
PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
livin
by mandiri
Strengthening Foundation, Balancing Business Risks
Menguatkan Fondasi, Menyeimbangkan Risiko Bisnis
Laporan Tahunan 2025 Annual Report

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Informations Presented in The Annual Report, Disclaimer, and Limitation of Liability



Penyusunan Laporan Tahunan PT PP (Persero) Tbk ("PTPP") tahun 2025 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana PTPP berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan tahunan PTPP juga mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan Laporan Keuangan teraudit. Penggunaan dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi PTPP dalam menghadirkan informasi dan data yang valid.

The 2025 Annual Report of PT PP (Persero) Tbk (PTPP) is prepared per references and standards applicable in Indonesia, in which PTPP is domiciled and developed its operational and business activities. The standard parameters and criteria refer to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies and the Circular Letter of OJK No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

PTPP's Annual Report also elaborates on several corporate documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Development Plan (RJPP), Audited Financial Statements, and Performance Evaluation Reports, which include the Company's Soundness Level. The use of these documents is expected to provide a strong argumentative basis for PTPP in presenting valid information and data.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PTPP tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PTPP", "Perusahaan", atau "Perseroan" yang mengacu pada PT PP (Persero) Tbk sebagai perusahaan konstruksi, EPC dan investasi berskala internasional. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT PP (Persero) Tbk.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan yaitu www.ptpp.co.id.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in implementing applicable laws and regulations. These statements have prospects of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report have been prepared based on assumptions regarding the latest conditions and projections of future situations related to the Company's business environment. PTPP cannot guarantee that these documents, whose validity has been confirmed, will bring definite results.

This Annual Report contains the words "PTPP," or "Company," which refer to PT PP (Persero) Tbk as an international construction, EPC, and investment company. In addition, the word "We" is used several times with the same function to consider the ease of mentioning PT PP (Persero) Tbk.

To reach a more diverse audience and refer to applicable regulations, this report is presented in two languages, i.e., Bahasa Indonesia and English. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.ptpp.co.id.

Tema Sampul
Cover Theme



Strengthening Foundation
Balancing Business Risks
Menguatkan Fondasi, Menyeimbangkan Risiko Bisnis

Sepanjang tahun 2025, dinamika industri konstruksi menghadirkan tekanan yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga bahan baku, tingginya biaya pendanaan, hingga penyesuaian prioritas belanja infrastruktur pemerintah. Kondisi ini menuntut PTPP untuk memperkuat fondasi bisnis sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perusahaan, penerapan manajemen risiko yang lebih terintegrasi, serta pengelolaan struktur keuangan yang pruden. Di saat yang sama, Perseroan mendorong transformasi operasional melalui efisiensi proses, pemanfaatan teknologi konstruksi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memastikan keunggulan kompetitif tetap terjaga di tengah ketidakpastian.

Dalam merespons risiko yang terus berkembang, PTPP menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan terukur dalam pengelolaan portofolio proyek, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi imbal hasil dan tingkat risiko. Diversifikasi lini usaha juga menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas kinerja dan mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu. Selain itu, integrasi prinsip keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), semakin diperkuat sebagai bagian dari mitigasi risiko jangka panjang. Melalui fondasi yang kokoh dan pengelolaan risiko yang disiplin, Perseroan berupaya memastikan pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Throughout 2025, the dynamics of the construction industry presented increasingly complex pressures, ranging from fluctuations in raw material prices and high financing costs to adjustments in the government's infrastructure spending priorities. These conditions required PTPP to strengthen its business foundation as a strategic step to maintain business resilience and sustainability. This effort was realized through the strengthening of corporate governance, the implementation of a more integrated risk management framework, and the prudent management of the Company's financial structure. At the same time, the Company continued to drive operational transformation through process efficiency, the utilization of construction technology, and the enhancement of human capital quality to ensure that its competitive advantage is maintained amid uncertainty.

In responding to evolving risks, PTPP has adopted a more selective and measured approach in managing its project portfolio, taking into consideration the balance between potential returns and risk exposure. Business line diversification has also become an important strategy to maintain performance stability and reduce dependence on specific segments. Furthermore, the integration of sustainability principles, including environmental, social, and governance (ESG) aspects, has been further strengthened as part of long-term risk mitigation efforts. Through a solid foundation and disciplined risk management practices, the Company strives to ensure growth that is not only oriented toward short-term performance but also toward the creation of sustainable value for all stakeholders.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity



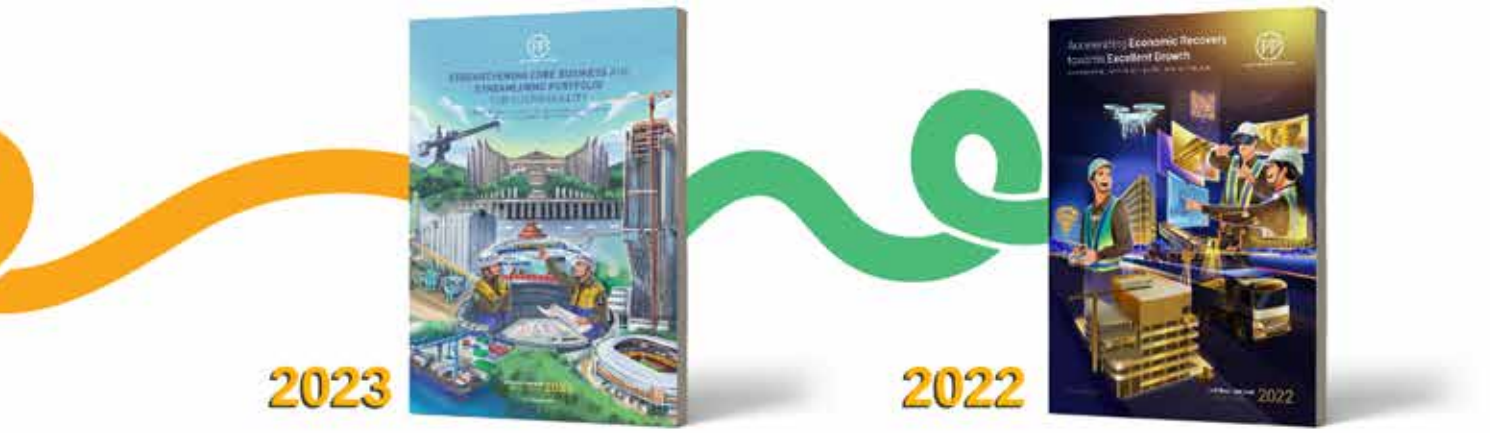
Keunggulan Inti untuk
Terus Bertumbuh Tangguh
Resilient Growth through
Core Excellence

Strategi penguatan operasi dan bisnis pada segmen konstruksi tetap bertumbuh dan terus melakukan *operational excellence*, yang diiringi dengan penyehatan keuangan dan penataan kembali portofolio investasi, menjadi fokus poin PTPP dalam mengembangkan operasi dan bisnisnya di tahun 2024. Terutama dengan segmen konstruksi sebagai bisnis inti, PTPP tentu memiliki kepentingan yang cukup besar untuk dapat terus menjaga kompetensinya di tengah persaingan industri, sekaligus memberikan nilai tambah bagi investor, pemegang saham, maupun pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Strategi penguatan bisnis inti ini juga akan terus diperkuat di masa mendatang, terutama melalui *Growth Operational Excellence, Managing Business Portfolio Risk*, dan penyehatan keuangan, sebagai turunan dari visi penting PTPP untuk berfokus pada bisnis konstruksi sebagai bisnis inti. Melalui langkah penting ini, PTPP akan berupaya menciptakan rantai nilai bisnis yang tangguh, yang pada akhirnya mampu menopang pertumbuhan yang tangguh di masa-masa mendatang.

The strategy of strengthening operations and business in the construction segment continues to grow and pursue operational excellence, accompanied by financial recovery and restructuring of the investment portfolio, which is the focus of PTPP in developing its operations and business in 2024. Especially with the construction segment as its core business, PTPP certainly has a significant interest in maintaining its competence amid industry competition while providing added value for investors, shareholders, and stakeholders.

This core business strengthening strategy will be further strengthened, especially through Growth Operational Excellence, Managing Business Portfolio Risk, and financial recovery, as a derivative of PTPP's important vision to focus on construction as its core business. Through this important step, PTPP will strive to create a resilient business value chain that will sustain robust growth in the future.



Memperkuat Kompetensi Inti dan Penyelarasan Bisnis untuk Mewujudkan Keberlanjutan

Strengthening Core Business and Streamlining Portfolio for Sustainability

Tantangan perekonomian global di tahun 2023 berimbas cukup besar terhadap iklim investasi Indonesia. Di sisi lain, perekonomian Indonesia yang relatif solid memberikan jaminan tentang berbagai dimensi dalam kehidupan sosial perekonomian masyarakat Indonesia. Tantangan juga muncul dari isu sektoral yang memiliki potensi risiko atas branding dan kinerja PTPP secara keseluruhan.

Di tengah kondisi tersebut, PTPP berupaya menjaga pertumbuhannya secara berkelanjutan. Tema "Memperkuat Kompetensi Inti dan Penyelarasan Bisnis untuk Mewujudkan Keberlanjutan" memberikan pernyataan kuat atas upaya yang dilakukan PTPP dalam menjawab berbagai kondisi yang ada dalam rangka meningkatkan nilai korporasinya. Penguatan kompetensi inti dilakukan melalui akselerasi produk dan layanan yang berfokus pada kompetensi inti PTPP di sektor konstruksi; yang diiringi dengan penyelarasan bisnis melalui perampingan portofolio aset yang dimiliki. Seluruh upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan, khususnya dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan sendiri, serta bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The challenges of the global economy in 2023 have significantly impacted Indonesia's investment climate. On the other hand, Indonesia's relatively solid economy provides guarantees regarding various dimensions of the social and economic life of Indonesian society. Challenges also arise from sectoral issues that have potential risks to the branding and overall performance of PTPP.

Amid these conditions, PTPP strives to maintain sustainable growth. The theme "Strengthening Core Competence and Business Alignment to Achieve Sustainability" provides a strong statement of PTPP's efforts to address various existing conditions in order to increase its corporate value. Strengthening core competencies is carried out through the acceleration of products and services that focus on PTPP's core competencies in the construction sector, which is accompanied by business alignment through the downsizing of the Company's asset portfolio. All these efforts are carried out in the context of maintaining sustainability, especially in the context of creating added value for the Company itself, as well as for shareholders and all stakeholders.

Akselerasi Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas

Accelerating Economic Recovery towards Excellent Growth

Tahun 2022 menjadi tahun penentuan bagi Indonesia. Agenda percepatan pemulihan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, baik dari sisi kesehatan masyarakat melalui vaksinasi massal maupun pemulihan perekonomian melalui serangkaian kebijakan, mampu memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh tangguh di tengah tekanan situasi ekonomi global.

Sebagai bagian dari BUMN karya, PTPP tentu berupaya menjadi bagian dari agenda besar pemulihan tersebut. Bergeliatnya industri konstruksi tentu menjadi highlight penting bagi PTPP untuk menjaga momentum pertumbuhannya. Tetap menjaga dan menciptakan peluang pasar yang potensial, penguatan kompetensi inti, menjaga kualitas layanan yang diberikan, serta inovasi yang terus dilakukan tiada henti, merupakan beberapa insiatif penting dalam upaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

The year 2022 is a decisive year for Indonesia. The agenda to accelerate recovery from the COVID-19 pandemic by the Indonesian Government, both in terms of public health through mass vaccination and economic recovery through a series of policies, can provide a strong foundation for the Indonesian economy to grow resiliently amid the pressures of the global economic situation.

As part of BUMN Karya, PTPP certainly strives to be part of the major recovery agenda. The resilience of the construction industry is certainly an important highlight for PTPP in maintaining its growth momentum. Maintaining and creating potential market opportunities, strengthening core competencies, maintaining the quality of services provided, and continuous innovation are some of the important initiatives to maintain sustainable growth.

Daftar Isi
Table of Contents

4 **Tema Sampul**
Cover Theme

6 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity

8 **Daftar Isi**
Table of Contents

15 **Kinerja 2025**
2025 Performance

01 Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

18 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Key Financial Highlights

27 **Ikhtisar Operasional**
Operational Highlights

30 **Ikhtisar Saham**
Share Highlight

36 **Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi**
Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds Highlights

38 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Awards and Certifications

50 **Kilas Peristiwa 2025**
2025 Event Highlight

02 Laporan Manajemen
Management Report

65 **Laporan Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners Report

77 **Laporan Direksi**
The Board of Directors Report

88 **Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025**
Responsibility for 2025 Annual Report

03 Profil Perusahaan
Company Profile

92 **Informasi Umum dan Identitas Perusahaan**
General Information and Company Identity

94 **Riwayat Singkat PTPP**
Brief History of PTPP

100 **Jejak Langkah**
Milestones

106 **Visi, Misi, Budaya, dan Nilai-Nilai Perusahaan**
Company Vision, Mission, Culture, and Company Values

114 **Makna Logo Perusahaan**
Meaning of Company Logo

116 **Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa**
Business Activities, Products and Services

134 **Wilayah Operasional**
Operational Area

136 **Keanggotaan Asosiasi**
Association Memberships

138 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

140 **Susunan dan Profil Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Composition and Profile

150 **Susunan dan Profil Direksi**
Board of Directors Composition and Profile

160 **Demografi Pegawai**
Employee Demographics

168 **Kronologis Pencatatan Saham**
Chronology of Share Listing

170 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholders Composition

180 **Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPP**
PTPP Group and Business Group Structure

182 **Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Other Securities Issuance and Listing

186 **Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV), dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)**
Purpose Vehicle (SPV) List of Subsidiaries and Associated Entities, Joint Venture (JV), and Special Purpose Vehicle (SPV)

210 **Lembaga dan Profesi Penunjang**
Supporting Institutions and Professionals

04 Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

216 **Tinjauan Perekonomian dan Industri**
Review of the Economy and Industry

218 **Kebijakan Strategis dan Penyelesaian Permasalahan Tahun 2025**
Strategic Policies and Problem Solving in 2025

221 **Tinjauan Operasi per Segmen Usaha**
Operations Review per Business Segment

256 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspect

258 **Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain**
Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

262 **Teknologi**
Technology

264 **Penelitian dan Pengembangan**
Research and Development

269 **Analisis Kinerja Keuangan**
Analysis of Financial Performance

286 **Kemampuan Membayar Utang**
Ability to Pay Debt

289 **Tingkat Kolektibilitas Piutang**
Receivables Collectability

290 **Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan**
Capital Structure, Management Policy on Capital Structure, and Basis of Policy Determination

293 **Investasi Barang Modal**
Capital Goods Investment

295 **Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan**
Impact of Price Changes Affecting the Company's Revenues and Financial Performance

295 **Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing**
Information on the Impact of Foreign Exchange Rate

295 **Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date

296 **Pencapaian Target Tahun 2025**
Target Achievement in 2025

298 **Tingkat Kesehatan Perusahaan**
Corporate Soundness Level

299 **Kebijakan Dividen dan Pembagiannya**
Dividend Policy and Its Distribution

300 **Perpajakan dan PNBP Lainnya: Kontribusi terhadap Negara**
Taxation and Non-Tax State Revenue: Contribution to the State

302 **Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**
The Use of Proceeds from Public Offering

302 **Laporan Penggunaan Tambahan PMN**
Report on the Use of Additional State Captial Injection (PMN)

303 **Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/ Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Transactions with Affiliated Parties, and Transactions with Conflicts of Interest

304 **Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi**
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

304 **Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan**
Changes in Laws and Regulations that Significantly Affect the Company

307 **Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan**
Changes in Accounting Policy and Their Impact on the Company

308 **Prospek Usaha Tahun 2026**
Business Prospect in 2026

310 **Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026**
Strategic Plans and the Company's Performance Projections in 2026

311 **Informasi Kelangsungan Usaha**
Information on Business Continuity

312 **Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang**
Business Roadmap: Long-Term Plans

05 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

316 **Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan**
Development of Good Corporate Governance Implementation in the Company

326 **Struktur, Proses/Mekanisme, serta Hasil dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PTPP**
Structure, Process/Mechanism, Results, and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance at PTPP

342 **Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)

366 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

398 **Komisaris Independen**
Independent Commissioner

401 **Direksi**
Board of Directors

481 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Supporting Organs of the Board of Commissioners

547 **Organ Pendukung Direksi**
Supporting Organs of the Board of Directors

628 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

643 **Manajemen Risiko Perusahaan**
Risk Management

669 **Perkara Penting**
Significant Cases

674 **Tata Kelola Teknologi Informasi**
Information Technology Governance

692 **Kode Etik**
Code of Conduct

706 **Kebijakan Anti Korupsi**
Anti-Corruption Policies

708 **Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi**
Gratification Management Policy

710 **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**
Procurement Policy

714 **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
State Official Wealth Report (LHKPN)

717 ***Whistleblowing System***



06 Rujukan Keberlanjutan
Sustainability Reference

738

07 Laporan Keuangan Konsolidasi
Consolidated Financial Statement

742

Penyelarasan Lini Bisnis Sektor Konstruksi

Alignment of Business Lines in The Construction Sector

Sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP mengoptimalkan bisnis intinya di sektor konstruksi melalui kelompok usaha yang bersinergi dalam pendekatan 2 (dua) lini bisnis, yaitu **KONSTRUKSI DAN EPC**, dan **INVESTASI** di sektor infrastruktur, energi, dan properti.

As one of the state-owned construction companies, PTPP optimizes its core business in the construction sector through a synergistic business group with a two-pronged approach, namely **CONSTRUCTION AND EPC**, and **INVESTMENT** in the infrastructure, energy, and property sectors.

Konstruksi Construction

Gedung
Building

- Perkantoran
  Office
- Apartemen
  Apartment
- Rumah Sakit
  Hospital
- Bandara
  Airport
- Universitas
  University
- *Mall*
- Stadion
  Stadium
- *Data Center*

Infrastruktur
Infrastructure

- Jalan Tol
  Toll Road
- Bendungan
  Dam
- Jembatan
  Bridge
- Landasan
  Runway
- Irigasi
  Irrigation
- Pelabuhan
  Port

Spesialis
Specialist

- Pracetak
  Precast
- Gedung
  Building
- Mekanikal
  Mechanical
- Kelistrikan
  Electrical
- *Earth Moving*
- *Bored Pile*
- *Bekisting*
  Formwork
- Jasa Tambang
  Mining Service
- *Erection*

Pabrik
Plant

- *Readymix*
- Pabrik Pracetak
  Precast Plant
- Campuran Aspal
  Asphalt Mixing
- Pabrik
  Plant

Peralatan
Equipment

- Alat Berat
  Heavy Equipment
- *Shoring*
- Aluminium *Bekisting*
  Aluminium Formwork

EPC

- Pembangkit Listrik
  Power Plant
- Minyak & Gas
  Oil & Gas
- *Smelter*
- Industri
  Industrial
- Kilang Minyak
  Tank Storage



Investasi Investment

Hingga akhir tahun 2025, PTPP telah mengembangkan usahanya melalui jaringan kelompok usaha mencakup:

By the end of 2025, PTPP has expanded its business through a network of business groups comprising:

Properti
Property

- Realti
  Realty
- Komersial
  Commercial
- *Hospitality*
- Pengelolaan Gedung
  Building Management

Energi
Energy

- Pembangkit Listrik
  Power Plant
- Minyak dan Gas
  Oil and Gas

Infrastruktur
Infrastructure

- Jalan Tol
  Toll Road
- Pelabuhan
  Port
- SPAM
  Drinking Water Supply System
- Infrastruktur Limbah
  Waste Infrastructure
- Infrastruktur Telekomunikasi
  Telcom Infrastructure

9
Entitas Anak Langsung
Direct Subsidiaries

23
Entitas Anak Tidak Langsung
Indirect Subsidiaries

23
Entitas Asosiasi
Associate Entities

2
Kerja Sama Operasi (KSO)
Joint Ventures



Infrastruktur menjadi urat nadi pembangunan, akselerasi ekonomi, dan membantu konektivitas manusia dan barang antar daerah.

Infrastructure is the lifeblood of development, economic acceleration, and helps connect people and goods between regions.

Infrastruktur untuk Negeri

Infrastructure for The Country





Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi
Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi Toll Road

PTPP terlibat dalam pembangunan infrastruktur Proyek Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi Paket 3 dengan panjang rute mencapai **25,6 km** dan nilai kontrak porsi PTPP sebesar **Rp1,99 triliun**. Pada proyek ini, PTPP menerapkan sistem Modular Bekisting Barrier Modified, dan menjadi pelopor penggunaan material timbunan Batu Gunung pada badan jalan tol, terobosan yang belum pernah diterapkan di proyek tol lainnya di Indonesia.
Jalan tol ini akan mempercepat waktu tempuh antarwilayah, menurunkan ongkos logistik, serta memperkuat integrasi kawasan industri dan destinasi wisata unggulan Jawa Timur.

PTPP is involved in the infrastructure construction of Package 3 of the Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi Toll Road Project, which spans **25.6 km** and has a contract value of **Rp1.99 trillion** for PTPP's portion. For this project, PTPP is implementing the Modular Barrier Modified Formwork system and pioneering the use of mountain rock fill material for the highway embankment—a breakthrough not previously applied in other toll road projects in Indonesia.
This toll road will reduce travel time between regions, lower logistics costs, and strengthen the integration of industrial zones and premier tourist destinations in East Java.

ESG & Konstruksi Berkelanjutan

ESG & Sustainable Construction

Tahun 2024 menjadi tahun *baseline* bagi PTPP untuk dapat merumuskan pendekatan keberlanjutan yang sistematis dan terukur. Melalui *Roadmap* ESG periode 2024-2028, PTPP berupaya untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih terukur. Keseriusan PTPP ini diharapkan mampu mendorong citra Perusahaan dan mampu memberikan nilai tambah baik bagi pemegang saham, investor, maupun bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan.

The year 2024 is the baseline year for PTPP to be able to formulate a systematic and measurable approach to sustainability. Through the 2024-2028 ESG Roadmap ratified in 2024, along with the formation of the ESG Committee, PTPP strives to realize sustainable construction with a more measurable approach. PTPP's seriousness is expected to boost the Company's image and provide added value for shareholders, investors, and stakeholders as a whole.



***Sustainability* Leadership**

2028

Menjadi Perusahaan yang memimpin dalam keberlanjutan, menjadi inspirasi dan menjadi standar acuan oleh perusahaan lain pada industri yang sama
Becoming a company that leads in sustainability, inspires, and becomes a reference standard for other companies in the same industry

***Tranformational* Information**

2027

Memperkuat praktik keberlanjutan Perusahaan dengan keterbaruan inovasi
Strengthening the Company's sustainability practices with innovative newness

***Continuous* Improvement**

2026

Berfokus pada perbaikan dan peningkatan praktik keberlanjutan yang ada pada Perusahaan
Focusing on improving and enhancing the Company's existing sustainability practices

***Enhancing* Practice**

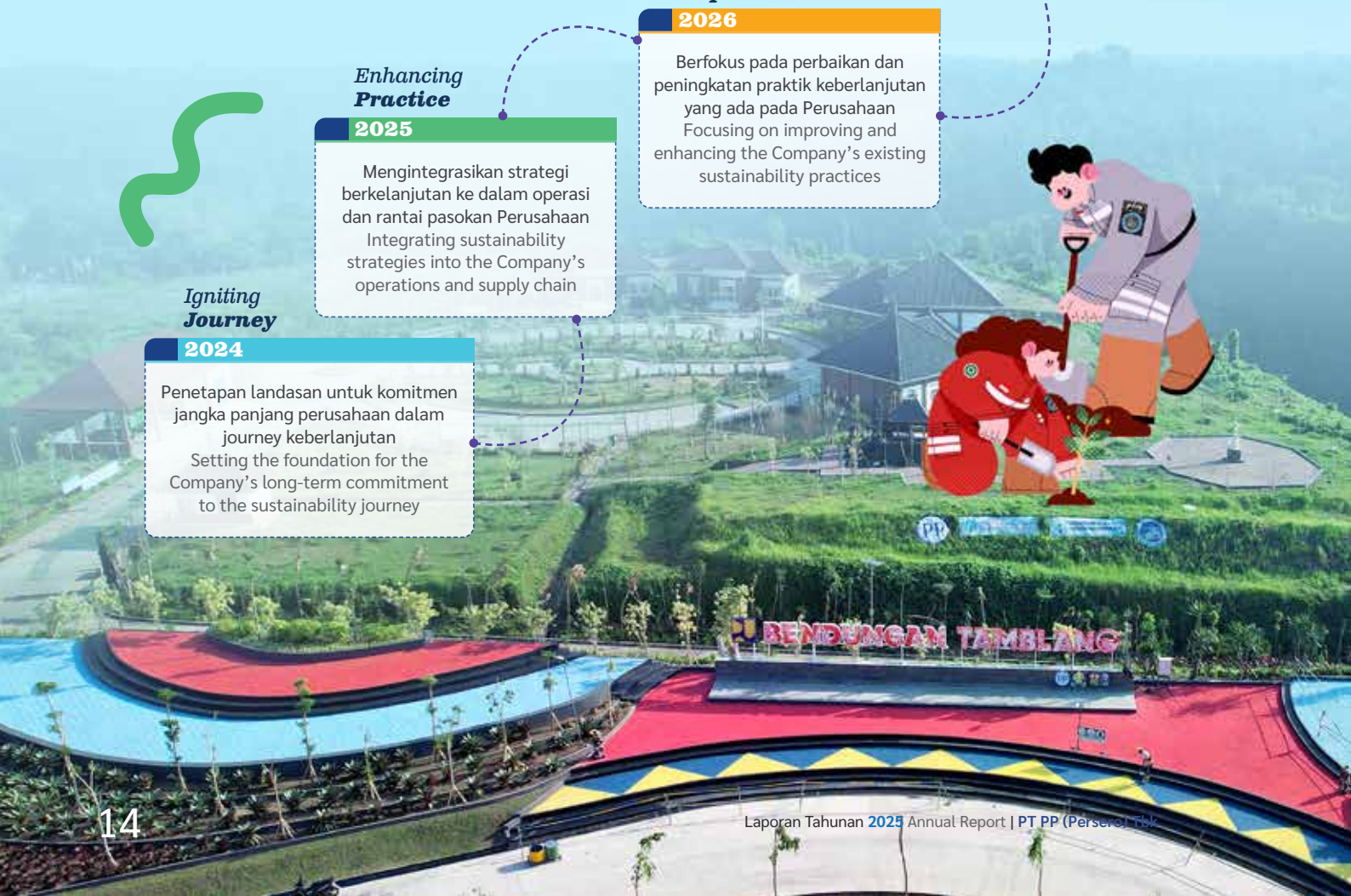
2025

Mengintegrasikan strategi berkelanjutan ke dalam operasi dan rantai pasokan Perusahaan
Integrating sustainability strategies into the Company's operations and supply chain

***Igniting* Journey**

2024

Penetapan landasan untuk komitmen jangka panjang perusahaan dalam journey keberlanjutan
Setting the foundation for the Company's long-term commitment to the sustainability journey

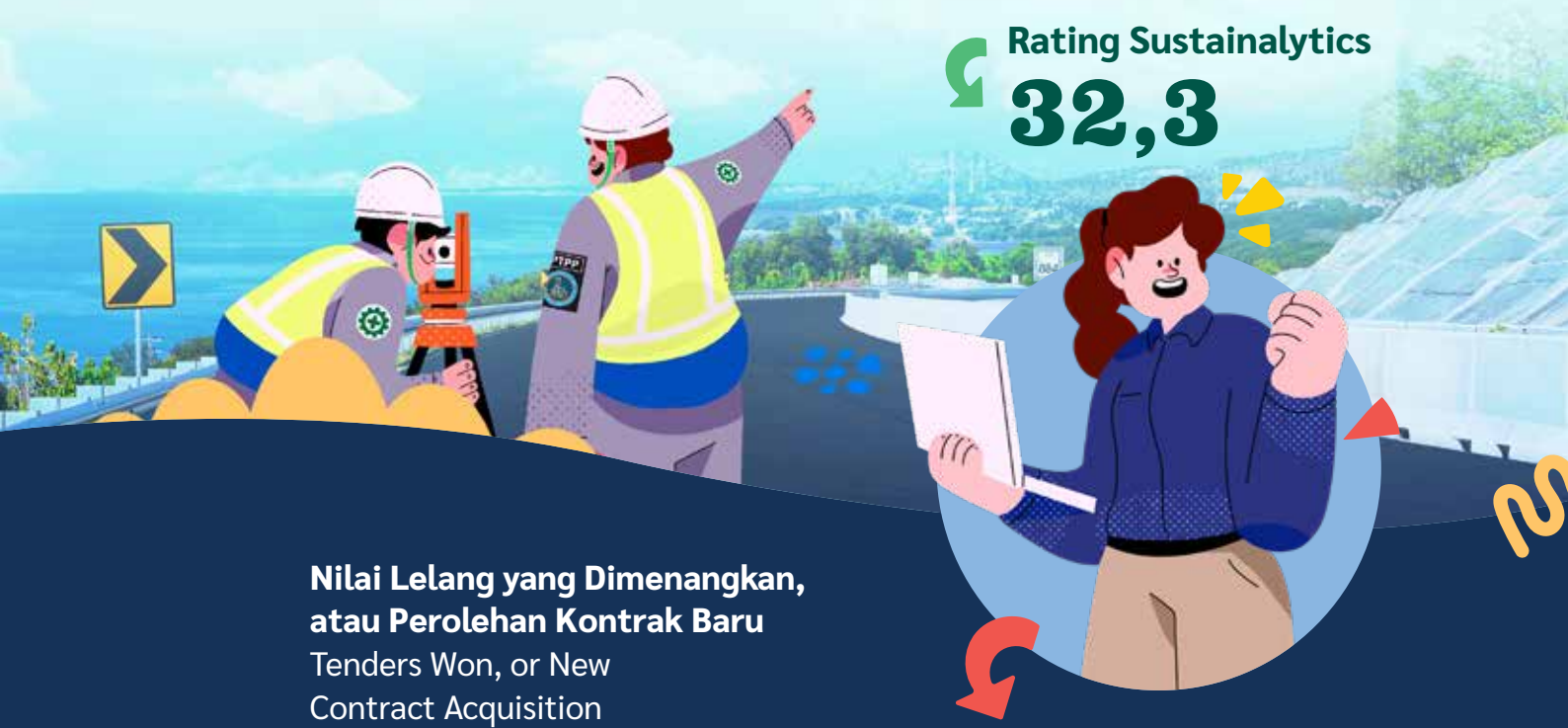


Kinerja 2025

2025 Performance

Dalam mengelola dinamika dan tantangan yang ada, PTPP **berupaya mengoptimalkan** seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk mengupayakan pendekatan strategi keuangan yang fundamental.

In managing the current dynamics and challenges, PTPP strives to optimize all of its resources, including pursuing a fundamental financial strategy.



Rating Sustainalytics

32,3

Nilai Lelang yang Dimenangkan, atau Perolehan Kontrak Baru
Tenders Won, or New Contract Acquisition

24,95 triliun trillion



Jumlah Pendapatan Usaha
Total Operating Revenue

16,27 triliun trillion

Jumlah Aset
Total Assets

42,98 triliun trillion

Laba Kotor
Gross Profit

1,45 triliun trillion



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights


PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
BALI INTERNATIONAL HOSPITAL

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights



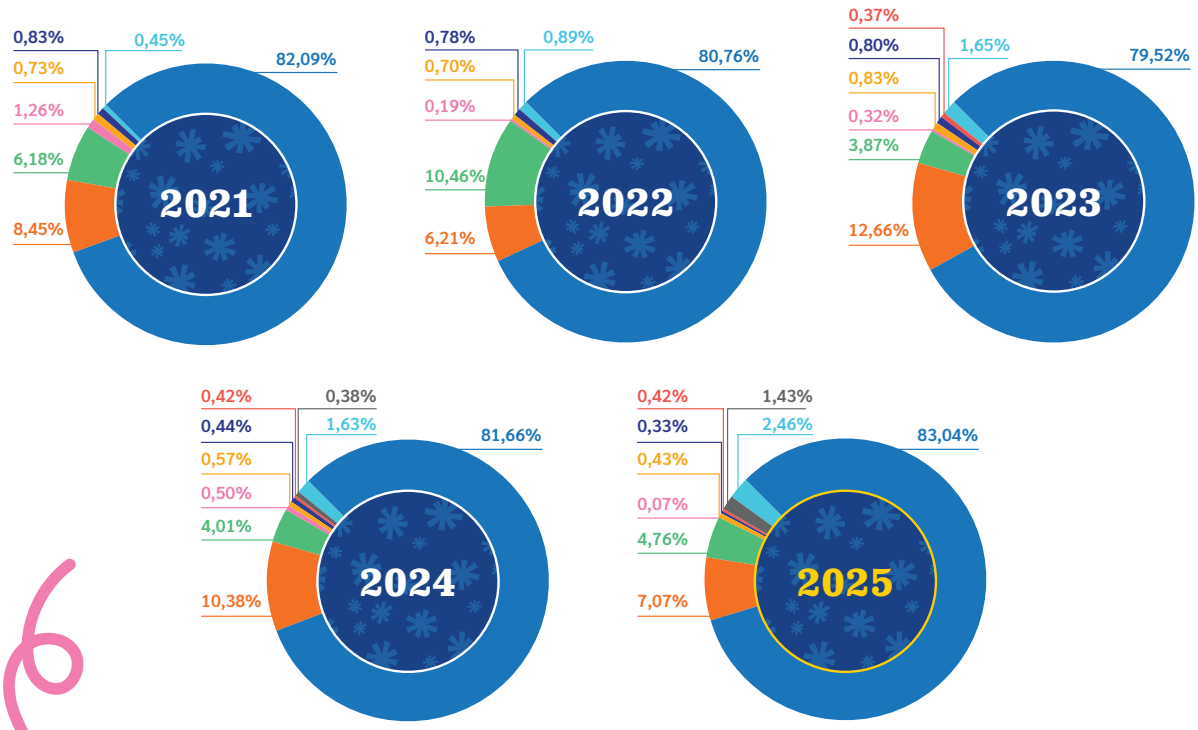
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)	2025	2024**	2023*	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Pendapatan Usaha Revenue							
Jasa Konstruksi Construction Services	13.511.687	16.179.414	14.682.803	15.281.903	13.761.573	(16,49)	(0,37)
EPC (*Engineering, Procurement, Construction*)	1.150.228	2.055.762	2.336.900	1.175.913	1.417.152	(44,05)	(4,09)
Properti dan Realti Property and Realty	774.501	795.185	711.677	1.978.689	1.036.847	(2,60)	(5,67)
Pracetak Precast	10.652	98.593	59.240	36.890	211.169	(89,20)	(44,97)
Peralatan Equipment	69.494	112.855	153.791	132.442	122.580	(38,42)	(10,73)
Energi Energy	53.236	87.866	147.107	147.606	138.699	(39,41)	(17,43)
Pendapatan Tol Toll Revenue	68.071	83.762	68.305	-	-	(18,73)	(0,11)
Pendapatan Keuangan atas Konstruksi Aset Keuangan Konsesi Financial Income from Construction of Concession Financial Assets	399.960	322.778	304.392	168.394	75.917	23,91	39,42
Jasa Pertambangan Mining Services	232.953	75.928	-	-	-	206,81	75,16
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	16.270.782	19.812.143	18.464.215	18.921.839	16.763.937	(17,87)	(0,60)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(14.811.841)	(17.179.098)	(16.081.950)	(16.245.774)	(14.589.354)	(13,78)	0,30
Laba Kotor Gross Profit	1.458.941	2.633.045	2.382.265	2.676.065	2.174.582	(44,59)	(7,67)
Beban Usaha Operating Expenses	(902.564)	(823.493)	(741.585)	(698.928)	(625.239)	9,60	7,62
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(7.350.616)	(356.262)	(582.903)	(299.207)	(289.334)	1.963,26	90,98
Laba atas Divestasi Entitas Anak dan Investasi Lainnya Gain on Divestment of Subsidiaries and Other Investments	-	-	-	-	497.606	-	-
Beban Keuangan Finance Cost	(2.135.037)	(1.891.555)	(1.206.629)	(1.255.014)	(1.343.189)	12,87	9,71

(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)	2025	2024**	2023*	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	(151.493)	(570.016)	676.856	379.504	586.601	(73,42)	(176,28)
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associates	54.560	48.573	72.520	34.582	(104.550)	12,33	(187,80)
Pendapatan Lainnya Other Income	3.172.624	1.103.047	444.436	274.415	481.394	187,62	45,81
Keuntungan Pembelian Diskon Gain on Bargain Purchase	-	-	-	-	51.793	-	(100,00)
Beban Lainnya Other Expenses	(1.455.801)	(1.226.668)	(401.610)	(246.833)	(461.827)	18,68	25,81
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(417.623)	(583.355)	(494.147)	(484.366)	(590.807)	(28,41)	(6,70)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	(7.727.009)	(1.666.684)	149.204	380.218	377.030	363,62	(282,95)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih Income Tax Expenses - Net	(272.164)	(118.278)	(22.115)	(14.476)	(15.608)	130,11	77,13
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	(7.999.173)	(1.784.962)	127.090	365.742	361.422	348,14	(285,78)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(84.622)	(17.914)	85.159	32.307	40.826	372,38	(215,69)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	(8.083.795)	(1.802.877)	212.249	398.048	402.248	348,38	(282,23)
Laba yang Dapat Diatribusikan kepada: Income Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	(6.075.259)	(1.522.623)	481.379	271.699	265.977	299,00	(286,96)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(1.923.914)	(262.399)	(354.290)	94.043	95.445	633,20	(282,34)
Jumlah Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	(6.155.663)	(1.574.727)	568.489	297.157	299.544	290,90	(283,05)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(1.928.132)	(228.149)	(356.240)	100.891	102.704	745,12	(279,77)
Laba per Saham Dasar (Rupiah penuh) Earnings per Share (in full Rupiah)	(982)	(246)	78	44	43	299,19	(286,95)

* Direklasifikasi | Reclassified
** Disajikan Kembali | Restated

Perkembangan Komposisi Pendapatan Usaha
Growth of Operating Revenue Composition

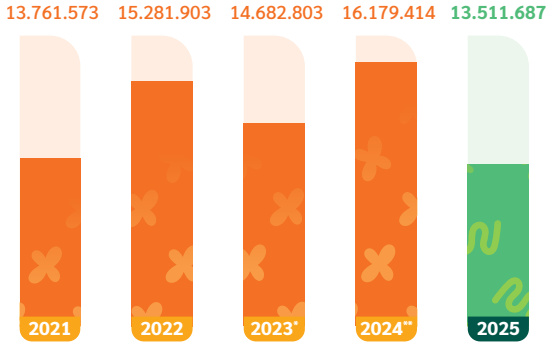


- Jasa Konstruksi — Construction Services
- EPC (*Engineering, Procurement, Construction*)
- Properti dan Realti — Property and Realty
- Pracetak — Precast
- Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi — Financial income from construction of concession financial assets
- Peralatan — Equipment
- Energi — Energy
- Pendapatan Tol — Toll Revenue
- Jasa Pertambangan — Mining Services

* Direklasifikasi | Reclassified
** Disajikan Kembali | Restated

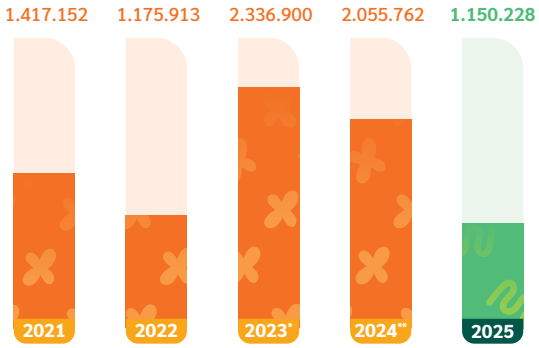
Pendapatan Jasa Konstruksi
Construction Services Revenues

Rp-juta
Rp-million



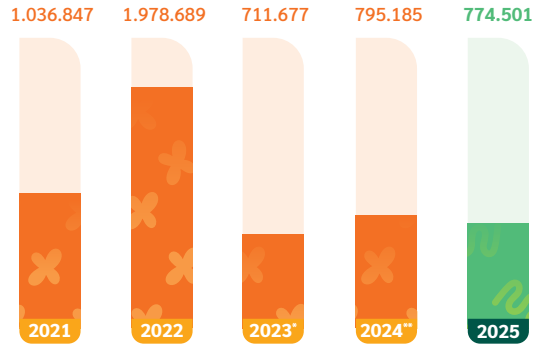
Pendapatan EPC
EPC Revenues

Rp-juta
Rp-million



Pendapatan Properti dan Realti
Property and Realty Revenues

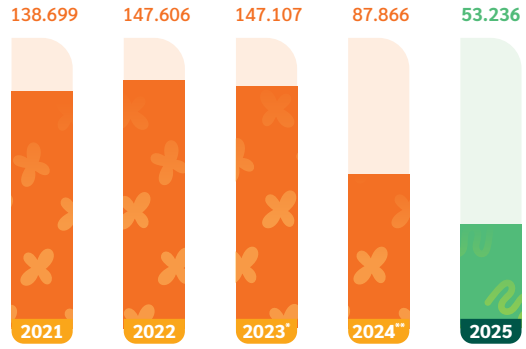
Rp-juta
Rp-million





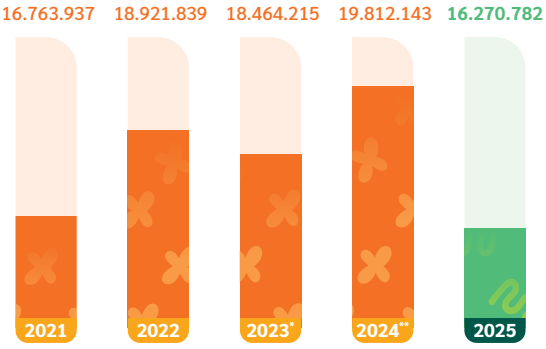
Pendapatan Energi
Energy Revenues

Rp-juta
Rp-million



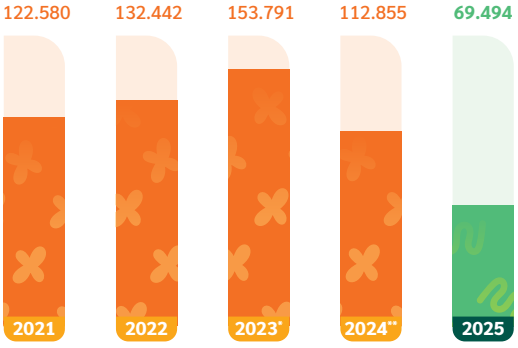
Jumlah Pendapatan Usaha
Total Revenues

Rp-juta
Rp-million



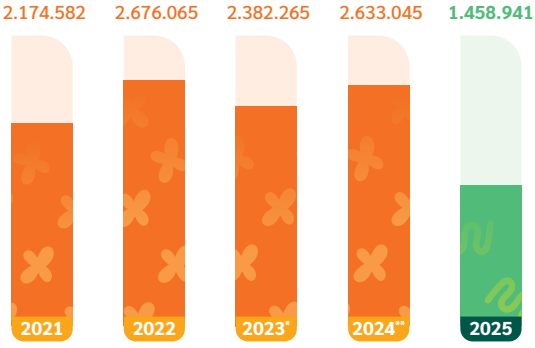
Pendapatan Peralatan
Equipment Revenues

Rp-juta
Rp-million



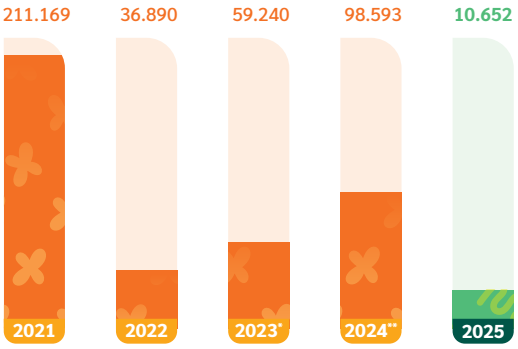
Laba Kotor
Gross Profit

Rp-juta
Rp-million



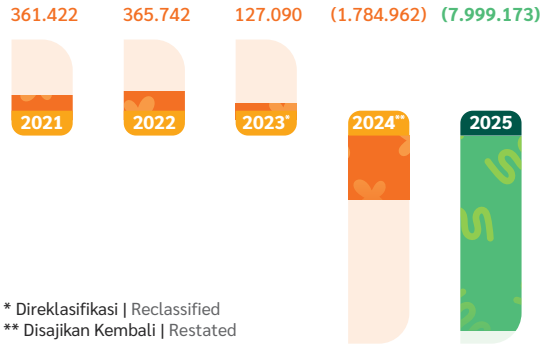
Pendapatan Pracetak
Precast Revenues

Rp-juta
Rp-million



Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp-juta
Rp-million



* Direklasifikasi | Reclassified
** Disajikan Kembali | Restated

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

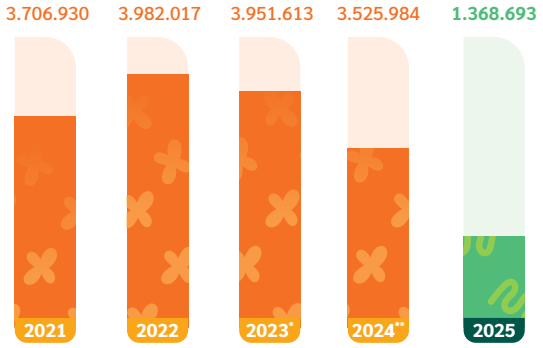
(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)	2025	2024**	2023*	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Persediaan Inventory	7.500.676	9.521.481	10.378.009	10.174.420	10.914.691	(21,22)	(7,23)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	13.031.936	19.829.588	20.360.322	22.217.303	22.817.077	(34,28)	(10,60)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	20.532.612	29.351.069	30.738.341	32.391.723	33.731.768	(30,04)	(9,45)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Tanah yang akan Dikembangkan Land to be developed	1.368.693	3.525.984	3.951.613	3.982.017	3.706.930	(61,18)	(18,07)
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	840.014	960.535	2.626.976	1.031.547	1.135.474	(12,55)	(5,85)
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Investments	1.604.931	1.631.594	1.680.443	1.649.145	1.449.995	(1,63)	2,05
Aset Tetap Fixed Assets	2.139.820	2.796.637	3.859.215	5.037.210	5.592.762	(23,49)	(17,48)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	16.498.383	16.266.391	15.035.275	13.520.741	9.956.914	1,43	10,63
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	22.451.841	25.181.141	25.786.701	25.220.660	21.842.075	(10,84)	0,55
Jumlah Aset Total Assets	42.984.453	54.532.210	56.525.042	57.612.383	55.573.844	(21,18)	(5,01)
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	19.447.400	21.503.552	26.992.212	26.838.316	30.145.581	(9,56)	(8,39)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	19.231.636	20.639.447	14.389.439	15.953.015	11.098.113	(6,82)	11,62
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	38.679.036	42.142.999	41.381.651	42.791.331	41.243.694	(8,22)	(1,28)
Ekuitas Equity							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	3.149.552	9.305.216	11.722.271	11.153.783	10.853.255	(66,15)	(21,92)
Kepentingan Non-pengendali Non-Controlling Interests	1.155.864	3.083.996	3.421.120	3.667.270	3.476.895	(62,52)	(19,77)

(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)	2025	2024**	2023*	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.305.416	12.389.212	15.143.391	14.821.052	14.330.150	(65,25)	(21,38)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	42.984.452	54.532.211	56.525.042	57.612.383	55.573.844	(21,18)	(5,01)
Informasi Penting Lainnya Other Important Information							
Belanja Modal Capital Expenditure	1.549.413	2.516.742	866.569	3.088.878	3.189.420	(38,44)	(13,45)
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	1.085.212	7.847.517	3.746.129	5.553.407	3.586.187	(86,17)	(21,26)

*Direklasifikasi | Reclassified ** Disajikan Kembali | Restated

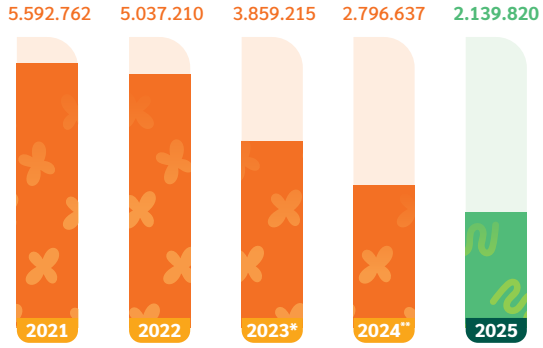
Tanah yang Akan Dikembangkan
Land to be Developed

Rp-juta
Rp-million



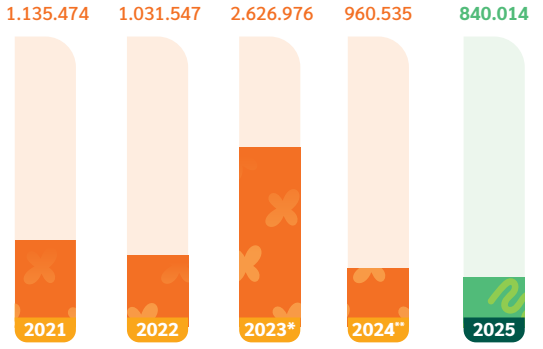
Aset Tetap
Fixed Assets

Rp-juta
Rp-million



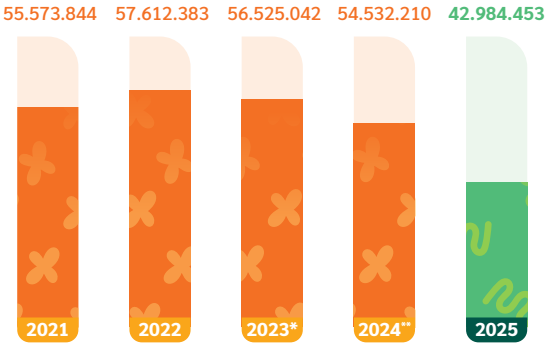
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Investment in Associates and Joint Ventures

Rp-juta
Rp-million



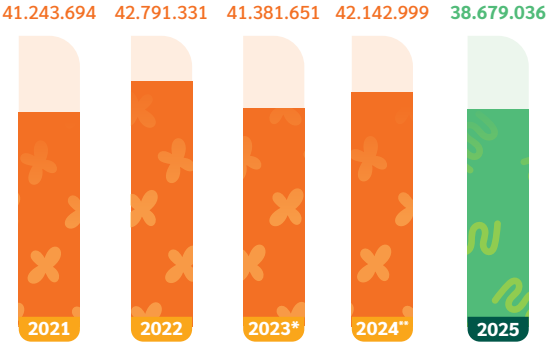
Jumlah Aset
Total Assets

Rp-juta
Rp-million



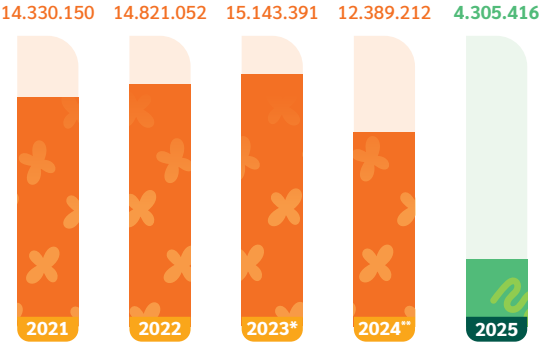
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Rp-juta
Rp-million



Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp-juta
Rp-million



* Direklasifikasi | Reclassified ** Disajikan Kembali | Restated

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)	2025	2024**	2023*	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	923.946	3.709.897	436.304	268.445	468.698	(75,10)	14,54
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	1.110.595	(3.123.580)	(753.276)	(2.271.032)	(2.078.368)	(135,56)	(188,22)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(3.326.972)	(605.360)	(941.747)	854.390	835.722	(45,99)	(182,89)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(1.292.431)	(19.042)	(1.258.715)	(1.148.196)	(773.947)	6.687,26	10,80
Perubahan Pengaruh Selisih Kurs Effect of Changes in Foreign Currencies	4.531	29.955	(17.127)	(8.745)	1.775	(84,87)	20,61
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	4.181.505	4.170.592	5.446.434	6.603.376	7.375.548	0,26	(10,73)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	2.893.604	4.181.505	4.170.592	5.446.434	6.603.376	(30,80)	(15,21)

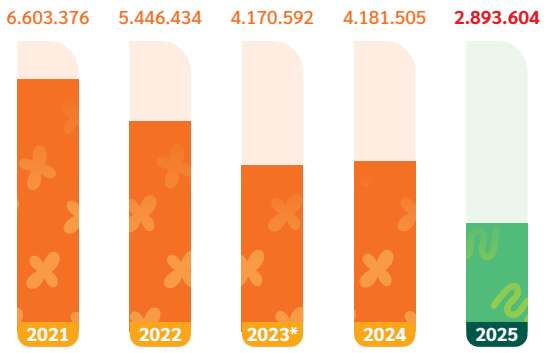
*Direklasifikasi | Reclassified

** Disajikan Kembali | Restated



Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Rp-juta
Rp-million

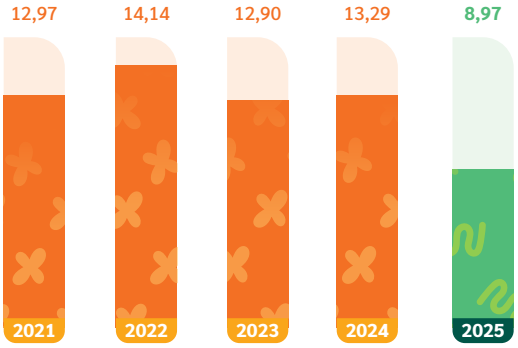


Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya
Financial Ratios and Other Important Ratios

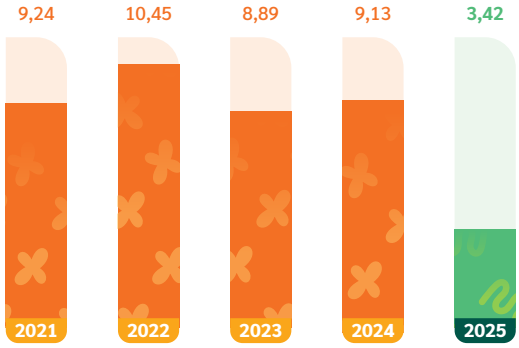
Perihal Subject	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan) 2024-2025 2024-2025 Increase/ (Decrease) (%)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios							
Rasio Kas Cash Ratio	%	**15,88**	20,84	15,45	20,29	21,90	(4,96)
Rasio Lancar Current Ratio	%	**105,58**	136,49	113,88	120,69	111,90	(30,91)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios							
Marjin Laba Kotor (GPM) Gross Profit Margin (GPM)	%	**8,97**	13,29	12,90	14,14	12,97	(4,32)
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Margin (OPM)	%	**3,42**	9,13	8,89	10,45	9,24	(5,71)
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Margin (NPM)	%	**(49,16)**	(9,01)	0,69	1,93	2,16	(40,15)
Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Return on Asset (ROA)	%	**(18,61)**	(3,27)	0,22	0,63	0,65	(15,34)
Tingkat Pengembalian Modal (ROE) Return on Equity (ROE)	%	**(185,79)**	(14,41)	0,84	2,47	2,52	(171,38)
Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	**2,66**	3,96	5,33	5,42	4,83	(1,30)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios							
Rasio Total Kewajiban terhadap Aset (DAR) Debt to Asset Ratio	%	**89,98**	77,28	73,21	74,27	74,21	12,70
Rasio Utang terhadap Modal (DER) Debt to Equity Ratio (DER)	%	**898,38**	340,16	273,27	288,72	287,81	558,22
Rasio Total Utang Berbunga terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio Interest Bearing	%	**422,10**	177,16	130,15	139,11	137,14	244,94
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Own Capital to Total Assets Ratio	%	**10,02**	22,72	26,79	25,73	25,79	(12,70)
EBITDA terhadap Beban Bunga EBITDA to Interest Coverage Ratio	%	**53,38**	113,45	246,05	247,33	197,07	(60,07)
Rasio Aktivitas Activity Ratios							
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	hari day	**185**	202	236	229	273	(8,41)
Periode Penagihan Collectability Ratio	hari day	**70**	107	123	111	117	(34,57)
Perputaran Aset Assets Turnover	kali times	**37,85**	36,33	43,55	32,84	30,17	4,18



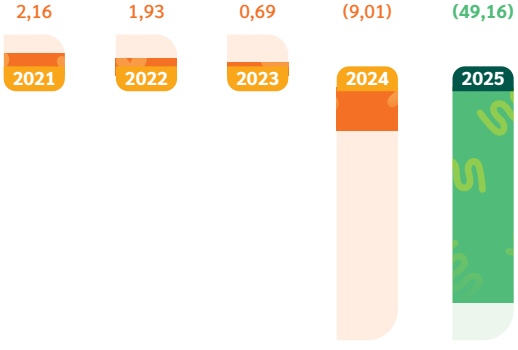
Marjin Laba Kotor (GPM)
Gross Profit Margin (GPM) %



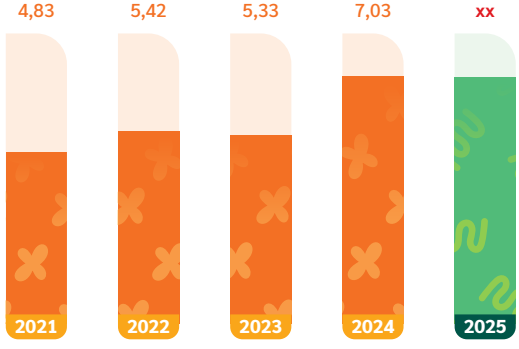
Marjin Laba Operasi (OPM)
Operating Profit Margin (OPM) %



Marjin Laba Bersih (NPM)
Net Profit Margin (NPM) %



Tingkat Pengembalian Investasi (ROI)
Return on Investment (ROI) %

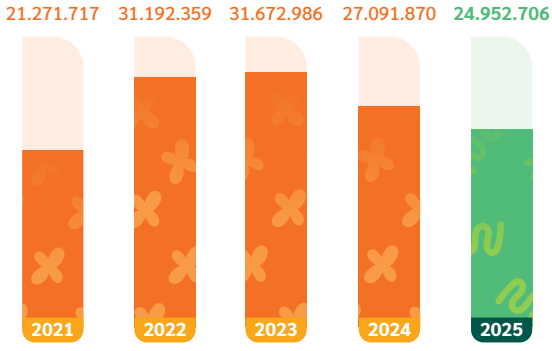


Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

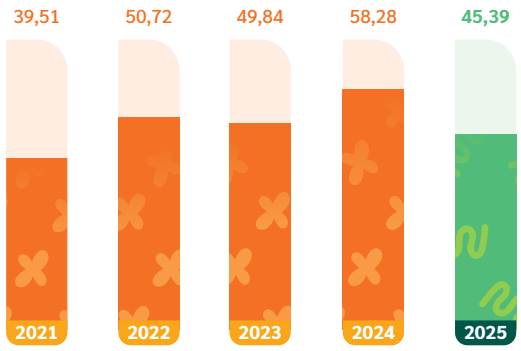
Kinerja Operasional
Operational Performance

Perihal Subject	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Nilai Lelang yang Diikuti dan Dimenangkan Tenders Participated in and Won								
Nilai Lelang yang Diikuti Tenders Participated in	Rp-juta Rp-million	54.976.016	46.489.254	63.547.685	61.499.702	53.838.992	18,26	0,42
Nilai Lelang yang Dimenangkan, atau Perolehan Kontrak Baru Tenders Won, or New Contract Acquisition	Rp-juta Rp-million	24.952.706	27.091.872	31.672.986	31.192.359	21.271.717	(7,90)	3,24
Komposisi Lelang yang Dimenangkan Composition of Tenders Won	%	45,39	58,28	49,84	50,72	39,51	(22,12)	2,81

Nilai Lelang yang Dimenangkan, atau Perolehan Nilai Kontrak Baru
Tenders Won, or New New Contract Acquisition
Rp-juta
Rp-million



Komposisi Lelang yang Dimenangkan
Composition of Tenders Won
%





Kinerja Organisasi
Organizational Performance

	2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Pegawai (orang) Total Employees (personnel)	1.737	1.766	1.780	1.765	1.833
Penilaian Penerapan GCG* GCG Implementation Assessment*	N/a	N/a	N/a	93,287	93,230
Tingkat Kesehatan Perusahaan** Company Soundness Level**	BBB+	Single A; *Stable Outlook*	Single A; *Stable Outlook*	75,75 "Sehat A" "Sound A"	71,25 "Sehat A" "Sound A"
Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*** ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment***	101,69	96,73	97,28	95,64	89,78
Penilaian Manajemen Risiko**** Risk Management Assessment****	2,9 "Fase praktik yang Baik" "Good Practice Phase"	2,9 "Fase praktik yang Baik" "Good Practice Phase"	4,59 "*Optimized*"	4,59 "*Optimized*"	4,53 "*Optimized*"

*) Sehubungan dengan adanya Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Republik Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2023 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan belum ada Surat Keputusan pengganti terkait Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka PTPP tidak melakukan *Assessment* Penerapan GCG untuk Tahun Buku 2023.

**) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Merujuk pada Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 76 dalam Peraturan BUMN tersebut, disebutkan bahwa Tingkat Kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (Rating) yang didasarkan pada Pemeringkatan. Atas dasar landasan tersebut, PTPP menunjuk perusahaan pemeringkat, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau "Pefindo" untuk melakukan penilaian atas pemeringkatan.

***) Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2025 menggunakan Kriteria ACGS 2023 yang terdapat tambahan kriteria Sustainability dan Resilience.

****) Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Penilaian Manajemen Risiko tahun 2024 disusun dengan merujuk pada SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

*) In light of the copy of the Decree from the Secretary of the SOE Ministry of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023, which revokes the previous Decree No. SK-16/S.MBU/2023 on Assessment Indicators/Parameters and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs, and the absence of a replacement Decree for the assessment and evaluation of Good Corporate Governance implementation in State-Owned Enterprises, PTPP did not conduct a GCG Implementation Assessment for the Fiscal Years 2023 and 2024.

**) The Company Soundness Level 2023 and 2024 is formulated based on the Regulation of the SOE Minister of the Republic of Indonesia No. PER-2/ MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Referring to Chapter IV, Section One, Article 76 of the SOE Regulation, it is mentioned that the SOE Soundness Level is assessed using a Rating based on Rankings. Based on this foundation, the Company appoints a rating agency, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), to conduct the ranking assessment.

***) The 2025 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment uses the 2023 ACGS Criteria, which includes additional Sustainability and Resilience criteria.

****) Per the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the 2024 Risk Management Assessment was prepared with reference to SK-8/DKU.MBU/12/2023 on the Technical Guide for Assessing the Risk Maturity Index within State-Owned Enterprises.



Ikhtisar Saham
Share Highlight

PTPP telah mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak **9 Februari 2010.**

PTPP has listed and traded its shares on Indonesia Stock Exchange since February 9, 2010.

Kode Saham
Ticker Code
PTPP



Informasi Pergerakan Saham PTPP
Information on PTPP Share Movement

Informasi Saham PTPP Periode 2021-2025
PTPP Share Information in 2021-2025

	2025	2024	2023	2022	2021
Harga Pembukaan (Rp/per saham) Opening Price (Rp/share)	336	428	720	1.020	1.885
Harga Tertinggi (Rp/per saham) Highest Price (Rp/share)	500	560	835	1.090	2.230
Harga Terendah (Rp/per saham) Lowest Price (Rp/share)	216	278	418	705	820
Harga Penutupan (Rp/per saham) Closing Price (Rp/share)	384	336	428	715	990
Nilai Buku Per Saham (Rp) Book Value per Share (Rp)	696	2.452	2.480	2.391	2.317
Price to Book Value (%)	0,21	0,20	0,29	0,40	0,57
Price to Earning Ratio (%)	16,15	11,11	15,15	16,25	26,58
Jumlah Saham Beredar (saham) Total Outstanding Shares (shares)	6.185.341.454				
Saham *Buyback* (saham) Buyback Shares (shares)	14.555.900				
Jumlah Saham Keseluruhan (saham) Total Shares (shares)	6.199.897.354				
Bursa Efek Perdagangan Saham Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Pergerakan Saham PTPP Periode 2021-2025

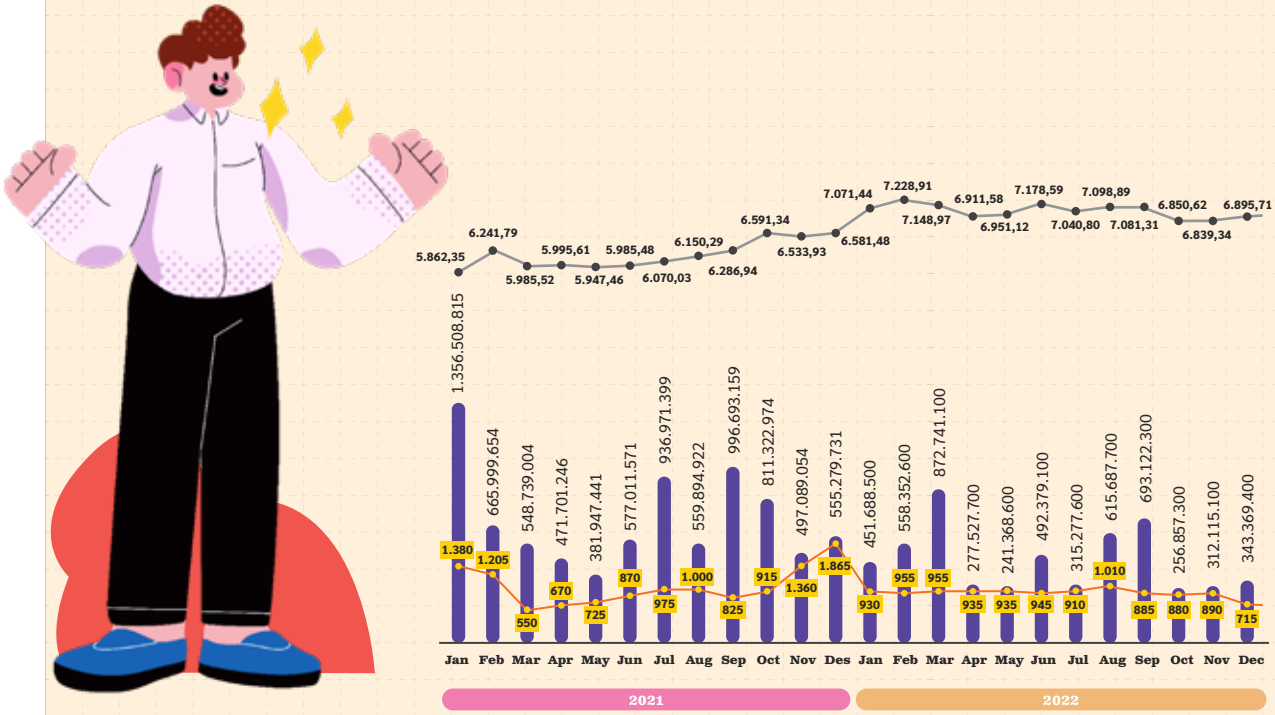
PTPP Share Exchange in 2021-2025

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (saham) Outstanding Shares (Shares)	Harga Saham Share Price				Volume Perdagangan (saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
		Pembukaan (Rp/saham) Opening (Rp/share)	Tertinggi (Rp/saham) Highest (Rp/share)	Terendah (Rp/saham) Lowest (Rp/share)	Penutupan (Rp/saham) Closing (Rp/share)		
2025							
Januari January	3.023.689.940	336	372	322	332	254.843.800	2.053.533.362.728
Februari February	3.023.689.940	332	332	230	230	315.537.400	1.422.628.534.420
Maret March	3.023.689.940	234	342	216	304	462.064.700	1.880.343.802.016
April April	3.023.689.940	304	442	252	408	1.129.903.600	2.523.619.313.232
Mei May	3.023.689.940	412	484	384	454	1.168.232.300	2.808.145.020.116
Juni June	3.023.689.940	454	500	386	438	1.052.306.900	2.709.179.556.852
Juli July	3.023.689.940	440	448	382	386	587.912.400	2.387.541.801.244
Agustus August	3.023.689.940	386	426	372	382	699.561.200	2.362.800.435.428
September September	3.023.689.940	438	438	332	400	723.250.400	2.474.136.581.600
Oktober October	3.023.689.940	416	416	358	382	420.531.100	2.362.800.435.428
November November	3.023.689.940	382	386	356	356	175.159.300	2.201.981.557.624
Desember December	3.023.689.940	366	442	348	348	823.458.300	2.152.498.825.992
2024							
Januari January	6.185.341.454	428	458	448	412	299.296.900	2.554.357.709.848
Februari February	6.185.341.454	414	560	452	496	1.085.770.500	3.075.149.087.584
Maret March	6.185.341.454	498	555	462	482	890.101.400	2.988.350.524.628
April April	6.185.341.454	482	462	410	420	386.431.800	2.603.956.888.680
Mei May	6.185.341.454	420	400	340	340	405.183.000	2.107.965.100.360
Juni June	6.185.341.454	340	352	278	290	360.510.700	1.797.970.232.660
Juli July	6.185.341.454	280	416	302	376	2.194.943.900	2.331.161.405.104
Agustus August	6.185.341.454	378	476	362	454	2.615.934.600	2.814.753.398.716

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (saham) Outstanding Shares (Shares)	Harga Saham Share Price				Volume Perdagangan (saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
		Pembukaan (Rp/saham) Opening (Rp/share)	Tertinggi (Rp/saham) Highest (Rp/share)	Terendah (Rp/saham) Lowest (Rp/share)	Penutupan (Rp/saham) Closing (Rp/share)		
September September	6.185.341.454	454	482	434	438	1.860.593.900	2.715.555.041.052
Oktober October	6.185.341.454	438	474	438	446	960.896.000	2.765.154.219.884
November November	6.185.341.454	446	446	390	390	333.534.100	2.417.959.968.060
Desember December	6.185.341.454	388	402	334	336	178.166.600	2.083.165.510.944
2023							
Januari January	6.185.341.454	720	745	600	695	276.902.700	4.308.928.676.355
Februari February	6.185.341.454	695	740	630	649	171.867.500	4.023.733.397.057
Maret March	6.185.341.454	640	655	555	580	153.672.100	3.595.940.478.109
April April	6.185.341.454	580	660	530	650	146.612.200	4.029.933.294.433
Mei May	6.185.341.454	645	660	498	510	199.186.200	3.161.947.661.786
Juni June	6.185.341.454	515	635	505	605	311.819.000	3.750.937.912.511
Juli July	6.185.341.454	605	660	580	605	212.112.400	3.750.937.912.511
Agustus August	6.185.341.454	605	615	530	580	178.317.700	3.595.940.478.109
September September	6.185.341.454	580	835	550	755	774.821.000	4.680.922.518.918
Oktober October	6.185.341.454	760	790	560	565	398.343.600	3.502.942.017.469
November November	6.185.341.454	580	640	545	555	648.920.400	3.440.943.043.708
Desember December	6.185.341.454	565	580	418	428	685.289.900	2.653.556.076.950
2022							
Januari January	6.185.341.454	1.020	1.065	890	930	451.688.500	5.765.904.559.727
Februari February	6.185.341.454	960	1.045	935	955	558.352.600	5.920.901.795.582
Maret March	6.185.341.454	950	1.090	885	995	872.741.100	6.168.897.913.383
April April	6.185.341.454	980	980	910	935	277.527.700	5.796.904.187.042
Mei May	6.185.341.454	895	940	875	935	241.368.600	5.796.904.187.042

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (saham) Outstanding Shares (Shares)	Harga Saham Share Price				Volume Perdagangan (saham) Trading Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
		Pembukaan (Rp/saham) Opening (Rp/share)	Tertinggi (Rp/saham) Highest (Rp/share)	Terendah (Rp/saham) Lowest (Rp/share)	Penutupan (Rp/saham) Closing (Rp/share)		
Juni June	6.185.341.454	920	990	900	945	492.379.100	5.858.902.991.312
Juli July	6.185.341.454	930	930	885	910	315.277.600	5.641.906.500.827
Agustus August	6.185.341.454	910	1.030	905	1.010	615.687.700	6.261.896.344.968
September September	6.185.341.454	1.000	1.060	885	885	693.122.300	5.486.909.264.971
Oktober October	6.185.341.454	895	915	845	880	256.857.300	5.455.909.637.656
November November	6.185.341.454	890	935	870	890	312.115.100	5.517.908.441.926
Desember December	6.185.341.454	890	895	705	715	343.369.400	4.432.926.439.858
2021							
Januari January	6.185.341.454	1.885	2.230	1.635	1.635	1.356.508.815	10.136.832.173.790
Februari February	6.185.341.454	1.795	1.840	1.615	1.615	665.999.654	10.012.834.226.710
Maret March	6.185.341.454	1.705	1.705	1.370	1.370	548.739.004	8.493.859.374.980
April April	6.185.341.454	1.375	1.375	1.215	1.220	471.701.246	7.563.874.771.880
Mei May	6.185.341.454	1.205	1.290	1.080	1.115	381.947.441	6.912.885.549.710
Juni June	6.185.341.454	1.165	1.165	880	915	577.011.571	5.672.906.078.910
Juli July	6.185.341.454	920	940	835	840	936.971.399	5.207.913.777.360
Agustus August	6.185.341.454	865	905	820	905	559.894.922	5.610.907.105.370
September September	6.185.341.454	910	1.090	885	1.090	996.693.159	6.757.888.115.860
Oktober October	6.185.341.454	1.150	1.340	1.150	1.205	811.322.974	7.470.876.311.570
November November	6.185.341.454	1.200	1.300	1.130	1.130	497.089.054	7.005.884.010.020
Desember December	6.185.341.454	1.090	1.140	975	990	555.279.731	6.137.898.380.460

Grafik Harga Penutupan dan Volume Perdagangan PTPP Periode 2021-2025
Graph of PTPP Closing Price and Trading Volume in 2021-2025



Informasi tentang Aksi Korporasi Saham

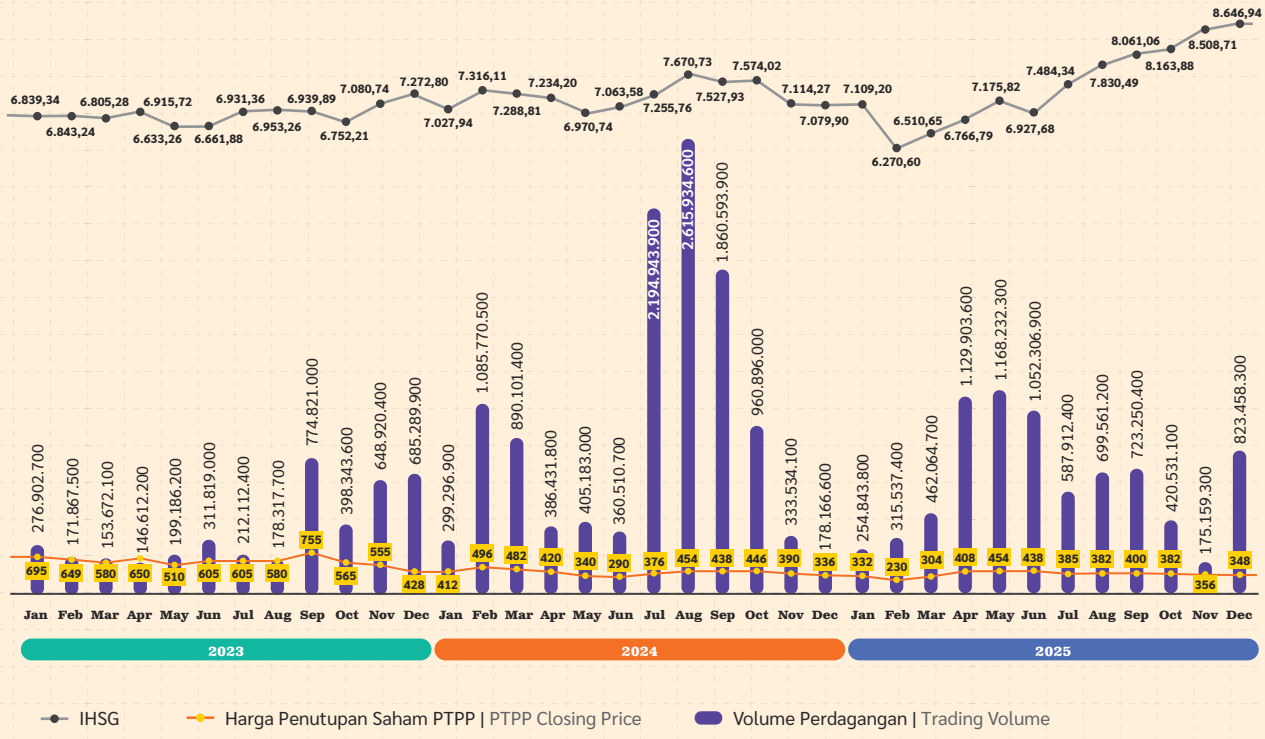
Tidak terdapat aksi korporasi saham terkait aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham yang dilakukan PTPP dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun buku 2024 dan 2025.

Tentang dasar kebijakan dan historikal pembagian dividen saham tunai yang dilakukan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada bab Analisis Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Information on Corporate Stock Action

PTPP has not carried out any stock corporate actions related to stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, or changes in the nominal value of shares in recent years, especially in fiscal years 2024 and 2025.

The policy basis and history of cash dividend distribution for the last five years are presented in the Management Discussion Analysis on Company Performance chapter of this Annual Report.



Informasi Penghentian Sementara dan/ atau Sanksi Perdagangan Saham PTPP serta Penghapusan Pencatatan Saham

Sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010, saham PTPP tidak pernah menerima sanksi yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan saham, khususnya penghentian perdagangan saham sementara (*suspension*). Perusahaan juga tidak melakukan penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Information on Temporary Suspension and/ or Sanctions for PTPP Share Trading and Delisting of Shares

Since being listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010, PTPP shares have never been subject to sanctions affecting stock trading, particularly temporary trading suspensions. The Company also did not delist its shares.



Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds Highlights

Daftar Obligasi dan Surat Berharga PTPP yang Diperdagangkan per 31 Desember 2025
List of PTPP Bonds and Securities Traded per December 31, 2025

Nama Obligasi Bond Name	Denominasi Denomination	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jumlah Pokok Principal Amount (Rp)	Tenor
Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 PTPP Shelf-Registered Bond IV Phase I 2024	Rupiah	1 Juli 2024 July 1, 2024	434.620.000.000	3 Tahun 3 Years
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023 PTPP Shelf-Registered Bond III Phase III 2023	Rupiah	11 April 2023 April 11, 2023	503.725.000.000	3 Tahun 3 Years
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase III 2023	Rupiah	11 April 2023 April 11, 2023	126.754.000.000	3 Tahun 3 Years
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Series B	Rupiah	22 April 2022 April 22, 2022	404.500.000.000	5 Tahun 5 Years
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Series B	Rupiah	22 April 2022 April 22, 2022	305.000.000.000	5 Tahun 5 Years
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase I 2021 Series B	Rupiah	2 Juli 2021 July 2, 2021	100.000.000.000	5 Tahun 5 Years
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B PTPP Shelf-Registered Bond III Phase I 2021 Series B	Rupiah	2 Juli 2021 July 2, 2021	650.000.000.000	5 Tahun 5 Years



Suku Bunga Tahunan Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Bursa Perdagangan Trading Exchange	Status
10,25%	28 Juni 2027 June 28, 2027	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
8,80%	11 April 2026 April 11, 2026	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 8,80% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 8.80%	11 April 2026 April 11, 2026	• A (Sy); Pefindo (2025) • A (Sy); Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
7,75%	22 April 2027 April 22, 2027	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 7,75% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 7.75%	22 April 2027 April 22, 2027	• A (Sy); Pefindo (2025) • A (Sy); Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 9,10% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 9.10%	2 Juli 2026 July 2, 2026	• A (Sy); Pefindo (2025) • A (Sy); Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
9,10%	2 Juli 2026 July 2, 2026	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid

Pelunasan Obligasi dan Surat Berharga pada Periode 2024 s.d 2025
Repayment of Bonds and Securities in the 2024-2025 Period

Nama Obligasi Bond Name	Denominasi Denomination	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jumlah Pokok Principal Amount (Rp)	Tenor
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Series A	Rupiah	22 April 2022 April 22, 2022	140.000.000.000	3 Tahun 3 Years
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Series A	Rupiah	22 April 2022 April 22, 2022	60.000.000.000	3 Tahun 3 Years
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B PTPP Shelf-Registered Bond II Phase II 2019 Series B	Rupiah	27 November 2019 November 27, 2019	250.000.000.000	5 Tahun 5 Years
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A PTPP Shelf-Registered Bond III Phase I 2021 Series A	Rupiah	2 Juli 2021 July 2, 2021	850.000.000.000	3 Tahun 3 Years
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase I 2021 Series A	Rupiah	2 Juli 2021 July 2, 2021	400.000.000.000	3 Tahun 3 Years

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan Tahun 2025 Berskala Internasional/Regional
International/Regional-Scale Awards in 2025



Fortune Indonesia Summit 2025	
Deskripsi Penghargaan: Description:	Change The World Awards 2024 untuk Reserve Vending Machine - ESG Program Change The World Awards 2024 for Reserve Vending Machine - ESG Program
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Fortune
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Fortune Indonesia Summit 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	6 Februari 2025 February 6, 2025



The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025	
Deskripsi Penghargaan: Description:	*Public Company with Green Achievement in Emission Reduction and Diamond Achievement in Emission Transparency*
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Investortrust
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	29 April 2025 April 29, 2025

Suku Bunga Tahunan Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Bursa Perdagangan Trading Exchange	Status
6,50%	22 April 2025 April 22, 2025	• A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Lunas Repaid
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 6,50% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 6.50%	22 April 2025 April 22, 2025	• A (Sy); Pefindo (2024) • A (Sy); Pefindo (2023)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Lunas Repaid
8,50%	27 November 2024 November 27, 2024	• A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Lunas Repaid
8,50%	2 Juli 2024 July 2, 2024	• A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Lunas Repaid
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 8,50% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 8.50%	2 Juli 2024 July 2, 2024	• A (Sy); Pefindo (2024) • A (Sy); Pefindo (2023)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Lunas Repaid





The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	*Water Deal of the Year*
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	The Asset 25
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	2 Juli 2025 July 2, 2025



Autodesk Design & Make Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	*Outstanding Recognition*, ASEAN atas pengimplementasian *Building Information Modeling* (BIM) Outstanding Recognition, ASEAN for the implementation of Building Information Modelling (BIM)
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	Autodesk
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Autodesk Design & Make Awards 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	17 September 2025 September 17, 2025

Penghargaan Tahun 2025 Berskala Nasional
National-Scale Awards in 2025



Beyond BIM Seminar

Deskripsi Penghargaan: Description:	Juara 3 Beyond BIM Competition 2025 Third Place in the Beyond BIM Competition 2025
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Adhi Karya
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Beyond BIM Seminar
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	19 Februari 2025 February 19, 2025



6th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards

Deskripsi Penghargaan: Description:	Indonesia Most Popular CEO Awards 2025
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	The Iconomics
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	6th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	19 Maret 2025 March 19, 2025



14th Anugerah BUMN 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Inovasi Bisnis Perusahaan Terbaik Best Corporate Business Innovation
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	BUMN Track
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	14th Anugerah BUMN 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	20 Maret 2025 March 20, 2025



14th Anugerah BUMN 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	The Best CEO Leading Change & Innovation - Novel Arsyad - Direktur Utama PTPP The Best CEO Leading Change & Innovation - Novel Arsyad - PTPP President Director
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	BUMN Track
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	14th Anugerah BUMN 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	20 Maret 2025 March 20, 2025



5D BIM Competition Award 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	Juara 2 dan *Most Unique Project* untuk Proyek Istana Negara IKN 2nd Place and Most Unique Project for the IKN Project State Palace
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	Glodon Indonesia
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	5D BIM Competition Award 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	9 Mei 2025 May 9, 2025



5D BIM Competition Award 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	Juara 3 untuk Proyek BNI PIK 2 3rd Place for the BNI PIK 2 Project
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	Glodon Indonesia
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	5D BIM Competition Award 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	9 Mei 2025 May 9, 2025



TJSL & CSR Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	Kategori *Gold* (Bintang 4) - Pilar Sosial: Program Air Bersih dan *Reservoir* Gold Category (4 Stars) – Social Pillar: Clean Water and Reservoir Program
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	BUMN Track
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Penghargaan TJSL & CSR Awards 2025 Tahun Ke-5 TJSL & CSR Awards 2025, 5th Year
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	25 Juni 2025 June 25, 2025



TJSL & CSR Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	Kategori *Gold* (Bintang 4) - Pilar Lingkungan: PPERMATA (Program Pelestarian Alam untuk Tatanan Asri) Gold Category (4 Stars) – Environmental Pillar: PPERMATA (Nature Conservation Program for a Beautiful Environment)
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	BUMN Track
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Penghargaan TJSL & CSR Awards 2025 Tahun Ke-5 TJSL & CSR Awards 2025, 5th Year
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	25 Juni 2025 June 25, 2025



Penghargaan MURI
MURI Awards

Deskripsi Penghargaan: Description:	Gedung Pertama yang Menggunakan Kaca Photovoltaic BIPV - Proyek BI IKN First Building to Use Photovoltaic Glass BIPV – BI IKN Project
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	MURI
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Penghargaan MURI MURI Awards
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	26 Agustus 2025 August 26, 2025



BAZNAS Award 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Pengumpulan Zakat Karyawan Terbaik dengan Kategori Mitra Terbaik dalam Ajang BAZNAS Award Tahun 2025 Best Employee Zakat Collection with the Best Partner Category at the 2025 BAZNAS Award Event
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	BAZNAZ RI
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	BAZNAS Award 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	28 Agustus 2025 August 28, 2025



Indonesia's Biggest Company 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	100 Indonesia's Biggest Company 2025
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Fortune
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Indonesia's Biggest Company 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	12 September 2025 September 12, 2025



PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 - Jumlah Seller Terbanyak Peringkat I (Tipe B)

Deskripsi Penghargaan: Description:	BUMN dengan Jumlah Seller Terbanyak Peringkat I (Tipe B) The SOE with the Highest Number of Sellers, Rank I (Type B)
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	KBUMN SOE Ministry
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	6 Oktober 2025 October 6, 2025



PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 - Jumlah Pengampu Terbanyak Peringkat III (Tipe B)

Deskripsi Penghargaan: Description:	BUMN dengan Jumlah Pengampu Terbanyak Peringkat III (Tipe B) The SOE with the Highest Number of Sponsors, Rank III (Type B)
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	KBUMN SOE Ministry
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	6 Oktober 2025 October 6, 2025



PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 - Seller Terbanyak Peringkat I (Tipe B)

Deskripsi Penghargaan: Description:	*Buyer Group* dengan Jumlah *Seller* Terbanyak Peringkat I (Tipe B) - Divisi Operasi Infrastruktur 1 Buyer Group with the Highest Number of Sellers, Rank I (Type B) – Infrastructure Operations Division 1
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	KBUMN SOE Ministry
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	6 Oktober 2025 October 6, 2025



PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 - Jumlah Pengampu Terbanyak Peringkat I (Tipe B) - Divisi Operasi Infrastruktur 1

Deskripsi Penghargaan: Description:	*Buyer Group* dengan Jumlah Pengampu Terbanyak Peringkat I (Tipe B) - Divisi Operasi Infrastruktur 1 Buyer Group with the Highest Number of Sponsors, Rank I (Type B) - Infrastructure Operations Division 1
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	KBUMN SOE Ministry
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	6 Oktober 2025 October 6, 2025



Anugrah Inovasi Indonesia 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Apresiasi Sektor Infrastruktur Kategori *Sustainability* dengan Inovasi Optimalisasi *Knowledge Management* Melalui Smart Learn AI Infrastructure Sector Recognition in the Sustainability Category for Innovation in Knowledge Management Optimization through Smart Learn AI
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	IDX
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Anugrah Inovasi Indonesia 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	10 Oktober 2025 October 10, 2025



Anugrah Inovasi Indonesia 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Anugerah Utama Sektor Infrastruktur GreenV PPLatform Keberlanjutan Untuk Masa Depan PTPP Main Award for the Infrastructure Sector: GreenV PPLatform Sustainability for the Future of PTPP
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	IDX
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Anugrah Inovasi Indonesia 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	10 Oktober 2025 October 10, 2025



Vendor Day Patra Jasa 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Vendor Terbaik dalam Implementasi Full Siklus CSMS Kategori Risiko Tinggi Tahun 2024 Best Vendor in Full Cycle CSMS Implementation, High Risk Category in 2024
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	PT Patra Jasa
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Vendor Day Patra Jasa 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	15 Oktober 2025 October 15, 2025



Penghargaan MURI
MURI Awards

Deskripsi Penghargaan: Description:	Pembangunan Masjid dengan Kubah Terbesar di Indonesia (Proyek Masjid Raya Baitul Khairaat di Palu, Sulawesi Tengah) Mosque Construction with the Largest Dome in Indonesia (Baitul Khairaat Grand Mosque Project in Palu, Central Sulawesi)
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	MURI
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Penghargaan MURI
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	15 Oktober 2025 October 15, 2025



Penghargaan MURI
MURI Awards

Deskripsi Penghargaan: Description:	Pembangunan Masjid dengan Jam Terbesar di Indonesia (Proyek Masjid Raya Baitul Khairaat di Palu, Sulawesi Tengah) Mosque Construction with the Largest Clock in Indonesia (Baitul Khairaat Grand Mosque Project in Palu, Central Sulawesi)
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	MURI
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Penghargaan MURI
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	15 Oktober 2025 October 15, 2025



Indonesia Kita Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	*Outstanding National Contractor in Advancing The Asta Cita Vision*
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	Garuda TV
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Indonesia Kita Awards 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	10 November 2025 November 10, 2025



Indonesia ESG Leadership Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	*Management BB - Evolving Practitioner in ESG Transparency*
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	BGK Foundation
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Indonesia ESG Leadership Awards 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	12 November 2025 November 12, 2025



Apresiasi ESG 2025
ESG Appreciation 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	*Outstanding Performance - Social Innovation*
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	Investor Daily
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Apresiasi ESG 2025 ESG Appreciation 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	20 November 2025 November 20, 2025



Anugerah Penggerak Nusantara 2025

Deskripsi Penghargaan: **Description:**	Anugerah Penggerak Transformasi Digital Digital Transformation Driver Award
Pemberi Penghargaan: **Awarding Institution:**	I News
Acara/Kegiatan: **Event/Activity:**	Anugerah Penggerak Nusantara 2025
Tanggal Diberikan: **Awarding Date:**	20 November 2025 November 20, 2025



detikcom Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Perusahaan Pelopor Inovasi Konstruksi Berkelanjutan Indonesia Indonesia's Pioneer in Sustainable Construction Innovation
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	detik.com
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	detikcom Awards 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	25 November 2025 November 25, 2025



Sutami Award 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Mitra Kerja BUMN yang Selama 80 Tahun Berkontribusi bagi Kementerian PU SOE Partner with 80-Year Contribution to the Public Works Ministry
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Kementerian PU
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Sutami Award 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	1 Desember 2025 December 1, 2025



Contractor & Vendor Day 2025 PT Pertamina Gas

Deskripsi Penghargaan: Description:	*The Best Large Business Entity Vendor*
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Pertamina Gas
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Contractor & Vendor Day 2025 PT Pertamina Gas
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	2 Desember 2025 December 2, 2025



Greenship Awards GBCI 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	*Best Green Contractor of The Year*
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	GBCI
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Greenship Awards GBCI 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	5 Desember 2025 December 5, 2025



CNBC Indonesia Awards 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	National Infrastructure Impact Awards
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	CNBC
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	CNBC Indonesia Awards 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	11 Desember 2025 December 11, 2025



Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025
Sustainable Business Integrity Index (INSTAR) 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	*Committed Company*
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Tempo
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	12 Desember 2025 December 12, 2025



ICCS Summit 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Juara 3 - *Community Involvement & Development* (CID) Pendidikan 3rd Place – Community Involvement & Development (CID) Education
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	BP BUMN
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	ICCS Summit 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	15 Desember 2025 December 15, 2025



Keterbukaan Informasi Publik 2025
Public Information Disclosure 2025

Deskripsi Penghargaan: Description:	Predikat Informatif Informative Predicate
Pemberi Penghargaan: Awarding Institution:	Komisi Informasi Pusat
Acara/Kegiatan: Event/Activity:	Anugerah Keterbukaan Informasi Republik Indonesia 2025
Tanggal Diberikan: Awarding Date:	15 Desember 2025 December 15, 2025

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025
Valid Certifications in 2025



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Certification Agency:	Kementerian Ketenagakerjaan Manpower Ministry
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: Certification Issuance Date:	6 Oktober 2025 October 6, 2025
Masa Berlaku Hingga: Validity Expiration:	6 Oktober 2028 October 6, 2028



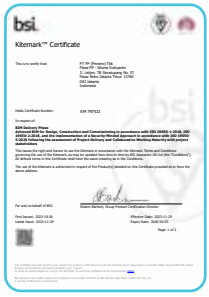
ISO 27001:2022 tentang Security Management System
ISO 27001:2022 on Security Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Certification Agency:	bsi. KAN
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: Certification Issuance Date:	13 Oktober 2023 October 13, 2023
Masa Berlaku Hingga: Validity Expiration:	12 Oktober 2026 October 12, 2026



ISO 37001:2016 tentang Anti Bribery Management Systems
ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Certification Agency:	KAN
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: Certification Issuance Date:	16 Oktober 2023 October 16, 2023
Masa Berlaku Hingga: Validity Expiration:	23 Oktober 2026 October 23, 2026



ISO 19650 tentang BIM Delivery Phase 1,2 & 5
ISO 19650 on BIM Delivery Phase 1,2 & 5

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Certification Agency:	bsi
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: Certification Issuance Date:	29 November 2023 November 29, 2023
Masa Berlaku Hingga: Validity Expiration:	25 Oktober 2026 October 25, 2026



ISO 21502:2020 tentang Guidance on Project management
ISO 21502:2020 on Guidance on Project management

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: Certification Agency:	dgicert
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: Certification Issuance Date:	28 Oktober 2024 October 28, 2024
Masa Berlaku Hingga: Validity Expiration:	1 November 2027 November 1, 2027


Certificate of Approval
PT PP (Persero) Tbk

ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sistem Manajemen Terintegrasi)
ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management System (Integrated Management System)

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: **Certification Agency:**	LRQA
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: **Certification Issuance Date:**	23 Juni 2025 June 23, 2025
Masa Berlaku Hingga: **Validity Expiration:**	22 Juni 2028 June 22, 2028


Certificate of Approval
PT PP (Persero) Tbk

ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (Sistem Manajemen Terintegrasi)
ISO 9001:2015 on Quality Management System (Integrated Management System)

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: **Certification Agency:**	LRQA
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: **Certification Issuance Date:**	23 Juni 2025 June 23, 2025
Masa Berlaku Hingga: **Validity Expiration:**	22 Juni 2028 June 22, 2028


Certificate of Approval
PT PP (Persero) Tbk

ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (Sistem Manajemen Terintegrasi)
ISO 14001:2015 on Environment Management Systems (Integrated Management System)

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: **Certification Agency:**	LRQA
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: **Certification Issuance Date:**	23 Juni 2025 June 23, 2025
Masa Berlaku Hingga: **Validity Expiration:**	22 Juni 2028 June 22, 2028


Verification Record
PT PP (Persero) Tbk

ISO 31000:2018 tentang Risk Management
ISO 31000:2018 on Risk Management

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: **Certification Agency:**	LRQA
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: **Certification Issuance Date:**	24 Juni 2025 June 24, 2025
Masa Berlaku Hingga: **Validity Expiration:**	23 Juni 2026 June 23, 2026


CERTIFICATE

ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2015 on Environment Management Systems

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi: **Certification Agency:**	Sucofindo International Certification Services Sucofindo International Certification Services
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi: **Certification Issuance Date:**	1 Agustus 2025 August 1, 2025
Masa Berlaku Hingga: **Validity Expiration:**	31 Juli 2028 July 31, 2028



Kilas Peristiwa 2025
2025 Event Highlight

Januari
January



02

Penandatanganan Kontrak RKA & KPI 2025 dan Kunjungan Kerja Awal Tahun Proyek Tol Kataraja PIK

Signing of the 2025 RKA & KPI Contract and Early Year Work Visit to the Kataraja PIK Toll Road Project

Penandatanganan Kontrak Manajemen RKA & KPI Tahun 2025 serta kunjungan kerja manajemen awal tahun di proyek Tol Kataraja PIK, dihadiri oleh BOD, SVP, dan DU AP PTPP. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengesahkan target RKA & KPI PTPP tahun baru 2025 serta Kunjungan Kerja Awal tahun.

Signing of the 2025 RKA & KPI management contract and early year management project visit to the Kataraja PIK Toll Road Project, attended by the BOD, SVP, and President Directors of PTPP Subsidiaries. The activity was carried out to ratify PTPP's 2025 RKA & KPI targets and to conduct the Early-Year Project Visit.





11

Kunjungan Kerja Menko Infrastruktur dan Menteri PU ke Proyek Tol Semarang - Demak

Project Visit by the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development and the Minister of Public Works to the Semarang-Demak Toll Road Project

Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Menteri PU ke Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1, Semarang, dalam rangka melakukan inspeksi lapangan dan meninjau progres pembangunan secara langsung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh DU, SVP Corsec, SVP Infra 1 PTPP serta DU PPSD.

Project visit by the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development and the Minister of Public Works to the Semarang-Demak Toll Road Construction Project Section 1, Semarang, to conduct a field inspection and review the progress of construction directly. The event was attended by the President Director, Corsec SVP, Infra 1 SVP, and PPSD President Director.

Februari
February



12

Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Proyek Tunnel Samarinda

Project Visit of the Vice President to the Samarinda Tunnel Project

Kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Proyek Tunnel Samarinda, dihadiri oleh Wakil Presiden RI, SVP Ops Infra 1 PTPP. Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Samarinda.

Project visit by the Vice President of the Republic of Indonesia to the Samarinda Tunnel Project, attended by the Vice President and SVP Ops Infra 1 of PTPP. This activity is part of the Vice President's project visit to Samarinda.



17

Groundbreaking Proyek RS Adhyaksa Jambi

Groundbreaking Ceremony for the Adhyaksa Jambi Hospital Project

Groundbreaking Proyek RS Adhyaksa Jambi dihadiri oleh Jaksa Agung RI, Gubernur Jambi, jajaran Forkopimda Prov Jambi dan Kota Jambi, Kejari se-Provinsi Jambi, DU & DO Gedung PTPP, SVP Ops Gedung, SVP Corsec, serta GM Ops. Gedung. Kegiatan ini menandai langkah awal pembangunan fasilitas layanan kesehatan RS Adhyaksa Jambi untuk kebermanfaatan bagi masyarakat Jambi dan sekitarnya.

The groundbreaking ceremony for the Adhyaksa Jambi Hospital Project was attended by the Attorney General, Jambi Governor, the Jambi Provincial and Jambi City Forkopimda officials, the Jambi Provincial District Attorney, PTPP President Director & Director of Building Ops, SVP Building Ops, SVP Corsec, and GM Building Ops. The event marked the first step in the construction of the Adhyaksa Jambi Hospital healthcare facility for the benefit of the people of Jambi and its surrounding areas.

Maret
March



17

CEO Talk Chapter I Tahun 2025

CEO Talk Chapter I of 2025

CEO TALK Chapter I Tahun 2025 diselenggarakan di Auditorium Wisma Subiyanto PTPP dan dihadiri oleh seluruh jajaran BOD PTPP, SVP UKP & Operasi, DU AP, GM Operasi, *Project Manager*, serta *Site Manager*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dari Direksi PTPP kepada seluruh *Leaders* PTPP, dengan fokus menyatukan visi, misi, dan strategi Perusahaan ke depan.

CEO Talk Chapter I 2025 was held at the Wisma Subiyanto PTPP Auditorium and attended by the entire PTPP Board of Directors, UKP & Operations SVPs, Subsidiaries President Directors, Operations GMs, Project Managers, and Site Managers. The event aimed to guide the PTPP Board of Directors to all PTPP Leaders, with a focus on unifying the Company's vision, mission, and future strategies.



20

Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh Presiden RI

Inauguration of the Batang Industropolis Special Economic Zone (KEK) by the President of the Republic of Indonesia

Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dilaksanakan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, oleh Presiden RI. Acara ini dihadiri oleh Presiden RI, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta DSH PTPP. Kegiatan ini menandai peresmian KEK Industropolis Batang sebagai langkah strategis dalam percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri.

The inauguration of the Batang Industropolis Special Economic Zone (KEK) was held at the Batang Integrated Industrial Zone in Central Java by the President of the Republic of Indonesia. The event was attended by the President, members of the Red and White Cabinet, and PTPP Director of Corporate Strategy and HCM. The event marked the inauguration of the Batang Industropolis KEK as a strategic step in accelerating economic growth through industrial sector development.

April
April



19

Kunjungan Kerja Menteri BUMN ke Bali International Hospital

Project Visit of the Minister of SOE to Bali International Hospital

Kunjungan kerja Menteri BUMN ke proyek Bali International Hospital (BIH) dihadiri oleh Menteri BUMN, Direkrut Utama InJourney, Direktur Utama InJourney Hospitality, Direktur Utama HIN, DU PTPP, DO Gedung PTPP, dan SVP Ops. Gedung. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas rumah sakit siap digunakan sesuai standar internasional. Saat ini, BIH telah beroperasi dan melayani pasien melalui layanan MCU, IGD, Ranap, serta klinik.

The Minister of SOE's project visit to the Bali International Hospital (BIH) project was attended by the Minister of SOE, the InJourney Managing Director, the InJourney Hospitality Managing Director, the HIN Managing Director, PTPP President Director, the Director of Building Operations, and the SVP of Building Operations. The visit was conducted to ensure that all hospital facilities are ready for use per international standards. Currently, BIH is operational and serving patients through MCU, IGD, Inpatient, and clinic services.



30

RUPST Tahun Buku 2024 PTPP

AGMS for the 2024 Fiscal Year of PTPP

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PTPP diselenggarakan di Auditorium Wisma Subiyanto PTPP dan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, serta para Pemegang Saham. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda Perusahaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban tahunan perusahaan.

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 fiscal year of PTPP was held at the Wisma Subiyanto PTPP Auditorium and attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders. The meeting discussed several company agendas related to fulfilling the company's annual obligations.

Mei
May



07

Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Bendungan Manikin

Project Visit by the Vice President to the Manikin Dam

Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Proyek Bendungan Manikin, dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Staff Khusus Wapres, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, serta GM Ops. Infra 2 PTPP. Kegiatan ini dilakukan sebagai peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Manikin, harapan nya dengan adanya Bendungan Manikin ini dapat segera bermanfaat bagi irigasi dan dapat mendukung perekonomian wilayah sekitar.

The Project Visit of the Vice President of the Republic of Indonesia to the Manikin Dam Project was attended by the Vice President, NTT Governor and Deputy Governor, Kupang Regent and Deputy Regent, Special Staff to the Vice President, the Head of the Nusa Tenggara II Kupang River Basin Agency, and the Infra 2 Ops GM of PTPP. This activity was conducted to review the progress of the Manikin Dam construction, with the hope that it will soon benefit irrigation and support the local economy.



08

Groundbreaking RS KMH Thohir Krui

Groundbreaking Ceremony for KMH Thohir Krui Hospital

Groundbreaking RS KMH Thohir Krui, Pesisir Barat Lampung, dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Ketua MPR RI, Kepala Staff Kepresidenan, Gubernur Lampung, Bupati Pesisir Barat, serta SVP Gedung PTPP. Sebagai tonggak awal dibangunnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat di kawasan Pesisir Barat Lampung yang harapan nya fasilitas kesehatan tidak jauh dari warga sekitar.

The groundbreaking ceremony for KMH Thohir Krui Hospital in West Lampung was attended by the Health Minister, the Speaker of the People's Consultative Assembly, the Presidential Chief of Staff, the Lampung Governor, the West Lampung Regent, and the SVP of PTPP. This marks the beginning of the construction of a healthcare facility for the community in West Lampung, with the hope that it will be accessible to nearby residents.

Juni
June



25

Peresmian Bali International Hospital di KEK Sanur oleh Presiden RI

Inauguration of Bali International Hospital in Sanur KEK by the President of Indonesia

Peresmian Bali International Hospital (BIH) di KEK Sanur oleh Presiden RI, dihadiri oleh Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, CEO & COO Danantara, Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama Pertamina Bina Medika IHC, DU dan DO Gedung PTPP, SVP Gedung PTPP, SVP Corsec PTPP. Peresmian fasilitas kesehatan berstandar internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur Bali, dimana harapannya Pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas kesehatan bertaraf internasional didalam negeri, dan mampu memfasilitasi para turis mancanegara di Bali yang ingin berobat.

The inauguration of Bali International Hospital (BIH) in Sanur KEK by the President of Indonesia was attended by the President, the SOE Minister, the Health Minister, the Tourism Minister, the CEO & COO of Danantara, the President Commissioner and President Director of Pertamina, the President Director of Pertamina Bina Medika IHC, PTPP President Director and Director of Building Ops, PTPP Building SVP, and PTPP Corsec SVP. The inauguration of an international-standard healthcare facility in the Sanur Bali Special Economic Zone (KEK), with the hope that the government will provide such facilities domestically and facilitate foreign tourists in Bali seeking medical treatment.



25

Kunjungan Kerja Kemenhan RI ke Proyek Dermaga PAL Surabaya

Project Visit of the Ministry of Defense to the Surabaya PAL Port Project

Kunjungan kerja Kepala Biro Infohan Kemenhan RI dan Staffsus Kemenhan Bidang Komunikasi Sosial ke Proyek Dermaga PAL, dihadiri oleh Kepala Biro Infohan kemenhan RI dan Staffsus Kemenhan Bidang Komunikasi Sosial, PM dan tim Proyek PTPP. Kunjungan dalam rangka meninjau proyek investasi strategis bagi Indonesia untuk mencapai visi *Whole Local Production* (WLP) kapal selam, mengurangi ketergantungan pada fasilitas asing, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Project visit by the Head of the Information Bureau Ministry of Defense and Special Staff for Social Communication to the PAL Pier Project, attended by the Head of the Information Bureau of Ministry of Defense and Special Staff for Social Communication, PM, and the PTPP Project team. The visit aimed to review the strategic investment project for Indonesia to achieve the vision of Whole Local Production (WLP) for submarines, reduce dependence on foreign facilities, and strengthen the independence of the national defense industry.

Juli
July



18

Kementerian BUMN Laksanakan *Site* Visit ke Proyek Rusun ASN 1 IKN dalam Rangka *Workshop* Komunikasi

SOE Ministry Conducts Site Visit to ASN 1 IKN Housing Project as Part of Communication Workshop

Kegiatan *Workshop* Komunikasi BUMN dengan tema "Komunikasi melalui Media Sosial dengan Optimasi AI" telah diselenggarakan sebagai upaya memperkuat strategi komunikasi digital di lingkungan BUMN. *Workshop* ini membahas pemanfaatan media sosial secara efektif dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sebagai bagian dari rangkaian acara, peserta workshop melakukan kunjungan lapangan ke proyek Rumah Susun ASN 1 IKN. Dalam kesempatan tersebut, Project Manager Galang Bastiono memaparkan *project overview*, termasuk teknologi dan inovasi yang digunakan dalam pembangunan unit hunian serta fasilitas umum yang tersedia di kawasan proyek.

Kegiatan ini menjadi momen sinergi antara penguatan kompetensi komunikasi dan apresiasi terhadap kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara.

The SOE Communication Workshop, with the theme "Communication through Social Media with AI Optimization," was held to strengthen digital communication strategies within SOEs. The workshop discussed the effective use of social media with the support of artificial intelligence (AI) technology.

As part of the series of events, workshop participants conducted a field visit to the ASN 1 IKN Apartment Project. During the visit, Project Manager Galang Bastiono presented an overview of the project, including the technology and innovations used in the construction of residential units and the public facilities available in the project area.

The activity marked a moment of synergy between strengthening communication competencies and recognizing the contributions of SOEs in the development of strategic infrastructure in the Nusantara Capital City.



21

Semangat Sportivitas Warnai Pembukaan *Sport Competition* untuk Sambut HUT ke-72 PTPP

Sportsmanlike Spirit Marks the Opening of the Sports Competition to Celebrate PTPP's 72nd Anniversary

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-72 PTPP, perusahaan resmi membuka rangkaian *Sport Competition* 2025 di Sport Center PTPP. Kegiatan ini menjadi ajang tahunan yang dinantikan oleh seluruh insan PP sebagai bagian dari semangat kebersamaan, sportivitas, dan budaya sehat di lingkungan kerja. Acara pembukaan turut dihadiri oleh jajaran BOD, SVP, DU AP, serta ratusan karyawan dari berbagai unit kerja. Suasana pembukaan berlangsung meriah dan penuh antusiasme. *Sport Competition* berlangsung selama satu bulan, dengan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer, antara lain:Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Tenis Meja, dan *E-Sport*.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap dapat mempererat silaturahmi antar insan PP serta menanamkan nilai-nilai kerja sama, disiplin, dan *fair play* sebagai bagian dari budaya perusahaan. Semangat HUT ke-72 PTPP diharapkan menjadi momentum positif untuk membangun tim yang solid, sehat, dan penuh energi menuju masa depan yang lebih gemilang.

To celebrate PTPP's 72nd Anniversary, the Company officially opened the 2025 Sport Competition series at the PTPP Sport Center. All PP personnel eagerly await this annual event as part of the spirit of togetherness, sportsmanship, and a healthy culture in the work environment. The Board of Directors, SVPs, Subsidiary President Directors, and hundreds of employees from various work units attended the opening ceremony. The opening atmosphere was lively and enthusiastic. The Sports Competition lasted for one month and feature popular sports such as futsal, basketball, volleyball, table tennis, and e-sports.

Through this activity, the Company hopes to strengthen bonds among PTPP personnel and instill the values of cooperation, discipline, and fair play as part of its culture. The spirit of PTPP's 72nd Anniversary is expected to be a positive momentum for building a solid, healthy, and energetic team towards a brighter future.

Agustus
August



26

PTPP Rayakan Inovasi Lewat PP Awards 2025, Dimeriahkan Penyerahan Rekor MURI dan Lencana Satya Jasa

PTPP Celebrates Innovation Through the PP Awards 2025, Highlighted by the Presentation of the MURI Record and the Satya Jasa Medal

PP Awards 2025 resmi digelar dengan mengusung tema "*Creating Value to Enhance The Core*". Acara yang dihadiri BOC & BOD, jajaran SVP, dan BOD Anak Perusahaan PTPP, serta seluruh Insan PP ini menjadi ajang apresiasi atas ide-ide kreatif dan inovasi yang mampu memberikan nilai tambah nyata untuk memperkuat inti bisnis PTPP. Tema ini menegaskan bahwa inovasi dan teknologi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan budaya kerja yang lebih cepat, efisien, dan efektif di tengah persaingan dunia konstruksi.

Sebagai sisipan dalam rangkaian acara, PTPP menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian monumental pembangunan Gedung Bank Indonesia di IKN, yang tercatat sebagai gedung pertama di Indonesia dengan penggunaan kaca Photovoltaic BIPV. Penghargaan ini kian menegaskan kiprah PTPP sebagai pelopor konstruksi berkelas dunia, sekaligus bukti komitmen perusahaan melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi bangsa.

Selain itu, dalam ajang PP Awards 2025 ini juga dilakukan penyerahan Lencana Satya Jasa (LSJ) kepada para Insan PP yang sudah bekerja secara terus menerus, dengan baik dan sungguh sungguh, setia dan berkelakuan baik selama kurun waktu tertentu. Adapun pada tahun ini Perusahaan memberikan penghargaan LSJ kepada 34 Insan PP.

The PP Awards 2025 was officially held with the theme "Creating Value to Enhance the Core." The event, attended by the BOC & BOD, SVP, and BOD of PTPP's subsidiaries, as well as all PP personnel, was a celebration of creative ideas and innovations that have delivered real added value, strengthening PTPP's core business. This theme emphasizes that innovation and technology are not just options but strategic necessities for creating a faster, more efficient, and more effective work culture amid competition in the construction industry.

As part of the event, PTPP received an award from the Indonesian Museum of Records (MURI) for its monumental achievement in constructing the Bank Indonesia Building in IKN, which is recorded as the first building in Indonesia to use Photovoltaic BIPV glass. This award further affirms PTPP's role as a pioneer in world-class construction and serves as proof of the company's commitment to developing innovations that have a real impact on the nation.

Additionally, during the PP Awards 2025 event, the Satya Jasa Medal (LSJ) was presented to PP personnel who have worked continuously, diligently, sincerely, loyally, and with good conduct for a certain period of time. This year, the company awarded the LSJ to 34 PP personnel.



26

Tonggak Penting Layanan Kesehatan Otak Nasional, Gedung RSPON Karya PTPP Diresmikan Presiden RI

A Milestone in National Brain Health Services: RSPON Building by PTPP Inaugurated by the President of the Republic of Indonesia

Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RSPON Mahar Mardjono, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, serta DO Gedung PTPP bersama jajaran manajemen.

Sebagai kontraktor pelaksana, PTPP kembali menunjukkan kapabilitasnya dalam menghadirkan infrastruktur kesehatan modern yang mendukung peningkatan layanan medis di Indonesia.

Gedung baru RSPON dilengkapi dengan 254 tempat tidur, kamar operasi, laboratorium, fasilitas MRI mutakhir, hingga layanan unggulan neurorestorasi. Kehadiran fasilitas ini memperkuat peran RSPON sebagai pusat rujukan nasional sekaligus pusat riset dan pendidikan kedokteran saraf. Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan layanan kesehatan otak di Indonesia, sekaligus bukti nyata dedikasi Insan PTPP dalam menghadirkan karya berkelas dunia yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan bangsa.

The President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, inaugurated the RSPON Mahar Mardjono Integrated Services Building and National Neuroscience Institute in Jakarta. The event was also attended by the Health Minister, Budi G. Sadikin, along with members of the Indonesia Onward Cabinet, as well as the Director of Building Ops and management.

As the implementing contractor, PTPP once again demonstrated its capability to deliver modern healthcare infrastructure that supports improvements in medical services in Indonesia.

The new RSPON building features 254 beds, operating rooms, laboratories, state-of-the-art MRI facilities, and leading neurorestoration services. The presence of these facilities strengthens RSPON's role as a national referral center as well as a center for research and education in neurology. This inauguration marks a significant milestone for the Ministry of Health in enhancing brain health services in Indonesia, while also serving as tangible.

September
September



17

Strategi PTPP dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan di Tengah Dinamika Industri Konstruksi Nasional dan Tantangan Global

PTPP's Strategy to Improve Company Performance Amidst the Dynamics of the National Construction Industry and Global Challenges

PTPP telah melaksanakan *Public Expose Live* 2025 secara *online* dan menegaskan strategi *Back to Core* dengan fokus pada jasa konstruksi, peningkatan kualitas melalui BIM, *Lean Construction*, serta penguatan manajemen risiko. Hingga Agustus 2025, PTPP mencatat kontrak baru senilai Rp15,28 triliun, naik 29,6% dari periode Juli 2025, dengan kontribusi terbesar dari proyek BUMN dan sektor pertambangan, gedung, serta *power plant*.

Sejumlah kontrak besar yang diraih antara lain PLTGU Batam-1, NPEA Phase II, ITACHA 2 *Haul Road*, dan Kataraja *Toll Road Phase* 2. Direktur Utama Novel Arsyad menegaskan konsistensi PTPP pada bisnis inti, optimalisasi portofolio, serta penerapan inovasi, teknologi, dan prinsip ESG untuk memperkuat daya saing sekaligus memberi manfaat nyata bagi stakeholder dan masyarakat.

PTPP has conducted the 2025 Public Expose Live online and reaffirmed its Back to Core strategy, focusing on construction services, quality improvement through BIM, Lean Construction, and strengthened risk management. As of August 2025, PTPP recorded new contracts worth Rp15.28 trillion, an increase of 29.6% from the July 2025 period, with the largest contributions coming from SOE projects and the mining, building, and power plant sectors.

Some of the major contracts secured include Batam-1 PLTGU, NPEA Phase II, ITACHA 2 Haul Road, and Kataraja Toll Road Phase 2. President Director Novel Arsyad emphasized PTPP's consistency in its core business, portfolio optimization, and the application of innovation, technology, and ESG principles to strengthen competitiveness while providing tangible benefits to stakeholders and the community.



22

Forum Diskusi Rantai Transportasi Berkeadilan, Direktur Utama PTPP Hadir Sebagai Narasumber

Fair Transportation Chain Discussion Forum, President Director of PTPP Attends as a Keynote Speaker

Diskusi bertema "Rantai Transportasi yang Berkeadilan" yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan menjadi forum strategis untuk menyatukan pandangan para pemangku kepentingan dalam mendorong sistem transportasi yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PTPP hadir sebagai narasumber dan memaparkan materi terkait Project Management. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pusat Informasi Transportasi Kemenhub guna memantau perkembangan moda transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Kepala BKT.

The discussion, themed "Fair Transportation Chain," organized by the Transportation Ministry, served as a strategic forum to unify stakeholders' views in promoting an inclusive, integrated, and sustainable transportation system. On this occasion, the President Director oserved as a speaker and presented material on Project Management. The activity continued with a visit to the Transportation Ministry's of Transportation Information Center to monitor the integrated development of land, sea, and air transportation modes.

The event was attended by the Minister of Transportation, the Deputy Minister of Transportation, the Secretary General, the Inspector General, the Directors General within the Transportation Ministry, and the BKT Head.

Oktober
October



01

Hari Kesaktian Pancasila sebagai Landasan Pemersatu Bangsa dalam Menghadirkan Infrastruktur Berkelanjutan

Pancasila Day as the Foundation for National Unity in Delivering Sustainable Infrastructure

PTPP menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025. Upacara yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama dan diikuti oleh seluruh Insan PP ini berlangsung khidmat dan penuh makna. Dalam upacara tersebut, seluruh Insan PP mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa juga hadir dalam benak seluruh Insan PP dan menjadi landasan kokoh dalam upaya memberikan kualitas terbaik bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

PTPP held a ceremony to commemorate Pancasila Day 2025. The ceremony, led by the President Director and attended by all PP personnel, was solemn and meaningful. During the ceremony, all PP personnel remembered the heroes who had fallen in the struggle for Pancasila. In addition, Pancasila, as the nation's ideology, was present in the minds of all PP personnel and served as a solid foundation for their efforts to deliver the highest quality in sustainable infrastructure development.



14

Wakil Presiden RI Tinjau Proyek Bendungan Way Apu Maluku, Langkah Strategis Pemerintah Wujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia Timur

Indonesian Vice President Inspects Way Apu Dam Project in Maluku, a Strategic Step by the Government to Achieve Food Security in Eastern Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Proyek Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku, sebagai bagian dari agenda peninjauan Proyek Strategis Nasional di wilayah Timur Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Wapres RI meninjau langsung progres pembangunan bendungan yang dikerjakan oleh PTPP serta menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek guna mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air di Maluku. Kehadiran Bendungan Way Apu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan air irigasi, dan menjadi penopang utama pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Adapun turut hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerissa, Bupati Buru Bapak Ikram Umasugi, Kabalai Pekerjaan Umum, Kapolda Maluku serta Pangdam Maluku, GM Ops. Divisi Infra 2.

The Vice President of the Republic of Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, paid a project visit to the Way Apu Dam Project in Buru Regency, Maluku, as part of his agenda to review National Strategic Projects in Eastern Indonesia. During the visit, the Vice President observed the progress of dam construction by PTPP and emphasized the importance of accelerating the project's completion to support food security and water resource management in Maluku. The Way Apu Dam is expected to increase agricultural productivity, maintain irrigation water availability, and become a major pillar of sustainable development in eastern Indonesia.

Also present during the visit were the Maluku Governor, Mr. Hendrik Lewerissa; the Buru Regent, Mr. Ikram Umasugi; the Head of the Public Works Office; the Maluku Police Chief; the Maluku Military Commander; and the Operations for Infrastructure Division 2 GM.

November
November



04

Perkuat Infrastruktur Perkereta Apian, Presiden RI Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru

Strengthening Railway Infrastructure, the President Inaugurates New Tanah Abang Station

Presiden RI Bapak Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Gubernur DKI Jakarta, jajaran Direksi PTPP, GM Operasi Gedung PTPP, tim Proyek Stasiun Tanah Abang Baru, serta Direktur Utama KAI. PTPP telah merampungkan revitalisasi stasiun yang dimulai sejak 2024 dan beroperasi sejak Juni 2025, dengan peningkatan kapasitas penumpang dari 141 ribu menjadi 308 ribu orang per hari. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan peran strategis infrastruktur perkeretaapian dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi kawasan Jakarta serta wilayah penyangga.

Indonesian President Prabowo Subianto inaugurated the New Tanah Abang Station in Central Jakarta. The event was also attended by the Minister of Coordinating Infrastructure and Regional Development, the Minister of State Secretary, the Minister of Transportation, the Cabinet Secretary, the Head of the Government Communication Agency, the DKI Jakarta Governor, the Board of Directors of PTPP, the GM of PTPP Building Ops, the New Tanah Abang Station Project team, and the President Director of KAI. PTPP has completed the station's revitalization, which began in 2024 and has been operational since June 2025, increasing passenger capacity from 141,000 to 308,000 people per day. In his remarks, the President emphasized the strategic role of railway infrastructure in supporting community mobility, goods distribution, and economic growth in the Jakarta area and its surrounding regions.



18

PTPP Hibahkan Dapur MBG Banjar, Menteri PU Lakukan Peninjauan Kualitas Standar Nasional

PTPP Donates MBG Banjar Kitchen, Minister of Public Works Conducts National Standard Quality Inspection

Menteri PU meninjau Dapur Makanan Bergizi (MBG) Banjar didampingi Sesditjen PS KemenPU, dan DO Gedung, SVP Gedung, serta GM Ops. Gedung PTPP, juga jajaran manajemen PTPP lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Menteri melihat langsung kualitas pembangunan fasilitas yang sepenuhnya dihibahkan PTPP melalui program CSR. Dapur MBG ini menjadi wujud kontribusi sosial PTPP dalam mendukung percepatan layanan gizi nasional dan dirancang sebagai standar nasional untuk penyelenggaraan layanan dapur gizi di berbagai daerah.

The Public Works Minister inspected the Banjar Nutritious Food Kitchen (MBG), accompanied by the Secretary General of Public Works Ministry, the Director of Building Ops, the Building Ops SVP, and the Building Ops GM, as well as other PTPP management officials. During the visit, the Minister directly observed the quality of the facility construction, which PTPP fully donated through its CSR program. The MBG Kitchen represents PTPP's social contribution to accelerating national nutrition services and is designed as a national standard for implementing nutrition kitchen services across various regions.

Desember
December



18

PTPP Resmi Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025

PTPP Officially Holds the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

PTPP telah melaksanakan RUPS LB tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh jajaran BOC & BOD PTPP.

Dalam RUPS LB kali ini, terdapat dua mata acara yang menjadi fokus utama, yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.

Sebagai perusahaan jasa konstruksi terkemuka di Indonesia, PTPP terus berkomitmen menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui fokus *Back to Core*, penguatan manajemen risiko, inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta konsistensi menjaga kualitas dan keselamatan kerja.

PTPP has conducted the 2025 EGMS, attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPP.

In this EGMS, there were two main agenda items: the Approval of Amendments to the Articles of Association and the Delegation of Authority to Approve the 2026 Company Work Plan and Budget (RKAP), including its Amendments.

As a leading construction services company in Indonesia, PTPP remains committed to delivering infrastructure development that brings tangible benefits to the community. This commitment is realized through a focus on Back to Core, strengthening risk management, innovation, and technology use, as well as maintaining consistency in quality and workplace safety.





22

PTPP Gelar CEO Talk Vol. II 2025, Manajemen Sampaikan Apresiasi dan Arah Strategis 2026

PTPP Holds CEO Talk Vol. II 2025, Management Expresses Appreciation and Strategic Direction for 2026

PTPP menyelenggarakan CEO Talk Vol II tahun 2025. Dihadiri Jajaran BOD, SVP, GM Ops, Dir AP hingga PM.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PTPP mewakili manajemen memberikan Apresiasi kepada seluruh insan PP atas dedikasi, kerja keras dan segala pengorbanan dan pencapaian di tahun 2025 ini. Selanjutnya Direktur Utama PTPP memberikan arahan singkat terkait perkembangan perusahaan serta bagaimana strategi untuk tahun 2026.

PTPP held CEO Talk Vol II in 2025. The Board of Directors, SVPs, Ops GM, as well as Subsidiary Board of Directors and PM attended the event.

On this occasion, the PTPP President Director, representing management, expressed appreciation to all PTPP personnel for their dedication, hard work, sacrifices, and achievements in 2025. Subsequently, the President Director provided a brief overview of the Company's development and the strategic directive for 2026.

CONSTRUCTION & INVESTMENT



Laporan Manajemen

Management Report





Ir. Dhony Rahajoe

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Report

Di tengah tekanan terhadap sektor konstruksi, PTPP berkomitmen untuk memperkuat kualitas kinerja ke depan, menjaga keberlanjutan usaha, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Kami memandang fase *challenging* ini sebagai bagian dari proses penataan ulang (*governance reset*) fondasi bisnis serta menjadi langkah dalam mendukung Danantara merasionalkan jumlah BUMN.

Amid pressures on the construction sector, PTPP is committed to enhancing performance quality moving forward, ensuring business sustainability, and creating long-term value for shareholders and all stakeholders.

We view this challenging phase as part of a process to reset the business foundation and as a step toward supporting Danantara to streamline the number of SOEs.

Para Pemegang Saham, Investor,
dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,
Esteemed Shareholders, Investors, and Stakeholders,

Seperti kita ketahui bersama, sektor konstruksi, infrastruktur, dan properti mendapatkan tantangan luar biasa di tahun 2025. Justru di tengah kondisi ini, PTPP berupaya menumbuhkembangkan dan menjawab tantangan untuk dapat terus melakukan penciptaan nilai dalam operasi dan bisnis yang dilakukan. Untuk itu, izinkan kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan atas pengelolaan PTPP sebagai bagian dari perjalanan PTPP di sepanjang 2025.

As we all know, the construction, infrastructure, and property sectors faced extraordinary challenges in 2025. It is precisely amid these conditions that PTPP strives to grow and respond to these challenges, continuing to create value in its operations and business activities. To that end, allow us, on behalf of the Board of Commissioners, to present this oversight report on the management of PTPP as part of PTPP's journey throughout 2025.

Perkembangan Sektor Konstruksi dan Tekanan Perekonomian dan Industri

Sektor konstruksi erat kaitannya dengan kemampuan investasi sebuah negara, baik pemerintah maupun masyarakat atau swasta, termasuk juga arah kebijakan pasar dalam menyikapi tren maupun risiko. Secara keseluruhan, perekonomian di tahun 2025 masih diwarnai berbagai tantangan struktural; termasuk ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan, dinamika hubungan dagang antar negara khususnya yang dipicu kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, serta penyesuaian kebijakan ekonomi di tengah proses normalisasi pasca periode pengetatan moneter.

Mengutip data International Monetary Fund (IMF), perekonomian dunia tahun 2025 tumbuh 3,2%, terkoreksi dari tahun sebelumnya sebesar 3,3%[1]. India mampu untuk menjaga perekonomian tumbuh dengan cukup stabil, sedangkan negara-negara maju, negara berkembang, hingga Tiongkok, mencatat perlambatan meskipun bersifat melandai.

Pertumbuhan ekonomi global cenderung bergerak moderat ini seiring upaya bank sentral utama dunia menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan. Tak hanya itu, faktor geopolitik turut memengaruhi berbagai komoditas dunia yang jelas terlihat pada volatilis harga minyak mentah dunia maupun komoditas pangan. Sementara itu, kebijakan moneter yang lebih akomodatif di sejumlah negara maju, termasuk kelanjutan arah pelonggaran suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat, memberikan ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi dan mendorong sentimen positif terhadap permintaan energi dan investasi global.

Di tengah tantangan perekonomian dunia, Indonesia justru mampu tumbuh stabil dan tangguh. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan, dari 5,03%[2] di tahun 2024 menjadi 5,11%[3] di tahun 2025. Konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan, sementara aktivitas investasi masih terus berjalan.

Developments in the Construction Sector and Economic and Industrial Pressures

The construction sector is closely linked to a country's investment capacity—whether from the government, the public, or the private sector—as well as the direction of market policies in addressing trends and risks. Overall, the economy in 2025 remains marked by various structural challenges, including ongoing geopolitical uncertainty, the dynamics of trade relations between nations—particularly those triggered by U.S. protectionist policies—and economic policy adjustments amid the normalization process following a period of monetary tightening.

Citing data from the International Monetary Fund (IMF), the global economy is projected to grow by 3.2% in 2025, down from 3.3% the previous year[1]. India maintains relatively stable economic growth, while developed nations, emerging economies, and China experience a gradual slowdown.

This moderate trend in global economic growth aligns with the efforts of the world's major central banks to balance inflation stability with sustainable growth. Moreover, geopolitical factors have influenced global commodity markets, as evidenced by the volatility of crude oil and food prices. Meanwhile, more accommodative monetary policies in several developed nations—including the U.S. Federal Reserve's continued interest rate cuts—have created room for economic recovery and fostered positive sentiment regarding global energy demand and investment.

Amid global economic challenges, Indonesia has grown steadily and resiliently. Statistics Indonesia (BPS) released official data showing that Indonesia's economic growth, as measured by Gross Domestic Product (GDP), increased from 5.03%[2] in 2024 to 5.11%[3] in 2025. Domestic consumption remains the primary driver of growth, while investment activity continues to progress.

[1]Real GDP Growth- International Monetary Fund (IMF),
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CHN/IND

[2]Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025.
Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical Bulletin No. 17/02/Vol. XXVIII, February 5, 2025.

[3]Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026.
Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.

Sektor konstruksi dan infrastruktur tetap memegang peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Masih mengutip data BPS, sektor konstruksi berkontribusi hingga 9,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi salah satu sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun, data BPS menyebutkan bahwa sektor ini mengalami perlambatan, dari pertumbuhan sebesar 7,02% di tahun 2024 menjadi hanya 3,81% di tahun 2025[4].

The construction and infrastructure sectors continue to play a strategic role in driving economic growth and equitable development. Still citing BPS data, the construction sector contributes up to 9.83% to the Gross Domestic Product (GDP) and plays a major role in Indonesia's economic growth. However, BPS data indicate that this sector is experiencing a slowdown, from a growth rate of 7.02% in 2024 to just 3.81% in 2025[4].

Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai indikator utama investasi riil dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam perekonomian Indonesia memperlihatkan angka yang cukup baik. PMTB tahun 2025 tumbuh 5,09%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 4,61%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang lebih baik ini memberikan signal positif tentang investasi jangka panjang dari pihak investor, baik pemerintah maupun swasta.

On the other hand, Gross Fixed Capital Formation (PMTB), as a key indicator of real investment and long-term economic growth in the Indonesian economy, shows fairly positive figures. PMTB in 2025 grew by 5.09%, higher than the previous year's 4.61%. From the expenditure side, this improved growth sends a positive signal about long-term investment from both government and private investors.

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga menjadi salah satu alat *shock absorber* bagi perekonomian nasional. Perubahan rezim pemerintahan yang terjadi pada akhir tahun 2024 menjadi momentum penting dari perjalanan di sepanjang 2025. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang didesain sebagai instrumen yang ekspansif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia berfokus pada beberapa program yang diusung dengan tema "Asta Cita" dengan fokus kegiatan seperti perbaikan kualitas gizi Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta infrastruktur. Peralihan fokus ini berdampak pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 2,50% atau di bawah tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 6,76%[5]. Faktor terbesar dari melandainya pengeluaran konsumsi pemerintah terutama disebabkan gelaran Pemilihan Umum tahun 2024 yang mengalokasikan pengeluaran yang cukup besar.

Government consumption expenditure also serves as a key shock absorber for the national economy. The change in government administration at the end of 2024 marks a significant turning point in the trajectory for 2025. In the 2025 State Budget (APBN), designed as an expansive instrument to support economic growth, the Indonesian Government is focusing on several programs under the "Asta Cita" theme, with key initiatives including improving the nutritional quality of the Free Nutritious Meal (MBG) program, education and health, food security, and infrastructure. This shift in focus has affected government consumption spending, which grew by only 2.50%—below the previous year's 6.76%[5]. The primary factor behind the slowdown in government consumption spending is the 2024 General Election, which allocated significant expenditures.

Selain itu, sektor konstruksi dan turunannya, termasuk properti, juga menghadapi perkembangan isu keberlanjutan. Sebagaimana digambarkan dalam dokumen Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor konstruksi dan properti menjadi salah satu penyumbang paling signifikan terhadap konsumsi energi global dan GRK. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memublikasikan Peraturan Menteri PUPR RI No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi

Additionally, the construction sector and its related industries, including real estate, are grappling with sustainability issues. As outlined in the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) document published by the Financial Services Authority (OJK), the construction and real estate sectors are among the most significant contributors to global energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions. The Indonesian Government, through the Public Works and Housing (PUPR) Ministry, has published Ministerial Regulation No. 9 of 2021 on Guidelines for Sustainable Construction, in

[4]Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026.
Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.

[5]Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026.
Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.

Berkelanjutan, di mana Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan konstruksi di Indonesia memiliki 3 (tiga) pilar dasar meliputi keekonomian layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pelestarian lingkungan, dan mengurangi disparitas sosial masyarakat.

which the Indonesian Government has established that construction management in Indonesia is based on three fundamental pillars: economic viability that enhances public welfare, environmental conservation, and the reduction of social disparities.

Peraturan ini tentu tidak lepas dari kompleksitas kondisi hari ini. Dengan populasi yang tumbuh begitu cepat, yang diiringi dengan percepatan urbanisasi, hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis atas kebutuhan hunian yang cukup tinggi. Pemerintah Indonesia, bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk PTPP, berupaya memenuhi kebutuhan hunian dan kebutuhan infrastruktur tersebut dengan tetap mempertimbangkan risiko jangka panjang, baik risiko sosial di masa mendatang maupun risiko lingkungan yang timbul dari keberadaan bangunan maupun hunian yang tumbuh dengan masif.

This regulation is, of course, inseparable from the complexities of today's conditions. With a rapidly growing population and accelerated urbanization, this requires a more strategic approach to addressing the high demand for housing. The Indonesian Government, together with all stakeholders, including PTPP, strives to meet these housing and infrastructure needs while accounting for long-term risks, including future social risks and environmental risks arising from the rapid growth of buildings and housing.

Penilaian Kinerja Direksi dan Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dengan mengedepankan kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan usaha PTPP. Dewan Komisaris menilai sejauh mana Direksi mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Performance Evaluation of the Board of Directors and Supervision by the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory functions, the Board of Commissioners continuously monitors the Board of Directors' management of the Company, prioritizing shareholders' interests and the sustainability of PTPP's business. The Board of Commissioners assesses the extent to which the Board of Directors can optimize all of the Company's resources to achieve the established performance targets.

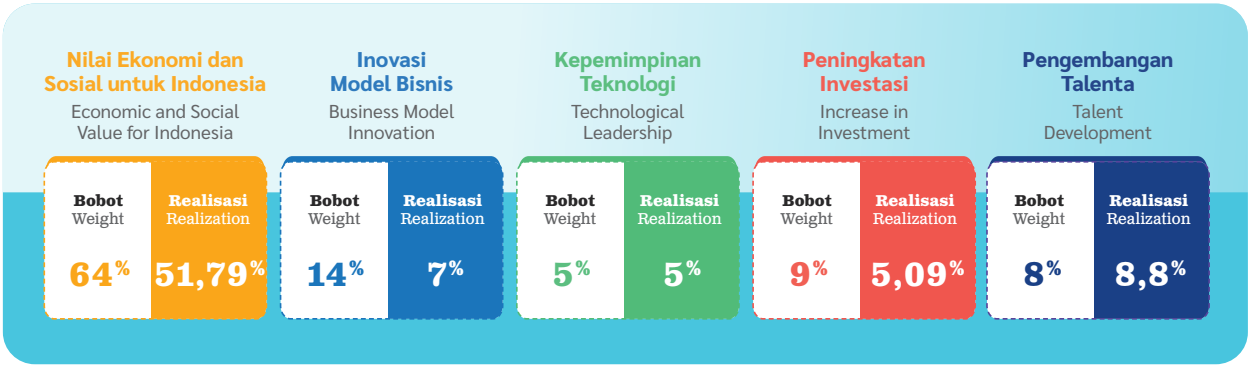
Pengukuran kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta pencapaian target korporasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Target tersebut dirumuskan oleh Direksi dan dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, serta dituangkan dalam Kontrak Manajemen sebagai dasar penilaian kinerja Perusahaan.

The Board of Directors' performance is measured based on the fulfillment of duties and responsibilities, as well as the achievement of corporate targets outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). These targets are formulated by the Board of Directors, submitted to the Board of Commissioners for approval, and incorporated into the Management Contract as the basis for evaluating the Company's performance.

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan secara tahunan menggunakan Indikator Pencapaian Kinerja atau *Key Performance Indicators* (KPI). KPI korporat yang melekat sebagai KPI Direksi dijabarkan ke dalam 5 (lima) program prioritas, yaitu aspek Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang mencakup pencapaian kinerja finansial, operasional, dan sosial; aspek Inovasi Model Bisnis; aspek Kepemimpinan Teknologi; aspek Peningkatan Investasi; serta aspek Pengembangan Talenta.

The Board of Directors' performance evaluation is conducted annually using Key Performance Indicators (KPIs). Corporate KPIs, which also serve as the Board of Directors' KPIs, are broken down into five priority programs: the Economic and Social Value for Indonesia aspect, covering financial, operational, and social performance; the Business Model Innovation aspect; the Technology Leadership aspect; the Investment Growth aspect; and the Talent Development aspect.

Indikator Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Key Performance Indicators for 2025



Dari penilaian secara korporat di atas, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi Tahun 2025 secara umum baik dengan capaian KPI sebesar 77,67, meskipun belum seluruh indikator mencapai target.

Based on the corporate assessment above, The Board of Commissioners assesses the Board of Directors' performance for 2025 as generally good, with a KPI achievement of 77.67, although not all indicators have met their targets.

Kinerja positif didukung oleh aspek Sosial (ESG *Rating*) dan beberapa indikator operasional seperti efisiensi piutang dan keselamatan kerja. Namun, terdapat deviasi pada indikator finansial utama, khususnya EBITDA, *Interest Bearing Debt to* EBITDA, ROIC, serta *Net Operating Cash Flow*, yang menunjukkan perlunya penguatan kinerja keuangan. Selain itu, realisasi investasi dan peningkatan kinerja anak perusahaan juga belum optimal.

This positive performance was supported by social aspects (ESG Rating) and several operational indicators such as accounts receivable efficiency and workplace safety. However, there were deviations in key financial indicators, particularly EBITDA, Interest-Bearing Debt to EBITDA, ROIC, and Net Operating Cash Flow, indicating the need to strengthen financial performance. Additionally, investment realization and subsidiary performance improvements have not yet reached optimal levels.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memperkuat fundamental keuangan, meningkatkan disiplin eksekusi investasi, serta mengoptimalkan kinerja portofolio anak perusahaan guna memastikan pencapaian yang lebih berkelanjutan.

Moving forward, the Board of Commissioners urges the Board of Directors to strengthen financial fundamentals, improve investment execution discipline, and optimize the performance of the subsidiary portfolio to ensure more sustainable achievements.

Dari sudut pandang pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, kami menilai bahwa struktur penilaian kinerja tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara pencapaian kinerja finansial, operasional, serta aspek keberlanjutan dan pengembangan organisasi. Tolok ukur kinerja yang terstruktur dan terukur diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan Perusahaan. Selain itu, aspek pengembangan talenta yang mencakup peningkatan peran karyawan perempuan dan generasi muda menunjukkan komitmen Perusahaan dalam membangun organisasi yang adaptif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

From the perspective of the Board of Commissioners' supervision, we assess that this performance evaluation framework strikes a balance between financial and operational performance, as well as sustainability and organizational development. Structured and measurable performance metrics are expected to have a positive impact on the Company's sustainability. Additionally, the talent development aspect—which includes enhancing the roles of female employees and the younger generation—demonstrates the Company's commitment to building an adaptive and sustainable organization, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Dewan Komisaris menyambut dengan sangat baik atas kriteria penilaian kinerja di atas. Tolok ukur kinerja yang memiliki dasar pengukuran yang baik tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan Perusahaan. Tak hanya itu, aspek penilaian Pengembangan Talenta yang menyertakan komposisi keterlibatan karyawan perempuan dan karyawan milenial menunjukkan keseriusan pengelolaan BUMN yang harus disikapi dengan keseriusan PTPP dalam pengembangan organisasi yang dilakukan. Hal ini tak lepas dari komitmen PTPP sebagai bagian dari BUMN untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

The Board of Commissioners warmly welcomes the aforementioned performance evaluation criteria. Performance metrics grounded in sound measurement principles will undoubtedly have a positive impact on the Company's sustainability. Moreover, the Talent Development assessment aspect, which includes the composition of female and millennial employee engagement, reflects the seriousness of SOE management—a matter that PTPP must address with equal seriousness in its organizational development efforts. This is inseparable from PTPP's commitment, as part of the SOE sector, to achieve sustainable growth in line with the spirit of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang saat ini telah menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN, terkait pengelolaan talenta dan suksesi Direksi, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara individual sebagai bagian dari proses *Talent Pool* dan *Succession Management* Direksi BUMN. Hasil evaluasi dan validasi Dewan Komisaris atas Direksi yang sedang menjabat (BOD *Existing*) serta Talenta BOD-1 (*Selected Talent*) telah disampaikan kepada *Cluster Talent Committee* (CTC) BUMN Jasa Infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat No. 008/KOM/PP/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Penyampaian *Nominated Talent* PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025.

In line with the policy of the SOE Ministry, which has now become the SOE Regulatory Agency (BP BUMN), regarding talent management and executive succession, the Board of Commissioners has also conducted individual performance evaluations of the Board of Directors as part of the Talent Pool and Succession Management process for SOE executives. The results of the Board of Commissioners' evaluation and validation of the existing Board of Directors as well as selected BOD-1 Talent have been submitted to the SOE Infrastructure Services Cluster Talent Committee (CTC) in accordance with applicable regulations via Letter No. 008/KOM/PP/02/2025 dated February 28, 2025, on the Submission of Nominated Talent for PT PP (Persero) Tbk for the Year 2025.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan pencapaian target korporasi secara berkelanjutan.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in managing the Company in accordance with the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations. Moving forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue improving performance quality, strengthening risk management, and ensuring the sustainable achievement of corporate targets.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai organ pengawas, kami memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan PTPP telah memasuki fase kedewasaan. Ini berarti, implementasi aspek GCG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepatuhan semata, namun bagaimana upaya seluruh organ terkait mewujudkan GCG dalam tingkatan praktik terbaik.

Views on Corporate Governance Implementation

As the supervisory body, we view the implementation of Good Corporate Governance (GCG) by PTPP as having entered a phase of maturity. This means that the implementation of GCG aspects is not merely focused on compliance, but on how all relevant bodies strive to realize GCG at the level of best practices.

Sejalan dengan hal itu, Dewan Komisaris juga telah memenuhi seluruh kepatuhan yang diwajibkan, yang juga diakselerasikan melalui berbagai upaya pro-aktif untuk dapat memperkuat penerapan GCG di lingkup Perusahaan. Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi misalnya,

In line with this, the Board of Commissioners has also fulfilled all required compliance obligations, which have been further accelerated through various proactive efforts to strengthen GCG implementation within the Company. The establishment of the Integrated Governance

dilakukan bukan hanya untuk memenuhi ketentuan dari Menteri BUMN RI terkait pengelolaan risiko sistemik. Lebih dari itu, komite ini difungsikan sebagai upaya Dewan Komisaris untuk dapat memantau pengelolaan risiko di level kelompok usaha. Hal ini juga sejalan dengan upaya Direksi dalam mengembangkan strategi *streamlining* portofolio yang melibatkan risiko dari anak usaha.

Committee, for example, was not undertaken merely to meet the requirements of the SOE Minister regarding systemic risk management. Beyond that, this committee serves as the Board of Commissioners' initiative to monitor risk management at the corporate group level. This also aligns with the Board of Directors' efforts to develop a portfolio streamlining strategy that involves risks from subsidiaries.

Pandangan kami terkait kedewasaan Perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG terlihat dari kesukarelaan PTPP untuk mengikuti evaluasi atas penerapan GCG pada praktik terbaik yang dilakukan melalui penilaian penerapan GCG dengan metode pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil penilaian memperlihatkan nilai akhir 101,69 dengan kualifikasi level 5 "*Leadership in Corporate Governance*" yang menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga praktik terbaik GCG.

Our view of the Company's maturity in applying GCG principles is evident in PTPP's voluntary participation in an independent evaluation of its GCG implementation against best practices, conducted using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) methodology. The assessment results showed a final score of 101.69 with a Level 5 qualification, "Leadership in Corporate Governance," indicating the Company's success in maintaining best GCG practices.

Kami pun menyadari, perkembangan penerapan GCG di lingkup PTPP bukanlah tanpa cela. Adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terkait menjadi evaluasi penting bagi kami bersama-sama Direksi untuk terus memperkuat penerapan prinsip GCG sebagai bagian dari pembentukan karakter masing-masing Insan PTPP dalam menjalankan operasi dan bisnis Perusahaan. Kami bersama-sama Direksi dan seluruh jajaran berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan kepemimpinan yang dapat mendorong budaya Perusahaan sebagai bagian dari praktik perilaku bisnis yang beretika.

We also recognize that the development of GCG implementation within PTPP is not without flaws. The occurrence of several issues over the past few years serves as a critical evaluation for us, together with the Board of Directors, to continue strengthening the implementation of GCG principles as part of shaping the character of every PTPP employee in conducting the Company's operations and business. Together with the Board of Directors and all management levels, we are committed to continuously fostering leadership that promotes the Company's culture as part of ethical business conduct.

Pandangan atas Penerapan Keberlanjutan Perusahaan

Kami menyambut baik kebijakan strategis terkait keberlanjutan yang telah dirumuskan Direksi dalam *roadmap* ESG dan target ke depan. Pembentukan Komite ESG di tahun 2024, di mana Dewan Komisaris terlibat sebagai organ pengawas, patut diapresiasi sebagai langkah besar PTPP untuk memulai inisiasi terkait keberlanjutan Perusahaan.

Memasuki tahun ke-2 dalam *roadmap* ESG tersebut, kami memandang PTPP telah cukup disiplin dalam memetakan berbagai persoalan keberlanjutan, termasuk perlakuan tahun *baseline* sebagai tolok ukur keberhasilan Perusahaan dalam menerapkan keberlanjutan untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai organ pengawas, kami berkomitmen untuk terus mengawasi pencapaian *roadmap* ESG Perusahaan, termasuk upaya manajemen dalam mempersiapkan diri atas berlakunya Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2027.

Views on the Company's Sustainability Implementation

We welcome the strategic sustainability policies the Board of Directors has formulated in the ESG roadmap and future targets. The establishment of the ESG Committee in 2024, in which the Board of Commissioners serves as the supervisory body, deserves appreciation as a major step by PTPP to initiate efforts related to the Company's sustainability.

As we enter the second year of this ESG roadmap, we believe that PTPP has been sufficiently diligent in identifying various sustainability issues, including the use of the baseline year as a benchmark for the Company's sustainability implementation over the coming years. As the supervisory body of the Board of Commissioners, we are committed to continuing to oversee the Company's progress on its ESG roadmap, including management's efforts to prepare for the implementation of the Sustainability Disclosure Standards (SPK), which will take effect on January 1, 2027.

Susunan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025 PTPP tidak melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sama, yaitu:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Ir. Dhony Rahajoe
- Komisaris Independen: Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum.
- Komisaris Independen: Irjen. Pol. (Purn) Drs. Istiono, M.H.
- Komisaris Independen: Ir. Pundjung Setya Brata, M.M.
- Komisaris: Dr. Ernadhi Sudarmanto Ak., MM., M.Ak.
- Komisaris: Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 dan hingga Laporan ini dipublikasikan.

Board of Commissioners Composition

Throughout 2025, PTPP made no changes to the composition of the Board of Commissioners. Consequently, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024, and December 31, 2025, remains the same, namely:

- President Commissioner and Independent Commissioner: Ir. Dhony Rahajoe
- Independent Commissioner: Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum.
- Independent Commissioner: Insp. Gen. (ret) Drs. Istiono, M.H.
- Independent Commissioner: Ir. Pundjung Setya Brata, M.M.
- Commissioner: Dr. Ernadhi Sudarmanto Ak., MM., M.Ak.
- Commissioner: Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

There have been no changes in the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, and up to the publication of this Report.

Memandang Prospek di Masa Mendatang

Di tahun 2026 dan mendatang, sektor konstruksi nasional masih akan menghadapi dinamika yang cukup menantang. Situasi ekonomi politik dunia masih akan diliputi berbagai persoalan yang akan berdampak pada perekonomian. Ekspansi Amerika Serikat serta lanjutan kebijakan proteksionisme, hingga dampak kenaikan komoditas minyak mentah serta konflik geopolitik yang terus terjadi berimbas langsung pada tatanan perekonomian dunia. Laporan *World Economic Outlook* oleh IMF memroyeksikan perekonomian dunia tahun 2026 tumbuh di angka 3,1%, atau terus melambat dari tahun-tahun sebelumnya[6]. Seluruh regional, baik negara-negara maju, negara berkembang, hingga Tiongkok dan India diprediksi mengalami perlambatan ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,4%[7], atau sedikit membaik dari realisasi tahun 2025 sebesar 5,11%[8]. Hal ini tak lepas dari beberapa fenomena, termasuk stabilisasi sektor keuangan yang mulai menguat pada awal 2026, ditandai dengan membaiknya sentimen pasar dan kembalinya arus modal asing.

Looking Ahead to Future Prospects

In 2026 and beyond, the national construction sector will continue to face significant challenges. The global political and economic landscape will remain fraught with various issues that will impact the economy. U.S. expansion, continued protectionist policies, and the impact of rising crude oil prices and ongoing geopolitical conflicts will directly affect the global economic order. The IMF's World Economic Outlook report projects global economic growth in 2026 at 3.1%, marking a continued slowdown from previous years[6]. All regions—including developed nations, developing countries, as well as China and India—are expected to experience economic slowdowns.

Amid these conditions, the Indonesian Government, through the 2026 State Budget Draft (RAPBN), targets Indonesia's economic growth at 5.4%[7], a slight improvement from the 2025 realization of 5.11%[8]. This is linked to several factors, including the stabilization of the financial sector, which began to strengthen in early 2026, marked by improved market sentiment and the return of foreign capital inflows.

[6]Real GDP Growth- International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CHN/IND

[7]Advertorial RAPBN 2026, Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Republik Indonesia, https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/3290efb9-0fa0-443d-b06d-90d89c5a70de?ext=.

2026 State Budget Advertorial, Finance Ministry of the Republic of Indonesia, Government of the Republic of Indonesia, https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/3290efb9-0fa0-443d-b06d-90d89c5a70de?ext=.

[8]Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026.
Statistics Indonesia (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.

Dalam RAPBN 2026, Pemerintah Indonesia menargetkan defisit APBN 2026 berada pada angka 2,48% hingga 2,68% dari PDB, lebih rendah dibandingkan realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari PDB. Meskipun dalam kenyataannya, realisasi defisit APBN pada awal Februari 2026 menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk dapat mendorong berbagai program nasional terkait kedaulatan pangan, energi dan ekonomi; termasuk infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).

In the 2026 RAPBN, the Indonesian Government targets the 2026 APBN deficit to be between 2.48% and 2.68% of GDP, lower than the realized 2025 APBN deficit of 2.92% of GDP. However, in reality, the realized APBN deficit as of early February 2026 is higher than the same period in the previous year. The Indonesian Government aims to drive various national programs related to food sovereignty, energy, and the economy, including infrastructure, particularly National Strategic Projects (PSN).

Normalisasi belanja infrastruktur pasca percepatan PSN, penyesuaian prioritas pembangunan, serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah akan berdampak pada sektor konstruksi cenderung tumbuh moderat. Selain itu, meningkatnya selektivitas pembiayaan dan kehati-hatian lembaga keuangan turut memengaruhi kecepatan realisasi proyek. Meskipun demikian, sektor konstruksi tetap memiliki prospek yang menjanjikan seiring berkelanjutannya PSN, pengembangan kawasan industri, proyek energi, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bendungan, dan pembangkit listrik.

The normalization of infrastructure spending following the acceleration of PSNs, adjustments to development priorities, and the government's limited fiscal space will lead the construction sector to grow moderately. Additionally, increased financing selectivity and the caution of financial institutions are affecting the pace of project implementation. Nevertheless, the construction sector remains promising, driven by the ongoing PSN, industrial zone development, energy projects, and the construction of basic infrastructure such as roads, ports, dams, and power plants.

Namun demikian, kami mencermati bahwa prospek tersebut tetap diwarnai oleh peningkatan risiko. Perubahan *outlook* Moody's menjadi Negatif pada awal 2026 telah meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit, termasuk pengetatan analisis risiko pada pembiayaan sektor konstruksi. Selain itu, potensi fluktuasi harga material bangunan global masih dapat menekan likuiditas proyek serta margin usaha. Dalam konteks tersebut, kami menilai bahwa keberhasilan Perusahaan pada tahun 2026 tidak semata ditentukan oleh volume perolehan proyek, melainkan oleh kualitas seleksi proyek, disiplin pengendalian biaya, pengelolaan portofolio yang sehat, serta konsistensi penerapan manajemen risiko yang *prudent*.

However, we note that these prospects remain overshadowed by rising risks. Moody's change of outlook to Negative in early 2026 has heightened banks' caution in extending credit, including stricter risk analysis for construction sector financing. Furthermore, potential fluctuations in global construction material prices could still strain project liquidity and business margins. In this context, we assess that the Company's success in 2026 will not be determined solely by the volume of project acquisitions, but rather by the quality of project selection, cost control discipline, sound portfolio management, and the consistent application of prudent risk management.

Direksi telah menetapkan tema strategi tahun 2026, yaitu "*Driving Construction Excellence to Achieve Financial Strength with Prudent Risk Management*". Dewan Komisaris memandang bahwa tema tersebut sejalan dengan kebutuhan PTPP untuk memperkuat ketahanan operasional dan struktur keuangan di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif dan selektif. Penguatan strategi *Back to Core* dengan fokus pada jasa konstruksi, penataan portofolio entitas anak dalam kelompok usaha, penerapan teknologi konstruksi seperti *Building Information Modeling* (BIM), serta implementasi *Lean Construction*, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, penguatan fungsi manajemen risiko dan tata kelola menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas pertumbuhan usaha.

The Board of Directors has established the 2026 strategic theme: "Driving Construction Excellence to Achieve Financial Strength with Prudent Risk Management." The Board of Commissioners views this theme as aligned with PTPP's need to strengthen operational resilience and financial structure amid increasingly competitive and selective industry dynamics. The reinforcement of the "Back to Core" strategy—with a focus on construction services, the restructuring of the portfolio of subsidiaries within the business group, the adoption of construction technologies such as Building Information Modeling (BIM), and the implementation of Lean Construction—is deemed an appropriate step to enhance productivity and efficiency. Additionally, strengthening risk management and corporate governance is crucial to maintaining the quality of business growth.

Dewan Komisaris juga mencermati bahwa strategi Perusahaan tahun 2026 telah mempertimbangkan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2045 serta kondisi makroekonomi dan kapasitas keuangan internal. Selain itu, kami juga melihat bahwa rencana kerja Perusahaan yang tertuang dalam RKAP 2026 telah mempertimbangkan proses konsolidasi dalam pembentukan Holding BUMN Karya yang masih dalam tahapan diskusi menuju proses konsolidasi yang dapat mengoptimalkan peran PTPP serta BUMN karya lainnya.

The Board of Commissioners also notes that the Company's 2026 strategy has considered the direction of national development outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for the 2025–2045 period, as well as macroeconomic conditions and internal financial capacity. Furthermore, we also observe that the Company's work plan outlined in the 2026 RKAP has taken into account the consolidation process in the formation of BUMN Karya Holding Company, which is still in the discussion phase, leading to a consolidation process that can optimize the role of PTPP and other state-owned construction enterprises.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan dukungan terhadap RKAP tahun 2026 yang telah disusun Direksi melalui proses kajian yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris akan terus melakukan pengawasan secara aktif dan konstruktif guna memastikan bahwa implementasi strategi berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Therefore, the Board of Commissioners supports the 2026 RKAP prepared by the Board of Directors through a comprehensive review process. In its implementation, the Board of Commissioners will continue to conduct active and constructive oversight to ensure that the strategy is implemented in accordance with the principles of prudence and good governance and is capable of creating sustainable value for shareholders and stakeholders.

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan Insan PTPP atas capaian kinerja dan keberhasilan pengelolaan tantangan sepanjang tahun 2025. Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi dan seluruh jajarannya dalam membangun hubungan yang selaras dengan Dewan Komisaris dan organ pendukungnya. Semoga keselarasan ini, bersama-sama dengan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi modal penting bagi perjalanan PTPP di masa-masa mendatang.

Closing

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors, the entire management team, and PTPP employees for their performance, achievements, and success in managing challenges throughout 2025. In particular, we extend our gratitude to the Board of Directors and its entire team for fostering harmonious relations with the Board of Commissioners and its supporting bodies. May this harmony, together with shareholders and all stakeholders, serve as a vital foundation for PTPP's journey in the years to come.

Jakarta, 27 April 2026
Jakarta, April 27, 2026

Atas nama Jajaran Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk
On behalf of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk



Dhony Rahajoe
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner



Flyover Lenteng Agung, Jakarta
Lenteng Agung Flyover, Jakarta



Ir. Novel Arsyad, MM.

Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi
The Board of Directors Report

PTPP terus memperkuat langkah transformasi bisnis dan fondasi keuangan Perseroan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Upaya ini akan membentuk figur yang tepat bagi perjalanan ke depan dalam membangun operasi dan bisnis yang berkelanjutan.

PTPP continues to strengthen its business transformation efforts and financial foundations as part of its commitment to ensuring long-term performance sustainability amid the evolving dynamics of the national construction industry. These efforts will lay the groundwork for the Company's future journey toward building sustainable operations and business practices.

Para Pemegang Saham, Investor,
dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,
Esteemed Shareholders, Investors, and Stakeholders,

Tugas penting manajerial adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, menghadapi seluruh dinamika dan tantangan yang ada, dan mampu melakukan penciptaan nilai di tengah itu semua. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan pengelolaan PTPP di sepanjang 2025 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang begitu dinamis dan langkah upaya yang telah dilakukan untuk membawa PTPP mampu tumbuh dengan fondasi yang cukup baik.

A key managerial responsibility is to optimize all available resources, navigate the existing dynamics and challenges, and create value amidst it all. Allow me to present PTPP's management report for 2025, which provides an overview of the highly dynamic conditions and the steps taken to ensure PTPP grows on a solid foundation.

Kondisi yang Dinamis dan Kebijakan Strategis Perusahaan serta Peran Direksi

Perekonomian global dan nasional memberikan pengaruh besar bagi sektor konstruksi yang dilandasi pada kapasitas dan kemampuan investasi. Volatilitas suku bunga, tekanan inflasi, serta dinamika geopolitik mendorong kenaikan biaya pembiayaan dan fluktuasi harga bahan baku. Hal ini menuntut pelaku usaha konstruksi untuk lebih disiplin dalam manajemen arus kas dan selektif dalam pengambilan proyek.

Di tingkat nasional, kebijakan dan fokus belanja pemerintah menjadi arah penentu. Prioritas pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional, hilirisasi industri, transisi energi, serta integrasi konektivitas infrastruktur dengan kawasan pertumbuhan ekonomi. Agenda ini sejalan dengan transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, telah cukup merumuskan pendekatan strategis untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian sebagai fondasi penting bagi proyek infrastruktur yang berkelanjutan, meskipun tekanan biaya pembiayaan tetap perlu diantisipasi.

Pasar konstruksi nasional juga masih menunjukkan tren yang cukup positif. Indonesia memiliki estimasi *addressable market* konstruksi lebih kurang Rp5.300 triliun untuk periode 2025-2029, dengan subsektor industrial, ketenagalistrikan, dan konektivitas menjadi kontributor utama. Hal ini menunjukkan bahwa peluang tetap terbuka, terutama pada proyek-proyek strategis dan sektor hilirisasi. Meskipun di sisi lain, besarnya nilai pasar ini menciptakan persaingan usaha yang cukup tinggi, yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan perusahaan konstruksi dari 186.534 perusahaan di 2024 tumbuh menjadi 199.006 perusahaan pada 2025. PTPP patut mewaspadai hal ini sebagai tantangan besar di masa mendatang[1].

Di samping itu, fenomena populasi dan urbanisasi telah mendorong kebutuhan akan hunian baik vertikal maupun hunian tapak, infrastruktur transportasi massal dan *Transit-Oriented Development* (TOD). Tren ini memperkuat relevansi pengembangan gedung dan infrastruktur konektivitas di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dynamic Conditions, Corporate Strategic Policies, and the Role of the Board of Directors

The global and national economies have a significant impact on the construction sector, which relies on investment capacity and capability. Interest rate volatility, inflationary pressures, and geopolitical dynamics drive up financing costs and cause fluctuations in raw material prices. This requires construction companies to be more disciplined in cash flow management and selective in project selection.

At the national level, government policies and spending priorities serve as key determinants. Development priorities focus on strengthening national resilience, industrial downstreaming, the energy transition, and integrating infrastructure connectivity with economic growth zones. This agenda aligns with the economic transformation outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for the 2025–2029 period. The Indonesian Government, with the support of all stakeholders, has formulated a strategic approach to maintain economic stability as a crucial foundation for sustainable infrastructure projects. However, rising financing costs must still be anticipated.

The national construction market also continues to show a fairly positive trend. Indonesia has an estimated addressable construction market of approximately Rp5,300 trillion for the 2025–2029 period, with the industrial, power, and connectivity subsectors as the main contributors. This indicates that opportunities remain open, particularly in strategic projects and the downstream sector. On the other hand, the sheer size of this market creates intense business competition, marked by significant growth in the number of construction companies—from 186,534 in 2024 to 199,006 in 2025. PTPP should be mindful of this as a major challenge in the future[1].

Furthermore, population growth and urbanization have driven the demand for both vertical and ground-level housing, mass transit infrastructure, and Transit-Oriented Development (TOD). This trend reinforces the relevance of building development and connectivity infrastructure in developing countries, including Indonesia.

[1]Badan Pusat Statistik, Konstruksi dalam Angka 2025, Volume 14 2025.
Statistics Indonesia, 2025 Construction in Figures, Volume 14 2025.

Sejalan dengan hal itu, industri konstruksi telah memasuki fase orientasi pada sosial dan lingkungan, sebagaimana diamantkan dalam Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Sektor konstruksi telah menghadapi tekanan publik untuk dapat mengurangi jejak karbon, meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi praktik ramah lingkungan pada berbagai produk konstruksi.

In line with this, the construction industry has entered a phase focused on social and environmental considerations, as stipulated in the Public Works and Housing (PUPR) Minister Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 2021 on Guidelines for Sustainable Construction. The construction sector has faced public pressure to reduce its carbon footprint, improve energy efficiency, and adopt environmentally friendly practices across various construction products.

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) menekankan penguatan tata kelola, manajemen risiko terintegrasi, serta penyehatan keuangan BUMN Karya. Hal ini membentuk lanskap industri yang lebih *prudent* dan berbasis disiplin keuangan. Ini juga sejalan dengan disrupsi teknologi yang dapat menciptakan aspek tata kelola yang lebih baik, pengelolaan risiko yang lebih *prudent*, serta efisiensi keuangan. Adopsi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), pemanfaatan *Building Information Modeling* (BIM), digitalisasi proyek, serta otomasi konstruksi menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan hal tersebut.

Furthermore, the Indonesian Government, through the SOE Regulatory Agency (BP BUMN), emphasizes strengthening governance, integrated risk management, and the financial soundness of BUMN Karya. This shapes a more prudent and financially disciplined industrial landscape. It also aligns with technological disruption, which can foster better governance, more prudent risk management, and greater financial efficiency. The adoption of Artificial Intelligence (AI), the use of Building Information Modeling (BIM), project digitization, and construction automation are key factors in achieving these goals.

Dari berbagai aspek tersebut, baik peran sosial, dampak lingkungan, maupun tekanan pada tata kelola, dapat dilihat bahwa peran pendekatan *Environment, Social & Governance* (ESG) bukan lagi sekedar pilihan, melainkan prasyarat dalam mengakses pendanaan dan menjaga daya saing.

From these various aspects—including social responsibility, environmental impact, and governance pressures—it is evident that the Environment, Social & Governance (ESG) approach is no longer merely an option but a prerequisite for accessing funding and maintaining competitiveness.

Menghadapi dinamika tersebut, PTPP menetapkan strategi tahun 2025 dengan tema "*Strengthening The Core, Managing Business Portfolios Risk*".

In response to these dynamics, PTPP has established its 2025 strategy under the theme "Strengthening the Core, Managing Business Portfolios, Risk."

Kebijakan Strategis PTPP Tahun 2025
PTPP's Strategic Policies for 2025



Kami memandang bahwa tahun 2025 bukan hanya tentang pertumbuhan, namun bagaimana membangun fondasi yang lebih kuat. Dengan pendekatan *Back to Core* dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, PTPP berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan global, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, kami optimis bahwa sektor infrastruktur dan konstruksi Indonesia tetap memiliki prospek positif, dengan catatan bahwa setiap peluang harus dikelola secara selektif, disiplin, dan berbasis manajemen risiko yang kuat.

We believe that 2025 is not just about growth, but about building a stronger foundation. With the "Back to Core" approach in the 2025-2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP), PTPP is committed to sustainable growth, adaptability to global changes, and alignment with national development priorities. In this context, we are optimistic that Indonesia's infrastructure and construction sectors continue to hold positive prospects, provided that every opportunity is managed selectively, with discipline, and grounded in robust risk management.

Secara garis besar, strategi PTPP tahun 2025 difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama:

a. **Penguatan Bisnis Inti Konstruksi**
   PTPP kembali menegaskan fokusnya pada bisnis inti konstruksi, khususnya pada segmen gedung, infrastruktur, dan EPC. Pendekatan ini dilakukan dengan prinsip *selective bidding*, peningkatan kualitas kontrak, serta penekanan pada margin dan arus kas yang sehat. Untuk itu, kami memprioritaskan proyek yang memiliki profil risiko terukur, didukung pendanaan yang jelas, dan selaras dengan agenda nasional yang berfokus pada hilirisasi, ketahanan energi, dan konektivitas.
b. **Pengelolaan Portofolio Investasi secara *Prudent***
   Kunci penting organisasi yang ideal adalah kemampuannya untuk bergerak secara lincah dengan beban yang mampu diminimalisir dengan baik. Untuk itu, kami berfokus pada divestasi aset portofolio sebagai bagian dari upaya membentuk organisasi yang lincah, optimalisasi kinerja entitas anak, serta penurunan tekanan *leverage*. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan struktur permodalan dan peningkatan likuiditas secara konsolidasian kelompok usaha PTPP.
c. **Penguatan Manajemen Risiko dan Tata Kelola**
   Aspek fundamental dari upaya penciptaaan nilai jangka panjang adalah kesadaran tentang risiko dan bagaimana PTPP mampu mengelola risiko yang ada. Dalam rangka hal tersebut, kami menekankan pentingnya penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) berbasis proyek, pengendalian biaya dan *cash flow*, serta evaluasi lelang dan kontrak.
d. **Peningkatan Daya Saing Jangka Panjang**
   Dengan mengintegrasikan prinsip ESG, pemanfaatan BIM, ERP SAP, dan *operational excellence*, kami tidak hanya berupaya menjaga kinerja jangka pendek, namun juga memperkuat *positioning* sebagai kontraktor yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan.

Broadly speaking, PTPP's 2025 strategy is centered on three main pillars:

a. **Strengthening the Core Construction Business**
   PTPP reaffirms its focus on the core construction business, particularly in the building, infrastructure, and EPC segments. This approach is implemented through selective bidding, improved contract quality, and an emphasis on healthy margins and cash flow. To that end, we prioritize projects with a measurable risk profile, clear funding, and alignment with the national agenda focused on downstreaming, energy security, and connectivity.
b. **Prudent Investment Portfolio Management**
   A key characteristic of an ideal organization is its ability to operate with agility while effectively minimizing operational burdens. To this end, we focus on divesting portfolio assets as part of our efforts to build an agile organization, optimize subsidiary performance, and reduce leverage pressure. This step is part of our efforts to strengthen the capital structure and enhance liquidity across the PTPP business group.
c. **Strengthening Risk Management and Governance**
   A fundamental aspect of creating long-term value is awareness of risks and how PTPP manages existing risks. In this regard, we emphasize the importance of strengthening project-based Enterprise Risk Management (ERM), cost and cash flow controls, as well as tender and contract evaluation.
d. **Enhancing Long-Term Competitiveness**
   By integrating ESG principles, leveraging BIM, SAP ERP, and advancing operational excellence, we not only strive to maintain short-term performance but also to strengthen our positioning as an innovative, superior, and sustainable contractor.

Salah satu cerminan penting dari keberhasilan pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan terlihat dari pengelolaan permodalan dalam rangka memenuhi modal kerja maupun belanja modal baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti kita ketahui, model bisnis sektor

One key indicator of the Company's successful operational and business management is its capital management, which meets both working capital and capital expenditure needs, whether short- or long-term. As we know, the construction sector's business model is generally capital-

konstruksi umumnya merupakan padat modal atau *capital intensive* yang membutuhkan investasi awal yang besar khususnya untuk aset tetap, yang menjadikannya rentan terhadap utang tinggi dan memerlukan modal kerja yang besar. Di tahun 2025, dengan modal dari utang berbasis bunga yang cukup besar, PTPP memandang struktur modal sebagai tantangan yang harus menemukan rumusan solusi cepat untuk dapat menjamin kelangsungan usaha dan tidak membebani di masa mendatang.

intensive, requiring significant initial investment—particularly for fixed assets—which makes it vulnerable to high debt and necessitates substantial working capital. By 2025, with a significant amount of interest-bearing debt, PTPP views its capital structure as a challenge that requires a swift solution to ensure business continuity and avoid future burdens.

Dalam menjalankan berbagai kebijakan dan pendekatan strategis di atas, kami selaku Direksi berperan sentral dalam menyusun, mengawal, memberikan arahan, dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan atas kebijakan yang diambil. Dalam perjalanannya, kami memiliki rapat koordinasi internal dengan perangkat organisasi yang ada, sebagai forum yang dapat memberikan masukan bagi Direksi selaku manajemen puncak untuk mengambil keputusan atas setiap kebijakan yang diambil.

In implementing the various policies and strategic approaches outlined above, we, as the Board of Directors, play a central role in formulating, supervising, providing guidance, and taking full responsibility for all decisions regarding the policies adopted. Throughout this process, we hold internal coordination meetings with existing organizational units, serving as a forum for providing input to the Board of Directors (the top management) in making decisions on the policies adopted.

Tak hanya itu, kami juga memiliki rapat gabungan bersama Dewan Komisaris yang berfungsi mengevaluasi setiap keputusan yang diambil dan mendiskusikan keputusan atas kebijakan yang diambil. Rapat gabungan ini menjadi begitu penting terutama karena Dewan Komisaris memiliki sudut pandang yang kompeten dan dapat memberikan arahan serta pandangan yang berkualitas dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Secara khusus, PTPP telah memiliki mekanisme tata kelola yang mengatur pembagian pengambilan keputusan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Mekanisme ini penting, mengingat independensi organ menjadi salah satu aspek mendasar dalam proses pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Furthermore, we hold joint meetings with the Board of Commissioners to evaluate every decision and discuss policy. These joint meetings are particularly important because the Board of Commissioners brings valuable perspectives and can provide high-quality guidance and insights to the decision-making process. Specifically, PTPP has established a governance mechanism that regulates the division of decision-making authority between the Board of Commissioners and the Board of Directors. This mechanism is crucial, given that the independence of these bodies is a fundamental aspect of the Company's overall management process.

Pencapaian Target

Kinerja 2025 mencerminkan tekanan yang signifikan terhadap Perusahaan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan *Audited* 2025. Kami memandang fase *challenging* ini sebagai bagian dari proses penataan ulang fondasi bisnis agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat ke depannya. Hal ini juga sejalan dalam mendukung upaya Danantara dalam melakukan *governance reset* untuk perkuatan fondasi keuangan menuju proses rasionalisasi jumlah BUMN.

Achievement of Targets

The 2025 performance reflects significant pressure on the Company, as reflected in the 2025 Audited Financial Statements. We view this challenging phase as part of the process of restructuring the business foundation to provide a basis for more informed decision-making going forward. This also aligns with Danantara's governance reset efforts to strengthen its financial foundations and rationalize the number of SOEs.

Namun demikian, ditengah tantangan ini, kami sampaikan bahwa Perusahaan telah memperoleh 24,9 triliun kontrak baru yang akan menjadi *revenue drivers* terutama di tahun 2026. Pareto terbesar kontrak baru yang didapat di tahun 2025 diantaranya Gedung 25,03%; Jalan Jembatan 15,80%; Smelter & Pertambangan 12,80%; Ketenagalistrikan 10,76%; Pelabuhan 10,15%; dengan 25,47% selebihnya tersebar di sektor lainnya.

Nevertheless, amidst these challenges, we report that the Company has acquired Rp24.9 trillion in new contracts, which will be key revenue drivers, especially in 2026. The largest Pareto positions for new contracts secured in 2025 include Buildings (25.03%), Roads and Bridges (15.80%), Smelters & Mining (12.80%), Electricity (10.76%), Ports (10.15%), with the remaining 25.47% spread across other sectors.

Beberapa proyek *prestigous* yang diperoleh di kontrak baru 2025 adalah PLTGU Batam dengan kontrak senilai Rp2,68 triliun; New Priok East Access Fase 2 senilai Rp2,33

Some prestigious projects awarded in the 2025 new contracts are the Batam Gas-Powered Power Plant, valued at Rp2.68 trillion; New Priok East Access Phase 2, valued

triliun; Itacha 2 for Hauling Road senilai Rp1,93 triliun; Tol Kataraja Fase 2 senilai Rp1,36 triliun dan Mandiri Financial Centre di PIK senilai Rp878 miliar.

at Rp2.33 trillion; Itacha 2 for Hauling Road, valued at Rp1.93 trillion; Kataraja Toll Road Phase 2, valued at Rp1.36 trillion; and Mandiri Financial Center in PIK, valued at Rp878 billion.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi serta Upaya Solusi yang Dilakukan

Kami menemui sejumlah tantangan yang dapat berdampak pada operasi dan bisnis Perusahaan, di mana berbagai tantangan ini secara umum ditemui dalam seluruh pelaku usaha di sektor konstruksi.

Pertama, dinamika kondisi perekonomian dan biaya pembiayaan. Kondisi suku bunga yang relatif tinggi, volatilitas nilai tukar, serta tekanan likuiditas di pasar mempengaruhi biaya pendanaan dan arus kas industri konstruksi. Asumsi makro 2025 menunjukkan suku bunga dan nilai tukar masih menjadi variabel sensitif bagi industry ini. Menghadapi hal ini, kami berupaya melakukan beberapa langkah mitigasi, seperti pengetatan pengelolaan arus kas dan modal kerja, prioritisasi proyek dengan kepastian pendanaan, serta optimalisasi divestasi aset portofolio untuk memperkuat likuiditas Perusahaan.

Kedua, adanya perubahan arah prioritas belanja Pemerintah Indonesia yang berimbas pada ketersediaan nilai pekerjaan konstruksi dari kebutuhan pemerintah. Tantangan ini juga berhubungan dengan persaingan industri yang berdampak pada tekanan margin, di mana persaingan pada *pipeline* proyek yang relatif sama dan agresifnya kompetisi harga yang pada akhirnya menggerus margin. Terutama dengan nilai pekerjaan konstruksi dari proyek pemerintah, Perusahaan menghadapi persaingan harga yang yang dapat mengurangi margin.

Tantangan ini berhasil kami mitigasi dengan serangkaian upaya, seperti penyelarasan portofolio proyek dengan agenda nasional. Selain itu, fokus pada bisnis inti, yaitu sektor gedung, infrastrukutur, dan EPC, menjadi strategi tepat yang dapat menciptakan daya saing Perusahaan yang lebih baik. Kami juga berupaya mengoptimalkan *operational excellence* dan efisiensi biaya dalam rangka meningkatkan profil profitabilitas dari setiap proyek yang dikerjakan.

Tantangan lainnya dihadapi dari struktur permodalan dan *leverage* yang dimiliki Perusahaan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sektor konstruksi umumnya merupakan sektor padat modal atau *capital intensive* yang membutuhkan kas dan permodalan yang kuat. Untuk itu, kami melakukan berbagai pendekatan agar aspek permodalan tidak menjadi jebakan jangka Panjang yang justru akan membawa Perusahaan kepada penurunan nilai di masa depan. Kami terus melakukan upaya divestasi pada berbagai aset portofolio, sembari tentunya melakukan penguatan ekuitas dengan terus memperbaiki profitabilitas dan manajemen aset.

Constraints and Challenges Faced, and Efforts to Address Them

We have encountered several challenges that could impact the Company's operations and business, which are common across the construction sector.

First, the dynamics of economic conditions and financing costs. Relatively high interest rates, exchange rate volatility, and market liquidity pressures affect the construction industry's financing costs and cash flow. The 2025 macroeconomic assumptions indicate that interest rates and exchange rates remain sensitive variables for this industry. In response, we are implementing several mitigation measures, such as tightening cash flow and working capital management, prioritizing projects with secured funding, and optimizing the divestment of portfolio assets to strengthen the Company's liquidity.

Second, there has been a shift in the Indonesian Government's spending priorities, which has impacted the availability of construction contracts from government projects. This challenge is also linked to industry competition, which has led to margin pressure; specifically, competition for a relatively limited project pipeline and aggressive price competition have ultimately eroded margins. Particularly regarding construction contracts from government projects, the Company faces price competition that can reduce margins.

We have successfully mitigated these challenges through a series of initiatives, including aligning our project portfolio with the national agenda. Additionally, focusing on our core businesses—namely the building, infrastructure, and EPC sectors—has proven to be an effective strategy for enhancing the Company's competitiveness. We are also striving to optimize operational excellence and cost efficiency to improve the profitability of every project we undertake.

Another challenge stems from the Company's capital structure and leverage. As previously explained, the construction sector is generally capital-intensive, requiring strong cash flow and capital. Therefore, we have adopted various approaches to ensure that capital-related issues do not become a long-term trap that could lead to a decline in the Company's value. We continue to pursue divestments of various portfolio assets while simultaneously strengthening equity by continuously improving profitability and asset management.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kunci penting dalam melakukan penciptaan nilai jangka panjang adalah membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), yang diharapkan mampu menciptakan hal fundamental dalam praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

PTPP telah mengembangkan praktik penerapan GCG cukup lama, meskipun berbagai kendala dan tantangan ditemui di setiap perjalanannya. Dari berbagai pembelajaran yang kami dapatkan, kami sangat menyadari bahwa GCG harus terintegrasi dalam pendekatan strategis Perusahaan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh Perusahaan adalah penguatan manajemen risiko dan tata kelola, yaitu penekanan pentingnya penguatan ERM berbasis proyek, pengendalian biaya dan *cash flow*, serta evaluasi lelang dan kontrak.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut, PTPP membentuk organisasi yang tangguh, mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, dan mampu mengambil keputusan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar penting, baik dalam desain proyek, perencanaan, hingga keuangan dan pelaporan.

Evaluasi atas penerapan GCG juga terus kami lakukan dalam rangka memantau dan meningkatkan penerapan GCG pada praktik terbaik. PTPP telah melakukan penilaian penerapan GCG dengan metode pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dilakukan oleh pihak independen. Atas penilaian yang dilakukan di tahun 2025 untuk penerapan GCG tahun buku 2024, PTPP memeroleh nilai akhir 101,69 dengan kualifikasi level 5 "*Leadership in Corporate Governance*". Angka ini meningkat cukup jauh dari tahun sebelumnya dengan perolehan nilai akhir sebesar 96,73, dan jauh di atas rata-rata CG *Score* tingkat 1 BigCap100 yang nilainya sebesar 82,59. Kami sungguh bersyukur, dan berkomitmen untuk tidak berpuas diri dan akan terus meningkatkan level kompetensi kami dalam penerapan GCG.

Di luar penilaian yang ada, kami menyadari hal fundamental dalam pelaksanaan prinsip bisnis beretika adalah penerapan etika bisnis yang dilandasi pada nilai integritas. Hal-hal yang terjadi pada beberapa waktu terakhir menjadi evaluasi bagi kami dan menjadi masukan bagi kami untuk terus berbenah, memperkuat nilai-nilai budaya korporasi, membentuk etika bisnis yang akan menciptakan pengelolaan operasi dan bisnis berbasis akuntabilitas, dan pada akhirnya diharapkan mampu membentuk pribadi Insan PTPP yang berintegritas. Melalui

Progress in Corporate Governance Implementation

A key element in creating long-term value is building a strong and sustainable business foundation. One crucial aspect of this is the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which is expected to establish the fundamental principles of ethical and sustainable business practices.

PTPP has been developing GCG implementation practices for quite some time, although various obstacles and challenges have been encountered along the way. From the lessons we have learned, we are fully aware that GCG must be integrated into the Company's strategic approach. As mentioned above, one of the strategic policies adopted by the Company is the strengthening of risk management and governance, specifically emphasizing the importance of project-based ERM, cost and cash flow controls, and tender and contract evaluations.

To implement these policies, PTPP has established a robust organization capable of addressing existing issues and making decisions effectively and efficiently. In this regard, the utilization of information technology serves as a key pillar, spanning project design, planning, and financial management and reporting.

We also continue to evaluate the implementation of GCG to monitor and improve its application in line with best practices. PTPP has assessed GCG implementation using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) methodology, carried out by an independent party. Based on the 2025 assessment of the 2024 fiscal year's GCG implementation, PTPP achieved a final score of 101.69, qualifying at Level 5: "Leadership in Corporate Governance." This figure represents a significant increase from the previous year's final score of 96.73 and is well above the average CG Score of 82.59 for Level 1 BigCap100 companies. We are truly grateful and remain committed to not resting on our laurels, continuing to enhance our competence in implementing GCG.

Beyond the existing assessment, we recognize that the fundamental aspect of implementing ethical business principles is applying business ethics grounded in the value of integrity. Developments that have occurred in recent times have served as an evaluation and valuable input for us to continue improving, strengthening corporate cultural values, and fostering business ethics that will create operations and business management based on accountability, ultimately aiming to cultivate PTPP personnel of integrity. Through this commitment,

komitmen ini, kami akan berupaya untuk terus mendorong nilai integritas sebagai modal mendasar bagi Perusahaan untuk tumbuh lebih baik di masa-masa mendatang.

we will continue to promote the value of integrity as the fundamental capital for the Company to grow better in the years to come.

Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Bisnis Perusahaan

Salah satu hal mendasar dalam membentuk bisnis yang beretika diwujudkan melalui keberlanjutan bisnis. PTPP telah menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Dalam Laporan Keberlanjutan tersebut, Perusahaan berupaya memberikan gambaran tentang pengelolaan risiko keberlanjutan, termasuk diantaranya berbagai risiko eksternal yang mempengaruhi bisnis Perusahaan seperti risiko dinamika perekonomian, risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko lainnya. Meskipun, Perusahaan belum memperhitungkan secara implikatif keuangan atas dampak risiko perubahan iklim, khususnya terkait dampak yang akan diantisipasi ke depan. Hal ini menjadi komitmen ke depan bagi Manajemen dan seluruh jajaran untuk dapat menyusun dampak risiko perubahan iklim dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan maupun pemegang saham.

Integrating Sustainability into the Company's Business

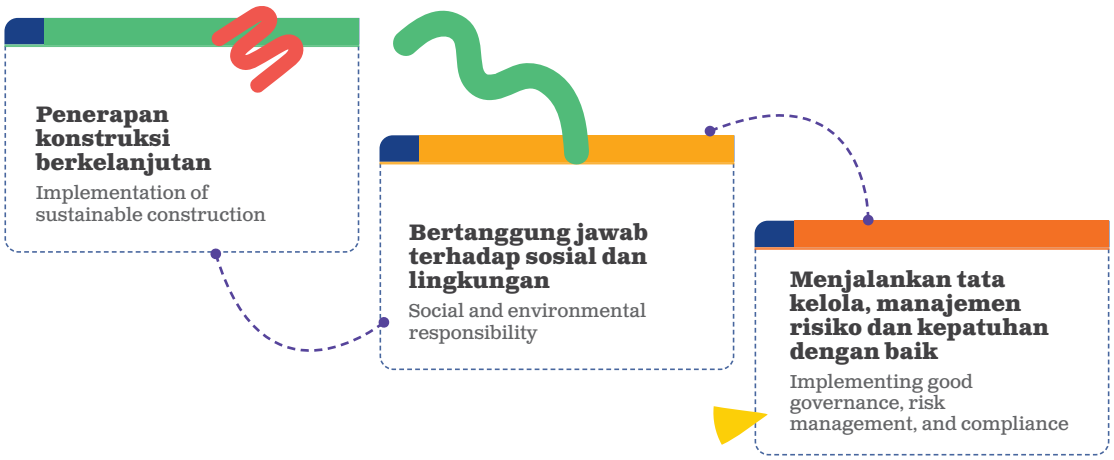
One of the fundamental aspects of building an ethical business is realized through business sustainability. PTPP has prepared a Sustainability Report as an integral part of this Annual Report. In the Sustainability Report, the Company seeks to provide an overview of sustainability risk management, including various external risks affecting the Company's business, such as economic dynamics risks, market risks, interest rate risks, and other risks. However, the Company has not yet conducted a financial impact assessment of climate change risks, particularly regarding anticipated future impacts. This represents a future commitment for Management and all staff to assess the impacts of climate change risks and report them to stakeholders and shareholders.

Namun demikian, kami telah memiliki pendekatan strategis terkait keberlanjutan dan ESG yang dirumuskan dalam 3 (tiga) prinsip utama.

Nevertheless, we have a strategic approach to sustainability and ESG, formulated into three main principles.

3 (tiga) Prinsip Utama Komitmen Penerapan ESG PTPP

Three Key Principles of PTPP's Commitment to ESG Implementation



Dari komitmen dan prinsip tersebut, PTPP telah menyusun *roadmap* ESG dan target ke depan untuk berbagai aspek keberlanjutan yang akan dikelola, termasuk diantaranya pembentukan Komite ESG. Lebih rinci tentang hal ini dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Based on these commitments and principles, PTPP has developed an ESG roadmap and future targets for various sustainability aspects to be managed, including the establishment of an ESG Committee. Further details on this can be found in the Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.

Susunan Direksi

Sepanjang tahun 2025 PTPP tidak melakukan perubahan susunan Direksi. Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sama, yaitu:

- Direktur Utama: Ir. Novel Arsyad, MM.
- Direktur Strategi Korporasi dan HCM: I Gede Upeksa Negara, S. T.
- Direktur Keuangan: Agus Purbianto, SE, Ak., MM.
- Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Ir. Yul Ari Pramuraharjo, M.Si.
- Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa, S.T., MM.
- Direktur Manajemen Risiko dan Legal Ing. Tommy Wiranata Anwar, M.Sc., CRMP., CRGP.

Tidak terdapat perubahan susunan Direksi per 31 Desember 2025 dan hingga Laporan ini dipublikasikan.

Prospek dan Proyeksi ke Depan

Tahun 2026 diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan kondisi tahun 2025. Sektor konstruksi masih akan sangat dipengaruhi oleh iklim investasi dan perekonomian yang tidak menentu. Di tengah tantangan yang masih akan terjadi, kami menyambut baik gagasan tentang konsolidasi BUMN Karya yang diharapkan akan mampu menyelaraskan kompetensi BUMN karya dengan perkembangan konstruksi nasional serta kebutuhan proyek pemerintah terkait infrastruktur maupun Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsolidasi dan penyelarasan ini juga akan berdampak positif pada kapasitas dan spesialisasi BUMN karya, yang pada akhirnya akan memberikan daya dorong bagi kesehatan keuangan masing-masing entitas.

Terlepas dari proses konsolidasi yang masih terus berjalan, PTPP akan melanjutkan strategi utama kembali ke bisnis inti di bidang konstruksi dan EPC dengan tema 2026 "*Driving Construction Excellence to Achieve Financial Strength with Prudent Risk Management*". Kami akan terus berupaya meningkatkan pangsa pasar proyek infrastruktur dan gedung, baik dari sektor BUMN, pemerintah, maupun swasta. Kami juga akan berfokus pada proyek dengan sumber dana yang terjamin, serta partisipasi selektif dengan keahlian pada sektor EPC.

Dalam pengelolaan portofolio, Perusahaan akan terus melakukan upaya divestasi dan restrukturisasi entitas anak dan asosiasi dalam rangka menurunkan level *leverage*. Kami juga akan terus memperkuat manajemen risiko dalam rangka pengelolaan portofolio aset yang *prudent*. Di samping itu, kami akan terus melakukan *streamlining* portofolio melalui optimalisasi bisnis yang mendukung bisnis inti Perusahaan.

Board of Directors Composition

Throughout 2025, PTPP made no changes to the composition of the Board of Directors. Consequently, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, and December 31, 2025, remains the same, namely:

- President Director: Ir. Novel Arsyad, M.M.
- Director of Corporate Strategy and HCM: I Gede Upeksa Negara, S.T.
- Director of Finance: Agus Purbianto, SE, Ak., M.M.
- Director of Infrastructure Operations: Ir. Yul Ari Pramuraharjo, M.Si.
- Director of Building Operations: Yuyus Juarsa, S.T., M.M.
- Director of Risk Management and Legal: Ing. Tommy Wiranata Anwar, M.Sc., CRMP., CRGP.

There have been no changes in the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, and up to the publication of this Report.

Outlook and Projections

The year 2026 is expected to be not much different from 2025. The construction sector will still be heavily influenced by an uncertain investment climate and economy. Amid ongoing challenges, we welcome the idea of consolidating BUMN Karya, which is expected to align their competencies with national construction developments and the needs of government infrastructure projects, as well as National Strategic Projects (PSN). This consolidation and alignment will also enhance the capacity and specialization of BUMN Karya, ultimately boosting the financial health of each entity.

Regardless of the ongoing consolidation process, PTPP will continue its core strategy of returning to its core business in construction and EPC under the 2026 theme "Driving Construction Excellence to Achieve Financial Strength with Prudent Risk Management." We will continue to strive to increase our market share in infrastructure and building projects across the SOE, government, and private sectors. We will also focus on projects with guaranteed funding sources and selective participation, leveraging our expertise in the EPC sector.

In portfolio management, the Company will continue to pursue divestments and the restructuring of subsidiaries and associates to reduce leverage levels. We will also continue to strengthen risk management to ensure prudent asset portfolio management. Additionally, we will continue to streamline the portfolio through business optimization that supports the Company's core business.

Pada level korporasi sebagai strategi *enablers*, Perusahaan akan berfokus pada penyehatan keuangan dan peningkatan profitabilitas, penguatan manajemen risiko secara komprehensif, pengembangan organisasi yang lincah serta mendukung inklusi gender, mengedepankan inovasi teknologi dan digitalisasi korporasi, serta meningkatkan implementasi ESG guna mempermudah akses kepada pembiayaan hijau dengan bunga yang lebih kompetitif.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam RJPP 2025-2029 PTPP berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan global, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Untuk dapat mencapai visi "Menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat", PTPP menyusun *framework strategy* yang berisikan visi sebagai hal yang ingin dicapai, tujuan strategis dan metrik utama sebagai ukuran kuantitatif dari visi yang ada, serta pilar strategis yang akan dilakukan agar dapat mencapai visi yang diinginkan. Perencanaan jangka menengah ini diharapkan mampu memberikan jaminan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas fokus kami dalam membangun bisnis yang memiliki penciptaan nilai jangka panjang.

At the corporate level, as strategic enablers, the Company will focus on financial soundness and profitability improvement, comprehensive risk management, developing an agile organization that supports gender inclusion, prioritizing technological innovation and corporate digitalization, and enhancing ESG implementation to facilitate access to green financing at more competitive interest rates.

As stated above, in the 2025-2029 RJPP, PTPP is committed to sustainable growth, adaptation to global changes, and alignment with national development priorities. To achieve the vision of "to be an innovative, superior, and sustainable contractor of first choice supported by sound finance," PTPP has developed a strategic framework that includes the vision as the desired outcome, strategic objectives, and key metrics as quantitative measures of the vision, as well as strategic pillars to be implemented to achieve the desired vision. This medium-term plan is expected to reassure shareholders and all stakeholders that we remain focused on building a business that creates long-term value.

Akhir Kata

Atas seluruh keberhasilan PTPP dalam mengarungi tahun 2025 yang penuh tantangan, izinkan saya mewakili Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, juga kepada para pemegang saham, regulator, para pemangku kepentingan, serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Kami berkomitmen untuk dapat mewujudkan ketahanan dan ketangguhan operasi dan bisnis Perusahaan di masa-masa mendatang, yang terutama diperoleh dari kebersamaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sektor konstruksi yang sehat, berkualitas, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Closing Remarks

In light of all of PTPP's successes in navigating the challenging year of 2025, allow me, on behalf of the Board of Directors, to express our respect and gratitude to the Board of Commissioners, as well as to our shareholders, regulators, stakeholders, and the entire management team and employees, for the excellent cooperation that has been established. We are committed to ensuring the resilience and robustness of the Company's operations and business in the years ahead, primarily by collaborating with all stakeholders to foster a healthy, high-quality construction sector that contributes to the nation's economic growth.

Jakarta, 27 April 2026
Jakarta, April 27, 2026

Atas nama Direksi dan Seluruh Jajaran PT PP (Persero) Tbk
On behalf of the Board of Directors and Management of PT PP (Persero) Tbk



Novel Arsyad
Direktur Utama
President Director



PLTMGU Lombok Peaker 140MW, Nusa Tenggara Barat
Lombok Peaker 140MW Gas Engine and Steam Power Plant, West Nusa Tenggara

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025

Responsibility for 2025 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declared that all of the information presented in this Annual Report of PT PP (Persero) Tbk Year 2025 have been written comprehensively and that we shall assume full responsibilty for the accuracy of this Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 April 2026
Jakarta, April 27, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Dhony Rahajoe
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner



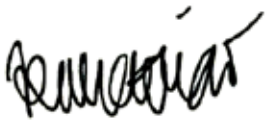
Istiono
Komisaris Independen
Independent Commissioner



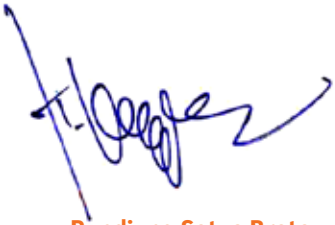
Jaya Kesuma
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Ernadhi Sudarmanto
Komisaris
Commissioner



Hedy Rahadian
Komisaris
Commissioner



Pundjung Setya Brata
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declared that all of the information presented in this Annual Report of PT PP (Persero) Tbk Year 2025 have been written comprehensively and that we shall assume full responsibilty for the accuracy of this Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 April 2026
Jakarta, April 27, 2026

Direksi
Board of Directors

Novel Arsyad
Direktur Utama
President Director

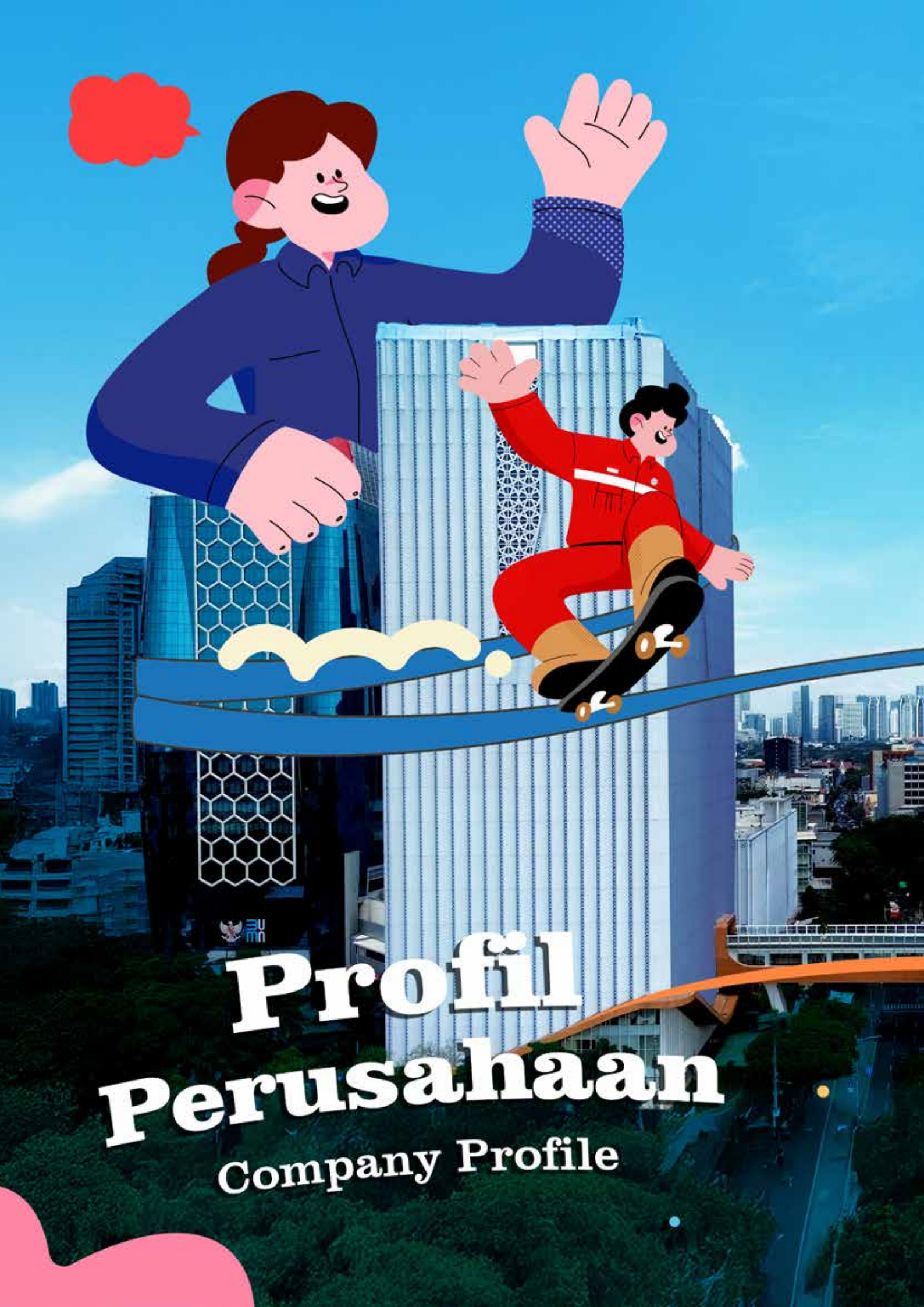
Agus Purbianto
Direktur Keuangan
Director of Finance

I Gede Upeksa Negara
Direktur Strategi Korporasi dan HCM
Director of Corporate Strategy and HCM

Tommy Wiranata Anwar
Direktur Manajemen Risiko dan Legal
Director of Risk Management and Legal

Yuyus Juarsa
Direktur Operasi Bidang Gedung
Director of Building Operations

Yul Ari Pramuraharjo
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
Director of Infrastructure Operations



Profil Perusahaan

Company Profile


PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
BSI



Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk atau disingkat PT PP (Persero) Tbk
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk or abbreviated as PT PP (Persero) Tbk

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

26 Agustus 1953
August 26, 1953

Tanggal Beroperasi
Date of Operation

26 Agustus 1953
August 26, 1953

Domisili
Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Informasi Perubahan Nama
Information on Name Change

1971	1961	1953
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan	Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan	NV Pembangunan Perumahan

Status Badan Hukum
Legal Entity Status

- Perseroan Terbatas (PT) | Limited Liability Company (PT)
- Perusahaan Terbuka (Tbk) | Public Company (Tbk)
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | State-Owned Enterprise (SOE)

Dasar Hukum Pembentukan
Legal Basis of Incorporation

Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 249 tanggal 4 Juni 1974.

Deed No. 78 dated March 15, 1973, made before the Notary Kartini Muljadi and obtained approval by the Justice Minister of the Republic of Indonesia No. Y.A.5.105/2 dated March 30, 1974, and was announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 249 dated June 4, 1974.

Bidang Usaha
Line of Business

- Konstruksi (Gedung, Sipil/Infrastruktur, EPC, Spesialis, *Plant* dan Peralatan)
- Investasi (Infrastruktur, Properti, dan Energi)
- Construction (Building, Civil/Infrastructure, EPC, Specialist, Plant, and Equipment)
- Investment (Infrastructure, Property, and Energy)

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp2.450.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid Capital

Rp619.989.735.400,-

Kepemilikan Saham
Shareholding

0,51% + 1 Saham Seri A Dwiwarna (1 Series A Dwiwarna Shares)	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia
50,49%	PT Danantara Asset Management (Persero)
0,03%	Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) PP Shareholder Employee Cooperation (KKPSPP)
48,74%	Masyarakat (Masing-masing kurang dari 5%) Public (Each less than 5%)
0,23%	Saham *Treasury* Treasury Stock

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Taxpayer Identification Number (NPWP)
01.001.613.7-093.000

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Business License Number (NIB)
8120410102025

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Business Permit (SIUP)
8120410102025

Pencatatan Saham di Bursa Saham
Share Listing in Stock Exchange
9 Februari 2010, Bursa Efek Indonesia
February 9, 2010, Indonesia Stock Exchange

Kode Saham di Bursa Saham
Ticker Code in Stock Exchange

PTPP

Jumlah Pegawai
Total Employees

1.737 pegawai
1,737 personnel

Jaringan Kelompok Usaha
Business Group

9
Entitas Anak Langsung
Direct Subsidiaries

23
Entitas Anak Tidak Langsung
Indirect Subsidiaries

23
Entitas Asosiasi
Associate Entities

2
Kerja Sama Operasi (KSO)
Joint Ventures

Obligasi
Bonds

- Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024
  PTPP Shelf-Registered Bond IV Phase I 2024
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023
  PTPP Shelf-Registered Bond III Phase III 2023
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
  PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase III 2023
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
  PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Series B
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
  PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Series B
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
  PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase I 2021 Series B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
  PTPP Shelf-Registered Bond III Phase I 2021 Series B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A (lunas 22 April 2025)
  PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Series A (repaid on April 22, 2025)
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A (lunas 22 April 2025)
  PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Series A (repaid on April 22, 2025)

Alamat
Address

Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
DKI Jakarta, Indonesia

Kontak Perusahaan
Company Contact

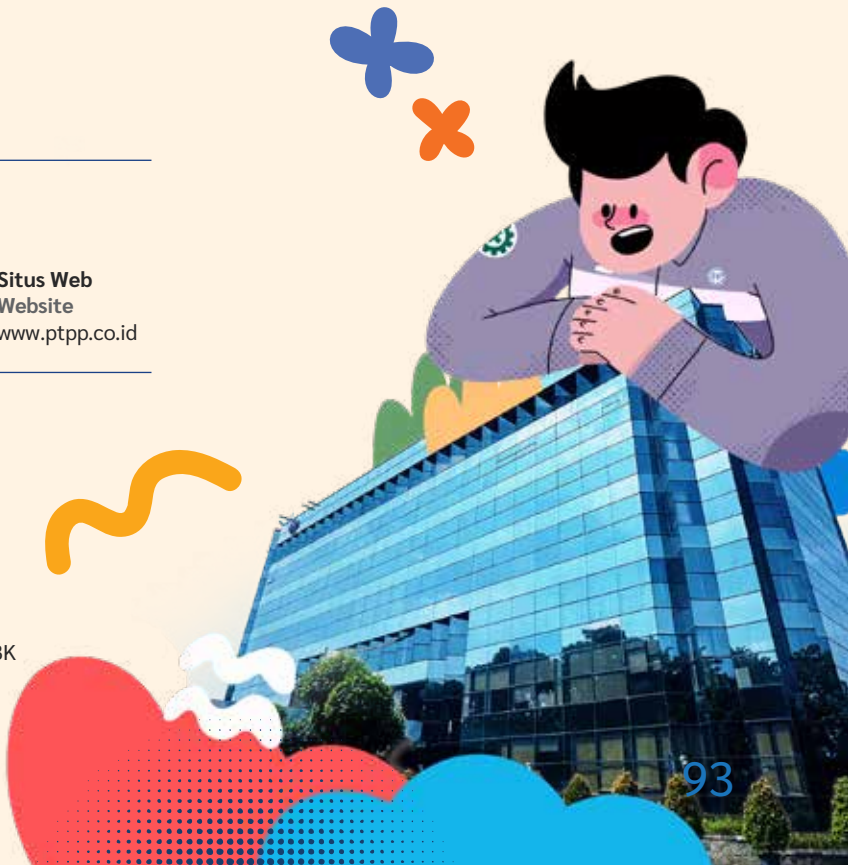
Telepon
Phone
+62 21 840 3883 (*hunting*)

Surel
Email
corsec@ptpp.co.id

Situs Web
Website
www.ptpp.co.id

Media Sosial
Social Media

PT PP - Persero Tbk
@PTPP_ID
PTPP_ID
@PTPP_ID
PT PP PERSERO TBK
PT PP(PERSERO) TBK





Riwayat Singkat PTPP

Brief History of PTPP

Sejarah Singkat PTPP

PT PP (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan" atau "PTPP", semula adalah badan usaha yang dibentuk dari hasil peleburan perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia). Proyek pertama NV Pembangunan Perumahan adalah membangun kompleks perumahan pejabat PT Semen Gresik Tbk, anak perusahaan BAPINDO yang berlokasi di Gresik. Seiring dengan kepercayaan yang terus meningkat, NV Pembangunan Perumahan mendapat tugas untuk membangun proyek-proyek besar hasil rampasan perang dari Pemerintah Jepang, seperti Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel dan Samudera Beach Hotel.

Brief History of PTPP

PT PP (Persero) Tbk, hereinafter referred to as the "Company" or "PTPP", was originally a business entity formed out of the consolidation of a building company formerly owned by Bank Industri Negara, which was incorporated based on the Notarial Deed of Raden Mr. Soewandi in Jakarta, No. 48 dated August 26, 1953 (Bank Industri Negara was later merged into Bank Pembangunan Indonesia). NV Pembangunan Perumahan's first project was building the housing complex for the officials of PT Semen Gresik Tbk, a subsidiary of BAPINDO in Gresik. As it gained more trust, NV Pembangunan Perumahan was trusted to handle some large projects of war trophies from the Japanese Government, such as Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, and Samudera Beach Hotel.



Sesuai Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960, NV Pembangunan Perumahan dilebur menjadi Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan, yaitu Perusahaan Negara yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63. PN Pembangunan Perumahan kemudian mengalami perubahan badan hukum pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tentang pengalihan bentuk PN Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang disebut PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan/atau PT PP (Persero) dan/atau PTPP.

Under Law No. 19 Prp of 1960, NV Pembangunan Perumahan was consolidated into State Company (PN) Pembangunan Perumahan, which was a State Company established on March 29, 1961, per Government Regulation No. 63. PN Pembangunan Perumahan then underwent a change of legal entity in 1971 per Government Regulation No. 39 on the change of the form of PN Pembangunan Perumahan to Company (Persero) called PT Pembangunan Perumahan (Persero) and/or PT PP (Persero) and/or PTPP.

Sejak berdirinya (1952-2002), PTPP telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional, dengan mengerjakan berbagai mega proyek nasional. Pada tahun 1991, PTPP menempuh diversifikasi kegiatan usaha, yakni properti dan realti, diantaranya adalah usaha sewa ruang kantor di Plaza PP dan pengembangan usaha realti di kawasan Cibubur. Selain itu, PTPP juga membentuk beberapa anak usaha dengan menggandeng mitra dari dalam dan luar negeri, diantaranya PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana dan PT Citra Waspphutowa.

Since its establishment (1952-2002), PTPP has been a major player in the national construction business and working on various national mega projects. In 1991, PTPP diversified its business activities, namely property and real estate, including office space rental business in Plaza PP and real estate business development in the Cibubur area. At that time, PTPP also established several subsidiaries by cooperating with domestic and foreign partners, including PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, and PT Citra Waspphutowa.

Dalam hal standar mutu hasil pekerjaan, sejak tahun 1993 PTPP merupakan perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang telah meraih sertifikat ISO 9001, yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu.

Regarding work quality standards, PTPP was the first construction company in Indonesia to receive an ISO 9001 certificate in 1993, an international standard for quality management systems.

Di tahun 2004, PTPP menjalankan program EMBO *(Employee Management Buy Out*), yaitu penjualan atau divestasi saham milik Negara Republik Indonesia (divestasi) untuk program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Pelaksanaan penjualan saham melalui program EMBO tersebut dilakukan melalui perjanjian tersendiri antara pemegang saham dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan ("KKPSPP") yang dalam hal ini mewakili karyawan dan manajemen. Dengan pelaksanaan program EMBO tersebut, terjadi perubahan kepemilikan saham perusahaan menjadi 51% milik Pemerintah Republik Indonesia dan 49% milik KKPSPP.

In 2004, PTPP carried out an EMBO (Employee Management Buy Out) program, i.e., the sale of shares of the Republic of Indonesia (divestment) for employee and management shareholding program. The sale of shares through the EMBO program was executed through a separate agreement between the shareholders and Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP), which in this case represented employees and management. The EMBO program has led to changes in the Company's share ownership to 51% owned by the Government of the Republic of Indonesia and 49% owned by KKPSPP.

Seiring dengan perkembangan usaha, Anggaran Dasar Perusahaan juga mengalami beberapa kali perubahan. Di antara yang signifikan adalah perubahan seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perubahaan tersebut juga diikuti dengan penambahan nama dari semula PT PP (Persero) menjadi PT PP (Persero) Tbk. Hal tersebut terjadi karena PTPP melaksanakan aksi korporasi besar, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) dan melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010. Sebelumnya, pelaksanaan program IPO PTPP telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT PP (Persero) Tbk tanggal 28 Desember 2009.

The Company's Articles of Association have also been amended several times in line with business development. One of the significant amendments is the change of the entire articles of association adjusted to the Regulations of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency. The amendment was also followed by the addition of the name from PT PP (Persero) to PT PP (Persero) Tbk. This was due to a significant corporate action conducted by PTPP, i.e., an Initial Public Offering (IPO), and listed its shares in the Indonesia Stock Exchange (IDX) on February 9, 2010. PTPP IPO program has previously been approved by the Government of the Republic of Indonesia per Government Regulation No. 76 of 2009 on Changes in State Ownership Structure through the Issuance and Sales of New Shares on PT PP (Persero) Tbk on December 28, 2009.

PTPP terus mengembangkan sayapnya dengan melakukan berbagai terobosan dan transformasi bisnis sebagai perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia. Namun, sejak tahun 2024 PTPP memiliki strategi "*Back to Core*" atau kembali ke penguatan bisnis inti yaitu di bidang konstruksi ditandai dengan perubahan visi dan misi.

PTPP continues to expand its wings through breakthroughs and business transformations as a leading construction and investment company in Indonesia. However, since 2024, PTPP has pursued a "Back to Core" strategy to strengthen its core business in the construction sector, marked by changes to its vision and mission.

Pionir dan *Trend Setter* di Sektor Konstruksi

Pendirian PTPP mengemban amanah untuk menjadi agen Pemerintah dalam pembangunan perumahan dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Dalam perkembangannya, PTPP terus bertransformasi dan melakukan pengembangan usaha ke sektor pendukung. PTPP menjelma menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang tidak hanya mengerjakan proyek-proyek konstruksi di tanah air, tapi juga di berbagai negara.

Pioneer and Trend Setter in Construction

PTPP was established to carry out the mandate to become the Government's agent in the construction of housing and other construction projects. Afterward, the Company continued transforming and developing its business to supporting sectors. PTPP has transformed into one of the largest construction companies in Indonesia, with its construction projects spread across the country and in other countries.

Keberhasilan PTPP tidak lepas dari upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan. PTPP selalu menjadi yang terdepan dalam mengimplementasi berbagai standar terbaru di bidang konstruksi di tanah air.

PTPP's success is, nonetheless, due to its efforts to improve its capacity and competencies to provide the best results for the customers. PTPP always leads the way in implementing the latest standards in the country's construction sector.

Di tahun 2004, PTPP menerbitkan buku Prinsip-prinsip Kontraktor yang menjadi buku wajib bagi perusahaan konstruksi di tanah air. Tahun yang sama, PTPP juga meluncurkan PP University yang menjadi kawah candradimuka dalam mencetak SDM di bidang konstruksi.

In 2004, PTPP published a book on Principles of Contractors, which became a mandatory book for construction companies in the country. In the same year, PTPP also launched PP University, which became a training center for producing human capital in the construction sector.

Tahun 2008, PTPP kembali melanjutkan kepemimpinannya dengan menginisiasi *green movement* di sektor konstruksi Indonesia. PTPP menerapkan *green constructions* pada proyek-proyek yang dikerjakan untuk mengurangi dampak negatif pengembangan proyek konstruksi terhadap lingkungan hidup. PTPP juga ikut mendorong *Green Building Council* di Indonesia. Beberapa proyek yang dikerjakan juga telah memperoleh sertifikasi *green building* dari lembaga independen.

In 2008, PTPP once again led the way in initiating the green movement in the Indonesian construction sector. PTPP applies green construction on its projects to reduce the negative impact of construction project development on the environment. PTPP also supports the establishment of the Green Building Council in Indonesia. Several projects have also obtained green building certification from independent institutions.

Di era informasi dan digitalisasi saat ini, PTPP kembali menunjukan kepemimpinannya dengan menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang menerapkan *Building Information Modeling* (BIM) di beberapa proyek strategis dan menggelar *Digital Conference Day* di tahun 2017 yang membangkitkan *awareness* para *stakeholder*. Selain itu PTPP juga menjadi perusahaan konstruksi pertama yang menerapkan *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis SAP di tahun 2016 dan *go live* di tahun 2017.

PTPP has once again shown its leadership in the information and digital age by being the first construction company in Indonesia to use Building Information Modeling (BIM) in several strategic projects and hosted Digital Conference Day in 2017 to increase stakeholder awareness. In addition, PTPP became the first construction company to implement SAP-based Enterprise Resource Planning (ERP) in 2016 and go live in 2017.

Di tahun 2018, PTPP merupakan perusahaan BUMN pertama di Indonesia yang meluncurkan instrumen Surat Berharga Perpetual ("SBP") atau dikenal dengan Perpetual *Bond*. SBP merupakan obligasi bunga abadi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Setahun kemudian, PTPP melakukan inovasi melalui gelaran *Digital Construction Hack* (DCH) atau *Hackathon Competition* sebagai ajang kompetisi pemrograman konstruksi digital pertama di Asia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para *developer* berbakat untuk berkarya dan membantu PTPP dalam menjawab tantangan-tantangan di era Digital dengan solusi inovatif berbasis teknologi yang dapat dituangkan dalam bentuk aplikasi *mobile*, *desktop* maupun *web*. Di tahun yang sama, PTPP melaksanakan *The 2nd International Conference and Workshop Digital Construction Day* 2019 di Jakarta.

In 2018, PTPP was the first SOE in Indonesia to issue Perpetual Bonds (SBP). SBP is a fixed-income security with no maturity date. A year later, PTPP made an innovation through the holding of the Digital Construction Hack (DCH) or Hackathon Competition, the first digital construction programming competition in Asia. This activity aimed to encourage talented developers to work and assist PTPP in responding to challenges in the digital era with innovative technology-based solutions in the form of mobile, desktop, or web applications. Also, the same year, PTPP held the 2nd International Conference and Workshop Digital Construction Day 2019 in Jakarta.

Pada tahun 2021, PTPP mendapatkan Sertifikasi ISO 21502: 2020 *Guidance on Project Management* dan menjadi BUMN Karya Pertama yang memiliki sertifikat ISO tersebut di Indonesia serta PTPP menjadi pionir dalam inovasi teknologi Beton Cetak 3D yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan *Startup* Autoconz.

In 2021, PTPP obtained the ISO 21502:2020 Guidance on Project Management Certification and became the first SOE in the construction industry to have the ISO certificate in Indonesia as well as became a pioneer in 3D Printed Concrete technology innovation in collaboration with the Public Works Ministry and Startup Autoconz.

Di tahun 2023, PTPP turut aktif dalam pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) dengan fokus untuk memperkuat bidang usaha sesuai dengan kompetisi perusahaan. Tidak hanya berkancah di dalam negeri, PTPP juga melebarkan sayapnya di kancah internasional dengan terlibat dalam pembangunan Commuter Railway di Manila, Filipina.

In 2023, PTPP actively participated in developing various national strategic projects and Nusantara Capital City (IKN), which is focused on realigning business fields per the Company's competencies. In addition to operating domestically, PTPP is expanding internationally by building commuter railways in Manila, Philippines.

Sepanjang tahun 2024, PTPP berhasil menyelesaikan proyek prestisius dan akan menjadi sejarah Indonesia seperti Proyek Istana Negara, Kantor Presiden dan beberapa infrastruktur di IKN. Inovasi tiada henti terus dilakukan oleh PTPP, hal ini ditandai dengan salah satu penghargaan yang didapatkan PTPP tahun 2024 dalam ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024 oleh IDX Channel, di mana penghargaan tersebut diraih atas Inovasi Optimasi *Digital Waste Material* Satu Dimensi untuk Inovasi BOMAT dan Opticuts Pro.

Throughout 2024, PTPP completed prestigious projects that will go down in Indonesian history, such as the State Palace Project, the Presidential Office, and several infrastructure projects in the National Capital Region. PTPP continues to innovate relentlessly, as evidenced by one of the awards it received at the 2024 Indonesian Innovation Awards by IDX Channel, where it was recognized for Innovation in Digital Optimization of One-Dimensional Waste Material for the BOMAT and Opticuts Pro innovations.

Pada tahun 2025, PTPP meraih *Outstanding Recognition*, ASEAN dalam ajang Autodesk Design & Make Awards 2025 yang digelar di Nashville, Amerika Serikat. PTPP dinilai unggul berkat konsistensinya dalam mengimplementasikan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) secara komprehensif, mulai dari model 3D untuk koordinasi desain, integrasi 5D untuk manajemen biaya, hingga pemanfaatan 6D-10D yang mencakup aspek keberlanjutan, keselamatan kerja, serta pengelolaan aset.

In 2025, PTPP won Outstanding Recognition, ASEAN at the Autodesk Design & Make Awards 2025 held in Nashville, United States. PTPP was recognized for its excellence in consistently implementing Building Information Modeling (BIM) technology across 3D models for design coordination, 5D integration for cost management, as well as 6D-10D, which covers sustainability, work safety, and asset management.

Perubahan Nama dan Status Badan Hukum

PTPP berdiri pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, hingga akhirnya bertransformasi menjadi PT PP (Persero) Tbk seperti yang diketahui saat ini. Berikut disampaikan transformasi dan perubahan nama serta status badan hukum PTPP sejak berdirinya di tahun 1953 hingga saat ini.

Name Change and Legal Entity Status

PTPP was incorporated on August 26, 1953, under the name NV Perumahan Perumahan and was transformed into PT PP (Persero) Tbk as it is known today. The transformation, name change, and legal entity status of PTPP from its incorporation in 1953 until today are described below.

1953-1961

NV Pembangunan Perumahan

Pendirian Perusahaan
Company's Establishment

1961-1971

Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"
Per Government Regulation No. 63 of 1961 dated March 29, 1961, on the Establishment of Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"



1971-2010

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Per Government Regulation No. 39 of 1971 on the change of status from Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan (Pembangunan Perumahan State Company) to Company (Persero)

2010-sekarang
2010-present

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk atau disingkat PT PP (Persero) Tbk

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk or abbreviated as PT PP (Persero) Tbk

Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, atau atau *Initial Public Offering* (IPO), 9 Februari 2010
Initial Public Offering (IPO) Implementation on February 9, 2010



Jejak Langkah
Milestones

1953

PTPP didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. Pada saat didirikan, NV Pembangunan Perumahan mendapat kepercayaan membangun Perumahan Pejabat PT Semen Gresik Tbk, anak perusahaan BAPINDO di Gresik. Seiring dengan kepercayaan yang terus meningkat, NV Pembangunan Perumahan mendapat tugas untuk membangun proyek-proyek besar hasil rampasan perang dari Pemerintah Jepang yaitu Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel dan Samudera Beach Hotel.

PTPP was Incorporated under the name NV Pembangunan Perumahan according to Deed No. 48, dated August 26, 1953. On its establishment, NV Pembangunan Perumahan was trusted to build a housing complex for the officials of PT Semen Gresik Tbk, a subsidiary of BAPINDO in Gresik. As it gained more trust, NV Pembangunan Perumahan was trusted to handle some large projects of war trophies from the Japanese Government: Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, and Samudera Beach Hotel.

1961

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan diubah menjadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan.

Per Government Regulation No. 63 of 1961, NV Pembangunan Perumahan was changed to PN (Perusahaan Negara or State Company) Pembangunan Perumahan.

1962

PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan telah menyelesaikan bangunan Hotel Indonesia yang terdiri dari 14 lantai dan 427 kamar, yang pada saat itu merupakan bangunan tertinggi di Indonesia.

PN Pembangunan Perumahan completed the construction of the Hotel Indonesia building, which consisted of 14 floors and 427 rooms and was the tallest in Indonesia then.

1971

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan berubah statusnya menjadi PT PP (Persero) yang dikuatkan dengan Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973. Kegiatan usaha inti perusahaan ini adalah di bidang jasa konstruksi.

Per Government Regulation No. 39 of 1971, PN Pembangunan Perumahan changed its status to PT PP (Persero), supported by Deed No. 78, dated March 15, 1973. The Company's core business activity is in the construction services sector.



1991-2002

Selama lebih dari 5 (lima) dekade sejak didirikan, PTPP telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional, dengan mengelola dan mengerjakan berbagai mega proyek nasional. Pada 1991, PTPP menempuh diversifikasi kegiatan usaha, yakni properti dan realti, diantaranya usaha sewa ruang kantor di Plaza PP dan pengembangan usaha realti di kawasan Cibubur. Selain itu, PTPP juga membentuk beberapa perusahaan afiliasi dengan menggandeng mitra dari dalam negeri maupun luar negeri PT PP Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana dan PT Citra Waspphutowa.

For more than five decades since its incorporation, PTPP has been a major player in the national construction business, managing and working on various mega projects in Indonesia. In 1991, PTPP diversified its business activities in property and real estate sectors, including office space rental business in Plaza PP and real estate business development in the Cibubur area. PTPP also established several affiliated companies by cooperating with domestic and foreign partners, including PT PP Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, and PT Citra Waspphutowa.

2004

PTPP melaksanakan program EMBO (*Employee Management Buy Out*), yaitu penjualan Saham Negara Republik Indonesia untuk program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen, dalam hal ini diwakili oleh Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP). Pelaksanaan program EMBO tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan tanggal 31 Desember 2003. Perjanjian jual beli saham tersebut dilakukan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan KKPSPP secara notarial pada 9 Februari 2004. Dengan pelaksanaan program EMBO tersebut, terjadi perubahan kepemilikan saham PTPP menjadi RI sebesar 51% dan KKPSPP sebesar 49%.

PTPP implemented an EMBO (Employee Management Buy Out) program, i.e., the sale of shares of the Republic of Indonesia for employee and management shareholding programs, in this case, represented by Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP). The EMBO program implementation was approved by the Government of the Republic of Indonesia per Government Regulation No. 64 of 2003 on the Sale of Shares of the Republic of Indonesia to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan dated December 31, 2003. The share purchase agreement was made between the Government of the Republic of Indonesia and KKPSPP before the notary on February 9, 2004. With the implementation of the EMBO program, there was a change in PTPP's share ownership in the Republic of Indonesia, with 51% share, and KKPSPP's share was 49%.



2010

Sejalan dengan berkembangnya bisnis dan semakin kokohnya kondisi keuangan, maka PTPP melakukan persiapan transformasi. Pada tahun ini, PTPP melaksanakan program Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat (*Initial Public Offering*/ IPO) dengan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia Jakarta tanggal 9 Februari 2010. Sebelumnya, pelaksanaan program IPO PTPP telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT PP (Persero) Tbk tanggal 28 Desember 2009.

In line with its business development and increasingly robust financial conditions, PTPP prepared for its transformation. On this year, PTPP conducted its Initial Public Offering (IPO) program by listing its first share on the Indonesia Stock Exchange on February 9, 2010. Previously, the IPO program was approved by the Government of the Republic of Indonesia under Government Regulation No. 76 of 2009 on Changes in State Ownership Structure through the Issuance and Sale of New Shares on PT PP (Persero) Tbk dated December 28, 2009.

2011

PTPP berhasil menyelesaikan proyek investasi pertama, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan daya 56 megawatt di Talang Duku, Sumatera Selatan. Proyek yang diresmikan oleh Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Oktober 2011 ini turut memberikan kontribusi kebutuhan listrik selama berlangsungnya SEA Games di Palembang. Dengan demikian, PTPP kembali menempuh diversifikasi kegiatan usaha, yakni *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) dan investasi.

PTPP completed the first investment project, i.e., the Gas Power Plant (PLTG), which has 56 megawatts capacity in Talang Duku, South Sumatra. The project, made official by the Director of Perusahaan Listrik Negara (PLN) in October 2011, also contributed to the electricity necessity during the SEA Games in Palembang. Thus, PTPP diversifies business activities by adding Engineering, Procurement, & Construction (EPC) and investment sectors.

2012

PTPP dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia diantaranya New Tanjung Priok dengan nilai kontrak Rp8,2 triliun, salah satu mega proyek PTPP pada tahun ini. Selain itu, PTPP juga menangani pembangunan 7 (tujuh) bandar udara selama 2012. Perusahaan melakukan berbagai aksi korporasi baik finansial maupun operasional, seperti proses persiapan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi Berkelanjutan I Tahap I) yang dilakukan pada penghujung 2012.

PTPP has been entrusted with several infrastructure projects in Indonesia, including the Rp8.2 trillion New Tanjung Priok project, one of the year's massive projects. PTPP also handled the construction of seven airports in 2012. The Company undertook various financial and operational corporate actions, such as the preparation process for the implementation of Shelf Registration (Shelf-Registered Bonds I Phase I) conducted at the end of 2012.

2013

Guna mendukung perkembangan bisnis pada 2013, PTPP telah melakukan berbagai aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional, diantaranya Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi Berkelanjutan I Tahap I) sebesar Rp700 miliar, Akuisisi PT PP Dirganeka menjadi PT PP Pracetak, *Spin Off* Divisi Properti menjadi entitas anak PTPP bernama PT PP Properti, pembukaan Cabang ke-8 di Sulawesi, Perubahan Visi Misi dan Budaya Perusahaan serta rencana akuisisi PT Prima Jasa Aldo Dua.

To support its business development in 2013, PTPP took various corporate actions both financially and operationally, including Shelf Registration (Shelf-Registered Bonds I Phase I) of Rp700 billion, the acquisition of PT PP Dirganeka into PT PP Pracetak, the Spin-Off of Property Division into the Company's Subsidiary named PT PP Properti, the opening of the 8th Branch in Sulawesi, Change of Company's Vision, Mission, and Culture as well as the plan to acquire of PT Prima Jasa Aldo Dua.

2014

PTPP melakukan akuisisi PT Prima Jasa Aldo Dua dan bertransformasi menjadi PT PP Peralatan.

PTPP acquired PT Prima Jasa Aldo Dua and transformed it into PT PP Peralatan.

2015

PT PP Properti Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015 dengan kode emiten "PPRO". Hal ini menandai saham entitas anak PTPP tersebut telah resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, PTPP juga melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 2 senilai Rp300 miliar.

PT PP Properti Tbk conducted an Initial Public Offering (IPO) by listing its shares on the Indonesia Stock Exchange on May 19, 2015, with the ticker code PPRO. Thus, the shares of the PTPP subsidiary were officially traded on the Indonesia Stock Exchange. In addition, PTPP issued Shelf-Registered Bonds II Phase II of Rp300 billion.

2016

PTPP melakukan Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau *Rights Issue* senilai Rp4,41 triliun dengan mendapatkan tambahan modal disetor dari Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,25 triliun dan dana dari Publik sebesar Rp2,16 triliun. PTPP juga melakukan transformasi bisnis dengan memecah lini bisnis PTPP menjadi 7 (tujuh) lini bisnis. Sejalan dengan program transformasi tersebut, PTPP melakukan *Spin Off* terhadap 2 (dua) Divisi Bisnis menjadi entitas anak, Divisi Bisnis Energi menjadi PT PP Energi dan Divisi Bisnis Infrastruktur menjadi PT PP Infrastruktur.

PTPP conducted Limited Public Offering through Preemptive Rights amounting to Rp4.41 trillion by obtaining additional paid-up capital from the Government in the form of State Capital Participation (PMN) of Rp2.25 trillion and public funds amounting to Rp2.16 trillion. PTPP also transformed the business by dividing its business lines into seven. In line with the transformation program, PTPP conducted a spin-off of two Business Divisions into Subsidiaries, namely the Energy Business Division into PT PP Energi and the Infrastructure Business Division into PT PP Infrastructure.



2019

PTPP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1,25 triliun dimana Seri A sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B sebesar Rp250 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

PTPP issued Shelf-Registered Bonds II Phase II amounting to Rp1.25 trillion, with Series A totaling Rp1 trillion for a term of three years and Series B amounting to Rp250 billion for a term of five years.

2018

PTPP meluncurkan tagline "*Empowering the Future*" untuk menjawab tantangan persaingan bebas di level global pada *era disruption* ini.

PTPP launched the tagline "Empowering the Future" to face the challenges of free competition at the global level in the current disruption era.

2017

PTPP melalui entitas anaknya, PT PP Properti Tbk (PPRO) melakukan *Right Issue* senilai Rp1,5 triliun. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan kinerja PPRO. Selain itu, entitas anak PTPP, yaitu PT PP Presisi Tbk, melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2017 dengan kode emiten "PPRE".

Through its subsidiary, PT PP Properti Tbk (PPRO), PTPP conducted the Right Issue amounting to Rp1.5 trillion. This was conducted to support PPRO performance. In addition, the PTPP subsidiary, PT PP Presisi Tbk, also conducted an Initial Public Offering (IPO) by listing its shares on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2017, with the ticker code PPRE.

2020

PTPP membentuk 2 (dua) Entitas Anak Tidak Langsung, yaitu PT Jasamarga Jogja Bawen dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang yang merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional ("PSN") yang dicanangkan oleh Pemerintah.

PTPP formed two Associated Entities, namely PT Jasamarga Jogja Bawen and PT Kawasan Industri Terpadu Batang, which is one of the National Strategic Projects (PSN) launched by the Government.

2021

PTPP mendapatkan Sertifikasi ISO 21502: 2020 *Guidance on Project Management* dan menjadi BUMN Karya Pertama yang memiliki sertifikat ISO tersebut di Indonesia, serta PTPP menjadi pionir dalam inovasi teknologi Beton Cetak 3D yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Startup Autoconz.

PTPP received ISO 21502:2020 Guidance on Project Management Certification and became the first BUMN Karya to have the ISO certificate in Indonesia. PTPP also pioneered 3D Printed Concrete technology innovation in collaboration with the Public Works Ministry and Startup Autoconz.

2022

PTPP menerbitkan kembali Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sebesar Rp544,5 miliar dan Sukuk *Mudharabah* I Tahap II sebesar Rp365 miliar.

PTPP reissued Shelf-Registered Bonds III Phase II of Rp544.5 billion and Mudharabah Sharia Bonds I Phase I of Rp365 billion.

2023

PTPP dipercaya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya Proyek Istana Negara dan Kantor Presiden, serta beberapa kantor Kementerian. Selain itu, PTPP untuk pertama kalinya mendapat proyek di Filipina yaitu Proyek *North-South Commuter Railway* sebanyak 2 paket pekerjaan. PTPP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2023.

PTPP is trusted to participate in developing the Nusantara Capital City (IKN) projects, especially the Presidential Palace and Office Projects, as well as some ministry offices. Moreover, PTPP received the first project in the Philippines, the North-South Commuter Railway Project, with two work packages. PTPP issued Shelf-Registered Bonds III and Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase III 2023.





2025

Terdapat perubahan yang signifikan atas kepemilikan saham PTPP dimana 51% saham seri B PTPP diinbrengkan oleh Kementerian BUMN kepada PT Danantara Asset Management (Persero). Sehingga, PT Danantara Asset Management (Persero) menjadi pemegang saham seri B mayoritas di PTPP.

There was a significant change in PTPP's share ownership, with 51% of its Series B shares transferred by the SOE Ministry to PT Danantara Asset Management (Persero). As a result, PT Danantara Asset Management (Persero) has become the majority shareholder of PTPP's series B shares.

2024

PTPP mengubah visi dan misi perusahaan setelah dilakukannya kajian dan disahkan pada Buku RJPP tahun 2025-2029. Selain itu, PTPP juga melakukan pengesahan *roadmap* ESG sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam hal *sustainability*. Sedangkan dari sisi keuangan, PTPP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024.

PTPP reformed the corporate vision and mission after a review and was approved in the 2025-2029 RJPP. In addition, PTPP approved the ESG roadmap as a form of the Company's commitment to sustainability. Meanwhile, from the financial side, PTPP issued PTPP Shelf-Registered Bond IV Phase I 2024.





Rumah Sakit Umum Kemenkes Makassar, Sulawesi Selatan
Makassar General Hospital of the Ministry of Health, South Sulawesi

Visi, Misi, Budaya, dan Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Vision, Mission, Culture, and Values

Visi Vision

Menjadi Kontraktor Pilihan Utama yang Inovatif, Unggul dan Berkelanjutan didukung Keuangan yang Sehat.

To Become a Leading Innovative, Excellent, and Sustainable Contractor, with Robust Finance Foundation.

Dengan berpegang pada **VISI, MISI, dan AKHLAK** sebagai nilai-nilai perusahaan, PTPP membangun landasan yang kokoh untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan.

By adhering to the **VISION, MISSION, and AKHLAK** as the corporate values, PTPP establishes a solid foundation to realize sustainable growth.

Misi Mission

1. Menyediakan jasa konstruksi dan EPC dengan fokus pada pengembangan gedung dan infrastruktur, yang berbasis tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen QHSE, manajemen risiko, dan prinsip keberlanjutan.
   To provide construction and EPC services focusing on building and infrastructure development, observing good corporate governance, risk management, and sustainability principles.
2. Menciptakan nilai tambah optimal bagi pemangku kepentingan melalui daya saing yang tinggi dan sinergi strategis dalam konstruksi dan EPC, serta investasi terkait.
   To create an optimum added value for stakeholders through high competitiveness and strategic synergy in construction, EPC, and related investment.
3. Mewujudkan talenta unggul dan tangguh dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan evaluasi yang selaras dengan budaya Perusahaan.
   To develop a distinguished and resilient talent through fulfillment, development, and evaluation processes aligned with the Company's culture.
4. Mencapai kinerja unggul berkelanjutan lewat pengoptimalan inovasi teknologi dan manajemen pengetahuan.
   To achieve a sustainable excellent performance by leveraging technological innovation and knowledge management.
5. Membangun Perusahaan yang berkelanjutan berlandaskan keuangan yang sehat.
   To build a sustainable Company with robust financial foundation.



Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 129/SK/PP/DIR/2024 tentang Perubahan Visi dan Misi Perusahaan PT PP (Persero) Tbk tanggal 7 Oktober 2024.

Key Management Approval of the Company's Vision and Mission

The Vision and Mission have been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors through the Board of Directors Decree No. 129/SK/PP/DIR/2024 on Changes in the Vision and Mission of PT PP (Persero) Tbk dated October 7, 2024.

Strategi Pencapaian Visi dan Misi Perusahaan

PTPP memandang visi dan misi perusahaan sebagai landasan strategis untuk mewujudkan keberlanjutan dan keunggulan di sektor konstruksi dan EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*). Dalam upaya mencapai visi menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan, perusahaan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan keuangan perusahaan yang sehat sebagai fondasi perusahaan. Strategi utama perusahaan mencakup penyediaan layanan konstruksi berbasis manajemen QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment*), pengelolaan risiko yang adaptif, serta penerapan prinsip keberlanjutan pada setiap tahapan operasional. Terdapat 23 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Dengan fokus pada pengembangan proyek Gedung dan Infrastruktur, PTPP terus mengadopsi teknologi mutakhir dan inovasi terkini guna memastikan efisiensi, kualitas, serta daya saing dalam setiap proyek yang dijalankan.

Strategy for Achieving the Company's Vision and Mission

PTPP views the corporate vision and mission as a strategic foundation for realizing sustainability and excellence in the construction and EPC (Engineering, Procurement, and Construction) sectors. To achieve the vision of becoming an innovative, superior, and sustainable contractor of first choice, the Company prioritizes good corporate governance and sound corporate finance as the foundation. The Company's main strategies include providing construction services based on QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) management, adaptive risk management, and applying sustainability principles at every stage of operations. There are 23 strategic initiatives that support the achievement of the Company's vision and mission. With a focus on developing Building and Infrastructure projects, PTPP continues to adopt the latest technology and innovation to ensure efficiency, quality, and competitiveness in every project undertaken.

Pada proyek Gedung, PTPP berstrategi untuk *Grow Buildings*, yaitu ekspansi bisnis gedung melalui penerapan inovasi teknologi konstruksi dan diversifikasi portofolio. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang pertumbuhan baru di sektor properti dan konstruksi. Kedua pada Proyek Infrastruktur PTPP berstrategi untuk *Elevate Infrastructure*, yaitu peningkatan bisnis infrastruktur dengan memprioritaskan proyek-proyek berbasis investasi dan keberlanjutan yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perusahaan. Ketiga, Pada Proyek EPC PTPP Berstrategi untuk *Refocus EPC*, yaitu pengembangan bisnis EPC secara selektif dengan fokus pada proyek yang dikelola melalui mitigasi risiko yang terukur, guna memastikan profitabilitas dan efisiensi.

In Building projects, PTPP has a strategy to Grow Buildings, i.e., expanding the building business by applying construction technology innovation and portfolio diversification. This aims to open up new growth opportunities in the property and construction sector. Second, on Infrastructure Projects, PTPP has a strategy to Elevate Infrastructure, i.e., increasing the infrastructure business by prioritizing investment-based and sustainability projects that can have a long-term impact on the company. Third, on EPC Projects, PTPP Strategizes to Refocus EPC, i.e., selective development of the EPC business with a focus on projects managed through measurable risk mitigation to ensure profitability and efficiency.

Dalam hal investasi, strategi PTPP diarahkan pada *Orchestrate Corporate Action & Portfolio Management*, yaitu restrukturisasi portofolio bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan identifikasi sinergi baru pasca klasterisasi. Selain itu, PTPP juga menekankan *Strengthen Investment & Cash Management* dengan cara memperkuat pengelolaan kas, optimalisasi *cash flow*, serta peningkatan efisiensi dalam proses investasi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dan mendukung pendanaan proyek-proyek strategis yang memiliki potensi keuntungan

In terms of investment, PTPP's strategy is directed at Orchestrate Corporate Action & Portfolio Management, i.e., the restructuring of business portfolios to improve efficiency and identification of new synergies after clusterization. In addition, PTPP also emphasizes Strengthen Investment & Cash Management by strengthening cash management, optimizing cash flow, and increasing efficiency in the investment process. This step aims to maintain liquidity and support funding strategic projects with high-profit potential. The enablers strategy is focused on three

tinggi. Strategi enablers difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, *Enhance Organization & Talent*, yang berupaya meningkatkan efisiensi organisasi melalui optimalisasi manajemen dan pengembangan kapabilitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis masa depan. Kedua, *Advance Digital & Technology*, yaitu mendorong inovasi teknologi melalui digitalisasi proses dan penguatan sistem manajemen berbasis IT untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, *Intensify Risk Management*, yaitu penguatan pengelolaan risiko dengan pendekatan kendali menyeluruh dan penerapan prinsip "*all-in profitability*" untuk meminimalkan risiko finansial dan operasional. Strategi ini didesain untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasional di semua aspek bisnis.

main aspects. First, Enhance Organization & Talent, which seeks to improve organizational efficiency through management optimization and developing HR capabilities to suit future business needs. Second, Advance Digital & Technology which encourages technological innovation through digitizing processes and strengthening IT-based management systems to improve operational efficiency. Third, Intensify Risk Management which strengthens risk management with a comprehensive control approach and applies the principle of "all-in profitability" to minimize financial and operational risks. This strategy is designed to strengthen the company's competitiveness and ensure operational sustainability in all aspects of the business.

Dalam mewujudkan misi menciptakan nilai tambah optimal bagi pemangku kepentingan, PTPP memanfaatkan pendekatan kolaboratif melalui sinergi strategis baik di internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan memprioritaskan kemitraan yang strategis untuk memperkuat rantai pasok serta menciptakan integrasi yang solid dalam pelaksanaan proyek-proyek besar. Selain itu, daya saing yang tinggi didorong melalui optimalisasi inovasi di berbagai bidang, termasuk digitalisasi proses kerja dan pengembangan kapabilitas organisasi. Sejalan dengan budaya AKHLAK yang menjadi pedoman etika perusahaan, PTPP berkomitmen untuk membangun talenta unggul dan tangguh melalui proses pemenuhan, pelatihan, dan evaluasi yang komprehensif. Budaya ini tidak hanya membentuk SDM yang profesional, tetapi juga memperkuat dedikasi pegawai terhadap pencapaian visi dan misi Perusahaan.

In realizing the mission of creating optimal added value for stakeholders, PTPP utilizes a collaborative approach through internal and external strategic synergies. The Company prioritizes strategic partnerships to strengthen the supply chain and create solid integration when implementing major projects. In addition, high competitiveness is encouraged through optimizing innovation in various fields, including digitizing work processes and developing organizational capabilities. In line with the AKHLAK culture guiding the company's ethics, PTPP is committed to building superior and resilient talents through comprehensive fulfillment, training, and evaluation. This culture shapes professional human resources and strengthens employees' dedication to achieving the company's vision and mission.

Keberlanjutan menjadi inti dari strategi PTPP untuk mencapai kinerja unggul secara konsisten. Perusahaan terus mengoptimalkan keuangan yang sehat melalui manajemen kas yang *prudent*, investasi strategis, dan diversifikasi sumber pendapatan. Di sisi lain, inovasi teknologi dan manajemen pengetahuan menjadi elemen penggerak utama untuk mendorong efisiensi operasional dan keberlanjutan perusahaan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis pada visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan, PTPP telah membangun landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan dan terus menjadi kontraktor pilihan utama di tingkat nasional maupun internasional. Kombinasi dari inovasi, integritas, dan keberlanjutan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembangunan nasional.

Sustainability is at the core of PTPP's strategy to achieve consistently superior performance. The Company continues to optimize sound finances through prudent cash management, strategic investments, and diversification of revenue sources. On the other hand, technological innovation and knowledge management are the main elements that drive operational efficiency and corporate sustainability. With a structured approach and based on the corporate vision, mission, and values, PTPP has built a solid foundation to face future challenges and continue to be the contractor of choice at the national and international levels. This combination of innovation, integrity, and sustainability reflects the company's commitment to positively contributing to all stakeholders and national development.

Kajian Periodik Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Periodic Review of the Company's Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the corporate vision and mission, both in the short-term periodic Work Plan and Budget (RKAP) for

tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 30 Januari 2025, maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 yang telah disahkan pada 23 September 2024.

Budaya dan Tata Nilai Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPP telah mengadopsi Budaya dan Tata Nilai "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai *core values* BUMN sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di BUMN, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. *Core values* BUMN "AKHLAK" telah ditetapkan sebagai Budaya dan Tata Nilai PTPP berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 111/SK/PP/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values)* Perusahaan AKHLAK.

Berikut Budaya dan Tata Nilai PTPP beserta panduan perilakunya yang wajib diterapkan oleh seluruh insan Perusahaan.

2025, which was signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 30, 2025, as well as the Company's Long Term Plan (RJPP) 2025-2029 which was approved on September 23, 2024.

Corporate Values/Culture

As a State-Owned Enterprise (SOE), PTPP has adopted the "AKHLAK" Culture/Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) established by the State-Owned Enterprises Ministry as the core values of SOEs as well as the identity and adhesive of a work culture that supports continuous performance improvement in SOEs, Subsidiaries and Consolidated Affiliated Companies. "AKHLAK" SOE core values have been established as PTPP Culture/Values based on the Decree of the Board of Directors No. 111/SK/PP/DIR/2020 dated July 14, 2020, on the stipulation of the Company's core values AKHLAK.

The following are PTPP Culture and Values along with the guidelines for behavior that must be applied by all Company personnel.



Amanah
Trustworthy

Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan
Uphold the Trust Given

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Fulfill promises and commitments.
- Responsibility for the duties, decisions, and actions taken.
- Uphold moral and ethical values.



Kompeten
Competent

Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas
Continue to Learn and Develop Capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improve self -competence in facing dynamic challenges.
- Help others learn.
- Complete tasks with the best quality.



Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai Perbedaan
Mutual Care and Respect for Differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang produktif.
- Appreciate anybody regardless of their background.
- Keen on helping others.
- Establish a productive working environment.



Loyal
Loyal

Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and Prioritizing the Interests of the Nation and the State

- Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum & etika.
- Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and State.
- Willingness to sacrifice for the greater good.
- Obedient to the leaders as long as it doesn't contradict the law and ethics.



Adaptif
Adaptive

Terus Berinovasi dan Antusias Dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan
Continue to Innovate and be Enthusiastic in Driving or Facing Change

- Cepat menyesuaikan diri untuk lebih baik.
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif.
- Adaptive to be better.
- Continuously adapt following technological development.
- Act proactively.



Kolaboratif
Collaborative

Membangun Kerjasama yang Sinergis
Build Synergic Cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Offer opportunities to various parties to contribute.
- Be open to cooperation in creating added value.
- Encourage the use of various resources for the common goals.

Internalisasi Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

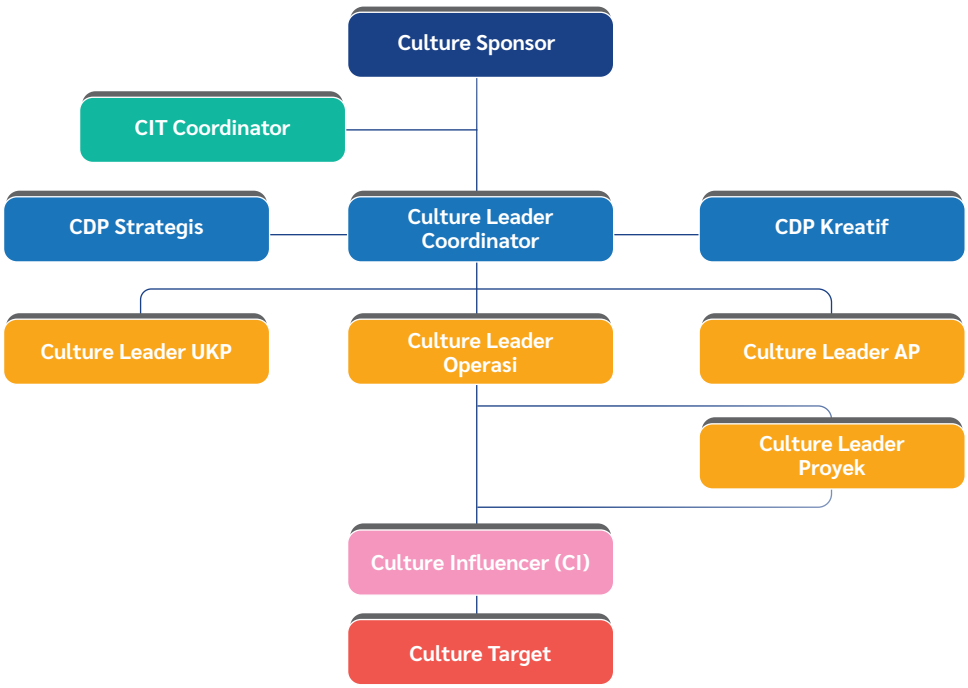
Perusahaan menyadari pentingnya fondasi yang kuat dalam membangun keselarasan budaya kerja di setiap lini organisasi. Dengan dukungan tim internalisasi budaya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 115/SK/PP/DIR/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan *Culture Internalization Team* "AKHLAK" PT PP (Persero) Tbk Tahun 2022, kami mengembangkan struktur yang terintegrasi untuk memastikan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan tertanam dalam setiap aspek operasional. Tim ini menjalankan peran strategis dalam menyusun inisiatif-inisiatif berkelanjutan yang membangkitkan rasa memiliki, menyelaraskan tujuan bersama, dan mendorong sinergi antar unit bisnis dalam mencapai aspirasi Perusahaan.

Internalization of Vision, Mission and Corporate Values

The Company realizes the importance of a strong foundation in building a harmonious work culture in every line of the organization. With the support of the culture internalization team formed based on the Board of Directors Decree No. 115/SK/PP/DIR/2022 dated June 15, 2022, on Changes in the "AKHLAK" Culture Internalization Team in PT PP (Persero) Tbk of 2022, we develop an integrated structure to ensure the corporate vision, mission, and values are embedded in every aspect of operations. This team plays a strategic role in developing sustainable initiatives that generate a sense of belonging, align common goals, and encourage synergy between business units in achieving the Company's aspirations.

Struktur Organisasi Culture Internalization Team (CIT) PTPP

PTPP Culture Internalization Team (CIT) Organizational Structure



Dalam upaya menguatkan karakter dan nilai yang menjadi identitas perusahaan, PTPP telah menyusun rencana tema internalisasi budaya perusahaan yang tertuang dalam RJPP Human Capital Management. Detail rencana tema budaya masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

To strengthen the character and values that define the corporate identity, PTPP has developed a plan to internalize the corporate culture, outlined in the Human Capital Management RJPP. Details of the cultural theme plan for each year are as follows:



2025	2026	2027	2028	2029
Penyusunan aspirasi budaya, penguatan dan peningkatan kapabilitas tim internalisasi budaya, analisis kesiapan budaya digital. Formulating cultural aspirations, strengthening and improving the capabilities of the cultural internalization team, and analyzing digital cultural readiness.	Membangun kolaborasi fungsi, peningkatan komunikasi, peningkatan kapabilitas *coaching feedback*, dan internalisasi budaya digital. Building functional collaboration, improving communication, improving coaching feedback capabilities, and internalizing digital culture.	Spirit adaptif melalui penguatan tim budaya, implementasi Implementasi *coaching & feedback*, pelaksanaan program inovasi. Adaptive spirit through strengthening the culture team, implementing coaching & feedback, and implementing innovation programs.	Membangun kompetensi masa depan melalui program-program inovasi. Building future competencies through innovation programs.	Internalisasi budaya *high performance*, efektivitas pimpinan dalam inovasi. Internalization of high-performance culture, leadership effectiveness in innovation.

Melalui strategi ini, Perusahaan memastikan bahwa budaya perusahaan, diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya menciptakan keselarasan budaya di lingkungan kerja, tetapi juga membangun etos kerja yang kokoh, mendukung pencapaian visi perusahaan, dan memperkuat hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

Through this strategy, the Company ensures that corporate value is implemented thoroughly and sustainably. This step not only creates cultural harmony in the work environment but also builds a solid work ethic, supports the achievement of the corporate vision, and strengthens the Company's relationship with stakeholders.

PTPP melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan melalui program-program diantaranya:

PTPP conducts dissemination and internalization of corporate culture through programs, including:





1. Sarasehan *Culture Influencer*

Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas *Culture Influencer* yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan internalisasi budaya di Lingkungan PTPP. Beberapa agenda yang dilaksanakan pada kegiatan ini diantaranya sesi inspirasi oleh Direktur Strategi Korporasi & Human Capital Management, sesi *upskilling influence people* dan *social media* positif, *refreshment action plan* budaya, *culture award* dan *urban outbond.*

This agenda aims to improve the capabilities of Culture Influencers appointed by the Company to internalize culture within PTPP. Several agendas carried out in this activity include an inspirational session by the Director of Corporate Strategy & Human Capital Management, an upskilling influence people and social media positive session, a refreshment action plan for culture, a culture award, and an urban outbound.

2. Survei *Digital Culture*

Digital Culture Survey

Survei dilakukan untuk mengukur kesiapan dan komitmen pemimpin, kesiapan operasional dan tata kelola, serta mengidentifikasi kesiapan dan motivasi pegawai dalam proses transformasi digital di lingkungan perusahaan.

The survey is conducted to measure leaders' readiness and commitment, operational readiness and governance, and to identify employees' readiness and motivation for the Company's digital transformation.







3. Implementasi Program Budaya Unit

Unit Culture Program Implementation

Perusahaan mendorong unit untuk menginisiasi program-program internalisasi budaya di masing-masing unit. Unit melaporkan kepada Divisi HCM pada periode waktu tertentu sebagai bentuk monitoring.

The Company encourages units to initiate cultural internalization programs within their own units. Units report to the HCM Division at certain periods as a form of monitoring.

Makna Logo Perusahaan
Meaning of Company Logo



Logogram

Logotype

Terdiri dari huruf **"PP" dan 8 (delapan) garis lengkung** dengan ketentuan warna sebagai berikut:
- Warna dasar: Putih
- Warna logo (lambang): Biru tua

Consists of the letters **"PP" and eight curved lines** with the following color provisions:
- Base color: White
- Logo color: Dark blue

Makna Logo
Logo meaning



Warna dasar putih berarti Perusahaan berkarya tanpa pamrih.

The basic color of white means that the Company works with no strings attached.



Warna logo (lambang) biru tua berarti berkarya dengan setia dan patuh.

The dark blue logo (symbol) means to work faithfully and obediently.

PP

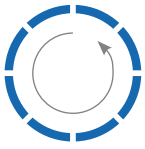
PP adalah singkatan dari Pembangunan Perumahan.

PP is an abbreviation of Pembangunan Perumahan.



8 (delapan) garis lengkung berarti:
- **Perusahaan berkarya di delapan penjuru angin (di mana saja).**
- **Perusahaan didirikan pada bulan ke-8 (Agustus).**

Eight curve lines mean:
- The Company works in eight directions (everywhere).
- The Company was incorporated in the eight month (August).



Lingkaran yang terbentuk oleh 8 (delapan) garis lengkung berarti kesatuan tujuan yang utuh.

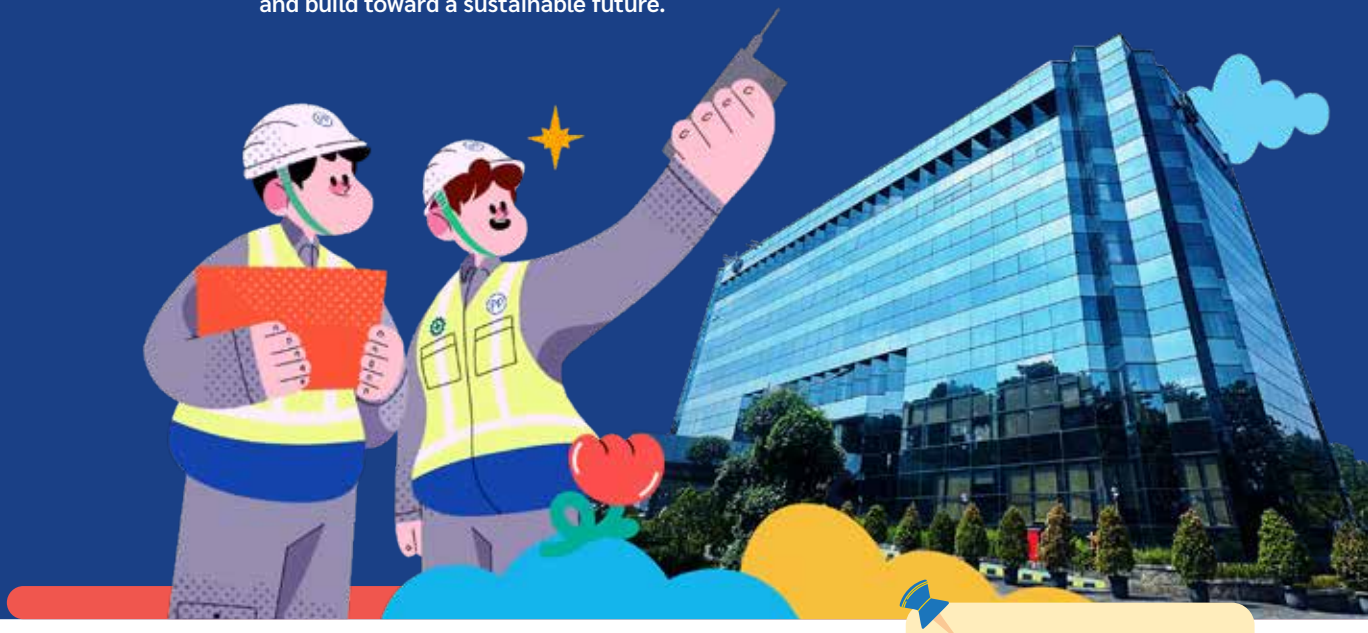
A circle formed by eight curved lines means a unified goal.

Tagline *Empowering The Future*

Makna | Meaning :

PTPP senantiasa berinovasi untuk memberdayakan masyarakat luas dan membangun menuju masa depan yang berkelanjutan.

PTPP constantly innovates to empower the broader community and build toward a sustainable future.



Latar Belakang:

1. *Era Disruption* dan persaingan bebas di level global mengharuskan PTPP untuk menyusun *Corporate Strategy* untuk tumbuh berkelanjutan;
2. Sebagai Perusahaan Pelopor Terobosan (*Trend Setter*) Bisnis, Manajemen & sistem yang sesuai dengan kebutuhan Industri Konstruksi di Indonesia, PTPP berkomitmen untuk Menuju Perusahaan yang Berkelanjutan (*Sustainable Company*);
3. Sebagai Perusahaan Pelopor Terobosan (*Trend Setter*) Bisnis, Manajemen & Sistem PTPP juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat luas menuju masa depan yang berkelanjutan;
4. Maka, PTPP menuangkan komitmen-komitmen tersebut dalam bentuk *tagline* yang diharapkan sesuai dengan *Corporate Strategy* yang dicanangkan.

Background:

1. The Disruption era and free competition at the global level require PTPP to develop a Corporate Strategy to grow sustainably;
2. As a Trend-Setter Company for the Business, Management, and System sectors that fit the needs of the Construction Industry in Indonesia, PTPP is committed to advancing Towards a Sustainable Company;
3. As a Trend-Setter Company for the Business, Management, and System sectors, PTPP is also committed to empowering the broader community toward a sustainable future;
4. Thus, PTPP included these commitments in its tagline with expectations to meet the announced Corporate Strategy.

Logo PTPP telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 01/SK/PP/DIR/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembuatan dan Penggunaan Logo (Lambang) Perusahaan.

PTPP logo has been validated through the Decree of the Board of Directors of PT (PP) Persero Tbk No. 01/SK/PP/ DIR/2010 dated January 29, 2010, on the Making and Use of Company Logo (Symbol).

Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa
Business Activities, Products, and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP (Persero) Tbk No. 06 tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement dan Construction* (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Business Activities Based on Articles of Association

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association in the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT PP (Persero) Tbk No. 06 dated January 13, 2026, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, the Company's purpose and objective to participate in the construction industry, Engineering Procurement and Construction (EPC), trade, area management, service of improving construction capabilities, engineering and planning services, development, as well as optimizing the utilization of company resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services, to obtain or pursue profits and increase the company's value by applying the principles of a Limited Liability Company.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

To achieve these purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/Not Executed	Keterangan Description
Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Investasi Construction and Investment Implementation Work	✓	Telah dilaksanakan oleh PTPP dan entitas anak Carried out by PTPP and subsidiaries
Properti Property	✓	Telah dilaksanakan oleh entitas anak dan entitas asosiasi Carried out by subsidiaries and associates
Pengelolaan Kawasan Area Management	✓	Telah dilaksanakan oleh entitas anak dan entitas asosiasi Carried out by subsidiaries and associates
Instalasi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil Building and Civil Building Installation	✓	Telah dilaksanakan oleh PTPP dan entitas anak Carried out by PTPP and subsidiaries
Jasa Perdagangan Bahan Komponen Bangunan dan Peralatan Konstruksi Building Materials and Construction Equipment Trading Services	✓	Telah dilaksanakan oleh entitas anak Carried out by subsidiaries
Building Management	✓	Telah dilaksanakan oleh entitas anak Carried out by subsidiaries
System Development	✓	Telah dilaksanakan oleh PTPP Carried out by PTPP
Pelaksanaan Pekerjaan EPC EPC Work Implementation	✓	Telah dilaksanakan oleh Divisi EPC Carried out by EPC Division

√ = telah dijalankan | x = belum dijalankan
√ = carried out | x = not carried out

Pengembangan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan membagi usahanya menjadi 2 (dua), yaitu Jasa Konstruksi dan Investasi. Jasa Konstruksi dikembangkan melalui kegiatan Kontraktor (Gedung, Sipil, dan EPC) dan Bisnis Kontraktor Spesialis (*Specialist*, *Plant*, dan *Equipment*). Sedangkan bidang Investasi, Perusahaan membaginya ke dalam Infrastruktur, Energi, dan Properti.

Business Segment Development

In carrying out its business, the Company divides its business into two: Construction and Investment Services. The Construction Services Sector consists of Contractors (Building, Infrastructure, and EPC) and Specialist Contractors (Specialists, Plants, and Equipment). Meanwhile, the Investment Sector is divided into Infrastructure, Energy, and Property.



Investasi
Investments

Infrastruktur
Infrastructure

- Jalan Tol
  Toll Road
- Pelabuhan
  Port
- SPAM
  Drinking Water Supply System
- Infrastruktur Limbah
  Waste Infrastructure
- Infrastruktur Telekomunikasi
  Telcom Infrastructure

Properti
Property

- Realti
  Realty
- Komersial
  Commercial
- *Hospitality*
- Pengelolaan Gedung
  Building Management

Energi
Energy

- Pembangkit Listrik
  Power Plant
- Minyak dan Gas
  Oil and Gas

Konstruksi
Construction

Gedung
Building

- Perkantoran
  Office
- Apartemen
  Apartment
- Rumah Sakit
  Hospital
- Bandara
  Airport
- Universitas
  University
- *Mall*
- Stadion
  Stadium
- *Data Center*

Infrastruktur
Infrastructure

- Jalan Tol
  Toll Road
- Bendungan
  Dam
- Jembatan
  Bridge
- Landasan
  Runway
- Irigasi
  Irrigation
- Pelabuhan
  Port

EPC

- Pembangkit Listrik
  Power Plant
- Minyak & Gas
  Oil & Gas
- *Smelter*
- Industri
  Industrial
- Kilang Minyak
  Tank Storage

Spesialis
Specialist

- Pracetak
  Precast
- Gedung
  Building
- Mekanikal
  Mechanical
- Kelistrikan
  Electrical
- *Earth Moving*
- *Bored Pile*
- *Bekisting*
  Formwork
- Jasa Tambang
  Mining Service
- *Erection*

Pabrik
Plant

- *Readymix*
- Pabrik Pracetak
  Precast Plant
- Campuran Aspal
  Asphalt Mixing
- Pabrik
  Plant

Peralatan
Equipment

- Alat Berat
  Heavy Equipment
- *Shoring*
- Aluminium *Bekisting*
  Aluminium Formwork



Produk dan Jasa yang Dihasilkan

Products and Services

Jasa Konstruksi | Construction Service

- ***General Contractor***
  Sebagai penyedia jasa pelayanan konstruksi publik, PTPP menjalankan usahanya dengan berfokus pada kegiatan jasa konstruksi untuk pembangunan Gedung, Sipil/Infrastruktur, dan EPC. Kegiatan jasa konstruksi ini bernilai historis, menjadi simbol negara dan memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat.
- **Proyek Gedung**
  Selama lebih dari 7 (tujuh) dekade berkiprah, PTPP telah membangun berbagai proyek bangunan besar bernilai historis di seluruh Indonesia. Keunggulan PTPP dalam mengerjakan proyek konstruksi bangunan terus berlanjut hingga kini guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan institusi baik pemerintahan maupun swasta secara luas melalui berbagai pembangunan gedung, seperti: perkantoran, apartemen, hotel, bandar udara, rumah sakit, stadion, sekolah dan universitas, mal, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya.

  Adapun proyek pembangunan konstruksi gedung yang telah dibangun oleh PTPP, antara lain:

- **General Contractor**
  As a provider of public construction services, PTPP runs its business by focusing on construction service activities for building, civil/infrastructure, and EPC. The construction service activity has a historical value, become a symbol of the state, and has made a significant contribution to society.

- **Building Project**
  For more than seven decades since its incorporation, PTPP has constructed various large historical building projects throughout Indonesia. PTPP's excellence in executing construction projects continues to this day, fulfilling various needs of the community and institutions, both government and private, through various building constructions, such as offices, apartments, hotels, airports, hospitals, stadiums, schools and universities, malls, and other public service facilities.

  The building construction projects undertaken by PTPP include:

Gedung Bertingkat
Multi-Storied Buildings

Hotel Indonesia (Jakarta) Hotel Indonesia (Jakarta)
Grand Bali Beach Hotel (Bali) Grand Bali Beach Hotel (Bali)
Hotel Ambarukmo Palace (DI Yogyakarta) Ambarrukmo Palace Hotel (Yogyakarta Special Region)
KPP Menteng (Jakarta) Menteng Tax Office (Jakarta)
Mahkamah Konstitusi (Jakarta) Constitutional Court (Jakarta)
Sampoerna Strategic Square (Jakarta)
St. Moritz Tower Ambasador (Jakarta) St. Moritz Tower Ambasador (Jakarta)
Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Gorontalo Bank of Indonesia Building Gorontalo Regional Representative Office

Stadion dan Sarana Olahraga
Stadium and Sports Facilities

Stadion Tenggarong (Kalimantan Timur) Tenggarong Stadium (East Kalimantan)
Stadion Palarang (Kalimantan Timur) Palarang Stadium (East Kalimantan)
Stadion Sempaja (Samarinda) Sempaja Stadium (Samarinda)
Stadion Papua Bangkit (Papua) Papua Bangkit Stadium (Papua)
Istora Papua (Papua) Papua Stadium (Papua)
Jakarta International Stadium (Jakarta)
Stadion Rugby (Papua) Rugby Stadium (Papua)

Bandara
Airports

Bandara Internasional Yogyakarta (DI Yogyakarta) Yogyakarta International Airport (Yogyakarta Special Region)
Bangunan Terminal Utama Penumpang BIJB Kertajati (Jawa Barat) Main Passenger Terminal Building (MPTB) Kertajati (West Java)

Gedung Bertingkat
Multi-Storied Buildings

- Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Papua
  Bank of Indonesia Building Papua Regional Representative Office
- Singapore Embassy (Jakarta)
  Singapore Embassy (Jakarta)
- Austrian Embassy (Jakarta)
  Austrian Embassy (Jakarta)
- Kementerian Pekerjaan Umum (Jakarta)
  Public Works Ministry (Jakarta)
- Grand Kamala Lagoon (Jawa Barat)
  Grand Kamala Lagoon (West Java)
- Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN
  IKN State Palace and Ceremonial Grounds
- KCC Glasskit Batang (Jawa Tengah)
  KCC Glasskit Batang (Central Java)
- Menara BNI 46 Pejompongan (Jakarta)
  BNI 46 Tower, Pejompongan (Jakarta)
- Apartemen Gunawangsa (Jawa Timur)
  Gunawangsa Apartment (East Java)
- Gedung Kementerian Keuangan (Jayapura)
  Finance Ministry Building (Jayapura)
- Gedung Sekretariat ASEAN (Jakarta)
  ASEAN Secretariat Building (Jakarta)
- Hotel Mercure Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)
  Mercure Hotel Pangkalan Bun (Central Kalimantan)
- Technoplex Living Apartment (Jawa Barat)
  Technoplex Living Apartment (West Java)
- Menara BPJS (Jakarta)
  BPJS Tower (Jakarta)
- Pollux Mega Superblok (Batam)
  Pollux Mega Superblock (Batam)
- Gedung Kejaksaan RI (Jakarta)
  Indonesian Attorney General's Office (Jakarta)
- Menara Danareksa (Jakarta)
  Danareksa Tower (Jakarta)
- BI Karawang (Jawa Barat)
  BI Karawang (West Java)



Bali International Hospital, Bali

Bandara
Airports

- Bandara Siboru Fakfak (Papua Barat)
  Siboru Fakfak Airport (West Papua)
- Bandara Vanuatu
  Vanuatu Airport
- Revitalisasi T1C Bandara Soekarno Hatta (Jakarta)
  Revitalization for T1C Soekarno Hatta Airport (Jakarta)

Rumah Sakit
Hospital

- RSUD Kabupaten Konawe (Sulawesi Selatan)
  Konawe Regional Public Hospital (South Sulawesi)
- RS UPT Vertikal (Makassar)
  Vertical Technical Implementation Unit Hospital (RSUPT) (Makassar)
- Bali International Hospital (Bali)
- RS Kanker Dharmais & Gedung Parkir RS Dharmais (DKI Jakarta)
  Hospital & Dharmais Hospital Parking Building Building (DKI Jakarta)
- RS Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran (Jawa Barat)
  Padjajaran University Hospital (West Java)
- RSUD Tarempa (Kepulauan Riau)
  Tarempa Regional Public Hospital (Riau Island)
- Gedung RSJPD Harapan Kita - Tokushukai (Jakarta)
  Harapan Kita National Heart Center – Tokushukai Building (Jakarta)
- RSUP Dr. Hasan Sadikin (Bandung)
  Dr. Hasan Sadikin General Hospital (Bandung)

Universitas
Universities

- Universitas Negeri Surabaya (Jawa Timur)
  Surabaya State University (East Java)
- GBK Universitas Malang (Jawa Timur)
  GBK Malang University (East Java)
- Universitas Tanjungpura (Kalimantan Barat)
  Tanjungpura University (West Kalimantan)
- Science Techno Park Universitas Indonesia (Depok)
  University of Indonesia Science Techno Park (Depok)
- Twin Tower Undip (Semarang)
  Undip Twin Tower (Semarang)
- Kampus UPN Veteran (Surabaya)
  UPN Veteran Campus (Surabaya)

Fasilitas Lainnya
Other Facilities

- Pasar Ikan Muara Baru (Jakarta)
  Muara Baru Fish Market (Jakarta)
- PLBN Terpadu Wini (Nusa Tenggara Timur)
  Wini Integrated Border Checkpoint Post (East Nusa Tenggara)

Gedung Bertingkat Multi-Storied Buildings
Bank Sulut Gorontalo (Manado) Bank Sulut Gorontalo (Manado)
Gedung IT Bank Mandiri (Jakarta) Bank Mandiri IT Building (Jakarta)
Kantor Kepresidenan IKN IKN Presidential Office
BNI PIK (Jakarta) BNI PIK (Jakarta)
Rusun ASN IKN IKN ASN Flats
Kantor Bank Indonesia IKN Bank Indonesia IKN Office
Gedung Kementerian Sekretariat Negara State Secretariat Ministry Building

Fasilitas Lainnya Other Facilities
Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) Labuan Bajo Sea Port Area (East Nusa Tenggara)
MRT Hub Jakarta (Jakarta)
KCC Glasskit Batang (Jawa Tengah)
Penataan Kawasan Pura Besakih (Bali) Revitalization for Besakih Temple Complex (Bali)
Pembangunan Hunian Danantara (Aceh Utara) Danantara Housing Development (North Aceh)
Stasiun Tanah Abang Baru Tanah Abang Baru Station
Masjid Raya Baitul Khairaat (Palu) Baitul Khairaat Grand Mosque (Palu)



Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta
Tanah Abang Baru Station, Jakarta

Masjid Raya Baitul Khairaat, Sulawesi Tengah
Baitul Khairaat Grand Mosque, Central Sulawesi

- **Proyek Infrastruktur**
  Dalam melayani pembangunan di sektor pekerjaan sipil atau infrastruktur, PTPP terus meningkatkan derap pembangunan infrastruktur dalam mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju yang adil dan merata, PTPP telah dipercaya untuk mengemban tugas dalam membangun negara dengan pembangunan berbagai fasilitas dan utilitas umum, seperti: Jalan, Jalan Tol, Jembatan, Bendungan, Irigasi, Pelabuhan, *Runway* Bandar Udara, *Railways*, hingga Terowongan.

  Adapun proyek pembangunan jasa konstruksi sipil atau infrastruktur yang telah dibangun oleh PTPP, antara lain:

- **Infrastructure Project**
  When it comes to building in the civil works or infrastructure sector, PTPP keeps accelerating infrastructure development to support the Government's initiative to boost Indonesians' economic activity. PTPP has been given the task of developing the nation by building various public facilities and utilities, such as roads, toll roads, bridges, dams, irrigation, ports, airport runways, railways, and tunnels, to support the Government's program in realizing a just and equitable Indonesia Maju program.

  The civil construction services or infrastructure development projects that have been built by PTPP include:

Jalan Tol
Toll Roads

Jalan Tol Sedyatmo (Jakarta) Sedyatmo Toll Road (Jakarta)
Interchange Padalarang Bypass Tollroad (Jawa Barat) Interchange Padalarang Bypass Tollroad (West Java)
Jakarta Outer Ring Road (JORR) E2 Cikunir-Cakung (Jakarta) Jakarta Outer Ring Road (JORR) E2 Cikunir-Cakung (Jakarta)
Jalan Tol Depok - Antasari (Jakarta) Depok - Antasari Toll Road (Jakarta)
Jalan Tol Cikampek - Palimanan (Jawa Barat) Cikampek - Palimanan Toll Road (West Java)
Jalan Tol Medan - Kualanamu Tebing Tinggi Medan (Sumatera Utara) Medan - Kualanamu Tebing Tinggi Medan Toll Road (North Sumatra)
Jalan Tol Bakauheni - Sidomulyo (Lampung) Bakauheni - Sidomulyo Toll Road (Lampung)
Jalan Tol Pandaan - Malang (Jawa Timur) Pandaan - Malang Toll Road (East Java)
Jalan Tol Manado - Bitung (Sulawesi Utara) Manado - Bitung Toll Road (North Sulawesi)
Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Jawa Barat) Bogor Outer Ring Road (West Java)
Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Kalimantan Timur) Balikpapan - Samarinda Toll Road (East Kalimantan)
Simpang Susun Tol Serang - Panimbang (Banten) Serang - Panimbang Interchange Toll Road (Banten)
Jalan Tol Semarang - Demak (Jawa Tengah) Semarang - Demak Toll Road (Central Java)
Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Jawa Timur) Probolinggo - Banyuwangi Toll Road (East Java)
Jalan Tol Indrapura - Kisaran (Sumatera Utara) Indrapura - Kisaran Toll Road (North Sumatra)
Jalan Tol Serpong - Cinere (Jakarta) Serpong - Cinere Toll Road (Jakarta)
Jalan Baru Kretek - Girijati (Yogyakarta) Kretek-Girijati New Road (Yogyakarta)
Pelebaran Tol Tangerang-Merak Widening of Tangerang-Merak Toll Road
Jalan Tol Toronipa - Kendari (Sulawesi Tenggara) Toronipa-Kendari Toll Road (Southeast Sulawesi)

Bandara
Airports

Apron Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) Kualanamu Airport Apron (North Sumatra)
Apron Bandara Jambi (Jambi) Jambi Airport Apron (Jambi)
Bandara Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) Ujung Pandang Airport (South Sulawesi)

Jembatan
Bridges

Jembatan Siak *Cable Stayed* (Riau) Siak Cable Stayed Bridge (Riau)
Cable Stayed Batam Tonton (Batam) Batam Tonton Cable Stayed (Batam)
Jembatan Perawang (Riau) Perawang Bridge (Riau)
Jembatan Kapuas Pontianak (Kalimantan Barat) Kapuas Bridge (Pontianak, West Kalimantan)
Jembatan Angso Duo (Jambi) Angso Duo Bridge (Jambi)
Jembatan Mahakam (Kalimantan Timur) Mahakam Bridge (East Kalimantan)
Jembatan Youtefa atau Holtekamp (Papua) Youtefa a.k.a. Holtekam Bridge (Papua)
Jembatan Teluk Kendari (Sulawesi Tenggara) Teluk Kendari Bridge (Southeast Sulawesi)

Pelabuhan
Ports

Pelabuhan East Java Multipurpose Terminal (Jawa Timur) East Java Multipurpose Port Terminal (East Java)
Koja Container Terminal (Development & Field) (Jakarta) Koja Container Terminal (Development & Field) (Jakarta)
Terminal Petikemas Kalibaru (Jakarta) Kalibaru Container Terminal (Jakarta)
Makassar New Port (Sulawesi Selatan) Makassar New Port (South Sulawesi)
Pelabuhan Gili Mas (Nusa Tenggara Barat) Gili Mas Port (West Nusa Tenggara)
Pelabuhan Bakauheni (Lampung) Bakauheni Port (Lampung)
Dermaga IV Merak (Banten) Merak Dock IV (Banten)
Dermaga IV Bakauheni (Lampung) Bakauheni Pier IV (Lampung)
Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten) Merak Ferry Port Pier II (Banten)
Dermaga Logististik IKN IKN Logistics Pier
Dermaga Berlian (Jawa Timur) Berlian Pier (East Java)
Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) Patimban Port (West Java)
East Java Multipurpose Terminal (EJMT) East Java Multipurpose Terminal (EJMT)

Bandara
Airports

- Pematangan Lahan dan Perluasan Apron Barat Bandara Ngurah Rai Bali
  Area Clearing and West Apron Expansion in Ngurah Rai Bali Airport
- *Runway* 3 Bandara Soekarno Hatta (Banten)
  Soekarno Hatta Airport Runway 3 (Banten)
- *Runway* Bandara Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)
  Tanjung Pinang Airport Runway (Riau Islands)

Bendungan
Dams

- Bendungan Lau Simeme (Sumatera Utara)
  Lau Simeme Dam (North Sumatra)
- Bendungan Leuwikeris (Jawa Barat)
  Leuwikeris Dam (West Java)
- Bendungan Lolak (Sulawesi Utara)
  Lolak Dam (North Sulawesi)
- Bendungan Tiu Suntuk Paket 2 (Sumbawa Barat)
  Tiu Suntuk Dam Package 2 (West Sumbawa)
- Bendungan Pidekso (Jawa Tengah)
  Pidekso Dam (Central Java)
- Bendungan Tamblang (Bali)
  Tamblang Dam (Bali)
- Bendungan Way Apu (Maluku)
  Way Apu Dam (Maluku)
- Bendungan Cibeet (Jawa Barat)
  Cibeet Dam (West Java)
- Bendungan Manikin (NTT)
  Manikin Dam (NTT)
- Bendungan Karangnongko (Jawa Tengah)
  Karangnongko Dam (Central Java)

Infrastruktur Lainnya
Other Infrastructures

- Jalur Kereta Api Bojonegoro - Cepu (Jawa Timur)
  Bojonegoro - Cepu Railways (East Java)
- Jalur Kereta Api Kabat - Meneng (Jawa Timur)
  Kabat - Meneng Airport Railways (East Java)
- Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo (Jawa Tengah)
  Solo Balapan - Adi Soemarno Airport Railways (Central Java)
- Irigasi Komering (Sumatera Selatan)
  Komering Irigation (South Sumatra)
- Teluk Lamong (Jawa Timur)
  Teluk Lamong (East Java)
- Sirkuit Mandalika (Nusa Tenggara Barat)
  Mandalika Circuit (West Nusa Tenggara)
- Pematangan Lahan KIT Batang (Jawa Tengah)
  KIT Batang Land Maturation (Central Java)
- Terowongan Notog (Jawa Tengah)
  Notog Tunnel (Central Java)
- IPAL Terintegrasi KEK Industropolis (Batang)
  Integrated IPAL for KEK Industropolis (Batang)
- Jalan Akses Masjid IKN
  Access Road to the IKN Mosque



Bendungan Way Sekampung, Lampung
Way Sekampung Dam, Lampung



East Java Multipurpose Terminal (EJMT), Jawa Timur
East Java Multipurpose Terminal (EJMT), East Java



Jalan Tol Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi, Jawa Timur
Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi Toll Road, East Java

- **Proyek EPC**
  Pengembangan usaha di bidang EPC dirancang dengan suatu model usaha yang mempertimbangkan segmentasi pasar, strategi bersaing, struktur rantai pasokan, pendapatan, modal dan strategi pertumbuhan. PTPP telah menentukan peta jalan bisnis EPC dengan sasaran dan fokus di sektor energi, minyak dan gas, serta pertambangan.

- **EPC Projects**
  Business development in EPC is designed with a business model that considers market segmentation, competitive strategy, value chain structure, revenue, capital, and growth strategy. PTPP has stipulated the EPC business roadmap with a target and focus on the energy, oil and gas, and mining sectors.

Adapun proyek pembangunan jasa konstruksi EPC yang telah dibangun oleh PTPP, antara lain:

EPC construction service development projects undertaken by PTPP include:

Jenis Proyek **Project Type**	**Kapasitas** **Capacity**	**Lokasi** **Location**
PLTU Steam Fired Power Plant	*Coal Fire Steam Power Plant* 2x7 MW	Lampung
PLTGU Combined Cycle Power Plant	PLTGU 3x40 MW KDL 3x40 MW KDL Combined Cycle Power Plant	Cilegon (Banten)
	PLTGU Tanjung Uncang 100 - 120 MW Tanjung Uncang 100 - 120 MW Combined Cycle Power Plant	Batam
	Grati *Add On Block* 2 *Project* 150 MW	Pasuruan (Jawa Timur) Pasuruan (East Java)
	Lombok GECC *Power Plant* (Peaker)	Mataram (Lombok)
PLTG Gas Fired Power Plant	Gorontalo *Gas Fired Power Plant* 100 MW	Gorontalo
	PLBG Talang Duku Talang Duku Gas Fired Power Plant	Talang Duku (Sumatera Selatan) Talang Duku (South Sumatra)
	PLTG Lampung 100 MW Lampung Gas Fired Power Plant 100 MW	Tarahan (Lampung)
	PLTG Pontianak 100 MW Pontianak Gas Fired Power Plant 100 MW	Pontianak (Kalimantan Barat) Pontianak (West Kalimantan)
	PLTG Bangka 50 MW Bangka Gas Fired Power Plant 50 MW	Merawang (Bangka Belitung)
	PLTG Medan 75 MW Medan Gas Fired Power Plant 75 MW	Medan (Sumatera Utara) Medan (North Sumatra)
	PLTG Balai Pungut 75 MW Balai Pungut Gas Fired Power Plant 75 MW	Riau
	PLTG Lombok 50 MW Lombok Gas Fired Power Plant 50 MW	Lombok Barat West Lombok
	PLTG Suge Belitung 25 MW Suge Belitung Gas Fired Power Plant 25 MW	Bangka Belitung
	PLTG Nias 25 MW Nias Gas Fired Power Plant 25 MW	Nias (Sumatera Utara) Nias (North Sumatra)
	PLTG Manyarsidorukun 150KV Manyarsidorukun Gas Fired Power Plant 150KV	Jawa Timur East Java
	Portsite Dual Fuel Power Plant	Timika (Papua)

Jenis Proyek Project Type	Kapasitas Capacity	Lokasi Location
PLTP Geothermal Power Plant	Kamojang 50 MW	Garut (Jawa Barat) Garut (West Java)
PLTMG Gas Engine Power Plant	Sei Gelam *Gas Power Plant* 90 MW	Jambi
	Duri *Gas Engine Power Plant* 100 MW	Duri (Kepulauan Riau) Duri (Riau Islands)
	Jayapura Kendari *Mobile Power Plant* 100 MW	Jayapura (Papua) dan Kendari (Sulawesi Tenggara) Jayapura (Papua) and Kendari (Southeast Sulawesi)
	Bangkanai *Gas Engine Power Plant* 155 MW	Bangkanai (Kalimantan Tengah) Bangkanai (Central Kalimantan)
	MPP dan FTGEP Paket 7 MPP and FTGEP Package 7	Labuan Bajo (NTT), Ternate (Maluku), Bontang (Kalimantan Timur), dan Nabire (Papua) Labuan Bajo (NTT), Ternate (Maluku), Bontang (East Kalimantan), and Nabire (Papua)
	Scattered Dual Fuel Engine Mobile Power Plant 120 MW, dan *Optional Additional* 20 MW - Paket 1 Scattered Dual Fuel Engine Mobile Power Plant 120 MW, and Optional Additional 20 MW - Package 1	Sorong, Timika, Merauke, Manokwari, Biak, Nabire (Papua), dan Natuna (Riau) Sorong, Timika, Merauke, Manokwari, Biak, Nabire (Papua), and Natuna (Riau)
	Gas Fired Diesel Power Plant Project with NDC OF 200 MW	Pesanggaran (Bali)
PLTB Wind Farm	PLTB Tolo 72 MW	Jeneponto (Sulawesi Selatan) Jeneponto (South Sulawesi)
PLTS Solar Power Plant	*Solar* PV *Plant* 42 MW	3 Proyek di Lombok 3 Projects in Lombok
		1 Proyek Manado 1 Project in Manado
PLTD Diesel Fired Power Plant	PLTD Senayan 100 MW Senayan Diesel Fired Power Plant 100 MW	Jakarta
CNG Plant	Pembangunan *Storage* CNG untuk PT PJB unit Pembangkitan Muara Tawar 20 MMSCF CNG Storage Construction for PT PJB 20 MMSCF Muara Tawar Generation Unit	Muara Tawar (Bekasi)
Petrochemical	Gresik *Gas Cogeneration Plant*	Gresik (Jawa Timur), Tawar, dan Bekasi Gresik (East Java), Tawar, and Bekasi

Jenis Proyek Project Type	Kapasitas Capacity	Lokasi Location
Oil & Gas	*Wellpad & Access Road* Cepu	Bojonegoro (Jawa Timur) Bojonegoro (East Java)
	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap I Construction of Cirebon-Semarang Natural Gas Transmission Pipeline Phase I	Semarang (Jawa Tengah) Semarang (Central Java)
	Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang	Balikpapan (Kalimantan Timur) Balikpapan (East Kalimantan)
Industri Industry	Pabrik Pupuk NPK 500.000 MTPY NPK Factory Plant 500.000 MTPY	Lhokseumawe (Aceh)
	Gold Processing Plant 4000 TPD	Palu (Sulawesi Tengah) Palu (Central Sulawesi)



Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1, Pulau Jawa
Construction of Cirebon-Semarang Natural Gas Transmission Pipeline Phase I, Java Island



Refinery Development Master Plan RU-V Balikpapan, Kalimantan Timur
Refinery Development Master Plan RU-V Balikpapan, East Kalimantan

Konstruksi *Specialist, Plant & Equipment* | Specialist, Plant & Equipment Construction

Sebagai penyedia jasa pelayanan konstruksi, PTPP melalui entitas anaknya, yaitu PT PP Presisi Tbk ("PPRE") dan PT PP Urban ("PPUB") menjalankan usahanya dengan berfokus pada kegiatan jasa konstruksi lainnya yang dibagi menjadi 3 (tiga) segmen, yaitu Kontraktor *Specialist, Plant*, dan *Equipment*.

- ***Specialist***
  Bidang *Specialist* terdiri dari lingkup pekerjaan sebagai berikut: *Precast Building, Mechanical Electrical* dikerjakan oleh PPUB, sedangkan *Earth Moving, Bored Pile, Formwork, Mining Service* dan *Erection* dikerjakan PPRE.
- ***Plant***
  Bidang *Plant*, terdiri dari lingkup pekerjaan sebagai berikut: *Readymix, Precast Plant*, dan *Asphalt Mixing Plant*. Dalam bidang ini PPRE dan PPUB dipercaya menjadi roda bisnis dengan kapabilitas produksi beton sehingga pracetak berkualitas.
- ***Equipment***
  Bidang *Equipment*, terdiri dari lingkup pekerjaan sebagai berikut: *Heavy Equipment, Shoring,* dan *Aluminium Formwork*. Dalam bidang ini, PTPP melalui anak usahanya yaitu PPRE dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan peralatan konstruksi.

As a provider of construction services, through its subsidiaries, i.e., PT PP Presisi Tbk (PPRE) and PT PP Urban (PPUB), PTPP runs its business by focusing on other construction service activities that are divided into three segments: Specialist, Plant, and Equipment Contractor.

- **Specialist**
  The scope of work in the Specialist field is as follows: PPUB does Precast Buildings and Mechanical Electrical work, while PPRE does Earth Moving, Bored Pile, Formwork, Mining Service, and Erection.
- **Plant**
  The scope of work in the Plant sector is as follows: Readymix, Precast Plant, and Asphalt Mixing Plant. In this field, PPRE and PPUB are entrusted to carry out the business with the capacity to produce high-quality concrete and precast.
- **Equipment**
  The scope of work in the Equipment sector is as follows: Heavy Equipment, Shoring, and Aluminum Formwork. PTPP is trusted to manage and develop construction equipment in this field through its subsidiary, PPRE.

Investasi | Investment

Selain menjadi perusahaan konstruksi, PTPP juga melakukan pengembangan usaha dan berfokus pada investasi di bidang Properti, Infrastruktur, dan Energi yang dikelola melalui entitas anak usahanya, yaitu PT PP Properti Tbk ("PPRO"), PT PP Presisi Tbk ("PPRE"), PT PP Infrastruktur ("PPIN"), PT PP Urban ("PPUB"), dan PT PP Energi ("PPEN"), yang memiliki berbagai diversifikasi usaha.

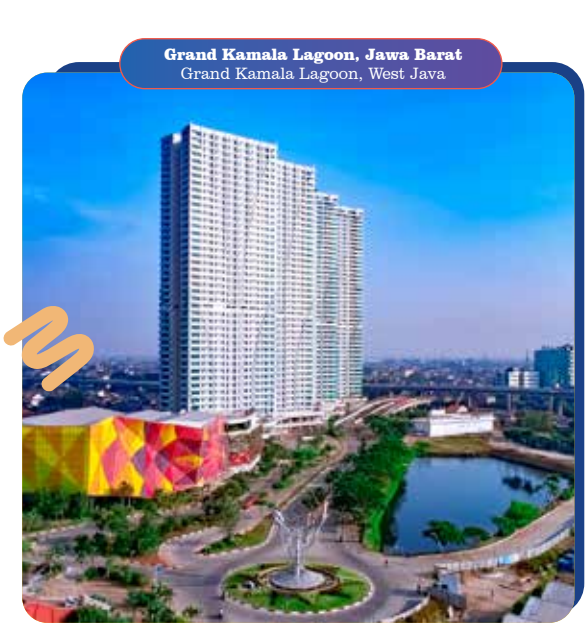
- **Segmen Properti**
  PTPP melalui entitas anaknya di bidang properti dan realti yaitu PT PP Properti Tbk ("PPRO") membagi portofolio bisnisnya menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: Residensial, *Mall* dan *Edutainmen*t dan Hotel. PPRO melaksanakan pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian sejumlah gedung komersial, hotel, apartemen, perkantoran, permukiman, pusat perbelanjaan, *trade center* dan fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. PPRO mengutamakan pasar kelas menengah dengan secara selektif melihat peluang pasar kelas atas dan senantiasa mengutamakan pengembangan produk *high rise building* dengan mengusung konsep "*Beyond Space*".

Adapun produk-produk yang dihasilkan dan dikelola oleh PPRO adalah sebagai berikut:

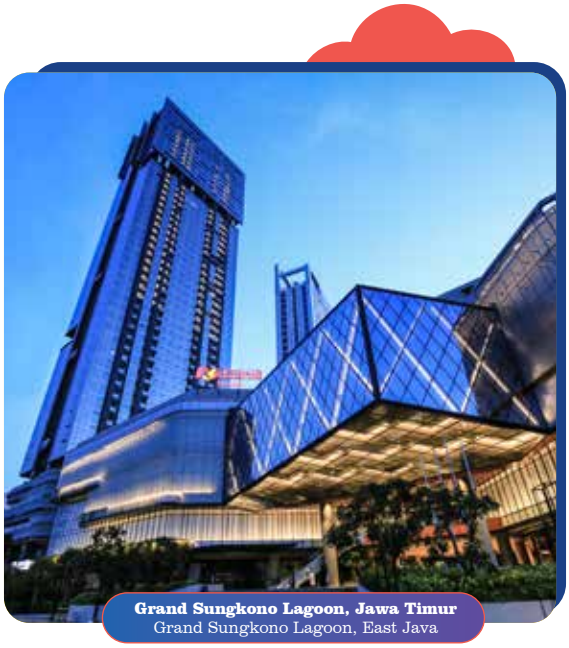
In addition to being a construction company, PTPP conducts business development and focuses on investment in the Property, Infrastructure, and Energy sectors, which are managed through its subsidiaries, namely PT PP Properti Tbk (PPRO), PT PP Presisi Tbk (PPRE), PT PP Infrastruktur (PPIN), PT PP Urban (PPUB) and PT PP Energi (PPN), which have various business diversifications.

- **Property Segment**
  Through its property and realty sector subsidiary, PT PP Properti Tbk (PPRO), PTPP divides its business portfolio into three fields: Residentials, Malls & Edutainments, and Hotel. PPRO works on developing, constructing, and operating several commercial buildings, hotels, apartments, offices, settlements, shopping centers, trade centers, and other facilities to meet the needs and lifestyles of the growing community. PPRO concentrates on the middle-class market by selectively looking at upscale market opportunities and always prioritizes the development of high-rise building products by carrying the "Beyond Space" concept.

The products produced and managed by PPRO are as follows:



Grand Kamala Lagoon, Jawa Barat
Grand Kamala Lagoon, West Java



Grand Sungkono Lagoon, Jawa Timur
Grand Sungkono Lagoon, East Java

Residensial
Residentials

Grand Kamala Lagoon, Bekasi, Jawa Barat Grand Kamala Lagoon Superblock, Bekasi, West Java	Apartemen Patria Park, Jakarta Patria Park Apartment, Jakarta
Grand Shamaya, Surabaya	FX Residence, Jakarta
Grand Dharmahusada Lagoon, Surabaya	Perumahan Karyawan Perum Otorita Jatiluhur, Purwakarta Perum Otorita Jatiluhur Employee Housing, Purwakarta
Grand Sungkono Lagoon, Surabaya	Perumahan Permata Puri I, Cibubur Permata Puri I Housing, Cibubur
Gunung Putri Square, Bogor, Jawa Barat Gunung Putri Square, Bogor, West Java	Perumahan Permata Puri II, Cibubur Permata Puri II Housing, Cibubur
Verdura, Sentul, Jawa Barat Verdura, Sentul, West Java	Perumahan Permata Puri III, Cibubur Permata Puri III Housing, Cibubur
Begawan Apartemen, Malang	Perumahan Permata Puri IV, Cibubur Permata Puri IV Housing, Cibubur
Amartha View, Semarang	Perumahan Permata Puri Laguna, Cibubur Permata Puri Laguna Housing, Cibubur
The Alton Apartemen, Semarang	Perumahan Bukit Permata Puri, Ngaliyan - Semarang Bukit Permata Puri Housing, Ngaliyan - Semarang
Westown View, Surabaya	Taman Griya Permata, Bali
Riverview Residence, Cikarang, Jawa Barat Riverview Residence, Cikarang, West Java	Puri Lembana, Bandung, Jawa Barat Puri Lembana, Bandung, West Java
Little Tokyo Apartemen, Cikarang - Jawa Barat Little Tokyo Apartment, Cikarang - West Java	Payon Amartha, Semarang
Ma-Zhoji, Depok	Tana Babarsari, Yogyakarta
Grand Anila Apartment, Kertajati	The Ayoma Apartment, Serpong
Grand Sagara Apartment, Surabaya	Green Park Terrace, Cilegon
Paxton Apartment, Surabaya	Louvin Apartment, Jatinangor, Jawa Barat
Pavilion Permata Apartemen, Surabaya	Apartemen Evenciio, Depok, Jawa Barat Evenciio Apartment, Depok, West Java
Apartemen Paladian Park, Jakarta Paladian Park Apartment, Jakarta	

Hotel

Prime Park Hotel Bandung
Swiss-Belhotel Balikpapan
Prime Park Hotel & Convention, Lombok
Prime Park Hotel & Convention, Pekanbaru
Palm Park Hotel & Convention, Surabaya

Mall & Edutainment

Kaza City Mall
Balikpapan Ocean Square
Lagoon Avenue Dharmahusada
De Tjolomadoe
Mall Serang Serang Mall
Grand Slipi Tower
Sungkono Business Park
Kidzania Surabaya
PP Sinergi Banjaratma
Rest Area Batang

Sedangkan untuk memenuhi program Pemerintah, PTPP melalui anak usahanya, PPUB, juga menjalankan usahanya di bidang pengembangan hunian terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun produk properti yang dihasilkan oleh PPUB, antara lain:

» URBANtown Serpong;
» URBANtown Karawang;
» Apartemen Sudimara Forestwalk.

Meanwhile, to meet the Government's program, through its subsidiary, PPUB, PTPP also runs a business in developing affordable housing for Low-Income Communities (MBR). The property products of PPUB include:

» URBANtown Serpong;
» URBANtown Karawang;
» Sudimara Forestwalk Apartment.



Urbantown Serpong, Banten



Pasar Legi Kota Surakarta, Jawa Tengah
Pasar Legi Surakarta, Central Java

Selain PPRO dan PPUB, PTPP juga mendirikan anak usaha bernama PT Sinergi Colomadu ("SCM") untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang saat ini melalui pengelolaan sebuah kawasan yang bernama "De Tjolomadoe" yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kawasan De Tjolomadoe terdapat fasilitas museum, tempat belanja, serta tempat makan dan rekreasi. Ruangan yang terdapat dalam De Tjolomadoe dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pernikahan, rapat, dan acara besar lainnya.

In addition to PPRO and PPUB, PTPP has established a subsidiary called PT Sinergi Colomadu (SCM) to meet the ever-changing people's needs and lifestyles through the management of an area called "De Tjolomadoe" located in Karanganyar, Central Java. There is a museum and a shopping center, as well as dining and recreational facilities in the De Tjolomadoe area. The rooms in De Tjolomadoe can be used for various activities, such as weddings, meetings, and other major events.

Selain itu, PTPP juga melakukan investasi pada beberapa anak usaha seperti:

» PT Centurion Perkasa Iman untuk mengelola Grand Swiss-Belhotel Darmo di Surabaya;
» PT PP Sinergi Banjaratma untuk mengelola Rest Area KM 260B di Jawa Tengah;
» PT Jasamarga Rest Area Batang untuk mengelola Rest Area KM 360B di Jawa Tengah;
» PT Indonesia Ferry Property untuk mengelola Terminal Eksekutif Merak, Terminal Eksekutif Bakauheni, dan Hotel Meruorah di Labuan Bajo;
» PT Kawasan Industri Batang untuk mengelola Kawasan Industri Pemerintah yang berdaya saing internasional dan ramah terhadap investor di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

PTPP is also investing in several subsidiaries, such as:

» PT Centurion Perkasa Iman to manage Grand Swiss-Belhotel Darmo in Surabaya;
» PT PP Sinergi Banjaratma to manage the KM260B Rest Area in Central Java;
» PT Jasamarga Rest Area Batang to manage the KM360B Rest Area in Central Java;
» PT Indonesia Ferry Property to manage Merak Executive Terminal, Bakauheni Executive Terminal, and Meurorah Hotel in Labuan Bajo;
» PT Kawasan Industri Batang manages a Government Industrial Estate that is internationally competitive and investor-friendly in Batang Regency, Central Java.

PTPP juga memiliki beberapa *Strategic Business Unit* (SBU), antara lain:
» KSU Danareksa untuk mengelola Menara Danareksa di Jakarta;
» BSI Tower di Jakarta;
» Park Hotel Jakarta;
» Mall Lagoon Avenue Bekasi;
» Mall Lagoon Avenue Sungkono di Surabaya;
» Prime Park Hotel Lombok.

PTPP also has several Strategic Business Units (SBUs), including:
» SBU Danareksa to manage Danareksa Tower in Jakarta;
» BSI Tower in Jakarta;
» Park Hotel Jakarta;
» Lagoon Avenue Mall Bekasi;
» Lagoon Avenue Sungkono Mall in Surabaya;
» Prime Park Hotel Lombok.



- **Segmen Infrastruktur**
  PTPP melalui entitas anaknya, yaitu PT PP Infrastruktur ("PPIN") bertugas untuk mengelola aset yang berfokus pada investasi di bidang infrastruktur pengelolaan air. PPIN akan terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. Pada segmen ini PPIN berperan sebagai investor atau pemilik proyek. Berikut proyek-proyek yang kepemilikan sahamnya dimiliki langsung oleh PPIN, antara lain:
  » SPAM Kali Angke, Tangerang Selatan;
  » SPAM Jatisari, Bekasi;
  » SPAM Gresik;
  » SPAM Pekanbaru-Kampar;
  » SPAM Pekanbaru Kota;
  » SPAM Tanah Merah; dan
  » SPAM Batam Hulu dan Hilir.

  Sedangkan proyek investasi di bidang infrastruktur yang kepemilikan sahamnya saat ini masih dimiliki oleh PTPP, antara lain:
  » Pengelolaan Proyek Jalan Tol bagian Depok-Antasari sepanjang 21,5 km dengan kepemilikan saham sebesar 6,74%;
  » Pelabuhan Multi Terminal Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan kepemilikan saham sebesar 1,26%;
  » Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang, dengan kepemilikan saham 1,70%;
  » Pembangunan Rel Kereta Api Makassar (Parepare), dengan kepemilikan saham 47,81%;

- **Infrastructure Segment**
  PTPP's subsidiary, PT PP Infrastruktur (PPIN), is tasked with managing the parent company's assets, which focuses on investment in infrastructure. PPIN will continue to expand and contribute optimally to national development. In this segment, PPIN functions as an investor or project owner. The following are projects whose share ownership is directly owned by PPIN:

  » Kali Angke SPAM, South Tangerang;
  » Jatisari SPAM, Bekasi;
  » Gresik SPAM;
  » Pekanbaru-Kampar SPAM;
  » Pekanbaru City SPAM;
  » Tanah Merah SPAM; and
  » Batam Hulu and Hilir SPAM.

  Meanwhile, investment projects in the infrastructure sector whose share ownership is currently still owned by PTPP are:
  » Management of the Depok–Antasari section of the 21.5 km toll road project with 6.74% share ownership;
  » Multi Terminal Kuala Tanjung Port, North Sumatra, with 1.26% share ownership;
  » Development of Batang Integrated Industrial Estate, with 1.70% share ownership;
  » Construction of Makasar (Parepare) Railway, with 47.81% share ownership;

» Pengelolaan proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,32 km dengan kepemilikan saham sebesar 13,75%;
» Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Manado - Bitung sepanjang 39 km dengan kepemilikan saham sebesar 14,99%;
» Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km dengan kepemilikan saham sebesar 4,44%;
» Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 50,91 km dengan kepemilikan saham sebesar 15,01%;
» Pembangunan dan Pengelolaan proyek jalan Tol akses Patimban sepanjang 37,05 Km dengan kepemilikan saham sebesar 3,59%;
» Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Batam dan Pekanbaru.

PTPP Juga memiliki anak usaha yang bergerak di bidang investasi Jalan Tol, yaitu PT PP Semarang Demak ("PPSD"). PPSD dibentuk untuk mengelola Jalan Tol Semarang - Demak yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jalan Tol Semarang - Demak merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional ("PSN") yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada entitas anak ini, PTPP memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 75,10%.

» Management of 99.32 km Balikpapan–Samarinda Toll Road project with 13.75% share ownership;
» Construction and Management of the 39 km Manado–Bitung Toll Road project with 14.99% share ownership;
» Construction and Management of the 75.82 km Yogyakarta–Bawen Toll Road project with 4.81% share ownership;
» Construction and Management of the 50.91 km Serang–Panimbang Toll Road project with 15.01% share ownership;
» Construction and Management of the 37.05 km Patimban Access Toll Road project with a 6.31% share ownership;
» Development of a Drinking Water Supply System (SPAM) in Batam and Pekanbaru City.

PTPP also has a subsidiary engaging in toll road investment, i.e., PT PP Semarang Demak (PPSD). PPSD was established to manage the Semarang–Demak Toll Road, which is still under construction. The Semarang–Demak Toll Road is one of the National Strategic Projects (PSN) launched by the Government. In this subsidiary, PTPP has a share ownership portion of 75.10%.



Perkeretaapian Makassar - Parepare, Sulawesi Selatan
Makassar - Parepare Railway, South Sulawesi



Jalan Tol Semarang - Demak, Jawa Tengah
Semarang - Demak Toll Road, Central Java

- **Segmen Energi**
  PTPP memiliki peta jalan bisnis dengan sasaran dan fokus dalam hal investasi di bidang energi dengan mempertimbangkan berbagai tinjauan aspek, melalui anak usahanya yang bergerak di bidang investasi Oil & Gas, Thermal Power Plant dan Renewable Energy, yakni PT PP Energi ("PPEN"). Investasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Energy Segment**
  PTPP has developed a business roadmap with a target and focus on investment by considering various aspects through its subsidiary engaging in investment in Oil & Gas, Thermal Power Plants, and Renewable Energy, i.e., PT PP Energi (PPEN). The investments that have been made are as follows:

Upstream Oil & Gas

PT Odira Energy Karang Agung

(masa konsesi s.d. 2037) (*Producing Oil Field I Up to 500 BOPD*) & (*Producing Gas I Up to 5 mmCFD*)
(concession period until 2037) (Producing Oil Field I up to 500 BOPD) and (Producing Gas I up to 5 mmCFD)

Downstream Oil & Gas

PT Surya Mina Bunkerindo

(*Nipa Oil Storage Tank Terminal | Capacity 1 Million CBM*)

Power Plant Fossil Fuel & Renewable Energy

PT Sepoetih Daya Prima

IPP Lampung Tengah *Coal Fired Power Plant* 2x7 MW
Central Lampung IPP Coal Fired Power Plant 2x7 MW

PT Pembangkitan Perkasa Daya

IPP Jambi 2 *Mine Mouth Coal Fired Power Plant* 2x300 MW
IPP Jambi 2 Mine Mouth Coal Fired Power Plant 2x300 MW

PT Meulaboh Power Generation

IPP Meulaboh *Coal Fired Power Plant* 2x200 MW
Meulaboh IPP MW Coal Fired Power Plant 2x200

PT Solo Citra Metro *Plasma Power*

Waste to Energy 5 MW
Waste to Energy 5 MW

Retail & Commercial Renewable Energy

Easy Solar ID

Retail & Commercial renewable energy mobile application



PT Odira Energy Karang Agung

Kebijakan Mutu dan K3 dan Lingkungan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan investasi, PTPP dalam mencapai visi dan misi menetapkan kebijakan di bidang Kualitas, Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan yang berlaku bagi seluruh unit di Perusahaan.

Quality, OHS, and Environment Policy

As a company engaging in the construction and investment services business, PTPP set policies in the areas of Quality, Occupational Health & Safety (OHS), and Environment in achieving its vision and mission that apply to all units in the Company.

Kebijakan Mutu
Quality Policy

• Mengedepankan kepedulian terhadap keinginan dan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas yang berkesinambungan. • Mengutamakan pendekatan rekayasa teknik maupun bisnis salah satunya dengan pemanfaatan teknologi mutakhir khususnya *Building Information Modelling* (BIM). • Mendorong profesionalisme SDM yang berwawasan global.		• Prioritizing customer desires and satisfaction by continuously improving quality. • Prioritizing technical and business engineering approaches, including using the latest technology, especially Building Information Modeling (BIM). • Encouraging HR professionalism with a global perspective.

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS)

• Penerapan sistem manajemen HSE mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan dengan melibatkan pihak terkait, serta aktif mendorong keikutsertaan, partisipasi dan konsultasi bagi seluruh pegawai dan vendor. • Pencegahan terhadap terjadinya cedera dan sakit akibat kerja. • Penggunaan Sumber daya yang efisien dalam setiap aktivitas dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan alam.		• The implementation of the HSE management system follows applicable regulations and requirements through continuous improvements to Occupational Safety, Health, and Environmental Management by involving related parties. It actively encourages participation and consultation for all employees and vendors. • Aims to prevent work-related injuries and illnesses. • The system also focuses on the efficient use of resources in every activity and plays an active role in preserving the environment and nature.

Kebijakan Lingkungan Kerja
Work Environment Policy

• Peduli akan Lingkungan Kerja yang sehat dan mempertimbangkan Dampak Lingkungan dalam setiap kegiatan kerja. • Memastikan lingkungan kerja yang aman dari kejahatan gender dan pelecehan seksual baik bagi insan dan mitra kerja serta berkomitmen mengurangi adanya dampak negatif pada lingkungan lokal, komunitas dan pekerjanya. • Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dengan tanpa kekhawatiran kepada sesama insan PP dan pihak eksternal yang terkait untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif.		• Caring for a healthy work environment and considering environmental impacts in every work activity. • Ensure a safe working environment from gender crimes and sexual harassment for both people and partners and commit to reducing any negative impact on the local environment, community, and employees. • Encourage increased care in good faith or based on reasonable belief with no concern for fellow PP personnel and related external parties to form a conducive work environment.



Pelebaran Jalan Tol Cikopo - Palimanan, Jawa Barat
Cikopo - Palimanan Toll Road Widening, West Java

Wilayah Operasional
Operational Area

Per 31 Desember 2025, kelompok usaha PTPP menaungi 9 (sembilan) Entitas Anak Langsung, 23 Entitas Anak Tidak Langsung, 23 Entitas Asosiasi, dan 2 (dua) Kerja Sama Operasi (KSO) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, proyek-proyek oleh PTPP dengan total 123 proyek dapat dilihat pada peta sebaran berikut:

On December 31, 2025, the PTPP business group oversees nine Direct Subsidiaries, 23 Indirect Subsidiaries, 23 Associates, and two Joint Operations (KSOs) spread throughout Indonesia. A total of 123 PTPP Projects are available in the following distribution map:

Peta Sebaran Proyek PTPP per 31 Desember 2025
PTPP Project Distribution Map on December 31, 2025



Phillippines

2

Projects



Sulawesi

6

Projects

Papua & Maluku

20

Projects

Bali & Nusa Tenggara

4

Projects

123

Proyek Aktif

On-going Projects

Keanggotaan Asosiasi
Membership in Associations

Untuk memperkuat bisnisnya, PTPP telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, diantaranya adalah:

To strengthen its business, PTPP has joined the membership of organizations, including:

Nama Organisasi Organization Name	Lingkup Scale	Peran dan Kontribusi PTPP PTPP's Role and Contribution
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Indonesian Contractors Association (AKI)	Nasional National	Anggota Biasa General Member
Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) National Construction Executor Association (ASPEKNAS)	Nasional National	Anggota Member
Perkumpulan Pengusaha Konstruksi Terintegrasi (PAKTI) Integrated Construction Entrepreneurs Association (PAKTI)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI) Indonesian Integrated Contractors Association (AKTI)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Indonesian Electrical and Mechanical Contractors Association (AKLI)	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Nasional National	Anggota Biasa General Member
Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Indonesian National Construction Company Association (GAPEKSINDO)	Nasional National	Anggota Member
Green Building Council Indonesia (GBCI) Green Building Council Indonesia (GBCI)	Nasional National	Corporate Founder dan Anggota Corporate Founder and Member
Institut BIM Indonesia (IBIMI) Indonesian BIM Institute (IBIMI)	Nasional National	Anggota Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	Nasional National	Anggota Member
Forum Humas BUMN (FH BUMN) SOE Public Relations Forum (FH BUMN)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Publicly Listed Companies Association (AEI)	Nasional National	Anggota Member
Anugerah Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia (AKMEI) Association of Indonesian National Design and Construction Companies (AKMEI)	Nasional National	Anggota Member
Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HKJI) Indonesian Construction Services Association (HKJI)	Nasional National	Anggota Member
Ikatan Ahli Manajemen Konstruksi Ramping Indonesia (IAMKRI) Indonesian Lean Construction Management Association (IAMKRI)	Nasional National	Anggota Member
Forum QHSE BUMN Konstruksi Construction SOE QHSE Forum	Nasional National	Anggota Member



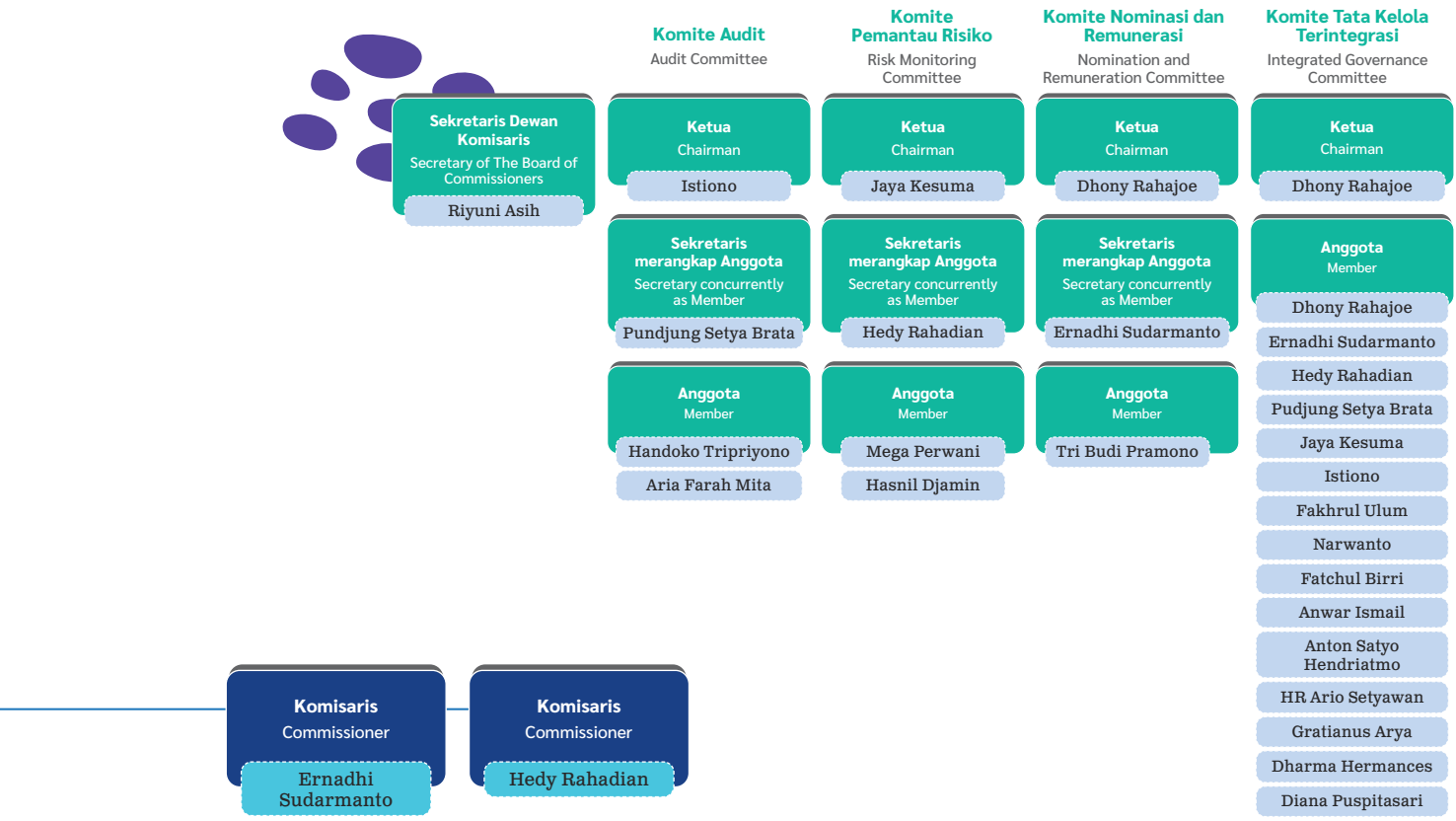
Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur Organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 044/SK/PP/DIR/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan tahun 2024.
The Company's Organizational Structure has been ratified through the Board of Directors Decree No. 044/SK/PP/DIR/2024 dated Juni 20, 2024, on Changes in the Company's Organizational Structure in 2024.

Struktur organisasi yang fleksibel dan kokoh memungkinkan seluruh elemen PTPP untuk **bersinergi dan tumbuh berkelanjutan.**

A flexible and robust organization allows all elements of PTPP to synergize and grow sustainably.




Komite Audit
Audit Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of The Board of Commissioners
Riyuni Asih
Ketua
Chairman
Istiono
Ketua
Chairman
Jaya Kesuma
Ketua
Chairman
Dhony Rahajoe
Ketua
Chairman
Dhony Rahajoe
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary concurrently as Member
Pundjung Setya Brata
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary concurrently as Member
Hedy Rahadian
Sekretaris merangkap Anggota
Secretary concurrently as Member
Ernadhi Sudarmanto
Anggota
Member
Dhony Rahajoe
Ernadhi Sudarmanto
Hedy Rahadian
Pudjung Setya Brata
Jaya Kesuma
Istiono
Fakhrul Ulum
Narwanto
Fatchul Birri
Anwar Ismail
Anton Satyo Hendriatmo
HR Ario Setyawan
Gratianus Arya
Dharma Hermances
Diana Puspitasari
Anggota
Member
Handoko Tripriyono
Aria Farah Mita
Anggota
Member
Mega Perwani
Hasnil Djamin
Anggota
Member
Tri Budi Pramono
Komisaris
Commissioner
Ernadhi Sudarmanto
Komisaris
Commissioner
Hedy Rahadian
PP Properti
PP Presisi
PP Urban
PP Energi
PP Infra
Subsidiari Lainnya & Afiliasi
Other Subsidiaries & Affiliations
Direksi Operasi Bidang Gedung
Director of Building Operations
Yuyus Juarsa
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
Director of Infrastructure Operations
Yul Ari Pramuraharjo
Divisi Building
Building Division
Daniel Rinsani Pakpahan
Divisi Infrastructure 1
Infrastructure 1 Division
Yusdiantoro
Divisi Infrastructure 2
Infrastructure 2 Division
Pande Ketut Gede Karmawan
Divisi EPC
EPC Division
Bakhtiyar Efendi
Branch Filipina
Philippines Branch

Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile

Sepanjang tahun 2025, PTPP tidak melakukan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris."

Throughout 2025, PTPP did not make any changes to the composition of the Board of Commissioners."



Infrastruktur Dasar Pelabuhan Benoa, Bali
Basic Infrastructure of Port of Benoa, Bali

* Surat pernyataan independensi dari Dhony Rahajoe dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagian pembahasan Komisaris Independen.
The independence statement letter from Dhony Rahajoe is available in the Good Corporate Governance chapter of the Independent Commissioner section.



Ir. Dhony Rahajoe

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen*
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner*

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Luar Biasa Tanggal 13 Desember 2023 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, periode ke-1

Extraordinary GMS on December 13, 2023, until the closing of the GMS to be held in 2028, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Bandung, 1 November 1965 Born in Bandung, November 1, 1965	Usia 60 tahun 60 years old	Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia Domiciled in South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Akta No. 26 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Sebelumnya, beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PTPP.

Appointed as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner through the resolution of the Extraordinary GMS held on December 13, 2023, with Deed No. 26 dated December 18, 2023, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the GMS to be held in 2028. This is his first term on the Board of Commissioners. Previously, he never served on the PTPP Board of Commissioners.

Pendidikan
Formal Education

Sarjana (S1) Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung, Bandung (1984).

Bachelor of Architectural Engineering, Bandung Institute of Technology, Bandung (1984).

Pengalaman Kerja
Work Experience

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen PTPP, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bina Karya Persero (2023-2025); Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) (2022-2024); Komisaris PT Inti Tekno Sains Bandung (2019-2022), Managing Director Sinarmas Land (2015-2022), dan President Director PT Inti Tekno Sukses Bersama (2010-2019).

In addition to serving as President Commissioner/Independent Commissioner of PTPP, he also serves as President Commissioner of PT Bina Karya Persero (2023-2025); Deputy Head of the Nusantara Capital City Authority (IKN) (2022-2024); Commissioner of PT Inti Tekno Sains Bandung (2019-2022), Managing Director of Sinarmas Land (2015-2022), and President Director of PT Inti Tekno Sukses Bersama (2010-2019).

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2025) dari Center for Risk Management & Sustainability (CRMS).

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2025) from Center for Risk Management & Sustainability (CRMS).

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2025-sekarang); Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang)

Di luar Perusahaan: Tidak ada

Within the Company:
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (2025-present); Chairman of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present)

Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi
Affiliation Relationship

Dhony Rahajoe tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Dhony Rahajoe is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan
Company Share Ownership

Dhony Rahajoe tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)

Dhony Rahajoe does not own any Company shares. (ticker code: PTPP).

* Surat pernyataan independensi dari Istiono dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagian pembahasan Komisaris Independen.
The independence statement letter from Istiono is available in the Good Corporate Governance chapter of the Independent Commissioner section.



Irjen. Pol. (Purn) Drs. Istiono, MH

Komisaris Independen*
Independent Commissioner*

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 5 April 2022 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, periode ke-1

Term of Office: Annual GMS for the Fiscal Year 2021 on April 5, 2022 until the closing of the GMS to be held in 2027, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Tulungagung, 1 Oktober 1963 Born in Tulungagung, October 1, 1963	Usia 62 tahun 62 years old	Berdomisili di Bandung, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2022 dengan Akta No. 18 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan di tahun 2027. Jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Sebelumnya, beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PTPP.

Appointment History

Appointed as Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2021 held on April 5, 2022, with Deed No. 18 dated April 5, 2022, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS for the Fiscal Year 2026 to be held in 2027. This is his first term on the Board of Commissioners. Previously, he never served on the PTPP Board of Commissioners.

Pendidikan

- LEMHANAS (2012);
- Magister (S2) Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2005);
- SESPIM Polri (2002);
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1998);
- Akademi Kepolisian (AKPOL) (1987).

Formal Education

- LEMHANAS (2012);
- Master of Law, Padjadjaran University, Bandung (2005);
- SESPIM Polri (2002);
- College of Police Science (PTIK) (1998);
- Police Academy (AKPOL) (1987).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Komisaris Independen PTPP, beliau berkarier di Kepolisian Republik Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Kakorlantas Polri (2019-2021), Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2018-2019), Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri (2017-2018), dan Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung (2016-2017).

Work Experience

Prior to becoming an Independent Commissioner of PTPP, he had a career in the Indonesian National Police, including serving as Chief of Traffic Corps, National Police (2019-2021), Bangka Belitung Islands Chief of Police (2018-2019), Community Potential Development Directorate, Community Development Security Maintenance Agency Corps of the National Police (2017-2018), and Bangka Belitung Islands Deputy Chief of Police (2016-2017).

Sertifikasi Profesi

Indonesia Internal Auditor (2023) dari IA Indonesia
(The Institute of Internal Auditors Indonesia).

Professional Certification

Indonesia Internal Auditor (2023) from IA Indonesia
(The Institute of Internal Auditors Indonesia).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Audit (2022-sekarang); Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang)

Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company:
Chairman of the Audit Committee (2022-present); Member of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present)

Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Istiono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/ Pengendali melalui rangkap jabatan yang dimiliki.

Affiliation Relationship

Istiono is not affiliated with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. However, he is affiliated with the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder through his concurrent positions.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Istiono tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham : PTPP)

Company Share Ownership

Istiono does not own any Company shares. (ticker code: PTPP).

* Surat pernyataan independensi dari Jaya Kesuma dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagian pembahasan Komisaris Independen.
The independence statement letter from Jaya Kesuma is available in the Good Corporate Governance chapter of the Independent Commissioner section.



Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum.

Komisaris Independen*
Independent Commissioner*

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Luar Biasa Tanggal 13 Desember 2023 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, periode ke-1

Extraordinary GMS on December 13, 2023, until the closing of the GMS to be held in 2028, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Bandar Lampung, 25 Desember 1963 Born in Bandar Lampung, December 25, 1963	Usia 62 tahun 62 years old	Berdomisili di Bandung, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Akta No. 26 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Sebelumnya, beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PTPP.

Appointment History

Appointed as Independent Commissioner by resolution of the Extraordinary GMS held on December 13, 2023, by Deed No. 26 dated December 18, 2023, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for a term of office until the closing of the GMS to be held in 2028. This is his first term on the Board of Commissioners. Previously, he never served on the PTPP Board of Commissioners.

Pendidikan

- Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan, Bandung (2016);
- Magister (S2) Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2005);
- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Prof. Dr. Hazairin. S.H., Bengkulu (1989).

Formal Education

- Doctorate of Law at Pasundan University, Bandung (2016);
- Master of Law, Parahyangan Catholic University, Bandung (2005);
- Bachelor of Law, Prof. Dr Hazairin University. S.H., Bengkulu (1989).

Pengalaman Kerja

Berkarier di institusi Kejaksaan, dengan beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia (2020-2023), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2019-2020), Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2018), dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (2016-2018).

Work Experience

He has a career in the Attorney General's Office, with several positions held, including Secretary of the Attorney General's Training Agency (2020-2023), Head of the West Kalimantan High Prosecutor's Office (2019-2020), Head of the Planning Bureau of the Attorney General's Office of (2018), and Head of the Bali High Prosecutor's Office (2016-2018).

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan:
Ketua Komite Pemantau Risiko (2025-sekarang); Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang)

Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company:
Within the Company: Chairman of the Risk Monitoring Committee (2025-present); Member of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present)

Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Jaya Kesuma tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Jaya Kesuma is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Jaya Kesuma tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

Jaya Kesuma does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)



* Surat pernyataan independensi dari Pundjung Setya Brata dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagian pembahasan Komisaris Independen.
The independence statement letter from Pundjung Setya Brata is available in the Good Corporate Governance chapter of the Independent Commissioner section.

Ir. Pundjung Setya Brata, M.M.

Komisaris Independen*
Independent Commissioner*

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029, periode ke-1

Annual GMS for Fiscal Year 2023 on April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2029, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Purworejo, 20 November 1965 Born in Purworejo, 20 November 1965	Usia 60 tahun 60 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 dengan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Sebelumnya beliau belum pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PTPP.

Appointment History

Appointed as an Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS of the Fiscal Year 2023 held on April 24, 2024, with Deed No. 53 dated April 29, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of the Fiscal Year 2028 to be held in 2029. This is his first term on the Board of Commissioners. Previously, he never served on the PTPP Board of Commissioners.

Pendidikan

- Magister (S2) *Strategic Management* dari Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta (2015);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah (1990).

Formal Education

- Master of Strategic Management from Prasetiya Mulya University, Jakarta (2015);
- Bachelor of Civil Engineering from Diponegoro University Semarang, Central Java (1990).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Komisaris Independen PTPP, beliau berkarier pada kelompok usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan beberapa jabatan diantaranya Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2014-2024); Komisaris Utama PT Adhi Persada Gedung (2019-2022); dan Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti (2018-2022).

Work Experience

Prior to becoming an Independent Commissioner of PTPP, he had a career in the PT Adhi Karya (Persero) Tbk business group, with several positions including Operations Director II of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2014-2024); President Commissioner of PT Adhi Persada Gedung (2019-2022); and President Commissioner of PT Adhi Commuter Properti (2018-2022).

Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Enterprise Risk Management Associate Professional (2025) dari Center for Risk Management & Sustainability (CRMS).	Enterprise Risk Management Associate Professional (2025) from Center for Risk Management & Sustainability (CRMS).
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Anggota Komite Audit (2024-sekarang); Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Tidak ada	**Within the Company:** Within the Company: Member of the Audit Committee (2024-present); Member of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present) **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Pundjung Setya Brata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Pundjung Setya Brata is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.
Kepemilikan Saham Perusahaan	**Company Share Ownership**
Pundjung Setya Brata tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)	Pundjung Setya Brata does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)



Dr. Ernadhi Sudarmanto Ak., MM., M.Ak.

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029, periode ke-2

Annual GMS of the Fiscal Year 2023 on April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2029, 2nd Term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Magelang, 4 Juli 1965 Born in Magelang, July 4, 1965	Usia 60 tahun 60 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 dengan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Jabatan ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Komisaris PTPP berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2019 dengan Akta No. 5 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan di tahun 2024.

Appointment History

Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS of Fiscal Year 2023 held on April 24, 2024, with Deed No. .53 dated April 29, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of Fiscal Year 2028 to be held in 2029. This is his second term of office. Previously, he has served as Commissioner of PTPP based on the Resolution of the 2018 Annual GMS held on April 30, 2019, with Deed No. 5 dated May 6, 2019, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the 2023 Annual GMS held in 2024.

Pendidikan

- Doktor (S3) Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2022);
- Magister (S2) Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta (2016);
- Magister (S2) Management dari Universitas Terbuka, Jakarta (2014);
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1992).

Formal Education

- Doctorate in Accounting from Padjadjaran University, Bandung (2022);
- Master of Accounting from STIE YAI, Jakarta (2016);
- Master of Management from Open University, Jakarta (2014);
- Bachelor in Accounting from Indonesian State College of Accountancy (1992).

Pengalaman Kerja

Selain menjabat Komisaris PTPP, beliau juga menjabat sebagai Penasehat Utama Menteri Transmigrasi (Agustus 2025-Sekarang). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP (2019-Juli 2025). Komisaris PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2018-2019); Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2017-2019), Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP (2016-2017), Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2012-2016), dan Kepala Bidang Investigasi, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta (2011-2012).

Work Experience

In addition to serving as a Commissioner of PTPP, he serves as Senior Advisor to the Transmigration Minister (August 2025–present). Previously, he served as Principal Secretary of the Development Finance Comptroller (BPKP) (2019-July 2025). Commissioner of PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2018–2019), Deputy for Supervision of Government Agencies in Politics, Law, Security, Human Development and Culture of the Development Finance Comptroller (BPKP) (2017-2019), Director of Investigation of BPKP Government Agencies (2016-2017), Director of Supervision of Regional Financial Implementation (2012-2016), and Head of Investigation Division, BPKP Representative of DKI Jakarta Province (2011-2012).

Sertifikasi Profesi

- Dalam Negeri
  - Certified Forensic Auditor (CFrA) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2024);
  - Certified Risk Executive Leader dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2023);
  - Certified Fraud Risk Management Professional, BPKP (2023);
  - Certified Government Risk Executive, BPKP (2023);
  - Certified Internal Audit Executive (CIAE), BPKP (2022);
  - Certified Governance Chief Audit Executive (CGCAE), BPKP (2020);
  - Qualified Internal Auditor (QIA) dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (2017);
  - Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2014).
- Luar Negeri
  - Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) (2023);
  - ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA) dari ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) (2020).

Professional Certification

- Domestic
  - Certified Forensic Auditor (CFrA), from the National Profession Certification Agency (BNSP) (2024);
  - Certified Risk Executive Leader, from the Development Finance Comptroller (BPKP) (2023);
  - Certified Fraud Risk Management Professional, BPKP (2023);
  - Certified Government Risk Executive, BPKP (2023);
  - Certified Internal Audit Executive (CIAE), BPKP (2022);
  - Certified Governance Chief Audit Executive (CGCAE), BPKP (2020);
  - Qualified Internal Auditor (QIA), from the Qualified Internal Auditor Certification Board (2017);
  - Chartered Accountant (CA), from the Indonesian Accountants Association (IAI) (2014).
- Overseas
  - Certified Fraud Examiner (CFE), from Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) (2023);
  - ASEAN Chartered Professional Accountants (ASEAN CPA), from ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) (2020).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan:
Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2025-sekarang); Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang)

Di luar Perusahaan:
Penasihat Utama Menteri Transmigrasi (Agustus 2025-Sekarang).

Concurrent Positions

Within the Company:
Secretary concurrently as Member of the Nomination and Remuneration Committee (2025-present); Member of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present)

Outside the Company:
Principal Advisor to the Transmigration Minister (August 2025–Present).

Hubungan Afiliasi

Ernadhi Sudarmanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui rangkap jabatan yang dimiliki.

Affiliation Relationship

Ernadhi Sudarmanto is not affiliated with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. However, he is affiliated with the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder through his dual positions.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Ernadhi Sudarmanto tidak memiliki saham Perusahaan.
(kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

Ernadhi Sudarmanto does not own any Company shares.
(ticker code: PTPP)



Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 30 April 2025 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030, periode ke-2

Annual GMS of the Fiscal Year 2024 on April 30, 2025, until the closing of the GMS to be held in 2030, 2nd term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Bandung, 14 Maret 1964 Born in Bandung, 14 March 1964	Usia 61 tahun 61 years old	Berdomisili di Bandung, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 dengan Akta No. 02 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan di tahun 2030. Jabatan ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Komisaris PTPP berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Akta No. 18 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.

Appointment History

Appointed as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS of the Fiscal Year2024 held on April 30, 2025, with Deed No. 02 dated May 2, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of the Fiscal Year 2029 to be held in 2030. This is his second term on the Board of Commissioners. Previously, he has served on the PTPP Board of Commissioners based on the Annual GMS of the Fiscal Year 2019 held on June 4, 2020, with Deed No. 18 dated June 4, 2020, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of the Fiscal Year 2024 held in 2025.

Pendidikan

- Doktor (S3) *Technical Engineering* dari University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom (1996);
- Magister (S2) Master of Science Bidang Highway Engineering dari University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom (1992);
- Sarjana (S1) Fakultas Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat (1987).

Formal Education

- Doctorate in Technical Engineering from University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom (1996);
- Master of Science in Highway Engineering from University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom (1992);
- Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology, West Java (1987).

Pengalaman Kerja

Selain menjabat Komisaris PTPP, beliau juga berkarier di Kementerian PUPR sebagai Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama (2023-sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Marga (2020-2024), Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan (2018-2020), Direktur Preservasi (2017-2018), Direktur Jembatan (2015-2017), Kepala BBPJN V Surabaya (2013-2015), Kasubdit Teknik Jalan, Dit. Bina Teknik (2011-2013).

Work Experience

In addition to serving as Commissioner of PTPP, he has a career at the PUPR Ministry as a Senior Road and Bridge Management Expert (2023-present). Previously, he served as Director General of Bina Marga (2020-2024), Director of Barriers and Urban Freeways (2018-2020), Preservation Director (2017-2018), Director of Bridges (2015-2017), Head of BBPJN V Surabaya (2013-2015), Head of Sub-Directorate of Road Engineering, Engineering Directorate (2011-2013).

Sertifikasi Profesi	Professional Certification
-	-
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko (2025-sekarang); Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2024-sekarang); dan Pengawas Komite ESG (2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI (2024-sekarang)	**Within the Company:** Secretary concurrently as Member of the Risk Monitoring Committee (2025-present); Member of the Integrated Governance Committee (2024-present); and Supervisor of the ESG Committee (2024-present) **Outside the Company:** Senior Road and Bridge Management Expert, Public Works and Housing Ministry (PUPR) (2024-present)
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Hedy Rahadian tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi, Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui rangkap jabatan yang dimiliki.	Hedy Rahadian is not affiliated with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. However, he is affiliated with the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder through his concurrent positions.
Kepemilikan Saham Perusahaan	**Company Share Ownership**
Hedy Rahadian tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)	Hedy Rahadian does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)

Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile

Sepanjang tahun 2025, PTPP tidak melakukan adanya perubahan susunan Anggota Direksi.

Throughout 2025, PTPP did not make any changes to the composition of the Board of Directors.



Jalan Lintas Selatan Lot 6 Pantai Sine - Tulungagung, Jawa Timur
South Cross Road Lot 6 Sine Beach - Tulungagung, East Java



Ir. Novel Arsyad, MM.

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 30 April 2025 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030, periode ke-2

Annual GMS for Fiscal Year 2024 on April 30, 2025, until the closing of the GMS to be held in 2030, 2nd term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Surakarta, 30 September 1967 Born in Surakarta, September 30, 1967	Usia 58 tahun 58 years old	Berdomisili di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 dengan Akta No. 02 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan di tahun 2030. Jabatan ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama PTPP berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020 dengan Akta No. 18 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.

Appointment History

Appointed as President Director based on the resolution of the Annual GMS for Fiscal Year 2024 on April 30, 2025, with Deed No. 02 dated May 2, 2025, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of the fiscal year 2029, to be held in 2030. This is his second term on the Board of Directors. Previously, he has served as the President Director based on the resolution of the Annual GMS of the fiscal year 2019 held on June 4, 2020, with Deed No. 18 dated June 4, 2020, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of the fiscal year 2024 held in 2025.

Pendidikan

- Magister (S2) *Strategic Management* dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta (2013);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1991).

Formal Education

- Master of Strategic Management, Bina Nusantara University, Jakarta (2013);
- Bachelor in Civil Engineering, Indonesian Islamic University, Yogyakarta (1991).

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau berkarier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2020), Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2016-2017), General Manager Departemen Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016), Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2014-2016), dan Manajer Divisi Bangunan Gedung, Departemen Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2012-2013).

Work Experience

Previously, he had a career at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Some of the positions he has held are as Director of Human Capital and Development of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2020), President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2016-2017), General Manager of the Building Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016), Commissioner of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2014-2016), and Building Division Manager, Building Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2012-2013).

Sertifikasi Profesi

Insinyur Profesional dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2021).

Professional Certification

Professional Engineer from the Indonesian Engineers Association (PII) (2021).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Pembina Komite ESG (2024-sekarang)
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company: Advisor of the ESG Committee (2024-present)
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Novel Arsyad tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Novel Arsyad is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Per 31 Desember 2025 Novel Arsyad memiliki saham Perusahaan: 62.600 lembar saham. (kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

On December 31, 2025, Novel Arsyad owns shares of the Company: 62,600 shares. (stock code: PTPP)



Agus Purbianto, SE, Ak., MM.

Direktur Keuangan
Director of Finance

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021 s.d. penutupan RUPS yang diselenggarakan di tahun 2026, periode ke-2

Annual GMS for Fiscal Year 2020 on May 25, 2021, until the closing of the GMS held in 2026, 2nd term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jombang, 18 Agustus 1971 Born in Jombang, August 18, 1971	Usia 54 tahun 54 years old	Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled East Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Akta No. 27 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Jabatan ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Direktur PTPP berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016 dengan Akta No. 59 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS yang diselenggarakan di tahun 2021.

Beberapa jabatan Direktur PTPP dan penugasan yang pernah diemban dalam masa jabatannya sejak pertama kali diangkat adalah:

- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 16 Maret 2017 terkait perubahan nomenklatur jabatan Direksi, beliau ditugaskan menjabat Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia untuk masa jabatan meneruskan pengangkatan sebelumnya.
- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019 terkait perubahan nomenklatur jabatan Direksi, beliau dipercaya untuk menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk masa jabatan meneruskan pengangkatan sebelumnya.
- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021 sesuai dengan Akta No. 27 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, beliau kembali diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024 sesuai dengan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, beliau kembali diangkat sebagai Direktur Keuangan.

Appointment History

Appointed as Director based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2020 held on May 28, 2021, with Deed No. 27 dated May 28, 2021, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS for the Fiscal Year 2025 to be held in 2026. This is his second term of office. Previously, he had served as PTPP Director based on the Resolution of the Annual GMS of the Fiscal Year 2015 held on April 29, 2016, with Deed No. 59 dated April 29, 2016, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the GMS held in 2021.

Some of the positions of Director of PTPP and assignments that have been held during his tenure since he was first appointed are:

- Based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2016 dated March 16, 2017, related to changes in the nomenclature of the Board of Directors, he was assigned to serve as Director of Finance and Human Capital Management for the term of office continuing his previous appointment.
- Based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2018 dated April 30, 2019, related to changes in the nomenclature of the Board of Directors, he was appointed as Director of Finance and Risk Management for the term of office to continue his previous appointment.
- Based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2020 dated May 25, 2021, per Deed No. 27 dated May 28, 2021, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, he was re-appointed as Director of Finance and Risk Management.
- Based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2023 dated April 24, 2024, per Deed No. 53 dated April 29, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, he was re-appointed as the Director of Finance.

Pendidikan	**Formal Education**
• Magister (S2) Manajemen SDM dari Universitas Sebelas Maret (2007); • Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1994).	• Master of HR Management from Sebelas Maret University (2007); • Bachelor of Economic Accounting from Brawijaya University (1994).
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
Beliau pernah berkarier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan beberapa jabatan diantaranya General Manajer Keuangan (2014-2016); Manager Akuntansi dan Pajak (2011-2014); dan Manager Keuangan dan Human Capital Sipil Umum (2009-2011).	He has had a career at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, with several positions including General Manager of Finance (2014-2016); Accounting and Tax Manager (2011-2014); and General Civil Finance and Human Capital Manager (2009-2011).
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
• Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2013); • Certified Professional Management Accountant dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) (2019).	• Chartered Accountant from the Indonesian Institute of Accountants (IAI) (2013); • Certified Professional Management Accountant from the Indonesian Institute of Management Accountants (IAMI) (2019).
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Ketua Komite ESG (2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Tidak ada	**Within the Company:** Chairman of the ESG Committee (2024-present) **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Agus Purbianto tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Agus Purbianto is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.
Kepemilikan Saham Perusahaan	**Company Share Ownership**
Agus Purbianto tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)	Agus Purbianto does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)



Ir. Yul Ari Pramuraharjo, M.Si.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
Director of Infrastructure Operations

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 30 April 2025 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030, periode ke-2

Annual GMS of the Fiscal Year 2024 on April 30, 2025, until the closing of the GMS to be held in 2030, 2nd term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jakarta, 6 Juli 1964 Born in Jakarta, July 6, 1964	Usia 61 tahun 61 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 dengan Akta No. 02 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat di hadapan hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan di tahun 2030. Jabatan ini merupakan periode kedua. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Direktur PTPP berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020 dengan Akta No. 18 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.

Beberapa jabatan Direktur PTPP dan penugasan yang pernah diemban dalam masa jabatannya sejak pertama kali diangkat adalah:
- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, beliau ditugaskan menjabat Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management untuk masa jabatan hingga RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025.
- Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021 terkait perubahan nomenklatur jabatan Direksi, beliau dipercaya untuk menjabat Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dengan masa jabatan meneruskan pengangkatan sebelumnya.

Appointment History

Appointed as Director based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024 on held on April 30, 2025, with Deed No. 02 dated May 2, 2025 made before hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS for the Fiscal Year 2029 to be held in 2030. This is his second term on the Board of Directors. Previously, he has served on the PTPP Board of Directors based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2019 held on June 4, 2020, with Deed No. 18 dated June 4, 2020, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024 held in 2025.

Previous PTPP Director and assignments undertaken during his terms, since the initial appointment, are as follows:
- Based on the Resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2019 dated June 4, 2020, he was assigned as the Director of Corporate Strategy and Human Capital Management for the term of office until the closing of the Annual GMS for the Fiscal Year 2024 held in 2025.
- Based on the Resolution of the Annual GMS for the 2020 Fiscal Year dated May 25, 2021, related to changes in the nomenclature of the Board of Directors positions, he was entrusted to serve as Director of Infrastructure Operations with a term of office continuing his previous appointment.

Pendidikan	Formal Education
• Magister (S2) Manajemen jurusan Administrasi Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia (1995); • Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).	• Master of Management majoring in International Business Administration from the University of Indonesia (1995); • Bachelor in Civil Engineering from Brawijaya University, Malang (1989).
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
Beliau berkarier di PTPP sejak tahun 1990. Beberapa jabatan yang pernah diemban di PTPP adalah Kepala Divisi Infrastruktur 1 (2020), Kepala Divisi Infrastruktur 2 (2017-2020), Kepala Divisi Pemasaran II (2014-2017), Marketing Manager (2012-2014), Business Development Manager (2009-2012) dan Kepala Cabang IX (2004-2009).	He has had a career at PTPP since 1990. Some of the positions he has held at PTPP are Head of Infrastructure Division 1 (2020), Head of Infrastructure Division 2 (2017-2020), Head of Marketing Division II (2014-2017), Marketing Manager (2012-2014), Business Development Manager (2009-2012), and Branch IX Manager (2004-2009)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Ahli Madya K3 Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (2019).	OHS Construction Intermediate Expert, LPJK (2019).
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan:** Tidak ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Yul Ari Pramuraharjo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Yul Ari Pramuraharjo is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.
Kepemilikan Saham Perusahaan	**Company Share Ownership**
Yul Ari Pramuraharjo tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)	Yul Ari Pramuraharjo does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)



Yuyus Juarsa, S.T., M.M.

Direktur Operasi Bidang Gedung
Director of Building Operations

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, periode ke-1

Annual GMS for Fiscal Year 2022 on April 12, 2023, until the closing of the GMS to be held in 2028, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Bekasi, 22 Juli 1977 Born in Bekasi, July 22, 1977	Usia 48 tahun 48 years old	Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Operasi Bidang Gedung melalui keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023 dengan Akta No. 30 tanggal 14 April 2023 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama dalam jajaran Direksi Perusahaan. Sebelumnya, beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi PTPP.

Appointment History

Appointed as Director of Building Operations based on the resolution of the Annual GMS for the Fiscal Year 2022 held on April 12, 2023, with Deed No. 30 dated April 14, 2023, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the GMS to be held in 2028. This is his first term on the Board of Directors. Previously, he has never served on the PTPP Board of Directors.

Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (2021);
- Sarjana (S1) dari Institut Teknologi Sepuluh November, Jawa Timur (2001).

Formal Education

- Master of Management from Prasetya Mulya University, Jakarta (2021);
- Bachelor's degree from 10 November Institute of Technology, East Java (2001).

Pengalaman Kerja

Beliau berkarier di lingkup kelompok usaha PTPP. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain Direktur Utama entitas anak PT PP Properti Tbk (2022-2023), Senior Vice President (SVP) Head of Corporate Secretary Bureau (2020-2022), SVP Head of Building 2 Division (2018-2020), SVP Head of Human Capital Management Division (2015-2017), Head of Branch VII Bali (2015-2017), General Manager (GM) entitas anak PT PP Properti Tbk (2014-2015), GM PP University (2011-2012), HR Manager (2011-2012), dan GM Project Branch III Jakarta (2010-2011).

Work Experience

He has a career within the PTPP business group. Some of the positions he has held include President Director of PT PP Properti Tbk (2022-2023), Senior Vice President (SVP) Head of Corporate Secretary Bureau (2020-2022), SVP Head of Building 2 Division (2018-2020), SVP Head of Human Capital Management Division (2015-2017), Head of Branch VII Bali (2015-2017), General Manager (GM) of PT PP Properti Tbk (2014-2015), GM PP University (2011-2012), HR Manager (2011-2012), and GM Project Branch III Jakarta (2010-2011).

Sertifikasi Profesi

Certificate in Management dari Holmesglen Institute of TAFE (2011)

Professional Certification

Certificate in Management, Holmesglen Institute of TAFE (2011).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Yuyus Juarsa tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Yuyus Juarsa is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Per 31 Desember 2025 Yuyus Juarsa tidak memiliki saham Perusahaan. (kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

On December 31, 2024, Yuyus Juarsa does not own any Company shares. (ticker code: PTPP)



Ing. Tommy Wiranata Anwar, M.Sc., CRMP., CRGP.

Direktur Manajemen Risiko dan Legal
Director of Risk Management and Legal

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029, periode ke-1

Annual GMS for Fiscal Year 2023 on April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2029, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Medan, 16 Januari 1982 Born in Medan, January 16, 1982	Usia 43 tahun 43 years old	Berdomisili di Tangerang, Banten, Indonesia Domiciled in Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 dengan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Jabatan ini merupakan periode pertama. Sebelumnya beliau belum pernah menjabat dalam jajaran Direksi PTPP.

Appointment History

Appointed as Director of Risk Management and Legal based on the Resolution of the Annual GMS of Fiscal Year 2023 held on April 24, 2024, with Deed No. 53 dated April 29, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of Fiscal Year 2028 to be held in 2029. This is his first term of office. Previously, he has never served on the PTPP Board of Directors.

Pendidikan

- Master (S2) of *Construction Law & Dispute Resolution* dari King's College London, Inggris (2017);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Hogeschool van Utrecht, Belanda (2005).

Formal Education

- Master of Construction Law & Dispute Resolution at King's College London, UK (2017);
- Bachelor of Civil Engineering at Hogeschool van Utrecht, Netherlands (2005).

Pengalaman Kerja

Beliau berkarier di lingkup kelompok usaha PTPP. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain Komisaris Utama entitas anak, PT PP Properti Tbk (2023-2024); Senior Vice President, Head of Risk Management & Legal Division di PT PP (Persero) (2022-2024); dan Senior Manager Advocation di PT PP (Persero) (2020-2022).

Work Experience

He has a career within the PTPP business group. Some of the positions he has held include President Commissioner of PT PP Properti Tbk (2023-2024); Senior Vice President, Head of Risk Management & Legal Division at PT PP (Persero) (2022-2024); and Senior Manager Advocation at PT PP (Persero) (2020-2022).

Sertifikasi Profesi

- Certified Risk Governance Professional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) (2022);
- Certified Risk Management Professional dari LSPMR (2022).

Professional Certification

- Certified Risk Governance Professional from the Risk Management Professional Certification Body (LSPMR) (2022);
- Certified Risk Management Professional from LSPMR (2022).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Tommy Wiranata Anwar tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Tommy Wiranata Anwar is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Tommy Wiranata Anwar tidak memiliki saham Perusahaan.
(kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

Tommy Wiranata Anwar does not own any Company shares.
(ticker code: PTPP)



I Gede Upeksa Negara, S.T.

Direktur Strategi Korporasi dan HCM
Director of Corporate Strategy and HCM

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024 s.d. penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, periode ke-1

Annual GMS for Fiscal Year 2023 on April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2028, 1st term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Buleleng, 28 Agustus 1972 Born in Buleleng, August 28, 1972	Usia 53 tahun 53 years old	Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Strategi Korporasi dan HCM berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 dengan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Jabatan ini merupakan periode pertama. Sebelumnya beliau belum pernah menjabat dalam jajaran Direksi PTPP.

Appointment History

Appointed as Director of Corporate Strategy and HCM based on the Resolution of the Annual GMS of Fiscal Year 2023 held on April 24, 2024, with Deed No. 53 dated April 29, 2024, made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, for the term of office until the closing of the Annual GMS of Fiscal Year 2028 to be held in 2029. This is his first term of office. Previously, he has never served on the Board of Directors of PTPP.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997).

Formal Education

Bachelor in in Civil Engineering at Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997).

Pengalaman Kerja

Beliau berkarier di lingkup kelompok usaha PTPP. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain Direktur Utama entitas anak, PT PP Presisi Tbk (2023-2024); Direktur Utama entitas anak, PT PP Infrastruktur (2022-2023); Direktur Utama entitas anak, PT PP Properti Tbk (2021-2022); Senior Vice President, Head of Business Development & Investment Division (2018-2021); General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division (2017-2018); General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division (2017); Kepala Cabang VI (2015-2017); Junior Professional Project Manager (2013-2015); Project Manager (2009-2013)

Work Experience

He has a career within the PTPP business group. Some of the positions he has held include President Director of PT PP Presisi Tbk (2023-2024); President Director of PT PP Infrastruktur (2022-2023); President Director of PT PP Properti Tbk (2021-2022); Senior Vice President, Head of Business Development & Investment Division (2018-2021); General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division (2017-2018); General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division (2017); Head of Branch VI (2015-2017); Junior Professional Project Manager (2013-2015); Project Manager (2009-2013).

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Positions

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

I Gede Upeksa Negara tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

I Gede Upeksa Negara is not affiliated with members of the Board of Commissioners, other Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Kepemilikan Saham Perusahaan

Per 31 Desember 2025 I Gede Upeksa Negara memiliki saham Perusahaan sebanyak 340.300 lembar saham (kode saham: PTPP)

Company Share Ownership

On December 31, 2025, I Gede Upeksa Negara owns 340,300 shares of the Company (ticker code: PTPP).



Demografi Pegawai
Employee Demographics

Demografi Pegawai

PTPP memiliki pegawai dengan budaya kerja unggul yang merupakan modal paling berharga dalam mencapai visi Menjadi Kontraktor Pilihan Utama yang Inovatif, Unggul dan Berkelanjutan didukung Keuangan yang Sehat. Di akhir tahun 2025, PTPP memiliki 1.737 pegawai, mengalami penurunan 1,64% atau setara dengan 29 orang dibandingkan jumlah pegawai per 31 Desember 2024 sebanyak 1.766 orang. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan *zero-growth*. Pada tahun 2025, PTPP hanya menjalankan Program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) dengan jumlah yang terbatas untuk menggantikan pegawai pensiun dan mengundurkan diri.

Profil demografi pegawai Perusahaan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

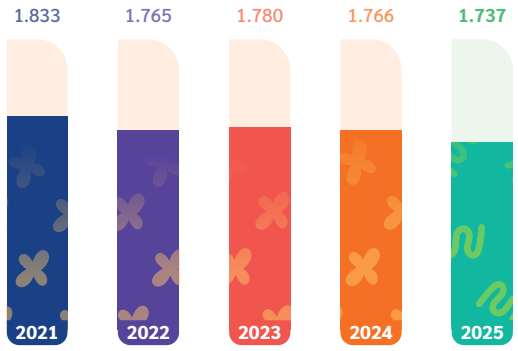
Employee Demographics

PTPP has employees with a superior work culture who are the most valuable asset in achieving the vision to be an Innovative, Superior, and Sustainable Contractor of First Choice supported by Sound Finance. At the end of 2025, PTPP had 1,737 employees, a decrease of 1.64% (29 personnel) from 1,766 as of December 31, 2024. This decrease was due to a zero-growth policy. In 2025, PTPP only implemented a limited number of Joint SOE Recruitment Programs (RBB) to replace employees who retired or resigned.

The employee demographic profiles are available in the following tables and charts.

Pergerakan Jumlah Pegawai dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2021-2025
Movement in the Number of Employees in the Last Five Years 2021-2025





Demografi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan (orang)
Employee Demographics by Position Level (personnel)

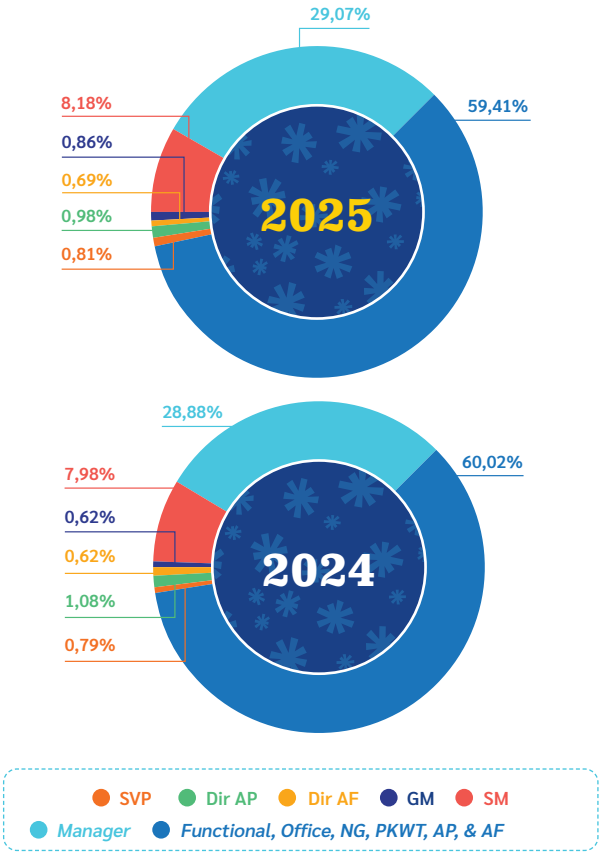
Level Jabatan Position Level	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Senior Vice President (SVP)	12	2	14	0,81	12	2	14	0,79	-	-
Director AP (Dir AP)	15	2	17	0,98	17	2	19	1,08	(2)	(10,53)
Director AF (Dir AF)	12	-	12	0,69	11	-	11	0,62	(1)	(9,09)
General Manager (GM)	15	-	15	0,86	11	-	11	0,62	4	36,36
Senior Manager (SM)	125	17	142	8,18	127	14	141	7,98	1	0,71

Level Jabatan Position Level	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Manager	473	32	505	29,07	481	29	510	28,88	(5)	(0,98)
Functional, Office, NG, PKWT, AP, & AF	806	226	1.032	59,41	832	228	1.060	60,02	(28)	(2,64)
Jumlah **Total**	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Total Employee Composition by Organizational Level



Senior Vice President (SVP) adalah jabatan struktur yang paling tinggi dalam divisi/unit pada Perusahaan, jabatan ini bisa disebut sebagai BOD-1. Di bawahnya terdapat jabatan-jabatan struktural pada *office* dan fungsional pada proyek, level jabatan tersebut berada dibawah level SVP yang dimulai dari BOD-2 dengan level jabatan *General Manager, Senior Manager & Project Manager*. Untuk level selanjutnya dibawah BOD-2 terdapat level jabatan Manager & *Officer/Staff*. Terdapat pula pegawai organik PTPP yang ditempatkan pada entitas anak/afiliasi dengan berbagai level jabatan.

Senior Vice President (SVP) is the highest structural position in the division/unit of the Company. This position can be referred to as BOD-1. Under it, there are structural positions in the office and functional in the project; the position is below the SVP level starting from BOD-2 with the level of the position of General Manager, Senior Manager, and Project Manager. For the next level below BOD-2, there is a Manager & Officer/Staff position level. There are also PTPP organic employees who are placed in subsidiaries/affiliates with various levels of positions.

Berdasarkan perbandingan struktur level jabatan tahun 2025 dan 2024, Perusahaan mencatat pertumbuhan signifikan pada jumlah pegawai, yang terutama didorong oleh peningkatan pada kelompok jabatan fungsional, *Office*, NG, PKWT, AP, & AF. Struktur manajemen puncak tetap stabil dengan penyesuaian terbatas sebagai bagian dari optimalisasi organisasi, sementara manajemen menengah diperkuat untuk mendukung efektivitas pengelolaan bisnis. Secara keseluruhan, komposisi organisasi tahun 2025 mencerminkan strategi Perusahaan dalam memperkuat kapasitas eksekusi dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Based on a comparison of the 2025 and 2024 job level structures, the Company recorded significant growth in the number of employees, which was mainly driven by increases in the functional, Office, NG, PKWT, AP, and AF job groups. The top management structure remained stable with limited adjustments as part of organizational optimization, while middle management was strengthened to support effective business management. Overall, the 2025 organizational composition reflects the Company's strategy to strengthen its execution capacity and support sustainable business growth.

Demografi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

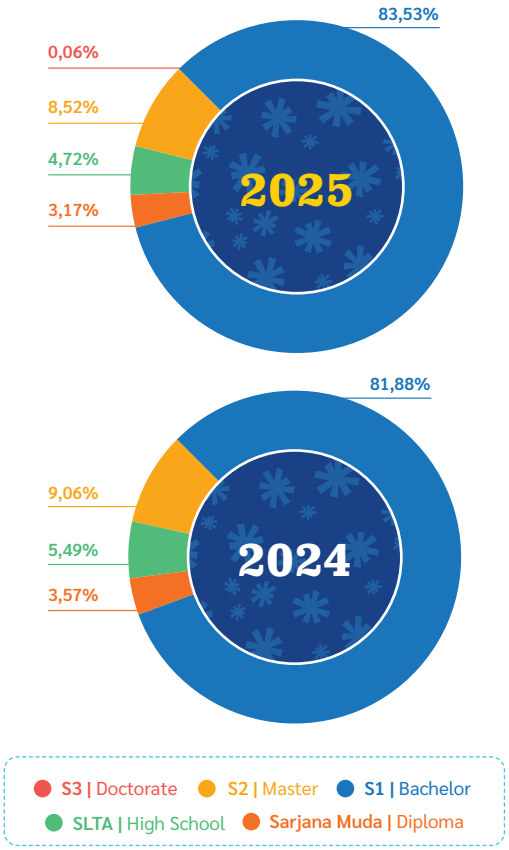
Employee Demographics by Education Level (personnel)

Jenjang Pendidikan Education Level	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Doktor (S-3) Doctorate	1	-	1	0,06	-	-	-	-	1	-
Pasca Sarjana (S2) Master's Degree	106	42	148	8,52	116	44	160	9,06	(11)	(6,88)
Sarjana (S1) Bachelor Degree	1.223	228	1.451	83,53	1.224	222	1.446	81,88	5	0,35
Sarjana Muda Diploma	46	9	55	3,17	54	9	63	3,57	(8)	(12,70)
SLTA Sederajat High School Equivalent	82	-	82	4,72	97	-	97	5,49	(15)	(15,46)
Jumlah Total	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Total Employee Composition by Education Level



Berdasarkan tingkat Pendidikan, jumlah pegawai didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi Strata 1 (S1). Komposisi ini menggambarkan kesiapan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi profesional, khususnya pada sektor konstruksi yang menuntut keseimbangan antara pengetahuan teknis dan penerapan praktik kerja di lapangan.

Perusahaan terus mendorong peningkatan kompetensi melalui program pengembangan dan pembelajaran berkelanjutan guna memastikan relevansi kemampuan pegawai terhadap dinamika industri dan keberlanjutan bisnis.

Based on education level, the majority of employees have a bachelor's degree (S1). This composition reflects the Company's human resources' readiness to support the implementation of work that requires professional competence, particularly in the construction sector, which demands a balance between technical knowledge and the application of practical skills in the field.

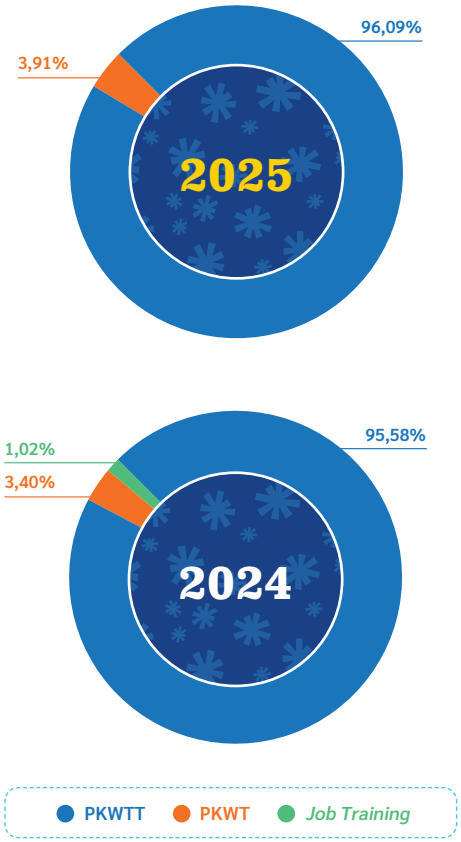
The Company continues to encourage competency development through continuous learning and development programs to ensure employees' skills remain relevant to industry dynamics and business sustainability.

Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographics by Employment Status (personnel)

Status Kepegawaian Employment Status	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Tetap (PKWTT) Permanent (PKWTT	1.417	252	1.669	96,09	1.442	246	1.688	95,58	(19)	(1,13)
Kontrak (PKWT) Contract (PKWT)	41	27	68	3,91	38	22	60	3,40	8	13,33
On The Job Training	-	-	-	-	11	7	18	1,02	(18)	(100,00)
Jumlah **Total**	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Total Employee Composition by Employment Status



Penurunan jumlah pegawai Perusahaan pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Pegawai Tetap (PKWTT) serta tidak adanya pegawai dengan status *On The Job Training* (OJT) dibandingkan tahun sebelumnya dan sejalan dengan penerapan kebijakan *zero-growth* yang dilakukan Perusahaan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan optimalisasi kebutuhan sumber daya manusia. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga organisasi tetap ramping dengan meningkatkan produktivitas, serta memastikan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis Perusahaan.

The decline in the number of employees of the Company in 2025 was mainly influenced by the reduction in permanent employees (PKWTT) and the absence of employees with On The Job Training (OJT) status compared to the previous year and in line with the implementation of the zero-growth policy carried out by the Company as part of efforts to control and optimize human resource requirements. This policy is aimed at keeping the organization lean by increasing productivity and ensuring more effective utilization of labor in line with the Company's operational and business strategy needs.

Demografi Pegawai Berdasarkan Spesialisasi Keahlian (orang)

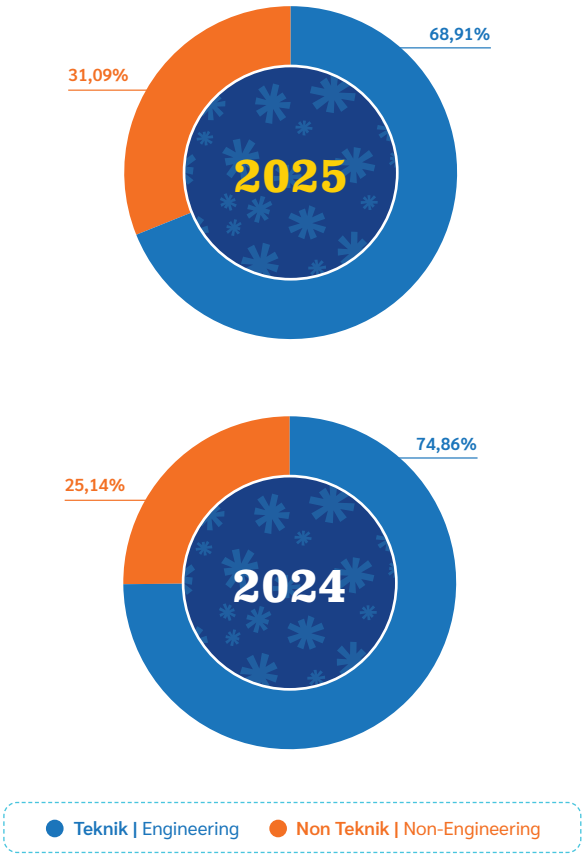
Employee Demographics by Expertise (personnel)

Spesialisasi Keahlian Expertise	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Teknik Engineering	1.078	119	1.197	68,91	1.180	142	1.322	74,86	(125)	(9,46)
Non Teknik Non-Engineering	380	160	540	31,09	311	133	444	25,14	96	21,62
Jumlah Total	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Spesialisasi Keahlian

Total Employee Composition by Expertise



Pada tahun 2025, komposisi pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan menunjukkan dominasi pegawai dengan keahlian teknik, terutama pada jabatan-jabatan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Struktur ini menggambarkan kesesuaian antara kompetensi teknis pegawai dengan kebutuhan jabatan strategis perusahaan dalam menjaga kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan kinerja operasional.

Seiring dengan penguatan tata kelola dan transformasi bisnis, perusahaan secara bertahap juga mengembangkan kompetensi non-teknis, seperti manajerial, kepemimpinan, dan *sustainability*, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan jabatan serta kesinambungan organisasi.

In 2025, the employee composition by expertise shows a dominance of employees with technical expertise, especially in positions directly related to project planning, implementation, and control. This structure illustrates the alignment between employees' technical competencies and the Company's strategic job requirements for maintaining the quality, safety, and sustainability of operational performance.

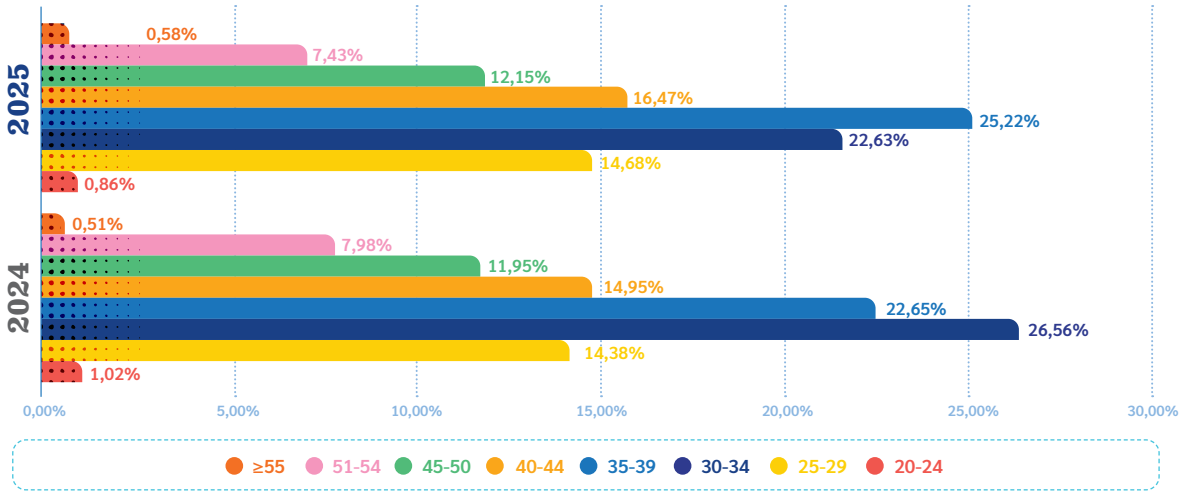
Along with strengthening governance and business transformation, the Company is also gradually developing non-technical competencies, including managerial, leadership, and sustainability skills, to enhance job performance and organizational continuity.

Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics by Age Range (personnel)

Rentang Usia Age Range	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
≥ 55 Tahun ≥ 55 years old	9	1	10	0,58	9	-	9	0,51	1	11,11
51-54 tahun 51-54 years old	121	8	129	7,43	135	6	141	7,98	(12)	(8,51)
45-50 tahun 45-50 years old	199	12	211	12,15	199	12	211	11,95	-	-
40-44 tahun 40-44 years old	260	26	286	16,47	248	16	264	14,95	22	8,33
35-39 tahun 35-39 years old	358	80	438	25,22	324	76	400	22,65	38	9,50
30-34 tahun 30-34 years old	292	101	393	22,63	374	95	469	26,56	(76)	(16,20)
25-29 tahun 25-29 years old	210	45	255	14,68	192	62	254	14,38	1	0,39
20-24 tahun 20-24 years old	9	6	15	0,86	10	8	18	1,02	(3)	(16,67)
Jumlah **Total**	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
Total Employee Composition by Age Range



Berdasarkan kelompok usia pegawai pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rentang usia 35-39 tahun merupakan kelompok yang paling dominan. Kondisi ini mencerminkan struktur tenaga kerja perusahaan yang berada pada fase usia produktif dan memiliki potensi kontribusi optimal terhadap kinerja operasional dan keberlanjutan bisnis.

Based on employee age groups in 2025, the 35-39 age group is the most dominant. This condition reflects the Company's workforce structure, which is in its productive age phase and has the potential to contribute optimally to operational performance and business sustainability.

Demografi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja (orang)

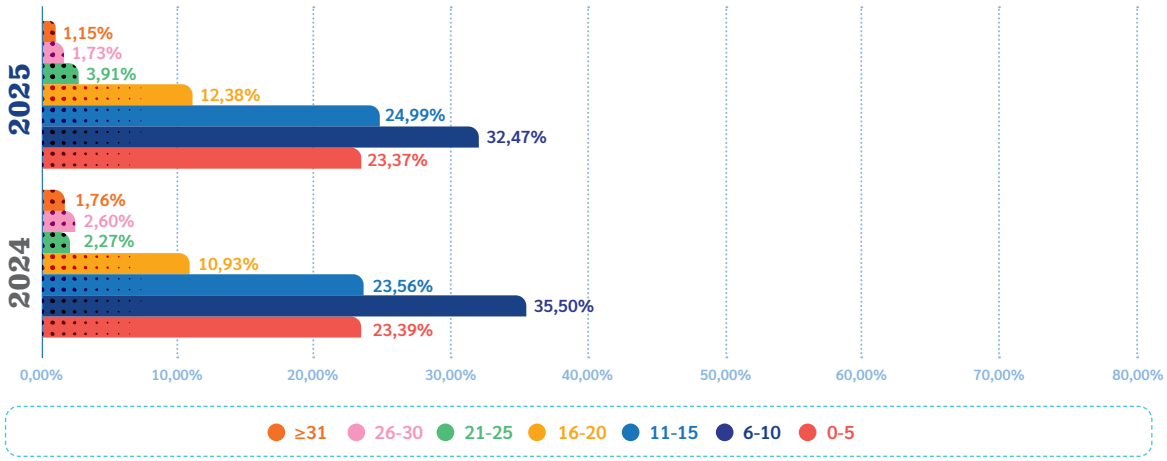
Employee Demographics by Working Period (personnel)

Masa Kerja Working Period	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
≥ 31 Tahun ≥ 31 years	18	2	20	1,15	28	3	31	1,76	(11)	(35,48)
26-30 Tahun 26-30 years	28	2	30	1,73	44	2	46	2,60	(16)	(34,78)
21-25 Tahun 21-25 years	66	2	68	3,91	39	1	40	2,27	28	70,00
16-20 Tahun 16-20 years	191	24	215	12,38	175	18	193	10,93	22	11,40
11-15 Tahun 11-15 years	361	73	434	24,99	355	61	416	23,56	18	4,33
6-10 Tahun 6-10 years	485	79	564	32,47	539	88	627	35,50	(63)	(10,05)
0-5 Tahun 0-5 years	309	97	406	23,37	311	102	413	23,39	(7)	(1,69)
Jumlah Total	**1.458**	**279**	**1.737**	**100,00**	**1.491**	**275**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

L = Laki-laki / P = Perempuan | L = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Total Employee Composition by Working Period



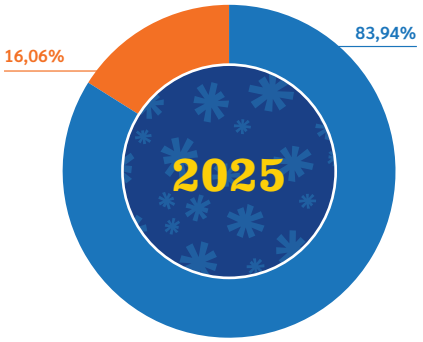
Berdasarkan analisis masa kerja pegawai pada tahun 2025, komposisi pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan masa kerja 6-10 tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga tingkat retensi pegawai serta membangun tenaga kerja yang memiliki pengalaman dan pemahaman organisasi yang memadai. Kelompok masa kerja ini berada pada fase produktif dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai talenta inti dalam mendukung keberlanjutan operasional serta penguatan pipeline kepemimpinan di masa mendatang.

Based on an analysis of the employee working period in 2025, the employee composition is still dominated by those with 6-10 years of service. This reflects the Company's success in maintaining employee retention rates and building a workforce with sufficient experience and understanding of the organization. This group of employees is in their productive phase, with great potential to be developed as core talent in supporting operational sustainability and strengthening the leadership pipeline in the future.

Demografi Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics by Gender/Sex (personnel)

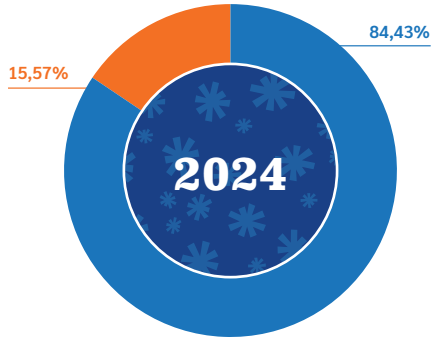
Gender	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Laki-laki Male	1.458	83,94	1.491	84,43	(33)	(2,21)
Perempuan Female	279	16,06	275	15,57	4	1,45
Jumlah Total	**1.737**	**100,00**	**1.766**	**100,00**	**(29)**	**(1,64)**

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender
Total Employee Composition by Gender



Pada tahun 2025, jumlah pegawai laki-laki mendominasi komposisi pegawai sebesar 83,94%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 16,06%, sejalan dengan karakteristik industri konstruksi yang masih didominasi tenaga kerja laki-laki.

In 2025, male employees accounted for 83.94% of the workforce, while female employees accounted for 16.06%, in line with the construction industry's continued dominance by male employees.





Uraian lengkap terkait kebijakan Perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM, termasuk pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

A complete description of the Company's policies in managing and developing HR competencies, including the fulfillment of labor rights, is available in the Sustainability Report as an integral part of this Annual Report.





Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Di tahun 2010, PTPP melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. PTPP menerima pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan surat No. S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dan harga penawaran Rp560 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010 sebanyak 4.842.436.500 lembar saham.

In 2010, PTPP conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. PTPP obtained an effective statement from the Bapepam-LK Chairman with Letter No. S-858/BL/2010 dated January 29, 2010, to conduct an initial public offering of 1,038,976,500 new Series B shares with a nominal value of Rp100 per share and an offering price of Rp560 per share. The shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on February 9, 2010, for 4,842,436,500 shares.

Di tahun 2016, PTPP melakukan aksi korporasi berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan melalui Surat Persetujuan No. S-693/D.04/2016 tanggal 24 November 2016 untuk mengadakan Pencatatan Saham Tambahan melalui HMETD sebanyak 1.357.460.854 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar

In 2016, PTPP conducted corporate actions in the form of Pre-Emptive Rights (HMETD) or Rights Issues. Approval from the Financial Services Authority (OJK) was given through the Approval Letter No. S-693/D.04/2016 dated November 24, 2016, to register Additional Shares through HMETD of 1,357,460,854 shares with a nominal value of Rp100 per share with an exercise price of Rp3,750 per

saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.750 per lembar saham. Dengan demikian, jumlah saham tercatat meningkat dari 4.842.436.500 saham menjadi 6.199.897.354 saham dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia.

share. Therefore, the number of listed shares increased from 4,842,436,500 to 6,199,897,354 shares and have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

Kronologis Lengkap Mengenai Penerbitan dan Pencatatan Saham Perusahaan

Complete Chronology of the Company's Shares Issuance and Listing

Aksi Korporasi Corporate Action	Tanggal Pencatatan Listing Date	Jumlah Saham Sebelum Aksi Korporasi (lembar) Total Shares before Corporate Action (share)	Nilai Nominal Saham (Rp/lembar saham) Share Nominal Value (Rp/share)	Harga Penawaran Saham (Rp/lembar saham) Share Offering Price (Rp/share)	Jumlah Penambahan Saham (lembar) Total Additional Shares (share)	Jumlah Akumulasi Saham (lembar) Total Accumulated Shares (share)
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Before the Initial Public Offering			100	-	-	3.803.460.000
Penawaran Umum Perdana Saham Initial Public Offering	9 Februari 2010 February 9, 2010	3.803.460.000	100	560	1.038.976.500	4.842.436.500
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pre-Emptive Rights (HMETD)	8 Desember 2016 December 8, 2016	4.842.436.500	100	3.750	1.357.460.854	6.199.897.354

Catatan: Seluruh pencatatan Saham PTPP dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Note: PTPP's stock trading is conducted in Indonesia Stock Exchange (IDX)

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan melakukan aksi korporasi *buyback* pembelian saham sebanyak 14.555.900 lembar saham dengan harga rata-rata pembelian Rp555/lembar saham. Aksi korporasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa valuasi harga saham PTPP yang rendah di tahun 2020 tidak mencerminkan kinerja Perusahaan.

On March 12, 2020, the Company took a corporate buyback action to purchase 14,555,900 shares at an average purchase price of Rp555/share. This corporate action was carried out with the consideration that the low valuation of PTPP's share price in 2020 did not reflect the Company's performance.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan belum mengalihkan saham hasil pembelian kembali, namun Perusahaan akan mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 Pasal 15 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Throughout 2025, the Company has not transferred the repurchased shares, but it will begin to transfer the repurchased shares within a maximum period of two years after three years from the completion of the repurchase of shares, per OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 Article 15 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Kepemilikan Saham PTPP dan Jenis Saham
PTPP's Share Ownership and Share Types

Kepemilikan Saham PTPP per 31 Desember 2024, 31 Desember 2025, dan per 27 April 2026
PTPP Share Ownership on December 31, 2024, December 31, 2025 and April 27, 2026

Pemegang Saham Shareholder	27 April 2026 April 27, 2026		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
	Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Share Nominal Value = Rp100/share		
Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares			
• Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengaturan BUMN The Republic of Indonesia, through the Government of the Republic of Indonesia, c.q. SOE Regulatory Agency	1	100	0,00
Saham Seri B Series B Shares			
• **Kepemilikan 5% atau Lebih** **5% Ownership or More**			
» Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengaturan BUMN The Republic of Indonesia, through the Government of the Republic of Indonesia, c.q. SOE Regulatory Agency	-	-	-
» PT Danantara Asset Management (Persero)*	3.130.328.358	313.032.835.800	50,49
Subjumlah Kepemilikan 5% atau Lebih Subtotal 5% Ownership or More	3.130.328.358	313.032.835.800	50,49
• **Kepemilikan Masing-masing Kurang dari 5%** **Ownership less than 5% each**			
» Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengaturan BUMN** The Republic of Indonesia, through the Government of the Republic of Indonesia, c.q. SOE Regulatory Agency**	31.619.477	3.161.947.700	0,51
» Koperasi Karyawan Pemegang Saham - PT PP (Persero) Tbk	2.029.692	202.969.200	0,03
» Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	402.900	40.290.000	0,01
» Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each less than 5% ownership)	3.020.961.026	302.096.102.600	48,74

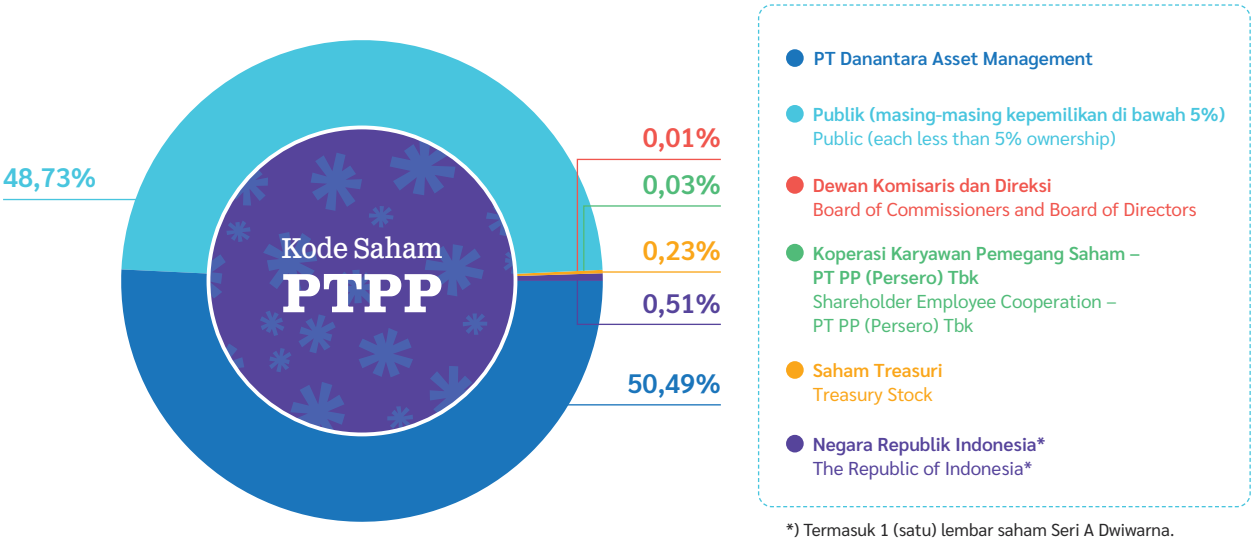
31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024		
Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Share Nominal Value = Rp100/share					
1	100	0,00	1	100	-
-	-	-	3.161.947.835	316.194.783.500	51,00
3.161.947.835	316.194.783.500	51,00			
3.161.947.835	316.194.783.500	51,00	3.161.947.835	316.194.783.500	51,00
-	-	-	-	-	-
2.029.692	202.969.200	0,03	2.029.692	202.969.200	0,03
512.200	51.220.000	0,01	512.200	51.220.000	0,01
3.020.851.726	302.060.202.600	48,73	3.020.851.726	302.085.172.600	48,73

Pemegang Saham Shareholder	27 April 2026 April 27, 2026 Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
	Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Share Nominal Value = Rp100/share		
Subjumlah Kepemilikan Masing-masing Kurang dari 5% Subtotal Ownership less than 5% each	3.055.013.095	305.501.309.500	49,28
Subjumlah Saham Seri B Subtotal Series B Shares	6.185.341.453	618.534.145.300	99,77
Saham Treasuri*** Treasury Stock***	**14.555.900**	**1.455.590.000**	**0,23**
Jumlah **Total**	**6.199.897.354**	**619.989.735.400**	**100,00**

* Pada tahun 2025 terdapat pengalihan 3.161.947.835 saham seri B dari Negara Republik Indonesia kepada PT Danantara Asset Management (Persero).
In 2025, there was a transfer of 3,161,947,835 series B shares from the Republic of Indonesia to PT Danantara Asset Management (Persero).

** Pada 5 Januari 2026 terdapat pengalihan saham seri B dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengaturan BUMN sebanyak 31.619.477 lembar saham.
On January 5, 2026, there was a transfer of Series B shares from PT Danantara Asset Management (Persero) to the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia c.q. the SOE Regulatory Agency amounting to 31,619,477 shares.

*** Saham *treasury* didapatkan Perusahaan melalui aksi korporasi pada tanggal 12 Maret 2020. Perusahaan melakukan aksi korporasi *buyback* pembelian saham sebanyak 14.555.900 lembar saham dengan harga rata-rata pembelian Rp555/lembar saham.
The Company acquired treasury shares through a corporate action on March 12, 2020. The Company conducted a share buyback corporate action of 14,555,900 shares at an average purchase price of Rp555 per share.



*) Termasuk 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna.
*) Including one Series A Dwiwarna Stock share.

31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024		
Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Share Nominal Value = Rp100/share					
3.023.393.618	302.339.361.800	48,77	3.023.393.618	302.339.361.800	48,77
6.185.341.453	618.534.145.300	99,77	6.185.341.453	618.534.145.300	99,77
14.555.900	**1.455.590.000**	**0,23**	**14.555.900**	**1.455.590.000**	**0,23**
6.199.897.354	**619.989.735.400**	**100,00**	**6.199.897.354**	**619.989.735.400**	**100,00**

Perusahaan mengeluarkan saham Seri A dan Seri B dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

- **Saham Seri A**
  Merupakan saham Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan hak-hak istimewa yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu:
  1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
     - » Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
     - » Persetujuan perubahan Permodalan;
     - » Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;
     - » Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perusahaan;
     - » Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
     - » Persetujuan penggunaan laba.
  2. Hak untuk mengusulkan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Komisaris.
  3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
  4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

The Company issued the Series A and Series B shares with the following rights and obligations:

- **Series A Shares**
  A Dwiwarna Stock share amounted to one share owned by the Government of the Republic of Indonesia with special rights contained in the Company's Articles of Association, namely:
  1. The right to grant approval in the GMS regarding the following matters:
     - » Approval of amendments to the Articles of Association;
     - » Approval of capital changes;
     - » Approval of the appointment and dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners member with the approval of the President;
     - » Approval related to merger, consolidation, expropriation, separation, and dissolution;
     - » Approval of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners members;
     - » Approval for the use of profits.
  2. The right to nominate candidate members for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
  3. The right to propose GMS agenda.
  4. The right to request and access the Company's data and documents. The mechanism for using said rights follows the Articles of Association and legislation.

- **Saham Seri B**
  Saham Seri B memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa yang dimiliki saham Seri A sebagaimana dijelaskan di atas.

- **Series B Shares**
  Series B shares have the same rights as those of Series A shares, except for special privileges owned by the Series A shares as explained above.

Kepemilikan Saham PTPP oleh Manajemen Kunci

PTPP's Share Ownership by Key Management

Kepemilikan Saham PTPP oleh Manajemen Kunci Baik Langsung Maupun Tidak Langsung (per 31 Desember di Setiap Periode)

Direct and Indirect PTPP Share Ownership by the Key Management (on December 31 on Every Period)

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kepemilikan Saham PTPP Secara Langsung Direct PTPP Share Ownership				Kepemilikan Saham PTPP Secara Tidak Langsung Indirect PTPP Share Ownership
	2025		2024		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		Pemegang saham utama/pengendali sekaligus pemilik akhir PTPP adalah Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan kepemilikan saham tidak langsung PTPP The main/ controlling shareholder and the ultimate owner of PTPP is the Government of the Republic of Indonesia. Thus, the Board of Commissioners and Board of Directors do not have indirect PTPP share ownership.
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	Nihil Nil		Nihil Nil		

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kepemilikan Saham PTPP Secara Langsung Direct PTPP Share Ownership				Kepemilikan Saham PTPP Secara Tidak Langsung Indirect PTPP Share Ownership
	2025		2024		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	
Direksi Board of Directors					
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	62.600	0,000	62.600	0,000	Pemegang saham utama/pengendali sekaligus pemilik akhir PTPP adalah Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan kepemilikan saham tidak langsung PTPP The main/ controlling shareholder and the ultimate owner of PTPP is the Government of the Republic of Indonesia. Thus, the Board of Commissioners and Board of Directors do not have indirect PTPP share ownership.
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	Nihil Nil		Nihil Nil		
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi Bidang Gedung) (Director of Building Operations)	Nihil Nil		109.300	0,000	
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan legal) (Director of Risk Management and Legal)	Nihil Nil		Nihil Nil		
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	340.300	0,005	340.300	0,005	
Jumlah **Total**	**402.900**	**0,006**	**512.200**	**0,005**	

Nihil = tidak ada | Nil = none

Kepatuhan pelaporan transaksi saham PTPP oleh Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2025 terkait pemenuhan Peraturan OJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini.

The compliance on reporting PTPP share transactions by the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2025 relates to the fulfillment of OJK Regulation Number 4 of 2024 on Ownership Report or Any Changes in Share Ownership in Public Companies and Report on Pledging Activities of Public Company Shares is available in the Good Corporate Governance chapter of this annual report.

Komposisi Pemegang Saham PTPP Berdasarkan Status

PTPP Shareholder Composition By Status

Rincian Komposisi Pemegang Saham PTPP Berdasarkan Status per 31 Desember 2024, 31 Desember 2025, dan per 27 April 2026

Details of PTPP Shareholder Composition Based on Status on December 31, 2024, December 31, 2025 and April 27, 2026

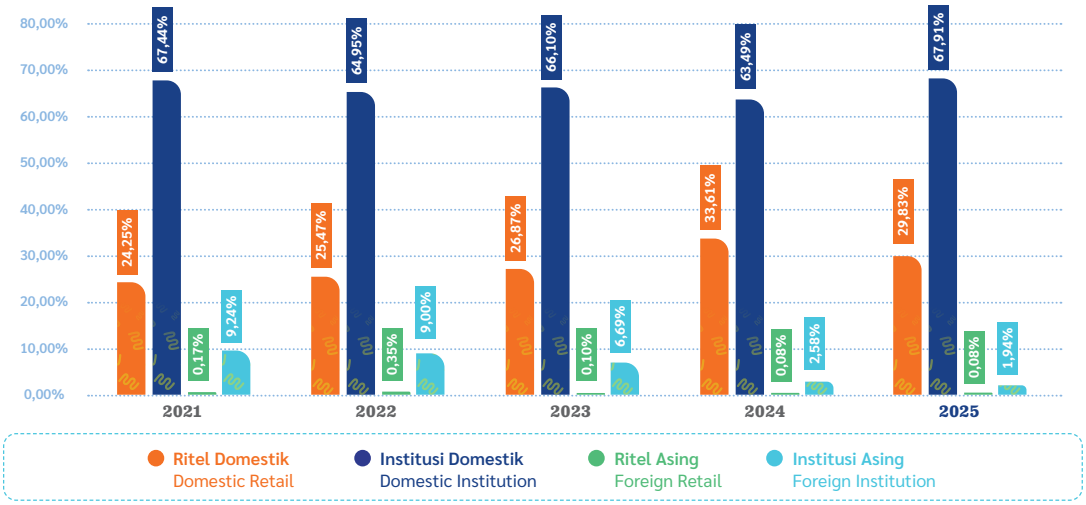
Status Pemegang Saham Status Shareholder	27 April 2026 April 27, 2026		
	Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Pemodal Domestik Domestic Investor			
Ritel Domestik Domestic Retail			
• Perorangan Individual	38.544	2.043.252.663	33,03
Institusi Domestik Domestic Institution			
• Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1	31.619.478	0,51
• Perseroan Terbatas Limited Liability Company	45	260.196.036	4,21
• KKPSPP	1	2.029.692	0,03
• Yayasan Foundation	9	17.347.071	0,28
• Asuransi Insurance	11	22.108.577	0,36
• Dana Pensiun Pension Fund	32	51.606.854	0,83
Lain-lain Others	47	3.620.933.160	58,54
Sub-Jumlah Institusi Domestik Subtotal Domestic Institution	146	4.005.840.868	64,76
Jumlah Pemodal Domestik **Total Domestic Investors**	**38.690**	**6.049.093.531**	**97,80**
Pemodal Asing Foreign Investors			
Ritel Asing/Perorangan Foreign Retail/Individual	112	4.750.631	0,08
Institusi Asing/Badan Usaha Foreign Institution/Business Entity	69	131.497.292	2,13
Jumlah Pemodal Asing **Total Foreign Investors**	**181**	**136.247.923**	**2,20**

	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024		
	Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
	39.876	1.849.215.891	29,83	43.925	2.083.816.191	33,61
	1	1	0,00	1	3.161.947.836	51,00
	52	3.438.648.771	55,46	54	125.522.036	2,02
	1	2.029.692	0,03	1	2.029.692	0,03
	8	17.644.524	0,28	9	28.697.862	0,46
	12	22.281.977	0,36	13	22.957.477	0,37
	34	58.969.934	0,95	40	69.407.604	1,12
	52	671.453.526	10,83	60	525.616.046	8,48
	160	4.211.028.425	67,92	178	3.936.178.553	63,49
	40.036	**6.060.244.316**	**97,75**	**44.103**	**6.019.994.744**	**97,10**
	112	4.869.531	0,08	118	5.174.731	0,08
	66	120.227.607	1,94	72	160.171.979	2,58
	178	**125.097.138**	**2,02**	**190**	**165.346.710**	**2,67**

Status Pemegang Saham Status Shareholder	27 April 2026 April 27, 2026 Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Saham Treasuri Treasury Stock	**1**	**14.555.900**	**0,23**
Jumlah Total	**38.872**	**6.199.897.354**	**100,00**

Tren Kepemilikan Saham PTPP Berdasarkan Status Periode 2021-2025 (per 31 Desember di setiap tahunnya)

PTPP Share Ownership Trends Based on Status for the 2021-2025 Period (on December 31 each year)



Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Di tahun 2025 terdapat perubahan kepemilikan saham sesuai penerapan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan PTPP, pada 22 Maret 2025 Negara Republik Indonesia telah mengalihkan Saham Seri B sebanyak 3.161.947.835 saham kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Edaran No. SE/001/DI-DAM/DO/2025 tentang Penyampaian Informasi atas Perubahan Nama Holding Operasional, dilakukan perubahan nama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero) atau "DAM". Kemudian pada 6 Januari 2026, DAM mengalihkan Saham Seri B PTPP yang dimilikinya kepada Negara Republik Indonesia sebanyak 31.619.477 saham. Sesuai Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2025, kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia adalah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Information on Major/Controlling Shareholder up to Ultimate Shareholders

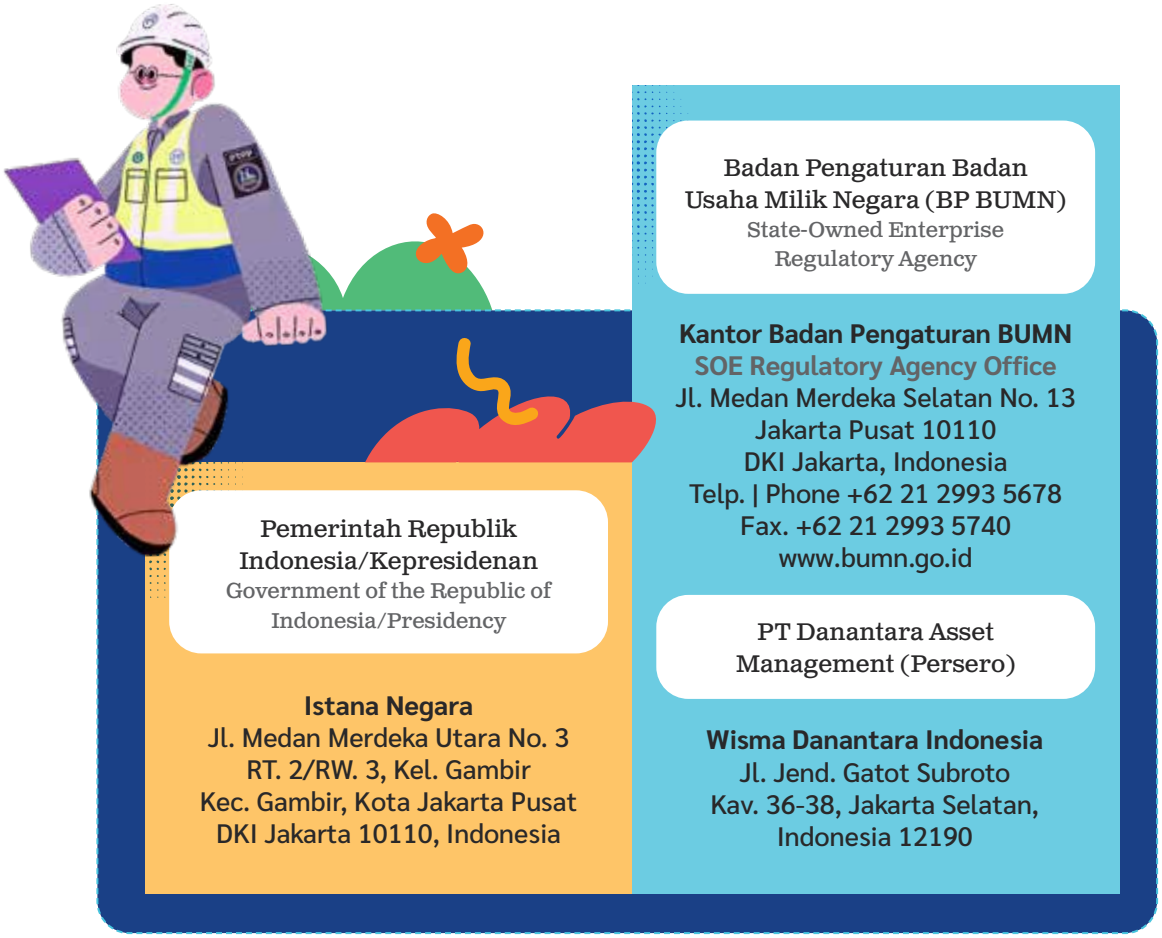
In 2025, there were changes in share ownership in accordance with the implementation of Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. In accordance with the information disclosure submitted by PTPP, on March 22, 2025, the Republic of Indonesia transferred 3,161,947,835 Series B shares to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Based on Circular Letter No. SE/001/DI-DAM/DO/2025 on the Submission of Information on Changes to the Name of the Operating Holding Company, the name of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) was changed to PT Danantara Asset Management (Persero) or DAM. Then on January 6, 2026, DAM transferred its PTPP Series B Shares to the Republic of Indonesia, amounting to 31,619,477 shares. In accordance with Law No. 16 of 2025, the authority of the Republic of Indonesia as a shareholder is vested in the State-Owned Enterprise Regulatory Agency (BP BUMN).

31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024		
Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemilik Number of Shareholders	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
1	14.555.900	0,23	1	14.555.900	0,23
40.215	6.199.897.354	100,00	44.294	6.199.897.354	100,00

DAM merupakan entitas usaha yang 1% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dan sisanya sebanyak 99% dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau "BPI Danantara" yang juga dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas pemilik manfaat akhir PTPP.

DAM is a business entity in which 1% of its shares are owned by the Republic of Indonesia, and the remaining 99% are owned by the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency or BPI Danantara, which is also owned by the Republic of Indonesia. Thus, the Republic of Indonesia is the ultimate beneficial owner of PTPP.



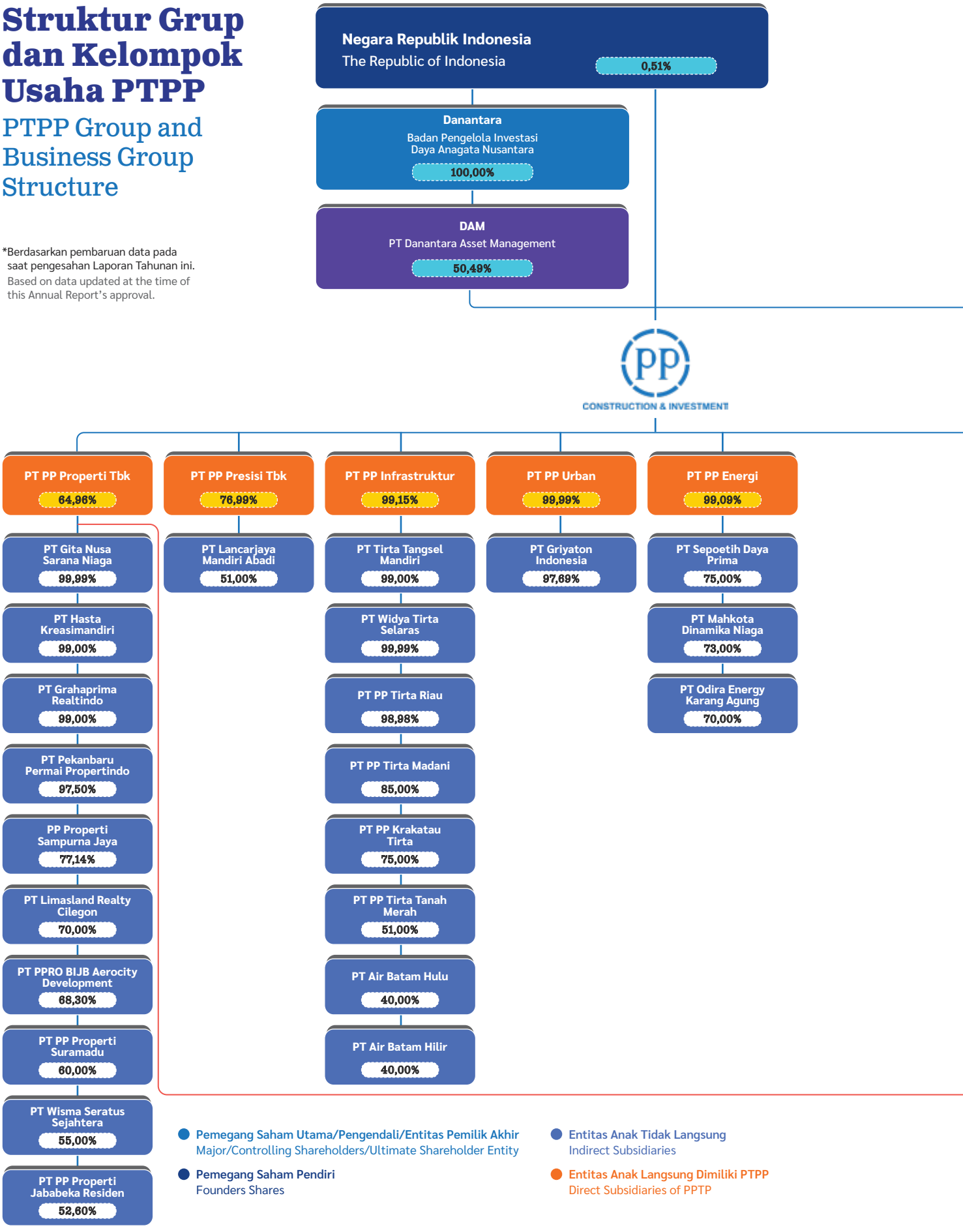
Tentang skema atau bagan terkait informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali PTPP baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu dapat dilihat pada struktur grup pada halaman selanjutnya.

The scheme or chart related to information about PTPP's major and controlling Shareholders, direct and indirect to individual owners, can be viewed in the following group structure on the following page.

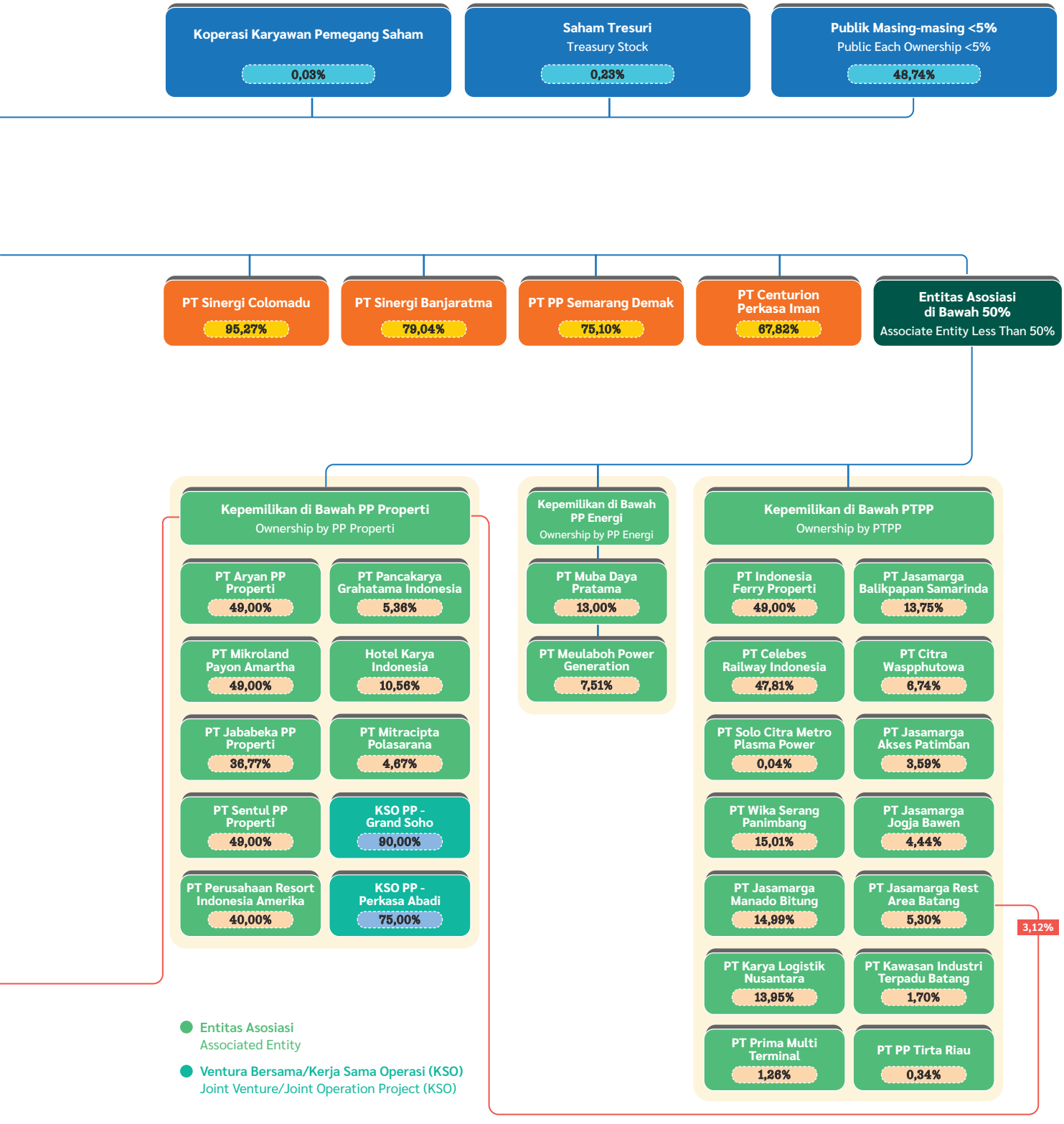
Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPP

PTPP Group and Business Group Structure

*Berdasarkan pembaruan data pada saat pengesahan Laporan Tahunan ini.
Based on data updated at the time of this Annual Report's approval.



- Pemegang Saham Utama/Pengendali/Entitas Pemilik Akhir
  Major/Controlling Shareholders/Ultimate Shareholder Entity
- Pemegang Saham Pendiri
  Founders Shares
- Entitas Anak Tidak Langsung
  Indirect Subsidiaries
- Entitas Anak Langsung Dimiliki PTPP
  Direct Subsidiaries of PPTP


Koperasi Karyawan Pemegang Saham
0,03%
Saham Tresuri
Treasury Stock
0,23%
Publik Masing-masing <5%
Public Each Ownership <5%
48,74%
PT Sinergi Colomadu
95,27%
PT Sinergi Banjaratma
79,04%
PT PP Semarang Demak
75,10%
PT Centurion Perkasa Iman
67,82%
Entitas Asosiasi di Bawah 50%
Associate Entity Less Than 50%
Kepemilikan di Bawah PP Properti
Ownership by PP Properti
PT Aryan PP Properti
49,00%
PT Pancakarya Grahatama Indonesia
5,36%
PT Mikroland Payon Amartha
49,00%
Hotel Karya Indonesia
10,56%
PT Jababeka PP Properti
36,77%
PT Mitracipta Polasarana
4,67%
PT Sentul PP Properti
49,00%
KSO PP - Grand Soho
90,00%
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika
40,00%
KSO PP - Perkasa Abadi
75,00%
Kepemilikan di Bawah PP Energi
Ownership by PP Energi
PT Muba Daya Pratama
13,00%
PT Meulaboh Power Generation
7,51%
Kepemilikan di Bawah PTPP
Ownership by PTPP
PT Indonesia Ferry Properti
49,00%
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
13,75%
PT Celebes Railway Indonesia
47,81%
PT Citra Waspphutowa
6,74%
PT Solo Citra Metro Plasma Power
0,04%
PT Jasamarga Akses Patimban
3,59%
PT Wika Serang Panimbang
15,01%
PT Jasamarga Jogja Bawen
4,44%
PT Jasamarga Manado Bitung
14,99%
PT Jasamarga Rest Area Batang
5,30%
3,12%
PT Karya Logistik Nusantara
13,95%
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
1,70%
PT Prima Multi Terminal
1,26%
PT PP Tirta Riau
0,34%
Entitas Asosiasi
Associated Entity
Ventura Bersama/Kerja Sama Operasi (KSO)
Joint Venture/Joint Operation Project (KSO)

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

Daftar Obligasi yang Masih Beredar pada Tahun 2025

List of Bond Securities Traded in 2025

Tahun Penerbitan Year of Issuance	Nama Efek Name of Security	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Nilai Value (Rp)	Tenor
2024	Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 (Kode Obligasi: PTPP04CN1; Kode ISIN: IDA000144307) PTPP Shelf-Registered Bond IV Phase I 2024 (Bond Code: PTPP04CN1; ISIN Code: IDA000144307)	1 Juli 2024 July 1, 2024	434.620.000.000	3 Tahun 3 Years
2023	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023 (Kode Obligasi: PTPP03CN3; Kode ISIN: IDA000131403) PTPP Shelf-Registered Bond III Phase III 2023 (Bond Code: PTPP03CN3; ISIN Code: IDA000131403)	11 April 2023 April 11, 2023	503.725.000.000	3 Tahun 3 Years
	Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 (Kode Sukuk: SMPTPP01CN3; Kode ISIN: IDJ000025705) PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase III 2023 (Bond Code: SMPTPP01CN3; ISIN Code: IDJ000025705)	11 April 2023 April 11, 2023	126.754.000.000	3 Tahun 3 Years
2022	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A (Kode Obligasi: PTPP03ACN2; Kode ISIN: IDA0001234A6) PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Serie A (Bond Code: PTPP03ACN2; ISIN Code: IDA0001234A6)	22 April 2022 April 22, 2022	140.000.000.000	3 Tahun 3 Years
	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B (Kode Obligasi: PTPP03BCN2; Kode ISIN: IDA0001234B4) PTPP Shelf-Registered Bond III Phase II 2022 Serie B (Bond Code: PTPP03BCN2; ISIN Code: IDA0001234B4)	22 April 2022 April 22, 2022	404.500.000.000	5 Tahun 5 Years
	Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A (Kode Obligasi: SMPTPP01ACN2; Kode ISIN: IDJ0000217A3) PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Serie A (Bond Code: SMPTPP01ACN2; ISIN Code: IDJ0000217A3)	22 April 2022 April 22, 2022	60.000.000.000	3 Tahun 3 Years

Dalam rangka memperkuat struktur pendanaan, PTPP telah menerbitkan obligasi sejak tahun 1993.

To strengthen the funding structure, PTPP has issued bonds since 1993

Tingkat Bunga Imbalan Interest Rate/Yield	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating	Status Status	Bursa Tempat Pencatatan Stock Exchange for Listing
10,25%	28 Juni 2027 June 28, 2027	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
8,80%	11 April 2026 April 11, 2026	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 8,80% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 8.80%	11 April 2026 April 11, 2026	• A (Sy); Pefindo (2025) • A (Sy); Pefindo (2024) • A (Sy); Pefindo (2023)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
6,50%	22 April 2025 April 22, 2025	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023) • A; Pefindo (2022)	Lunas pada 22 April 2025 Repaid on April 22, 2025	BEI IDX
7,75%	22 April 2027 April 22, 2027	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023) • A; Pefindo (2022)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 6,50% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 6.50%	22 April 2025 April 22, 2025	• A (Sy); Pefindo (2025) • A (Sy); Pefindo (2024) • A (sy); Pefindo (2023) • A (sy); Pefindo (2022)	Lunas pada 22 April 2025 Repaid on April 22, 2025	BEI IDX

Tahun Penerbitan Year of Issuance	Nama Efek Name of Security	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Nilai Value (Rp)	Tenor
2021	Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B (Kode Obligasi: SMPTPP01BCN2; Kode ISIN : IDJ0000217B1) PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase II 2022 Serie B (Bond Code: SMPTPP01BCN2; ISIN Code: IDJ0000217B1)	22 April 2022 April 22, 2022	305.000.000.000	5 Tahun 5 Years
	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (Kode Obligasi: PTPP03BCN1; Kode ISIN: IDA0001157B7) PTPP Shelf-Registered Bond III Phase I 2021 Serie B (Bond Code: PTPP03BCN1; ISIN Code: IDA0001157B7)	2 Juli 2021 July 2, 2021	650.000.000.000	5 Tahun 5 Years
	Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (Kode Obligasi: SMPTPP01BCN1; Kode ISIN : IDJ0000189B2) PTPP Shelf-Registered Mudharabah Sharia Bond I Phase I 2021 Serie B (Bond Code: SMPTPP01BCN1; ISIN Code: IDJ0000189B2)	2 Juli 2021 July 2, 2021	100.000.000.000	5 Tahun 5 Years

Tingkat Bunga Imbalan Interest Rate/Yield	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating	Status Status	Bursa Tempat Pencatatan Stock Exchange for Listing
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 7,75% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 7.75%	22 April 2027 April 22, 2027	• A (sy); Pefindo (2025) • A (sy); Pefindo (2024) • A (sy); Pefindo (2023) • A (sy); Pefindo (2022)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
9,10%	2 Juli 2026 July 2, 2026	• A; Pefindo (2025) • A; Pefindo (2024) • A; Pefindo (2023) • A; Pefindo (2022)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* Ekuivalen 9,10% Equivalent Profit Sharing Income of Mudharabah Sharia Bond at 9.10%	2 Juli 2026 July 2, 2026	• A (sy); Pefindo (2025) • A (sy); Pefindo (2024) • A (sy); Pefindo (2023) • A (sy); Pefindo (2022)	Aktif/ Belum Lunas Active/Not Yet Paid	BEI IDX

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV), dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)

List of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures (JVs), and Special Purpose Vehicles (SPVs)

Entitas Anak
Subsidiaries

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile	Alamat Address
Kepemilikan Langsung oleh PTPP Direct Ownership by PTPP			
PT PP Properti Tbk	Realti dan Properti Realty and Property	DKI Jakarta	Plaza PP - Lantai | Floor 7 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8779 2734 Fax: +62 21 8779 2947 *E-mail*: headoffice@pp-properti.com *Website*: www.pp-properti.com
PT PP Presisi Tbk	Jasa Sewa Lease Service	DKI Jakarta	Plaza PP - Lantai | Floor 7 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8248 3255 Fax: +62 21 824 83240 *E-mail*: headoffice@pp-presisi.co.id *Website*: www.pp-presisi.co.id
PT PP Urban	Konstruksi Construction	DKI Jakarta	Plaza PP - Lantai | Floor 2 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8403 933-34 Fax: +62 21 8408 234 *E-mail:* contact@pptp-urban.com *Website*: www.ppurban.co.id
PT PP Energi	Penyediaan Tenaga Listrik Electricity Supply	DKI Jakarta	Plaza PP - Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8403 988 *E-mail*: corsec@pp-energi.com *Website*: www.pp-energi.com
PT PP Infrastruktur	Infrastruktur Infrastructure	DKI Jakarta	Plaza PP- Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 *E-mail*: investment@pp-infra.com *Website*: www.pp-infrastructure.com

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP (%) Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2013	2013	2013	64,96	64,96	10.669.214	17.396.972	Beroperasi Operating
2004	2004	2014	76,99	76,99	6.779.743	7.648.848	Beroperasi Operating
1989	1989	2013	99,99	99,99	1.131.450	2.024.028	Beroperasi Operating
2016	2016	2016	99,09	99,09	1.542.153	1.754.033	Beroperasi Operating
2016	2016	2016	99,15	99,15	3.673.167	3.884.976	Beroperasi Operating

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile	Alamat Address
PT Sinergi Colomadu	Realti dan Properti Realty and Property	Solo, Jawa Tengah Solo, Central Java	Jl. Adi Sucipto No. 1 Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar 57177 Jawa Tengah | Central Java, Indonesia Plaza PP - Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 271 7851 761 *E-mail*: info@detjolomadoe.com *Website*: www.detjolomadoe.com
PT Centurion Perkasa Iman	Perdagangan, Pembangunan, Properti Trading, Development, and Property	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	Jl. Bintoro 21-25, Tegalsari, Dr. Soetomo, Surabaya 60264, Jawa Timur | East Java Tel. | Ph.: +62 31 9954 3399 Fax: +62 31 9954 0996 *E-mail*: centurionperkasaiman@gmail.com
PT Sinergi Banjaratma	*Rest Area*	Brebes, Jawa Tengah Brebes, Central Java	Jl. Cipugur RT 003 RW 011 Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 52253 Jawa Tengah | Central Java, Indonesia Plaza PP - Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 812-2793-8900 *E-mail*: tip260b@gmail.com
PT PP Semarang Demak	Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Development	Demak, Jawa Tengah Demak, Central Java	Jl. Raya Semarang-Demak Km. 10 Sayung, Kab. Demak Jawa Tengah | Central Java 59563, Indonesia Tel. | Ph.: +62 24 3516491 *E-mail*: tollsemarangdemak@gmail.com
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT PP Properti Tbk Indirect Ownership through PT PP Properti Tbk			
PT Pekanbaru Permai Propertindo	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Service	DKI Jakarta	Gandaria 8 Office Tower, Lantai | Floor 3 unit F Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan | South Jakarta 12240 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 29304047 Fax: +62 21 29304047 *Website*: www.pekanbarupark.com
PT Gitanusa Sarana Niaga	Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Pengangkutan, Percetakan, Perbengkelan, Jasa Development, Trading, Agriculture, Transportation, Printing, Workshop, Services	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	Jl. Ruko Villa Bukit Mas RM. 24-25 Kota Surabaya, 60142 Jawa Timur | East Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 31 3740008 Fax: +62 31 3554568 *E-mail*: infokazacitymallsurabaya@gmail.com

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP (%) Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2017	2018	2017	95,27	95,27	134.979	142.748	Beroperasi Operating
2010	2011	2019	67,82	67,82	386.496	400.586	Beroperasi Operating
2019	2019	2019	79,04	79,04	177.859	162.993	Beroperasi Operating
2019	2022	2019	75,10	75,10	5.769.091	6.033.686	Beroperasi Operating
2014	2014	2014	97,50	97,50	259.711	293.657	Beroperasi Operating
2003	2006	2013	99,99	99,99	238.176	304.558	Beroperasi Operating

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile	Alamat Address
PT Hasta Kreasimandiri	Pembangunan Perumahan (*Real Estate*), Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Jasa Real Estate Development, Trading, Manufactury and Mining, Animal Husbandry, Agriculture, Plantation, Forestry, and Services	Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, East Kalimantan	Ruko Pasar Baru Balikpapan Jl.Jenderal Sudirman Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan Kalimantan Timur | East Kalimantan 76113, Indonesia Tel. | Ph.: +62 542 737888 *Website*: www.bosmall.id
PT Grahaprima Realtindo	Bahan Bangunan (Pasir/Batu Bata), Jasa Pengelolaan Gedung, Jasa Konsultasi Manajemen Construction Materials (Sand/Bricks), Building Management Services, Management Consulting Services	Sleman, DI Yogyakarta Sleman, Yogyakarta	Jl. Babarsari No. 88 RT. 17/RW. 05 Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 274 488899 *E-mail*: tanababarsari@gmail.com *Website*: www.tanababarsari.com
PT PP Properti Sampurna Jaya	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Services	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	Jl.Raya Wiyung, Babatan Timur C No. 1 Kota Surabaya 60227 Jawa Timur | East Java, Indonesia Jawa Timur, Indonesia Tel. | Ph.: +62 31 9942 4848
PT PPRO BIJB Aerocity Development	Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Realti, *Building Management* Trading, Services, Development, Realty, Building Management	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java	Jl. Soekarno Hatta No. 522, RT. 05/RW. 06 Batununggal, Bandungkidul, Bandung, Jawa Barat | West Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 22 7569922 *E-mail*: bp1ad@pp-properti.com
PT Limasland Realty Cilegon	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Services	Cilegon, Jawa Barat Cilegon, West Java	Puri Krakatau Hijau Blok G1 No. 1A Kotasari, Gerogol, Cilegon, Banten, Indonesia Tel. | Ph.: +62 254 7734567 *E-mail*: greenparkterrace199@gmail.com
PT PP Properti Suramadu	Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Realti, Building Management Trading, Services, Development, Realty, Building Management	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	Jl. Tambak Wedi Kav. 2 No. 1 Surabaya 60126, Jawa Timur | East Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 31 3741414 *E-mail*: info@pp-pro-suramadu.com hello@pppro-suramadu.com *Website*: www.pp-pro-suramadu.com
PT Wisma Seratus Sejahtera	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Services	DKI Jakarta	Jl. Margonda Raya No. 492C Pondok Cina, Beji, Kota Depok 16424, Jawa Barat | West Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 22373999 / +62 21 21798722 *E-mail*: evenciiomargonda@gmail.com *Website*: www.evenciomargonda.co.id
PT PP Properti Jababeka Residence	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Services	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Hollywood Plaza No. 10-12 Jl. H. Umar Ismail, Mekar Mukti, Cikarang Utara Bekas, Kota Jababeka 17550 Jawa Barat | West Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 89833961 *E-mail*: ppproperti.jababekaresiden@gmail.com

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
1995	1995	2015	99,00	99,00	736.024	835.123	Beroperasi Operating
2013	2014	2018	99,00	99,00	86.776	86.785	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2017	2017	2017	77,12	77,14	686.421	732.078	Beroperasi Operating
2018	2019	2018	68,30	68,30	378.802	389.936	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2016	2016	2018	70,00	70,00	74.585	81.359	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2017	2019	2017	60,00	60,00	578.014	577.929	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2012	2012	2016	55,00	55,00	294.829	330.293	Beroperasi Operating
2016	2016	2016	52,60	52,60	388.542	393.171	Beroperasi Operating

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile	Alamat Address
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT PP Presisi Tbk Indirect Ownership through PT PP Presisi Tbk			
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Jasa Peralatan Konstruksi Alat Berat dan *Dump Truck*, Industri Bahan/Komponen Bangunan dan Peralatan Konstruksi Construction, Mining and Quarrying, Wholesale and Retail Trading, Provision of Construction Equipment Services for Heavy Equipment and Dump Trucks, Construction Material/ Component Industry, and Construction equipment	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Jl. Raya Narogong Km. 12,5 No. 18 Bekasi, Jawa Barat | West Java Indonesia Tel. | Ph.:+62 21 8250365 Fax:+62 21-8250-369 *E-mail*: business.process@lmacontractor.com
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT PP Energi Indirect Ownership through PT PP Energi			
PT Sepoetih Daya Prima	Penyediaan Tenaga Listrik Electricity Supply	Lampung Tengah Central Lampung	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8403 988
PT Mahkota Dinamika Niaga	Energi Energy	DKI Jakarta	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8403988 Fax: +62 21 8403 988
PT Odira Energi Karang Agung	Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Oil and Gas Exploration and Production	Banyuasin, Palembang	Gedung ANTAM Tower B Lantai | Floor 3 Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan | South Jakarta 12530 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 2963 4905
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT PP Urban Indirect Ownership through PT PP Urban			
PT Griyaton Indonesia	Pracetak Precast	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Jl. Kali Abang Bungur RT. 001/RW. 018 Harapan Jaya, Bekasi 17124 Jawa Barat | West Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8895 8629 Fax: +62 21 884 1906 *E-mail*: info@griyaton.com

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP (%) Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
1994	1994	2017	51,00	51,00	3.677.177	2.934.234	Beroperasi Operating
2002	2014	2016	75,00	75,00	30.668	76.194	Beroperasi Operating
2017	-	2018	73,00	73,00	50.342	60.064	Konstruksi Construction
2006	2017	2018	70,00	70,00	965.593	979.472	Beroperasi Operating
1979	1981	2016	97,69	97,69	16.365	245.059	Beroperasi Operating

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile	Alamat Address
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT PP Infrastruktur Indirect Ownership through PT PP Infrastruktur			
PT Tirta Tangsel Mandiri	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Tangerang Selatan, Banten South Tangerang, Banten	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: tirta.tangsel.mandiri2018@gmail.com
PT Widya Tirta Selaras	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: widyatirtaselaras.jatisari@gmail.com
PT PP Tirta Madani	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Riau	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: admin@ptpptm.com
PT PP Krakatau Tirta	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	Jl. Amir Hamzah Prubungan Area Sawah/Kebun Sidomukti, Bungah, Gresik 61152 Jawa Timur | East Java, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: info@ptppkt.co.id
PT PP Tirta Riau	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Riau	Plaza PP Lantai 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: admin@ptpptr.com
PT PP Tirta Tanah Merah	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Plaza PP Lantai | Floor 4 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur | East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia Tel. | Ph.: +62 21 8414 449 Fax: +62 21 8414 449 *E-mail*: admin@ptpptr.com
PT Air Batam Hulu	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Batam	Komplek Batam Centre Square Blok D No. 2 Batam, Kepulauan Riau *E-mail*: finance@hulu.airbatam.com Tel. | Ph.: +62 778 3721 921
PT Air Batam Hilir	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Batam	Komplek Batam Centre Square Blok D No. 2 Batam, Kepulauan Riau *E-mail*: finance@hilir.airbatam.com Tel | Ph.: +62 778 3722 058

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP (%) Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2018	2020	2018	99,99	99,99	604.293	609.047	Beroperasi Operating
2017	2018	2017	99,99	99,99	111.911	114.099	Beroperasi Operating
2020	2020	2020	85,00	85,00	467.402	500.662	Beroperasi Operating
2019	2021	2019	75,00	75,00	992.538	958.076	Beroperasi Operating
2019	2023	2020	98,98	90,32	1.231.372	1.358.405	Beroperasi Operating
2020	-	2020	51,00	51,00	73.118	69.832	Beroperasi Operating
2022	2022	2022	40,00	40,00	51.026	58.312	Beroperasi Operating
2022	2022	2022	40,00	40,00	158.606	127.909	Beroperasi Operating

Entitas Asosiasi
Associated Entitites

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile
Entitas Asosiasi, di Bawah PTPP Associated Entities under PTPP		
PT Indonesia Ferry Properti	Realti dan Jasa Properti Realty and Property Services	DKI Jakarta
PT Celebes Railway Indonesia	Perkeretaapian Railways	Makassar, Sulawesi Selatan Makassar, South Sulawesi
PT Solo Citra Metro Plasma Power	Pembangkit Tenaga Listrik Power Plant	Solo, Jawa Tengah Solo, Central Java
PT Prima Multi Terminal	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Port Development and Operations	Sumatra Utara North Sumatra
PT Jasamarga Rest Area Batang	Real Estate dan Perdagangan Real Estate and Trading	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	Serang, Banten
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Industri Industrial Estate Construction and Development	Batang, Jawa Tengah Batang, Central Java
PT Jasamarga Manado Bitung	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	Manado, Sulawesi Utara Manado, North Sulawesi
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	Balikpapan, Kalimantan Timur Balikpapan, East Kalimantan
PT Jasamarga Jogja Bawen	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	Jawa Tengah Central Java
PT PP Tirta Riau	Pengolahan Air Minum Drinking Water Treatment	Riau
PT Citra Waspphutowa	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	DKI Jakarta
PT Karya Logistik Nusantara	Logistik Logistics	Balikpapan
PT Jasamarga Akses Patimban	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Construction and Development	Subang
Entitas Asosiasi, di Bawah PT PP Properti Tbk Associated Entities under PT PP Properti Tbk		
PT Sentul PP Properti	Konstruksi, Industri Realti dan Properti Jasa Construction, Realty Industry, and Property Services	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
PT Aryan PP Properti	Konstruksi dan Properti Jasa Construction and Property Services	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2018	2019	2018	49,00	49,00	1.121.717	1.138.925	Beroperasi Operating
2019	2022	2019	47,81	47,81	930.081	1.015.677	Beroperasi Operating
2018	2022	2018	0,4	40,00	558.993	476.682	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2016	2019	2016	1,26	1,26	4.075.408	3.972.064	Beroperasi Operating
2019	2019	2019	5,30	5,30	102.127	107.089	Beroperasi Operating
2019	2022	2019	15.01	15,01	7.513.058	7.126.913	Beroperasi Sebagian Partially Operating
2020	2022	2021	1,70	1,70	3.952.632	3.112.587	Beroperasi Sebagian Partially Operating
2016	2020	2016	14,99	14,99	4.331.792	4.452.162	Beroperasi Operating
2016	2020	2016	13,75	13,75	9.540.429	9.613.156	Beroperasi Operating
2020	2023	2020	4,40	4,81	8.235.231	5.386.444	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2019	-	2020	0,34	3,23	1.231.373	1.318.445	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2006	2018	2006	6,74	6,74	5.084.307	4.967.816	Beroperasi Sebagian Partially Operating
2023	2023	2023	13,95	17,64	312.900	419.279	Beroperasi Operating
2023	-	2023	3,02	6,31	2.006.769	1.764.345	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2016	2016	2016	49,00	49,00	170.032	170.063	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2017	2020	2017	49,00	49,00	102.469	98.956	Beroperasi Operating

Nama Name	Bidang Usaha Business Line	Domisili Domicile
PT Jababeka PP Properti	Konstruksi dan Properti Jasa Construction and Property Services	Jawa Barat West Java
PT Mikroland Payon Amartha	Realti dan Jasa Properti Realty and Property Services	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika	Penyediaan Akomodasi Hotel Bintang Lima Provision of Five-Star Hotel Accommodations	Lombok, NTB Lombok, West Nusa Tenggara
PT Hotel Karya Indonesia	Realti dan Jasa Properti Realty and Property Services	DKI Jakarta
PT Pancakarya Grahatama Indonesia	Pembangunan dan Pengusahaan Terminal Bus Bus Terminal Construction and Development	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
PT Jasamarga Rest Area Batang	Real Estate dan Perdagangan Real Estate and Trading	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java
PT Sinergi Colomadu	Realti dan Properti Realty and Property	Solo, Jawa Tengah Solo, Central Java
PT PP Sinergi Banjaratma	Rest Area	Brebes, Jawa Tengah Brebes, Central Java
PT Mitra Cipta Polasarana	Jasa Persewaan Kantor Office Rental Services	DKI Jakarta
Entitas Asosiasi, di Bawah PT PP Energi Associated Entities under PT PP Energi		
PT Muba Daya Pratama	Pembangkit Tenaga Listrik Pembangkit tenaga listrik Power Plant	Palembang, Sumatera Selatan Palembang, South Sumatra
PT Meulaboh Power Generation	Pembangkit Tenaga Listrik Pembangkit tenaga listrik Power Plant	Aceh

Ventura Bersama/Kerja Sama Operasi (KSO)/Kerja Sama Usaha (KSU)

Joint Ventures/Joint Operations (KSO)/Business Cooperations (KSU)

Nama Name	Proyek Project	Domisili Domicile
KSO, di Bawah PT PP Properti Tbk JO under PT PP Properti Tbk		
PPRO - Grand Soho	Grand Soho, Gedung Grand Slipi Tower Grand Soho, Grand Slipi Tower Building	DKI Jakarta
PPRO - PT Artha Karya Manunggal Jaya	Perkasa Abadi, Apartemen Kelapa Gading Perkasa Abadi, Kelapa Gading Apartment	DKI Jakarta

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2016	2016	2016	36,77	36,77	112.261	115.522	Beroperasi Operating
2019	2020	2019	49,00	49,00	399.186	395.270	Beroperasi Operating
2016	-	2017	40,00	17,16	41.953	41.942	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2018	-	2019	10,56	10,56	59.170	58.733	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2011	-	2013	15,00	5,36	49.011	49.124	Belum Beroperasi Not Yet Operating
2019	2019	2019	3,12	3,12	102.127	107.089	Beroperasi Operating
2017	2018	2017	3,31	7,34	134.979	142.653	Beroperasi Operating
2019	2019	2019	3,11	3,11	177.859	161.040	Beroperasi Operating
1996	-	2013	4,67	4,67	62.510	58.192	Beroperasi Operating
2011	2012	2011	13,00	13,00	180.860	200.934	Tidak Beroperasi Not Operating
2017	-	2017	7,51	7,51	11.692.001	13.369.180	Tidak Beroperasi Not Operating

Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh PTPP Year of Capital Investment by PTPP	Kepemilikan oleh PTPP Ownership by PTPP (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
			2025	2024	2025	2024	
2010	2010	2015	90,00	90,00	104.387	104.521	Beroperasi Operating
2003	2006	2013	75,00	75,00	97.964	99.090	Beroperasi Operating

PT PP Properti Tbk ("PPRO")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

PT PP Properti Tbk ("PPRO") berdiri pada tanggal 12 Desember 2013 sesuai Akta Pendirian No. 18 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Pembentukan PPRO merupakan diversifikasi usaha yang dilakukan PTPP pada tahun 1991 dalam bentuk Cabang Usaha Non Konstruksi ("UNK") sebagai pengembangan dari Divisi Pengembangan Usaha. Cabang UNK ini terdiri dari Unit Developer dan Unit Properti.

Lebih dari 20 tahun, PPRO telah menunjukkan kemampuannya, antara lain membangun Perumahan Otorita Jatiluhur (1991), pengembangan kawasan Cibubur (1991-2004), Apartemen Paladian Park di Kelapa Gading, Juanda Business Center di Surabaya dan pembangunan serta pengelolaan Park Hotel Jakarta (2010) dan Park Hotel Bandung (2012). PPRO menjalankan pengembangan usaha di bidang Properti dan Realti yaitu dengan melakukan pengembangan lahan yang idle dan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk menciptakan bisnis pengembangan properti seperti apartemen, hotel, perkantoran, mall, pusat perdagangan dan perumahan yang dijual dan disewakan.

Pada 11 April 2017 PPRO resmi melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

PT PP Properti Tbk (PPRO) was established on December 12, 2013, per the Deed of Establishment No. 18 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The establishment of PPRO is a business diversification carried out by PTPP in 1991 in the form of the Non-Construction Business (UNK) Branch as a development of the Business Development Division. The UNK Branch consists of a Developer Unit and a Property Unit.

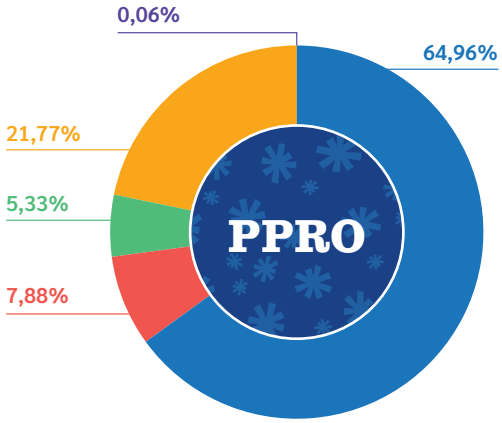
For more than 20 years, PPRO has demonstrated its capabilities, including building Jatiluhur Authority Housing (1991), Cibubur area development (1991-2004), Paladian Park Apartment in Kelapa Gading, Juanda Business Center in Surabaya, as well as the construction and management of Park Hotel Jakarta (2010) and Park Hotel Bandung (2012). PPRO conducts business development in the Property and Realty sector by developing idle land and collaborating with strategic partners to create property development businesses such as apartments, hotels, offices, malls, trade centers, and housing for sale and rent.

On 11 April 2017, PPRO officially conducted an Initial Public Offering and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange.



Grand Dharmahusada Lagoon, Jawa Timur
Grand Dharmahusada Lagoon, East Java

Kepemilikan Saham PPRO
PPRO Share Ownership



- PTPP
- PT Asuransi Jiwa IFG
- PT Asabri (Persero) - Dapen Polri
- Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%) Public (Each less than 5%)
- Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)

Manajemen Kunci PPRO per 31 Desember 2025
PPRO Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Fachrul Ulum
Komisaris Independen Independent Commissioner	Abdul Rahman
Komisaris Independen Independent Commissioner	Ronaldy Samuel Sinurat

Direksi
Board of Directors

Direktur Utama President Director	Dyah Rahadyannie
Direktur Keuangan Director of Finance	Ikhwan Putra Pradana
Direktur Pengelolaan Bisnis & HCM Director of Business Management & HCM	Nurjaman Sastrawijaya
Managing Director	Daniel Moeis



The Alton Apartment, Jawa Tengah
The Alton Apartment, Central Java



Prime Park Hotel Bandung, Jawa Barat
Prime Park Hotel Bandung, West Java

PT PP Presisi Tbk ("PPRE")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

PT PP Presisi Tbk ("PPRE") semula bernama PT Prima Jasa Aldodua. PPRE didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Mei 2004 dibuat di hadapan Notaris Muhammad Chotib, S.H. Kegiatan usaha utama PPRE adalah bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/ angkutan, jasa penyewaan, perdagangan dan pertambangan.

PT PP Presisi Tbk (PPRE) was originally named PT Prima Jasa Aldodua. PPRE was established based on Deed No. 2 dated May 6, 2004, made before Notary Muhammad Chotib, S.H. PPRE's main business activities are in the construction industry, Engineering Procurement & Construction (EPC), mechanical-electrical works, transportation services, rental services, trading, and mining.

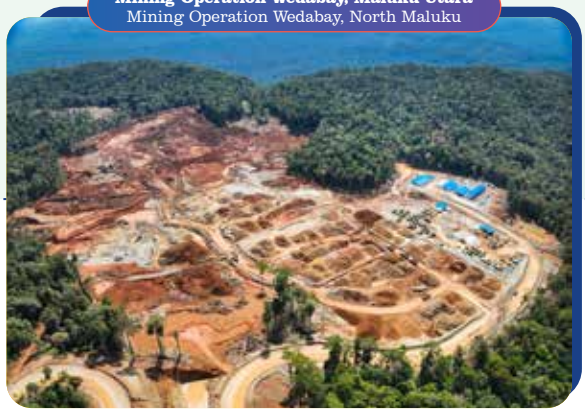
Pada 24 November 2017 PPRE resmi melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

On November 24, 2017, PPRE officially conducted an Initial Public Offering and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange.

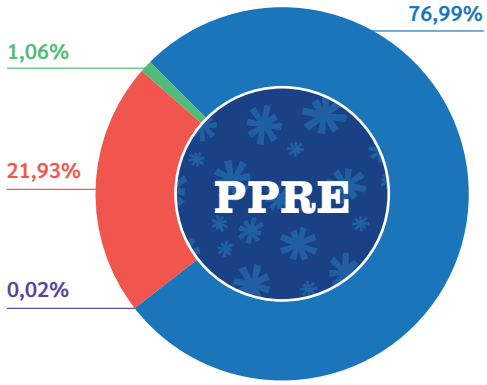
IGP Bahadopi - Bahomotefe, Sulawesi Tengah
IGP Bahadopi - Bahomotefe, Central Sulawesi



Mining Operation Wedabay, Maluku Utara
Mining Operation Wedabay, North Maluku



Kepemilikan Saham PPRE
PPRE Share Ownership



- PTPP
- *Treasury*
- Publik | Public
- Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)

Manajemen Kunci PPRE per 31 Desember 2025
PPRE Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Narwanto
Komisaris Commissioner	Albert Simangunsong
Komisaris Commissioner	Maulana Malik Ibrahim

Direksi
Board of Directors

Direktur Utama President Director	Rizki Dianugrah
Direktur Director	Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Director	Yovi Hendra

PT PP Urban ("PPUB")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

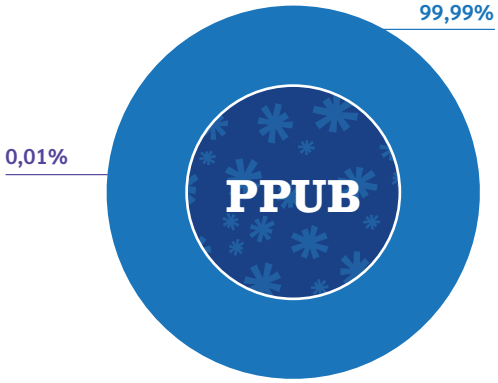
PT PP Urban ("PPUB") didirikan dengan nama PT Prakarsa Dirgaaneka berdasarkan Akta No. 97 tanggal 19 September 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Bajumi, lalu berubah nama menjadi PT PP Urban berdasarkan Akta Notaris No. 103 tanggal 29 Maret 2017 dengan maksud dan tujuan untuk bergerak dalam bidang konstruksi, manufaktur beton pra-cetak dan pengelolaan gedung.

PPUB memiliki keunggulan hadir dengan konsep bisnis terintegrasi, mulai dari *upstream* yang diwakili oleh URBAN Development, *middle stream* sebagai kontraktor URBAN Construction dan sebagai produsen beton pracetak berkualitas dari lini bisnis URBAN Precast.

PT PP Urban (PPUB) was established under the name PT Prakarsa Dirgaaneka according to Deed No. 97 dated September 19, 1989, made before Notary Achmad Bajumi, and then changed its name to PT PP Urban according to Notarial Deed No. 103 dated March 29, 2017, with the purpose and objective to engage in construction, precast concrete manufacturing, and building management.

PPUB has the advantage of emerging with the concept of integrated business from the upstream sector represented by URBAN Development, the midstream as an URBAN Construction contractor, and the producer of high-quality precast concrete from the URBAN Precast business line.

Kepemilikan Saham PPUB
PPUB Share Ownership



Manajemen Kunci PPUB per 31 Desember 2025
PPUB Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Fatchul Birri
Komisaris Commissioner	Hasanuddin Sugiharto Effendi

Direksi
Board of Directors

Direktur Director	Fuad Prabowo



Gedung Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Nahdlatul Ulama University Building, Yogyakarta



Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
DPRD Building of Sumenep Regency, East Java

PT PP Energi ("PPEN")

Entitas Anak Langsung PTPP
Direct Subsidiary of PTPP

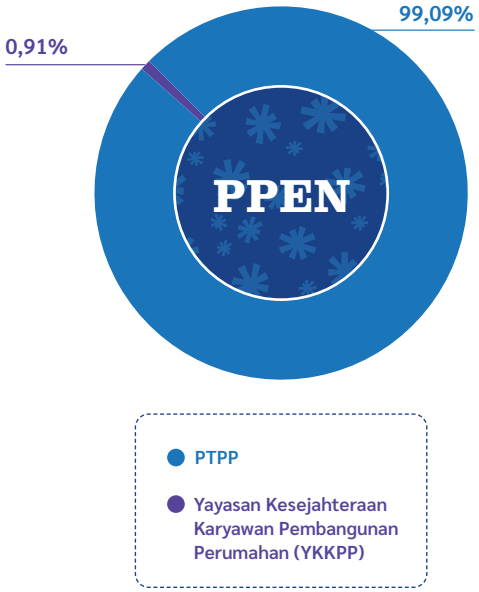
PT PP Energi ("PPEN") didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 2 Agustus 2016 dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., di Jakarta. PPEN menjalankan usaha dibidang industri konstruksi, infrastruktur, ketenagalistrikan, pembangkit tenaga listrik.

PPEN mengembangkan potensi sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan di Indonesia dengan bekerja di seluruh rantai nilai energi, mulai dari hulu dan hilir untuk minyak & gas, pengembangan dan operasi pembangkit listrik, energi terbarukan, pembiayaan energi maupun perdagangan komoditas.

PT PP Energi (PPEN) was established according to Deed No. 05 dated August 2, 2016, made before Notary Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., in Jakarta. PPEN engages in the construction, infrastructure, electrical power, and power plant business.

PPEN develops energy resource potentials into profitable investment portfolios in Indonesia by working across the energy value chain, from the upstream and downstream for oil and gas to power plant operations and development, renewable energy, energy financing, and commodity trading.

Kepemilikan Saham PPEN
PPEN Share Ownership



Manajemen Kunci PPEN per 31 Desember 2025
PPEN Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Anwar Ismail
Komisaris Commissioner	Ismail Zulkarnain

Direksi
Board of Directors

Direktur Utama President Director	Gangga Wahyu Nugroho
Direktur Keuangan Director of Finance	Supriyadi



Wilayah Kerja Karang Agung (PT Odira Energi Karang Agung), Sumatra Selatan
Karang Agung Working Area
(PT Odira Energi Karang Agung, South Sumatra



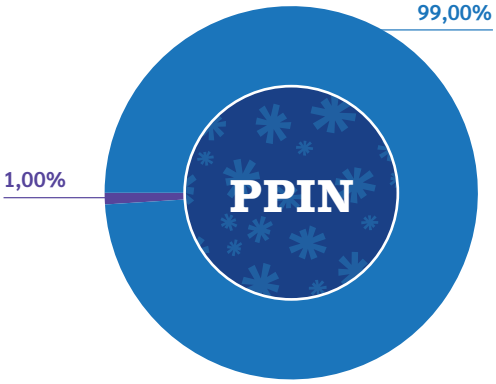
PT PP Infrastruktur ("PPIN")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

PT PP Infrastruktur ("PPIN") didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn. PPIN didirikan dengan tujuan mengelola aset PTPP dan turut andil dalam beberapa proyek infrastruktur yang sangat prospektif di Indonesia. PPIN menargetkan untuk menambah beberapa portofolio bisnis baru untuk meningkatkan pertumbuhannya, sekaligus pertumbuhan kelompok usaha PTPP.

PT PP Infrastruktur (PPIN) was established according to Deed No. 30 dated August 10, 2016, by Notary Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn. PPIN was established to manage PTPP's assets and contribute to several highly prospective infrastructure projects in Indonesia. PPIN aims to add several new business portfolios to increase its growth and the growth of the PTPP business group.

Kepemilikan Saham PPIN
PPIN Share Ownership



Manajemen Kunci PPIN per 31 Desember 2025
PPIN Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Anton Satyo Hendriatmo
Komisaris Commissioner	Ishaq Zubaedi Raqib
Komisaris Commissioner	Hapsoro Hadinoto
Komisaris Commissioner	Iriandi Azwartika

Direksi
Board of Directors

Presiden Direktur President Director	Helmi Adam
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi Director of Business Management & Operations	Iwan Sumediono
Plt. Direktur Keuangan & HCM Act. Director of Finance & HR	Anindyarta Adhi Wardhana



Sistem Penyediaan Air Minum Angke, Banten
Angke Drinking Water Supply System, Banten



Sistem Penyediaan Air Minum Gresik, Jawa Timur
Gresik Drinking Water Supply System, East Java

PT Sinergi Colomadu ("SC")

Entitas Anak Langsung PTPP
Direct Subsidiary of PTPP

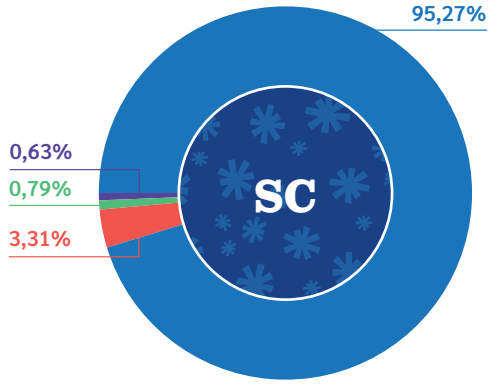
PT Sinergi Colomadu ("SC") didirikan berdasarkan perjanjian Usaha Patungan, Pengembangan Lahan Fase 1 Bekas Pabrik Gula Colomadu antara PTPP, PT PP Properti Tbk, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Jasamarga Properti, PT Patra Jasa dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2017 dengan No. 31/EXT/PP/DB/2017. Para pihak sepakat mendirikan Perusahaan patungan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akta pendirian SCM No. 8 tanggal 8 April 2017 Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H.

SC didirikan dalam rangka revitalisasi dan pengembangan aset Bekas Pabrik Gula Colomadu untuk tujuan wisata dan komersial.

PT Sinergi Colomadu (SC) was established according to a Joint Venture agreement and Phase 1 Land Development of the Former Colomadu Sugar Mill between PTPP, PT PP Properti Tbk, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Jasamarga Properti, PT Patra Jasa, and PT Kereta Api Indonesia (Persero), which was signed on April 8, 2017, with No. 31/EXT/ PP/DB/2017. The parties agreed to establish a Joint Venture for an indefinite period. The Deed of Incorporation of SCM No. 8 dated April 8, 2017, made before Notary Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H.

SC was established to revitalize and develop the Colomadu Sugar Mill's assets for tourism and commercial purposes.

Kepemilikan Saham SC
SC Share Ownership



Manajemen Kunci SC per 31 Desember 2025
SC Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Commissioner	Dharma Hermances

Direksi
Board of Directors

Direktur Utama President Director	M. Fakhruddin Yunia Putra



De Tjolomadoe, Jawa Tengah
De Tjolomadoe, Central Java



PT Centurion Perkasa Iman ("CPI")

Entitas Anak Langsung PTPP
Direct Subsidiary of PTPP

PT Centurion Perkasa Iman ("CPI") berkedudukan di Surabaya yang didirikan dengan akta No. 74 tanggal 23 Desember 2010 dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya, Anggaran Dasar telah diubah terakhir kalinya dengan Akta No. 61 tanggal 28 Februari 2020 dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2019, PT PP (Persero) Tbk melakukan akuisisi PT CPI berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Siti Susyanthi, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nana Zaenah, S.H., Notaris di Jakarta.

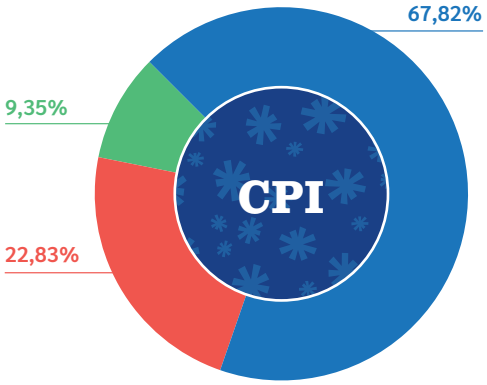
CPI didirikan dalam rangka menunjang bidang perhotelan untuk menghadapi persaingan kompetitif dengan hotel lainnya di Kota Surabaya. Hotel Grand Swiss-Bellhotel Darmo Surabaya merupakan hotel bintang 5 dengan desain model minimalis, namun tetap memberikan kesan mewah.

PT Centurion Perkasa Iman (CPI) is located in Surabaya and was established by Deed No. 74 dated December 23, 2010, made before Devi Chrisnawati, S.H., Notary in Surabaya. The Articles of Association were last amended by Deed No. 61, dated February 28, 2020, made before Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., a Notary in Jakarta. In 2019, PT PP (Persero) Tbk acquired PT CPI according to Deed No. 01 dated July 3, 2019, made before Siti Susyanthi, S.H., M.Kn., a Substitute Notary of Nana Zaenah, S.H., a Notary in Jakarta.

CPI was established to support the hospitality sector in facing competitive challenges with other hotels in Surabaya. Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya is a 5-star hotel with a minimalist design and a luxurious vibe.



Kepemilikan Saham CPI
CPI Share Ownership



Manajemen Kunci CPI per 31 Desember 2025
CPI Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	
Komisaris Commissioner	Gratianus Arya Nugraha
Direksi **Board of Directors**	
Direktur Director	Wahyono Hidayat

Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya, Jawa Timur
Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya, East Java



PT PP Semarang Demak ("PPSD")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

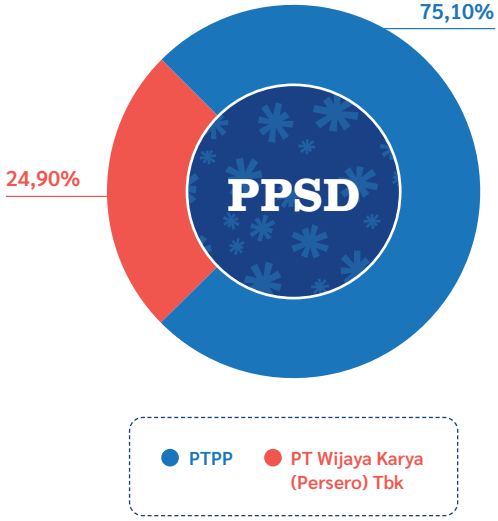
PT PP Semarang Demak ("PPSD") berkedudukan di Demak yang didirikan dengan Akta No. 88 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak No. 147 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk - Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

PPSD didirikan dengan tujuan untuk mengelola Jalan Tol Semarang - Demak.

PT PP Semarang Demak (PPSD) is located in Demak and was established by Deed No. 88 dated August 8, 2019, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and last amended by the Deed of Resolution of the Shareholders of PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak No. 147, dated December 30, 2020, before Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

PPSD was established to manage the Semarang-Demak Toll Road.

Kepemilikan Saham PPSD
PPSD Share Ownership



Manajemen Kunci PPSD per 31 Desember 2025
PPSD Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	HR Ario Setyawan
Komisaris Commissioner	Ashuri

Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Arzan
Direktur Director	Antonius Aditya C. N



Gerbang Tol Demak, Jawa Tengah
Demak Toll Gate, Central Java



Jalan Tol Semarang - Demak, Jawa Tengah
Semarang - Demak Toll Road, Central Java

PT PP Sinergi Banjaratma ("PPSB")

Entitas Anak Langsung PTPP | Direct Subsidiary of PTPP

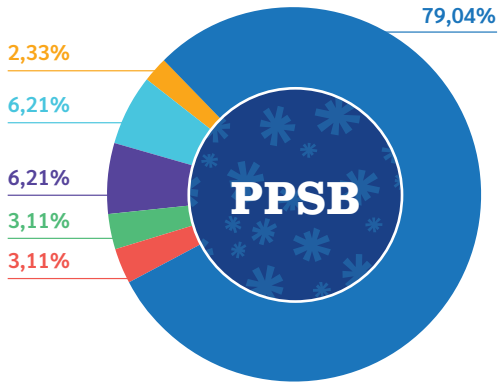
PT PP Sinergi Banjaratma ("PPSB") didirikan berdasarkan perjanjian Usaha Patungan, Pengembangan Lahan Eks Pabrik Gula Banjaratma antara PTPP, PT Jasamarga Properti, PT Perkebunan Nusantara IX, PT PP Properti Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang telah ditandatangani pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2018 dengan No. 25/PERJ/PP-PROP/DIR/2018 dan No. L.56.1/P/WK/2018. Para pihak sepakat mendirikan Perusahaan patungan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama masih berdirinya Perusahaan Patungan. Akta pendirian PPSB No. 02 pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PPSB didirikan dalam rangka melakukan pengembangan lahan yang bergerak di bidang jasa, pembangunan, dan perdagangan dengan bisnis utama *realty*, properti, pengoperasian dan pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan serta area destinasi beserta segala usaha tambahan atas usaha tersebut dengan tetap memperhatikan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial serta usaha lainnya. PPSB didirikan dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB) was established based on the Joint Venture agreement, Development of the Former Banjaratma Sugar Plant between PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasamarga Properti, PT Perkebunan Nusantara IX, PT PP Properti Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). The agreement was signed on Friday, October 30, 2018, No. 25/PERJ/PP-PROP/DIR/2018 and No. L.56.1/P/WK/2018. The parties agreed to establish a Joint Venture Company for an indefinite period as long as the Joint Venture Company is still established. Deed of establishment of PPSB No. 02 on Thursday, February 7, 2019 before Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PPSB was established to carry out land development in services, development, and trade, with its main business in realty, property, and the operation and management of rest areas, service areas, and destination areas. Additionally, PPSB engages in supporting businesses related to its core operations while considering the improvement of human resource quality, social welfare, and other relevant sectors. PPSB was established with the following shareholder composition:

Kepemilikan Saham PPSB
PPSB Share Ownership



- PTPP
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- PT Perkebunan Nusantara I
- PT Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali
- PT PP Properti Tbk
- PT Jasamarga Related Business

Manajemen Kunci PPSB per 31 Desember 2025
PPSB Key Management on December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Diana Puspitasari

Direksi Board of Directors	
Direktur Director	Dina Yunanda

Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma, Jawa Tengah
Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma, Central Java



Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals

Akuntan Publik
Public Accountant

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm (KAP)	:	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Tanda Terdaftar: STTD.KAP-00012/PM.22/2017 Registration License: STTD.KAP-00012/PM.22/2017
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Benny Andria Registrasi | Register: AP. 0181
Jasa yang Diberikan Provided Services	:	• Jasa Audit : Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Audit Service : Audit of Financial Statements for the 2025 Fiscal Year • Jasa Non Audit : - Non-Audit Service : -
Periode Penugasan Assignment Period	:	Oktober 2025-April 2026 October, 2025-April, 2026
Biaya Jasa (*Fee*) Fee	:	• Jasa Audit : Rp1.300.000.000 Audit Service : Rp1,300,000,000 • Jasa Non Audit : - Non-Audit Service : -

Perdagangan dan Pencatatan Saham
Share Trading and Listing

Nama Name	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	
Alamat Address	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Call Center: +62 21 515 0515 *E-mail*: contactcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id	Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Call Center: +62 21 515 0515 E-mail: contactcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id
Bentuk Jasa Provided Services	:	• Informasi perdagangan Trade information • Biaya pencatatan saham tahunan Annual Listing Fee	

Kustodian
Custodian

Nama Name	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	
Alamat Address	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp.: +62 21 5299 1099 Faks.: +62 21 5299 1199 *E-mail*: helpdesk@ksei.co.id Website: www.ksei.co.id	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Ph. +62 21 5299 1099 Fax. . +62 21 5299 1199 E-mail: helpdesk@ksei.co.id Website: www.ksei.co.id

Kustodian
Custodian

Bentuk Jasa Provided Services	:	• Menyediakan jasa untuk mengadministrasikan Efek yang telah dikeluarkan Providing the service of administering issued securities; • Penyedia layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta distribusi hasil aksi korporasi Providing securities transaction settlement and depository services as well as the distribution of corporate action proceeds. • Penyediaan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS) Provision of an Electronic General Meeting of Shareholders (e-GMS) system

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

Nama Name	:	PT BSR Indonesia	
Alamat Address	:	iNews Tower Lt. 7. Komplek MNC Center, Jln. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat - DKI Jakarta, 10340	iNews Tower 7th Floor MNC Center Complex, Jln. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta – DKI Jakarta, 10340
Bentuk Jasa Provided Services	:	• Pemeliharaan Daftar Pemegang Saham PTPP Maintenance of PTPP's Shareholder Register • Pemeliharaan Daftar Surat Kolektif Saham per Pemegang Saham Maintenance of the Register of Collective Share Certificates per Shareholder • Rekonsiliasi Harian Saldo Rekening Saham dengan KSEI Daily reconciliation of Share Account balances with KSEI • Pengiriman Laporan Bulanan kepada OJK dan BEI Monthly submission of reports to OJK and IDX • Penanganan Daftar Hadir RUPS Tahunan Handling the Annual GMS attendance list • Penanganan Daftar Hadir RUPS Luar Biasa Handling the Extraordinary GMS attendance list	

Wali Amanat
Trustee

Nama Name	:	PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk	
Alamat Address	:	Gedung T Tower Lantai 17, Jl. Gatot Subroto, No. 93, RT.02 RW.03 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780	T Tower Building 17th Floor, Jl. Gatot Subroto, No. 93, RT.02 RW.03 Pancoran, Pancoran Regency South Jakarta, DKI Jakarta 12780
Bentuk Jasa Provided Services	:	Mewakili kepentingan para Pemegang Saham Efek bersifat Utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan kontrak Perwaliamanatan dan Perundangan Representing the interest of Shareholders of Debt Securities, both inside and outside the Court, following the Trustee Contract and the Law	

Pemeringkat Efek
Rating Agency

Nama Name	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	
Alamat Address	:	Equity Tower Lantai 30, Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190	Equity Tower 30th Floor, Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, 12190
Bentuk Jasa Provided Services	:	Melakukan pemantauan pemeringkatan atas risiko kredit terhadap penerbitan Obligasi dan Sukuk PTPP Monitoring the credit risk rating of PTPP's Bond and Sharia Bond issuance	

Notaris
Notary

Nama Name	:	Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H	
Alamat Address	:	Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12160	Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru South Jakarta, 12160
Bentuk Jasa Provided Services	:	• Mengaktakan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Declaring the Annual GMS Resolution for the 2024 Fiscal Year • Mengaktakan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa selama Tahun 2025 Declaring the Extraordinary GMS Resolution throughout the 2025 Fiscal Year	

Konsultan Hukum
Legal Consultant

Nama Name	:	Jusuf Indradewa & Partners	
Alamat Address	:	Menara BCA (Grand Indonesia) Lantai 50, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, 10310	BCA Tower (Grand Indonesia) 50th Floor, Jl. MH. Thamrin No. 1 Central Jakarta, 10310
Bentuk Jasa Provided Services	:	Pembuatan *Legal Opinion* dan *Legal Memorandum* PT PP (Persero) Tbk Preparation of Legal Opinions and Legal Memoranda for PT PP (Persero) Tbk	
Nama Name	:	UMBRA - Strategic Legal Solutions	
Alamat Address	:	Telkom Landmark Tower, Lantai 49, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710	Telkom Landmark Tower, 49th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710
Bentuk Jasa Provided Services	:	Pembuatan *Legal Opinion* Aksi Korporasi Rencana Divestasi Preparation of a Legal Opinion on the Proposed Divestiture Corporate Action	
Nama Name	:	FKNK Law Firm	
Alamat Address	:	Equity Tower, Lantai 40, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta 12190	Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta 12190
Bentuk Jasa Provided Services	:	Pembuatan *Legal Opinion* Aksi Korporasi Rencana Divestasi Preparation of a Legal Opinion on the Proposed Divestiture Corporate Action	

Jasa Penilai
Appraisal Agency

Nama Name	:	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	
Alamat Address	:	The Manhanttan Square-Mid Tower Lantai 16 Unit C Jl. TB. Simatupang Kav. 1S Cilandak Timur, Jakarta Selatan	The Manhanttan Square-Mid Tower 16th Floor Unit C Jl. TB. Simatupang Kav. 1S East Cilandak, South Jakarta
Bentuk Jasa Provided Services	:	Penilaian terhadap Aset Tetap milik PT PP (Persero) Tbk The Assessment of Fixed Assets owned by PT PP (Persero) Tbk	



Makassar New Port, Sulawesi Selatan
Makassar New Port, South Sulawesi



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis


PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
PTPP

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Overview of the Economy and Industry

Perekonomian Global

Pada tahun 2025, perekonomian global masih diwarnai oleh berbagai tantangan struktural, termasuk ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan, dinamika hubungan dagang antarnegara, serta penyesuaian kebijakan ekonomi di tengah proses normalisasi pasca periode pengetatan moneter. Prospek pertumbuhan ekonomi global cenderung bergerak moderat, seiring dengan upaya bank sentral utama dunia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan. Dalam konteks pasar energi, harga minyak mentah *Brent crude* menunjukkan volatilitas sepanjang tahun; pada kuartal pertama 2025, harga *Brent* sempat berada di level yang relatif tinggi sekitar USD78,3* per barel pada Januari 2025, namun kemudian mengalami tren penurunan dan berfluktuasi di kisaran USD 58,7 per barel pada Desember kuartal akhir 2025, dengan penutupan mendekati USD60,8 per barel pada Desember 2025**. Harga minyak mentah *Brent* tetap menunjukkan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kebijakan produksi negara-negara

The Global Economy

In 2025, the global economy continued to be shaped by various structural challenges, including ongoing geopolitical uncertainty, the dynamics of international trade relations, and economic policy adjustments amid the normalization process following a period of monetary tightening. The outlook for global economic growth is expected to remain moderate, as major central banks strive to balance inflation stability with sustainable growth. In the energy market, Brent crude oil prices showed volatility throughout the year; in the first quarter of 2025, Brent prices briefly reached a relatively high level of around USD78.3* per barrel in January 2025, but subsequently trended downward and fluctuated around USD58.7 per barrel in the final quarter of 2025, closing near USD60.8 per barrel in December 2025**. Brent crude oil prices continued to exhibit volatility influenced by geopolitical factors, production policies of producer nations, and global demand expectations. Meanwhile, more accommodative monetary policies in several developed nations, including



produsen, serta ekspektasi permintaan global. Sementara itu, kebijakan moneter yang lebih akomodatif di sejumlah negara maju, termasuk kelanjutan arah pelonggaran suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat, memberikan ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi dan mendorong sentimen positif terhadap permintaan energi dan investasi global.

Sumber: *kumparan.com

Sumber: **investing.com

the US Federal Reserve's continued interest rate easing, provided room for economic activity recovery and fostered positive sentiment toward global energy demand and investment.

Source: *kumparan.com

*Source: **investing.com*

Perekonomian Indonesia

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika global yang masih menantang, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada 5,11% (yoy)*** yang didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, keberlanjutan realisasi investasi, serta kinerja ekspor yang relatif terjaga. Stabilitas makroekonomi tetap menjadi fokus utama kebijakan, di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level yang relatif ketat di kisaran 5,75-6,00%**** guna memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1%**** serta menjaga daya tarik aset keuangan domestik. Sepanjang tahun, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,92% (yoy)****, meskipun menghadapi tekanan dari volatilitas harga pangan dan energi global. Di sisi eksternal, nilai tukar Rupiah bergerak fluktuatif dan cenderung berada pada rentang Rp15.500-Rp16.300**** per dolar AS, dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan arah kebijakan moneter negara maju; namun demikian, langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui intervensi pasar valas dan pengelolaan likuiditas berhasil menjaga volatilitas Rupiah pada level yang terkendali dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Sumber: ***Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025

Sumber: ****bi.go.id.

The Indonesian Economy

In 2025, the Indonesian economy continues to demonstrate solid resilience amid persistently challenging global dynamics, with Gross Domestic Product (GDP) growth projected to be 5.11% (yoy)***, supported by robust household consumption, sustained investment, and relatively stable export performance. Macroeconomic stability remains the primary policy focus, with Bank Indonesia maintaining the benchmark interest rate (BI Rate) at a relatively tight level of 5.75-6.00%**** to ensure inflation stays within the 2.5±1%**** target range and to preserve the attractiveness of domestic financial assets. Throughout the year, the inflation rate stood at 2.92% (yoy)****, despite pressures from volatility in global food and energy prices. On the external front, the Rupiah exchange rate fluctuated and generally remained within the range of Rp15,500-Rp16,300**** per US dollar, influenced by global uncertainty and the direction of monetary policy in advanced economies; however, stabilization measures implemented by Bank Indonesia through foreign exchange market interventions and liquidity management succeeded in keeping Rupiah volatility at a controlled level and supported the stability of the national financial system.

Source: ***Statistics Indonesia (BPS), Official Statistics News: Indonesia's Economic Growth in 2025

Source: ****bi.go.id.

Industri Konstruksi Indonesia

Pada tahun 2025, perekonomian global berada dalam fase pemulihan yang berlangsung secara moderat, ditandai oleh stabilisasi inflasi dan penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara, meskipun masih dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik serta fragmentasi perdagangan global.

Dalam konteks nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dengan tingkat pertumbuhan yang terjaga, didukung oleh stabilitas makroekonomi, penguatan konsumsi domestik, serta kesinambungan realisasi investasi. Sejalan dengan kondisi tersebut, industri konstruksi dan infrastruktur tetap memegang peranan strategis sebagai penggerak utama

Indonesia's Construction Industry

In 2025, the global economy was in a phase of moderate recovery, marked by inflation stabilization and monetary policy adjustments across various countries, although it remained faced with geopolitical uncertainty and the fragmentation of global trade.

In the national context, the Indonesian economy demonstrated solid resilience, with sustained growth rates supported by macroeconomic stability, strengthened domestic consumption, and continued investment implementation. In line with these conditions, the construction and infrastructure industry continues to play a strategic role as the primary driver of economic activity,

aktivitas ekonomi, khususnya melalui pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan daya saing, pemerataan pertumbuhan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

particularly through the implementation of national strategic projects, the development of basic infrastructure and connectivity, and increased private sector participation in development financing.

Overall, these developments reflect a sustained commitment to long-term development focused on enhancing competitiveness, equitable growth, and the sustainability of the national economy.

Kebijakan Strategis dan Penyelesaian Permasalahan Tahun 2025

Strategic Policies and Problem Solving in 2025

Inisiatif Strategis Tahun 2025 / Strategic Initiatives in 2025

Sasaran Strategis Strategic Objectives	Kebijakan Policy	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives
Menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat **To be an innovative, superior, and sustainable contractor of first choice supported by sound finance**	Menumbuhkan bisnis jasa konstruksi gedung Growing the building construction services business	Meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan pemenangan proyek IKN dan Indonesia Timur. Increasing revenue by prioritizing the winning of projects in the Nusantara Capital City (IKN) and Eastern Indonesia.
		Mempertahankan *market share* di Jawa. Maintaining market share in Java.
		Melakukan pengembangan jaringan vendor lokal dan efisiensi penggunaaan jasa sub-kontraktor, untuk efisiensi BPP, dengan tetap mengedepankan *quality* dan *safety*. Developing a network of local vendors and optimizing the use of subcontractors to improve project costs, while continuing to prioritize quality and safety.
	Menumbuhkan bisnis Infrastruktur Growing the infrastructure business	Meningkatkan pendapatan dengan mengedepankan *competitive advertising* di proyek *airport* dan *sea port* Increasing revenue by prioritizing competitive advertising in airport and seaport projects
		Mempertahankan *market share* di proyek infra lainnya seperti *water & dam* dan jembatan. Maintaining market share in other infrastructure projects, such as water, dams, and bridges.
		Mengubah partisipasi pada proyek jalan tol di masa mendatang dengan berfokus pada bidang konstruksi, dibandingkan terlibat sebagai sebagai investor maupun operator. Shifting our participation in future toll road projects to focus on construction, rather than acting as an investor or operator.
		Melakukan *sourcing*, *outsourcing*, dan mobilisasi sumber daya yang tepat, untuk efisiensi BPP, dengan tetap mengedepankan *quality* dan *safety*. Sourcing, outsourcing, and mobilizing the right resources to optimize project costs, while prioritizing quality and safety.

Sasaran Strategis Strategic Objectives	Kebijakan Policy	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives
	Melakukan fokus selektif bisnis EPC Pursuing a selective focus on the EPC business	Melakukan partisipasi tender lewat pemilihan model dan lingkup yang lebih selektif/*opportunistic* dengan mengedepankan manajemen risiko dan pembangunan kapabilitas dalam jangka menengah. Participating in tenders through a more selective/opportunistic approach to project models and scope, prioritizing risk management and capability development in the medium term.
		Membangun *partnership* dengan *technology providers* untuk pengembangan kapabilitas. Building partnerships with technology providers to develop capabilities.
	Orkestrasi Aksi Korporasi dan Manajemen Portfolio Orchestration of Corporate Actions and Portfolio Management	Melakukan divestasi dengan nilai yang optimal untuk memperkuat struktur keuangan grup. Divesting at optimal valuations to strengthen the group's financial structure.
		Menerapkan sistem tata kelola Anak Perusahaan yang baik untuk penciptaan nilai secara grup. Implementing good Subsidiary governance systems to create value for the group.
		Mengidentifikasi sinergi dengan WIKA untuk mengoptimalisasi rencana klusterisasi. Identifying synergies with WIKA to optimize clustering plans.
		Memperkuat fungsi *cash management office* guna mengoptimalkan pengumpulan kas dan memastikan pemanfaatan kas yang tepat guna. Enhancing the office cash management functions to optimize cash collection and ensure the appropriate use of cash.
		Melakukan investasi secara selektif, melalui proses investasi yang diperkuat, menyeimbangkan potensi imbal hasil & pengelolaan risiko, juga mempertimbangkan kapasitas keuangan. Making selective investments through a strengthened investment process, balancing potential returns and risk management, while also considering financial capacity.
	Mengembangkan kapabilitas organisasi dan talenta Developing organizational capabilities and talent	Mengembangkan organisasi yang *agile* dan *corporate culture* selaras dengan bisnis dan kebijakan dengan mengedepankan peningkatan inklusivitas komunitas & *employee wellbeing*. Developing an agile organization and a corporate culture aligned with business objectives and policies, prioritizing increased community inclusivity and employee well-being.
		Membangun kapabilitas talenta selaras dengan strategi bisnis Perusahaan. Building talent capabilities aligned with the Company's business strategy.
		Memperkuat sistem manajemen kinerja melalui *feedback* yang rutin dan berkala, antara lain melalui program *coaching, mentoring*, dan *counseling*. Strengthening the performance management system through regular and periodic feedback, including through coaching, mentoring, and counseling programs.
	Memajukan ekosistem digital dan teknologi Advancing the digital and technology ecosystem	Mengedepankan inovasi teknologi, antara lain dapat dilakukan melalui penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Building Information Modeling* (BIM) di bagian operasi dalam kerangka aspek keberlanjutan. Prioritizing technological innovation, including through the implementation of Artificial Intelligence (AI) and Building Information Modeling (BIM) in operations within the framework of sustainability.
		Memperkuat *enterprise architecture*, termasuk *cybersecurity*, proses *application lifecycle management*, dan *change management*. Strengthening enterprise architecture, including cybersecurity, application life-cycle management processes, and change management.

Sasaran Strategis Strategic Objectives	Kebijakan Policy	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives
		Memperbaharui RSTI selaras dengan strategi Perusahaan 2025-2029 dan rencana KBUMN, termasuk pemanfaatan *big data* dan *data analytics* dalam korporasi. Updating the RSTI in alignment with the Company's 2025–2029 strategy and the SOE Ministry's plan, including the utilization of big data and data analytics within the corporation.
	Intensifikasi manajemen risiko Strengthening risk management	Memperkuat pengendalian risiko dengan mengintegrasikan ukuran kinerja risiko dan prinsip GCG dalam aktivitas harian. Strengthening risk management by integrating risk performance metrics and GCG principles into daily operations.
		Menyiapkan dan menerapkan konsep *all-in profitability* dan *all-in cash flow* untuk setiap proyek. Developing and implementing the concepts of all-in profitability and all-in cash flow for every project.
	Wujudkan keberlanjutan Achieving sustainability	Meningkatkan *sustainability rating* Perusahaan dengan penerapan praktik ESG dan *sustainable construction* yang lebih ekstensif. Improving the Company's sustainability rating through the more extensive implementation of ESG practices and sustainable construction.

Masalah yang Terjadi di Sepanjang Tahun 2025 dan Solusinya

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi nasional dan global, fluktuasi harga bahan baku konstruksi, perubahan kebijakan pemerintah, serta meningkatnya tingkat persaingan di industri konstruksi dan investasi. Selain itu, proses penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pasar, pengelolaan arus kas proyek, serta tantangan dalam menjaga efektivitas rantai pasok turut menjadi faktor yang memengaruhi kinerja operasional Perusahaan selama periode pelaporan.

Di samping itu, PTPP menghadapi tantangan terkait perubahan arah prioritas belanja Pemerintah Indonesia yang berimbas pada ketersediaan nilai pekerjaan konstruksi dari kebutuhan pemerintah. Tantangan ini juga berelasi langsung dengan persaingan industri yang berdampak pada tekanan margin, di mana persaingan pada *pipeline* proyek yang relatif sama dan agresifnya kompetisi harga yang pada akhirnya menggerus margin. Terutama dengan nilai pekerjaan konstruksi dari proyek pemerintah yang mencapai 45% dari perolehan kontrak baru di akhir 2025, PTPP menghadapi persoalan persaingan harga yang yang dapat mengurangi margin.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, PTPP juga melakukan mitigasi, seperti penyelarasan portofolio proyek dengan agenda nasional. Perusahaan juga berfokus pada bisnis inti, yaitu sektor gedung, infrastrukutur, dan EPC, dan berupaya mengoptimalkan *operational excellence* serta efisiensi biaya dalam rangka meningkatkan profil profitabilitas dari setiap proyek.

Problems that Occurred throughout 2025 and the Solutions

Throughout 2025, the Company faced various challenges influenced by national and global economic dynamics, fluctuations in construction raw material prices, changes in government policy, and increasing competition in the construction and investment industries. Additionally, the process of adapting to shifting market demands, managing project cash flows, and challenges in maintaining supply chain efficiency also contributed to the Company's operational performance during the reporting period.

Furthermore, PTPP faced challenges due to shifts in the Indonesian government's spending priorities, which affected the availability of construction work driven by government needs. These challenges are also directly linked to industry competition, which exerts pressure on margins. Competition for a relatively similar project pipeline and aggressive price competition ultimately erode margins. Particularly given that government construction projects accounted for 45% of new contract acquisitions by the end of 2025, PTPP faces price competition that could reduce margins.

To address these challenges, PTPP is implementing mitigation strategies, including aligning its project portfolio with national priorities. The company is also focusing on its core businesses: the building, infrastructure, and EPC sectors, and striving to optimize operational excellence and cost efficiency to enhance the profitability profile of each project.

PTPP juga secara konsisten menerapkan langkah-langkah strategis dan solutif melalui percepatan transformasi digital pada proses bisnis dan pengelolaan proyek. Selain itu, Perusahaan juga memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek, serta menerapkan strategi selektif dalam pengembangan bisnis guna menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing Perusahaan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

PTPP also consistently implements strategic, solution-oriented measures by accelerating digital transformation across business processes and project management. Additionally, the Company strengthens coordination with stakeholders, conducts periodic evaluations of project implementation, and applies selective strategies in business development to ensure business sustainability and enhance the Company's competitiveness amid the industry's evolving dynamics.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operations Overview per Business Segment

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Manajemen menetapkan operasi bisnis dari segmen yang menunjukkan jenis usaha. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan terdaftar di Indonesia. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang dilakukan di Indonesia.

In preparing the financial statements, the Company applies PSAK 5 (2015 Adjustment) on Operating Segments. Management determines the business operations of the segments that indicate the type of business. The Company and its subsidiaries operate and are registered in Indonesia. All construction activities and sales of goods are carried out in Indonesia.

Segmen usaha Perusahaan berdasarkan jenis usaha terbagi berdasarkan operasi baik di tingkat Perusahaan maupun kelompok usaha, yang terbagi menjadi Konstruksi; Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction*/EPC); Properti dan Realti; Pracetak; Peralatan; Toll Road; Energi; dan Jasa Pertambangan.

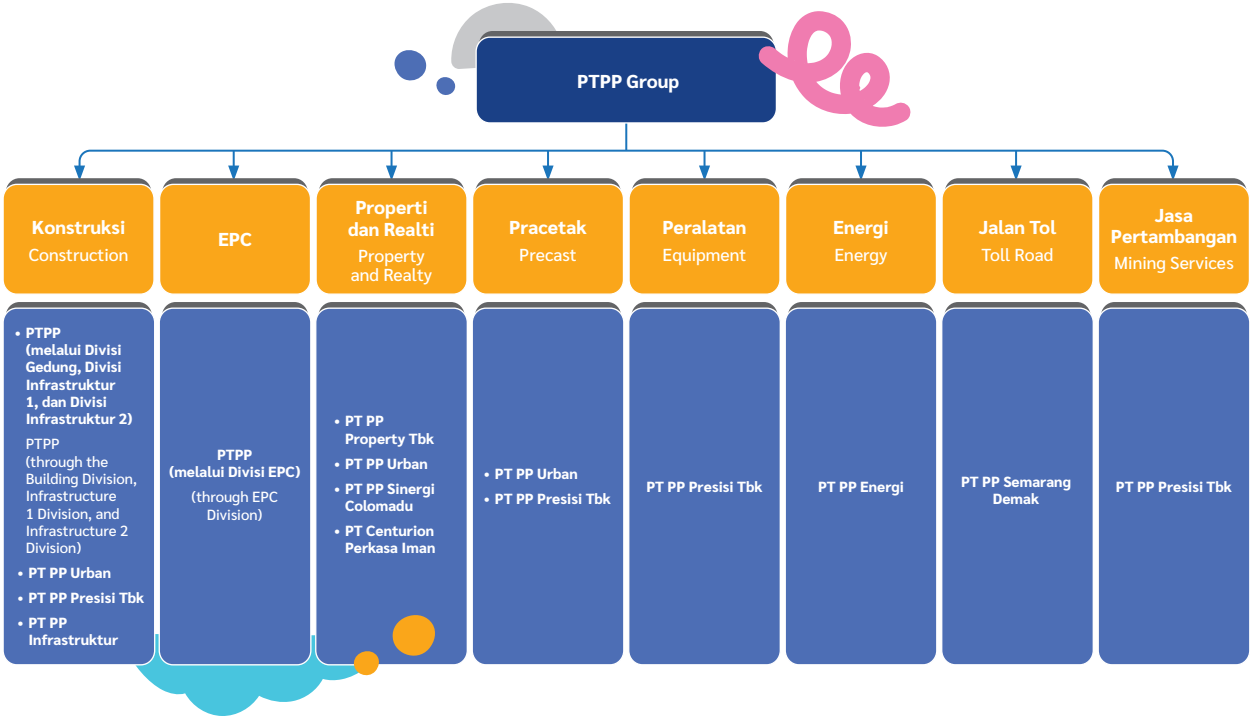
The Company's business segments are divided by type of business and are based on operations at both the Company and business group levels, including Construction; Engineering, Procurement, and Construction (EPC); Property and Real Estate; Precast; Equipment; Toll Roads; Energy; and Mining Services.

Segmen Primer PTPP Berdasarkan Jenis Usaha atau Produk yang Dihasilkan
PTPP Primary Segment based on the Type of Business or Products Produced



Ke-8 segmen usaha di atas didapatkan dari PTPP yang bertindak sebagai induk atas beberapa entitas anak. Berikut disampaikan konsolidasi atas setiap segmen yang menggambarkan kelompok usaha PTPP.

The eight business segments above are sourced from PTPP, which serves as the holding company for several subsidiaries. The following is a consolidation of each segment that illustrates the PTPP business group.



Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan pendapatan serta nilai aset Perusahaan yang dikontribusikan oleh masing-masing segmen.

The following is a breakdown of the Company's revenue and asset value contributed by each segment, providing an initial overview of each segment's business scale and its contribution to the Company.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Usaha PTPP

Amount and Contribution of Segments to PTPP's Revenues

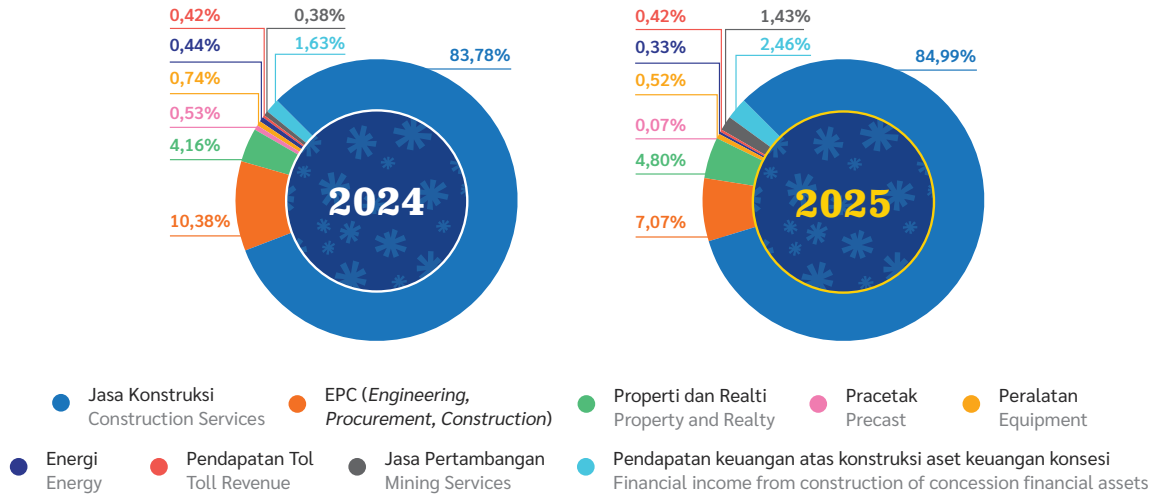
Segmen Primer Primary Segments	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Konstruksi Construction	13.829.263	84,99	16.597.848	83,78	(2.768.585)	(16,68)
EPC	1.150.228	7,07	2.055.762	10,38	(905.534)	(44,05)
Properti dan Realti Property and Real Estate	780.333	4,80	824.154	4,16	(43.821)	(5,32)
Pracetak Precast	10.653	0,07	104.058	0,53	(93.405)	(89,76)
Persewaan Peralatan Equipment Rent	84.560	0,52	146.447	0,74	(61.887)	(42,26)
Energi Energy	53.236	0,33	87.866	0,44	(34.630)	(39,41)
Pendapatan Tol Toll Income	68.071	0,42	83.762	0,42	(15.691)	(18,73)
Jasa Pertambangan Mining Service Business	232.953	1,43	75.928	0,38	157.025	206,81

Segmen Primer Primary Segments	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi* Financial income on the construction of concession financial assets*	399.960	2,46	322.778	1,63	77.182	23,91
Eliminasi** Elimination**	(338.474)	(2,08)	(486.459)	(2,46)	147.985	(30,42)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**16.270.782**	**100,00**	**19.812.143**	**100,00**	**(3.541.362)**	**(17,87)**

*) Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi adalah pendapatan atas suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan.
*) Financial income on the construction of concession financial assets is the interest income that accurately discounts estimated future cash receipts over the expected life of the financial asset.

**) Eliminasi adalah penghapusan pendapatan di salah satu segmen usaha dikarenakan adanya 2 (dua) pengakuan di 2 (dua) unit bisnis.
**) Elimination is the elimination of revenue in one of the business segments due to two recognitions in two business units.

Komposisi Pendapatan Segmen Primer Terhadap Pendapatan Usaha PTPP
Primary Segment Revenue Composition on PTPP Revenues



Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Nilai Aset PTPP
Amount and Contribution of Segments to PTPP's Asset Value

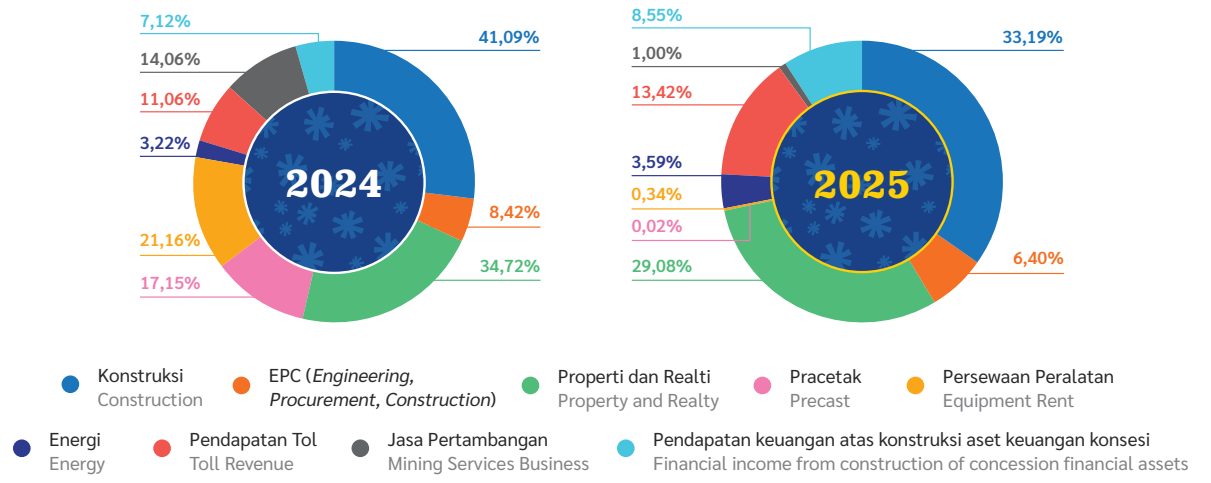
Segmen Primer Primary Segments	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Konstruksi Construction	14.267.378	33,19	22.406.076	41,09	(8.138.698)	(36,32)
EPC	2.749.212	6,40	4.589.938	8,42	(1.840.726)	(40,10)

Segmen Primer Primary Segments	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Properti dan Realti Property and Real Estate	12.499.998	29,08	18.934.011	34,72	(6.434.013)	(33,98)
Pracetak Precast	10.339	0,02	9.703.838	17,15	(9.693.499)	(99,89)
Persewaan Peralatan Equipment Rent	145.287	0,34	11.539.309	21,16	(11.394.022)	(98,74)
Energi Energy	1.542.153	3,59	1.754.034	3,22	(211.881)	(12,08)
Pendapatan Tol Toll Income	5.769.091	13,42	6.033.687	11,06	(264.596)	(4,39)
Jasa Pertambangan Mining Service Business	430.594	1,00	7.654.633	14,06	(7.224.039)	(94,37)
Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi* Financial income on the construction of concession financial assets*	3.673.167	8,55	3.884.676	7,12	(211.509)	(5,44)
Eliminasi** Elimination**	1.897.232	4,41	(31.967.991)	(58,62)	33.865.223	(105,93)
Jumlah Aset Total Assets	42.984.452	100,00	**54.532.211**	**100,00**	**(11.547.760)**	**(21,18)**

*) Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi adalah pendapatan atas suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan.
*) Financial income on the construction of concession financial assets is the interest income that accurately discounts estimated future cash receipts over the expected life of the financial asset.

**) Eliminasi adalah penghapusan pendapatan di salah satu segmen usaha dikarenakan adanya 2 (dua) pengakuan di 2 (dua) unit bisnis.
**) Elimination is the elimination of revenue in one of the business segments due to two recognitions in two business units.

Komposisi Aset Segmen Terhadap Nilai Aset PTPP
Segment Asset Composition on PTPP's Asset Value



Kinerja volume operasi dan bisnis Perusahaan dapat dilihat dari pemasaran yang terdiri dari nilai lelang yang diikuti dan dimenangkan dan nilai kontrak pekerjaan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

The Company's operational volume performance can be seen from the marketing perspective, which comprises the value of auctions participated in and won, and the value of work contracts, as shown in the table below.

Pemasaran: Nilai Lelang yang Diikuti dan Dimenangkan **Marketing: Total Tenders Participated in and Won**	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage (%)
Nilai lelang yang diikuti (Rp-juta) Tenders participated in (Rp-million)	**54.976.016**	46.489.254	8.486.762	18,26
Nilai lelang yang dimenangkan (Rp-juta) Tenders won (Rp-million)	**24.952.706**	27.091.870	(2.139.164)	(7,90)
Komposisi lelang yang dimenangkan (%) Composition of tenders won (%)	**45,39**	58,28	(12,89)	

Realisasi perolehan lelang yang dimenangkan dan kontrak baru selama tahun 2025 sebesar Rp24,95 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,13 triliun atau 7,90% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp27,09 triliun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja (APBN) pemerintah yang menyebabkan pembatalan dan penundaan proyek infrastruktur. Serta adanya penundaan lelang karena penyesuaian Rencana Umum Pengadaan (RUP).

The realized value of tenders won and new contracts in 2025 amounted to Rp24.95 trillion, a decrease of Rp2.13 trillion, or 7.90%, from the 2024 figure of Rp27.09 trillion. This was due to the State Budget (APBN) efficiency policies, which led to the cancellation and postponement of infrastructure projects. Additionally, there were delays in tenders due to adjustments to the General Procurement Plan (RUP).

Kontribusi segmen terhadap perolehan kontrak baru Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

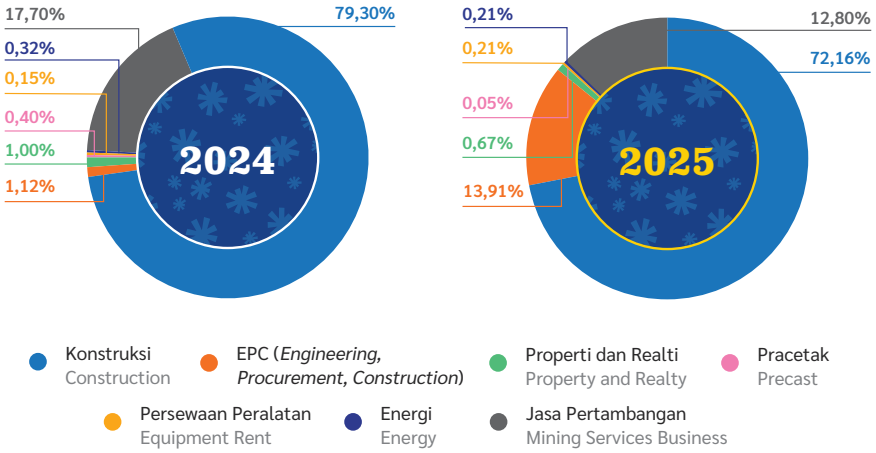
The segment's contribution to the Company's new contracts is available in the table below.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Perolehan Kontrak Baru PTPP

Number and Contribution of Primary Segment to PTPP's New Contract Acquisition

Segmen Primer **Primary Segments**	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Konstruksi Construction	**18.008.836**	**72,16**	21.484.717	79,30	(3.478.881)	(16,19)
EPC	**3.470.246**	**13,91**	304.619	1,12	3.165.627	1.039,21
Properti dan Realti Property and Real Estate	**166.235**	**0,67**	270.623	1,00	(104.388)	(38,57)
Pracetak | Precast	**11.443**	**0,05**	108.375	0,40	(96.932)	(89,44)
Persewaan Peralatan Equipment Rent	**51.190**	**0,21**	40.598	0,15	10.592	26,09
Energi | Energy	**53.236**	**0,21**	87.865	0,32	(34.629)	(39,41)
Jasa Pertambangan Mining Services	**3.194.519**	**12,80**	4.795.074	17,70	(1.600.555)	(33,38)
Jumlah Perolehan Kontrak Baru **Total New Contracts Acquisition**	**24.952.706**	**100,00**	**27.091.870**	**100,00**	**(2.139.164)**	**(7,90)**

Komposisi Pendapatan Segmen Terhadap Perolehan Kontrak Baru PTPP
Segment Revenue Composition on PTPP's New Contracts Acquisition



Seperti yang terlihat baik pada tabel dan grafik terkait kontribusi setiap segmen terhadap pendapatan usaha serta aset, dan kontribusi segmen terhadap pemasaran, segmen Konstruksi memberikan kontribusi terbesar terhadap bisnis Perusahaan.

As seen in the table and graph related to the contribution of each segment to operating income and assets, and to marketing, the Construction segment makes the largest contribution to the Company's business.

Segmen Konstruksi

Produk dan Jasa Segmen Konstruksi
PTPP menyediakan jasa pelayanan konstruksi publik dengan berfokus pada kegiatan mencakup gedung bertingkat, jalan dan jembatan, bendungan dan irigasi, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Kegiatan usaha konstruksi ini bernilai historis, menjadi simbol negara, dan memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat.

Construction Segment

Products and Services in the Construction Segment
PTPP provides public construction services by focusing on activities such as high-rise buildings, roads and bridges, dams and irrigation, ports, airports, and other projects. These construction business activities are rich in historical value, serve as a symbol of the state, and make a significant contribution to the community.

Produk dan Jasa Segmen Konstruksi
Products and Services in the Construction Segment



Berikut disampaikan konsolidasi atas kelompok usaha PTPP pada segmen Konstruksi.

Following is the consolidation of the PTPP business group in the Construction segment.



Strategi Pengembangan Segmen Konstruksi Tahun 2025

Pada tahun 2025, strategi Perusahaan berfokus kepada *capex owner* BUMN terutama Industri dan Hilirisasi, serta masuk ke instansi pemerintahan baik PUPR yang berfokus pada proyek pembangunan jalan, maupun non PUPR seperti proyek rumah sakit dari Kementerian Kesehatan serta rumah susun dari Kementerian Perumahan. Disarankan di selaraskan dengan kinerja operasional segmen konstruksi.

Construction Segment Development Strategy in 2025

In 2025, the Company's strategy is focused on BUMN (state-owned enterprise) owner capex, particularly in the industrial and downstream sectors, as well as expanding into government institutions, including the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), with a focus on road construction projects, and non-PUPR ministries such as hospital projects from the Ministry of Health and housing projects from the Ministry of Housing. It is recommended that this be aligned with the operational performance of the construction segment.

Kinerja Operasional Segmen Konstruksi

Kinerja operasi segmen Konstruksi terlihat dari nilai Kontrak Baru yang didapatkan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Operational Performance of the Construction Segment

The operational performance of the Construction segment is available from the value of New Contracts acquired in the table below.

Kontrak Baru Segmen Konstruksi New Contracts in the Construction Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Bangunan Gedung Building Construction	8.490.837	8.673.999	(183,162)	(2,11)
Jalan/Jembatan Roads/Bridges	3.904.241	8.759.612	(4,855,371)	(55,43)
Irigasi/Pengairan Irrigation	1.906.722	113.423	1,793,299	1581,07
Pelabuhan Seaport	2.531.557	1.122.047	1,409,510	125,62
Bandar Udara Airport	292.214	306.810	(14,596)	(4,76)
Kereta Api Railways	-	-	-	-
Industri Industry	687.909	2.264.580	(1,576,671)	(69,62)
Lain-lain Others	192.355	244.245	(51,890)	21,24
Jumlah Total	**18.005.836**	**21.484.717**	**(3,478,881)**	**(16,19)**

Realisasi nilai kontrak baru dari segmen konstruksi di tahun 2025 sebesar Rp18,01 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,47 triliun atau 16,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21,48 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembatalan dan penundaan proyek infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran belanja (APBN) pemerintah.

The realization of new contract value from the construction segment in 2025 amounted to Rp18.01 trillion, a decrease of Rp3.47 trillion or 16.19% compared to the previous year's figure of Rp21.48 trillion. This decline was primarily due to the cancellation and postponement of infrastructure projects resulting from the government's budget (APBN) efficiency policy.

Penjabaran kinerja segmen Konstruksi pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The breakdown of the Construction segment's performance in 2025 compared to 2024 is as follows:

- **Bangunan/Gedung**
  Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen bangunan/gedung sebesar Rp8,49 triliun, turun 2,11% dari Rp8,67 triliun pada tahun 2024. Beberapa proyek bangunan/gedung yang berhasil didapat di tahun 2025 antara lain dan memiliki nilai di atas Rp200 miliar antara lain:

- **Buildings**
  In 2025, PTPP recorded new contracts in the building segment totaling Rp8.49 trillion, a decrease of 2.11% from Rp8.67 trillion in 2024. Some of the building projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp200 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Mandiri Financial Center Pantai Indah Kapuk	878.378	2 Februari 2027 February 2, 2027	Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	Gedung DPD IKN IKN DPD Building	650.468	23 Desember 2027 December 23, 2027	IKN	Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Capital City Authorities
3	Gedung Paripurna IKN IKN Plenary Building	577.590	23 Desember 2027 December 23, 2027	IKN	Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Capital City Authorities
4	Dapur Nasional - Gedung SPPG 3 National Kitchen - SPPG 3 Building	512.187	31 Desember 2025 December 31, 2027		Kementerian Pekerjaan Umum Public Works Ministry
5	Sekolah Rakyat Paket Aceh 1 People's School Package Aceh 1	387.626	26 Juli 2026 July 26, 2026	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum Public Works Ministry
6	Rusun Rorotan IX Tahap I Rorotan IX Flats Stage I	350.000	22 Juni 2027 June 22, 2027	Jakarta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province



Gedung BNI PIK 2, Jakarta
BNI PIK 2 Building, Jakarta



Bali International Hospital, Bali

▶ Jalan/Jembatan

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen jalan/jembatan sebesar Rp3,90 triliun, turun 55,43% dari Rp8,75 triliun pada tahun 2024. Beberapa proyek jalan/jembatan yang berhasil didapat di tahun 2025 antara lain dan memiliki nilai di atas Rp200 miliar antara lain:

▶ Roads/Bridges

In 2025, PTPP recorded new contracts in the roads/bridges segment amounting to Rp3.90 trillion, a decrease of 55.43% from Rp8.75 trillion in 2024. Some road/bridge projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp200 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg Seksi 2 & 3 (Kosambi - Tj. Pasir) Kamal -Teluk Naga -Rajeg Toll Road Section 2 & 3 (Kosambi - Tj. Pasir)	1.356.300	22 Maret 2026 March 22, 2026	Jakarta	PT Duta Graha Karya
2	Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II STA. 7+100 – Sta. 14+110 Construction of Patimban Access Toll Road Package II STA. 7+100 – Sta. 14+110	583.524	30 April 2027 April 30, 2027	Jawa Barat West Java	PT Jasa Marga Akses Patimban
3	Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif Construction of Road at Judicial Complex Area	430.314	31 Desember 2027 December 31, 2027	Kalimantan Timur East Kalimantan	Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Capital City Authorities
4	Jembatan Pulau Kalimantan Selatan- Pulau Laut Kabupaten Tanah Bumbu Bridge of South Kalimantan-Lout Island, Tanah Bumbu Regency	261.274	18 Februari 2026 February 18, 2026	Kalimantan Selatan South Kalimantan	Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Public Works and Spatial Planning Office of the South Kalimantan Province
5	Peningkatan Jalan Paket F Di KIPP 1B Road Improvement Package F at KIPP 1B	244.811	31 Desember 2025 December 31, 2025	Kalimantan Timur East Kalimantan	Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Capital City Authorities



Jembatan Youtefa, Papua
Youtefa Bridge, Papua



Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi, Jawa Timur
Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi Toll Road, East Java

▶ Irigasi/Pengairan

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen irigasi/pengairan sebesar Rp1,91 triliun, naik 1.581,07% dari Rp113,42 miliar pada tahun 2024. Beberapa proyek irigasi/pengairan yang berhasil didapat di tahun 2025 dan memiliki nilai di atas Rp200 miliar antara lain:

▶ Irrigation

In 2025, PTPP recorded new contracts in the irrigation segment amounting to Rp1.91 trillion, an increase of 1,581.07% from Rp113.42 billion in 2024. Some irrigation projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp200 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Bendungan Bagong Paket 3 Bagong Dam Package 3	271.834	31 Desember 2028 December 31, 2028	Jawa Timur East Java	Kementerian PUPR PUPR Ministry
2	Volcanic Disaster Risk Reduction Sector Loan Project Package-2	133.653	30 Desember 2027 December 30, 2027	Jawa Timur East Java	Kementerian PUPR PUPR Ministry
3	Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kebagusan Construction of Kebagusan Pump Water Management System	114.629	15 Desember 2026 December 15, 2026	Jakarta	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Water Resources Office of the DKI Jakarta Province
4	Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Bulak Cabe (Kelurahan Cilincing) Construction of Bulak Cabe Pump Water Management System (Cilincing District)	124.253	11 Desember 2027 December 11, 2027	Jakarta	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Water Resources Office of the DKI Jakarta Province



Bendungan Tiu Suntuk, Nusa Tenggara Barat
Tiu Suntuk Dam, West Nusa Tenggara



Bendungan Lolak, Sulawesi Utara
Lolak Dam, North Sulawesi

▶ Pelabuhan

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen pelabuhan sebesar Rp2,53 triliun, naik 125,62% dari Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Beberapa proyek pelabuhan yang berhasil didapat di tahun 2025 dan memiliki nilai di atas Rp100 miliar antara lain:

▶ Seaport

In 2025, PTPP recorded new contracts in the seaport segment amounting to Rp2.53 trillion, an increase of 125.62% from Rp1.12 trillion in 2024. Some seaport projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp100 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	New Priok Eastern Access (NPEA)	2.330.000	21 Februari 2027 February 21, 2027	Jakarta	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2	Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 2 NCICD Coast Protective Embankment Phase A Stage 3 Package 2	172.901	15 Desember 2027 December 15, 2027	Jakarta	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Water Resources Office of the DKI Jakarta Province



East Java Multipurpose Terminal (EJMT), Jawa Timur
East Java Multipurpose Terminal (EJMT), East Java



Makassar New Port, Sulawesi Selatan
Makassar New Port, South Sulawesi

▶ Bandar Udara

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen bandar udara sebesar Rp292,21 miliar, turun 4,76% dari Rp306,81 miliar pada tahun 2024. Beberapa proyek bandar udara yang berhasil didapat pada tahun 2025 dan memiliki nilai di atas Rp200 miliar antara lain:

▶ Airport

In 2025, PTPP recorded new contracts in the airport segment amounting to Rp292.21 billion, turun 4.76% from Rp306.81 billion in 2024. Some airport projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp200 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Add. Terminal Bandara 1C Soekarno Hatta Add. Terminal of Soekarno Hatta 1C Airport	258.038	30 April 2026 April 30, 2026	Banten	PT Angkasa Pura Indonesia (Persero)
2	Add. Overlay Runway Selatan Bandara Soekarno Hatta Add. Overlay of the South Runway of Soekarno Hatta Airport	31.382	26 Oktober 2025 October 26, 2025	Banten	PT Angkasa Pura Indonesia (Persero)



Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan
Syamsudin Noor International Airport, South Kalimantan



Bandara Internasional Yogyakarta, Yogyakarta
Yogyakarta International Airport, Yogyakarta

- **Kereta Api**
  Pada tahun 2025, PTPP tidak mencatat perolehan kontrak baru pada segmen kereta api.

- **Industri**
  Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen industri sebesar Rp687,90 miliar, turun 69,62% dari Rp2,26 triliun pada tahun 2024. Beberapa proyek industri yang berhasil didapat pada tahun 2025 dan memiliki nilai di atas Rp100 miliar antara lain:

- **Railways**
  In 2025, PTPP did not acquire any new contracts in the railway segment.

- **Industry**
  In 2025, PTPP recorded new contracts in the industrial segment amounting to Rp687.90 billion, turun 69.62% from Rp2.26 trillion in 2024. Industrial projects that were successfully obtained in 2025 and have a value of more than Rp100 billion include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Construction of Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project Package 2	578.688	9 Juni 2027 June 9, 2027	Banten	Kementerian Pekerjaan Umum Public Works Ministry
2	Sewerage Pipe Installation Nipah Kuning B CWIP-03	109.221	25 Juni 2029 June 25, 2029	Kalimantan Barat West Kalimantan	Kementerian Pekerjaan Umum Public Works Ministry



Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Konstruksi

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Construction Segment

The profitability and financial performance of the construction segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Konstruksi Financial Performance of the Construction Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues				
Penjualan Eksternal External Sales	**13.511.687**	16.179.414	(2.667.727)	(16,49)
Penjualan antar Segmen Inter-Segment Sales	**317.576**	418.434	(100.858)	(24,10)

Kinerja Keuangan Segmen Konstruksi Financial Performance of the Construction Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**13.829.263**	16.597.848	(2.768.585)	(16,68)
Hasil Segmen Segment Revenues	**1.280.650**	2.204.146	(923.496)	(41,90)
Bagian Laba (Rugi) pada Investasi Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Gain (Loss) in Investment in Associates and Joint Ventures	**(55.004)**	(538.948)	483.944	(89,79)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(600.639)**	(334.849)	(265.790)	79,38
Beban Keuangan Finance Costs	**(1.102.580)**	(1.228.122)	125.542	(10,22)
Beban Usaha Operating Expenses	**(447.777)**	(336.106)	(111.671)	33,22
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(370.224)**	(365.644)	(4.580)	1,25
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**442.973**	814.698	(371.725)	(45,63)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(852.600)**	215.175	(1.067.776)	(496,24)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**-**	(85.496)	85.496	(100,00)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(852.600)**	129.679	(982.280)	(757,47)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**14.267.378**	22.406.076	(26.252.680)	(64,79)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**20.829.145**	45.550.212	(24.721.067)	(54,27)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(5,98)**	0,58	(6,30)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(6,17)**	0,78	(6,55)	

Pendapatan usaha pada sektor konstruksi mengalami penurunan sebesar 16,49% dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan tingkat perolehan kontrak di tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 serta proyek-proyek yang sudah selesai di tahun 2025. Sementara itu pada posisi keuangan, aset segmen dan liabilitas sama-sama mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Hal ini menyebabkan pergerakan pada rasio profitabilitas, yaitu imbal balik aset dan marjin lebih bersih menjadi negatif sebagai dampak dari rugi bersih pada sektor konstruksi.

Revenues in the construction sector declined by 16.49% from that in 2024, driven by a lower contract acquisition rate in 2025 compared to 2024, as well as projects that were completed in 2025. Meanwhile, in terms of financial position, both segment assets and liabilities decreased compared to 2024. This resulted in changes in profitability ratios, specifically the return on assets and net profit margin, which turned negative due to the net loss in the construction sector.

Segmen Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (*Engineering, Procurement and Construction*/EPC)

Produk dan Jasa Segmen EPC

Pengembangan usaha di bidang Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi, atau *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) dirancang dengan suatu model usaha yang mempertimbangkan segmentasi pasar, strategi bersaing, struktur *value chain*, pendapatan, modal dan strategi pertumbuhan. PTPP telah menentukan *roadmap* bisnis EPC dengan sasaran dan fokus di sektor energi, minyak dan gas, pertambangan serta manufaktur.

Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Segment

Products and Services of the EPC Segment

Business development in Engineering, Procurement, and Construction (EPC) is designed with a business model that considers market segmentation, competitive strategy, value chain structure, revenue, capital, and growth strategy. PTPP has established an EPC business roadmap with targets and a focus on the energy, oil and gas, mining, and manufacturing sectors.

Produk dan Jasa Segmen EPC
Products and Services of the EPC Segment



Kegiatan operasi segmen EPC dijalankan langsung oleh PTPP melalui Divisi EPC.

EPC segment operations are carried out directly by PTPP through the EPC Division.

Strategi Pengembangan Segmen EPC

Pada tahun 2025, PTPP tetap mengembangkan kapabilitas konstruksi spesialisasi seperti *renewable energy*, infrastruktur pendukung industri (*pipeline*) hingga *mining* (*mining operator, site preparation*). sesuai dengan arahan Danantara terkait penguatan peran BUMN dalam mendorong industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. PTPP melakukan *strategic partnership* untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan dapat dilakukan pembagian risiko dalam pelaksanaan konstruksi, dan penyelesaian VO (*Variation Order*) dan klaim proyek *on going*.

EPC Segment Development Strategy

In 2025, PTPP continued to enhance its specialized construction capabilities, spanning renewable energy, industrial support infrastructure (pipelines), and mining services (including mining operations and site preparation). This alignment follows Danantara's directives to strengthen the role of SOEs in driving industrialization, natural resource downstreaming, and sustainable value creation for the national economy. To bolster these efforts, PTPP has entered into strategic partnerships aimed at capability building and risk-sharing during construction. Furthermore, the company remains focused on the efficient resolution of Variation Orders (VO) and claims for ongoing projects.

Kinerja Operasional Segmen EPC

Kinerja operasi segmen EPC terlihat dari nilai Kontrak Baru yang didapatkan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

EPC Segment Operational Performance

The EPC segment's operational performance is reflected in the value of New Contracts obtained, as shown in the table below.

Kontrak Baru Segmen EPC EPC Segment's New Contracts	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Power Plant	2.683.746	15.887	2.667.859	16.792,72
Minyak & Gas Oil and Gas	786.500	-	786.500	100,00

Kontrak Baru Segmen EPC EPC Segment's New Contracts	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Industri Industry	-	288.732	(288.732)	(100,00)
Jumlah Total	**3.470.246**	**304.619**	**3.165.627**	**1.039,21**

Perolehan kontrak baru pada segmen EPC mengalami penurunan baik pada proyek *Power Plant*, Minyak & Gas, maupun Industri. Penurunan ini disebabkan penundaan atau mundurnya pelaksanaan tender khususnya segmen *Power Plant*.

New contract awards in the EPC segment declined across the Power Plant, Oil & Gas, and Industrial segments. This decline was due to delays or postponements in tender processes, particularly in the Power Plant segment.

Penjabaran kinerja segmen EPC pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 adalah sebagai berikut.

The breakdown of the EPC segment performance in 2025 compared to 2024 is as follows.

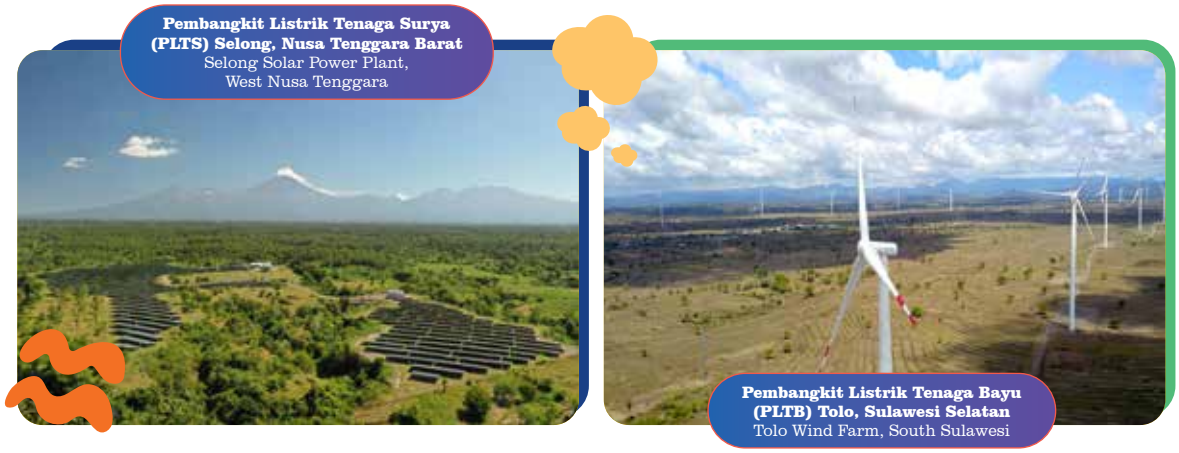
- ***Power Plant***

  Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen *power plant* sebesar Rp2,68 triliun, naik 16.792,72% dari Rp15,88 miliar pada tahun 2024. Proyek *power plant* yang berhasil didapat pada tahun 2025 adalah:

- **Power Plant**

  In 2025, PTPP recorded new contracts in the power plant segment amounting to Rp2.68 trillion, an increase of 16,792.72% from Rp15.88 billion in 2024. Power plant projects that were successfully obtained in 2025 include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	PLTGU Batam-1 120 MW	2.683.746	28 September 2028 September 28, 2028	Kepulauan Riau	PT PLN Batam



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Selong, Nusa Tenggara Barat
Selong Solar Power Plant, West Nusa Tenggara

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo, Sulawesi Selatan
Tolo Wind Farm, South Sulawesi

▶ **Minyak & Gas**

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen minyak & gas sebesar Rp786,50 miliar, di mana pada tahun 2024 tidak mencatat adanya kontrak baru. Proyek minyak & gas yang berhasil didapat pada tahun 2025 antara lain:

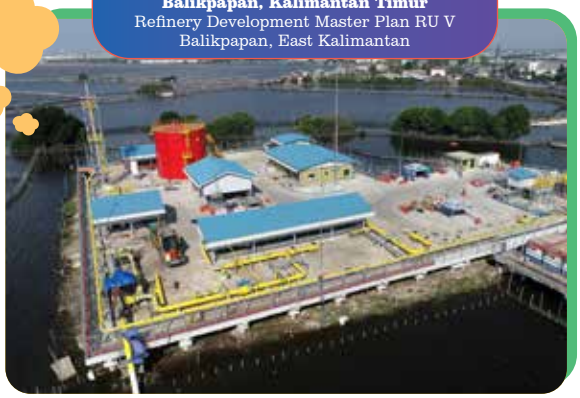
▶ **Oil & Gas**

In 2025, PTPP recorded new contracts in the oil & gas segment amounting to Rp786.50 billion, whereas PTPP did not record new contracts in 2024. Oil & gas projects that were successfully obtained in 2025 include:

No.	Nama Proyek Project Name	Perolehan Kontrak Contract Value	Target Penyelesaian Completion Target	Lokasi Location	Pemilik Owner
1	Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Pelumpang Cikampek - Pelumpang Oil Fuel Plumbing Service	786.500	1 Juli 2027 July 1, 2027	Jawa Barat West Java	PT Pertamina Gas



Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1, Pulau Jawa
Construction of the Cirebon–Semarang Natural Gas Transmission Pipeline Phase 1, Java Island



Refinery Development Master Plan RU-V Balikpapan, Kalimantan Timur
Refinery Development Master Plan RU V Balikpapan, East Kalimantan

▶ **Industri**

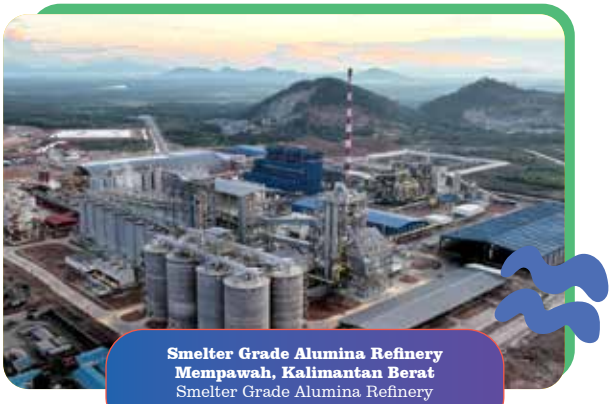
Pada tahun 2025, PTPP tidak mencatat kontrak baru pada segmen industri, sedangkan pada tahun 2024 senilai Rp288,73 miliar.

▶ **Industry**

In 2025, PTPP did not secure any new contracts in the industrial segment, while it was Rp288.73 billion in 2024.



Pabrik NPK PIM, Aceh
NPK Plant of PIM, Aceh



Smelter Grade Alumina Refinery Mempawah, Kalimantan Barat
Smelter Grade Alumina Refinery Mempawah, West Kalimantan

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen EPC

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen EPC dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the EPC Segment

The profitability and financial performance of the EPC segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen EPC Financial Performance of the EPC Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues	**1.150.228**	2.055.762	(905.534)	(44,05)
Hasil Segmen Segment Revenues	**132.449**	111.161	21.288	19,15
Bagian Laba (Rugi) pada Investasi Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Gain (Loss) in Investment in Associates and Joint Ventures	**-**	8.627	(8.627)	(100,00)
Beban Usaha Operating Expenses	**(46.202)**	(54.000)	7.798	(14,44)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(30.481)**	-	(30.481)	100,00
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**55.766**	65.788	(10.022)	(15,23)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**-**	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**55.766**	65.788	(10.022)	(15,23)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**2.749.212**	4.589.938	(1.840.726)	(40,10)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**1.489.887**	2.964.304	(1.474.417)	(49,74)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**2,03**	1,43	0,60	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**4,85**	3,20	1,65	

Pendapatan usaha pada segmen EPC mengalami penurunan sebesar 44,05% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,55 triliun. Namun secara profitabilitas, segmen EPC masih mencatatkan laba bersih meskipun 15,23% lebih rendah dibanding tahun lalu. Pada posisi keuangan, aset dan liabilitas segmen masing-masing mencatatkan penurunan sebesar 40,10% dan 49,74% di tahun 2025. Sementara itu pada rasio keuangan segmen EPC, baik imbal balik aset dan marjin laba bersih sama-sama mencatatkan nilai positif masing-masing 2,03 dan 4,83.

Revenues in the EPC segment decreased by 44.05% compared to 2024, which recorded revenue of Rp2.55 trillion. However, in terms of profitability, the EPC segment still recorded a net profit, although it was 15.23% lower than the previous year. In the financial position, the segment's assets and liabilities each recorded a decrease of 40.10% and 49.74% in 2025. Meanwhile, regarding the EPC segment's financial ratios, both return on assets and net profit margin recorded positive values of 2.03 and 4.83, respectively.

Segmen Properti dan Realti

Produk dan Jasa Segmen Properti dan Realti

PTPP dan entitas anak melaksanakan pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian sejumlah gedung komersial, hotel, apartemen, perkantoran, permukiman, mal, *trade center* dan fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berevolusi.

Property and Real Estate Segment

Products and Services of the Property and Real Estate Segment

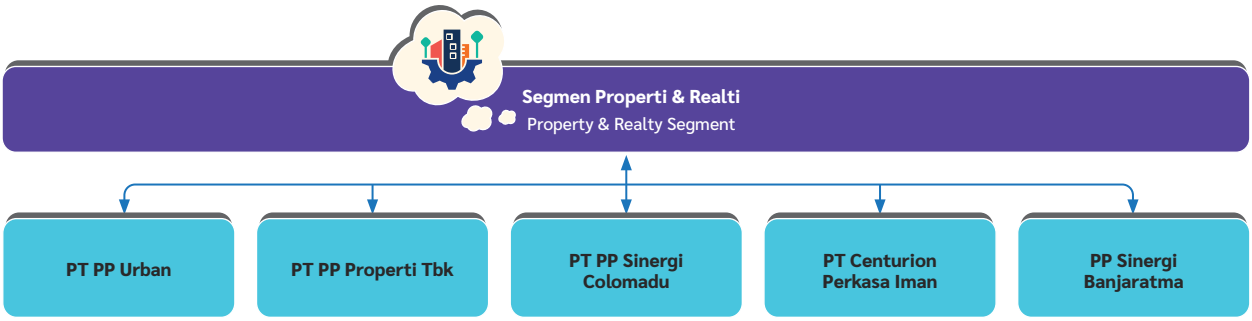
PTPP and its subsidiaries develop, construct, and operate several commercial buildings, hotels, apartments, offices, residential buildings, malls, trade centers, and other facilities to meet the evolving needs and lifestyles of the people.

Produk dan Jasa Segmen Properti dan Realti
Products and Services of the Property and Real Estate Segment

Residensial Residentials	***Hospitality***	***Commercial***
Mencakup kegiatan pengembangan dan pengelolaan apartemen, namun tidak terbatas pada pembelian lahan atau kerja sama pengembangan lahan, penjualan unit-unit apartemen dan/atau sewa unit-unit apartemen serta pemukiman. Includes apartment development and management activities, but not limited to land purchases or land development cooperation, sale of apartment units, and/or rental of apartment units and housings.	Mencakup kegiatan pengembangan dan pengelolaan hotel, namun tidak terbatas pada perencanaan pengembangan hotel, operasional hotel dan pemeliharaan hotel. Includes hotel development and management activities, but not limited to hotel development planning, hotel operations, and hotel maintenance.	Mencakup kegiatan pengembangan dan pengelolaan *mall*, *office*/gedung perkantoran, termasuk namun tidak terbatas pada penyewaan unit-unit kios, kerja sama dengan tenant. Includes development and management of malls, offices/ office buildings, including but not limited to the rental of kiosk units, tenant cooperation.

Pada segmen Properti dan Realti, kinerja PTPP dikonsolidasikan dari entitas anak, PT PP Properti Tbk, PT PP Urban, PT Sinergi Colomadu, PT Centurion Perkasa Iman, dan PP Sinergi Banjaratma.

In the Property and Real Estate segment, PTPP's performance was consolidated with its subsidiaries: PT PP Properti Tbk, PT PP Urban, PT Sinergi Colomadu, PT Centurion Perkasa Iman, and PP Sinergi Banjaratma.



Pengembangan Operasi dan Bisnis Segmen Properti dan Realti

Proyek-proyek pengembangan untuk tipe pengembangan *Hospitality* yang sudah dijalankan entitas anak, PT PP Properti Tbk, meliputi:

- Park Hotel, Jakarta;
- Prime Park Hotel, Bandung;
- Swiss-Belhotel, Balikpapan;
- Prime Park Hotel & Convention Pekanbaru;
- Prime Park Hotel & Convention Lombok; dan
- Palm Park Hotel Surabaya.

Operational and Business Development of the Property and Real Estate Segment

The Hospitality development projects that have been conducted by PT PP Properti Tbk, as a subsidiary, are as follows:

- Park Hotel, Jakarta;
- Prime Park Hotel, Bandung;
- Swiss-Belhotel, Balikpapan;
- Prime Park Hotel & Convention Pekanbaru;
- Prime Park Hotel & Convention Lombok; and
- Palm Park Hotel Surabaya.

Di samping itu, terdapat proyek pengembangan *Hospitality* yang dijalankan langsung oleh PTPP, yaitu Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, yang dimiliki dan dikelola oleh PTPP.

In addition, there is a Hospitality development project directly run by PTPP, namely the Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya, which is owned and managed by PTPP.

Hotel Hotel	Bintang Star Rating	Beroperasi Operating Since	Dimiliki oleh PP Properti Owned by PP Properti	Dikelola oleh PP Properti Managed by PP Properti
Park Hotel Jakarta	Bintang 3+ 3+ Stars	2009	✓	✓
Prime Park Hotel Bandung	Bintang 4 4 Stars	2014	✓	✓
Swiss-Belhotel Balikpapan	Bintang 4 4 Stars	2016	✓	-
Prime Park Hotel & Convention Pekanbaru	Bintang 4 4 Stars	2018	✓	✓
Prime Park Hotel & Convention Lombok	Bintang 4 4 Stars	2019	✓	✓
Palm Park Hotel Surabaya	Bintang 3 3 Stars	2018	✓	✓
Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya, dh. Hotel Royal Tulip Darmo	Bintang 5 5 Stars	2023	-	-

Adapun proyek-proyek pengembangan *Commercial* yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

The Commercial development projects that have been implemented are as follows:

Mall & Edutainment	
Kaza City Mall	Grand Slipi Tower
Balikpapan Ocean Square	Sungkono Business Park
Lagoon Avenue Dharmahusada	Kidzania Surabaya
De Tjolomadoe	PP Sinergi Banjaratma
Mall Serang | Serang Mall	Rest Area Batang

Untuk proyek-proyek pengembangan residensial yang sudah dijalankan dan sedang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Untuk proyek-proyek pengembangan residensial yang sudah dijalankan dan sedang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Residensial Residentials	
Grand Kamala Lagoon, Bekasi, Jawa Barat Grand Kamala Lagoon Superblock, Bekasi, West Java	Apartemen Patria Park, Jakarta Patria Park Apartment, Jakarta
Grand Shamaya, Surabaya	FX Residence, Jakarta
Grand Dharmahusada Lagoon, Surabaya	Perumahan Karyawan Perum Otorita Jatiluhur, Purwakarta Perum Otorita Jatiluhur Employee Housing, Purwakarta
Grand Sungkono Lagoon, Surabaya	Perumahan Permata Puri I, Cibubur Permata Puri I Housing, Cibubur
Gunung Putri Square, Bogor, Jawa Barat Gunung Putri Square, Bogor, West Java	Perumahan Permata Puri II, Cibubur Permata Puri II Housing, Cibubur
Verdura, Sentul, Jawa Barat Verdura, Sentul, West Java	Perumahan Permata Puri III, Cibubur Permata Puri III Housing, Cibubur

Residensial Residentials	
Begawan Apartemen, Malang	Perumahan Permata Puri IV, Cibubur Permata Puri IV Housing, Cibubur
Amartha View, Semarang	Perumahan Permata Puri Laguna, Cibubur Permata Puri Laguna Housing, Cibubur
The Alton Apartemen, Semarang	Perumahan Bukit Permata Puri, Ngaliyan - Semarang Bukit Permata Puri Housing, Ngaliyan - Semarang
Westown View, Surabaya	Taman Griya Permata, Bali
Riverview Residence, Cikarang, Jawa Barat Riverview Residence, Cikarang, West Java	Puri Lembana, Bandung, Jawa Barat Puri Lembana, Bandung, West Java
Little Tokyo Apartemen, Cikarang - Jawa Barat Little Tokyo Apartment, Cikarang - West Java	Payon Amartha, Semarang
Ma-Zhoji, Depok	Tana Babarsari, Yogyakarta
Grand Anila Apartment, Kertajati	The Ayoma Apartment, Serpong
Grand Sagara Apartment, Surabaya	Green Park Terrace, Cilegon
Paxton Apartment, Surabaya	Louvin Apartment, Jatinangor, Jawa Barat
Pavilion Permata Apartemen, Surabaya	Apartemen Evenciio, Depok, Jawa Barat Evenciio Apartment, Depok, West Java
Apartemen Paladian Park, Jakarta Paladian Park Apartment, Jakarta	

Sedangkan untuk memenuhi program Pemerintah, PTPP melalui entitas anak, PT PP Urban, juga menjalankan usahanya di bidang pengembangan hunian terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adapun produk properti yang dihasilkan oleh PT PP Urban, antara lain:

- URBANtown Serpong;
- URBANtown Karawang;
- Apartemen Sudimara Forestwalk.

As for fulfilling the Government program, PTPP, through its subsidiary PT PP Urban, also operates in affordable housing development for Low-Income Communities. The property products produced by PT PP Urban include:

- URBANtown Serpong;
- URBANtown Karawang;
- Sudimara Forestwalk Apartment.

Selain PT PP Properti Tbk dan PT PP Urban, PTPP juga mendirikan entitas anak, PT Sinergi Colomadu ("SC") untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang saat ini melalui pengelolaan sebuah kawasan komersial yang bernama "De Tjolomadoe" yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kawasan De Tjolomadoe tersebut terdapat fasilitas Museum, Ruangan, Tempat Belanja dan Tempat Makan. Ruangan yang terdapat dalam De Tjolomadoe dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti Pernikahan, Rapat, dan Acara Besar lainnya. Kemudian, PTPP juga memiliki satu anak usaha yang bergerak di bidang *Rest Area* Heritage 260B yaitu PT PP Sinergi Banjaratma yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. *Rest area* ini disebut *heritage* karena memiliki bangunan yang unik di mana sebelumnya merupakan bangunan pabrik gula didirikan oleh salah satu Perusahaan Perkebunan Belanda, yang kemudian direvitalisasi dan dioperasikan sebagai *rest area* pada tahun 2019. Di dalam *rest area* terdapat *booth* UMKM yang menjual kuliner nusantara, oleh-oleh, kerajinan tangan, dan batik. Selain itu juga tersedia hotel transit yang ditujukan untuk pemudik.

In addition to PT PP Properti Tbk and PT PP Urban, PTPP established a subsidiary, PT Sinergi Colomadu (SC), to meet the needs and lifestyle of today's evolving community through the management of a commercial area called De Tjolomadoe located in Karanganyar, Central Java. In the De Tjolomadoe area, there are museum facilities, rooms, shopping areas, and places to eat. The rooms at De Tjolomadoe can be used for various activities, including weddings, meetings, and other large events. PTPP also has a subsidiary engaged in Rest Area Heritage 260B, PT PP Sinergi Banjaratma, located in Brebes, Central Java. This rest area is designated a heritage site because it features a unique building that was previously a sugar factory, built by a Dutch plantation company. The building was revitalized and operated as a rest area in 2019. Inside the rest area, there are MSME booths that sell Indonesian culinary delights, souvenirs, handicrafts, and batik. There is also a transit hotel available for travelers.

Selain itu, PTPP juga memiliki anak usaha yang bernama PT Centurion Perkasa Iman ("CPI") untuk mengelola Grand Swiss Belhotel di Surabaya.

Strategi Pengembangan Segmen Properti dan Realti Tahun 2025

PTPP dan entitas anak pada segmen properti lainnya melaksanakan pengembangan dan pengoperasian sejumlah apartemen, hotel, komersial, perkantoran, dan fasilitas lainnya. Strategi yang dijalankan pada segmen ini adalah melakukan program *cross selling*, percepatan pengurangan inventory, percepatan *cash in* dan efisiensi *cash out*.

Kinerja Operasional Segmen Properti dan Realti

Kinerja operasi dan bisnis segmen Properti dan Realti tercermin dari nilai perolehan kontrak baru, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Moreover, PTPP has a subsidiary, PT Centurion Perkasa Iman (CPI), which manages the Grand Swiss Belhotel in Surabaya.

Property and Real Estate Segment Development Strategy in 2025

PTPP and its subsidiaries within the property segment are engaged in the development and operation of various apartments, hotels, commercial spaces, offices, and other facilities. The segment's core strategy focuses on implementing cross-selling programs, accelerating inventory reduction, fast-tracking cash-inflow, and optimizing cash-outflow efficiency.

Operational Performance of the Property and Real Estate Segment

The operational performance of the Property and Real Estate segment is available from the value of New Contracts acquired in the table below.

Nilai Perolehan Kontrak Baru New Contracts Acquisition Value	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Segmen Properti dan Realti Property and Real Estate Segment	166.235	270.623	(104,388)	38,57

Pada tahun 2025, PTPP melalui entitas anaknya mencatat kontrak baru pada segmen properti dan realti sebesar Rp166,23 miliar, mengalami penurunan 38,57% atau setara Rp104,38 miliar dari Rp270,62 miliar pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan struktural, antara lain keterbatasan akses pembiayaan konsumen akibat belum optimalnya dukungan perbankan dalam penyediaan fasilitas KPA/KPR pasca PKPU, serta peningkatan *cancel rate* yang sejalan dengan tekanan perlambatan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan tantangan daya beli dan kehati-hatian konsumen dalam melakukan keputusan pembelian properti. Adapun strategi yang telah dijalankan secara terintegrasi diantaranya adalah program *flash sale*, pemanfaatan *cross database*, serta penguatan kanal pemasaran berbasis *omni-channel* untuk mendorong akselerasi penjualan.

In 2025, through its subsidiaries, PTPP recorded new contracts in the property and real estate segment totaling Rp166.23 billion, a decrease of 38.57% or Rp104.38 billion from Rp270.62 billion in 2024. This was influenced by external and structural factors, including limited access to consumer financing due to suboptimal banking support in providing KPA/KPR facilities following the PKPU, as well as an increase in cancellation rates in line with economic slowdown pressures. These conditions reflect challenges in purchasing power and consumer caution in making property purchase decisions. The integrated strategies implemented include flash sale programs, the utilization of cross-databases, and the strengthening of omni-channel marketing channels to drive sales acceleration.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Properti dan Realti

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen properti dan realti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Property and Real Estate Segment

The profitability and financial performance of the property and Real Estate segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Properti dan Realti Financial Performance of the Property and Real Estate Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues				
Penjualan Eksternal External Sales	**774.501**	795.185	(20.684)	(2,60)
Penjualan antar Segmen Inter-Segment Sales	**5.832**	28.969	(23.137)	(79,87)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**780.333**	824.154	(43.821)	(5,32)
Hasil Segmen Segment Revenues	**228.734**	138.907	89.827	64,67
Bagian Laba (Rugi) pada Investasi Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Gain (Loss) in Investment in Associates and Joint Ventures	**(29.681)**	6.999	(36.680)	(524,07)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(6.252.350)**	(109.163)	(6.143.187)	5.627,54
Beban Keuangan Finance Costs	**(248.195)**	(955.419)	707.224	(74,02)
Beban Usaha Operating Expenses	**(153.543)**	(104.312)	(49.231)	47,20
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(19.122)**	(19.340)	218	(1,13)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**(1.465.342)**	(1.049.586)	(415.756)	(39,61)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(7.939.497)**	(2.091.914)	(5.847.583)	(279,53)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**5.428**	(3.997)	9.425	(235,80)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(7.934.069)**	(2.095.911)	(5.838.158)	(278,55)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**12.499.998**	18.934.011	(6.434.013)	(33,98)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**6.187.739**	16.464.014	(10.276.275)	(62,42)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(63,47)**	(11,07)	(52,04)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(1.016,75)**	(254,31)	(762,44)	

Pendapatan usaha segmen properti dan realti mencatatkan penurunan nilai sebesar 2,60% dibandingkan tahun lalu. Di tahun ini, segmen properti dan realti mengakui nilai rugi bersih sebesar Rp7,93 triliun yang utamanya dikontribusi oleh kerugian penurunan nilai sebesar Rp6,25 triliun. Hal ini menyebabkan rasio profitabilitas yaitu imbal balik aset dan marjin laba bersih sama-sama memiliki nilai negatif yang dipengaruhi oleh kerugian tersebut. Sementara itu pada aset dan liabilitas segmen properti realti menurun masing-masing senilai 33,98% dan 62,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Revenues from the property and real estate segment decreased by 2.60% compared to last year. This year, the property and real estate segment reported a net loss of Rp7.93 trillion, primarily driven by an impairment loss of Rp6.25 trillion. This resulted in negative profitability ratios, specifically, the return on assets and net profit margin, both of which were impacted by this loss. Meanwhile, the assets and liabilities of the real estate segment decreased by 33.98% and 62.42%, respectively, compared to the previous year.

Segmen Pracetak

Produk dan Jasa Segmen Pracetak

PTPP dan entitas anak melaksanakan bisnis pada produk beton pracetak, di mana sistem pracetak telah diaplikasikan secara luas di Indonesia. Pada sistem pracetak, seluruh komponen bangunan dapat dibuat dan dipasang di lapangan. Proses pembuatan komponen dapat dilakukan dengan kontrol kualitas yang baik.

Precast Segment

Products and Services in the Precast Segment

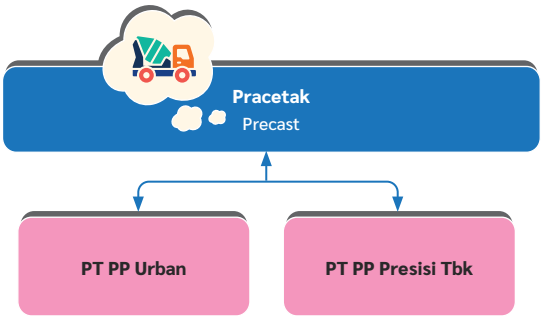
PTPP and its subsidiaries operate in the precast sector, where the precast system has been widely adopted in Indonesia. In a precast system, all building components can be fabricated and installed in the field, and the components can be manufactured with good quality control.

Produk dan Jasa
Product and Services

Precast Readymix

Kegiatan operasi segmen Pracetak dijalankan oleh PT PP Urban dan PT PP Presisi Tbk.

The precast segment operations are conducted by PT PP Urban and PT PP Presisi Tbk.



Strategi Pengembangan Segmen Pracetak Tahun 2025

PTPP dan entitas anak melaksanakan bisnis pada sektor pracetak, di mana sistem pracetak telah diaplikasikan secara luas di Indonesia. Pada sistem pracetak, seluruh komponen bangunan dapat dibuat dan dipasang di lapangan. Proses pembuatan komponen dapat dilakukan dengan kontrol kualitas yang baik. Kegiatan operasi segmen Pracetak dijalankan oleh PT PP Urban dan PT PP Presisi Tbk.

Precast Segment Development Strategy in 2025

PTPP and its subsidiaries operate in the precast sector, a system that has been widely implemented across Indonesia. Under the precast system, all structural components can be manufactured and subsequently installed on-site. This manufacturing process ensures rigorous quality control. The operations within the Precast segment are managed by PT PP Urban and PT PP Presisi Tbk.

Kinerja Operasional Segmen Pracetak

Operational Performance of the Precast Segment

Nilai Perolehan Kontrak Baru New Contracts Acquisition Value	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Segmen Pracetak Precast Segment	**11.443**	108.375	(96,932)	89,44

Pada tahun 2025, PTPP melalui entitas anaknya mencatat kontrak baru pada segmen pracetak Rp11,44 miliar, mengalami penurunan hingga 89,44% atau setara Rp96,93 miliar dari Rp108,37 miliar pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan suku bunga KPR, serta kondisi pasar yang cenderung *oversupply* sehingga konsumen lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian.

In 2025, through its subsidiaries, PTPP recorded new contracts in the precast segment amounting to Rp11.44 billion, a decrease of 89.44% or equivalent to Rp96.93 billion from Rp108.37 billion in 2024. This was due to a combination of external factors, such as public purchasing power and mortgage interest rates, as well as market conditions that tended toward oversupply, causing consumers to be more selective in making purchasing decisions.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pracetak

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen pracetak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Precast Segment

The profitability and financial performance of the precast segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pracetak Financial Performance of the Precast Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues				
Penjualan Eksternal External Sales	**10.653**	98.593	(87.940)	(89,19)
Penjualan antar Segmen Inter-Segment Sales	**-**	5.465	(5.465)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**10.653**	104.058	(93.405)	(89,76)
Hasil Segmen Segment Revenues	**(4.243)**	7.087	(11.330)	(159,87)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(1.000)**	(4.236)	3.236	(76,39)
Beban Keuangan Finance Costs	**(571)**	(727)	156	(21,46)
Beban Usaha Operating Expenses	**(163)**	(154.340)	154.177	(99,89)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**-**	(103.411)	103.453	(100,00)

Kinerja Keuangan Segmen Pracetak Financial Performance of the Precast Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	42	(828.017)	828.059	(100,01)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	(5.935)	(1.083.644)	1.077.708	(99,45)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	(5.936)	(1.083.644)	1.077.708	(99,45)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	10.339	9.703.838	(9.693.499)	(99,89)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	7.090	5.811.294	(5.804.204)	(99,88)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	(57,40)	(11,17)	(46,24)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	(55,71)	(1.041,38)	985,67	

Pendapatan segmen pracetak mengalami penurunan yang cukup signifikan dipengaruhi oleh penurunan nilai kontrak yang terjadi di tahun 2025. Kerugian yang dicatat di tahun ini mengalami perbaikan sebesar 99,45% menjadi Rp5.936 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi bersih senilai Rp1,08 triliun. Sementara itu pada posisi keuangan, aset dan liabilitas segmen pracetak juga mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 99,89% dan 99,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio profitabilitas masih menunjukkan nilai negatif sama dengan tahun sebelumnya, namun di tahun 2025 rasio balik aset meningkat menjadi (57,40%) dari tahun sebelumnya yang bernilai (11,17%) dan marjin laba bersih mengalami perbaikan kerugian dari (1,041%) di tahun sebelumnya menjadi (55,71%) di tahun 2025.

Revenues in the precast segment experienced a significant decline, driven by a decrease in contract value occurring in 2025. The loss recorded this year improved by 99.45% to Rp5,936 billion compared to the previous year, which recorded a net loss of Rp1.08 trillion. Meanwhile, in terms of financial position, the assets and liabilities of the precast segment also saw a significant decline of 99.89% and 99.88%, respectively, compared to the previous year. Profitability ratios remained negative, similar to the previous year; however, in 2025, the return on assets improved to (57.40%) from (11.17%) the previous year, and the net profit margin improved from a loss of (1.041%) the previous year to (55.71%) in 2025.

Segmen Peralatan

Produk dan Jasa Segmen Peralatan

Peralatan konstruksi memiliki peran yang sangat penting di dalam industri konstruksi. Ketersediaan peralatan konstruksi yang baik dapat membantu realisasi pengelolaan proyek yang baik, hasil konstruksi yang berkualitas dan pada akhirnya akan mengarah kepada hasil konstruksi yang kokoh, handal dan kompetitif.

Equipment Segment

Products and Services of the Equipment Segment

Construction equipment has a vital role in the construction industry. The availability of good construction equipment can help realize good project management and quality construction results, ultimately leading to solid, reliable, and competitive construction results.

Produk dan Jasa Segmen Peralatan
Products and Services of the Equipment Segment



***Erection* Kontraktor**
Erection Contractor



Rental Alat Berat
Heavy Equipment Rental



Bekisting
Formwork

Kegiatan operasi segmen Peralatan dijalankan oleh entitas anak, PT PP Presisi Tbk.

Strategi Pengembangan Segmen Peralatan Tahun 2025
Pada tahun 2025, strategi pada segmen peralatan adalah melakukan divestasi alat berat yang tidak produktif dan divestasi alat berat yang tidak sesuai dengan fokus Perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya alat berat yang sudah tidak produktif karena memasuki masa *midlife/ overhaul* pada TW II 2025. Sebagai tindak lanjut, dilakukan peremajaan alat melalui *overhaul*, kontrak FMC, optimasi penggunaan alat dan *sparepart*, pelatihan mekanik, hingga mengimplementasikan sistem pengendalian kinerja *asset management* yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas alat dan pada akhirnya akan mengarah pada kualitas produk konstruksi yang baik.

The equipment segment operations are carried out by PT PP Presisi Tbk.

Equipment Segment Development Strategy in 2025
In 2025, the equipment segment focused on the divestment of non-productive heavy equipment and assets that no longer align with the Company's strategic focus. This initiative was prompted by equipment reaching its midlife or overhaul phase in the second quarter of 2025. To ensure operational continuity, the Company undertook an asset rejuvenation program through comprehensive overhauls, Full Managed Contracts (FMC), and the optimization of equipment and spare parts. Furthermore, we enhanced mechanic training and implemented an integrated asset management performance control system to boost productivity and ultimately ensure superior construction quality.

Kinerja Operasional Segmen Peralatan
Equipment Segment Operational Performance

Nilai Perolehan Kontrak Baru New Contracts Acquisition Value	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Segmen Peralatan Equipment Segment	51.189	40.598	10.592	26,09

Pada tahun 2025, PTPP melalui entitas anak, PT PP Presisi Tbk, mencatat kontrak baru pada segmen peralatan sebesar Rp51,19 miliar, naik 26,09% atau setara Rp10,59 miliar dari Rp40,59 triliun pada tahun 2024.

In 2025, through its subsidiary entity, PT PP Presisi Tbk, PTPP recorded new contracts in the equipment segment amounting to Rp51.19 billion, an increase of 26.09% or Rp10.59 trillion from Rp40.59 billion in 2024.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Peralatan
Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen peralatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Equipment Segment
The profitability and financial performance of the equipment segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Peralatan Financial Performance of the Equipment Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues				
Penjualan Eksternal External Sales	**69.494**	112.855	(43.361)	(38,42)
Penjualan antar Segmen Inter-Segment Sales	**15.066**	33.592	(18.526)	(55,15)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**84.560**	146.447	(61.887)	(42,26)
Hasil Segmen Segment Revenues	**1.474**	13.304	(11.830)	(88,92)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(14.059)**	(21.468)	7.409	(34,51)
Beban Keuangan Finance Costs	**(8.021)**	(3.683)	(4.338)	117,78
Beban Usaha Operating Expenses	**(2.295)**	(131.663)	129.368	(98,26)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**-**	(94.961)	94.961	(100,00)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**586**	131.523	(130.937)	(99,55)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(22.314)**	(106.948)	84.634	(79,14)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(11.113)**	(45.517)	34.404	(75,58)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(33.427)**	(152.465)	119.038	(78,08)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**145.287**	11.539.309	(11.394.022)	(98,74)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**99.624**	6.158.709	(6.059.085)	(98,38)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(23,01)**	(1,32)	(21,69)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(39,53)**	(104,11)	64,58	

Pendapatan usaha segmen peralatan mencatatkan penurunan nilai sebesar 42,46% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari menurunnya perolehan nilai kontrak atas sewa peralatan pada tahun 2025. Namun secara kerugian yang diakui oleh segmen peralatan mengalami perbaikan sebesar 78,08%

Revenues from the equipment segment recorded a 42.46% decrease compared to the previous year. This was influenced by a decline in contract revenues from equipment rental in 2025. However, the loss recognized by the equipment segment improved by 78.08% compared to the previous year. In terms of financial position, the

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada posisi keuangan, aset dan liabilitas segmen peralatan mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 98,74% dan 98,38% lebih rendah dibandingan dengan nilai aset dan liabilitas tahun sebelumnya. Dengan kedua hal tersebut maka turut mempengaruhi pergerakan rasio profitabilitas. Imbal balik aset mengalami penurunan sebesar 21,69%, namun marjin laba bersih mengalami perbaikan kerugian sebesar 64,58% dari yang sebelumnya (104,11%) di tahun 2024 menjadi (39,53%) di tahun 2025 walau masih sama-sama bernilai negatif akibat rugi yang diakui pada segmen peralatan.

equipment segment's assets and liabilities saw significant declines of 98.74% and 98.38%, respectively, compared to the previous year's figures. These factors consequently impacted changes in profitability ratios. Return on assets decreased by 21.69%, but the net profit margin improved by 64.58%, from (104.11%) in 2024 to (39.53%) in 2025, although both figures remained negative due to the loss recognized in the equipment segment.

Segmen Energi

Produk dan Jasa Segmen Energi

PTPP dan entitas anak melakukan investasi dalam mengembangkan proyek-proyek energi. Investasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Coal Fired Power Plant* Lampung Tengah 2x7 MW;
2. *Mini Hydro Power Plant* (PLTMH) Lau Gunung 2x7,5 MW;
3. Nipa Island *Storage Tank Oil Storage Tank Terminal*;
4. *Oil & Gas Operation* Odira Energi Karang Agung;
5. PT Meulaboh Power Generation (IPP Meulaboh *Coal Fired Power Plant* 2x200 MW);
6. PT Pembangkitan Perkasa Daya (UPP Jami 2 *Mine Mouth Coal Fired Power Plant* 2x300 MW).
7. IPP Surakarta *Waste to Energy* 5 MW-*a subsidiary of* PTPP *currently manage by* PT PP Energi.

Kegiatan operasi segmen Energi dijalankan oleh entitas anak, PT PP Energi.

Strategi Segmen Energi Tahun 2025

Mengoptimalkan produksi minyak dan gas sehingga nilai valuasi aset akan meningkat (OEKA) dan mempercepat proses divestasi / pelepasan saham pada portfolio investasi secara selektif untuk memberikan kontribusi nilai terbaik bagi Perusahaan pada sektor energi.

Kinerja Operasional Segmen Energi

Energy Segment

Products and Services in the Energy Segment

PTPP and its subsidiaries make investments in developing energy projects. The investments that have been made are as follows:

1. Coal Fired Power Plant Central Lampung 2x7 MW;
2. Mini Hydro Power Plant (PLTMH) Lau Gunung 2x7,5 MW;
3. Nipa Island Storage Tank Oil Storage Tank Terminal;
4. Oil & Gas Operation Odira Energi Karang Agung;
5. PT Meulaboh Power Generation (IPP Meulaboh Coal Fired Power Plant 2x200 MW);
6. PT Pembangkitan Perkasa Daya (UPP Jami 2 Mine Mouth Coal Fired Power Plant 2x300 MW); and
7. PP Surakarta Waste to Energy 5 MW – currently managed by PT PP Energi.

The energy segment operations are conducted by PT PP Energi.

Energy Segment Development Strategy in 2025

Optimizing oil and gas production to increase asset valuation (OEKA) and accelerate the selective divestment of shares in the investment portfolio to deliver the best value for the Company in the energy sector.

Operational Performance of the Energy Segment

Nilai Perolehan Kontrak Baru New Contracts Acquisition Value	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Segmen Energi Energy Segment	53.236	87.865	(34.629)	39,41

Pada tahun 2025, PTPP melalui entitas anak, PT PP Energi, mencatat kontrak baru pada segmen energi sebesar Rp53,23 miliar, penurunan 39,41% dari Rp87,86 miliar pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan alami atau *natural declining* atas produksi minyak.

In 2025, through its subsidiary entity, PT PP Energi, PTPP recorded new contracts in the energy segment amounting to Rp53.23 billion, a decrease of 39.41% from Rp87.86 billion in 2024. This was mainly due to the natural decline in oil production.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Energi

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen energi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Energy Segment

The profitability and financial performance of the energy segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Energi Financial Performance of the Energy Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues	**53.236**	87.866	(34.630)	(39,41)
Hasil Segmen Segment Revenues	**(24.010)**	2.865	(26.875)	(938,05)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(74.677)**	(90.882)	16.205	(17,83)
Beban Keuangan Finance Costs	**(107.067)**	(114.478)	7.411	(6,47)
Beban Usaha Operating Expenses	**(18.427)**	(20.299)	1.872	(9,22)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**8.393**	(200.566)	208.959	(104,18)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(215.788)**	(423.361)	207.573	(49,03)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(215.788)**	(423.361)	207.573	(49,03)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**1.542.153**	1.754.034	(211.881)	(12,08)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**2.051.858**	2.040.049	11.809	0,58
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(13,99)**	(24,14)	10,14	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(405,34)**	(481,83)	76,48	

Pada segmen energi, pendapatan usahanya mengalami penurunan sebesar 39,41% dibandingkan dengan tahun lalu. Namun secara kerugian yang dicatatkan pada segmen energi mengalami perbaikan dari negatif (424,361) miliar

In the energy segment, revenues decreased by 39.41% compared to the previous year. However, the loss recorded in the energy segment improved from a negative (424.361) billion to a negative (215.788) billion in 2025.

menjadi negatif (215,788) miliar di tahun 2025. Sementara itu pada posisi keuangan baik aset dan liabilitas segmen energi hanya bergerak sedikit yaitu aset menurun 12,08% dan liabilitas meningkat 0,58%. Rasio profitabilitas masih mencatatkan nilai negatif baik di tahun 2024 dan 2025. Imbal balik aset menjadi (13,99%) dari tahun 2024 yang bernilai (24,14%), dan marjin laba bersih di tahun 2024 negatif (481,83%) menjadi negatif (405,34%) di tahun 2025.

Meanwhile, regarding the financial position, both assets and liabilities in the energy segment changed only slightly: assets decreased by 12.08% and liabilities increased by 0.58%. Profitability ratios remained negative in both 2024 and 2025. The return on assets turned at (13.99%) from (24.14%) in 2024, and the net profit margin, which was negative (481.83%) in 2024, improved to negative (405.34%) in 2025.

Toll Road

Produk dan Jasa Segmen *Toll Road*

PTPP melalui entitas anak PT PP Semarang Demak, mengelola operasi dan bisnis dari jalan tol Semarang-Demak ruas Seksi 2 Ruas Sayung-Demak, Jawa Tengah, yang resmi beroperasi secara komersial sejak 25 Februari 2023, serta penyelesaian konstruksi Seksi 1 Kaligawe-Sayung. Jalan tol ruas Seksi 2 Ruas Sayung-Demak merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional ("PSN") dan memiliki panjang 26,40 km yang terbagi dalam 2 (dua) seksi, di mana Seksi 1 menghubungkan Kaligawe-Sayung (10,64 km, masih dalam pengerjaan) dan Seksi 2 Sayung-Demak (16,31 km, beroperasi sejak 25 Februari 2023).

Strategi Pengembangan Segmen *Toll Road* Tahun 2025

Mengoptimalkan aset jalan tol melalui kemitraan strategis untuk meningkatkan LHR di sepanjang jalan tol.

Kinerja Operasional Segmen *Toll Road*

Toll Road

Products and Services in the Toll Road Segment

Through its subsidiary, PT PP Semarang Demak, PTPP manages the operation and business of the Semarang-Demak toll road, Section 2 Sayung–Demak Section, Central Java, which has been officially in commercial operation since February 25, 2023, and the completion of the construction of Section 1 Kaligawe-Sayung. The Section 2 Sayung-Demak section of the toll road, which is one of the National Strategic Projects (PSN), is 26.40 km long and divided into two sections, where Section 1 connects Kaligawe-Sayung (10.64 km, still in progress) and Section 2 Sayung–Demak (16.31 km, operating since February 2023).

Toll Road Segment Development Strategy in 2025

Optimizing toll road assets through strategic partnerships to increase average daily traffic volume along toll roads.

Operational Performance of the Toll Road Segment

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di Sepanjang Tahun (kendaraan per hari) Average Daily Traffic throughout the year (vehicles per day)	9.515	10.540	(1.025)	9,72
Periode Beroperasi (bulan) Operation Period (month)	12	12	-	-
Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) (kendaraan per hari) Average Daily Traffic (vehicles per day)	9.515	10.540,00	(1.025)	9,72

Lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan yang melintasi tol yang dikelola PPSD tahun 2025 sebanyak 9.515 kendaraan per hari, mengalami penurunan 9,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10.540 kendaraan per hari. Hal ini disebabkan oleh Karena adanya kejadian khusus pada bulan agustus 2024 s.d. september 2024 yg menyebabkan kenaikan LHR yg signifikan pada

The average daily traffic (LHR) of vehicles passing through toll roads managed by PPSD in 2025 was 9,515 vehicles per day, a decrease of 9.72% compared to the previous year's figure of 10,540 vehicles per day. This was due to a specific incident occurring from August 2024 to September 2024, which caused a significant increase in LHR at that time, namely the repair of the Wonokerto Bridge on the

waktu tersebut yaitu perbaikan Jembatan Wonokerto di jalan Nasional Semarang Demak yang letaknya sejajar dengan jalan tol Semarang Demak Seksi 2 dan menyebabkan terjadinya kemacatan panjang sehingga dari instansi terkait mengambil langkah untuk melewatkan kendaraan ke jalan tol untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Nasional, sedangkan pada tahun 2025 tidak kejadian khusus yg dapat meningkatkan LHR.

Semarang-Demak National Road, which runs parallel to the Semarang-Demak Toll Road Section 2 and caused long traffic jams. Consequently, relevant agencies took steps to divert vehicles to the toll road to alleviate the congestion on the National Road. In contrast, in 2025, there were no special events that could increase LHR.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Jalan Tol

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Toll Road dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Toll Road Segment

The profitability and financial performance of the toll road segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen *Toll Road* Financial Performance of the Toll Road Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues	**68.071**	83.762	(15.691)	(18,73)
Hasil Segmen Segment Revenues	**3.406**	15.334	(11.928)	(77,79)
Beban Keuangan Finance Costs	**(387.650)**	(321.246)	(66.404)	20,67
Beban Usaha Operating Expenses	**(14.005)**	(13.125)	(880)	6,70
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**(966.902)**	(332.427)	(634.475)	190,86
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(1.365.152)**	(651.464)	(713.688)	109,55
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(256.284)**	(32.782)	(223.502)	681,78
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(1.621.436)**	(684.246)	(937.190)	136,97
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**5.769.091**	6.033.687	(264.596)	(4,39)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**4.047.752**	4.607.692	(559.940)	(12,15)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(28,11)**	(11,34)	(16,77)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(2.381,98)**	(816,89)	(1.565,08)	

Pada segmen *toll road,* pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar 18,73% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan kerugian yang dicatatkan pada segmen *toll road* mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 136,97% dibandingkan dengan rugi bersih tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban lain-lain segmen *toll road* yang menambah kerugian tercatat di tahun berjalan. Laporan posisi keuangan mengalami penurunan pada aset dan liabilitas segmen masing-masing sebesar 4,39% dan 12,15% di tahun 2025. Rasio profitabilitas juga terpengaruh pada imbal balik aset dan marjin laba bersih yang turut mengalami peningkatan nilai rasio negatif masing-masing sebesar 28,11% pada imbal balik aset dan marjin laba bersih sebesar 2,381% di tahun 2025.

In the toll road segment, revenues decreased by 18.73% compared to the previous year. Meanwhile, the loss recorded in the toll road segment increased significantly by 136.97% compared to the net loss of the previous year. This was influenced by an increase in other expenses in the toll road segment, which added to the recorded loss for the current year. The statement of financial position showed a decrease in assets and liabilities for the respective segments by 4.39% and 12.15% in 2025. Profitability ratios were also affected, with the return on assets and net profit margin both experiencing an increase in negative ratios of 28.11% for return on assets and 2.381% for net profit margin in 2025.

Segmen Pertambangan

Produk dan Jasa Segmen Pertambangan

PTPP melalui entitas anak, PT PP Presisi Tbk, memiliki jasa layanan segmen pertambangan berupa *mining infrastructure* (*hauling road, mining development*), *mining operation*, dan *hauling ore*.

Strategi Pengembangan Segmen Pertambangan Tahun 2025

Pada tahun 2025, strategi yang diterapkan oleh perusahaan adalah memaksimalkan produksi proyek *carry over*, serta penetrasi ke *market* baru khususnya *mining operation*, dan *hauling ore*.

Kinerja Operasional Segmen Pertambangan

Mining Segment

Products and Services in the Mining Segment

Through its subsidiary, PT PP Presisi Tbk, PTPP provides mining services, including mining infrastructure (haul roads and mining development), mining operations, and hauling ore.

Mining Segment Development Strategy in 2025

In 2025, the Company's strategy focused on maximizing production from carry-over projects while aggressively penetrating new markets, specifically in mining operations and ore hauling.

Operational Performance of the Mining Segment

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Hauling road services	232.953	75.928	157.025	206,81

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kinerja operasional baru pada segmen pertambangan sebesar Rp232,95 miliar, mengalami peningkatan 206,81% atau setara dengan Rp157,02 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp75,93 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah proyek yang diperoleh di sektor pertambangan.

In 2025, PTPP recorded new operating revenue in the mining segment of Rp232.95 billion, an increase of 206.81% or Rp157.02 billion compared to Rp75.93 billion in 2024. This was driven by an increase in the number of projects secured in the mining sector.

Kinerja produktivitas segmen Pertambangan dapat dilihat di bawah ini.

The productivity performance of the Mining segment is available below.

Nilai Perolehan Kontrak Baru New Contracts Acquisition Value	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Segmen Pertambangan Mining Segment	**3.194.519**	4.795.074	(1.600.555)	(33,38)

Pada tahun 2025, PTPP mencatat kontrak baru pada segmen pertambangan sebesar Rp3,19 triliun, mengalami penurunan 33,38% atau setara dengan Rp1,60 triliun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4,79 triliun.

In 2025, PTPP recorded new contracts in the mining segment amounting to Rp3.19 trillion, a decrease of 33.38% or Rp1.60 trillion from Rp4,79 trillion in 2024.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pertambangan

Profitabilitas dan kinerja keuangan segmen Pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of the Mining Segment

The profitability and financial performance of the Mining segment are available in the table below.

Kinerja Keuangan Segmen Pertambangan Financial Performance of the Mining Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income				
Pendapatan Usaha Revenues	**232.953**	75.928	157.025	206,81
Hasil Segmen Segment Revenues	**(27.821)**	14.210	(42.031)	(295,78)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	**(41.666)**	(1.039)	(40.627)	3.910,20
Beban Keuangan Finance Costs	**(23.771)**	(6.057)	(17.714)	292,46
Beban Usaha Operating Expenses	**(6.802)**	-	(6.802)	100,00
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(2.707)**	-	(2.707)	100,00
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**1.738**	(9.948)	11.686	(117,47)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**(101.029)**	(2.834)	(98.195)	(3.464,89)
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit of the Year	**(101.029)**	(2.834)	(98.195)	(3.464,89)

Kinerja Keuangan Segmen Pertambangan Financial Performance of the Mining Segment	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Segmen Segment Assets	**430.594**	7.654.633	(7.224.039)	(94,37)
Liabilitas Segmen Segment Liabilities	**295.258**	4.160.065	(3.864.807)	(92,90)
Profitabilitas Profitability				
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(23,46)**	0,04	(23,43)	
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(43,37)**	3,73	(39,64)	

Pendapatan usaha pada segmen pertambangan mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 206,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh perolehan nilai kontrak yang yang didapatkan di tahun 2025. Namun karena peningkatan di beban keuangan dan kerugian penurunan nilai yang terjadi di tahun 2025 turut berdampak pada rugi bersih yang dicatatkan di tahun 2025 yaitu senilai Rp101.029 miliar, yang sebelumnya mencatatkan kerugian senilai Rp2.384 miliar di tahun 2024. Pada posisi keuangan yaitu aset dan liabilitas segmen masing-masing mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 94,37% dan 92,90%. Rasio profitabilitas juga ikut terdampak atas fluktuasi laba rugi dan posisi keuangan tersebut. Imbal balik aset tercatat negatif menjadi (23,46%) dari yang sebelumnya 0,06%, serta marjin laba bersih juga menjadi negatif (43,37%) yang semula positif 3,73% di tahun 2024.

Revenues in the mining segment saw a significant increase of 206.81% compared to the previous year, driven by contract values secured in 2025. However, due to increases in financial expenses and impairment losses occurring in 2025, this also impacted the net loss recorded in 2025, amounting to Rp101,029 billion, compared to a loss of Rp2,384 billion recorded in 2024. In terms of financial position, the assets and liabilities of each segment experienced a significant decline of 94.37% and 92.90%, respectively. Profitability ratios were also affected by these fluctuations in profit and loss and financial position. The return on assets turned negative to (23.46%) from the previous 0.06%, and the net profit margin also turned negative (43.37%), having been positive at 3.73% in 2024.



Prime Park Hotel & Convention Lombok, Nusa Tenggara Barat
Prime Park Hotel & Convention Lombok, West Nusa Tenggara



Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Perusahaan mengelola strategi pemasaran sebagai berikut:
1. Mengembangkan strategi dan kebijakan pemasaran Perusahaan (*Market Existing* maupun *New Market*);
2. Mengelola *Brand Awareness* Perusahaan dilingkup eksternal;
3. *Marketing Intelligence*; dan
4. Mengendalikan distribusi dokumen pendukung pemasaran/tender.

Di tahun 2025 PTPP mengembangkan strategi pemasaran dengan menciptakan *Customer Experience Excellence*. Strategi ini dilakukan guna memicu pertumbuhan pemasaran Perusahaan yang ditopang dengan pilar-pilar pertumbuhan pemasaran melalui penetrasi pasar *new market* dan *repeat order* yang memiliki perkuatan dasar atas *value for money (price)*, kualitas yang baik, penyerahan tepat waktu, selektif dalam memilih pasar dan pengelolaan *Brand* Perusahaan yang berkelanjutan.

Marketing Strategy

The Company manages its marketing strategy as follows:

1. Developing the Company's marketing strategies and policies (for both existing and new markets);
2. Managing the Company's brand awareness externally;
3. Marketing Intelligence; and
4. Controlling the distribution of support documents for marketing/tender.

In 2025, PTPP developed a marketing strategy by creating Customer Experience Excellence. This strategy is implemented to drive the Company's marketing growth, supported by the pillars of marketing growth through new market penetration and repeat orders, which are underpinned by value for money (price), high quality, timely delivery, selective market targeting, and sustainable management of the Company's brand.

Meningkatkan *Repeat Order*
Perusahaan berencana untuk meningkatkan jumlah repeat order dengan peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan guna membangun suatu hubungan kemitraan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan *New Market*
Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan kinerja yang tercakup dalam new market, yaitu area, klien, dan produk. Optimisasi ketiga hal ini merupakan kunci kinerja yang profitable.

Marketing Intelligence
Perusahaan terus beradaptasi dengan perubahan dan bersaing dengan kompetitornya untuk meningkatkan kemampuan bisnis melakukan penetrasi pasar dengan optimal.

Implementasi ketiga strategi tersebut didukung oleh beberapa upaya Perusahaan, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas & Tingkat Kompetensi Tender;
2. Peningkatan *Customer Satisfaction Indeks*;
3. Selektif dalam Pemilihan Proyek; dan
4. Efektif Dalam Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau *Customer Relationship Management* (CRM).

Dari segi kualifikasi, Perusahaan memastikan bahwa kualitas produk dan jasa yang diajukan telah memenuhi standar kualitas internal dan proses kontrol. Strategi ini berfokus pada *value of money*.

Pangsa Pasar

Perusahaan menerapkan strategi pemasaran dengan menciptakan *Customer Experience Excellence* untuk memicu pertumbuhan pemasaran Perusahaan yang ditopang dengan pilar-pilar pertumbuhan pemasaran. Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan kinerja yang tercakup dalam *repeat order* dan mengoptimalkan *new marke*t, yaitu area, klien dan produk dengan harapan optimisasi ketiga hal ini merupakan kunci kinerja yang *profitable*.

Dalam melakukan kajian pangsa pasar, Perusahaan menggunakan perbandingan antara nilai kontrak pekerjaan yang didapatkan dengan estimasi jumlah belanja konstruksi dari negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta belanja konstruksi korporasi, baik BUMN maupun swasta. Dengan estimasi belanja APBN serta korporasi BUMN dan Swasta sebesar Rp227,3 triliun, pangsa pasar Perusahaan mencapai lebih kurang 10,98% dengan realisasi kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun.

Increasing Repeat Orders
The Company plans to increase the number of repeat orders by improving the Customer Satisfaction Index to build a continuous and sustainable partnership.

Optimizing New Markets
The Company strives to optimize performance in new markets, specifically in terms of regions, clients, and products. Optimizing these three areas is key to profitable performance.

Marketing Intelligence
The Company continues to adapt to changes and compete with its competitors to enhance the business's ability to penetrate the market optimally.

The implementation of these three strategies is supported by several Company initiatives, namely:
1. Improving Tender Quality and Competency Levels;
2. Improving the Customer Satisfaction Index;
3. Being Selective in Project Selection; and
4. Being Effective in the Customer Relationship Management (CRM) System.

In terms of qualifications, the Company ensures that the quality of the products and services submitted meets internal quality standards and control processes. This strategy focuses on value for money.

Market Share

The Company implements a marketing strategy by creating Customer Experience Excellence to drive the Company's marketing growth, supported by the pillars of marketing growth. The Company strives to optimize performance encompassing repeat orders and to optimize new markets, specifically regions, clients, and products, with the expectation that optimizing these three areas is the key to profitable performance.

In conducting market share analysis, the Company compares the value of secured project contracts with estimated national construction spending as outlined in the State Budget (APBN), as well as corporate construction spending from both SOEs and private entities. With estimated APBN spending and corporate spending by SOEs and private companies amounting to Rp227.3 trillion, the Company's market share reached approximately 10.98%, with new contract realizations totaling Rp24.95 trillion.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain

Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments



PTPP merupakan salah satu pelaku usaha sektor konstruksi dan infrastruktur terpercaya di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dipercayakan kepada PTPP, di mana berbagai PSN tersebut menjadi bagian dari agenda percepatan pembangunan nasional yang didorong oleh Pemerintah Indonesia."

PTPP is one of the most reputable companies in Indonesia's construction and infrastructure sector. This is evident from the various National Strategic Projects (PSN) entrusted to PTPP, where the various PSNs are part of the national development acceleration agenda driven by the Indonesian Government.

Berikut disampaikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih berjalan dan/atau telah selesai di tahun 2025.

Below are various National Strategic Projects (PSN) that are still ongoing and/or have been completed in 2025.

No.	Nama Proyek Project Name	Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) (Rp-juta) Contract Value (excluding VAT) (Rp-million)	Tahun Mulai Starting Year	Tahun/Target Selesai Completion Year/ Target	Kemajuan Proyek (per 31 Desember 2025) Project Progress (up to December 31, 2025) (%)
1	Tol Probolinggo - Banyuwangi PKT 3 Probolinggo - Banyuwangi PKT 3 Toll Road	2.034.522	2023	2025	93,94%

No.	Nama Proyek Project Name	Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) (Rp-juta) Contract Value (excluding VAT) (Rp-million)	Tahun Mulai Starting Year	Tahun/Target Selesai Completion Year/ Target	Kemajuan Proyek (per 31 Desember 2025) Project Progress (up to December 31, 2025) (%)
2	Patimban Access Toll Road (VGF) Package 1	1.006.142	2023	2025	58,51%
3	Paket 2 Pembangunan Konstruksi Simpang Susun Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3 Package 2 of the Construction of Serang Panimbang Interchange Toll Road Section 3	622.436	2019	2024	100,00%
4	Airside Bandara VVIP IKN IKN VVIP Airport Airside	2.187.484	2023	2025	100,00%
5	Tol IKN Seksi 3B-2 IKN Toll Road Section 3B-2	359.914	2023	2025	79,86%
6	KIPP: West Residence	73.055	2024	2026	64,13%
7	Tol IKN Seksi 1B IKN Toll Road Section 1B	1.519.802	2024	2026	22,81%
8	Peningkatan Jalan Paket F di KIPP 1B Road Improvement Package F at KIPP 1B	266.571	2025	2025	27,15%
9	Patimban II : Package 6	823.185	2023	2025	77,30%
10	Bendungan Way Apu Way Apu Dam	724.191	2018	2025	98,06%
11	Smelter Kolaka Kolaka Smelter	2.384.504	2019	2024	90,83%
12	Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 Bahodopi Mines Block 2 and 3	2.676.164	2022	2025	90,59%
13	Smelter Grade Alumina Refinery	1.442.486	2019	2026	48,03%
14	Kantor PUPR IKN IKN PUPR Office	815.565	2023	2025	100,00%
15	JO HV 4 TOWER TNI	349.279	2024	2025	94,59%
16	RS PON	277.837	2023	2025	100,00%
17	DPRD Sorong	148.104	2024	2025	90,76%
18	RSV Riau	597.516	2024	2026	56,10%
19	RS Onkologi Medan Medan Oncology Hospital	196.264	2024	2026	58,33%
20	RSUD Tarempa Tarempa Regional Hospital	73.289	2025	2025	100,00%
21	RSUD Krui Krui Regional Hospital	123.910	2025	2025	100,00%
22	Rehabilitasi Irigasi Kalbar West Kalimantan Irrigation Rehabilitation	72.602	2025	2025	100,00%
23	Rehabilitasi Irigasi Sumut North Sumatra Irrigation Rehabilitation	89.892	2025	2025	100,00%

No.	Nama Proyek Project Name	Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) (Rp-juta) Contract Value (excluding VAT) (Rp-million)	Tahun Mulai Starting Year	Tahun/Target Selesai Completion Year/ Target	Kemajuan Proyek (per 31 Desember 2025) Project Progress (up to December 31, 2025) (%)
24	Irigasi Sulteng Tahap 2 Paket 1 Central Sulawesi Irrigation Phase 2 Package 1	72.626	2025	2026	96,28%
25	Irigasi Sulteng Tahap 2 Paket 2 Central Sulawesi Irrigation Phase 2 Package 2	57,478	2025	2026	95,09%
26	Irigasi Kalbar Tahap 2 Paket 1 West Kalimantan Irrigation Phase 2 Package 1	51,599	2025	2025	100,00%
27	Irigasi Kalbar Tahap 2 Paket 2 West Kalimantan Irrigation Phase 2 Package 2	5,741	2025	2025	100,00%
28	Irigasi Malut Tahap 2 North Maluku Irrigation Phase 2	31,172	2025	2025	100.00%
29	Irigasi Jatim Tahap 2 East Java Irrigation Phase 2	57,723	2025	2025	100.00%
30	Irigasi Papua Selatan Tahap 2 South Papua Irrigation Phase 2	34,324	2025	2025	100.00%
31	Jiat Merauke Tahap 2 Merauke Jiat Phase 2	10,797	2025	2025	100.00%
32	Irigasi Papua Barat Tahap 2 West Papua Irrigation Phase 2	20,056	2025	2025	100.00%
33	Irigasi Sumut Tahap 2 North Sumatra Irrigation Phase 2	45,390	2025	2025	100.00%
34	JIAT Sumut Tahap 2 North Sumatra JIAT Phase 2	27,859	2025	2026	82.13%
35	JIAT Kaltara Tahap 2 North Kalimantan JIAT Phase 2	13,665	2025	2025	100.00%
36	Irigasi Papua Tengah Tahap 2 Central Papua Irrigation Phase 2	12,187	2025	2026	95.87%
37	JIAT Papua Tahap 2 Papua JIAT Phase 2	10,642	2025	2026	95.85%
38	JIAT Nabire Tahap 2 Nabire JIAT Phase 2	1,770	2025	2026	87.56%
39	JIAT Kab. Keerom Paket II Prov. Papua Keerom Regency JIAT Package II Papua Province	87,315	2025	2026	44.99%
40	JIAT Kab. Keerom Paket I Prov. Papua Keerom Regency JIAT Package I Papua Province	84,214	2025	2026	85.12%
41	JIAT Kab. Sarmi Prov. Papua Sarmi Regency JIAT Papua Province	69,729	2025	2026	49.66%

No.	Nama Proyek Project Name	Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) (Rp-juta) Contract Value (excluding VAT) (Rp-million)	Tahun Mulai Starting Year	Tahun/Target Selesai Completion Year/ Target	Kemajuan Proyek (per 31 Desember 2025) Project Progress (up to December 31, 2025) (%)
42	Irigasi Jatim Tahap 3 East Java Irrigation Phase 3	50,869	2025	2025	100.00%
43	Irigasi BWS Papua Paket 1 Papua BWS Irrigation Package 1	51,794	2025	2026	80.17%
44	Irigasi Jatim Tersier Tertiary East Java Irrigation	38,830	2025	2025	100.00%
45	Irigasi BWS Papua Paket 2 Papua BWS Irrigation Package 2	38,637	2025	2026	66.71%
46	Irigasi BWS Papua Barat West Papua BWS Irrigation	29,094	2025	2025	100.00%
47	Irigasi BWS Papua Merauke Papua Merauke BWS Irrigation	2,215	2025	2025	100.00%

Lapangan Rugby Jayapura, Papua
Rugby Field Jayapura, Papua



Teknologi
Technology

Dalam aktivitas bisnisnya PTPP telah mengimplementasikan teknologi baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan konstruksi maupun teknologi pendukung lainnya. Teknologi terbaru seperti *Building Information Modelling* (BIM), *digital surveying*, dan *Internet of Things* (IOT) telah diterapkan di lingkup Perusahaan secara konsisten.

In its business operations, PTPP has implemented technologies related both directly to construction activities and other supporting technologies. The latest technologies, such as Building Information Modelling (BIM), digital surveying, and the Internet of Things (IoT), have been consistently applied throughout the Company.

▶ Pemanfaatan ERP PTPP

PTPP menerapkan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dalam *Supply Chain Control* (SCC) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas rantai pasok. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis untuk memastikan aliran informasi yang mulus antar departemen dan mitra kerja.

- Integrasi Data dan Proses - Memungkinkan akses *real-time* untuk analisis dan pengambilan keputusan.
- Peningkatan Efisiensi - Mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengadaan serta distribusi.
- Visibilitas Rantai Pasokan - Memberikan gambaran holistik untuk perencanaan yang lebih baik.
- Manajemen Persediaan - Mengoptimalkan pengelolaan stok dan meminimalkan biaya.
- Pengurangan Biaya - Meningkatkan efisiensi operasional dan menekan pengeluaran jangka panjang.

▶ PTPP's Use of ERP

PTPP utilizes Enterprise Resource Planning (ERP) within Supply Chain Control (SCC) to enhance the efficiency, transparency, and productivity of the supply chain. This system integrates various business functions to ensure a seamless flow of information between departments and business partners.

- Data and Process Integration - Enables real-time access for analysis and decision-making.
- Efficiency Improvements - Automates business processes, reduces errors, and accelerates procurement and distribution.
- Supply Chain Visibility - Provides a holistic overview for better planning.
- Inventory Management - Optimizes stock management and minimizes costs.
- Cost Reduction - Improves operational efficiency and reduces long-term expenses.

▶ Pengelolaan Alat Berat dan Pemeliharaan (IoT) di PTPP

Sebagai anak perusahaan PTPP, PT PP Presisi Tbk berfokus pada pemenuhan sumber daya alat berat untuk proyek strategis. Mereka mengimplementasikan sistem *Heavy Equipment Maintenance System* (HEMS-P3) yang terintegrasi dengan ERP untuk mengelola:

- *Preventive Maintenance* - Perawatan rutin untuk mencegah *downtime*.
- *Condition Monitoring* - Pemantauan kesehatan alat melalui inspeksi berkala.
- *Repair & Component Management* - Menjaga ketersediaan suku cadang dan meningkatkan efisiensi perbaikan.
- *Planning & Scheduling* - Menyusun jadwal pemeliharaan yang lebih efektif.
- Peningkatan sistem *Maintenance* System Gen 2.0 menambahkan fitur seperti KPI Unit, *Budget & Actual Maintenance Cost*, *Parts Forecasting*, dan *Tire Management* untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja alat.

▶ Heavy Equipment Management and Maintenance (IoT) at PTPP

As a subsidiary of PTPP, PT PP Presisi Tbk focuses on providing heavy equipment resources for strategic projects. They have implemented the Heavy Equipment Maintenance System (HEMS-P3), integrated with ERP, to manage:

- Preventive Maintenance - Routine maintenance to prevent downtime.
- Condition Monitoring - Monitoring equipment health through periodic inspections.
- Repair and Component Management - Ensuring spare part availability and improving repair efficiency.
- Planning and Scheduling - Developing more effective maintenance schedules.
- The upgrade to the Maintenance System Gen 2.0 adds features such as Unit KPIs, Budget and Actual Maintenance Costs, Parts Forecasting, and Tire Management to optimize equipment costs and performance.



- Penerapan Teknologi OT (*Operational Technology*) di PTPP

  PTPP mengadopsi teknologi OT untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan integritas bangunan melalui:
  - *Sensor Monitoring* - Pemantauan lendutan bangunan dan pergerakan *formwork*.
  - *Fleet Monitoring System* - Kontrol alat berat berbasis IoT untuk efisiensi operasional.
  - *Integrated CCTV* – Pengawasan CCTV dari semua proyek secara realtime.
  - 3D Printing Konstruksi - Solusi alternatif untuk efisiensi pembangunan.
  - *Load Scanner* & UAV LiDAR - Mengoptimalkan penggunaan sumber daya material dan survei digital yang lebih akurat.

- Implementasi *Building Information Modelling* (BIM)

  Sejak 2015, PTPP telah menerapkan BIM sebagai standar dalam proyeknya, sesuai dengan ISO 19650. BIM memungkinkan:
  - Koordinasi desain yang lebih baik dan pelaksanaan yang lebih akurat.
  - Pemodelan bangunan digital dari tahap tender hingga serah terima dan operasional.
  - Analisa data geometris dan non-geometris dari proyek.
  - Perhitungan *engineering* yang lebih cepat
  - Identifikasi bahaya dalam pelaksanaan proyek
  - Kolaborasi desain secara virtual

  Dengan penerapan ERP, OT, dan BIM, PTPP terus berinovasi dalam sistem pengadaan dan pengelolaan rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing industri konstruksi di Indonesia.

- Implementation of OT (Operational Technology) at PTPP

  PTPP adopts OT technology to improve efficiency, workplace safety, and structural integrity through:
  - Sensor Monitoring - Monitoring of building deflection and formwork movement.
  - Fleet Monitoring System - IoT-based heavy equipment control for operational efficiency.
  - Integrated CCTV - Real-time CCTV monitoring of all projects.
  - Construction 3D Printing - An alternative solution for construction efficiency.
  - Load Scanner and UAV LiDAR - Optimizing material resource usage and enabling more accurate digital surveys.

- Implementation of Building Information Modelling (BIM)

  Since 2015, PTPP has implemented BIM as a standard in its projects, in accordance with ISO 19650. BIM enables:
  - Better design coordination and more accurate execution.
  - Digital building modeling from the tender stage through handover and operations.
  - Analysis of geometric and non-geometric project data.
  - Faster engineering calculations
  - Identification of hazards during project execution
  - Virtual design collaboration

  Through the implementation of ERP, OT, and BIM, PTPP continues to innovate in procurement systems and supply chain management to enhance operational efficiency and the competitiveness of the construction industry in Indonesia.

Penelitian dan Pengembangan
Research and Development

Dalam bidang penelitian dan pengembangan PTPP masuk di dalam keanggotaan Indonesia Infrastructure Research & Innovation Institute (I2RI) yang berkomitmen penuh mendukung pengembangan program riset strategis. Beberapa diantaranya dijalankan dengan skema kolaborasi riset baik dengan universitas maupun kerja sama skema *matching fund* Kedaireka dengan Kemendikbud.

Beberapa program penelitian dan pengembangan yang dijalankan di tahun 2025 diantaranya adalah:

1. ***Program Cybersecurity***
   Peningkatan keamanan siber kini menjadi bagian integral dari strategi korporasi untuk menjaga operasional dan melindungi aset informasi perusahaan. Pendekatan ini mengacu pada penguatan tiga pilar utama keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*), yang secara menyeluruh diterapkan dalam seluruh proses bisnis dan teknologi informasi. Selain itu sebagai bentuk dalam memenuhi arahan pada SK-275/MBU/11/2024 tentang "Prioritas Penerapan Keamanan Siber di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara" maka Perusahaan melakukan beberapa langkah strategis program penguatan *cybersecurity* antara lain:
   a. Pengembangan Sistem Keamanan IT - Implementasi Keamanan Perangkat Terintegrasi
      Program kerja ini bertujuan memastikan hanya perangkat yang telah terdaftar dan dikelola secara resmi oleh perusahaan yang diperbolehkan mengakses sistem dan data korporat.
   b. Pengembangan Sistem Keamanan IT - Penerapan Kebijakan Pengelolaan Aset Informasi, sebagai mekanisme pengelolaan hak akses informasi berdasarkan tingkat sensitivitas dan peran pengguna untuk melindungi kebocoran informasi perusahaan.
   c. Peningkatan *Awareness* & Literasi Digital, melalui program sosialisasi dan edukasi *Security* Information *System Awareness* kepada seluruh karyawan, guna membentuk budaya sadar keamanan secara menyeluruh.
   d. Pekerjaan peremajaan *network* tahap 2 *high availability* – Penggunaan *dual firewall, router* dan *san switch* memperkuat *High Availability & Resiliency* untuk *workload critical*.

   PTPP telah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi *Cyber Security Maturity* (CSM) pada Desember 2025, yang bertujuan memantau implementasi rekomendasi peningkatan kematangan keamanan siber yang telah diberikan sebelumnya. Hasil monitoring

In the field of research and development, PTPP is a member of the Indonesia Infrastructure Research and Innovation Institute (I2RI), which is fully committed to supporting the development of strategic research programs. Some of these are carried out through research collaboration schemes with universities as well as through the Kedaireka matching fund partnership with the Education and Culture Ministry.

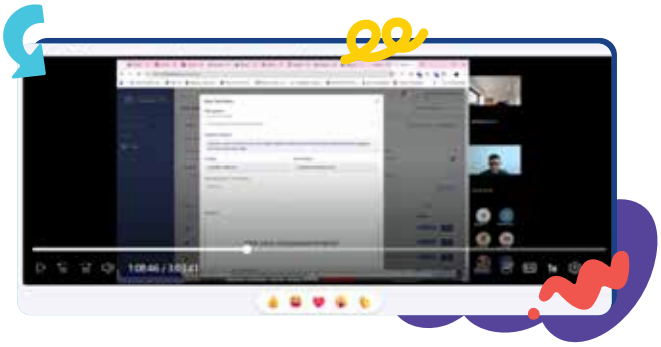
Some of the research and development programs to be implemented in 2025 include:

1. **Cybersecurity Program**
   Enhancing cybersecurity has now become an integral part of the corporate strategy to safeguard operations and protect the company's information assets. This approach focuses on strengthening the three main pillars of information security: confidentiality, integrity, and availability, which are comprehensively applied across all business processes and information technology systems. Furthermore, to comply with the directives in SK-275/MBU/11/2024 on "Priorities for Implementing Cybersecurity in State-Owned Enterprises," the Company is undertaking several strategic steps to strengthen its cybersecurity program, including:
   a. IT Security System Development - Implementation of Integrated Device Security
      This program aims to ensure that only devices officially registered and managed by the company are permitted to access corporate systems and data.
   b. IT Security System Development - Implementation of Information Asset Management Policies, as a mechanism for managing information access rights based on sensitivity levels and user roles to prevent corporate information leaks.
   c. Enhancement of Digital Awareness and Literacy, through outreach and education programs on Security Information System Awareness for all employees, to foster a comprehensive security-conscious culture.
   d. Phase 2 network modernization for high availability – The use of dual firewalls, routers, and SAN switches strengthens High Availability and Resiliency for critical workloads.

   PTPP completed the monitoring and evaluation of Cyber Security Maturity (CSM) in December 2025, aimed at tracking the implementation of previously provided recommendations for enhancing cyber security maturity. The results of this monitoring

tersebut menunjukkan adanya peningkatan Indeks Kematangan Keseluruhan dari 3.96 (tahun 2024) menjadi 4.10 (tahun 2025). Peningkatan ini didorong oleh kemajuan signifikan dalam pelaksanaan rekomendasi, terutama pada aspek Tata Kelola, Deteksi, dan Respon, meskipun masih ada beberapa rekomendasi di aspek Proteksi dan Deteksi yang belum sepenuhnya terlaksana dan perlu ditindaklanjuti untuk penguatan implementasi keamanan siber.

indicated an increase in the Overall Maturity Index from 3.96 (2024) to 4.10 (2025). This improvement was driven by significant progress in the implementation of recommendations, particularly in the areas of Governance, Detection, and Response, although there are still some recommendations in the areas of Protection and Detection that have not been fully implemented and need to be followed up to strengthen cybersecurity implementation.



Pelaksanaan Asesmen Cyber Security Maturity
Implementation of the Cybersecurity Maturity Assessment

Penjelasan pencapaian progres:

a. Persentase pencapaian program hingga Desember dari tahun berjalan (95% dari 100%).
b. Persentase realisasi anggaran program hingga Desember terhadap total anggaran (91% dari 100%) (Pembayaran dilakukan di termin berikutnya).

Progress Achievement:

a. Program achievement percentage as of December of the current year (95% of 100%).
b. Program budget execution percentage as of December relative to the total budget (91% of 100%) (Payments will be made in the next installment).

2. **Improvement Transaksi Kelogistikan PBD (Pemberitahuan Barang Datang) dan PBK (Pemberitahuan Barang Keluar)**

Untuk meningkatkan fungsi pengendalian transaksi kelogistikan dimana setelah adanya perubahan fungsi yang melakukan *transaksigoods receipt* dan *goods issue* dari *Logistic Project* menjadi *Site Administration Manager* (SAM). Untuk saat ini fungsi tersebut meliputi:

a. Pencatatan manual pada excel untuk Pemberitahuan Barang Datang;
b. Pencatatan manual pada excel untuk Pemberitahuan Barang Keluar; dan
c. *Report* untuk memonitor *follow on document* atas PBD dan PBK.

Transaksi PBD
(Pemberitahuan Barang Datang. Tcode: ZMM059)

Program peencatatan transaksi PBD yang terintegrasi dengan data transaksi pengadaan berupa *Delivery Order, Purchase Order*, *Goods Receipt*). Fungsi lainnya mencatat *history* transaksi PBD dan dapat memonitor *follow on document* berupa transaksi *goods receipt* dan perhitungan data *outstanding* (jika ada).

2. **Improvement of Logistics Transactions for Goods Receipt (PBD) and Goods Issue (PBK)**

To enhance the control functions for logistics transactions following the transfer of responsibilities for processing goods receipt and goods issue transactions from the Logistics Project to the Site Administration Manager (SAM). Currently, these functions include:

a. Manual recording in Excel for Goods Receipt;
b. Manual recording in Excel for Goods Issue; and
c. Reports to monitor follow-up documents for PBD and PBK.

PBD Transactions
(Goods Receipt. Tcode: ZMM059)

A program for recording PBD transactions integrated with procurement transaction data such as Delivery Orders, Purchase Orders, and Goods Receipts. Additional functions include recording the transaction history of PBD and monitoring follow-on documents such as Goods Receipt transactions and calculating outstanding data (if any).

Transaksi PBK
(Pemberitahuan Barang Keluar, Tcode : ZMM060)
Fungsi transaksi pencatatan material keluar yang terintegrasi dengan nomor *reservation* dan item sebagai *previous document*. Menjadi dasar transkasi goods issue oleh SAM (jurnal *generation*).

***New Enhancement* pada transaksi *Goods Receipt & Goods Issue*, tcode : MIGO)**
Untuk mempermudah *tracing* transaksi secara komprehensif, fungsi transaksi kelogistikan PBD dan PBK akan menjadi dasar dokumen pada saat dilakukan transaksi *goods receipt* dan *goods issue* oleh SAM, dimana, GR dan GI akan menimbulkan *accounting document* (Jurnal Biaya/ Persediaan).

PBK Transactions
(Goods Issue, Tcode: ZMM060)
A transaction recording function for material issuance integrated with reservation numbers and items as previous documents. It serves as the basis for goods issue transactions by SAM (journal generation).

New Enhancement for Goods Receipt and Goods Issue Transactions (Tcode: MIGO)
To facilitate comprehensive transaction tracing, the PBD and PBK logistics transaction functions will serve as the basis for documents when Goods Receipt and Goods Issue transactions are performed by SAM, where GR and GI will generate accounting documents (Expense/Inventory Journal).



Penjelasan pencapaian progres:
a. Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 100% dari 100%;
b. *GoLive* Transaksi Kelogistikan PBD (Pemberitahuan Barang Datang) dan PBK (Pemberitahuan Barang Keluar) Pada Sistem ERP dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026.

Progress Achievement:
a. The program achievement percentage as of March 2026 is 100% of 100%;
b. The GoLive of PBD (Goods Receipt) and PBK (Goods Issue) Logistics Transactions in the ERP System was implemented on January 1, 2026.

3. ***Improvement Report OP4A dan SIPEK BAP pada Sistem ERP SAP***
Evaluasi sepanjang tahun 2025 ini terkait Penggunaan *Report* OP4A dan kebutuhan peningkatan Pengendalian Berita Acara Pembayaran (BAP) dalam rangka mendukung rencana penyehatan perusahaan, dilakukan *Go Live Improvement* atas;
- *Report* OP4A dengan penambahan kolom kumulatif progres dan deviasi progres serta perbaikan tampilan dalam hal urutan bulan dan tahun progres.
- Penambahan *Approval* Departemen OC dalam SIPEK BAP pada *system* ERP SAP PT PP, pada tanggal 27 Februari 2026 sehingga diharapkan data BAP yang diinput dalam sistem berkualitas serta dapat menjadi kontrol bersama atas kualitas WIP 2 setiap bulannya.
- Dari Kondisi tersebut di atas, maka untuk kebutuhan penginputan data OP2, OP4 & OPA harus di lakukan di system ERP SAP (akses ke PP *Online* untuk kegiatan di atas dinonaktifkan).

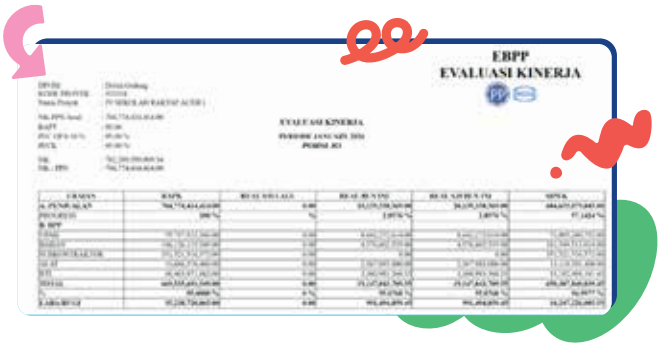
3. **Improvement of OP4A Report and SIPEK BAP in the SAP ERP System**
An evaluation throughout 2025 regarding the use of the OP4A Report and the need to enhance Payment Minutes (BAP) controls to support the company's restructuring plan led to the implementation of the following Go Live Improvements:
- The OP4A Report, with the addition of cumulative progress and progress deviation columns, as well as display improvements on the progress order of months and years.
- The addition of the OC Department Approval in SIPEK BAP within the SAP ERP system of PT PP, effective February 27, 2026, so that the BAP data entered into the system is of high quality and can serve as a joint control over the quality of WIP 2 each month.
- Given the above conditions, data entry for OP2, OP4, and OPA must be performed in the SAP ERP system (access to PP Online for the aforementioned activities has been disabled).

Penjelasan pencapaian progres:
a. Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 100% dari 100%.
b. GoLive Report OP4A dan SIPEK BAP pada Sistem ERP SAP dilakukan pada tanggal 25 Februari 2026.

Progress Achievement:
a. The program achievement percentage as of March 2026 is 100% of 100%.
b. The GoLive of the OP4A and SIPEK BAP reports on the SAP ERP System was conducted on February 25, 2026.

4. ***Improvement Report* OP4A dan SIPEK BAP pada Sistem ERP SAP**
Sistem Pengendalian Project Definition dirancang untuk memonitoring seluruh proyek yang berada di bawah satu Profit Center secara terintegrasi. Profit Center tidak hanya menangani satu proyek, melainkan terdiri dari beberapa proyek yang berjalan secara bersamaan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengendalian yang mampu mengonsolidasikan seluruh aktivitas proyek agar evaluasi kinerja dapat dimonitor dalam satu kendali.

4. **Improvement Report on OP4A and SIPEK BAP in the SAP ERP System**
The Project Definition Control System is designed to monitor all projects under a single Profit Center in an integrated manner. A Profit Center does not handle just one project but consists of several projects running concurrently. This situation requires a control system capable of consolidating all project activities so that performance evaluations can be monitored under a single control.



Penjelasan pencapaian progres
a. Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 100% dari 100 %
b. *GoLive* Sistem Pengendalian Project Definition Pada Sistem ERP dilakukan pada tanggal 26 Januari 2026.

Progress Achievement:
a. The program achievement percentage as of March 2026 is 100% of 100%
b. The Project Definition Control System went live on the ERP system on January 26, 2026.

Penjelasan pencapaian progres:
- Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 100% dari 100%.
- *GoLive Report* OP4A dan SIPEK BAP pada Sistem ERP SAP dilakukan pada tanggal 25 Februari 2026.

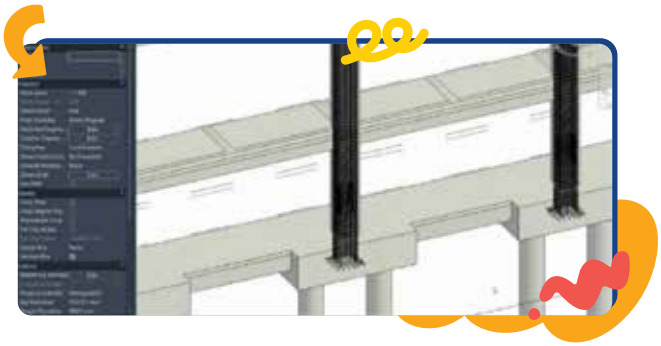
Progress Achievement:
- The program achievement percentage as of March 2026 is 100% of 100%.
- The GoLive of the OP4A and SIPEK BAP reports on the SAP ERP system was conducted on February 25, 2026.

5. **Pengembangan *Auto Generate Rebar Schedule* – Element Kolom By BIM**
Pengembangan ini merupakan lanjutan dari program tahun sebelumnya yaitu Bomat (Bestat Otomatis Matematis), dengan lingkup di tahun ini untuk elemen kolom struktur. Tujuan dari pengembangan ini adalah agar dapat dihasilkan daftar produksi penulangan kolom secara otomatis dari model fisik yang telah dibuat di software Autodesk Revit, sekaligus 3D rebar model dalam software tersebut. Benefit yang dihasilkan

5. **Development of Auto-Generate Rebar Schedule – Column Elements by BIM**
This development is a continuation of the previous year's program, Bomat (Automated Mathematical Bestat), with this year's scope focused on structural column elements. The objective of this development is to automatically generate a column rebar production list from the physical model created in Autodesk Revit software, along with the 3D rebar model within that software. The benefit of this development is a

dari pemgembangan ini adalah mempersingkat waktu perhitungan secara signifikan, dari sebelumnya 30 menit menjadi kurang dari satu menit.

significant reduction in calculation time, from 30 minutes previously to less than one minute.



Penjelasan pencapaian progres:

a. Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 95% dari 100 %
b. *GoLive* Pengembangan Auto Generate Rebar Schedule – Element Kolom by BIM akan dilakukan pada April 2026.

Progress Achievement:

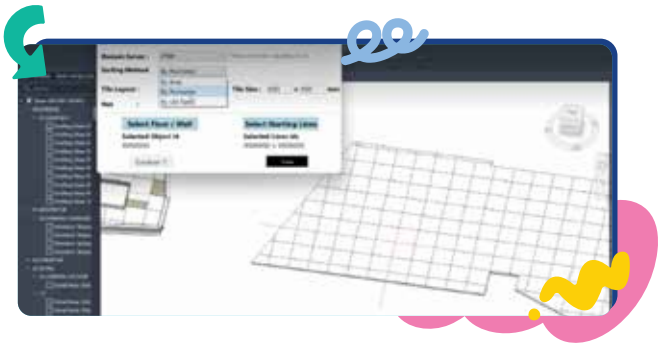
a. The program achievement percentage as of March 2026 is 95% of 100%
b. The GoLive for the Auto Generate Rebar Schedule – Column Elements by BIM development will be conducted in April 2026.

6. **Pengembangan *Auto Generate Rebar Schedule* – Element Kolom By BIM**

Program ini merupakan realisasi dari konsep pendekatan skema optimasi bahan yang berbasis dua dimensi seperti keramik, *plat* baja, ACP, dan lain-lain. Selama ini belum ada aplikasi yang digunakan oleh PTPP yang secara spesifik untuk keperluan optimasi tersebut. Penerapan algoritma ini sementara untuk perhitungan kebutuhan jumlah keping minimum material *homogeneous tile* atau keramik dalam beberapa ruangan yang dipilih.

6. **Development of Auto Generate Rebar Schedule – Column Elements by BIM**

This program is the realization of a concept for a two-dimensional material optimization approach for materials such as ceramic tiles, steel plates, ACP, and others. To date, PTPP has not utilized any specific application for such optimization purposes. The application of this algorithm is currently focused on calculating the minimum number of homogeneous tiles or ceramic pieces required for several selected rooms.



Penjelasan pencapaian progres:

a. Persentase capaian program s.d. Maret 2026 adalah 70% dari 100%.
b. *GoLive* Pengembangan Algoritma Optimasi Material 2D akan dilakukan pada tanggal Juni 2026.

Progress Achievement:

a. The program completion rate as of March 2026 is 70% of 100%.
b. The GoLive for the 2D Material Optimization Algorithm Development will take place in June 2026.

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standard of Information and Compatibility for the Financial Accounting Standards

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refer to the Financial Statement for the years ending December 31, 2025, and December 31, 2024, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, i.e., the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), published by the Indonesian Accountants Association (IAI).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position Statements

Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan Perusahaan. Di tahun 2025, jumlah aset Perusahaan mencapai **Rp42,94 triliun.** Sedangkan struktur permodalan Perusahaan terdiri dari liabilitas sebesar **89,98%** dan ekuitas sebesar **10,02%.**

The financial position provides an overview of the Company's asset and capital strength. In 2025, the Company's total assets reached **Rp42.94 trillion**. Meanwhile, the Company's capital structure consists of liabilities amounting to **89.98%** and equity amounting to **10.02%.**

Posisi Keuangan Financial Position	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Aset Assets	42.984.452	54.532.210	(11.547.758)	(21,18)
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities	38.679.036	42.142.999	(3.463.963)	(8,22)
Ekuitas Equity	4.305.416	12.389.212	(8.083.796)	(65,25)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	42.984.452	**54.532.211**	**(11.547.759)**	**(21,18)**

Aset

Assets

Jumlah aset Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp42,94 triliun, menurun 21,18% dibandingkan nilai aset tahun 2024 sebesar Rp56,59 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 5,01%.

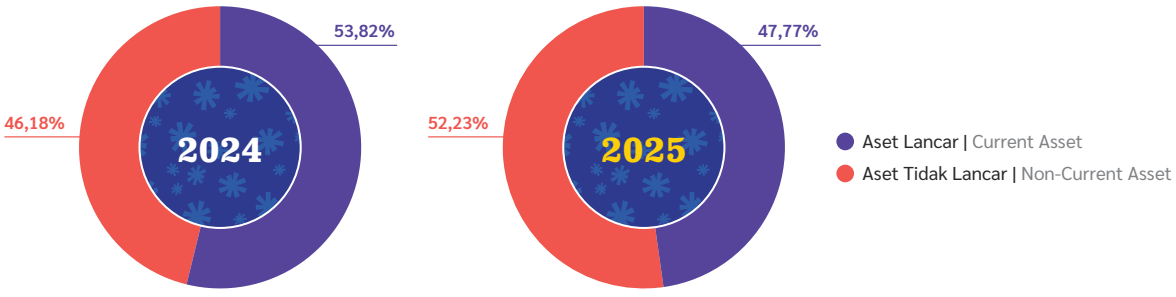
The Company's total assets in 2025 reached Rp42.94 trillion, a decrease of 21.18% compared to the 2024 asset value of Rp56.59 trillion. Over the 2021-2025 period, the Company's assets grew at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.01%.

Aset 2024-2025
Assets in 2024-2025

Aset Assets	2025		2024*		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Aset Lancar Current Assets	20.532.612	47,77	29.351.069	53,82	(8.818.457)	(30,04)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	22.451.841	52,23	25.181.141	46,18	(2.729.300)	(10,84)
Jumlah Aset Total Assets	42.984.453	100,00	**54.532.210**	**100,00**	**(11.547.757)**	**(21,18)**

* Disajikan Kembali | Restated

Komposisi Aset PTPP
Composition of PTPP Assets



Aset PTPP secara keseluruhan dominan berada pada aset tidak lancar dengan komposisi mencapai 52,23%. Dibandingkan tahun 2024, jumlah aset lancar tahun 2025 mengalami penurunan 30,04% sedangkan jumlah aset tidak lancar tahun 2025 mengalami penurunan 10,84%.

PTPP's total assets are predominantly non-current assets, accounting for 52.23%. 51.46%. Compared to 2024, current assets decreased by 30.04% in 2025, while non-current assets decreased by 10.84%.

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar 2024-2025
Current Assets in 2024-2025

Aset Lancar Current Assets	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**2.893.604**	4.181.505	(1.287.901)	(30,80)
Investasi Jangka Pendek Short-Term Investment	**194.836**	299.349	(104.513)	(34,91)
Bank yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Bank	**165.199**	213.749	(48.550)	(22,71)
Piutang Usaha - Bersih Trade Accounts Receivable - Net	**3.127.208**	5.789.497	(2.662.289)	(45,98)
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Lancar Financial Assets from Concession Project - Current Portion	**174.025**	219.641	(45.616)	(20,77)
Piutang Retensi - Bersih Retention Receivable - Net	**787.592**	1.442.654	(655.062)	(45,41)
Piutang pada Ventura Bersama Receivable from Joint Ventures	**660.354**	843.760	(183.406)	(21,74)
Tagihan bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih Gross receivables from Project Owners - Net	**3.821.243**	4.725.649	(904.406)	(19,14)
Pekerjaan dalam Proses Works in Progress	**426.317**	499.897	(73.580)	(14,72)
Piutang Lain-lain - Bagian Lancar Bersih Other Receivables - Net Current Portion	**103.234**	238.112	(134.878)	(56,64)
Persediaan - Bersih Inventories - Net	**7.500.676**	9.521.480	(2.020.804)	(21,22)
Uang Muka Advances	**70.714**	269.116	(198.402)	(73,72)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	**270.091**	634.152	(364.061)	(57,41)
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	**60.952**	234.532	(173.580)	(74,01)
Sewa Dibayar di Muka Prepaid Lease	**207.211**	234.536	(27.325)	(11,65)
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual Non-Current Assets Held for Sale	**69.354**	3.440	65.914	1.916,10
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**20.532.610**	**29.351.069**	**(8.818.459)**	**(30,04)**

Jumlah aset lancar tahun 2025 sebesar Rp20,53 triliun, turun 30,04% atau setara dengan Rp8,18 triliun dibandingkan jumlah aset lancar tahun 2024 sebesar Rp29,35 triliun. Hal ini dikontribusi oleh penurunan nilai kas setara kas yang mengalami penurunan sebesar 30,8% dibandingkan tahun 2024. Selain itu, nilai piutang

Current assets in 2025 totaled Rp20.53 trillion, a decrease of 30.04%, or Rp8.18 trillion, compared to the 2024 figure of Rp29.35 trillion. This was driven by a 30.8% decrease in cash and cash equivalents compared to 2024. In addition, trade receivables, retention receivables, and gross contract assets also declined. Changes in inventory value

usaha, piutang retensi dan tagihan bruto juga mengalami penurunan. Perubahan nilai persediaan juga berpengaruh pada penurunan nilai aset lancar di tahun 2025 akibat dari dampak berubahnya master plan pada nilai persediaan yang akan dijual.

also contributed to the decrease in current assets in 2025, due to the impact of revisions to the master plan affecting the value of inventory held for sale.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar 2024-2025
Non-Current Assets in 2024-2025

Aset Lancar Current Assets	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Bank yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Bank	**68.550**	91.744	(23.194)	(25,28)
Aset Keuangan dari proyek Konsesi - Setelah Dikurangi Bagian Lancar Financial Assets from Concession Project - Net of Current Portion	**3.187.625**	2.941.247	246.378	8,38
Piutang Lain-lain - Setelah Dikurangi Bagian Lancar Other Receivables - Net of Current Portion	**347.625**	257.603	90.022	34,95
Tanah yang Akan Dikembangkan Land for Development	**1.368.693**	3.525.984	(2.157.291)	(61,18)
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	**612.816**	578.962	33.854	5,85
Investasi pada Ventura Bersama Investments in Joint Ventures	**840.014**	960.535	(120.521)	(12,55)
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Investments	**1.604.931**	1.631.594	(26.663)	(1,63)
Aset Tetap - Bersih Property and Equipment - Net	**2.139.820**	2.796.637	(656.817)	(23,49)
Properti Investasi Investment Properties	**3.637.004**	3.881.231	(244.227)	(6,29)
Aset Sewa Pembiayaan Finance Lease Assets	**594.036**	540.621	53.415	9,88
Aset Hak Guna Right-to-Use Assets	**937.050**	785.403	151.647	19,31
Aset Minyak dan Gas Bumi - Bersih Oil and Gas Properties - Net	**1.053.576**	1.071.445	(17.869)	(1,67)
Goodwill	**292.470**	292.884	(414)	(0,14)
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	**5.761.107**	5.818.560	(57.453)	(0,99)
Aset Lain-lain Other Assets	**6.523**	6.691	(168)	(2,51)
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**22.451.840**	**25.181.141**	**(2.729.301)**	**(10,84)**

Jumlah aset tidak lancar tahun 2025 sebesar Rp22,45 triliun, turun 10,84% atau setara dengan Rp2,73 triliun dibandingkan jumlah aset tidak lancar tahun 2024 sebesar Rp25,18 triliun. Hal ini disebabkan utamanya oleh penurunan nilai tanah yang akan dikembangkan yang merupakan bagian dari persediaan tidak lancar sebesar 61,18% dibandingkan dengan nilai tahun lalu.

Non-current assets in 2025 totaled Rp22.45 trillion, a decrease of 10.84%, or Rp2.73 trillion, compared to current assets in 2024, which totaled Rp27.47 trillion. This is primarily due to a 61.18% decrease in the value of land to be developed, which is part of non-current inventory, compared to the previous year's value.

Liabilitas

Liabilities

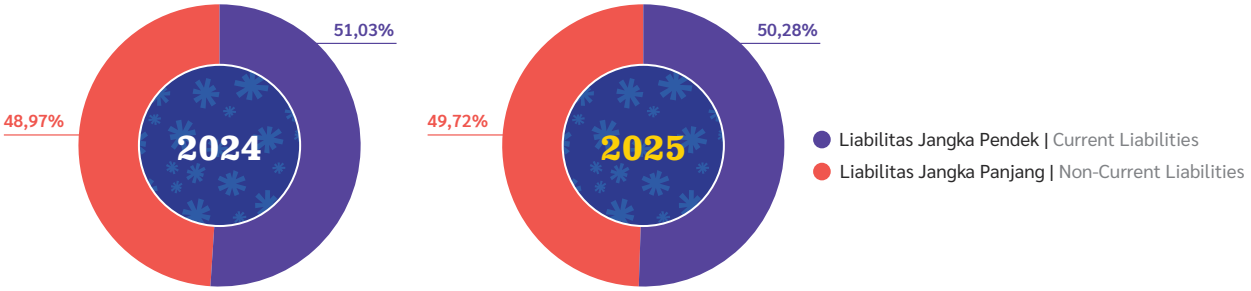
> Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp38,68 triliun, mengalami penurunan 8,22% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2024 sebesar Rp42,14 triliun."
>
> The Company's total liabilities in 2025 amounted to Rp38.68 trillion, a decrease of 8.22% compared to the total liabilities in 2024 of Rp42.14 trillion."

Liabilitas 2024-2025
Liabilities in 2024-2025

Liabilitas Liabilities	2025		2024*		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	19.447.400	50,28	21.503.552	51,03	(2.056.152)	(9,56)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	19.231.636	49,72	20.639.447	48,97	(1.407.811)	(6,82)
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	38.679.036	100,00	**42.142.999**	**100,00**	**(3.463.963)**	**(8,22)**

* Disajikan Kembali | Restated

Komposisi Liabilitas PTPP
Composition of PTPP Liabilities



Jumlah liabilitas Perusahaan dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dengan komposisi liabilitas Perusahaan didominasi oleh liabilitas jangka pendek. Dibandingkan tahun 2024, jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2025 mengalami penurunan 9,56% sedangkan liabilitas jangka panjang tahun 2025 mengalami penurunan 6,82% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

The Company's total liabilities comprise current and non-current liabilities, with current liabilities accounting for the majority. Compared to 2024, current liabilities in 2025 decreased by 9.56%, while non-current liabilities in 2025 decreased by 6.82%, as detailed below.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek 2024-2025
Current Liabilities in 2024-2025

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Utang Usaha Trade Account Payables	**7.637.085**	9.411.101	(1.774.016)	(18,85)
Utang Pajak Taxes Payable	**779.924**	810.287	(30.363)	(3,75)
Biaya Akrual Accruals	**3.815.425**	3.538.453	276.972	7,83
Utang Bank - Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	**2.457.092**	4.475.216	(2.018.124)	(45,10)
Utang Non Bank - Pihak Berelasi Non-Bank Loans - Related Parties	**343.657**	343.010	647	0,19
Pendapatan Diterima Di Muka Unearned Revenue	**124.330**	119.729	4.601	3,84
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Long-Term Borrowings from Banks and Financial Institutions Due Within One (1) Year	**764.639**	530.751	233.888	44,07
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Long-Term Liabilities - Current Portion	**1.209.813**	1.055.117	154.696	14,66
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	**684.548**	66.858	617.690	923,88
Utang Obligasi Bonds Payable	**1.153.245**	453.675	699.570	154,20
Sukuk *Mudharabah* Mudharabah Sharia Bonds	**226.754**	60.000	166.754	277,92
Utang Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	**250.887**	639.353	(388.466)	(60,76)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**19.447.399**	**21.503.552**	**(2.056.153)**	**(9,56)**

* Disajikan Kembali | Restated

Jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2025 tercatat sebesar Rp19,45 triliun, mengalami penurunan 9,56% atau setara dengan Rp2,06 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21,40 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang usaha di tahun 2025, yang selaras dengan peningkatan atas kas yang dibayarkan kepada pemasok dan subkontraktor di tahun berjalan, menurunnya utang usaha sebesar 18,85%, utang bank jangka pendek sebesar 45,10%, serta utang jangka pendek lainnya sebesar 60,76%. Secara keseluruhan, liabilitas jangka pendek di tahun 2025 9,56% lebih rendah dibandingkan liabilitas jangka pendek di tahun 2024.

Total current liabilities for 2025 amounted to Rp19.45 trillion, a decrease of 9.56% or Rp2.06 trillion from Rp21.40 trillion in 2024. This decrease was driven by the repayment of trade payables in 2025, which aligns with an increase in cash payments made to suppliers and subcontractors during the current year, a 18.85% decrease in trade payables, a 45.10% decrease in short-term bank loans, and a 60.76% decrease in other current liabilities. Overall, current liabilities in 2025 were 9.56% lower than current liabilities in 2024.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang 2024-2025
Non-Current Liabilities in 2024-2025

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Utang Usaha Trade Payables	**427.198**	65.309	361.889	554,12
Liabilitas Program Imbalan Kerja Employment Benefits Liabilities	**435.947**	285.363	150.584	52,77
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-Term Loans from Bank and Financial Institutions – Net of Current Maturity	**10.985.128**	11.887.325	(902.197)	(7,59)
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-Term Liabilities – Net of Current Maturity	**1.444.837**	2.613.616	(1.168.779)	(44,72)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	**278.626**	719.813	(441.187)	(61,29)
Utang Obligasi Bonds Payable	**937.185**	2.249.824	(1.312.639)	(58,34)
Obligasi konversi Convertible bonds	**37.224**	-	37.224	100,00
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	**289.065**	32.782	256.283	781,78
Utang pada Ventura Bersama Joint Venture Payable	**1.955.376**	1.236.850	718.526	58,09
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama Accumulated Equity in Net Losses of Joint Ventures	**1.598.333**	707.023	891.310	126,07
Sukuk *Mudharabah* Mudharabah Sharia Bond	**305.000**	531.754	(226.754)	(42,64)
Utang Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Liabilities	**537.716**	309.788	227.928	73,58
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**19.231.636**	**20.639.447**	**(1.407.812)**	**(6,82)**

* Disajikan Kembali | Restated

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 senilai Rp19,23 triliun, mengalami penurunan 6,82 atau setara dengan Rp1,41 triliun dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 senilai Rp20,64 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang yang mengalami penurunan 7,59% dibandingkan tahun lalu, penurunan obligasi karena pembayaran utang obligasi dan obligasi yang pindah ke jangka pendek di tahun 2025, dan penurunan liabilitas sewa yang terjadi di tahun 2025. Secara kesuluruhan liabilitas jangka panjang menurun sebesar 6,82% dibandingkan dengan tahun 2024.

Total Non-Current Liabilities for 2025 amounted to Rp19.23 trillion, a decrease of 6.82% or Rp1.41 trillion from Total Non-Current Liabilities for 2024, which stood at Rp20.64 trillion. This decline was driven by a 7.59% decrease in long-term bank and financial institution loans compared to the previous year, a reduction in bonds due to bond repayments and reclassification of bonds to short-term liabilities in 2025, as well as a decrease in lease liabilities during the same period. Overall, long-term liabilities decreased by 6.82% compared to 2024.

Ekuitas

Equity

Jumlah ekuitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp4,31triliun, turun 65,25% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp15,25 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, jumlah ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 21,38%.

The Company's equity in 2025 reached Rp4.31 trillion, a 65.25% decrease from Rp15.25 trillion in 2024. Over the 2021-2025 period, the Company's equity grew at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 21.38%.

Ekuitas 2024-2025

Equity in 2024-2025

Ekuitas Equity	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham Share Capital	**619.990**	619.990	-	-
Saham Treasuri Treasury Share	**(8.100)**	(8.100)	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	**(8.187)**	(8.187)	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	**4.710.055**	4.710.055	-	-
Perubahan Ekuitas pada Entitas Anak Changes in Equity of Subsidiaries	**241.160**	241.160	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**1.338.437**	1.449.557	(111.120)	(7,67)

Ekuitas Equity	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Persentase Percentage (%)
Saldo Laba: Retained Earnings:				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	2.300.741	3.823.365	(1.522.624)	(39,82)
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	(6.044.544)	(1.522.624)	(4.521.920)	296,98
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	3.149.552	9.305.216	(6.155.664)	(66,15)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali Equity Attributable to Non-Controlling Interest	1.155.864	3.083.996	(1.928.132)	(62,52)
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.305.416	**12.389.212**	**(8.083.796)**	**(65,25)**

* Disajikan Kembali | Restated

Dibandingkan tahun 2024, jumlah ekuitas di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 65,25% atau setara Rp8,08 triliun. Penurunan tersebut utamanya dikontribusi oleh penurunan saldo laba ditahan yang dipengaruhi oleh kerugian yang dicatatkan di tahun berjalan.

Compared to 2024, equity in 2025 decreased by 65.25%, or the equivalent of Rp8.08 trillion. This decline was primarily driven by a decrease in retained earnings, which was affected by the loss recorded in the current year.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2024-2025

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2024-2025

Pos Akun Account Post	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Persentase Percentage (%)
Pendapatan Usaha Revenues	16.270.782	19.812.143	(3.541.361)	(17,87)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(14.811.841)	(17.179.098)	(2.367.257)	(13,78)
Laba Kotor Gross Profit	1.458.941	2.633.045	(1.174.104)	(44,59)
Beban Usaha Operating Expenses	(902.564)	(823.493)	(79.071)	9,60
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(7.350.616)	(356.262)	(6.994.354)	1.963,26
Beban Keuangan Finance Costs	(2.135.037)	(1.891.555)	(243.482)	12,87
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	(151.493)	(570.016)	418.523	(73,42)

Pos Akun Account Post	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024* (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Bagian Laba Entitas Asosiasi Share in Profit of Associates	**54.560**	48.573	5.987	12,33
Pendapatan Lainnya Other Income	**3.172.624**	1.103.047	2.069.577	187,62
Beban Lainnya Other Expense	**(1.455.801)**	(1.226.668)	(229.133)	18,68
Beban Pajak Final Final Tax Expense	**(417.623)**	(583.355)	165.732	(28,41)
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	**(7.727.009)**	(1.666.684)	(6.060.325)	363,62
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	**(272.164)**	(118.278)	(153.886)	130,11
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**(7.999.173)**	(1.784.962)	(6.214.211)	348,14
Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensive Loss	**(84.622)**	(17.914)	(66.708)	372,38
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**(8.083.795)**	(1.802.877)	(6.280.918)	348,38
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Profit Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	**(6.075.259)**	(1.522.624)	(4.552.635)	299,00
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	**(1.923.914)**	(262.339)	(1.661.575)	633,37
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	**(7.999.173)**	(1.784.962)	(6.214.211)	348,14
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada: **Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	**(6.155.663)**	396.274	(6.551.937)	(1.653,39)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	**(1.928.132)**	(284.749)	(1.643.383)	577,13
Jumlah Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**(8.083.795)**	111.525	(8.195.320)	(7.348,42)
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Earnings per Share (Full Rupiah)	**(982)**	(246)	(736)	299,19

* Disajikan Kembali | Restated

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, pendapatan Perusahaan diperoleh dari 8 (delapan) segmen berdasarkan jenis usaha, yaitu segmen Konstruksi, EPC, Properti dan Realti, Pracetak, Persewaan Peralatan, Energi, Pendapatan Tol, dan Jasa Pertambangan, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 221.

As described in the Operations Overview per Business Segment section, the Company's revenue is derived from eight segments based on business type: Construction, EPC, Property and Real Estate, Precast, Equipment Rent, Energy, Toll Income, and Mining Service Business, as shown on page 221.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Usaha PTPP

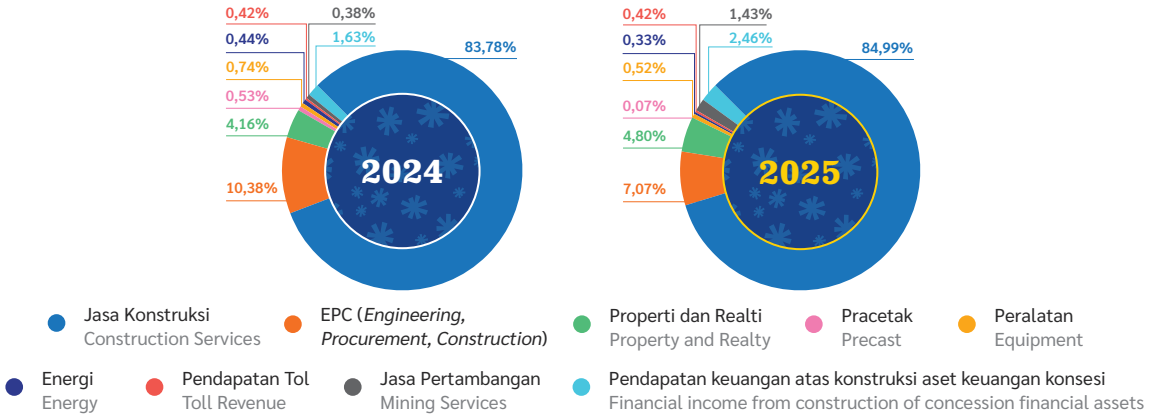
Segment Total and Contribution to the Value of PTPP's Revenues

Pendapatan Usaha Revenues	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Jasa Konstruksi Construction Services	**13.829.263**	**84,99**	16.597.848	83,78	(2.768.585)	(16,68)
EPC	**1.150.288**	**7,07**	2.055.762	10,38	(905.534)	(44,05)
Properti dan Realti Property and Real Estate	**780.333**	**4,80**	824.154	4,16	(43.821)	(5,32)
Pracetak Precast	**10.653**	**0,07**	104.058	0,53	(93.405)	(89,76)
Persewaan Peralatan Equipment Rent	**84.560**	**0,52**	146.447	0,74	(61.887)	(42,26)
Energi Energi	**53.236**	**0,33**	87.866	0,44	(34.630)	(39,41)
Pendapatan Tol Toll Income	**68.071**	**0,42**	83.762	0,42	(15.691)	(18,73)
Jasa Pertambangan Mining Services Business	**232.953**	**1,43**	75.928	0,38	157.025	206,81
Pendapatan Keuangan atas Konstruksi Aset Keuangan Konsesi* Financial Income on Construction from Financial Asset Concessions*	**399.960**	**2,46**	322.778	1,63	77.182	23,91
Eliminasi** Elimination**	**(338.474)**	**(2,08)**	(486.459)	(2,46)	147.985	(30,42)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**16.270.782**	**100,00**	19.812.144	100,00	(3.541.362)	(17,87)

*) Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi adalah pendapatan atas suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan.
*) Financial income on the construction of concession financial assets is the interest income that accurately discounts estimated future cash receipts over the expected life of the financial asset.

**) Eliminasi adalah penghapusan pendapatan di salah satu segmen usaha dikarenakan adanya 2 (dua) pengakuan di 2 (dua) unit bisnis.
**) Elimination is the elimination of revenue in one of the business segments due to two recognitions in two business units.

Komposisi Pendapatan Usaha PTPP
Composition of PTPP Revenues



Pendapatan Usaha PTPP tahun 2025 sebesar Rp16,27 triliun, turun 17,87% atau setara dengan Rp3,54 triliun dibandingkan Pendapatan Usaha tahun 2024 sebesar Rp19,81 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pada tahun 2025 Perusahaan mencetak rugi bersih sebesar Rp7,99 triliun miliar, turun 6.279% atau setara dengan Rp8,13 triliun dari laba bersih di tahun 2024 yang tercatat senilai Rp129,44 miliar.

PTPP's revenues in 2025 was Rp16.27 trillion, a decrease by 17.87% or Rp3.54 trillion from the 2024 revenues of Rp19.81 trillion. Compared to 2024, in 2025 the Company recorded a net loss of Rp7.99 trillion, a decrease of 6,279% or equivalent to Rp8.13 trillion from the net profit in 2024, which was recorded at Rp129.44 billion.

Pendapatan usaha tahun 2025 menurun dipengaruhi tidak tercapainya perolehan nilai kontrak baru di tahun 2025 dan proyek-proyek yang sudah selesai di tahun berjalan. Perusahaan mencatatkan rugi bersih senilai Rp7,99 triliun, meningkat sebesar 348,14% dibandingkan tahun lalu yang membukukan rugi bersih senilai Rp1,78 triliun. Hal ini utamanya dikontribusi oleh peningkatan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

Revenue in 2025 declined, driven by the non-achievement of new contract acquisitions during the year and the completion of projects within the reporting period. The Company recorded a net loss of Rp7.99 trillion, an increase of 348.14% compared to the previous year's net loss of Rp1.78 trillion. This was primarily driven by an increase in impairment losses on trade receivables.

Kinerja laba rugi di atas kemudian tercermin pada kinerja rasio kemampuan Perusahaan dalam beroperasi, menciptakan efisiensi, dan menghasilkan keuntungan.

The profit and loss performance above is reflected in the Company's performance ratios, which indicate its ability to operate, create efficiency, and generate profits.

Rasio Kegiatan Operasi dan Kemampuan Menghasilkan Keuntungan 2024-2025
Operating Activity Rations and the Ability to Generate Profit in 2024-2025

Rasio-rasio Keuangan Financial Ratios	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Aktivitas Activity Ratios			
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	**185**	202	(8,41)
Perputaran Aset (kali) Asset Turnover (times)	**37,85**	36,33	4,18

Rasio-rasio Keuangan Financial Ratios	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios			
Marjin Laba Kotor (GPM) (%) Gross Profit Margin (GPM) (%)	**8,97**	13,29	(4,32)
Marjin Laba Operasi (OPM) (%) Operating Profit Margin (OPM) (%)	**3,42**	9,13	(5,71)
Marjin Laba Bersih (NPM) (%) Net Profit Margin (NPM) (%)	**(49,16)**	(9,01)	(40,15)
Tingkat Pengembalian Aset (ROA) (%) Return on Assets (ROA) (%)	**(18,61)**	(3,27)	(15,34)
Tingkat Pengembalian Modal (ROE) (%) Return on Equity (ROE) (%)	**(185,79)**	(14,41)	(171,38)
Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) (%) Return on Investment (ROI) (%)	**2,66**	3,96	(1,30)

Dari rasio-rasio di atas, Marjin Laba Kotor dan Marjin Laba Operasi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha di tahun 2025. Hal ini juga berimbas pada Marjin Laba Bersih yang mencatatkan nilai negatif.

Based on the above ratios, the Gross Profit Margin and Operating Profit Margin declined due to a decrease in operating revenue in 2025. This also impacted the Net Profit Margin, which recorded a negative value.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flows

Arus Kas 2024-2025
Cash Flows in 2024-2025

Arus Kas Cash Flows	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**923.946**	3.709.897	(2.785.951)	(75,10)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**1.110.595**	(3.123.580)	4.234.175	(135,56)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**(3.326.972)**	(605.360)	2.722.612	449,59
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Decrease in Cash and Cash Equivalents	**(1.292.431)**	(19.042)	(1.273.389)	6.687,26
Perubahan Pengaruh Selisih Kurs Effect of Changes in Foreign Currencies	**4.531**	29.955	(25.424)	(84,87)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	**4.181.505**	4.170.592	10.913	0,26
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	**2.893.604**	4.181.505	(1.287.901)	(30,80)

Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu. Secara umum, Kas dan Setara Kas Perusahaan di akhir tahun 2025 tercatat mengalami penurunan 30,80% atau setara Rp1,29 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor di tahun berjalan.

The Cash Flow statement provides an overview of the Company's income and expenses over a specific period. In general, the Company's Cash And Cash Equivalents at the end of 2025 decreased by 30.80%, or the equivalent of Rp1.29 trillion. This decline was driven by a decrease in cash flows from operating activities in 2025 compared to the previous year, resulting from increased cash payments to suppliers and subcontractors during the current year. below.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2024-2025

Cash Flows from Operating Activities in 2024-2025

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	**18.344.928**	16.858.651	1.486.277	8,82
Pembayaran Kas Kepada: **Payments to:**				
Pemasok dan Subkontraktor Supplier and Subcontractors	**(15.171.006)**	(11.860.072)	(3.310.934)	27,92
Direksi, Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Board of Directors, Employees, and Third Party	**(2.081.525)**	(1.172.697)	(908.828)	77,50
Kas yang Dihasilkan dari Operasi Cash Generated from Operation	**1.092.397**	3.825.882	(2.733.485)	(71,45)
Pembayaran Pajak-pajak Taxes Payment	**(216.338)**	(225.202)	8.864	(3,94)
Penerimaan Pajak Taxes Received	**-**	61.817	(61.817)	(100,00)
Penerimaan Bunga Interest Received	**47.887**	47.400	487	1,03
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**923.946**	3.709.897	(2.785.951)	(75,10)

Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp923,95 miliar, menurun 75,10% atau setara dengan Rp2,79 triliun dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp3,71 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor serta pihak ketiga lainnya yang 32,38% lebih tinggi dibanding tahun 2024. Hal ini yang menyebabkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 75,10% dibanding tahun sebelumnya.

Net cash from operating activities in 2025 amounted to Rp923.95 billion, a decrease of 75.10% or equivalent to Rp2.79 trillion compared to the net cash from operating activities in 2024 of Rp3.71 trillion. This decrease was primarily driven by cash payments to suppliers, subcontractors, and other third parties, which were 32.38% higher than in 2024. This is what caused net cash from operating activities to decrease by 75.10% compared to the previous year.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2024-2025
Cash Flows from Investing Activities in 2024-2025

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Investasi Jangka Pendek Short-Term Investment Receipts	113.000	-	113.000	100,00
Pembayaran Investasi Jangka Pendek Payment of Short-Term Investment	(8.000)	(100.000)	92.000	(92,00)
Penambahan Kas yang Dibatasi Penggunaannya Addition Restricted Cash	(18.277)	(214.184)	195.907	(91,47)
Pengurangan Kas yang Dibatasi Penggunaannya Deduction Restricted Cash	204.984	3.500	201.484	5.756,69
Penerimaan Dana Talangan dari LMAN Receipt of Funds from LMAN	42.127	2.822	39.305	1.392,81
Pengembalian Pinjaman dari Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya Receipt of Payment from Investment Associates Company and Other Long-Term Investments	-	5.109	(5.109)	(100,00)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Dividend Received from Associates	8.856	7.521	1.335	17,75
Penambahan investasi pada ventura bersama Addition of investment in joint ventures	(2.323.972)	(3.960.535)	1.636.563	(41,32)
Pengurangan Investasi pada Ventura Bersama Deduction from Investment in Joint Ventures	3.629.882	3.056.534	573.348	18,76
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya Addition of Other Long-Term Investment	-	(30.700)	30.700	(100,00)
Pengurangan investasi jangka panjang lainnya Deduction from other long-term investment	10.808	-	10.808	100,00
Penambahan Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Addition of Financial Assets from Concession Project	(140.674)	(117.985)	(22.689)	19,23
Hasil Divestasi Pada Entitas Anak, Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya Proceed from Divestment of Investment in Subsidiaries, Associates, and Other Long-Term Investment	-	731.313	(731.313)	(100,00)
Pembayaran atas Biaya Divestasi Payment of Divestment Costs	-	(40.982)	40.982	(100,00)
Penambahan Aset Minyak dan Gas Bumi Addition of Oil and Gas	-	(52.283)	52.283	(100,00)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Property and Equipment	(17.723)	(146.731)	129.008	(87,92)
Hasil dari Pelepasan Aset Tetap Proceeds from Disposal of Property and Equipment	171.402	66.043	105.359	159,53

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Perolehan Aset Tak Berwujud Addition of Intangible Assets	(5.506)	(1.739.196)	1.733.690	(99,68)
Penambahan Aset Sewa Pembiayaan Addition of Finance Lease Assets	(555.923)	(425.353)	(130.570)	30,70
Perolehan Properti Investasi Acquisition of Investment Property	(390)	(168.473)	168.863	99,77
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	1.110.595	(3.123.580)	4.234.954	135,58

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp1,11 triliun, mengalami fluktuasi 135,5% dari negatif Rp3,12 triliun menjadi positif Rp1,11 triliun di tahun berjalan. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh berkurangnya penambahan investasi pada ventura bersama sebesar 41,32% serta meningkatnya kas yang didapat dari pengurangan investasi ventura bersama sebesar 18,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Net cash used for investing activities in 2025 amounted to Rp1.11 trillion, fluctuating by 135.5% from a negative Rp3.12 trillion to a positive Rp1.11 trillion in the current year. This was primarily influenced by a 41.32% decrease in investments in joint ventures and an 18.76% increase in cash received from the deduction from investments in joint ventures compared to the previous year.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2024-2025
Cash Flows from Financing Activities in 2024-2025

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pembayaran Dividen Payment of Dividend	-	(18.513)	18.513	(100,00)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi Receipt of loans from related parties	43.573	-	43.573	100,00
Pembayaran Pinjaman Lainnya Payment of Other Loans	(89.970)	(4.658)	(85.312)	1.831,52
Pembayaran bunga Payments of interest expense	(1.891.042)	(1.881.910)	(9.132)	0,49
Pembayaran Obligasi Payment of Bonds	(242.275)	(1.100.000)	857.725	77,98
Pembayaran Sukuk Payment of Sharia Bonds	(60.000)	(400.000)	340.000	85,00
Penerimaan Utang Bank Proceeds from Bank Loans	15.134.442	21.676.141	(6.541.699)	(30,18)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pembayaran Utang Bank Repayment of Bank Loans	**(15.577.925)**	(18.535.471)	2.957.546	15,96
Penerimaan Utang Non Bank Proceeds from Non-Bank Loans	**1.194**	335.729	(334.535)	(99,64)
Pembayaran Utang Non Bank Repayment of Non-Bank Loans	**(11.316)**	(602.729)	591.413	98,12
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	**(633.653)**	(73.949)	(559.704)	756,88
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	**(3.326.972)**	(605.360)	(2.721.612)	449,59

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2025 sebesar Rp3,33 triliun, meningkat 449,59% atau setara dengan Rp2,72 triliun dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2024 sebesar Rp605 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran liabilitas sewa sebesar 756,8% di tahun 2025, serta nilai kas yang masuk atas penerimaan utang bank hampir sama dengan nilai kas yang keluar untuk pembayaran utang bank di tahun 2025. Hal inilah yang menyebabkan total kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2025 lebih besar jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun sebelumnya.

Net cash used in financing activities in 2025 amounted to Rp3.33 trillion, an increase of 449.59% or Rp2.72 trillion compared to the Rp605 billion in net cash used in financing activities in 2024. This increase is primarily due to a 756.8% rise in lease liability payments in 2025, as well as the fact that cash inflows from the proceeds from bank loans were nearly equal to cash outflows for the repayment of bank loans in 2025. This is what caused the total net cash used for financing activities in 2025 to be higher compared to the net cash used for financing activities in the previous year.

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

The Company's solvency is measured using solvency and liquidity ratios. Solvency ratios are ratios that measure the Company's ability to pay all its short-term and long-term debts. Meanwhile, the liquidity ratio measures the Company's ability to pay short-term debt.

Rasio Likuiditas: Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas di mana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio kas dan rasio lancar, sebagaimana terlihat di bawah ini.

Liquidity Ratio: Ability to Pay Short-Term Debt

The Company's ability to pay short-term debts is reflected in liquidity ratios, where liquidity levels are evident in the cash and current ratios, as shown below.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratios	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	15,88	20,84	(4,96)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	105,58	136,49	(30,91)

Rasio kas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang cukup signifikan di tahun 2025 sebagai dampak dari penurunan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi.

The cash ratio decreased compared to the previous year, primarily due to a significant decline in cash and cash equivalents in 2025 as a result of the decrease in net cash from operating activities.

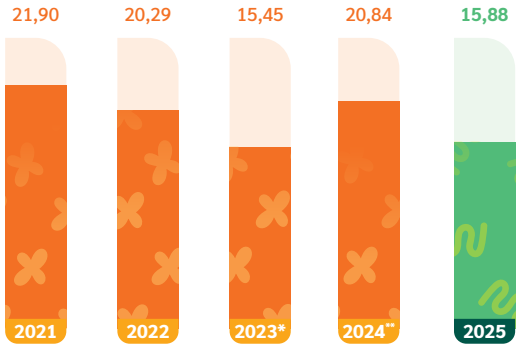
Rasio lancar juga menunjukkan penurunan terhadap rasio lancar tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai aset lancar yang lebih besar daripada penurunan liabilitas lancar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The current ratio also showed a decline compared to the previous year's current ratio. This was caused by a larger decrease in current assets than in current liabilities compared to the previous year.

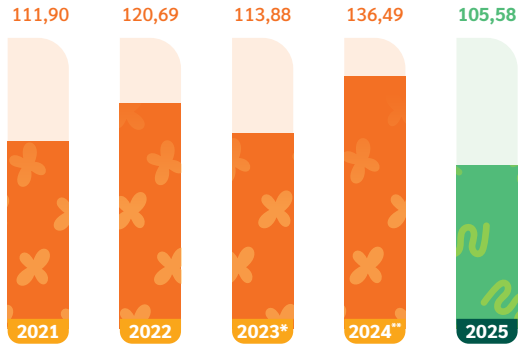
Rasio kas dan rasio lancar menunjukkan perbaikan terhadap tahun 2024. Ini menunjukan hal yang positif di mana aset lancar Perusahaan cukup mampu menanggung utang lancar di tahun berjalan.

The cash ratio and current ratio show an improvement compared to 2024. This indicates a positive trend, as the Company's current assets are sufficiently capable of covering current liabilities in the current year.

Perkembangan Rasio Kas 2021-2025
Development of the Cash Ratio in 2021-2025 %



Perkembangan Rasio Lancar 2021-2025
Development of the Current Ratio in 2021-2025 %



Rasio Solvabilitas: Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari Rasio Total Kewajiban terhadap Aset, Rasio Utang terhadap Modal (DER), Rasio Total Utang Berbunga terhadap Ekuitas, Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, serta EBITDA terhadap Beban Bunga, sebagaimana terlihat di bawah ini.

Solvency Ratio: Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debts

The Company's ability to pay its long-term and short-term debts can be seen in the solvency ratios, including the Debt-to-Assets Ratio, Debt-to-Equity Ratio (DER), Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio, Equity-to-Assets Ratio, and EBITDA to Interest Coverage Ratio, as shown below.

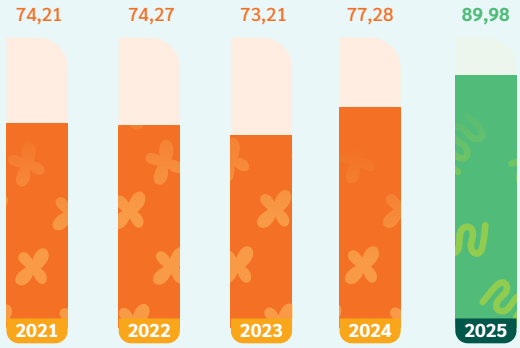
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Total Kewajiban terhadap Aset (%) Debt-to-Assets Ratio (%)	**89,98**	77,28	12,70
Rasio Utang terhadap Modal (DER) (%) Debt-to-Equity Ratio (DER) (%)	**898,38**	340,16	558,22
Rasio Total Utang Berbunga terhadap Ekuitas (%) Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio (%)	**422,10**	177,16	244,94
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (%) Equity-to-Assets Ratio (%)	**10,02**	22,72	(12,70)
EBITDA terhadap Beban Bunga (%) EBITDA-to-Interest Coverage Ratio (%)	**53,38**	113,45	(60,07)

Berdasarkan tabel di atas, untuk Rasio Utang terhadap Modal (DER) meningkat dibandingkan tahun lalu dipengaruhi oleh penurunan nilai ekuitas yang cukup signifikan di tahun 2025. Begitu juga dengan total utang berbunga terhadap ekuitas mengalami peningkatan sebagai dampak dari penurunan nilai ekuitas di tahun 2025. EBITDA terhadap beban bunga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan menurunnya nilai EBITDA sebagai dampak dari penurunan laba kotor di tahun 2025, sedangkan beban bunga yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Based on the table above, the Debt-to-Equity Ratio (DER) increased compared to the previous year, influenced by a significant decline in equity value in 2025. Similarly, total interest-bearing debt-to-equity increased as a result of the decline in equity value in 2025. The EBITDA-to-interest coverage ratio decreased compared to the previous year due to a decline in EBITDA resulting from a decrease in gross profit in 2025, while interest expense increased compared to the previous year.

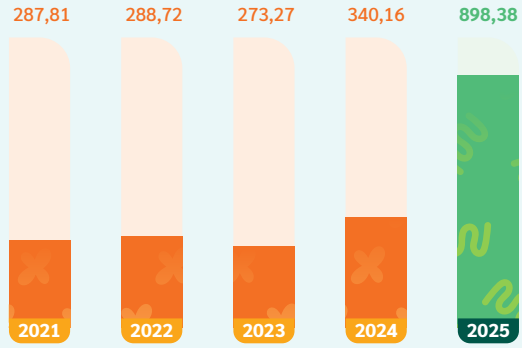
Perkembangan Rasio Total Kewajiban terhadap Aset 2021-2025

Development of Debt-to-Assets Ratio in 2021-2025 %



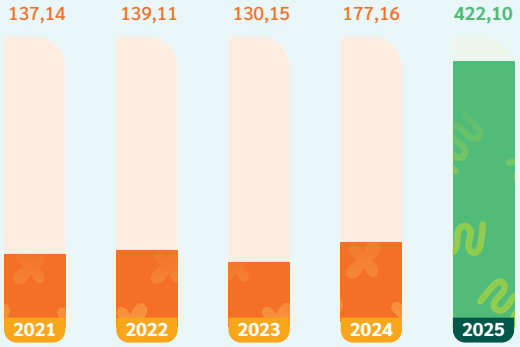
Perkembangan Rasio Utang terhadap Modal (DER) 2021-2025

Development of Debt-to-Equity Ratio (DER) in 2021-2025 %



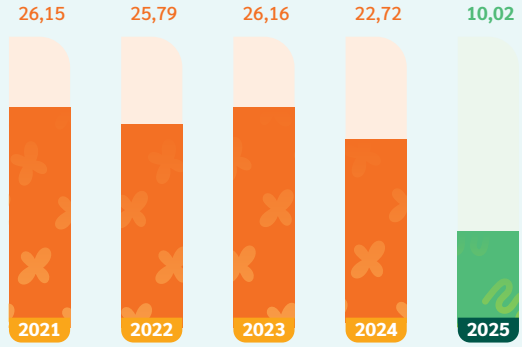
Perkembangan Rasio Total Utang Berbunga terhadap Ekuitas 2021-2025

Development of Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio in 2021-2025 %



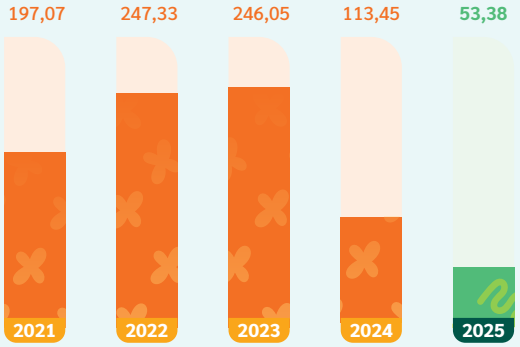
Perkembangan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 2021-2025

Development of Equity-to-Assets Ratio in 2021-2025 %



Perkembangan EBITDA terhadap Beban Bunga 2021-2025

Development of EBITDA to Interest Coverage Ratio in 2021-2025 %



Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Periode Penagihan atau *Collection Period*. Semakin kecil nilai *Collection Period* menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the Collection Period. The smaller the Collection Period value indicates the Company's ability to collect receivables faster.

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability Ratio

Perihal Subject	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage (%)
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	70	107	(37)	(34,57)

Periode Penagihan atau *Collection Period* pada tahun2025 selama 70 hari, lebih cepat 37 hari dibandingkan dengan tahun 2024 yang menunjukkan angka 107 hari. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai piutang usaha dan juga pendapatan usaha di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

The collection period in 2025 was 70 days, 37 days shorter than in 2024, which stood at 107 days. This was due to a decrease in accounts receivable and revenues in 2025 compared to the previous year.

Umur piutang usaha Perusahaan dan upaya Perusahaan dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The age of the Company's accounts receivable and the Company's efforts to manage accounts receivable are shown in the table below.

Umur Piutang Usaha (Dalam jutaan rupiah) Age of Accounts Receivable (In million Rupiah)	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage (%)
Belum jatuh tempo Not yet due	122.051	2.086.075	(1.964.024)	(94,15)
Sudah jatuh tempo Expired				
1 bulan-12 bulan 1 month-12 months	1.639.631	2.900.421	(1.260.790)	(43,47)
12-15 bulan 12-15 months	471.175	374.300	96.875	25,88
15-18 bulan 15-18 months	250.693	373.675	(122.982)	(32,91)
18-21 bulan 18-21 months	167.156	328.560	(161.404)	(49,12)
Lebih dari 21 bulan More than 21 months	2.613.922	1.134.390	1.479.532	130,43
Sub Jumlah **Subtotal**	**5.264.628**	**7.197.421**	**(1.932.793)**	**(26,85)**

Umur Piutang Usaha (Dalam jutaan rupiah) Age of Accounts Receivable (In million Rupiah)	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage (%)
Dikurangi: Subtracted by:				
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses	(2.137.420)	(1.407.924)	(729.496)	51,81
Jumlah piutang usaha - bersih Total receivables - net	3.127.208	5.789.497	(2.662.289)	(45,98)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari. Piutang usaha dijaminkan atas utang bank jangka pendek, utang non bank serta utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang.

The Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover the possibility of uncollectible receivables in the future. Receivables are pledged as collateral for short-term bank loans, non-bank loans, and long-term bank and financial institution loans.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan

Capital Structure, Management Policy on Capital Structure, and Basis of Policy Determination

Kebijakan dan Dasar Penentu Kebijakan Struktur Modal serta Manajemen Risiko Permodalan

Perusahaan mengelola modalnya untuk memastikan dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang termasuk utang bank, utang non-bank pihak berelasi, utang obligasi dan sukuk, surat berharga jangka menengah, dan liabilitas sewa pembiayaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Perusahaan, modal saham dan laba ditahan.

Manajemen secara berkala melakukan kajian atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari kajian tersebut, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Rincian struktur permodalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Capital Structure Policy, Basis for Determining Policy, and Capital Risk Management

The Company manages its capital to ensure it can maintain its business continuity, while maximizing returns to shareholders by optimizing the balance between liabilities and equity.

The Company's capital structure consists of liabilities, including bank loans, related party non-bank loans, bonds payable, sharia bonds, medium-term notes, and finance lease liabilities as disclosed in the notes to the consolidated financial statements, cash and cash equivalents, and capital available to shareholders of the Company, share capital, and retained earnings.

The Management periodically reviews the Company's capital structure. As part of the review, the Management considers the capital cost and associated risks. Details of the capital structure as of December 31, 2024, and 2023 are as follows:

Pos Akun Accout Post	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Modal dari Utang Berbasis Bunga: **Capital from Interest-Based Debt:**				
Utang Bank - Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	**2.457.092**	4.475.216	(2.018.124)	(45,10)
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Banks and Financial Institutions Loans	**11.749.767**	12.418.076	(668.309)	(5,38)
Utang Non-Bank Non-Bank Loans	**343.657**	343.010	647	0,19
Surat Berharga Jangka Menengah Medium-Term Notes	**-**	630.000	(630.000)	(100,00)
Utang Obligasi Bond Debts	**2.090.430**	2.603.499	(513.069)	(19,71)
Sewa Pembiayaan Finance Lease	**963.174**	786.671	176.503	22,44
Sukuk *Mudharabah* Mudharabah Sharia Bonds	**531.754**	591.754	(60.000)	(10,14)
Jumlah Modal dari Utang Berbasis Bunga - Bersih Total Capital from Interest-Based Debt - Net	**18.135.874**	21.948.226	(3.812.352)	(17,37)
Ekuitas Equity	**4.305.416**	12.389.212	(8.083.796)	(65,25)
Jumlah Struktur Modal **Total Capital Structure**	**22.441.290**	**34.337.438**	**(11.896.148)**	**(34,64)**
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%) **Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio (%)**	**421,23**	**177,16**	**244,08**	

Struktur modal Perusahaan dari utang berbunga selalu dijaga komposisi jangka pendek dan jangka panjangnya agar rasio likuiditas Perusahaan tetap terjaga dan cenderung membaik di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, sedangkan untuk ekuitas akan dipengaruhi oleh perolehan laba operasi yang mana pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024.

The Company's capital structure of interest-bearing debt is always maintained in its short-term and long-term composition to maintain the Company's liquidity ratio, which tends to improve in 2025 compared to 2024, while equity will be influenced by the acquisition of operating profit, which decreased in 2025 compared to 2024.

Struktur Permodalan Perusahaan

Struktur modal Perusahaan tahun 2025 yang terdiri dari kewajiban berbasis bunga dan modal sendiri serta perbandingannya dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Capital Structure of the Company

The Company's capital structure in 2025, which comprises interest-based debt and equity, as well as its comparison with that in 2024, is as follows:

Struktur Modal dan Perubahannya
Capital Structure and Its Changes

Struktur Modal Capital Structure	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Modal dari Utang Berbasis Bunga Capital from Interest-Based Debt	**18.173.100**	**80,85**	21.948.226	63,92	(3.812.352)	(17,37)
Ekuitas (permodalan sendiri) Equity (own capital)	**4.305.416**	**19,15**	12.389.212	36,08	(8.083.796)	(65,25)
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure	**22.478.516**	**100,00**	34.337.438	100,00	(11.896.148)	(34,64)

Modal dari utang berbasis bunga mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio utang berbunga terhadap modal mengalami penurunan dikarenakan penerimaan utang bank di tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perolehan kontrak baru yang didapat di tahun 2025.

Interest-bearing debt capital decreased in 2025 compared to the previous year. The ratio of interest-bearing debt to capital decreased because the proceeds from bank loans in 2025 were lower than in the previous year. This is in line with the new contracts secured in 2025.



PT PP Sinergi Banjaratma - Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma

Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Di tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan.

Material Commitment for Capital Goods Investment
In 2025, the Company had no material commitments for capital goods investment other than funding.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realisasi investasi barang modal Perusahaan tercermin dari belanja modal atau *Capital Expenditure* (Capex). Di tahun 2025, belanja modal Perusahaan dan entitas anak sebesar Rp857,58 miliar triliun yang terdiri dari belanja modal Perusahaan dan belanja modal entitas anak sebesar Rp854,40 miliar serta operasional sebesar Rp3,18 miliar, berikut rinciannya.

Realization of Capital Goods Investment
The Company's capital investment is reflected in its Capital Expenditures (Capex). In 2025, the Company's and its subsidiaries' capital expenditures totaled Rp857.58 billion, consisting of the Company's capital expenditures and its subsidiaries' capital expenditures of Rp854.40 billion, as well as operating expenses of Rp3.18 billion, with the following details.

Rincian Investasi Barang Modal Tahun 2025
Details on Capital Goods Investment in 2025

No.	Jenis Investasi Type of Investment	Tujuan Investasi Purpose of Investment	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)
AP Utama Main Subsidiaries			
1	PT PP Properti	Penambahan Aktiva Tetap Addition of Fixed Assets	1.555.396.055
2	PT PP Presisi	Penambahan Aktiva Tetap & Infrastruktur IT Addition of Fixed Assets & IT Infrastructure	12.969.272.972
3	PT PP Urban	-	-
4	PT PP Energi	-	-
5	PT PP Infrastruktur	SPAM Development	141.132.826.007
AP Non Utama Non-Main Subsidiaries			
6	PT Centurion Perkasa Iman	Penambahan Fasilitas Hotel Addition of Hotel Facilities	1.317.607.985
7	PT Sinergi Colomadu	*Maintenance*	3.500.000
8	PT PP Semarang Demak	Pembayaran utang konstruksi Payment of construction debts	2.281.052.747
9	PT PP Sinergi Banjaratma	Penambahan Peralatan Kantor Addition of Office Equipment	575.607.044

No.	Jenis Investasi Type of Investment	Tujuan Investasi Purpose of Investment	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)
SBU & Operasional SBU & Operational			
10	BSI Tower	Penyelesaian Konstruksi Construction Completion	555.923.406.003
11	Strategic Business Unit	Penambahan Fasilitas & Maintenance Addition of Facilities & Maintenance	1.272.789.096
12	Operasional Operational	Optimalisasi dan pengembangan sistem IT IT system optimization and development	3.184.475.000
13	Perolehan Properti Investasi Investment Property Acquisition	-	137.368.638.91
	Jumlah **Total**		**857.584.571.824**

Perbandingan belanja modal tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The comparison of the 2025 and 2024 expenditures can be viewed in the following table.

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Persentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	857.584	2.516.742	(1.659.158)	(65,92)-

Secara keseluruhan. jumlah investasi barang modal yang direalisasikan di tahun 2025 mengalami penurunan 65,92% dibandingkan jumlah investasi barang modal yang direalisasikan tahun 2024 sebesar Rp2,52 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh selesainya konstruksi BSI Tower serta fokus investasi barang modal sesuai dengan strategi perusahaan "*back to core*".

Overall, the amount of capital goods investment realized in 2025 decrease 65.92% from that of capital goods investment realized in 2024. This is mainly due to the completion of BSI Tower construction as well as the focus of the capital goods investment according to the Company's "back to the core" strategy.

Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Impact of Price Changes Affecting the Company's Revenues and Financial Performance

Model bisnis PTPP, khususnya di segmen jasa konstruksi memiliki kontrak yang mengikat nilai selama masa pelaksanaan, sehingga secara umum tidak ada kenaikan harga. Sedangkan jika terjadi kenaikan harga material yang signifikan (bersifat *force majeure*) makan akan dilakukan klaim atau eskalasi harga kepada *Owner*.

PTPP's business model, especially in the construction services segment, has value-binding contracts during the implementation, and thus, in general, there is no price increase. Meanwhile, if there is a significant increase in the material price (due to force majeure), a claim or price escalation will be made to the Owner.

Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Information on the Impact of Foreign Exchange Rate

Dalam kegiatan operasi dan bisnisnya, PTPP memiliki transaksi dalam bentuk mata uang asing, namun transaksi dengan mata uang asing tidak memiliki nilai yang signifikan. PTPP tidak menerapkan kebijakan lindung nilai dalam transaksi dengan menggunakan mata uang asing.

In its operations and business activities, PTPP has transactions in foreign currencies, but these transactions are not significant in value. PTPP does not apply a hedging policy to transactions denominated in foreign currencies.

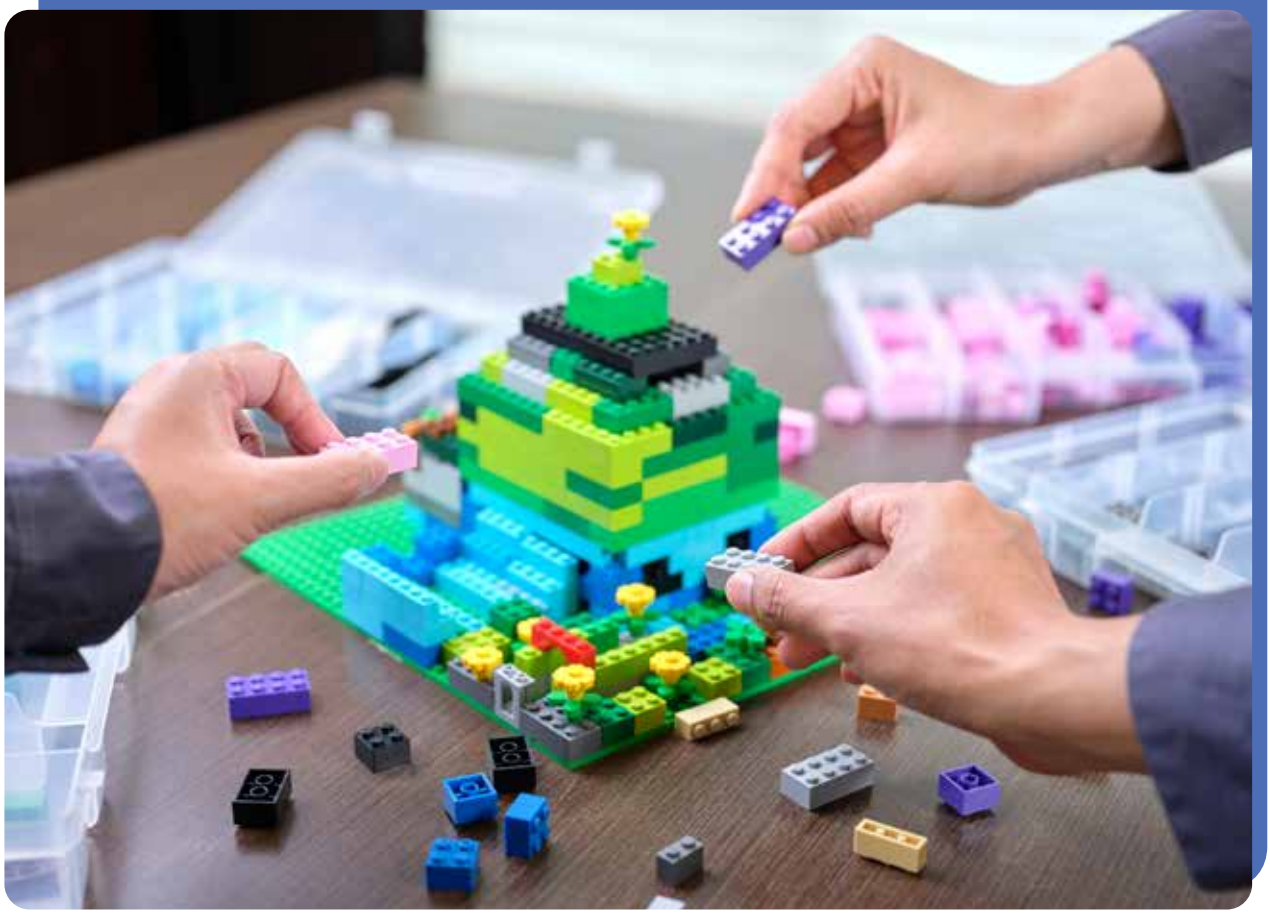
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date

Tidak terdapat peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan hingga disahkannya laporan tahunan ini.

There were no events occurring after the date of the independent auditor's report up to the approval of this Annual Report.

Pencapaian Target Tahun 2025
Target Achievement in 2025



Dalam penyusunan RKAP tahun 2025 mempertimbangkan prognosa kinerja 2024, dinamika eksternal, arah kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, serta kebutuhan internal perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis. Sasaran strategis utama perusahaan diarahkan pada *Growth Operational Excellence, Managing Business Portfolio Risk,* dan Penyehatan Keuangan Perusahaan, dengan tema strategi *"Strengthening The Core, Managing Business Portfolios Risk"* yang sejalan dengan RJPP 2025-2029 bertema *"Back to Core".* Fokus utama perusahaan pada 2025 mencakup peningkatan perolehan kontrak baru dan pendapatan usaha, penguatan efisiensi operasional, pengelolaan risiko portofolio, divestasi dan aksi korporasi secara terukur, perbaikan struktur keuangan, penguatan tata kelola dan *compliance*, pengembangan teknologi, serta komitmen terhadap ESG guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih sehat, berkelanjutan, dan bernilai optimal.

In preparing the 2025 RKAP, the Company considered the 2024 performance forecast, external dynamics, government policy directions, macroeconomic conditions, and internal needs to strengthen the business foundation. The Company's primary strategic objectives are focused on Operational Excellence Growth, Managing Business Portfolio Risk, and Corporate Financial Soundness, under the strategic theme "Strengthening The Core, Managing Business Portfolios Risk," which aligns with the 2025–2029 RJPP themed "Back to Core." The Company's primary focus in 2025 includes increasing new contract acquisitions and business revenues, enhancing operational efficiency, managing portfolio risk, measured divestments and corporate actions, improving financial structure, strengthening governance and compliance, developing technology, as well as a commitment to ESG to support healthier, sustainable, and optimal-value business growth.

Pencapaian Realisasi Terhadap Target Tahun 2025
Realization Compared to the Target in 2025

Pos Akun Account Post	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2025 2025 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2025 (%) 2025 Realization Compared to the Target (%)
	1	2	(1/2)
Perolehan Kontrak Baru (Rp-juta) New Contract Asquisition (Rp-million)	24.952.706	28.500.000	87,55
Pendapatan Usaha (Rp-juta) Revenues (Rp-million)	16.270.782	18.297.663	88,92
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (Rp-million)	(7.999.173)	157.002	(5.094,95)
Jumlah Struktur Modal (Rp-juta) Total Capital Structure (Rp-million)	22.478.516	27.720.753	81,09

- **Operasi dan Pemasaran**
  Perolehan kontrak baru tahun 2025 terealisasi sebesar Rp24,9 triliun atau mencapai 87,55% dari target 2025, pencapaian ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memperoleh kontrak baru dalam jumlah yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika pasar.

- **Pendapatan usaha dan Laba Bersih**
  Pendapatan usaha di tahun 2025 mencapai 88,92% dari nilai yang ditargetkan atau sebesar Rp16,2 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh perolehan nilai kontrak baru yang tidak mencapai target serta proyek-proyek yang telah selesai di tahun 2025.

  Perusahaan membukukan rugi bersih senilai Rp7,9 triliun di tahun 2025 dari target Rp157 miliar. Hal ini utamanya dikontribusi oleh peningkatan kerugian penurunan nilai yang dicatatkan di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Struktur Modal**
  Capaian struktur modal yang terdiri dari utang berbunga adalah sebesar 81,09% dari target yang diharapkan. Penerimaan utang berbunga dari lembaga keuangan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Operations and Marketing**
  New contract acquisition in 2025 totaled Rp24.9 trillion or 87.55% of the 2025 target. This achievement indicates that the Company remains capable of securing a significant number of new contracts, although it has not yet fully met the established target. This situation is influenced by market dynamics.

- **Revenues and Net Profit**
  Operating revenue in 2025 reached 88.92% of the targeted value, amounting to Rp16.2 trillion. This was influenced by the realization of new contract values that did not meet the target as well as projects that had been completed in 2025.

  The Company recorded a net loss of Rp7.9 trillion in 2025, compared to the target of Rp157 billion. This was mainly contributed by the increase in impairment losses recognized in 2025, which were higher than those recorded in the previous year.

- **Capital Structure**
  The achievement of the capital structure consisting of interest-bearing debt was 81.09% of the expected target. Interest-bearing debt received from financial institutions was lower compared to the previous year.

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Corporate Soundness Level

PTPP memiliki perangkat penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Merujuk pada Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 76 dalam Peraturan BUMN tersebut, disebutkan bahwa Tingkat Kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (*Rating*) yang didasarkan pada Pemeringkatan.

PTPP has a Corporate Soundness Level assessment tool based on the Indonesian SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Chapter IV, Part One, Article 76 of the SOE Regulation states that the SOE's Soundness Level is assessed using a Rating based on Ranking.

Atas dasar landasan tersebut, Perusahaan menunjuk perusahaan pemeringkat, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau "Pefindo" untuk melakukan penilaian atas pemeringkatan. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Pefindo, peringkat PTPP pada tahun 2024 adalah "idA".

On this basis, the Company appointed rating agency PT Pemeringkat Efek Indonesia or Pefindo to conduct the rating assessment. Based on the results issued by Pefindo, PTPP's rating in 2024 is "idA".



Tahun 2025 PTPP menerima hasil ini sama dengan tahun sebelumnya di mana PTPP memperoleh peringkat "BBB+" oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia atau "Pefindo".

In 2025, PTPP achieved the same result as the previous year, in which PTPP obtained a rating of "BBB+" by PT Pemeringkat Efek Indonesia or Pefindo.

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Dividend Policy and Its Distribution

Kebijakan Dasar tentang Pembagian Dividen
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26 tentang penggunaan laba, laba bersih Perusahaan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian Dividen harus disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perusahaan.

Basic Policy on Dividend Distribution
According to prevailing laws and regulations in Indonesia and the Company's Articles of Association, Article 26 on the use of profit, the Company's net profit can be distributed to the Shareholders as Dividends after setting aside mandatory reserve funds required by law. Dividend distribution must be approved by the shareholders through an Annual GMS resolution based on the Company's recommendation.

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2025 dan Kronologis Pembagian Dividen
Berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2025 tanggal 30 April 2025, pemegang saham menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp415.654.077.278,- seluruhnya sebagai cadangan.

Dividend Distribution in 2025 and Chronology of Dividend Distribution
Pursuant to the shareholders resolution at the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year held on April 30, 2025, the shareholders approved and resolved to allocate the net profit attributable to the owners of the Company's parent entity for the 2024 fiscal year in the amount of Rp415,654,077,278.- in full to reserves.

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2018 hingga 2024 adalah sebagai berikut,

The chronology of the distribution and payment of dividends from 2018 to 2024 is as follows:

Tahun Pembagian Distribution Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar) Cash Dividends Distributed (Rp-billion)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)
2025	2024	30 April 2025 April 30, 2025	PTPP tidak membagikan dividen dan dialokasikan seluruhnya sebagai cadangan sesuai keputusan pemegang saham dalam RUPS Tahunan. PTPP did not distribute dividends and has been allocated as undesignated reserves following the shareholders' resolution in the Annual GMS.			
2024	2023	24 April 2024 April 24, 2024				
2023	2022	12 April 2023 April 12, 2023				
2022	2021	5 April 2022 April 5, 2022				
2021	2020	25 Mei 2021 May 25, 2021				
2020	2019	8 Juni 2020 Juni 8, 2020	7 Juli 2020 July 7, 2020	209,33	33,84	22,5
2019	2018	3 Mei 2019 May 3, 2019	29 Mei 2019 May 29, 2019	300,39	48,45	20
2018	2017	30 April 2018 April 30, 2018	25 Mei 2018 May 25, 2018	290,63	46,88	20

Perpajakan dan PNBP Lainnya: Kontribusi Terhadap Negara

Taxation and Other Non-Tax State Revenue (PNBP): Contribution to the State

Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara, melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan data Kementerian BUMN, besaran pajak yang dibayarkan Perusahaan di tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1,76 triliun dan Rp1,29 triliun. Berikut disampaikan tabel kontribusi pajak Perusahaan.

The Company is committed to contributing to the nation by fulfilling its tax obligations. According to data from the SOE Ministry, the Company's tax payments for 2024 and 2025 amounted to Rp1.76 trillion and Rp1.29 trillion respectively. The table below shows the Company's tax contributions.

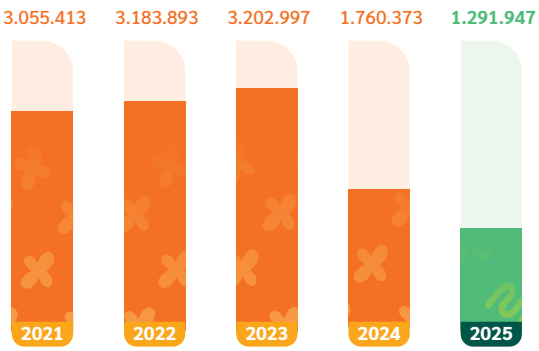
Jenis Pajak Type of Tax	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
1. PPh Ps.4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	201.339	254.048	(52.709)	(20,75)
a. PPh Ps 4 ayat 2 atas Owner Income Tax Article 4 paragraph 2 on Owners	2.789	11.926	(9.137)	(76,61)
b. PPh Ps 4 ayat 2 atas pihak ketiga Income Tax Article 4 paragraph 2 on Third Parties	198.550	242.122	(43.572)	(18,00)
2. PPH Ps 21 Income Tax Article 21	114.441	122.732	(8.291)	(6,76)
3. PPH Ps 22 Income Tax Article 22	51.448	59.217	(7.769)	(13,12)
4. PPH Ps 23 Income Tax Article 23	24.256	23.584	672	2,85
5. PPH Ps 24 Income Tax Article 24	-	1	(1)	-
6. PPH Ps 25 Income Tax Article 25	5.703	4.927	776	15,75
7. PPH Ps 26 Income Tax Article 26	222	136	86	63,24
8. PPH Ps 29 Income Tax Article 29	49.399	2.174	47.225	2.172,26
9. PPH Ps 15 Income Tax Article 15	-	5	(5)	-

Jenis Pajak Type of Tax	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
10. PPN VAT				
a. Total Pajak Keluaran Total Output Tax	27.822	76.648	(48.826)	(63,70)
– Proyek Swasta Private Projects	27.822	76.648	(48.826)	(63,70)
– Proyek Pemerintah Government Projects	-	-	-	-
b. Pajak Masukan Income Tax	798.725	1.200.949	(402.674)	(33,49)
11. PBB Property Tax	9.901	7.873	2.028	25,76
12. BPHTB Land and Building Rights Acquisition Fee	-	-	-	-
13. Pajak Lainnya Other Tax	9.141	8.078	1.063	13,16
Jumlah Pajak yang Dibayarkan **Total Tax Payments**	**1.291.947**	**1.760.373**	**(468.426)**	**(26,61)**

Perkembangan pembayaran pajak yang dipenuhi oleh Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The Company's tax payments over the last five years are shown in the following chart.

Perkembangan Pembayaran Pajak Tahun 2021-2025 (Rp-juta)
Development of Tax Payments in 2021-2025 (Rp-million)



Selain pajak dan dividen seperti yang telah dijelaskan di atas, PTPP tidak menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Apart from taxes and dividends as explained above, PTPP did not remit any other Non-Tax State Revenue (PNBP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

The Use of Proceeds from Public Offering

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Di tahun 2010, PTPP melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. PTPP menerima pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan surat No. S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dan harga penawaran Rp560 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010 sebanyak 4.842.436.500 lembar saham.

Di tahun 2016, PTPP melakukan aksi korporasi berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan melalui Surat Persetujuan No. S-693/D.04/2016 tanggal tanggal 24 November 2016 untuk mengadakan Pencatatan Saham Tambahan melalui HMETD sebanyak 1.357.460.854 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.750 per lembar saham. Dengan demikian, jumlah saham tercatat meningkat dari 4.842.436.500 saham menjadi 6.199.897.354 saham dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia.

Di sepanjang 2025, PTPP tidak memiliki kewajiban terkait pemenuhan Peraturan OJK tentang penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk

Di sepanjang 2025, PTPP tidak memiliki kewajiban terkait pemenuhan Peraturan OJK tentang penggunaan dana hasil penawaran umum penerbitan obligasi dan sukuk.

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering

In 2010, PTPP conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. PTPP received an effective statement from the Bapepam-LK Chairman with letter No. S-858/BL/2010 dated January 29, 2010, to conduct an initial offering to the public of 1,038,976,500 new Series B shares with a nominal value of Rp100 per share and an offering price of Rp560 per share. The shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on February 9, 2010, in a total of 4,842,436,500 shares.

In 2016, PTPP conducted a corporate action in the form of Preemptive Rights (HMETD) or Rights Issue. Approval from the Financial Services Authority (OJK) was granted through Approval Letter No. S-693/D.04/2016, dated November 24, 2016, to conduct Additional Shares Listing through HMETD of 1,357,460,854 shares with a nominal value of Rp100 per share with an exercise price of Rp3,750 per share. Thus, the number of registered shares increased from 4,842,436,500 to 6,199,897,354, and the shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

Throughout 2025, PTPP had no obligations related to compliance with OJK regulations regarding the use of proceeds from public offerings of shares.

Report on the Realization of the Use of Proceeds from Bond and Sharia Bonds Public Offering

Throughout 2025, PTPP had no obligations related to compliance with OJK regulations regarding the use of proceeds from public offerings of bonds and sharia bonds.

Laporan Penggunaan Tambahan PMN

Report on the Use of Additional State Capital Injection (PMN)

Sampai dengan Bulan Maret 2026, Perusahaan belum mendapatkan tambahan dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebelumnya Perusahaan mendapatkan PMN pada tahun 2016, dan sudah terealisasi penggunaannya, sebagaimana telah dilaporkan melalui RUPST Tahun Buku 2022 yang diadakan pada Rabu, 12 April 2023.

As of March 2026, the Company has not received additional funds from State Capital Injection (PMN). Previously, the Company received PMN in 2016, and its use has been fully realized, as reported at the 2022 Fiscal Year AGMS held on Wednesday, April 12, 2023.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/ Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Transactions with Affiliated Parties, and Transactions with Conflicts of Interest

Tidak terdapat informasi material antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, dan transaksi benturan kepentingan yang terjadi di tahun 2025.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, yang dilakukan sebagai transaksi atas kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi ini telah diungkapkan secara rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 53 Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 yang dilampirkan pada Laporan Tahunan ini.

Perusahaan mengadopsi Peraturan OJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang mempersyaratkan keterbukaan informasi dalam laporan tahunan terkait transaksi pihak berelasi/afiliasi. Seluruh transaksi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kepatuhan atas Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tersebut.

Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi terkait dugaan ketidakwajaran atas transaksi yang terjadi maupun dugaan adanya benturan kepentingan.

There is no material information regarding, among other things, investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, debt/equity restructurings, material transactions, and conflict of interest transactions that occurred in 2025.

The Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK 224: Disclosure of Related Parties, which are carried out as part of business activities conducted to generate revenues and are performed on a routine, recurring, and/or ongoing basis. These transactions are conducted based on terms agreed upon by both parties, which may differ from transactions conducted with unrelated parties. These transactions have been disclosed in detail in Note 53 to the 2025 Financial Statements attached to this Annual Report.

The Company has adopted OJK Regulation No. 42/ POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, which requires disclosure of information in the annual report regarding transactions with related/affiliated parties. All transactions referred to above have complied with OJK Regulation No. 42/ POJK.04/2020.

All transactions with related parties were conducted in compliance with applicable laws and regulations. Up to the end of the reporting period, the Company has never received any sanctions related to allegations of irregularities in transactions or allegations of conflicts of interest.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2025.

There was no financial information containing extraordinary or rare events throughout 2025.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Significantly Affect the Company

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Law Number 16 Year 2025 concerning Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Laws and/or Regulations	:	1. Mengatur perubahan atas perubahan nomenklatur, tugas, kewenangan dan lainnya sebelumnya Menteri menjadi Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN/BP BUMN; 2. Penghapusan atas kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, yang kini kepemilikan hanya pada BUMN; 3. Mengatur penguatan tata kelola (*good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 4. Mengatur restrukturisasi, konsolidasi, dan pembentukan *holding/subholding* BUMN; 5. Mengatur peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko dan kepatuhan. 1. Regulates changes to the nomenclature, duties, authorities, and other matters from the previous Minister to the Head of the Regulatory Body (RB)/RB SOE; 2. Elimination of ownership of Series A Dwiwarna shares with special rights in Investment Holding and Operational Holding, which now only has ownership in SOE; 3. Regulates the strengthening of good corporate governance in State-Owned Enterprises (SOEs); 4. Regulates the restructuring, consolidation, and formation of SOE holdings/subholdings; 5. Regulates increased transparency, accountability, and risk and compliance management.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 16 Year 2025 concerning Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises		
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	1. Kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar dan kebijakan internal perusahaan; 2. Kewajiban peningkatan pelaporan kinerja, keuangan, dan kepatuhan kepada pemegang saham; 3. Potensi perubahan struktur organisasi akibat pembentukan *holding/subholding*; 4. Potensi tambahan biaya untuk pemenuhan kepatuhan, audit, dan transformasi tata kelola. 1. Obligations to adjust the company's Articles of Association and internal policies; 2. Obligations to improve performance, financial, and compliance reporting to shareholders; 3. Potential changes to the organizational structure due to the formation of holding/ subholding entities; 4. Additional potential costs for compliance, audits, and governance transformation.
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	1. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel; 2. Memperjelas arah strategis BUMN sebagai entitas bisnis yang kompetitif dan profesional; 3. Mendorong efisiensi dan sinergi antar BUMN melalui pembentukan *holding/subholding*; 4. Memperkuat pengawasan dan peran pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis; 5. Risiko sanksi dan evaluasi kinerja apabila tidak memenuhi prinsip tata kelola dan kepatuhan. 1. Improving the quality of corporate governance to be more transparent and accountable; 2. Clarifying the strategic direction of SOEs as competitive and professional business entities; 3. Encouraging efficiency and synergy between SOEs through the establishment of holding/ subholding units; 4. Strengthening oversight and the role of shareholders in strategic decision-making; 5. Risk of sanctions and performance evaluations for failure to comply with governance and compliance principles;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing		
Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Laws and/or Regulations	:	1. Mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan pendekatan klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi); 2. Menetapkan jenis perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan/atau Izin lainnya; 3. Mengatur penyederhanaan proses perizinan melalui sistem elektronik terintegrasi (*Online Single Submission* (OSS)); 4. Mengatur kewajiban pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk bagi Perusahaan sesuai tingkat risiko; 5. Mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha melalui simplifikasi regulasi dan pengawasan berbasis risiko. 1. Establish a risk-based business licensing system using a risk classification approach for business activities (low, medium, high); 2. Establish types of permits tailored to risk levels, including Business Identification Numbers (BIN), Standard Certificates, and/or other permits; 3. Simplify the licensing process through an integrated electronic system (Online Single Submission (OSS)); 4. Regulate the obligation to meet business and/or product standards for companies based on risk levels; 5. Promote accelerated investment and ease of doing business through regulatory simplification and risk-based supervision.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing

Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	1. Kewajiban perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sebagai identitas pelaku usaha; 2. Kewajiban pemenuhan Sertifikat Standar dan/atau Izin lainnya sesuai tingkat risiko usaha; 3. Kewajiban atas pemenuhan persyaratan dasar yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 4. Kewajiban atas kesesuaian perizinan dan/atau pemenuhan standar sesuai dengan lingkup kegiatan usaha Perusahaan; 5. Kewajiban atas persetujuan bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 6. Kewajiban atas Perizinan Berusaha lainnya untuk menunjang kegiatan usaha; 7. Penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS); 8. Kewajiban pemenuhan standar teknis, operasional, dan/atau lingkungan sesuai klasifikasi risiko; 9. Pengawasan rutin, pemeriksaan terhadap laporan pelaku usaha dan inspeksi atas pemenuhan izin usaha terhadap masing-masing sektor kegiatan usaha; 10. Mengatur sanksi apabila pelaku usaha tidak tunduk dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana PP No. 28/2025 bagi masing-masing sektor pelaku usaha. 1. Obligation to obtain a Business Identification Number (BIN), Business License (BL) and/or Business License to Support Business Activities (BLSBA) as a business actor's identity. 2. Obligation to fulfill Standard Certificates and/or other permits according to the level of business risk. 3. Obligation to fulfill basic requirements, including the Conformity of Spatial Utilization Activities (CSUA), Environmental Approval (EA), Building Construction Approval (BCA), and Certificate of Functional Worthiness (CFW). 4. Obligation to comply with permits and/or meet standards according to the scope of the Company's business activities. 5. Obligation to obtain building approvals and Certificates of Functional Worthiness (CFW). 6. Obligation to obtain other Business Licensing to support business activities. 7. Use of the Online Single Submission (OSS) system. 8. Obligation to fulfill technical, operational, and/or environmental standards according to risk classification. 9. Routine supervision, review of business actor reports, and inspections of business permit compliance for each business sector. 10. Regulating sanctions for business actors who fail to comply and/or commit violations as stipulated in Government Regulation No. 28/2025 for each business sector.
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	1. Meningkatkan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan berusaha; 2. Mempermudah proses perizinan melalui digitalisasi dan integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS); 3. Mendorong Perusahaan untuk lebih patuh terhadap standar operasional, keselamatan, dan lingkungan; 4. Mempercepat proses investasi dan ekspansi usaha karena prosedur yang lebih sederhana; 5. Pengawasan berbasis risiko meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola perusahaan; 6. Perusahaan dengan risiko tinggi akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat dibandingkan risiko rendah; 7. Ketidakpatuhan terhadap pemenuhan standar dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. 1. Increase legal certainty and transparency in the business licensing process; 2. Simplify the licensing process through digitization and integration of the Online Single Submission (OSS) system; 3. Encourage Companies to better comply with operational, safety, and environmental standards; 4. Accelerate investment and business expansion processes through simplified procedures; 5. Risk-based supervision improves accountability and the quality of corporate governance; 6. High-risk companies will face stricter oversight than low-risk companies; 7. Non-compliance with standards can result in administrative sanctions, up to and including business license revocation.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 concerning the Standard Indonesian Business Field Classifications		
Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Laws and/or Regulations	:	1. Mengatur pembaharuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai acuan standar nasional dalam pengelompokan kegiatan usaha; 2. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan International Standard Industrial Classification of All Economics Activities, Revision 5; 3. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan perkembangan ekonomi, digitalisasi, dan sektor industri terbaru. 1. Regulates the 2025 update of the Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) as a national standard reference for grouping business activities; 2. Alignment of the Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) with the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 5; 3. Adjustment of the Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) to the latest economic developments, digitalization, and industrial sectors.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	1. Kewajiban penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sistem OSS dan dokumen legal perusahaan; 2. Tenggat waktu atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. 1. Obligation to adjust the Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) in the OSS system and company legal documents; 2. The deadline for adjusting the 2025 Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC).
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	1. Kewajiban melakukan penyesuaian dan validasi kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; 2. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 oleh Perusahaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PerBPS No. 7/2025 diundangkan; 3. Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dapat berdampak pada ruang lingkup usaha yang diakui secara hukum dan kesesuaian dengan perizinan berbasis risiko. 1. Obligation to adjust and validate business activities in accordance with the 2025 Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC); 2. Companies must adjust the 2025 Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) no later than 6 (six) months after the enactment of PerBPS No. 7/2025; 3. Changes to the Standard Indonesian Business Field Classifications (SIBFC) may impact the scope of legally recognized businesses and compliance with risk-based licensing.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policy and Their Impact on the Company

Di tahun 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap PTPP.

In 2025, there were no changes in accounting policies that impacted PTPP.



Prospek Usaha Tahun 2026

Business Prospect in 2026

Prospek usaha tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh dengan didorong oleh peningkatan anggaran pemerintah serta berbagai agenda prioritas nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, dan perumahan. Pemetaan potensi pasar menunjukkan total peluang mencapai Rp559,1 triliun[1], dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen industri dan hilirisasi, diikuti oleh general civil serta sektor transportasi seperti railway. Namun demikian, tingkat penyerapan pasar perusahaan masih relatif terbatas di beberapa segmen strategis, sehingga diperlukan strategi ekspansi yang lebih agresif dan terarah untuk meningkatkan pangsa pasar. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan APBN 2026 dirancang bersifat ekspansif dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor riil melalui delapan agenda prioritas nasional, antara lain ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Selain itu, peningkatan belanja negara yang mencapai sekitar Rp3.842,7 triliun[2] dengan defisit yang tetap terjaga di kisaran 2,68%[2] PDB menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan disiplin fiskal.

Business prospects in 2026 are expected to continue growing, driven by increased government budgets and various national priority agendas, particularly in the infrastructure, energy, and housing sectors. Market potential mapping indicates a total opportunity of Rp559.1 trillion[1], with the largest contribution coming from the industrial and downstream segments, followed by general civil engineering and transportation sectors such as railways. However, the company's market absorption rate remains relatively limited across several strategic segments, necessitating a more aggressive, targeted expansion strategy to increase market share. In line with this, the policy direction of the 2026 APBN is designed to be expansive, focusing on accelerating economic growth and strengthening the real sector through eight national priority agendas, including food and energy security, infrastructure development, education, health, and accelerating investment and global trade. Furthermore, increased state spending, reaching approximately Rp3,842.7 trillion[2], alongside a maintained deficit of around 2.68%[2] of GDP, demonstrates the government's commitment to balancing economic stimulus and fiscal discipline.

Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi global dan domestik memberikan tantangan sekaligus peluang. Penurunan suku bunga global berpotensi mendorong investasi, namun tetap dibayangi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan sentimen investor. Di dalam negeri, peningkatan belanja negara dan fokus pada sektor prioritas masih menjadi penopang bagi industri konstruksi, meskipun efektivitasnya bergantung pada realisasi anggaran dan kondisi fiskal. Meski demikian, faktor sosial seperti dinamika politik dan kepercayaan investor, serta tekanan terhadap daya beli masyarakat, dapat mempengaruhi realisasi proyek dan permintaan pasar secara keseluruhan.

Externally, global and domestic economic conditions present both challenges and opportunities. The decline in global interest rates has the potential to boost investment, but remains overshadowed by uncertainty due to geopolitical dynamics and investor sentiment. Domestically, increased government spending and a focus on priority sectors continue to support the construction industry, although their effectiveness depends on budget realization and fiscal conditions. However, social factors such as political dynamics and investor confidence, as well as pressure on public purchasing power, can impact project implementation and overall market demand.

Selain itu, perkembangan teknologi dan isu lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan arah strategi perusahaan. Investasi besar pada infrastruktur digital dan AI membuka peluang integrasi teknologi dalam operasional konstruksi, sementara tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan semakin meningkat, terutama dalam proyek energi dan hilirisasi. Dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah yang semakin ketat, khususnya di sektor pertambangan dan energi, menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas teknis, efisiensi operasional, serta kemitraan strategis menjadi kunci untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan di tahun 2026.

Furthermore, technological developments and environmental issues are important factors in shaping company strategy. Significant investments in digital infrastructure and AI are opening up opportunities for technology integration in construction operations, while demands for sustainable development are increasing, particularly in energy and downstream projects. From a regulatory perspective, increasingly stringent government policies, particularly in the mining and energy sectors, require companies to be more adaptive and collaborative. Therefore, strengthening technical capabilities, operational efficiency, and strategic partnerships will be key to seizing opportunities and facing challenges in 2026.

[1]Riset BCI Central, KPMG dan Data Internal Perusahaan
Research by BCI Central, KPMG, and Internal Company Data

[2]Nota APBN 2026, reuters.com
2026 APBN Note, reuters.com

Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026

Strategic Plans and the Company's Performance Projections in 2026

Melihat peluang pasar yang tetap besar di tengah dinamika ekonomi, PTPP merumuskan arah strateginya ke dalam tiga pilar utama, yaitu *Growth Operational Excellence, Managing Business Portofolio Risk*, dan *Financial Recovery.* Strategi *Growth Operational Excellence* difokuskan pada penguatan bisnis konstruksi sebaga*i core business* perusahaan, dengan target peningkatan perolehan kontrak baru, penjualan, serta profitabilitas yang lebih optimal. *Managing Business Portfolio Risk* merupakan Upaya PTPP mengelola portofolio dan melakukan berbagai aksi korporasi dengan mempertimbangkan manajemen risiko yang terukur. Sementara itu, *Financial Recovery* merupakan langkah jangka panjang PTPP dalam rangka melakukan perbaikan kapasitas keuangan melalui divestasi, *asset recycling,* serta perbaikan *Asset and Liability Management* (ALMA).

Seeing the significant market opportunities amid economic dynamics, PTPP has formulated its strategic direction around three main pillars: Growth Operational Excellence, Managing Business Portfolio Risk, and Financial Recovery. The Growth Operational Excellence strategy focuses on strengthening the construction business as the company's core business, with the target of increasing new contract acquisitions, sales, and optimizing profitability. Managing Business Portfolio Risk is PTPP's effort to manage its portfolio and undertake various corporate actions with measurable risk management in mind. Meanwhile, Financial Recovery is PTPP's long-term strategy to improve its financial capacity through divestment, asset recycling, and improvements to Asset and Liability Management (ALMA).

Inisiatif strategis tersebut akan dilanjutkan ke dalam rencana 5 (lima) tahun ke depan periode 2025-2029 dengan kajian berkala. PTPP mengusung visi "Menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat". Strategi ini didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu konstruksi, investasi, dan enablers. Adapun sasaran strategis periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor konstruksi (Gedung, Infrastruktur dan EPC) sebagai inti bisnis;
2. Penyehatan keuangan Perusahaan yaitu dengan strategi streamlining d dengan strategi divestasi, asset recycling dan joint control; dan
3. Strategi enablers didukung oleh penguatan organisasi dan talenta, pengembangan kapabilitas digital dan IT, manajemen risiko yang efisien, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

These strategic initiatives will be continued in the next five-year plan for the period 2025-2029, with regular reviews. PTPP's vision is "To become a leading innovative, excellent, and sustainable contractor, with robust financial foundation". This strategy is supported by three main pillars: construction, investment, and enablers. The strategic targets for the 2025-2029 period are as follows:

1. Strengthening the construction sector (Building, Infrastructure, and EPC) as the core business;
2. Improving the Company's financial soundness through a streamlining strategy, including divestment, asset recycling, and joint control; and
3. The enabler strategy is supported by organizational and talent strengthening, digital and IT capability development, efficient risk management, and the implementation of sustainability principles.

Untuk dapat meningkatkan kinerja sektor konstruksi, PTPP akan memprioritaskan pemenangan proyek di *growth center* (Proyek Digital Infrastructure, *Market Share* Pulau Jawa, Pasar swasta selektif dan CAPEX BUMN), meningkatkan kualitas *leads intelligence* dengan *active sourcing,* memanfaatkan *value engineering,* dan memposisikan diri sebagai kontraktor bangunan hijau untuk mendapatkan premium sesuai dengan tren konstruksi mengarah ke *sustainability*. PTPP juga telah menyiapkan mitigasi risiko dan strategi alternatif untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut. Secara keseluruhan, dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, PTPP diharapkan mampu mencapai pertumbuhan berkelanjutan, kinerja unggul, serta menciptakan nilai tambah optimal bagi pemangku kepentingan.

To improve the performance of the construction sector, PTPP will prioritize winning projects in growth centers (Digital Infrastructure Projects, Java Market Share, selective private markets, and SOE CAPEX), improving the quality of lead intelligence through active sourcing, utilizing value engineering, and positioning itself as a green building contractor to command premiums in line with the trend towards sustainable construction. PTPP has also prepared risk mitigation and alternative strategies to ensure the success of these initiatives. Overall, with a prudent and measured approach, PTPP is expected to achieve sustainable growth, superior performance, and create optimal added value for stakeholders.

Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2025, perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian akibat tekanan inflasi, gejolak nilai tukar mata uang, dan potensi resesi di beberapa wilayah ekonomi utama. Ketidakpastian ini berdampak pada biaya modal, ketersediaan pembiayaan internasional, dan permintaan proyek infrastruktur luar negeri. Perubahan permintaan ekonomi global berimplikasi pada harga material konstruksi yang sensitif terhadap kondisi ekonomi luar negeri.

Secara domestik, perubahan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran pemerintah pada 2025 berdampak pada segmen pasar yang bergantung pada pendanaan APBN dan belanja infrastruktur publik. Penyesuaian alokasi anggaran untuk proyek strategis nasional mempengaruhi *pipeline* proyek baru yang menjadi sumber utama pendapatan. Strategi yang dilakukan oleh PTPP salah satunya adalah dengan berfokus pada penetrasi pasar swasta dan BUMN di luar *market* pemerintah.

Selain itu, perpindahan pemegang saham dari Kementerian BUMN ke Danantara berpotensi membawa implikasi strategis terhadap arah pengelolaan dan tata kelola perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi proyek infrastruktur nasional.

Sementara dari sisi internal, PTPP memanfaatkan teknik *value engineering* untuk memastikan efisiensi desain dan teknik pengerjaan pada proyek, melakukan partnership untuk mendapat *transfer knowledge* dan pembiayaan yang lebih baik, serta mengedepankan *sustainable construction* sebagai nilai tambah.

Pada sisi investasi, PTPP berfokus untuk melakukan investasi secara selektif melalui proses investasi yang diperkuat, menyeimbangkan potensi imbal hasil & pengelolaan risiko, serta mendivestasi aset yang mampu menghasilkan cash sesuai dengan minat investor untuk mempercepat penyehatan keuangan Perusahaan.

Factors Potentially Significantly Impacting Business Continuity in the Last Fiscal Year

In 2025, the global economy continued to face uncertainty due to inflationary pressures, currency exchange rate volatility, and the potential for recession in several major economic regions. This uncertainty affects the cost of capital, the availability of international financing, and demand for overseas infrastructure projects. Changes in global economic demand have implications for construction material prices, which are sensitive to overseas economic conditions.

Domestically, shifts in development policy direction and government budget priorities in 2025 affect market segments reliant on APBN funding and public infrastructure spending. Budget allocation adjustments for national strategic projects influence the pipeline of new projects, which serve as the primary revenue source. One of PTPP's strategies involves focusing on penetrating the private sector and SOEs outside the government market.

Additionally, the transfer of ownership from the SOE Ministry to Danantara has the potential to bring strategic implications for the direction of corporate management and governance by improving operational efficiency and providing alternative financing sources for national infrastructure projects.

Internally, PTPP utilizes value engineering techniques to ensure design efficiency and construction methods in projects, forms partnerships to facilitate knowledge transfer and secure better financing, and prioritizes sustainable construction as a value-added component.

On the investment side, PTPP focuses on making selective investments through a strengthened investment process, balancing potential returns and risk management, and divesting assets capable of generating cash in line with investor interest to accelerate the Company's financial recovery.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha di Tahun 2025, serta Asumsi yang digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Untuk mengelola berbagai potensi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun 2025, Manajemen melakukan penilaian secara komprehensif dengan mengacu pada penerapan manajemen risiko korporasi yang terintegrasi. Dalam proses tersebut, Manajemen menggunakan berbagai variabel pengukuran yang relevan dan dituangkan dalam Manajemen Risiko Korporasi yang terintegrasi.

Selanjutnya, selain hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat faktor lain yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun buku 2025.

Management Assessment of Factors Potentially Significantly Impacting Business Continuity in 2025, and Assumptions Used by Management in Conducting the Assessment

To manage various factors that could have a significant impact on the Company's business continuity in 2025, Management conducted a comprehensive assessment based on the implementation of an integrated corporate risk management framework. In this process, Management utilized various relevant measurement variables, which are incorporated into the integrated corporate risk management framework.

Furthermore, aside from the matters disclosed above, Management states that there are no other factors that could potentially have a significant impact on the Company's business continuity in the 2025 fiscal year.

Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang

Business Roadmap: Long-Term Plans

Dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2025-2029, tercantum bahwa PTPP memiliki visi "Menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat". Untuk mencapai visi tersebut, PTPP membentuk *framework strategy* yang berisikan Visi sebagai hal yang ingin dicapai, tujuan strategis dan metrik utama sebagai ukuran kuantitatif dari Visi yang ada, serta 9 pilar strategis yang akan dilakukan PTPP agar dapat mencapai Visi yang diinginkan.

The Corporate Long-Term Plan (RJPP) for the 2025–2029 period states that PTPP's vision is "To be an innovative, superior, and sustainable contractor of first choice supported by sound finance". To achieve this vision, PTPP has established a strategic framework comprising the Vision as the desired outcome, strategic objectives and key metrics as quantitative measures of the Vision, as well as nine strategic pillars that PTPP will implement to achieve the desired Vision.

10 Strategi Jangka Menengah dan Jangka Panjang PTPP

Ten Medium-Term and Long-Term Strategies of PTPP

A. Konstruksi | *Construction*

1. ***Grow Buildings***
   Ekspansi bisnis Gedung dengan inovasi teknologi dan standar sustainability di sentra pertumbuhan baru
   Business expansion of Buildings with technological innovation and sustainability standards in new growth centers
2. ***Elevate Infrastructure***
   Pengembangan bisnis infra lewat pasar konektivitas strategis dengan inovasi teknologi dan standar sustainability
   Infrastructure business development through strategic connectivity markets with technological innovation and sustainability standards
3. ***Refocus EPC***
   Pengembangan bisnis EPC secara selektif sesuai kapasitas dan pengelolaan risiko
   Selective EPC business development according to capacity and risk management

B. Investasi | *Investment*

4. ***Orchestrate Corporate Action & Portfolio Management***
   Penyehatan portofolio bisnis (restrukturisasi) dan identifikasi sinergi pasca klasterisasi
   Business portfolio restructuring and identification of synergies after clustering
5. ***Strengthen Investment & Cash Management***
   Penguatan peran cash office dan proses investasi
   Strengthening the role of the cash office and the investment process

C. *Enablers*

6. ***Enhance Organization & Talent***
Optimalisasi manajemen dan kapabilitas organisasi
Optimization of management and organizational capabilities

7. ***Advance Digital & Technology***
Inovasi teknologi dan penguatan manajemen IT
Technological innovation and strengthening of IT management

8. ***Intensify Risk Management***
Penguatan pengendalian risiko dan penerapan all-in-profitability
Strengthening risk control and applying all-in-profitability

9. ***Embody Sustainability***
Peningkatan sustainability rating dan penerapan prinsip keberlanjutan di operasi konstruksi & korporasi
Improving sustainability rating and applying sustainability principles in construction & corporate operations

Untuk mencapai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, PTPP akan melakukan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan. Tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa *milestones*, antara lain:

1. *Milestones* Jangka Pendek: *Secure The Base;*
2. *Milestones* Jangka Menengah: *Fix The Foundation;*
3. *Milestones* Jangka Panjang: *Cement the Growth.*

To achieve the short-term, medium-term, and long-term plans, PTPP will conduct gradual and sustainable development. The stages are divided into several milestones, among others:

1. Short-Term Milestones: Secure The Base;
2. Medium-Term Milestones: Fix The Foundation;
3. Long-Term Milestones: Cement the Growth.

2024 ***Secure*** *The Base*	2025 - 2026 ***Fix*** *The Foundation*	2027 - onward ***Cement*** *The Growth*
• ***Execute high-impact corp. action*** Fokus pada divestasi dan restrukturisasi entitas anak perusahaan untuk memperbaiki posisi keuangan. Focus on divestment and restructuring of subsidiaries to improve financial position.	• ***Aim for a focused & synergized portfolio*** Menyesuaikan portofolio bisnis dengan menargetkan sektor konstruksi dan infrastruktur sebagai core business utama. Adjust the business portfolio by targeting the construction and infrastructure sectors as the main core business. • ***Build concentrated play with calculated risk*** Mengambil proyek dengan perhitungan risiko yang matang, termasuk optimalisasi proyek EPC dan diversifikasi sumber pendapatan. Take on projects with careful risk calculations, including EPC project optimization and diversification of revenue sources. • ***Foster innovation & sustainability*** Meningkatkan adopsi teknologi, mengembangkan SDM, serta mengimplementasikan standar SCOR untuk efisiensi rantai pasok. Increase technology adoption, develop human resources, and implement SCOR standards for supply chain efficiency.	• ***Aggressively grow core construction business*** Memperkuat bisnis inti dengan target proyek strategis di sektor infrastruktur dan energi. Strengthen the core business by targeting strategic projects in the infrastructure and energy sectors. • ***Enhance human & IT capability*** Mengembangkan kapabilitas SDM, digitalisasi proses bisnis, dan peningkatan sistem manajemen proyek. Develop HR capabilities, digitize business processes, and improve project management systems. • ***Strengthen cash management*** Mengoptimalkan pengelolaan *cash flow* dan strategi keuangan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Optimize cash flow management and financial strategies to support long-term growth.
Immediate Priority ***(2024)***	*Short - Medium Term Priority* ***(2025-2026)***	*Medium - Long-term Priority* ***(2027-2029)***

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance




PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
PP
PP

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PTPP

Development of Good Corporate Governance Implementation in PTPP

Dasar-dasar dan Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus sebagai Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PTPP berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di samping itu, sebagai BUMN yang menjadi agen pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, PTPP terus melakukan penyempurnaan sistem tata kelola Perusahaan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam hal kinerja dan kemampuan berorganisasi serta dalam rangka memastikan pemenuhan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Basis and Commitment to Implementing Governance Principles

As a State-Owned Enterprise (SOE) and Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), PTPP is fully committed to implementing GCG principles as a foundation for creating sustainable added value for the stakeholders, both in the short and long term. In addition, as an SOE that is an agent of development for Indonesia's economic growth, PTPP continues to improve its corporate governance system to achieve higher performance and organizational ability and to ensure the fulfillment of stakeholders' aspirations.

Tujuan, Manfaat dan Sasaran Penerapan GCG

Tujuan penerapan GCG di lingkup Perusahaan selaras dengan tujuan penerapan GCG di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
3. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional melalui kinerja optimal Perusahaan.

Targets, Benefits, and Objectives of GCG Implementation

The objectives of GCG implementation within the Company conform with the objectives of GCG implementation in State-Owned Enterprises (SOE) as stated in the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as follows:

1. Optimizing the Company's values to earn strong competitiveness, both nationally and internationally, to maintain its existence and sustainably to achieve the Company's goals and objectives;
2. Encouraging professional, efficient, and effective management, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's organs;
3. Encouraging the Company's organs to make decisions and carry out actions based on high moral values, compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increasing the Company's contribution to the national economy; and
5. Improving a conducive climate to develop national investment through optimum performance.



Tujuan penerapan GCG di lingkungan BUMN tersebut selaras dengan penerapan GCG di lingkup Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Tujuan dan manfaat penerapan GCG PTPP adalah:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai saham jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya;
2. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
5. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
6. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan PTPP berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

The purposes of GCG implementation in the SOE environment conform with its implementation in the Company, aiming at increasing business results and providing added value for Shareholders and stakeholders to achieve the Company's vision and mission.

The objectives and benefits of GCG implementation by PTPP are:

1. Achieving maximum growth and yields that will increase the Company's welfare, as well as realizing the value of the long-term shares without neglecting the interests of other Stakeholders;
2. Supporting the Company's internal control and development activities;
3. Managing resources more reliably;
4. Improving accountability to the stakeholders;
5. Improving the Company's work culture; and
6. Creating a value-added company that improves the welfare of all PTPP employees and increases the benefits for the Company's stakeholders.

Penerapan GCG di lingkup PTPP memiliki sasaran, yaitu:

1. Terlaksananya sistem manajemen strategi yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan rencana strategi (*strategic plan*) Perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Adanya keterbukaan serta komunikasi dua arah baik dengan regulator, pelaku pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Berfungsinya dengan baik organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Ditegakkannya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;
6. Dipastikannya seluruh jajaran Perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui sanksi dan penghargaan; serta
7. Ditegakkannya kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan.

The objectives of GCG implementation in the Company are as follows:

1. Implemented reliable strategy management to be able to formulate Vision, Mission, Targets, and Objectives that are in line with both Company's short-term and long-term strategic plans;
2. Openness and two-way communication with the regulators, capital market players, and other stakeholders;
3. Supporting organs function properly for the Company's internal control and development activities;
4. Enforced commitments and rules of conduct for ethical business conduct;
5. The availability of human capital that is reliable, superior, professional, and free from conflicts of interest;
6. Ensuring that all levels of the Company understand and can carry out their duties, obligations, and responsibilities following the applicable regulations and acknowledge the sanctions and awards; and
7. Upholding concern for the surrounding community and environmental sustainability.

Prinsip Dasar GCG: Komitmen dan Penerapannya

Dalam menerapkan GCG, PTPP terus melakukan perbaikan internal dengan mengadopsi standar *best practice* dari korporasi-korporasi unggulan dan menyesuaikan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atas tata kelola perusahaan. Sebagai BUMN, PTPP juga telah merespon dan menindaklanjuti penerapan GCG mengacu pada Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

GCG Basic Principles: Commitment and Implementation

In implementing GCG, PTPP continues to make internal improvements by adopting best practice standards from leading corporations and adjusting to changes in laws and regulations on corporate governance. As an SOE, PTPP has also responded to and followed up on the implementation of GCG, referring to SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In addition, the Company refers to the SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Prinsip-prinsip GCG
GCG Principles



Esensi dari 5 (lima) prinsip di atas adalah peningkatan kinerja Perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

The essence of these five principles is the Company's performance improvement through monitoring management performance and management accountability to the stakeholders, according to the applicable rules and regulations.

Prinsip Transparansi

Pendekatan
Perusahaan menjamin ketersediaan akses informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini senantiasa mendapatkan perhatian Perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak-hak para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di lingkup PTPP
- Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan;
- Proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi telah dilaksanakan melalui rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris;
- Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan dan mendapat persetujuan melalui mekanisme Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris;
- Perusahaan telah memiliki sistem teknologi informasi *online* yang *real time* guna mempercepat akses informasi;
- Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran disajikan melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia dan disajikan dalam situs web Perusahaan; dan
- Seluruh kebijakan Perusahaan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan Perusahaan.

Transparency Principle

Approach
The Company ensures that accurate and timely access to relevant information is provided to the Shareholders and other stakeholders. This has been important for the Company in fulfilling the rights of the Shareholders and other stakeholders.

Implementation in PTPP
- The decision-making process by Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) has met the requirements of the Company's Articles of Association;
- The decision-making process by the Board of Commissioners, as the supervisor and advisor to the Board of Directors, has been carried out through internal Board of Commissioners meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- The decision-making process of the Board of Directors to manage the Company has been carried out and approved through Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- The Company already has a real-time online information technology system to accelerate access to information;
- Annual Financial Statements and Annual Reports are presented in two languages and are available on the Company's website; and
- All of the Company's policies have been written down and communicated to all stakeholders through communication channels provided by the Company.

Prinsip Akuntabilitas

Pendekatan
Perusahaan telah mengatur kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dari masing-masing organ Perusahaan sehingga seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar guna terealisasinya kinerja yang berkesinambungan.

Penerapan di lingkup PTPP
- Perusahaan telah memiliki Struktur Organisasi, *Job Description* untuk masing-masing *Job Title* dan penilaian *Key Performance Indicator* untuk Direksi, Kepala Unit kerja dan masing-masing karyawan;
- Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan telah di breakdown kepada seluruh unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya;
- Manajemen telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mempertanggungjawabkan kegiatannya secara transparan setiap triwulan;
- Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan tahunan atas Laporan Keuangan;
- Manajemen telah memberikan pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan dan mendapat persetujuan dalam RUPS Tahunan; dan
- Perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran.

Accountability Principle

Approach
The Company has arranged the clarity of functions, structure, systems, and accountability of every Company organ so that all of the Company's business and operational activities run effectively and efficiently and can be accounted for transparently and fairly to realize sustainable performance.

Implementation in PTPP
- The Company has an Organizational Structure and Job Description for every Job Title and Key Performance Indicator assessment for the Board of Directors, Head of Work Units, and every employee;
- The Company has an Annual Work Plan and Budget approved by the Board of Commissioners and broken down to all work units as a reference in carrying out their tasks annually;
- Management has transparently carried out its duties and responsibilities and accounted for its activities every quarter;
- The external auditor has conducted an annual audit of the Financial Statements;
- Management has given responsibility for the Annual Report and received approval at the Annual GMS; and
- The Company awards employees who excel and sanctions those who commit violations.

Prinsip Responsibilitas

Pendekatan
Perusahaan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya sehari-hari guna terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kondusif. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat, Perusahaan juga senantiasa menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penerapan di lingkup PTPP
- Perusahaan memiliki Anggaran Dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Pendanaan UMK sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- Manajemen dan seluruh karyawan selalu bersikap *prudent* sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan;
- Audit kepatuhan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan setiap tahun;
- Perusahaan telah berkontribusi bagi masyarakat di lingkungan sekitar melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam batas kewajaran dan kepatutan; dan
- Seluruh Karyawan dan Manajemen telah menandatangani pakta integritas untuk tunduk kepada Kode Etik dan etika bisnis yang telah ditetapkan.

Responsibility Principle

Approach
The Company constantly complies with the applicable laws and regulations in carrying out its daily business and operational activities to create a healthy and favorable business climate. In addition, as part of the community, the Company continues to carry out its social responsibilities towards the community and the environment.

Implementation in PTPP
- The Company has Articles of Association, GCG infrastructure, Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) and SME Funding Programs as the basis for carrying out its duties;
- The management and all employees are always prudent in following the risk management policies and ensuring that their duties are in line with the regulations;
- Compliance audit by an External Auditor is conducted annually;
- The Company has contributed fairly and properly to the surrounding community through the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL); and
- All Employees and Management have signed an integrity pact to comply with the established Code of Conduct and business ethics.

Prinsip Independensi

Pendekatan
Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan tugas, kewajiban serta wewenang dari masing-masing organ Perusahaan senantiasa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari organ-organ Perusahaan lainnya maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan di lingkup PTPP
- Perusahaan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- Perusahaan memiliki nilai-nilai Perusahaan sesuai dengan *core value* BUMN;
- Masing-masing organ Perusahaan yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan peranannya tanpa intervensi dan dominasi pihak lain;
- Hasil asesmen dari penerapan GCG PTPP selalu meningkat dari tahun ke tahun;
- Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional dan independen; dan
- Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi *check and balances* melalui komunikasi formal berupa rapat, surat tanggapan serta surat persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

Independence Principle

Approach
The Company ensures that the implementation of duties, obligations, and authorities of each organ of the Company always runs well without any intervention from other organs of the Company or other parties that are not following applicable laws and regulations.

Implementation in PTPP
- The Company has a conflict of interest policy;
- The Company has corporate values in line with SOE core values;
- All Company organs, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors, have carried out their roles without the intervention and domination of other parties;
- The assessment results from GCG implementation have improved from year to year;
- Shareholders have delegated part of their authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to encourage professional and independent Company management; and
- The Board of Commissioners and Board of Directors have conducted the check and balances function through formal communication in the form of meeting, response letters, and letters of approval from the Board of Commissioners regarding proposals submitted by the Board of Directors.

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan	Fairness and Equality Principles
Pendekatan Perusahaan tidak melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Approach** The Company does not discriminate and ensures the protection of the rights of Shareholders and stakeholders according to the applicable laws and regulations.
Penerapan di lingkup PTPP • Perusahaan telah memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan; • Perusahaan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; • Perusahaan memberikan perlakuan yang proporsional kepada seluruh mitra kerja; dan • Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (*website*) dan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*).	**Implementation in PTPP** • The Company has regulations that govern the rights and obligations relating to all stakeholders; • The Company has an operational technical policy to provide services to all stakeholders through the ISO 9001:2015 Quality Management System; • The Company provides proportial treatment to all business partners; and • The Company allows all stakeholders to express their opinions through meeting forums, electronic communication channels (websites), and the Whistleblowing System.

Perjalanan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Development of Good Corporate Governance Implementation



Orientasi GCG GCG Orientation			
Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan GCG. Comply with all provisions and regulations related to GCG.	Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui *internal control* yang wajar dan implementasi manajemen risiko. Properly controlled operations with reasonable internal control and implementation of risk management.	Menjadi Perusahaan yang berwarga masyarakat yang amanah, profesional dan dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Beome a trustworthy, professional, and civic-minded company that implements corporate social responsibility.	Menjadi Perusahaan yang berwarga masyarakat yang amanah, profesional dan dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Become a trustworthy, professional, and civic-minded company that implements corporate social responsibility.
Parameter			
Penyusunan GCG Manual dan Kode Etik Perusahaan pada tahun 2004. Preparation of the GCG Manual and the Company's Code of Conduct in 2004.	Pengoptimalan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika. Optimizing the structure of GCG Ethics manager and Ethics supervisor.	Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Consistently and continuously improving GCG implementation in the Company's activities.	Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Consistently and continuously improving GCG implementation in the Company's activities.

Tahap 1 | Phase 1 2004-2010	Tahap 2 | Phase 2 2011-2013	Tahap 3 | Phase 3 2014-2017	Tahap 4 | Phase 4 2018-Sekarang 2018-present
Corporate Governance Commitment	*Good Governed Company*	*Good Sustainability Company*	*Good Sustainability Citizenship*
Penyempurnaan GCG Manual tahun 2008, 2010 dan Kode Etik Perusahaan tahun 2008, 2010 dan 2012. Completing the GCG Manual in 2008 and 2010 and the Company's Code of Conduct in 2008, 2010, and 2012.	Penyempurnaan Penyusunan Pedoman/Kebijakan GCG, *Board Manual*, Kode Etik Perusahaan, dan Anggaran Dasar. Improving the Drafting of GCG Guidelines/Policies, Board Manuals, Code of Conduct, and Articles of Association.	Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG: • Hubungan Korporasi dengan Anak Perusahaan; • *Charter* Komisaris; • *Charter* Direksi; • *Charter* Komite; • Kebijakan Manajemen Risiko; dan Kebijakan Teknologi Informasi. Drafting GCG policies and improvements: • Corporate Relations with Subsidiaries; • Board of Commissioners Charter; • Board of Directors Charter; • Committee Charter; • Risk Management Policy; and • Information Technology Policy.	Mencapai di atas 85 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Exceeding 85 with an "Excellent" qualification.
Internalisasi dan penandatanganan pakta integritas dan Etika Kerja. Internalization and signing of the integrity pact and Work Ethics.	Penyusunan Prosedur Program Kerja Tahunan SPI Berbasis Risiko. Drafting of Procedures for the Risk-Based SPI Annual Work program.	Memonitor, mengevaluasi dan menyempurnakan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan. Monitoring, evaluating, and improving the structure of GCG Ethics manager and Ethics supervisors following the Company's development.	Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG: • Hubungan Korporasi dengan Anak Perusahaan; • *Charter* Komisaris; • *Charter* Direksi; • *Charter* Komite; • Kebijakan Manajemen Risiko; • Kebijakan Teknologi Informasi; dan • Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Drafting and improving GCG-related policies: • Corporate Relations with Subsidiaries; • Commissioner Charter; • Board of Directors Charter; • Committee Charter; • Risk Management Policy; • Information Technology Policy; and • Anti-Bribery Management System Policy.

Tahap 1 | Phase 1 2004-2010	Tahap 2 | Phase 2 2011-2013	Tahap 3 | Phase 3 2014-2017	Tahap 4 | Phase 4 2018-Sekarang 2018-present
Corporate Governance Commitment	*Good Governed Company*	*Good Sustainability Company*	*Good Sustainability Citizenship*
Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2007. Establishment of Corporate Secretary in 2007.	Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang mengadopsi pada konsep dan praktik terbaik saat ini, yaitu *Internal Control- Integrated Framework* oleh The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO). Drafting the General Guidelines for the Company's Internal Control System, which adopts the current concepts and best practices, i.e., the Internal Control–Integrated Framework by the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO).	Penyempurnaan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali. Improvement of self-assessment implementation of GCG application every two years.	Memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan. Monitor, evaluate, and improve the management structure of Business Ethics and Work Ethics, as well as supervise the Code of Conduct following the development of the Company.
Terbentuknya sistem pengendalian *intern* yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko. The establishment of an internal control system according to information technology and risk management.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pengendalian *Intern*. Drafting of Guidelines for the Implementation of Internal Control System Evaluation.	Target capaian hasil *assessment* GCG mencapai di atas 85 dengan kualifikasi sangat baik. The target of GCG assessment results exceeds 85 with an excellent qualification.	Penyempurnaan penerapan GCG di PTPP dengan membentuk Tim *Counterpart*/ Tim Agen dari masing-masing divisi terkait, untuk mempermudah proses *assessment* maupun *self-assessment* penerapan GCG. Improvement of GCG implementation in PTPP by forming a Counterpart Team/ Agent Team from every related division to simplify the GCG implementation assessment or self-assessment process.
Pelaksanaan assessment GCG secara berkala, dengan hasil sebagai berikut: Tahun 2004 = 75,89 Tahun 2005 = 78,46 Tahun 2006 = 79,38 Tahun 2007 = 80,19 Tahun 2009 = 82,62 Periodic GCG assessment is as follows: 2004 = 75.89 2005 = 78.46 2006 = 79.38 2007 = 80.19 2009 = 82.62	Penyempurnaan Sistem Manajemen Terintegrasi QHSE. Improving the QHSE Integrated Management System.		Mempertahankan capaian hasil *assessment* GCG mencapai di atas 85 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Maintaining GCG assessment results exceeds 85 with an excellent qualification.
Capaian hasil *assessment* GCG pada tahun 2009 adalah 80,62 dengan kualifikasi "Baik". The result of the 2009 GCG assessment was 80.62 with a "Good" qualification.	Capaian hasil *assessment* GCG tahun 2013 adalah 84,14 dengan kualifikasi "Baik". The result of the 2013 GCG assessment was 84.14 with a "Good" qualification.	Capaian *hasil assessment* GCG tahun 2017 adalah 92,77 dengan kualifikasi "Sangat Baik". The result of the 2017 GCG assessment was 92.77 with a "Excellent" qualification.	Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, mengenai penggantian Indikator Penilaian GCG BUMN. Consultation with relevant parties regarding the replacement of SOE GCG Assessment Indicators.

Tahap 1 | Phase 1 2004-2010	Tahap 2 | Phase 2 2011-2013	Tahap 3 | Phase 3 2014-2017	Tahap 4 | Phase 4 2018-Sekarang 2018-present
Corporate Governance Commitment	*Good Governed Company*	*Good Sustainability Company*	*Good Sustainability Citizenship*
			Berupaya mencapai praktik GCG terbaik dan berkelanjutan, dengan berfokus pada *improvement* terhadap tata kelola yang berkelanjutan. Striving to achieve the best and most sustainable GCG practices, with a focus on improvement in sustainable governance.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025 dan Rencana Pengembangan Tahun 2026

Rencana dan realisasi program kerja GCG tahun 2025 serta program kerja untuk tahun 2026 dapat dilihat di bawah ini.

Good Corporate Governance Implementation Progress in 2025 and 2026 Plan

The plan and realization of the GCG work program for 2025 and the work program for 2026 is available below.

Realisasi Program Kerja Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026

Realization of 2025 Work Plan and 2026 Plan

No.	Program Kerja 2025 2025 Work Program	Realisasi 2025 2025 Realization	Keterangan/Gap Description/Gap	Program Kerja 2026 2026 Work Program
1	Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai penggantian Indikator Penilaian GCG Khusus BUMN. Coordinate and consult with related parties regarding the replacement of SOE GCG Assessment Indicators.	Masih belum ada Indikator Penilaian GCG BUMN, dikarenakan terdapat beberapa regulasi terbaru terkait UU BUMN serta pembentukan Danantara. There are still no SOE GCG Assessment Indicators, due to several recent regulations related to the SOE Law and the establishment of Danantara.	*Continue*	Intens melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai penggantian Indikator Penilaian GCG Khusus BUMN. Intensively coordinate and consult with relevant parties regarding the replacement of the Special GCG Assessment Indicators for SOEs.
2	Melakukan kajian pedoman dan dokumen terkait implementasi GCG yang telah disesuaikan dengan regulasi dan proses bisnis Perusahaan. Review the guidelines and documents related to GCG implementation that have been adapted to the Company's regulations and business processes.	Pada tahun 2025, terdapat pembaharuan atas beberapa infrastruktur GCG antara lain *Company Manual* Sistem Pengendalian Internal Perusahaan. In 2025, several GCG infrastructures were updated, including the Company Manual and the Company Internal Control System.	-	Me-*review* Pedoman dan dokumen terkait implementasi GCG yang telah disesuaikan dengan regulasi dan proses bisnis Perusahaan. Review the Guidelines and documents related to the implementation of GCG that have been adjusted to the Company's regulations and business processes.

No.	Program Kerja 2025 2025 Work Program	Realisasi 2025 2025 Realization	Keterangan/Gap Description/Gap	Program Kerja 2026 2026 Work Program
3	Melakukan sosialisasi GCG dan infrastruktur pendukungnya. Dissemination of GCG and its supporting infrastructure.	Sosialisasi telah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, melalui aplikasi LMS sesuai memo No. 368/M/PP/HCM/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Outreach has been carried out in conjunction with the dissemination of the Anti-Bribery Management System, through the LMS app per memo No. 368/M/PP/HCM/2025 dated August 27, 2025.	*Continue*	Melakukan sosialisasi GCG dan infrastruktur pendukungnya. Conducting outreach on GCG and its supporting infrastructures.
4	Melakukan survei pemahaman GCG dan infrastruktur pendukungnya. A survey of GCG understanding and its supporting infrastructure.	*Survey* pemahaman telah dilakukan bersamaan dengan survey pemahaman tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, melalui aplikasi LMS sesuai memo No. 368/M/PP/HCM/2025 tanggal 27 Agustus 2025. An understanding survey has been conducted in conjunction with the Anti-Bribery Management System understanding survey, through the LMS app per memo No. 368/M/PP/HCM/2025 dated August 27, 2025.	*Continue*	Melakukan survei pemahaman GCG dan infrastruktur pendukungnya. Conducting surveys on the understanding of GCG and its supporting infrastructure.
5	Melakukan asesmen ACGS tahun buku 2024. Conduct ACGS Assessment for Fiscal Year 2024.	Telah dilakukan *assessment* ACGS, bekerja sama dengan Pihak Independen dan sudah menggunakan kriteria terbaru yang telah memperhitungkan unsur Keberlanjutan. An ACGS assessment has been conducted in collaboration with an independent party, using the latest criteria that account for sustainability factors.	*Continue*	Melakukan asesmen ACGS tahun buku 2025. Conducting an ACGS assessment for the 2025 fiscal year.
6	Menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen ACGS. Following up on the Area of Improvement results of the ACGS Assessment.	Terhadap beberapa *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen ACGS telah ditindaklanjuti. Several Areas of Improvement (AoIs) identified in the ACGS assessment have been followed up on.	*Continue*	Menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen ACGS. Following up on the Areas of Improvement (AoI) identified in the ACGS assessment.
7	Berusaha mengikuti dan memenangkan penghargaan terkait penerapan GCG. Attempting to participate and win awards related to the implementation of GCG.	Pada tahun 2025, Perusahaan telah berhasil meningkatkan klasipikasi atas capaian hasil KIP menjadi "Informatif". In 2025, the Company successfully improved the KIP results classification to "Informative."	-	Berusaha mengikuti dan memenangkan penghargaan terkait penerapan GCG. Striving to participate in and win awards related to the implementation of GCG.

Struktur, Proses/Mekanisme, serta Hasil dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PTPP

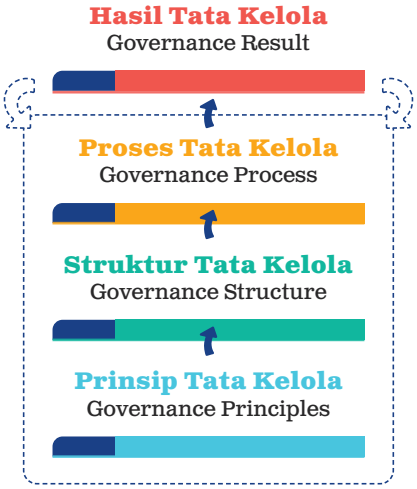
Structure, Process/Mechanism, Results, and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance at PTPP

Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* di lingkup Perusahaan terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Kedua aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

Governance Structure and Process/ Mechanism

The implementation of Governance Principles within the Company consists of two main aspects: Governance Structure and Governance Process. These two aspects are sustainable with each other, which in turn will reflect the Governance Outcome as expected.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

The Governance Structure consists of organs or instruments possessed by the Company that are established to comply with the applicable laws and regulations or to meet the internal needs to improve GCG implementation. Meanwhile, the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the Company's overall management. The Governance Process includes laws and regulations that apply to the Company, Permanent Procedures, Charters, documents, and regulations that govern the relationship between organs or instruments.

Struktur Tata Kelola Perusahaan memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan penerapan Prinsip Tata Kelola. Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur

The Company's Governance Structure has several main aspects that support the strengthening of control and management of the Company following the objectives of applying the Governance Principles. Per Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the organizational

keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan.

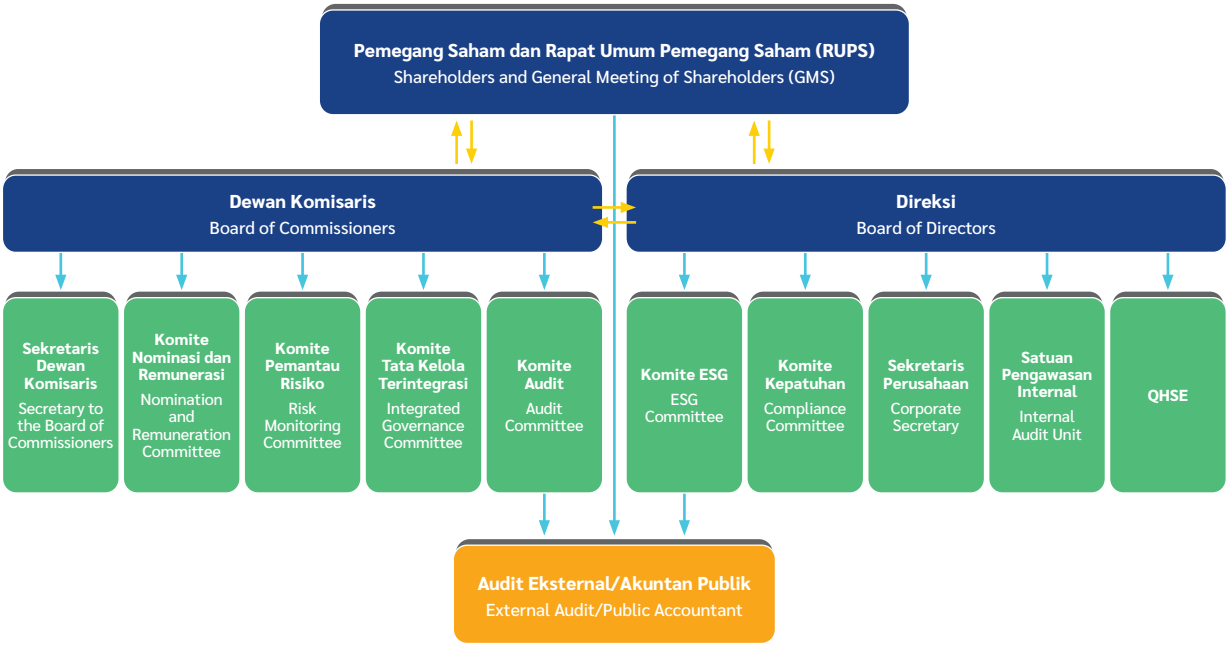
Berikut digambarkan Struktur Tata Kelola PTPP beserta kelengkapannya.

infrastructure of a Limited Liability Company covers the interests of Shareholders as outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS); Board of Directors with its duties to manage; and the Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of a Limited Liability Company adheres to a two-body or two-tier system model, in which the Board of Commissioners and Board of Directors have distinct authority and responsibilities according to their respective functions as mandated in laws and regulations as well as the Articles of Association.

The Company has three main organs: GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for maintaining long-term business continuity. The Board of Commissioners and Board of Directors must have a common perception of the Company's vision, mission, core values, and culture.

The following chart describes PTPP Governance Structure and its organs.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure



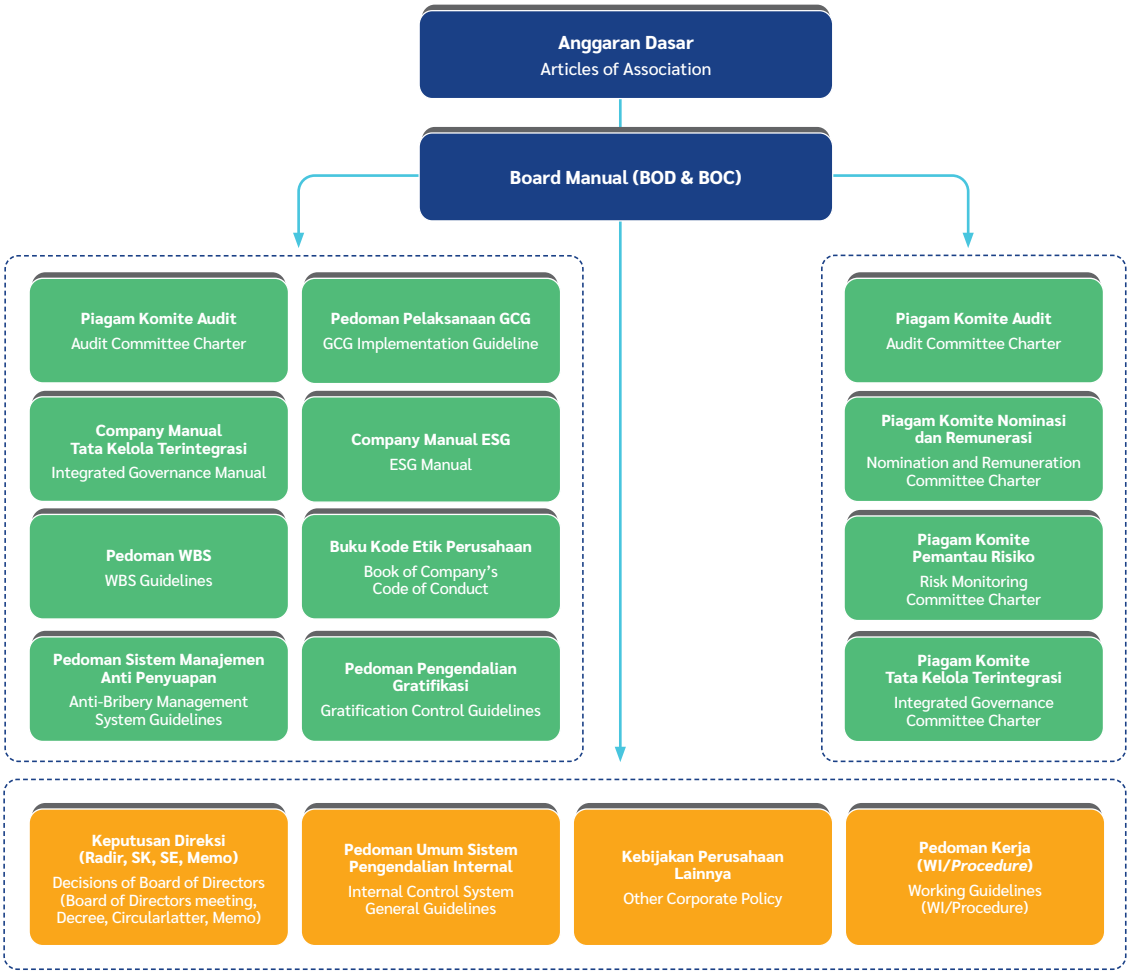
Agar Struktur Tata Kelola di atas dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan Proses Tata Kelola atau Mekanisme Tata Kelola seperti peraturan dan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

For the above Governance Structure to run well and have its respective responsibility boundaries, a Governance Process or Governance Mechanism, such as laws and regulations as previously described, is necessary, along with a set of internal rules that are expected to establish a Company organization with accountable management as its basis.

Hirarki kebijakan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat digambarkan seperti di bawah ini:

The Company's policy hierarchy, according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, can be described as follows:

Proses atau Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process or Mechanism



Perusahaan telah menyusun, menerapkan dan memperbaharui Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap, meliputi antara lain:

The Company has prepared, implemented, and updated its Policies, Rules, and Permanent Procedures, among others:

Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Policies, Guidelines, and Procedures	Diterbitkan Issued	Dimutakhirkan Terakhir Latest Update
Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association	1973	2023
Pedoman GCG (*Board Manual* & *Corporate Manual*) GCG Code (Board Manual & Corporate Manual)	2004	2021
Buku Kode Etik Perusahaan Book of Code of Conduct	2005	2022
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Board of Commissioners Manual	2015	2023
Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi Board of Directors Manual	2021	2021

Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Policies, Guidelines, and Procedures	Diterbitkan Issued	Dimutakhirkan Terakhir Latest Update
Pedoman *Whistleblowing System* Whistleblowing System Guideline	2013	2022
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	2015	2024
Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan General Guideline for the Internal Control System	2015	2025
Prosedur Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	2004	2025
Company Manual/Sistem Manajemen Terintegrasi Company Manual/Integrated Management System	2011	2023
Kontrak Manajemen (KPI) Management Contract (KPI)	2012	2025
Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) Internal Supervisory (SPI) Charter	2002	2025
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter Risk Monitoring Committee Charter	2025	2025
Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	2025	2025
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	2016	2023
Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Charter	2025	2025
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Berbasis Risiko Risk-Based SPI Annual Audit Work Program	2013	2025
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) & Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) Company's Long-term Plan (RJPP) & Annual Work Plan and Budget (RKAP)	2002	2025
SK Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Board of Directors Decree on State Official Wealth Report	2017	2023
Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan Subsidiary Governance Guidelines	2019	2019
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berubah menjadi *Company Manual* Sistem Manajemen Anti Kecurangan The Anti-Bribery Management System Guidelines Have Been Revised into the Anti-Fraud Management System Manual	2023	2025

Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Hasil Tata Kelola, atau *Governance Outcome*, merupakan keluaran dari penerapan Struktur dan Proses Tata Kelola, baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktik-praktik yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Untuk dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas Hasil Tata Kelola, Perusahaan memiliki mekanisme asesmen atau penilaian penerapan GCG secara periodik.

Governance Outcome: Evaluation, Monitoring, and Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Governance Outcome is an output from implementing Governance Structure and Process, both from the aspects of performance results and methods/practices used in the process. To get an overview of the Governance Outcome quality, the Company has a periodic GCG Assessment mechanism.

Capaian Penerapan GCG Tahun 2025

GCG Implementation Achievements in 2025



Penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten mendorong peningkatan *score* ACGS mencapai 101,69 dengan predikat *Leadership in Corporate Governance* atau level 5 (>100), yang artinya praktik yang dilakukan Perusahaan telah melampaui kinerja yang disyaratkan dan merupakan emiten terdepan (*leader*) dalam penerapan GCG.

The consistent implementation of Good Corporate Governance has driven an increase in the ACGS score to 101.69, with the title of Leadership in Corporate Governance or level 5 (>100), which means that the practices carried out by the Company have exceeded the required performance and are a leading issuer in GCG implementation.

Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Hasil Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PTPP melakukan penilaian penerapan GCG dalam rangka memantau dan mengevaluasi serta menyusun rekomendasi perbaikan GCG ke depan. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Di samping itu, PTPP juga melakukan penilaian sendiri melalui pemantauan tahunan atas perkembangan penerapan GCG berdasarkan kepatuhan terhadap Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan kesesuaian terhadap Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dapat dilihat pada bagian belakang laporan ini.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) adalah salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Market Forum) dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Di tahun 2020, PTPP memulai inisiasi penilaian penerapan GCG melalui pendekatan ACGS yang masih dilanjutkan hingga saat ini. Hasil penilaian praktik-praktik GCG melalui ACGS ini bertujuan membantu upaya meningkatkan standar implementasi tata kelola korporasi di lingkup PTPP, yang diharapkan menarik para investor lokal dan global untuk melakukan investasi khususnya pada saham Perusahaan.

Penilaian ASEAN Corporate Governance *Scorecard* (ACGS): Dasar Penilaian, Metode dan Parameter

Instrumen penilaian dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan International Corporate Governance Network (ICGN). Pada instrumen penilaian ACGS versi terbaru, yaitu versi ACGS 2023 dan setelahnya, terdapat beberapa penekanan pada pokok praktik tata kelola yang berkenaan dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan serta ketangguhan yang banyak menjadi perhatian bagi dunia usaha dalam menjalankan operasinya dewasa ini, di antaranya mencakup:

- Topik material terkait ESG;
- Isu-isu perubahan iklim dan pengelolaan risiko serta peluang terkait iklim;
- Keterlibatan pemangku kepentingan (internal & eksternal) terkait masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perusahaan;

Evaluation, Monitoring, and Assessment of Good Corporate Governance Implementation

The Company assesses the GCG implementation through two assessment models, namely the GCG assessment based on the SOE approach and parameters of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). In addition, PTPP conducts its own assessment through annual monitoring of GCG implementation progress, in accordance with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, and compliance with the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI), which can be found at the end of this report.

The ASEAN Corporate Governance Scorecard is one of the initiatives of the ASEAN Capital Market Forum to integrate the capital markets of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In 2020, PTPP started the ACGS GCG assessment initiation, which is still ongoing. The results of GCG assessment practices through ACGS aim to improve the corporate governance implementation standards within PTPP, with the expectation of attracting local and global investors, especially for the Company's shares.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Assessment: Assessment Basis, Method, and Parameter

The assessment instrument is developed based on international Corporate Governance principles standards, particularly those issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the International Corporate Governance Network (ICGN). The latest version of the ACGS assessment instrument (ACGS version 2023 and later) emphasizes the principles of governance practices relating to environmental issues, sustainability, and resilience, which are of great concern to the business world in carrying out its operations today. These include:

- ESG-related material topics;
- Climate change issues as well as climate-related risk and opportunity management;
- Stakeholder engagement (internal & external) related to sustainability issues that are important to the Company's business;

- Saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan untuk masalah ESG;
- Peran pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris terkait Keberlanjutan (risiko dan peluang);
- Keberadaan Unit Pengelola khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan di Perusahaan; dan
- Kualitas Laporan Berkelanjutan.

Sehingga dalam rangka mendorong korporasi memiliki perhatian dan komitmen yang kuat dalam menjalankan praktik tata kelola pada aspek keberlanjutan, maka instrumen penilaian ACGS versi terbaru tersebut dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- Prinsip A: Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*), terdiri dari 30 pertanyaan.
- Prinsip B: Keberlanjutan dan Ketangguhan (*Sustainability and Resilience*), terdiri dari 22 pertanyaan.
- Prinsip C: Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*), terdiri dari 34 pertanyaan.
- Prinsip D: Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*), terdiri dari 63 pertanyaan.

Instrumen penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tingkat, yaitu Tingkat 1 penilaian atas 4 (empat) Prinsip, dan Tingkat 2 yaitu bonus dan penalti. Berikut disampaikan bobot dan skor penilaian.

1. Tingkat 1, penilaian atas 4 (empat) Prinsip
   - Prinsip A - Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (Bobot 20%).
   - Prinsip B - Keberlanjutan dan Ketangguhan (Bobot 15%).
   - Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi (Bobot 25%).
   - Prinsip D - Tanggung Jawab Dewan (Bobot 40%).

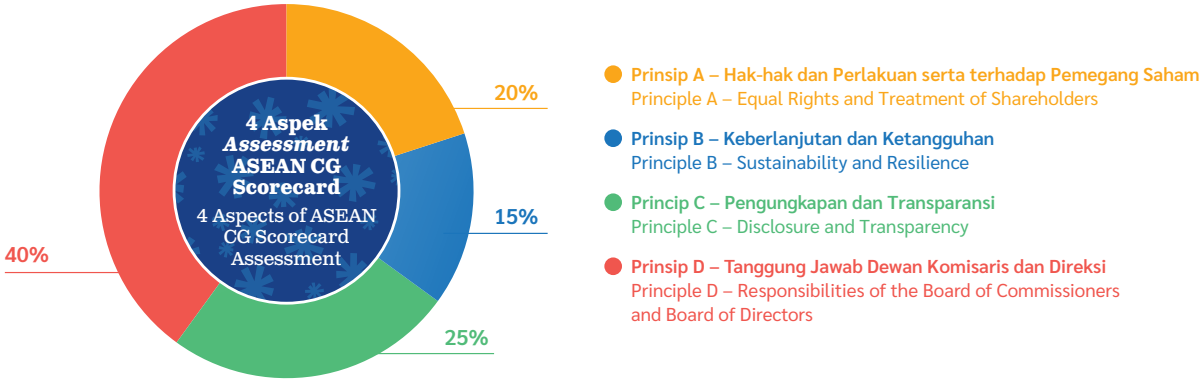
- Engagement channels with stakeholder groups for ESG issues;
- The Supervisory Role of the Board of Directors and Board of Commissioners related to Sustainability (risks and opportunities);
- The Existence of a Special Management Unit responsible for managing sustainability issues in the Company; and
- Quality of Sustainability Reports.

Hence, to encourage corporations to have strong attention and commitment to implementing governance practices in the sustainability aspect, the latest version of the ACGS assessment instrument is grouped into the following:

- Principle A: Rights and Equitable Treatment of Shareholders, consisting of 30 questions.
- Principle B: Sustainability and Resilience, consisting of 22 questions.
- Principle C: Disclosure and Transparency, consisting of 34 questions.
- Principle D: Responsibilities of the Board, consisting of 63 questions.

The assessment instrument is grouped into two levels: Level 1, which assesses four Principles, and Level 2, which includes bonuses and penalties. The weighting and assessment scores are presented below.

1. Level 1, assessment of four Principles
   - Principle A - Equal Rights and Treatment of Shareholders (Weight 20%).
   - Principle B – Sustainability and Resilience (Weight 15%).
   - Principle C - Disclosure and Transparency (Weight 25%).
   - Principle D - Board Responsibility (Weight 40%).



2. Tingkat 2, bonus dan penalti
   - Bonus terdiri dari 18 pertanyaan dengan total skor untuk bonus mencapai 30 poin;
   - Penalti terdiri dari 26 pertanyaan dengan total skor untuk penalti mencapai minus 67 poin.

2. Level 2, bonuses and penalties
   - The bonus consists of 18 questions, with a total score for the bonus reaching 30 points.
   - The penalty consists of 26 questions with a total score of minus 67 points for penalties.

Original Version ACGS
(ACGS 2017-2023)

Principles	*Original Number of Items*	*Weighting*
A (*Rights of Shareholders*)	21	10%
B (*Equitable Treatment of Shareholders*)	15	10%
C (*Role of Stakeholders*)	13	15%
D (*Disclosure and Transparency*)	32	25%
E (*Responsibilities of the Board*)	65	40%
Total number of questions or indicators (Level 1)	146	100%
Bonus	**13**	**30**
Penalty	**25**	**63**
Total number of questions or indicators (Level 2)	38	

Original Version ACGS
(ACGS 2024 & up)

Principles	*Original Number of Items*	*Weighting*
A (*Right and Equitable Treatment of Shareholders*)	30	20%
B (*Sustainability and Resilience*)	22	15%
C (*Disclosure and Transparency*)	34	25%
D (*Responsibilities of the Board*)	63	40%
Total number of questions or indicators (Level 1)	149	100%
Bonus	**18**	**30**
Penalty	**26**	**(67)**
Total number of questions or indicators (Level 2)	44	

Perbedaan Struktur Penilaian ACGS versi lama (2017) dengan ACGS versi baru (2023) dapat diidentifikasi pada gambar di atas, di mana terdapat penambahan untuk jumlah item penilaian pada penilaian level 1 sebanyak 3 (tiga) butir item penilaian dari jumlah sebelumnya sebanyak 146 butir menjadi 149 butir item penilaian, sedangkan pada item penilaian tingkat 2 terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) butir item penilaian dari jumlah sebelumnya sebanyak 38 butir menjadi 44 butir item penilaian.

The difference between the old ACGS (2017) and the new ACGS (2023) assessment structures can be identified in the image above. At level 1 assessment, the number of assessment items has increased by three from the previous number of 146 to 149. Meanwhile, at level 2 assessment, the number of assessment items has increased by six from the previous number of 38 to 44.

Hasil penilaian menggunakan level kinerja dan interpretasi dengan rentang skor sebagai berikut.

The assessment results use the level of performance and interpretation with the following score ranges.



Keterangan: | Remarks:

Skor Nilai (poin) Score (point)	Kinerja CG CG Performance	Interpretasi Interpretation
60,00-69,99	Level 1	*Minimum Requirement*, memenuhi standar minimum sesuai UU dan regulasi Minimum Requirement, meet the minimum standards per laws and regulations
70,00-79,99	Level 2	*Fair*, ada kesadaran kuat dan upaya mengadopsi standar internasional Fair, there is a strong awareness and efforts to adopt international standards
80,00-89,99	Level 3	*Good*, Mengadopsi sebagian standar internasional Good, adopting some of the international standards
90,00-100	Level 4	*Very Good*, Mengadopsi secara penuh standar internasional Very Good, fully adopting international standards
Di atas 100	Level 5	*Leadership in corporate governance*, melebihi level 1 (Struktur ACGS) Leadership in corporate governance, exceeding level 1 (ACGS Structure)

Teknik penilaian *ASEAN CG Scorecard* didasarkan pada informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik *Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang dimaksud diantaranya meliputi:

1. Laporan tahunan;
2. Laporan keuangan yang telah diaudit;
3. Pengumuman Pemanggilan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun buku;
4. Pengumuman Hasil RUPS untuk kinerja Perusahaan yang diadakan di tahun buku;
5. Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Pedoman kerja Dewan dan Komite-komite Dewan;
7. Situs web Perusahaan; serta
8. Informasi-informasi publik relevan lainnya.

The ASEAN CG Scorecard assessment technique is based on publicly available information or documents related to Corporate Governance practices carried out by the Company. The sources of information or documents include:

1. Annual reports;
2. Audited financial statements;
3. The Summons for the Annual GMS held in the fiscal year;
4. Announcement of GMS Results for the Company's performance in the fiscal year;
5. The Articles of Association;
6. Work guidelines for the Board and Board Committees;
7. Corporate website; and
8. Other relevant public information.

Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard PTPP Tahun 2025

Penilaian penerapan GCG dengan ACGS tahun 2025 adalah sebagai berikut:

ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment in 2025

The GCG assessment with the ACGS in 2025 is as follows:

Jenis Penilaian **Assessment Type**	:	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Assessor/Penilai **Assessor**	:	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Waktu Pengukuran **Assessment Period**	:	Praktik-praktik *Corporate Governance* tahun buku 2024 Corporate Governance Practices for the 2024 fiscal year
Metode Penilaian **Assessment Method**	:	Didasarkan pada informasi publik yang terdapat pada: • Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2024; • Laporan Keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2024; • Anggaran Dasar Perusahaan; • Pedoman Kerja Dewan dan Komite Dewan; • *Website* Perusahaan; serta • Informasi-informasi publik yang relevan lainnya. Based on public information contained in: • The Company's 2024 Annual Report; • Audited Financial Statements for the 2024 fiscal year; • The Company's Articles of Association; • Board and Board Committee Work Guidelines; • Company website; and • Other relevant public information.
Waktu Terbit Laporan **Report Issuance Date**	:	9 Januari 2026 January 9, 2026

Rincian hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan dengan ACGS untuk tahun 2025 sebagai berikut:

The details of the Company's GCG assessment results with the ASEAN CG Scorecard for 2025 are as follows:

Aspek Pengujian **Testing Aspects**	**Bobot | Weight (%)**	**Nilai Akhir Tahun 2025** **Final Score in 2025**
Tingkat 1 Level 1		
Hak-hak dan Perlakuan Setara untuk Pemegang Saham Rights of Shareholders	20,00	17,93
Keberlanjutan dan Ketangguhan Sustainability and Resilience	15,00	13,63

Aspek Pengujian Testing Aspects	Bobot | Weight (%)	Nilai Akhir Tahun 2025 Final Score in 2025
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	25,00	22,05
Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors	40,00	38,06
Tingkat 2 Level 2		
Bonus Bonuses	30,00	12
Penalti Penalties	(67,00)	(2)
Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**101,69**
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG **Qualification of GCG Implementation**	**"*Leadership in Corporate Governance*" atau Level Level 5** **"Leadership in Corporate Governance" or Level Level 5**	

Berdasarkan skor akhir sebesar 101,69 poin, maka kinerja tingkat kepatuhan PTPP termasuk dalam predikat "*Leadership in Corporate Governance*" atau Level 5 (>100), yang berarti praktik GCG yang dilakukan Perusahaan telah mampu melampaui kinerja yang disyaratkan oleh Penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan merupakan emiten terdepan (Leader) dalam penerapan GCG berdasarkan ACGS Standard di Indonesia.

Based on the final score of 101.69 points, PTPP's compliance level is in the "Leadership in Corporate Governance" predicate or Level 5 (>100), which means the Company's implementation of GCG practices has exceeded the performance requirements of the Level 1 Assessment (ACGS Structure) and positions it as a leader in GCG implementation under the ACGS Standard in Indonesia.

Selain hasil penilaian atas tingkat kepatuhan praktik CG berdasarkan standar ACGS, penilaian ini juga memberikan rekomendasi sebagai acuan/referensi untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi praktik GCG Perusahaan ke depan.

In addition to the assessment results of the CG practices compliance level based on the ACGS standard, the assessment also provides recommendations for improving the Company's implementation of GCG practices in the future.

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2025
The 2025 ASEAN CG Scorecard Recommendations

Prinsip A. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Principle A. Rights of Shareholders	
(A.2.5)	Pemberian kesempatan bagi para peserta RUPST untuk mengajukan pertanyaan serta melakukan pencatatan terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dimaksud selama RUPST berlangsung. Providing opportunities for AGMS participants to ask questions and record all questions and answers during the AGMS.
(A.6.4)	Dalam dokumen undangan RUPST direkomendasikan untuk mengungkapkan secara jelas nama auditor eksternal (bukan nama KAP) yang akan digunakan di tahun buku berikutnya. In the AGMS summons document, it is recommended to clearly disclose the name of the external auditor (not the name of the KAP) that will be used in the following fiscal year.
(A.8.3)	Perusahaan disarankan menyusun dan mengungkapkan kebijakan mengenai larangan pinjaman kepada Direktur dan Komisaris atau suatu kebijakan yang memastikan pemberian pinjaman tersebut dilakukan pada periode jatuh tempo dan suku bunga yang wajar. The Company is advised to formulate and disclose a policy prohibiting loans to Directors and Commissioners or a policy ensuring that such loans are made at reasonable maturity periods and interest rates.

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2025
The 2025 ASEAN CG Scorecard Recommendations

Prinsip B. Keberlanjutan dan Ketangguhan
Principle B. Sustainability and Resilience

(B.3.1) Perusahaan agar memastikan bahwa Dewan Komisaris agar setiap tahun/secara periodik juga berperan untuk melakukan *review* terhadap kebijakan struktur modal dan hutang Perusahaan, apakah telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko (*risk appetite*). Dan, sebaiknya terkait dengan peran tersebut agar ditambahkan di dalam tugas/tanggung jawab Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Pedoman Dewan Komisaris (*BoC Charter*).
The Company should ensure that the Board of Commissioners also plays a role in conducting an annual/periodic review of the Company's capital structure and debt policies to determine whether they are in line with strategic objectives and risk appetite. Furthermore, this role should be added to the Board of Commissioners' duties and responsibilities as outlined in the Board of Commissioners Charter (BoC Charter).

(B.6.3) Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program atau kebijakan kompensasi atau *reward* yang lebih bersifat jangka panjang bagi karyawannya (bukan hanya Dewan Komisaris dan Direksi).
The Company may consider implementing a compensation or reward program or policy that is more long-term in nature for its employees (not only the Board of Commissioners and the Board of Directors).

Prinsip C. Pengungkapan dan Transparansi
Principle C. Disclosure and Transparency

(C.2.4) Untuk meningkatkan kualitas laporan tahunannya, Perusahaan disarankan untuk mengungkapkan secara eksplisit informasi di dalam laporan tahunan mengenai kebijakan pembayaran dividen (c/o: *target dividend payout ratio atau dividend pershare*) untuk tahun buku yang dinilai tersebut (bukan kebijakan dividen untuk tahun buku yang lampau). Kebijakan ini berlaku baik untuk Perusahaan yang memutuskan melakukan pembagian dividen maupun tidak kepada para pemegang sahamnya terhadap kinerja operasi Perusahaan pada tahun buku yang sedang dinilai.
To improve the quality of its annual report, the Company is advised to explicitly disclose information in the annual report regarding its dividend payment policy (c/o: target dividend payout ratio or dividend per share) for the fiscal year being assessed (not the dividend policy for the previous fiscal year). This policy applies to both Companies that decide to distribute dividends and those that do not to their shareholders based on the Company's operating performance in the fiscal year being assessed.

(C.3.3) Mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, yang mencakup gaji pokok, insentif (baik jangka pendek maupun jangka panjang), serta tunjangan lainnya. Selain itu, Perusahaan juga perlu mengungkapkan pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar pemberian remunerasi.
Requires the Company to disclose the remuneration policy for members of the Board of Directors, which includes basic salary, incentives (both short-term and long-term), and other allowances. In addition, the Company also needs to disclose the performance measurements used as the basis for remuneration.

(C.5.1) Perusahaan diminta untuk mengungkapkan (*disclosure*) mengenai *insider trading* yang dilakukan oleh anggota Komisaris atau Direksi Perusahaan, Perusahaan diharapkan untuk menampilkan kepemilikan saham diawal dan di akhir periode pelaporan.
The Company is required to disclose insider trading conducted by members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors. The Company is expected to disclose its share ownership at the beginning and end of the reporting period.

(C.9.6) Perusahaan sebaiknya mengungkapkan Anggaran Dasar Perusahaan di *website* Perusahaan dalam versi Bahasa inggris.
The Company should disclose its Articles of Association on the Company's website in English.

Prinsip D. Tanggung Jawab Dewan
Principle D. Responsibilities of the Board

(D.3.4) Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai syarat quorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
Submit a proposal to amend the provisions regarding the quorum requirements for decision-making meetings of the Board of Commissioners, from the previous requirement of only more than half of the members of the Board of Commissioners being present at the meeting.

(D.3.6) Perusahaan sebaiknya mempunyai kebijakan untuk mengirimkan bahan rapat Dewan Komisaris minimal 5 hari kerja sebelum rapat diadakan.
The Company should have a policy to send the materials for Board of Commissioners meetings at least five working days before the meeting is held.

(D.3.13) Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengkaitkan antara kinerja Direksi dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti adanya *claw back provision*, *reward* atau *deferred bonuses* yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti *ROE, Cummulative Free Cash Flow, Operating Profit* atau lainnya.
Formulate a remuneration policy by establishing measurable standards that link the performance of the Board of Directors with the long-term interests of the Company, such as the existence of a claw-back provision, reward, or deferred bonuses that use measurements such as ROE, Cumulative Free Cash Flow, Operating Profit, or others.

Dibandingkan dengan skor rata-rata untuk perusahaan publik (Tbk) atau emiten yang masuk dalam kategori BigCap100 atau 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa berdasarkan nilai pembanding pada ACGS 2025 untuk penilaian tingkat 1, Total CG Score tersebut berada di atas rata-rata Total CG Score tingkat 1 BigCap100 yang nilainya sebesar "82,59".

Compared to the average score for public companies (Tbk) or issuers classified in the BigCap100 category or the 100 largest market capitalization companies on the stock exchange based on comparative values in ACGS 2025 for level 1 assessment, the Total CG Score is above the average Total CG Score of level 1 BigCap100 which is "82,59".

Perkembangan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard PTPP

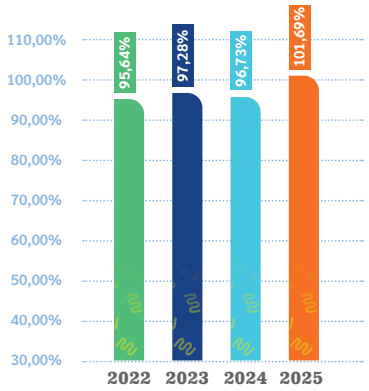
Berikut disampaikan perkembangan skor penilaian ACGS yang diperoleh PTPP sejak pertama kali melakukan penilaian hingga tahun buku 2025.

Development of PTPP's ASEAN Corporate Governance Scorecard

The following is a summary of PTPP's ACGS score development since its first assessment until the 2025 fiscal year.

Skor Akhir Penilaian ASEAN CG Scorecard 2022-2025

Final Score of the 2022-2025 ASEAN CG Scorecard



Untuk dapat memberikan gambaran tentang nilai positif penilaian ACGS bagi penerapan GCG di lingkup Perusahaan, berikut ini disampaikan rekomendasi ACGS tahun 2024 dan realisasi tindak lanjut yang dilakukan PTPP hingga akhir tahun 2025.

To provide an overview of the positive value of ACGS assessments for the implementation of GCG within the Company, the following are the ACGS recommendations for 2024 and the follow-up actions taken by PTPP until the end of 2025.

	Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations	Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
Prinsip A. Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Principle A. Rights and Equitable Treatment of Shareholders		
(A.2.5)	Jawaban dan pertanyaan diharapkan dicatat dan dipublikasikan di risalah RUPST Answers and questions are expected to be recorded and published in the AGM minutes.	Pertanyaan dan jawaban dicantumkan serta dipublikasikan di risalah RUPST. Questions and answers are recorded and published in the AGMS minutes.
(A.2.10)	Guna menjamin independensi hasil suara yang diperoleh untuk setiap agenda rapat, perusahaan disarankan untuk membuat kebijakan mengenai mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap agenda dalam RUPS yang memerlukan adanya voting agar dilakukan secara tertutup, serta menginformasikan ke publik melalui risalah RUPS atas praktik/implementasi kebijakan tersebut di dalam rapat. To guarantee the independence of the voting results obtained for each meeting agenda, the Company is advised to make policies regarding the decision-making mechanism for each agenda in the GMS that require voting to be conducted in a closed manner and to inform the public through the GMS minutes of the practice/ implementation of these policies in the meeting.	Tercantum dalam Tata Tertib RUPST, dan terdapat metode *e-voting* melalui aplikasi eASY KSEI. This is stated in the AGM Rules of Procedure, and e-voting is available through the KSEI eASY app.

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations		Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
(A.6.1)	*Bundling* agenda dapat diatasi oleh perusahaan apabila proses pemungutan suara *(voting)* untuk agenda yang terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Komisaris/Direksi perusahaan (pemilihan atau *re-election* anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru) dilakukan secara individual per masing-masing kandidat, jadi bukan melalui pemungutan suara *(voting)* terhadap paket kandidat yang telah berlangsung selama ini. The Company can overcome the bundling of agendas if the voting process for agendas related to changes in the membership of the Company's Board of Commissioners/Directors (election or re-election of new members of the Board of Commissioners and/or Directors) is carried out individually for each candidate, so it is not through voting on the candidate package that has been going on so far.	Pada tahun buku 2025 tidak terdapat RUPST maupun RUPSLB terkait mata agenda perubahan susunan pengurus (N/A). In the 2025 fiscal year, there was no AGMS or EGMS related to the agenda item of changes in the composition of the management (N/A).
(A.6.3)	Perusahaan disarankan untuk mempublikasikan CV dari Komisaris atau Direksi yang akan dipilih di RUPST, sehingga membuat pemegang saham *well-informed*, terhadap kandidat yang akan dipilih. The Company is advised to publish the CVs of the Commissioners or Directors to be elected at the AGMS so that shareholders are well informed about the candidates to be elected.	Pada tahun buku 2025 tidak terdapat RUPST maupun RUPSLB terkait mata agenda perubahan susunan pengurus (N/A). In the 2025 fiscal year, there was no AGMS or EGMS related to the agenda item of changes in the composition of the management (N/A).
(A.6.4)	Pemegang saham seharusnya terinformasi secara layak *(well-informed)* dalam penunjukkan atau penunjukkan auditor yang ditugaskan oleh KAP, paling tidak nama yang bersangkutan. Shareholders should be well-informed of the appointment or appointment of auditors assigned by the Public Accounting Firm, at least the name of the person concerned.	*Continue*
(A.8.3)	Pinjaman kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris seharusnya termasuk dalam pengertian transaksi-transaksi terafiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memiliki kebijakan yang layak, seperti *arms' length* basis (dengan tingkat suku bunga yang wajar sebagaimana diberlakukan kepada pihak ketiga). Loans to the Board of Directors and members of the Board of Commissioners should be included in the definition of affiliated transactions that can potentially cause a conflict of interest. Therefore, the Company should have a proper policy, such as an arms' length basis (with reasonable interest rates applied to third parties).	*Continue*
Prinsip B. Keberlanjutan dan Ketangguhan Principle B. Sustainability and Resillience		
(B.1.6)	Laporan keberlanjutan perusahaan diharapkan di *review* dan di *approved* oleh Dewan Komisaris atau komite di bawah Komisaris. The Company's sustainability report is expected to be reviewed and approved by the Board of Commissioners or a committee under the Commissioners.	Dewan Komisaris atau komite di bawah Komisaris melakukan *review* atas Laporan keberlanjutan perusahaan. The Board of Commissioners or a committee under the Commissioner conducts a review of the Company's sustainability report.
(B.3.1)	Perusahaan agar memastikan bahwa Dewan Komisaris agar setiap tahun/secara periodik juga berperan untuk melakukan *review* terhadap kebijakan struktur modal dan hutang Perusahaan, apakah telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko *(risk appetite).* Dan, sebaiknya terkait dengan peran tersebut agar ditambahkan di dalam tugas/tanggung jawab Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Pedoman Dewan Komisaris (BoC *Charter*). The Company should ensure that the Board of Commissioners also reviews the Company's capital structure and debt policy every year/periodically to determine whether they are following strategic objectives and risk appetite. This role should be related to and added to the duties/responsibilities of the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners (BoC) Charter.	*Continue*

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations		Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
(B.6.3)	Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program atau kebijakan kompensasi atau *reward* yang lebih bersifat jangka panjang bagi karyawannya (bukan hanya Dewan Komisaris dan Direksi). The Company may consider organizing a program or a compensation or reward policy that is more long-term for its employees (not only the Board of Commissioners and the Board of Directors).	*Continue*
Prinsip C. Pengungkapan dan Transparansi Principle C. Disclosure and Transparency		
(C.2.4)	Untuk meningkatkan kualitas laporan tahunannya, perusahaan disarankan untuk mengungkapkan secara eksplisit informasi di dalam laporan tahunan mengenai kebijakan pembayaran dividen (c/o: target *dividend payout ratio* atau *dividend per share*) untuk tahun buku yang dinilai tersebut (bukan kebijakan dividen untuk tahun buku yang lampau). Kebijakan ini berlaku baik untuk perusahaan yang memutuskan melakukan pembagian dividen maupun tidak kepada para pemegang sahamnya terhadap kinerja operasi perusahaan pada tahun buku yang sedang dinilai. To improve the quality of its annual report, the Company is advised to explicitly disclose information in the annual report regarding the dividend payment policy (c/o: target dividend payout ratio or dividend per share) for the fiscal year under review (not the dividend policy for the previous fiscal year). This policy applies to companies that decide to distribute dividends or not to its shareholders based on the Company's operating performance in the fiscal year under review.	*Continue*
(C.5.1)	Perusahaan diminta untuk mengungkapkan *(disclosure)* mengenai *insider trading* yang dilakukan oleh anggota Komisaris atau Direksi Perusahaan, Perusahaan diharapkan untuk menampilkan kepemilikan saham di awal dan di akhir periode pelaporan. The Company is required to disclose insider trading by members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors. The Company is expected to disclose share ownership at the beginning and end of the reporting period.	*Continue*
(C.9.6)	Perusahaan diminta memublikasikan Anggaran Dasar Perusahaan di *website* perusahaan. The Company is required to publish its Articles of Association on its website.	*Continue*
Prinsip D. Tanggung Jawab Dewan Principle D. Responsibilities of the Board		
(D.2.9) & (D.2.14)	Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi seharusnya sebagian besar berasal dari Komisaris Independen. Tujuannya adalah untuk membantu Dewan dalam memastikan objektivitas fungsi fidusia yang mereka jalankan. The composition of the Nomination and Remuneration Committee members should mostly consist of Independent Commissioners. The aim is to assist the Board in ensuring the objectivity of its fiduciary functions.	Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagian besar berasal dari Komisaris Independen. Dengan tujuannya untuk membantu Dewan dalam memastikan objektivitas fungsi fidusia yang dijalankan. The Nomination and Remuneration Committee is composed mostly of Independent Commissioners. Its purpose is to assist the Board in ensuring the objectivity of the fiduciary functions performed.
(D.3.3)	Perusahaan diharapkan untuk mendorong Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris minimal menghadiri rapat Dewan Komisaris 75% dalam total rapat yang diadakan dalam setahun. The Company is expected to encourage the Board of Commissioners to attend Board of Commissioners meetings so that the Board of Commissioners should attend at least 75% of the total meetings held in a year.	Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris minimal 75% dalam total rapat yang diadakan dalam setahun. In the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners attended at least 75% of the total Board of Commissioners meetings held in a year.

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations		Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
(D.3.4)	Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat menjadi minimal 2/3. Submit a proposal to change the provisions regarding the quorum requirements in decision-making meetings by the Board of Commissioners from previously requiring only more than 1/2 of the members of the Board of Commissioners to be present at the meeting to a minimum of 2/3.	*Continue*
(D.3.13)	Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengaitkan antara kinerja Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti adanya *clawback provision, reward* atau *deferred bonuses* yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE, *Cumulative Free Cash Flow, Operating Profit* atau lainnya. Formulate a remuneration policy by setting measurable standards that link the performance of the Board of Directors to the long-term interests of the Company, such as clawback provisions, rewards, or deferred bonuses that use measurements such as ROE, Cummulative Free Cash Flow, Operating Profit or others.	*Continue*
Bonus & Penalti Bonuses & Penalties		
Peraturan OJK tentang RUPS yang dikeluarkan pada bulan Desember 2015 mengharuskan perusahaan mengirimkan panggilan RUPS tahunan kepada para pemegang saham paling sedikit dalam 21 hari kalender. Namun, mekanisme panggilan RUPS itu sendiri memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai panggilan RUPS kepada para pemegang saham dalam 28 hari kalender sebelum pelaksanaan RUPS. (memiliki nilai 1 poin). The OJK Regulation on GMS issued in December 2015 requires companies to send annual GMS summons to shareholders at least 21 calendar days in advance. However, the GMS invitation mechanism allows the Company to convey information regarding GMS invitations to shareholders 28 calendar days prior to the GMS. (worth 1 point).		Perusahaan masih mengacu pada Peraturan OJK, sehingga panggilan RUPS masih 21 hari kalender dan terkait pemanggilan 28 hari kalender dilakukan melalui *website* Perusahaan. The Company still refers to OJK Regulations, so the GMS summons period remains 21 calendar days, and the 28-calendar-day notice period is served via the Company's website.
Dewan Komisaris perlu menjalankan peran pengawasan terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta melakukan pengungkapan informasi atas kegiatan tersebut. (memiliki nilai 2 poin). The Board of Commissioners must exercise oversight of sustainability-related risks and opportunities and disclose information on these activities. (worth 2 points).		Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/2025 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT PP (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2025. The Board of Commissioners has formed a Risk Monitoring Committee through Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/2025, on the Formation of the Risk Monitoring Committee of PT PP (Persero) Tbk, dated February 21, 2025.
Kebijakan remunerasi yang diterima Direksi agar mempertimbangkan juga komponen/faktor yang terkait dengan capaian kinerja dalam pengelolaan aktivitas keberlanjutan yang telah dijalankan Perusahaan sebagai indikator pengukurannya. (memiliki nilai 2 poin). The remuneration policy received by the Board of Directors should also consider components/ factors related to performance achievements in the management of sustainability activities carried out by the Company as a measurement indicator. (worth 2 points).		*Continue*

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations	Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
Perusahaan agar mempertimbangkan pelibatan/penggunaan pihak/lembaga independen dalam pengelolaan sistem WBS, terutama untuk menghindari adanya keberpihakan apabila pengelolaan hanya dilakukan secara internal. (memiliki nilai 2 poin). The Company should consider involving/using independent parties/institutions in managing the WBS system, especially to avoid bias if management is only carried out internally. (worth 2 points).	*Continue*
Perusahaan seharusnya dapat mengusahakan untuk merilis Laporan Keuangan (audited) ke publik dalam jangka waktu maksimal 2 bulan (60 hari) setelah berakhirnya tahun buku. (memiliki nilai 2 poin). The Company should be able to endeavor to release (audited) Financial Statements to the public within a maximum period of 2 months (60 days) after the end of the fiscal year. (worth 2 points).	*Continue*
Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyusunan kebijakan yang secara jelas mengatur mengenai keberagaman komposisi keanggotaan Dewan Komisaris perusahaan yang disertai dengan adanya penetapan target serta laporan atas kemajuan (progres) atau pencapaian dari target/tujuan diversitas tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut: • Kebijakan keberagaman meliputi bagaimana diversitas didefinisikan dan ditetapkan serta bagaimana inklusi terdapat pada dewan. Keberagaman tidak saja diartikan dari sisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh calon Komisaris, melainkan juga meliputi usia, gender, atau bahkan terkait etnis. • Target ditetapkan menurut pengetahuan atau latar belakang pendidikan, pengalaman, dan gender. Target diversitas gender, misalnya Dewan Komisaris dalam 3 tahun ke depan terdiri dari 30% perempuan. Diversitas *knowledge* dan pengalaman juga harus demikian. (memiliki nilai 2 poin). The Company may consider formulating a policy that regulates the diversity of the composition of its Board of Commissioners, accompanied by setting targets and reporting on the progress or achievement of these diversity targets/ goals. With the following explanation: • Diversity policy includes how diversity is defined and determined and how inclusion is present on the board. Diversity is defined not only in terms of the expertise and competence of prospective commissioners but also includes age, gender, or even ethnicity. • Targets are set according to knowledge or educational background, experience, and gender. The gender diversity target, for example, is that the Board of Commissioners in the next three years consists of 30% women. Diversity of knowledge and experience must also be the case. (worth 2 points).	Pertimbangan untuk melakukan penyusunan kebijakan yang secara jelas mengatur mengenai keberagaman komposisi keanggotaan Dewan Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (BP BUMN). The consideration to formulate a policy that clearly regulates the diversity of the composition of the Board of Commissioners is the authority of the Series A Dwiwarna Stock Shareholders (BP BUMN).
Perusahaan dapat memperkuat peran Dewan Komisaris lewat pemberdayaan Komite Nominasi dengan komposisi anggota 100 persen independen. Anggota yang independen tidak harus seorang Komisaris Independen, namun dapat berasal dari pihak luar yang memenuhi syarat independensi. (memiliki nilai 1 poin). The Company can strengthen the role of the Board of Commissioners by empowering the Nomination Committee with 100 percent independent membership. An independent member does not have to be an Independent Commissioner but can come from outside parties who meet the independence requirements (worth 1 point).	Perusahaan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, terkait komposisi anggota merupakan kewenangan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (BP BUMN). The Company has formed a Nomination and Remuneration Committee, whose membership composition is the authority of the Series A Dwiwarna Stock Shareholders (BP BUMN).
Perusahaan melalui Komite Nominasi agar dalam proses identifikasi kandidat Komisaris dapat menyelaraskan proses nominasi dengan *strategic map* yang ada, di mana identifikasi kandidat Komisaris agar disesuaikan dengan arah atau kebijakan strategis perusahaan. (memiliki nilai 1 poin). The Company, through the Nomination Committee, can align the nomination process with the existing strategic map, where the identification of Commissioner candidates is adjusted to the Company's strategic direction or policy. (worth 1 point).	Akan dimasukkan dalam salah satu Pedoman Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. This will be included in one of the Guidelines for the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee's Duties.

Rekomendasi ASEAN CG Scorecard 2024 The 2024 ASEAN CG Scorecard Recommendations	Realisasi Tindak Lanjut hingga Akhir Tahun 2025 Follow Up Realization until the End of 2025
Perusahaan mempunyai kemampuan untuk menggunakan *Professional Search Firms* tidak saja dalam mendapatkan kandidat Direksi, melainkan juga untuk mendapatkan kandidat Komisaris perusahaan. (memiliki nilai 1 poin). The Company can use professional search firms to find candidates for the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners (worth 1 point).	Penggunaan *professional search firms* untuk mendapatkan kandidat Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (BP BUMN). The use of professional search firms to obtain candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of the Series A Dwiwarna Stock Shareholders (BP BUMN).
Perusahaan melalui Dewan Komisaris harus dapat memastikan bahwa proses tata kelola terhadap permasalahan-permasalahan IT dilakukan dengan baik, termasuk di antaranya terkait *disruption, cyber security* serta *disaster recovery* untuk memastikan agar semua risiko utama dapat diidentifikasi, dikelola, serta dilaporkan ke Dewan Komisaris. (memiliki nilai 2 poin). The Company, through the Board of Commissioners, must be able to ensure that the governance process for IT issues is carried out properly, including those related to disruption, cyber security and disaster recovery to ensure that all major risks can be identified, managed and reported to the Board of Commissioners. (worth 2 points).	Akan dimasukkan dalam salah satu Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. This will be included in one of the Board of Commissioners' Duty Implementation Guidelines.
Perusahaan dapat membentuk Komite (organ di bawah Dewan Komisaris) yang secara khusus bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan pengelolaan risiko di Perusahaan oleh jajaran *manajemen (Separate Board Level Risk Committee).* (memiliki nilai 1 poin). The Company can form a committee (an organ under the Board of Commissioners) that is specifically responsible for assisting the Board of Commissioners in monitoring risk management in the Company by the management (Separate Board Level Risk Committee). (worth 1 point).	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/2025 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT PP (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2025. The Board of Commissioners has formed a Risk Monitoring Committee through Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/2025 on the Formation of the Risk Monitoring Committee of PT PP (Persero) Tbk dated February 21, 2025.
Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan terkait pelarangan pemberian bonus/ tantiem dari perusahaan untuk para Komisaris Independen perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk bonus/tantiem merupakan praktik yang kurang baik, karena bonus/tantiem tersebut terkait dengan kinerja perusahaan, yaitu kinerja Direksi. Disarankan agar kompensasi kepada Dewan Komisaris, apalagi bagi anggota Komisaris yang independen, tidak diberikan dalam bentuk bonus atau semacam tantiem. (dapat mengurangi nilai -2 (minus dua) poin). It is necessary to consider formulating a policy regarding the prohibition of bonuses/ tantiem from the Company for the Company's Independent Commissioners. The provision of compensation in the form of bonuses/tantiem is not a good practice because the bonuses/ tantiem are related to the Company's performance, namely the performance of the Board of Directors. It is recommended that compensation to the Board of Commissioners, especially for independent members of the Board of Commissioners, not be given in the form of bonuses or tantiem. (may reduce the value by -2 (minus two) points).	Terdapat arahan dari PT Danantara Aset Management selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan melalui surat No. S-063/DI-BP/ VII/2025 tanggal 30 Juli 2025, perihal "Pemberian Tantiem, Insentif, dan/ atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN". There is a directive from PT Danantara Aset Management, as the Company's Majority Shareholder, through letter No. S-063/DI-BP/VII/2025 dated July 30, 2025, on "The Provision of Bonuses, Incentives, and/or Other Forms of Income to the Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs and Subsidiaries of SOEs".

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)

Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Pendiri, serta Pemegang Saham publik atau masyarakat yang mendapatkan saham Perusahaan melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Shareholders and Information on Major/Controlling Shareholders

Shareholders, as capital owners, have rights and responsibilities per the laws and regulations and the Articles of Association. The Company's Shareholders consist of Major and/or Controlling Shareholders, Founder Shareholders, and public or community shareholders who acquire the Company's shares through a stock trading mechanism on the Indonesia Stock Exchange.

Susunan Pemegang Saham per 31 Desember 2025

Shareholders Composition as of December 31, 2025



Negara Republik Indonesia merupakan Entitas Pemilik Manfaat Akhir PTPP dengan jumlah kepemilikan saham langsung sebesar 0,51% dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Danantara Asset Management (Persero) sebesar 50,49%; dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham - Pembangunan Perumahan (KKPSPP) memiliki 0,03% saham Perusahaan sebagai Pemegang Saham Pendiri. PT Danantara Asset Management (Persero) bertindak selaku Pemegang Saham Utama PTPP. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2025, kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia adalah Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

The Republic of Indonesia is the Ultimate Beneficial Owner of PTPP with a direct shareholding of 0.51% and an indirect shareholding through PT Danantara Asset Management (Persero) of 50.49%; and the Koperasi Karyawan Pemegang Saham - Pembangunan Perumahan (KKPSPP) owns 0.03% of the Company's shares as a Founding Shareholder. PT Danantara Asset Management (Persero) acts as the Main Shareholder of PTPP. In accordance with Law No. 16 of 2025, the authority of the Republic of Indonesia as a Shareholder is vested in the State-Owned Enterprise Regulatory Agency (BP BUMN).

Tentang hak dan kewajiban saham Seri A dan Seri B yang dimiliki PTPP dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan ini.

Information regarding the rights and obligations of Series A and Series B shares owned by PTPP is available in the Company Profile section of this report.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Kewenangan dan Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan

General Meetings of Shareholders (GMS) and Shareholders' Authorities and Rights in GMS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company organ that has authority not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits specified in the laws and regulations and the articles of association. Such authority includes holding the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable for

Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

the management of the Company, amending the Articles of Association, appointing and dismissing the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, deciding on the division of management duties and authority among the Board of Directors and others.

Dalam RUPS, seluruh Pemegang Saham mempunyai hak yang setara untuk memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Setiap keputusan penting di dalam RUPS diambil melalui musyawarah atau mekanisme pemungutan suara yang dapat diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan. Seluruh Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik yang dibahas sesuai agenda rapat, dan berhak mendapatkan jawaban memadai atas pertanyaan yang diajukannya dari perwakilan Perusahaan (Direksi atau perangkatnya dan/atau dari anggota Dewan Komisaris), sesuai kewenangan masing-masing perwakilan Perusahaan.

In a GMS, all shareholders have equal rights to decide important matters relating to business sustainability. Every important resolution at a GMS is made through deliberation or a voting mechanism in which all present Shareholders or their authorized representatives can participate under the provisions. All Shareholders have the right to ask questions on topics discussed according to the meeting agenda and have the right to get adequate answers from representatives of the Company (the Board of Directors or its apparatus and/or members of the Board of Commissioners), according to their respective authority.

Untuk menjamin Pemegang Saham minoritas diperhatikan kepentingannya baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan gagasan dan ide yang membangun, disediakan mekanisme tertentu dengan melibatkan Komisaris Independen yang tidak mewakili kepentingan Pemegang Saham mayoritas tertentu.

To ensure that minority Shareholders' interests are considered in the decision-making process and in conveying constructive ideas, certain mechanisms are provided by involving Independent Commissioners who do not represent the interests of certain majority shareholders.

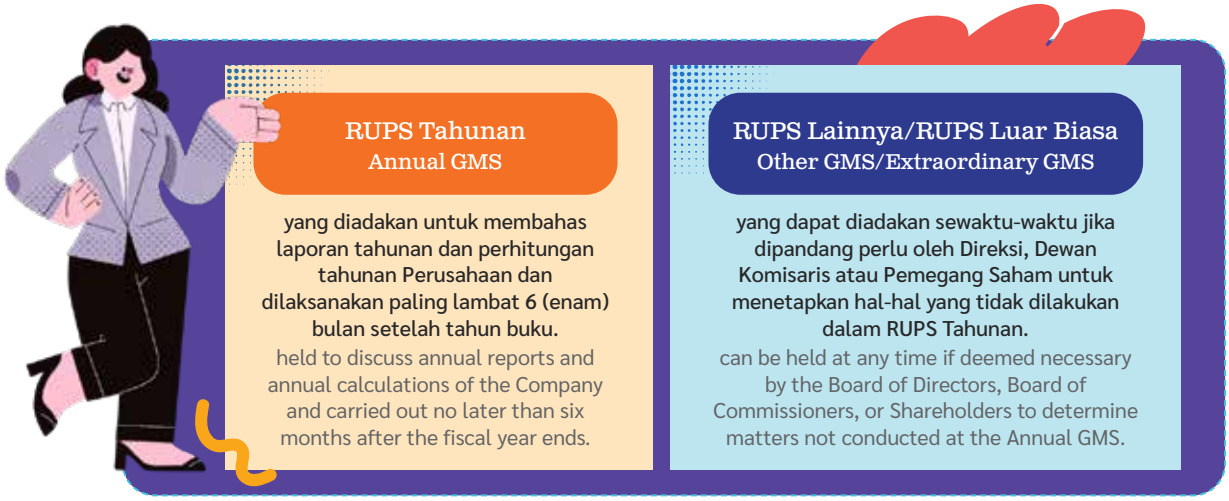
RUPS memiliki kewenangan untuk:
1. Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan tahunan Perusahaan.
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan antara lain untuk:
   a. Dividen kepada Pemegang Saham;
   b. Cadangan.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan.
5. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
7. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan.
8. Memutuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan anggaran dasar.

The GMS has the authority to:
1. Approve the Company's annual report and financial statements.
2. Determine the calculation of the Company's Profit allocation for:
   a. Dividends to Shareholders;
   b. Reserves.
3. Appoint and dismiss a member of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Assign an external auditor to audit the Company's financial statements.
5. Determine the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. Delegate the division of duties and authorities of members of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
7. Dissolve or liquidate the Company.
8. Decide on other GMS agenda items submitted accordingly with due regard to the articles of association.

Hak dan wewenang Pemegang Saham dalam RUPS:
1. Mendapatkan informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
2. Menerima pembagian Dividen berdasarkan Keputusan RUPS;
3. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS; serta
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

The Shareholders' rights and authorities in a GMS:
1. To receive timely and regular material information about the Company;
2. To receive dividend distributions based on GMS resolutions;
3. Shareholders, whether individually or represented by proxy, have the right to attend the GMS; and
4. During the GMS, shareholders have the right to obtain the agenda for the meeting and related materials as long as they do not conflict with the Company's interests.

Jenis-jenis Pelaksanaan RUPS
GMS Types



Sesuai dengan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPS Tahunan.

According to its organization, the GMS consists of the Annual GMS, which is held at least once a year no later than six months after the end of the fiscal year, and another GMS, referred to as Extraordinary GMS, which can occur outside the timing of the Annual GMS.

RUPS Tahunan merupakan agenda rutin yang wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. RUPS Tahunan membahas persetujuan Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris, yang diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Selain itu, RUPS Tahunan juga dapat diadakan untuk membahas penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan, dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

The Annual GMS is regularly held at least once a year. The Annual GMS discusses the approval of the Annual Report containing at least financial statements, reports on the Company's activities, reports on the implementation of social and environmental responsibility, details of problems that affect the Company's activities, the Board of Commissioner's supervisory report, names of the Board of Directors and the Board of Commissioners, salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorariums for members of the Board of Commissioners, which are held no later than six months after the fiscal year ends. The Annual GMS can also be held to discuss the determination of the use of the Company's net income and the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority.

Sebagai Perusahaan publik, penyelenggaraan RUPS di lingkup Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perusahaan.

As a public company, the Company's GMS organization refers to the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 on Amendment to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of Public Companies. Both the Annual GMS and Extraordinary GMS have the highest authority in the Company's Governance structure and, at the same time, are the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Management of the Company.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS

Provisions for Conducting GMS

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan
The Stages for Conducting Company's GMS



Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Kepada Regulator

Notification of GMS Implementation Plan to Regulators

Paling lambat **5 (lima) hari** kerja sebelum Pengumuman Penyelenggaraan RUPS.

No later than **five working days** before the GMS Announcement.

Pengumuman Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Massa

GMS Notice through Mass Media

Paling lambat **14 (empat belas)** hari sebelum Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal dan pemanggilan dan pengumuman.

No later than **14 days** before the GMS Summons, without regard to the date, notice, and announcement.

Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Massa

GMS Summons through Mass Media

Paling lambat **21 (dua puluh satu)** hari sebelum Pelaksanaan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan.

No later than **21 days** before the GMS, without regard to the GMS date and summon date.



Penyampaian Risalah RUPS kepada Regulator

Submission of GMS Minutes to the Regulators

Paling lambat **30 (tiga puluh)** hari setelah pelaksanaan RUPS.

No later than **30 days** after the GMS.

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Melalui Media Massa

Notice of GMS Minutes Summary through Mass Media

Paling lambat **2 (dua) hari** kerja setelah pelaksanaan RUPS.

No later than **two working days** after the GMS.

Pelaksanaan RUPS

Convening the GMS

Teknis penyelenggaraan RUPS Perusahaan, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, mengacu kepada ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ketentuan tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian agenda RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman penyelenggaraan RUPS;
2. Pengumuman bahwa akan diselenggarakan RUPS pada koran, situs web Bursa efek Indonesia dan situs web Perusahaan yang dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman di Media Massa melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; di situs web Bursa Efek; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing;
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan menggunakan surat tercatat/iklan surat kabar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS di Media Massa melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; di situs web Bursa Efek; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing; dan
4. Setelah pelaksanaan RUPS, Perusahaan wajib menyampaikan hasil RUPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar nasional, situs web Bursa efek Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

The Company's GMS technical implementation, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS, refers to OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 on the Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies. The provisions regarding the stages of conducting GMS in general are as follows:

1. Submitting a clear and detailed agenda of the GMS to OJK no later than five working days prior to the notice of the GMS;
2. Notice of the upcoming GMS will be made in newspapers, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website no later than 14 days before the GMS summons. The notice in the Mass Media will be through one national circulating daily newspaper in Indonesian, on the Stock Exchange website, and the Public Company's website, in Indonesian and foreign languages;
3. The GMS summons is conducted through registered letters/newspaper advertisements no later than 21 days before the GMS, without including the summons date and GMS date. The GMS summons in the Mass Media will be through one national circulating daily newspaper in Indonesian, on the Stock Exchange website, and on the Public Company's website, in Indonesian and foreign languages; and
4. After the GMS is conducted, the Company is required to submit the results of the GMS no later than two working days after the GMS to the OJK and announce them to the public, at least in one national newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website in Indonesian and foreign languages.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2025, Agenda, Hasil dan Tindak Lanjutnya

Di sepanjang tahun 2025, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025. Berikut disampaikan informasi atas penyelenggaraan RUPS.

GMS Throughout 2025, Agenda, Resolution, and Follow-Up

Throughout 2025, the Company held two GMS: the Annual GMS for the 2024 Fiscal Year and the 2025 Extraordinary GMS. Here is the information about the GMS.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 30 April 2025 | The 2024 Fiscal Year Annual GMS on April 30, 2025

Berikut informasi penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Here is the information on the 2024 Fiscal Year Annual GMS.

Jenis Rapat **Meeting Type**	:	RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024 The 2024 Fiscal Year Annual GMS
Hari/Tanggal **Day/Date**	:	Rabu, 30 April 2025 Wednesday, April 30, 2025
Waktu **Time**	:	Pukul 15.00 - 17.03 WIB 15.00-17.03
Tempat **Venue**	:	Plaza PP Lantai 1, Wisma Subiyanto, Jakarta Plaza PP 1st Floor, Wisma Subiyanto, Jakarta
Penghitung Suara Independen **Independent Vote Counter**	:	PT BSR Indonesia

Pemenuhan Peraturan dan Perundang-undangan atas Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 30 April 2025

Compliance with the Regulations and Laws on the 2024 Fiscal Year Annual GMS on April 30, 2025

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan BEI **Notification of GMS Implementation Plan to OJK and IDX**	:	Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan kepada OJK dan BEI melalui Surat No. 043/EXT/PP/CORSEC/2025 tanggal 12 Maret 2025. Notify the plan to conduct Annual GMS to OJK and IDX through Letter No. 043/EXT/PP/CORSEC/2025 dated March 12, 2025.
Pengumuman Penyelenggaraan RUPS **GMS Announcement**	:	• Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor Surat: 051/EXT/PP/CORSEC/2025. • Mengiklankan Kembali/Koreksi Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor Surat: 051A/EXT/PP/CORSEC/2025. • Advertising the Meeting Announcement to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on March 8, 2025, with Letter No. 051/EXT/PP/CORSEC/2025. • Re-advertise/correct the Meeting Announcement to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on March 24, 2025, with Letter No. 051A/EXT/PP/CORSEC/2025.
Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS **GMS Summons**	:	• Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 8 April 2025 dengan Nomor Surat: 065/EXT/PP/CORSEC/2025. • Menyampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 8 April 2025 dengan Nomor Surat: 049/EXT/PP/CORSEC/2025. • Mengiklankan Kembali/Koreksi Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 17 April 2025 dengan Nomor Surat: 075/EXT/PP/CORSEC/2025. • Advertising the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on April 8, 2025, with Letter No. 065/EXT/PP/CORSEC/2025. • Submit proof of advertising the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on April 8, 2025, with Letter No. 049/EXT/PP/CORSEC/2025. • Re-advertise/correct the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on April 17, 2025, with Letter No. 075/EXT/PP/CORSEC/2025.
Penyelenggaraan RUPS **Convening the GMS**	:	Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2024 pada 30 April 2025 melalui rapat fisik dan media elektronik (*online*) dengan mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). The Annual GMS for the 2024 fiscal year was held on April 30, 2025, through a physical meeting and electronic media (online) by accessing the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at https://akses.ksei.co.id/, provided by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI).

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS **Announcement of the GMS Minutes Summary**	:	Mengiklankan Pengumuman Ringkasan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 2 Mei 2025 dengan Nomor Surat: 127/EXT/PP/CORSEC/2025. Advertising the Minutes Summary of the Meeting to Shareholders in the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company's website in both Indonesian and English on May 2, 2025, with Letter No. 127/EXT/PP/CORSEC/2025.
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK **Submission of the GMS Minutes Summary to OJK**	:	• Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 kepada OJK dan BEI pada tanggal 7 Mei 2025 dengan Nomor Surat: 133/EXT/PP/CORSEC/2025. • Penyampaian Kembali/Koreksi Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 kepada OJK dan BEI pada tanggal 28 Mei 2025 dengan Nomor Surat: 133A/EXT/PP/CORSEC/2025. • Submission of the GMS Minutes Summary for the 2024 Fiscal Year to OJK and IDX on May 7, 2025 with Letter No. 133/EXT/PP/CORSEC/2025. • Resubmission/Correction of the 2024 Annual GMS Minutes to OJK and IDX on May 28, 2025, with Letter No. 133A/EXT/PP/CORSEC/2025.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 30 April 2025

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the 2024 Fiscal Year Annual GMS on April 30, 2025

Dewan Komisaris dan Direksi **Board of Commissioners and Board of Directors**	**Kehadiran dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025** **Attendance at the 2024 Fiscal Year Annual GMS**	**Keterangan** **Remark**
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	✓	Seluruh Komisaris menghadiri RUPS ini. All Commissioners attended the GMS.
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	✓	
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	✓	
Direksi Board of Directors		
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	✓	Seluruh Direksi menghadiri RUPS ini. All Directors attended the GMS.
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	✓	

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 Attendance at the 2024 Fiscal Year Annual GMS	Keterangan Remark
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	✓	Seluruh Direksi menghadiri RUPS ini. All Directors attended the GMS.
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi Bidang Gedung) (Director of Building Operations)	✓	
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan legal) (Director of Risk Management and Legal)	✓	
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	✓	

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dihadiri oleh para Pemegang Saham Perusahaan yang hadir mewakili sejumlah 3.558.816.426 termasuk saham Seri A dan Seri B, atau sebesar 57,5362969% dari seluruh saham Perusahaan dengan hak suara yang sah sebanyak 6.185.341.454 saham (termasuk 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna) setelah dikurangi 14.555.900 lembar saham treasuri.

The 2024 Fiscal Year Annual GMS was attended by shareholders representing a total of 3,558,816,426 shares, including Series A and Series B shares, equivalent to 57.5362969% of the total voting shares of the Company, which amounted to 6,185,341,454 shares (including one Dwiwarna Stock Series A Share) after deducting 14,555,900 treasury shares.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 dipimpin oleh Dhony Rahajoe selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Penunjukan Dewan Komisaris No. 010/KOM/PP/03/2025 tanggal 19 Maret 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK 15/2020.

The 2024 Fiscal Year Annual GMS was chaired by Mr. Dhony Rahajoe, appointed as President Commissioner concurrently Independent Commissioner based on the Minutes of the Meeting for the Appointment of the Board of Commissioners No. 010/KOM/PP/03/2025 dated March 19, 2025, under the provisions of OJK Regulation No. 15/2020.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 telah dituangkan melalui Akta No. 39 Tanggal 30 April 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

The Summary Minutes of the Annual GMS for the 2024 Fiscal Year has been documented through Deed No. 39 dated April 30, 2025, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS.

Here are the resolutions made during the 2024 Fiscal Year Annual GMS and the implementation or follow-up actions based on the Annual GMS resolutions.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.	**Agenda 1:** Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 fiscal year, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their supervisory actions which were performed in the 2024 Fiscal Year.
Penanya: 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan 1 (satu) Pemegang Saham yang menyampaikan tanggapan.	Inquirer: One Shareholder asked questions, and one Shareholder responded.
Hasil Penghitungan Suara*: Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.558.762.426 saham, atau 99,998% Abstain = 11.211.311 saham Tidak setuju = 54.000 saham	**Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,558,762,426 shares or 99.998% Abstain = 11,211,311 shares Disagree = 54,000 shares
Hasil Keputusan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan No. 00097/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/Ill/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material." b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan No. 00289/2.1030/AU.2/12/0181-1/0/III/ 2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.	**Resolutions:** 1. Approved the Company's Annual Report including the Report on Board of Commissioners Supervisory Duties, and the Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2024 Fiscal Year ending on December 31, 2024. 2. Ratified: a. the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia) per Report No. 00097/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/Ill/2025 dated March 5, 2025, with the "unqualified" opinion. b. Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, as audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia) per Report No. 00289/2.1030/AU.2/12/0181-1/0/III/ 2025 dated March 14, 2025, with the "unqualified" opinion. 3. Granted a release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management and to the Board of Commissioners for their supervision of the Company carried out in the 2024 Fiscal Year ending on December 31, 2024, as long as such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Company's abovementioned report.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini.	**Follow-Up on Resolutions:** Shareholder approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report prepared by the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year, and the adoption of the Company's Consolidated Financial Statements, which include the Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program ending on December 31, 2024, have been recorded in the minutes of this meeting.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2024.	**Agenda 2:** Allocation of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.
Penanya: Tidak ada	**Inquirer:** None
Hasil Penghitungan Suara*: Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.558.762.426 saham, atau 99,998% Abstain = 6.415.011 saham Tidak setuju = 54.000 saham	**Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,558,762,426 shares or 99.998% Abstain = 6,415,011 shares Disagree = 54,000 shares
Hasil Keputusan: Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp415.654.077.278 ditetapkan seluruhnya sebagai Cadangan.	**Resolutions:** Determining the use of the Net Profit attributable to the owners of the Company's parent entity for the 2024 Fiscal Year amounting to Rp415,654,077,278 as Reserves.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Penetapan penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2024 telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini. Pada tahun 2025 Perusahaan tidak membayarkan dividen. Sebesar Rp415.654.077.278,- telah digunakan sebagai cadangan.	**Follow-Up on Resolutions:** The allocation of the Company's profits for the 2024 fiscal year has been recorded in the minutes of this meeting. In 2025, the Company did not pay dividends. An amount of Rp415,654,077,278,- has been allocated to a reserve fund.
Mata Acara 3: Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas Kinerja Tahun Buku 2024.	**Agenda 3:** Determination of Salaries/Honoraria, Facilities, and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, and Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for their Performance in the 2024 Fiscal Year.
Penanya: Tidak ada	**Inquirer:** None
Hasil Penghitungan Suara*: Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.558.747.726 saham, atau 99,99 Abstain = 6.415.011 saham Tidak setuju = 68.700 saham	**Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,558,747,726 shares or 99.998% Abstain = 6,415,011 shares Disagree = 68,700 shares
Hasil Keputusan: 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.	**Resolutions:** 1. Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Stock Shareholders to determine the following for the Board of Commissioners: a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the 2024 Fiscal Year performance per applicable regulations; and b. The honoraria, allowances, and facilities for the year 2025. 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Series A Dwiwarna Stock Shareholders, to determine the following for the Board of Directors: a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the 2024 Fiscal Year performance per applicable regulations; and b. The salaries, allowances, and facilities for the year 2025.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sehubungan dengan tidak diterbitkannya Surat Penetapan dari Kementerian BUMN/BP BUMN/Danantara untuk Tahun Buku 2025, maka besaran Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 tetap mengacu pada dan mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Tahun Buku 2024. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan atas komponen Gaji/ Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas dimaksud dibandingkan dengan penetapan sebelumnya, dan pembayaran kepada Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Tahun Buku 2024 yang masih berlaku.	**Follow-Up on Resolutions:** Due to the non-issuance of the Determination Letter from the SOE Ministry/BP BUMN/Danantara for the 2025 Fiscal Year, the amount of Salary/Honorarium, Allowances, and Facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year still refers to and follows the provisions as stipulated in the 2024 Fiscal Year determination. Therefore, there are no changes to the components of Salary/Honorarium, Allowances, and Facilities in question compared to the previous determination, and payments to the Board of Directors and the Board of Commissioners are made in accordance with the provisions of the 2024 Fiscal Year that remain in effect.
Mata Acara 4: Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025. **Penanya:** Tidak ada **Hasil Penghitungan Suara*:** Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.554.304.929 saham, atau 99,873% Abstain = 6.415.011 saham Tidak setuju = 4.511.497 saham **Hasil Keputusan:** 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.	**Agenda 4:** Appointment of Public Accountant Office (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the 2025 Fiscal Year. **Inquirer:** None. **Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,554,304,929 shares or 99.873% Abstain = 6,415,011 shares Disagree = 4,511,497 shares **Resolutions:** 1. Approving the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &Partners (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the 2025 fiscal year. 2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to: a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2025 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company; and b. Determine the audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Replacement Public Accountant and/ or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/ or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia), for any reason, cannot complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods in the 2025 Fiscal Year, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2025 Fiscal Year, including determining the audit fees and other requirements for the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi RSM) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025 oleh pemegang saham telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini. Terkait imbalan jasa telah ditetapkan melalui Surat Perintah Kerja antara PTPP dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi RSM) No. 4302/EXT/PP/DK/2025 tanggal 24 Oktober 2025.	**Follow-Up on Resolutions:** Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) to audit the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation Report of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) and other reports for Fiscal Year 2025 by the shareholders has been recorded in the minutes of this meeting. Regarding the fee, it has been determined under a Work Order between PTPP and the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) No. 4302/EXT/PP/DK/2025 dated October 24, 2025.
Mata Acara 5: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan. **Penanya:** Tidak ada **Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Keputusan:** Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan keputusan RUPS. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Keputusan ini tidak membutuhkan tindak lanjut. Laporan Realisasi Penggunaan Dana telah diumumkan melalui *website* BEI dan Sistem Pelaporan Elektronik OJK.	**Agenda 5:** Accountability Report on the Utilization of Funds from the Public Offering through Shelf-Registered Public Offering. **Inquirer:** None **Vote Count Result and Resolution:** The fifth agenda item is only a report and does not require a GMS resolution. **Follow-Up on Resolutions:** This decision does not require any follow-up actions. The Report on the Realization of the Use of Funds has been disclosed through the IDX website and the OJK Electronic Reporting System.
Mata Acara 6: Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun. **Penanya:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara*:** Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.558.742.026 saham, atau 99,997% Abstain = 6.596.811 saham Tidak setuju = 74.400 saham **Hasil Keputusan:** 1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pembangunan Perumahan yang mengatur penambahan program manfaat lain beserta skema pendanaannya, sebagaimana telah direkomendasikan oleh Laporan Aktuaris Independen dan telah melalui kajian internal sesuai prinsip kehati-hatian; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.	**Agenda 6:** Approval of Pension Fund Regulation Amendments. **Inquirer:** None. **Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,558,724,026 shares or 99.997% Abstain = 6,596,811 shares Disagree = 74,400 shares **Resolutions:** 1. Approve amendments to the Pension Fund Regulations of the Housing Development Pension Fund that regulate the addition of other benefit programs and their funding schemes, as recommended by the Independent Actuary's Report and reviewed internally in accordance with the principle of prudence; and 2. Granting authority and power to Series A Dwiwarna Stock Shareholders to approve any amendments to the Pension Fund Regulations, which result in changes to funding and/or changes to the amount of Pension Benefits that the Founder bears.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Dana Pensiun Pembangunan Perumahan bersama PT PP (Persero) Tbk selaku Pendiri telah memproses dan menyampaikan pengajuan perubahan Peraturan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 September 2025. Seiring dengan adanya perubahan struktur dan mekanisme kewenangan persetujuan Pendiri, di mana kewenangan yang sebelumnya berada pada Kementerian BUMN/BP BUMN dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sesuai ketentuan yang berlaku, maka diperlukan penyesuaian dan pelimpahan kewenangan persetujuan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menindaklanjuti pelimpahan kewenangan persetujuan Peraturan Dana Pensiun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025, guna memastikan kesesuaian kewenangan Pendiri serta keberlanjutan proses persetujuan Peraturan Dana Pensiun oleh OJK.	**Follow-Up on Resolutions:** The Pembangunan Perumahan Pension Fund, together with PT PP (Persero) Tbk, as the Founder, processed and submitted a request for amendments to the Pension Fund Regulations to the Financial Services Authority (OJK) on September 30, 2025. Following the changes in the structure and mechanism for the Founder's approval authority, whereby authority previously held by the SOE Ministry/BP BUMN has been transferred to the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) in accordance with applicable regulations, adjustments, and delegation of approval authority for the Amendments to the Pension Fund Regulations are required. In this regard, the Company will follow up on the delegation of authority for the approval of the Pension Fund Regulations at the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS) to ensure the appropriateness of the Founder's authority and the continuity of OJK's approval process for the Pension Fund Regulations.
Mata Acara 7: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan. **Penanya:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara*:** Hadir = 3.558.816.426 saham Jumlah suara setuju = 3.508.206.221 saham, atau 98,578% Abstain = 6.596.811 saham Tidak setuju = 50.610.205 saham **Hasil Keputusan:** 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan: i. Direktur Utama : Novel Arsyad ii. Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo iii. Komisaris : Hedy Rahadian Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 4 Juni 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 4 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Tanggal 25 Mei 2021, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 4 Juni 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perusahaan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan: i. Direktur Utama: Novel Arsyad ii. Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo iii. Komisaris: Hedy Rahadian 3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	**Agenda 7:** Approval of Changes in the Company's Management Structure. **Inquirer:** None. **Vote Count Result*:** Present = 3,558,816,426 shares Total votes in favor = 3,508,206,221 shares or 98.578% Abstain = 6,598,811 shares Disagree = 50,610,205 shares **Resolutions:** 1. Respectfully dismissing the names mentioned below as the Management of the Company: i. President Director: Novel Arsyad ii. Director of Infrastructure Operations: Yul Ari Pramuraharjo iii. Commissioner: Hedy Rahadian Who were appointed respectively based on the Resolution of the 2019 Fiscal Year Annual GMS dated June 4, 2020, Resolution of the 2019 Fiscal Year Annual GMS dated June 4, 2020 jo. Resolution of the 2020 Fiscal Year, and Resolution of the 2019 Fiscal Year Annual GMS dated June 4, 2020, effective from the closing of this GMS, with gratitude for the contribution of energy and thought given during their tenure as the Company's Management. 2. Appointing the following names as the Company's Management: i. President Director: Novel Arsyad ii. Director of Infrastructure Operations: Yul Ari Pramuraharjo iii. Commissioner: Hedy Rahadian 3. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as referred to in point 2, follows the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the Laws and Regulations in the capital market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut: **Direksi** i. Direktur Utama: Novel Arsyad ii. Direktur Keuangan: Agus Purbianto iii. Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Tommy Wiranata Anwar iv. Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa v. Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo vi. Direktur Strategi Korporasi dan HCM: I Gede Upeksa Negara **Dewan Komisaris** i. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe ii. Komisaris Independen: Istiono iii. Komisaris: Ernadhi Sudarmanto iv. Komisaris Independen: Jaya Kesuma v. Komisaris Independen: Pundjung Setya Brata vi. Komisaris: Hedy Rahadian	4. With the dismissal and appointment of Company Management as referred to in numbers 1 and 2, the composition of the Company's Management is as follows: **Board of Directors** i. President Director: Novel Arsyad ii. Director of Finance: Agus Purbianto iii. Director of Risk Management and Legal: Tommy Wiranata Anwar iv. Director of Building Operations: Yuyus Juarsa v. Director of Infrastructure Operations: Yul Ari Pramuraharjo vi. Director of Corporate Strategy and HCM: I Gede Upeksa Negara **Board of Commissioners** i. President Commissioner concurrently Independent Commissioner: Dhony Rahajoe ii. Independent Commissioner: Istiono iii. Commissioner: Ernadhi Sudarmanto iv. Independent Commissioner: Jaya Kesuma v. Independent Commissioner: Pundjung Setya Brata vi. Commissioner: Hedy Rahadian
5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.	5. If any Director and Commissioner appointed, as referred to in point 2, still holds another position prohibited by laws and regulations to be concurrent with the position of a Board of Directors and Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise, the individual must resign or be dismissed from that position.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.	6. Granting authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to declare the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary Public or authorized officer, and to make adjustments or necessary corrections if required by the competent authority to implement the resolutions of the meeting.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Meeting Agenda and Resolutions, as well as Follow-up on 2024 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:	**Follow-Up on Resolutions:** Following the dismissals, changes in job nomenclatures, reassignments, and appointments of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as reffered, the composition of the Company's Management is as follows:
Direksi 1. Direktur Utama: Novel Arsyad 2. Direktur Keuangan: Agus Purbianto 3. Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Tommy Wiranata Anwar 4. Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa 5. Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo 6. Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : I Gede Upeksa Negara	**Board of Directors** 1. President Director: Novel Arsyad 2. Director of Finance: Agus Purbianto 3. Director of Risk Management and Legal Affairs: Tommy Wiranata Anwar 4. Director of Building Operations: Yuyus Juarsa 5. Director of Infrastructure Operations: Yul Ari Pramuraharjo 6. Director of Corporate Strategy and Human Capital Management: I Gede Upeksa Negara
Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe 2. Komisaris: Ernadhi Sudarmanto 3. Komisaris: Hedy Rahadian 4. Komisaris Independen: Pundjung Setya Brata 5. Komisaris Independen: Jaya Kesuma 6. Komisaris Independen: Istiono	**Board of Commissioners** 1. President Commissioner and Independent Commissioner: Dhony Rahajoe 2. Commissioner: Ernadhi Sudarmanto 3. Commissioner: Hedy Rahadian 4. Independent Commissioner: Pundjung Setya Brata 5. Independent Commissioner: Jaya Kesuma 6. Independent Commissioner: Istiono

*) Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
*) Under the provisions of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), abstentions are considered to be votes cast in line with the majority of shareholders who voted in the Meeting.

Seluruh keputusan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 di atas telah ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan, sebagaimana dapat dilihat pada keterangan di atas.

All shareholder resolutions in the 2024 Fiscal Year Annual GMS held on April 30, 2025, above have been followed up by the Company's management, as evident in the information above.

RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 | The 2025 Extraordinary GMS on December 18, 2025

Berikut informasi penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025.

The following is information regarding the Extraordinary GMS for 2025 on December 18, 2025.

Jenis Rapat **Meeting Type**	:	RUPS LB Tahun 2025 2025 EGMS
Hari/Tanggal **Day/Date**	:	Kamis, 18 Desember 2025 Thursday, December 18, 2025
Waktu **Time**	:	Pukul 14.44 s.d 15.14 14.44 until 15.14
Tempat **Venue**	:	Plaza PP Lantai 1, Wisma Subiyanto, Jakarta Plaza PP 1st Floor, Wisma Subiyanto, Jakarta
Penghitung Suara Independen **Independent Vote Counter**	:	PT BSR Indonesia

Pemenuhan Peraturan dan Perundang-undangan atas Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025

Compliance with the Regulations and Laws on the 2025 Extraordinary GMS on December 18, 2025

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan BEI **Notification of GMS Implementation Plan to OJK and IDX**	:	Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS Tahunan kepada OJK dan BEI melalui Surat No. 267/EXT/PP/CORSEC/2025 tanggal 4 November 2025. Notify the plan to conduct Extraordinary GMS to OJK and IDX through Letter No. 267/EXT/PP/CORSEC/2025 dated November 4, 2025.
Pengumuman Penyelenggaraan RUPS **GMS Announcement**	:	• Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Surat: 275/EXT/PP/CORSEC/2025. • Menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Surat: 270/EXT/PP/CORSEC/2025. • Advertising the Meeting Announcement to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 11, 2025, with Letter No. 275/EXT/PP/CORSEC/2025. • Submitting Proof of Meeting Announcement Advertisement to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 11, 2025, with Letter No. 270/EXT/PP/CORSEC/2025.
Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS	:	• Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor Surat: 282/EXT/PP/CORSEC/2025. • Mengiklankan Kembali/Koreksi Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor Surat: 282A/EXT/PP/CORSEC/2025. • Menyampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor Surat: 281/EXT/PP/CORSEC/2025. • Mengiklankan Kembali/Koreksi Bukti Iklan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris masing-masing pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor Surat: 281A/EXT/PP/CORSEC/2025

GMS Summons	:	• Advertising the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 26, 2025, with Letter No. 282/EXT/PP/CORSEC/2025. • Re-advertise/Correct the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 26, 2025, with Letter No. 282/EXT/PP/CORSEC/2025. • Submit proof of advertising the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 26, 2025, with Letter No. 281/EXT/PP/CORSEC/2025. • Re-advertise/Correct the proof of advertising the Meeting Summons to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on November 26, 2025, with Letter No. 281A/EXT/PP/CORSEC/2025.
Penyelenggaraan RUPS **Convening the GMS**	:	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada 18 Desember 2025 melalui rapat fisik dan media elektronik (*online*) dengan mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). The 2025 Extraordinary GMS was held on December 18, 2025, through a physical meeting and electronic media (online) by accessing the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at https://akses.ksei.co.id/, provided by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI).
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS **Announcement of the GMS Minutes Summary**	:	• Mengiklankan Pengumuman Ringkasan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 19 Desember 2025 dengan Nomor Surat: 300/EXT/PP/CORSEC/2025 • Menyampaikan Bukti Iklan Ringkasan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI dalam Bahasa Indonesia, Sistem Pelaporan Elektronik OJK dalam Bahasa Indonesia dan situs web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing pada tanggal 22 Desember 2025 dengan Nomor Surat: 301/EXT/PP/CORSEC/2025 • Advertising the Minutes Summary of the Meeting to Shareholders in the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company's website in both Indonesian and English on December 19, 2025, with Letter No. 300/EXT/PP/CORSEC/2025. • Submit proof of advertising the Minutes Summary of the Meeting to Shareholders on the IDX website in Indonesian, the OJK Electronic Reporting System in Indonesian, and the Company website in Indonesian and English on December 22, 2025, with Letter No. 301/EXT/PP/CORSEC/2025.
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK **Submission of the GMS Minutes Summary to OJK**	:	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2025 kepada OJK dan BEI pada tanggal 9 Januari 2026 dengan Nomor Surat: 300 /EXT/PP/CORSEC/2025 Submission of the Extraordinary GMS Minutes Summary for the 2025 Fiscal Year to OJK and IDX on January 9, 2026, with Letter No. 300 /EXT/PP/CORSEC/2025.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the 2025 Extraordinary GMS on December 18, 2025

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2025 Attendance at the 2025 Extraordinary GMS	Keterangan Remark
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	✓	Seluruh Komisaris menghadiri RUPS ini. All Commissioners attended the GMS.
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓	
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	✓	
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	✓	
Direksi Board of Directors		
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	✓	Seluruh Direksi menghadiri RUPS ini. All Directors attended the GMS.
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	✓	
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	✓	
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi Bidang Gedung) (Director of Building Operations)	✓	
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan legal) (Director of Risk Management and Legal)	✓	
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	✓	

RUPS Luar Biasa Tahun 2025 dihadiri oleh para Pemegang Saham Perusahaan yang hadir mewakili sejumlah 4.300.242.585 termasuk saham Seri A dan Seri B, atau sebesar 69,5231236% dari seluruh saham Perusahaan dengan hak suara yang sah sebanyak 6.185.341.454 saham (termasuk 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna) setelah dikurangi 14.555.900 lembar saham treasuri.

The 2025 Extraordinary GMS was attended by shareholders representing a total of 4,300,242,585 shares, including Series A and Series B shares, equivalent to 69.5231236% of the total voting shares of the Company, which amounted to 6,185,341,454 shares (including one Dwiwarna Stock Series A Share) after deducting 14,555,900 treasury shares.

RUPS Luar Biasa Tahun 2025 dipimpin oleh Hedy Rahadian selaku Komisaris Perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Penunjukan Dewan Komisaris untuk Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk/ PTPP No. 056/KOM/PP/11/2025 tanggal 17 November 2025 dan telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perusahaan *juncto* Pasal 37 ayat 1 POJK 15.

The 2025 Extraordinary GMS was chaired by Mr. Hedy Rahadian as the Company Commissioner appointed based on the Minutes of the Appointment of the Board of Commissioners to Chair the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero)/PTPP No. 056/KOM/PP/11/2025 dated November 17, 2025, and is in accordance with Article 24 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 37 paragraph 1 of POJK 15.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 telah dituangkan melalui Akta No.35 tanggal 8 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

The Summary Minutes of the 2025 Extraordinary GMS has been documented through Deed No. 35 dated December 8, 2025, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS.

Here are the resolutions made during the 2025 Extraordinary GMS and the implementation or follow-up actions based on the GMS resolutions.

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025	Resolutions and Follow-up on 2025 Extraordinary GMS Resolutions
Mata Acara 1: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	**Agenda 1:** Approval of Amendments to the Articles of Association
Penanya: Tidak ada	**Inquirer:** None
Hasil Penghitungan Suara*: Hadir = 4.300.242.585 saham Setuju = 4.241.841.736 saham atau 98,6419173% dari seluruh suara yang hadir Abstain = 10.335.385 saham Tidak setuju = 58.400.849 saham	**Vote Count Result*:** Present = 4,300,242,585 shares Agree = 4,241,841,736 shares or 98.6419173% of those present Abstain = 10,335,385 shares Disagree = 58,400,849 shares

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, apabila hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Perusahaan sudah menyesuaikan hasil rapat dan sudah mengesahkannya dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 06 Tanggal 13 Januari 2026 dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0013103 Tanggal 15 Januari 2026

Resolutions and Follow-up on 2025 Extraordinary GMS Resolutions

Resolutions:

1. Approving amendments to the Company's Articles of Association, among other things, to comply with laws and regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, including approving amendments to Article 5 of the Company's Articles of Association regarding adjustments to the special rights attached to Series A Dwiwarna Stock Shares owned by the Republic of Indonesia;
2. Approving the rewriting of all provisions in the Company's Articles of Association into a complete codification in connection with the amendments referred to in point 1 of the above resolution;
3. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting, including drafting and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and granting power with the right of substitution to submit to the competent authorities to obtain a receipt of notification and approval of amendments to the Articles of Association of the Company, as well as to do everything deemed necessary and useful for this purpose without exception, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association, if required by the competent authorities.

Follow-Up on Resolutions:

The Company has incorporated the results of the meeting and formalized them in the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association No. 06 dated January 13, 2026, executed before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, who has obtained approval from the Law and Human Rights Minister No. AHU-AH.01.03.0013103 dated January 15, 2026.

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025	Resolutions and Follow-up on 2025 Extraordinary GMS Resolutions
Mata Acara 2: Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya	**Agenda 2:** Delegation of Authority for Approval of the 2026 Company Work Plan and Budget (RKAP), including Amendments.
Penanya: 1 (satu) orang	**Inquirer:** One person
Hasil Penghitungan Suara*: Hadir = 4.300.242.585 saham Setuju = 4.294.800.588 saham atau 99,8734491% dari seluruh suara yang hadir Abstain = 10.335.385 saham Tidak setuju = 5.441.997 saham	**Vote Count Result*:** Present = 4,300,242,585 shares Agree = 4,294,800,588 shares or 99.8734491% of those present Abstain = 10,335,385 shares Disagree = 5,441,997 shares
Hasil Keputusan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.	**Resolutions:** Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Series B Shareholders, to approve the Company's 2026 Work Plan and Budget (RKAP), including any amendments thereto.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 melalui surat No. 004/KOM/PP/01/2026 tanggal 30 Januari 2026. Sebelumnya dewan komisaris telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak dalam hal ini PT Danantara Asset Management melalui surat No. SR.014/DI-DAM/MDONFS2/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahun 2026 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	**Follow-Up on Resolutions:** The Board of Commissioners has approved the Company's 2026 Work Plan and Budget (RKAP) through letter No. 004/KOM/PP/01/2026 dated 30 January 2026. Previously, the Board of Commissioners had obtained written approval from the majority Series B Shareholder, in this case PT Danantara Asset Management, through letter No. SR.014/DI-DAM/MDONFS2/2026 dated 30 January 2026 regarding the Approval of the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Seluruh keputusan pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025 di atas telah ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan, sebagaimana dapat dilihat pada keterangan di atas.

All shareholder decisions in the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 18, 2025 above have been followed up by the Company's management, as can be seen in the above information.

Informasi tentang RUPS di Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 24 April 2024. Berikut disampaikan informasi atas masing-masing RUPS.

Information on GMS in 2024 and Follow-up on GMS Resolutions by Management

Throughout 2024, the Company held one GMS, the 2023 Fiscal Year Annual GMS on April 24, 2024. Here is the information about the GMS.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Tanggal 24 April 2024 | The 2023 Fiscal Year Annual GMS on April 24, 2024

Berikut informasi penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 24 April 2024.

Here is the information on the 2023 Fiscal Year Annual GMS on April 24, 2024.

Jenis Rapat **Meeting Type**	:	RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 The 2023 Fiscal Year Annual GMS
Hari/Tanggal **Day/Date**	:	Rabu, 24 April 2024 Wednesday, April 24, 2024
Waktu **Time**	:	Pukul 14.00 s.d selesai 14.00–adjournment
Tempat **Venue**	:	Plaza PP Lantai 1, Wisma Subiyanto, Jakarta Plaza PP 1st floor, Wisma Subiyanto, Jakarta
Penghitung Suara Independen **Independent Vote Counter**	:	PT BSR Indonesia

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 telah dituangkan melalui Akta No. 38 tanggal 24 April 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, notaris di Jakarta.

The Summary Minutes of the Annual GMS for the 2023 Fiscal Year has been documented through Deed No. 38 dated April 24, 2024, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, notary in Jakarta.

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS.

Here are the resolutions made during the 2023 Fiscal Year Annual GMS and the implementation or follow-up actions based on the Annual GMS resolutions.

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	Resolutions and Follow-up on 2023 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun buku 2023 sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.	**Agenda 1:** Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 fiscal year, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions which were performed in the 2023 Fiscal Year.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini.	**Follow-Up on Resolutions:** Shareholders' approval of the Company's Annual Report, including the Report on the Supervisory Duties by the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, including the Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program, which ended on December 31, 2023, have been recorded in the deed of resolution of this meeting.

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	Resolutions and Follow-up on 2023 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2023. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Penetapan penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2023 telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini. Di tahun 2024 Perusahaan tidak membayarkan dividen. Sebesar Rp481.379.208.573 telah digunakan sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.	**Agenda 2:** Allocation of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year. **Follow-Up on Resolutions:** The determination of the Company's profit allocation for the 2023 fiscal year has been recorded in the minutes of this meeting's resolution. In 2024, the Company did not pay dividends. An amount of Rp481,379,208,573,- has been allocated as undesignated reserves.
Mata Acara 3: Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) untuk tahun buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Berdasarkan Surat Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN No. SR-292/Wk.MBU.10/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tahun 2024, Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Kementerian BUMN menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023. Seluruh tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2024 telah dibayarkan oleh Perusahaan.	**Agenda 3:** Remuneration Determination (Salaries/Honoraria, Facilities, and Allowances) for the 2024 Fiscal Year, as well as Bonus/Performance Incentive for the 2023 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company **Follow-Up on Resolutions:** Per the Letter of the Business Infrastructure Undersecretary Assistant of the SOE Ministry No. SR-292/Wk.MBU.10/08/2024 dated August 23, 2024, on the Determination of the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk in 2024, the Government of Indonesia as Series A Golden Stock Shareholder through the SOE Ministry determines the amount of Remuneration (Salaries/Honoraria, Facilities, and Benefits) for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year as well as Bonuses/Performance Incentives for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2023 Fiscal Year. All bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year, and salaries/honoraria along with facilities and other allowances for the 2024 Fiscal Year, have been paid by the Company.
Mata Acara 4: Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi RSM) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024 oleh pemegang saham telah dicatat dalam akta keputusan rapat ini. Terkait imbalan jasa telah ditetapkan melalui Surat Perintah Kerja antara PTPP dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi RSM) No. 3863/EXT/PP/DK/2024 tanggal 13 September 2024.	**Agenda 4:** Appointment of Public Accountant Office (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year. **Follow-Up on Resolutions:** The appointment of Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) to audit the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for the 2024 Fiscal Year by the shareholders has been recorded in the deed of resolution of this meeting. Related service fees have been stipulated in a Work Order between PTPP and KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (affiliated with RSM) No. 3863/EXT/PP/DK/2024 dated September 13, 2024.

Keputusan serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	Resolutions and Follow-up on 2023 Fiscal Year Annual GMS Resolutions
Mata Acara 5: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Keputusan ini tidak membutuhkan tindak lanjut. Laporan Realisasi Penggunaan Dana telah diumumkan melalui *website* BEI dan Sistem Pelaporan Elektronik OJK.	**Agenda 5:** Accountability Report on the Utilization of Funds from the Public Offering through Shelf-Registered Public Offering. **Follow-Up on Resolutions:** This resolution does not require any follow-up. The Report on the Utilization of Funds has been announced through the IDX website and the OJK Electronic Reporting System.
Mata Acara 6: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, 3, dan 4 maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut: 1. Direksi a. Direktur Utama - Novel Arsyad b. Direktur Keuangan - Agus Purbianto c. Direktur Manajemen Risiko dan Legal - Tommy Wiranata Anwar d. Direktur Operasi Bidang Gedung - Yuyus Juarsa e. Direktur Operasi Bidang Infrastruktur - Yul Ari Pramuraharjo f. Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management - I Gede Upeksa Negara 2. Dewan Komisaris a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - Dhony Rahajoe b. Komisaris - Ernadhi Sudarmanto c. Komisaris - Hedy Rahadian d. Komisaris Independen - Pundjung Setya Brata e. Komisaris Independen - Jaya Kesuma f. Komisaris Independen - Istiono	**Agenda 6:** Approval of Changes in the Company's Management Structure. **Follow-Up on Resolutions:** With the dismissal, changes in position nomenclature, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in numbers 1, 2, 3, and 4, the composition of the Company's Management is as follows: 1. Board of Directors a. President Director - Novel Arsyad b. Director of Finance - Agus Purbianto c. Director of Risk Management and Legal - Tommy Wiranata Anwar d. Director of Building Operations - Yuyus Juarsa e. Director of Infrastructure Operations - Yul Ari Pramuraharjo f. Director of Corporate Strategy and Human Capital Management - I Gede Upeksa Negara 2. Board of Commissioners a. President Commissioner concurrently Independent Commissioner - Dhony Rahajoe b. Commissioner - Ernadhi Sudarmanto c. Commissioner - Hedy Rahadian d. Independent Commissioner - Pundjung Setya Brata e. Independent Commissioner - Jaya Kesuma f. Independent Commissioner - Istiono

Seluruh keputusan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024 di atas telah ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan, sebagaimana dapat dilihat pada keterangan di atas.

All shareholder resolutions in the 2023 Fiscal Year Annual GMS held on April 24, 2024, above have been followed up by the Company's management, as evident in the information above.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Commissioners, as a Company organ, has the collective and collegial duty and responsibility to supervise and provide independent advice to the Board of Directors related to the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities in managing the Company and ensuring that the Company has implemented GCG principles. The Board of Commissioners' accountability to the GMS embodies supervisory accountability for the management of the Company in implementing GCG principles.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Board of Commissioners Terms of Office

Under the Company's Articles of Association as stated in Deed No. 31 of 2023, members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth GMS after the date of appointment, provided that they may not exceed five years, with due observance to the Capital Market regulations and without prejudice to the GMS right to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. After their term of office ends, a member of the Board of Commissioners can be re-appointed by the GMS for one more term.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2025

Di tahun 2025, pemegang saham memutuskan tidak melakukan perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris; pemegang saham memutuskan untuk mengangkat kembali Hedy Rahadian selaku Komisaris untuk periode ke-2.

Number, Composition, and Structure of the Board of Commissioners in 2025

In 2025, shareholders decided not to change the composition of the Board of Commissioners; they reappointed Hedy Rahadian as Commissioner for a second term.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025
Board of Commissioners' Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Menjabat Service Period
Dhony Rahajoe	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023 Extraordinary GMS Resolution dated December 13, 2023	13 Desember 2023 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 December 13, 2023, until the closing of the GMS held in 2028	Pertama First

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Menjabat Service Period
Istiono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 5 April 2022 Annual GMS Resolution for the 2021 Fiscal Year dated April 5, 2022	5 April 2022 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 5, 2022, until the closing of the GMS held in 2027	Pertama First
Jaya Kesuma	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023 Extraordinary GMS Resolution dated December 13, 2023	13 Desember 2023 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 December 13, 2023, until the closing of the GMS held in 2028	Pertama First
Pundjung Setya Brata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 2023 tanggal 24 April 2024 Annual GMS Resolution for the 2023 Fiscal Year dated April 5, 2024	24 April 2024 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 April 24, 2024, until the closing of the GMS held in 2029	Pertama First
Ernadhi Sudarmanto	Komisaris Commissioner	• Periode ke-2: Keputusan RUPS Tahunan 2023 tanggal 24 April 2024 • Periode ke-1: Keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 30 April 2019 • Second Period: Annual GMS Resolution for the 2023 Fiscal Year dated April 24, 2024 • First Period: Annual GMS Resolution for the 2018 Fiscal Year dated April 30, 2019	24 April 2024 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 April 24, 2024, until the closing of the GMS held in 2029	Kedua Second
Hedy Rahadian	Komisaris Commissioner	• Periode ke-2: Keputusan RUPS Tahunan 2024 tanggal 30 April 2025 • Periode ke-1: Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 • Second Period: Annual GMS Resolution for the 2024 Fiscal Year dated April 30, 2025 • First Period: Annual GMS Resolution for the 2019 Fiscal Year dated June 4, 2020	30 April 2025 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030 April 30, 2025, until the closing of the GMS held in 2030	Kedua Second

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 6 (enam) orang, di mana 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan Komisaris Independen, atau 66,67% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris. Dengan demikian komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

There are six members of the Board of Commissioners; one person is the President Commissioner serving concurrently as the Independent Commissioner, and three are Independent Commissioners or 66.67% of the Board of Commissioners total number. Therefore, the Company's Board of Commissioners composition has met the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies

The profile of all members of the Board of Commissioners is available in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Board Manual: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris PTPP yang disahkan dan diperbarui oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Dewan

Board of Commissioners Manual and Main Programs of the Board of Commissioners

In performing their duties, the Board of Commissioners has Board of Commissioners Manual and Main Programs Implementation of the Board of Commissioners which were approved by the Board of Commissioners with

Komisaris No. 10/SK/KOM/PP/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) PT PP (Persero) Tbk. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris PTPP ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris PTPP tersebut, antara lain menjelaskan secara terperinci penerapan GCG dalam Perusahaan yang mencakup aspek-aspek:

1. Organ dan proses organisasi Dewan Komisaris, mencakup Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, rapat-rapat Dewan Komisaris, kunjungan kerja, tugas khusus Dewan Komisaris, akses Dewan Komisaris terhadap informasi Perusahaan, dan penyediaan data dan informasi bagi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2. Pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris, mencakup:
   a. Proses tata kelola internal Dewan Komisaris, yang berisi: program pengenalan anggota Dewan Komisaris; peningkatan kapasitas anggota Dewan Komisaris; penyusunan dan penetapan program kerja Dewan Komisaris; pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris; penetapan ukuran kinerja secara kolegial dan individual serta penilaian kinerja, baik untuk Dewan Komisaris maupun Direksi; penetapan ukuran kinerja dan penilaian kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris (OPD); penyusunan Sistem Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi; penyusunan dan pengajuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; pemberhentian Direksi sementara, dan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa terkait pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris; pemberian persetujuan atas Calon Pejabat Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan; pengawasan atas proses penunjukan Wakil Perusahaan yang akan diusulkan menjadi Calon Direktur dan/atau Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan; penanganan potensi benturan kepentingan pada Dewan Komisaris; serta penunjukan Penilai (*Assessor*) GCG lndependen;

   b. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, yang berisi: pemantauan atas perubahan lingkungan bisnis; pemberian arahan

Decree No. 10/SK/KOM/PP/12/2022 dated December 16, 2022, on the Establishment of Board of Commissioners Manual and Main Program Implementation at PT PP (Persero) Tbk. The Board of Commissioners Manual and Main Program Implementation are periodically reviewed if deemed necessary by considering the applicable laws and regulations.

The PTPP Board of Commissioners Manual and Main Program explain the GCG implementation in the Company in detail, which includes aspects of:

1. The Board of Commissioners organizational organs and processes, including the Board of Commissioners, President Commissioner, Secretary to the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, Board of Commissioners meetings, work visits, special duties of the Board of Commissioners, Board of Commissioners access to Company information, and provision of data and information for performing the Board of Commissioners duties.
2. The manual for implementing the duties and activities of the Board of Commissioners includes:
   a. The process of internal governance of the Board of Commissioners which contains: an induction program for members of the Board of Commissioners; capacity building for members of the Board of Commissioners; preparation and determination of the work program of the Board of Commissioners; division of duties and responsibilities of members of the Board of Commissioners; determining collegial and individual performance measures as well as performance appraisal, both for the Board of Commissioners and the Board of Directors; determining the performance measurement and performance evaluation of the Board of Commissioners Supporting Organs (OPD); preparation of the Nomination System for the Board of Commissioners and Board of Directors; preparation and submission of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors; temporary dismissal of the Board of Directors, and holding of an Extraordinary GMS regarding the temporary dismissal of the Board of Directors by the Board of Commissioners; granting approval for Candidates for Head of Internal Audit Unit Bureau and Corporate Secretary; supervising the process of appointing Company Representatives who will be proposed as Candidates for Directors and/or Commissioners in subsidiaries/joint ventures; handling potential conflicts of interest in the Board of Commissioners; as well as the appointment of an Independent GCG Assessor;
   b. Implementation of duties and supervisory functions of the Board of Commissioners, which contains: monitoring of changes in the business

dalam penyusunan visi misi Perusahaan; pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP; pemberian persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan Dewan Komisaris; respon Dewan Komisaris atas masukan yang diterima dari *stakeholders*; pengawasan atas pelaksanaan RJPP dan RKAP; pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan, pengawasan dan penelaahan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern, kebijakan risiko Perusahaan, desain dan implementasi sistem teknologi informasi Perusahaan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan pengadaan barang/jasa, kebijakan mutu Perusahaan, sistem GCG, dan fungsi tata kelola terintegrasi; pelaporan atas gejala penurunan kinerja Perusahaan; penggantian, penunjukan dan pengajuan calon auditor eksternal; penilaian efektivitas pelaksanaan tugas auditor; serta pemantauan atas tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.

environment; providing directive in preparing the Company's vision and mission; giving approval for RJPP and RKAP draft; giving approval to the Board of Directors' proposal which requires the response of the Board of Commissioners; the response of the Board of Commissioners to the input received from stakeholders; supervising RJPP and RKAP implementation; supervising the Company's compliance with laws and regulations, supervising and reviewing the internal control systems implementation, Company risk policies, design and implementation of Company information technology systems, Human Resources management, accounting policies and financial reporting, policies on procurement of goods/services, policies corporate quality, GCG systems, and integrated governance functions; reporting of symptoms of decreasing Company performance; replacement, appointment and submission of candidates for external auditors; assessment of the effectiveness of the implementation of the auditor's duties; as well as monitoring the follow-up of decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners.

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Dewan Komisaris PTPP, maka tugas, tanggung jawab, wewenang serta kewajiban Dewan Komisaris PTPP adalah sebagai berikut:

- **Tugas Dewan Komisaris**

  Tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

- **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
  1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Duties, Responsibilities, Authorities, and Obligations of the Board of Commissioners

Based on the Guidelines for the Implementation of Duties and Programs of the Board of Commissioners of PTPP the duties, responsibilities, authorities and obligations of the Board of Commissioners of PTPP are as follows:

- **Board of Commissioners Duties**

  The duties of the Board of Commissioners, based on applicable regulations and the Company's Articles of Association, are supervising the management policies and general course of management, both regarding the Company and its business conducted by the Board of Directors. They also provide advice to the Board of Directors, including controlling the implementation of the Company's Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders, legal regulations, and regulations in the field of the Capital Market, for the Company's interests and in line with the Company's purposes and objectives.

- **Board of Commissioners Responsibilities**
  1. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually; they can only act based on decisions made by the Board of Commissioners.
  2. Each member of the Board of Commissioners is jointly responsible for losses incurred by the Company due to errors or omissions by members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses incurred by the Company as mentioned above if they can prove:
   a. The loss is not due to their errors or omissions;
   b. They have supervision with good faith, full responsibility, and prudence for the interests and in line with the purposes and objectives of the Issuer or Public Company;
   c. They do not have any direct or indirect conflicts of interest regarding supervision actions that result in losses; and
   d. They have taken actions to prevent the occurrence or continuation of such losses.

▶ **Wewenang Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, meliputi:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal;

▶ **Board of Commissioners Authority**

Under the Articles of Association, the Board of Commissioners is authorized to give approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions, including:

1. Examine books, letters, and other documents, examine the cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Enter the yard, building, and office used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/ or other officials on any issues related to the Company's management;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be performed by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend the Board of Commissioners Meeting;
6. Appoint and dismiss a Secretary to the Board of Commissioners;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors per the provisions of the Articles of Association;
8. Establish an Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, and other committees if necessary with due observance of the Company's capability;
9. Use experts for certain matters and within a certain period at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Conduct the Company's management action in certain circumstances for a certain period per the provisions of the Articles of Association;
11. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or the Head of Internal Audit;

12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

▶ **Kewajiban Dewan Komisaris**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
5. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Attend the Board of Directors meetings and provide views on matters discussed; and
13. Perform other supervisory authority as long as it does not violate the laws and regulations, Articles of Association, and/or General Meeting of Shareholders' resolutions.

▶ **Board of Commissioners Obligations**

1. Provide advice to the Board of Directors in conducting the Company's management;
2. Provide opinion and approval for the Company's Annual Work Plan and Budget, as well as other work plans prepared by the Board of Directors, following the provisions of these Articles of Association;
3. Follow the Company's activity development, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on any matter deemed necessary for the Company's management;
4. Report to the Series A Dwiwarna Stock Shareholders in the event of any declining tendency in the Company's performance;
5. Propose the appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's books to the General Meeting of Shareholders;
6. Examine and review the periodic report and Annual Report prepared by the Board of Directors, including signing the Annual Report;
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders on the Annual Report, if requested;
8. Prepare minutes of Board of Commissioners Meetings and keep a copy;
9. Report their and/or their family's ownership of shares of the Company and other companies to the Company;
10. Provide a report on the supervisory duties performed in the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders;
11. Explain all matters questioned or requested by Series A Dwiwarna Stock Shareholders with due observance of the laws and regulations, mainly those applicable in the Capital Market sector; and
12. Perform other obligations in the framework of supervisory and advisory duties, as long as they do not violate the laws and regulations, articles of association, and/or the General Meeting of Shareholders' resolutions.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

In performing their duties, each member of the Board of Commissioners must:
1. Comply with the Articles of Association and applicable regulations as well as principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
2. Act in good faith and with prudence, and be responsible for performing supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and per the intentions and objectives of the Company.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PTPP (Persero) Tbk Tahun 2024.

Division of Duties Among the Board of Commissioners

The Board of Commissioners regulates the division of work among its members and for the smooth performance of duties based on the Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/05/2024 dated May 3, 2024, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PTPP (Persero) Tbk in 2024.

Dhony Rahajoe

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | **President Commissioner concurrently Independent Commissioner**

Mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan: a. Kegiatan Anggota Dewan Komisaris; b. Penyelenggaraan hingga keputusan RUPS /RUPSLB; dan c. Hubungan dengan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.	Coordinating matters related to: a. Members of the Board of Commissioners Activities; b. GMS/EGMS organization and resolutions; and c. Relations with the Shareholders and other stakeholders.

Istiono

Komisaris Independen | **Independent Commissioner**

a. Kebijakan dan *monitoring* pelaksanaan audit (internal dan eksternal); b. Kebijakan, pelaksanaan dan *monitoring* atas persetujuan Investasi/Aksi korporasi; dan c. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Bisnis.	a. Audit policy and monitoring (internal and external); b. Policy, implementation, and monitoring with the approval of Investment/Corporate Action; and c. Policy and Implementation of Business Development.

Jaya Kesuma

Komisaris Independen | **Independent Commissioner**

a. Kebijakan dan pelaksanaan aspek Legal/Hukum serta kepatuhan peraturan perundang-undangan; b. Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan, remunerasi dan nominasi); dan c. Kebijakan dan pelaksanaan bidang CSR dan TJSL.	a. Policy and implementation of Legal/Law aspects and regulatory compliance; b. Human Capital policy and management (development, remuneration, and nomination); and c. CSR and TJSL policy and implementation.

Pundjung Setya Brata

Komisaris Independen | **Independent Commissioner**

a. Kebijakan penyusunan dan monitoring RKAP dan RJPP; b. Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi; dan c. Kebijakan dan pelaksanaan organisasi Perusahaan dan pengelolaan Anak Perusahaan.	a. Policy for preparing and monitoring the RKAP and RJPP; b. Policy and implementation of Risk Management and Information Technology; and c. Policy and implementation of the Company's organization and subsidiary management.

Ernadhi Sudarmanto
Komisaris | Commissioner

a. Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan;
b. Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi; dan
c. Kebijakan dan monitoring pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

a. Company financial policy and implementation;
b. Policy and implementation of KPIs of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
c. Policy and monitoring of the Corporate Governance implementation.

Hedy Rahadian
Komisaris | Commissioner

a. Kebijakan dan pelaksanaan bidang operasional Perusahaan;
b. Kebijakan dan pelaksanaan investasi perusahaan; dan
c. Kebijakan dan penerapan QHSE (Mutu, K-3, & Lingkungan), *Green Construction* dan Sertifikasi.

a. Policy and implementation of the company operations;
b. Company investment policy and implementation; and
c. Policy and implementation of QHSE (Quality, OHS, & Environment), Green Construction, and Certification.

Program Orientasi bagi Anggota Baru Dewan Komisaris

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Dewan Komisaris Baru terkait kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Dewan Komisaris Perusahaan mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Penanggung jawab Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris Baru berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, materi untuk program pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris baru adalah sebagai berikut:
1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Gambaran Umum;
3. Visi dan Misi Perusahaan;
4. Budaya Perusahaan;
5. Struktur Organisasi dan *Job Description;*
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
8. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
9. Audit Internal dan Audit Eksternal;
10. Komite Nominasi dan Remunerasi;
11. Komite Pemantau Risiko; dan
12. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Di tahun 2025 PTPP tidak melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris, dengan demikian program pengenalan Perusahaan kepada Komisaris baru tidak dilakukan.

Induction Program for New Members of the Board of Commissioners

The induction program for the newly appointed Board of Commissioners aims to provide the New Board of Commissioners with an understanding of the conditions in the Company so that the Board gets a comprehensive understanding, both organizationally and operationally. The person in charge of the Induction Program for the new members of the Board is the Corporate Secretary. A company induction program includes a presentation, meeting, company visit, and document review.

According to the GCG Implementation Guidelines approved by the Board of Commissioners and Board of Directors, the materials for the Company orientation program for the new Board of Commissioners are as follows:
1. The implementation of Good Corporate Governance principles;
2. General Overview;
3. Company's Vision and Mission;
4. Corporate Culture;
5. Organizational Structure and Job Description;
6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
7. Company's Long-term Plan (RJPP);
8. Company's Work Plan and Budget (RKAP);
9. Internal Audit and External Audit;
10. Nomination, and Remuneration Committee;
11. Risk Monitoring Committee; and
12. Integrated Governance Committee.

In 2025, PTPP did not make any changes to the composition of its Board of Commissioners, and therefore, no program to introduce the Company to new Commissioners was carried out.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

PTPP memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris merupakan upaya *update knowledge* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihatan dalam pengelolaan Bisnis Perusahaan.

Board of Commissioners Competency Development Program

PTPP is committed to creating superior and competitive Human Capital by conducting competency development programs for all employees. The Board of Commissioners competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory and advisory tasks in managing the Company's business.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	Driving Company Transformation for Growth and Resilience	Jakarta, 15 September 2025 Jakarta, September 15, 2025	KADIN Indonesia Institute
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	PTPP
	KII Executive Brief, Where The Capital Flows	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	KADIN Indonesia Institute
	Navigating The Future of Digital Transformation and Leadership	Jakarta, 13-14 November 2025 Jakarta, November 13–14, 2025	TICMI (The Indonesia Capital Market Institute)
	Investment *Strategist* and Portfolio Management	Jakarta, 24-25 November 2025 Jakarta, November 24–25, 2025	TICMI (The Indonesia Capital Market Institute)
	QRGP Training and Certification	Jakarta, 26-28 November 2025 Jakarta, November 26–28, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Fenomena Kerugian BUMN Pasca Revisi UU BUMN; Mewujudkan Peran BUMN yang lebih Optimal The Phenomenon of SOE Losses Following the Revision of the SOE Law; Realizing a More Optimal SOE Role	Jakarta, 18 Maret 2025 Jakarta, March 18, 2025	Bagusenrico & Partner
	ISO 31000-Standar Internasional Manajemen Fundamental RM ISO 31000-International Standard for Fundamental Risk Management	Bali, 4-5 Desember 2025 Bali, December 4–5, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
	Webinar Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat Dalam Kasus Korupsi Webinar on Preventing Business Decisions in S/ROE from Becoming Entangled in Corruption Cases	*Online*, 6 Desember 2025 Online, December 6, 2025	Visi Integritas dan Satu Visi Law Office
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Webinar Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat Dalam Kasus Korupsi Webinar on Preventing Business Decisions in S/ROE from Becoming Entangled in Corruption Cases	*Online*, 6 Desember 2025 Online, December 6, 2025	Visi Integritas dan Satu Visi Law Office
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Fenomena Kerugian BUMN Pasca Revisi UU BUMN; Mewujudkan Peran BUMN yang lebih Optimal The Phenomenon of SOE Losses Following the Revision of the SOE Law; Realizing a More Optimal SOE Role	Jakarta, 18 Maret 2025 Jakarta, March 18, 2025	Bagusenrico & Partner

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	Fenomena Kerugian BUMN Pasca Revisi UU BUMN; Mewujudkan Peran BUMN yang lebih Optimal The Phenomenon of SOE Losses Following the Revision of the SOE Law; Realizing a More Optimal SOE Role	Jakarta, 18 Maret 2025 Jakarta, March 18, 2025	Bagusenrico & Partner
	Webinar Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat Dalam Kasus Korupsi Webinar on Preventing Business Decisions in S/ROE from Becoming Entangled in Corruption Cases	*Online*, 6 Desember 2025 Online, December 6, 2025	Visi Integritas dan Satu Visi Law Office
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	PTPP
	ISO 31000-Standar Internasional Manajemen Fundamental RM ISO 31000-International Standard for Fundamental Risk Management	Bali, 4-5 Desember 2025 Bali, December 4–5, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Berikut disampaikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun 2025 mencakup rencana kerja dan realisasinya, kunjungan kerja yang dilakukan, serta persetujuan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Manajemen Perusahaan.

- **Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris**

  Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris menyusun Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2025 yang telah disahkan pada 30 Januari 2025. Program kerja dimaksud merupakan acuan awal bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan melakukan pengelolaan Perusahaan berdasarkan Program Kerja Dewan Komisaris PTPP tahun 2025, pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

The Board of Commissioners Duties Implementation in 2025

Below are the duties implemented by the Board of Commissioners in 2025 including work plans and their implementation, work visits conducted, as well as the approval and recommendations of the Board of Commissioners to the Company's Management.

- **Implementation of the Board of Commissioners Work Plan**

  To conduct its duties and obligations, the Board of Commissioners prepared the Board of Commissioners 2025 Annual Work Program, which was ratified on January 30, 2025. The work program referred to is the initial reference for the Board in conducting supervisory duties, providing advice to the Board of Directors, and managing the Company according to the PTPP Board of Commissioners Work Program in 2025. The main points of these activities are as follows:

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025
Board of Commissioners Work Plan in 2025

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency
1	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal	Monitoring dan saran atas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan: a. Peraturan dan perundangan dari Regulator b. Peraturan Internal/Kebijakan/SOP	 Arahan Arahan	 1 X 1 X
	Compliance with Regulations and Internal Control	Monitoring and advice on the implementation of applicable laws and regulations for the Company: a. Laws and regulations from the Regulator b. Internal Regulations/ Policies/Standard Operating Procedures (SOP)	 Directive Directive	 1 X 1 X

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency
2	Kinerja Perusahaan	Monitoring, saran atas kinerja Perusahaan: a. Mencakup antara lain: Evaluasi pencapaian kinerja perusahaan terhadap RKAP (Induk) & Entitas Anak Tahun 2025, atau pembahasan permasalahan strategis b. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ke Pemegang Saham Tahun 2025 c. Kunjungan Dewan Komisaris ke proyek dan/ atau investasi perusahaan	 Risalah Laporan Laporan	 12 X 4 X 10 X
	Company Performance	Monitoring and advice on the Company's performance related to: a. Achievement of the Company's performance against the 2025 RKAP (Parent) & Subsidiaries b. Quarterly Performance Report to Shareholders for 2025 c. Board of Commissioners' visits to the Company's projects and/or investments	 Minutes Report Report	 12 X 4 X 10 X
3	Kinerja Dewan Komisaris	a. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 b. Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2024	Evaluasi Laporan	1 X 1 X
	Board of Commissioners' Performance	a. Measurement and Assessment of the Board of Commissioners' Performance for the 2024 Fiscal Year. b. Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year.	Evaluation Report	1 X 1 X
4	Manajemen Risiko	Monitoring, saran atas pengelolaan manajemen risiko	Arahan	1 X
	Risk Management	Monitoring and advice on risk management	Directive	1 X
5	Sistem Teknologi Informasi	Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi	Arahan	1 X
	Information Technology System	Monitoring and advice on Information Technology System	Directive	1 X
6	Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Arahan	1 X
	QSHE Management (Quality, OHS, and Environment)	Monitoring and advice on the implementation of QSHE Management (Quality, OHS, and Environment)	Directive	1 X
7	Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi	Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP)	Arahan	1 X
	Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS) and gratification management system	Monitoring and advice on the implementation of the Company's internal control system (SPIP)	Directive	1 X
		Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS	Arahan/Laporan	1 X
		Monitoring, advice, and follow-up on WBS reports	Directive/Report	1 X
		Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi	Arahan/Laporan	1 X
		Monitoring, advice, and follow-up on gratuity reports	Directive/Report	1 X

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency
8	Pengawasan Kebijakan	a. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya	Arahan	1 X
		b. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai	Arahan	1 X
		c. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Arahan	1 X
		d. Pengelolaan Entitas Anak (*Subsidiary Governance*)	Arahan	1 X
	Policy Oversight	a. Procurement Policy and its Implementation	Directive	1 X
		b. Human Capital Management, including Recruitment, Career Management, Promotion, Transfer, and Demotion of Employees	Directive	1 X
		c. Accounting Policies and Preparation of Financial Statements	Directive	1 X
		d. Subsidiary Governance	Directive	1 X
9	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi BUMN serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak	a. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi	Usulan	1 X
		b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan	Usulan	1 X
	Remuneration, Nomination, and Succession Planning for SOE Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiary Entities	a. Reviewing proposals for Board of Directors remuneration and nominations	Recommendation	1 X
		b. Proposing bonuses/performance incentives considering the performance assessment of the Board of Directors and the achievement of the company's health level	Recommendation	1 X
10	Pengawasan Eksternal/ KAP	a. Evaluasi efektivitas kinerja KAP Tahun Buku 2024	Evaluasi	1 X
		b. Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025	Usulan	1 X
	External Audit/ KAP	a. Evaluation of the effectiveness of the KAP's performance for the Fiscal Year 2024	Evaluation	1 X
		b. Proposal for the Appointment of KAP for the Fiscal Year 2026	Recommendation	1 X
11	GCG	Monitoring, saran dan tindak lanjut atas penerapan prinsip-prinsip GCG	Arahan	1 X
	GCG	Monitoring, advice, and follow-up on the implementation of GCG principles	Directive	1 X
12	RUPST dan RUPSLB	Tanggapan dan saran terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam RUPST dan RUPSLB	RUPST atau RUPSLB	1 X
	AGMS and EGMS	Feedback and Advice on Matters to be Discussed in the AGMS and EGMS	AGMS or EGMS	1 X
13	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Memberikan persetujuan dan arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Persetujuan	-
	Investment, Business Development, and Corporate Action	Approval and Guidance on Investment, Business Development, and Corporate Action Plans	Approval	-

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency
14	Penyusunan RKAP Tahun 2025	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKAP Tahun 2025: a. Arahan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKAP b. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP c. Persetujuan/Pengesahan RKAP	 Surat Surat Berita Acara	 1 X 1 X 1 X
	Preparation of the the 2025 RKAP	Advice and Approval for the Preparation of the 2025 RKAP: a. Board of Commissioners Directives regarding RKAP Preparation b. Board of Commissioners Response to the RKAP Draft c. RKAP Approval/Endorsement	 Letter Letter Minutes	 1 X 1 X 1 X
15	Laporan Periodik atas Program Kerja Perusahaan Tahun 2024-2025	a. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Periodik Tahun 2025 b. Persetujuan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2024	Arahan Persetujuan	3 X 1 X
	Periodic Reports on the Company's Work Plan for 2023-2024	a. Board of Commissioners' Response to the Periodic Financial Statements for 2025 b. Approval of the 2024 Annual Report	Directive Approval	3 X 1 X
16	Pengembangan Dewan Komisaris	Seminar, *workshop* atau sebagai narasumber	Laporan	6 X
	Development of the Board of Commissioners	Seminar, workshop, or participation as a speaker.	Report	6 X
17	Tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris	Laporan	1 X
	Follow-up on Decisions, Recommendations, and Instructions of the Board of Commissioners	Monitoring the follow-up on decisions, recommendations, and instructions of the Board of Commissioners.	Report	1 X
18	Evaluasi Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris	Evaluasi kinerja Komite Audit, Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris	Evaluasi	1 X
	Evaluation of the Performance of Supporting Organs under the Board of Commissioners	Evaluation of the performance of the Audit Committee, GCG Committee, Risk Monitor, Nomination and Remuneration Committee, and Board Secretary	Evaluation	1 X

Terhadap program kerja di atas, Dewan Komisaris telah merealisasikan sejumlah program kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Regarding the above work program, the Board of Commissioners has implemented several work programs, with details as follows:

Realisasi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025

Implementation of the Board of Commissioners Work Program in 2025

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Compliance to Rules, Regulations, and Internal Control	Monitoring dan saran atas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan: a. Peraturan dan perundangan dari Regulator b. Peraturan Internal/Kebijakan/SOP Monitoring, suggestions on the implementation of regulations and laws that applied to the Company: a. Regulations and laws from Regulators b. Internal Regulations/Policies/SOP	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat serta melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice were carried out in meetings and through directives in letters from the Board of Commissioners
2	Kinerja Perusahaan Company Performance	Monitoring, saran atas kinerja perusahaan: a. Mencakup antara lain: Evaluasi pencapaian kinerja perusahaan terhadap RKAP (Induk) & Entitas Anak Tahun 2025, atau pembahasan permasalahan strategis b. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ke Pemegang Saham Tahun 2025 c. Kunjungan Dewan Komisaris ke proyek dan/atau investasi perusahaan Monitoring, suggestions on company management/performance related to: a. Achievement of company performance against the RKAP (Parent) & Subsidiaries in 2024, as well as discussion of strategic issues b. Quarterly Performance Reports to Shareholders for 2024 c. Board of Commissioners visits to company projects and/or investments	• Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat rutin Dewan Komisaris dan juga rapat gabungan dengan Direksi • Evaluasi kinerja triwulanan dilakukan 4 kali (triwulanan) melalui penyampaian tanggapan atas kinerja triwulanan • Kunjungan ke proyek telah dilakukan sebanyak 11 kali • Monitoring and provision of advice were carried out during regular Board of Commissioners meetings and joint meetings with the Board of Directors • Quarterly performance evaluations were carried out four times (quarterly) through the submission of responses to quarterly performance • Visits to projects were carried out 11 times
3	Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Performance	a. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 b. Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2024 a. Measurement and Assessment of the Board of Commissioners Performance for the 2025 Fiscal Year b. Supervisory Task Report for the 2024 Fiscal Year	Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan KPI dan disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Measurement and Assessment of the Board of Commissioners' performance in accordance with KPIs and submitted to Shareholders through the Board of Commissioners' Supervisory Report
4	Manajemen Risiko Risk Management	Monitoring, saran atas pengelolaan manajemen Risiko Monitoring, advice on risk management	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners
5	Sistem Teknologi Informasi Information Technology System	Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi Monitoring, advice on the implementation of Information Technology Systems	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
6	Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) QHSE Management (Quality, OHS, and Environment)	Monitoring, Saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) Monitoring, advice on the implementation of Information Technology Systems	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners
7	Pengawasan Sistem Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS), and gratification management system	a. Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP) b. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS c. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi a. Monitoring and recommendations on the implementation of the company's internal control system (SPIP) b. Monitoring, recommendations, and follow-up on WBS reports c. Monitoring, recommendations, and follow-up on gratification reports	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners
8	Pengawasan Kebijakan Policy Supervision	a. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya b. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai c. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan d. Pengelolaan Entitas Anak (*Subsidiary Governance*) a. Procurement Policy and Its Implementation b. HR Management, Including Recruitment, Career Management, Promotion, Transfer, and Demotion of Employees c. Accounting Policy and Financial Reporting Preparation d. Subsidiary Governance Management	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners
9	Remunerasi, Nominasi dan Seksesi Direksi BUMN serta Direksi dan Dewan Komisaris entitas Anak Remuneration, Nomination, and Succession Planning for SOE Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiary Entities	a. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan a. Reviewing proposals for Board of Directors remuneration and nominations b. Proposing bonuses/performance incentives considering the performance assessment of the Board of Directors and the achievement of the company's soundness level	• Penyampaian *Nominated Talent* PTPP Tahun 2025 • Usulan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 PTPP • Telaah, usulan kepada Pemegang Saham, dan Persetujuan atas susunan pengurus Anak Perusahaan • Presentation of PTPP's Nominated Talent for 2025 • Proposed Remuneration (Salaries/Honoraria, Facilities and Allowances) for the 2025 Fiscal Year, as well as Bonuses for PTPP's 2024 Fiscal Year • Review, proposal to Shareholders, and Approval of the composition of the Subsidiary's management

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
10	Pengawasan Eksternal/KAP External Audit/Public Accountant Firm	a. Evaluasi efektivitas kinerja KAP Tahun Buku 2024 b. Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025 a. Evaluation of the effectiveness of the Public Audit Firm's performance for the Fiscal Year 2024 b. Proposal for the Appointment of External Audit Firm for the Fiscal Year 2025	Penyampaian Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025 Evaluation Results Submission on the Implementation of the Public Accounting Firm (KAP) Audit for the 2024 Fiscal Year and Proposal for the KAP Appointment for the 2025 Fiscal Year
11	GCG	Monitoring, saran dan tindak lanjut atas penerapan prinsip-prinsip GCG Monitoring, advice on the implementation of corporate governance principles	Monitoring dan pemberian saran dilakukan dalam rapat dan/atau melalui arahan dalam surat Dewan Komisaris Monitoring and provision of advice are carried out in meetings and/or through directives in letters from the Board of Commissioners
12	RUPST dan RUPSLB AGMS and EGMS	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam RUPST/RUPSLB Opinions and Responses to matters that will be discussed at AGMS and EGMS	• Penunjukan Dewan Komisaris Untuk Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 • Penunjukan Dewan Komisaris Untuk Pimpinan RUPS LB Tahun 2025 • Penyampaian Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025 • Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PTPP Tahun Buku 2024 (*Audited*) • Usulan Remunerasi untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 • Tanggapan atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada Dana Pensiun Pembangunan Perumahan (DPPP) • Appointment of the Board of Commissioners to Chair the 2025 Annual GMS • Appointment of the Board of Commissioners to Chair the 2025 EGMS • Presentation of the Evaluation Results on the Implementation of the Public Accounting Firm (KAP) Audit for the 2024 Fiscal Year and Proposed KAP Appointment for the 2025 Fiscal Year • Responses and Recommendations of the Board of Commissioners on the Annual Report and Financial Statements of PTPP for the 2024 Fiscal Year (Audited) • Proposed Remuneration for the 2025 Fiscal Year, as well as Bonuses for the 2024 Fiscal Year • Response to the Proposed Amendment to the Pension Fund Regulations (PDP) of the Housing Development Pension Fund (DPPP)

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
13	Investasi, Pengembangan Bisnis dan Corporate Action Investment, Business Development, and Corporate Action	Memberikan persetujuan dan arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action* Approval and direction on Investment, Business Development, and Corporate Action plans	Tanggapan maupun persetujuan serta arahan terhadap aksi korporasi dilakukan sesuai usulan dari Direksi dengan pertimbangan dan telaah mendalam (rincian pada tabel persetujuan) Responses, approvals, and directives regarding corporate actions were carried out in accordance with the Board of Directors' proposals, with careful consideration and review (details in the approval table)
14	Penyusunan RKAP Tahun 2025 Preparation of the 2025 RKAP	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKAP Tahun 2025: a. Arahan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKAP b. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP c. Persetujuan/Pengesahan RKAP Suggestions and Approval for the preparation of 2025 RKAP: a. Directives from the Board of Commissioners regarding RKAP preparation b. Board of Commissioners' Response to the RKAP Draft c. RKAP Approval/Ratification	Persetujuan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2025 PTPP Board of Commissioners' approval of PTPP's 2025 RKAP
15	Laporan Periodik atas Program Kerja Perusahaan Tahun 2023/2024 Periodic Report on Company Work Programs in 2023/2024	a. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Periodik Tahun 2025 b. Persetujuan Laporan Tahunan *(Annual Report)* Tahun 2024 a. Board of Commissioners' Response to the Periodic Financial Statements of 2024 b. Approval of the 2023 Annual Report	• Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan atas Laporan Keuangan Periodik Tahun 2025 setiap triwulan • Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PTPP Tahun Buku 2024 (*Audited*) • The Board of Commissioners submits its response to the 2025 Periodic Financial Statements on a quarterly basis • Board of Commissioners' Response and Recommendations on PTPP's Annual Report and Financial Statements for the 2024 Fiscal Year (Audited)
16	Pengembangan Dewan Komisaris Development of the Board of Commissioners	Seminar dan *Workshop* atau sebagai narasumber Seminar, workshop, or participation as a speaker	Dewan Komisaris telah memenuhi target pengembangan dalam KPI, yaitu 6 kali (minimal 1 kali/orang) The Board of Commissioners has met the KPI development target, achieving six times (at least once/person)
17	Tindak lanjut hasil keputusan rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris Follow-up on decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris Monitoring the follow-up of decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners	Monitoring tindak lanjut dilakukan berkala, antara lain setiap rapat Follow-up monitoring is carried out periodically, including at every meeting

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
18	Evaluasi Kinerja Organ pendukung Dewan Komisaris Evaluation of the Performance of Supporting Organs under the Board of Commissioners	Evaluasi kinerja Komite Audit, Komite GCG dan Nominasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris Evaluation of the Performance of the Audit Committee, GCG and Nomination Committee, as well as the Secretary to the Board of Commissioners	Evaluasi kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris setahun sekali The performance of the Board of Commissioners' Supporting Organs is evaluated annually

- **Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris PTPP dalam menjalankan tugas pengawasan, telah memberikan persetujuan serta rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja manajemen sesuai tata kelola yang baik guna mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai persetujuan maupun rekomendasi sebagai berikut:

- **Approval and Recommendation of the Board of Commissioners**

In carrying out its supervisory duties, PTPP's Board of Commissioners has provided approvals and recommendations to improve management performance in accordance with good governance to encourage improved Company performance. Throughout 2025, the Board of Commissioners has issued various approvals and recommendations as follows:

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2025

Approval and Recommendation of the Board of Commissioners In 2025

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
1	001/KOM/PP/01/2025	9 Januari 2025 January 9, 2025	Penyampaian *Update* Usulan KPI Direksi Kolegial terkait RKAP Tahun 2025. Submission of Update on KPI Proposal by the Collegial Board of Directors related to the 2025 RKAP.
2	002/KOM/PP/01/2025	13 Januari 2025 January 13, 2025	Permohonan Konsultasi Anggaran Tantiem dalam RKAP Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk. Request for Consultation on Bonus Budget in the 2025 RKAP of PT PP (Persero) Tbk.
3	003/KOM/PP/01/2025	15 Januari 2025 January 15, 2025	Tanggapan atas Usulan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2026 PT PP (Persero) Tbk. Response to the Proposed Additional State Capital Participation Funds for the 2026 Fiscal Year of PT PP (Persero) Tbk.
4	004/KOM/PP/01/2025	15 Januari 2025 January 15, 2025	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Hasil *Quality Assurance Review* Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT PP (Persero) Tbk Tahun 2023. Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the Report of the Quality Assurance Review by the Internal Audit Unit (SPI) of PT PP (Persero) Tbk for 2023.
5	005/KOM/PP/01/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	Persetujuan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk. Approval of the Board of Commissioners on the 2025 RKAP of PT PP (Persero) Tbk.
6	006/KOM/PP/01/2025	31 Januari 2025 January 31, 2025	Penyampaian Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk. Submission of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PT PP (Persero) Tbk.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
7	007/KOM/PP/02/2025	21 Februari 2025 February 21, 2025	Penyampaian SK Pembubaran Komite GCGPRNR, SK Pembentukan Komite Pemantau Risiko, SK Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Submission of the Decree on the Dissolution of the GCGPRNR Committee, the Decree on the Establishment of the Risk Monitoring Committee, and the Decree on the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee.
8	008/KOM/PP/02/2025	28- Februari 2025 February 28, 2025	Penyampaian *Nominated Talent* PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025. Submission of PT PP (Persero) Tbk Nominated Talent for 2025.
9	009/KOM/PP/02/2025	28- Februari 2025 February 28, 2025	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk Tahun Buku 2024. Submission of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk for the 2024 Fiscal Year.
10	010/KOM/PP/03/2025	19 Maret 2025 March 19, 2025	BA Penunjukan Dewan Komisaris Untuk Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk/PT PP (Persero) Tbk. Minutes of Appointment of the Board of Commissioners to Chair the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk/PT PP (Persero) Tbk.
11	011/KOM/PP/03/2025	19 Maret 2025 March 19, 2025	Penerusan Surat Pengaduan terkait Permohonan Pembayaran Tagihan Vendor PT Wiratirta Alam Sejahtera. Forwarding of Complaint Letter regarding Request for Payment of Vendor Bills of PT Wiratirta Alam Sejahtera.
12	012/KOM/PP/03/2025	26 Maret 2025 March 26, 2025	Persetujuan Izin Cuti Tahunan Direksi (Bapak Novel Arsyad tanggal 8 April 2025. Approval of Annual Leave Permission for Directors (Mr. Novel Arsyad on April 8, 2025).
13	013/KOM/PP/03/2025	27 Maret 2025 March 27, 2025	Penyampaian Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025. Submission of Evaluation Results on the Implementation of the Public Accounting Firm (KAP) Audit for the 2024 Fiscal Year and Proposed Appointment of KAP for the 2025 Fiscal Year.
14	014/KOM/PP/03/2025	27 Maret 2025 March 27, 2025	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PP (Persero) Tbk Tahun Buku 2024 (*Audited*). Responses and Recommendations of the Board of Commissioners on the Annual Report and Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk for the 2024 Fiscal Year (Audited).
15	015/KOM/PP/03/2025	27 Maret 2025 March 27, 2025	Usulan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 PT PP (Persero) Tbk. Proposal for Remuneration (Salaries/Honoraria, Facilities and Allowances) for the 2025 Fiscal Year, as well as Bonus for the 2024 Fiscal Year of PT PP (Persero) Tbk.
16	016/KOM/PP/04/2025	21 April 2025 April 21, 2025	Tanggapan atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada Dana Pensiun Pembangunan Perumahan (DPPP). Response to Proposed Amendments to Pension Fund Regulations (PDP) at the Housing Development Pension Fund (DPPP).
17	017/KOM/PP/04/2025	27 April 2025 April 27, 2025	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada Dana Pensiun Pembangunan Perumahan (DPPP). Board of Commissioners Response to the Proposed Amendment to the Pension Fund Regulations (PDP) of the Housing Development Pension Fund (DPPP).
18	018/KOM/PP/05/2025	14 Mei 2025 May 14, 2025	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Proyek BNI Kawasan PIK 2, Proyek Tol Kataraja Seksi 1, Proyek Revitalisasi T1C Bandara Soetta, Proyek Overlay Runway Selatan Bandara Soetta. Working visits by the Board of Commissioners to the BNI PIK 2 Area Project, Kataraja Toll Road Section 1 Project, Soetta Airport T1C Revitalization Project, and Soetta Airport South Runway Overlay Project.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
19	019/KOM/PP/05/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	Penyampaian SK Dewan Komisaris No. 004/SK/KOM/PP/05/2025 Tanggal 16 Mei 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Submission of Board of Commissioners Decree No. 004/SK/KOM/PP/05/2025 dated May 16, 2025, on the dismissal and appointment of Board of Commissioners Secretariat Staff.
20	20/KOM/PP/05/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	Permohonan Persetujuan Pergantian Susunan Direksi PT PP Properti Tbk (Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk. Request for Approval of Changes to the Board of Directors of PT PP Properti Tbk (Subsidiary of PT PP (Persero) Tbk.
21	21/KOM/PP/05/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	Permohonan Persetujuan Pergantian Susunan Direksi PT PP Presisi Tbk (Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk). Request for Approval of Changes to the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk (Subsidiary of PT PP (Persero) Tbk).
22	22/KOM/PP/05/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	Persetujuan Penetapan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk (Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk). Approval of Changes to the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PP Properti Tbk (Subsidiary of PT PP (Persero) Tbk).
23	23/KOM/PP/05/2025	23 Mei 2025 May 23, 2025	Persetujuan Penetapan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk (Anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk). Approval of Changes to the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk (Subsidiary of PT PP (Persero) Tbk).
24	24/KOM/PP/05/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	Penunjukan Koordinator Komite Tata Kelola Terintegrasi Bapak Fatchul Birri/Komisaris Utama PT PP Urban. Appointment of Mr. Fatchul Birri as Coordinator of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of PT PP Urban.
25	025/KOM/PP/05/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan SPI Triwulan I Tahun 2025. Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the SPI Report for the First Quarter of 2025.
26	026/KOM/PP/05/2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	Tanggapan dan saran Dewan Komisaris terkait Laporan keuangan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2025. Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the Consolidated Financial Statement for the First Quarter of 2025.
27	027/KOM/PP?06/2025	12 Juni 2025 June 12, 2025	Permintaan Penjelasan atas Kelanjutan Rencana Divestasi Saham pada PT Selebes Railway Indonesia dan PT PP Infrastruktur. Request for Explanation on the Continuation of the Share Divestment Plan at PT Selebes Railway Indonesia and PT PP Infrastruktur.
28	028/KOM/PP/06/2025	17 Juni 2025 June 17, 2025	Persetujuan Penggantian Pejabat Kepala SPI (SPI) PT PP (I Komang Sudarma digantikan oleh Muhammad Zahid). Approval of the Replacement of the Head of SPI of PT PP (I Komang Sudarma replaced by Muhammad Zahid).
29	029/KOM/PP/06/2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	Permohonan Persetujuan Pergantian Susunan Direksi PT PP Energi (HR Ario Setyawan DU digantikan oleh Gangga Wahyu, DK Supriyadi digantikan oleh Galerry Rekayasa). Request for Approval of Changes to the Board of Directors of PT PP Energi (Mr. Ario Setyawan DU replaced by Gangga Wahyu, Mr. DK Supriyadi replaced by Galerry Rekayasa).
30	030/KOM/PP/06/2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	Permohonan Persetujuan Pergantian Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPSD. Request for Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPSD.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
31	031/KOM/PP/06/2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	Permohonan Persetujuan Pergantian Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Sinergi Colomadu (Ghea Swastika D digantikan Dyah Novian Tri, I Nyoman Dana digantikan oleh M Fahruddin Yunia P). Request for Approval of Changes to the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PP Sinergi Colomadu (Ghea Swastika D replaced by Dyah Novian Tri, I Nyoman Dana replaced by M Fahruddin Yunia P).
32	032/KOM/PP/06/2025	30 Juni 2025 June 30, 2025	Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris atas Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Triwulan I Tahun 2025. Responses and Input from the Board of Commissioners on the First Quarter Management Evaluation Report for 2025.
33	033/KOM/PP/07/2025	4 Juli 2025 July 4, 2025	Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris atas Laporan Riset ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) PT PP (Persero) Tbk Tahun Buku 2024. Response and Input from the Board of Commissioners on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Research Report of PT PP (Persero) Tbk for the 2024 Fiscal Year.
34	034/KOM/PP/07/2025	14 Juli 2025 July 14, 2025	Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Tahun 2025 SPI PT PP (Persero) Tbk. Response and Input from the Board of Commissioners on the 2025 Annual Audit Work Program of SPI PT PP (Persero) Tbk.
35	035/KOM/PP/07/2025	14 Juli 2025 July 14, 2025	Kunjungan Proyek Bapak Pundjung Setya Brata ke Jawa Tengah Proyek PPSD dan Proyek Twin Tower Pleburan Univ Diponegoro. Tanggal 17-19 Juli 2025. Project Visit by Mr. Pundjung Setya Brata to Central Java PPSD Project and Pleburan Twin Tower Project, Diponegoro University. July 17–19, 2025.
36	036/KOM/PP/07/2025	18 Juli 2025 July 18, 2025	Persetujuan Penetapan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Imbalan Jasa Atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2025 Approval of the Scope of Work and Remuneration for the Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.
37	037/KOM/PP/08/2025	5 Agustus 2025 August 5, 2025	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian s.d Triwulan II Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk dan Entitas Anak. Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the Consolidated Financial Statements for the Second Quarter of 2025 of PT PP (Persero) Tbk and its Subsidiaries.
38	038/KOM/PP/08/2025	12 Agustus 2025 August 12, 2025	Persetujuan Penunjukkan serta Penetapan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Imbalan Jasa atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT PP (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Approval of the Appointment and Determination of the Scope of Work and Remuneration for the Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk for the period ending June 30, 2025.
39	039/KOM/PP?08/2025	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk No. 005 dan 006. Submission of PT PP (Persero) Tbk Board of Commissioners Decisions No. 005 and 006.
40	040/KOM/PP/08/2025	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Persetujuan Ijin Cuti Umroh Bapak Novel terhitung 4 September s.d 9 September 2025. Approval of Mr. Novel's Umrah leave from September 4 to September 9, 2025.
41	041/KOM/PP/08/2025	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan Data terkait Permohonan Ijin Pelaksanaan Pembangunan Dapur Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Request for Explanation and Completeness of Data related to the Application for a Permit to Build a Kitchen to Support the Free Nutritious Meals Program in collaboration with the Public Works Ministry.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
42	042/KOM/PP/09/2025	9 September 2025 September 9, 2025	Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris atas Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025. Response and Input from the Board of Commissioners on the Report on the Results of the Risk Management Evaluation for the Second Quarter of 2025.
43	043/KOM/PP/09/2025	22 September 2025 September 22, 2025	Cuti Umroh Bapak Yuyus Juarsa terhitung tgl 25 September s.d 3 Oktober 2025. Umrah leave for Mr. Yuyus Juarsa from September 25 to October 3, 2025.
44	044/KOM/PP/09/2025	22 September 2025 September 22, 2025	Permohonan Persetujuan Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT PP Properti Tbk (Posisi yang sebelumnya lowong dijabat oleh Ichwan Putra Pradhana). Request for Approval of Proposed Changes to the Management Structure of PT PP Properti Tbk (Ichwan Putra Pradhana previously held the position).
45	045/KOM/PP/09/2025	22 September 2025 September 22, 2025	Permohonan Persetujuan Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT PP Infrastruktur (Faizal Rahmad digantikan oleh Anindyanta Adi W). Request for Approval of Proposed Changes to the Management Structure of PT PP Infrastruktur (Faizal Rahmad replaced by Anindyanta Adi W).
46	046/KOM/PP/09/2025	24 September 2025 September 24, 2025	Penyampaian Laporan *Contingency Plan* PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025. Submission of the 2025 Contingency Plan Report of PT PP (Persero) Tbk.
47	047/KOM/PP/09/2025	29 September 2025 September 29, 2025	Kunjungan Proyek tanggal 6-7 Oktober 2025 Proyek Rail Loop TLS. Project visit on October 6–7, 2025 for the TLS Rail Loop Project.
48	048/KOM/PP/09/2029	29 September 2025 September 29, 2025	Tanggapan Dewan Komisaris atas Company Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PP (Persero) Tbk. Board of Commissioners' response to the PT PP (Persero) Tbk Whistleblowing System Company Manual.
49	049/KOM/PP/09/2025	29 September 2025 September 29, 2025	Persetujuan atas Dokumen Pedoman Rencana Darurat (*Contingency Plan* PT PP (Persero) Tbk Tahun 2025. Approval of the Contingency Plan Document for PT PP (Persero) Tbk for 2025.
50	050/KOM/PP/10/2025	3 Oktober 2025 October 3, 2025	Persetujuan Penetapan Perubahan Pengurus PT PP Properti Tbk (Anak Perusahaan PTPP (Persero) Tbk (Pemberhentian Sdr.Jatmiko Murdiono digantikan oleh Ikhwan Putra Perdhana sebagai Direktur PT Properti Tbk-Surat Plt Menteri BUMN No. SR-509/MBU/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025). Approval of Changes to the Management of PT PP Properti Tbk (Subsidiary of PTPP (Persero) Tbk (Termination of Mr. Jatmiko Murdiono, replaced by Ikhwan Putra Perdhana as Director of PT Properti Tbk - Letter from the Acting SOE Minister No. SR-509/MBU/10/2025 dated October 3, 2025).
51	051/KOM/PP/10/2025	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Penyampaian RKA Dewan Komisaris Tahun 2026. Submission of the 2026 Board of Commissioners' RKA.
52	052/KOM/PP/10/2025	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Penyampaian Laporan Manajemen s.d Agustus yang sudah ditandatangani Dewan Komisaris. Submission of the Management Report up to August, which the Board of Commissioners has signed.
53	053/KOM/PP/11/2025	4 November 2025 November 4, 2025	Penyampaian Laporan Manajemen s.d Triwulan III 2025. Submission of the Management Report up to the Third Quarter of 2025.
54	054/KOM/PP/11/2025	11 November 2025 November 11, 2025	Penyampaian Laporan Audit Intern Triwulan III Thn 2025. Submission of the Internal Audit Report for the Third Quarter of 2025.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Subject
55	055/KOM/PP/11/2025	11 November 2025 November 11, 2025	Tanggapan Dewan Komisaris terkait Laporan RMI Tahun 2024. Board of Commissioners Response regarding the 2024 RMI Report.
56	056/KOM/PP/11/2025	17 November 2025 November 17, 2025	BA Penunjukan Dewan Komisaris Untuk Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk/PT PP (Persero) Tbk. Minutes of Appointment of the Board of Commissioners to Chair the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk/ PT PP (Persero) Tbk.
57	057/KOM/PP/11/2025	17 November 2025 November 17, 2025	Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Rencana Divestasi Saham pada PT Celebes Railway Indonesia dan PT PP Infrastruktur. Request for Complete Documents on the Share Divestment Plan at PT Celebes Railway Indonesia and PT PP Infrastruktur.
58	058/KOM/PP/11/2025	20 November 2025 November 20, 2025	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Konsolidasian s.d. Triwulan III Tahun 2025 PTPP (Persero) Tbk dan Entitas Anak. Response and Recommendations of the Board of Commissioners on the Consolidated Financial Statements for the First Three Quarters of 2025 of PTPP (Persero) Tbk and its Subsidiaries.
59	059/KOM/PP/11/2025	25 November 2025 November 25, 2025	Penyampaian Rancangan RKAP Tahun 2026 yang sudah ditandatangani Dewan Komisaris. Submission of the 2026 RKAP Draft signed by the Board of Commissioners.
60	060/KOM/PP/11/2025	25 November 2025 November 25, 2025	Kunjungan Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang, Proyek Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 4 Desember 2025. Visit to the Cikampek–Plumpang Fuel Pipeline Project, Kalibaru Terminal Design and Construction Project Phase 1B, Tanjung Priok Port on December 4, 2025.
61	61/KOM/PP/11/2025	28 November 2025 November 28, 2025	Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris No. 009/010/SK/KOM/PP/11/2025 tanggal 28 November 2025. Submission of Board of Commissioners Decree No. 009/010/SK/ KOM/PP/11/2025 dated November 28, 2025.
62	062/KOM/PP/11/2025	27 November 2025 November 27, 2025	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Proyek JO Harkit Tokushukai dan Proyek Parkir RS Dharmais tanggal 10 Desember 2025. Working visit by the Board of Commissioners to the JO Harkit Tokushukai Project and the Dharmais Hospital Parking Project on December 10, 2025.
63	063/OM/PP/11/2025	28 November 2025 November 28, 2025	Penyampaian SK Dewan Komisaris No. 088/SK/KOM/PP/11/2025 tanggal 28 November 2025 Submission of Board of Commissioners Decree No. 088/SK/KOM/ PP/11/2025 dated November 28, 2025
64	064/KOM/PP/12/2025	5 Desember 2025 December 5, 2025	Penyampaian Laporan Manajemen PT PP (Persero) Tbk s.d Oktober 2025 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Submission of PT PP (Persero) Tbk Management Report up to October 2025, signed by the Board of Commissioners.

- **Kunjungan Kerja Dewan Komisaris**
  Pada tahun 2025, Dewan Komisaris PTPP juga melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa proyek yang dianggap strategis dalam pengembangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- **Board of Commissioners Work Visit**
  In 2025, the PTPP Board of Commissioners also conducted working visits to several projects that are considered strategic in the development of the Company with the following details:

No.	Proyek Project	Tanggal Date	Peserta Participants	
1	Proyek BNI Kawasan PIC-2 BNI PIC-2 Area Project	22 Mei 2025 May 22, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Jaya Kesuma Komisaris Independen 4. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 5. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 6. Hedy Rahadian Komisaris 7. Handoko Tripriyono Komite Audit 8. Farahmita Komite Audit 9. Suko Staf Dewan Komisaris 10. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Jaya Kesuma Independent Commissioner 4. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 5. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 6. Hedy Rahadian Commissioner 7. Handoko Tripriyono Audit Committee 8. Farahmita Audit Committee 9. Suko Board of Commissioners Staff 10. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
2	Proyek Bank Mandiri Kawasan Pik-2 Bank Mandiri PIK-2 Area Project	22 Mei 2025 May 22, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Jaya Kesuma Komisaris Independen 4. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 5. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 6. Hedy Rahadian Komisaris 7. Handoko Tripriyono Komite Audit 8. Farahmita Komite Audit 9. Suko Staf Dewan Komisaris 10. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Jaya Kesuma Independent Commissioner 4. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 5. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 6. Hedy Rahadian Commissioner 7. Handoko Tripriyono Audit Committee 8. Farahmita Audit Committee 9. Suko Board of Commissioners Staff 10. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
3	Proyek Revitalisasi T1C Bandara Soekarno Hatta. Soekarno Hatta Airport T1C Revitalization Project.	22 Mei 2025 May 22, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Jaya Kesuma Komisaris Independen 4. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 5. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 6. Hedy Rahadian Komisaris 7. Handoko Tripriyono Komite Audit 8. Farahmita Komite Audit 9. Suko Staf Dewan Komisaris 10. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Jaya Kesuma Independent Commissioner 4. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 5. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 6. Hedy Rahadian Commissioner 7. Handoko Tripriyono Audit Committee 8. Farahmita Audit Committee 9. Suko Board of Commissioners Staff 10. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff

No.	Proyek Project	Tanggal Date	Peserta Participants	
4	Proyek Overlay Runway Selatan Bandara Soekarno Hatta. Soekarno Hatta Airport South Runway Overlay Project.	22 Mei 2025 May 22, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Jaya Kesuma Komisaris Independen 4. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 5. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 6. Hedy Rahadian Komisaris 7. Handoko Tripriyono Komite Audit 8. Farahmita Komite Audit 9. Suko Staf Dewan Komisaris 10. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Jaya Kesuma Independent Commissioner 4. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 5. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 6. Hedy Rahadian Commissioner 7. Handoko Tripriyono Audit Committee 8. Farahmita Audit Committee 9. Suko Board of Commissioners Staff 10. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
5	Proyek Tol Kataraja Seksi-1 Kataraja Toll Road Project Section 1	22 Mei 2025 May 22, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Jaya Kesuma Komisaris Independen 4. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 5. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 6. Hedy Rahadian Komisaris 7. Handoko Tripriyono Komite Audit 8. Farahmita Komite Audit 9. Suko Staf Dewan Komisaris 10. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Jaya Kesuma Independent Commissioner 4. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 5. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 6. Hedy Rahadian Commissioner 7. Handoko Tripriyono Audit Committee 8. Farahmita Audit Committee 9. Suko Board of Commissioners Staff 10. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
6	Proyek Tol PT PP Semarang Demak. PT PP Semarang Demak Toll Road Project.	17-19 Juli 2025 July 17-19, 2025	Pundjung Setya Brata Komisaris Independen	Pundjung Setya Brata Independent Commissioner
7	Proyek Twin Tower Pleburan Universitas Diponegoro. Diponegoro University Pleburan Twin Tower Project.	17-19 Juli 2025 July 17-19, 2025	Pundjung Setya Brata Komisaris Independen	Pundjung Setya Brata Independent Commissioner
8	Proyek Rail Loop TLS 6 & 7, Muara Enim TLS 6 & 7 Rail Loop Project, Muara Enim	6 Oktober 2025 October 6, 2025	1. Jaya Kesuma Komisaris Independen 2. Handoko Tripriyono Komite Audit 3. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Jaya Kesuma Independent Commissioner 2. Handoko Tripriyono Audit Committee 3. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff

No.	Proyek Project	Tanggal Date	Peserta Participants	
9	Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline Project	4 Desember 2025 December 4, 2025	1. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 2. Ernadhi Sudarmanto Komisaris 3. Riyuni Asih Sekretaris Dewan Komisaris 4. Handoko Tripriyono Komite Audit 5. Hasnil Djamin Komite Pemantau Risiko 6. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 2. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 3. Riyuni Asih Secretary of the Board of Commissioners 4. Handoko Tripriyono Audit Committee 5. Hasnil Djamin Risk Monitoring Committee 6. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
10	Proyek Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok Kalibaru Terminal Design and Construction Project Phase 1B, Tanjung Priok Port	4 Desember 2025 December 4, 2025	1. Pundjung Setya Brata Komisaris Independen 2. Ernadhi Sudarmanto Komisaris, 3. Riyuni Asih Sekretaris Dewan Komisaris 4. Handoko Tripriyono Komite Audit 5. Hasnil Djamin Komite Pemantau Risiko 6. Nadia Dara Inggrida Staf Dewan Komisaris	1. Pundjung Setya Brata Independent Commissioner 2. Ernadhi Sudarmanto Commissioner 3. Riyuni Asih Secretary of the Board of Commissioners 4. Handoko Tripriyono Audit Committee 5. Hasnil Djamin Risk Monitoring Committee 6. Nadia Dara Inggrida Board of Commissioners Staff
11	Proyek JO HARKIT TOKUSHUKAI HARKIT TOKUSHUKAI JO Project	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Hedy Rahadian Komisaris 4. Pramono Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Mega Perwani Komite Pemantau Risiko 6. Suko Staf Dewan Komisaris 7. Tri Asih Handayani Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Hedy Rahadian Commissioner 4. Pramono Nomination and Remuneration Committee 5. Mega Perwani Risk Monitoring Committee 6. Suko Board of Commissioners Staff 7. Tri Asih Handayani Board of Commissioners Staff
12	Proyek Parkir RS Dharmais Dharmais Hospital Parking Project	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. Dhony Rahajoe Komisaris Utama 2. Istiono Komisaris Independen 3. Hedy Rahadian Komisaris 4. Pramono Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Mega Perwani Komite Pemantau Risiko 6. Suko Staf Dewan Komisaris 7. Tri Asih Handayani Staf Dewan Komisaris	1. Dhony Rahajoe President Commissioner 2. Istiono Independent Commissioner 3. Hedy Rahadian Commissioner 4. Pramono Nomination and Remuneration Committee 5. Mega Perwani Risk Monitoring Committee 6. Suko Board of Commissioners Staff 7. Tri Asih Handayani Board of Commissioners Staff

Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya

Penilaian kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Metode Evaluasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Evaluasi dilakukan dengan dua aspek utama yaitu 1) aspek kepatuhan pelaksanaan tugas dan tata kelola (60%), dan 2) aspek kinerja dan perilaku (40%).

Performance Assessment of Supporting Organs and Committees Under the Board of Commissioners and the Basis for Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners' Supporting Organ is conducted in accordance with Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/01/2026 dated January 27, 2026, on the Evaluation Method for the Board of Commissioners' Support Units of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. The evaluation is conducted based on two main aspects, namely 1) compliance with the performance of duties and governance (60%), and 2) performance and conduct (40%).

Kategori predikat penilaian sebagai berikut:

The assessment rating categories are as follows:

Skor Score	Predikat Rating
81 - 100	Sangat Baik Excellent
61 - 80	Baik Good
41 - 60	Cukup Fair
21 - 40	Buruk Poor
0 - 20	Sangat Buruk Very Poor

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Aspek A - Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Tata Kelola Aspect A - Compliance with Task Implementation and Governance	60	60,00
2	Aspek B - Kinerja & Perilaku Aspect B - Performance & Behavior	40	35,14
Total Skor Total Score		**100**	**95,14**
Predikat Rating			**Sangat Baik Excellent**

Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris untuk tahun 2025 melalui penilaian di atas mencapai skor sebesar 95,14% dari target 100,00%. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja Sekretaris Dewan Komisaris "Sangat Baik".

The performance of the Secretary to the Board of Commissioners in 2025, as assessed above, achieved a score of 95.14% of the 100.00% target. This indicates that the performance of the Secretary of the Board of Commissioners is "Excellent".

Penilaian Kinerja Komite Audit
Performance Assessment of the Audit Committee

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Bobot Weight	Handoko Tripriyono	Aria Farah Mita
1	Aspek A - Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Tata Kelola Aspect A - Compliance with Task Implementation and Governance	60	58,80	58,80
2	Aspek B - Kinerja & Perilaku Aspect B - Performance & Behavior	40	35,79	35,47
Total Skor Total Score		**100**	**94,59**	**94,27**
Predikat Rating			**Sangat Baik Excellent**	**Sangat Baik Excellent**

Kinerja Komite Audit untuk tahun 2025 melalui penilaian di atas mencapai skor sebesar 94,27% dari target 100,00%. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja Komite Audit "Sangat Baik".

The Audit Committee's performance for 2025, as assessed above, achieved a score of 94.27% of the 100.00% target. This indicates that the Audit Committee's performance is "Excellent".

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Aspek A - Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Tata Kelola Aspect A - Compliance with Task Implementation and Governance	60	60.00
2	Aspek B - Kinerja & Perilaku Aspect B - Performance & Behavior	40	35.21
Total Skor Total Score		**100**	**95,21**
Predikat Rating			**Sangat Baik Excellent**

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun 2025 melalui penilaian di atas mencapai skor sebesar 95,21% dari target 100,00% dengan kategori "Sangat Baik".

The performance of the Nomination and Remuneration Committee for the year 2025, as assessed above, achieved a score of 95.21% of the 100.00% target, falling into the "Excellent" category.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko
Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Bobot Weight	Hasnil Djamin	Mega Perwani
1	Aspek A - Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Tata Kelola Aspect A - Compliance with Task Implementation and Governance	60	60,00	60,00
2	Aspek B - Kinerja & Perilaku Aspect B - Performance & Behavior	40	35,47	35,40
Total Skor Total Score		**100**	**95,47**	**95,40**
Predikat Rating			**Sangat Baik Excellent**	**Sangat Baik Excellent**

Kinerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2025 melalui penilaian di atas mencapai skor sebesar 95,40% dari target 100,00% dengan kategori "Sangat Baik".

The performance of the Risk Monitoring Committee for the year 2025, as assessed above, achieved a score of 95.40% of the 100.00% target, falling into the "Excellent" category.

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Performance Assessment of the Integrated Governance Committee

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Aspek A - Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Tata Kelola Aspect A - Compliance with Task Implementation and Governance	100	86,00
Total Skor Total Score		**100**	**86,00**
Predikat Rating			**Sangat Baik Excellent**

Penilaian untuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu hanya berdasarkan Aspek A (Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Dan Tata Kelola). Hasil penilaian menunjukkan capaian sebesar 86% atau dengan predikat "Sangat Baik".

The assessment for the Integrated Governance Committee is based solely on Aspect A (Compliance with Task Implementation and Governance). The assessment results indicate an achievement of 86% or a rating of "Excellent".

Rencana Program Kerja Dewan Komisaris 2026

Dewan Komisaris secara rutin menyusun rencana program pengawasan sebagai acuan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun yang akan datang. Rencana Program Pengawasan Dewan Komisaris PTPP meliputi Rencana Kerja dan Anggaran, pengembangan kompetensi dan rencana rapat sebagai berikut:

Board of Commissioners' Work Program Plan in 2026

The Board of Commissioners regularly prepares a plan for the supervisory program as a reference for the Board of Commissioners' duties implementation in the coming year. PTPP's Board of Commissioners Supervisory Program Plans include Work Plan and Budget, competency development, and meeting plans as follows:

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2026
Board of Commissioners' Work Program in 2026

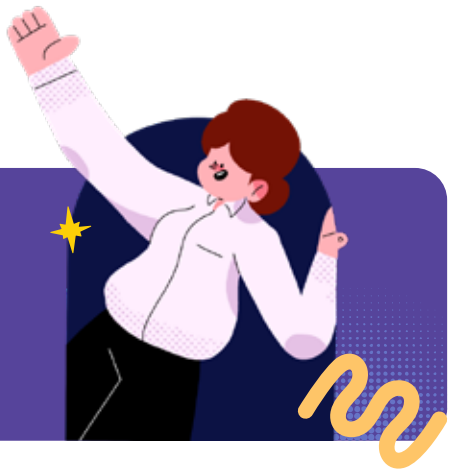
No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency	Waktu Time
1	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal	Monitoring dan saran atas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan:			
		a. Peraturan dan perundangan dari Regulator	Arahan	1 X	TW 2
		b. Peraturan Internal/Kebijakan/SOP	Arahan	1 X	TW 2
	Compliance with Regulations and Internal Control	Monitoring and advice on the implementation of applicable laws and regulations for the Company:			
		a. Laws and regulations from the Regulator	Directive	1 X	Q2
		b. Internal Regulations/Policies/Standard Operating Procedures (SOP)	Directive	1 X	Q2

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency	Waktu Time
2	Kinerja Perusahaan	Monitoring, saran atas kinerja perusahaan: a. Mencakup antara lain: Evaluasi pencapaian kinerja perusahaan terhadap RKAP (Induk) & Entitas Anak Tahun 2026, atau pembahasan permasalahan strategis b. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ke Pemegang Saham Tahun 2026 c. Kunjungan Dewan Komisaris ke proyek dan/atau investasi Perusahaan	Risalah Laporan Laporan	6 X 4 X 10 X	Setiap dua bulan Setiap Triwulan Sesuai kebutuhan
	Company Performance	Monitoring and advice on the Company's performance related to: a. Includes: Evaluation of the company's performance against the 2026 RKAP (Parent) & Subsidiary Entities, or discussion of s trategic issues b. Quarterly Performance Report to Shareholders for 2026 c. Board of Commissioners' visits to the Company's projects and/or investments	Minutes Report Report	6 X 4 X 10 X	Bimonthly Quarterly As needed
3	Kinerja Dewan Komisaris	a. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2026 b. Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2025	Evaluasi Laporan	1 X 1 X	TW 4 TW 1
	Board of Commissioners' Performance	a. Measurement and Assessment of the Board of Commissioners' Performance for the 2025 Fiscal Year b. Supervisory Report for the 2025 Fiscal Year	Evaluation Report	1 X 1 X	Q4 Q1
4	Manajemen Risiko	Monitoring, saran atas pengelolaan manajemen risiko	Arahan	1 X	TW 3
	Risk Management	Monitoring and advice on risk management	Directive	1 X	Q3
5	Sistem Teknologi Informasi	Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi	Arahan	1 X	TW 3
	Information Technology System	Monitoring and advice on the implementation of Information Technology Systems	Directive	1 X	Q3
6	Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	Arahan	1 X	TW 3
	QSHE Management (Quality, OHS, and Environment)	Monitoring and advice on the implementation of QSHE Management (Quality, OHS, and Environment)	Directive	1 X	Q3
7	Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi	Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP) a. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS b. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi	Arahan Arahan/ Laporan Arahan/ Laporan	1 X 1 X 1 X	TW 4 TW 4 TW 4
	Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS) and gratification management system	Monitoring and advice on the implementation of the Company's internal control system (SPIP); a. Monitoring, advice, and follow-up on WBS reports b. Monitoring, advice, and follow-up on gratuity reports	Directive Directive/Report Directive/Report	1 X 1 X 1 X	Q4 Q4 Q4

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency	Waktu Time
8	Pengawasan Kebijakan	a. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya	Arahan	1 X	TW 4
		b. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karir, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai	Arahan	1 X	TW 4
		c. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Arahan	1 X	TW 4
		d. Pengelolaan Entitas Anak (*Subsidiary Governance*)	Arahan	1 X	TW 4
	Policy Oversight	a. Procurement Policy and its Implementation	Directive	1 X	Q4
		b. Human Capital Management, including Recruitment, Career Management, Promotion, Transfer, and Demotion of Employees	Directive	1 X	Q4
		c. Accounting Policies and Preparation of Financial Statements	Directive	1 X	Q4
		d. Subsidiary Governance	Directive	1 X	Q4
9	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi BUMN serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak	a. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi	Usulan	1 X	TW 1
		b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan	Usulan	1 X	TW 1
	Remuneration, Nomination, and Succession Planning for State-Owned Enterprises (SOE) Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiary Entities	a. Reviewing proposals for Board of Directors remuneration and nominations	Recommendation	1 X	Q1
		b. Proposing bonuses/performance incentives considering the performance assessment of the Board of Directors and the achievement of the company's health level	Recommendation	1 X	Q1
10	Pengawasan Eksternal/ KAP	a. Evaluasi efektivitas kinerja KAP Tahun Buku 2025	Evaluasi	1 X	TW 1
		b. Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2026	Usulan	1 X	TW 1
	External Audit/ KAP	a. Evaluation of the effectiveness of the KAP's performance for the 2025Fiscal Year	Evaluation	1 X	Q1
		b. Proposal for the Appointment of KAP for the 2026 Fiscal Year	Recommendation	1 X	Q1
11	GCG	Monitoring, saran dan tinak lanjut atas penerapan prinsip-prinsip GCG	Arahan	1 X	TW 1
	GCG	Monitoring, advice, and follow-up on the implementation of GCG principles	Directive	1 X	Q1
12	RUPST dan RUPSLB	Tanggapan dan saran terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam RUPST dan RUPSLB	RUPST atau RUPSLB	1 X	TW 1 (sesuai kebutuhan)
	AGMS and EGMS	Feedback and Advice on Matters to be Discussed in the AGMS and EGMS	AGMS or EGMS	1 X	Q1 (as needed)
13	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Memberikan persetujuan dan arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Persetujuan	-	Sesuai Kebutuhan
	Investment, Business Development, and Corporate Action	Approval, guidance, and directive on on Investment, Business Development, and Corporate Action plans	Approval	-	As Needed

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	*Output* Output	Frekuensi Frequency	Waktu Time
14	Penyusunan RKAP Tahun 2026	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKAP Tahun 2026: 1. Arahan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKAP 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP 3. Persetujuan/Pengesahan RKAP	 Surat Surat Berita Acara	 1 X 1 X 1 X	 TW 4 TW 4 TW 4
	Preparation of the 2026 RKAP	Advice and Approval for the Preparation of the 2026 RKAP: 1. Board of Commissioners Directions regarding the Preparation of the RKAP 2. Board of Commissioners Response to the RKAP Draft 3. RKAP Approval/Endorsement	 Letter Letter Minutes	 1 X 1 X 1 X	 Q4 Q4 Q4
15	Laporan Periodik atas Program Kerja Perusahaan Tahun 2024	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Periodik Tahun 2024 2. Persetujuan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2024	Arahan Persetujuan	3 X 1 X	Setiap triwulan TW 1
	Periodic Reports on the Company's 2024 Work Plan	1. Board of Commissioners' Response to the Periodic Financial Statements for 2024 2. Approval of the 2024 Annual Report	Directive Approval	3 X 1 X	Quarterly Q1
16	Pengembangan Dewan Komisaris	Seminar, *workshop* atau sebagai narasumber	Laporan	6 X	Sesuai kebutuhan
	Development of the Board of Commissioners	Seminar, workshop, or participation as a speaker	Report	6 X	As Needed
17	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal/ Eksternal	Monitoring tindak lanjut temuan auditor baik internal maupun eksternal dalam rapat Komite, rapat Dewan Komisaris, dan/atau rapat Gabungan	Kali	1 X	TW 4
	Monitoring Follow-up on Internal/External Auditor Findings	Monitoring follow-up on internal and external auditor findings in Committee meetings, Board of Commissioners meetings, and/or Joint meetings	Times	1 X	Q4
18	Evaluasi Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris	Evaluasi kinerja Komite Audit, Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris	Evaluasi	1 X	TW 4
	Evaluation of the Performance of Supporting Organs under the Board of Commissioners	Evaluation of the performance of the Audit Committee, GCG Committee, Risk Monitoring, Nomination and Remuneration Committee, and Secretary to the Board of Commissioners	Evaluation	1 X	Q4

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Komposisi Komisaris Independen Perusahaan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebesar 66,67%, dan telah memenuhi peraturan terkait.

The composition of the Company's Independent Commissioners represents 66.67% of the total number of members of the Board of Commissioners, and complies with the relevant regulations."

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perusahaan, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board and/or with the majority shareholder, or other relationships with the Company which may affect their independent decision making and actions.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan mandiri dan juga untuk menjaga "*fairness*" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dengan Pemegang Saham minoritas serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

The Independent Commissioner exists to create a more objective and independent climate and to maintain fairness, provide a balance between the interests of majority shareholders with minority shareholders, as well as provide protection for the interests of minority shareholders and other stakeholders.

Keberadaan dan pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The existence and appointment of the Independent Commissioner are regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, komposisi Dewan Komisaris Independen haruslah minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki 4 (empat) Komisaris Independen dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

Composition and Membership of Independent Commissioner in the Board of Commissioners' Structure

Under OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Independent Commissioner composition must be at least 30% of the total Board of Commissioners members. As of December 31, 2025, the Company has four Independent Commissioners out of a total of six Commissioners.

Komisaris Independen per 31 Desember 2025
Independent Commissioners as of December 31, 2025

Komisaris Independen Independent Commissioner	Periode Jabatan Service Period	Masa Jabatan Term of Office
Dhony Rahajoe	Periode ke-1 First Period	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023; masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Extraordinary GMS Resolution dated December 13, 2023; Term of office until the closing of the Annual GMS, which will be held in 2028.
Istiono	Periode ke-1 First Period	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 5 April 2022; masa hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. 2021 Fiscal Year Annual GMS Resolution dated April 5, 2022; Term of office until the closing of the GMS, which will be held in 2027.
Jaya Kesuma	Periode ke-1 First Period	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023; masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Extraordinary GMS Resolution dated December 13, 2023; Term of office until the closing of the GMS, which will be held in 2028.
Pundjung Setya Brata	Periode ke-1 First Period	Keputusan RUPS Tahunan 2023 tanggal 24 April 2024; masa jabatan hingga penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029. 2023 Annual GMS Resolution dated April 24, 2024; Term of office until the closing of the GMS, which will be held in 2029.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Independensinya

Sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tepatnya Pasal 21 Butir 1, Kriteria Komisaris Independen adalah:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Perusahaan mengacu pada ketentuan tersebut dalam menentukan Komisaris Independen.

Seluruh Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas dan telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui setiap tahun.

Criteria to Determine Independent Commissioners and Their Independence

Per OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, particularly Article 21 Point 1, Criteria for Independent Commissioner are:

1. Currently not being employed nor has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of said Issuer or Public Company within the last six months, except for re-appointment as the Independent Commissioner of the said Issuer or Public Company in the next period;
2. Does not have shares, either directly or indirectly, with the Issuer or Public Company;
3. Not affiliated with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the major shareholders of the Issuer or Public Company; and
4. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, that is related to the business activities of the Issuer or Public Company.

The Company refers to these provisions in appointing Independent Commissioners.

The Company's Independent Commissioners have met the independence criteria as stated above and have been declared Independent by every Commissioner by signing an annually renewed statement.

Berikut disampaikan independensi dari Komisaris Independen Perusahaan.

Below is the independence of the Company's Independent Commissioners.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Dhony Rahajoe	Istiono	Jaya Kesuma	Pundjung Setya Brata
Sebagai orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya Being employed or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for re-appointment as the Company's Independent Commissioner in the next period.	✗	✗	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung Possessing Company shares, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan Affiliated with Commissioners, Directors, and the Company's Major Shareholders.	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung Having a business relationship with the Company, either directly or indirectly.	✗	✗	✗	✗

✓ = ada | ✗ = tidak ada
✓ = have a relationship; ✗ = no relationship

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Statement of Independence from the Independent Commissioners

Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)



Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)



Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)



Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)



Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is the Company's organ in charge of and collectively responsible for managing the Company and implementing GCG at all ranks or organizational levels. The Board of Directors is fully responsible for managing the Company for the Company's interests and objectives following the provisions of the Articles of Association.

Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Perusahaan, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan, terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Board of Directors Term of Office

Per the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are appointed for a term of office commencing from the date determined by the GMS that appoints them and ending at the closing of the fifth GMS after the appointment date, without prejudice to the GMS's right to dismiss the members of the Board of Directors at any time before their term of office ends.

After the term of office expires, members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for one more term of office, commencing from the date determined by the GMS that appoints them and ending at the closing of the fifth GMS after the appointment date, provided that it does not exceed a period of five years.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2025

Di tahun 2025, pemegang saham memutuskan tidak melakukan perubahan susunan Direksi; pemegang saham memutuskan untuk mengangkat kembali Direktur Utama Novel Arsyad dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Yul Ari Pramuraharjo untuk periode ke-2.

Number, Composition, and Structure of the Board of Directors in 2025

In 2025, shareholders decided not to change the composition of the Board of Directors; they reappointed President Director Novel Arsyad and Director of Infrastructure Operations Yul Ari Pramuraharjo for a second term.

Susunan Direksi per 31 Desember 2025
Board of Directors Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Sebagai Direksi Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Menjabat Service Period
Novel Arsyad	Direktur Utama President Director	• Periode ke-2: Keputusan RUPS Tahunan 2024 tanggal 30 April 2025 • Periode ke-1: Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 • Second Term: Resolution of the 2024 Annual GMS dated April 30, 2025 • First Term: Resolution of the 2019 Fiscal Year Annual GMS dated June 4, 2020	30 April 2025 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030 April 30, 2025, until the closing of the GMS to be held in 2030	Kedua Second

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Sebagai Direksi Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Menjabat Service Period
Agus Purbianto	Direktur Keuangan Director of Finance	• Periode ke-2: Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021 • Periode ke-1: Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 29 April 2016 • Second Term: Resolution of the 2020 Fiscal Year Annual GMS dated May 25, 2021 • First Term: Resolution of the 2015 Fiscal Year Annual GMS dated April 29, 2016	25 Mei 2021 s.d. penutupan RUPS yang diselenggarakan di tahun 2026 May 25, 2021, until the closing of the GMS to be held in 2026	Kedua Second
Yul Ari Pramuraharjo	Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Director of Infrastructure Operations	• Periode ke-2: Keputusan RUPS Tahunan 2024 tanggal 30 April 2025 • Periode ke-1: Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 • Second Term: Resolution of the 2024 Annual GMS dated April 30, 2025 • First Term: Resolution of the 2020 Fiscal Year Annual GMS dated May 25, 2021	30 April 2025 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2030 April 30, 2025, until the closing of the GMS to be held in 2030	Kedua Second
Yuyus Juarsa	Direktur Operasi Bidang Gedung Director of Building Operations	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2023 Resolution of the Extraordinary GMS dated December 13, 2023	13 Desember 2023 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 December 13, 2023, until the closing of the GMS to be held in 2028	Pertama First
Tommy Wiranata Anwar	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 24 April 2024 Resolution of the 2023 Fiscal Year Annual GMS dated April 24, 2024	24 April 2024 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2029	Pertama First
I Gede Upeksa Negara	Direktur Strategi Korporasi dan HCM Director of Corporate Strategy and HCM	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 24 April 2024 Resolution of the 2023 Fiscal Year Annual GMS dated April 24, 2024	24 April 2024 s.d penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 April 24, 2024, until the closing of the GMS to be held in 2029	Pertama First

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of all Directors are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Sebagai pendukung dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi Perusahaan telah dilengkapi Pedoman Tata Tertib Kerja (Board Manual) Direksi yang telah ditandatangani oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. 125/SK/PP/DIR/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Piagam (Board Manual) Direksi PT PP (Persero) Tbk.

Aspek-aspek Pedoman Kerja Direksi terdiri atas:
1. Masa Jabatan Anggota Direksi;
2. Wewenang, dan Kewajiban Direksi;
3. Rapat Direksi;
4. Program Pengenalan Anggota Direksi;
5. Remunerasi;

Board Manual of the Board of Directors

As a supporting organ in conducting the Company's management functions, the Board of Directors has been equipped with a Board Manual which was signed by the Board of Directors per the Board of Directors Decree No. 125/SK/PP/DIR/2021, dated August 20, 2021, on the Board of Directors Charter (Board Manual) of PT PP (Persero) Tbk.

The aspects of the Board of Directors Manual consist of:
1. Term of Office of Members of the Board of Directors;
2. Board of Directors Authority and Obligations;
3. Board of Directors Meeting;
4. Board of Directors Induction Program;
5. Remuneration;

6. Peningkatan Pengetahuan Direksi;
7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan; dan
8. Evaluasi Kinerja Direksi.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

▶ Ketentuan Umum

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Publik, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan secara tanggung renteng apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
7. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

6. Knowledge Enhancement for the Board of Directors;
7. The Company's Long-term Plan, Work Plan and Budget, and Annual Report; and
8. Board of Directors Performance Evaluation.

Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors

▶ General Provisions

1. The Board of Directors is in charge of carrying out and being responsible for the Company's management for the Company's interest following the Company's purposes and objectives as outlined in the Articles of Association.
2. In performing the duties and responsibilities for the management of the Public Company, the Board must hold the Annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
3. Every member of the Board of Directors must conduct their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
4. Every member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company losses caused by errors or omissions of members of the Board of Directors in performing their duties.
5. Members of the Board of Directors cannot be held liable jointly and severally for the Company's losses if they can prove that:
   a. The losses were not due to any fault or negligence on their part;
   b. They have conducted management with good faith, full responsibility, and prudence for the interests and in accordance with the purposes and goals of the Company;
   c. The person does not have any conflict of interest, either directly or indirectly, over the management actions resulting in losses; and
   d. They have taken actions to prevent the occurrence or continuation of such losses.
6. The Board of Directors is authorized to conduct Company management with the appropriate policy following the aims and objectives outlined in the Articles of Association.
7. The Board of Directors is authorized to represent the Company in and out of court.
8. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a legal dispute in court between the Company and the concerned member of the Board of Directors; and
   b. The respective member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company.

9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada point (2), yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

9. In the event of circumstances as referred to in point (2), the authorized representative of the Company is:
   a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
   b. The Board of Commissioners, if all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
   c. Other party appointed by the GMS, if all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

▶ **Tugas Direksi**

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

▶ **Duties of the Board of Directors**

The Board of Directors performs all actions related to the management and is responsible for the Company's management of the Company's interests in line with the Company's purposes and objectives, concerning and subject to the conditions and represents the Company both inside and outside the court on all matters and all the events with the restrictions as outlined in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GSM resolutions.

- Tugas dalam RUPS

  Dalam hubungannya dengan RUPS, Direksi bertugas antara lain:
  1. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan keuangan tahunan kepada RUPS;
  2. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal ada anggota Direksi menolak untuk menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya;
  3. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam hal menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangundangan yang terkait. Dalam pelaksanaannya sedapat mungkin dihindari adanya perubahan-perubahan yang dapat membingungkan para Pemegang Saham;
  4. Menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat secara jelas dan rinci kepada OJK selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum mengumumkan rencana rapat;
  5. Menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat diselenggarakan kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional;
  6. Menyediakan bahan rapat RUPS dan diberikan cuma-cuma kepada Pemegang Saham;

- Duties in the GMS

  In relation to the GMS, the Board of Directors has duties, among others:
  1. Provide accountability and all information on the condition and operation of the Company in the form of an annual report including annual financial calculations to the GMS;
  2. Signing the Annual Report; in case a member of the Board of Directors refuses to sign the Annual Report, the reason must be stated;
  3. Summoning and holding the Annual GMS and or Extraordinary GMS. The GMS should be carefully planned in terms of determining the place, time of the event, procedures, and meeting agendas following the Company's Articles of Association and related laws and regulations. In its implementation, it is possible to avoid changes that may confuse the Shareholders;
  4. Submitting the meeting agenda clearly and in detail to OJK no later than seven days before announcing the meeting plan;
  5. Submit the meeting results no later than two working days after the meeting is held to OJK and announce it to the public in at least two Indonesian newspapers, one of which has national circulation;
  6. Provide materials for the GMS meeting and are given free of charge to the Shareholders;

7. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang Saham;
8. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar; dan
9. Direktur Utama memimpin RUPS apabila anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Komisaris Utama untuk memimpin RUPS tidak hadir. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir dalam RUPS maka Direktur Utama wajib menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi untuk memimpin RUPS.

- Tugas dalam menyusun strategi dan rencana kerja
  1. Menyusun menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Perusahaan. Pengkajian visi dan misi dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau setiap saat bila diperlukan penyesuaian.
  2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
  3. Menyiapkan rencana pengembangan perusahaan serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan.
  4. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPP dan RKAP.
  5. Menyusun/menyiapkan RJPP.
  6. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran rencana tahunan dari RJPP untuk setiap tahun buku disertai perincian anggaran yang selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
  7. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.
     Tata cara penyampaian RKAP kepada Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
     1) Direksi menyusun draft RKAP dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Draft RKAP memuat:
        a. Rencana Kerja Perusahaan;
        b. Anggaran Perusahaan;
        c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, yang memuat Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba/Rugi, Proyeksi Arus Kas dan Sumber dan Penggunaan Dana;
        d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan; dan
        e. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Umum Pemegang Saham (RUPS).
     2) Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan tanggapan terhadap draft RKAP yang diusulkan Direksi.

7. Provide the GMS Minutes to the Shareholders upon request;
8. Requesting GMS approval for any amendments to the Articles of Association; and
9. The President Director shall chair the GMS if the Board of Commissioners member appointed by the President Commissioner to chair the GMS is absent. If the President Director cannot attend the GMS, the President Director shall appoint in writing one of the Board of Directors members to chair the GMS.

- Duties in Formulating Strategy and Work Plans
  1. Developing and establishing the Company's vision, mission, objectives, targets, and strategies. The review of the vision and mission shall be conducted at least once every three years or as needed for adjustments.
  2. Striving for and ensuring the implementation of the company's strategy to achieve the established goals/objectives.
  3. Preparing the company's development plan and presenting it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval.
  4. Drafting and establishing policies, procedures, and guidelines for the preparation of RJPP and RKAP.
  5. Drafting/preparing RJPP.
  6. Preparing RKAP as an elaboration of the annual plan from RJPP for each fiscal year, accompanied by detailed budgets which are then approved and ratified by the Board of Commissioners.
  7. Striving to achieve the short-term targets outlined in RKAP.
     The procedure for presenting RKAP to the Board of Commissioners is regulated as follows:
     1) The Board of Directors prepares an RKAP draft and submits it to the Board of Commissioners no later than October 31 before the start of the upcoming fiscal year. The RKAP draft includes:
        a. Company Work Plan;
        b. Company's Budget;
        c. Company's Principal Financial Projections, including Balance Sheet Projection, Profit/Loss Projection, Cash Flow Projection, and Sources and Uses of Funds;
        d. Principal Financial Projections of Subsidiaries; and
        e. Other matters requiring the General Meeting of Shareholders' (GMS) Resolution.
     2) The Board of Commissioners reviews and provides feedback on the proposed draft RKAP submitted by the Board of Directors.

3) Direksi menerima tanggapan dan melakukan perbaikan- perbaikan yang diminta.
4) Dewan Komisaris memberikan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.

Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh persetujuan sampai batas waktu yang ditentukan, maka RKAP Tahunan Perusahaan sebelumnya yang diberlakukan.

- Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal
  1. Direksi harus menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
  2. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan harus diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan Perusahaan;
  3. Dalam memastikan Sistem Pengendalian Intern berfungsi secara efektif, Direksi dibantu oleh Internal Audit dalam memberikan pernyataan tentang tingkat kecukupan pengendalian intern Perusahaan pada level operasional dan level entitas;
  4. Direksi menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian internal (*internal control report*) pada akhir tahun, yang berisikan pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta efektivitas struktur pengendalian intern; dan
  5. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga dan menjalankannya.

- Tugas dalam pengelolaan Manajemen Risiko
  Direksi menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan secara konsisten mencakup:
  1. ldentifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis jenis risiko yang relevan dan berpotensi akan terjadi;
  2. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, dan probabilitas dari risiko yang telah diidentifikasi;
  3. Pedoman penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menangani apabila terjadi suatu risiko tertentu;
  4. Pemantauan Risiko, yaitu proses pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko, melakukan pengukuran dampak risiko yang terjadi dan melakukan koreksi terhadap Pedoman Penangan Risiko apabila dampak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan;

3) The Board of Directors receives feedback and makes required improvements.
4) The Board of Commissioners provides approval before the start of the fiscal year.

If the request for approval of the RKAP has not been granted by the specified deadline, then the Company's previous year's RKAP shall remain in effect.

- Duties in the Internal Control System
  1. The Board of Directors must establish an effective Internal Control System policy to secure the Company's investments and assets;
  2. The Company's Internal Control System Policy must be implemented effectively to achieve the Company's objectives;
  3. In ensuring that the Internal Control System functions effectively, the Board of Directors is assisted by the Internal Audit in providing statements regarding the level of adequacy of the Company's internal control at the operational and entity level;
  4. The Board of Directors issues a report on the level of adequacy of internal control at the end of the year, which contains a statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures as well as the effectiveness of internal control structure; and
  5. The Board of Directors establish a mechanism to maintain compliance with applicable laws and regulations and agreements with third parties and implements them.

- Duties in Risk Management
  The Board of Directors implement risk management and consistently execute it, including:
  1. Risk identification: the process of recognizing relevant types of risks and their potential occurrence;
  2. Risk measurement: the process of measuring the magnitude, impact, and probability of identified risks;
  3. Risk handling guidelines: the process of establishing efforts to manage specific risks if they occur;
  4. Risk Monitoring: the process of monitoring risk management implementation, measuring the impact of occurring risks, and correcting Risk Handling Guidelines if the actual impact differs from expectations;

5. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan didalam Perusahaan;
6. Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Direksi membuat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko;
8. Dalam hal tindakan Perusahaan untuk menangani risiko yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris/RUPS.

- Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan lnformasi
  1. Masyarakat Pemodal dan pemangku kepentingan lainnya perlu mendapatkan informasi mengenai Perusahaan oleh karena itu informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal wajib untuk dipublikasikan, antara lain untuk hal- hal sebagai berikut: Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan,sesuai dengan peraturan OJK.
  2. Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat. Penawaran Umum tersebut meliputi saham, obligasi atau efek yang dapat dikonversikan menjadi saham.
  3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana dimaksud poin 2, dibuat secara berkala setiap triwulan (Maret, Juni, September dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.
  4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
  5. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut Direksi wajib:
     a) Melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
     b) Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

5. Evaluation: the process of assessing the adequacy of overall risk management activities conducted within the Company;
6. Reporting and Disclosure: the process of reporting the implemented risk management system along with its disclosures to relevant parties as required by applicable regulations;

7. The Board of Directors creates a company work plan to implement risk management policies;
8. In cases where Company actions to manage risks require approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors submits proposals to the Board of Commissioners/GMS.

- Duties in Information Disclosure and Confidentiality

1. Investors and other stakeholders need to obtain information about the Company. Therefore, material information or facts that are expected to influence the price of securities or investors' investment decisions must be published, e.g., for the following matters: business mergers, stock purchases, business consolidation, or the establishment of joint ventures, following OJK regulations.

2. The Board of Directors is required to submit a report on the use of proceeds from the Public Offering to OJK. The use of proceeds from the Public Offering must also be accounted for at the Annual General Meeting of Shareholders, and/or submitted to the Trustee. The Public Offering includes shares, bonds, or securities that can be converted into shares.

3. Accountability for the use of proceeds submitted to OJK and the Trustee as referred to in point 2 is made periodically every quarter (March, June, September, and December). Submission of the report is no later than the 15th day of the following month.

4. Accountability for the use of funds realization at the Annual General Meeting of Shareholders is carried out every year.
5. In case of changes in the utilization of funds, the Board of Directors is required to:
   a) Prior to any change in the utilization of funds, report the plan to OJK by providing reasons along with its considerations;

   b) Changes in the use of funds originating from an IPO of Shares must first obtain approval from the General Meeting of Shareholders;

c) Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat; dan
d) Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada Perusahaan Anak atau afiliasinya, agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Perusahaan.

6. Perubahan penggunaan dana tersebut mencakup:
   a) Perubahan yang material dari masing masing unsur penggunaan dana; dan
   b) Perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.
7. Dalam hal terdapat sisa dana perlu dijelaskan antara lain:
   a) Tempat dimana dana tersebut disimpan;
   b) Tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;
   c) Hubungan afiliasi antara Perusahaan dengan tempat dimana dana tersebut disimpan; dan
   d) Jangka waktu penyimpanan.
8. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian laporan periode yang bersangkutan, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak penjatahan.
9. Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terdekat, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal penjatahan.
10. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

11. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, kreditur dan *stakeholders*, antara lain mengenai:
    a) Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan;
    b) Status Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham;

c) Changes in the use of funds originating from the Public Offering of Bonds must first obtain approval from the Trustee; and
d) In case the funds are lent to a Subsidiary Company or its affiliates, clarify the allocation of fund utilization after the funds are returned to the Company.

6. Changes in fund usage include:
   a) Material changes to each element of fund usage; and
   b) Location changes that have economic impacts.
7. If there are remaining funds, it needs to be explained, among others:
   a) The place where the funds are deposited;
   b) The interest rate earned and its allocation;
   c) Affiliation between the Company and the place where the funds are deposited; and
   d) Deposit period.
8. The report on the realization of fund usage for the first time must be submitted during the reporting period, even if the fund usage does not cover three months since the allotment.

9. The realization of fund usage accounted for in the Annual GMS for the first time must be submitted at the nearest Annual General Meeting of Shareholders, even if the fund usage does not cover one year since the allotment.

10. The Board of Directors is required to disclose significant information in the Annual Report and Financial Statements of the Company to other parties in accordance with the applicable regulations promptly, accurately, clearly, and objectively.
11. The Board of Directors must take the initiative to disclose not only matters required by regulations but also those important for decision-making by Shareholders, the Board of Commissioners, creditors, and stakeholders, including:
    a) The Company's objectives, business objectives, and strategies;
    b) Status of the Major Shareholders and other Shareholders as well as related information regarding the implementation of the Shareholders' rights;

c) Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
d) Penilaian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e) Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka. Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perusahaan;
f) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, anggota Komisaris dan Direksi;
g) Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
h) lnformasi material mengenai karyawan Perusahaan dan *stakeholders*;
i) Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan;
j) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan
k) Pelaksanaan Pedoman *Good Corporate Governance*.

12. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
13. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah material yang dihadapi perusahaan.
14. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
15. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung memuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
16. Direktur wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
17. Perusahaan wajib melaporkan kepada OJK atas setiap pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

c) Cross-shareholding and cross-debt guarantee;
d) Company Assessment by Public Accounting Firms, credit rating agencies, and other rating agencies;
e) Curriculum vitae of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and key executives of the Company, as well as their salaries and benefits.
f) The honorarium awarding system for Internal Auditors as well as members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
g) Material risk factors that can be anticipated, including management's assessment of the business climate and risk factors;
h) Material information regarding the Company's employees and stakeholders;
i) Material claims filed by and/or against the Company, and cases in judicial bodies or arbitration bodies involving the Company;
j) Potential and/or ongoing conflicts of interest; and
k) Implementation of the Good Corporate Governance Guidelines;

12. The Board of Directors is required to submit reports to the Board of Commissioners first before they are presented to the Shareholders.
13. The Board of Directors must actively disclose the implementation of Good Corporate Governance principles and material issues faced by the company.
14. The Board of Directors is responsible for maintaining the confidentiality of the Company and ensuring that confidential information is not disclosed until the announcement regarding it is made to the public.
15. Members of the Board of Directors are prohibited, either directly or indirectly, from making false statements regarding material facts or not disclosing material facts to prevent the statements made from being misleading about the state of the company at the time the statements are made.
16. Directors are required to report on ownership and any change in ownership of the Company's shares to OJK no later than ten days after the transaction occurs.
17. The Company is required to report any party owning 5% or more of the paid-up shares and any changes in ownership of the Company's shares to OJK.

18. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 16 dan 17 tersebut sekarang kurangnya meliputi: 1) nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan; 2) jumlah saham yang dibeli atau dijual; 3) harga pembelian dan penjualan per saham; 4) tanggal transaksi.
19. Salinan dari laporan sebagaimana poin 18 harus tersedia untuk dilihat oleh umum dan disalin OJK.
20. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian Pemegang Saham sebagai akibat pelanggaran memberikan pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga menyesatkan mengenai keadaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
21. Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan sebagaimana dimaksud poin 20 apabila anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

- Tugas dalam Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
  1. Untuk meningkatkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Direksi menetapkan kebijakan operasi Perusahaan yang mengatur hubungan dan kewajiban terhadap *stakeholders*; dan
  2. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/*harassment*).

- Tugas dalam Sistem Akuntansi dan Pembukuan
  1. Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan Berkala dan menyampaikan kepada BEI dan OJK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan salinan elektronik (*soft copy*). Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan perusahaan yang terdiri dari:
     a) Laporan posisi keuangan (neraca);
     b) Laporan laba rugi komprehensif;
     c) Laporan perubahan ekuitas;
     d) Laporan arus kas;
     e) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, wajib membuat penyajian kembali pos-pos dalam keuangan atau mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya; dan
     f) Catatan atas laporan keuangan.

18. The reports as referred to in points 16 and 17 now cover at least: 1) name, place of residence, and nationality; 2) the number of shares purchased or sold; 3) purchase and sale price per share; 4) transaction date; and
19. A copy of the report as referred to in point 18 must be made available for public viewing and copied by OJK.
20. Members of the Board of Directors are individually and jointly responsible for the loss of Shareholders as a result of their violation of providing false statements regarding material facts or failing to disclose material facts to mislead the Company's condition under the applicable laws and regulations.
21. Members of the Board of Directors cannot be held responsible individually or jointly for the provisions referred to in point 20 if the concerned member of the Board of Directors has been careful enough in determining that the statement is true and not misleading.

- Duties in Relations with Stakeholders
  1. To improve relations with stakeholders, the Board of Directors shall establish the Company's operating policies that regulate relations and obligations to stakeholders; and
  2. The Board of Directors is required to provide a safe and healthy work environment that is free from all forms of pressure (harassment).

- Duties in Accounting and Bookkeeping Systems
  1. The Board of Directors is required to prepare Periodic Financial Statements and submit at least two copies, one of which is the original, to IDX and OJK, accompanied by a soft copy of the report. Periodic Financial Reports are the Company's annual financial reports and semiannual financial reports consisting of:
     a) Statement of financial position (balance sheet);
     b) Comprehensive income statement;
     c) Statement of Changes in Equity;
     d) Cash flow statement;
     e) The statement of financial position at the beginning of the comparative period. If the Company applies accounting policies retrospectively, a restatement of items in the financial statements or reclassifying items in its financial statements is required; and
     f) Notes to financial statements.

Dalam penyajian laporan keuangan berkala harus dinyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

2. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Berkala wajib mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Keuangan terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.
3. Apabila perusahaan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada OJK wajib memuat informasi yang sama dengan laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Apabila Bursa Efek di negara lain menetapkan batas waktu penyampaian dan pengumuman maka perusahaan dapat menyampaikan Laporan Keuangan Berkala mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut dan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada OJK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.
4. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan Laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BEI dan OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pengumuman Laporan keuangan tahunan kepada masyarakat wajib dilakukan paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;
   b) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada BEI dan OJK; dan
   c) Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada BEI dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

In presenting periodic financial statements, it must be stated that the notes to the financial statements are an integral part of the financial statements.

2. Periodic Financial Statements preparation must follow the latest Financial Accounting Standards provisions as long as it is not stated otherwise by OJK.
3. If the Company is listed on the Stock Exchange in Indonesia and in other countries, the Periodic Financial Statements submitted to OJK must contain the same information as the Periodic Financial statement submitted to the capital market authority in other countries and at least comply with the provisions regulated by OJK related to the presentation and disclosure of financial statements. If the Stock Exchange in other countries stipulates a deadline for submission and announcement, the Company can submit Periodic Financial Statements following the provisions of the capital market authority in other countries, and the date of submission and announcement of Periodic Financial Statements to OJK is no later than the date of submission and announcement of Periodic Financial Statements to the capital market authorities in other countries.
4. The annual financial statement must be presented in comparison with the same period the previous year.
5. The annual financial statement must be accompanied by an Accountant's Report to audit the financial statements.
6. The annual financial statements must be submitted to IDX and OJK and announced to the public no later than the end of the third month after the date of the annual financial statements. Announcement of the annual financial statement to the public must be made in at least one daily newspaper with national circulation in Indonesian with the following provisions:
   a) The annual financial statements that are published shall at least include a statement of financial position (balance sheet), comprehensive income, cash flows, and an Accountant's Opinion;
   b) The form and content of the report as referred to in point 1) must be the same as that presented in the annual financial report submitted to IDX and OJK; and
   c) Proof of the announcement must be submitted to IDX and OJK no later than two working days after the announcement date.

7. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya.
8. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada BEI dan OJK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut:
   a) Paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
   b) Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
   c) Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
9. Pengumuman laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam poin 8 wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Laporan keuangan tengah tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posIsI keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas;
   b) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada BEI dan OJK;
   c) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan; dan
   d) Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada BEI dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
10. Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, wajib pula memuat paragraf penjelasan Akuntan atas opininya.
11. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.

7. The mid-year financial statements must be presented on a comparative basis with the same period of the previous year, except for the statement of financial position (balance sheet) as of the mid-year period compared with the statement of financial position (balance sheet) as of the end of the previous fiscal year.
8. Mid-year financial statements must be submitted to the IDX and OJK and announced to the public within the following timeframe:
   a) No later than the end of the first month after the date of the mid-year financial statements, if not accompanied by an Accountant's report;
   b) No later than the end of the second month after the date of the mid-year financial statements, if accompanied by an Accountant's report for limited review purposes; and
   c) No later than the end of the third month after the date of the mid-year financial statements if accompanied by an Accountant's report to audit the financial statements.
9. The announcement of mid-year financial statements, as referred to in point 8, must be made in at least one daily Indonesian-language newspaper with national circulation, with the following provisions:
   a) The announced mid-year financial statements must at least include the statement of financial position (balance sheet), statement of comprehensive income, and statement of cash flows;
   b) The form and content of the statements as referred to in point a must be the same as those presented in the mid-year financial statements submitted to the IDX and OJK;
   c) If the mid-year financial statements are accompanied by an Accountant's report to audit the financial statements, then the announcement must include the opinion of the Accountant; and
   d) Proof of the announcement must be submitted to IDX and OJK no later than two working days after the announcement date.
10. If the Periodic Financial Statements receive an opinion other than unqualified, then the annual and mid-year financial statement announcements must also include a paragraph of the Accountant's explanation regarding their opinion.
11. If the deadline for submitting Periodic Financial Statements falls on a holiday, then the Periodic Financial Statements must be submitted on the next working day.

12. Membuat Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung jawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermeterai cukup dan dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan.
13. Menyusun sistem akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang kuat, terutama dilakukan pemisahan antara fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan.

- Tugas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
  Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan. Laporan Manajemen merupakan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada RUPS dan Dewan Komisaris.

- Tugas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan
  Direksi wajib menyusun dan menyediakan serta mengumumkan Laporan Tahunan Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUPT. Tata cara penyampaian Laporan Tahunan dari Direksi kepada RUPS adalah sebagai berikut:
  1. Direksi menyusun dan membuat Laporan tahunan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.
  2. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  3. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:
     a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

12. Prepare a statement from the Board of Directors regarding the Responsibility for the Financial Statements following the provisions stipulated by OJK. The statement Letter is signed by the President Director and the Director in charge of accounting or finance, has sufficient stamp duty, and is attached to the financial statements submitted to OJK. The Board of Directors is jointly and severally responsible for the statements made, including any losses that may be caused.
13. Develop an accounting system based on Financial Accounting Standards and strong internal control principles, particularly separating management, recording, storage, and supervisory functions.

14. Establish and maintain the bookkeeping and administration of the Company following prevailing practices for the Company.

- Duties in Compiling and Submitting Management Reports
  The Board of Directors is required to prepare and submit a Company Management Report. The Management Report is a periodic report containing the Company's Work Plan and Budget implementation according to the method and time following the provisions applicable to the GMS and the Board of Commissioners.

- Duties in Preparing and Submitting Annual Reports

  The Board of Directors is required to prepare, provide, and announce the Company's Annual Report following the provisions of the LLC Laws. The procedure for submitting the Annual Report from the Board of Directors to the GMS is as follows:
  1. The Board of Directors compiles and prepares an annual report that has been examined by a Public Accountant and then signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
  2. The Board of Directors submits the Annual Report to the Annual GMS no later than five months after the end of the fiscal year by considering the applicable provisions.
  3. The annual report must contain at least:

     a) Financial statements consisting of at least a balance sheet at the end of the last Fiscal Year in comparison with the previous Fiscal Year, a statement of profit and loss for the fiscal year concerned, a statement of cash flows, a statement of changes in equity, and notes to the financial statements;

b) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan;
c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

4. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan harus disediakan di kantor pusat Perusahaan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.

- Tugas Pengelolaan Dokumen Perusahaan
  1. Direksi menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dokumen Perusahaan termasuk afiliasinya, sesuai peraturan perundangan yang mengatur tentang Dokumen Perusahaan, mencakup:
     a) Klasifikasi dokumen perusahaan;
     b) Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan;
     c) Ketentuan dan tata cara pengalihan bentuk dokumen (dari kertas ke bentuk mikrofilm atau media lainnya) dan legalitasnya; serta
     d) Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen.
  2. Dalam pengelolaan dokumen perusahaan, Direksi wajib:
     a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

b) Reports on the Company's activities;
c) Report on Social and Environmental Responsibility implementations;
d) Details of problems that arose during the fiscal year that affected the Company's business activities;
e) Report on the supervisory duties that the Board of Commissioners has carried out during the last fiscal year;
f) Names of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
g) Salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners for the past year.

4. Approval of the Annual Report, including the ratification of the financial statements as well as the Board of Commissioners report on the supervisory duties and the decision on the use of profits to be determined by the Annual GMS. Approval of the Annual Report, including the report on supervisory duties by the Board of Commissioners and ratification of the financial statements by the Annual GMS, means granting settlement and release to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the past fiscal year, as long as such actions are evident in the Annual Report, including financial statements, reports on the Board of Commissioners supervisory duties, as well as following the applicable regulations. The Annual Report, including financial statements, must be provided at the Company's head office from the summons date until the Annual GMS date.

- Duties in Managing Company Documents
  1. The Board of Directors establishes policies in the management of Company Documents, including their affiliations, following the laws governing Company Documents, which include:
     a) Classification of the Company documents;
     b) The Company record-keeping and document storage;
     c) Provisions and procedures for transferring documents (from paper to microfilm or other media) and their legalization; as well as
     d) Provisions and procedures for transferring, submitting, and destroying documents.
  2. In managing Company documents, the Board of Directors is required to:
     a) Make a shareholder registry, special registry, GMS minutes, and minutes of the Board meetings, prepare Annual Reports and Company financial documents as referred to in Law No. 8 of 1997 on Company Documents;

b) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya; dan
c) Menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya di tempat kedudukan Perusahaan.

3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan Laporan Tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.
4. Direksi menyusun kebijakan pengelolaan informasi dan/atau dokumen elektronik, serta memastikan keandalan sistem elektronik di Perusahaan dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik dan kegiatan Perusahaan pada umumnya. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah.

- Tugas Menyimpan Daftar Pemegang Saham
  1. Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundangan.
  2. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:
     a) Nama dan alamat para Pemegang Saham;
     b) Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
     c) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
     d) Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
     e) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
     f) Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
  3. Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.
  4. Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perusahaan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham.
  5. Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
  6. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

b) Maintain all lists, minutes, financial documents of the company, and other company documents; and
c) Store all lists, minutes, financial documents of the company, and other company documents at the registered office of the Company.

3. Upon written request from the shareholders, the Board of Directors grants permission to shareholders to examine the shareholder registry, special registry, GMS minutes, and the Annual Report, as well as obtain a copy of the GMS minutes and the Annual Report.
4. The Board of Directors formulates policies for managing electronic information and/or documents, as well as ensuring the reliability of electronic systems in the Company in supporting the implementation of electronic transactions and the Company's activities in general. Per Law No. 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions, electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are stipulated as legal evidence.

- Duties of Maintaining a Shareholder Registry
  1. The Board of Directors organizes and maintains the Shareholder Registry and documents related to the GMS following the provisions of the prevailing regulations.
  2. The Shareholder Registry includes:
     a) Names and addresses of Shareholders;
     b) Total, serial number, and date of acquisition of shares owned by the shareholders;
     c) Amount paid for each share;
     d) Name and address of the person/individual/legal entity that has a lien on the shares or as the recipient of the share fiduciary guarantee and the acquisition date of the lien or the registration date of the fiduciary guarantee;
     e) Information on non-monetary share contributions; and
     f) Other information deemed necessary by the Board of Directors.
  3. Every change in share ownership is also recorded in the Shareholder Registry.
  4. The Shareholder Registry must be made available at the Company's registered office for shareholders to inspect.
  5. The Special Registry is a list containing the ownership and/or changes in ownership of shares by the Directors and Board of Commissioners Members along with their families in the Company and/or other companies, including the date the shares were acquired.
  6. The Board of Directors is required to keep and maintain the Shareholder Registry and Special Registry in the best way.

- Tugas dan Kewajiban Lain
  Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

- Other Duties and Responsibilities
  Conducting other obligations following the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on the applicable laws and regulations. The Board of Directors formulates corporate social and environmental responsibility policies. The Board of Directors is required to carry out quality and effective internal supervision.

▶ **Wewenang Direksi**

Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, biaya-biaya dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris, yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

▶ **Board of Directors Authorities**

The Board of Directors has the authority to:

1. Establish policies deemed appropriate in managing the Company;
2. Regulate the delegation of authority from the Board of Directors to represent the Company in and out of court to one or more specifically appointed individuals, including Company employees individually or jointly, and/or other entities;
3. Regulate provisions regarding Company employees, including the determination of salaries, pensions or retirement benefits, and other employee income based on applicable laws and regulations;
4. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
5. Internal supervision with the approval of the Board of Commissioners;
6. Write off bad debts under the provisions stipulated in the Articles of Association and subsequently report and be accountable for them in the Annual Report;
7. Cease to demand interest, fines, fees, and other receivables beyond the principal amount in the context of debt restructuring and/or settlement and other actions related to the settlement of Company debts with an obligation to report to the Board of Commissioners, the procedures for which are determined by the Board of Commissioners; and
8. Undertake all other actions and activities related to the management or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, including but not limited to optimizing the utilization of Company assets, with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

▶ Kewajiban Direksi

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya;
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

▶ Board of Directors Obligations

1. Undertaking and ensuring the implementation of the Company's business and activities following its purposes, objectives, and business activities;
2. Timely preparation of the Company's Long-Term Plans, Work Plans, Annual Budgets, and other work plans and their amendments to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
3. Compiling the Shareholder Registry, Special Registry, GMS minutes, and minutes of the Board of Directors meetings;
4. Preparation of Annual Reports, including financial statements, as a form of accountability for the management of the Company, and financial documents of the Company as referred to in Law on Company Documents;
5. Preparation of financial statements based on Financial Accounting Standards and submission to Public Accountants for auditing;
6. Submitting the Annual Report to the GMS for approval and ratification after being reviewed by the Board of Commissioners within a maximum period of four months after the end of the Company's fiscal year;
7. Providing explanations to the GMS regarding the Annual Report;
8. Submission of the Balance Sheet and Income Statement approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights under the provisions of the laws and regulations;
9. Preparation of other reports required by the provisions of laws and regulations;
10. Maintaining the Shareholder Registry, Special Registry, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
11. Keeping the following at the Company's registered office: Shareholder Registry, Special Registry, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
12. Establishing and maintaining the Company's bookkeeping and administration under prevailing norms applicable to a Company;
13. Developing an accounting system under Financial Accounting Standards based on internal control principles, especially management, recording, storage, and supervision functions;

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; dan
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

14. Providing periodic reports according to the prescribed methods and deadlines, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Stock shareholders, while adhering to regulations, particularly those in Capital Markets;

15. Preparation of the Company's organizational structure complete with details and responsibilities;
16. Providing explanations on any matters queried or requested by members of the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Stock shareholders while adhering to regulations, especially those in Capital Markets; and

17. Fulfilling other obligations as stipulated in the Articles of Association and by the GMS.

- **Etika Berusaha dan Anti Korupsi**

Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan *Good Corporate Governance* serta melakukan pengukuran terhadap penerapannya:

1. Direksi berkewajiban memantau dan mendorong dilaksanakannya *code of conduct* oleh semua insan PTPP;
2. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya benturan kepentingan;
4. Direksi menetapkan kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
5. Direksi menetapkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dan memantau pelaksanaannya;
6. Direksi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistleblowing system*), menindaklanjuti setiap informasi/pengaduan yang diterima dan melindungi kerahasiaan pelapor;
7. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya benturan kepentingan.

- **Business Ethics and Anti-Corruption**

The Board of Directors is responsible for developing and leading the implementation of Good Corporate Governance practices, as well as conducting assessments of its implementation:

1. The Board of Directors is obligated to monitor and encourage the implementation of the code of conduct by all PTPP personnel;
2. Members of the Board of Directors are prohibited from giving, or offering, or accepting, directly or indirectly, anything of value to government officials and/or other parties that could influence or be in return for actions taken under applicable laws and regulations;

3. The Board of Directors is responsible for preventing personal gain from conflicts of interest;

4. The Board of Directors establishes policies regarding compliance with the State Official Wealth Report (LHKPN);
5. The Board of Directors establishes policies regarding gratuity control and monitors its implementation;
6. The Board of Directors establishes policies regarding the company's whistleblowing system, follows up on any information/complaints received, and protects the confidentiality of the whistleblower;

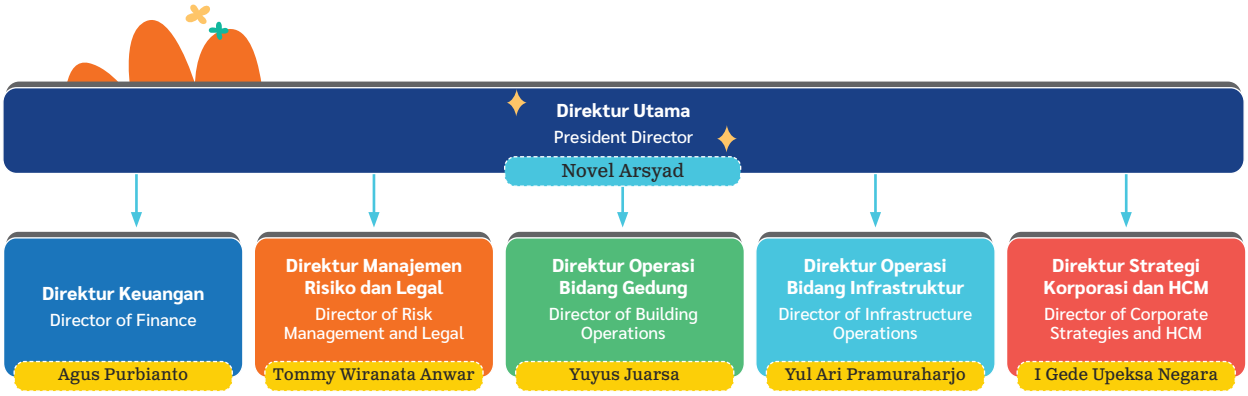
7. The Board of Directors is responsible for preventing personal gain from conflicts of interest.

Pembagian Tugas Direksi dan Perubahan Nomenklatur Jabatan

Berikut disampaikan pembagian tugas di antara Direksi Perusahaan.

Division of Duties of the Board of Directors and Changes in Position Nomenclature

The following is a description of the division of duties between the Company's Board of Directors.



Merujuk pada Surat Keputusan No. 067/SK/PP/DIR/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan, Direksi Perusahaan telah melakukan pembagian tugas diantara anggota Direksi agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi senantiasa berjalan efektif dan efisien. Pada prinsipnya, pembidangan tugas diantara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan.

Referring to Decree No. 067/SK/PP/DIR/2024 dated June 7, 2024, on the Determination of Position Nomenclature, Division of Responsibilities and Authorities of the Board of Directors, there is a division of tasks among Board of Directors members so that the implementation of duties and responsibilities of every Director is always effective and efficient. In principle, the division of duties between the Board of Directors does not eliminate the collegiate responsibility of the Board in managing the Company.

Penjabaran lebih rinci mengenai pembidangan tugas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A more detailed explanation of the division of tasks can be seen in the table below:

Novel Arsyad

Direktur Utama | **President Director**

1. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui strategi, kebijakan/peraturan dan rencana kerja seluruh Direktorat;	1. Evaluate and establish/approve strategies, policies/ regulations, and work plans of all Directorates;
2. Memberi arahan, bimbingan, masukan, pembinaan dan pemecahan masalah strategis kepada unit yang dipimpin dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan dan keputusan direksi terhadap kegiatan-kegiatan fungsi seluruh Direktorat;	2. Provide directive, guidance, input, coaching, and strategic problem-solving to the unit under supervision in the implementation of policies/regulations and board of directors' decisions on the functional activities of all Directorates;
3. Menetapkan visi, misi, arahan dan sasaran strategis perusahaan;	3. Establish the vision, mission, direction, and strategic goals of the company;
4. Menyetujui kebijakan-kebijakan peraturan tertinggi perusahaan;	4. Approve the company's highest regulatory policies;
5. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) serta Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi (termasuk rapat-rapat lain);	5. Organize and chair meetings (internal and external) as well as periodic Board of Directors Meetings as determined by the Board of Directors (including other meetings);
6. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan Direktorat lain yang membutuhkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan termasuk dalam penyusunan RJPP, RKAP dan target kinerja perusahaan;	6. Coordinate thoroughly with other Directorates as required in the implementation of company functions, including in the preparation of RJPP, RKAP, and company performance targets;
7. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;	7. Foster good relations and effective communication with external parties;
8. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS; dan	8. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS; and
9. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketetapan RUPS.	9. Carry out other duties and obligations following the provisions of the AOA and the provisions of the GMS.

Agus Purbianto

Direktur Keuangan | Director of Finance

1. Memimpin, mengkoordinir, menetapkan, dan menjaga pencapaian target keuangan, kebutuhan pendanaan perusahaan, akuntansi, perpajakan, pengendalian operasi, dan pengendalian rantai pasok di lingkup Perusahaan;
2. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui strategi, kebijakan/peraturan dan rencana kerja Direktorat Keuangan;
3. Memberi arahan, bimbingan, masukan, pembinaan dan pemecahan masalah strategis kepada unit yang dipimpin dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan dan keputusan Direksi terhadap kegiatan-kegiatan fungsi Direktorat Keuangan;
4. Menyetujui kebutuhan dana sesuai alokasi anggaran;
5. Menetapkan, memberikan arahan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset produktif dan/atau non produktif Perusahaan (antara lain Pencatatan, Inventarisasi, Valuasi);
6. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan/fungsi Direktorat Keuangan;
7. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan Direktorat lain yang membutuhkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan termasuk dalam penyusunan RJPP, RKAP dan target kinerja perusahaan;
8. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;
9. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/ fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS; dan
10. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketetapan RUPS.

1. Lead, coordinate, set, and maintain the achievement of financial targets, corporate funding needs, accounting, taxation, operation control, and supply chain control within the Company;
2. Evaluate and establish/approve strategies, policies/regulations, and work plans of the Finance Directorate;
3. Provide directive, guidance, input, coaching, and strategic problem-solving to the units led in the implementation of policies/regulations and decisions of the Board of Directors on the activities of the Finance Directorate functions;
4. Approve the need for funds per the budget allocation;
5. Determine, provide directive, and supervise the implementation of the Company's productive and/or non-productive asset management (Recording, Inventory, and Valuation);
6. Organize and chair meetings (internal and external) required in the implementation of the activities/functions of the Finance Directorate;
7. Coordinate thoroughly with other Directorates as required in the implementation of company functions, including in the preparation of RJPP, RKAP, and company performance targets;
8. Foster good relations and effective communication with external parties;
9. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS; and
10. Carry out other duties and obligations following the provisions of the Articles of Association and the GMS.

Yuyus Juarsa

Direktur Operasi bidang Gedung | Director of Building Operations

1. Memimpin, mengoordinir dan menjaga pencapaian target operasional, pemasaran, engineering, keuangan di Direktorat Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;
2. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui target kinerja, strategi, kebijakan/peraturan, rencana kerja dan program Direktorat Operasi Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;
3. Melakukan koordinasi, memberi arahan serta pemecahan masalah terhadap kegiatan-kegiatan/fungsi-fungsi (pemasaran, teknik, operasi, keuangan, administrasi) serta pelaksanaan kebijakan/peraturan yang berada di Direktorat Operasi Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pihak-pihak terkait merencanakan, mengelola dan melaksanakan segala kegiatan/fungsi terkait Direktorat Operasi Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;
5. Memberi arahan, bimbingan, masukan dan informasi yang membutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direktorat Operasi Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;

1. Lead, coordinate, and maintain the achievement of operational, marketing, engineering, and financial targets in the Building Operations Directorate as well as overseas marketing operations;
2. Evaluate and set/approve performance targets, strategies, policies/regulations, work plans, and programs of the Building Operations Directorate and overseas marketing operations;
3. Coordinate, provide directive and problem-solving for activities/functions (marketing, engineering, operations, finance, administration), as well as the implementation of policies/regulations within the Building Operations Directorate and overseas marketing operations;
4. Coordinate and communicate effectively with related parties to plan, manage, and implement all activities/functions related to the Building Operations Directorate and overseas marketing operations;
5. Provide directive, guidance, input, and information needed in the implementation of the activities of the Building Operations Directorate and overseas marketing operations;

Yuyus Juarsa

Direktur Operasi bidang Gedung | Director of Building Operations

6. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) serta Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi (termasuk rapat-rapat lain);
7. Memberi masukan terhadap penyusunan RJPP dan RKAP termasuk mengelola, melakukan koordinasi, memberi masukan dan arahan implementasi RJPP & RKAP untuk Direktorat Operasi Gedung serta operasional pemasaran luar negeri;
8. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;
9. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS; dan
10. Memberi usulan RKAP dan target kinerja Direktorat Operasi Gedung.

6. Organize and chair meetings (internal and external) as well as periodic Board of Directors Meetings as determined by the Board of Directors (including other meetings);
7. Provide input to the preparation of RJPP and RKAP, including managing, coordinating, providing input, and directives on the implementation of RJPP and RKAP for the Building Operations Directorate and overseas marketing operations;
8. Foster good relations and effective communication with external parties;
9. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS; and
10. Provide proposals for the RKAP and performance targets of the Building Operations Directorate.

Yul Ari Pramuraharjo

Direktur Operasi bidang Infrastruktur | Director of Infrastructure Operations

1. Memimpin, mengkoordinir dan menjaga pencapaian target operasional, pemasaran, *engineering*, keuangan di Direktorat Operasi Infrastruktur yang meliputi spesialisasi infrastruktur dan EPC;
2. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui target kinerja, strategi, kebijakan/peraturan, rencana kerja dan program Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC);
3. Melakukan koordinasi, memberi arahan serta pemecahan masalah terhadap kegiatan-kegiatan/fungsi-fungsi (pemasaran, teknik, operasi, keuangan, administrasi) pelaksanaan kebijakan/peraturan yang berada di Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC);
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pihak-pihak terkait dalam merencanakan, mengelola dan melaksanakan segala kegiatan/fungsi terkait Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC);
5. Memberi arahan, bimbingan, masukan dan informasi yang membutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC);
6. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) serta Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi (termasuk rapat-rapat lain);
7. Memberi masukan terhadap penyusunan RJPP dan RKAP termasuk mengelola, melakukan koordinasi, memberi masukan dan arahan implementasi RJPP & RKAP untuk Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC);
8. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;
9. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS; dan
10. Memberi usulan RKAP dan target kinerja Direktorat Operasi Infrastruktur (spesialisasi infrastruktur dan EPC).

1. Lead, coordinate, and maintain the achievement of operational, marketing, engineering, and financial targets in the Infrastructure Operations Directorate, which includes infrastructure and EPC specialties;
2. Evaluate and set/approve performance targets, strategies, policies/regulations, work plans, and programs of the Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialties);
3. Coordinate, provide directive and problem-solving to activities/functions (marketing, engineering, operations, finance, administration) implementing policies/regulations within of Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialization);
4. Coordinate and communicate effectively with related parties in planning, managing, and implementing all activities/functions related to the Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialization);
5. Provide directive, guidance, input, and information needed in the implementation of the activities of the Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialization);
6. Organize and chair meetings (internal and external) as well as periodic Board of Directors Meetings as determined by the Board of Directors (including other meetings);
7. Provide input to the preparation of RJPP and RKAP, including managing, coordinating, providing input, and directives on the implementation of RJPP and RKAP for the Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialization);
8. Foster good relations and effective communication with external parties;
9. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS; and
10. Provide proposals for the RKAP and performance targets of the Infrastructure Operations Directorate (infrastructure and EPC specialization).

Tommy Wiranata Anwar

Direktur Manajemen Risiko dan Legal | Director of Risk Management and Legal

1. Memimpin, mengkoordinir, menetapkan, dan menjaga pencapaian target dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko, pemantauan efektivitas aktivitas dan pengendalian manajemen risiko, aksi korporasi, administrasi kontrak dan advokasi legal;
2. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui strategi, kebijakan/peraturan dan rencana kerja Direktorat Manajemen Risiko dan Legal;
3. Memberi arahan, bimbingan, masukan, pembinaan dan pemecahan masalah strategis kepada unit yang dipimpin dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan dan keputusan Direksi terhadap kegiatan-kegiatan fungsi Direktorat Manajemen Risiko dan Legal;
4. Menetapkan, memberikan arahan, dan mengawasi pelaksanaan pengembangan pemeliharaan kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan selera risiko, toleransi, dan standar pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas aktivitas dan pengendalian manajemen risiko;
5. Menetapkan, memberikan arahan, mengendalikan, menerapkan dan mengevaluasi hal-hal yang berhubungan dengan Hukum, kepatuhan, lisensi, aksi korporasi, dan perizinan;
6. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan/fungsi Direktorat Manajemen Risiko dan Legal;
7. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan Direktorat lain yang membutuhkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan termasuk dalam penyusunan RJPP, RKAP dan target kinerja perusahaan;
8. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;
9. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS;
10. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketetapan RUPS, serta memberi usan RKAP dan target kinerja Direktorat Manajemen Risiko dan Legal dan fungsi QHSE Perusahaan; dan
11. Memberi arahan, bimbingan, masukan, pembinaan dan pemecahan masalah strategis kepada unit dan fungsi *Quality, Health, Safety, Environment*, dan *Green* Perusahaan.

1. Lead, coordinate, set, and maintain target achievement in developing risk management framework, monitoring the effectiveness of risk management activities and controls, corporate actions, contract administration, and legal advocacy;
2. Evaluate and establish/approve strategies, policies/regulations, and work plans of the Risk Management and Legal Directorate;
3. Providing directive, guidance, input, coaching, and strategic problem-solving to the led unit in the implementation of policies/regulations and decisions of the Board of Directors on the activities of the Risk Management and Legal Directorate functions;
4. Establishing, providing directive, and overseeing the implementation of the development and maintenance of a risk management framework that defines risk appetite, tolerance, and reporting standards, as well as monitoring and evaluating the effectiveness of risk management activities and controls;
5. Establish, provide directive, control, implement, and evaluate matters related to Legal, compliance, licenses, corporate actions, and permits;
6. Organize and chair meetings (internal and external) required in the implementation of the activities/functions of the Risk Management and Legal Directorate;
7. Conduct overall coordination with other Directorates required in the implementation of company functions, including in the preparation of RJPP, RKAP, and company performance targets;
8. Foster good relations and effective communication with external parties;
9. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS;
10. Carry out other duties and obligations following the provisions of the Articles of Association and the provisions of the GMS, and provide RKAP and performance targets of the Risk Management and Legal Directorate and the Company's QHSE function; and
11. Provide directives, guidance, input, coaching, and strategic problem-solving to the Company's Quality, Health, Safety, Environment, and Green units and functions.

I Gede Upeksa Negara

Direktur Strategi Korporasi dan HCM | Director of Corporate Strategy and HCM

1. Memimpin, mengkoordinir, menetapkan, dan menjaga pencapaian target Strategic Management Office (SMO), strategic engineering & inovasi, BIM & operation technology, tata kelola maupun operasional sistem informasi & ERP, pengembangan bisnis, investasi perusahaan, tata kelola portofolio perusahaan (termasuk memberikan persetujuan atas rencana aksi korporasi Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi sesuai dengan ketentuan Threshold yang berlaku), pengelolaan subsidiary, pengelolaan manusia secara strategis, pengelolaan talenta, pengelolaan hak maupun benefit pegawai, pengelolaan pemenuhan kompetensi pegawai dan knowledge management di perusahaan;
2. Mengevaluasi dan menetapkan/menyetujui strategi, kebijakan/peraturan dan rencana kerja Direktorat Strategi Korporasi & HCM;

1. Lead, coordinate, determine, and maintain the achievement of Strategic Management Office (SMO) targets, strategic engineering & innovation, BIM & operation technology, governance and operations of information systems & ERP, business development, corporate investment, corporate portfolio governance (including approving corporate action plans of Subsidiaries and/or Affiliates following applicable threshold provisions), subsidiary management, strategic human management, talent management, management of employee rights and benefits, management of employee competency fulfillment and knowledge management in the Company;
2. Evaluate and establish/approve strategies, policies/regulations, and work plans of the Corporate Strategy & HCM Directorate;

I Gede Upeksa Negara

Direktur Strategi Korporasi dan HCM | Director of Corporate Strategy and HCM

3. Memberi arahan, bimbingan, masukan, pembinaan dan pemecahan masalah strategis kepada unit yang dipimpin dalam pelaksanaan kebijakan, peraturan dan keputusan Direksi terhadap kegiatan-kegiatan fungsi Direktorat Strategi Korporasi & HCM;
4. Menetapkan, memberikan arahan, dan mengawasi pelaksanaan pengembangan dan komersialisasi aset produktif Perusahaan yang untuk memberikan pendapatan atau nilai manfaat bagi Perusahaan;
5. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat (internal dan eksternal) serta Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi (termasuk rapat-rapat lain);
6. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan Direktorat lain yang membutuhkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan termasuk dalam penyusunan RJPP, RKAP, dan target kinerja perusahaan;
7. Membina hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pihak eksternal;
8. Memberi pertanggungjawaban, data, informasi, pencapaian target, pelaksanaan dan segala keterangan yang diperlukan tentang pengelolaan seluruh kegiatan/fungsi perusahaan dalam bentuk laporan sesuai permintaan RUPS;
9. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketetapan RUPS; dan
10. Memberi usulan RKAP dan target kinerja Direktorat Strategi Korporasi & HCM.

3. Provide directive, guidance, input, coaching, and strategic problem-solving to the units led in the implementation of policies, regulations, and decrees of the Board of Directors on the activities of the Corporate Strategy & HCM Directorate functions;
4. Determining, providing directive, and overseeing the implementation of the development and commercialization of the Company's productive assets to provide income or benefit value for the Company;
5. Organize and chair meetings (internal and external) as well as periodic Board of Directors Meetings as determined by the Board of Directors (including other meetings);
6. Coordinate thoroughly with other Directorates as required in the implementation of company functions, including in the preparation of RJPP, RKAP, and company performance targets;
7. Foster good relations and effective communication with external parties;
8. Provide accountability, data, information, target achievement, implementation, and all necessary information about the management of all company activities/functions in the form of reports as requested by the GMS;
9. Carry out other duties and obligations following the provisions of the Articles of Association and the GMS; and
10. Provide proposals for the RKAP and performance targets of the Corporate Strategy & HCM Directorate.

Independensi Direksi

Agar seluruh anggota Direksi senantiasa bertindak maksimal demi kepentingan Perusahaan, maka Perusahaan menilai faktor independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Perusahaan atau mempengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan; dan
2. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus usaha Perusahaan.

Independence of the Board of Directors

For all members of the Board of Directors to always act optimally in the interests of the Company, the Company considers that the Board of Directors' independence is one of the important things that must be maintained. To achieve this, the Company has set the following provisions:

1. Apart from the Company's organs, any other party is prohibited from interfering in Company management or influencing the Board of Directors in carrying out the Company's business; and
2. Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that may interfere with their independence in managing the Company's business.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program Pengenalan bagi Direksi yang baru menjabat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Direksi Baru terkait kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Direksi Perusahaan mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Penanggung jawab Program Pengenalan bagi anggota Direksi Baru berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen.

Induction Program for New Directors

The induction program for newly appointed members of the Board of Directors is aimed to provide understanding to the new member regarding the existing conditions in the Company, so that the Board gets a comprehensive understanding, both organizationally and operationally. The person in charge of the Induction Program for new members of the Board of Directors is the Corporate Secretary. the Company orientation program can take the form of presentation, a meeting, Company visit, and document review.

Berdasarkan Pedoman GCG yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021, materi untuk program pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance;*
2. Gambaran Umum;
3. Visi dan Misi Perusahaan;
4. Budaya Perusahaan;
5. Struktur Organisasi dan *Job Description;*
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
8. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
9. Audit Internal dan Audit Eksternal; dan
10. Komite-komite pendukung Dewan Komisaris.

Di tahun 2025 PTPP tidak melakukan perubahan susunan Direksi, dengan demikian program pengenalan Perusahaan kepada Direktur baru tidak dilakukan.

According to the GCG Implementation Guidelines approved by the Board of Commissioners and Board of Directors and signed on October 29, 2021, the materials for the Company orientation program for the new Board of Commissioners are as follows:

1. The implementation of Good Corporate Governance principles;
2. General Overview;
3. Company's Vision and Mission;
4. Corporate Culture;
5. Organizational Structure and Job Description;
6. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
7. Company's Long-term Plan (RJPP);
8. Company's Work Plan and Budget (RKAP);
9. Internal Audit and External Audit; and
10. Board of Commissioners' supporting committees.

In 2025, PTPP did not make any changes to the composition of its Board of Directors, and therefore, no program to introduce the Company to new Directors was carried out.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Berdasarkan Pedoman GCG PTPP yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 Oktober 2021, Direksi Perusahaan diharuskan mengikuti program peningkatan pengetahuan dan kompetensi:

1. Anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan;
2. Anggota Direksi perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam *self-study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, seminar, *workshop, conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi; dan
3. Pendidikan berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri, dan atas beban Perusahaan.

Selama tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop*, dan *conference* sebagaimana berikut:

Competency Development Program of the Board of Directors

According to PTPP GCG Guidelines signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on October 29, 2021, the Board of Directors are required to take part in a program to improve their knowledge and competence:

1. Members of the Board of Directors must always add and update their knowledge to conduct the tasks of managing the Company;
2. Members of the Board of Directors need to receive continuing education combined with self-study and participation in special education, training, seminars, workshops, and conferences, which can be useful in improving the effectiveness of the Board of Directors functions; and
3. Continuing education can be conducted in the country and overseas at the Company's expense.

Throughout 2025, the Board of Directors members have attended training sessions, certifications, workshops, and conferences as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	*Kick Off* Danantara Indonesia Human Capital Program Danantara Indonesia Human Capital Program Kick Off	Jakarta, 25 Juli 2025 Jakarta, July 25, 2025	Danantara Indonesia
	Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan Discussion Forum on Fair Transportation Chain	Jakarta, 22 September 2025 Jakarta, September 22, 2025	Kementerian Perhubungan Transportation Ministry
	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	Townhall Danantara "Melayani dengan Sepenuh Hati" Danantara Townhall "Serving Wholeheartedly"	Jakarta, 31 Oktober 2025 Jakarta, October 31, 2025	Danantara Indonesia
	Civil Days 2025	Jakarta, 13 Desember 2025 Jakarta, December 13, 2025	FTSP UII
	Surat Tanda Registrasi Insinyur Engineer Registration Certificate	*Online*, 27 Mei 2022-26 Mei 2027 Online, May 27, 2022-May 26, 2027	PII
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	*Kick Off* CBDO *Executive* Program CBDO Executive Program Kick Off	Jakarta, 13 Agustus 2025 Jakarta, August 13, 2025	Danantara Indonesia
	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	Townhall Danantara "Melayani dengan Sepenuh Hati" Danantara Townhall "Serving Wholeheartedly"	Jakarta, 31 Oktober 2025 Jakarta, October 31, 2025	Danantara Indonesia
	Chartered Accountant	Jakarta, 20 November 2013 Jakarta, November 20, 2013	IAI
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	K3 Konstruksi Construction OHS	Jakarta, 27 Mei 2021-27 Mei 2026 Jakarta, May 27, 2021-May 27, 2026	BNSP
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi bidang Gedung) (Director of Building Operations)	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	K3 Konstruksi Construction OHS	Jakarta, 27 Mei 2021-27 Mei 2026 Jakarta, May 27, 2021-May 27, 2026	BNSP

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko) Director of Risk Management	CRO School	Bali, 2-16 Mei 2025 Bali, May 2–16, 2025	KBUMN SOE Ministry
	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	Certified Risk Government Profesional	*Online*, 2 5 Juni 2023-24 Juni 2026 Online, June 25, 2023-June 24, 2026	BNSP
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) Director of Corporate Strategy and HCM .	*Kick Off* Danantara Indonesia Human Capital Program Danantara Indonesia Human Capital Program Kick Off	Jakarta, 25 Juli 2025 Jakarta, July 25, 2025	Danantara Indonesia
	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 24 Oktober 2025 Jakarta, October 24, 2025	HCM PTPP
	Humanizing Digital Transformation	Jakarta, 30 Oktober 2025 Jakarta, October 31, 2025	FHCI
	Townhall Danantara “Melayani dengan Sepenuh Hati” Danantara Townhall “Serving Wholeheartedly”	Jakarta, 31 Oktober 2025 Jakarta, October 31, 2025	Danantara Indonesia
	Workshop Human Capital Transformation Human Capital Transformation Workshop	Jakarta, 14 November 2025 Jakarta, November 14, 2025	Danantara Indonesia
	FHCI Connect Expert	Jakarta, 19 November 2025 Jakarta, November 19, 2025	FHCI
	Strategic Human Capital Director	Jakarta, 12 Desember 2025 Jakarta, December 12, 2025	SHRM

Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung Direksi

Berdasarkan struktur organ tata kelola Perusahaan PTPP, Direksi memiliki organ pendukung 2 (dua) badan komite, yaitu Komite Kepatuhan dan Komite ESG. Berikut disampaikan penilaian atas badan komite yang dibentuk Direksi.

▶ Penilaian atas Kinerja Komite Kepatuhan

Penilaian atas kinerja Komite Kepatuhan sepanjang tahun 2025 dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas peran komite dalam mendukung Direksi menjaga kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan serta memastikan konsistensi penerapan nilai integritas di seluruh unit kerja. Penilaian ini mencakup aspek pelaksanaan tugas, kualitas rekomendasi, koordinasi dengan unit terkait, serta kepatuhan terhadap tata cara kerja Komite Kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Kepatuhan dinilai telah menjalankan fungsinya secara efektif melalui respons cepat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dan permintaan klarifikasi dari unit kerja. Komite secara konsisten menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan, dengan pemenuhan kehadiran unsur-unsur komite sebagaimana dipersyaratkan. Proses klarifikasi terhadap pegawai terindikasi pelanggaran juga dilaksanakan secara objektif, tertib, dan sesuai prosedur, memastikan bahwa setiap rekomendasi pembinaan atau sanksi didasarkan pada verifikasi fakta dan bukti yang memadai.

Kualitas rekomendasi yang diberikan Komite Kepatuhan dinilai baik, proporsional, dan selaras dengan ketentuan Peraturan Perusahaan serta prinsip keadilan dalam penegakan disiplin. Selain itu, dokumentasi hasil rapat, risalah, dan rekomendasi telah disusun secara lengkap dan akuntabel sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Direksi atau unit terkait.

Komite Kepatuhan juga dinilai efektif dalam berkoordinasi dengan Divisi Human Capital Management dan unit kerja lainnya, sehingga penyelesaian laporan pelanggaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, seluruh area evaluasi dinilai telah terpenuhi dengan baik, sehingga melalui pelaksanaan tugas tersebut, Komite Kepatuhan berkontribusi penting dalam menjaga budaya kepatuhan, memperkuat disiplin kerja, serta menunjang penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan PTPP.

Performance Assessment of Committees and Supporting Organs of the Board of Directors

Based on the structure of the Company's governance organs, PTPP's Board of Directors has supporting organs, namely the Compliance Committee and the ESG Committee. The following is an assessment of the committees formed by the Board of Directors.

▶ Performance Assessment of the Compliance Committee

The assessment of the Compliance Committee's performance throughout 2025 was conducted qualitatively to evaluate the effectiveness of the committee's role in supporting the Board of Directors in maintaining compliance with Company Regulations and ensuring the consistent application of integrity values across all work units. This assessment covers aspects of task implementation, quality of recommendations, coordination with related units, and compliance with the Compliance Committee's working procedures as stipulated in the Company's internal regulations.

Throughout 2025, the Compliance Committee has performed its functions effectively through its quick response in following up on reports of violations and requests for clarification from work units. The Committee consistently held meetings as needed, with the required attendance of committee members. The clarification process for employees suspected of violations was also carried out objectively, in an orderly manner, and in accordance with procedures, ensuring that every recommendation for guidance or sanctions was based on adequate verification of facts and evidence.

The quality of the recommendations provided by the Compliance Committee is considered good, proportional, and in line with Company Regulations and the principle of fairness in disciplinary enforcement. In addition, the documentation of meeting results, minutes, and recommendations has been compiled in a complete and accountable manner as a basis for decision-making by the Board of Directors or related units.

The Compliance Committee is also considered effective in coordinating with the Human Capital Management Division and other work units, so that violation reports can be resolved in a timely manner and in accordance with the provisions.

Overall, all evaluation areas were deemed to have been fulfilled properly, so that, through the implementation of these tasks, the Compliance Committee made an important contribution to maintaining a culture of compliance, strengthening work discipline, and supporting the application of Good Corporate Governance (GCG) principles within PTPP.

- **Penilaian atas Kinerja Komite ESG**

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan implementasi Roadmap ESG PTPP periode 2024-2028 dengan tema *Enhancing Practice*. Pada tahun kedua ini, PTPP memulai inisiasi target dan program-program inisiatif untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Tahun ini juga menjadi awal integrasi strategi yang dirumuskan pada tahun pertama ke dalam seluruh aktivitas operasional dan rantai pasok perusahaan. Dengan melibatkan proses integrasi strategis ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan secara holistik.

Berdasarkan Roadmap ESG tahun 2025, sepanjang tahun PTPP menjalankan 47 inisiatif ESG dengan detail 12 inisiatif pada pilar Lingkungan (E), 20 inisiatif pada pilar Sosial (S), dan 15 inisiatif pada pilar Tata Kelola (G). Secara garis besar, 47 inisiatif ESG yang dijalankan pada tahun 2025.

Kinerja pencapaian Inisiatif ESG pada tahun 2025 adalah sebesar 98% dimana hanya terdapat satu inisiatif ESG yang belum dapat dijalankan di tahun 2025 yaitu terkait pembuatan Roadmap Net Zero Emission (NZE).

Diluar dari inisiatif ESG yang dijalankan, Komite ESG juga memonitor dilaksanakannya *Area of Improvement* (AOI) dari BPKP periode tahun 2024, dimana setidaknya terdapat 21 AOI yang harus diselesaikan pada tahun 2025.

Selain fokus pada upaya implementasi ESG di internal PTPP, pada tahun 2025 Komite ESG juga melakukan peningkatan kinerja *rating* ESG PTPP berdasarkan *raters Sustainalytics*. Sepanjang tahun 2025, *rating* ESG PTPP pada *Sustainalytics* terus membaik dari semula sebesar 36,9 pada tahun 2024 hingga mencapai 32,3 pada akhir Desember 2025 (membaik sebesar 4,6 poin - *lower is better*). Hal tersebut menjadikan PTPP menjadi perusahan BUMN Karya dengan *rating* ESG terbaik di Indonesia versi *Sustainalytics*.

Berdasarkan kinerja sepanjang tahun 2025 diatas, pelaksanaan tugas Komite ESG telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di PTPP. Ke depan, Komite ESG akan terus mendukung Manajemen dalam memastikan ESG menjadi bagian integral dari strategi dan operasional Perusahaan.

- **Performance Assessment of the ESG Committee**

The year 2025 marks the second year of implementing PTPP's ESG Roadmap for the 2024-2028 period, with the theme of Enhancing Practice. In this second year, PTPP has initiated targets and programs to achieve its sustainability goals. This year also marks the beginning of integrating the strategies formulated in the first year into all of the company's operational activities and supply chain. By engaging in this strategic integration process, the company hopes to improve its holistic sustainability performance.

Based on the 2025 ESG Roadmap, PTPP implemented 47 ESG initiatives throughout the year, including 12 in the Environmental (E) pillar, 20 in the Social (S) pillar, and 15 in the Governance (G) pillar. Broadly speaking, 47 ESG initiatives were implemented in 2025.

The achievement rate of ESG initiatives in 2025 was 98%, with only one ESG initiative that could not be implemented: the creation of a Net Zero Emission (NZE) Roadmap.

Apart from the ESG initiatives implemented, the ESG Committee also monitors the implementation of the Areas of Improvement (AOIs) from BPKP for the 2024 period, with at least 21 AOIs to be completed in 2025.

In addition to focusing on ESG implementation efforts within PTPP, in 2025, the ESG Committee improved PTPP's ESG rating, as rated by Sustainalytics. Throughout 2025, PTPP's ESG rating on Sustainalytics continued to improve from 36.9 in 2024 to 32.3 at the end of December 2025 (an improvement of 4.6 points - lower is better). This makes PTPP the best BUMN Karya company with the best ESG rating in Indonesia according to Sustainalytics.

Based on the performance throughout 2025, the implementation of the ESG Committee's duties has made a positive contribution to strengthening the application of sustainability principles at PTPP. Going forward, the ESG Committee will continue to support Management in ensuring that ESG becomes an integral part of the Company's strategy and operations.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Information Transparency on the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Terciptanya hubungan kerja yang baik diantara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu hal penting bagi Perusahaan agar masing-masing organ dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai fungsinya. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjaga hubungan kerja diantara Komisaris dan Direksi dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati;
2. Setiap hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal;
3. Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan, tetapi tidak mengikat sebelum diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya terkait dengan dan untuk kepentingan Perusahaan;
5. Direksi dapat menolak permintaan informasi oleh Dewan Komisaris jika informasi tersebut tidak terkait dengan tanggung jawab Direksi; dan
6. Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan sepengetahuan atau didampingi Direksi.

Keputusan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 7i sebagai berikut:

1. Melepaskan atau memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan-Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO),kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build - Operate and Own*/BOO), sewa dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya melebihi dari jangka waktu yang dari dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

Work Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The establishment of a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is essential for the Company, ensuring that each organ functions effectively and efficiently according to its role. Therefore, the Company strives to maintain this working relationship by applying the following principles:

1. The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the principles of openness and mutual respect;
2. Every interaction between the Board of Commissioners and the Board of Directors in the context of their respective duties and responsibilities is a formal relationship;
3. Informal interactions may occur but are not binding until they are decided at a Board of Commissioners and Board of Directors meeting;
4. Any information requested by the Board of Commissioners from the Board of Directors must be related to and in the best interest of the Company;
5. The Board of Directors may refuse requests for information from the Board of Commissioners if the requested information is not within the Board of Directors' responsibilities; and
6. The Board of Commissioners may communicate with management under the knowledge of or accompanied by the Board of Directors

The Board of Directors' Decree which requires the approval of the Board of Commissioners as stated in the Articles of Association, Article 12, paragraph 7i, is as follows:

1. Release or transfer and/or pledge the Company's assets with a value exceeding a certain amount set by the Board of Commissioners, except for assets recorded as inventory, in compliance with the Capital Market regulations;
2. Establish cooperation with business entities or other parties, in the form of Operation Cooperation (KSO), Business Cooperation (KSU), licensing cooperation, Build, Operate and Transfer (BOT), Build, Operate and Own (BOO), lease, and other similar agreements with a duration exceeding the period set by the Board of Commissioners;

3. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
5. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan - ketentuan di bidang Pasar Modal;
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan-dengan nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
7. Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi-dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan atau bernilai strategis-yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
9. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
10. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
11. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
12. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
13. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
14. Tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

3. Determine and change the Company's logo;
4. Establish the organizational structure one level below the Board of Directors;
5. Make capital investments, release capital investments, including changes in capital structure with a value determined by the Board of Commissioners in another company, subsidiary, and joint venture not aimed at debt restructuring, in compliance with the Capital Market regulations;
6. Establish subsidiaries and/or joint ventures with values set by the Board of Commissioners in other companies, subsidiaries, and joint ventures, in compliance with the Capital Market regulations;
7. Propose the Company's representative as a candidate for the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or are strategically important, as determined by the Board of Commissioners;
8. Carry out mergers, consolidations, acquisitions, separations, and dissolution of subsidiaries and joint ventures with a value set by the Board of Commissioners, in compliance with the Capital Market regulations;
9. Bind the Company as a guarantor (borg or avalist) with a value set by the Board of Commissioners, in compliance with the Capital Market regulations;
10. Receive and provide medium/long-term loans with a certain value set by the Board of Commissioners, with due regard to regulations in the Capital Markets sector;
11. Grant short/medium/long-term loans that are not operational, except for loans to subsidiaries, which must be reported to the Board of Commissioners;
12. Write off bad debts and obsolete inventory with a value exceeding the limit set by the Board of Commissioners;
13. Take actions included in material transactions as determined by the laws and regulations in the capital markets sector, with a value set by the Board of Commissioners, except where such actions are excluded by applicable regulations in the Capital Markets sector;
14. Actions not yet established in the Company's Work Plan and Budget;

15. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 menggunakan pembiayaan oleh Perusahaan terlebih dahulu (proyek *turnkey/ prefinancing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
16. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land Bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang-ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
17. Melakukan investasi dengan Batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diinternalisasi ke dalam Pedoman Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan tersebut, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan senantiasa mempertimbangkan integritas, bidang keahlian dan pengalaman bekerja. Di samping memperhatikan aspek kompetensi tersebut, Perusahaan turut mempertimbangkan aspek-aspek lainnya sebagai wujud pembudayaan prinsip GCG.

Perusahaan telah memiliki kebijakan keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimuat dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris. Perusahaan memerhatikan aspek keberagaman terkait pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi namun tetap mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Transparansi Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2025.

15. Carry out the Company's main business activities, as referred to in Article 3, using Company financing first (turnkey/prefinancing projects), with certain values and criteria set by the Board of Commissioners;
16. Purchase land assets and/or land banks for property business activities or to be used as fixed assets, with a value set by the Board of Commissioners; and
17. Make investments with value and/or criteria limits set by the Board of Commissioners based on proposals from the Board of Directors.

Diversity of the Board of Commissioners and the Board Of Directors' Composition

Diversity Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The composition and diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in the Appendix of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines for Public Company Governance, have been internalized into the Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors. As part of the Company's commitment to these provisions, the appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors always considers integrity, areas of expertise, and work experience. In addition to these competency factors, the Company also takes other aspects into account as part of its corporate governance practices.

The Company has a diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, outlined in the Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners. This policy includes considerations of diversity related to education, expertise, work experience, age, and gender when determining the composition of the Board. However, the Company ensures that these considerations align with its business needs and objectives.

Diversity Transparency of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following is the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors' Composition

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	Laki-laki Male	59	Sarjana (S1) Teknik Arsitektur Bachelor of Architecture Engineering	• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PP (Persero) Tbk (2024-sekarang) Chairman of the Integrated Governance Committee of PT PP (Persero) Tbk (2024-present) • Komisaris Utama PT Bina Karya Persero (2023-sekarang) President Commissioner of PT Bina Karya Persero (2023-present) • Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) (2022-2024) Deputy Head of the Nusantara Capital Authority (IKN) (2022-2024) • Komisaris PT Inti Tekno Sains Bandung (2019-2022) Commissioner of PT Inti Tekno Sains Bandung (2019-2022) • Managing Director Sinar Mas Land (2015- 2022) Managing Director of Sinar Mas Land (2015-2022) • Penasihat Senior PT Leyand International Tbk (2003-2011) Senior Advisor of PT Leyand International Tbk (2003-2011) • Direktur PT BPS Energy (2003-2008) Director of PT BPS Energy (2003-2008)	Teknik Engineering
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Laki-laki Male	61	Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia Police Education of the Republic of Indonesia	Berkarir di Kepolisian Republik Indonesia: Careers in the Indonesian National Police: • Kakorlantas POLRI (2019-2021) Chief of POLRI Traffic Corps (2019-2021) • Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2018-2019) Regional Chief of Police of Bangka Belitung Islands (2018-2019) • Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam POLRI (2017-2018) Directorate for Social Potentials Development, Community Development Corps of POLRI Security Maintenance (2017-2018) • Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung (2016-2017) Deputy Chief of Police of Bangka Belitung Islands (2016-2017)	Hukum Law

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Laki-laki Male	61	• Doktor (S3) Ilmu Hukum; Doctor of Law; • Magister (S2) Hukum; dan Master of Law; and • Sarjana (S1) Hukum. Bachelor of Law.	• Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia (2020-2023) Secretary of the Training and Education Agency Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (2020-2023) • Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2019-2020) Head of the West Kalimantan High Prosecutor's Office (2019-2020) • Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2018) Head of the Planning Bureau, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (2018) • Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (2016-2018) Head of the Bali High Prosecutor's Office (2016-2018)	Hukum Law
Pundjung Setya Brata (Komisaris) (Commissioner)	Laki-laki Male	59	• Sarjana (S1) Teknik Sipil ; dan Bachelor of Civil Engineering; and • Magister (S2) Strategic Management. Master of Strategic Management	• Komisaris Independen PT PP (Persero) Tbk (2024-sekarang) Independent Commissioner at PT PP (Persero) Tbk (2024-present) • Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2014-2024) Director of Operations II at PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2014-2024) • Komisaris Utama PT Adhi Persada Gedung (2019-2022) President Commissioner at PT Adhi Persada Gedung (2019-2022) • Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti (2018-2022) President Commissioner at PT Adhi Commuter Properti (2018-2022)	Teknik dan Manajemen Engineering and Management
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	Laki-laki Male	59	• Sarjana (S1) Akuntansi; Bachelor of Accounting; • Pasca Sarjana (S2) Manajemen; dan Master of Management; and • Pasca Sarjana (S2) Akuntansi. Master of Accounting.	• Penasehat Utama Menteri Transmigrasi (Agustus 2025-sekarang) Senior Advisor to the Transmigration Minister (August 2025-present) • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PP (Persero) Tbk (2025-sekarang) Member of PTPP's Nomination and Remuneration Committee (2025–present) • Sekretaris Utama BPKP (2019-Juli 2025) Main Secretary of BPKP (2019-July 2025) • Anggota Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi, & Remunerasi PT PP (Persero) Tbk (2019-2025) Member of PTPP's GCG, Risk Management, Nomination, and Remuneration Committee (2019-2025) • Komisaris PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2018-2019) Commissioner of PT Dok and Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2018-2019) • Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan – BPKP (2017-2019) Deputy of Supervision of Government Agencies for Politics, Law, Security, Human Development, and Culture – BPKP (2017-2019)	Hukum dan Keuangan Law and Finance

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
				• Direktur Investigasi Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Investigasi – BPKP (2016-2017) Director of Investigation of Government Agencies, Deputy for Investigation – BPKP (2016-2017) • Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP (2012-2016) Director of Regional Financial Administration Supervision Region II, Deputy for Supervision of Regional Financial Administration – BPKP (2012-2016) • Kepala Bidang Investigasi, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta – BPKP (2011-2012) Head of Investigation, BPKP Representative for DKI Jakarta Province – BPKP (2011-2012)	
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	Laki-laki Male	60	• Sarjana (S1) Teknik Sipil; Bachelor of Civil Engineering; • Pasca Sarjana (S2) Traf & Highway Eng; dan Master of Traffic & Highway Engineering; and • Doktor (S3) Teknik Sipil. Doctor of Civil Engineering.	• Direktur Dirjen Bina Marga (2020- sekarang) Director of Bina Marga Directorate General (2020-present) • Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (2018-2020) Director of Freeways and Urban, Directorate General of Highways, Ministry of PUPR (2018-2020) • Direktur Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (2015-2017) Director of Bridge, Directorate General of Highways PUPR Ministry (2015-2017) • Kepala BBPJN V Surabaya (2013-2015) Head of BBPJN V Surabaya (2013-2015) • Kasubdit Teknik Jalan, Dit. Bina Teknik (2011-2013) Head of Sub-Directorate of Road Engineering, Directorate of Technical Development (2011-2013)	Teknik Engineering

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Direksi Board of Directors					
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	Laki-laki Male	57	• Sarjana (S1) Teknik Sipil; dan Bachelor of Civil Engineering; and • Magister (S2) Strategic Management. Master of Strategic Management.	• Direktur Human Capital dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2020) Director of Human Capital and Development of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2020) • Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2016-2017) President Director of PT Wijaya Karya Gedung Tbk (2016-2017) • General Manager Departemen Bangunan Gedung WIKA (2014-2016) General Manager of the Building Department of WIKA Building (2014-2016) • General Manajer Departemen Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016) General Manager of the Building Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016) • Manajer Divisi Bangunan Gedung, Departemen Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2012-2013) Manager of Building Division, Department of Building PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2012-2013)	Pengembangan Investasi dan *Human Capital* Investment Development and Human Capital
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Laki-laki Male	53	• Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi; Bachelor of Economics • Magister (S2) Management SDM. Magister of HR Management	• Komisaris Utama PT PP Properti Tbk (entitas anak PTPP) (2022-sekarang) President Commissioner of PT PP Properti Tbk (a subsidiary of PTPP) (2022-present) • Komisaris Utama PT PP Infrastruktur (entitas anak PTPP) (2021-2022) President Commissioner of PT PP Infrastruktur (a subsidiary of PTPP) (2021-2022) • Ketua Dewan Pengawas Dana PensiunPembangunan Perumahan (2018-sekarang) Chairman of the Supervisory Board of the Pension Fund for Pembangunan Perumahan (2018-present) • General Manager Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016) General Manager of Finance at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014-2016) • Manajer Akuntansi dan Pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011-2014) Manager of Accounting and Tax at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011-2014) • Manajer Keuangan dan Human Capital Sipil Umum PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009-2011) Manager of Finance and Human Capital for Civil Engineering at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009-2011)	Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Finance, HR, and Risk Management

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	Laki-laki Male	60	• Sarjana (S1) Teknik; dan Bachelor of Engineering; and • Magister (S2) Administrasi Bisnis Internasional. Master of International Business Administration	• Komisaris Utama PT PP Presisi Tbk (entitas anak PTPP) (2021-sekarang) President Commissioner of PT PP Presisi Tbk (a subsidiary of PTPP) (2021-present) • Kepala Divisi Infrastruktur 1 PT PP (Persero) Tbk (2020) Head of Infrastructure Division 1 PT PP (Persero) Tbk (2020) • Kepala Divisi Infrastruktur 2 PT PP (Persero) Tbk (2017-2020) Head of Infrastructure Division 2 PT PP (Persero) Tbk (2017-2020) • Kepala Divisi Pemasaran II PT PP (Persero) Tbk (2014-2017) Head of Marketing Division II PT PP (Persero) Tbk (2014-2017) • Marketing Manager PTPP (2012-2014) Marketing Manager PTPP (2012-2014) • Business Development Manager PT PP (Persero) Tbk (2009-2012) Business Development Manager PT PP (Persero) Tbk (2009-2012) • Kepala Cabang IX (2004-2009) Head of Branch IX (2004-2009)	Teknik Engineering
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi Bidang Gedung) (Director of Building Operations)	Laki-laki Male	47	• Magister (S2) Manajemen; dan Master of Management; and • Sarjana (S1) Teknik Sipil. Bachelor of Civil Engineering.	Berkarir di lingkup kelompok usaha PTPP. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain: Careers within PTPP Group. Some of the positions he has held include: • Direktur Utama entitas anak PT PP Properti Tbk (2022-2023) President Director of PT PP Properti Tbk (a subsidiary of PTPP) (2022-2023) • Senior Vice President (SVP) Head of Corporate Secretary Bureau (2020-2022) Senior Vice President (SVP), Head of Corporate Secretary Bureau (2020-2022) • SVP Head of Building 2 Division (2018-2020) SVP, Head of Building Division 2 (2018-2020) • SVP Head of Human Capital Management Division (2015-2017) SVP, Head of Human Capital Management Division (2015-2017) • Head of Branch VII Bali (2015-2017) Head of Branch VII Bali (2015-2017) • General Manager (GM) entitas anak PT PP Properti Tbk (2014-2015) General Manager (GM) of PT PP Properti Tbk (2014-2015) • GM PP University (2011-2012) GM of PP University (2011-2012) • HR Manager (2011-2012) HR Manager (2011-2012) • GM Project Branch III Jakarta (2010-2011) GM of Project Branch III Jakarta (2010-2011)	Teknik dan Manajemen Engineering and Management

Nama dan Jabatan Name and Position	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	Laki-laki Male	42	• Sarjana (S1) Teknik Sipil; dan Bachelor of Civil Engineering; and • Master (S2) of Construction Law & Dispute Resolution Master of Construction Law & Dispute Resolution	• Direktur Manajemen Risiko dan legal (2024-sekarang) Director of Risk Management and Legal (2024-present) • Komisaris Utama PT PP Properti Tbk (2023-2024) President Commissioner of PT PP Properti Tbk (2023-2024) • Senior Vice President, Head of Risk Management & Legal Division PT PP (Persero) Tbk (2020-2024) Senior Vice President, Head of Risk Management & Legal Division at PT PP (Persero) Tbk (2020-2024) • Senior Advocation Manager PT PP (Persero) Tbk (2020) Senior Advocacy Manager at PT PP (Persero) Tbk (2020)	Teknik Engineering
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	Laki-Laki Male	52	Sarjana (S1) Teknik Sipil. Bachelor of Civil Engineering	• Direktur Utama PT PP Presisi (2023-2024) President Director of PT PP Presisi (2023-2024) • Direktur Utama PT PP Infrastruktur (2022-2023) President Director of PT PP Infrastruktur (2022-2023) • Direktur Utama PT PP Properti Tbk (2021-2022) President Director of PT PP Properti Tbk (2021-2022) • Direktur Komersial PT PP Infrastruktur (2021) Director of Commercial of PT PP Infrastruktur (2021) • Senior Vice President, Head of Business Development & Investment Division PT PP (Persero) Tbk (2018-2021) Senior Vice President, Head of Business Development & Investment Division at PT PP (Persero) Tbk (2018-2021) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division PT PP (Persero) Tbk (2017-2018) General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017-2018) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division PT PP (Persero) Tbk (2017) General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017) • Kepala Cabang VI PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) Head of Branch VI at PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) • Junior Professional Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2013-2015) Junior Professional Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2013-2015) • Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2009-2013) Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2009-2013)	Teknik dan SDM Engineering and HR

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam setahun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring Dewan Komisaris terhadap kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.

Rapat Dewan Komisaris umumnya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris. Secara teknis, pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Di tahun 2025, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 19 kali dari target 12 kali. Berikut disampaikan kehadiran serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Meeting of the Board of Commissioners

As regulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners holds internal meetings at least once every two months or six times a year. These meetings serve as part of the Board's supervisory and monitoring functions over the Company's management carried out by the Board of Directors. According to the Guidelines for the Board of Commissioners' Principal Duties and Programs Implementation, these meetings must be held regularly and require the physical attendance of all Board of Commissioners members.

Board of Commissioners meetings are generally attended by its members, the Secretary to the Board of Commissioners, or other designated officials, except for special meetings, which may be attended only by Board members. Decisions in these meetings are primarily made through deliberation to reach a consensus. However, if a consensus cannot be achieved, decisions are made by a majority vote.

In 2025, the Board of Commissioners held a total of 19 times, against the target of 12 times internal meetings. Below are the meeting agendas and minutes, attendance, and a summary of the attendance rate of the Board of Commissioners in these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	19	19	-	100,00
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	19	19	-	100,00
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	19	19	-	100,00
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	19	19	-	100,00

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	19	19	-	100,00
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	19	19	-	100,00
Rata-rata Average				**100,00**

Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap operasional Perusahaan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris menggelar rapat bersama dengan Direksi. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Program Pokok Dewan Komisaris, Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta Direksi.

Di tahun 2025, Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sebanyak 6 kali. Berikut disampaikan kehadiran serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

As part of the implementation of the supervisory function of the Company's operations conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors. Per the Guidelines for the Implementation of the Board of Commissioners' Main Duties and Programs, the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors must be held regularly and physically attended by all members of both Boards.

In 2025, the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held six times. Below are the attendance and attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Bersama

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	6	6	-	100,00
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	-	100,00
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	5	1	83,33
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	6	6	-	100,00

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) (Commissioner)	6	6	-	100,00
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	6	6	-	100,00
Direksi Board of Directors				
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	6	6	-	100,00
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	6	6	-	100,00
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	6	5	1	83,33
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi Bidang Gedung) (Director of Building Operations)	6	5	1	83,33
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	6	5	1	83,33
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management) (Director of Corporate Strategy and Human Capital Management)	6	6	-	100,00
Rata-rata **Average**				**94,44**

Beberapa agenda dalam Rapat Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rapat Bersama ke-1/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
   - Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d. Desember 2024 (*unaudited*/prognosa);
   - Pembahasan *update* usulan RKAP dan KPI Tahun 2025;
   - Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024; serta
   - Lain-lain.
2. Rapat Bersama ke-2/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya
   - Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan sd Januari 2025
   - Pembahasan Kinerja *Audited* Tahun Buku 2024 dan Persiapan RUPS Tahunan; serta
   - Lain-lain.

Several items on the agenda for the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors can be outlined as follows:

1. Joint Meeting 1/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting;
   - Discussion of Company Performance up to December 2024 (unaudited/forecast);
   - Discussion of updates to the 2025 RKAP and KPI proposals;
   - Discussion of the Progress Audit of the 2024 Financial Statements; and
   - Others.
2. Joint Meeting 2/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting
   - Discussion of the Company's Performance Report up to January 2025
   - Discussion of the Audited Performance for the 2024 Fiscal Year and Preparation for the Annual GMS; and
   - Others.

3. Rapat Bersama ke-3/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
   - Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan s.d Maret-April 2025;
   - Pembahasan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan; serta
   - Lain-lain.
4. Rapat Bersama ke-4/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
   - Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan s.d Juni (Semester 1) 2025;
   - Pembahasan Rencana Penyehatan Anak Perusahaan; serta
   - Lain-lain.
5. Rapat Bersama ke-5/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
   - Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan s.d Agustus 2025;
   - Pembahasan permasalahan PKPU;
   - Progres rencana integrasi BUMN Infrastruktur; serta
   - Lain-lain.
6. Rapat Bersama ke-6/2025
   - Pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;
   - Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan s.d September 2025;
   - Pembahasan RKAP Tahun 2026;
   - Pembahasan Progres RUPS LB (Perubahan Anggaran Dasar); serta
   - Lain-lain.

3. Joint Meeting 3/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting;
   - Discussion of the Company's Performance Report until March-April 2025;
   - Discussion of the Follow-up on the Results of the Annual GMS; and
   - Others.
4. Joint Meeting 4/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting;
   - Discussion of the Company's Performance Report up to June (Semester 1) 2025;
   - Discussion of the Subsidiary Restructuring Plan; and
   - Others.
5. Joint Meeting No. 5/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting;
   - Discussion of the Company's Performance Report until August 2025;
   - Discussion of PKPU issues;
   - Progress of the Infrastructure SOE company integration plan; and
   - Others.
6. Joint Meeting 6/2025
   - Discussion and follow-up on the results of the previous meeting;
   - Discussion of the Company's Performance Report up to September 2025;
   - Discussion of the 2026 RKAP;
   - Discussion of the Progress of the EGMS (Amendment to the Articles of Association); and
   - Others.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta isi Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 13, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau 12 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, adanya permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.

Secara teknis, pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Adapun seluruh keputusan yang diambil di dalam rapat Direksi bersifat mengikat dan dapat juga ditetapkan tanpa harus menggelar Rapat Direksi dengan syarat keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Board of Directors Meeting

As regulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Guidelines for Good Corporate Governance Implementation, the Board of Directors must hold a meeting at least once a month, or 12 times a year. In practice, Board of Directors meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, upon written request from one or more members of the Board of Directors.

Decision-making in Board of Directors meetings is typically based on deliberation for consensus. However, if consensus is not reached, decisions are made according to the majority vote. All decisions taken at the Board of Directors meeting are binding and can be determined without holding a meeting, provided that the decision has been approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

Di tahun 2025, Direksi mengadakan Rapat sebanyak 43 kali. Berikut disampaikan kehadiran serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

In 2025, the Board of Directors held 43 meetings. The following presents the attendance and the attendance recapitulation of the Board of Directors in those meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Attendance Recapitulation of the Board of Directors in Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Novel Arsyad Direktur Utama President Director	43	43	-	100,00
Agus Purbianto Direktur Keuangan Director of Finance	43	43	-	100,00
Yul Ari Pramuraharjo Direktur Operasi bidang Infrastruktur Director of Infrastructure Operations	43	38	5	88,00
Yuyus Juarsa Direktur Operasi Bidang Gedung Director of Building Operations	43	37	6	86,00
Tommy Wiranata Anwar Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	43	39	2	95,00
I Gede Upeksa Negara Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management Director of Corporate Strategy and Human Capital Management	43	43	-	100,00
Rata-rata **Average**				**95,00**

Beberapa agenda dalam Rapat Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025;
2. Pemasaran tahun 2025;
3. *Update* Pemasaran setiap Pekan;
4. Strategi Divestasi tahun 2025;
5. QHSE *Highlight*;
6. *Site Visit* Proyek-proyek (*Online*);
7. Pembahasan HCM;
8. Pembahasan PPUB;
9. Pembahasan PPRO;
10. *Update* RKAP 2025 Dampak dari Pemotongan APBN 2025;
11. Evaluasi Strategi Bisnis PPRE;
12. Identifikasi Risiko Audit SPI;
13. *Progress* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
14. Pembahasan RAPK 0-10% Proyek-proyek;
15. *Progress* Perkembangan Sistem IT;
16. Tender Proyek-proyek dengan kategori *High Risk;*
17. Kinerja sd Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025;
18. Pembahasan Efisiensi;
19. *Update* Strategi dan *Mapping* Klaim;
20. HUT PP ke 72;
21. *Update* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
22. *Mapping* Optimalisasi Aset;

Several items on the Board of Directors' agenda can be summarized as follows:

1. Company Budget Work Plan (RKAP) for 2025;
2. Marketing for 2025;
3. Weekly Marketing Updates;
4. Divestment Strategy for 2025;
5. QHSE Highlights;
6. Site Visits to Projects (Online);
7. HCM Discussion;
8. PPUB Discussion;
9. PPRO Discussion;
10. Update on 2025 RKAP Impact of 2025 State Budget Cuts;
11. Evaluation of PPRE Business Strategy;
12. Identification of SPI Audit Risks;
13. Progress of 2024 Financial Statement Audit;
14. Discussion of 0-10% RAPK for Projects;
15. Progress of IT System Development;
16. Project Tenders with High Risk Category;
17. Performance for Quarters I, II, III, and IV of 2025;
18. Efficiency Discussion;
19. Update on Strategy and Mapping of Claims;
20. PTPP 72nd Anniversary;
21. Update on the Company's Long-Term Plan (RJPP);
22. Mapping of Asset Optimization;

23. Struktur Organisasi QHSE;
24. Lencana Satya Jasa (LSJ);
25. *Update* WI/Prosedur;
26. Integrasi Dana Pensiun;
27. Jabatan Fungsional Keahlian;
28. *Update* Divestasi;
29. Usulan *Pay Performance* Tahun Kinerja 2024;
30. Pembahasan Integrasi; serta
31. Pembahasan Kinerja akhir tahun 2025.

23. QHSE Organizational Structure;
24. Satya Jasa Badge (LSJ);
25. WI/Procedure Updates;
26. Pension Fund Integration;
27. Functional Expertise Positions;
28. Divestment Updates;
29. Pay Performance Proposals for 2024;
30. Integration Discussion; and
31. 2025 Year-End Performance Discussion.

Rencana Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2026

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyusun rencana rapat untuk tahun 2026 sebagaimana yang terlampir berikut ini.

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Plan for 2026

The Board of Commissioners and the Board of Directors have prepared a meeting plan for 2026 as attached below.

Waktu Pelaksanaan Time	Rencana Agenda Agenda Plan
Rencana Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Plan	
Triwulan I 1st Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, surat masuk, pembahasan Materi *Top Sheet* untuk Rapat Bersama yang meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan I. Meeting to follow up on meeting outcomes, incoming correspondence, and discussion of the Top Sheet materials for the Joint Meeting, covering Financial Performance, Operational Performance, Business Development and Human Resources, Risk Management and Legal Affairs, and Strategic Issues for the first quarter.
Triwulan II 2nd Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, surat masuk, pembahasan Materi *Top Sheet* untuk Rapat Bersama yang meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan II. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, incoming correspondence, and discussion of the Top Sheet materials for the Joint Meeting covering Financial Performance, Operational Performance, Business and HR Development, Risk and Legal Management, and Strategic Issues for the second quarter.
Triwulan III 3rd Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, surat masuk, pembahasan Materi *Top Sheet* untuk Rapat Bersama yang meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan III. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, incoming correspondence, and discussion of the Top Sheet materials for the Joint Meeting covering Financial Performance, Operational Performance, Business and Human Resources Development, Risk and Legal Management, and Strategic Issues for the third quarter.
Triwulan IV 4th Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, surat masuk, pembahasan Materi *Top Sheet* untuk Rapat Bersama yang meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan IV. Meeting to follow up on meeting outcomes, incoming correspondence, and discussion of the Top Sheet materials for the Joint Meeting, covering Financial Performance, Operational Performance, Business Development and Human Resources, Risk Management and Legal Affairs, and Strategic Issues for the fourth quarter.
Rencana Rapat Direksi Board of Directors Meeting Plan	
Triwulan I 1st Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan I. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, Financial Performance, Operational Performance, Business and HR Development, Risk and Legal Management, and Strategic Issues for the first quarter.
Triwulan II 2nd Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan II. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, Financial Performance, Operational Performance, Business and Human Resources Development, Risk and Legal Management, and Strategic Issues for the second quarter.
Triwulan III 3rd Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan II. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, Financial Performance, Operational Performance, Business and HR Development, Risk and Legal Management, and Strategic Issues for the second quarter.

Waktu Pelaksanaan Time	Rencana Agenda Agenda Plan
Triwulan IV 4th Quarter	Rapat tentang tindak lanjut hasil rapat, Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Pengembangan Bisnis dan SDM, Manajemen Risiko dan Legal, dan Isu Strategis pada triwulan IV. Meeting regarding follow-up on meeting outcomes, Financial Performance, Operational Performance, Business and Human Resources Development, Risk Management and Legal, and Strategic Issues for the fourth quarter.

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perencanaan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan tanggung jawab Perusahaan, termasuk di dalamnya Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Kebijakan dasar terkait suksesi Dewan Komisaris di lingkup Perusahaan sebagai BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai Perusahaan terbuka, pengangkatan dan pemberhentian Direksi juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria/Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi

Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris BUMN.

Persyaratan Formal calon anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Orang perseorangan;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Nomination of the Board of Commissioners and the Board Of Directors

The succession plan of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the responsibility of PTPP, including the SOE Ministry as the power holder as well as the Nomination and Remuneration Committee in preparing for regeneration and maintaining leadership continuity in the future. To realize a transparent and accountable process and mechanism for selecting and replacing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the appointments and dismissals are carried out based on the professionalism principles in GCG principles.

Basic Policy Regarding the Succession of the Board of Commissioners within the Company as an SOE refers to the SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. Furthermore, as a Public Company, the appointment and dismissal of the Board of Directors also refer to the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

Criteria/Requirements for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Candidates for members of the Board of Commissioners must meet the formal and material requirements to be appointed as members of the Board of Commissioners of SOEs.

The formal requirements for candidates for members of the Board of Commissioners are:

1. An individual;
2. Proficient in performing legal actions;
3. Never been declared bankrupt within five years before candidacy;
4. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who is found guilty of causing a Company Public Corporation (Perum) to be declared bankrupt within five years before candidacy; and
5. Never been punished for committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within five years before candidacy.

Selain harus memenuhi persyaratan formal, calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
1. Integritas;
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/ Forum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

In addition to meeting formal requirements, prospective members of the Board of Commissioners must also meet the material requirements, namely:
1. Integrity;
2. Dedication;
3. Understand the Company's management issues related to one of the management functions;
4. Have sufficient knowledge in the business of Persero/ Forum where the concerned is nominated; and
5. Can provide sufficient time to carry out the duties.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris, diantaranya yaitu:
1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan
5. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

Other requirements that must be fulfilled by prospective members of the Board of Commissioners include:
1. Not an administrator of a political party and/or a candidate legislature member and/or a legislature member. A candidate legislature member or a legislature member consists of candidates/members of DPR, DPD, DPRD I, and DPRD II;
2. Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/ or Head/Deputy Head of Region;
3. Not serving as a member of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors of the relevant SOE for two consecutive periods;
4. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors), as evidenced by a health certificate from a doctor; and
5. Prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies must be based on a proposal letter from the relevant agency.

Sedangkan Calon Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.

Meanwhile, prospective members of the Board of Directors must meet formal and material requirements to be appointed as members of the Board of Directors of SOEs.

Persyaratan formal anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara antara lain Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; dan
3. Dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang karena berkaitan dengan sektor keuangan.

Formal requirements of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as an individual who is capable to perform legal actions, unless within five years before the appointment has ever:
1. Been declared bankrupt;
2. Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who is found guilty of causing an SOE and/or a Company to be declared bankrupt; and
3. Been punished for committing a criminal action that is detrimental to state finances, SOE, Company, and/or related to the financial sector.

Selain harus memenuhi persyaratan formal, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;

In addition to meeting formal requirements, prospective members of the Board of Directors must also meet the material requirements, namely:
1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;

4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi, diantaranya yaitu:
1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Calon Anggota Dewan Komisaris PTPP harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Pemegang Saham. Adapun pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:
1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati selaku anggota Dewan Komisaris; dan
6. Mengundurkan diri.

Demikian pula dengan Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan atas persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

4. Experience;
5. Honesty;
6. Good behavior; and
7. High dedication to advancing and developing the Company.

Other requirements that must be met by prospective members of the Board of Directors are:
1. Not an administrator of a political party and/or a candidate legislature member and/or a legislature member. A candidate legislature member or a legislature member consists of candidates/members of DPR, DPD, DPRD I, and DPRD II;
2. Not a candidate for Head/Deputy Head of Region and/or Head/Deputy Head of Region;
3. Not serving as a member of the Board of Directors of the relevant SOE for two consecutive periods;
4. Has dedication and provides full time to carry out their duties; and
5. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that could impede the performance of duties as a member of the Board of Directors of an SOE), as evidenced by a health certificate from a doctor.

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed upon GMS approval with due observance of the applicable provisions, then reported to the Law and Human Rights Minister.

Prospective members of PTPP Board of Commissioners must go through several selection stages before being proposed by the Shareholders with the authority to propose the Board of Commissioners at the GMS. A Commissioner can be dismissed at any time according to the applicable provisions and with the Shareholders' approval. The dismissal of members of the Board of Commissioners can be done if the concerned:
1. Does not perform their duties properly;
2. Does not implement or violate the provisions of the applicable laws and regulations or the Company's Articles of Association;
3. Is engaged in any action that harms the Company and/or State;
4. Is found guilty by a court decision that has permanent legal force;
5. Commits any action that violates ethics and/or propriety that shall be respected as a member of the Board of Commissioners; and
6. Resigns.

Similarly, members of the Board of Directors are appointed and dismissed with the GMS approval with due regard to the applicable provisions, then reported to the Law and Human Rights Minister.

Calon Direksi Perusahaan harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Adapun pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:

1. Tidak atau kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
5. Melakukan tindakan yang melanggar Etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
7. Mengundurkan diri.

Selain dari alasan pemberhentian anggota Direksi dimaksud di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan Perusahaan.

Prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat melalui RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak setelah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Komite Suksesi yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Dewan Komisaris dan Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berikut disampaikan bagan pengusulan hingga penetapan Dewan Komisaris dan Direksi di lingkup Perusahaan.

Prospective members of the Board of Directors must go through several selection stages before being proposed by the Shareholders with the authority to propose the Board of Directors at the GMS. The GMS may dismiss a Director at any time by stating the reasons. The dismissal of members of the Board of Directors can be done if the concerned:

1. Does not perform or underperforms in fulfilling the obligations that have been agreed upon in the management contract;
2. Does not perform their duties properly;
3. Violates the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association;
4. Is engaged in action that harms the Company and/or State;
5. Commits action that violates Ethics and/or propriety that must be upheld as the Board of Directors;
6. Is found guilty by a court decision with permanent legal force; or
7. Resigns.

In addition to the abovementioned reasons to dismiss a member of the Board of Directors, the Board may be dismissed by the GMS based on other reasons that are considered appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

The procedure for dismissing the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Suggestion to Determination Procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed by the GMS from candidates proposed by the largest holder of Series B shares, following their successful completion of a fitness and propriety test conducted by the Succession Committee formed by the holders of Series A Dwiwarna Stock shares. The nomination process follows the applicable laws and regulations, and the nomination is binding on the GMS.

To ensure integrity and professionalism in their fields, all candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors undergo a fit and proper test carried out following the applicable laws and regulations. In conducting the fit and proper test, referring to Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the SOE Minister Regulation on the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and other laws and regulations.

The following is a chart of the proposal to determination procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors within the Company.

Skema dan Mekanisme Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi: Pengusulan Hingga Penetapan
Succession Scheme and Mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors: Suggestion to Stipulation



Pengajuan Bakal Calon
Submission of Prospective Candidates

Pengajuan nama-nama calon Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari personal yang pernah menjabat Direksi BUMN namun tidak lagi menjabat, Dewan Komisaris BUMN, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain.

The nomination of candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the sources of the candidates consisting of individuals who have served as SEO Board of Directors but are no longer serving, SOE Board of Commissioners, SOE talents, talents from the SOE Ministry and other sources



Penjaringan Bakal Calon
Selection of Prospective Candidates

Penjaringan nama-nama Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

Selection of the names of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by the SOE Minister, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy looking for prospective candidates from various sources. All prospective candidates are administered by the Deputy.



Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
Fit and Proper Test (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon Dewan Komisaris dan Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

The candidate who will be determined as a candidate for the Board of Commissioners and the Board of Directors is someone who has been declared to have fulfilled the Formal Requirements and other Requirements and passed the UKK. UKK for prospective candidates is carried out by a professional institution appointed by the Minister.

Usulan Pengangkatan
Appointment Proposal

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Candidates who have received a "Suggested" recommendation from the assessment team can be appointed to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.





Penetapan
Stipulation

Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

The stipulation is made through the GMS mechanism as regulated in the Financial Services Authority Regulation and other related regulations.

Peran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Proses Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

PTPP memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas menjalankan fungsi nominasi dalam tubuh Perusahaan, yaitu:

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri;
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perusahaan;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN mengenai struktur organisasi BUMN;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
9. Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris; serta
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

Role of the Nomination/Remuneration Committee in the BOC and BOD nomination process

PTPP has a Nomination and Remuneration Committee tasked with carrying out nomination functions within the Company, namely:

1. Conduct regular reviews of the Company's Talent Management system as well as monitoring and evaluating its implementation;
2. Evaluate the Talent classification system and procedure by the Board of Directors;
3. Validate and calibrate the Selected Talent to produce a list of Nominated Talents nominated by the Board of Commissioners to the Minister;
4. Evaluate prospective Company representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, before submitting them to the Minister;
5. Evaluate individual KPI suggestions for members of the Company's Board of Directors;
6. Arrange a proposed individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
7. Evaluate the suggestions of the SOEs' Directors regarding the SOEs organizational structure;
8. Maintain the confidentiality of Company document, data, and information;
9. Prepare Quarterly and Annual Report on the Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee and submit them to the Board of Commissioners; and
10. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and carry out other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Prosedur dan Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Komisaris dan Direksi

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat

Procedure and Mechanism for Resignation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

A member of the Board of Commissioners has the right to resign from their position before the term of office ends by notifying the intention to the Company in writing. The Company must convene a GMS to resolve the resignation request from member(s) of the Board of Commissioners no longer than 90 days after receiving the resignation letter. The Company must disclose the information to the public and submit it to OJK no later than two business days after receiving the resignation request from the member of the Board of Commissioners and the GMS resolution.

Before the resignation becomes effective, the relevant member of the Board of Commissioners shall remain obligated to complete their duties and responsibilities following the Articles of Association and the applicable laws and regulations. The member of the Board of Commissioners who resigns can still be held accountable

dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

as a member of the Board of Commissioners from the appointment until the approval of the resignation date at the GMS. Exemption from the responsibilities of members of the Board of Commissioners concerned until the date of approval of his resignation at the GMS.

Demikian pula bagi Direksi, seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan. PTPP wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Likewise, for the Board of Directors, a member of the Board of Directors may resign from their post before the term of office expires. In the event a member of the Board of Directors resigns, the relevant member of the Board of Directors must submit a resignation letter regarding his/her intention to the Company. PTPP must organize GMS to resolve the resignation proposal of the member of the Board of Directors in no longer than 90 days after receiving the resignation letter.

PTPP wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

1. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi; dan
2. Hasil penyelenggaraan RUPS.

PTPP is required to disclose information to the public and submit it to OJK no later than two working days after:

1. The receipt of the request for resignation of the Board of Directors; and
2. The GMS resolutions.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

Before the resignation is effective, the relevant member of the Board of Directors will remain obligated to complete the duties and responsibilities following the Articles of Association and Laws and Regulations. The abovementioned member of the Board of Directors who resigns can still be held accountable as a member of the Board of Directors from the appointment until the approval of the resignation date at the GMS. The resigning Director will be free from responsibility after obtaining the release and discharge of responsibility from the Annual GMS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board Of Commissioners and the Board of Directors

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada berbagai perangkat penilaian dari Kementerian BUMN yang terangkum dalam Kontrak Manajemen atau *Key Performance Indicator*.

As a State-Owned Enterprise owned by the Government of the Republic of Indonesia, performance assessment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the various assessment tools from the SOE Ministry summarized in the Management Contract or Key Performance Indicator.

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris dan Direksi sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi pemberian insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/ RUPS untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi baik sebagai Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi.

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is evaluated annually by the Shareholders in a GMS. In general, the performance is determined based on their obligations, as stipulated in the applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the Shareholders' mandate. Formal evaluation criteria are presented transparently to the Board of Commissioners and the Board of Directors upon their appointment.

The results of the performance evaluation, both collegially and individually, form an integral part of the compensation scheme and incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors. These evaluation results serve as one of the key considerations for the Shareholders/ GMS when deciding on the dismissal or re-appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors performance evaluation results are also a valuable tool for assessing and improving the effectiveness of both the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

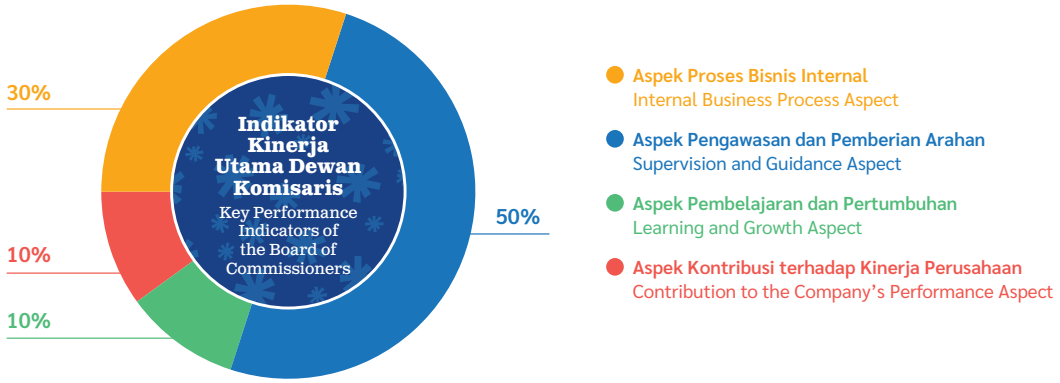
Dalam melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran-ukuran tertentu yang menjadi target-target yang harus dicapai oleh Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

In assessing the performance of the Board of Commissioners, the Company refers to the SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/03/2023, dated March 24, 2023, on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. According to this regulation, Key Performance Indicators (KPIs) are defined as specific measurements that serve as targets for the Board of Commissioners in supervising the Company.

Terdapat 4 (empat) aspek kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris, seperti terlihat di bawah ini.
1. Aspek Proses Bisnis Internal;
2. Aspek Pengawasan dan Pemberian Arahan;
3. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan; dan
4. Aspek Kontribusi terhadap Kinerja Perusahaan.

The assessment criteria for the performance of the Board of Commissioners are divided into four key aspects:
1. Internal Business Process Aspect;
2. Supervision and Providing Direction Aspect;
3. Learning and Growth Aspect; and
4. Contribution to Company Performance Aspect.



Untuk tahun 2025, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Penilaian Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2025 yang meratifikasi Peraturan Menteri BUMN di atas ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai aspirasi pemegang saham. Berikut disampaikan kriteria penilaian kinerja dan capaian atau realisasi penilaian KPI Dewan Komisaris.

For 2025, the Board of Commissioners' performance assessment is based on the achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs) as stipulated in the 2025 RKAP, which ratifies the above SOE Minister Regulation into Key Performance Indicators (IKU) in accordance with the aspirations of shareholders. The following are the criteria for performance assessment and for the achievement or realization of the Board of Commissioners' KPIs.

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2025

Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2025

No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot Weight (%)	Realisasi Achievement	Capaian KPI KPI Achievement (%)
Aspek Proses Bisnis Internal (30%) Internal Business Process Aspects (30%)							
1	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meetings	Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Pendukung, termasuk rapat paparan permasalahan strategis dengan mengundang pejabat BOD-1 (SVP). Internal meeting of the Board of Commissioners with Supporting Organs, including strategic issue presentations involving BOD-1 (SVP) officials	Kali Times	12	10,00	19	12,00
2	Pelaksanaan GCG Dewan Komisaris GCG Implementations by the Board of Commissioners	Capaian nilai GCG aspek Dewan Komisaris (menggunakan kriteria ACGS) GCG score for the Board of Commissioners aspect (based on the ACGS criteria)	Skor Score	Sangat Baik Excellent	10,00	Sangat Baik Excellent	10,00

No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot Weight (%)	Realisasi Achievement	Capaian KPI KPI Achievement (%)
3	Jangka Waktu Pemberian Keputusan atas Usulan Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Decision-Making Timeframe for Proposals Requiring Board of Commissioners Approval	Rata-rata jangka waktu pemberian keputusan Dewan Komisaris setelah dokumen diterima secara lengkap Average timeframe for Board of Commissioners' decisions after complete documentation is received.	Hari Days	7	10,00	7	10,00
Aspek Pengawasan dan Pemberian Arahan (50%) Supervision and Providing Directions Aspects (50%)							
4	Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and Directors	Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi Board of Commissioners Meetings involving the Board of Directors	Kali Times	6	10,00	6	10,00
5	Arahan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan dan Jalannya Perseroan Board of Commissioners' Directives on Company Policies and Operations	Arahan-arahan kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan sebagaimana kewajiban Dewan Komisaris yang tercantum dalam Anggaran Dasar Directives provided to the Board of Directors in managing the company as per the obligations of the Board of Commissioners outlined in the Articles of Association	Surat Letter	15	10,00	29	11,33
6	Kunjungan Anggota Dewan Komisaris untuk memonitor kemajuan proyek Visits by Board of Commissioners Members to Monitor Project Progress	Jumlah kunjungan Anggota Dewan Komisaris ke lokasi usaha, proyek dan/atau investasi Number of visits by members of the Board of Commissioners to business, project and/ or investment locations	Kali Times	10	10,00	12	11,00
7	Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Periodik Perseroan Submission of the Board of Commissioners' Response to the Company's Periodic Report	Tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulanan dan laporan tahunan (laporan triwulan IV termasuk dalam lingkup laporan tahunan) The Board of Commissioners' response to quarterly reports and annual reports (quarter IV reports are included in the scope of the annual report)	Surat Letter	4	10,00	4	10,00
8	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan kepada RUPS Submission of the Supervisory Task Report to the GMS	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku bersangkutan kepada RUPS Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners during the relevant fiscal year to the GMS	Surat Letter	1	10,00	1	10,00

No	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot Weight (%)	Realisasi Achievement	Capaian KPI KPI Achievement (%)
Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan (10%) Learning and Growth Aspects (10%)							
9	Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Training Attended by Board of Commissioners Members	Jumlah diklat/seminar/ *benchmarking* yang diikuti masing-masing Anggota Dewan Komisaris Number of training/seminars/ benchmarking attended by each Member of the Board of Commissioners	Kali Times	6	10,00	15	12,00
Aspek Kontribusi terhadap Kinerja Perusahaan (10%) Contribution to the Company Performance Aspect (10%)							
10	Kontribusi Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pencapaian KPI Direksi Contribution of the Board of Commissioners' Supervision to the Board of Directors' KPI Achievement	Skor KPI Direksi Board of Directors' KPI Scores	Skor Score	100	10,00	77,67	7,77
	Total Skor **Total Score**				**100,00**		**104,1**

Penilaian Kinerja Direksi

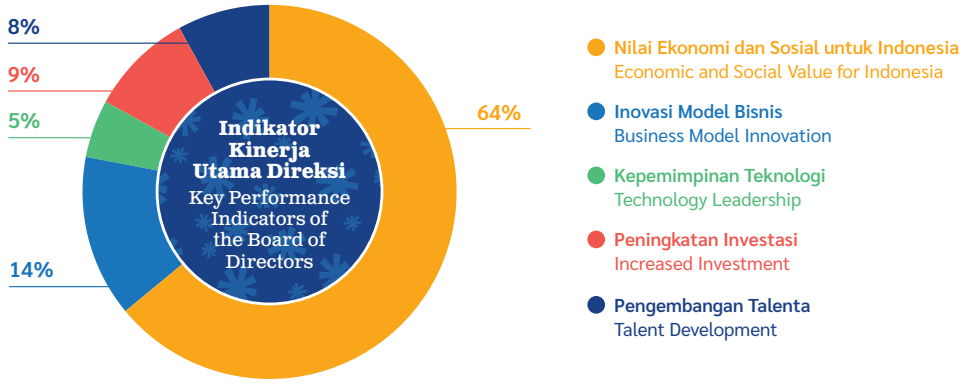
Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai ukuran-ukuran tertentu yang menjadi target-target yang harus dicapai oleh Direksi dalam pengurusan Perusahaan.

Terdapat 5 (lima) aspek kriteria penilaian kinerja Direksi, seperti terlihat di bawah ini:
1. Aspek Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia.
2. Aspek Inovasi Model Bisnis.
3. Aspek Kepemimpinan Teknologi.
4. Aspek Peningkatan Investasi.
5. Aspek Pengembangan Talenta.

Performance Assessment of the Board of Directors

In assessing the performance of the Board of Directors, the Company refers to SOE Minister Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. In this regulation, the Key Performance Indicators (KPI) are explained, focusing on performance aspects as specific measurements and targets that must be achieved by the Board of Directors in managing the Company.

There are five aspects of the Board of Directors' performance assessment criteria, as shown below:
1. Economic & Social Value for Indonesia Aspect.
2. Business Model Innovation Aspect.
3. echnology Leadership Aspect.
4. Increasing Investment Aspect.
5. Talent Development Aspect.



Untuk tahun 2025, penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan aspirasi Pemegang Saham dengan No. S-468/MBU/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2025 yang menurunkan Peraturan Menteri BUMN di atas ke dalam Indikator Kinerja utama (IKU) sesuai aspirasi pemegang saham.

Berikut disampaikan kriteria penilaian kinerja dan capaian atau realisasi penilaian KPI Direksi.

For 2025, the performance assessment of the Board of Directors is carried out based on Shareholder Aspirations with No. S-468/MBU/09/2024 dated September 30, 2024 on the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget, which reduces the above Regulation of the SOE Minister into the Main Performance Indicators (IKU) in accordance with the shareholders' aspirations.

Below are the performance assessment criteria and achievements or realization of the Board of Directors' KPI assessment.

Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2025 (Tabel realisasi KPI 2025)

Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) in 2025 (Table of KPI Realization in 2025)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Kolegial Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors as a Collective Body for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia Economic & Social Value for Indonesia							**64**				**51,79**
Finansial Financial							**39**				**27,40**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,55
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	*Net Operating Cash Flow*	Rp Miliar Rp Billion	285,58	130,35	C	*Maximize*	9	*Sum*	923,95	110%	9,90

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direksi Secara Kolegial Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors as a Collective Body for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
Operasional Operational							**20**				**18,97**
6	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20.133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07
7	*On Time On Budget*	%	86,57	100,00	C	*Maximize*	7	*Sum*	89,93	90%	6,30
8	*Total Recordable Incident Rate*	Skor Score	N/A	0,24	C	*Minimize*	6	*Last Value*	0,030	110%	6,60
Sosial Social							5				**5,42**
9	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	5	*Last Value*	32,30	108%	5,42
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation							**14**				**7,00**
10	Penyelesaian Restrukturisasi Baik di Level Induk maupun Anak Perusahaan, sesuai dengan kondisi masing-masing BUMN Completion of restructuring at both parent and subsidiary levels, in accordance with the conditions of each SOE	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	7	*Last Value*	100	100%	7,00
11	Peningkatan Kinerja Anak Perusahaan Improvement in subsidiary performance	Jumlah Anak Perusahaan & Rp Miliar Total Subsidiaries & Rp Billion	N/A	2 & (270,64)	C	*Maximize*	7	*Sum*	3 & (6,518.15)	(1032%)	0,00
C. Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership							**5,00**				**5,00**
12	Implementasi ERP ERP Implementation	Jumlah Anak Perusahaan Total Subsidiaries	N/A	2	C	*Maximize*	5	*Last Value*	2,00	100%	5,00
D. Peningkatan Investasi Investment Increase							**9**				**5,09**
13	*Asset Recycling*/ Divestasi Anak/ Divestasi Cucu Asset Recycling/ Divestment of Subsidiaries/ Divestment of Second-Tier Subsidiaries	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	9	*Last Value*	56,50	57%	5,09
E. Pengembangan Talenta Talent Development							**8,00**				**8,80**
14	*Human Capital Transformation*	%	N/A	100,00	S	*Maximize*	8	*Last Value*	112,46	110%	8,80
	Total						**100**				**77,67**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Operasi Gedung Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Building Operations for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. KPI Bersama Joint KPI							**40**				**26,82**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,55
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20.133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07
6	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	3	*Last Value*	32,30	108%	3,25
B. KPI Direktorat Directorate KPI							**60**				**54,91**
1	*Net Operating Cash Flow*	Rp Miliar Rp Billion	997,96	644,71	C	*Maximize*	9	*Sum*	1.033,75	110%	9,90
2	*Feeding* dan JO ke Anak Perusahaan Feeding and JO to Subsidiaries	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	6	*Last Value*	17,38	17%	1,04
3	*Adjusted Gross Profit Margin Growth*	%	N/A	23,43	C	*Maximize*	5	*Last Value*	18,23	78%	3,89
4	*On Time On Budget*	%	90,68	100,00	C	*Maximize*	8	*Sum*	94,26	94%	7,54
5	*Orderbook Burn Rate*	%	54,55	54,91	C	*Maximize*	7	*Sum*	48,68	89%	6,21
6	*Total Recordable Incident Rate*	Skor Score	N/A	0,24	C	*Minimize*	7	*Last Value*	0,00	110%	7,70
7	*Gross Profit Growth From Business Specialization*	%	64,69	17,99	C	*Maximize*	6	*Sum*	16,27	90%	5,43
8	Penyelesaian Proyek Strategis Nasional & IKN Completion of National Strategic Projects & IKN	%	96,05	86,00	S	*Maximize*	6	*Sum*	98,20	110%	6,60
9	Produktivitas Karyawan Employee Productivity	Rp Juta/ Karyawan Rp Million/ Employee	541,38	429,74	C	*Maximize*	6	*Sum*	538,88	110%	6,60
	Total						**100**				**81,73**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Operasi Infrastruktur Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Infrastructure Operations for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. KPI Bersama **Joint KPI**							**40**				**26,82**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,25
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20.133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07
6	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	3	*Last Value*	32,30	108%	3,25
B. KPI Direktorat **Directorate KPI**							**60**				**37,36**
1	*Net Operating Cash Flow*	Rp Miliar Rp Billion	527,88	1.282,30	C	*Maximize*	9	*Sum*	65,89	5%	0,46
2	*Feeding* dan JO ke Anak Perusahaan Feeding and JO to Subsidiaries	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	6	*Last Value*	87,03	87%	5,22
3	*Adjusted Gross Profit Margin Growth*	%	N/A	11,99	C	*Maximize*	5	*Last Value*	2,30	-4%	0,00
4	*On Time On Budget*	%	83,33	100,00	C	*Maximize*	8	*Sum*	86,30	86%	6,90
5	*Orderbook Burn Rate*	%	47,95	44,06	C	*Maximize*	7	*Sum*	28,70	67%	4,69
6	*Total Recordable Incident Rate*	Skor	N/A	0,24	C	*Minimize*	7	*Last Value*	0,062	110%	7,70
7	*Gross Profit Growth From Business Specialization*	%	51,03	23,06	C	*Maximize*	6	*Sum*	143,88	110%	6,60
8	Penyelesaian Proyek Strategis Nasional & IKN Completion of National Strategic Projects & IKN	%	81,67	90,87	S	*Maximize*	6	*Sum*	87,51	96%	5,78
9	Produktivitas Karyawan Employee Productivity	Rp Juta/ Karyawan Rp Million/ Employee	606,63	425,40	C	*Maximize*	6	*Sum*	(9,57)	(2%)	0,00
	Total						**100**				**64,18**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Manajemen Risiko & Legal Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Risk Management & Legal for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. KPI Bersama Joint KPI							**40**				**26,82**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,55
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20.133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07
6	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	3	*Last Value*	32,30	108%	3,25
B. KPI Direktorat Directorate KPI							**60**				**49,70**
1	*Claims-Cost Ratio*	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	7	*Sum*	65,01	65%	4,55
2	*Total Recordable Incident Rate*	Skor Score	N/A	0,24	C	*Minimize*	7	*Last Value*	0,030	110%	7,70
3	Penyelesaian Restrukturisasi Baik di Level Induk maupun Anak Perusahaan, sesuai dengan kondisi masing-masing BUMN Completion of Restructuring at both Parent and Subsidiary Levels, in accordance with the conditions of each SOE	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	8	*Last Value*	100	100%	8,00
4	Pendampingan Penyelesaian Aksi Korporasi Assistance in completing corporate actions	%	100,00	100,00	G	*Maximize*	9	*Sum*	55,32	55%	3,87
5	*Success Rate Legal Settlement*	%	157,00	60,00	G	*Maximize*	8	*Sum*	43,10	72%	5,75
6	*Risk Maturity Index*	Skor Score	2,90	2,62	G	*Maximize*	8	*Sum*	2,90	110%	8,80
7	Implementasi Roadmap Standarisasi Evaluasi NC Implementation of the NC Evaluation Standardization Roadmap	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	5	*Sum*	100,00	100%	5,00

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Manajemen Risiko & Legal Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Risk Management & Legal for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
8	Pencapaian KPI PMN* Achievement of KPI for PMN*	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	4	*Last Value*	0,00	0%	0,00
9	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Compliance with Risk Management Body Qualifications	%	85,00	90,00	S	*Maximize*	8	*Sum*	90,48	101%	6,03
	Total						**100**				**76,52**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Keuangan Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Finance for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. KPI Bersama Joint KPI							**40**				**26,82**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,55
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20,133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07
6	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	3	*Last Value*	32,30	108%	3,25
B. KPI Direktorat Directorate KPI							**60**				**50,58**
1	*Net Operating Cash Flow*	Rp Miliar Rp Billion	285,58	130,35	C	*Maximize*	9	*Sum*	923,95	110%	7,70
2	*Cost of Debt*	%	8,94	8,94	C	*Minimize*	9	*Sum*	9,91	90%	6,30
3	*On Time On Budget*	%	86,57	100,00	C	*Maximize*	8	*Sum*	89,93	90%	7,19
4	*Orderbook Burn Rate*	%	44,93	47,07	C	*Maximize*	7	*Sum*	32,31	69%	4,80

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Keuangan Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Finance for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
5	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Level of Domestic Product Use	%	72,21	71,54	S	*Maximize*	6	*Last Value*	64,39	90%	4,50
6	Penerapan TJSL TJSL Implementation	%	85,29	82,00	S	*Maximize*	6	*Last Value*	83,41	102%	5,09
7	Penyelesaian Restrukturisasi Baik di Level Induk maupun Anak Perusahaan, sesuai dengan kondisi masing-masing BUMN Completion of Restructuring at both Parent and Subsidiary Levels, in accordance with the conditions of each SOE	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	8	*Last Value*	100	100%	8,00
8	Implementasi ERP ERP Implementation	Jumlah Anak Perusahaan Total Subsidiaries	N/A	2	C	*Maximize*	7	*Last Value*	2	100%	7,00
9	Pencapaian KPI PMN* Achievement of KPI for PMN*	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	4	*Last Value*	0,00	0%	0,00
	Total						**100**				**77,40**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Strategi Korporasi & HCM Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Corporate Strategy & HCM for 2025

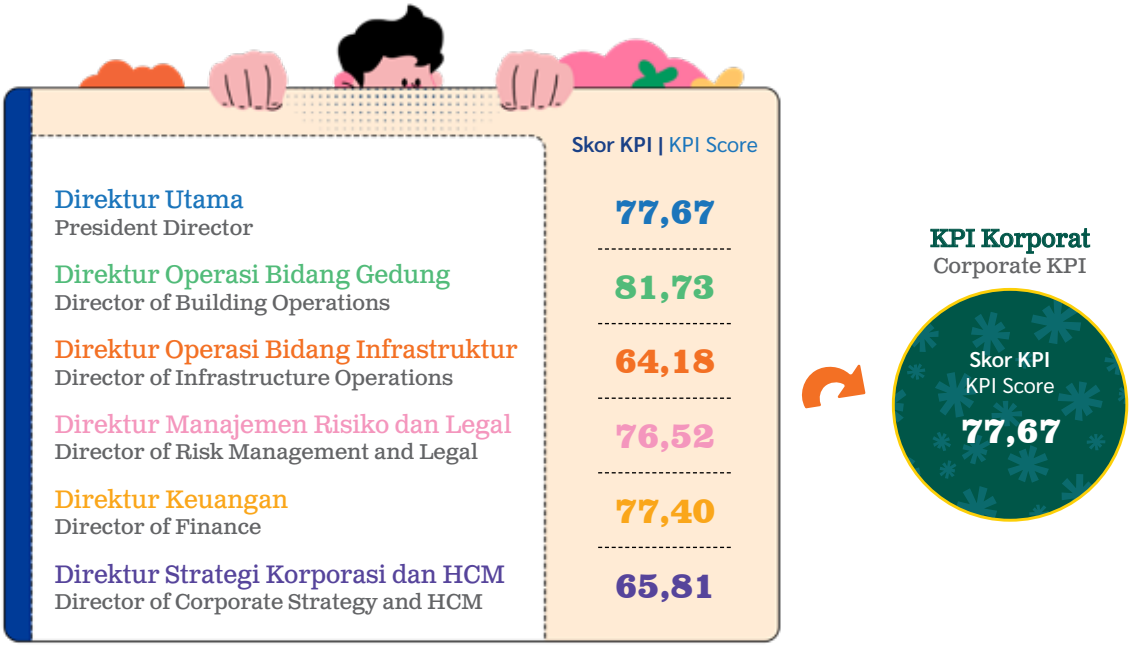
No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
A. KPI Bersama Joint KPI							**40**				**26,82**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.947,94	2.639,20	C	*Maximize*	9	*Last Value*	1.139,64	43%	3,89
2	Rasio Perputaran Piutang (Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pekerjaan dalam Progress Konstruksi) Accounts Receivable Turnover Ratio (Accounts Receivable, Gross Bills, Construction Work in Progress)	Jumlah Hari Total Days	293,00	212	C	*Minimize*	9	*Last Value*	183	110%	9,90
3	*Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	5,56	6,31	C	*Minimize*	7	*Last Value*	17,30	36%	2,55
4	ROIC ≥ WACC	%	(2,04)	(6,46)	C	*Maximize*	5	*Sum*	(27,81)	23%	1,16
5	Perolehan Kontrak Konstruksi Baru Acquisition of New Construction Contracts	Rp Miliar Rp Billion	20.133	28.230	C	*Maximize*	7	*Sum*	24.478,25	87%	6,07

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Direktur Strategi Korporasi & HCM Tahun 2025
Key Performance Indicators (KPIs) for the Director of Corporate Strategy & HCM for 2025

No	KPI KPI	Satuan Unit	Real 2024-A 2024-A Realization	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	ESG/C ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight (%)	Tipe Ytd	Real 2025-A 2025-A Realization	% Pencapaian KPI % KPI Achievement	Skor KPI KPI Score
				a			b		c	d=c/a	e=d*b
6	*ESG Rating*	Skor Score	37,90	35,00	E, S, G	*Minimize*	3	*Last Value*	32,30	108%	3,25
B. KPI Direktorat Directorate KPI							**60**				**38,99**
1	*Net Investing Cash Flow*	Rp Miliar Rp Billion	-2.227,72	2.245,10	C	*Maximize*	9	*Sum*	1.110,59	49%	4,45
2	Penyelesaian Restrukturisasi Baik di Level Induk maupun Anak Perusahaan, sesuai dengan kondisi masing-masing BUMN Completion of Restructuring at both Parent and Subsidiary Levels, in accordance with the conditions of each SOE	%	N/A	100.00	C	*Maximize*	8	*Last Value*	100	100%	8,00
3	Peningkatan Kinerja Anak Perusahaan Improvement in subsidiary performance	Jumlah Anak Perusahaan & Rp Miliar Total Subsidiaries & Rp Billion	N/A	2 & (270,64)	C	*Maximize*	8	*Sum*	3 & (6,518.15)	(1032%)	0,00
4	Implementasi ERP ERP Implementation	Jumlah Anak Perusahaan Total Subsidiaries	N/A	2	C	*Maximize*	7	*Last Value*	2	100%	7,00
5	*Asset Recycling*/ Divestasi Anak/ Divestasi Cucu Asset Recycling/ Divestment of Subsidiaries/ Divestment of Second-Tier Subsidiaries	%	N/A	100,00	C	*Maximize*	9	*Last Value*	0,00	0%	0,00
6	*Talent Diversity in Nominated Talent* (Talenta Milenial dan Rasio Perempuan) Talent Diversity in Nominated Talent (Millennial Talent and Female Ratio)	%	N/A	28,57	S	*Maximize*	6	*Last Value*	56,50	57%	2,83
7	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Qualification Fulfillment of Risk Management Body	%	85,00	90,00	S	*Maximize*	7	*Sum*	172,92	110%	6,60
8	Produktivitas Karyawan Employee Productivity	Rp Juta/ Karyawan Rp Million/ Employee	487,70	296,65	C	*Maximize*	6	*Sum*	90,48	101%	7,04
	Total						**100**				**65,81**

Di samping itu, Perusahaan juga memiliki penilaian Direksi per Direktorat, dengan aspek penilaian yang memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Berikut disampaikan realisasi penilaian kinerja per Direktorat dan hasil skor KPI Korporat PTPP tahun 2025.

In addition, the Company has assessments of the Board of Directors per Directorate, with the assessment aspects that are slightly different from one another. the following shows the realization of the performance assessment per Directorate and the results of the PTPP Corporate KPI score in 2025.



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemegang Saham. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dan berbagai tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan, sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-197/MBU/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2024;
4. Surat Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN No. SR-292/Wk.MBU.10/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2024;

Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS by referring to the Shareholders' Resolutions. The income of the Board of Commissioners and the Board of Directors includes Remuneration, Allowances, and Bonuses, and is given according to the Company's performance and achievements, as stipulated in prevailing laws and regulations.

The policy for determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 113;
2. SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
3. SOE Minister Decree No. SK-197/MBU/08/2024 dated August 22, 2024, on Determination of the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises in 2024;
4. Letter of the Business Infrastructure Undersecretary Assistant of the SOE Ministry No. SR-292/Wk.MBU.10/08/2024 dated August 23, 2024, on the Determination of the Salary of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk for the year 2024;

5. Surat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Republik Indonesia (Danantara) No. S-063/DI-BP/VII/2025 perihal Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN; dan
6. Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

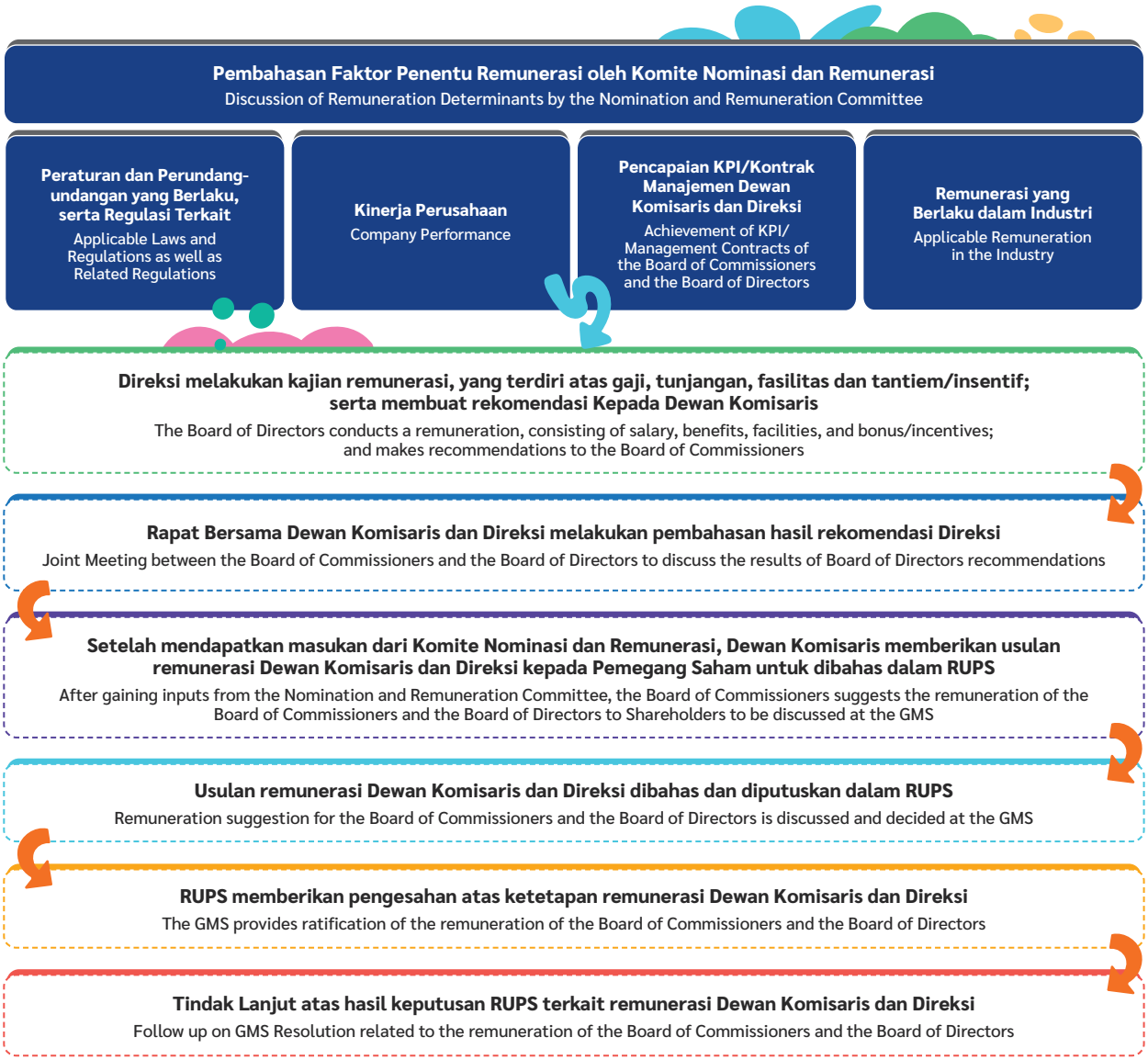
5. Daya Anagata Nusantara Investment Agency Management Board (Danantara) Letter No. S-063/DI-BP/VII/2025 on the Granting of Tantiem, Incentives, and/or Other Forms of Compensation to the Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs and their Subsidiaries; and
6. Articles of Association of the Company.

Procedure and Mechanism from Suggestion to Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The procedure for determining the remuneration of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to GMS resolutions, considering the results of studies conducted by the Company.

Bagan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Chart of the Mechanism for Proposing and Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham. Proses penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan rekomendasi Dewan Komisaris, termasuk masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, sebelum akhirnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

- Remunerasi Dewan Komisaris
  - » Honorarium;
  - » Tunjangan;
  - » Fasilitas;
  - » Tantiem/Insentif Kinerja; dan
  - » Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Remunerasi Direksi
  - » Gaji;
  - » Tunjangan;
  - » Fasilitas;
  - » Tantiem/Insentif Kinerja; dan
  - » Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

Remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined based on a formula established by the Shareholders. The determination process takes into account the study results and recommendations of the Board of Commissioners, including input from the Nomination and Remuneration Committee, before being ultimately decided at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, the components of income of the Board of Commissioners and the Board of Directors consist of:

- Remuneration of the Board of Commissioners
  - » Honorarium;
  - » Benefits;
  - » Facilities;
  - » Bonus/Performance Incentive; and
  - » Taxes on Honorarium, Benefits, and Facilities for the Board of Commissioners are borne by the Company. Meanwhile, the tax on performance bonus/incentives for the Board of Commissioners is borne by each member of the Board of Commissioners.
- Remuneration of the Board of Directors
  - » Salary;
  - » Benefits;
  - » Facilities;
  - » Tantiem/Performance Incentive; and
  - » Taxes on Salary, Benefits, and Facilities for the Board of Directors are borne by the Company. Meanwhile, the tax on performance bonuses/incentives for the Board of Directors is borne by each member of the Board of Directors.

The remuneration structure and components for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Commissioners
• **Honorarium Dewan Komisaris** Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: » Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; » Perhitungan honorarium Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.	• **Gaji Direksi** Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: » Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali; » Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
• **Honorarium of the Board of Commissioners** A fixed income in the form of money received monthly because of their position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following provisions: » The calculation of the President Commissioner's honorarium is 45% of the President Director's salary; » The calculation of the Commissioner's honorarium is 90% of the President Commissioner's honorarium.	• **Salary of the Board of Directors** A fixed income in the form of money received monthly due to their position as members of the Company's Board of Directors, with the following provisions: » The salary of the President Director is determined using internal guidelines set by the SOE Minister as the authority of the Major/Controlling Shareholder; » The calculation of other Directors' salaries is 85% of the President Director's salary.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration Structure of the Board of Commissioners

- **Tunjangan Dewan Komisaris**
  Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa:
  - Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya;
  - Tunjangan Transportasi, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya sebesar 20% dari perhitungan honorarium;
  - Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.

- **Benefits for the Board of Commissioners**
  Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than Honorarium, in the form of:
  - Holiday allowance, given at most one time of fixed income per month every year;
  - Transportation Benefit, given once a month at 20% of the honorarium calculation;
  - Post-Employment Insurance, given under the condition that the Company pays the premium at a maximum of 25% of the annual honorarium.

- **Fasilitas Dewan Komisaris**
  Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang dapat berupa:
  - Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya dan pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*);
  - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.

- **Facilities for the Board of Commissioners**
  Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in conducting their duties, authorities, obligations, and responsibilities per the laws and regulations, which can be in the form of:
  - Medical facilities, given in the form of insurance membership/reimbursement of medical expenses and and medical health check-ups;
  - Legal Aid Facilities, given if necessary, in the event of actions for and on behalf of the position relating to the Company.

Struktur Remunerasi Direksi
Remuneration Structure of the Board of Commissioners

- **Tunjangan Direksi**
  Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:
  - Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya;
  - Tunjangan Perumahan, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya;
  - Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun.

- **Benefits for the Board of Directors**
  Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the Board of Directors other than Salary, in the form of:
  - Holiday allowance, given at most one time of fixed income per month every year;
  - Housing Benefit, given one time each month;
  - Operational Benefit, given one time each month;
  - Post-Employment Insurance, given under the condition that the Company pays the premium at a maximum of 25% of the annual honorarium.

- **Fasilitas Direksi**
  Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:
  - Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Faktor Jabatan;
  - Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*);
  - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.

- **Facilities for the Board of Directors**
  Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Directors in conducting their duties, authorities, obligations, and responsibilities per the laws and regulations, which can be in the form of:
  - Vehicle Facilities, one unit of the official vehicle is provided along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to their Position;
  - Medical facilities, given in the form of insurance membership/reimbursement of medical expenses;
  - Legal Aid Facilities, given if necessary, in the event of actions for and on behalf of the position relating to the Company.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration Structure of the Board of Commissioners

- **Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris**
  - » Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS, apabila:
    a. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
    b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;
    c. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan
    d. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.
  - » Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.
  - » Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
    – Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama;
    – Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara No. S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Pemberian Tantiem, Insentif, dan/atau Penghasilan dalam Bentuk Lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, anggota Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, berlaku sejak tahun buku 2025.

Struktur Remunerasi Direksi
Remuneration Structure of the Board of Commissioners

- **Tantiem/Insentif Kinerja Direksi**
  - » Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS, apabila:
  - » Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - » Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;
  - » Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan
  - » Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.
  - » Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
  - » Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut:
    – Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali;
    – Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Direktur lainnya sebesar 85% Tantiem/Insentif Kinerja gaji Direktur Utama.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Commissioners
• **Tantiem/Performance Incentive of the Board of Commissioners** » Tantiem is Income as an award given to members of the Board of Commissioners if they receive profits and do not have accumulated losses. The Company may provide Tantiem to members of the Board of Commissioners based on the GMS, if: a. The opinion issued by the auditor is Unqualified Opinion; b. The realized soundness level is at least equivalent to a BBB rating, excluding expenses/gains resulting from actions of previous SOE Directors and/or matters beyond the control of the SOE Directors; c. The KPI achievement is at least 80% (eighty percent), excluding factors beyond the control of the SOE Directors; and d. The condition of the respective SOE does not incur greater losses compared to the previous year for SOEs in a loss position, or does not shift from a profit position to a loss position, excluding factors beyond the control of the SOE Directors. » Performance Incentives are income in the form of awards given to members of the Board of Commissioners; » Tantiem/Performance Incentive Calculation for the Board of Commissioners are as follows: – The Calculation of Tantiem/Performance Incentive for the President Commissioner is 45% of the Tantiem/ Performance Incentive for the President Director; – The Calculation for other Commissioners is 90% of the Tantiem/Performance Incentive for the President Commissioner. Based on the Letter of the Head of the Danantara BPI Executive Agency No. S-063/DI-BP/VII/2025 dated 30 July 2025 concerning the Provision of Tantiem, Incentives, and/or Other Forms of Income to the Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs and SOE Subsidiaries, members of the Board of Commissioners of SOEs and SOE Subsidiaries are not permitted to receive tantiem, incentives (whether in the form of performance incentives, special incentives, and/or long-term incentives), and/or other forms of income linked to the Company's performance, effective from the 2025 financial year.	• **Tantiem/Performance Incentive of the Board of Directors** » Tantiem is income as an award given to members of the Board of Directors if they receive profits and do not have accumulated losses. The Company may provide Tantiem to members of the Board of Directors based on the determination of the GMS, » The opinion issued by the auditor is Unqualified (WTP); » The realization of the soundness rating is at least equivalent to a BBB rating, not taking into account losses/ profits due to actions by the previous Board of Directors of the SOE and/or beyond the control of the Board of Directors of the SOE; » The achievement of Key Performance Indicators (KPI) is at least 80%, not considering factors outside the control of the Board of Directors of the SOE; and » The condition of the SOE in question has not suffered increased losses compared to the previous year for SOEs in loss conditions, or the SOE has not turned to loss from a profit situation, not taking into account factors beyond the control of the Board of Directors of the SOE. » Performance Incentives, which are earnings awarded to members of the Board of Directors in recognition of improved performance, even if the company is still experiencing losses or accumulated losses. » The calculation of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors is as follows: – Tantiem/Performance Incentives for the President Director are determined using guidelines set by the SOE Minister as the representative of the Main Shareholder/Controller. – The calculation of Tantiem/Performance Incentives for other Directors is 85% of the President Director's Tantiem/Performance Incentives.
• Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, asuransi, dll)	• Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, asuransi, dll)
• No other components (concerning components such as nonperformance bonuses, stock options, insurance, etc.)	• No other components (concerning components such as nonperformance bonuses, stock options, insurance, etc.)

Selain struktur dan komponen di atas, Perusahaan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya. Perusahaan juga tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

In addition to the above structures and components, the Company does not provide remuneration in another form. the Company also does not have a stock option policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Hubungan antara Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Kinerja Perusahaan

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mempertimbangkan kinerja Perusahaan serta pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, guna memastikan keselarasan antara imbal jasa dengan nilai tambah yang dihasilkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang Dibayarkan Tahun 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, telah ditetapkan kebijakan terkait pembayaran tantiem atas kinerja Tahun Buku 2024 serta penetapan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2025.

Menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut, Perusahaan telah menyampaikan usulan penetapan gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta usulan tantiem/insentif kinerja atas kinerja Tahun Buku 2024, melalui Surat No. 030/EXT/PP/DU/2025 tanggal 17 Maret 2025 kepada Dewan Komisaris.

Sampai dengan akhir Tahun Buku 2025, Perseroan belum memperoleh persetujuan atau ketentuan lanjutan dari Kementerian BUMN/BP BUMN/Danantara, sehingga remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dibayarkan pada Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan remunerasi Tahun 2024.

Relationship between the Remuneration of the Board of Commissioners and Directors and Company Performance

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors consistently takes into account the Company's performance as well as the achievement of the established key performance indicators, in order to ensure alignment between the remuneration provided and the value added generated for shareholders and stakeholders.

Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for Financial Year 2024 held on 30 April 2025, policies were established regarding the determination and payment of tantiem for the performance of Financial Year 2024, as well as the determination of salaries/honoraria, facilities, and other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year 2025, with the details as follows:

1. Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Stock Shareholders to determine the amount of bonuses/performance incentives/special incentives for the 2024 Fiscal Year, as well as to determine honoraria, allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners for 2025; and
2. Granting authority and power to the Board of Commissioners, with prior written approval from Series A Dwiwarna Stock Shareholders, to determine the amount of bonuses/performance incentives/special incentives for the 2024 Fiscal Year, as well as to determine salaries, allowances, and facilities for the Board of Directors for 2025.

Following up on the resolution of the AGMS, the Company submitted a proposal for the determination of salaries/honoraria, facilities, and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year 2025, as well as a proposal for tantiem/performance incentives based on the performance of Financial Year 2024, through Letter No. 030/EXT/PP/DU/2025 dated 17 March 2025 to the Board of Commissioners.

As of the end of Financial Year 2025, the Company had not yet obtained approval or further provisions from the Ministry of SOEs/BP BUMN/Danantara; therefore, the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors paid in 2025 still refers to the remuneration provisions for 2024.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Remuneration Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2025
Board of Commissioners' Remuneration in 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Masa Menjabat di Tahun 2025 Term of Office in 2025	Penghasilan per Bulan Monthly Income		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	
Dhony Rahajoe Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	1 tahun penuh 1 full year	✓	✓	✓
Istiono Komisaris Independen Independent Commissioner		✓	✓	✓
Jaya Kesuma Komisaris Independen Independent Commissioner		✓	✓	✓
Pundjung Setya Brata Komisaris Independen Independent Commissioner		✓	✓	✓
Ernadhi Sudarman Komisaris Commissioner		✓	✓	✓
Hedy Rahadian Komisaris Commissioner		✓	✓	✓
Jumlah (Rp) **Total (Rp)**				

✓ = mendapatkan/dibayarkan; ✗ = tidak mendapatkan
✓ = received/paid; ✗ = did not receive

Remunerasi Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Remuneration in 2025

Direksi Board of Directors	Masa Menjabat di Tahun 2025 Term of Office in 2025	Penghasilan per Bulan Monthly Income			Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance
		Gaji Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Operasional Operational Allowance	
Novel Arsyad Direktur Utama President Director	1 tahun penuh 1 full year	✓	✓	✓	✓
Agus Purbianto Direktur Keuangan Director of Finance		✓	✓	✓	✓
Yul Ari Pramuraharjo Direktur Operasi bidang Infrastruktur Director of Infrastructure Operations		✓	✓	✓	✓

Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem/ Performance Incentive	Jumlah Remunerasi Total Remuneration (Rp)
✓	✓	✓	✓	✗	2.416.413.439
✓	✓	✓	✓	✗	2.737.161.961
✓	✓	✓	✓	✗	2.174.772.095
✓	✓	✓	✓	✗	2.146.176.000
✓	✓	✓	✓	✗	2.737.161.961
✓	✓	✓	✓	✗	2.737.161.961
					14.948.847.417

Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem/ Performance Incentive	Jumlah Remunerasi Total Remuneration (Rp)
✓	✓	✓	✓	✗	6.397.224.595
✓	✓	✓	✓	✗	5.487.140.906
✓	✓	✓	✓	✗	5.487.140.906

Direksi Board of Directors	Masa Menjabat di Tahun 2025 Term of Office in 2025	Penghasilan per Bulan Monthly Income			Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance
		Gaji Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Operasional Operational Allowance	
Yuyus Juarsa Direktur Operasi bidang Gedung Director of Building Operations	1 tahun penuh 1 full year	✓	✓	✓	✓
Tommy Wiranata Anwar Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal		✓	✓	✓	✓
I Gede Upeksa Negara Direktur Strategi Korporasi dan HCM Director of Corporate Strategy and HCM		✓	✓	✓	✓
Jumlah (Rp) **Total (Rp)**					

✓ = mendapatkan/dibayarkan; ✗ = tidak mendapatkan
✓ = received/paid; ✗ = did not receive

Perbandingan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 dan 2025

Comparison of the Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024 and 2025

Perihal Subject	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp)	Persentase Percentage (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3/2)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	14.948.847.417	16.440.879.112	(1.492.031.695)	(9,08)
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	31.352.247.313	37.358.130.637	(6.005.883.324)	(16,08)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors	46.301.094.730	53.799.009.749	(7.497.915.019)	(13,94)

Rasio Gaji

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Salary Ratio

Information on the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company is as follows:

Perbandingan Comparison	2025	2024	2024
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1 : 0,85	1 : 0,85	1 : 0,85
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1 : 0,45	1 : 0,45	1 : 0,45
Direktur Utama terhadap Komisaris President Director to Commissioner	1 : 0,41	1 : 0,41	1 : 0,41
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to Employee's highest salary	1 : 0,38	1 : 0,27	1 : 0,13

Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem/ Performance Incentive	Jumlah Remunerasi Total Remuneration (Rp)
✓	✓	✓	✓	X	5.487.140.906
✓	✓	✓	✓	X	4.246.800.000
✓	✓	✓	✓	X	4.246.800.000
					31.352.247.313

Perbandingan Comparison	2025	2024	2024
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to Employee's lowest salary	1 : 0,02	1 : 0,02	1 : 0,02
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan terendah Employee's Highest to Employee's lowest salary	1 : 0,07	1 : 0,07	1 : 0,15
Karyawan terendah terhadap Upah Minimum Regional Employee's lowest salary to Minimum Regional Wage	1 : 0,98	1 : 0,98	1 : 0,91

Yang dimaksud Karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Jabatan dengan *grade* 23, sementara Karyawan terendah adalah dengan *grade* 12.

The Employees' highest level in the table above is in the 23rd grade, while the Employees' lowest level is in the 12th grade.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Hingga akhir tahun 2025, PTPP tidak memiliki kebijakan terkait kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. PTPP juga tidak melaksanakan Program Opsi Kepemilikan Saham baik oleh Manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) maupun oleh Karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) untuk pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja.

Tidak diterapkannya kompensasi jangka panjang berbasis kinerja merupakan bagian dari kebijakan kehati-hatian Perusahaan serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Long-Term Performance-Based Compensation Policy

Until the end of 2025, PTPP does not have any policies related to performance-based long-term compensation. PTPP also does not carry out any Stock Option Programs, neither by the Management (Management Stock Option Program–MSOP) nor by Employees (Employee Stock Option Program–ESOP), for providing performance-based long-term compensation.

The absence of long-term performance-based compensation is part of the Company's prudential policy and remains in compliance with the applicable laws and regulations.

Pengungkapan Transaksi dan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan

Disclosure of Share Transactions and Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company and other companies is regularly disclosed through a share ownership register

saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada OJK paling lambat 10 hari sejak terjadinya transaksi. Demi menjaga independensi, Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memilikI saham Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam *Board Manual*.

of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors must inform the purchase and sale of securities transactions to OJK no later than ten days from the transaction. To maintain their independence, the Independent Commissioners are not allowed, either directly or indirectly, to possess the Company's shares as outlined in the Board Manual.

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan kepemilikan saham Perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Below is the data on the Company's shares possessed by the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as ownership of other companies over 5% by the Board of Commissioners and Board of Directors, which may create potential conflict in decision-making.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2025

Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of December 31, 2025

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Perusahaan (Kode Saham: PTPP) Company (Ticker Code: PTPP)	Perusahaan Lain > 5% Other Companies >5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Ernadhi Sudarman (Komisaris) (Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Direksi Board of Directors		
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	62.600 lembar; 0,00% 62,600 shares; 0.00%	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Perusahaan (Kode Saham: PTPP) Company (Ticker Code: PTPP)	Perusahaan Lain > 5% Other Companies >5%
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi bidang Gedung) (Director of Building Operations)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	Tidak memiliki saham PTPP Does not own PTPP shares	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	340.300 lembar; 0,00% 340,300 shares; 0.00%	Tidak memiliki saham Perusahaan Lain Does not own shares in other companies

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 hari sejak terjadinya transaksi.

Per OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 on the Ownership Report or Any Change in Share Ownership of a Public Company, each member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to submit information to the Company regarding ownership and any change in ownership of the Company's shares no later than three working days after the transaction occurs. Furthermore, the Company is required to submit a report on the transaction to OJK no later than 10 days after the transaction occurred.

Di sepanjang tahun 2025 terdapat perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berkenaan dengan hal tersebut, Perusahaan secara rutin bulanan melaporkan kepemilikan saham melalui keterbukaan informasi di pasar modal.

Throughout 2025, there was no change in the Company's share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors. In this regard, the Company routinely reports its share ownership every month through disclosure of information on the capital market.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliation between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang dan hak masing-masing.

The Major/Controlling Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors respect each other for the implementation of their respective duties, responsibilities, and authority following the laws and regulations and the Articles of Association. The Board of Commissioners and Board of Directors have work guidelines and procedures that include, among others, their respective responsibilities, obligations, authority, and rights.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak manapun. Independensi merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Hal tersebut penting agar pengelolaan Perusahaan dilakukan semata-mata untuk kepentingan mencapai tujuan Perusahaan.

In conducting their duties, the Board of Commissioners acted independently and free from any party's interests. The independence aspect needs to be observed to minimize the possibility of a conflict of interest. The Company's management must be conducted solely to achieve the Company's objectives.

Perusahaan berupaya menjaga Independensi Direksi dengan meminimalisir potensi adanya benturan kepentingan dari hubungan afiliasi yang meliputi hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham, hubungan kepengurusan dan hubungan kepemilikan saham pada Perusahaan lain.

The Company seeks to maintain the Independence of the Board of Directors by minimizing the potential for conflict of interest from affiliation, including family and financial relationships between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, shareholders, management relationships, and shareholder relations to other companies.

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah hubungan istimewa yang terjadi karena adanya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; serta hubungan keuangan antara Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi.

Affiliation means a blood relationship up to the third degree, either horizontally or vertically, or a relationship from marriage, and the financial relationship between the Major/Controlling Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors.

Transparansi hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/ Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Relationship transparency of affiliation of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/ Controlling Shareholders is available in the table below.

	Hubungan Afiliasi Affiliation		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali: Pemerintah Indonesia c.q Kementerian BUMN** Main/Controlling Shareholder: the Government of Indonesia c.q. the SOE Ministry
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Ernadhi Sudarman (Komisaris) (Commissioner)	✗	✗	✓
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	✗	✗	✓

	Hubungan Afiliasi Affiliation		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali: Pemerintah Indonesia c.q Kementerian BUMN Main/Controlling Shareholder: the Government of Indonesia c.q. the SOE Ministry
Direksi Board of Directors			
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	X	X	X
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	X	X	X
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	X	X	X
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi bidang Gedung) (Director of Building Operations)	X	X	X
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	X	X	X
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	X	X	X

✓ = terdapat adanya hubungan; X = tidak terdapat adanya hubungan
✓ = affiliated; X = not affiliated

Adanya hubungan afiliasi beberapa Dewan Komisaris dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali karena rangkap jabatan yang dimiliki pada beberapa kementerian/lembaga negara, sebagaimana dijelaskan pada bagian "Pengungkapan Rangkap Jabatan" di bawah ini.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

The affiliation between several members of the Board of Commissioners and the Government of Indonesia as the Major/Controlling Shareholder is due to concurrent positions held in several ministries/state institutions, as will be explained in "Concurrent Position Disclosure" section below.

Concurrent Position Disclosure of the Board of Commissioners and Board of Directors

Members of the Board of Commissioners must comply with the provisions of Article 24 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which regulates that:

1. A member of the Board of Commissioners may hold a concurrent position as a member of the Board of Directors at no more than two other Issuers or public companies and as a member of the Board of Commissioners at no more than two other Issuers or public companies;

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Untuk Direksi, Anggota Direksi Perusahaan tidak merangkap jabatan kecuali terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu bahwa anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan di atas.

2. If a member of the Board of Commissioners does not hold a position as a member of the Board of Directors, the said member may have a concurrent position as a member of the Board of Commissioners at no more than four other Issuers or Public Companies; and
3. A member of the Board of Commissioners may also serve as a committee member at a maximum of five committees at Issuers or Public Companies, in which the said member also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Board of Directors is not allowed to hold concurrent positions except concerning the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, where members of the Board of Directors may hold concurrent positions as:
- A member of the Board of Directors at no more than one other Issuer or Public Company;
- A member of the Board of Commissioners at no more than three other Issuers or Public Companies; and
- Committee members at no more than five committees at Issuers or Public Companies, in which the said Director also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

A concurrent position as referred to above may only be made to the extent that it is not contrary to other laws and regulations. If there are other laws and regulations governing the provisions on concurrent positions that differ from the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, stricter provisions apply.

Below is data on the concurrent position of the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 31, 2025, following the abovementioned provisions.

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management at other Company/Institution		
	Sebagai Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Direksi** As a Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✗	✗	✗
Ernadhi Sudarman (Komisaris) (Commissioner)	✗	✗	✓
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	✗	✗	✓
Direksi Board of Directors			
Novel Arsyad (Direktur Utama) (President Director)	✗	✗	✗
Agus Purbianto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	✗	✗	✗
Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) (Director of Infrastructure Operations)	✗	✗	✗
Yuyus Juarsa (Direktur Operasi bidang Gedung) (Director of Building Operations)	✗	✗	✗
Tommy Wiranata Anwar (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	✗	✗	✗
I Gede Upeksa Negara (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) (Director of Corporate Strategy and HCM)	✗	✗	✗

✓ = ada; ✗ = tidak ada
✓ = yes; ✗ = no

Penjelasan terkait rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

The explanations related to the concurrent position are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan Lain Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently as Independent Commissioner)	Tidak ada None
Istiono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak ada None
Jaya Kesuma (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak ada None
Pundjung Setya Brata (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak ada None
Ernadhi Sudarman (Komisaris) (Commissioner)	Penasihat Utama Menteri Transmigrasi (Agustus 2025-Sekarang). Principal Advisor to the Transmigration Minister (August 2025–Present).
Hedy Rahadian (Komisaris) (Commissioner)	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama Kementerian PUPR (2024-sekarang) Senior Road and Bridge Manager, Public Works and Housing Ministry (2024-present)
Direksi Board of Directors	
Tidak terdapat Direksi Perusahaan yang memiliki kepengurusan baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi maupun jabatan lainnya pada perusahaan/institusi lainnya. There are no Company Directors who hold management positions, whether as Board of Commissioners members, Directors, or other positions, in other companies or institutions.	

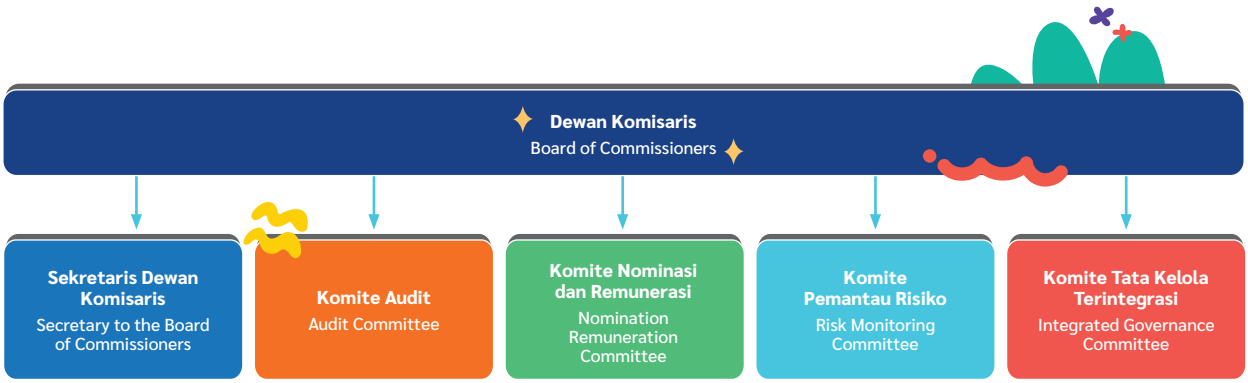
Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan seperti telah dijelaskan di atas tidak melanggar Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The concurrent positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as described above, do not violate OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk 5 (lima) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

To carry out its supervisory duties and functions, the Board of Commissioners has established three supporting organs: the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination Remuneration Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee.



Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan, untuk membantu kelancaran pelaksanaan kerja di antara para Anggota Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Riyuni Asih berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM/PP/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Secretary to the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is assisted by the Secretary to the Board of Commissioners, appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense to support seamless work implementation among members of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners has the duties and functions of carrying out administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties and is directly responsible to the Board of Commissioners. Moreover, the Secretary to the Board of Commissioners has a significant role in ensuring that the Board of Commissioners applies GCG principles following the best practices and the prevailing laws and regulations.

Term of Office

Per the State-Owned Enterprise Minister Regulation of PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary to the Board of Commissioners is three years at most and can be reappointed for two years at most without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss the official at any time.

The Secretary to the Board of Commissioners Official

The Secretary to the Board of Commissioners is currently held by Riyuni Asih based on the Board of Commissioners Decree No. 005/SK/KOM/PP/08/2025 dated August 15, 2025, on the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk.



Riyuni Asih

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Periode Jabatan
Term of Office

15 Agustus 2025 s.d 15 Agustus 2028, periode ke-1
August 15, 2025, to August 15, 2028, first term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Sleman, 23 Februari 1987 Born in Sleman, February 23, 1987	Usia 38 tahun 38 years old	Berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Pendidikan

- Master of Science (M.Sc.), Animal Science, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah (2012)
- Sarjana Peternakan (S.Pt), Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (2009)

Formal Education

- Master of Science (M.Sc.), Animal Science, Faculty of Animal Science, Gadjah Mada University (2012)
- Bachelor of Animal Science (S.Pt), Faculty of Animal Science, Gadjah Mada University (2009)

Pengalaman Kerja

- Pejabat Fungsional pada Asisten Deputi Bidang Energi, Minyak, dan Gas BP BUMN (2025-sekarang)
- Pejabat Fungsional pada Asisten Deputi Bidang Energi, Minyak, dan Gas KBUMN (2022-2025)
- Pejabat Fungsional pada Asisten Deputi Bidang Manajemen SDM Kemen KBUMN (2020-2022)
- Analis Kinerja BUMN pada Asisten Deputi Bidang Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan KBUMN (2019-2020)
- Analis Kinerja BUMN pada Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media KBUMN (2015-2019)
- Staf Sekretariat Dewan Komisaris, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2024-2025)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (2021-2024)
- Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2019-2021)
- Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara V (Persero) (2017-2019)

Work Experience

- Functional Officer at the Deputy Assistant for Energy, Oil, and Gas at BP BUMN (2025-present)
- Functional Officer at the Deputy Assistant for Energy, Oil, and Gas at SOE Ministry (2022-2025)
- Functional Officer at the Deputy Assistant for Human Resource Management at SOE Ministry (2020-2022)
- BUMN Performance Analyst at the Deputy Assistant for Construction, Facilities, and Transportation Infrastructure at SOE Ministry (2019-2020)
- BUMN Performance Analyst at the Deputy Assistant for Mining, Strategic Industries, and Media at SOE Ministry (2015-2019)
- Secretariat Staff to the Board of Commissioners, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2024-2025)
- Secretary to the Board of Commissioners of PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (2021-2024)
- Staff Member of the Board of Commissioners Secretariat of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2019-2021)
- Staff Member of the Board of Commissioners Secretariat of PT Perkebunan Nusantara V (Persero) (2017-2019)

Sertifikasi Profesi

- Certified Compliance Professional (CCP), LSP MKS (2025);
- Certified Human Resource Professional (CHRPE), GML Performance Consulting (2020); serta
- Sertifikasi Pengadaan Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) (2015).

Professional Certification

- Certified Compliance Professional (CCP), LSP MKS (2025);
- Certified Human Resource Professional Professional (CHRPE), GML Performance Consulting (2020); and
- Government Service Procurement Certification, Indonesian Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP RI) (2015).

Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangan Sekretaris Dewan Komisaris

▶ Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

a. Penyediaan informasi untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;

Responsibilities, Duties, and Authorities of the Secretary to the Board of Commissioners

▶ Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

a. Providing information for the duty implementation of the Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees;

b. Penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Komisaris baik yang bersifat rutin maupun non-rutin dengan berbagai pihak;
c. Pemantauan tindak lanjut dari setiap keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris; dan
d. Penyelenggaraan fungsi penghubung (*liaison officer*) internal Dewan Komisaris dan diantara Dewan Komisaris dengan Manajemen dan stakeholders perusahaan.

b. Organizing regular and non-regular meetings within the work environment of the Board of Commissioners with various parties;
c. Monitoring the follow-ups of every decision made by the Board of Commissioners; and
d. Performing liaison officer functions within the Board of Commissioners and between the Board of Commissioners and the Company's Management and Stakeholders.

▶ Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

a. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   1) Menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi;
   2) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing/topsheet*) Dewan Komisaris;
   3) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk menghadiri dan membuat risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
   4) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik berupa surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
   5) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   6) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris; dan
   7) Menyusun bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi bagian tugas/tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas berupa:
   1) Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
   2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   3) Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
   4) Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
c. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada:
   1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
   2) Mengkoordinasikan pembuatan kajian/*review* yang diperlukan Dewan Komisaris;

▶ Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

a. The Secretary to the Board of Commissioners has the duty of performing activities to assist them in carrying out its duties, namely:
   1) Scheduling Board of Commissioners Meetings and the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors;
   2) Preparing meetings, including the briefing/top sheet of the Board of Commissioners meetings;
   3) Taking minutes of the Board of Commissioners meetings following the Articles of Association, including attending and taking minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors;
   4) Administering Board of Commissioners documents, be it incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, or other documents;
   5) Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
   6) Drafting the Board of Commissioners Reports; and
   7) Drafting materials for the General Meeting of Shareholders (GMS) that fall under the duties/responsibilities of the Board of Commissioners.
b. Besides performing the duties as referred to in point a, the Secretary to the Board of Commissioners, as the head of the Secretariat of the Board of Commissioners, performs the following duties:
   1) Ensuring that the Board of Commissioners complies with the applicable regulations and implements GCG principles;
   2) Providing the information needed by the Board of Commissioners periodically or at any time when requested;
   3) Coordinating Committee members, if necessary, to expedite the implementation of the Board of Commissioners duties; and
   4) Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
c. Performing other tasks from the Board of Commissioners, including but not limited to:
   1) Coordinating the drafting of the Board of Commissioners Decrees;
   2) Coordinating the study/review needed by the Board of Commissioners;

3) Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perusahaan dan berkoordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris tersebut;
4) Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai pengawas Perusahaan; dan
5) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas tersimpan dengan baik di Perusahaan.

3) Assisting work visits/official travel of the Board of Commissioners to work units within the Company and coordinating with committees under the Board of Commissioners in preparing the report of the work visits/official travels of the Board of Commissioners;
4) Assisting the Board of Commissioners in meetings with regulatory parties or bank supervisory parties concerning the Board of Commissioners duties and responsibilities as the Company's supervisor;
5) To implement administrative order and good Corporate Governance, the Secretary to the Board of Commissioners is obligated to ensure that the activity implementation documents as referred to in point a above are archived well in the Company.

► Kewenangan Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan Manajemen terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris;
c. Melibatkan pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

► Authorities of the Secretary to the Board of Commissioners

In performing their duties, the Secretary to the Board of Commissioners has the following authority:
a. Accessing necessary Company documents, data, and information about the Company's employees, funds, assets, and resources;
b. Communicating directly with the Management regarding the duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners;
c. Involving the necessary independent parties to assist the implementation of duties (if necessary); and
d. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Competency Development for the Secretary to the Board of Commissioners

The Company has a policy on the competency development and improvement of the Secretary to the Board of Commissioners, carried out through various training and education fully funded by the Company.

Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Cybersecurity Foundations: Governance, Risk, and Compliance (GRC)	Jakarta, 3 Desember 2025 Jakarta, December 3, 2025	LinkedIn Learning
Certified Compliance Professional (CCP)	Jakarta, 4-7 November 2025 Jakarta, November 4–7, 2025	PPM Manajemen PPM Management
Menavigasi Risiko Keputusan Bisnis melalui *Business Judgment Rule* Navigating Business Decision Risks through the Business Judgment Rule	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	PTPP
OECD *Workshop: Enhancing Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Indonesia*	Jakarta, 20 Mei 2025 Jakarta, May 20, 2025	OECD
Seminar on Reform and Governance of State-owned Enterprises for Asian BRI Partner Countries - Republic of China	Beijing and Chengdu, 20 Februari-5 Maret 2025 Beijing and Chengdu, February 20–March 5, 2025	Ministry of Commers, People's Republic of China Ministry of Commerce, People's Republic of China

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris tercantum di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
   a. Mempersiapkan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2025;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2025 sesuai dengan ketentuan;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya selama tahun 2025;
   d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris tahun 2026;
   e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris, antara lain Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 dan laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris;
   f. Menyusun rancangan surat-surat Dewan Komisaris; serta
   g. Menyusun bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi bagian tugas/tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu untuk RUPS Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku Pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   c. Mengkoordinasikan Organ Pendukung Dewan Komisaris (Komite dan Tim Sekretariat Dewan Komisaris) dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; serta
   d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Mengkoordinir penyusunan rancangan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
   b. Mengkoordinir pembuatan kajian/reviu yang diperlukan Dewan Komisaris;

Duties Implementation Report in 2025

The duties of the Secretary to the Board of Commissioners are stated in the Board Manual and the Board of Commissioners Decree on the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners. Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out duties and functions, including the following:

1. Assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties, including:
   a. Preparing Board of Commissioners meetings, including Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors throughout 2025;
   b. Preparing minutes of Board of Commissioners Meetings, including Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors throughout 2025 per prevailing provisions;
   c. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents throughout 2025;
   d. Preparing Board of Commissioners work plans and budgets draft for 2026;
   e. Preparing the draft for Board of Commissioners reports, including the Supervisory Duty Report for the 2024 Fiscal Year and Board of Commissioners work visit reports;
   f. Preparing the draft for Board of Commissioners letters; and
   g. Preparing materials for the General Meeting of Shareholders (GMS), which is part of the duties/responsibilities of the Board of Commissioners, including the Company's Annual GMS for the 2024 Fiscal Year and the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. In addition to the duties mentioned above, the Secretary to the Board of Commissioners, as the Head of the Board of Commissioners Secretariat, carries out the following duties:
   a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and applies good corporate governance principles;
   b. Providing information required by the Board of Commissioners periodically or at any time upon request;
   c. Coordinating the Supporting Bodies of the Board of Commissioners (Committees and Secretariat of the Board of Commissioners), to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
   d. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
3. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners, including:
   a. Coordinating the preparation of draft Board of Commissioners' Decrees;
   b. Coordinating the preparation of studies/reviews required by the Board of Commissioners;

c. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perusahaan dan berkoordinasi dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris tersebut; serta
d. Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai pengawas Perusahaan.

c. Accompanying the Board of Commissioners on working visits/business trips to operational units within the Company and coordinating with Committees under the Board of Commissioners in preparing reports on such work visits/business trips;

d. Accompanying the Board of Commissioners in meetings with regulators or supervisory bodies related to the duties and obligations of the Board of Commissioners as the Company's supervisor.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/KOM/PP/11/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Penetapan Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Remuneration Policy

The Remuneration Policy of the Secretary to the Board of Commissioners refers to the Board of Commissioners Decree No. 008/SK/KOM/PP/11/2025 dated November 28, 2025, on the Determination of Income for Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk.



Komite Audit

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.

Penunjukkan Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat. Anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen luar Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Wajib memahami bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan perencanaan strategis, kewenangan pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban pada Perusahaan;
3. Wajib memenuhi kode etik yang ditetapkan Perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
5. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif;
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
7. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang Akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis Perusahaan;
8. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain pada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
9. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

Audit Committee

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners that functions to assist the Board of Commissioners in performing its duties, which are monitoring the Board of Directors in managing the Company and advising the Board of Directors per the SOE Minister Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities in SOEs.

The Audit Committee is appointed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the duty implementation and supervisory functions of the Board of Commissioners according to the Board of Commissioners Decree.

Audit Committee Member Qualifications

All Committee members have a high level of commitment and integrity, the abilities and expertise in their respective fields to support the implementation of sound governance. The Audit Committee members, particularly from outside the Company, must meet the following requirements:

1. Having a high level of integrity, capability, relevant knowledge and experience in supervision/inspection;
2. Must understand the Company's business, particularly in relation to strategic planning, decision-making authority, delegation of authority, and accountability mechanisms within the Company;
3. Must comply with the code of conduct established by the Company;
4. Must not have personal interests or affiliations that could create negative impacts or conflicts of interest with the Company;
5. Able to work and communicate effectively;
6. Able to allocate sufficient time to fulfill their duties;
7. At least one member of the Audit Committee must have an independent background or expertise in accounting or finance, and at least one member must have knowledge of the Company's industry/business;
8. Must not be affiliated with a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Firm, or any other party providing insurance, non-insurance, appraisal, and/or consulting services to the Company within the last six months;
9. Must not be an individual who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for an Independent Commissioner;
10. Must not directly or indirectly own shares in the Company;

11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
12. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut; dan
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

11. If an Audit Committee member acquires Company shares, either directly or indirectly, as a result of a legal event, they must transfer those shares to another party within a maximum period of six months from the date of acquisition;
12. Must not be affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Company's major shareholders; and
13. Must not have any direct or indirect business relationships related to the Company's operations.

Masa Jabatan

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a term of up to three years for members who are not part of the Board of Commissioners. They may be reappointed for only one additional term of two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2025

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, OJK dan Bursa Efek. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

- 1 (satu) orang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen;
- 1 (satu orang Sekretaris yang berasal dari anggota Dewan Komisaris; dan
- 2 (dua) Anggota lainnya berasal dari pihak di luar Emiten atau Perusahaan Publik (EPP).

Di sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Komite Audit.

Total Members, Composition, and Structure of the Audit Committee in 2025

The composition, membership requirements, expertise, and independence of the Audit Committee members comply with applicable laws, OJK regulations, and Stock Exchange provisions. The Audit Committee consists of:

- One Chairperson, who is an Independent Commissioner;
- One Secretary, who is a member of the Board of Commissioners; and
- Two other members from outside the Issuer or Public Company (EPP).

Throughout 2025, there were no changes to the Audit Committee's composition or structure.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2025

Audit Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Istiono	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Head of Audit Committee/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/ PP/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PP (Persero) Tbk. Board of Commissioners Decree No. 001/SK/KOM/ PP/04/2022 on the Dismissal and Appointment of the Head of Audit Committee of PT PP (Persero) Tbk.	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner	
Pundjung Setya Brata	Anggota Komite Audit/Komisaris Independen Audit Committee Member/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/ SK/KOM/ PP/05/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk. Board of Commissioners Decree No. 003/ SK/KOM/ PP/05/2024 on the Dismissal and Appointment of the Audit Committee Members of PT PP (Persero) Tbk.	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner	

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Handoko Tripriyono	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Member/ Independent Party	No. 001/SK/KOM/PP/1/2023 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk. Board of Commissioners Decree No. 001/SK/KOM/ PP/1/2023 on the Appointment of the Audit Committee Members of PT PP (Persero) Tbk.	9 Januari 2023 s.d 8 Januari 2026 January 9, 2023 to January 8, 2026	Ke-2 Second Term
Aria Farah Mita	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk No. 004/SK/KOM/PP/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk. Board of Commissioners Decree No. 003/ SK/KOM/ PP/05/2024 on the Dismissal and Appointment of the Audit Committee Members of PT PP (Persero) Tbk.	25 Juni 2024 s.d 25 Juni 2027 June 25, 2024 to June 25, 2027	Ke-1 First Term

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members



Istiono

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Istiono dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the Audit Committee, Istiono, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Pundjung Setya Brata

Anggota Komite Audit/Komisaris Independen
Member of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Anggota Komite Audit Pundjung Setya Brata dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Pundjung Setya Brata, Member of the Audit Committee, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Handoko Tripriyono, Ak., CPA

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committee/Independent Party

Periode Jabatan
Term of Office

9 Januari 2023 s.d 8 Januari 2026, perpanjangan masa tugas periode ke-2
January 9, 2023, to January 2026, extension of the 2nd term

Data Pribadi / Personal Data				
	Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Banjar, 2 September 1982 Born in Banjar, September 2, 1982	Usia 43 tahun 43 years old	Berdomisili Tangerang, Banten, Indonesia Domiciled in Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan

- Pendidikan profesi di Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) (2009);
- Sarjana Terapan (S.Tr.) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2006);
- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2003).

Formal Education

- Professional education in Professional Accounting Education (PPAk) at the Indonesian Institute of Business and Informatics (IBII) (2009);
- Bachelor of Applied Science (S.Tr.) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) (2006);
- Diploma (D3) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) (2003).

Pengalaman Kerja

- Partner, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2013-present)
- Manager, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2010-2012)
- Senior Auditor, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2007-2010)
- Junior Auditor, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2005-2007)
- General Audit, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2013)
- General Audit, ASEAN Centre for Energy (ACE) (2012-2013)
- Accounting Service (Preparation of Accounting Policies), PT Indofarma (Persero) (2012)
- Accounting Service (Preparation of Accounting Policies), PT Dok Kodja Bahari (Persero) (2012)
- Accounting Service (Preparation of Accounting SOP for SAP Accounting System), Lembaga Penjamin Simpanan (2012)
- General Audit, PT Bintan North Star Resorts (2012)
- Asset Reconciliation, PT Bank Commonwealth (2012)
- General Audit, PT BCI Asia (2009-2012)
- General Audit, KSO Timah – Sarana Karya (2009-2012)
- General Audit, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2009-2013)
- Audit Committee Member (Upon Agreed Procedure), PT Surveyor Indonesia (Persero) (2010)
- General Audit, PT Sarana Karya (Persero) (2009)
- General Audit, Elnusa Bangkanai Energy Ltd (2004-2009)
- General Audit, PT Pindad (Persero) (2008)
- General Audit, PT Elnusa (2005)

Work Experience

- Partner, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2013-present)
- Manager, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2010-2012)
- Senior Auditor, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2007-2010)
- Junior Auditor, KAP Ghazali Sahat & Rekan (2005-2007)
- General Audit, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2013)
- General Audit, ASEAN Centre for Energy (ACE) (2012-2013)
- Accounting Service (Preparation of Accounting Policies), PT Indofarma (Persero) (2012)
- Accounting Service (Preparation of Accounting Policies), PT Dok Kodja Bahari (Persero) (2012)
- Accounting Service (Preparation of Accounting SOP for SAP Accounting System), Lembaga Penjamin Simpanan (2012)
- General Audit, PT Bintan North Star Resorts (2012)
- Asset Reconciliation, PT Bank Commonwealth (2012)
- General Audit, PT BCI Asia (2009-2012)
- General Audit, KSO Timah – Sarana Karya (2009-2012)
- General Audit, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2009-2013)
- Audit Committee Member (Upon Agreed Procedure), PT Surveyor Indonesia (Persero) (2010)
- General Audit, PT Sarana Karya (Persero) (2009)
- General Audit, Elnusa Bangkanai Energy Ltd (2004-2009)
- General Audit, PT Pindad (Persero) (2008)
- General Audit, PT Elnusa (2005)

Sertifikasi Profesi

- Sertifikasi Risk Management, ERMA (2024); serta
- Sertifikat Indonesia Internal Auditor Practitioner, IIA Indonesia (2023).

Professional Certification

- Risk Management Certification, ERMA (2024); and
- Indonesia Internal Auditor Practitioner Certificate from IIA Indonesia (2023)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Position

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Handoko Tripriyono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Handoko Tripriyono is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.



Dr. Aria Farah Mita, MSM, CPA, CA.

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committee/Independent Party

Periode Jabatan
Term of Office

25 Juni 2024 s.d. 25 Juni 2027, periode ke-1
June 25, 2024, to June 25, 2027, 1st Term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jakarta, 2 Maret 1978 Born in Jakarta, March 2, 1978	Usia 47 tahun 47 years old	Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Pendidikan

- Doktor (S3) Akuntansi di Universitas Indonesia (2015);
- Magister (S2) Corporate Finance di Universitas Indonesia (2009);
- Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Indonesia (1999).

Formal Education

- Doctorate in Accounting from the University of Indonesia (2015);
- Master of Corporate Finance from the University of Indonesia (2009);
- Bachelor of Accounting from the University of Indonesia (1999).

Pengalaman Kerja

- Tim Teknikal Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) (2021-sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Airnav (2020-2024)
- Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2020)
- Partner, IFRS Advisory Services di RSM Indonesia (2016-2021)
- Partner, IFRS Advisory Services di RSM Indonesia (2010-2011)
- Asisten Direktur - Finance Universitas Indonesia (2009)
- Manajer Keuangan Universitas Indonesia (2004-2008)
- Senior Executive Indonesian CPA The Indonesian Institute of Accountant (IAI) (2001-2004)
- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2001-sekarang)
- Auditor Ernst & Young Indonesia (EY) (1999-2001)

Work Experience

- Technical Team Member, National Committee on Governance Policy (KNKG) (2021-present)
- Audit Committee Member, PT Airnav (2020-2024)
- Audit Committee Member, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2020)
- Partner, IFRS Advisory Services, RSM Indonesia (2016-2021)
- Partner, IFRS Advisory Services, RSM Indonesia (2010-2011)
- Assistant Director - Finance, Universitas Indonesia (2009)
- Finance Manager, Universitas Indonesia (2004-2008)
- Senior Executive, Indonesian CPA - The Indonesian Institute of Accountants (IAI) (2001-2004)
- Permanent Lecturer, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2001-present)
- Auditor, Ernst & Young Indonesia (EY) (1999-2001)

Sertifikasi Profesi

- Certified Public Accountant (CPA), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2008);
- Chartered Accountant (CA), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2013);
- Certified Audit Committee Practitioner (CACP), Ikatan Komite Audit Indonesia (2021);
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), BNSP (2019 dan 2023); serta
- Certificate in Business Valuation (CBV), ACCA dan IAPI (2019).

Professional Certification

- Certified Public Accountant (CPA) from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (2008);
- Chartered Accountant (CA) from the Institute of Indonesia Chartered Accountants (2013);
- Certified Audit Committee Practitioner (CACP) from the Indonesian Audit Committee Association (2021);
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from BNSP (2019 and 2023); and
- Certificate in Business Valuation (CBV) from ACCA and IAPI (2019).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan:
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2001-sekarang), dan Staf Ahli di Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) (2021-sekarang).

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company:
Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2001-present) and Expert Staff at the National Committee on Governance Policy (KNKG) (2021-present)

Hubungan Afiliasi

Aria Farah Mita tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Aria Farah Mita is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan menyatakan independensinya bahwa mereka senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau tekanan apapun. Hal itu tercermin dengan adanya keberadaan Komisaris Independen di dalam keanggotaan Komite Audit yakni pihak independen yang berasal dari luar Perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris maupun Direksi. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Aspek independensi Komite Audit adalah:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
   - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama;
   - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

Independence of the Audit Committee

All Audit Committee members of the Company declare their independence that they consistently work professionally, independently, objectively, and free from any intervention or pressure. Their independence is reflected in the existence of Independent Commissioners in the Audit Committee membership, independent parties from outside the Company with no financial and/or family relationship with the Majority Shareholders, the Board of Commissioners, or the Board of Directors. The Company's Audit Committee membership has fulfilled the requirements outlined in POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.

Aspects of the Audit Committee's independence are:

1. Not working at the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other parties that provide audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company within the last six months before being appointed by the Commissioner;
2. Not a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Company within the last six months before being appointed by the Commissioner, except for the Independent Commissioner;
3. Not owning shares either directly or indirectly in the Company. If a member of the Audit Committee acquires shares as a result of a legal event, then within a maximum period of six months after the acquisition, the shares must be transferred to another Party;
4. Not having:
   - Familial relationship by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders;
   - Direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.

Transparency of the Audit Committee's independence is shown in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspects	Istiono	Pundjung Setya	Handoko Tripriyono	Aria Farah Mita
Karyawan aktif Perusahaan An active employee of the Company	X	X	X	X
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris Works at a Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other Party that provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within the last six months before being appointed by the Commissioner	X	X	X	X

Aspek Independensi Independence Aspects	Istiono	Pundjung Setya	Handoko Tripriyono	Aria Farah Mita
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen Is a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Issuer or Public Company within the last six months before being appointed by the Commissioner, except the Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Has a family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholders	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Has a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business	✗	✗	✗	✗

✓ = ada; ✗ = tidak ada
✓ = yes; ✗ = no

Surat Pernyataan Independensi Aria Farah Mita
Independent Statement Letter of Aria Farah Mita



Surat Pernyataan Independensi Handoko Tripriyono
Independent Statement Letter of Handoko Tripriyono



Untuk surat pernyataan independensi Ketua Komite Audit Istiono dan Anggota Komite Audit Pundjung Setya Brata dapat dilihat pada bagian "Komisaris Independen" di bab ini.

Please refer to the "Independent Commissioner" section of this chapter for the independence statement letters of the Chairman of the Audit Committee, Istiono, and the Member of the Audit Committee, Pundjung Setyo Brata.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (*Charter*) Komite Audit No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen. Piagam Komite Audit menguraikan tentang:

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 dated January 23, 2024, approved by the Board of Commissioners, which is used as a guideline and work order for the Audit Committee members in carrying out their duties and responsibilities professionally and independently. The Audit Committee Charter outlines:

1. Nota Kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Pembentukan Komite Audit Perusahaan;
2. Pendahuluan;
3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit;
4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit;
5. Masa Tugas;
6. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit;
7. Tata Cara dan Prosedur Kerja;
8. Wewenang Komite Audit;
9. Rapat Komite Audit;
10. Pelaporan;
11. Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Dugaan pelanggaran Terkait Laporan Keuangan;
12. Penilaian Kerja; dan
13. Pakta Integritas.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit juga wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang mengatur tentang integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi anggota Komite Audit.

1. Memorandum of Agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the Establishment of the Company's Audit Committee;
2. Introduction;
3. Audit Committee Structure and Membership;
4. Audit Committee Membership Requirements;
5. Term of Office;
6. Audit Committee Duties and Responsibilities;
7. Work Conduct and Procedures;
8. Audit Committee Authorities;
9. Audit Committee Meetings;
10. Reporting;
11. Handling of Complaints and Reporting of Alleged Violations Related to Financial Statements;
12. Work Assessment; and
13. Integrity Pact.

In performing their duties, Audit Committee members must also comply with the Audit Committee Code of Conduct, which regulates their integrity, objectivity, confidentiality, and competence.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal dan Bursa Efek, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi 3 (tiga) bidang yakni: laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola Perusahaan (*corporate governance*) dan pengawasan Perusahaan (*corporate control*).

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee performs its functions as stipulated in the provisions of laws and regulations in capital markets and the Stock Exchange. It is guided by the Audit Committee Charter. In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently.

The Audit Committee's duties and responsibilities generally include financial reporting, corporate governance, and corporate control.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Scope of Duties and Responsibilities of the Audit Committee



Penjelasan masing-masing bidang tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

The explanation for each area of duties and responsibilities is as follows:

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities	Keterangan Description
Laporan Keuangan Financial Reporting	• Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP. • Memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perusahaan. • Memastikan manajemen Perusahaan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP. • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perusahaan dan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Dalam menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan, Komite Audit Perusahaan dapat mempertimbangkan: » Independensi AP dan/atau KAP, termasuk orang dalam KAP tersebut; » Ruang lingkup audit; » Imbalan jasa audit; » Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP; » Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik; » Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP; » Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan » Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya (Apabila ada). • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, evaluasi tersebut dilakukan melalui: » Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; » Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; » Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan » Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. • Supervise the implementation of audits and monitor the results of audit findings conducted by AP and/or KAP. • Ensure that the AP and/or KAP immediately communicate significant matters/findings to the Company's Audit Committee to be submitted to the Company's Board of Commissioners. • Ensure that the Company's management follows up on the AP and/or KAP findings. • Provide an independent opinion in case of a difference between the Company's management and AP and/or KAP for the services provided. • Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of AP and/or KAP to provide audit services on annual historical financial information. In preparing recommendations to the Company's Board of Commissioners, the Company's Audit Committee may consider: » Independence of the AP and/or KAP, including the person in the KAP; » The scope of the audit; » Audit fees; » Expertise and experience of the AP and/or KAP and the audit team of the KAP; » Audit methodologies, techniques, and tools used by the Public Accountant Firm; » The benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of AP and/or KAP and the audit team from KAP; » Potential risks of using audit services by the same KAP consecutively for a long period; and » The results of evaluating the implementation of the provision of audit services by AP and/or KAP in the previous period (if any). • Evaluate the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by AP and/or KAP. The evaluation is carried out through: » Evaluation of the suitability of the audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards; » Adequacy of fieldwork time; » Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling; and » Recommendations for improvements provided by the AP and/or KAP.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities	Keterangan Description
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	• Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; • Memastikan telah terdapat prosedur *evaluasi* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; • Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan serta penanganan pengaduan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan *Whistle Blowing System* (WBS). • Provide recommendations on improving the management control system and its implementation; • Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company; • Perform duties related to risk management as stipulated in laws and regulations; • Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company and handling complaints concerning violations related to Whistleblowing System (WBS) reporting.
Pengawasan Perusahaan Corporate Control	• Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal; • Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal; • Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; • Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan. • Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors; • Assess the implementation of activities and audit results carried out by internal and external auditors; • Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners; • Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Authorities of the Audit Committee

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authority:

- Access the Company's documents, data, and information about employees, funds, assets, and resources required about the duties and functions of the Audit Committee;
- Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
- Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan *Charter* Komite Audit No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 tanggal 23 Januari 2024, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities in Audit Committee Membership

Based on the Audit Committee Charter No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 dated January 23, 2024, the scope of duties of each Audit Committee Member is as follows:

Istiono

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen | Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

Mengkoordinir tugas anggota komite audit bidang operasional dan komite audit bidang keuangan dan administrasi.	Coordinate the duties of audit committee members in the fields of operations, finance, and administration.

Pundjung Setya Brata

Anggota Komite Audit/Komisaris Independen | Member of the Audit Committee/Independent Commissioner

Bertindak sebagai sekretaris komite, yaitu menyampaikan notulen rapat dan hasil kajian Komite Audit.	Acting as committee secretary, which involves delivering meeting minutes and the results of the Audit Committee's reviews.

Handoko Tripriyono

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

1. Melakukan *review* kebijakan akuntansi dan memantau sesuatu yang dijadikan *second opinion* oleh manajemen tentang masalah akuntansi yang signifikan dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijakan tersebut; 2. Meneliti laporan keuangan (*financial statement*) yang diterbitkan secara berkala (laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan), opini auditor dan *management letters;* 3. Melakukan *review* laporan keuangan untuk lembaga regulator; 4. Hal yang berkaitan dengan Auditor Eksternal, yaitu: Penunjukan Auditor, perkiraan biaya audit, jadwal kunjungan Auditor, koordinasi dengan SPI, pengawasan terhadap hasil audit, menilai pelaksanaan pekerjaan auditor, melakukan *review* dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor dan hal lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris; 5. Menilai kebijakan Perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan dan menindaklanjuti terhadap perbuatan yang merugikan Perusahaan; 6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya; 7. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memenuhi kebutuhan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan kepada Pemegang Saham; 8. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, kecurangan dan perbuatan yang merugikan Perusahaan; 9. Memonitor penyelesaian sengketa yang menyangkut *Corporate Governance* dan Perusahaan menjadi salah satu pihak terkait di dalamnya; 10. Mendapatkan laporan SPI atas hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan lainnya.	1. Review accounting policies and monitor the matters that the management refers to as second opinions regarding significant accounting issues and decisions related to those policies; 2. Examine financial statements published periodically (quarterly reports, semester reports, annual reports), auditor opinions, and management letters; 3. Review financial statements for regulatory agencies; 4. Matters relating to the External Auditor, namely the Appointment of Auditors, audit cost estimates, Auditor visit schedules, coordination with SPI, supervision of audit results, assessing the implementation of auditor work, reviewing and evaluating factors that affect auditor independence, and other matters ordered by the Board of Commissioners; 5. Assess the Company's policies related to compliance with applicable laws and regulations, ethics, conflict of interest, and follow-up on actions that harm the Company; 6. Provide recommendations on improving the Company's management control system and its implementation; 7. Ensure that there is a review procedure that meets the needs of the information issued by the Company to Shareholders; 8. Examine important cases related to conflict of interest, fraud, and actions that harm the Company; 9. Monitor the settlement of disputes involving Corporate Governance in which the Company is one of the parties involved; 10. Obtain SPI's report on the results of the Corporate Governance examination and other findings.

Aria Farah Mita

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

1. Melakukan *review* pelaksanaan kegiatan operasional, hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan SPI; 2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian kecukupan dan efektivitas pengawasan; 3. Melakukan *review* pengawasan intern dalam hal rencana kerja audit, *budget*, laporan, dan sebagainya; 4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian kecukupan dan efektivitas sarana dan prasarana kerja; 5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;	1. Reviewing the implementation of operational activities, the results of audits conducted by External Auditors and SPI; 2. Examining and assessing the adequacy and effectiveness of supervision; 3. Reviewing internal supervision in terms of audit work plans, budgets, reports, and so forth; 4. Examining and assessing the adequacy and effectiveness of work facilities and infrastructure; 5. Identifying matters that require the Board of Commissioners' attention;

Aria Farah Mita

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

6. Mempelajari dan menilai kebijakan manajemen risiko serta membahasnya dalam rangka mengantisipasi kerugian dan memaksimalkan kesempatan yang terbuka;
7. Mempelajari dan menilai kebijakan penerapan IT, penerapan Mutu dan K-3 serta pengadaan barang dan jasa di Perusahaan;
8. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja Perusahaan terhadap RKAP untuk Induk dan Entitas Anak secara periodik; dan
9. Melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Studying and assessing risk management policies and discussing them to anticipate losses and maximize opportunities;
7. Studying and assessing IT implementation policies, Quality and OHS implementation, as well as procurement of goods and services in the Company;
8. Periodically monitoring and evaluating the Company's performance achievement compared to the RKAP for the Parent Entity and Subsidiaries; and
9. Implementing other matters assigned by the Board of Commissioners if they are within their scope of duties and obligations based on the provisions of applicable laws and regulations.

Hubungan Kerja Komite Audit

Working Relationship of the Audit Committee



Hubungan kerja Komite Audit dengan Auditor Internal adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas Auditor Internal;
b. Memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor serta Piagam Auditor Internal *(Internal Audit Charter);*
c. Melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang terkait pelaksanaan tugas-tugas pengendalian intern khususnya dalam kaitannya dengan Komite Audit.

The working relationship between the Audit Committee and the Internal Auditor is as follows:

a. Evaluate the independence, objectivity, and effectiveness of the Internal Auditor;
b. Monitor compliance with the Code of Conduct for Professional Auditors and the Internal Audit Charter;
c. Conduct activities and coordination related to implementing internal control tasks, especially regarding the Audit Committee.

Hubungan kerja Komite Audit dengan Auditor Eksternal sebagai berikut:

a. Mengevaluasi sistem penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Auditor Eksternal dengan memperhatikan aspek independensi, objektivitas dan efektivitas;
b. Mengevaluasi tujuan dan ruang lingkup audit yang dilakukan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa semua risiko penting yang dihadapi Perusahaan sudah dikaji dalam proses audit dan tidak ada pembatasan ruang lingkup audit;
d. Mengevaluasi pelaksanaan audit dengan memperhatikan aspek-aspek independensi, objektivitas dan efektivitas;
e. Melakukan komunikasi dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen untuk membahas sistem pengendalian intern dan mengenai kewajaran dan ketepatan laporan keuangan.

The working relationship between the Audit Committee and the External Auditor is as follows:

a. Evaluate the system of appointment, reappointment, and dismissal of External Auditors about aspects of independence, objectivity and effectiveness;
b. Evaluate the objectives and scope of the audit conducted;
c. Evaluate the audit implementation to ensure that all important risks faced by the Company have been assessed in the audit process and that there are no restrictions on the scope of the audit;
d. Evaluate the audit implementation by regarding the aspects of independence, objectivity, and effectiveness;
e. Communicate with the external auditor without the presence of management to discuss the internal control system and the fairness and accuracy of the financial statements.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Competency Development for the Audit Committee

The Company facilitates the implementation of development programs for the Audit Committee to improve the competence of its members. These programs are expected to impact the committee's productivity and effectiveness positively.

Komite Audit Audit Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Istiono dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Istiono participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Pundjung Setya Brata dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Pundjung Setya Brata participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perusahaan secara rutin menggelar rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan sebagaimana telah diatur di dalam No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 tanggal 23 Januari 2024. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Audit Perusahaan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Di tahun 2025, Komite Audit melakukan 12 kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dapat dilihat di bawah ini.

Audit Committee Meetings

The Company's Audit Committee regularly holds internal meetings at least once a month as stipulated in No. 01/PIAGAM/KOM/PP/01/2024 dated January 23, 2024. The decision-making method in the Company's Audit Committee meetings is based on deliberation for consensus. Each Audit Committee meeting is outlined in the meeting minutes, which includes any dissenting opinions, signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

In 2025, the Audit Committee conducted 12 meetings, with attendance and agenda recapitulation as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat

Recapitulation of Audit Committee Attendance at Audit Committee Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Istiono (Ketua) (Chairman)	12	12	-	100
Pundjung Setyo Brata (Anggota) (Member)	12	12	-	100
Handoko Tripriyono (Anggota) (Member)	12	12	-	100
Aria Farah Mita (Anggota) (Member)	12	12	-	100
Rata-rata **Average**				**100**

Beberapa agenda dalam Rapat Komite Audit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan kinerja perusahaan per triwulan selama tahun 2025;
2. Rapat evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024;
3. Rapat pembahasan *Contigency Plan* tahun 2025;
4. Rapat pembahasan RKAP tahun 2026;
5. Rapat pembahasan pelaksanaan audit tahun buku 2025; serta
6. Rapat pembahasan aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris tahun 2025.

Several items on the Audit Committee's agenda can be described as follows:

1. Quarterly company performance review meetings for 2025;
2. Evaluation meeting on the audit implementation by the Public Accounting Firm for the 2024 fiscal year;
3. Meeting to discuss the 2025 Contingency Plan;
4. Meeting to discuss the 2026 RKAP;
5. Meeting to discuss the audit implementation for the 2025 fiscal year; and
6. Meeting to discuss corporate actions that require the approval of the Board of Commissioners in 2025.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2025

Berikut adalah daftar kegiatan rutin tahunan Komite Audit Perusahaan yang telah dijalankan di tahun 2025:

» Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Kerja
Sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun Buku 2024, sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Duties and Activities in 2025

The following is a list of annual routine activities of the Company's Audit Committee that have been carried out in 2025:

» Implementation and Realization of the Work Plan
Throughout 2025, the Audit Committee has carried out the activities set out in the Audit Committee Work Plan for Fiscal Year 2025, as follows:

No	Program Kerja Tahun 2025 Work Program in 2025	Realisasi Realization	Capaian Achievement
1	Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan Monitoring, advice on the implementation of applicable regulations and legislation for the Company	Februari 2025 February 2025	100,00%
2	Monitoring, saran atas Kinerja Perusahaan Monitoring, advice on Company Performance	Tiap bulan selama tahun 2025 Every month throughout 2025	100,00%
3	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Audit Committee Report to the Board of Commissioners	Maret 2025 March 2025	100,00%

No	Program Kerja Tahun 2025 Work Program in 2025	Realisasi Realization	Capaian Achievement
4	Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS) dan system pengelolaan gratifikasi Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS), and gratification management system	Juni 2025 June 2025	100,00%
5	Pengawasan Kebijakan Perusahaan Supervision of Company Policies	Maret 2025 March 2025	100,00%
6	Pengawasan Ekternal/KAP External Supervision/KAP	Februari 2025 February 2025	100,00%
7	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPS dan RUPSLB Opinions and Responses to matters discussed in the AGMS and EGMS	April 2025 April 2025	100,00%
8	Monitoring, saran atas realisasi Program Kerja Perusahaan Monitoring, advice on the implementation of the Company's Work Program	Per Triwulan selama tahun 2025 Quarterly throughout 2025	100,00%
9	Monitoring, saran dan persetujuan rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action* Monitoring, advice, and approval of Investment, Business Development, and Corporate Action plans	April 2025 April 2025	100,00%
10	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKAP 2025 Advice and approval on the preparation of the 2025 RKAP	Januari 2025 January 2025	100,00%
11	Laporan Manajemen Management Reports	Per Triwulan selama tahun 2025 Quarterly throughout 2025	100,00%
12	Peninjauan Lapangan Field Reviews	Oktober 2025 October 2025	100,00%
13	Tindak lanjut rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris Follow up on recommendations and directives from the Board of Commissioners	Per Triwulan selama tahun 2025 Quarterly throughout 2025	100,00%
14	*Self Assessment*	Desember 2025 December 2025	100,00%

» Rekomendasi Tahun 2025

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

» Recommendations in 2025

As part of its duties and responsibilities, the Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners related to its areas of responsibility. Throughout 2025, the recommendations given by the Audit Committee are as follows:

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	01/KA/DKOM/01/2025	8 Januari 2025 January 8, 2025	Telaah Bersama Komite Audit & Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi dan Remunerasi atas Permohonan Kembali Usulan Persetujuan Indikator *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan Tahun 2024 Joint Review by the Audit Committee & GCG Committee, Risk Monitoring, Nomination and Remuneration on the Request for Re-approval of the Company's Key Performance Indicators (KPIs) for 2024

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
2	02/KA/DKOM/01/2025	13 Januari 2025 January 13, 2025	Telaah Komite Audit atas Laporan Hasil *Quality assurance Review* Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2023 Audit Committee Review of the Internal Audit Unit (SPI) Quality Assurance Review Report for 2023
3	03/KA/DKOM/01/2025	13 Januari 2025 January 13, 2025	Telaah Komite Audit atas Usulan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2026 Review by the Audit Committee on the Proposed Additional State Capital Participation (PMN) Funds for the 2026 Fiscal Year
4	04/KA/DKOM/01/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	Telaah Bersama Komite Audit dan Komite GCGPRNR atas Rancangan RKAP 2025 PT PP (Persero) Tbk Joint Review by the Audit Committee and the GCGPRNR Committee on the 2025 Draft RKAP of PT PP (Persero) Tbk
5	05/KA/DKOM/01/2025	30 Januari 2025	Usulan Piagam Komite Audit Proposed Audit Committee Charter
6	06/KA/DKOM/03/2025	21 Maret 2025 March 21, 2025	Tanggapan dan Saran Komite Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun 2024 PT PP (Persero) Tbk dan Entitas Anak Audit Committee Responses and Recommendations on the 2024 Audited Consolidated Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk and its Subsidiaries
7	07/KA/DKOM/03/025	26 Maret 2025 March 26, 2025	Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024 dan Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan KAP Tahun Buku 2025 Report on the Evaluation of the Implementation of Audit Services on Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms for the 2024 Fiscal Year and Recommendations of the Audit Committee on the KAP Appointment for the 2025 Fiscal Year
8	08/KA/DKOM/04/2025	21 April 2025 April 21, 2025	Telaah bersama Komite Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada Dana Pensiun Pembangunan Perumahan (DPPP) Joint review by the Board of Commissioners Committee on the Proposed Amendment to the Pension Fund Regulations (PDP) at the Housing Development Pension Fund (DPPP)
9	09/KA/DKOM/04/2025	25 April 2025 April 25, 2025	Telaah Bersama Komite Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada Dana pensiun Pembangunan Perumahan (DPPP) untuk Agenda RUPST Tahun Buku 2024 Joint review by the Board of Commissioners Committee on the Proposed Amendment to the Pension Fund Regulations (PDP) at the Housing Development Pension Fund (DPPP) for the 2024 Fiscal Year AGM Agenda
10	10/KA/DKOM/04/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	Tanggapan dan Saran KA atas Laporan Keuangan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2025 PT PP (persero) Tbk dan Entitas Anak Audit Committee's Response and Recommendations on the Consolidated Financial Statements for the First Quarter of 2025 of PT PP (Persero) Tbk and its Subsidiaries
11	11/KA/DKOM/04/2025	20 Mei 2025 May 20, 2025	Telaah Komite Audit atas Laporan SPI Triwulan 1 Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk Audit Committee Review of the SPI Report for the First Quarter of 2025 of PT PP (Persero) Tbk
12	12/KA/DKOM/PP/07/2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	Tanggapan Komite Audit atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk Audit Committee Response to the 2025 Annual Audit Work Program (PKPT) of PT PP (Persero) Tbk

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
13	13/KA/DKOM/PP/07/2025	18 Juli 2025 July 18, 2025	Telaah Komite Audit atas Penetapan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Harga atas Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk Audit Committee Review of the Determination of the Scope of Work and Price for the Audit Services of the 2025 Consolidated Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk
14	14/KA/DKOM/PP/07/2025	29 Juli 2025 July 29, 2025	Tanggapan dan Saran Komite Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan II Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk dan Entitas Anak Audit Committee Response and Recommendations on the 2025 Second Quarter Consolidated Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk and its Subsidiaries
15	15/KA/DKOM/PP/08/2025	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Telaah Komite Audit atas Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris untuk Penunjukan KAP atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 Audit Committee Review of the Board of Commissioners' Request for Approval of the Appointment of KAP for the Financial Statements as of June 30, 2025
16	16/KA/DKOM/PP/08/2025	11 Agustus 2025 August 11, 2025	Telaah KA atas Penetapan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Harga atas Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 PT PP (Persero) Tbk Audit Committee Review of the Determination of the Scope of Work and Price for Consolidated Financial Statement Audit Services for the Period Ending June 30, 2025 PT PP (Persero) Tbk
17	17/KA/DKOM/PP/09/2025	16 September 2025 September 16, 2025	Telaah Bersama Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atas Permohonan Persetujuan Company Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PP (Persero) Tbk Joint Review by the Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee on the Request for Approval of the PT PP (Persero) Tbk Whistleblowing System Company Manual
18	18/KA-06K/PR/DKOM/PP/09/2025	16 September 2025 September 16, 2025	Telaah Bersama Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit atas Permohonan Persetujuan Laporan *Contingency Plan* PTPP (Persero) Tbk Tahun 2025 Joint Review by the Risk Monitoring Committee and Audit Committee on the Request for Approval of PTPP (Persero) Tbk's Contingency Plan Report for 2025
19	019//KA/DKOM/11/2025	11 November 2025 November 11, 2025	Telaah Komite Audit atas Laporan audit Intern Triwulan 3 Tahun 2025 PT PP (Persero) Tbk Audit Committee Review of PT PP (Persero) Tbk's Internal Audit Report for the Third Quarter of 2025

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Komite Audit merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM/PP/09/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Remuneration Policy

The Audit Committee Remuneration Policy refers to the Board of Commissioners Decree No. 006/SK/KOM/PP/09/2022 dated September 2, 2022, on the Determination of Income of Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memastikan pengawasan Dewan Komisaris atas proses Nominasi dan Remunerasi Perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksana secara transparan, kompeten, obyektif dan independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dan termasuk yang berasal dari pihak independen luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.

Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi PTPP dibentuk pada tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PP (Persero) Tbk, yang merupakan bagian dari kebijakan pemecahan fungsi dan peran yang sebelumnya diemban oleh Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi, & Remunerasi yang telah ada sebelumnya.

Berikut disampaikan kronologis perubahan dan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi hingga 31 Desember 2025.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners for ensuring that the Board of Commissioners' supervision of the Company's Nomination and Remuneration process is carried out in accordance with laws and regulations and implemented in a transparent, competent, objective, independent, and accountable manner.

Qualifications to Become Members of the Nomination and Remuneration Committee

The requirements and qualifications to become a member of the Nomination and Remuneration Committee, especially from independent parties outside the Company, are as follows:

1. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company;
2. Has experience related to nominations and/or remuneration; and
3. Does not concurrently serve as a member of any other committee within the Company.

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

According to SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners shall not exceed three years. It may be extended once for two years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Meanwhile, the term of office of Committee members who are members of the Company's Board of Commissioners shall automatically terminate when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.

Number, Composition, and Structure of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of PTPP was established in 2025 based on the Board of Commissioners Decree No. 003/SK/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025, on the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of PT PP (Persero) Tbk, which is part of the policy to separate the functions and roles previously carried out by the existing GCG, Risk Monitoring, Nomination, & Remuneration Committee.

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025, is as follows.

21 Februari s.d 28 November 2025 February 21 to November 28, 2025	28 November s.d 31 Desember 2025 November 28 to December 31, 2025	Keterangan Description
Dhony Rahajoe (Ketua Komite/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) Chairman of the Committee/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Dhony Rahajoe (Ketua Komite/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) Chairman of the Committee/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	-
Ernadhi Sudarmanto (Sekretaris merangkap Anggota Komite/Komisaris) Secretary and Member of the Committee/Commissioner	Ernadhi Sudarmanto (Sekretaris merangkap Anggota Komite/Komisaris) Secretary and Member of the Committee/Commissioner	-
Nurahini (Anggota Komite/Pihak Independen) Member of the Committee/ Independent Party		Sudah tidak menjabat sejak 28 November 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM/PP/11/2025 tanggal 28 November 2025 No longer in office since November 28, 2025, based on the Board of Commissioners' Decree No. 010/SK/KOM/ PP/11/2025 dated November 28, 2025.
Tri Budi Pramono (Anggota Komite/Pihak Independen) Member of the Committee/ Independent Party	Tri Budi Pramono (Anggota Komite/Pihak Independen) Member of the Committee/ Independent Party	-

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2025

Composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Dhony Rahajoe	Ketua Komite/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Chairman of the Committee/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/ KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Board of Commissioners Decree No. 003/SK/ KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Following the term of office as President Commissioner and Independent Commissioner	
Ernadhi Sudarmanto	Sekretaris merangkap Anggota Komite/Komisaris Secretary and Member of the Committee/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/ KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Board of Commissioners Decree No. 003/SK/ KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Following the term of office as Commissioner	
Tri Budi Pramono	Anggota Komite/Pihak Independen Member of the Committee/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/ KOM/PP/11/2025 tanggal 28 November 2025 Board of Commissioners Decree No. 010/SK/ KOM/PP/11/2025 dated November 28, 2025	1 Desember 2025 s.d sekarang December 1, 2025, to present	Ke-1 First Term

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Ir. Dhony Rahajoe

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/ President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Dhony Rahajoe, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Jaya Kesuma, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Dr. Ernadhi Sudarmanto Ak., MM., M.Ak.

Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris
Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Ernadhi Sudarmanto, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Ernadhi Sudarmanto, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Tri Budi Pramono S.Ip,. M.A.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Pihak Independen
Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Independent Party

Periode Jabatan
Term of Office

1 Desember 2025 s.d sekarang, Periode Ke-1
December 1, 2025, to present, First Term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Pekanbaru, 15 Maret 1990 Born in Pekanbaru, March 15, 1990	Usia 35 tahun 35 years old	Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan

- Pascasarjana (S2) Master of Arts (Ilmu Hubungan Internasional), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015);
- Sarjana (S1) Ilmu Politik (Hubungan Internasional), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2012).

Formal Education

- Master of Arts (International Relations), Gadjah Mada University, Yogyakarta (2015);
- Bachelor of Politics (International Relations), Veteran National Development University, Yogyakarta, (2012).

Pengalaman Kerja

- Analis SDM Aparatur Muda (Subkoordinator Layanan Kepegawaian) Badan Pengaturan BUMN (2022-sekarang)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum Perhutani (2022-2025)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk (2021-2022)
- Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2020-2021)
- Analis Kinerja BUMN pada Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN Kementerian BUMN (2018-2020)
- Analis Data BUMN pada Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II Kementerian BUMN (2015-2018)
- Analis Data BUMN pada Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN Kementerian BUMN (2015-2015)

Work Experience

- HR Analyst for Junior Civil Servants (Sub-Coordinator of Personnel Services) SOE Regulatory Agency (2022-present)
- Secretary to the Supervisory Board of Perum Perhutani (2022-2025)
- Secretary to the Board of Commissioners of PT Indofarma Tbk (2021 -2022)
- Staff Member of the Board of Commissioners Secretariat of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2020 -2021)
- SOE Performance Analyst at the Deputy Assistant for SOE Human Resource Management, SOE Ministry (2018-2020)
- SOE Data Analyst at the Deputy Assistant for Financial Services, Survey Services, and Consultant II, SOE Ministry (2015 -2018)
- SOE Data Analyst at the Deputy Assistant for SOE Restructuring, SOE Ministry (2015 -2015)

Sertifikasi Profesi

- Planetary Carbon Certification Program (PKPB - CSGS Universitas Indonesia) (2025);
- Certified Chief Internal Audit (LSP MKS) (2025);
- Pelatihan Regulatory Impact Assessment (LPEM - FEB Universitas Indonesia) (2025);
- Pelatihan Creating Business Ecosystem (Masterclass BSE) (2025);
- Pelatihan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaga Administrasi Negara) (2024);
- Qualified Risk Governance Professional (LSP MKS) (2023); serta
- Human Resources Program Executive (GML Performance Consulting) (2020).

Professional Certification

- Planetary Carbon Certification Program (PKPB - CSGS University of Indonesia) (2025);
- Certified Chief Internal Audit (LSP MKS) (2025);
- Regulatory Impact Assessment Training (LPEM - FEB University of Indonesia) (2025);
- Creating Business Ecosystem Training (Masterclass BSE) (2025);
- Civil Service Performance Management Training (State Administration Agency) (2024);
- Qualified Risk Governance Professional (LSP MKS) (2023); and
- Human Resources Program Executive (GML Performance Consulting) (2020).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Position

Within the Company: None
Outside the Company: None

Hubungan Afiliasi

Tri Budi Pramono tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Tri Budi Pramono is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek independensi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Transparansi independensi Komite Nominasi dan Remunerasi terlihat dalam tabel berikut:

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Aspects of the independence of the Nomination and Remuneration Committee are:

1. Not working at the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, or other parties that provide audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the last six months before being appointed by the Commissioner;
2. Not a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Company within the last six months before being appointed by the Commissioners, except for Independent Commissioners;
3. Not owning shares either directly or indirectly in the Company. If a member of the Committee acquires shares as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the acquisition;
4. Not having family affiliation by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders;
5. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Transparency of the Nomination and Remuneration Committee's independence is shown in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Dhony Rahajoe	Ernadhi Sudarmanto	Nurahini	Tri Budi Pramono
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris Works at a Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other Party that provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within the last six months before being appointed by the Commissioner	✗	✗	✗	✗
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen Is a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Issuer or Public Company within the last six months before being appointed by the Commissioner, except the Independent Commissioner	✓	✓	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗

Aspek Independensi Independence Aspect	Dhony Rahajoe	Ernadhi Sudarmanto	Nurahini	Tri Budi Pramono
Memiliki hubungan afiliasi keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Has a family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholders	X	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Has a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business	X	X	X	X

✓ = ada; X = tidak ada
✓ = yes; X = no

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam (*Charter*) Komite yang telah disahkan melalui surat No. 02/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025. Piagam ini digunakan sebagai landasan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya (*oversight*) atas proses Nominasi dan Remunerasi Perusahaan, dan memastikannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksana secara transparan, kompeten, obyektif dan independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi menguraikan tentang:

1. Tujuan dan Dasar Pengaturan;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Kewenangan;
4. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian;
5. Masa Tugas;
6. Komposisi, Kualifikasi, dan Persyaratan Keanggotaan;
7. Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja; serta
8. Tata Cara dan Prosedur Kerja;

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee has a Charter that has been authorized and refined through letter No. 02/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025. This charter serves as the basis for the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its oversight responsibilities over the Company's Nomination and Remuneration processes, ensuring that they are conducted in accordance with laws and regulations and implemented in a transparent, competent, objective, independent, and accountable manner. The Nomination and Remuneration Committee Charter outlines:

1. Purpose and Basis of Regulation;
2. Duties and Responsibilities;
3. Authority;
4. Provisions for Appointment and Dismissal;
5. Term of Office;
6. Composition, Qualifications, and Membership Requirements;
7. Organizational Structure and Working Relationships; and
8. Work Procedures and Processes;

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsinya membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengevaluasi manajemen talenta dan remunerasi Direksi dan Komisaris perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi;

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in evaluating the talent management and remuneration of the company's Board of Directors and Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee has the following duties and responsibilities, among others:

1. Conduct a periodic review of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluation of its implementation;
2. Evaluate the talent classification system and procedures conducted by the Board of Directors;

3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri;
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perusahaan;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
7. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi Perusahaan mengenai struktur organisasi Perusahaan;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
10. Menyusun Program Kerja Komite Tahunan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
11. Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
12. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris; serta
13. Menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya;
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Sekretaris Perusahaan, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan dan dokumen yang diperlukan secara terintegrasi;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); serta
4. 4Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Validate and calibrate the selected talent to produce a list of nominated talent by the Board of Commissioners to the Minister;
4. Evaluate prospective Company Representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of subsidiaries before being submitted to the Minister;
5. Evaluate the proposed KPIs of individual members of the Board of Directors;
6. Prepare a system proposal and conduct individual performance evaluations for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
7. Evaluate the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure;
8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information;
10. Prepare the Annual Committee Work Program and submit it to the Board of Commissioners;
11. Prepare Quarterly and Annual Reports on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee and submit them to the Board of Commissioners;
12. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and perform other duties as requested by the Board of Commissioners; and
13. Develop binding guidelines for each member of the Nomination and Remuneration Committee.

Authorities of Nomination and Remuneration Committee

In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the following authorities:

1. Access records or information about employees, funds, assets, and other company resources related to their duties;
2. Communicate with work units for functions including Corporate Secretary, Legal and Compliance, Finance, Human Resources, and other necessary business operations to obtain information and clarification, and to request necessary reports and documents in an integrated manner;
3. Involve independent parties outside the members of the Nomination and Remuneration Committee as necessary to assist in the performance of their duties (if required); and
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Competency Development for the Nomination and Remuneration Committee

The Company facilitates the implementation of development programs for the Nomination and Remuneration Committee to improve the competence of Nomination and Remuneration Committee members. These programs are expected to positively impact the productivity and effectiveness of the Nomination and Remuneration Committee's performance.

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dhony Rahajoe dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Dhony Rahajoe participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Ernadhi Sudarmanto dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Ernadhi Sudarmanto participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Nurahini (Anggota) (Member)*	Webinar "Kepatuhan dan Efektivitas Manajemen Risiko sebagai Integrator Implementasi POJK 12/2024" Webinar "Compliance and Effectiveness of Risk Management as an Integrator of POJK 12/2024 Implementation"	Jakarta 31 Januari 2025 Jakarta, January 31, 2025	Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)
	Masterclass Program Series XXIV Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital Masterclass Program Series XXIV Risk Mitigation in Digital Transformation	Bandung 3 & 4 Juli 2025 Bandung, July 3 & 4, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
	Webinar Melampaui ketidakpastian: "Peran strategis K/L, Pemda, dan BUMN, dalam menentukan Batas Risiko Pembangunan Nasional" Webinar Overcoming uncertainty: "The strategic role of ministries/agencies, local governments, and SOEs in determining the limits of National Development Risk"	Jakarta 11 Juli 2025 Jakarta, July 11, 2025	Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)
	Risk & Governance Summit (RGS) 2025, *Empowering The GRC Ecosystem To Drive Economic Growth And National Resilience*	Jakarta 19 Agustus 2025 Jakarta, August 19, 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
	Workshop Menuju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8% "Siapkah Kita Mengimplementasi MRPN Tanpa Kuantifikasi" Workshop Towards 8% Economic Growth in Indonesia: "Are We Ready to Implement MRPN Without Quantification?"	Jakarta 3 September 2025 Jakarta, September 3, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), dan Global Integrated Risk Management Association (GIRMA), serta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR), Global Integrated Risk Management Association (GIRMA), and Indonesian Christian University (UKI)

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	Webinar Membangun KPI yang Adaptif dalam Perspektif Manajemen Risiko Webinar Building Adaptive KPIs from a Risk Management Perspective	Jakarta 11 November 2025 Jakarta, November 11, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), dan Global Integrated Risk Management Association (GIRMA) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR) and Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)
Tri Budi Pramono (Anggota) (Member)	*Certified Chief Internal Audit*	Jakarta 7 Februari 2025 Jakarta, February 7, 2025	LSP MKS
	Creating Business Ecosystem	Jakarta 21 Februari 2025 Jakarta, February 21, 2025	Masterclass BSE
	Webinar INSIGHT - Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* pada BUMN INSIGHT Webinar - Implementation of Internal Control over Financial Reporting in SOEs	Jakarta 16 April 2025 Jakarta, April 16, 2025	Kementerian BUMN SOE Ministry
	Planetary Carbon Certification Program	Jakarta 25-29 April 2025 Jakarta, April 25-29, 2025	PKPB - CSGS Universitas Indonesia PPKB-CSGS University of Indonesia
	Regulatory Impact Assessment	Jakarta 29-31 Oktober 2025 Jakarta, October 29-31, 2025	LPEM - FEB Universitas Indonesia LPEM-FEB University of Indonesia

*Nurahini sudah tidak lagi menjabat sejak 28 November 2025.
Nurahini has not been in office since November 28, 2025.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan secara rutin menggelar rapat internal. Berdasarkan piagam Nominasi dan Remunerasi, beberapa persyaratan rapat komite di antaranya:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir;
3. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris; serta
4. Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Di tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan 16 kali rapat, yang terdiri dari 3 kali rapat bersama Dewan Komisaris dan 13 kali rapat internal, dengan rekapitulasi kehadiran dapat dilihat di bawah ini.

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee regularly holds internal meetings. Based on the Nomination and Remuneration charter. Several requirements for committee meetings include:

1. The Nomination and Remuneration Committee shall hold meetings at least as often as the Board of Commissioners meetings stipulated in the articles of association;
2. Each meeting of the Nomination and Remuneration Committee shall be recorded in the Minutes of the Meeting signed by all Committee Members present;
3. The minutes of the Nomination and Remuneration Committee meeting shall be submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners; and
4. The attendance of Committee Members at meetings shall be reported in the quarterly and annual reports of the Nomination and Remuneration Committee.

In 2025, the Nomination and Remuneration Committee conducted 16 meetings, consisting of three meetings with the Board of Commissioners and 13 internal meetings, with attendance recapitulation as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat

Recapitulation of Nomination and Remuneration Committee Attendance at Meetings

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Dhony Rahajoe (Ketua) (Chairman)	16	16	-	100,00
Ernadhi Sudarmanto (Sekretaris merangkap Anggota) (Secretary and Member)	16	16	-	100,00
Nurahini (Anggota)* (Member)*	15	15	-	100,00
Tri Budi Pramono (Anggota) (Member)	1	1	-	100,00
Rata-rata **Average**				**100,00**

*Nurahini sudah tidak lagi menjabat sejak 28 November 2025.
Nurahini has not been in office since November 28, 2025.

Beberapa agenda dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembahasan Pendalaman Usulan RKAP dan KPI Tahun PTPP (khususnya berkaitan program HCM);
2. Pembahasan Anggaran Tantiem Dewan Komisaris & Direksi PTPP;
3. Pembahasan Cluster Talent Committee Tahun 2025 PTPP;
4. Pembahasan Persiapan Integrasi Dana Pensiun PTPP;
5. Wawancara Calon Pejabat Manajemen Satu Tingkat di Bawah Direksi PTPP;
6. Pembahasan Skema Pengurusan Anak Perusahaan PTPP;
7. Pembahasan Manajemen Risiko dalam RKAP Tahun 2025 PTPP;
8. Pembahasan konsep Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PTPP;
9. Pembahasan masa jabatan organ pendukung Dewan Komisaris.

Several items on the agenda of the Nomination and Remuneration Committee Meeting can be outlined as follows:

1. In-depth discussion of the proposed RKAP and KPI for PTPP (particularly related to the HCM program);
2. Discussion of the bonus budget for the Board of Commissioners & Board of Directors of PTPP;
3. Discussion of the 2025 PTPP Talent Committee Cluster;
4. Discussion of the Preparation for the Integration of PTPP's Pension Fund;
5. Interview with Candidates for Management Positions One Level Below the Board of Directors;
6. Discussion of the PTPP Subsidiary Management Scheme;
7. Discussion of Risk Management in PTPP's 2025 RKAP;
8. Discussion of the PTPP Integrated Governance Guidelines Concept;
9. Discussion on the Term of Office of the Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

1. **Penyiapan Data dan Penulisan terkait Materi Komite Dewan Komisaris dalam Penyusunan Annual Report Perusahaan**
   Pelaksanaan kegiatan ini berjalan selama periode penyusunan *Annual Report* sejak bulan Januari 2025 hingga penyampaian Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2024.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Nomination and Remuneration Committee in 2025

1. **Data Preparation and Writing related to the Board of Commissioners Committee Material in the Preparation of the Company's Annual Report**
   This activity was carried out during the period of preparing the Annual Report from January 2025 until the submission of the 2024 Annual Report.

2. **Penilaian Kinerja Kolegial dan Individual Direksi**

   Telah diselesaikan penilaian kinerja Direksi secara Kolegial dan individual tahun buku 2024 untuk dilaporkan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

3. **Kajian Program Talent Development dan/atau Career Planning Perusahaan**
   Telaahan terkait *talent development/program career planning* terkait dengan rekrutmen calon-calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan, bagi talenta BOD-1 hingga BOD-5 yang disesuaikan dengan grading untuk pengisian/rekrutmen calon-calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4. **Kajian Besaran Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2024**

   Komite telah menyelesaikan telaah atas Usulan Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025 dan besaran tantiem atas Tahun buku 2024 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. **Kajian Usulan Pergantian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan**
   Telah diselesaikan telaahan atas Usulan Pergantian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

6. **Telaahan Atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PTPP**
   Telah diselesaikan telaahan terkait permohonan persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi PTPP.

7. **Pemantauan dan Penyiapan Materi RUPS Tahunan**
   Telah dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan dan regulasi yang berlaku bagi Perusahaan.

8. **Reviu RKAP Tahun 2026**
   Telah dilakukan *Review* terhadap RKAP Tahun 2026.

9. **Konsultasi Penetapan Anggaran Tantiem dan Penetapan KPI Direksi pada RKAP Tahun 2026**
   Telah dilakukan Konsultasi Penetapan Anggaran Tantiem dan Penetapan KPI Direksi pada RKAP Tahun 2026.

2. **Assessment of the Collective and Individual Performance of the Board of Directors**
   The assessment of the collective and individual performance of the Board of Directors for the 2024 fiscal year has been completed and was reported at the 2024 Annual GMS.

3. **Review of the Company's Talent Development and/or Career Planning Programs**
   A review of talent development/career planning programs related to the recruitment of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, for BOD-1 to BOD-5 talents, adjusted to the grading for the filling/recruitment of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, has been submitted to the Board of Commissioners.

4. **Review of the Amount of Salaries/Honoraria for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 and Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year**
   The Committee has completed its review of the Proposed Remuneration (Salaries/Honoraria, Facilities and Allowances) for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 and the amount of bonuses for the 2024 fiscal year and has submitted it to the Board of Commissioners.

5. **Review of the Proposed Replacement of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries**
   The review of the Proposed Replacement of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries has been completed.

6. **Review of the Request for Approval of Changes to the Organizational Structure of PTPP**
   The review of the request for approval of changes to PTPP's organizational structure has been completed.

7. **Monitoring and Preparation of Annual GMS Materials**
   Monitoring has been carried out to ensure that the implementation of the 2024 Annual GMS has met the requirements stipulated in the applicable provisions and regulations of the Company.

8. **Review of the 2026 RKAP**
   A review of the 2026 RKAP has been carried out.

9. **Consultation on the Determination of Bonus Budget and KPI for the Board of Directors in the 2026 RKAP**
   A consultation on the Determination of the Bonus Budget and KPI for the Board of Directors in the 2026 RKAP has been conducted.

10. **Penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi**
Komite telah menyelesaikan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan penetapan oleh Dewan Komisaris melalui surat No. 02/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025.

11. **Reviu Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris (Board of Commissioners Manual)**

Reviu atas Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) masih dalam proses pembahasan dan sinkronisasi dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi.

12. **Reviu masa kerja Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Reviu atas masa kerja organ pendukung Dewan Komisaris, untuk kebutuhan keberlanjutan ataupun rekrutmen baru bagi organ pendukung yang akan berakhir masa jabatannya

13. **Pengembangan Kapasitas Anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi**
Anggota Komite telah melaksanakan pengembangan kapasitas untuk para Anggota Komite dengan mengikut berbagai pelatihan diantaranya: Webinar Membangun KPI Yang Adaptif dalam Perspektif Manajemen Risiko; *Workshop* Menuju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8% "Siapkah Kita Mengimplementasi MRPN Tanpa Kuantifikasi"; *Risk & Governance Summit* (RGS) 2025, *Empowering The GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience*; Webinar Melampaui ketidakpastian: "Peran strategis K/L, Pemda, dan BUMN, dalam menentukan Batas Risiko Pembangunan Nasional"; "Masterclass Program Series XXIV Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital"; dan Webinar "Kepatuhan dan Efektivitas Manajemen Risiko sebagai Integrator Implementasi POJK 12/2024".

14. **Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun Buku 2025.**

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk pada SK No. 006/SK/KOM/ PP/09/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola BUMN, Dewan Komisaris PTPP membentuk Komite Pemantau Risiko yang berperan memperkuat tata kelola perusahaan,

10. **Drafting of the Nomination and Remuneration Committee Charter**
The Committee has completed the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was ratified by the Board of Commissioners through letter No. 02/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025.

11. **Review of the Board of Commissioners' Task Implementation Guidelines (Board of Commissioners Manual)**
The review of the Board of Commissioners' Task Implementation Guidelines (Board of Commissioners Manual) is still under discussion and synchronization with the Board of Directors' Task Implementation Guidelines.

12. **Review of the Board of Commissioners Supporting Organs' Term of Office**
Review of the Board of Commissioners supporting organs' term of office, for continuity or new recruitment for supporting bodies whose terms are about to expire.

13. **Capacity Building for Members of the Nomination and Remuneration Committee**
Committee members have carried out capacity building for Committee members by participating in various training programs, including: Webinar on Building Adaptive KPIs from a Risk Management Perspective; Workshop Towards 8% Economic Growth in Indonesia "Are We Ready to Implement MRPN Without Quantification"; Risk & Governance Summit (RGS) 2025, Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience; Webinar Overcoming Uncertainty: "The Strategic Role of Ministries/Agencies, Local Governments, and SOEs in Determining National Development Risk Limits"; Masterclass Program Series XXIV Risk Mitigation in Digital Transformation; and Webinar "Compliance and Effectiveness of Risk Management as an Integrator of POJK 12/2024 Implementation".

14. **Preparation of the Annual Report on the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee's Duties in the 2025 Fiscal Year.**

Remuneration Policy

The Remuneration Policy of the Nomination and Remuneration Committee refers to Decree No. 006/SK/KOM/PP/09/2022 dated September 2, 2022, on the Determination of Income of Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk.

Risk Monitoring Committee

In accordance with the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for SOE Governance, the Board of Commissioners of PTPP established a Risk Monitoring Committee to strengthen corporate

khususnya dalam melakukan pengawasan menyeluruh atas pengelolaan risiko yang dilakukan Direksi. Komite Pemantau Risiko PTPP dibentuk pada tahun 2025 sebagai bagian dari pemecahan fungsi dan peran yang sebelumnya diemban oleh Komite *Good Corporate Governance* (GCG), Pemantau Risiko, Nominasi, & Remunerasi yang telah ada sebelumnya.

governance, particularly by overseeing the comprehensive risk management carried out by the Board of Directors. The Risk Monitoring Committee was established in 2025 as part of the division of functions and roles previously carried out by the existing Good Corporate Governance (GCG), Risk Monitoring, Nomination, & Remuneration Committee.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko

Persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi anggota Komite Pemantau Risiko khususnya dari pihak independen luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi secara baik;
2. Wajib memahami bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan perencanaan strategis, kewenangan pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban pada Perusahaan, manajemen risiko, sistem tata kelola Perusahaan dan sistem manajemen yang digunakan, serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalaman kerja di bidang manajemen risiko dan/atau tata kelola perusahaan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain pada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
9. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut;

Qualifications to Become Members of the Risk Monitoring Committee

The requirements and qualifications to become a member of the Risk Monitoring Committee, especially from independent parties outside the Company, are as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, and experience suitable to their field of work and be able to communicate well;
2. Must understand the Company's business, especially those related to strategic planning, decision-making authority, delegation of authority and accountability mechanisms in the Company, risk management, corporate governance systems and management systems used, management recruitment systems and career planning in the Company, performance appraisal systems as well as laws and regulations in the Capital Market sector and other related laws and regulations;
3. Must fulfill the code of conduct established by the Company;
4. Willing to improve competence continuously through education and training;
5. Must have at least one member with educational background and expertise as well as work experience in risk management, corporate governance, and/or nomination and remuneration;
6. Not working at the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Firm, or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last six months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months except for Independent Commissioners;
8. Does not own shares directly or indirectly in the Company;
9. If a member of the Nomination and Remuneration Committee acquires shares of the Company either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the acquisition of the shares;
10. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Majority Shareholders of the Company;

11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut;
12. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif; dan
13. Dapat menyediakan waktu cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

11. Has no business relationship, either directly or indirectly, with business activities of the Company;
12. Can collaborate and communicate effectively; and
13. Can provide sufficient time to complete their duties.

Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Term of Office

According to SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners shall not exceed three years. It may be extended once for two years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Meanwhile, the term of office of Committee members who are members of the Company's Board of Commissioners shall automatically terminate when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko PTPP dibentuk pada tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT PP (Persero) Tbk, yang merupakan bagian dari kebijakan pemecahan fungsi dan peran yang sebelumnya diemban oleh Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi, & Remunerasi yang telah ada sebelumnya. Berikut disampaikan susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025.

Number, Composition, and Structure of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was established in 2025 based on the Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025, on the Establishment of the PT PP (Persero) Tbk Risk Monitoring Committee, which is part of the policy to separate the functions and roles previously carried out by the existing GCG, Risk Monitoring, Nomination, & Remuneration Committee that had existed previously. The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025, is as follows.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025

Composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Jaya Kesuma	Ketua Komite/ Komisaris Independen Chairman of the Committee/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner	
Hedy Rahadian	Sekretaris merangkap Anggota Komite/ Komisaris Secretary and Member of the Committee/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Board of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Following the term of office as the Commissioner	

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Hasnil Djamin	Anggota Komite/ Pihak Independen Member of the Committee/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/ KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 Board of Commissioners Decree No. 002/SK/ KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025	21 Februari 2025 s.d 21 Februari 2028 February 21, 2025, to February 21, 2028	Ke-1 First Term
Mega Perwani	Anggota Komite/ Pihak Independen Member of the Committee/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/ KOM/PP/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Board of Commissioners Decree No. 006/SK/ KOM/PP/08/2025 dated August 15, 2025	15 Agustus 2025 s.d 15 Agustus 2028 August 15, 2025, to August 15, 2028	Ke-1 First Term

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members



Dr. Jaya Kesuma SH., M.Hum

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen
Chairman of the Risk Monitoring Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko, Jaya Kesuma, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, Jaya Kesuma, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Dr.Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris
Secretary and Member of the Risk Monitoring Committee/Commissioner

Profil Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko, Hedy Rahadian, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Secretary and Member of the Risk Monitoring Committee, Hedy Rahadian, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Hasnil Djamin, MM, Ak., CA, PIA

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party

Periode Jabatan
Term of Office

21 Februari 2025 s.d 21 Februari 2028, Periode Ke-1
February 21, 2025, to February 21, 2028, 1st Term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jakarta, 15 Mei 1965 Born in Jakarta, May 15, 1965	Usia 60 tahun 60 years old	Berdomisili di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Cimahi, West Java, Indonesia

Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen dari Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung (2009);
- Diploma (D4) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1993);
- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1987).

Formal Education

- Master of Management from the Faculty of Business and Management, Widyatama University, Bandung (2009);
- Diploma (D4) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) (1993);
- Diploma (D3) in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) (1987).

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Pemantau Risiko PTPP (2025-sekarang)
- Anggota Komite Pemantau Risiko Dana Pensiun Angkasa Pura II (2025-sekarang)
- Anggota Komite GCG, Pemantau Risiko, Nominasi, & Remunerasi PTPP (2022-2025)
- Anggota Komite GCG dan Nominasi PTPP (2017-2022)
- Anggota Komite Manajemen Risiko dan SDM PT Angkasa Pura II (Persero) (2014-2016)
- Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura II (Persero) (2013-2014)

- Co-owner dan Senior Consultant PT i-Con Solusi (2011-sekarang)
- Instruktur Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) (2010-2015)
- Konsultan dan Trainer PT Daya Inovasi Indonesia (2010-2011)
- Konsultan Corporate Governance dan Management pada BPKP Provinsi Jawa Barat (2001-2013)
- Auditor BPKP Provinsi Jawa Barat (1996-2001)
- Tax Auditor Kanwil VII Dirjen Pajak Jawa Barat (1994-1996)

- Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau (1987-1990)

Work Experience

- Member of the Risk Monitoring Committee, PTPP (2025-present)
- Member of the Risk Monitoring Committee, Dana Pensiun Angkasa Pura II (2025-present)
- Member of the GCG, Risk Monitoring, Nomination, & Remuneration Committee of PTPP (2022-2025)
- Member of the GCG and Nomination Committee of PTPP (2017-2022)
- Member of the Risk Management and Human Resources Committee of PT Angkasa Pura II (Persero) (2014-2016)
- Member of the Audit Committee of PT Angkasa Pura II (Persero) (2013-2014)
- Co-owner and Senior Consultant of PT i-Con Solusi (2011-present)
- Instructor at the Accounting and Finance Development Center (PPAK) (2010-2015)
- Consultant and Trainer at PT Daya Inovasi Indonesia (2010-2011)
- Corporate Governance and Management Consultant at BPKP West Java Province (2001-2013)
- Auditor at the West Java Provincial BPKP (1996-2001)
- Tax Auditor at the West Java Regional Office VII of the Taxation Directorate General (1994-1996)
- Auditor at the Riau Provincial Representative Office of the Development Finance Comptroller (BPKP) (1987-1990)

Sertifikasi Profesi

- Certified Risk Professional, dari LSP-PM (2025);
- Qualified Risk Governance Professional, dari LSP-MKS (2021) diperbaharui tahun 2024;
- Lead Implementer - ISO 37001 Anti Bribery Management, dari Asia Anti Fraud (2020);
- Chartered Accountant, dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014);

- Professional Internal Auditor, dari Asosiasi Auditor Internal Indonesia (2011); serta
- Akuntan dengan Nomor Register D-12383 (1993).

Professional Certification

- Certified Risk Professional, from LSP-PM (2025);
- Qualified Risk Governance Professional, from LSP-MKS (2021), renewed in 2024;
- Lead Implementer - ISO 37001 Anti-Bribery Management, from Asia Anti Fraud (2020);
- Chartered Accountant, from the Institute of Indonesia Chartered Accountants (2014);
- Professional Internal Auditor, from the Indonesian Internal Auditors Association (2011); and
- Accountant with Registration No. D-12383 (1993).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan:
Co-owner, konsultan, PT i-Con Global Solusi (2011-sekarang).

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company:
Co-Owner, Consultant of PT i-Con Solusi (2011-present)

Hubungan Afiliasi

Hasnil Djamin tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Hasnil Djamin is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.



Mega Perwani

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Member of the Risk Monitoring Committee/Independent Party

Periode Jabatan
Term of Office

15 Agustus 2025 s.d 15 Agustus 2028, Periode Ke-1
August 15, 2025, to August 15, 2028, 1st Term

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Semarang, 28 Februari 1987 Born in Semarang, February 28, 1987	Usia 38 tahun 38 years old	Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan, Fakultas Bisnis dan Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang (2018);
- Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang (2009)

Formal Education

- Master of Management with a Concentration in Financial Management, Faculty of Business and Management, Diponegoro University, Semarang (2018);
- Bachelor of Management from Diponegoro University, Semarang (2009)

Pengalaman Kerja

- Penata Kelola Perusahaan Negara Pertama di Kementerian BUMN (2022-sekarang)
- Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Kawasan Berikat Nusantara (2022-2025)
- Staff Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero), Tbk (2021-2022)
- Staff Dewan Pengawas Perum Perhutani (2019-2021)

Work Experience

- First Corporate Governance Officer at the SOE Ministry (2022-present)
- Risk Management Monitoring Committee of PT Kawasan Berikat Nusantara (2022-2025)
- Staff Member of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero), Tbk (2021-2022)
- Staff Member of the Supervisory Board of Perum Perhutani (2019-2021)

Sertifikasi Profesi

- Certificate in Sustainability for Finance dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) & ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) (2025);
- Certified Risk Governance Professional (CRGP) dari LSPMR (2025);
- Certified Chief Governance Officer (CCGO) dari LSPMKS (2023);
- Certified Governance Professional (CGP) dari LSPMKS (2023); serta
- Certified Risk Management Professional (CRMP) dari LSPMR (2023).

Professional Certification

- Certificate in Sustainability for Finance from the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2025);
- Certified Risk Governance Professional (CRGP) from LSPMR (2025);
- Certified Chief Governance Officer (CCGO) from LSPMKS (2023);
- Certified Governance Professional (CGP) from LSPMKS (2023); and
- Certified Risk Management Professional (CRMP) from LSPMR (2023).

Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan:** Tidak ada	**Within the Company:** None **Outside the Company:** None
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Mega Perwani tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Mega Perwani is not affiliated with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

Aspects of the independence of the Risk Monitoring Committee are:

1. Not working at the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, or other parties that provide audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the last six months before being appointed by the Commissioner;
2. Not a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Company within the last six months before being appointed by the Commissioners, except for Independent Commissioners;
3. Not owning shares either directly or indirectly in the Company. If a member of the Committee acquires shares as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the acquisition;
4. Not having family affiliation by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders;
5. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Transparency of the Risk Monitoring Committee's independence is shown in the following table:

Aspek Independensi **Independence Aspect**	**Jaya Kesuma**	**Hedy Rahadian**	**Hasnil Djamin**	**Mega Perwani**
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris Works at a Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other Party that provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within the last six months before being appointed by the Commissioner	✗	✗	✗	✗
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen Is a person with authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of the Issuer or Public Company within the last six months before being appointed by the Commissioner, except the Independent Commissioner	✓	✓	✗	✗

Aspek Independensi Independence Aspect	Jaya Kesuma	Hedy Rahadian	Hasnil Djamin	Mega Perwani
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares of the Company, either directly or indirectly	X	X	X	X
Memiliki hubungan afiliasi keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Has a family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority/Controlling Shareholders	X	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Has a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business	X	X	X	X

✓ = ada; X = tidak ada
✓ = yes; X = no

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam (Charter) Komite yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat No. 01/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 tanggal 21 Februari 2025. Piagam ini digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen. Piagam Komite Pemantau Risiko menguraikan tentang:

1. Tujuan dan Dasar Pengaturan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab.
3. Wewenang.
4. Pengangkatan dan Pemberhentian.
5. Masa Tugas.
6. Keanggotaan.
7. Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja.
8. Tatacara dan Prosedur Kerja.
9. Penutup.

Work Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee has a Committee Charter that has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors through letter No. 01/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 dated February 21, 2025. This Charter serves as a guideline and code of conduct for members of the Risk Monitoring Committee in carrying out their duties and responsibilities professionally and independently. The Risk Monitoring Committee Charter outlines:

1. Purpose and Basis of Regulation.
2. Duties and Responsibilities.
3. Authority.
4. Provisions for Appointment and Dismissal.
5. Term of Office.
6. Membership.
7. Organizational Structure and Working Relationships.
8. Work Procedures and Processes.
9. Closing.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal dan Bursa Efek, serta berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen.

Komite Pemantau Risiko menjalankan fungsinya membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam pemantauan dan penelaahan penerapan Manajemen Risiko baik Induk Perusahaan maupun Anak Perusahaan. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Induk Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan;

Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee performs its functions as stipulated in the laws and regulations governing the capital market and the Stock Exchange, and is guided by the Risk Monitoring Committee Charter. In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee acts independently.

The Risk Monitoring Committee performs its functions by assisting the Board of Commissioners in monitoring and reviewing the implementation of Risk Management in both the Parent Company and Subsidiaries. The Risk Monitoring Committee has the following duties and responsibilities, among others:

1. Monitor and review the Risk Management report and other reports related to the implementation of Risk Management, both within the Company as a parent and subsidiary;
2. Monitor and evaluate the appropriateness of the implementation of Risk Management policies of the Company and its Subsidiaries;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Induk Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
5. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
7. Menyusun Program Kerja Komite Tahunan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
8. Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris; serta
9. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

3. Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of Risk Management implementation and conformity between the Company's Risk Management policy and Subsidiaries' Risk Management;
4. Monitoring and evaluating the implementation of other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or resolutions of the GMS/Minister;
5. Exercising other authorities, duties, and responsibilities related to its functions;
6. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information;
7. Prepare the Annual Committee Work Program and submit it to the Board of Commissioners;
8. Prepare Quarterly and Annual Reports on the Implementation of Duties of the Risk Monitoring Committee and submit them to the Board of Commissioners; and
9. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and perform other duties as requested by the Board of Commissioners.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Unit Manajemen Risiko, Audit Intern, Sekretaris Perusahaan, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan dan dokumen yang diperlukan secara terintegrasi;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); serta
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

In performing its duties, the Risk Monitoring Committee has the following authorities:
1. Access records or information about employees, funds, assets, and other company resources related to their duties;
2. Communicate with work units for functions including Risk Management Unit, Internal Audit, Corporate Secretary, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources, and other necessary business operations to obtain information and clarification, and to request necessary reports and documents in an integrated manner;
3. Involve independent parties outside the members of the Risk Monitoring Committee as necessary to assist in the performance of their duties (if required); and
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Kebijakan pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa setiap anggota wajib memiliki integritas yang tinggi, pengalaman yang relevan, serta pemahaman memadai mengenai kegiatan usaha dan tugas komite. Anggota harus bebas dari benturan kepentingan, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, serta menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan. Untuk memastikan kompetensi yang berkelanjutan, setiap anggota diwajibkan mengikuti pelatihan tahunan minimal 20 jam dengan topik

Competency Development for the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee's competency development policy stipulates that each member must have high integrity, relevant experience, and adequate understanding of business activities and committee duties. Members must be free from conflicts of interest, able to work together and communicate effectively, and provide sufficient time to carry out their supervisory functions. To ensure ongoing competency, each member is required to complete a minimum of 20 hours of annual training on risk management, governance, fraud, compliance, finance,

terkait manajemen risiko, tata kelola, fraud, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, bisnis, maupun HSSE, yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, atau lembaga pelatihan terakreditasi.

accounting, auditing, business, and HSSE, organized by professional institutions, regulators, or accredited training institutions.

Selain pelatihan, anggota komite diwajibkan memiliki sertifikasi profesional sesuai bidang keahliannya sebelum menjabat, serta mengikuti setidaknya satu sertifikasi lanjutan selama masa tugas. Sertifikasi harus diterbitkan oleh lembaga yang diakui secara nasional atau internasional dan memenuhi standar profesi serta etika. Seluruh sertifikasi tersebut wajib berlaku sepanjang masa jabatan guna memastikan kredibilitas dan kompetensi anggota dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

In addition to training, committee members are required to hold professional certification in their field of expertise before taking office and to obtain at least one advanced certification during their term of office. Certifications must be issued by nationally or internationally recognized institutions and meet professional and ethical standards. All certifications must be valid throughout the term of office to ensure the credibility and competence of members in supporting the implementation of good corporate governance.

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	**Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type and Material	**Tempat/Tanggal** Venue/Date	**Penyelenggara** Organizer
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Jaya Kesuma dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Jaya Kesuma participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Hedy Rahadian dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which Hedy Rahadian participated is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Hasnil Djamin (Anggota) (Member)	*Certified Risk Professional*	Jakarta, 30 Desember 2025 Jakarta, December 30, 2025	LSP-Pasar Modal LSP-Capital Market
Mega Perwani (Anggota) (Member)	*Certified Risk Governance Professional* (CRGP)	Jakarta, 20 Juni 2025 Jakarta, June 20, 2025	LSPMR
	Certificate in Sustainability for Finance (2025)	Jakarta, 19 November 2025 Jakarta, November 19, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) & ACCA (*the Association of Chartered Certified Accountants)* Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Rapat Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melakukan 67 kali rapat, yang terdiri dari 25 kali rapat bersama Dewan Komisaris, dan 42 kali rapat internal dengan 10 kali diantaranya adalah rapat bersama dengan Komite Audit. Rekapitulasi kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat dapat dilihat di bawah ini.

Meetings of the Risk Monitoring Committee

In 2025, the Risk Monitoring Committee conducted 67 meetings, consisting of 25 meetings with the Board of Commissioners and 42 internal meetings – 10 of which were meetings with the Audit Committee. The attendance recapitulation of Risk Monitoring Committee in meetings is as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat
Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance at Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Jaya Kesuma (Ketua) (Chairman)	23	23	-	100,00
Hedy Rahadian (Sekretaris merangkap Anggota) (Secretary and Member)	23	23	-	100,00
Hasnil Djamin (Anggota) (Member)	31	31	-	100,00
Mega Perwani (Anggota)* (Member)*	19	19	-	100,00
Rata-rata **Average**				**100,00**

*Mega Perwani mulai menjabat pada tanggal 15 Agustus 2025.
Mega Perwani took office on August 15, 2025.

Beberapa agenda dalam Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembahasan internal atas draft Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun Manajemen sebanyak 2 (dua) kali rapat;
2. Pembahasan konsep RKAP dan KPI Tahun Buku 2025 bersama Komite Audit sebanyak 2 (dua) kali rapat;
3. Pembahasan draft Strategi Manajemen Risiko dalam RKAP 2026;
4. Pembahasan internal dan menyusun telaah atas Laporan Manajemen Risiko PTPP Tahun Buku 2024;
5. Pembahasan atas draft *Internal Audit Charter* dan draft Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2025 atas undangan dari Komite Audit;
6. Pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan IV/2024 dari Divisi Manajemen Risiko, serta menyusun telaah mengenainya;
7. Pembahasan atas pemantauan *fraud risk* oleh Divisi MR dalam konteks penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Pembahasan atas draft revisi Pedoman *Whistleblowing System* yang disusun Manajemen bersama dengan Komite Audit dan Biro Corporate Secretary sebanyak 2 (dua) kali rapat;
9. Pembahasan atas program kerja Divisi Manajemen Risiko Tahun 2025 bersama dengan Divisi Manajemen Risiko;
10. Pembahasan mengenai rencana integrasi Dana Pensiun dan perubahan Peraturan Dana Pensiun PTPP bersama Manajemen Dana Pensiun, Tapera dan Divisi Human Capital Management sebanyak 2 (dua) kali rapat;

Several items on the agenda of the Risk Monitoring Committee Meeting can be outlined as follows:
1. Internal discussion of the Integrated Governance Guidelines draft prepared by Management in two meetings;
2. Discussion of the 2025 RKAP and KPI concepts with the Audit Committee in two meetings;
3. Discussion of the Risk Management Strategy draft in the 2026 RKAP;
4. Internal discussion and review of the PTPP Risk Management Report for Fiscal Year 2024;
5. Discussion of the Internal Audit Charter draft and the SPI Annual Audit Work Program draft for 2025 at the invitation of the Audit Committee;
6. Discussion of the Key Risk Indicators monitoring results for the Q4/2024 from the Risk Management Division, and preparing a review thereof;
7. Discussion of fraud risk monitoring by the MR Division in the context of implementing the Anti-Bribery Management System;
8. Discussion of the Whistleblowing System Guidelines draft revision prepared by Management, together with the Audit Committee and the Corporate Secretary Bureau, in two meetings;
9. Discussion of the 2025 work program of the Risk Management Division together with the Risk Management Division;
10. Discussion on the pension fund integration plan and changes to the PTPP Pension Fund Regulations with the Pension Fund Management, Tapera, and Human Capital Management Division in two meetings;

11. Pembahasan internal atas Laporan Manajemen Risiko 2024, serta menyusun telaah Komite mengenainya;
12. Mengikuti pelaksanaan RUPS Tahunan 2024 PTPP;
13. pemantauan dan Pembahasan atas sistem manajemen risiko yang digunakan untuk level proyek bersama Divisi Manajemen Risiko;
14. Pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan I/2025 dari Divisi Manajemen Risiko, serta menyusun telaah mengenainya;
15. Pembahasan internal atas hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* oleh pihak penilai independen;
16. Pembahasan atas *draft Contingency Plan* yang disusun Manajemen atas RKAP 2025 bersama dengan Komite Audit, serta menyusun telaah bersama mengenainya sebanyak 6 (enam) kali rapat;
17. Pembahasan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam rencana revisi RKAP PTPP Tahun 2025 bersama Komite Audit dan Tim Penyusun RKAP PTPP sebanyak 2 (dua) kali rapat;
18. Pembahasan atas rencana divestasi PT PP Infrastruktur bersama Komite Audit, Divisi Business Development and Portfolio Management serta Manajemen PT PP Infrastruktur;
19. Pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan II/2025 dari Divisi Manajemen Risiko, serta menyusun telaah mengenainya;
20. Pembahasan atas asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Strategi Manajemen Risiko RKAP 2026 bersama Divisi Manajemen Risiko;
21. Pembahasan atas draft RKAP 2026 bersama Komite Audit dan Tim Penyusun RKAP PTPP sebanyak 2 (dua) kali rapat;
22. Pembahasan atas hasil asesmen *Risk Maturity Index* Tahun 2024 bersama Tim Asesor Internal dan Divisi Manajemen Risiko;
23. Pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan III/2025 dari Divisi Manajemen Risiko, serta menyusun telaah mengenainya;
24. Pembahasan dan pendalaman atas perubahan konsep Manajemen Risiko sesuai arahan Danantara bersama Divisi Manajemen Risiko;
25. Kunjungan pada Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang dan Proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B bersama Dewan Komisaris dan Komite Audit;
26. Pembahasan atas strategi perusahaan yang akan dituangkan dalam draft RJPP 2026 bersama Komite Audit dan Tim Penyusun RJPP PTPP sebanyak 2 (dua) kali rapat;
27. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali rapat; serta
28. Mengikuti Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 (enam) kali rapat.

11. Internal discussion on the 2024 Risk Management Report and preparation of the Committee's review thereof;
12. Attending the 2024 PTPP Annual GMS;
13. Monitoring and discussing the risk management system used at the project level with the Risk Management Division;
14. Discussing the results of the Key Risk Indicators monitoring for Q1/2025 from the Risk Management Division, and preparing a review thereof;
15. Internal discussion of the results of the ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment by an independent assessor;
16. Discussion of the Contingency Plan draft prepared by Management for the 2025 RKAP together with the Audit Committee, and preparing a joint review of it in six meetings;
17. Discussion of the assumptions used in the revised 2025 RKAP plan with the Audit Committee and the PTPP RKAP Drafting Team in two meetings;
18. Discussion of the PT PP Infrastruktur divestment plan with the Audit Committee, the Business Development and Portfolio Management Division, and PT PP Infrastruktur Management;
19. Discussion of the Key Risk Indicators monitoring results for Q2/2025 from the Risk Management Division, and preparing a review thereof;
20. Discussion of the assumptions that need to be considered in the preparation of the 2026 RKAP Risk Management Strategy with the Risk Management Division;
21. Discussion of the 2026 RKAP draft with the Audit Committee and the PTPP RKAP Drafting Team in two meetings;
22. Discussion of the 2024 Risk Maturity Index assessment results with the Internal Assessment Team and the Risk Management Division;
23. Discussion of the Key Risk Indicator monitoring results for Q3/2025 from the Risk Management Division, as well as compiling a review thereof;
24. Discussion and in-depth analysis of changes to the Risk Management concept per Danantara's directives, together with the Risk Management Division;
25. Visited the Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline Project and the Kalibaru Terminal Project Phase 1B with the Board of Commissioners and the Audit Committee;
26. Discussing the company's strategy to be outlined in the 2026 RJPP draft with the Audit Committee and the PTPP RJPP Drafting Team in two meetings;
27. Attended six Board of Commissioners meetings; and
28. Attended six joint meetings with the Board of Commissioners and Board of Directors.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025 adalah sebebai berikut:

1. Komite melakukan pembahasan dan penyusunan tanggapan atas draft Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan Manajemen pada tanggal 3 dan 10 Januari 2025. Telaah Komite telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 01/KGCGPRNR/DKOM/01/2025 tanggal 6 Januari 2025. Melalui surat dimaksud Komite antara lain menyarankan Direksi untuk melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi Pedoman, *Work Instruction* dan Keputusan-keputusan Direksi terkait *Subsidiary Governance* yang ada, menyusun strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi antara Induk dan Anak-anak Perusahaan serta pengintegrasian risiko-risiko Anak Perusahaan yang berdampak pada kondisi dan kinerja Induk, yang mencakup sekurangnya:risiko keuangan serta risiko hukum dan kepatuhan;

2. Komite melakukan pembahasan atas konsep RKAP dan KPI Tahun Buku 2025 yang diajukan Direksi pada tanggal 7 dan 21 Januari 2025. Pembahasan dilakukan bersama dengan Komite Audit dan telaah Komite bersama telah disampaikan melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 02/KGCGPRNR/DKOM/01/2025 tanggal 8 Januari 2025. Masukan Komite kepada Manajemen antara lain mencakup: komitmen Direksi menjalankan seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan dan mengimplementasikan secara komprehensif *roadmap* penyelesaian tindak lanjut perbaikan ICOFR (*Internal Control Over Financial Reporting*), penerapan *cash management* yang baik agar *cash flow* perusahaan tetap terjaga, dan perlunya dilakukan pemantauan menyeluruh terhadap kinerja anak perusahaan dan perusahaan patungan, terutama terhadap dampak dan risiko resesi global;
3. Komite melakukan pembahasan draft Strategi Manajemen Risiko dalam RKAP 2026 yang disampaikan Direksi bersama dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 10 Januari 2025. Catatan dan masukan Komite dalam pembahasan telah ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan melakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan masukan yang diberikan;
4. Pada tanggal Februari 2025, Komite mengikuti pembahasan atas draft *Internal Audit Charter* dan *draft* Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2025 atas undangan dari Komite Audit. Catatan dari Komite Pemantau Risiko telah disampaikan dalam rapat dan menjadi catatan bagi SPI dalam penyusunan *Internal Audit Charter* dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2025. Secara khusus Komite mendorong agar penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI dapat meng*cover* area-area pengendalian atas *Top Risk* Perusahaan dalam tahun 2025;

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Risk Monitoring Committee in 2025

The tasks and activities carried out by the Risk Monitoring Committee throughout 2025 are as follows:

1. The Committee discussed and prepared a response to the draft Integrated Governance Guidelines submitted by Management on January 3 and 10, 2025. The Committee's review was submitted to the Board of Commissioners through Committee Letter to the Board of Commissioners No. 01/KGCGPRNR/DKOM/01/2025 dated January 6, 2025. Through the aforementioned letter, the Committee recommended that the Board of Directors update and synchronize the existing Guidelines, Work Instructions, and Board of Directors' Decrees related to Subsidiary Governance, develop an integrated risk management strategy between the Parent Company and its Subsidiaries, and integrate the Subsidiaries risks that have an impact on the Parent Company's condition and performance, which include at least: financial risks as well as legal and compliance risks;
2. The Committee discussed the 2025 RKAP and KPI concepts proposed by the Board of Directors on January 7 and 21, 2025. The discussion was held with the Audit Committee, and the joint review was submitted through a Committee Letter to the Board of Commissioners No. 02/KGCGPRNR/DKOM/01/2025 dated January 8, 2025. The Committee's input to Management included: the Board of Directors' commitment to implement all recommendations for improvement and comprehensively implement the roadmap for the completion of ICOFR (Internal Control Over Financial Reporting) improvements, the implementation of good cash management to maintain the company's cash flow, and the need for comprehensive monitoring of the performance of subsidiaries and joint ventures, especially in relation to the impact and risks of a global recession;
3. The Committee discussed the Risk Management Strategy draft for the 2026 RKAP, submitted by the Board of Directors and the Risk Management Division on January 10, 2025. Management has followed up on the Committee's notes and input in the discussion by making revisions and improvements based on the provided input;
4. On February 10, 2025, the Committee participated in discussions on the Internal Audit Charter draft and the SPI Annual Audit Work Program draft for 2025 at the invitation of the Audit Committee. The Risk Monitoring Committee's notes were presented at the meeting and considered by the SPI in preparing the Internal Audit Charter and the SPI Annual Audit Work Program for 2025. In particular, the Committee encouraged the preparation of the SPI Annual Audit Work Program to cover the control areas of the Company's Top Risks in 2025;

5. Pada tanggal 5 Maret 2025, Komite melakukan pembahasan internal Komite dan menyusun telaah atas Laporan Manajemen Risiko PTPP Tahun Buku 2024 yang disampaikan Manajemen. Masukan yang disampaikan Komite kepada Manajemen antara lain adalah agar target-target dalam RKAP yang akan datang agar dapat lebih sinkron dengan toleransi dan limit risiko yang telah ditetapkan, serta memastikan realistisnya target divestasi yang direncanakan, disertai dengan pemantauan secara intensif atas progres pelaksanaan divestasi dan penyediaan alternatif aset dalam *longlist* divestasi sebagai *contingency plan*.
6. Komite melakukan pembahasan atas pemantauan *fraud risk* oleh Divisi Manajemen Risiko dalam konteks penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pembahasan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025 bersama Divisi Manajemen Risiko dan catatan dan masukan Komite telah disampaikan pada saat pembahasan;
7. Komite melakukan beberapa kali rapat pembahasan atas *draft* revisian Pedoman *Whistleblowing System* yang disusun Manajemen bersama dengan Komite Audit dan Biro Corporate Secretary pada tanggal 11 dan 14 Maret 2025. Masukan dan koreksian Komite telah disampaikan secara tertulis maupun secara langsung dibahas pada saat rapat. Secara formal, tanggapan Komite atas draft final dokumen yang telah disempurnakan disampaikan melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 07/KPR/DKOM/09/2025 tanggal 16 September 2025. Masukan Komite antara lain terkait dengan penyempurnaan kembali struktur penanganan laporan pengaduan dan alokasi kewenangan diantara anggota tim pengelola pengaduan, pengaturan ulang mengenai mekanisme penanganan laporan pengaduan serta penyusunan *work instruction* bagi perlindungan bagi pelapor;
8. Komite melakukan pembahasan atas program kerja Divisi Manajemen Risiko Tahun 2025 bersama dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 25 Maret 2025. Masukan Komite telah disampaikan pada saat rapat dan menjadi catatan bagi Divisi Manajemen Risiko;
9. Komite melakukan pembahasan mengenai rencana integrasi Dana Pensiun dan perubahan Peraturan Dana Pensiun PTPP bersama Manajemen Dana Pensiun, Taper dan Divisi Human Capital Management pada tanggal 9 dan 25 April 2025. Catatan dan masukan Komite telah disampaikan melalui Surat No. 01/KPR/DKOM/04/2025 tanggal 21 April 2025 untuk menjadi perhatian bagi Manajemen dalam pelaksanaan integrasi. Secara khusus Komite memberi perhatian pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi iuran tambahan yang diperlukan untuk memastikan kecukupan pendanaan bagi Dana Pensiun setelah integrasi dilaksanakan;
10. Komite melakukan pembahasan internal atas hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* oleh pihak penilai independen pada tanggal 23 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam laporan yang disampaikan oleh Direksi. Catatan dan masukan

5. On March 5, 2025, the Committee conducted an internal discussion and prepared a review of the PTPP Risk Management Report for the 2024 Fiscal Year submitted by Management. The input provided by the Committee included that the upcoming RKAP targets should be more in line with the established risk tolerance and limits, as well as ensuring the realism of the planned divestment targets, accompanied by intensive monitoring of the divestment implementation progress and the alternative assets provision in the divestment longlist as a contingency plan;
6. The Committee discussed the Risk Management Division's monitoring of fraud risk in the context of implementing the Anti-Bribery Management System. The discussion was held on March 5, 2025, with the Risk Management Division, and the Committee's notes and input were submitted during the discussion;
7. The Committee held several meetings to discuss the Whistleblowing System Guidelines draft revision prepared by Management together with the Audit Committee and the Corporate Secretary Bureau on March 11 and 14, 2025. The Committee's input and corrections were submitted in writing and discussed directly during the meeting. Formally, the Committee's response to the final draft of the revised document was submitted through a Committee Letter to the Board of Commissioners No. 07/KPR/DKOM/09/2025 dated September 16, 2025. The Committee's input included refinements to the structure for handling complaints and the allocation of authority among members of the complaint management team, rearrangements to the complaint-handling mechanism, and the preparation of work instructions for protecting whistleblowers;
8. The Committee discussed the Risk Management Division 2025 work program with the Risk Management Division on March 25, 2025. The Committee's input was conveyed during the meeting and noted by the Risk Management Division;
9. The Committee discussed the plan to integrate the Pension Fund and amend the PTPP Pension Fund Regulations with the Pension Fund Management, Taper, and Human Capital Management Division on April 9 and 25, 2025. The Committee's notes and input were submitted through Letter No. 01/KPR/DKOM/04/2025 dated April 21, 2025, for Management's consideration in implementing the integration. In particular, the Committee paid attention to the company's ability to meet the additional contributions required to ensure sufficient funding for the Pension Fund after the integration is implemented;
10. The Committee conducted an internal discussion on the ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment results by an independent assessor on June 23, 2025, as stated in the report submitted by the Board of Directors. The Committee's notes and

Komite mengenai hasil penilaian tersebut tertuang dalam telaah Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Komite No. 04/KPR/DKOM/06/2025 tanggal 3 Juli 2025. Masukan Komite kepada Manajemen terutama difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut atas beberapa catatan dari hasil asesmen;

11. Komite melakukan pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan I/2025 dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 27 dan 28 Mei 2025, serta menyampaikan catatan dan masukan Komite mengenainya. Secara formal, telaah Komite telah disampaikan pula melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 03/KPR/DKOM/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan telah dipaparkan dalam Rapat Komite dengan Dewan Komisaris;
12. Komite melakukan pembahasan atas *draft Contingency Plan* yang disusun Manajemen atas RKAP 2025 bersama dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 24 Juli, 4 dan 9 Juli, serta 11, 12 dan 25 Agustus 2025. Pembahasan dilakukan bersama dengan Komite Audit, dan telah disusun telaah bersama berdasarkan pembahasan yang dilakukan yang disampaikan melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 06/KPR/DKOM/09/2025 tanggal 16 September 2025. Masukan Komite kepada Manajemen antara lain meliputi saran untuk menyusun prosedur dan/atau *work instruction* pemantauan *trigger point* dan *trigger level* secara kontinyu, memastikan dilakukannya pemantauan kontinyu atas seluruh trigger point dan trigger level yang ditetapkan, serta merekomendasikan agar penyusunan *contingency plan* serupa dilakukan pula pada Anak-anak Perusahaan yang berstatus sistemik A;
13. Komite melakukan pembahasan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam rencana revisi RKAP PTPP Tahun 2025 bersama Komite Audit dan Tim Penyusun RKAP PTPP pada tanggal 10 dan 16 Juli 2025. Catatan dan masukan Komite telah disampaikan pada saat rapat untuk menjadi bahan koreksian dan masukan bagi Manajemen;
14. Komite melakukan pembahasan atas rencana divestasi PT PP Infrastruktur bersama Komite Audit, Divisi *Business Development* and *Portfolio Management* dan Manajemen PT PP Infrastruktur pada tanggal 22 Juli 2025. Catatan dan masukan Komite telah disampaikan pada saat rapat untuk menjadi bahan koreksian dan masukan bagi Manajemen;
15. Komite melakukan pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan II/2025 dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 29 Juli 2025, serta menyampaikan catatan dan masukan Komite mengenainya. Secara formal, telaah Komite telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat 05/KPR/DKOM/08/2025 tanggal 22 Agustus 2025 dan telah dipaparkan dalam Rapat Komite dengan Dewan Komisaris;

input regarding the assessment results are contained in the Committee's review submitted to the Board of Commissioners through Letter No. 04/KPR/DKOM/06/2025 dated July 3, 2025. The Committee's input to Management focused primarily on the implementation of follow-up actions on several notes from the assessment results;

11. The Committee discussed the Key Risk Indicators monitoring results for Q1/2025 with the Risk Management Division on May 27 and 28, 2025, and submitted the Committee's notes and input regarding this matter. Formally, the Committee's review was also submitted through Committee Letter to the Board of Commissioners No. 03/KPR/DKOM/06/2025 dated June 25, 2025, and was presented at the Committee Meeting with the Board of Commissioners;
12. The Committee discussed the Contingency Plan draft prepared by Management for the 2025 RKAP together with the Risk Management Division on July 24, July 4 and 9, and August 11, 12, and 25, 2025. The discussion was held with the Audit Committee, and a joint review was prepared based on the discussion, which was submitted through Committee Letter to the Board of Commissioners No. 06/KPR/DKOM/09/2025 dated September 16, 2025. The Committee's input to Management included recommendations to develop procedures and/or work instructions for continuous monitoring of trigger points and trigger levels, to ensure continuous monitoring of all established trigger points and trigger levels, and to recommend that similar contingency plans be developed for Subsidiaries with systemic A status.
13. The Committee discussed the assumptions used in the revised 2025 PTPP RKAP plan with the Audit Committee and the PTPP RKAP Drafting Team on July 10 and 16, 2025. The Committee's notes and input were submitted during the meeting to be used as corrections and input for Management;
14. The Committee discussed the divestment plan of PT PP Infrastruktur with the Audit Committee, the Business Development and Portfolio Management Division, and the Management of PT PP Infrastruktur on July 22, 2025. The Committee's notes and input were submitted during the meeting to be used as corrections and input for Management;
15. The Committee discussed the Key Risk Indicators monitoring results for Q2/2025 with the Risk Management Division on July 29, 2025, and submitted the Committee's notes and input regarding this matter. Formally, the Committee's review was submitted to the Board of Commissioners through Letter 05/KPR/DKOM/08/2025 dated August 22, 2025, and was presented at the Committee Meeting with the Board of Commissioners;

16. Komite melakukan pembahasan atas hasil asesmen *Risk Maturity Index* Tahun 2024 bersama Tim Asesor Internal dan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 10 Oktober 2025, serta menyampaikan catatan dan masukan Komite mengenainya. Secara formal, telaah Komite telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Komite kepada Dewan Komisaris No. 08/KPR/DKOM/11/2025 tanggal 10 November 2025. Masukan Komite kepada Manajemen meliputi antara lain: menindaklanjuti hasil penilaian *Risk Maturity Index*, memperkuat penerapan model tata kelola tiga lini melalui kebijakan formal dan evaluasi berkala sekurangnya dua kali dalam satu tahun, melakukan pengembangan platform manajemen risiko terintegrasi yang menghubungkan kebijakan risiko, *key risk indicator, loss event database* dan laporan mitigasi secara *real time*, memperkuat integrasi risiko proyek, unit dan korporat ke dalam sistem informasi risiko perusahaan serta menetapkan *early warning trigger* terhadap limit risiko yang telah ditetapkan;
17. Komite melakukan pembahasan atas hasil pemantauan *Key Risk Indicator* Triwulan III/2025 dengan Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 23 Oktober 2025, serta menyampaikan catatan dan masukan Komite mengenainya. Secara formal, telaah Komite telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat 09/KPR/DKOM/11/2025 tanggal 24 November 2025 dan telah dipaparkan dalam Rapat Komite dengan Dewan Komisaris;
18. Komite melakukan kunjungan pada Proyek Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang dan Proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B bersama Dewan Komisaris dan Komite Audit. Masukan Komite telah disampaikan kepada Manajemen pada saat pemaparan dan pembahasan progres pelaksanaan Proyek; serta
19. Melakukan pembahasan atas strategi perusahaan yang akan dituangkan dalam draft RJPP 2026 bersama Komite Audit dan Tim Penyusun RJPP PTPP, serta menyampaikan catatan dan masukan Komite mengenainya.

16. The Committee discussed the 2024 Risk Maturity Index assessment results with the Internal Assessment Team and the Risk Management Division on October 10, 2025, and submitted the Committee's notes and input on this matter. Formally, the Committee's review was submitted to the Board of Commissioners through Committee Letter to the Board of Commissioners No. 08/KPR/DKOM/11/2025 dated November 10, 2025. The Committee's input to Management includes, among others: following up on the results of the Risk Maturity Index assessment, strengthening the implementation of the three lines of governance model through formal policies and periodic evaluations at least twice a year, developing an integrated risk management platform that connects risk policies, key risk indicators, loss event databases, and mitigation reports in real time, strengthening the integration of project, unit, and corporate risks into the company's risk information system, and establishing early warning triggers for predetermined risk limits;
17. The Committee discussed the Key Risk Indicators monitoring results for Q3/2025 with the Risk Management Division on October 23, 2025, and submitted the Committee's notes and input on this matter. Formally, the Committee's review was submitted to the Board of Commissioners through Letter 09/KPR/DKOM/11/2025 dated November 24, 2025, and was presented at the Committee Meeting with the Board of Commissioners;
18. The Committee visited the Cikampek-Plumpang Fuel Pipeline Project and the Kalibaru Terminal Project Phase 1B with the Board of Commissioners and the Audit Committee. The Committee's input was conveyed to Management during the presentation and discussion of the Project's progress; and
19. Discussed the company's strategy to be outlined in the 2026 RJPP draft with the Audit Committee and the PTPP RJPP Drafting Team, and submitted the Committee's notes and input regarding this matter

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko merujuk pada SK No. 006/SK/KOM/ PP/09/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Remuneration Policy

The Remuneration Policy of the Risk Monitoring Committee refers to Decree No. 006/SK/KOM/PP/09/2022 dated September 2, 2022, on the Determination of Income of Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi di lingkup Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee is established by and is responsible to the Board of Commissioners for evaluating Integrated Governance policies and implementation, and for providing recommendations to the Board of Commissioners to improve Integrated Governance policies within the Company in accordance with applicable laws.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam Piagam Tata Kelola Terintegrasi PTPP telah diatur persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi
   Komposisi Komite TKT terdiri dari:
   - » Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   - » Anggota Komisaris perusahaan induk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; serta
   - » Komisaris yang mewakili masing-masing anak perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Kualifikasi
   a. Pelatihan
      - » Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti pelatihan dengan topik tata kelola perusahaan.
      - » Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam poin di atas paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan.
      - » Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Perusahaan.

   b. Sertifikasi
      - » Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib mengikuti sertifikasi saat menjabat pada bidang tata kelola Perusahaan.
      - » Sertifikasi sebagaimana dimaksud point di atas dipenuhi dengan ketentuan:
        - Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diikuti secara nasional dan/atau internasional; serta
        - Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika dan sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.
3. Susunan Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPP No. 005/SK/KOM/PP/06/2024 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PP (Persero) Tbk dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah mengikuti masa jabatan masing-masing selaku Dewan Komisaris di PTPP dan entitas anak.

Qualifications to Become Members of the Integrated Governance Committee

The PTPP Integrated Governance Charter stipulates the following requirements and qualifications for becoming a member of the Integrated Governance Committee:

1. Composition
   The TKT Committee composition consists of:
   - » The President Commissioner serves as Chair of the Integrated Governance Committee;
   - » Members of the parent company's Board of Commissioners serve as the Integrated Governance Committee members; and
   - » Commissioners representing each subsidiary as members of the Integrated Governance Committee.
2. Qualifications
   a. Training
      - » Each member is required to attend training on corporate governance topics every year.
      - » In one year, members are required to attend at least 20 hours of training as referred to in the point above.
      - » The training attended must be PPL organized by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions, and/or training institutions owned or controlled by the Company.

   b. Certification
      - » Integrated Governance Committee members are required to obtain certification while serving in the field of corporate governance.
      - » The certification referred to in the point above is fulfilled with the following conditions:
        - Issued by a certification board/regulator/ related professional organization that is recognized nationally and/or internationally; and
        - The certification issuing institution has professional and ethical standards and a standards board, and certification is required to be valid for the duration of the term of office.
3. The composition of the Chair and members of the Integrated Governance Committee is determined by the Board of Commissioners.

Term of Office

Per the Board of Commissioners of PTPP Decree No. 005/SK/KOM/PP/06/2024 on the Establishment of the Integrated Governance Committee of PT PP (Persero) Tbk and the Integrated Governance Committee Charter, the term of office of members of the Integrated Governance Committee shall follow their term of office as a member of the Board of Commissioners of PTPP and its subsidiaries.

Untuk masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

For members of the Integrated Governance Committee who are not members of the Board of Commissioners, the term of office is a maximum of three years and may be extended for a further two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berikut disampaikan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Desember 2025.

Total Members, Composition, and Structure of the Integrated Governance Committee

The following is the composition of the Integrated Governance Committee in December 2025.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2025

Integrated Governance Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Dhony Rahajoe	Ketua Komite/ Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PTPP Chairman of the Committee/PTPP President Commissioner and concurrently as Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama Following the term of office as the President Commissioner
Ernadhi Sudarmanto	Anggota Komite/ Komisaris PTPP Member of the Committee/PTPP Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Following the term of office as the Commissioner
Hedy Rahadian	Anggota Komite/ Komisaris PTPP Member of the Committee/PTPP Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Following the term of office as the Commissioner
Pundjung Setya Brata	Anggota Komite/ Komisaris Independen PTPP Member of the Committee/ PTPP Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner
Jaya Kesuma	Anggota Komite/ Komisaris Independen PTPP Member of the Committee/ PTPP Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Istiono	Anggota Komite/ Komisaris Independen PTPP Member of the Committee/ PTPP Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen Following the term of office as the Independent Commissioner
Fakhrul Ulum	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPRO Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPRO)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPRO Following the term of office as PPRO President Commissioner
Narwanto	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPRE Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPRE)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPRE Following the term of office as PPRE President Commissioner
Fatchul Birri	Koordinator dan Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPUB Coordinator and Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPUB)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Surat Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi No. 024/KOM/PP/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024 Integrated Governance Committee Chairman Letter No. 024/KOM/PP/05/2025 dated May 28, 2025	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPUB Following the term of office as PPUB President Commissioner
Anwar Ismail	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPEN Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPEN)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPEN Following the term of office as PPEN President Commissioner
Anton Satyo Hendriatmo	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPIN Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPIN)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPIN Following the term of office as PPIN President Commissioner
HR Ario Setyawan	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPSD Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPEN)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPSD Following the term of office as PPSD President Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Gratianus Arya	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, CPI Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPSD)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama CPI Following the term of office as CPI President Commissioner
Dharma Hermances	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, SC Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (SC)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama SC Following the term of office as SC President Commissioner
Diana Puspitasari	Anggota Komite/ Komisaris Utama entitas anak, PPSB Member of the Committee/ President Commissioner of a subsidiary entity (PPSB)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/ SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Board of Commissioners Decree No. 005/SK/ KOM/PP/06/2024 dated June 26, 2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPSB Following the term of office as PPSB President Commissioner

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profile of the Integrated Governance Committee Members

Ir. Dhony Rahajoe

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama
Chairman of the Integrated Governance Committee/President Commissioner

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dhony Rahajoe dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Dhony Rahajoe, Chairman of the Integrated Governance Committee, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dr. Ernadhi Sudarmanto Ak., MM., M.Ak.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of the Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Ernadhi Sudarmanto dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Ernadhi Sudarmanto, a Member of the Integrated Governance Committee, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of the Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Hedy Rahadian dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Hedy Rahadian, a Member of the Integrated Governance Committee, is available in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Ir. Pundjung Setya Brata, M.M.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pundjung Setya Brata dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Pundjung Setya Brata, a Member of the Integrated Governance Committee, can be viewed in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dr. Jaya Kesuma SH., M.Hum

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Jaya Kesuma dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Jaya Kesuma, a Member of the Integrated Governance Committee, can be viewed in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Istiono, MH

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Independent Commissioner

Profil Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, Istiono, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Istiono, the Secretary of the Integrated Governance Committee, can be viewed in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Fakhrul Ulum

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPRO
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPRO

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Surabaya, 25 Juli 1977
Born in Surabaya, July 25, 1977

Usia 48 tahun
48 years old

Berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPRO (26 Juni 2024 s.d 5 Juni 2029, Periode ke-1)
Following the term of office as PPRO President Commissioner (June 26, 2024, to June 5, 2029, 1st Term)

Pendidikan
Formal Education

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (2002)

Bachelor of Civil Engineering from the 10 November Institute of Technology Surabaya (2002)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Komisaris Utama PPRO (2024-sekarang)
- Senior Vice President Divisi Legal PTPP (2024-sekarang)
- Senior Vice President Divisi HCM PTPP (2023-2024)
- Direktur Operasi PT PP Urban (2021-2023)
- General Manager Operasional Divisi Gedung PTPP (2018-2021)
- Project Manager Divisi Gedung PTPP (2014-2018)
- Construction Manager Divisi Gedung PTPP (2013-2014)

- President Commissioner of PPRO (2024-present)
- Senior Vice President of PTPP Legal Division (2024-present)
- Senior Vice President of PTPP HCM Division (2023-2024)
- Director of Operations of PT PP Urban (2021-2023)
- General Manager of PTPP Building Division Operations (2018-2021)
- Project Manager of PTPP Building Division (2014-2018)
- Construction Manager of PTPP Building Division (2013-2014)

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

Certified Risk Governance Professional (2025

Certified Risk Governance Professional (2025).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di dalam Perusahaan:
SVP, Head of Legal Division (2024-sekarang)

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PT PP Properti (2024-sekarang)

Within the Company:
SVP, Head of Legal Division (2024-present)

Outside the Company:
President Commissioner of PT PP Properti (2024-present)

Narwanto

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPRE
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPRE

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Klaten, 7 Oktober 1974
Born in Klaten, October 7, 1975

Usia 51 tahun
51years old

Berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPRE (23 Mei 2025 s.d 23 Mei 2030, Periode ke-1)
Following the term of office as PPRE President Commissioner (May 23, 2025, to May 23, 2030, 1st Term)

Pendidikan
Formal Education

Sarjana (S1) Manajemen (2011), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga

Bachelor of Management (2011), Adhy Niaga College of Economics

Pengalaman Kerja

- Senior Underwriting, PT Asuransi Jiwa Miralife (1996-1999)
- Asisten Manager Aktuaria, PT Asuransi Jiwa Intan Life (1999-2004)
- Ajun Aktuaris, PT Konsultan Aktuaria Tiwi Krama (2004-2008)
- Asisten Pribadi, Alm. Prof.DR.Ir. Suhardi. Msc (Guru Besar UGM) (2008-2014)
- Tenaga Ahli, Anggota DPR RI Bpk. DR. Ir. H.A.R. Sultan Adil Hendra, MM (2014-2024); dan
- Tenaga Ahli, Anggota DPR RI Bpk. Andik Sasongko (2024-sekarang)

Work Experience

- Senior Underwriter, PT Asuransi Jiwa Miralife (1996-1999)
- Assistant Actuarial Manager, PT Asuransi Jiwa Intan Life (1999-2004)
- Assistant Actuary, PT Konsultan Aktuaria Tiwi Krama (2004-2008)
- Personal Assistant to the late Prof. DR. Ir. Suhardi, M.Sc. (Professor at Gadjah Mada University) (2008-2014)
- Expert Staff to Member of the House of Representatives, Mr. Dr. Ir. H.A.R. Sultan Adil Hendra, MM (2014-2024); and
- Expert Staff to Member of the House of Representatives, Mr. Andik Sasongko (2024-present)

Sertifikasi Profesi

Associate Society of Actuaries of Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia (2002).

Professional Certification

Associate Society of Actuaries of Indonesia, the Society of Actuaries of Indonesia (2002).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PT PP Presisi (2025-sekarang)

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company:
President Commissioner of PT PP Presisi (2025-present)

Fatchul Birri

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPUB
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPUB

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Malang, 22 Oktober 1966
Born in Malang, October 22, 1966

Usia 59 tahun
59 years old

Berdomisili di Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Domiciled in Bogor, West Java, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPUB (26 Juni 2024 s.d 25 Mei 2028, Periode ke-1)
Following the term of office as PPUB President Commissioner (June 26, 2024, to May 25, 2028, 1st Term)

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (1990)

Formal Education

Bachelor of Irrigation Engineering from Brawijaya University (1990)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PPUB (2023-sekarang)
- Senior Vice President Divisi OC SCC PTPP (2020-2024)
- Komisaris Utama PT Jasa Marga Manado Bitung (2018-2023)
- Senior Vice President Divisi SCM & IS PTPP (2020-2020)
- Senior Vice President Biro OBC PTPP (2020-2020)
- Plt Senior Vice President Biro QHSE PTPP (2020-2020)
- Komisaris PT Odira Energi Karang Agung (2018-2020)
- Kepala Cabang VIII, Makassar PTPP (2013-2016)
- Kepala Cabang VII, Makassar PTPP (2012-2013)
- Deputy Kepala Cabang VII, Makassar PTPP (2010-2012)
- Project Manager PTPP (2003-2010)
- Staf sampai dengan Site Manager PTPP (1994-2003)

Work Experience

- President Commissioner of PPUB (2023-present)
- Senior Vice President of the OC SCC Division of PTPP (2020-2024)
- President Commissioner of PT Jasa Marga Manado Bitung (2018-2023)
- Senior Vice President of PTPP SCM & IS Division (2020-2020)
- Senior Vice President of PTPP OBC Bureau of (2020-2020)
- Acting Senior Vice President of PTPP QHSE Bureau (2020-2020)
- Commissioner of PT Odira Energi Karang Agung (2018-2020)
- Head of PTPP Branch VIII, Makassar (2013-2016)
- Head of PTPP Branch VII, Makassar (2012-2013)
- Deputy Head of PTPP Branch VII, Makassar (2010-2012)
- Project Manager PTPP (2003-2010)
- Staff to Site Manager PTPP (1994-2003)

Sertifikasi Profesi

- Sertifikasi Ahli K-3 Bidang Konstruksi/ Pekerjaan Umum, Asosiasi Ahli K3 dan Depnakertrans (1999);
- Sertifikasi Ahli Pelaksana Madya Jalan dan Jembatan, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DKI (2003);
- Sertifikasi Ahli Profesional Madya Bidang Sipil, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) (2005); serta
- Sertifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, KDPK & Bappenas (2006).

Professional Certification

- OHS Expert Certification in Construction/Public Works, Association of OHS Experts and Depnakertrans (1999);
- Intermediate Road and Bridge Implementation Expert Certification, Indonesian Road Development Association (HPJI) DKI (2003);
- Intermediate Professional Certification in Civil Engineering, Indonesian Construction Experts Association (HAKI) (2005); and
- Certification in Construction Services Procurement and Government Goods/Services Procurement, KDPK & Bappenas (2006).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PPUB (2023-sekarang)

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company:
President Commissioner of PPUB (2023-present)

Anwar Ismail

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPEN
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPEN

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Jakarta, 14 Februari 1984
Born in Jakarta, February 14, 1984

Usia 41 tahun
41 years old

Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPEN (26 Juni 2024 s.d 22 Juni 2028, Periode ke-1)
Following the term of office as PPEN President Commissioner (June 26, 2024, to June 22, 2028, 1st Term)

Pendidikan
Formal Education

- Magister (S2), Quantitative Finance & Risk Management dari Newcastle University, Inggris (2017)
- Sarjana (S1), Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (2006)

- Master of Quantitative Finance & Risk Management from Newcastle University (2017)
- Bachelor of Civil Engineering from Diponegoro University (2006)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Komisaris Utama PPEN (2023-sekarang)
- SVP Business Development & Portfolio Management PTPP (2021-sekarang)
- Direktur Bisnis & HCM PPEN (2019-2021)
- Kepala Departemen Analisa Investasi PTPP (2017-2019)
- Direktur Utama PT Surya Mina Bunkerindo (2019)
- Project Manager Profesional EPC PTPP (2015-2017)

- President Commissioner of PPEN (2023-present)
- PTPP SVP Business Development & Portfolio Management (2021-present)
- PPEN Director of Business & HCM (2019-2021)
- Head of PTPP Investment Analysis Department (2017-2019)
- President Director of PT Surya Mina Bunkerindo (2019)
- Professional Project Manager EPC (2015-2017)

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

-

-

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di dalam Perusahaan:
SVP, Head of Business Development & Portfolio Management (2021-sekarang)

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PPEN (2023-sekarang)

Within the Company:
SVP, Head of Business Development & Portfolio Management (2021-present)

Outside the Company:
President Commissioner of PPEN (2023-present)

Anton Satyo Hendriatmo

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPIN
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPIN

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Jakarta, 1 April 1969
Born in Jakarta, April 1, 1969

Usia 56 tahun
56 years old

Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPIN (26 Juni 2024 s.d 25 Mei 2028, Periode ke-2)
Following the term of office as PPIN President Commissioner (June 26, 2024, to June 22, 2028, 2nd Term)

Pendidikan
Formal Education

- Master (S2) of Construction Project Management dari Hogeschool van Arnhem en Nijmegen University Belanda (2005)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Jawa Barat (1993)

- Master of Construction Project Management from Hogeschool van Arnhem en Nijmegen University Netherlands (2005)
- Bachelor of Civil Engineering from the University of Indonesia (1993

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PPIN (2019-sekarang)
- Direktur Gedung PTPP (2018-2023)
- Kepala Divisi Gedung 2 PTPP (2017-2018)
- Kepala Divisi Operasi II (Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat) PTPP (2016-2017)
- Kepala Divisi Operasi IV (Wilayah Operasi Indonesia Timur) PTPP (2014-2016)
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PTPP (2013-2014)
- Kepala Cabang IV Bandung PTPP (2011-2013)
- Deputy KCB III Jakarta PTPP (2009-2011)
- Project Manager PTPP (2001-2009)

Work Experience

- President Commissioner of PPIN (2019-present)
- PTPP Director of Buildings (2018-2023)
- Head of PTPP Building Division 2 (2017-2018)
- Head of PTPP Division II Operations (DKI Jakarta and West Java Regions) (2016-2017)
- Head of PTPP Division IV Operations (Eastern Indonesia Operations Region) (2014-2016)
- Head of PTPP Human Resources Division (2013-2014)
- Head of PTPP Bandung IV Branch (2011-2013)
- Deputy PTPP KCB III Jakarta (2009-2011)
- PTPP Project Manager (2001-2009)

Sertifikasi Profesi

- Sertifikasi Ahli K3, Departemen Tenaga Kerja (1990); serta
- Sertifikasi Insinyur Profesional Utama, Persatuan Insinyur Indonesia / PII (2023).

Professional Certification

- OHS Expert Certification, Manpower Department (1990); and
- Senior Professional Engineer Certification, Institute of Indonesian Engineers (PII) (2023).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama PPIN (2019-sekarang)

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company:
President Commissioner of PPIN (2019-present)

HR Ario Setyawan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPSD
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPSD

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Jakarta, 10 November 1969
Born in Jakarta, November 10, 1969

Usia 57 tahun
57 years old

Berdomisili di Surabaya
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPSD (26 Juni 2024 s.d 10 Mei 2027, Periode ke-1)
Following the term of office as PPSD President Commissioner (June 26, 2024, to May 10, 2027, 1st Term)

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang (1996)

Formal Education

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang (1996)

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama PPEN (2021-2025)
- Senior Vice President, Head of BDPM PTPP (2021)
- Senior Vice President, Head of QHSE PTPP (2020-2021)
- Direktur Utama PPEN (2018-2020)

Work Experience

- President Director PPEN (2021-2025)
- Senior Vice President, Head of BDPM PTPP (2021)
- Senior Vice President, Head of QHSE PTPP (2020-2021)
- President Director PPEN (2018-2020)

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada

Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Position

Within the Company: None

Outside the Company: None

Gratianus Arya

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, CPI
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, CPI

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Palembang, 10 November 1990
Born in Palembang, November 10, 1990

Usia 35 tahun
35 years old

Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Domiciled in South Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama CPI (26 Juni 2024 s.d. 28 Mei 2029, Periode ke-1)
Following the term of office as CPI President Commissioner (June 26, 2024, to May 28, 2029, 1st Term)

Pendidikan
Formal Education

Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2013)

Bachelor of Law from Parahyangan Catholic University, Bandung (2013)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Komisaris Utama CPI (2024-sekarang);
- Senior Manager Corporate Action & Compliance, Divisi Legal PTPP (2023-sekarang); serta
- Head of Manrisk & Legal PPIN (2021-2022).

- President Commissioner of CPI (2023-present);
- Senior Manager of PTPP Corporate Action & Compliance, Legal Division (2023-present); and
- Head of PPIN Manrisk & Legal (2021-2022)

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

Pendidikan Profesi Advokat (2017)

Advocate Professional Education (2017)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di dalam Perusahaan:
Senior Manager, Corporate Action and Compliance Department (2023-sekarang)

Di luar Perusahaan:
Komisaris Utama CPI (2024-sekarang)

Within the Company:
Senior Manager, Corporate Action and Compliance Department (2023-present)

Outside the Company:
President Commissioner of CPI (2024-present)

Dharma Hermances

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, SC
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, SC

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1975
Born in Jakarta, October 3, 1975

Usia 51 tahun
51 years old

Berdomisili di Depok
Domiciled in Depok

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama SC (26 Juni 2024 s.d. 9 Juli 2029, Periode ke-1)
Following the term of office as SC President Commissioner (June 26, 2024, to July 9, 2028, 1st Term)

Pendidikan
Formal Education

Sarjana (S1) Teknik Informatika, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta (2004)

Bachelor's Degree (S1) in Computer Science, Satya Negara Indonesia University, Jakarta (2004)

Pengalaman Kerja

- Komisaris, PT Sinergi Colomadu (2023-saat ini)
- Pimpinan Redaksi, Mustang Corp (2013-2019)

Work Experience

- Commissioner of PT Sinergi Colomadu (2023-saat ini)
- Editor-in-Chief, Mustang Corp (2013–2019)

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Position

Within the Company: None
Outside the Company: None

Diana Puspitasari

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama entitas anak, PPSB
Member of the Integrated Governance Committee/President Commissioner of a subsidiary entity, PPSB

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Kelahiran Jakarta, 8 April 1986
Born in Jakarta, April 8, 1986

Usia 39 tahun
39 years old

Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan
Term of Office

Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama PPSB (26 Juni 2024 s.d 26 September 2029, Periode ke-1)
Following the term of office as PPSB President Commissioner (June 26, 2024, to September 26, 2029, 1st Term)

Pendidikan

- Komisaris Utama PPSB (2024-sekarang)
- PJ Kepala Divisi Manajemen Portofolio PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2024-sekarang)
- Corporate Strategy & Portfolio Management Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2023-2024)
- VP Business Strategy PT Waskita Karya Realty (2022-2023)
- VP Realty PT Waskita Karya Realty (2021-2022)
- VP Business Development PT Waskita Karya Realty (2017- 2021)
- Manager Business Development PT Waskita Karya Realty (2015-2017)

Formal Education

- President Commissioner of PPSB (2024- present)
- Project Manager, Head of Portfolio Management Division, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2024-present)
- Corporate Strategy & Portfolio Management Manager, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2023-2024)
- VP Business Strategy, PT Waskita Karya Realty (2022-2023)
- VP Realty of PT Waskita Karya Realty (2021-2022)
- VP Business Development of PT Waskita Karya Realty (2017-2021)
- Manager of Business Development of PT Waskita Karya Realty (2015-2017)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama SC (2024-sekarang)
- Komisaris Utama PT PP Tirta Madani (2021-2023)
- Kepala Divestasi Investasi PTPP (2019-2022)
- Business Development Manager PTPP (2017-2019)
- Business Analyst PTPP (2014-2017)

Work Experience

- President Commissioner of SC (2024-present)
- President Commissioner of PT PP Tirta Madani (2021-2023)
- Head of PTPP Investment Divestment (2019-2022)
- PTPP Business Development Manager (2017-2019)
- PTPP Business Analyst (2014-2017)

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan:
PJ. Kepala Divisi Manajemen Portofolio PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2024-sekarang); Komisaris Utama PPSB (2024-sekarang)

Concurrent Position

Within the Company: None
Outside the Company:
Acting Head of Portfolio Management Division of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2024-present); President Commissioner of SC (2024-present)

Pedoman Kerja: Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut atas pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, pada tahun 2024 Komite GCGPRNR menyusun konsep Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi perlu memiliki piagam untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan keselarasan dengan regulasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Piagam juga membantu menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan mencegah konflik kepentingan, sehingga Komite dapat berfungsi secara efektif serta mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi No. 03/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 telah ditetapkan tanggal 24 Februari 2025.

Working Guidelines: Integrated Governance Committee Charter

As a follow-up to establishing the Integrated Governance Committee, in 2024, the GCGPRNR Committee drafted the Integrated Governance Committee Charter. The Integrated Governance Committee needs a charter to provide a clear framework, increase transparency and accountability, ensure alignment with regulations, and improve efficiency and effectiveness. The charter also helps to implement good governance principles and prevent conflicts of interest so that the Committee can function effectively and achieve the goals and targets set. The Integrated Governance Committee Charter No. 03/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 was ratified on February 24, 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi di lingkup PTPP dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri;
- Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- Menyusun Program kerja Tata Kelola Terintegrasi Tahunan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
- Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite TKT dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee carries out the Integrated Governance function within PTPP with the following duties and responsibilities:

- Evaluate Integrated Governance policies;
- Monitor and evaluate the Integrated Governance policies compliance of the SOE Parent Company or SOE Subsidiary Companies;
- Evaluate the implementation of Integrated Governance, at least through an internal controls assessment adequacy and integrated compliance functions implementation;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners for improvements to the Integrated Governance policy;
- Communicate with work units for functions including Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources, and other necessary operational aspects of the business, to obtain information, clarifications, and request necessary reports in an integrated manner;
- Monitor and evaluate the implementation of other Integrated Governance functions per the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or GMS/Ministerial Decrees;
- Exercise other authorities, duties, and responsibilities related to its functions;
- Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information;
- Prepare the Annual Integrated Governance Work Program and submit it to the Board of Commissioners;
- Prepare Quarterly and Annual Reports on the Implementation of the TKT Committee's Duties and submit them to the Board of Commissioners;
- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and perform other duties as requested by the Board of Commissioners;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan TKT; serta
- Menyusun Piagam Komite TKT dan melakukan reviu paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

- Provide recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of TKT policies; and
- Draft the TKT Committee Charter and conduct a review at least once every two years.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Competency Development for the Integrated Governance Committee

The Company facilitates the implementation of development programs for the Integrated Governance Committee to improve the competence of the Integrated Governance Committee members. These programs are expected to positively impact the productivity and effectiveness of the Integrated Governance Committee's performance.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Pengungkapan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris PTPP, yaitu Dhony Rahajoe, Ernadhi Sudarmanto, Hedy Rahadian, Pundjung Setya Brata, Jaya Kesuma, dan Istiono, dapat dilihat pada bagian "Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris" pada sub-bab uraian "Dewan Komisaris" dalam bab ini. Disclosure of the competency development activities in which PTPP Board of Commissioners (Dhony Rahajoe, Ernadhi Sudarmanto, Hedy Rahadian, Pundjung Setya Brata, Jaya Kesuma, and Istiono) participated in is available in the "Board of Commissioners Competency Development Program" section, "Board of Commissioners" sub-chapter of this chapter.			
Fakhrul Ulum (Anggota) (Member)	*Certified Risk Governance Professional*	Jakarta, 1 Januari 2025 Jakarta, January 1, 2025	GIRMA
	Corporate Law for Executive "Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN" Corporate Law for Executives "Legal Aspects of SOE Management"	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	The Indonesian Capital Market Institute
	Company Law Advance Class "Corporate Finance Law"	Jakarta, 2 Mei-2 Juni 2025 Jakarta, May 2-June 2, 2025	ASIA
Narwanto (Anggota) (Member)	*The New Special Directorship Program*	Jakarta 26-27 Agustus 2025 Jakarta August 26-27, 2025	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
Fatchul Birri (Anggota) (Member)	Menavigasi Risiko Keputusan Bisnis melalui *Business Judgment Rule* Navigating Business Decision Risks through the Business Judgment Rule	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	PTPP
Anwar Ismail (Anggota) (Member)	*Dual Transformation, Ambidex Leadership Program*	IMD Business school, 2024	Kementerian BUMN SOE Ministry
Anton Satyo Hendriatmo (Anggota) (Member)	Menavigasi Risiko Keputusan Bisnis melalui *Business Judgment Rule* Navigating Business Decision Risks through the Business Judgment Rule	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	PTPP
HR Ario Setyawan (Anggota) (Member)	*Training Business Coaching Mastery*	*Online*, 14 Maret 2025 Online, March 14, 2025	HCM PTPP dan BINUS *Executive Education* HCM PTPP and BINUS Executive Education
	Business Judgment Rule	Auditorium Wisma Subiyanto, 16 Oktober 2025 Auditorium Wisma Subiyanto, October 16, 2025	HCM PTPP HR PTPP
	Seminar Leading Transformative Change	Auditorium Wisma Subiyanto, 4 November 2025 Auditorium Wisma Subiyanto, November 4, 2025	HCM PTPP HR PTPP

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Gratiyanus Arya (Anggota) (Member)	*Refreshment* Sistem manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Tahun 2025 Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 Year 2025 Refreshment	Jakarta, 25 September 2025 Jakarta, September 25, 2025	PTPP
Dharma Hermances (Anggota) (Member)	-	-	-
Diana Puspitasari (Anggota) (Member)	Pelatihan dan Praktik Pengelola dan Penanggungjawab Kearsipan Training and Practice for Records Management and Responsibility	*Online*, 30 Juli-1 Agustus 2025 Online, July 30–August 1, 2025	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
	Pelatihan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301 : 2021 Compliance Management System ISO 37301:2021 Training	Jakarta, 15 Mei 2025 Jakarta, May 15, 2025	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
	Pelatihan *Strategic Decision Making & Execution* Strategic Decision Making & Execution Training	*Online*, 16-17 April 2025 dan 22 April 2025 Online, April 16–17, 2025, and April 22, 2025	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
	Pelatihan *Business English Program* Business English Program Training	*Hybrid*, 4 November 2025 Hybrid, November 4, 2025	PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rapat komite tata kelola terintegrasi dilakukan secara rutin sebagai salah satu pelaksanaan program kerja. Rapat dilakukan paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Setiap rapat komite tata kelola terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.

Di tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan 2 (dua) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dapat dilihat di bawah ini.

Integrated Governance Committee Meeting

Integrated governance committee meetings are held regularly as part of the work program. Meetings are held at least as often as the Board of Commissioners meetings stipulated in the articles of association. Each integrated governance committee meeting is recorded in meeting minutes signed by all committee members present and submitted in writing by the Integrated Governance Committee to the Board of Commissioners.

In 2025, the Integrated Governance Committee held two meetings, with attendance summarized below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat

Recapitulation of Integrated Governance Committee Attendance at Meetings

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Dhony Rahajoe (Ketua) (Chairman)	2	2	-	100,00
Ernadhi Sudarmanto (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Hedy Rahadian (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Pundjung Setya Brata (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Jaya Kesuma (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Istiono (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Fakhrul Ulum (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Narwanto (Anggota)* (Member)*	1	1	-	100,00
Fatchul Birri (Anggota)* (Member)*	2	2	-	100,00
Anwar Ismail (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Anton Satyo Hendriatmo (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Nawang Sri Retno Kartiko (Anggota) (Member)	2	1	1	50,00
Gratianus Arya (Anggota) (Member)	2	-	2	-
Ghea Swastika Dwiputra (Anggota) (Member)	2	1	1	50,00
Diana Puspitasari (Anggota) (Member)	2	2	-	100,00
Rata-rata **Average**				**86,67**

*Narwanto mulai menjabat pada tanggal 23 Mei 2025, dan Fatchul Birri mulai menjabat pada tanggal 28 Mei 2025
Narwanto began their terms on May 23, 2025, and Fatchul Birri began their terms on May 28, 2025

Agenda dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain membahas *monitoring* dan evaluasi program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal;
2. *Review* kebijakan Tata kelola Terintegrasi;
3. Pelaporan Hasil Pengawasan Tata Kelola Terintegrasi; serta

The agenda for the Integrated Governance Committee Meeting included discussing the monitoring and evaluation of the Integrated Governance Committee's work program, including the following:

1. Compliance with Laws and Regulations and Internal Control;
2. Review of Integrated Governance policies;
3. Reporting of Integrated Governance Oversight Results; and

4. Komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi tertentu untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Tahun 2025 ini, Komite Tata Kelola Terintegrasi sudah mulai berjalan secara efektif. Hal ini dimulai dengan penetapan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi No. 03/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 setelah disusunnya *Company Manual* Tata Kelola Terintegrasi No. PP/CM/M2-064 tanggal 31 Desember 2024. Dalam piagam ini mengatur secara jelas tugas dan tanggung jawab dari Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam dan *Company Manual* ini diratifikasi oleh seluruh anak perusahaan anggota dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata kelola Terintegrasi telah menyusun Program Kerja yang disahkan dalam buku RKAP Perusahaan Tahun 2025. Program kerja ini dilakukan pendetailan dan kemudian dimonitor dan dievaluasi dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan secara rutin. Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga menunjuk Koordinator Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi No. 024/KOM/PP/05/2025 tanggal 28 Mei 2025. Koordinator bertugas untuk membantu Ketua dalam mengkoordinasikan agenda kerja, menjembatani komunikasi antar anggota, memonitor pelaksanaan program kerja serta mengkonsolidasi bahan rapat dan penyusunan laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Program kerja yang telah disusun juga telah disosialisasikan kepada masing-masing anggota Komite untuk mendapatkan masukan bersama dan ditindaklanjuti sesuai tugas masing-masing. Untuk tahun 2026, Komite Tata Kelola Terintegrasi sudah menyusun program kerja yang akan dilakukan dan akan disampaikan dalam RKAP 2026.

Komite TKT juga melakukan diskusi dengan Manajemen Perusahaan yang diwakili oleh Divisi Corsec, Divisi HCM dan Biro SPI dalam rangka perbaikan tata kelola implementasi Pakta Integitas dan *Whistle Blower System* (WBS) tanggal 26 November 2025. Dan untuk meningkatkan kompetensi, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga mengikuti pelatihan dengan tema Menavigasi Risiko Keputusan Bisnis melalui *Business Judgment Rule* tanggal 16 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh PTPP.

Kebijakan Remunerasi

Mengingat posisi Komite Tata Kelola Terintegrasi besifat *ad hoc* dan melekat pada jabatan yang telah ada, maka anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki kebijakan remunerasi. Remunerasi dibebankan kepada masing-masing entitas.

4. Communication with work units for specific functions to obtain information, clarification, and request the necessary reports in an integrated manner.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Integrated Governance Committee in 2025

In 2025, the Integrated Governance Committee began to operate effectively. This began with the enactment of the Integrated Governance Committee Charter No. 03/PIAGAM/KOM/PP/02/2025 on February 24, 2025, following the drafting of the Integrated Governance Company Manual No. PP/CM/M2-064 on December 31, 2024. The charter clearly outlines the duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee. All member subsidiaries of the Integrated Governance Committee ratified the charter and the Company Manual.

In fulfilling its duties and responsibilities, the Integrated Governance Committee has developed a Work Program that was approved in the Company's 2025 RKAP (Work Plan and Budget). This work program is detailed, then monitored and evaluated at regular Integrated Governance Committee meetings. In addition, the Integrated Governance Committee appointed an Integrated Governance Committee Coordinator per the Integrated Governance Committee Chairman Letter No. 024/KOM/PP/05/2025 dated May 28, 2025. The Coordinator is tasked with assisting the Chairman in coordinating the work agenda, facilitating communication between members, monitoring the implementation of the work program, and consolidating meeting materials and preparing reports for the Integrated Governance Committee. The prepared work program has also been disseminated to each Committee member to obtain joint input and to follow up on their respective duties. For 2026, the Integrated Governance Committee has prepared a work program to be carried out and submitted in the 2026 RKAP.

The TKT Committee also held discussions with Company Management, represented by the Corsec Division, HCM Division, and SPI Bureau, regarding improvements to the governance of the implementation of the Integrity Pact and Whistleblowing System (WBS) on November 26, 2025. To enhance competencies, the Integrated Governance Committee also participated in a training session on “Navigating Business Decision Risks through the Business Judgment Rule” on October 16, 2025, organized by PTPP.

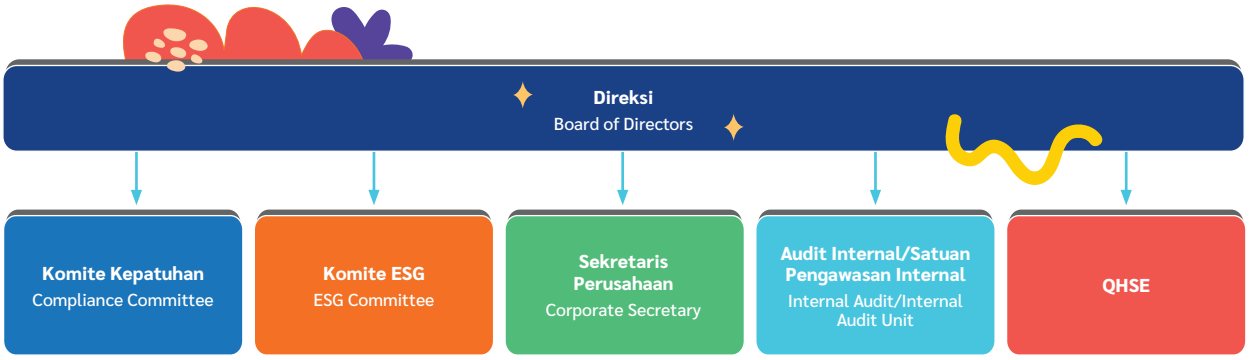
Remuneration Policy

Considering that the Integrated Governance Committee is an ad hoc committee attached to existing positions, its members do not have a remuneration policy. Remuneration is borne by each entity.

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of the Board of Directors

Direksi membentuk beberapa organ pendukung untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam melaksanakan penerapan GCG serta meningkatkan komitmen atas hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors established several supporting organs to carry out its duties and functions, especially in implementing GCG and increasing commitment to relationships with all stakeholders.



Komite Kepatuhan

Komite Kepatuhan dibentuk dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi membentuk Komite Kepatuhan ini untuk mendukung implementasi Peraturan Perusahaan serta meningkatkan kepatuhan pegawai dalam mewujudkan integritas Insan PTPP. Dengan dibentuknya Komite ini diharapkan mampu memperkuat penerapan GCG secara berkelanjutan.

Komite Kepatuhan bertugas memberikan rekomendasi pembinaan atas pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi bertingkat, seperti Surat Peringatan Ketiga (SP-III) atau sanksi tidak bertingkat, seperti Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPPT) hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, rekomendasi pembinaan dapat diberikan lebih ringan, dengan tetap mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap, sehingga rekomendasi pembinaan dapat disesuaikan secara objektif dan proporsional.

Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan berpedoman pada:

1. Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/PP/DIR/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Peraturan Perusahaan; dan
2. *Work Instruction* (WI) No. PP/WI/E3-023 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberian Sanksi/*Punishment*.

Compliance Committee

The Compliance Committee was formed to improve the implementation of good corporate governance principles. The Board of Directors established this Compliance Committee to support the implementation of Company Regulations and improve employee compliance to realize the integrity of PTPP personnel. Establishing this Committee is expected to strengthen the sustainable implementation of GCG.

The Compliance Committee is tasked with providing recommendations on violations subject to graduated sanctions, such as a Third Warning Letter (SP-III), or non-graduated sanctions, such as a First and Final Warning Letter (SPPT) or Termination of Employment (PHK). However, disciplinary recommendations may be less severe, given the facts and evidence revealed, so that they can be adjusted objectively and proportionally.

Legal Basis

The implementation of the Compliance Committee's duties is based on:

1. Board of Directors Decree No. 101/SK/PP/DIR/2019 dated October 21, 2019 on the Establishment of the Company's Compliance Committee; and
2. Work Instruction (WI) No. PP/WI/E3-023 dated August 29, 2024, on the Imposition of Sanctions/Punishment.

Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komite Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/PP/DIR/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Peraturan Perusahaan dan *Work Instruction* (WI) No. PP/WI/E3-023 tanggal 29 Agustus 2024, anggota Komite Kepatuhan terdiri dari:

Membership and Organizational Structure of the Compliance Committee

Based on the Board of Directors Decree No. 101/SK/PP/DIR/2019 dated October 21, 2019, on the Establishment of the Company's Regulatory Compliance Committee and Work Instruction (WI) No. PP/WI/E3-023 dated August 29, 2024, the members of the Compliance Committee consist of:

Status Tim Komite Committee Team Status	Posisi Position	Pegawai Pemangku Jabatan Tim Komite Employee Holding Positions in the Committee Team
Tetap Permanent	Ketua Head	SVP HCM
Tetap Permanent	Wakil Deputy Head	SVP Unit Asal Pegawai SVP of Employee's Original Unit
Tetap Permanent	Anggota Member	SVP Manajemen Risiko SVP of Risk Management
Tetap Opsional Optional Permanent	Anggota Member	SVP Unit Terkait SVP of Related Unit
Insidentil Incidental	Anggota Member	GM-Operasi/*Project Manager*/*Key Person*
Insidentil Incidental	Anggota Member	*Expert Internal/External*
Insidentil Incidental	Anggota Member	Senior Manager dari Unit Terkait Senior Manager of Related Unit
Rekomendasi Sanksi Sanction Recommendation	Tim Komite Committee Team	
Persetujuan Sanksi Sanction Approval	DSH	

Catatan: Perlu adanya Surat Kuasa untuk anggota komite kepatuhan yang diwakilkan
Note: Power of Attorney is required for compliance committee members who are represented

Profil Anggota Komite Kepatuhan

Profile of Compliance Committee Members

Adelia Auliyanti

Ketua Komite Kepatuhan/SVP HCM
Head of the Compliance Committee/SVP of HCM

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1986 Born in Jakarta, August 10, 1986	Usia 39 tahun 39 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 061/SK/PP/DIR/2024

Appointment History

PTPP Board of Directors Decree No. 061/SK/PP/DIR/2024

Pendidikan

- Magister (S2) Strategic Business, Prasetya Mulya Business School, Jakarta (2020)
- Sarjana (S1) Psikologi, Universitas Indonesia, Jakarta (2008)

Formal Education

- Master of Strategic Business, Prasetya Mulya Business School, Jakarta (2020)
- Bachelor of Psychology, University of Indonesia, Jakarta (2008)

Pengalaman Kerja	Work Experience
• Senior Vice President, Head of Human Capital Management Division PTPP (2024-sekarang) • Vice President, Head of Human Capital Management Division PPRE (2023-2024) • Vice President, Head of Corporate Secretary Division PPRE (2020-2023) • Kepala Divisi HCM PPRE (2020) • Senior Manager, Head of Human Capital Business Partner PTPP (2018-2020) • Senior Manager, Head of Performance System & Knowledge Management PTPP (2017-2018)	• Senior Vice President, Head of Human Capital Management Division, PTPP (2024–present) • Vice President, Head of Human Capital Management Division, PPRE (2023–2024) • Vice President, Head of the Corporate Secretary Division, PPRE (2020–2023) • Head of the HCM Division, PPRE (2020) • Senior Manager, Head of Human Capital Business Partner, PTPP (2018–2020) • Senior Manager, Head of Performance System & Knowledge Management, PTPP (2017–2018)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
General Manager HCM, LSP MSDM (2024)	General Manager of HCM, LSP MSDM (2024)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Adelia Auliyanti tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Adelia Auliyanti is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Anwar Ismail

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP BDPM
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of BDPM

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Jakarta, 14 Februari 1984 Born in Jakarta,February 10, 1984	Usia 42 tahun 42 years old	Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 103/SK/PP/DIR/2021	PTPP Board of Directors Decree No. 103/SK/PP/DIR/2021
Pendidikan	**Formal Education**
• Magister (S2) Quantitative Finance & Risk Management, Newcastle University, Newcastle (2017) • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang (2006)	• Master in Quantitative Finance & Risk Management, Newcastle University, Newcastle (2017 • Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University, Semarang (2006)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Business Development & Portfolio Management Division PTPP (2021-sekarang) • Direktur Bisnis & HCM PPRE (2019-2021) • Direktur Utama, PT Surya Mina Bunkerindo (2019) • Kepala Departemen Analisa Investasi PTPP (2017-2019) • Project Manager professional PTPP (2015-2017)	• Senior Vice President, Head of the Business Development & Portfolio Management Division, PTPP (2021–present) • Director of Business & HCM, PPRE (2019–2021) • President Director, PT Surya Mina Bunkerindo (2019) • Head of the Investment Analysis Department, PTPP (2017–2019) • Professional Project Manager, PTPP (2015–2017)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
General Manager HCM, LSP MSDM (2024)	General Manager of HCM, LSP MSDM (2024)

Rangkap Jabatan	Concurrent Positions
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Anwar Ismail tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Anwar Ismail is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Yusuf Maharani

Wakil Ketua/Anggota Kepatuhan/STRATEC
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/STRATEC

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Kudus, 23 April 1980 Born in Kudus, April 23, 1980	Usia 45 tahun 45 years old	Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 026/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 026/SK/PP/DIR/2024
Pendidikan	**Formal Education**
• Magister (S2) Maaster of Business Administration, University of Glasgow, Glasgow (2017) • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang (2004)	• Master of Business Administration, University of Glasgow, Glasgow (2017) • Bachelor of Civil Engineering, Brawijaya University, Malang (2004)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Strategic Planning, Engineering and Technology PTPP (2024 - sekarang) • Pjs. Senior Vice President, Head of Strategic Planning, Engineering and Technology PTPP 2023 - 2024) • Direktur Teknik, PT PP Semarang Demak (2022-2023) • Senior Manager, Head Of General Business Department, Business Development and Portfolio Management Division PTPP (2020-2022) • Senior Manager, Head Of International Marketing Department PTPP (2020) • Senior Manager, Head of Energy, Business Development Department, Business Development & Investment Division PTPP (2019-2020)	• Senior Vice President, Head of Strategic Planning, Engineering, and Technology, PTPP (2024 – present) • Acting Senior Vice President, Head of Strategic Planning, Engineering and Technology, PTPP (2023–2024) • Director of Engineering, PT PP Semarang Demak (2022–2023) • Senior Manager, Head of General Business Department, Business Development and Portfolio Management Division, PTPP (2020–2022) • Senior Manager, Head of International Marketing Department, PTPP (2020) • Senior Manager, Head of Energy, Business Development Department, Business Development & Investment Division, PTPP (2019–2020)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
-	-
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Yusuf Maharani tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Yusuf Maharani is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Pande Ketut Gede Karmawan

Wakil Ketua/Anggota Kepatuhan/SVP OPS Infra 2
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Infra 2 OPS

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Bangli, 19 September 1968 Born in Bangli, September 19, 1968	Usia 57 tahun 57 years old	Berdomisili di Jakarta, ndonesia Domiciled in Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 093/SK/PP/DIR/2020

PTPP Board of Directors Decree No. 093/SK/PP/DIR/2020

Pendidikan
Formal Education

- Magister (S2) Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2004)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Atmajaya, Jakarta (1993)

- Master of Technology Management, 10 November Institute of Technology, Surabaya (2004)
- Bachelor of Civil Engineering, Atmajaya University, Jakarta (1993)

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Senior Vice President, Head of Operation Infra 2 Division PTPP (2020-sekarang)
- Senior Profesional Project Manager PTPP (2016-2020)
- Profesional Project Manager PTPP (2015-2016)

- Senior Vice President, Head of Infra 2 Operations Division, PTPP (2020–present)
- Senior Professional Project Manager, PTPP (2016–2020)
- Professional Project Manager, PTPP (2015–2016)

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

- Ahli Utama Manajemen Konstruksi, BNSP (2023)
- Ahli Utama Teknik Dermaga, BNSP (2023)

- Senior Expert in Construction Management, BNSP (2023)
- Senior Expert in Port Engineering, BNSP (2023)

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Di dalam Perusahaan: Tidak Ada.
Di luar Perusahaan: Tidak Ada.

Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi
Affiliation Relationship

Pande Ketut Gede tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Pande Ketut Gede is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Daniel Rinsani Pakpahan

Wakil Ketua/Anggota Kepatuhan/SVP Operation Building
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Building Operations

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Pematang Siantar, 16 Januari 1986 Born in Pematang Siantar, January 16, 1986	Usia 40 tahun 40 years old	Berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 057/SK/PP/DIR/2024

PTPP Board of Directors Decree No. 057/SK/PP/DIR/2024

Pendidikan	Formal Education
• Magister (S2) Rekayasa Bangunan Tinggi, Universitas Diponegoro, Semarang (2023) • Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007)	• Master of High-Rise Building Engineering, Diponegoro University, Semarang (2023) • Bachelor of Civil and Environmental Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2007)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Operation Building Division PTPP (2024-sekarang) • Direktur Utama PT PP Properti Tbk (2023-2024) • Direktur Operasi PT PP Properti Tbk (2022-2023) • General Manager Operation Building Division PTPP (2020-2023) • Project Manager PTPP (2013-2020)	• Senior Vice President, Head of the Building Operations Division, PTPP (2024–present) • President Director of PT PP Properti Tbk (2023–2024) • Director of Operationsl of PT PP Properti Tbk (2022-2023) • General Manager of Building Operations Division, PTPP (2020–2023) • Project Manager, PTPP (2013–2020)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Ahli Kebandarudaraan, IABI (2021)	Airport Expert, IABI (2021)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Daniel Rinsani P. tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Daniel Rinsani P. is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Budi Suanda

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP QHSE
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of QHSE

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Pontianak, 11 Februari 1977 Born in Pontianak, 11 Februari 1977	Usia 49 tahun 49 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 054/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 054/SK/PP/DIR/2024
Pendidikan	**Formal Education**
• Magister (S2) Pasca Sarana Manajemen Proyek, Universitas Indonesia, Jakarta (2008) • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001)	• Master of Project Management, University of Indonesia, Jakarta (2008) • Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2001)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• SVP Head of QHSE Br PTPP (2024-sekarang) • Direktur Operasi Teknik & Operasi PT Wika Serang Panembang (2023-2024) • SVP Head of Strategic Planning, Engineering and Technology PTPP (2020-2023) • Direktur Reality PPUB (2017-2020) • Senior Manager, Head of Research & Innovation PTPP (2014-2017) • Project Manager PTPP (2019-2014)	• SVP Head of QHSE, PTPP (2024–present) • Director of Engineering & Operations, PT Wika Serang Panembang (2023–2024) • Senior Vice President, Head of Strategic Planning, Engineering, and Technology, PTPP (2020–2023) • Director of Realty, PPUB (2017–2020) • Senior Manager, Head of Research & Innovation, PTPP (2014–2017) • Project Manager, PTPP (2019–2014)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Sertifikasi Manajemen Konstruksi, LSP BNSP (2024)	Construction Management Certification, LSP BNSP (2024)

Rangkap Jabatan	Concurrent Positions
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Budi Suanda tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Budi Suanda is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Muhammad Zahid

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Internal Audit
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Internal Audit

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Gresik, 15 Mei 1970 Born in Gresik, May 15, 1970	Usia 55 tahun 55 years old	Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 037/SK/PP/DIR/2025	PTPP Board of Directors Decree No. 037/SK/PP/DIR/2025
Pendidikan	**Formal Education**
Sarjana (S1) Akuntansi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2003)	Bachelor of Accounting, Dr. Soetomo University, Surabaya (2003)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Internal Audit Br PTPP (2025-sekarang) • Senior Vice President Finance, Head of Finance and Accounting Division, PT PP (Persero) Tbk, 2021 - 2025 • Senior Manager, Finance and Human Capital, PT PP (Persero) Tbk, 2017 - 2021 • Asisten Keuangan, PT PP (Persero) Tbk, 2007 - 2017 • Site Administration Manager, PT PP (Persero) Tbk, 2004 - 2007	• Senior Vice President, Head of Internal Audit, PTPP (2025–present) • Senior Vice President of Finance, Head of the Finance and Accounting Division, PT PP (Persero) Tbk, 2021–2025 • Senior Manager, Finance and Human Capital, PT PP (Persero) Tbk, 2017–2021 • Finance Assistant, PT PP (Persero) Tbk, 2007–2017 • Site Administration Manager, PT PP (Persero) Tbk, 2004–2007
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Certified Accountan, IAI (2024)	Certified Public Accountant, IAI (2024)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Muhammad Zahid tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Muhammad Zahid is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Fakhrul Ulum

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Legal
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Legal

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Surabaya, 25 Juli 1977 Born in Surabaya, July 25, 1977	Usia 47 tahun 47 years old	Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 052/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 052/SK/PP/DIR/2024
Pendidikan	**Formal Education**
Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2002	Bachelor of Civil Engineering, 10 November Institute of Technology, Surabaya, 2002
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Legal Division PTPP (2024-sekarang) • Senior Vice President, Head of Human Capital Management Division PTPP (2023-2024) • Direktur Operasi PPUB (2021-2023) • General Manager Operation PTPP (2018-2021) • Project Manager PTPP (2014-2018)	• Senior Vice President, Head of Legal Division, PTPP (2024–present) • Senior Vice President, Head of Human Capital Management Division, PTPP (2023–2024) • Director of Operations, PPUB (2021–2023) • General Manager of Operations, PTPP (2018–2021) • Project Manager, PTPP (2014–2018)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Certified Risk Government Profesional (CRGP), BNSP (2025)	Certified Risk Governance Professional (CRGP), BNSP (2025)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Komisaris Utama PT PP Properti Tbk **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** President Commissioner of PT PP Properti Tbk **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Fakhrul Ulum tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Fakhrul Ulum is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Yusdiantoro

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Operation Infra 1
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Infra 1 Operations

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Tulungagung, 14 Desember 1971 Born in Tulungagung, December 14, 1971	Usia 54 tahun 54 years old	Berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 056/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 056/SK/PP/DIR/2024

Pendidikan	Formal Education
Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1996)	Bachelor of Civil Engineering, 10 November Institute of Technology, Surabaya (1996)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Operation Infrastructure 1 Division PTPP (2024-sekarang) • General Manager Operation PTPP (2019-2024) • Project Manager professional PTPP (2015-2019)	• Senior Vice President, Head of Infrastructure 1 Operations Division, PTPP (2024–present) • General Manager of Operations, PTPP (2019–2024) • Project Manager, PTPP (2015–2019)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
-	-
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Yusdiantoro tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Yusdiantoro is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Joko Raharjo

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Corsec
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Corsec

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Sleman, 8 April 1980 Born in Sleman, April 8, 1980	Usia 46 tahun 46 years old	Berdomisili di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 066/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 066/SK/PP/DIR/2024
Pendidikan	**Formal Education**
• Magister (S2) Teknik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2023) • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Janabadra, Yogyakarta (2003)	• Master of Engineering, 10 November Institute of Technology, Surabaya (2023) • Bachelor of Civil Engineering, Janabadra University, Yogyakarta (2003)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of Corporate Secretary Division PTPP (2024-sekarang) • General Manager Operasi Building PTPP (2021-2024) • Senior Manager Departemen Tender Building PTPP (2020-2021) • Project Manager PTPP (2012-2020)	• Senior Vice President, Head of the Corporate Secretary Division, PTPP (2024–present) • General Manager of Building Operations, PTPP (2021–2024) • Senior Manager, Tender Department, PTPP (2020–2021) • Project Manager, PTPP (2012–2020)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
• Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung, BNPS (2023) • Ahli Manajemen Proyek - Utama, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (2021) • Ahli Madya K3 Konstruksi, Divisi HCM PTPP (2021)	• Principal Expert in Building Engineering, BNSP (2023) • Senior Project Management Expert, Construction Services Development Institute (2021) • Associate Expert in Construction Occupational Safety and Health, PTPP HCM Division (2021)

Rangkap Jabatan	Concurrent Positions
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Joko Raharjo tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Joko Raharjo is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Niekke Kusuma Wardani

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP OC&SCC
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of OC&SCC

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Semarang, 9 Juni 1982 Born in Semarang, June 9, 1982	Usia 43 tahun 43 years old	Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan	Appointment History
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 055/SK/PP/DIR/2024	PTPP Board of Directors Decree No. 055/SK/PP/DIR/2024
Pendidikan	**Formal Education**
Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2015)	Bachelor in Civil Engineering, University of Lampung, Bandar Lampung (2015)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Senior Vice President, Head of OC&SCC Division PTPP (2024-sekarang) • Senior Manager, Head of Suplly Chain Management PTPP (2017-2024)	• Senior Vice President, Head of the OC&SCC Division, PTPP (2024–present) • Senior Manager, Head of Supply Chain Management, PTPP (2017–2024)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
AUditor Internal SNI ISO 37001:2016 (2022) Mutu Institute	Internal Auditor SNI ISO 37001:2016 (2022) Mutu Institute
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliation Relationship**
Niekke Kusuma W. tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Niekke Kusuma W. is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Bakhtiyar Efendi

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Operation EPC
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of EPC Operations

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Pasuruan, 2 Agustus 1982 Born in Pasuruan, August 2, 1982	Usia 43 tahun 43 years old	Berdomisili di Tangerang, Banten, Indonesia Domiciled in Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 062/SK/PP/DIR/2024

Appointment History
PTPP Board of Directors Decree No. 062/SK/PP/DIR/2024

Pendidikan
- Magister (S2) Construction and Project Management, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2020)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2005)

Formal Education
- Master of Construction and Project Management, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2020)
- Bachelor of Civil Engineering, 10 November Institute of Technology, Surabaya (2005)

Pengalaman Kerja
- Senior Vice President, Head of Operation EPC Division PTPP (2024-sekarang)
- Senior Vice President, Head of Corporate Secretary Division PTPP (2022-2024)
- General Manager Operation PTPP (2021-2022)
- Project Manager PTPP (2015-2021)

Work Experience
- Senior Vice President, Head of the EPC Division, PTPP (2024–present)
- Senior Vice President, Head of the Corporate Secretary Division, PTPP (2022–2024)
- General Manager of Operations, PTPP (2021–2022)
- Project Manager, PTPP (2015–2021)

Sertifikasi Profesi
Certified Risk Government Profesional, BNSP (2024)

Professional Certification
Certified Risk Management Professional, BNSP (2024)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada.
Di luar Perusahaan: Tidak Ada.

Concurrent Positions
Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi
Bakhtiyar Efendi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship
Bakhtiyar Efendi is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Faizal Rahmad

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP FinAcc
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of FinAcc

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1985 Born in Yogyakarta, August 5, 1985	Usia 40 tahun 40 years old	Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 038/SK/PP/DIR/2025

Appointment History

PTPP Board of Directors Decree No. 038/SK/PP/DIR/2025

Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen, Universitas Bakrie, Jakarta (2024)
- Sarjana (S1) Akuntansi, STIE YKPN, Yogyakarta (2014)

Formal Education

- Master of Management, Bakrie University, Jakarta (2024)
- Bachelor of Accounting, STIE YKPN, Yogyakarta (2014)

Pengalaman Kerja

- Senior Vice President, Head of Finance & Accounting Division PTPP (2025 - sekarang
- Direktur Keuangan & HCM, PT PP Infrastruktur (2024 - 2025
- Senior Manager, Head of Corporate Finance Department PTPP (2021-2024)
- Direktur Keuangan, PT Indonesia Ferry Properti (2021)
- Direktur Keuangan, PT Celebes Railway Indonesia (2019-2021)

Work Experience

- Senior Vice President, Head of Finance & Accounting Division, PTPP (2025 – present)
- Director of Finance & HCM, PT PP Infrastruktur (2024–2025)
- Senior Manager, Head of Corporate Finance Department, PTPP (2021–2024)
- Director of Finance, PT Indonesia Ferry Properti (2021)
- Director of Finance, PT Celebes Railway Indonesia (2019–2021)

Sertifikasi Profesi

-

Professional Certification

-

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan: Tidak Ada.
Di luar Perusahaan: Tidak Ada.

Concurrent Positions

Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi

Faizal Rahmad tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship

Faizal Rahmad is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Andek Prabowo

Wakil Ketua/Anggota Komite Kepatuhan/SVP Risk Management
Deputy Head/Member of the Compliance Committee/SVP of Risk Management

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Surabaya, 13 Desember 1982 Born in Surabaya, December 13, 1982	Usia 45 tahun 45 years old	Berdomisili di Surabaya, Jawa Timur,Indonesia Domiciled in Surabaya, East Java,Indonesia

Riwayat Penunjukan
Surat Keputusan (SK) Direksi Direksi PTPP No. 36/SK/PP/DIR 2025 tanggal 13 Juni 2025

Appointment History
PTPP Board of Directors Decree No. 36/SK/PP/DIR 2025 dated June 13, 2025

Pendidikan
- Magister (S2) Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2015)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2004)

Formal Education
- Master of Business Administration, Bandung Institute of Technology, Bandung (2015)
- Bachelor of Civil Engineering, 10 November Institute of Technology, Surabaya (2004)

Pengalaman Kerja
- SVP, Head of Risk Management Div PTPP (2025-sekarang)
- SVP, Head of Operations Building Div PTPP (2020-2025)
- GM, Head of Operation Dept PTPP (2017-2020)
- Project Manager Professional Muda PTPP (2015-2017)
- Project Manager PTPP (2010-2015)

Work Experience
- Senior Vice President, Head of the Risk Management Division, PTPP (2025–present)
- Senior Vice President, Head of the Building Operations Division, PTPP (2020–2025)
- General Manager, Head of Operations Department, PTPP (2017–2020)
- Junior Project Manager, PTPP (2015–2017)
- Project Manager, PTPP (2010–2015)

Sertifikasi Profesi
- Certified Risk Governance Professional, BNSP (2025)
- Financial Risk Analysis in Corporation, IFMI (2025)

Professional Certification
- Certified Risk Governance Professional, BNSP (2025)
- Financial Risk Analysis in Corporations, IFMI (2025)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak Ada.
Di luar Perusahaan: Tidak Ada.

Concurrent Positions
Within the Company: None.
Outside the Company: None.

Hubungan Afiliasi
Andek Prabowo tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation Relationship
Andek Prabowo is not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Government of the Republic of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder.

Pedoman Kerja Komite Kepatuhan

Komite Kepatuhan memiliki Pedoman Kerja yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja Komite Kepatuhan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/PP/DIR/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Peraturan Perusahaan, serta diperbarui melalui *Work Instruction* (WI) Perusahaan No. PP/WI/E3-023 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberian Sanksi/*Punishment*.

Pedoman Kerja tersebut mengatur secara komprehensif tata cara kerja Komite Kepatuhan agar pelaksanaan tugas berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan.

Ruang Lingkup dan Tugas Komite Kepatuhan

Pedoman Kerja Komite Kepatuhan mencakup, antara lain:

1. Maksud dan tujuan pembentukan Komite Kepatuhan;
2. Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Kepatuhan;
3. Ruang lingkup kerja Komite Kepatuhan dalam mendukung penerapan kepatuhan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kepatuhan berfungsi untuk mendukung Manajemen dalam memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kepatuhan

1. Memberikan pertimbangan kepada Divisi HCM dalam melakukan klarifikasi pelanggaran kepada Pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran;
2. Menjadi saksi untuk memberikan informasi tambahan mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai;
3. Memberikan pertimbangan kepada Divisi HCM dalam melakukan klasifikasi jenis pelanggaran dan pemberian sanksi bagi pegawai;
4. Membuat keputusan yang menjadi dasar penerbitan Surat Peringatan dan pemberian sanksi oleh Divisi HCM atau SVP Unit terkait;
5. Keikutsertaan anggota Komite Kepatuhan di dalam klasifikasi dan/atau klasifikasi bersifat insidentil menyesuaikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai;
6. Dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Kepatuhan, kuorum yang harus dipenuhi adalah 100% kehadiran dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Tetap, ditambah minimum 1 (satu) perwakilan dari anggota insidentil; dan

Compliance Committee Work Guidelines

The Compliance Committee has Work Guidelines established as a reference in performing its duties and responsibilities. The Compliance Committee's Work Guidelines were approved by the Board of Directors via Decree No. 101/SK/PP/DIR/2019 dated October 21, 2019, on the Establishment of the Company's Compliance Committee, and updated via Company Work Instruction (WI) No. PP/WI/E3-023 dated August 29, 2024, on the Imposition of Sanctions/Punishments.

These Work Guidelines comprehensively regulate the working procedures of the Compliance Committee to ensure that the performance of duties is carried out professionally, independently, and accountably, and in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's internal policies.

Scope and Duties of the Compliance Committee

The Compliance Committee Work Guidelines cover, among other things:

1. The purpose and objectives of establishing the Compliance Committee;
2. The duties and responsibilities of Compliance Committee members;
3. The scope of work of the Compliance Committee in supporting the implementation of the Company's compliance.

In carrying out its duties, the Compliance Committee supports Management in ensuring the Company's compliance with laws and regulations, internal policies, and the principles of good corporate governance (GCG).

Duties and Responsibilities of the Compliance Committee

1. Provide consideration to the HCM Division in clarifying violations to employees who are indicated to have committed violations;
2. Be a witness to provide additional information regarding the type of violation committed by the employee;
3. Provide consideration to the HCM Division in clarifying the types of violations and sanctions for employees;
4. Make decisions that become the basis for issuing Warning Letters and sanctions by the HCM Division or related SVP Unit;
5. Participation of Compliance Committee members in classification and/or incidental classification according to the type of violation committed by employees;
6. In the decision-making mechanism by the Compliance Committee, the quorum that must be met is 100% attendance of the Head, Deputy Head, and Permanent Members, plus a minimum of one representative of the incidental members; and

7. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Komite atau SVP, maka mekanisme klarifikasi akan tereskalasi ke BOD terkait melalui pengajuan dari Wakil Ketua Komite atau Anggota Komite.

7. If there are indications of violations committed by the Head of the Committee or SVP, the clarification mechanism will be escalated to the relevant Board of Directors through a submission from the Deputy Head of the Committee or Committee Member.

Rapat Komite Kepatuhan

Rapat Komite Kepatuhan diselenggarakan secara insidentil apabila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perusahaan dan adanya permintaan dari unit terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komite Kepatuhan telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Tingkat kehadiran anggota Komite Kepatuhan pada tahun 2025 secara umum berada pada tingkat yang baik dan mencerminkan komitmen dalam menjalankan fungsi kepatuhan, dengan rata-rata kehadiran mencapai tingkat optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut disampaikan kehadiran serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Kepatuhan dalam rapat-rapat tersebut.

Meetings of the Compliance Committee

Compliance Committee meetings are held every time there is an incident of violation and when there is a request from the relevant unit.

The Compliance Committee held four meetings throughout 2025. The attendance rate of Compliance Committee members in 2025 is generally good and reflects their commitment to performing their compliance functions, with the average attendance reaching an optimal level in accordance with applicable regulations.

The following is a summary of the Compliance Committee's attendance and attendance rate at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Kepatuhan pada Rapat Komite Kepatuhan Tahun 2025

Recapitulation of Compliance Committee Attendance at Compliance Committee Meetings in 2025

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Ketua Komite Head of the Compliance Committee	4	4	-	100,00
Wakil Ketua Komite Deputy Head of the Compliance Committee	4	4	-	100,00
Anggota Tetap Permanent Member	4	3	1	75,00
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	4	4	-	100,00
Rata-rata Average	**4**	**4**	**1**	**93,75**

Beberapa agenda dalam Rapat Komite Kepatuhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terjadi indikasi perbuatan pelanggaran tertentu yang dapat dikenakan sanksi bertingkat, seperti SP-III atau sanksi tidak bertingkat, seperti SPPT, hingga PHK;
2. Ketua komite kepatuhan membuat panggilan untuk menghadiri rapat komite kepatuhan kepada wakil, anggota tetap dan tidak tetap;
3. Wakil ketua menjelaskan kronologi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terkait beserta bukti pendukung;
4. Apabila komite kepatuhan tidak memiliki cukup bukti dapat menggali fakta dengan cara melakukan klarifikasi kepada pegawai terkait;

Several items on the Compliance Committee Meeting agenda can be outlined as follows:

1. There are indications of certain violations that may be subject to graduated sanctions, such as SP-III, or non-graduated sanctions, such as SPPT, up to and including employment termination;
2. The head of the compliance committee issues a summons to attend the compliance committee meeting to representatives, permanent and non-permanent members;
3. The deputy head explains the chronology of the alleged violation committed by the employee concerned, along with supporting evidence;
4. If the compliance committee does not have sufficient evidence, it can gather facts by clarifying the matter with the employee concerned;

5. Komite kepatuhan secara bersama-sama berdiskusi untuk memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
6. DSH dapat menyetujui rekomendasi komite kepatuhan atau memutuskan berbeda dengan tetap mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap; dan
7. HCM menerbitkan sanksi.

5. The compliance committee discusses and provides recommendations for sanctions in accordance with applicable regulations;
6. DSH can approve the compliance committee's recommendations or decide otherwise, while still considering the facts and evidence that have been revealed; and
7. HCM issues the sanctions.

Pengembangan Kompetensi Komite Kepatuhan

Pengembangan kompetensi Komite Kepatuhan selaras dengan misi PTPP yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 129/SK/PP/DIR/2024 tentang Perubahan Visi dan Misi Perusahaan. Salah satu misi yang tercantum adalah mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan penilaian yang berbasis pada budaya Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, anggota Komite Kepatuhan mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang mencakup antara lain:

Competency Development for the Compliance Committee

The Compliance Committee's competency development is in line with the Company's mission, as stated in Decree No. 129/SK/PP/DIR/2024 on Changes in the Company's Vision and Mission. One of the missions listed is to achieve excellent human resources through a fulfillment, development, and assessment process based on corporate culture.

Throughout 2025, members of the Compliance Committee participated in various competency development programs, including:

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
SVP HCM SVP of HCM	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training – Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Manajemen Risiko SVP of Risk Management	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Financial Risk Analysis for Corporation	Jakarta, 9-10 Desember 2025 Jakarta, December 9-10, 2025	Divisi HCM PTPP dan RJ Consulting PTPP HCM Division and RJ Consulting
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
SVP Legal SVP of Legal	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	Public Training - Training Corporate Law for Executive	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	TICMI
	Public Training - Training Corporate Finance Law	*Online*, 26 Mei-2 Juni 2025 Online, May 26-June 2, 2025	ET ASIA
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	Public Training - Webinar Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat dalam Kasus Korupsi Public Training - Webinar on Preventing Business Decisions in S/ROEs from Becoming Entangled in Corruption Cases	*Online*, 6 Desember 2025 Online, December 6, 2025	Visi Integrasi dan Satu Visi Law Office
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP FinAcc SVP of FinAcc	*In House Training - SPEED Program Batch 1 Volume 1*	Jakarta, 10 Januari-21 Februari 2025 Jakarta, January 10–February 21, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Training Business Coaching Mastery	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	Public Training - Program Star Track Cohort 1 Global Business School	*Online*, 25 Juli-September 2025 Online, July 25–September 2025	BUMN School of Excellence
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP OC&SCC SVP of OC&SCC	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	Public Training - Training Corporate Law for Executive	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	TICMI

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP IntAud SVP of IntAud	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP QHSE SVP of QHSE	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP BDPM SVP of BDPM	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Corsec SVP of Corsec	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Stratec SVP of Stratec	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Ops Infra 1 SVP of Infra Ops 1	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Ops Infra 2 SVP of Infra Ops 2	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Ops Gedung SVP of Building Ops	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
SVP Ops EPC SVP of EPC Ops	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
	In House Training - Seminar Business Judgement Rules	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Workshop External Perspective and Initiative Structure	Jakarta, 17 Desember 2025 Jakarta, December 17, 2025	Divisi Stratec PTPP PTPP Stratec Division
GM-Operasi Gedung dan Infra 2 GM-Building and Infra 2 Ops	*In House Training - Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	Divisi HCM PTPP dan Binus Business School Executive Education PTPP HCM Division and Binus Business School
GM-Operasi Gedung, Infra 1, Infra 2, dan EPC GM-Building, Infra 1, Infra 2, and EPC Ops	*In House Training - Seminar Business Judgement Rules*	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division
	In House Training - Seminar Leading Transformative Change	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	Divisi HCM PTPP PTPP HCM Division

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan

Sepanjang tahun 2025, Komite Kepatuhan telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran peraturan perusahaan.

Komite Kepatuhan telah memberikan rekomendasi sanksi terhadap 12 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Compliance Committee Duties

Throughout 2025, the Compliance Committee has carried out its duties in accordance with applicable regulations and followed up on all reports of alleged violations of company regulations.

The Compliance Committee has recommended sanctions against 12 employees, with the following details:

Rekomendasi Pembinaan dan Persetujuan DSH Disciplinary Recommendation and DSH Approval	Jumlah Pegawai Total Employee
Surat Teguran (ST) Letter of Reprimand (ST)	1
Surat Peringatan Pertama (SP-I) First Warning Letter (SP-I)	2
Surat Peringatan Kedua (SP-II) Second Warning Letter (SP-II)	-
Surat Peringatan Ketiga (SP-III) Third Warning Letter (SP-III)	-

Rekomendasi Pembinaan dan Persetujuan DSH Disciplinary Recommendation and DSH Approval	Jumlah Pegawai Total Employee
Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPPT) First and Final Warning Letter (SPPT)	9
Jumlah Pembinaan Total Disciplinary Measures	12

Komite Kepatuhan telah menindaklanjuti 100% (seratus persen) laporan keterlibatan pegawai dalam pelanggaran peraturan perusahaan. Rekomendasi komite kepatuhan ditindaklanjuti dengan diterbitkan sanksi oleh pihak yang berwenang di perusahaan dan pada saat ini status masa berlaku sanksi seluruh pegawai telah selesai untuk seluruhnya.

The Compliance Committee has followed up on 100% of reports of employee involvement in violations of company regulations. The Compliance Committee recommendations are followed up with the issuance of sanctions by the authorized parties in the company, and at this time, the status of the validity period of all employee sanctions has been fully completed.

Selain itu, Perusahaan telah menindaklanjuti 100% laporan penyimpangan internal yang terjadi selama tahun 2025, serta menyelesaikan seluruh kasus sesuai mekanisme internal yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

In addition, the Company has followed up on 100% of internal misconduct reports that occurred in 2025 and resolved all cases in accordance with applicable internal mechanisms. This reflects the Company's commitment to maintaining integrity, compliance, and consistent implementation of good corporate governance principles.

Komite Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/PP/DIR/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Peraturan Perusahaan dan *Work Instruction* (WI) No. PP/WI/E3-023 tanggal 29 Agustus 2024. tentang Pemberian Sanksi/ *Punishment*. Bahwa Komite Kepatuhan selama tahun 2025 telah mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan. Sebagai bagian dari transparansi yang dilakukan Perusahaan, berikut disampaikan jumlah penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.

The Compliance Committee has carried out its duties and responsibilities per Board of Directors Decree No. 101/SK/PP/DIR/2019 dated October 21, 2019, on the Establishment of the Company's Compliance Committee and Work Instruction (WI) No. PP/WI/E3-023 dated August 29, 2024, on the Imposition of Sanctions/Punishment. The Compliance Committee issued recommendations for sanctions against employees found to have violated company regulations in 2025. As part of the Company's transparency, the following is a report on the number of internal irregularities that have occurred and the efforts to resolve them.

Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun Internal Misconduct in 1 Year	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Total Cases Conducted by			
	Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees	
	2025	2024	2025	2024
Telah Diselesaikan Settled	8	14	4	4
Dalam proses penyelesaian internal Under internal settlement	-	5	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya Settlement not yet Considered	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up by legal process	-	-	-	-
Jumlah Penyimpangan **Total Misconduct**	**8**	**19**	**-**	**4**

Komite ESG

PTPP membentuk Komite *Environmental, Social & Governance* (ESG) dalam rangka memperkuat fokus penerapan aspek ESG dalam kegiatan operasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan. Komite ini berada di bawah Direksi, yang diketuai oleh Direktur Keuangan Perusahaan dengan Direktur Utama bertindak selaku Pembina dan Dewan Komisaris selaku Pengawas. Komite ini beranggotakan perwakilan berbagai unit dan divisi yang diharapkan mampu mempertajam agenda, program dan inisiatif ESG Perusahaan.

Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komite ESG

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 024/SK/PP/DIR/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pembentukan Komite *Environmental, Social & Governance* (ESG) PT PP (Persero) Tbk, struktur dan keanggotaan Komite ESG Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

ESG Committee

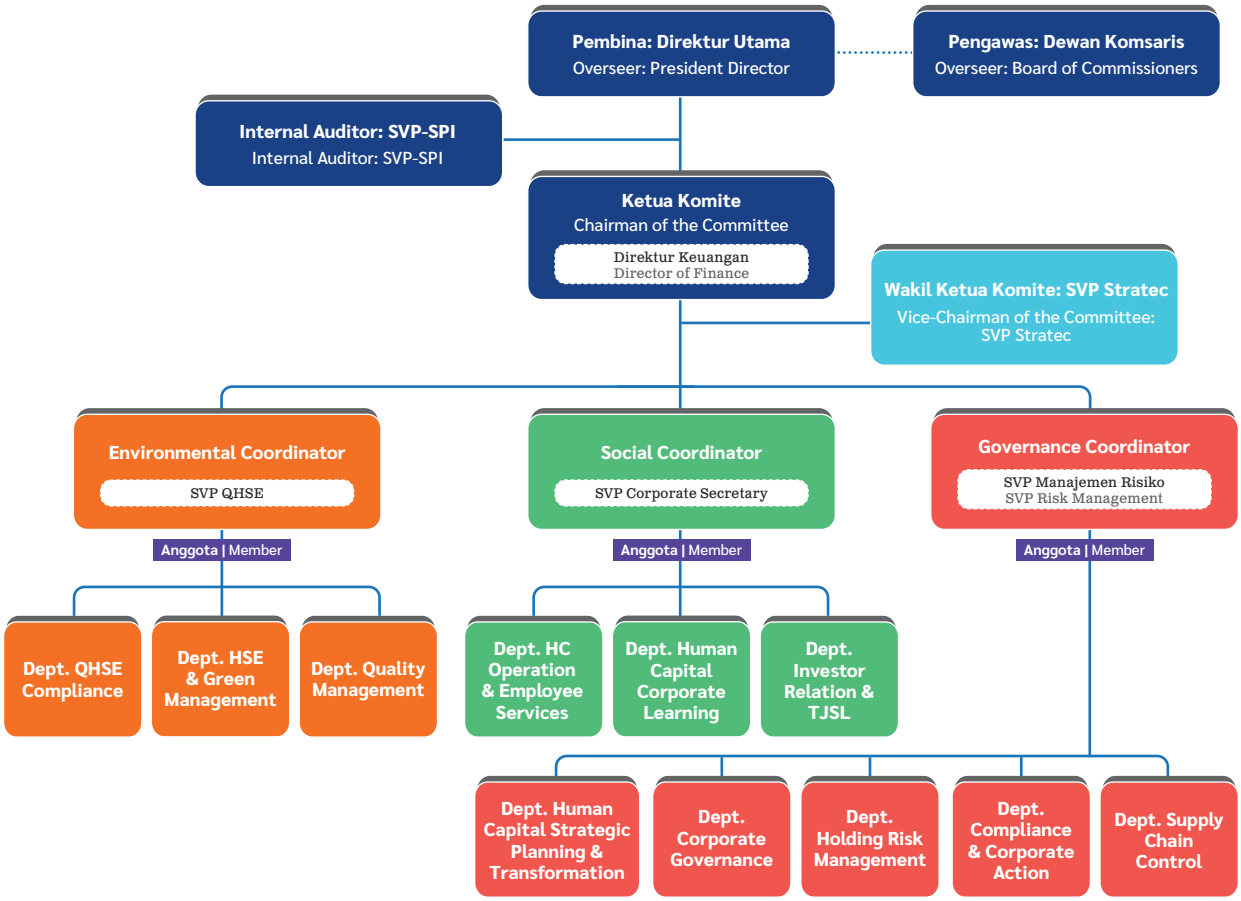
PTPP established the Environmental, Social & Governance (ESG) Committee to strengthen the focus on implementing ESG aspects in the company's operations and business activities. This committee is under the Board of Directors, chaired by the Director of Finance, with the President Director acting as the Advisor and the Board of Commissioners acting as the Supervisor. The Committee comprises representatives from various units and divisions expected to sharpen the Company's ESG agenda, programs, and initiatives.

Membership and Organizational Structure of the ESG Committee

Based on the Board of Directors Decree No. 024/SK/PP/DIR/2024 dated May 3, 2024, on the Establishment of the Environmental, Social & Governance (ESG) Committee of PT PP (Persero) Tbk, the structure and membership of the ESG Committee can be seen below.

Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite ESG PTPP

Organizational Structure and Membership of PTPP's ESG Committee



Profil Anggota Komite ESG

Profile of ESG Committee Members

Agus Purbianto

Ketua Komite ESG/Direktur Keuangan
Chairman of the ESG Committee/Director of Finance

Profil Ketua Komite ESG, Agus Purbianto, dapat dilihat bagian profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the ESG Committee, Agus Purbianto, is available in the Board of Directors profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Yusuf Maharani

Wakil Ketua Komite ESG/SVP Stratec
Vice Chairman of the ESG Committee/SVP Stratec

Profil WakilKetua Komite ESG, Yusuf Maharani, dapat dilihat bagian profil Komite Kepatuhan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Vice Chairman of the ESG Committee, Yusuf Maharani, is available in the Compliance Committee profile section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Budi Suanda

Environmental Coordinator Komite ESG/SVP QHSE
Environmental Coordinator of the ESG Committee/SVP of QHSE

Profil Environmental Coordinator ESG, Budi Suanda, dapat dilihat bagian profil Komite Kepatuhan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Environmental Coordinator of the ESG Committee, Budi Suanda, is available in the Compliance Committee profile section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Andek Prabowo

Governance Coordinator Komite ESG/SVP Manajemen Risiko
ESG Committee Governance Coordinator/SVP of Risk Management

Profil Governance Coordinator Komite ESG, Andek Prabowo, dapat dilihat bagian profil Komite Kepatuhan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Governance Coordinator of the ESG Committee, Budi Suanda, is available in the Compliance Committee profile section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Joko Raharjo

Social Coordinator Komite ESG/SVP Corsec
Social Coordinator of the ESG Committee/SVP of Corsec

Profil Social Coordinator Komite ESG, Andek Prabowo, dapat dilihat bagian profil Komite Kepatuhan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Social Coordinator of the ESG Committee, Budi Suanda, is available in the Compliance Committee profile section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Pedoman Kerja Komite ESG

Komite ESG memiliki pedoman kerja yang telah disahkan oleh Direksi melalui *Company Manual* No. PP/CM/M2-086 tanggal 31 Desember 2024. Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

Pedoman Komite ESG menguraikan tentang:

1. Ketentuan Umum yang berisi latar belakang implementasi ESG di PTPP beserta dokumen referensi implementasi ESG antara lain:
   a. *Sustainable Development Goals* (SDG);
   b. Perjanjian Paris (*Paris Agreement*);
   c. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
   d. *Net Zero Emission* (NZE);
   e. *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC).
2. Ketentuan Khusus, yang berisi hal-hal sebagai berikut:
   a. Penjelasan mengenai Komite ESG;
   b. Penjelasan mengenai ESG *Framework* PTPP;
   c. Penjelasan mengenai ESG *Roadmap* PTPP periode 2024-2028;
   d. Penjelasan mengenai *Assessment* ESG.

ESG Committee Work Guidelines

The ESG Committee has work guidelines approved by the Directors through Company Manual No. PP/CM/M2-086 dated December 31, 2024. These guidelines serve as the rules of procedure for members of the ESG Committee in carrying out their duties and responsibilities professionally and independently.

The ESG Committee guidelines outline:

1. General Provisions containing the background of ESG implementation at PTPP, along with reference documents for ESG implementation, including:
   a. Sustainable Development Goals (SDGs);
   b. Paris Agreement;
   c. Greenhouse Gas (GHG) Emissions;
   d. Net Zero Emissions (NZE);
   e. Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
2. Special Provisions, which contain the following:
   a. Explanation regarding the ESG Committee;
   b. Explanation of PTPP ESG Framework;
   c. Explanation of PTPP's ESG Roadmap for the 2024–2028 period;
   d. Explanation of the ESG Assessment.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Sesuai struktur dan keanggotaan Komite ESG di atas, tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam Komite ESG dijabarkan sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the ESG Committee

In accordance with the structure and membership of the ESG Committee above, the duties and responsibilities of each element in the ESG Committee are outlined as follows:

Pengawas/Dewan Komisaris	Overseer/Board of Commissioners
Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap program ESG guna mendukung keberlanjutan Perusahaan.	Supervise, monitor, and evaluate ESG programs to support the Company's sustainability.
Pembina/Direktur Utama	**Supervisor/President Director**
• Memberikan arahan pelaksanaan dalam berbagai program ESG untuk keberlanjutan Perusahaan; dan • Menentukan arah dan kebijakan (*roadmap*) terkait dengan ESG di lingkungan Perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan.	• Provide directive on ESG program implementation for the sustainability of the Company; and • Determining ESG-related directives and policies (roadmap) within the Company following the Company's Vision, Mission, and Goals.
Internal Auditor/SVP-SPI	**Internal Auditor/SVP-SPI**
Melakukan *review* atas pelaporan ESG, menilai Materialitas atau Risiko pada pelaporan ESG, dan mengintegrasikan ESG dalam perencanaan audit.	Review ESG reporting, assess materiality or risk in ESG reporting, and integrate ESG in audit planning.

Ketua Komite/Direktur Keuangan	Chairman of the Committee/Director of Finance
• Memberikan arahan teknis dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) terkait dengan program-program ESG; • Bertanggung jawab atas semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan implementasi sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan • Mengkoordinasikan fungsi Unit Kerja yang terkait dalam implementasi ESG.	• Provide technical directives and determine the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long Term Plan (RJPP) related to ESG programs; • Responsible for all planning, execution, evaluation, and implementation activities per the Sustainable Development Goals (SDGs); and • Coordinating the functions of Work Units related to ESG implementation.
Wakil Ketua Komite/SVP Stratec	**Vice-Chairman of the Committee/SVP of Stratec**
Membantu dan mewakili Ketua Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait ESG pada PTPP.	Assist and represent the Chairman of the Committee in carrying out its duties and responsibilities related to ESG within PTPP.
Koordinator	**Coordinator**
• Merencanakan program kerja dan anggaran sesuai dengan Unit Kerja masing-masing dan melaporkan kepada Ketua/ Wakil Ketua Komite; • Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan program untuk keberhasilan program dan perbaikan; • Mengkoordinir penyusunan program kerja dan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing; • Mengimplementasikan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing; dan • Mensosialisasikan dan mempublikasikan program-program ESG yang dilaksanakan Perusahaan kepada internal dan eksternal Perusahaan.	• Plan work programs and budgets appropriate to each Work Unit and report to the Chairman/ Vice Chairman of the Committee; • Monitor and evaluate the implementation of programs for their success and improvement; • Coordinate the preparation of work programs and budgets by their respective fields; • Implement work programs according to their respective fields; and • Disseminate and publicize ESG programs implemented by the Company to internal and external parties.
Anggota - Bidang Lingkungan atau *Environmental* (E)	**Member – Environmental (E)**
• Pelaksanaan pengelolaan air dan air limbah di lingkungan Perusahaan; • Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Lingkungan dengan program penanaman pohon untuk skema *Carbon-Offset* dan pelestarian lingkungan; • Penetapan *roadmap Net Zero Emission* (NZE) dan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK); • Pelaksanaan pengelolaan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); • Pelaksanaan pengelolaan pemetaan dan program penurunan produksi limbah konstruksi melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycling*) serta menetapkan penurunan limbah konstruksi sebesar 15% dari total proyek berjalan; • Pelaksanaan pengelolaan penerapan Konstruksi Berkelanjutan di seluruh proyek konstruksi PTPP; • Pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertahankan *fatality rate* di angka 0 (nol); • Mengembangkan dan meningkatkan produk *green building*; dan • Memberikan kualitas konstruksi terbaik tanpa adanya kegagalan konstruksi.	• The management of water and wastewater in the Company's environment; • The management of Environmental Conservation by the tree planting program for the Carbon-Offset scheme and environmental preservation; • The establishment of the Net Zero Emission (NZE) roadmap and the reduction of Greenhouse Gas (GHG) emission intensity; • The management of Greenhouse Gas (GHG) emission calculation; • The management of mapping and programs to reduce construction waste production through the 3R (Reduce, Reuse, Recycling) program and establishing a 15% reduction in construction waste from the total running projects; • The management of Sustainable Construction implementation in all PTPP construction projects; • The management of occupational safety and health by maintaining the fatality rate at zero; • Developing and improving green building products; and • Providing the best construction quality without any construction failure.

Anggota - Bidang Sosial (S)	Member – Social (S)
• Pelaksanaan pengelolaan jaminan program kesehatan kerja karyawan; • Pelaksanaan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui *well being program*; • Meningkatkan ketersediaan program pelatihan bagi seluruh karyawan; • Merancang kompensasi dan *benefit* bagi seluruh karyawan;	• The management of the employee health insurance program; • The implementation of a commitment to improve employee welfare through the well-being program; • Increasing the availability of training programs for all employees; • Designing compensation and benefits for all employees;
• Meningkatkan rasio *talent* perempuan; • Pelaksanaan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan • Pelaksanaan pengelolaan aktivitas Perusahaan secara komprehensif dengan mempertimbangkan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama masyarakat lokal.	• Increasing the ratio of women talents; • The implementation of social and environmental responsibility management; and • The comprehensive management of Company activities by considering basic human rights in a fair and equal manner to improve the welfare of all communities, especially local communities.

Anggota - Bidang Tata Kelola atau *Governance* (G)	Member – Governance (G)
• Pelaksanaan pengelolaan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan; • Pelaksanaan pengelolaan kode etik dan integritas karyawan di lingkungan Perusahaan; • Pelaksanaan dan pengelolaan penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan Perusahaan; • Pelaksanaan dan pengelolaan penerapan aturan *Respectful Workplace Policy* (RWP) di lingkungan Perusahaan; • Peningkatan kualitas laporan keberlanjutan; • Pelaksanaan *assessment* dan me-*monitor* tindak lanjut hasil *assessment*; • Penurunan ESG *risk rating* terhadap hasil analisa *Sustainalytics*; • Pengelolaan praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan; • Peningkatan nilai TKDN melalui sinergi perusahaan lokal dan peningkatan keterlibatan UMKM; dan • Pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen risiko dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam pengelolaan seluruh bisnis Perusahaan.	• Managing GCG implementation within the Company; • Managing the code of conduct and integrity of employees within the Company; • Implementing and managing the Whistleblowing System (WBS) within the Company; • Implementing and managing the Respectful Workplace Policy (RWP) rules within the Company; • Improving the quality of sustainability reports; • Assessing and monitoring the follow-up of assessment results; • The decrease of ESG risk rating on the results of Sustainalytics analysis; • Managing goods and services procurement practices within the Company; • Increasing the value of TKDN through collaboration with local companies and increasing the involvement of MSMEs; and • Implementing the risk management system by integrating environmental and social aspects into Enterprise Risk Management (ERM) in managing the Company's entire business.

Rapat Komite ESG

Rapat Komite ESG dilakukan setidaknya triwulanan atau sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan isu ESG. Rapat Komite ESG bertujuan untuk:

- Mengawasi implementasi kebijakan ESG dalam operasional Perusahaan;
- Mengevaluasi risiko dan peluang ESG yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis;
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ESG, standar internasional, dan ekspektasi pemangku kepentingan;
- Meninjau laporan keberlanjutan, termasuk kinerja ESG dan metrik yang digunakan; dan
- Menyusun rekomendasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas strategi ESG.

Di sepanjang tahun 2025, Komite ESG menyelenggarakan 31 kali rapat. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite ESG dalam rapat-rapat tersebut.

Meetings of the ESG Committee

ESG Committee meetings are held at least quarterly or as needed based on ESG issue developments. ESG Committee meetings aim to:

- Oversee the implementation of ESG policies in the company's operations;
- Evaluate ESG risks and opportunities that may affect business sustainability;
- Ensure compliance with ESG regulations, international standards, and stakeholder expectations;
- Review sustainability reports, including ESG performance and metrics used; and
- Develop recommendations and improvements to enhance the effectiveness of the ESG strategy.

Throughout 2025, the ESG Committee has held 31 meetings. The following is the agenda, minutes, attendance, and recapitulation of the ESG Committee's attendance at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Komite ESG pada Rapat Komite ESG

Recapitulation of ESG Committee Attendance at ESG Committee Meetings

Komite ESG ESG Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance %
Pengawas Overseer	3	3	-	100,00
Pembina Overseer	3	3	-	100,00
Muhammad Zahid (Internal Auditor)	3	3	-	100,00
Agus Purbianto (Ketua Komite/Direktur Keuangan) (Chairman of the Committee/Director of Finance)	3	3	-	100,00
Yusuf Maharani (Wakil Ketua Komite/SVP Stratec) (Vice-Chairman of the Committee/SVP of Stratec)	3	3	-	100,00
Budi Suanda (Koordinator Bidang Lingkungan/SVP QHSE) (Coordinator – Environmental/SVP of QHSE)	3	3	-	100,00
Joko Raharjo (Koordinator Bidang Sosial/SVP Corporate Secretary) (Coordinator – Social/SVP of Corporate Secretary)	3	3	-	100,00
Andek Prabowo (Koordinator Bidang Tata Kelola/SVP Manajemen Risiko) (Coordinator – Governance/SVP of Risk Management)	3	3	-	100,00
Anggota Bidang Lingkungan (Member – Environmental)	8	8	-	100,00
Anggota Bidang Sosial (Member – Social)	8	8	-	100,00
Anggota Bidang Tata Kelola (Member – Governance)	8	8	-	100,00
Rata-rata **Average**				**100,00**

Beberapa agenda dalam Rapat Komite ESG dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertemuan berkala (triwulanan) membahas isu terkini terkait ESG, pencapaian kinerja *rating* ESG PTPP, pencapaian kinerja implementasi Inisiatif/KPI ESG PTPP, dan rencana tindaklanjut atas *assessment* BPKP terkait ESG. Untuk pertemuan berkala tahun 2025, telah dilakukan pertemuan sebanyak 3 kali yaitu untuk periode TW-1, TW-2, dan TW-3 2025;
2. Pelaksanaan verifikasi kinerja inisiatif ESG dari PIC unit seperti Biro QHSE, Biro Corsec, Divisi Stratec, Divisi HCM, Divisi Legal, Divisi RM, serta Divisi OC & SCC, yang dilakukan sebanyak 22 kali sepanjang tahun 2025; serta

Several items on the ESG Committee Meeting agenda can be outlined as follows:

1. Regular (quarterly) meetings to discuss current ESG issues, PTPP's ESG rating performance, the implementation of PTPP's ESG Initiatives/KPIs, and follow-up plans for BPKP's ESG assessment. For the 2025 regular meetings, three meetings have been held, namely for the Q1, Q2, and Q3 periods of 2025;
2. Verification of the performance of ESG initiatives from PIC units such as the QHSE Bureau, Corsec Bureau, Stratec Division, HCM Division, Legal Division, RM Division, and OC & SCC Division, which was carried out 22 times throughout 2025; and

3. Pelaksanaan finalisasi program inisiatif maupun KPI ESG untuk periode tahun 2025 dan juga tahun 2026 yang dilakukan bersama PIC Unit, dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan sepanjang tahun 2025.

3. Finalization of ESG initiative programs and KPIs for the 2025 and 2026 periods, carried out in collaboration with the PIC Unit, with six meetings held throughout 2025.

Pengembangan Kompetensi Komite ESG

Pengembangan kompetensi Komite ESG selaras dengan misi PTPP yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 129/SK/PP/DIR/2024 tentang Perubahan Visi dan Misi Perusahaan. Salah satu misi yang tercantum adalah mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan penilaian yang berbasis pada budaya Perusahaan.

Competency Development for the ESG Committee

The ESG Committee's competency development is in line with the Company's mission, as stated in Decree No. 129/SK/PP/DIR/2024 on Changes in the Company's Vision and Mission. One of the missions listed is to achieve excellent human resources through a fulfillment, development, and assessment process based on corporate culture.

Komite ESG ESG Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Zahid (SPV Internal Audit)	*Training Business Coaching Mastery*	Jakarta, 14 Maret 2025 Jakarta, March 14, 2025	HCM PTPP
	Pelatihan *Business Judgement Rules* Business Judgment Rules Training	Jakarta, 16 Oktober 2025 Jakarta, October 16, 2025	HCM PTPP
	Training Change Management	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	HCM PTPP
	Training ISO 37001:2016 SMAP ISO 37001:2016 SMAP Training	Jakarta, 26 September 2025 Jakarta, September 26, 2025	HCM PTPP
	Workshop External Perspective and Initiative Discussion	Jakarta, 23 Desember 2025 Jakarta, December 23, 2025	STRATEC PTPP
Muhammad Hafiz Aulia (SM Health Safety Enviro Green)	Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Construction OHS Expert Certification	Jakarta, 8 April 2025 Jakarta, April 8, 2025	Kemenaker Manpower Ministry
Felix Cahyo Kuncoro Jakti (SM Human Capital Operation)	Sertifikasi Manager HCM HCM Manager Certification	Jakarta, 15 Oktober 2025 Jakarta, October 15, 2025	LSP MSDM (BNSP)
Yusrina Ilmia Rosa (SM Human Capital Corporate Learning)	Seminar *Human Capital Game Changer* Human Capital Game Changer Seminar	Jakarta, 23 April 2025 Jakarta, April 23, 2025	Quality Resources Coach Indonesia
	Training Lesson Learning Masterclass	Jakarta, 13-14 Oktober 2025 Jakarta, October 13-14, 2025	Knoco Indonesia
Andek Prabowo (SVP Risk Management)	*Workshop* Penyusunan Rencana Darurat PTPP Workshop on Emergency Plan Development for PTPP	Jakarta, 24 April 2025 Jakarta, April 24, 2025	DRML PTPP
	Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi Dissemination of Anti-Corruption Prevention	Jakarta, 13 Oktober 2025 Jakarta, October 13, 2025	KPK RI
	Change Management	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	HCM PTPP
	Konferensi Nasional Manajemen Risiko National Conference on Risk Management	Jakarta, 27-28 November 2025 Jakarta, November 27-28, 2025	LSPMR
Dica Pramarti (SM Human Capital Strategic Planning and Culture Transformation)	Sertifikasi Manager HCM HCM Manager Certification	Jakarta, 15 Oktober 2025 Jakarta, October 15, 2025	LSP MSDM (BNSP)

Komite ESG ESG Committee	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Anjar Tri Astuti (SM Corporate Governance)	*Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)	Jakarta, 20 Maret 2025 Jakarta, March 20, 2025	DPS Consulting
Astri Oktaviani (SM Holding Risk Management)	*Internal Control Over Financial Reporting*	Jakarta, 18-19 Februari 2025 Jakarta, February 18-19, 2025	KBUMN SOE Ministry
	Workshop Penyusunan Rencana Darurat PTPP Workshop on Emergency Plan Development for PTPP	Jakarta, 24 April 2025 Jakarta, April 24, 2025	DRML PTPP
	Pelatihan Pasar Modal Capital Market Training	Jakarta, 17 Juli 2025 Jakarta, July 17, 2025	HCM PTPP
	Anaplan *Connect* Jakarta 2025	Jakarta, 22 Juli 2025 Jakarta, July 22, 2025	Anaplan
	Sharing Session: Resilient Minds ins Shifting Times	Jakarta, 1 Agustus 2025 Jakarta, August 1, 2025	HCM PTPP
	Change Management	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November 4, 2025	HCM PTPP
Gratianus Arya Nugraha (SM Compliance and Corporate Action)	*Corporate Law for Executive*	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	TICMI
	Corporate Finance Law	Jakarta, 26 Mei-2 Juni 2025 Jakarta, May 26-June 2, 2025	ET ASIA
	Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat dalam Kasus Korupsi Preventing Business Decisions in S/ROEs from Becoming Entangled in Corruption Cases	Jakarta, 6 Desember 2025 Jakarta, December 6, 2025	Visi Integritas dan Satu Visi Law Office
Restian Dini Malini (SM Supply Chain Control)	Sertifikasi FRAC FRAC Certification	Jakarta, 18 Desember 2025 Jakarta, December 18, 2025	IFMI

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite ESG

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan implementasi *Roadmap* ESG PTPP periode 2024-2028 dengan tema *Enhancing Practice*. Pada tahun kedua ini, PTPP memulai inisiasi target dan program-program inisiatif untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Tahun ini juga menjadi awal integrasi strategi yang dirumuskan pada tahun pertama ke dalam seluruh aktivitas operasional dan rantai pasok perusahaan. Dengan melibatkan proses integrasi strategis ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan secara holistik.

Berdasarkan *Roadmap* ESG tahun 2025, sepanjang tahun PTPP menjalankan 47 inisiatif ESG dengan detail 12 inisiatif pada pilar Lingkungan (E), 20 inisiatif pada pilar Sosial (S), dan 15 inisiatif pada pilar Tata Kelola (G). Secara garis besar, 47 inisiatif ESG yang dijalankan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Brief Report on the Implementation of ESG Committee Duties

The year 2025 marks the second year of implementing PTPP's ESG Roadmap for the 2024-2028 period, with Enhancing Practice as the theme. In this second year, PTPP has initiated targets and programs to achieve its sustainability goals. This year also marks the beginning of integrating the strategies formulated in the first year into all of the company's operational activities and supply chain. By engaging in this strategic integration process, the company hopes to improve its holistic sustainability performance.

Based on the 2025 ESG Roadmap, PTPP implemented 47 ESG initiatives throughout the year, including 12 in the Environmental (E) pillar, 20 in the Social (S) pillar, and 15 in the Governance (G) pillar. Broadly speaking, the 47 ESG initiatives implemented in 2025 are as follows.

Pilar ESG ESG Pillar	Topik Material Material Topic	Beberapa Inisiatif ESG Tahun 2025 ESG Initiatives in 2025
Lingkungan (E) Environment (E)	1. Pengelolaan Air dan Limbah Water and Waste Management	Efisiensi penggunaan Sumber Daya Air (SDA) bagi kegiatan operasional. Efficiency in the use of Water Resources (SDA) for operational activities.
	2. Penggunaan Lahan dan Keanekaragaman Hayati Land Use and Biodiversity	1. Pembuatan WI *Enviro Plan* sebagai bagian dari pengelolaan mitigasi atas dampak proyek dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati dalam proyek yang dilaksanakan PTPP. 2. Pelaksanaan program penanaman pohon berbasis *revenue*. 1. Creation of a WI Enviro Plan as part of mitigation management of the impact of projects and activities on biodiversity in projects implemented by PTPP. 2. Implementation of a revenue-based tree planting program.
	3. Karbon - Operasi Sendiri Carbon - Own Operations	Upaya penurunan emisi GRK *Scope* 1 dan *Scope* 2 Efforts to reduce Scope 1 and Scope 2 GHG emissions
	4. Produk dan Jasa Karbon Carbon Products and Services	Perhitungan *baseline Scope* 3 BBM Subkon dan upaya penurunan emisi GRK Scope 3 Perjalanan Dinas Udara. Calculation of the Scope 3 baseline for subcontractor fuel consumption and efforts to reduce Scope 3 GHG emissions from business air travel.
	5. Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Hazardous Waste and Materials Management	Upaya penurunan nilai sampah konstruksi dan pengelolaan limbah B3. Efforts to reduce construction waste and manage hazardous waste.
	6. Perancangan dan Pengembangan Produk Konstruksi Construction Product Design and Development	Penerapan konstruksi berkelanjutan. Implementation of sustainable construction.
Sosial (S) Social (S)	7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tahunan K3 PTPP. 2. Mempertahankan sertifikasi ISO 45001. 1. Planning, implementation, and evaluation of PTPP's annual OHS program. 2. Maintaining ISO 45001 certification.
	8. Keterlibatan Pegawai Employee Engagement	1. Peningkatan kompetensi pegawai (*training plan, execution*, dan *evaluation*). 2. Komitmen menjaga kesejahteraan pegawai (*Employee Well Being Policy, Engagement Survey, Children Day Care*, indeks kesehatan pegawai). 1. Improving employee competence (training plan, execution, and evaluation). 2. Commitment to maintaining employee welfare (Employee Well Being Policy, Engagement Survey, Children's Day Care, employee health index).
	9. Masyarakat Setempat Local Communities	1. Pelaksanaan dan analisis aktivitas TJSL secara komprehensif. 2. Pemenuhan kebutuhan talenta perusahaan melalui pemberdayaan masyarakat setempat. 1. Comprehensive implementation and analysis of TJSL activities. 2. Fulfilling the company's talent needs through the empowerment of local communities.
	10. Produk dan Kualitas Products and Quality	1. Mengembangkan praktik *green building* di Indonesia. 2. Berkomitmen memberikan produk dengan kualitas terbaik. 1. Developing green building practices in Indonesia. 2. Commitment to providing the highest quality products.
Tata Kelola (G) Governance (G)	11. Etika dan Integritas Ethics and Integrity	1. Peningkatan persentase pegawai yang mengikuti pelatihan terkait etika dan integritas. 2. Penetapan kebijakan *Zero-tolerance*. 1. Increase the percentage of employees who participate in ethics and integrity training. 2. Establishment of a zero-tolerance policy.

Pilar ESG ESG Pillar	Topik Material Material Topic	Beberapa Inisiatif ESG Tahun 2025 ESG Initiatives in 2025
	12. Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	1. Memperbaiki kinerja keberlanjutan sesuai hasil penilaian *Sustainalytics*. 2. Persiapan adopsi standar pelaporan PSK-1 dan PSK-2. 1. Improving sustainability performance in line with Sustainalytics assessment results. 2. Preparing to adopt PSK-1 and PSK-2 reporting standards.
	13. Praktik Pengadaan Procurement Practices	1. Peningkatan persentase pemasok lokal. 2. Peningkatan nilai TKDN. 1. Increasing the percentage of local suppliers. 2. Increasing the value of TKDN (local content).
	14. Manajemen Risiko Sistemik Systemic Risk Management	1. Analisis skenario perubahan iklim. 2. Penyempurnaan *framework* berbasis risiko. 3. Penerapan ESG pada lini bisnis Perusahaan. 1. Analyzing climate change scenarios. 2. Refining the risk-based framework. 3. Implementing ESG in the Company's business lines.

Kinerja pencapaian Inisiatif ESG pada tahun 2025 adalah sebesar 98% dimana hanya terdapat satu inisiatif ESG yang belum dapat dijalankan di tahun 2025 yaitu terkait pembuatan *Roadmap Net Zero Emission* (NZE) yang baru bisa dijalankan setelah proses Integrasi BUMN Karya selesai. Dengan demikian, inisiatif pembuatan *Roadmap* NZE akan dimasukkan menjadi salah satu inisiatif/KPI ESG PTPP di tahun berikutnya (2026).

The performance of ESG initiatives in 2025 is 98%, with only one ESG initiative that cannot be implemented in 2025, i.e., the creation of a new Net Zero Emission (NZE) Roadmap, which can only be implemented after the integration of BUMN Karya is complete. Therefore, the NZE Roadmap development initiative will be included as one of PTPP's ESG initiatives/KPIs in the following year (2026).

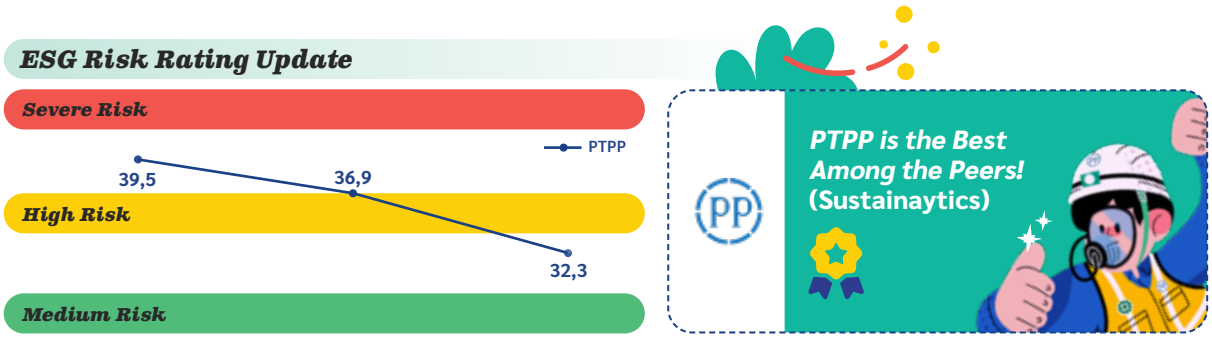
Diluar dari inisiatif ESG yang dijalankan, Komite ESG juga memonitor dilaksanakannya *Area of Improvement* (AOI) dari BPKP periode tahun 2024, dimana setidaknya terdapat 21 AOI yang harus diselesaikan pada tahun 2025. Berdasarkan proses monitoring dan evaluasi yang dijalankan, kinerja tindak lanjut AOI tahun 2025 adalah sebesar 95% dimana hanya terdapat satu AOI yang belum dapat diselesaikan, yaitu pembuatan dan pelaksanaan SOP/WI khusus mengenai Enviro Plan yang di dalamnya memuat dampak positif/negatif atas implementasi program keanekaragaman hayati di PTPP. Dengan demikian AOI terkait *Enviro Plan* tersebut akan dijalankan di tahun berikutnya (tahun 2026).

Apart from the ESG initiatives being implemented, the ESG Committee also monitors the implementation of the Areas of Improvement (AOIs) from BPKP for the 2024 period, with at least 21 AOIs to be completed in 2025. Based on the monitoring and evaluation process carried out, the 2025 AOI follow-up is at 95%, with only one AOI that has not been completed, namely the creation and implementation of specific SOPs/WIs on the Enviro Plan, which contains the positive/negative impacts of the implementation of the biodiversity program at PTPP. Therefore, the AOI related to the Enviro Plan will be implemented in the following year (2026).

Faktor ESG ESG Factor	Jumlah AOI Total AOS	Tenggat 2025 2025 Deadline		
		Closed	*Progress*	*Open*
Faktor Lingkungan Environmental Factor	9	8	1	-
Faktor Sosial Social Factor	3	3	-	-
Faktor Tata Kelola Governance Factor	7	7	-	-
Faktor FInansial Finance Factor	2	2	-	-
Total	**21**	**20**	**1**	**-**

Berikutnya, selain fokus pada upaya implementasi ESG di internal PTPP, pada tahun 2025 Komite ESG juga melakukan peningkatan kinerja *rating* ESG PTPP berdasarkan *raters* Sustainalytics. *Raters* Sustainalytics dipilih karena merupakan *raters* yang umum digunakan oleh emiten (perusahaan publik) dan juga yang digunakan secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun 2025, rating ESG PTPP pada Sustainalytics terus membaik dari semula sebesar 36,9 pada tahun 2024 hingga mencapai 32,3 pada akhir Desember 2025 (membaik sebesar 4,6 poin). Nilai rating pada akhir Desember 2025 tersebut menjadikan PTPP menjadi perusahaan BUMN Karya dengan *rating* ESG terbaik di Indonesia versi Sustainalytics.

In 2025, in addition to focusing on ESG implementation efforts within PTPP, the ESG Committee improved PTPP's ESG rating based on Sustainalytics raters. Sustainalytics raters were chosen because they are commonly used by issuers (public companies) and are also officially used by the Indonesia Stock Exchange (IDX). In 2025, PTPP's ESG rating on Sustainalytics improved from 36.9 in 2024 to 32.3 at the end of December 2025 (an improvement of 4.6 points). This rating at the end of December 2025 makes PTPP the BUMN Karya company with the best ESG rating in Indonesia, according to Sustainalytics.



Capaian Utama Komite ESG

Capaian utama Komite ESG sepanjang tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan integrasi isu ESG material ke dalam kebijakan dan proses bisnis;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan unit kerja terhadap pengelolaan risiko ESG;
3. Penguatan sistem pemantauan dan pelaporan kinerja ESG; serta
4. Meningkatnya koordinasi lintas fungsi dalam implementasi ESG.

Tantangan Utama dan Arah Tindaklanjut

▶ Tantangan Utama

1. Perbedaan tingkat pemahaman ESG di unit dan proyek;
2. Keterbatasan data ESG yang terstandarisasi dan terintegrasi;
3. Kompleksitas pengelolaan dampak ESG pada proyek berskala besar; serta
4. Dinamika regulasi dan standar ESG.

▶ Arah Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas dan internalisasi ESG;
2. Penguatan sistem data dan pelaporan ESG terintegrasi;
3. Penajaman indikator kinerja (KPI) ESG;
4. Penguatan sinergi lintas fungsi dan entitas anak; serta
5. Penyesuaian kebijakan internal sesuai perkembangan regulasi.

Key Achievements of the ESG Committee

The key achievements of the ESG Committee throughout 2025 include:

1. Strengthening the integration of material ESG issues into business policies and processes;
2. Increasing awareness and compliance of work units with ESG risk management;
3. Strengthening the ESG performance monitoring and reporting system; and
4. Increased cross-functional coordination in ESG implementation.

Key Challenges and Next Steps

▶ Key Challenges

1. Differences in the level of ESG understanding across units and projects;
2. Limited standardized and integrated ESG data;
3. Complexity of managing ESG impacts on large-scale projects; and
4. Dynamics of ESG regulations and standards.

▶ Next Steps

1. Enhancing ESG capacity and internalization;
2. Strengthening integrated ESG data and reporting systems;
3. Refining ESG key performance indicators (KPIs);
4. Strengthening cross-functional and subsidiary synergies; and
5. Adjusting internal policies in line with regulatory developments.

Berdasarkan kinerja sepanjang tahun 2025 di atas, pelaksanaan tugas Komite ESG telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di PTPP. Ke depan, Komite ESG akan terus mendukung Manajemen dalam memastikan ESG menjadi bagian integral dari strategi dan operasional Perusahaan.

Based on the performance above throughout 2025, the implementation of the ESG Committee's duties has made a positive contribution to strengthening the application of sustainability principles at PTPP. Going forward, the ESG Committee will continue to support Management in ensuring that ESG becomes an integral part of the Company's strategy and operations.

Sekretaris Perusahaan

PTPP menyadari pentingnya hubungan baik antar organ Perusahaan, mulai dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders Untuk terwujudnya hubungan tersebut, Perusahaan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam menyelenggarakan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai Emiten dengan Regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan pemangku kepentingan pada umumnya, dan pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perusahaan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau Perusahaan publik lain.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Perusahaan wajib melaporkan pergantian pejabat Sekretaris Perusahaan kepada setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian pejabat Sekretaris Perusahaan diberitahukan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Kualifikasi Pejabat Sekretaris Perusahaan

Pejabat yang diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi pendidikan akademis yang memadai sesuai ketentuan Perusahaan, termasuk pelatihan di bidang Sekretaris Perusahaan, memiliki pengetahuan tentang kegiatan Perusahaan secara menyeluruh, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan dan pengalaman manajerial, akhlak dan moral yang baik, serta harus memiliki integritas dan dedikasi tinggi.

Corporate Secretary

PTPP realizes the importance of good relations between the Company's organs, starting from the GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, Employees and the relationship between the Company and Stakeholders. To materialize these relationships, the Company appoints a Corporate Secretary.

The Corporate Secretary assists the Board of Directors in organizing good relations between the Company as an Issuer and Regulators and capital market-supporting institutions, investors, the wider community, and stakeholders in general. The Corporate Secretary also manages information related to the Company's business environment. Under OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies and SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Parties Appointing and Dismissing the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is a Company official specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is responsible for and reports their activities directly to the President Director. The Corporate Secretary is prohibited from holding any position in another issuer or public company.

Per OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, the Company is obliged to report the change of Corporate Secretary officer to the OJK and the Indonesia Stock Exchange on every appointment, replacement, or dismissal of the Corporate Secretary officer.

Qualification of Corporate Secretary Officer

An officer appointed as a Corporate Secretary must have adequate academic qualifications as the Company requires, including training in the Corporate Secretary's area of expertise. They must also have comprehensive knowledge of the Company's activities, communication ability, managerial skills and experience, good character and morals, high integrity, and dedication.

Pengangkatan dan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Perusahaan telah menetapkan Joko Raharjo sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 066/SK/PP/DIR/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengangkatan Senior Vice President, Head of Corporate Secretary Bureau, dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pengangkatan Joko Raharjo sebagai Sekretaris Perusahaan telah dipublikasikan di situs web Perusahaan www.ptpp.co.id serta di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yakni Investor Daily pada tanggal 28 Juni 2024.

Pengangkatan Joko Raharjo sebagai Sekretaris Perusahaan juga sudah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2024 melalui surat No. 115/EXT/PP/CORSEC/2024 untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Appointment and Officers of the Corporate Secretary

The Company has appointed Joko Raharjo as Corporate Secretary based on the Board of Directors Decree No. 066/SK/PP/DIR/2024 dated June 27, 2024, on the Appointment of Senior Vice President, Head of Corporate Secretary Bureau, and has received approval from the Board of Commissioners.

The appointment of Joko Raharjo as Corporate Secretary has been published on the Company's website, www.ptpp.co.id, as well as in one nationally circulated newspaper, i.e., Investor Daily on June 28, 2024.

The appointment of Joko Raharjo as Corporate Secretary has also been reported to OJK and the Indonesia Stock Exchange on June 28, 2024 through letter No. 115/EXT/PP/CORSEC/2024 to comply with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.



Joko Raharjo, S.T., M.T.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Periode Jabatan
Term of Office

Menjabat sejak 28 Juni 2024
In Office since June 28, 2024

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Sleman, 8 April 1980 Born in Sleman, April 8, 1980	Usia 45 tahun 45 years old	Berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in Tangerang, Banten, Indonesia

Bergabung di PTPP

24 Oktober 2011 sebagai Construction Manager Proyek Gedung UIN Malang Tahap III, Divisi Gedung

Joined PTPP

October 24, 2011, as a Project Construction Manager of UIN Malang Building Phase III, Building Division

Pendidikan

- Magister (S2) Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November, Surabaya (2023)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas Janabadra Yogyakarta (2003)

Formal Education

- Master of Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (2023)
- Bachelor of Civil Engineering, Janabadra University, Yogyakarta (2003)

Pengalaman Kerja

- SVP Corporate Secretary PT PP (Persero) Tbk (2024-sekarang)
- General Manager Operasi Divisi Gedung PT PP (Persero) Tbk (2021-2024)
- Senior Manager Departemen Tender Divisi Gedung, PT PP (Persero) Tbk (2020-2021)
- Project Manager Divisi Gedung, PT PP (Persero) Tbk (2012-2020)
- Construction Manager Proyek Divisi Gedung, PT PP (Persero) Tbk (2011-2012)

Work Experience

- SVP Corporate Secretary, PT PP (Persero) Tbk (2024-present)
- General Manager of Operations, Building Division, PT PP (Persero) Tbk (2021-2024)
- Senior Manager of Tender Department, Building Division, PT PP (Persero) Tbk (2020-2021)
- Project Manager of Building Division, PT PP (Persero) Tbk (2012-2020)
- Construction Manager of Building Division, PT PP (Persero) Tbk (2011-2012)

Sertifikasi Profesi

- Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung, BNPS (2023)
- Ahli Manajemen Proyek - Utama, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (2021)
- Ahli Madya K3 Konstruksi, Divisi HCM PTPP (2021)

Professional Certification

- Principal Expert in Building Engineering, BNSP (2023)
- Senior Project Management Expert, Construction Services Development Institute (2021)
- Associate Expert in Construction Occupational Safety and Health, PTPP HCM Division (2021)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan:
Social Coordinator Komite ESG (2024-sekarang).
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Concurrent Position

Within the Company:
Social Coordinator of the ESG Committee (2024-present).
Outside the Company: None

Keorganisasiaan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, Sekretaris Perusahaan membawahi unit kerja Departemen Hubungan Eksternal dan Hubungan Internal, sebagaimana Struktur Organisasi Biro Sekretaris Perusahaan.

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan, berikut disampaikan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2025.

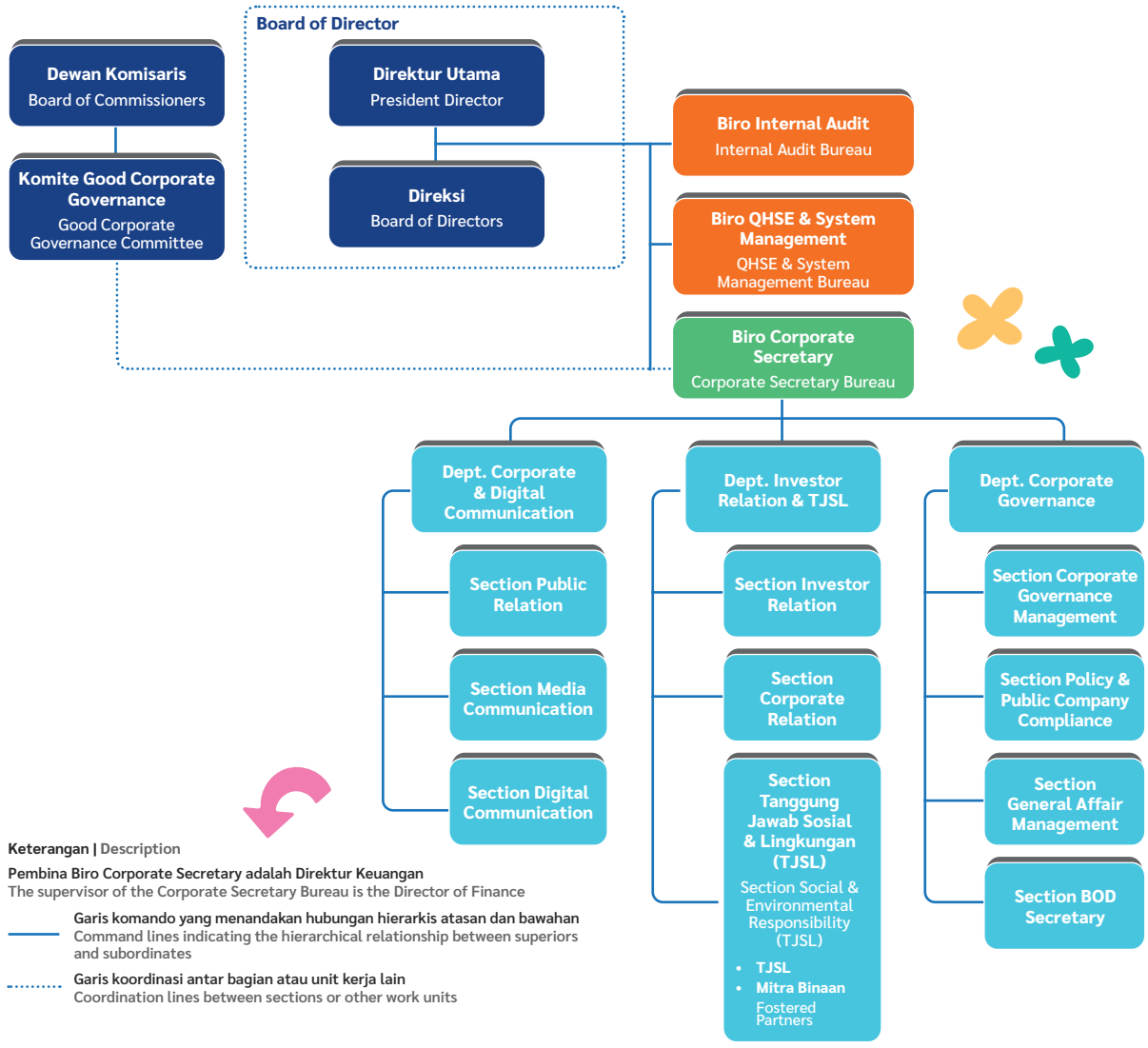
Organization of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director for implementing the assigned tasks. To expedite the activities carried out, the Corporate Secretary oversees the work units of the External Relations and Internal Relations Departments, as per the Organizational Structure of the Corporate Secretary Bureau.

The following is the organizational structure of the Corporate Secretary as of December 31, 2025, to depict the scope of functions of the Corporate Secretary.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Organizational Structure of the Corporate Secretary



Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 044/SK/PP/DIR/2024 tanggal 10 Juni 2024. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 27 orang.

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined per the Board of Directors Decree No. 044/SK/PP/DIR/2024 dated June 10, 2024. Until the end of 2025, the number of employees who are members of the Corporate Secretary unit is 27 people.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (personnel)
SVP, Head of Corporate Secretary Bureau	1
Head of Corporate & Digital Communication Department	1
Head of Investor Relations & TJSL Department	1
Head of Corporate Governance Department	1
Investor Relations	2
Corporate Relations	1
TJSL	3
Media Relations	1
Public Relations	2
Digital Communication	4
Corporate Governance Management	1
Policy and Public Company Compliance	2
General Affair	2
Secretary	5
Jumlah Total	**27**

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan tertuang di dalam Pedoman GCG tahun 2021 Bagian Kedua Bab VI, yang berisi uraian tentang keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, dan pengelolaan informasi.

Corporate Secretary Work Guidelines

The Corporate Secretary Work Guidelines are contained in the 2021 GCG Guidelines Part Two Chapter VI, which describes membership, duties and responsibilities, and information management.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran hubungan antar organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan hubungan baik dengan pemangku kepentingan strategis, khususnya Pemegang Saham, akan sangat mendukung kelancaran bisnis dan pengembangan usaha Perusahaan. Selain itu, sebagai Perusahaan publik, Perusahaan juga wajib memiliki tata laksana dokumen dan informasi yang baik untuk membantu memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan dan peraturan pasar modal serta untuk mendukung akuntabilitas pelaporan kinerja dan tanggung jawab Perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The main task of the Corporate Secretary is to ensure a smooth relationship between the Company's organs, the relationship between the Company and its stakeholders, and the fulfillment of the prevailing laws and regulations. Developing good relationships with strategic stakeholders, especially Shareholders, will significantly support the smooth running of the Company's business and its development. Moreover, as a public company, the Company is also required to have good document and information management to help ensure the Company's compliance with capital market laws and regulations as well as to support the accountability of performance reporting and the Company's responsibilities to stakeholders.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Perusahaan menetapkan kualifikasi khusus untuk pejabat Sekretaris Perusahaan, memberikan wewenang dan sumber daya yang memadai dan dilakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan tugasnya. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan ada 3 (tiga), yaitu: sebagai *liaison officer*, *compliance officer* serta *investor*

The Corporate Secretary reports directly to the President Director. The Company sets specific qualifications for the Corporate Secretary, provides adequate authority and resources, and conducts periodic evaluations of the implementation of its duties. There are three main functions of the Corporate Secretary, namely: as a liaison officer, compliance officer, and investor relations. Under

relations. Sesuai dengan fungsinya, Sekretaris Perusahaan menjamin ketersediaan informasi terkini, tepat waktu dan akurat mengenai Perusahaan kepada para Pemegang Saham, analis, media massa dan masyarakat umum, yang juga meliputi penyediaan laporan Triwulan dan laporan Tahunan.

these functions, the Corporate Secretary ensures the availability of current, timely, and accurate information about the Company to Shareholders, analysts, mass media, and the public, including the provision of Quarterly and Annual reports.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:
   a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
   b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
   c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
      » Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
      » Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
      » Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
      » Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris; dan
      » Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan.
4. Mengelola penyelenggaraan RUPS:
   a. Menjadwalkan RUPS;
   b. Mengundang Pemegang Saham;
   c. Melaksanakan RUPS dan membuat Risalah RUPS; dan
   d. Me-*record* Agenda, Risalah RUPS, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam RUPS.
5. Mengelola Rapat Direksi:
   a. Menjadwalkan Rapat Direksi;
   b. Mengundang Peserta Rapat Direksi;

The Corporate Secretary has the following duties, among others:

1. The Corporate Secretary Function performs the following duties at least:
   a. Following the development of the Capital Market, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
   b. Providing input to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.
   c. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, which includes:
      » Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's Website;
      » Timely submission of reports to OJK;
      » Organizing and documenting the GMS;
      » Organizing and documenting Board of Directors Meetings and/or Board of Commissioners Meetings; and
      » Implementing company orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   d. Becoming a liaison between the Company and Shareholders, OJK, and other stakeholders.
2. The Corporate Secretary and employees in the work unit that carries out the Corporate Secretary function shall maintain the confidentiality of classified documents, data, and information, except in fulfilling obligations under laws and regulations or as otherwise specified in laws and regulations.
3. The Corporate Secretary and employees in the work unit that carries out the Corporate Secretary functions are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly, that is detrimental to the Company.
4. Managing the organization of the GMS:
   a. Scheduling the GMS;
   b. Inviting Shareholders;
   c. Conducting the GMS and making the GMS Minutes;
   d. Recording the Agenda, GMS Minutes, Policies, Decisions, and data generated in the GMS.
5. Managing Board of Directors Meetings:
   a. Scheduling Board of Directors Meetings;
   b. Inviting Participants to Board of Directors Meetings;

c. Melaksanakan Rapat Direksi dan membuat Risalah/ Minit;
d. Merecord Agenda, Risalah Rapat Direksi, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Direksi.

6. Mengelola Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, Kebijakan, Risalah dan Keputusan serta data-data yang dihasilkan di dalam Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
8. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
9. Menangani dan mengkoordinir Aksi Korporasi, bekerja sama dengan Biro MR dan Legal.
10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
11. Mengkoordinir program kerja & aktivitas Sekretaris Direksi.
12. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang No. 08 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan:
    a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
    b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
    c. Informasi Fakta Material; dan
    d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
    e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
15. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan), termasuk penyusunan dan pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
16. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
17. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

c. Holding Board of Directors Meetings and making Minutes;
d. Recording the Agenda, Minutes of Board of Directors Meetings, Policies, Decisions, and data generated in Board of Directors Meetings.

6. Managing the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and recording the Agenda, Policies, Minutes and Decisions as well as data generated in the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
7. Assisting the Board of Directors in resolving general Company problems.
8. Overseeing the application of applicable regulations while adhering to GCG principles.
9. Handling and coordinating Corporate Actions in cooperation with MR and Legal Bureau.
10. Organizing and storing Company documents.
11. Coordinating the work program & activities of the Secretary to the Board of Directors.
12. Keeping abreast of the prevailing regulations in the Capital Market.
13. Providing input to the Board of Directors to comply with Law No. 8 of 1995 on the Capital Market.
14. Providing services to the public or Stakeholders for information needed by investors regarding the condition of the Company:
    a. Annual Financial Statements (Audited);
    b. Annual Company Performance Report (Annual Report);
    c. Information on Material Facts;
    d. Significant products or inventions (awards, flagship projects, invention of special methods, and others);
    e. Changes in the control system or essential management changes.
15. Becoming a liaison officer between the Company and related institutions and communities (external and environmental), including preparing and implementing the Partnership & Community Development Program (PKBL).
16. The Corporate Secretary shall make periodic reports to the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least once a year, on implementing the Corporate Secretary function.
17. Any information submitted by the Corporate Secretary to the public is official information from the Company.

Competency Development for the Corporate Secretary

The Company facilitates the implementation of development programs for the Corporate Secretary to improve competence. These programs are expected to positively impact the Corporate Secretary's productivity and effectiveness.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dimas Citra Bangsa (Officer - Corporate and Digital Communication)	*Workshop* Komunikasi Media Sosial melalui Optimasi AI Workshop on Social Media Communication through AI Optimization	Bandung, 21-22 Februari 2025 Bandung, February 21-22, 2025	KBUMN SOE Ministry
Rizko Fauzy Algonny (Officer - Corporate and Digital Communication)	*Workshop* Komunikasi Media Sosial melalui Optimasi AI Workshop on Social Media Communication through AI Optimization	Bandung, 21-22 Februari 2025 Bandung, February 21-22, 2025	KBUMN SOE Ministry
Anjar Tri Astuti (SM - Corporate Governance)	*Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)	*Online*, 20 Maret 2025 Online, March 20, 2025	DPS Consulting
Kiki Firmansyah (Senior Officer - Corporate Governance)	*Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)	*Online*, 20 Maret 2025 Online, March 20, 2025	DPS Consulting
Irma Berlian (Junior Officer - Public Relationship)	*Workshop* Komunikasi Media Sosial Optimasi AI Workshop on Social Media Communication through AI Optimization	Surabaya, 24-25 April 2025 Surabaya, April 24-25, 2025	KBUMN SOE Ministry
Nabila Drishti Kanya (Officer - Investor Relationship and TJSL)	*Financial Risk Analyst for Corporation* (FRAC)	*Online*, 22-23 Oktober 2025 Online, October 22-23, 2025	Rajawali Konsulindo
Chalid Susanto (Junior Officer - Investor Relationship and TJSL)	*Financial Risk Analyst for Corporation* (FRAC)	*Online*, 22-23 Oktober 2025 Online, October 22-23, 2025	Rajawali Konsulindo

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2025

Berdasarkan Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan tahun 2025 kepada Dewan Komisaris, Komite Audit serta Direksi, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 24 April 2024;
2. Memastikan frekuensi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Direksi serta Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang Pasar Modal maupun peraturan lainnya, termasuk dalam ketersediaan agenda dan materi rapat;
3. Mendokumentasikan risalah hasil Rapat Direksi serta Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Memastikan pedoman serta kebijakan telah dibuat dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
5. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023;
6. Melakukan Keterbukaan Informasi dalam hal terdapatnya fakta atau laporan material ke OJK maupun BEI;
7. Melaksanakan kegiatan hubungan investor, seperti *analyst meeting, one-on-one meeting*, dan *project visit;*
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi (*Management Review*) Perusahaan yang berkoordinasi dengan Biro OC & SCM;

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2025

Based on the 2025 Corporate Secretary Activity Report to the Board of Commissioners, Audit Committee, and Board of Directors, the Corporate Secretary has carried out the following duties:

1. Holding the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 on April 24, 2024;
2. Ensuring the frequency and coordinating the holding of Board of Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors to comply with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and other regulations, including the availability of meeting agendas and materials;
3. Documenting the minutes of the results of the Board of Directors Meetings and the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Ensuring that guidelines and policies have been made and implemented according to applicable laws and regulations while adhering to GCG principles;
5. Preparing the Annual Report and Sustainability Report for Fiscal Year 2024;
6. Disclosing information in the event of material facts or reports to the OJK or IDX;
7. Carrying out investor relations activities, such as analyst meetings, one-on-one meetings, and project visits;
8. Carrying out Company Coordination Meetings (Management Review) in coordination with the OC & SCM Bureau;

9. Menerbitkan *press release* kepada publik dan media massa baik *online* maupun cetak, untuk menjaga citra positif Perusahaan;
10. Melaksanakan kegiatan *press conference;*
11. Melakukan publikasi Iklan Advertorial, Iklan Display, dan Iklan Keterbukaan Informasi di Media Massa;
12. Melakukan publikasi kegiatan dan informasi terkini seputar perusahaan di Media Sosial (Instagram, X, Facebook, Youtube) dan *Website* Perusahaan;
13. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan perusahaan seperti Peresmian Proyek, *Groundbreaking*, Kunjungan Pejabat Negara, dan sebagainya;
14. Melakukan kegiatan *Public Expose;*
15. Menjadi *Counterpart* dalam melakukan *Assessment* ESG oleh BPKP; serta
16. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi integrasi WBS dengan KPK.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Peran media informasi sangat penting dalam membentuk citra publik yang baik terhadap Perusahaan. Oleh karena itu, PTPP berupaya mengelola informasi publik dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan baik oleh *Stakeholders*. Sehingga upaya tersebut dapat menunjang penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkelanjutan khususnya terkait aspek transparansi.

Perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya. Prinsip keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan usahanya, PTPP menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh Stakeholders.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

9. Publishing press releases to the public and mass media, both online and in print, to maintain the Company's positive image;
10. Carrying out press conference activities;
11. Publishing Advertorials, Display Advertisements, and Information Disclosure Advertisements in the Mass Media;
12. Publishing the latest activities and information about the company on Social Media (Instagram, X, Facebook, YouTube) and the Company's Website;
13. Organizing and participating in company activities such as Project Inaugurations, Groundbreakings, State Official Visits, and so on;
14. Conducting Public Expose activities;
15. Acting as a Counterpart in conducting ESG Assessments by the BPKP; and
16. Coordinating the monitoring and evaluation of the implementation of the WBS integration with the KPK.

Access to Company Information and Data

The role of information media is vital in forming a good public image of the Company. Therefore, PTPP strives to manage public information and ensure that stakeholders can access it properly so that these efforts can support the sustainable implementation of Corporate Governance especially related to transparency aspects.

The Company implements the principle of transparency by providing information in a timely, adequate, precise, accurate, and comparable manner and is easily accessible to stakeholders according to their rights. The principle of transparency does not reduce the obligation to fulfill the confidentiality provisions of the Company's information according to laws and regulations, official confidences, and personal rights. To maintain objectivity in conducting its business, PTPP provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understood by Stakeholders.

The Corporate Secretary is responsible for coordinating the management of electronic and print communication media to maintain the integrity and credibility of the Company's information to the public.

Untuk kebutuhan informasi tentang PTPP secara langsung, kami menyediakan sarananya melalui saluran *website* atau surat menyurat dan telepon yang dapat ditujukan kepada:

For direct information needs about PTPP, we provide suggestions through website channels or correspondence and telephone that can be addressed to:



PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia
Surel | E-mail: corsec@ptpp.co.id
Phone: +6221 840 3883 (*hunting*)
Fax: +6221 840 3936 & 840 3890

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Eksternal

Perusahaan menyediakan akses informasi dan data Perusahaan untuk Pihak Eksternal dengan cara berikut:

- Pengelolaan Situs Web
  Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Perusahaan Publik, Perusahaan telah mempunyai situs web resmi yang mencerminkan identitas Perusahaan dan dapat diakses melalui www.ptpp.co.id. Situs web ini tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan menyajikan berbagai informasi umum yang berkaitan dengan profil Perusahaan dan informasi korporasi lainnya.

  Perusahaan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait Perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Perusahaan juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

  Di bawah ini tersaji kesesuaian konten situs web www.ptpp.co.id dengan peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Information Governance and Access to Company Data for External Parties

The Company provides access to the Company's information and data for External Parties in the following ways:

- Website Management
  Per OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies, the Company has an official website that reflects its identity and can be accessed through www.ptpp.co.id. The website is available in two languages, Indonesian and English, and presents various general information relating to the Company's profile and other corporate information.

  The Company regularly updates its website to keep stakeholders updated with the latest information related to the Company and to comply with prevailing laws and regulations. The Company's website also provides contact numbers, e-mail, and postal addresses that can be contacted for further communication with stakeholders.

  Below is the www.ptpp.co.id website content conformity with OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies.

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik **OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Website of Issuers or Public Companies**	**Kesesuaian dengan Situs Web Perusahaan** **Company Website Compliance**
Ketentuan Umum General Provisions	
Situs web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia. The website of the Issuer or Public Company must present information in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English. Information presented in a foreign language must contain the same information as that in Bahasa Indonesia.	✓

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik **OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Website of Issuers or Public Companies**	**Kesesuaian dengan Situs Web Perusahaan** **Company Website Compliance**
Informasi yang termuat mengenai Emiten atau Perusahaan Publik terbuka untuk umum, aktual, dan terkini. The information about the Issuer or Public Company is open to the public, actual, and up to date.	✓
Dapat diakses setiap saat oleh semua pihak. Accessible at any time by all parties.	✓
Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik General Information of Issuer or Public Company	
Identitas Perusahaan, mencakup nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi. The identity of the Company includes the name, address, and contact details of the head office and/or representative office of the Issuer or Public Company and factory address (if any), which at least includes telephone number, facsimile number, and electronic mail address that can be contacted.	✓
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik. Brief history of the Issuer or Public Company.	✓
Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik. Organizational structure of the Issuer or Public Company.	✓
Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: • Uraian tentang nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan; • Informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; • Nama entitas anak, Perusahaan asosiasi, Perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi Perusahaan tersebut (jika ada). The ownership structure of the Issuer or Public Company, including: • Description of the name of Shareholders and percentage of ownership at the end of each month; • Information on majority and controlling Shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, down to individual owners, presented in the form of schemes or diagrams; • Name of subsidiaries, associated companies, and joint ventures where the Issuer or Public Company has joint control of the entity, along with the percentage of share ownership, line of business, and the Company's operating status (if any).	✓
Struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi Perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. The group structure of the Issuer or Public Company should be in the form of a chart that at least includes companies in the Issuer or Public Company group that are under the supervision of the Financial Services Authority.	✓
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi: foto, nama, riwayat jabatan termasuk rangkap jabatan, riwayat pendidikan, dan hubungan afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham (jika ada). Profiles of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees, and Corporate Secretary include at least a photograph, name, history of position, including concurrent position, education history, and affiliation of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, and Shareholders (if any).	✓
Nama dan alamat Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan. Name and address of the Public Accountant who audited the Issuer's or Public Company's financial statements in the current year.	✓
Nama dan alamat Pemeringkat Efek (jika ada). Name and address of Securities Rating Agency (if any).	✓
Nama dan alamat Wali Amanat (jika ada). Name and address of the Trustee (if any).	✓

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik **OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Website of Issuers or Public Companies**	**Kesesuaian dengan Situs Web Perusahaan** **Company Website Compliance**
Nama dan alamat Biro Administrasi Efek (jika ada). Name and address of the Share Registrar (if any).	✓
Dokumen Anggaran Dasar. Articles of Association document.	✓
Informasi Bagi Pemodal atau Investor Information for Investors	
Prospektus Penawaran Umum. Public Offering Prospectus.	✓
Laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir. Annual report for the period of the last five fiscal years.	✓
Informasi keuangan, paling kurang meliputi: • Laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir. • Laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir. • Ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat: » Pendapatan, laba bruto, laba (rugi), laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, total laba (rugi) komprehensif, laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, dan laba (rugi) per saham; » Jumlah aset, liabilitas dan ekuitas; » Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset, rasio laba (rugi) terhadap ekuitas, rasio laba (rugi) terhadap pendapatan, rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset; » Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya. Financial information including at least: • Annual financial statements for the last five fiscal years. • Semi-annual financial statements for the last five fiscal years. • Summary of key financial data in comparative form for the last five fiscal years, which at least includes: » Revenue, gross profit, profit (loss), profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests, total comprehensive profit (loss), comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests, and earnings (loss) per share; » Total assets, liabilities, and equity; » The ratio of profit (loss) to total assets, the ratio of profit (loss) to equity, the ratio of profit (loss) to revenue, the current ratio, the ratio of liabilities to equity, and the ratio of liabilities to total assets; » Other financial information and ratios relevant to the Company and its industry.	✓
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi: • Pengumuman dan pemanggilan; • Bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham; • Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; • Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Information on the General Meeting of Shareholders, including at least: • Announcement and summons; • Agenda materials discussed at the General Meeting of Shareholders; • Curriculum vitae of prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners if there is an agenda item for the appointment or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; • Summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders.	✓

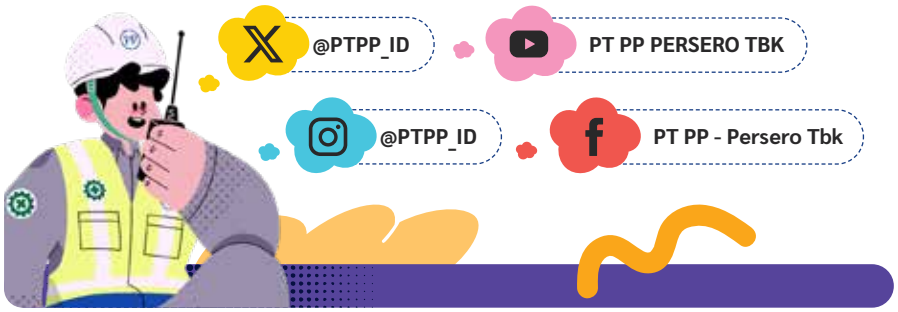
Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik **OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Website of Issuers or Public Companies**	**Kesesuaian dengan Situs Web Perusahaan** **Company Website Compliance**
Informasi saham, paling kurang meliputi: • Jumlah saham beredar; • Pemecahan saham (jika ada); • Penggabungan saham (jika ada); • Saham bonus (jika ada); • Perubahan nilai nominal saham (jika ada). Share information, including at least: • Number of shares outstanding; • Stock split (if any); • Merger of shares (if any); • Bonus shares (if any); • Changes in the nominal value of shares (if any).	✓
Informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (*outstanding bond*) dan/atau Sukuk, hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk. Information on bonds and/or Sharia Bonds, at least including the value of outstanding bonds and/or Sharia Bonds, bond and/or Sharia Bond rating results, maturity dates, and bond interest rates and/or Sharia Bond yields.	✓
Informasi dividen. Dividend information.	✓
Informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada). Information for investors, media, public, and/or analysts (if any).	✓
Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi: • Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; • Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama; • Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; • Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; • Kuasi Reorganisasi; • Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; • Pembagian Saham Bonus; • Pernyataan Penawaran Tender; • Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; • Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali. Information related to corporate actions taken by the Issuer or Public Company and actions taken by other parties against the Issuer or Public Company (if any), including: • Affiliate Transactions and Conflict of Interest in Certain Transactions; • Material Transactions and changes in Main Business Activities; • Business Merger or Consolidation; • Acquisition of Public Company; • Quasi Reorganization; • Buyback of shares issued by the Issuer or Public Company; • Bonus Share Distribution; • Tender Offer Statement; • Share buyback by Issuers or Public Companies in potentially critical market conditions; • Share ownership program by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company or controlled parties.	✓
Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Material Information or Facts other than those disclosed in this Financial Services Authority Regulation.	✓
Informasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Information	
Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Work guidelines of the Board of Directors and Board of Commissioners.	✓
Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya. Appointment, dismissal, and/or vacancy of the Corporate Secretary, including temporary Corporate Secretary, and supporting information.	✓

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Website of Issuers or Public Companies	Kesesuaian dengan Situs Web Perusahaan Company Website Compliance
Piagam Unit Audit Internal. Internal Audit Charter.	✓
Kode etik. Code of conduct.	✓
Pedoman kerja komite. Committee guidelines.	✓
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit. Appointment and dismissal of Audit Committee members.	✓
Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Description of Nomination and Remuneration procedures if no Nomination and Remuneration Committee is established.	✓
Kebijakan manajemen risiko. Risk management policy.	✓
Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada). Whistleblowing system mechanism policy (if any).	✓
Kebijakan anti korupsi (jika ada). Anti-corruption policy (if any).	✓
Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada). Policies related to supplier selection and creditor rights (if any).	✓
Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada). Policies on vendor capacity building (if any).	✓
Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Information	
Bidang lingkungan hidup; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Environmental matters, including policies, types of programs, and costs incurred by Issuers and Public Companies.	✓
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Employment practices, occupational health and safety, including policies, types of programs, and costs incurred by the Issuer and Public Company.	✓
Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Social and community development, including policies, types of programs, and costs incurred by the Issuer and Public Company.	✓
Tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Product and/or service responsibility with supporting information, including policies, types of programs, and costs incurred by Issuers and Public Companies.	✓

✓ = ada; ✕ = tidak ada
✓ = yes; ✕ = no

- Jejaring Sosial Perusahaan
  Tidak dapat dipungkiri bahwa di era ini media komunikasi publik telah bergeser ke arah digitalisasi yang berbasis internet. Media Sosial merupakan media daring di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan berbagi informasi secara online. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, PTPP telah menyediakan akses informasi dan komunikasi melalui Media Sosial, yaitu:

- The Company's Social Network
  It is undeniable that in this era, public communication media has shifted towards internet-based digitalization. Social media is an online platform where users can easily participate and share information online. To keep up with these developments, PTPP has provided access to information and communication through social media, namely:



Kanal Media Sosial yang dimiliki oleh PTPP telah dikelola dan diperbaharui secara rutin oleh tim Sekretaris Perusahaan yang memuat tentang berbagai informasi atas kegiatan atau aktivitas terkini yang dilakukan oleh Perusahaan.

The Corporate Secretary team regularly manages and updates the Social Media channels owned by PTPP regularly, and they contain various information on the latest activities or activities carried out by the Company.

- Laporan Tahunan
  PTPP mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui website Perusahaan dengan alamat www.ptpp.co.id maupun dalam bentuk cetak.

  Adapun jenis laporan yang dipublikasikan oleh PTPP secara reguler setiap tahunnya meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Tahunan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keterbukaan Informasi, dan lainnya.

- Annual Report
  PTPP discloses financial information, essential information and other matters concerning the Company in the Annual Report and Financial Statements. These reports can be accessed through the Company's website at www.ptpp.co.id or in print.

  The types of reports published by PTPP regularly every year include Annual Financial Statements, Interim Financial Statements, Annual Reports, Corporate Governance Implementation Reports, Sustainability Reports, Disclosure of Information Reports, and others.

- Hubungan Investor
  Sekretaris Perusahaan juga menangani Hubungan Investor dalam rangka menjaga dan meningkatkan komunikasi antara PTPP dengan para investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Fungsi dari Hubungan Investor antara lain untuk memberikan informasi terkini terkait kinerja keuangan dan prospek Perusahaan kepada para Pemegang Saham dan investor secara umum.

  Penyebarluasan informasi dilakukan secara langsung dan aktif kepada investor maupun kepada para analis pasar modal melalui penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan (*small group* atau *one-on-one meeting*), *conference call*, pengungkapan informasi dan publikasi *Company Update* di *website* Perusahaan setiap bulannya.

  Selama tahun 2025, Hubungan Investor PTPP telah melakukan kegiatan berbagai sebagai berikut:

- Investor Relations
  The Corporate Secretary also handles Investor Relations to maintain and improve communication between PTPP and investors at the local and international levels. Investor Relations function, among other things, is to provide Shareholders and investors with the latest information related to the Company's financial performance and prospects.

  Information is disseminated directly and actively to investors and capital market analysts through activity implementation or periodic activities. These activities are carried out through formal meetings in groups or individually (small group or one-on-one meetings), conference calls, information disclosure and publication of Company Updates on the Company's website every month.

  Throughout 2025, PTPP Investor Relations has carried out several activities as follows:

Kegiatan Hubungan Investor Tahun 2025
Investor Relations Activities in 2025

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Jumlah Total
1	*One-on-One Meeting/Small Group Meeting*	43
2	Konferensi Conference	6
3	*Investor Gathering*	-
4	*Analyst Meeting*	-
5	Kunjungan Proyek Project Visit	3
Jumlah **Total**		**52**

- Hubungan Media
  Sebagai Perusahaan publik, PTPP harus menjalin hubungan yang baik dengan institusi media massa baik cetak, portal, maupun elektronik (televisi, radio, dan sebagainya) untuk meraih pencapaian publikasi Perusahaan yang maksimal dan berimbang serta citra positif dari para investor maupun publik terkait gambaran atau kondisi Perusahaan saat ini. Untuk mendapatkan citra positif melalui media tersebut, PTPP senantiasa melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan media massa.

- Media Relations
  As a public company, PTPP must establish good relationships with mass media institutions, be it in print, through portals, or electronically (television, radio, and others), to achieve the optimal and balanced Company publications and a positive image from investors and the public regarding the Company's current situation or condition. To get a positive image through the media, PTPP always carries out several activities related to the mass media.

Kegiatan Hubungan Media Tahun 2025
Media Relations Activities in 2025

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Jumlah Total
1	Siaran Pers Press Release	94
2	Konferensi Pers Press Conference	3
3	*Media Gathering*	2
4	Kunjungan Media Media Visit	4
5	Iklan di Media Massa Advertisements in Mass Media	2
6	*Public Expose* Tahunan Annual Public Expose	1
7	Media *Interview* atau *Live Interview* di Media Massa Media Interview or Live Interview in Mass Media	59
Jumlah **Total**		**165**

- *Public Expose*
  Sebagai Perusahaan Terbuka, Perusahaan wajib melakukan *Public Expose* Tahunan atau paparan publik kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses usaha Perusahaan. Paparan publik dilakukan

- Public Expose
  As a Public Company, the Company must conduct an Annual Public Expose to Shareholders, stakeholders, and the general public on the Company's operations and business processes. Public expose is done by presenting to Shareholders, stakeholders, and invited

melalui metode presentasi kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang diundang. Perusahaan memandang paparan publik yang dilakukan akan membantu Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas dan menjangkau khalayak lebih banyak.

parties. The Company considers that the public expose will enable the Company to convey information more widely and reach a larger audience.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan *Public Expose Live* Tahunan (Pubex Live) PTPP Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 dimulai Pukul 14.00-15.00 WIB, yang dilaksanakan secara *online* dan diikuti oleh para Pemegang Saham dan rekan-rekan Media. Acara ini dimoderatori oleh Joko Raharjo selaku Sekretaris Perusahaan dan dihadiri oleh Direksi PTPP beserta jajaran manajemen PTPP lainnya.

In 2025, the Annual Public Expose Live (Pubex Live) of PT PP (Persero) Tbk 2025 was held on Wednesday, September 17, 2025, from 14.00 to 15.00 WIB, which was held online and attended by Shareholders and Media colleagues. The event was moderated by Joko Raharjo as the Corporate Secretary and attended by PTPP's Board of Directors and other members of PTPP's management team.



- Komunikasi dengan Regulator
  Sebagai Perusahaan publik, Perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan laporan periodik dan keterbukaan informasi ke OJK.

  Selama tahun 2025, Perusahaan telah menyampaikan korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Pelaporan Online SPE-IDXNet sebanyak 161 kali, yaitu 41 Pelaporan Rutin dan 120 Pelaporan Non Rutin.

- Communication with Regulators
  As a public company, the Company must submit periodic reports and disclosures of information to OJK.

  Throughout 2025, the Company has submitted 161 correspondences to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange via SPE-IDXNet Reporting, namely 41 Routine Reporting and 120 Non-Routine Reporting.

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Internal

Komunikasi internal di Perusahaan dikelola oleh beberapa unit kerja Perusahaan yang bekerja sama membentuk tim khusus redaksi untuk mengorganisir kegiatan dalam bentuk media cetak dan media elektronik.

Information Governance and Access to Company Data for Internal Parties

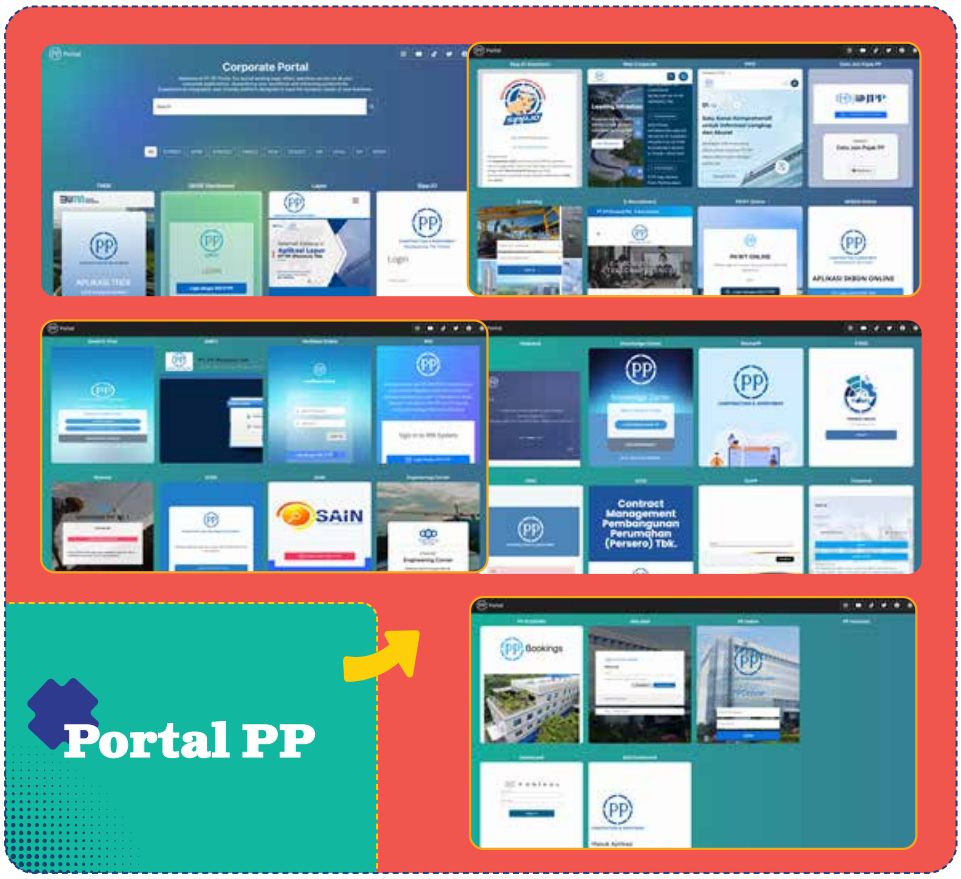
Internal communication in the Company is managed by several work units that collaborate to form a special editorial team to organize activities in print and electronic media.

Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal antara lain:

- Portal PP
  Untuk komunikasi internal, PTPP memiliki jaringan intranet Portal PP yang dapat diakses oleh pegawai melalui www.portal.ptpp.co.id yang memadai sehingga dapat berkomunikasi secara lebih aktif. Intranet Portal PP yang berisi informasi tentang 34 aplikasi yang dapat diakses secara langsung oleh pegawai Perusahaan, antara lain: *TNDE, QHSE Dashboard, Lapor, SippJO, SippJO Akuntansi, Web Corporate, PPID, Data Join Pajak, E-Learning, E-Recruitment, PKWT Online, SKBDN Online, Smart E-Proc, SMKV, Verifikasi Online, Integrated Risk Management (IRM), Manrisk PP 22.1, Integrated Case Management System (ICMS), Sistem Audit Internal PP (SAIN), Engineering Corner, Helpdesk, Knowledge Center, MantaPP, P3MS, Customer Relationship Management (CRM), Claim & Contract Management (CCM), SiaPP, Frontend, PP Booking, Webmail, PP Online, PP Investasi, Dashboard dan BIM Dashboard.*

The forms of internal communication activities include:

- PP Portal
  For internal communication, PTPP has an appropriate PP Portal intranet network that employees can access through www.portal.ptpp.co.id to communicate more actively. The PP Portal intranet contains information on 34 apps that can be accessed directly by Company employees, including TNDE, QHSE Dashboard, Lapor, SippJO, SippJO Akuntansi, Web Corporate, PPID, Data Join Pajak, E-Learning, E-Recruitment, PKWT Online, SKBDN Online, Smart E-Proc, SMKV, Verifikasi Online, Integrated Risk Management (IRM), Manrisk PP 22.1, Integrated Case Management System (ICMS), Sistem Audit Internal PP (SAIN), Engineering Corner, Helpdesk, Knowledge Center, MantaPP, P3MS, Customer Relationship Management (CRM), Claim & Contract Management (CCM), SiaPP, Frontend, PP Booking, Webmail, PP Online, PP Investasi, Dashboard and BIM Dashboard.

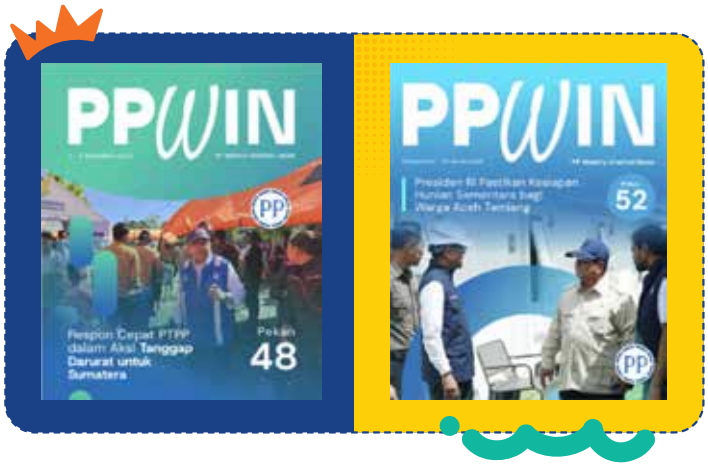


- Majalah Internal
  Majalah internal merupakan salah satu media komunikasi internal yang dimiliki oleh PTPP sebagai sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan di Perusahaan, termasuk di

- Internal Magazine
  Internal magazine is one of the internal communication media owned by PTPP as a means of communication to disseminate information about activities in the Company, including management programs and

antaranya program dan kebijakan manajemen. PTPP memiliki majalah internal yang disebut dengan PP WIN. Pegawai juga dapat menyumbangkan saran dan opini yang membangun dengan mengirimkan artikel kepada redaksi. Majalah internal PTPP dikelola oleh Biro Sekretaris Perusahaan. Selama tahun 2025, majalah tersebut telah terbit sebanyak 53 kali.

policies. PTPP has an internal magazine called PP WIN. Employees can also contribute constructive suggestions and opinions by sending articles to the editor. PTPP's internal magazine is managed by the Corporate Secretary Bureau. In 2025, the magazine has been published 53 times.



- CEO *Talk*
  Untuk membangun iklim komunikasi yang baik antara manajemen dengan pegawai, sejumlah kegiatan tatap muka antara manajemen dengan pegawai diakomodasi melalui kegiatan rutin tahunan berupa CEO Talk. Di mana CEO atau Direktur Utama PTPP memberikan paparan mengenai kinerja Perusahaan tahun sebelumnya dan rencana kinerja tahun berjalan untuk memberikan informasi kepada pegawai mengenai arah yang sedang dituju Perusahaan, serta penyampaian isu-isu yang sedang menjadi *concern* Perusahaan.

- CEO Talk
  Aiming to build a good communication atmosphere between management and employees, several face-to-face activities between management and employees are accommodated through annual routine activities in the form of CEO Talk, where PTPP's CEO or President Director provides insight on the Company's performance in the previous year and the current year's performance plan to inform employees about the direction of the Company, as well as the delivery of issues that are of concern to the Company.

Kegiatan CEO *Talk* Tahun 2025
CEO Talk in 2025

No.	Tema Theme	Tempat dan Tanggal Venue and Date	Peserta Participants
1	BODxLeaders: CEO TALK Vol. 1 2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	Direktur, Senior Vice President, Direktur Anak Perusahaan dan Afiliasi, General Manager, Senior Manager, Project Manager dengan total peserta yang hadir sebanyak 194 orang Directors, Senior Vice Presidents, Directors of Subsidiaries and Affiliates, General Managers, Senior Managers, Project Managers with a total of 194 participants in attendance
2	BODxLeaders: CEO TALK Vol. 2 2025	22 Desember 2025 December 22, 2025	Direktur, Senior Vice President, Direktur Anak Perusahaan dan Afiliasi, General Manager, Senior Manager, Project Manager dengan total peserta yang hadir sebanyak 209 orang Directors, Senior Vice Presidents, Directors of Subsidiaries and Affiliates, General Managers, Senior Managers, Project Managers with a total of 209 participants in attendance



Ragam Media Perusahaan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Corporate Media Varieties for Shareholders and Stakeholders

The following table illustrates the variety of communication media the Company uses to convey data and information related to its operational activities, business processes, and performance achievements.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Forms of Media
Regulator Regulator	• Penghargaan | Awards • Laporan Keterbukaan Informasi | Information Disclosure Reports
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
Investor Investor	• *Analyst Meeting* • *One-on-One Meeting* • *Investor Gathering* • *Conference Call*
Lembaga Publik Public Institutions	Penghargaan Awards
Konsumen Consumers	*Exhibition*
Pegawai Employees	*Management Review* *CEO Talks*
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	*Benchmarking*
Mitra Kerja dan Rekanan Partners	*Vendor Gathering*
Organisasi Profesi Professional Organization	Seminar *Workshop*
Masyarakat/Umum Community/Public	*Public Expose*
Media Massa Mass Media	• *Media Gathering* • *Press Conference* • *Media Visit* • *Press Release*

* Situs web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.
The Company's website is not included in the above media varieties, as it is open, unrestricted, and accessible to anyone.

Audit Internal/Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Satuan Pengawasan Internal (SPI) dibentuk bertujuan untuk membantu Direktur Utama dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan, kajian, serta usulan perbaikan untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. SPI bertindak secara independen sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjadi mitra manajemen dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik, pengelolaan risiko serta penerapan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan.

Piagam Audit Internal: Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal

Dilandasi atas kebutuhan adanya pedoman yang mengatur jalannya tugas, tanggung jawab dan wewenang Satuan Pengawasan Internal, Perusahaan telah menyusun Piagam Satuan Pengawasan Internal. Pada tahun 2025, manajemen mereviu dan menyempurnakan Charter Satuan Pengawasan Internal 2025, disesuaikan dengan keadaan Perusahaan. Piagam Satuan Pengawasan Internal Perusahaan tahun 2025 ditandatangani 28 Maret 2025.

Adapun isi dari Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) PTPP adalah sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan;
2. Pendahuluan;
3. Definisi;
4. Visi, Misi dan Tujuan;
5. Struktur Organisasi;
6. Persyaratan Profesional;
7. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
8. *Quality Assurance and Improvement Program*;
9. Pelaporan.
10. SPI Integrasi.

Piagam Internal Audit direview secara periodik agar pelaksanaan audit internal senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas pertimbangan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, bilamana Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Internal Audit/Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) was established to assist the President Director in evaluating the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes by conducting examinations, studies, and proposals for improvements to secure the Company's investments and assets. SPI acts independently as a work unit directly responsible to the President Director and becomes a management partner in achieving good corporate governance, risk management, and internal control within the Company.

Internal Audit Charter: Work Guidelines for the Internal Audit Unit

Based on the need for guidelines governing the duties, responsibilities, and authority of the Internal Audit Unit, the Company has prepared an Internal Audit Charter. In 2025, management reviewed and refined the 2025 Internal Audit Charter to suit the Company's circumstances. The Company's Internal Audit Charter for 2025 was signed on March 28, 2025.

The contents of the PTPP Internal Supervisory Unit Charter are as follows:

1. Memorandum of Agreement;
2. Introduction;
3. Definition
4. Vision, Mission, and Objectives;
5. Organizational Structure;
6. Professional Requirements;
7. Duties, Responsibilities, and Authorities;
8. Quality Assurance and Improvement Program;
9. Reporting.
10. Integrated Internal Audit Unit (IAU).

The Internal Audit Charter is reviewed periodically so that the implementation of internal audit is always at an optimal level.

Parties Appointing and Dismissing the Head of the Internal Audit Unit

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the consideration of the Board of Commissioners. In its implementation, the President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor and/or fails or is incapable of carrying out their duties and responsibilities.

Any appointment, replacement or dismissal of the Head of SPI shall be notified to OJK and the Indonesia Stock Exchange.

Pengangkatan dan Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Penetapan Kepala SPI sesuai dengan Keputusan Direksi No. 037/SK/PP/DIR/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pengangkatan Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau, yang mengangkat Muhammad Zahid sebagai Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau. Pengangkatan Kepala SPI telah dipublikasikan di situs web Perusahaan www.ptpp.co.id tanggal 22 September 2025 dan dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 September 2025.

Appointment and Profile of the Head of the Internal Audit Unit

The appointment of the Head of SPI is based on the Board of Directors Decree No. 037/SK/PP/DIR/2025 dated September 22, 2025, on the Appointment of Senior Vice President, Head of the Internal Audit Bureau, which appointed Muhammad Zahid as the Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau. The appointment of the Head of SPI has been published on the Company's website, www.ptpp.co.id, September 22, 2025, and reported to OJK and the Indonesia Stock Exchange on September 22, 2025.



Muhammad Zahid

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Audit Unit

Periode Jabatan
Term of Office

Menjabat sejak 22 September 2025
In Office since September 22, 2025

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Gresik, 15 Mei 1970 Born in Gresik, May 15, 1970	Usia 55 tahun 55 years old	Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Bergabung di PTPP	**Joined PTPP**
16 Juni 1991 sebagai SAM Keuangan – Cabang 2 PTPP	June 16, 1991, as Finance SAM – PTPP Branch 2
Pendidikan	**Formal Education**
Sarjana (S1) Akuntansi, Universitas Dr. Soetomo (2002)	Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Dr. Soetomo (2002)
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
• Asisten Keuangan (ASKU) PTPP Cabang IV (2007-2014) • Asisten Keuangan (ASKU) PTPP Cabang III (2014-2016) • Asisten Keuangan (ASKU) PTPP Cabang IV (2016-2017) • SM Finance & Human Capital PTPP Div. Infra 2 (2017-2021) • SVP Finance & Accounting PTPP (2021-2025)	• Financial Assistant (ASKU) at PTPP Branch IV (2007–2014) • Financial Assistant (ASKU) at PTPP Branch III (2014–2016) • Financial Assistant (ASKU) at PTPP Branch IV (2016–2017) • SM Finance & Human Capital, PTPP Infrastructure Division 2 (2017–2021) • Senior Vice President of Finance & Accounting at PTPP (2021–2025)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Chartered Accountant, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) - 2024	Chartered Accountant, Indonesian Institute of Accountants (IAI) - 2024
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Internal Auditor Komite ESG (2024-sekarang). **Di luar Perusahaan:** Tidak Ada.	**Within the Company:** Internal Auditor, ESG Committee (2024–present). **Outside the Company:** None.

Pertanggungjawaban

Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara fungsional SPI berkoordinasi dengan Komite Audit. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.

Accountability

The Head of SPI is directly responsible to the President Director. In carrying out its supervisory function, SPI functionally coordinates with the Audit Committee. To support independence and ensure the smooth running of the audit and the authority to monitor follow-up on audit results, the Head of SPI can communicate directly with the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee to inform diverse matters related to the audit. The provision of such information must be reported to the President Director.

Keorganisasiaan Satuan Pengawasan Internal

SPI berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama, dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Secara organisasi, kedudukan Internal Audit memiliki garis koordinasi dengan Komite Audit. Dalam pelaksanaannya, SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pertimbangan Dewan Komisaris. Sementara itu, Auditor Internal yang bertugas di dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi SPI, berikut disampaikan kedudukan dan struktur organisasi SPI per 31 Desember 2025.

Organization of the Internal Audit Unit

SPI is positioned under and directly responsible to the President Director. It is led by a Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Organizationally, the position of Internal Audit Unit has a coordination line with the Audit Committee. In its implementation, SPI is led by a Head of SPI who is directly responsible to the President Director at the discretion of the Board of Commissioners. Meanwhile, Internal Auditors who work at SPI are directly accountable to the Head of SPI.

To illustrate the scope of SPI's functions, the following is the position and organizational structure of SPI as of December 31, 2025.



Struktur organisasi Internal Audit ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 044/SK/PP/DIR/2024. Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Unit Internal Audit sebanyak 19 orang.

The organizational structure of Internal Audit is determined per the Board of Directors Decree No. 044/SK/PP/DIR/2024. Until the end of 2025, the number of employees who are members of the Internal Audit Unit is 19 personnel.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (personnel)
Kepala SPI Head of SPI	1
System Auditor Coord.	1
Financial Auditor Coord.	1
Operasional Auditor Coord.	1
Investment Auditor Coord.	1
Financial Auditor	3
Operational Auditor	3
System Auditor	3
Investment Auditor	3
GCG Auditor	1
Sekretaris SPI Secretary of SPI	1
Jumlah **Total**	**19**

Kualifikasi Pegawai Satuan Pengawasan Internal

Auditor SPI PTPP harus memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif, memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, serta sesuai *job requirement* yang telah ditetapkan Perusahaan, antara lain:

1. Kepala Satuan Pengawasan Internal berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang Bisnis, Akuntansi, Keuangan, audit, manajemen risiko, atau kegiatan usaha korporasi, memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S1) baik jurusan teknik ataupun non-teknik, mempunyai pengalaman minimal sebagai Kepala Departemen Bidang Keuangan atau Bidang Operasional, Kepala Divisi Bidang Keuangan ataupun Bidang Operasional;
2. Financial Auditor Coordinator, Operational Auditor Coordinator, System Auditor Coordinator dan Investment Auditor Coordinator memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S1) baik jurusan teknik ataupun non teknik, mempunyai pengalaman minimal sebagai Proyek Manager, atau Kepala Departemen Bidang Operasional, maupun Kepala Departemen Bidang Keuangan;
3. Auditor Internal bidang operasional memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan teknik atau mempunyai pengalaman di bidang pengendalian operasi minimal setingkat Site Engineering Manager;
4. Auditor Internal bidang keuangan memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan Akuntansi/ Manajemen atau mempunyai pengalaman di bidang Akuntansi atau Keuangan minimal setingkat Site Administrasi Manager;

Qualifications of Internal Audit Unit Employees

Internal Audit (SPI) auditors of PTPP must possess integrity and professional conduct, and be independent, honest, and objective. They must also have adequate competence and experience in carrying out their duties, and meet the job requirements established by the Company, including:

1. The Head of the Internal Audit Unit has a background or experience in Business, Accounting, Finance, auditing, risk management, or corporate business activities, holding a minimum of a Bachelor's degree (S1) in either engineering or non-engineering, and having a minimum of experience as Head of the Finance Department or Operations Department, or Head of the Finance Division or Operations Division;
2. Operational Auditor Coordinator, Financial Auditor Coordinator, System Auditor Coordinator, and Investment Auditor Coordinator have a minimum education level of Bachelor's Degree in either engineering or non engineering, have minimum experience as Project Manager, Head of Operations Department, or Head of Finance Department;
3. The Internal Auditor in the field of operations has a minimum education level of Bachelor's Degree in engineering or has experience in the field of operation control at least at the level of Site Engineering Manager;
4. The Internal Auditor in the field of finance has a minimum education of Bachelor's Degree in Accounting/Management or has experience in the field of Accounting or Finance at least at the level of Site Administration Manager;

5. Auditor Internal bidang Sistem memiliki Pendidikan minimal memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan teknik atau non teknik atau mempunyai pengalaman minimal setingkat Site Administrasi Manager atau Site Engineering Manager;
6. Auditor Internal bidang GCG memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan non teknik atau mempunyai pengalaman minimal setingkat Site Administrasi Manager;
7. Auditor Internal bidang Investasi memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan teknik atau non teknik, mempunyai pengalaman di bidang investasi dan mengikuti pelatihan/ pendidikan bisnis manajemen;
8. Memiliki pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
9. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
10. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
11. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko;
12. Kepala SPI dan Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
13. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesi (Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal) dan kode etik Audit Intern serta kebijakan dan peraturan Perusahaan;
14. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
15. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Auditor Internal tidak diperkenankan melakukan audit di Unit yang pernah dikelolanya/terlibat didalamnya dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun;
17. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;
18. Mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;
19. Kepala SPI dan Auditor Internal diwajibkan mengikuti paling sedikit 1 sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam 1 tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 tahun paling sedikit 3 sertifikasi dibidang audit, manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, Keuangan atau Akuntansi;

5. The Internal Auditor in the field of Systems has a minimum education of a Bachelor's Degree, in either engineering or non engineering or has a minimum experience as a Site Administration Manager or Site Engineering Manager;
6. The Internal Auditor in the field of GCG has a minimum education of a Bachelor's Degree in non engineering fields or has a minimum experience as a Site Administration Manager;
7. The Internal Auditor in the field of investment has a minimum education of Bachelor's Degree in either engineering or non engineering, experienced in investments, and attended business management education/training;
8. Knowledgeable in audit techniques and other disciplines relevant to their field of work;
9. Knowledgeable in the laws and regulations in capital markets and other related laws and regulations;
10. Capable of effectively interacting and communicating both orally and in writing;
11. Understand the principles of Good Corporate Governance (GCG) and risk management;
12. The Head of SPI and Internal Auditors are prohibited from concurrent duties and positions in the implementation of the Company and Subsidiaries' operations;
13. Ensure that internal audit functions are performed in accordance with professional standards (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) and the Internal Audit Code of Conduct, as well as the Company's policies and regulations;
14. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of Internal Audit duties and responsibilities, unless permitted by provisions of law and/or court verdict;
15. Maintaining confidential information obtained during their term of office under statutory regulations;
16. Internal Auditors are not permitted to conduct audits in Units that they have managed or been involved in for a minimum period of two years; and
17. Willing to continuously improve their knowledge, expertise, and professional competence;
18. Participate in continuing professional development and other training in line with the evolving complexity and business activities of the Company;
19. The Head of SPI and Internal Auditors are required to obtain at least one certification within one year of assuming their position and, if their term of office exceeds one year, at least three certifications in the fields of audit, risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, or accounting;

20. Auditor Internal wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik audit, manajemen risiko, *fraud*, Bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, Keuangan atau Akuntansi. Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan secara akumulatif paling sedikit 40 jam untuk kepala SPI dan 20 Jam untuk Auditor Internal.

20. Internal auditors are required to attend at least one training session on the topics of auditing, risk management, fraud, business, corporate operations, law, compliance, finance, or accounting. Within a single year, they must accumulate a minimum of 40 hours of training for the Head of the Internal Audit Department and 20 hours for internal auditors.

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Internal

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki pegawai SPI hingga akhir tahun 2025.

Professional Certification of the Internal Audit Unit

Professional certification is essential for auditors to understand audit developments, especially related to regulatory compliance and industry developments. Below are professional certifications held by SPI personnel until the end of 2025.

Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Types of Internal Audit Professional Certification	Bidang Sertifikasi Certification Field	Lembaga Penerbit Sertifikasi Certification Issuing Agency	Jumlah Personil SPI yang Memiliki Number of Certified SPI Employees
Certified Practitioner of Internal Audit	Audit	Lembaga Sertifikasi Profesi - Yayasan Pendidikan Internal Audit (LSP-YPIA) Professional Certification Institute - Internal Audit Education Foundation (LSP-YPIA)	5
Associate Certified Competent Internal Audit (ACCIA)	Audit	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal (LSPAI) Internal Auditor Professional Certification Institute (LSPAI)	3
Chartered Accountant (CA)	Akuntansi Accounting	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	2
Register Negara Akuntan (RNA)	Akuntansi Accounting	Kementrian Keuangan Republik Indonesia Finance Ministry of the Republic of Indonesia	2
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	Audit	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Development Finance Comptroller (BPKP)	1
Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Lembaga Sertifikasi Profesi - Yayasan Pendidikan Internal Audit (LSP-YPIA) Professional Certification Institute - Internal Audit Education Foundation (LSP-YPIA)	1
Professional Internal Audit (PIA)	Audit	Praktisi Auditor Internal Bersertifikat kompetensi (PAI-BK) Competence Certified Internal Auditor Practitioners (PAI-BK)	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	Audit	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)	1
Certified Public Accountant (CPA)	Akuntansi Accounting	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	Manajemen Risiko Risk Management	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)	1

Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Types of Internal Audit Professional Certification	Bidang Sertifikasi Certification Field	Lembaga Penerbit Sertifikasi Certification Issuing Agency	Jumlah Personil SPI yang Memiliki Number of Certified SPI Employees
Certified Risk Management Officer (CRMO)	Manajemen Risiko Risk Management	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)	1
Financial Risk Analyst For Corporation (FRAC)	Manajemen Risiko Risk Management	International Financial Modeling Institute (IFMI)	1
Ahli Utama Bidang Keahlian Manjemen Konstruksi Senior Expert in Construction Management	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Profession Certification Agency (BNSP)	1
Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung Senior Expert in Building Engineering	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Profession Certification Agency (BNSP)	1
Green Professional	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities	Green Building Council Indonesia (GBCI)	1
Insinyur Profesional Madya (IPM)	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Indonesian Engineers Association (PII)	1

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi pegawai SPI, baik bagi pegawai yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The Company is committed to increasing the level of professional certification for SPI employees, both those who already have it and those who do not.

Tugas dan Tanggung Jawab

SPI memegang peranan sebagai *third line model* yang memastikan pengendalian internal di setiap line pada lingkungan Perusahaan semakin kuat dan efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam melaksanakan pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikan.

Pemeriksaan internal dilakukan secara berkala sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atau Program Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan.

Secara umum tugas dan tanggung jawab SPI PTPP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit Intern secara periodik;

Duties and Responsibilities

The Internal Audit Unit (SPI) plays a role as the third line of defense, ensuring that internal controls across each line within the Company's environment are strengthened and operate effectively to safeguard the Company's investments and assets. SPI assists the President Director in carrying out his responsibilities, particularly in conducting internal audits in the Company's operational and financial areas, assessing the effectiveness of control, management, and implementation within the Company, and providing recommendations for improvement.

Internal audits are conducted periodically in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT) or the Company's Annual Work Plan and Budget.

In general, the duties and responsibilities of the SPI of PT PP (Persero) Tbk are as follows:

1. Conduct periodic preparation and review of the Internal Audit charter;

2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan/ PKPT yang berbasis risiko termasuk alokasi anggaran biaya yang berkaitan dengan audit dan non audit serta memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana. Dalam penyusunan PKPT, Kepala SPI meminta arahan Direktur Utama dan mempertimbangkan arahan-arahan Dewan komisaris dan Komite Audit;
3. Kepala SPI meminta persetujuan PKPT kepada Direktur Utama;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 3E (ekonomis efisiensi, dan efektivitas) di bidang Keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan PKPT. Melaksanakan evaluasi atas sistem, prosedur, *Work Instruction* (WI), serta kebijakan operasi Perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan;
5. Melaksanakan pemeriksaan dalam lingkup audit operasional, keuangan, *compliance*, kinerja dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (investigasi atas permintaan Direktur Utama);
6. Melakukan evaluasi dan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Direktur Utama/semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut (ringkasan eksekutif dan/atau laporan hasil audit) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; dan memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (rekomendasi) perbaikan yang telah disarankan;
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris atau Komite Audit;
12. Bekerja sama dengan Komite Audit. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan berdasarkan undangan dari Komite;
13. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan;
14. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;

2. Prepare and implement a risk-based annual audit plan/ PKPT, including budget allocation of audit and non-audit related costs, and ensure that the implementation of internal audit is in line with the plan. In preparing the PKPT, the Head of SPI requests the direction of the President Director and considers the directives of the Board of Commissioners and the Audit Committee;
3. The Head of SPI requests approval of the PKPT to the President Director;
4. Conduct inspection and assessment of the 3Es (economic, efficiency, and effectiveness) in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities based on the PKPT. Evaluate systems, procedures, Work Instruction (WI), and Company operating policies on an ongoing basis;
5. Conduct examinations within the scope of operational, financial, compliance, and performance audits, as well as special examinations when necessary (investigations at the request of the President Director);
6. Evaluate the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and regulations and Company policies;
7. Provide recommendations for improvement and objective information regarding the activities under review to the President Director and all levels of management;
8. Prepare audit reports and submit them (executive summary and/or audit report) to the President Director and the Board of Commissioners;
9. Reporting significant findings to the President Director and the Board of Commissioners to ensure prompt corrective action is taken; and monitoring the implementation of corrective actions regarding significant findings;
10. Monitor, analyze, and report on the implementation of recommended corrective actions;
11. Reporting the results of monitoring follow-up corrective actions on significant findings to the President Director and the Board of Commissioners or the Audit Committee;
12. Collaborate with the Audit Committee. Coordination is carried out at the Committee's invitation;
13. Providing objective opinions, input, and recommendations, as well as consulting services, to Management and other business units regarding supervisory functions;
14. Providing consultation and assurance regarding strategic matters, both during planning and during the implementation of operational activities;

15. Melaksanakan monitoring rekomendasi audit eksternal baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) atau assessor eksternal lain yang menjadi tanggung jawab SPI;
16. Melakukan internalisasi dan sosialisasi dalam upaya membangun sistem pencegahan anti korupsi di dalam lingkungan Perusahaan, melalui implementasi pencegahan korupsi yang sistematis sesuai SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP; dan
17. Penjabaran atas tahapan pelaksanaan audit internal disampaikan dalam suatu Prosedur/Work Instruction.

Wewenang

SPI atas persetujuan Direktur Utama, mempunyai wewenang:

1. Menyusun, merevisi dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan audit internal (program audit) termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
2. Melakukan pemeriksaan dan meminta data/fakta-fakta pendukung dari lapangan terhadap objek yang telah ditetapkan. Auditee wajib menyampaikan data yang diminta Auditor;
3. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan/objek yang diperiksa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4. Melakukan klarifikasi dan wawancara dengan pejabat/petugas terkait;
5. Melakukan koordinasi dan pendampingan kegiatan dengan auditor eksternal;
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit;
7. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
8. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
9. Melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan serta dapat berkoordinasi dengan fungsi pengawasan internal lainnya pada Anak Perusahaan yang bersangkutan, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku;
10. Dalam hal kompetensi maupun jumlah auditor internal tidak mencukupi untuk melakukan tugas audit sesuai prioritas risiko yang ada; Kepala SPI berwenang untuk mengajukan tambahan tenaga auditor atau tenaga ahli secara *outsourcing/co-sourcing* (Penggunaan jasa pihak eksternal) kepada Direktur Utama.
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern:
    a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;

15. Monitoring the implementation of external audit recommendations from the Supreme Audit Agency (BPK), the Development Finance Comptroller (BPKP), Public Accounting Firms (KAP), or other external assessors under the SPI's responsibility;
16. Conducting internalization and socialization efforts to establish an anti-corruption prevention system within the Company, through the systematic implementation of anti-corruption measures in accordance with SNI ISO 37001:2016 on SMAP; and
17. The details of the internal audit implementation stages are outlined in a Procedure/Work Instruction.

Authorities

SPI, with the approval of the President Director, has the authority to:

1. Prepare, revise and implement internal audit implementation policies (audit programs), including, among others, determining the procedures and scope of audit work;
2. Conduct audits and request supporting data/facts from the site on predetermined objects. Auditees are required to submit data requested by the Auditor;
3. Access all relevant information about the Company/audited object related to the implementation of its duties and functions;
4. Clarify and interview relevant officials/officers;
5. Coordinate and assist activities with external auditors;
6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
7. Organize regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
8. Participate in strategic meetings;
9. Conduct internal supervision over all areas, operational and business activities of the Company and may coordinate with other internal supervisory functions at the relevant Subsidiary, which in its implementation is in line with the provisions of applicable laws and regulations as well as governance;
10. If the competence or number of internal auditors is insufficient to perform audit tasks according to the existing risk priorities, the Head of SPI is authorized to propose additional auditors or experts (The use of external services) to the President Director on an outsourcing/co-sourcing basis.
11. Ensuring that, in cases where external parties' services are utilized for internal oversight activities:
    a. Knowledge transfer takes place between the external party and SPI members, given that the use of external experts is temporary;

b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI;
c. Pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern Perusahaan.

Kode Etik Auditor

Untuk menerapkan budaya Etik dalam profesi Internal Audit, Auditor SPI PTPP mengacu pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal atau Kode Etik Audit Internal yang berlaku secara Internasional, yang meliputi prinsip-prinsip perilaku dan aturan perilaku yang mengatur integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi:

1. Integritas
   Auditor internal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat pendapat (*judgment*) yang handal dengan melakukan:
   a. Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab;
   b. Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi;
   c. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Intern atau Perusahaan; dan
   d. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan telah sesuai dengan hukum.
2. Obyektivitas
   Auditor internal menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern melakukan penilaian secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (*judgment*) dengan melakukan:
   a. Tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Intern dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional; dan
   c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diaudit.
3. Kerahasiaan
   Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut dengan melakukan:

b. The use of external parties does not affect the independence and objectivity of the SPI's functions;
c. The external party complies with the Company's Internal Audit Charter.

Auditor Code of Conduct

To implement a culture of Ethics in the Internal Audit profession, the SPI Auditors of PTPP refer to the Code of Conduct established by the Internal Audit Association or the Internationally applicable Internal Audit Code of Conduct, which includes principles of behavior and rules of conduct governing integrity, objectivity, confidentiality, and competence:

1. Integrity
   Internal auditors have integrity by building trust, which is the basis for making reliable opinions (judgments) by:
   a. Working honestly, diligently and responsibly;
   b. Complying with the law and disclosing information as regulated by law and profession;
   c. Not engaging in unlawful activities or any activities that dishonor the Internal Auditor profession or the Company; and
   d. Paying respect to and participating in achieving ethical and legally compliant company goals.
2. Objectivity
   Internal auditors demonstrate high objectivity according to standards in collecting, evaluating, and communicating information about the activity or process being audited. Internal auditors make a balanced assessment by taking into account all relevant circumstances. They are not influenced by personal interests or others in making an opinion (judgment) by:
   a. Not being involved in the company's operational activities that can reduce or be considered to reduce the objectivity of the Internal Auditor in conducting assessments, including in activities or relationships that can lead to conflicts of interest;
   b. Not accepting anything that could weaken or be perceived as weakening professional judgment;
   c. Disclosing all material facts known, which, if not disclosed, could distort reporting on the audited activity.
3. Confidentiality
   Internal auditors respect the value and ownership of the information received and do not disclose the information without authorization from the authorities unless there is a legal or professional obligation to disclose the information by:

a. Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat melaksanakan tugas; dan
b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran perusahaan yang etis dan berlegitimasi.

4. Kompetensi
Auditor Intern menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit dengan melakukan:
a. Hanya terlibat dalam audit apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam audit tersebut;
b. Melaksanakan fungsi pengawasan Intern sesuai dengan standar praktik profesional internal audit; dan
c. Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

5. Perilaku Profesional
Auditor harus bertindak sesuai dengan standar profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga reputasi profesi.

a. Acting carefully in using and safeguarding information obtained while performing duties;
b. Not using information for personal gain or in any way that contravenes the law or interferes with the ethical and legitimate achievement of company objectives.

4. Competence
Internal Auditors use the necessary knowledge, skills, and experience in carrying out audit tasks by:
a. Only engaging in an audit if they have the knowledge, skills, and experience required for the audit;
b. Carrying out the Internal control function according to the standards of internal audit professional practice;
c. Continuously improve expertise, effectiveness, and quality of the services provided.

5. Professional Conduct
Auditors must act in accordance with professional standards, comply with applicable laws and regulations, and uphold the profession's reputation.

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan *Internal*

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi pegawai SPI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Internal Audit.

Competency Development for the Internal Audit Unit

The Company facilitates the implementation of development programs for SPI personnel to improve employee competence. These programs are expected to positively impact the Internal Audit's productivity and effectiveness.

No.	Nama Name	Jenis Pendidikan & Pelatihan Education & Training Type	Tema Theme	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
1	Yasser Fatahillah	*Public Training*	Seminar Membangun Ketahanan Teknologi Infromasi Melalui Audit IT dan Pengelolaan Risiko Seminar on Building Information Technology Resilience Through IT Audits and Risk Management	*Online*, 22 Januari 2025 Online, January 22, 2025	PAI - BK
2	Septia Mitha & Yulitaning Utami	*Public Training*	Workshop Internal Control Coso 2013 COSO 2013 Internal Control Workshop	*Online*, 6-7 Februari 2025 Online, February 2-7, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
3	Syari'i Gaus & Yasser Fatahillah	*Public Training*	Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology	*Online*, 3-7 Maret 2025 Online, March 2-7, 2025	PPA & K
4	Febrian Ariyanto	*In House Training*	Lesson Learned : Soil Investigation pada Quarry Wadas Proyek Bendungan Bener Paket 3 Lessons Learned: Soil Investigation at the Wadas Quarry for the Bener Dam Project Package 3	*Online*, 10 Maret 2025 Online, March 10, 2025	PP University
5	Dwi Widyastuti	*Public Training*	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	Jakarta, 29 April 2025 Jakarta, April 29, 2025	IIA Indonesia

No.	Nama Name	Jenis Pendidikan & Pelatihan Education & Training Type	Tema Theme	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
6	Gita Wibiksana	*Public Training*	Pelatihan Audit Operasional Operational Audit Training	Jakarta, 5-14 Mei 2025 Jakarta, May 5-14, 2025	PPA & K
7	Shinta Dwiyani	*Public Training*	Penerapan Akuntansi Instrumen Keuangan Sesuai PSAK 109 Application of Financial Instrument Accounting in Accordance with PSAK 109	*Online*, 26-28 Mei 2025 Online, May 26-28, 2025	IIA Indonesia
8	Emir Nuriza	*Public Training*	Tata Kelola Manajemen Proyek Untuk Pencegahan Fraud Project Management Governance for Fraud Prevention	*Online*, 25 Juli 2025 Online, July 25, 2025	IAMPI
9	Rima Noviyanty	*Public Training*	AI dalam perencanaan audit AI in Audit Planning	*Online*, 17 Oktober 2025 Online, October 17, 2025	FKSPI
10	Rima Noviyanty & Yulitaning Utami	*Public Training*	AI dalam Pelaksanaan Audit I - Analisa Data AI in Audit Implementation I – Data Analysis	*Online*, 24 Oktober 2025 Online, October 24, 2025	FKSPI
11	Irfan Nurudin Firdaus	*Public Training*	Penguatan Pengelolaan Risiko Kecurangan pada BUMN sebagai penggerak pembangunan nasional Strengthening Fraud Risk Management in SOEs as Drivers of National Development	*Online*, 19 November 2025 Online, October 19, 2025	YPIA
12	Septia Mitha & Arief Husein	*Public Training*	Certified Practitioner of Internal Audit	*Online*, 1-5 Desember 2025 Online, December 1-5, 2025	YPIA
13	Syari'i Gaus & Yasser Fatahillah	*Public Training*	Audit Kecurangan (Fraud Audit) + Asesmen CCIA Fraud Audit + CCIA Assessment	Online 1-5 Desember 2025 Online, December 1-5, 2025	PPA & K
14	M Triwidodo & Shinta Dwiyani	*Public Training*	Certified Practitioner of Internal Audit	*Online*, 8-12 Desember 2025 Online, December 8-12, 2025	YPIA
15	Haekal Reza, Mubari & Ronny Albar	*Public Training*	Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Auditor (QIA)	Jakarta, 8-13 Desember 2025 Jakarta, December 8-12, 2025	YPIA
16	Irfan Nurudin Firdaus	*Public Training*	QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA	Jakarta, 8-13 Desember 2025 Jakarta, December 8-12, 2025	YPIA
17	Gita Wibiksana	*Public Training*	Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology	*Online*, 15-22 Desember 2025 Online, December 15-22, 2025	PPA & K
18	Tahbis Gesta Rachma	*Public Training*	Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC)	Jakarta, 9-10 Desember 2025 Jakarta, December 9-10, 2025	PT Rajawali Konsulindo

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Internal Tahun 2025

Di tahun 2025, SPI melaksanakan program kerja pengawasan yang rencana dan realisasinya adalah:

- Audit

Brief Report on the Implementation of Duties of the Internal Audit Unit in 2025

In 2025, SPI implemented supervisory work programs of which the plans and realizations were:

- Audit

No	*Auditee*	Deskripsi Audit Audit Description	Rencana Plan	Realisasi Realization
1	Joint Audit Urbantown Karawang - PP Urban Joint Audit of Urbantown Karawang - PP Urban	Joint Audit dengan SPI PP Urban Joint Audit with SPI PP Urban	Q1	Q1
2	Kantor Divisi EPC & 5 Proyek Terpilih 5 Selected Projects & EPC Division Office	Audit Operasional Operational Audit	Q1	Q1
3	Lagoon Avenue Mall Bekasi (LAVEB)	Audit Operasional Operational Audit	Q1	Q1
4	Kantor Divisi Gedung & 10 Proyek Terpilih 10 Selected Projects & Building Division Office	Audit Operasional Operational Audit	Q2	Q2
5	Prime Park Hotel & Convention Lombok (PPHCL)	Audit Operasional Operational Audit	Q2	Q2
6	Menara Danareksa Jakarta Danareksa Tower Jakarta	Audit Investasi Investment Audit	Q2	Q2
7	PT Pekanbaru Permai Propertindo (PPP) - AP PPRO PT Pekanbaru Permai Propertindo (PPP) - PPRO (a Subsidiary)	Joint Audit dengan SPI PPRO Joint Audit with SPI PPRO	Q3	Q3
8	PT Karya Logistik Nusantara (KLN) - Afiliasi PT Karya Logistik Nusantara (KLN) - Affiliate	Joint Audit dengan SPI Nindya Karya Joint Audit with SPI Nindy	Q3	Q3
9	Biro Quality Healthy Safety Environment Quality, Health, Safety, and Environment Bureau	Audit Compliance Compliance Audit	Q3	Q3
10	Kantor Divisi Infrastruktur 2 & 4 Proyek terpilih 4 Selected Project & Infrastructure Division 2 Office	Audit Operasional Operational Audit	Q4	Q4
11	PT PP Krakatau Tirta (PPKT)	Joint Audit dengan SPI PP Infra Joint Audit with SPI PP Infra	Q4	Q4
12	Kantor Divisi Infrastruktur 1 & 2 Proyek Terpilih 2 Selected Project & Infrastructure Division 1 Office	Audit Operasional Operational Audit	Q4	Q4
13	Divisi Legal Legal Division	Audit Compliance Compliance Audit	Q4	Q4
14	PP WIKA Serang Panimbang	Audit Investasi Investment Audit	Q4	Q4

- Non Audit
  - » Laporan Kegiatan SPI Triwulan dan Tahunan;
  - » Internal Audit Report (Quarterly) - Reporting to the Ministry od State-Owned Enterprises (SOEs);
  - » Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
  - » *Self-Assessment* Quality Assurance Internal Program (QAIP);
  - » Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) SPI.

- Kaji Ulang Pihak Eksternal yang Independen (*Quality Assurance Review*)
  SPI telah melaksanakan kajian ulang pihak eksternal yang Independen (*quality assurance review*) terhadap kinerja SPI sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana tertuang dalam Laporan No. PE.12.03/LHP-416/PW09/4.1/2024 tanggal 30 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa kegiatan fungsi SPI PTPP pada periode tahun 2023 adalah "Sangat Patuh" dalam memenuhi kriteria yang relevan dalam Standar Profesi Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.

  Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kaji ulang pihak eksternal berikutnya akan dilaksanakan untuk periode tahun 2026.

- Non-Audit
  - » Quarterly and Annual SPI Activity Reports;
  - » Internal Audit Report (Quarterly) - Reporting to the Ministry od State-Owned Enterprises (SOEs);
  - » Evaluation of the Implementation of the Company's Internal Control System;
  - » Internal Quality Assurance Program (QAIP) Self-Assessment;
  - » SPI Human Resource Development.

- Independent External Review (Quality Assurance Review)
  SPI has conducted an independent external review (quality assurance review) of SPI's performance in accordance with the State-Owned Enterprises (SOE) Minister Regulation of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023, carried out by BPKP as outlined in Report No. PE.12.03/LHP-416/PW09/4.1/2024 dated December 30, 2024, concluding that the activities of the PTPP SPI during the 2023 period were "Highly Compliant" in meeting the relevant criteria of the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Conduct.

  Furthermore, in accordance with applicable regulations, the next external review will be conducted for the 2026 period.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi serta Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

Meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners and/or Audit Committee

Tanggal Date	Jenis Type	Perihal Subject	Peserta Participant
3 Januari 2025 January 3, 2025	Rapat Komisaris Commissioners Meeting	Pembahasan Konsep Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Discussion of the Integrated Governance Guidelines Draft	Komite GCGPRNR dan Divisi Terkait GCGPRNR Committee and Related Divisions
13 Januari 2025 January 13, 2025	Radir Umum General Board of Directors Meeting	Arahan Direksi Board of Directors Directives	SVP - ALL, DIR AP, GM OPS, PM SVP - ALL, Directors of Subsidiaries, GM of Operations, PM
		QHSE *Highlight*	
		Site Visit Proyek Project Site Visit	
10 Februari 2025 February 10, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Identifikasi Risiko Audit SPI SPI Audit Risk Identification Discussion	SVP - IntAud
11 Februari 2025 February 11, 2025	Rapat Komisaris Commissioners Meeting	Pembahasan *Draft* Internal *Audit Charter* & Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2025 Discussion of the Draft for Internal Audit Charter & 2025 Annual Audit Work Program	Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Biro SPI Board of Commissioners, Board of Commissioners Committee, SPI Bureau
5 Mei 2025 May 5, 2025	Radir Umum General Board of Directors Meeting	Arahan Direksi Board of Directors Directives	SVP - ALL, DIR AP, GM OPS, PM SVP - ALL, Directors of Subsidiaries, GM of Operations, PM
		QHSE *Highlight*	
		Pembahasan Manajemen Risiko Risk Management Discussion	
		Site Visit Proyek Project Site Visit	
3 Juni 2025 June 3, 2025	Rapat Komisaris Commissioners Meeting	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI TW I 2025 Discussion of the SPI Audit Report (LHP) for Q1 of 2025	Dewan Komisaris, Komite Audit, Biro SPI Board of Commissioners, Audit Committee, SPI Bureau
15 Agustus 2025 August 15, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Integrasi Karya Discussion on Karya Integration	SVP UKP (ALL), Ketua PMO SVP UKP (ALL), Head of PMO
		Pembahasan Penilaian KPMG KPMG Assessment Discussion	SVP (ALL), Ketua PMO SVP (ALL), Head of PMO
25 Agustus 2025 August 25, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	*Update* WI/Prosedur WI/Procedure Update	Ketua PMO, SVP UKP (All) Head of PMO, SVP UKP (ALL)
29 September 2025 September 29, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Integrasi dan RKAP 2026 Discussion on Integration and 2026 RKAP	SVP UKP (ALL), Ketua PMO SVP UKP (ALL), Head of PMO
6 November 2025 November 6, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Integrasi Karya Discussion on Karya Integration	SVP UKP (All)

Tanggal Date	Jenis Type	Perihal Subject	Peserta Participant
10 November 2025 November 10, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Integrasi Karya • Tindak lanjut *meeting* Danantara • Detail evaluasi *risk* terhadap *impairment* dan *restatement* Discussion on Karya Integration • Follow-up on the Danantara meeting • Details of the risk assessment regarding impairment and restatement	SVP UKP (All)
24 November 2025 November 24, 2025	Radir Terbatas Limited Board of Directors Meeting	Pembahasan Integrasi Karya Discussion on Karya Integration	SVP UKP (All)

Berikut disampaikan rekapitulasi dan kehadiran SPI dalam rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit di sepanjang tahun 2025.

The following is a summary of SPI's attendance at joint meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee throughout 2025.

Rekapitulasi Kehadiran SPI dalam Rapat Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

Recapitulation of SPI's Attendance at Joint Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee

Rapat SPI SPI Meetings	Jumlah Rapat Total Meetings	% Kehadiran SPI % SPI Attendance
Rapat bersama Direksi Meetings with the Board of Directors	9	75,00
Rapat bersama Dewan Komisaris Meetings with the Board of Commissioners	2	17,00
Rapat bersama Komite Audit Meetings with the Audit Committee	1	8,00
Rata-rata **Average**	**12**	**100,00**

Rencana Audit Tahun 2026

SPI menyusun perencanaan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa tujuan penugasan audit sesuai dengan Piagam audit (*Internal Audit Charter*), Standar Audit Internal Global dan menetapkan prioritas kegiatan fungsi audit internal sesuai dengan tujuan, strategi, risiko signifikan yang dihadapi oleh Perusahaan dan Arahan Pemegang Saham untuk penyusunan RKAP Tahun 2026 termasuk mempertimbangkan alokasi sumber daya serta kompetensi yang dimiliki oleh Biro SPI.

Audit Plans in 2026

SPI prepares risk-based audit planning to ensure that audit assignment objectives are in line with the Internal Audit Charter and Global Internal Audit Standards, and sets priorities for internal audit activities in accordance with the Company's objectives, strategies, significant risks faced, and Shareholders' Directives for the preparation of the 2026 RKAP, including taking into account resource allocation and the competencies possessed by the SPI Bureau.

A. Asurans | Assurance

No.	Jenis Penugasan Assignment Type	Auditable Unit/Objek Audit dan Subjek Audit Auditable Unit/Audit Object and Subject	Sumber Daya yang Digunakan Resources Used	Jadwal Audit Audit Schedule
1	Audit Operasional Operational Audit	Divisi Operasi EPC dan beberapa sample proyek EPC Operations Division and several sample projects	Dept. Ops. Aud. Dept. Fin. Aud. Dept. Sys. Aud.	Januari-April 2026 January-April 2026
2	Audit Operasional Operational Audit	Divisi Operasi Gedung dan beberapa sample proyek Building Operations Division and several sample projects	Dept. Ops. Aud. Dept. Fin. Aud. Dept. Sys. Aud.	April-Juli 2026 April-July 2026
3	Audit Operasional Operational Audit	Divisi Operasi Infra 2 dan beberapa sample proyek Infrastructure Division 2 Operations and several sample projects	Dept. Ops. Aud. Dept. Fin. Aud. Dept. Sys. Aud.	Juli-Oktober 2026 July-October 2026
4	Audit Operasional Operational Audit	Divisi Operasi Infra 1 dan beberapa sample proyek Infrastructure Division 1 Operations and several sample projects	Dept. Ops. Aud. Dept. Fin. Aud. Dept. Sys. Aud.	Oktober-Desember 2026 October-December 2026
5	*Audit Compliance* Compliance Audit	Divisi Human Capital Management Human Capital Management Division	Dept. Sys. Aud.	Februari-Maret 2026 February-March 2026
6	*Audit Compliance* Compliance Audit	Divisi Operation Control & Supply Chain Management Operation Control & Supply Chain Management Division	Dept. Sys. Aud.	April-Mei 2026 April-May 2026
7	Audit Tematik Thematic Audit	Divestasi Anak Perusahaan Divestiture of Subsidiaries	Dept. Sys. Aud.	Juli-Agustus 2026 July-August 2026
8	Audit Tematik Thematic Audit	Pengelolaan Pendanaan & Restrukturisasi Funding Management & Restructuring	Dept. Sys. Aud.	September-Oktober 2026 September-October 2026
9	Audit Anak Perusahaan Subsidiary Audit	PTPP Semarang - Demak	Dept. Inv. Aud.	Februari-Maret 2026 February-March 2026
10	Audit Anak Perusahaan Subsidiary Audit	PP Infrastruktur - Operation & Business Control	Dept. Inv. Aud.- Joint Audit SPI PP Infra	April-Mei 2026 April-May 2026
11	Audit Anak Perusahaan Subsidiary Audit	PP Properti - Dept. Portofolio Management	Dept. Inv. Aud.- Joint Audit SPI PPRO	Juli-Agustus 2026 July-August 2026
12	Audit Anak Perusahaan Subsidiary Audit	PP Energi - PT Odira Energy Karang Agung	Dept. Inv. Aud.- Joint Audit SPI PPEN	September-Oktober 2026 September-October 2026
13	Audit Anak Perusahaan Subsidiary Audit	PP Presisi - Divisi Operasi PP Presisi – Operations Division	Dept. Inv. Aud.- Joint Audit	Oktober-Desember 2026 October-December 2026

No.	Jenis Penugasan Assignment Type	Auditable Unit/Objek Audit dan Subjek Audit Auditable Unit/Audit Object and Subject	Sumber Daya yang Digunakan Resources Used	Jadwal Audit Audit Schedule
14	*Audit Compliance* Compliance Audit	Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Perusahaan Evaluation of Corporate Risk Management Effectiveness	Dept. Ops. Aud. Dept. Sys. Aud.	Juni-Juli 2026 June-July 2026
15	*Audit Compliance* Compliance Audit	Self Assessment Risk Maturity Indeks Self-Assessment on Risk Maturity Index	Dept. Ops. Aud. Dept. Sys. Aud.	Juni-Juli 2026 June-July 2026
16	*Audit Compliance* Compliance Audit	Self Assessment Quality Assurance & Improvement Program Self-Assessment on Quality Assurance & Improvement Program	Dept. Sys. Aud.	Juni 2026 June 2026
17	*Audit Compliance* Compliance Audit	Evaluasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) - Level Induk Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Evaluation – Parent Company Level	Dept. Sys. Aud.	Juli & Desember 2026 July & December 2026
18	*Audit Compliance* Compliance Audit	Audit Internal atas implementasi Environment, Social & Governance Internal Audit on the Implementation of Environment, Social & Governance	Dept. Sys. Aud.	Oktober-November 2026 October-November 2026
19	*Audit Compliance* Compliance Audit	Audit penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) Information Technology (IT) Operations Audit	Dept. Sys. Aud.	November-Desember 2026 November-December 2026
20	Audit Khusus	Diluar Audit yang telah direncanakan dalam PKPT Outside the Audit planned in PKPT	All Dept.	Januari-Desember 2026 January-December 2026

B. Consulting

No.	Jenis Penugasan Assignment Type	Auditable Unit/Objek Audit dan Subjek Audit Auditable Unit/Audit Object and Subject	Sumber Daya yang Digunakan Resources Used	Jadwal Audit Audit Schedule
1	*Advisory*	Konsulting & Pendampingan SPI Afiliasi PT Indonesia Ferry Property (IFPRO) Consulting & Assistance for the Internal Audit Department of PT Indonesia Ferry Property (IFPRO)	Dept. Inv. Aud.	Juni 2026 June 2026
2	*Advisory*	Fungsi lini 1 dan lini 2 - PT PP (Perseroan) Tbk dan Entitas Anak Line 1 and Line 2 Functions - PT PP (Persero) Tbk and Subsidiaries	Dept. Sys. Aud.	April & Juli 2026 April & July 2026
3	*Advisory*	Sesuai Permintaan Auditee As Requested by the Auditee	All Dept.	Januari-Desember 2026 January-December 2026

Biro QHSE

Direksi membentuk Biro Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) dalam rangka mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap pembuatan, pengembangan dan pemantauan seluruh program QHSE, termasuk menciptakan budaya kesadaran QHSE seluruh pemangku kepentingan PTPP. Biro QHSE dipimpin oleh seorang SVP.

Pejabat Biro QHSE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/SK/PP/DIR/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pengangkatan Kepala Biro QHSE & Sistem Manajemen, Direksi menunjuk Budi Suanda sebagai SVP Biro QHSE.

QHSE Bureau

The Board of Directors established the Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) Bureau to manage and be fully responsible for creating, developing, and monitoring all QHSE programs, including creating a culture of QHSE awareness among all PTPP stakeholders. An SVP leads the QHSE Bureau.

QHSE Bureau Officials

Based on the Board of Directors Decree No. 54/SK/PP/DIR/2024 dated June 6, 2024, on the Appointment of the Head of QHSE Bureau, the Board of Directors appointed Budi Suanda as SVP of QHSE Bureau.



Budi Suanda

SVP QHSE
SVP QHSE

Periode Jabatan
Term of Office

Menjabat sejak 6 Juni 2024
In Office since June 6, 2024

Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia Indonesian citizen	Kelahiran Pontianak, 11 Februari 1977 Born in Pontianak, February 11, 1977	Usia 48 tahun 48 years old	Berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di PTPP

Tahun 1991 sebagai Staf Teknik

Joined PTPP

Joined in 1991 as an Engineering Staff

Pendidikan

- Magister (S2) Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2008)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada (2001)

Formal Education

- Master of Project Management from the University of Indonesia (2008)
- Bachelor of Civil Engineering from Gajah Mada University (2001)

Pengalaman Kerja

- Direktur Operasi, WIKA Serang Panimbang (2022-2024)
- Senior Vice President Div. Strategic Planning, Research, & Technology, PT PP (Persero) Tbk (2020-2022)
- Direktur Realty, PT PP Urban (2017-2020)
- Kadep Riset & Inovasi - Div Strategic Planning, Research, & Technology, PT PP (Persero) Tbk (2014-2017)
- Project Manager EPC, PT PP (Persero) Tbk (2012-2014)
- Project Manager Konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (2009-2012)
- Construction Manager, PT PP (Persero) Tbk (2007-2009)

Work Experience

- Director of Operations, WIKA Serang Panimbang (2022-2024)
- Senior Vice President of the Strategic Planning, Research, & Technology Division, PT PP (Persero) Tbk (2020-2022)
- Director of Realty, PT PP Urban (2017-2020)
- Head of Research & Innovation Department – Strategic Planning, Research, & Technology Division, PT PP (Persero) Tbk (2014-2017)
- EPC Project Manager, PT PP (Persero) Tbk (2012-2014)
- Construction Project Manager, PT PP (Persero) Tbk (2009-2012)
- Construction Manager, PT PP (Persero) Tbk (2007-2009)

Sertifikasi Profesi	Professional Certification
Sertifikasi Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, dari BNSP (2024).	Senior Expert Certification in Construction Management, BNSP (2024)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Environmental Coordinator Komite ESG (2024-sekarang) **Di luar Perusahaan:** Tidak ada	**Within the Company:** Environmental Coordinator of the ESG Committee (2024-present) **Outside the Company:** None

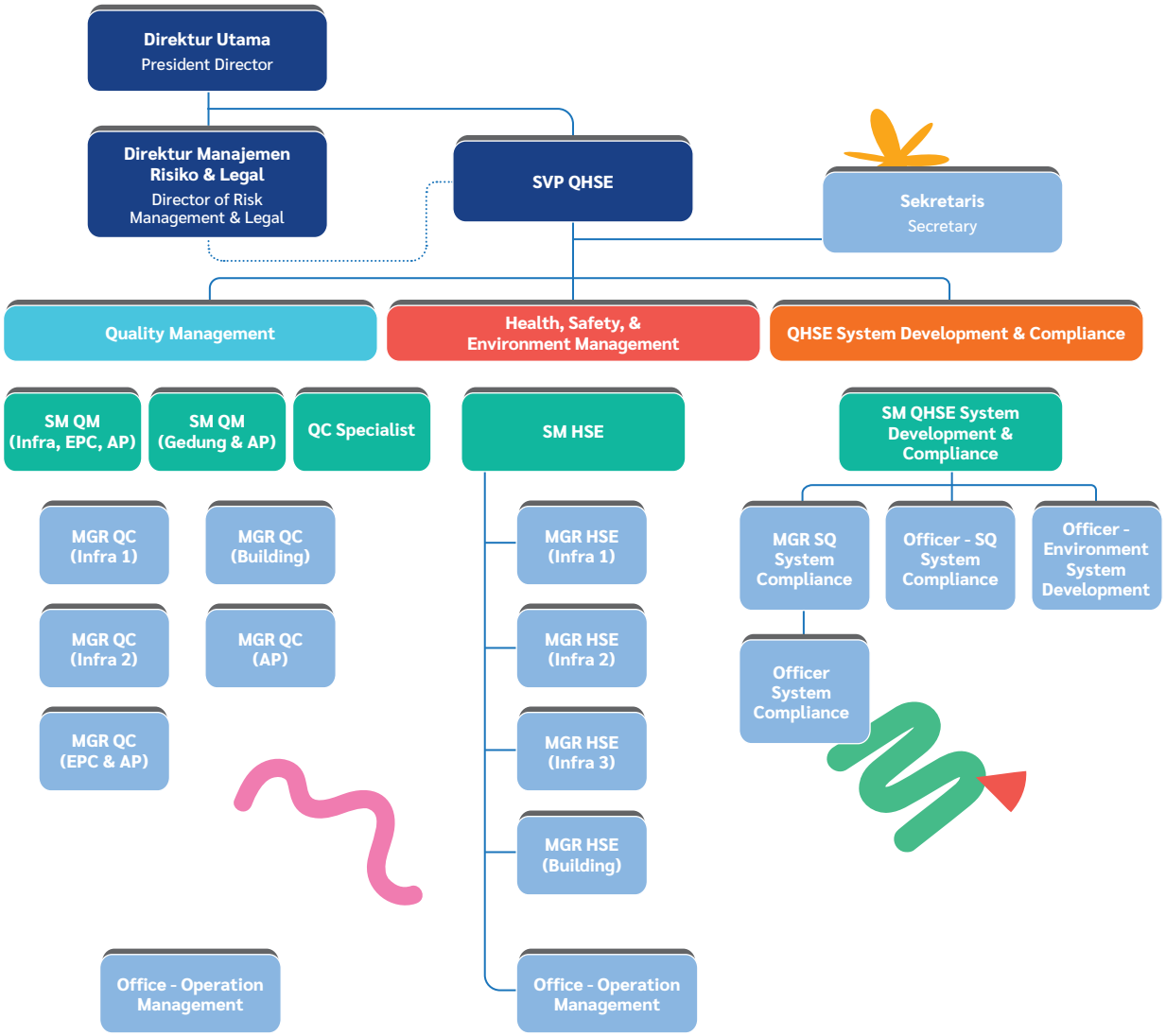
Keorganisasian Biro QHSE

Untuk memberikan gambaran tentang cakupan fungsi, berikut disampaikan struktur organisasi Biro QHSE.

Organization of the QHSE Bureau

To provide an overview of the function's scope, the organizational structure of the QHSE Bureau is presented below.

Struktur Organisasi Biro QHSE
Organizational Structure of the QHSE Bureau



Per 31 Desember 2025, Biro QHSE memiliki 44 orang yang mengisi struktur organisasi di atas.

As of December 31, 2025, the QHSE Bureau has 44 personnel filling the above organizational structure.

Jumlah Pegawai Biro QHSE
Total QHSE Bureau Employees

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (personnel)
Senior Vice President Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) Senior Vice President of Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)	1
QC Specialist	1
Senior Manager Quality Management (QM) Senior Manager of Quality Management (QM)	2
Senior Manager HSE Senior Manager of HSE	1
Senior Manager System QHSE Development & Compliance Senior Manager of System QHSE Development & Compliance	1
Manager System Compliance Manager of System Compliance	1
Manager QC Gedung QC Manager of Buildings	3
Manager QC Gedung & AP QC Manager of Buildings & Subsidiaries	1
Manager QC Infra 1 QC Manager of Infrastructure 1	1
Manager QC Infra 2 QC Manager of Infrastructure 2	1
Manager QC EPC & AP QC Manager of EPC & Subsidiaries	1
Manager HSE Gedung HSE Manager of Buildings	2
Manager HSE Infra 1 HSE Manager of Infrastructure 1	1
Manager HSE Infra 2 HSE Manager of Infrastructure 2	1
Manager HSE EPC HSE Manager of EPC	1
Manager HSE AP HSE Manager of Subsidaries	1
Senior Officer System Compliance	1
Senior Officer SQ System Development	5
Junior Officer SQ System Development	1
Senior Officer Environment Development	3
Junior Officer Contractor Safety Management System (CSMS)	1
Officer QC Operation Management	4
Junior Officer QC Operation Management	2
Officer HS Operation Management	3
Junior Officer HS Operation Management	3
Secretary	1
Jumlah **Total**	**44**

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan QHSE. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki pegawai Biro QHSE hingga akhir tahun 2025.

Professional Certification

Professional certification is an essential aspect of understanding QHSE development for auditors. The following are the professional certifications held by QHSE Bureau employees until the end of 2025.

Jenis dan Level Sertifikasi Type and Level of Certification	Jumlah Karyawan Biro QHSE yang Memiliki Total Certified QHSE Bureau Employees	Persentase Terhadap Jumlah Karyawan Biro QHSE Percentage from Total QHSE Bureau Employees
Ahli K3 Umum General OHS Expert	2 orang | personnel	4,5 %
Ahli Madya K3 Konstruksi Associate OHS Construction Expert	1 orang | personnel	2,3 %
Ahli Utama K3 Konstruksi Senior OHS Construction Expert	1 orang | personnel	2,3 %
Auditor SMK3 SMK3 Auditor	1 orang | personnel	2,3 %
Lead Auditor IRCA & CQI ISO 14001	2 orang | personnel	4,5 %
Lead Auditor IRCA & CQI ISO 45001	2 orang | personnel	4,5 %
Lead Auditor IRCA & CQI ISO 9001	1 orang | personnel	2,3 %
Ahli Utama Elektrikal Gedung Senior Building Electrical Engineer	1 orang | personnel	2,3 %
Inspektor Pesawat Angkat Angkut Lifting Equipment Inspector	1 orang | personnel	2,3 %
Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Senior Quality Management System Engineer	2 orang | personnel	4,5 %
Ahli Madya Teknik Jalan Associate Road Engineering Engineer	1 orang | personnel	2,3 %
Ahli Madya Material Jalan Associate Road Materials Engineer	1 orang | personnel	2,3 %
Training of Trainer Level 4	1 orang | personnel	2,3 %

Tugas dan Tanggung Jawab

Biro QHSE memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola aspek HSE Perusahaan mengenai tata kelola dan strategi Perusahaan agar mencapai *zero harm* di HSE termasuk prosedur dan kebijakan terbaru;
2. Mengelola aspek *Quality* di tingkat Perusahaan mengenai tata kelola dan strategi Perusahaan agar mutu kualitas pekerjaan terjaga melalui prosedur, kebijakan dan kualifikasi sertifikasi yang tervalidasi sesuai kebutuhan di masa kini maupun mendatang;
3. Mengelola tata kelola kepatuhan seluruh peraturan mengenai QHSE di level nasional (kementerian), provisional maupun internal dan antar Perusahaan;
4. Mengelola organisasi P2K3 dalam penerapan HSE di seluruh badan Perusahaan;
5. Mengelola dan menganalisis pelaporan kecelakaan kerja, investigasi mutu kerja maupun *near misses* ke *stakeholder* eksternal maupun internal sesuai mekanisme yang ditentukan;

Duties and Responsibilities

The QHSE Bureau has the following duties and responsibilities:

1. Manage the Company's HSE aspects regarding the Company's governance and strategy to achieve zero harm in HSE, including the latest procedures and policies;
2. Manage Quality aspects at the Company level regarding the Company's governance and strategy to maintain the quality of work through validated procedures, policies and certification qualifications according to current and future needs;
3. Manage compliance governance of all QHSE regulations at national (ministerial), provisional, and internal and inter-company levels;
4. Manage the P2K3 organization in the implementation of HSE throughout the Company;
5. Manage and analyze the reporting of work accidents, work quality investigations, and near misses to external and internal stakeholders according to the specified mechanism;

6. Melakukan penilaian secara komprehensif kinerja proyek (biaya, mutu, waktu, keuangan, kualitas dan SHE) untuk *Best Performance Project Award* yang dilakukan setiap tahunnya;
7. Memastikan implementasi sistem *quality*, SHE Perusahaan sesuai standar ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 dilaksanakan dengan baik; dan
8. Menjaga dan meningkatkan penciptaan budaya kerja yang berasaskan biaya, mutu, kualitas dan HSE; dan
9. Promosi dan pengembangan program *Green Construction* dan *Green Technology* di Perusahaan.

6. Conduct a comprehensive assessment of project performance (cost, quality, time, finance, quality, and SHE) for the Best Performance Project Award conducted annually;
7. Ensure that the Company's quality system and the Company's SHE based on ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 standards are well implemented;
8. Maintain and improve the creation of a work culture based on cost, quality, quality and HSE; and
9. Promote and develop Green Construction and Green Technology programs in the company.

Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi pegawai Biro QHSE dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan QHSE.

Competency Development

The Company facilitates the implementation of development programs for QHSE Bureau employees to improve employee competencies. These programs are expected to impact the QHSE management's productivity and effectiveness positively.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Fadlan Efendi (Off QC Operation Mgt)	Sertifikasi Ahli Madya Teknik Jalan Intermediate Certification in Road Engineering	*Online*, 18 Januari 2025 Online, January 18, 2025	BNSP
	Sertifikasi Ahli Madya Material Jalan Intermediate Certification in Road Materials	*Online*, 10 Maret 2025 Online, March 10, 2025	BNSP
Yuniar Widya Larasati (Off CSMS)	Sertifikasi Lead Auditor IRCA & CQI ISO 14001 IRCA & CQI ISO 14001 Lead Auditor Certification	*Online*, 19-23 Mei 2025 Online, May 19-23, 2025	CQI & IRCA - BSI
M. Reza Aliansyah (SrOff Environmental Dev)	Sertifikasi Lead Auditor IRCA & CQI ISO 14001 IRCA & CQI ISO 14001 Lead Auditor Certification	*Online*, 19-23 Mei 2025 Online, May 19-23, 2025	CQI & IRCA - BSI
Tirta Mazli Zulkarnain (SrOff Environmental Dev)	Pelatihan ToT *Asia Low Carbon Building Transition* (ALCBT) ToT Training Asia Low Carbon Building Transition (ALCBT)	Jakarta, 15 Juni 2025 Jakarta, June 15, 2025	Global Green Growth Institute
Juniar Bakti Alkafianto (SM SysComp)	Sertifikasi *Lead Auditor* IRCA & CQI ISO 9001 IRCA & CQI ISO 9001 Lead Auditor Certification	*Online*, 20 Juni 2025 Online, June 20, 2025	CQI & IRCA - BSI
RA Intan Dwi Saraswati (Off HS Operation Mgt)	Sertifikasi Ahli K3 Umum General OHS Expert Certification	*Online*, 14 Juli 2025 Online, July 14, 2025	Kemnaker Manpower Ministry
M. Fiqih Agusfiyan (SrOff SQ System Development)	Sertifikasi Auditor SMK3 SMK3 Auditor Certification	*Online*, 21-26 Juli 2025 Online, July 21-26, 2025	Kemnaker - Midiatama Manpower Ministry-Midiatama
Sholikul Hadi (SM QM)	Pelatihan *Leadership Business Scale Up* 2.0 Leadership Business Scale Up 2.0 Training	Jakarta, 24 Agustus 2025 Jakarta, August 24, 2025	Aksoro
Tirta Mazli Zulkarnain (SrOff Environmental Dev)	Pelatihan *Building Emission Assessment Tools* (BEAT) Building Emission Assessment Tools (BEAT) Training	Jakarta, 27 Agustus 2025 Jakarta, August 27, 2025	Global Green Growth Institute & Kementerian PU Global Green Growth Institute & PU Ministry
Maharani Sofia Firdouz (SrOff System Compliance)	Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 45001 (CQI & IRCA) ISO 45001 Lead Auditor Certification (CQI & IRCA)	*Online*, 8-12 September 2025 Online, September 8-12, 2025	CQI & IRCA - BSI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type and Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dian Putri Hapsari (JrOff HS OM)	Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 45001 (CQI & IRCA) ISO 45001 Lead Auditor Certification (CQI & IRCA)	*Online*, 8-12 September 2025 Online, September 8-12, 2025	CQI & IRCA - BSI
M. Alifian Rahman (JrOff HS Operation Mgt)	Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Construction OHS Intermediate Expert Certification	*Online*, 3 Oktober 2025 Online, October 3, 2025	BNSP
RA Intan Dwi Saraswati (Off HSE Operation Mgt)	Sertifikasi Ahli Utama K3 Konstruksi Senior Construction OHS Expert Certification	*Online*, 9 Oktober 2025 Online, October 9, 2025	BNSP
Mirza Mahendra (Mgr SysComp)	Sertifikasi Ahli Utama Elektrikal Gedung Senior Building Electrical Expert Certification	*Online*, 20 Oktober 2025 Online, October 20, 2025	BNSP
Sholikul Hadi (SM QM)	Sertifikasi Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Senior Quality Management System Expert Certification	*Online*, 26 November 2025 Online, November 26, 2025	BNSP
Junison (Mgr HSE AP)	Sertifikasi Inspektor Pesawat Angkat Angkut Lifting Equipment Inspector Certification	Jakarta, 1,3 dan 5 Desember 2025 Jakarta, December 1, 3, and 5, 2025	BNSP
Edil Syah Ariol (Off QC OM)	Sertifikasi Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Senior Quality Management System Expert Certification	*Online*, 2 Desember 2025 Online, December 1, 3, and 5, 2025	BNSP
M. Reza Aliansyah (SrOff Environmental Dev)	Pelatihan *Asia Low Carbon Building Transition* Asia Low Carbon Building Transition Training	Jakarta, 11 Desember 2025 Online, December 11, 2025	Kementerian PUPR

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Di sepanjang tahun 2025 Biro QHSE telah merealisasikan berbagai program kerja sebagai berikut:

Brief Report on Task Implementation in 2025

Throughout 2025, the QHSE Bureau has implemented several work programs as follows:

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization
1	Pengelolaan CSMS (*Contractor Safety Management System*) CSMS (Contractor Safety Management System) Management	Tercapai 100% 100% achieved
2	Audit unit SBU SBU Unit Audit	Tercapai 100% 100% achieved
3	Pendampingan QHSE Divisi Operasional QHSE Assistance for the Operations Division	Tercapai 100% 100% achieved
4	Pengelolaan Inspeksi berbasis Manajemen Risiko Risk Management-based Inspection Management	Tercapai 100% 100% achieved
5	Pendampingan dan Implementasi Program Quick Win Quick Win Program Assistance and Implementation	Tercapai 100% 100% achieved
6	Audit Integrated Management System QHSE QHSE Integrated Management System Audit	Tercapai 100% 100% achieved
7	Penyusunan database NC NC Database Development	Tercapai 100% 100% achieved
8	Pendampingan *Corrective Action* Corrective Action Assistance	Tercapai 100% 100% achieved

Audit Independen/Akuntan Publik

Penerapan prinsip GCG dilakukan melalui penguatan Hasil Tata Kelola yang tercermin dari laporan-laporan Perusahaan yang telah diaudit oleh pihak independen. Salah satunya adalah Laporan Keuangan sebagai dokumen utama yang memberikan gambaran tentang kinerja Perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penggunaan jasa akuntan Publik yang termasuk ke dalam auditor eksternal independen dibutuhkan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada dasarnya, pernyataan Akuntan Publik merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran laporan Keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada Pemegang Saham, Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Penunjukan Auditor Eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan *(Conflict of Interest)* dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan.

Skema sederhana tentang hubungan organ internal GCG dan Akuntan Publik sebagai organ eksternal dapat dilihat di bawah ini.

Independent Audit/Public Accountant

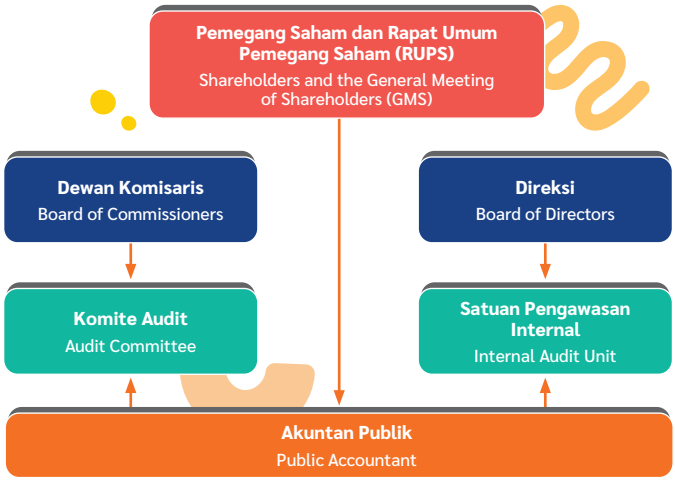
The implementation of GCG principles is carried out by strengthening Governance Results, which are reflected in the Company's reports that independent parties have audited. One of them is the Financial Statements, the main documents that provide an overview of the Company's performance. This is also done to comply with applicable regulations.

The use of Public accountant services included in independent external auditors is required to express an opinion on the fairness, in all material respects, of the financial position, results of operations, changes in equity, and cash flows following the generally accepted accounting principles in Indonesia. The Public Accountant's statement is an independent third-party opinion regarding the fairness of the Financial statements submitted to the Company's Shareholders and other stakeholders regarding material matters stated in the financial statements.

In ensuring the integrity of the presentation of financial statements to Shareholders, the Company utilizes the services of an external auditor. The appointment of the External Auditor to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025 is determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The appointed External Auditor is not allowed to have a conflict of interest with the Company to ensure the independence and quality of the audit results. The External Auditor is responsible for expressing an opinion on the compliance of the Company's audited Financial Statements with generally accepted Financial Accounting Standards.

The Public Accountant Firm that examines the Company's financial statements is determined through the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with any level of Company officials.

Below is a simple scheme of the relationship between GCG's internal organs and the Public Accountant as an external organ.



Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi audit independen, Auditor Eksternal melakukan hubungan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Through the GMS, the Shareholders have the authority to determine the External Auditor who will audit the Company's financial statements. In carrying out the independent audit function, the External Auditor liaises with the Internal Audit Unit (SPI), under the Board of Directors, and the Audit Committee, under the Board of Commissioners.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Compliance with the Indonesian Financial Accounting Standards

The management is responsible for presenting the Company's financial statements and complies with the SAK applicable in Indonesia set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), which is now the Financial Services Authority (OJK), Chairman Decree No. VIII.G.7, Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated June 25, 2012, on the Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;

External Audit Procedures and Audit Standards

- The audit of the Company's financial statements is conducted following the Public Accountant's professional standards, which include all audit procedures deemed necessary under the circumstances;
- An audit includes testing and evaluating the internal control system and examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the financial statements according to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI;
- As part of the audit process, the Public Accountant Firm (KAP) also debriefs management regarding management's assertions presented in the financial statements;

- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selain itu, dalam pelaksanaan penunjukannya, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Audits carry an inherent risk that material errors and irregularities will be discovered. If so, KAP will inform the management;
- Management approves the working paper of KAP's audit of the Company for review by the relevant body or authority.

Audits are conducted according to the Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If the Government of Indonesia provides financial assistance, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Supreme Audit Agency (BPK).

Public Accountant Appointment Mechanism

As previously explained, the appointment of the Public Accountant Firm is determined through the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. Moreover, in implementing the appointment, the Company also refers to the Finance Minister Regulation No. 17/PMK.01/2008 on Public Accountant Services and OJK Regulation No. 13/PojK.03/2017 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Mechanism of Appointment to the Determination of Public Accountant



Akuntan Publik Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan:
   - » Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan; dan
   - » Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan/ atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Berdasarkan surat No. 013/KOM/PP/03/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan Usulan Penunjukan KAP Tahun Buku 2025 Dewan Komisaris dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah menetapkan besaran imbalan jasa audit serta penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Terafiliasi dengan RSM).

The 2025 Public Accountant

Based on the Resolution of the Annual GMS for Fiscal Year 2024 held on April 30, 2025, the Shareholders decided on the following matters:

1. Approving the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &Partners (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the 2025 fiscal year.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
   - » Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2025 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company; and
   - » Determine the audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Partners (RSM Indonesia), for any reason, cannot complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods in the 2025 Fiscal Year, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2025 Fiscal Year, including determining the audit fees and other requirements for the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Based on letter No. 013/KOM/PP/03/2025 dated March 27, 2025, on the Submission of Evaluation Results on the Implementation of Public Accounting Firm (KAP) Audits for Fiscal Year 2024 and Proposed Appointment of KAP for Fiscal Year 2025, the Board of Commissioners, with the approval of the Series A Dwiwarna Stock Shareholders, has determined the amount of audit fees as well as the additional scope of work required and other reasonable requirements for KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Affiliated with RSM).

Akuntan Publik Tahun 2025
The 2025 Public Accountant

Kantor Akuntan Publik **Public Accountant Firm**	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Terafiliasi dengan RSM) Tanda Terdaftar: STTD.KAP-00012/PM.22/2017 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (Affiliated with RSM) Registration License: STTD.KAP-00012/PM.22/2017
Akuntan Publik **Public Accountant**	:	Benny Andria, No. Registrasi: RNA 2946 Benny Andria, Registration No.: RNA 2946
Tahun Audit **Audit Year**	:	Tahun Buku 2025 2025 Fiscal Year

Periode Penugasan **Assignment Period**	:	24 Oktober 2025 s.d 27 Februari 2026 October 24, 2025, to February 27, 2026
Tanggal Publikasi Laporan Keuangan Teraudit **Publication Date of Audited Financial Statement**	:	2 April 2026 April 2, 2026
Jasa **Services**	:	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2025 General Audit on the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program for Fiscal Year 2025
Jasa Lainnya **Other Services**	:	-
Biaya **Fee**	:	Rp1.300.000.000

Daftar Akuntan Publik

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mengatur terkait pembatasan penggunaan jasa audit.

List of Public Accountants

To maintain professionalism and independence, the selection of External Auditors carried out annually must comply with the provisions of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities, which regulates restrictions on the use of audit services.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 7 (Tujuh) Tahun Terakhir 2019-2025

List of Public Accountant Firms and Accountants in the Last Seven Years (2019-2025)

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Jasa Service	Opini Audit Audit Opinion	Nilai Jasa Service Value
2025	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (KAP RSM AAJ)	Benny Andria No. Izin: AP.0181 Benny Andria License No.: AP.0181	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2025 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PUMK for Fiscal Year 2025	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion	Rp1.300.000.000
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (KAP RSM AAJ)	Benny Andria No. Izin: AP.0181 Benny Andria License No.: AP.0181	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2024 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PUMK for Fiscal Year 2024	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion	Rp1.200.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Jasa Service	Opini Audit Audit Opinion	Nilai Jasa Service Value
2023	Hertanto Grace Karunawan (KAP HGK)	Bambang Karunawan No. Izin: AP.0912 Bambang Karunawan License No.: AP.0912	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2023 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PUMK for Fiscal Year 2023	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion	Rp850.000.000
2022	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan No. Izin: 854/ KM.1/2015 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners License No.: 854/ KM.1/2015	Ali Hery No. Izin: AP.0555 Ali Hery License No.: AP.0555	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2022 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PKBL for Fiscal Year 2022	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion	Rp1.047.375.000
2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan No. Izin: 854/ KM.1/2015 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners License No.: 854/ KM.1/2015	Ali Hery No. Izin: AP.0555 Ali Hery License No.: AP.0555	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2021 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PKBL for Fiscal Year 2021	Wajar dalam Semua Hal yang Material Unqualified Opinion	Rp997.500.000
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan No. Izin: 854/ KM.1/2015 Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners License No.: 854/ KM.1/2015	Ali Hery No. Izin: AP.0555 Ali Hery License No.: AP.0555	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PKBL for Fiscal Year 2020	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	Rp950.000.000
2019	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin 929/ KM.1/2014 Hertanto, Grace, Karunawan License No.: 929/ KM.1/2014	Bambang Karunawan No. Izin: AP.0912 Bambang Karunawan License No.: AP.0912	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019 General Audit of Consolidated Financial Statements and Financial Statements of PKBL for Fiscal Year 2019	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	Rp660.000.000



Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan risiko terhadap kebutuhan Perusahaan untuk mencapai targetnya dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The internal control system aims to assist in managing and controlling risks to the Company's needs to achieve its targets while still implementing GCG principles and complying with applicable laws and regulations.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 28 dan Kerangka kerja COSO Internal Control - Integrated Framework 2013. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan, maka Manajemen perlu mengembangkan sistem pengendalian internal Perusahaan dan mencantumkannya dalam suatu pedoman umum penyelenggaraan sistem pengendalian internal Perusahaan.

Referring to the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises Article 28 and Kerangka kerja COSO Internal Control - Integrated Framework 2013. The Board of Directors must establish an effective internal control system to secure the Company's investments and assets, the Management needs to develop the Company's internal control system and include it in a general guideline for the implementation of the Company's internal control system.

Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Sejak tahun 2013 PTPP telah menyusun Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), dan disahkan oleh Direksi pada tanggal 8 September 2014 sesuai Prosedur No. QHSE/TQM/AK/P/002, revisi: asli, tanggal 8 September 2014. Pedoman tersebut sudah disempurnakan dan di-*review* menjadi *Company Manual* Sistem Pengendalian Internal Perusahaan No. PP/CM/M2-115 tanggal 20 Oktober 2025.

Guidelines for the Company's Internal Control System

Since 2013, PTPP has developed General Guidelines for the Company's Internal Control System (SPIP), approved by the Board of Directors on September 8, 2014, under Procedure No. QHSE/TQM/AK/P/002, revision: original, dated September 8, 2014. These guidelines have been refined and reviewed to become the Company Manual for the Corporate Internal Control System No. PP/CM/M2-115 dated October 20, 2025.

- Maksud dan tujuan

  Maksud:

  Sebagai landasan dan acuan resmi bagi seluruh jajaran perusahaan dalam merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif.

  Tujuan:

  1. Menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran perusahaan;
  2. Meningkatkan keandalan laporan keuangan dan informasi manajemen;
  3. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal;
  4. Mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan;
  5. Mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan, kecurangan (*fraud*), dan pelanggaran;
  6. Mendukung penerapan prinsip GCG melalui integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dalam pencapaian tiga tujuan utama:

1. Tujuan Operasi (*Operations Objectives*)
   Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas.
   a. Mendukung pencapaian target kinerja operasional, produktivitas, dan kualitas layanan;
   b. Melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan;
   c. Menumbuhkan budaya disiplin, integritas, dan akuntabilitas dalam aktivitas operasional sehari-hari.
2. Tujuan Pelaporan (*Reporting Objectives*)
   Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal,
   a. Memastikan keandalan, ketepatan waktu, dan kelengkapan pelaporan keuangan maupun non-keuangan;
   b. Mendukung penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK/IFRS);
   c. Menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Tujuan Kepatuhan (*Compliance Objectives*)
   Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
   a. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, dan ketentuan yang berlaku;
   b. Memastikan kepatuhan pada kebijakan internal perusahaan, termasuk kode etik, kebijakan *anti-fraud*, dan standar prosedur operasional;
   c. Mengurangi risiko hukum, sanksi, atau kerugian reputasi akibat ketidakpatuhan.

- Purpose and Objectives

  Purpose:

  To serve as the official foundation and reference for all levels of the Company in designing, implementing, and maintaining an effective internal control system.

  Objectives:

  1. To ensure effectiveness and efficiency in achieving the Company's objectives;
  2. To enhance the reliability of financial statements and management information;
  3. Ensuring compliance with laws and regulations as well as internal policies;
  4. Identifying, assessing, and mitigating risks that could potentially affect the achievement of objectives;
  5. Preventing and detecting irregularities, fraud, and violations;
  6. Support the implementation of GCG principles through integrity, transparency, and accountability.

Objectives of Internal Control

The internal control system is designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of three primary objectives:

1. Operational Objectives
   Relating to the effectiveness and efficiency of the entity's operations.
   a. Supporting the achievement of operational performance targets, productivity, and service quality;
   b. b. Protecting the Company's assets from misuse, loss, or damage;
   c. Fostering a culture of discipline, integrity, and accountability in daily operational activities.
2. Reporting Objectives
   Regarding internal and external financial and non-financial reporting,
   a. Ensuring the reliability, timeliness, and completeness of both financial and non-financial reporting;
   b. Supporting the preparation of financial statements in accordance with applicable accounting standards (PSAK/IFRS);
   c. Providing transparent, accurate, and reliable information to stakeholders.
3. Compliance Objectives
   Relates to compliance with laws and regulations.
   a. Ensuring compliance with applicable laws, regulations, and provisions;
   b. Ensuring compliance with the Company's internal policies, including the code of ethics, anti-fraud policies, and standard operating procedures;
   c. Reducing the risk of legal action, sanctions, or reputational damage resulting from non-compliance.

Komponen Sistem Pengendalian Internal

Konsep *Three Lines model* (Model Tiga Lapis) yang diterapkan PTPP merupakan implementasi terkini dari prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Konsep *Three Lines model* menempatkan peran unit kerja sebagai Manajemen Operasional yang mengelola aspek kontrol internal di unitnya masing-masing dan menunjuk fungsi Manajemen Pengendali yang bertugas mengelola risiko Perusahaan secara keseluruhan serta membentuk fungsi yang memiliki peran sebagai *Comply Unit, Investigation, Risk Management* dan *Quality Assessment*, seperti peran Satuan Pengawas Intern dalam rangkaian *defence of control*.

Kesesuaian dengan *internal control framework*/COSO telah diimplementasikan oleh PTPP seperti diuraikan di bawah ini.

Components of the Internal Control System

The Three Lines model, implemented by PTPP, represents the latest application of the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) principles. The Three Lines model assigns operational units the role of Operational Management, responsible for managing internal control aspects within their respective units, and designates a Control Management function tasked with managing the Company's risks and establishing functions that serve as the Compliance Unit, Investigation, Risk Management, and Quality Assessment, such as the role of the Internal Audit Unit within the control defense framework.

Compliance with the internal control framework/COSO has been implemented by PTPP as described below.

Lingkungan Pengendalian
Control Environment

Merupakan serangkaian standar, proses dan struktur sebagai dasar pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan atau merupakan dasar dari seluruh komponen pengendalian internal. Komponen ini menciptakan kondisi (*set the tone*) perusahaan yang mempengaruhi kesadaran personel terhadap pengendalian internal. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komponen lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:
This consists of a series of standards, processes, and structures that serve as the foundation for implementing internal controls within the Company or form the basis of all internal control components. This component sets the tone for the Company and influences personnel's awareness of internal controls. The principles related to the control environment component are as follows:

Prinsip 1 **Principle 1**	**Menunjukan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.** Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, dengan *point of focus* pada: • Menetapkan aturan perilaku yang disusun atas dasar integritas dan nilai-nilai etika. Pedoman perilaku dipahami oleh seluruh insan perusahaan (termasuk *outsourcing*) dan *stakeholders*. • Pimpinan perusahaan memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan perilaku, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan guna mendukung berfungsinya sistem pengendalian internal. • Terdapat proses evaluasi atas pelaksanaan aturan perilaku. • Penyimpangan atas pelaksanaan aturan perilaku diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu dan konsisten. **Demonstrating a commitment to integrity and ethical values.** The Company demonstrates a commitment to integrity and ethical values, with a focus on: • Establishing a code of conduct based on integrity and ethical values. The code of conduct are understood by all Company personnel (including outsourced staff) and stakeholders. • Company leadership sets an example in adhering to the code of conduct, both through actions and words, to support the functioning of the internal control system. • There is a process for evaluating the implementation of the code of conduct. • Deviations from the code of conduct are identified and addressed in a timely and consistent manner.

Lingkungan Pengendalian
Control Environment

Prinsip 2 **Principle 2**	**Melaksanakan tanggung jawab pengawasan** Dewan Komisaris (Dekom) menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • Dekom menetapkan tanggungjawab pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka memenuhi ekspektasi *stakeholders*. • Dekom mengidentifikasi, mengembangkan, dan secara periodik mengevaluasi kemampuan dan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. • Dekom memiliki jumlah anggota yang cukup dan independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif. • Dekom melaksanakan tugas pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal. **Exercising oversight responsibilities** The Board of Commissioners demonstrates independence from management and performs its oversight function in the development and implementation of internal controls, with a focus on: • The Board of Commissioners establishes oversight responsibilities for the Company to meet stakeholder expectations. • The Board identifies, develops, and periodically evaluates the capabilities and expertise it possesses and requires to carry out its duties. • The Board has a sufficient number of independent members to carry out its oversight functions objectively. • The Board of Commissioners oversees the development and implementation of internal controls.
Prinsip 3 **Principle 3**	**Menetapkan struktur, kewenangan dan tanggung jawab.** Direksi menetapkan struktur organisasi, alur pelaporan, serta wewenang dan tanggungjawab, dengan *point of focus* pada: • Penetapan struktur organisasi selaras dengan tujuan Perusahaan, dan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai model dan aspek (termasuk unit-unit operasi, entitas hukum, distribusi wilayah dan penyedia jasa eksternal/*outsourcing*). • Manajemen mendesain dan mengevaluasi alur pelaporan dari setiap struktur dalam organisasi perusahaan agar dapat menjalankan kewenangan dan tanggung jawab serta alur informasi untuk mengelola aktivitas Perusahaan • Pimpinan Perusahaan mendelegasikan kewenangan, menetapkan tanggung jawab, menggunakan proses dan teknologi yang sesuai untuk melaksanakan tanggung jawab, serta memisahkan tugas pada berbagai tingkatan dalam perusahaan. **Establishing structure, authority, and responsibilities.** The Board of Directors establishes the organizational structure, reporting lines, and authorities and responsibilities, with a focus on: • The establishment of the organizational structure aligns with the Company's objectives and is carried out by considering various models and aspects (including operational units, legal entities, regional distribution, and external service providers/outsourcing). • Management designs and evaluates reporting lines for each structure within the Company's organization to ensure the exercise of authority and responsibility, as well as the flow of information to manage the Company's activities • Company leadership delegates authority, assigns responsibilities, utilizes appropriate processes and technology to fulfill responsibilities, and separates duties across various levels within the Company.
Prinsip 4 **Principle 4**	**Menunjukan komitmen terhadap kompetensi.** Perusahaan memiliki komitmen untuk menarik minat, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, dengan *point of focus* pada: • Kebijakan dan praktik dalam pengelolaan SDM mencerminkan adanya standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan. • Melakukan identifikasi dan evaluasi kompetensi pegawai dan penyedia jasa eksternal (*outsourcing*) dlm rangka pelaksanaan kebijakan SDM serta menindaklanjuti apabila ada kelemahan/kekurangan. • Adanya diklat yang diperlukan untuk menarik minat, mengembangkan dan mempertahankan jumlah dan kompetensi pegawai yang cukup untuk mendukung pencapaian tujuan. **Demonstrating a commitment to competence.** The Company is committed to attracting, developing, and retaining competent individuals to support the achievement of the Company's objectives, with a focus on: • Policies and practices in HR management reflect the competency standards required to support the achievement of objectives. • Identifying and evaluating the competencies of employees and external service providers (outsourcing) in the context of implementing HR policies and taking follow-up action if there are weaknesses or deficiencies. • Providing necessary training to attract, develop, and retain a sufficient number of employees with the competencies required to support the achievement of objectives.

Lingkungan Pengendalian
Control Environment

Prinsip 5 **Principle 5**	**Menegakan akuntabilitas.** Setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya atas pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • Direksi membangun mekanisme untuk mengkomunikasikan dan menegakkan akuntabilitas individu untuk pertanggungjawaban kinerja Sistem Pengendalian Internal di seluruh perusahan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. • Pimpinan menetapkan indikator kinerja, insentif dan penghargaan lainnya sesuai dengan tanggung Jawab semua level dalam perusahaan yang mempertimbangkan capaian kinerja, perilaku serta pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka Panjang. • Pimpinan Perusahaan menyelaraskan pemberian insentif dan penghargaan dengan tingkat pemenuhan tanggung jawab pengendalian internal. • Pimpinan Perusahaan memperhatikan kemungkinan adanya tekanan/beban kerja yang berlebih (*overload*) pada saat menugaskan, menetapkan indikator kinerja dan mengevaluasi kinerja individu. • Pimpinan Perusahaan melakukan evaluasi atas kinerja individu pegawai. **Enforcing accountability.** Every individual understands their role and responsibilities regarding internal control, with a focus on: • The Board of Directors establishes mechanisms to communicate and enforce individual accountability for the performance of the Internal Control System across the Company and to implement necessary corrective actions. • Management establishes performance indicators, incentives, and other rewards in accordance with the responsibilities of all levels within the Company, taking into account performance achievements, behavior, and the attainment of short-term and long-term objectives. • Company management aligns the provision of incentives and rewards with the level of fulfillment of internal control responsibilities. • Company management considers the possibility of excessive pressure or workload (overload) when assigning tasks, setting performance indicators, and evaluating individual performance. • Company management evaluates the performance of individual employees.

Penilaian Risiko
Risk Assessment

Merupakan proses yang dinamis dan berulang dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko relevan dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik pada tingkat perusahaan maupun transaksional. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komponen penilaian risiko adalah sebagai berikut:
This is a dynamic, iterative process of identifying and analyzing risks relevant to achieving the Company's objectives at both the corporate and transactional levels. The principles related to the risk assessment component are as follows:

Prinsip 6 **Principle 6**	**Menetapkan tujuan yang tepat.** Perusahaan menetapkan tujuan dengan cukup jelas sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan pengukuran risiko yang berkaitan dengan tujuan, dengan *point of focus* pada: • Tujuan operasional mencerminkan pilihan manajemen, toleransi risiko, mencakup sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan digunakan sebagai dasar alokasi sumber daya. • Tujuan pelaporan keuangan untuk eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, mempertimbangkan materialitas, dan mencerminkan transaksi/peristiwa yang sebenarnya. • Tujuan perusahaan telah mencerminkan aspek pelaporan non keuangan untuk pihak eksternal sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan analisis risiko. • Tujuan pelaporan internal memberikan informasi kepada manajemen secara akurat dan lengkap sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan informasi perusahaan, tepat waktu dan akurat serta mencerminkan transaksi yang sebenarnya. • Perusahaan menetapkan tujuan kepatuhan dan standar perilaku minimum dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku. • Tujuan perusahaan telah mencerminkan aspek pelaporan non keuangan untuk pihak eksternal sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan analisis risiko.

Penilaian Risiko
Risk Assessment

Prinsip 6 **Principle 6**	**Establishing appropriate objectives.** The Company sets objectives clearly enough to enable the identification and measurement of risks related to those objectives, with a focus on: • Operational objectives reflect management's choices and risk tolerance, encompass operational and financial performance targets, and serve as the basis for resource allocation. • External financial reporting objectives comply with applicable accounting principles, consider materiality, and reflect actual transactions/events. • The Company's objectives incorporate aspects of non-financial reporting for external parties, enabling the identification and analysis of risks. • Internal reporting objectives provide management with accurate and complete information, in accordance with business processes and the Company's information needs, in a timely and accurate manner, and that reflects actual transactions. • The Company establishes compliance objectives and minimum standards of conduct in accordance with applicable laws and regulations. • The Company's objectives have incorporated non-financial reporting aspects for external parties, thereby enabling risk identification and analysis. • The Company's objectives have incorporated aspects of internal reporting, thereby enabling risk identification and analysis. • The Company's objectives have incorporated compliance aspects, thereby enabling risk identification and analysis.
Prinsip 7 **Principle 7**	**Mengidentifikasi dan menganalisis risiko.** Perusahaan melakukan identifikasi risiko-risiko diseluruh unit organisasi dan menganalisisnya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola (respon), dengan *point of focus* pada: • Perusahaan mengidentifikasi dan mengukur risiko secara menyeluruh, baik risiko tingkat korporat, anak perusahaan, divisi, unit operasi, dan tingkat fungsional. • Menganalisa faktor internal dan eksternal. • Melibatkan tingkatan manajemen yang tepat dalam proses penilaian risiko. • Mengukur tingkat signifikansi risiko yang teridentifikasi. • Menentukan respon risiko. **Identify and analyze risks.** The Company identifies risks across all organizational units and analyzes them as a basis for determining how those risks should be managed, with a focus on: • The Company comprehensively identifies and measures risks at the corporate, subsidiary, division, operational unit, and functional levels. • Analyzing internal and external factors. • Involving the appropriate management levels in the risk assessment process. • Measuring the significance of identified risks. • Determining the risk response.
Prinsip 8 **Principle 8**	**Melakukan penilaian atas risiko kecurangan.** Perusahaan melakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan potensi risiko kecurangan (*fraud*) yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, dengan *point of focus* pada: • Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam pelaporan, kemungkinan hilangnya aset, korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya yang dapat terjadi. • Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor insentif dan tekanan. • Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko terkait peluang/kesempatan. • Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko terkait sikap dan tindakan yang tidak rasional. **Assessing the risk of fraud.** The Company performs a risk assessment by considering the potential for fraud that could affect the achievement of objectives, with a focus on: • The fraud risk assessment considers the potential for fraud in reporting, the possibility of asset loss, corruption, and other irregularities. • The fraud risk assessment considers incentive and pressure factors. • The fraud risk assessment is conducted by considering risk factors related to opportunities. • Fraud risk assessment is performed by considering risk factors related to irrational attitudes and actions.

Penilaian Risiko
Risk Assessment

Prinsip 9 **Principle 9**	**Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan.** Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • Proses penilaian risiko telah mempertimbangkan adanya perubahan peraturan, perekonomian, dan lingkungan fisik di mana perusahaan beroperasi. • Perusahaan mempertimbangkan adanya dampak potensial perubahan lingkungan bisnis, seperti lini bisnis baru yang secara dramatis merubah komposisi lini bisnis yang ada, investasi atau divestasi operasi bisnis, pertumbuhan yang cepat, ketergantungan pada geografi asing, dan teknologi baru, yang mempengaruhi penerapan sistem pengendalian internal. • Perusahaan mempertimbangkan adanya dampak perubahan kepemimpinan dan perubahan pandangan atau filosofi terhadap sistem pengendalian internal. **Identify and analyze significant changes.** The Company identifies and assesses changes that could significantly affect the internal control system, with a focus on: • The risk assessment process has considered changes in regulations, the economy, and the physical environment in which the Company operates. • The Company considers the potential impact of changes in the business environment, such as new business lines that dramatically alter the composition of existing business lines, investments in or divestments of business operations, rapid growth, reliance on foreign geographies, and new technologies, which affect the implementation of the internal control system. • The Company considers the impact of leadership changes and shifts in perspective or philosophy on its internal control system.

Aktivitas Pengendalian
Control Activities

Merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan dalam memitigasi risiko untuk mencapai tujuan dapat dilaksanakan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komponen aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:
These are actions established through policies and procedures to ensure that directives for mitigating risks to achieve objectives can be implemented. The principles related to the control activities component are as follows:

Prinsip 10 **Principle 10**	**Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian.** Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima, dengan *point of focus* pada: • Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa respon untuk memitigasi risiko dilaksanakan. • Manajemen mempertimbangkan pengaruh dari lingkungan, kompleksitas perusahaan, sifat dan ruang lingkup operasi dan karakteristik organisasi dalam pemilihan aktivitas pengendalian. • Manajemen menentukan bisnis proses yang membutuhkan aktivitas pengendalian. • Manajemen mengevaluasi berbagai aktivitas pengendalian yang mencakup berbagai pengendalian dan pendekatan yang berimbang untuk memitigasi risiko, misalnya mempertimbangkan pengendalian manual atau otomatis dan pengendalian preventif atau detektif. • Manajemen mempertimbangkan aktivitas pengendalian pada berbagai tingkatan dalam perusahaan. • Manajemen melakukan pemisahan fungsi dan jika tidak memungkinkan mencari aktivitas pengendalian lainnya. **Selecting and developing control activities.** The Company selects and develops control activities that support risk mitigation to an acceptable level, with a focus on: • Control activities help ensure that responses to mitigate risks are implemented. • Management considers the environment, the Company's complexity, the nature and scope of operations, and organizational characteristics when selecting control activities. • Management identifies business processes that require control activities. • Management evaluates various control activities that encompass a balanced range of controls and approaches to mitigate risk, including manual and automated controls, as well as preventive and detective controls. • Management considers control activities at various levels within the Company. • Management implements segregation of duties and, if this is not feasible, seeks other control activities.

Prinsip 11 **Principle 11**	**Memilih dan Mengembangkan Pengendalian Umum atas Teknologi.** Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Perusahaan memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan, dengan *point of focus* pada: • Manajemen memahami dan menetapkan ketergantungan dan keterkaitan antara proses bisnis perusahaan, pengendalian aplikasi dan pengendalian umum teknologi. • Manajemen telah memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur Teknologi lnformasi (Tl). • Manajemen telah memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang dirancang dan dilaksanakan untuk membatasi hak akses ke suatu Tl sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk melindungi aset perusahaan dari ancaman ekstemal dan internal (penyalahgunaan hak istimewa *segregation of duties* di Tl). • Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait proses pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan Tl. **Selecting and Developing General Controls over Technology.** Selecting and developing general controls over technology. The Company selects and develops general controls over technology to support the achievement of objectives, with a focus on: • Management understands and establishes the dependencies and interrelationships between the Company's business processes, application controls, and general technology controls. • Management has selected and developed control activities over the Information Technology (IT) infrastructure. • Management has selected and developed control activities designed and implemented to restrict access rights to IT in accordance with authority and responsibility to protect the Company's assets from external and internal threats (abuse of privileges and segregation of duties in IT). • Management selects and develops control activities related to the procurement, development, and maintenance of IT.
Prinsip 12 **Principle 12**	**Kebijakan dan Prosedur.** Perusahaan mendefinisikan dan menjabarkan aktivitas pengendaliaan dalam bentuk kebijakan dan prosedur, dengan *point of focus* pada: • Manajemen menetapkan aktivitas pengendalian yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. • Manajemen menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian pada manajemen (atau personil lainnya yang ditunjuk) pada unit operasi atau fungsi di mana risiko terkait berada. • Aktivitas pengendalian telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai kebijakan dan prosedur. • Atas permasalahan yang ditemukan dari hasil pelaksanaan aktivitas pengendalian, personil yang bertanggung jawab (pemilik proses) melakukan investigasi dan melakukan perbaikan aktivitas pengendalian. • Aktivitas proses bisnis dilakukan oleh personil yang kompeten dan bertanggungjawab. • Manajemen telah melakukan reviu atas relevansi serta efektifitas kebijakan dan prosedur secara berkala. **Policies and Procedures.** The Company defines and details control activities in the form of policies and procedures, with a focus on: • Management establishes control activities documented in policies and procedures. • Management assigns responsibility and accountability for control activities to management (or other designated personnel) within the operational units or functions where the associated risks reside. • Control activities are carried out on time in accordance with policies and procedures. • Regarding issues identified from the results of control activities, the responsible personnel (process owners) conduct investigations and make improvements to the control activities. • Business process activities are performed by competent and responsible personnel. • Management has periodically reviewed the relevance and effectiveness of policies and procedures.

Informasi dan Komunikasi
Information and Communication

lnformasi diperlukan bagi perusahaan dalam melaksanakan sistem pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan. Komunikasi, baik internal dan eksternal, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian internal sehari-hari. Komunikasi membantu personel untuk memahami tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komponen informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:
Information is necessary for the Company to implement an internal control system to support the achievement of objectives. Communication, both internal and external, provides the information needed to carry out day-to-day internal controls. Communication helps personnel understand their internal control responsibilities in achieving objectives. The principles related to the information and communication component are as follows:

Informasi dan Komunikasi
Information and Communication

Prinsip 13 **Principle 13**	**Penggunaan Informasi yang Relevan** Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • Manajemen menetapkan kebijakan dan langkah atas proses dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi dan diharapkan mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal lain serta pencapaian tujuan perusahaan. • Sistem informasi yang ada mencukupi dalam perolehan data internal dan eksternal. • Kecukupan sistem informasi untuk memproses dan merubah data menjadi informasi. • Kecukupan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang tepat waktu, *up to date*, lengkap, mudah diakses, aman, dapat diverifikasi dan terpelihara. • Kecukupan kebijakan dan langkah manajemen dalam menyeimbangkan antara biaya untuk menghasilkan informasi yang cukup dan berkualitas dengan manfaat terhadap pencapaian tujuan perusahaan. **Use of Relevant Information** The Company obtains or generates and uses relevant and high-quality information to support the functioning of internal control, with a focus on: • Management establishes policies and procedures for identifying information needs, which are expected to support the functioning of other internal control components and the achievement of the Company's objectives. • The existing information system is sufficient for collecting internal and external data. • The adequacy of the information system in processing and transforming data into information. • The adequacy of the information system in producing information that is timely, up-to-date, complete, easily accessible, secure, verifiable, and well-maintained. • The adequacy of management policies and measures in balancing the costs of producing sufficient and high-quality information with the benefits of achieving the Company's objectives.
Prinsip 14 **Principle 14**	**Komunikasi yang efektif di internal perusahaan.** Perusahaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • lnformasi pengendalian internal dikomunikasikan agar seluruh pegawai memahami dan menjalankan tanggung jawab pengendalian internal. • Terdapat komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris sehingga keduanya memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan. • Terdapat saluran komunikasi yang terpisah misalnya saluran langsung *whistleblower*, yang dibuat dan dapat digunakan dengan aman sehingga komunikasi yang bersifat rahasia atau anonim dapat dilakukan secara efektif. • Metode komunikasi yang digunakan telah mempertimbangkan waktu, pengguna dan sifat informasi. **Effective internal communication within the Company.** The Company communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control, which are necessary to support the functioning of internal control, with a focus on: • Internal control information is communicated so that all employees understand and carry out their internal control responsibilities. • There is communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners so that both obtain the information needed in accordance with their respective roles in the Company. • There are separate communication channels, such as a direct whistleblower channel, that are established and can be used securely to enable confidential or anonymous communication. • The communication methods used take into account the timing, the users, and the nature of the information.
Prinsip 15 **Principle 15**	**Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal.** Perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi pengendalian internal, dengan *point of focus* pada: • Perusahaan melakukan komunikasi atas informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pihak eksternal, termasuk pemegang saham, mitra, pemilik, pemerintah, pelanggan, analis keuangan dan pihak eksternal lain. • Perusahaan memiliki saluran komunikasi terbuka, yang memungkinkan masukan dari pelanggan, konsumen, supplier, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan pihak lain untuk memberikan informasi yang relevan kepada manajemen dan direksi. • lnformasi relevan yang dihasilkan dari berbagai pihak eksternal, dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris. • Saluran komunikasi terpisah seperti *Whistleblowing System* (WBS) Hotline disediakan sebagai mekanisme yang aman bagi pelapor (pihak ekstemal) kejadian yang bersifat rahasia. • Metode komunikasi yang ditetapkan mempertimbangkan waktu, pengguna dan sifat komunikasi serta persyaratan peraturan/hukum.

Informasi dan Komunikasi
Information and Communication

Prinsip 15 **Principle 15**	**Effective communication with external parties.** The Company communicates with external parties regarding matters affecting internal control, with a focus on: • The Company communicates relevant and timely information to external parties, including shareholders, partners, owners, the government, customers, financial analysts, and other external parties. • The Company maintains open communication channels, enabling feedback from customers, consumers, suppliers, external auditors, the government, financial analysts, and other parties to provide relevant information to management and the board of directors. • Relevant information generated by various external parties is communicated to the Board of Commissioners. • Separate communication channels, such as the Whistleblowing System (WBS) Hotline, are provided as a secure mechanism for whistleblowers (external parties) to report confidential incidents. • The established communication methods take into account the timing, users, and nature of the communication, as well as regulatory and legal requirements.

Pemantauan (*Monitoring*)
Monitoring

Merupakan proses berkelanjutan untuk mengevaluasi dan memelihara kualitas sistem pengendalian internal. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan komponen pemantauan adalah sebagai berikut:
This is an ongoing process to evaluate and maintain the quality of the internal control system. The principles related to the monitoring component are as follows:

Prinsip 16 **Principle 16**	**Melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah.** Perusahaan memilih, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal "ada" (*Present*) dan "berfungsi" (*Functioning*), dengan *point of focus* pada: • Manajemen melakukan monitoring pengendalian internal melalui evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*) dan evaluasi terpisah (*separate evaluation*) secara seimbang. • Manajemen mempertimbangkan kecepatan perubahan dalam bisnis dan proses bisnis ketika memilih dan mengembangkan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. • Desain dan kondisi sistem pengendalian internal saat ini digunakan sebagai dasar untuk membangun evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. • Manajemen menjamin bahwa evaluator yang melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi. • Evaluasi berkelanjutan melekat dalam proses bisnis dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi proses bisnis. • Manajemen menyesuaikan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah berdasarkan risiko. • Evaluasi terpisah yang dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik yang obyektif. **Conduct continuous and/or separate evaluations.** The Company selects, develops, and implements ongoing evaluation and/or separate evaluation activities to ensure that internal control components are “present” and “functioning,” with a focus on: • Management monitors internal controls through a balanced approach of ongoing evaluation and separate evaluation. • Management considers the pace of change in the business and business processes when selecting and developing ongoing evaluations and separate evaluations. • The design and current status of the internal control system serve as the basis for ongoing and separate evaluations. • Management ensures that evaluators conducting ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated. • Continuous evaluation is embedded in business processes and adapts to changes in those processes. • Management adjusts the scope and frequency of separate evaluations based on risk. • Separate evaluations are conducted periodically to provide objective feedback.

Pemantauan (*Monitoring*)
Monitoring

Prinsip 17 **Principle 17**	**Mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi pengendalian.** Perusahaan mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan pengendalian internal tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan sebagaimana mestinya, termasuk kepada Direksi dan Dekom; dengan *point of focus* pada: • Direksi dan Dekom telah mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. • Kelemahan pengendalian internal telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan dan kepada Direksi serta Dekom. • Direksi memantau apakah kelemahan pengendalian internal telah diperbaiki sesuai rekomendasi dan tepat waktu. **Evaluate and communicate control deficiencies.** The Company evaluates and communicates internal control deficiencies on time to the parties responsible for taking appropriate corrective actions, including the Board of Directors and the Audit Committee, with a focus on: • The Board of Directors and the Audit Committee have evaluated and followed up on the results of the ongoing evaluation and separate evaluations. • Internal control weaknesses have been communicated to the parties responsible for making corrections and to the Board of Directors and the Audit Committee. • The Board of Directors monitors whether internal control weaknesses have been corrected in accordance with recommendations and on time.

Evaluasi dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Tahun 2025

Evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) dilaksanakan sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (non audit) Biro SPI. Dilaksanakannya evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) pada dasarnya mengacu kepada Per-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 28.

Tujuan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, adalah memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Perusahaan telah efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, dan efisiensi/efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

Evaluasi penerapan SPIP dilakukan dengan menilai 5 (lima) Komponen Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Prinsip dan 80 (delapan puluh) *Point of Focus*/Atribut, mengacu kepada Pedoman Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL yang dikembangkan oleh BPKP. Berikut disampaikan keterangan terkait penilaian Sistem Pengendalian Internal untuk tahun 2025.

Evaluation and Assessment of Internal Control System in 2025

Evaluation of the effectiveness of the Company's Internal Control System (SPIP) is carried out by the Annual Audit Work Program (non-audit) of the SPI Bureau. The implementation of the evaluation of the effectiveness of the Company's Internal Control System (SPIP) refers to Per-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises Article 28.

The purpose of evaluating the implementation of the Company's Internal Control System is to assure the Board of Directors in providing assertions regarding the effectiveness of the Internal Control System and providing assurance to other stakeholders that the implementation of the Internal Control System in the Company has been effective in achieving the expected objectives, namely compliance with applicable laws and regulations, the availability of correct, complete and timely financial and management information, and the efficiency/effectiveness of the Company's business activities.

The evaluation of SPIP implementation is carried out by assessing five Components of the Company's Internal Control System, which consists of seventeen Principles and 80 Points of Focus/Attributes. The guidelines for Evaluating the Implementation of the Internal Control System of SOE/ROE/BUL developed by BPKP are used. The following information is submitted regarding the assessment of the Internal Control System for 2025.

Penilaian Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025
Internal Control System Assessment in 2025

Dasar Metodologi Methodology Basis	:	Pedoman Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Guidelines for Evaluating the Implementation of the Internal Control System of SOE/ROE/BUL developed by the Development Finance Comptroller (BPKP)
Penilai Assessor	:	Biro SPI/Internal Audit SPI/Internal Audit Office
Penugasan Assignment	:	Surat Tugas Direktur Utama No. 044/M/PP/DU/2025 tanggal 2 Desember 2025 President Director Assignment Letter No. 044/M/PP/DU/2025 dated December 2, 2025
Pelaksanaan Implementation	:	Pekan 49 tahun 2025 (8 Desember 2025) sampai dengan pekan 8 tahun 2026 (27 Februari 2026). Week 49 of 2025 (December 8, 2025) through Week 8 of 2026 (February 27, 2026).

Hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal tahun 2025 menjadi dasar bagi Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko dalam memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan tahun buku 2025. Metodologi evaluasi dilakukan dengan: review dokumen dan kuesioner. Rancangan kuesioner disusun oleh Tim BPKP. Jumlah responden yang ikut serta dalam evaluasi SPIP tahun 2025 sesuai kriteria yang diberikan oleh Tim BPKP adalah sebanyak 304 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

The Internal Control System assessment results in 2025 are the basis for the President Director and Director of Finance and Risk Management certifying the Company's annual financial statements for the 2025 fiscal year. The evaluation methodology is carried out by document review and questionnaire. The draft questionnaire was prepared by the BPKP Team. The number of respondents who participated in the 2025 SPIP evaluation per the criteria provided by the BPKP Team was 304 employees with the following details:

Peserta Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025
Internal Control System Evaluation Participants in 2025

No	Uraian/Jabatan Description/Position	Kuesioner yang disebar Distributed Questionnaires	Jawaban yang diterima Collected Answers	Persentase Pengembalian Kuesioner Return Percentage Questionnaire
1	Direksi Board of Directors	6	6	100%
2	Kepala Divisi (diluar Kepala SPI) Head of Division (excluding Head of SPI)	13	13	100%
3	Personil Manajemen Risiko dan Fasilitator Manajemen Risiko masing-masing unit Risk Management Personnel and Risk Management Facilitators of each unit	78	78	100%
4	Staff SPI/Auditor (Include Kepala SPI) Personal-SPI/Auditor (Including head of SPI)	18	18	100%
5	Karyawan Employees	189	189	100%
	Jumlah **Total**	**304**	**304**	**100%**

Kesimpulan hasil penilaian tingkat kecukupan SPIP dikategorikan dalam 5 (lima) kategori dengan rentang capaian skor efektivitas seperti terlihat di bawah ini.

The conclusion of the SPIP adequacy level assessment results is divided into five categories, with a range of effectiveness score achievements, as shown below.

Tingkat Level	Rentang Skor Capaian Aktual Tingkat Pemenuhan Actual Achievement Score Range of Fulfillment Level	Predikat Predicate
1	0 < skor ≤ 50 0 < score ≤ 50	Tifak Efektif Not Effective
2	50 < skor ≤ 60 50 < score ≤ 60	Kurang Efektif Not Sufficiently Effective
3	60 < skor ≤ 75 60 < score ≤ 75	Cukup Efektif Sufficiently Effective
4	75 < skor ≤ 90 75 < score ≤ 90	Efektif Effective
5	90 < skor ≤100 90 < score ≤100	Sangat Efektif Very Effective

Hasil evaluasi telah dibahas dengan pihak-pihak terkait, dan dapat disimpulkan bahwa kecukupan SPIP pada PTPP tahun 2025 mencapai nilai 90,93 atau berada pada tingkat pemenuhan "Sangat Efektif", yaitu Pengendalian Intern telah diterapkan, tidak terdapat penyimpangan dan kelemahan yang signifikan dalam Sistem Pengendalian Intern. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 90,76 dengan kategori "Sangat Efektif". Masih terdapat *area of improvement* yang perlu ditindaklanjuti Manajemen PTPP untuk mencapai atau mendekati *best practices*.

The evaluation results have been discussed with the relevant parties. It can be concluded that the adequacy of SPIP at PTPP in 2025 reaches a value of 90.93 or is at the level of fulfillment of "Very Effective" Internal Control has been implemented. There are no significant deviations or weaknesses in the Internal Control System. This value is compared to 2024 when it was 90.76, under the "Very Effective" category. PTPP management still needs to follow up on areas of improvement to achieve or approach best practices.

Berikut adalah rincian capaian penerapan SPIP per komponen untuk tahun 2024 dan 2025.

The following are details of SPIP implementation achievements per component for 2024 and 2025.

Rincian Capaian Penerapan SPIP 2025

Details of SPIP Implementation Outcomes in 2025

No	Komponen Penerapan SPIP Components of SPIP Implementation	Bobot Weight	Nilai Score	% Tingkat Capaian % Achievement Rate
			Tahun 2025 In 2025	
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	25,00	22,69	90,78
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	25,00	22,07	88,29
3	Kegiatan Pengendalian Control Activities	20,00	18,09	90,43
4	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	17,50	16,11	92,04
5	Pemantauan Monitoring	12,50	11,97	95,74
	Jumlah **Total**	**100,00**	**90,93**	
	Predikat **Predicate**		**"Sangat Efektif"** **"Very Effective"**	

Rincian Capaian Penerapan SPIP 2024
Details of SPIP Implementation Outcomes in 2024

No	Komponen Penerapan SPIP Components of SPIP Implementation	Bobot Weight	Nilai Score	% Tingkat Capaian % Achievement Rate
			Tahun 2024 In 2024	
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	25,00	22,20	88,78
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	25,00	22,09	88,37
3	Kegiatan Pengendalian Control Activities	20,00	18,18	90,91
4	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	17,50	16,32	93,24
5	Pemantauan Monitoring	12,50	11,97	95,76
	Jumlah **Total**	**100,00**	**90,76**	
	Predikat **Predicate**		**"Sangat Efektif"** **"Very Effective"**	

Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi terhadap praktik penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), yang menjadi saran bagi Manajemen agar melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian
   a. Managemen agar melakukan *review* secara berkala atas pedoman kode etik (*Code of conduct*) dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      - Melakukan pembaruan pedoman agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2024;
      - Menambahkan ketentuan dalam pedoman kode etik pada etika kerja, terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme dan anti kecurangan;
      - Menyelaraskan pedoman kode etik dengan pedoman internal lainnya seperti C*ompany Manual* Sistem Manajemen Anti Kecurangan;
      - Menambahkan mekanisme evaluasi dan monitoring atas implementasi dan kepatuhan terhadap kode etik.

Based on the evaluation results in 2025, there are several recommendations on the practice of implementing the Company's Internal Control System (SPIP), which are suggestions for Management to take steps to improve or refine as follows:

1. Control Environment
   a. Management should conduct periodic reviews of the Code of Conduct and consider the following:
      - Update the guidelines to align with the latest laws and regulations, including Law No. 16 of 2025 and the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2024;
      - Incorporating provisions into the Code of Conduct regarding work ethics, specifically concerning money laundering, terrorist financing, and anti-fraud measures;
      - Aligning the code of conduct guidelines with other internal guidelines, such as the Anti-Fraud Management System Company Manual;
      - Adding mechanisms for evaluating and monitoring the implementation of and compliance with the code of ethics.

b. Manajemen agar melakukan reviu dan pembaruan *job profile* secara berkala agar selaras dengan perkembangan organisasi, perubahan proses bisnis, serta kebutuhan Perusahaan, sehingga pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan pemisahan tugas tetap memadai dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
c. Manajemen agar menyusun dan menetapkan kebijakan/prosedur terkait dengan pengelolaan SDM sejak proses rekrutmen sampai dengan pemberhentian karyawan, yang mencakup pula karyawan kontrak (KKWT).
d. Manajemen agar mengesahkan dan mengimplementasikan kebijakan/prosedur terkait *Work Load Analysis* (WLA) guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan efesiensi operasional serta memastikan setiap karyawan memiliki beban kerja yang proporsional dan sesuai dengan kapasitasnya.

2. Penilaian Risiko
a. Manajemen agar menetapkan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan terencana dalam RKAP atau rencana kerja tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan operasional Perusahaan, termasuk penetapan kebutuhan kompetensi dan jumlah personel yang dibutuhkan pada setiap unit kerja.

b. Management should periodically review and update job profiles to align them with organizational developments, changes in business processes, and the Company's needs, so that the delegation of authority, responsibilities, and segregation of duties remain adequate in supporting the effectiveness of internal controls.
c. Management should develop and establish policies/procedures related to human resources management, from the recruitment process through to employee termination, which also covers contract employees (KKWT).
d. Management is requested to approve and implement policies and procedures related to Workload Analysis (WLA) to create a healthy work environment, improve operational efficiency, and ensure that every employee has a workload that is proportionate to and appropriate for their capacity.

2. Risk Assessment
a. Management shall establish adequate and planned Human Resources (HR) allocations in RKAP or annual work plan to support the achievement of the Company's operational objectives, including the determination of competency requirements and the number of personnel needed in each work unit.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Hasil evaluasi yang telah disampaikan di atas memberikan gambaran tentang kecukupan Sistem Pengendalian Internal PTPP. Melalui hasil penilaian tersebut, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sistem Pengendalian Internal PTPP telah mencukupi dan tidak terdapat penyimpangan dan kelemahan yang signifikan dalam Sistem Pengendalian Internal PTPP tersebut.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Company's Internal Control System

The evaluation results submitted above provide an overview of the adequacy of PTPP's Internal Control System. Based on the assessment results, the Board of Directors and Commissioners think the System is adequate, with no significant deviations or weaknesses.

Manajemen Risiko Perusahaan
Risk Management



Dalam menjalankan pengelolaan perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan melindungi nilai bagi perusahaan, PTPP menyadari bahwa mengelola risiko melalui manajemen risiko merupakan hal yang harus dilakukan oleh Perusahaan. Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk dapat melakukan proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang ditemui dalam pengelolaan bisnis dalam mencapai target perusahaan. Risiko dalam bisnis dapat diartikan sebagai sebuah ketidakpastian. PTPP menerapkan manajemen risiko sebagai sebuah proses perencanaan, pengaturan, pengelolaan, dan kontrol aktivitas untuk dapat meminimalisir risiko dihadapi.

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di seluruh organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

In running the Company's management to provide added value and protect value for the Company, PTPP realizes that managing risk through risk management is something that the Company must do. Risk management is an approach used to identify, analyze, assess, control, avoid, minimize, or even eliminate risks encountered in business management. Risk in business can be interpreted as uncertainty. PTPP implements risk management as a process of risk management planning, organizing, managing, and controlling activities to minimize the risks faced.

To improve risk management capabilities throughout the organization, a comprehensive risk management implementation policy is emphasized through management commitment following applicable regulations.

Kebijakan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di PTPP telah dimulai sejak tahun 2004, dan sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, pada bulan Juni tahun 2015, Perusahaan menetapkan kebijakan manajemen risiko sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Pada Tanggal 20 Juni 2024 melaui Surat Keputusan Direksi No. 075/SK/PP/DIR/2024, Kebijakan Manajemen Risiko direviu kembali dengan menambahkan unsur *Three Lines Model*, pilar penerapan manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

Kebijakan manajemen risiko berisi maksud dan arah penerapan manajemen risiko Perusahaan dan tugas masing-masing unit dalam pengelolaan risiko Perusahaan. Kebijakan manajemen risiko secara jelas mengatur bahwa semua pegawai bertanggung jawab dan akuntabel untuk mengelola risiko masing-masing secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan manajemen sebagai pemegang akuntabilitas tertinggi dalam pengelolaan risiko Perusahaan, memberikan arahan strategis dan menetapkan parameter risiko.

Perusahaan juga memiliki Pedoman Manajemen Risiko berupa *Company Manual* Manajemen Risiko No. PP/CM/M2-045, *Standard Operating Procedure* (SOP) Implementasi Manajemen Risiko No. PP/SOP/M2-082, *Work Instruction* Evaluasi Manajemen Risiko dengan *Risk Maturity Index* (RMI) No. PP/WI/M2-069, *Work Instruction* Pelaporan Manajemen Risiko No.PP/WI/M2-046, *Work Instruction* Penyusunan Profil Risiko No. PP/DIVMR&LEGAL/W/001, *Work Instruction* Penyusunan Profil Risiko Penyuapan No. PP/DIVMR&LEGAL/W/004 yang bertujuan menyediakan arahan dan panduan bagi pelaksanaan penerapan manajemen risiko korporasi dan memberikan pengetahuan manajemen risiko sebagai upaya dalam mengelola ketidakpastian bisnis dan mengoptimalkan peluang. Seluruh pedoman dan kebijakan ditandatangani oleh semua Direksi yang menunjukan adanya komitmen, kesungguhan dan kepedulian Direksi untuk pentingnya manajemen risiko dalam keberlangsungan perusahaan.

Pembentukan Unit Manajemen Risiko

Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko secara independen terpisah dari fungsi lini pertama sejak 10 Juni 2024 sesuai dengan penerapan fungsi *three lines models* melalui Surat Keputusan Direksi No. 044/SK/PP/DIR/2024.

Risk Management Policy

The implementation of risk management at PTPP began in 2004. As part of the Company's mandate and commitment to risk management, the Company established a risk management policy in June 2015, signed by the President Director.

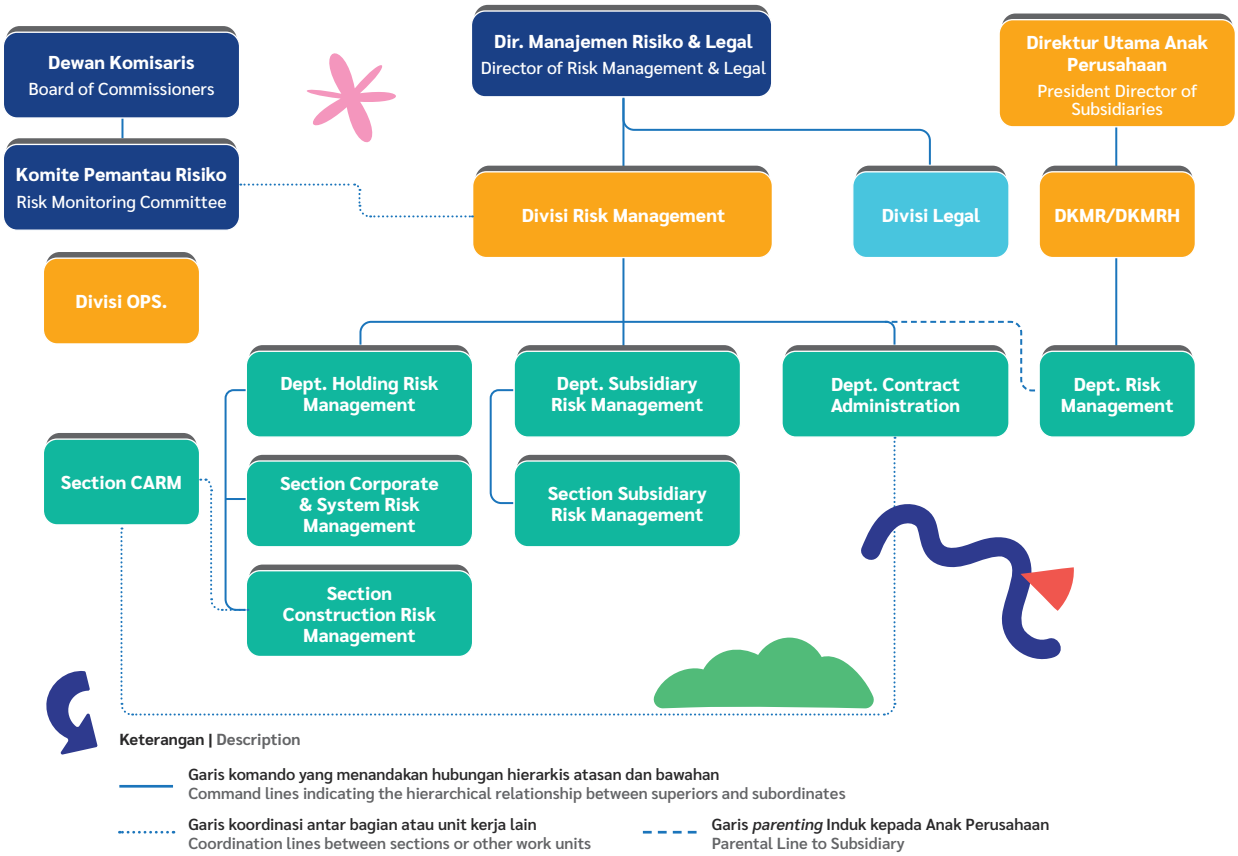
On June 20, 2024, through Board of Directors Decree No. 075/SK/PP/DIR/2024, the Risk Management Policy was reviewed and revised to include the Three Lines Model, pillars of risk management implementation, and risk management principles in accordance with SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

The risk management policy contains the purpose and direction of the Company's risk management implementation and the duties of each unit in managing the Company's risks. It stipulates that all employees are responsible and accountable for managing their respective risks consistently and sustainably. Meanwhile, management, as the highest accountability holder in the Company's risk management, provides strategic direction and sets risk parameters.

The Company also has Risk Management Guidelines in Risk Management Company Manual No. PP/CM/M2-045, Risk Management Implementation Standard Operating Procedure No. PP/SOP/M2-082, Work Instruction Risk Management Evaluation with Risk Maturity Index (RMI) No. PP/WI/M2-069, Work Instruction Risk Management Reporting No. PP/WI/M2-046, Work Instruction Risk Profile Preparation No. PP/DIVMR&LEGAL/W/001, and No. WI Preparation of Bribery Risk Profile No. PP/DIVMR&LEGAL/W/004 which aim to provide direction and guidance for implementing corporate risk management and provide risk management knowledge to manage business uncertainty and optimize opportunities. All guidelines and policies are signed by the Board of Directors, which shows the commitment, seriousness, and concern of the Board of Directors for the importance of risk management in the sustainability of the Company.

Establishment of a Risk Management Unit

The Company has established a Risk Management Division independently separate from the first line function since June 10, 2024, following the implementation of the three lines model function through the Board of Directors Decree No. 044/SK/PP/ DIR/2024.



Berdasarkan Piagam Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada 13 Desember 2024, Divisi Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang minimal sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Memantau profil risiko, peta risiko, realisasi perhitungan risiko inheren dan risiko residual dan realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya;
3. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko;
5. Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko kepada Direktur Manajemen Risiko dan Legal dan Komite Pemantau Risiko secara berkala triwulanan.

Divisi Manajemen Risiko memberikan rekomendasi atas penilaian risiko yang dibuat oleh setiap unit berdasarkan informasi terbaik dan terkini untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen. Memastikan proses monitoring manajemen risiko dilaksanakan rutin setiap bulan untuk seluruh lini perusahaan dalam rangka meningkatkan mitigasi risiko

Based on the Risk Management Charter stipulated by the Company on December 13, 2024, the Risk Management Division has the following minimum duties and authorities:

1. Monitor the implementation of the Risk Management strategy that has been approved by the Board of Directors;
2. Monitor the risk profile, risk map, realization of inherent risk calculations and residual risk, and realization of the implementation of risk treatment and costs;
3. Periodically review the Risk Management process;
4. Evaluate the accuracy of the model and the validation of the data used to measure risk;
5. Provide recommendations to the first line and/or the Risk Monitoring Committee according to their authority; and
6. Prepare and submit quarterly risk management reports to the Director of Risk Management and Legal and the Risk Monitoring Committee.

The Risk Management Division provides recommendations on risk assessments made by each unit based on the best and most up-to-date information to provide input for strategic management decision making. Ensuring that the risk management monitoring process is carried out monthly across all lines of the company to improve risk mitigation is also a priority. The implementation of

juga dilakukan. Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis maupun operasional Perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan GCG.

Risk Management is an integral part of the Company's strategic and operational planning processes, reflecting the implementation of GCG.

Peta Jalan Manajemen Risiko

Risk Management Roadmap



2024	Tahun 2024 merupakan fase penguatan kebijakan dan sistem manajemen risiko, hal ini karena pada tahun ini difokuskan kepada perbaikan sistem dan kebijakan penerapan manajemen risiko di Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang telah dirubah menjadi BP BUMN No. PER2/MBU/03/2023. Oleh karena itu Divisi Manajemen Risiko melakukan pembaruan metodologi, proses dan sistem yang diterapkan di Perusahaan, melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko ke semua unit kerja dan pemilik risiko di Perusahaan untuk meningkatkan budaya risiko di Perusahaan. Penyiapan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh lini Perusahaan. Budaya risiko dikembangkan dengan adanya program rutin dalam meningkatkan kompetensi risiko di seluruh pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang sejalan dengan infrastruktur yang membaik diharapkan manajemen risiko dapat meningkatkan kontrol dalam mencapai kinerja bagi perusahaan di seluruh proses bisnis Perusahaan, mulai dari konstruksi dan entitas anak serta integrasi risiko di seluruh bisnis. The year 2024 is a phase of strengthening risk management policies and systems, as this year's focus is on improving the risk management implementation system and policies at the Company in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation, which has been amended to become BP BUMN No. PER2/MBU/03/2023. Therefore, the Risk Management Division is updating the methodologies, processes, and systems implemented across the Company, and conducting risk management socialization and training for all work units and risk owners to improve the Company's risk culture. Infrastructure is being prepared to support the implementation of integrated risk management across all lines of the Company. A risk culture is being developed through regular programs to improve risk competence among all employees. With improved infrastructure and increased employee competence, it is hoped that risk management will enhance control and performance for the Company across all business processes, from construction and subsidiaries to risk integration across all businesses.
2025	Pada fase ini, Divisi Manajemen Risiko meningkatkan kualitas aplikasi manajemen risiko sebagai salah satu skenario perencanaan yang terautomasi dengan menambah unsur *early warning system*. *Early warning system* sebagai tanda awal dari risiko terjadi, sehingga *value* yang diharapkan tercapai tidak bergeser. Peningkatan sistem integrasi dalam prioritas risiko dilakukan dengan meningkatkan analisa data historis dilakukan dengan peningkatan integrasi sistem di seluruh Perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan manajemen risiko sebagai sinyal dalam terjadinya risiko akan lebih akurat. Melalui evaluasi dan monitoring yang rutin atas penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dilakukan diharapkan penerapan manajemen risiko mencapai fase praktik yang baik dengan nilai maksimal. Pembaharuan Aplikasi mengikuti peraturan terbaru telah selesai dilakukan dengan hadirnya Aplikasi PPRISMA (PP Risk Management) menggantikan MANRISK 22.1. At this stage, the Risk Management Division improves the quality of risk management applications as one of the automated planning scenarios by adding an early warning system. The early warning system serves as an early indicator of risk, so that the expected value is not shifted. Improvements to the integration system for risk prioritization are achieved by enhancing historical data analysis and integrating the system across the Company. This is expected to improve the implementation of risk management by making risk signals more accurate. Through regular evaluation and monitoring of the implementation of Enterprise Risk Management (ERM), it is hoped that the implementation of risk management will reach a good practice phase with maximum value. Application updates in accordance with the latest regulations have been completed with the introduction of the PPRISMA (PP Risk Management) application, replacing MANRISK 22.1.
2026	Pada tahun 2026, pengembangan manajemen risiko difokuskan pada pembangunan fondasi tata kelola dan integrasi ERM yang kuat dan konsisten dengan proses bisnis inti perusahaan. Upaya ini diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan ERM dan prinsip GCG dengan siklus perencanaan bisnis dan RKAP, sehingga manajemen risiko tidak lagi berdiri sebagai fungsi pendukung semata, tetapi menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan operasional dan manajerial sehari-hari. Selain itu, penguatan peran dan akuntabilitas *Three Lines Model* dilakukan secara menyeluruh di seluruh lini perusahaan untuk memastikan kejelasan tanggung jawab pengelolaan risiko. Penyempurnaan indikator risiko utama (KRI), mekanisme pelaporan dan eskalasi lintas unit, serta pengembangan sistem digital ERM menjadi landasan bagi konsistensi, transparansi dan efektivitas pengelolaan risiko. Pada fase ini, penggunaan *loss event* dan *root cause insight* juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan proses dan mitigasi risiko secara berkelanjutan. In 2026, risk management development focuses on building a strong, consistent ERM governance and integration foundation aligned with the company's core business processes. These efforts aim to align ERM policies and GCG principles with the business planning and RKAP cycles, so that risk management no longer stands as a supporting function but becomes an integral part of daily operational and managerial decision-making. In addition, the role and accountability of the Three Lines Model is strengthened across all lines of the company to ensure clarity of risk management responsibilities. The refinement of key risk indicators (KRIs), cross-unit reporting and escalation mechanisms, and the development of a digital ERM system form the basis for consistency, transparency, and effectiveness in risk management. At this stage, the use of loss events and root cause insights is also utilized as a basis for continuous process improvement and risk mitigation.

2027-2028	Pada periode 2027-2028, fokus manajemen risiko diarahkan pada penguatan kualitas pengambilan keputusan melalui integrasi risiko secara menyeluruh ke dalam keputusan strategis dan pengelolaan operasi perusahaan. Penerapan *risk-adjusted business planning* pada keputusan strategis perusahaan menjadi praktik utama, didukung oleh pemanfaatan *risk analytics* berbasis data historis dan analisis skenario sebagai *decision support* yang andal dan terukur. Pada fase ini, penyesuaian *Delegation of Authority* (DoA) dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat maturitas risiko setiap entitas, sehingga kewenangan bisnis diberikan secara proporsional dengan kapasitas pengelolaan risikonya. Konsolidasi data risiko lintas fungsi dan unit usaha, integrasi risiko keberlanjutan ke dalam proses perencanaan dan evaluasi bisnis, serta penguatan koordinasi antar *Three Lines Model* semakin memperkuat disiplin, ketepatan, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. In the 2027-2028 period, risk management focuses on strengthening the quality of decision-making through the comprehensive integration of risk into strategic decisions and operations management. The application of risk-adjusted business planning to the company's strategic decisions will become a key practice, supported by risk analytics based on historical data and scenario analysis as reliable, measurable decision support. In this phase, adjustments to the Delegation of Authority (DoA) are made gradually based on each entity's risk maturity level, so that business authority is granted in proportion to its risk management capacity. The consolidation of risk data across functions and business units, the integration of sustainability risk into business planning and evaluation processes, and the strengthening of coordination between the Three Lines Model further reinforce discipline, accuracy, and accountability in risk-based decision-making.
2029-2030	Pada periode 2029-2030, manajemen risiko diposisikan sebagai kapabilitas inti perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha, ketahanan operasional, dan penciptaan nilai jangka panjang. Integrasi penuh risiko keberlanjutan dan ESG ke dalam ERM dan strategi bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas, reputasi, dan nilai perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, pengelolaan risiko portofolio dan risiko sistemik diperkuat untuk menjaga stabilitas grup melalui pemanfaatan sistem dan teknologi digital yang matang mendukung transparansi, konsistensi, dan keandalan pengelolaan risiko. Evaluasi berkelanjutan atas kontribusi manajemen risiko terhadap penciptaan nilai serta penguatan peran fungsi risiko dalam menjaga reputasi dan kesinambungan usaha menegaskan posisi manajemen risiko sebagai penjaga nilai (*guardian of value*) dan penasihat strategis bagi manajemen puncak. In the 2029-2030 period, risk management is a core capability of the company, supporting business sustainability, operational resilience, and long-term value creation. Full integration of sustainability and ESG risks into ERM and business strategy is implemented to ensure that every strategic decision considers their long-term impact on the company's stability, reputation, and overall value. In addition, portfolio and systemic risk management are strengthened to maintain group stability through mature digital systems and technologies that support transparency, consistency, and reliability in risk management. Continuous evaluation of risk management's contribution to value creation and its strengthening of the risk function's role in maintaining reputation and business continuity affirms risk management's position as a guardian of value and a strategic advisor to top management.

PTPP telah memiliki sistem manajemen risiko yang matang dan diterapkan setiap proses bisnis, hal ini terlihat dengan telah adanya kebijakan dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan risiko di perusahaan. Ruang untuk peningkatan tentunya masih akan terus dilakukan guna menciptakan sistem manajemen risiko di PTPP telah tertata dengan baik.

PTPP has a mature risk management system applied to every business process, as evidenced by policies and infrastructure to support risk management in the Company. There is still room to improve the risk management system at PTPP.

Penguatan manajemen risiko di PTPP perlu dilakukan salah satunya untuk meningkatkan ketercapaian RKAP dan target target finansial yang telah ditentukan. Terdapat 4 (empat) hal sebagai bagian dari komitmen PTPP dalam memperkuat penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi dan budaya manajemen risiko untuk internalisasi manajemen risiko di seluruh pegawai;
2. Penguatan penerapan *threee lines models* untuk memaksimalkan peran seluruh organ pengelalu risiko dan *risk owner* di Perusahaan;

Strengthening risk management at PTPP is necessary, among other things, to improve the achievement of the RKAP and predetermined financial targets. There are four aspects that form part of PTPP's commitment to strengthening the implementation of risk management, namely:

1. Improving risk management competencies and culture to internalize risk management among all employees;
2. Strengthening the implementation of the three lines model to maximize the role of all risk management bodies and risk owners in the Company;

3. Penguatan Sistem Infrastruktur Manajemen Risiko (PPRISMA) dalam proses validasi risiko, pembaharuan *Key Risk Indicator* (KRI) dan mengelola *Loss Event Database* (LED) sebagai peningkatan kualitas identifikasi risiko yang ada selanjutnya; serta
4. Pemanfaatan Infrastruktur secara maksimal dalam penerapan manajemen risiko sebagai sebuah perangkat antisipasi yang utuh dan terintegrasi.

3. Strengthening the Risk Management Infrastructure System (PPRISMA) in the risk validation process, updating Key Risk Indicators (KRI) and managing the Loss Event Database (LED) to improve the quality of existing risk identification further; and
4. Maximizing the use of infrastructure in the application of risk management as a comprehensive and integrated anticipation tool.

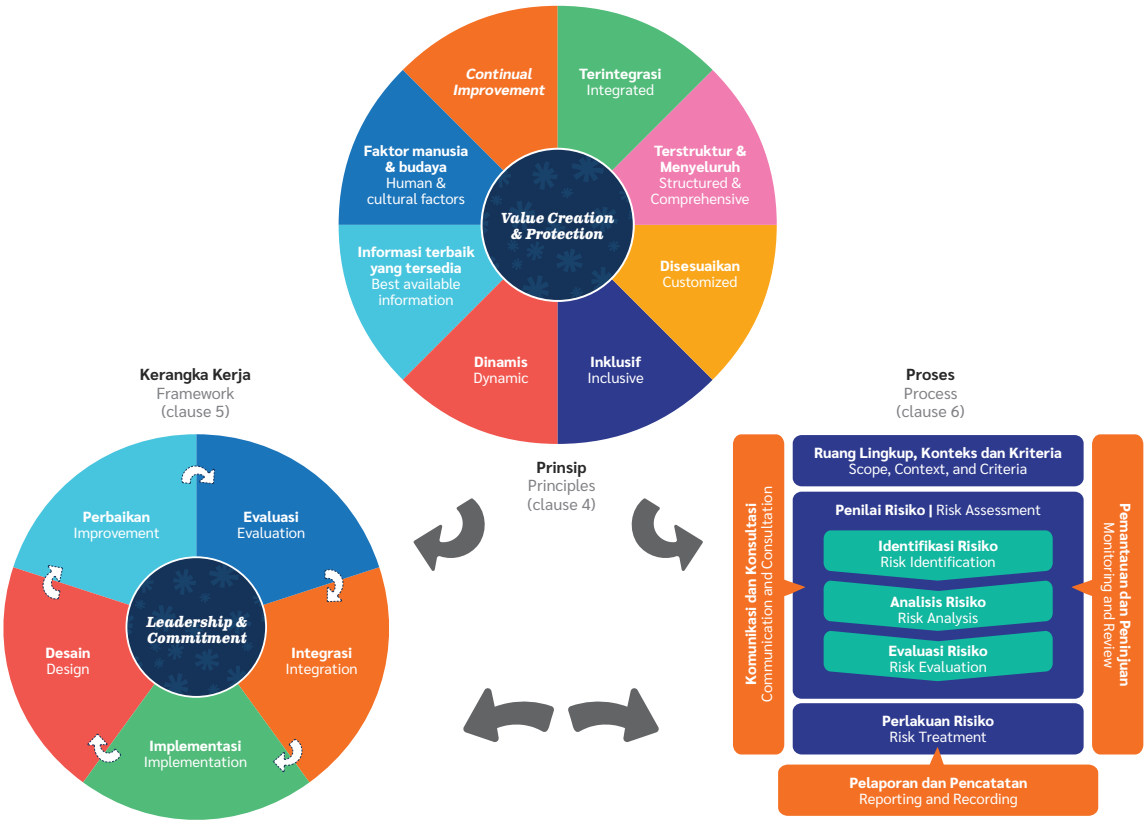
Sistem Manajemen Risiko PTPP

Manajemen risiko Perusahaan mengacu kepada ISO 31000 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.

PTPP Risk Management System

The Company's risk management refers to ISO 31000, which consists of three components, namely: Risk Management Principles, Risk Management Framework, and Risk Management Process.

Arsitektur Manajemen Risiko
Architectur of Risk Management



Pada proses manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh masing-masing unit sebagai *Risk Owner*. Perusahaan menyadari bahwa semakin awal risiko diidentifikasi, akan semakin baik, oleh sebab itu penyusunan Daftar Risiko untuk proyek, wajib dilakukan sejak persiapan tender. Di tingkat strategis, pembuatan Daftar Risiko dilaksanakan pada saat penyusunan RKAP dan RJPP dan pelaksanaannya dimonitor secara rutin melalui Manajemen *Review* Perusahaan.

In the risk management process, each unit conducts risk assessment as the Risk Owner. The Company realizes that the earlier the risks are identified, the better; hence, the development of a Risk Register for the project is mandatory from tender preparation. At the strategic level, the Risk Register is prepared during the preparation of the RKAP and RJPP, and its implementation is monitored regularly through the Company's Management Review.

Menurut *Risk Company Policy* melalui Surat Keputusan Direksi No. 075/SK/PP/DIR/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang diperbarui kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PP/DIR/2025 Tanggal 23 April 2025, Perusahaan menerapkan 4 (empat) pilar dalam penerapan Manajemen Risiko yaitu:

1. Pengurusan aktif oleh Direksi dan Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan dan Standar Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Strategi Risiko;
3. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, Pelaporan dan Pemantauan serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem Pengendalian Intern yang komprehensif.

According to the Risk Company Policy through Board of Directors Decree No. 075/SK/PP/DIR/2024 dated June 20, 2024, which was renewed through Board of Directors Decree No. 003/SK/PP/DIR/2025 dated April 23, 2025, the Company implements four pillars in Risk Management Implementation, namely:

1. Active management by the Board of Directors and active supervision by the Board of Commissioners;
2. Adequacy of Risk Management Policy and Standard Procedures and Risk Strategy Determination;
3. Adequacy of Identification, Measurement, Control, Reporting and Monitoring and Risk Management Information Systems; and
4. Comprehensive Internal Control System.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Dalam mendukung terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan, Perusahaan perlu membangun infrastruktur sebagai prasarana pendukung yang dapat menunjang proses manajemen risiko bagi seluruh pemangku kepentingan internal Perusahaan. Infrastruktur yang telah digunakan saat ini yaitu PPRISMA (PP *Risk Management*) yaitu aplikasi pengelolaan manajemen risiko berbasis web yang mengintegrasikan risiko seluruh risiko sebagai *protect* dan *create value* bagi Perusahaan. Selain Infrastruktur juga terdapat prosedur yang mengatur pengelolaan risiko Perusahaan dalam bentuk Pedoman Manajemen Risiko No. PP/DIVMR&LEGAL/P/001, yang diperbarui di tahun 2024 menjadi SOP Implementasi Manajemen Risiko No. PP/SOP/M2-082 sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

Risk Management Infrastructure

To implement an effective and sustainable risk management process, the Company needs to build an infrastructure that can support it for all internal stakeholders. The infrastructure currently in use is PPRISMA (PP Risk Management), a web-based risk management application that integrates all risks to protect and create value for the Company. Aside from this infrastructure, there are procedures that regulate the Company's risk management in the form of the Risk Management Company Manual No. PP/CM/M2-045, Risk Management Procedure No. PP/DIVMR&LEGAL/P/001, which was updated in 2024 to become Risk Management Implementation SOP No. PP/SOP/M2-082 following the SOE Ministry Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

Aplikasi manajemen risiko berbasis web pertama kali digunakan tahun 2004 dengan nama IrisQ. Aplikasi ini memfasilitasi proses manajemen risiko yang dimulai dari penetapan konteks, asesmen risiko, penanganan risiko, konsultasi & komunikasi serta monitoring & pelaporan, dengan menggunakan metode analisis risiko kualitatif. Pengembangan IrisQ didampingi oleh konsultan manajemen risiko. Seiring perkembangan Perusahaan, IrisQ menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: *security* data rendah, biaya pengembangan tinggi serta penggunaan metode analisis risiko kualitatif yang menghasilkan kajian risiko lebih bersifat subjektif dan intuitif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mulai tahun 2017 Divisi Manajemen Risiko mengembangkan aplikasi yang diberi nama MANRISK PP (Manajemen Risiko PP). Keunggulan aplikasi ini dibandingkan IrisQ antara lain setiap unit memiliki user masing-masing yang disesuaikan dengan aplikasi SDM sehingga menghindari penyalahgunaan username serta biaya pengembangan yang lebih murah dan *security* data tinggi.

The first web-based risk management app was used in 2004 under the name IrisQ. This app facilitates the risk management process, starting from context setting, risk assessment, risk handling, consultation & communication, and monitoring & reporting, using qualitative risk analysis methods. A risk management consultant assisted in the development of IrisQ. As the Company develops, IrisQ raises several issues, including weak data security, high development costs, and the use of qualitative risk analysis methods that yield more subjective, intuitive risk assessments. To overcome these problems, starting in 2017, the MR Division developed an app called MANRISK PP (PP Risk Management). The advantages of this app compared to IrisQ include each unit having its own user account tailored to the HR application to prevent misuse of usernames, lower development costs, and strong data security.

Dengan bertambahnya lini bisnis Perusahaan dan semakin meningkatnya kebutuhan Perusahaan terhadap manajemen risiko, maka diperlukan metode analisis risiko yang lebih objektif dan akuntabel sehingga di akhir tahun 2018, Perusahaan meluncurkan aplikasi manajemen risiko kuantitatif MANRISK PP 18.1. Aplikasi ini memiliki keunggulan dibanding aplikasi-aplikasi sebelumnya yaitu: Efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tepat waktu dan tenaga; Mudah digunakan untuk *user*, kepala unit dan manajemen; Cepat hanya dengan *single input* dan kalkulasi dilakukan oleh Apps secara komprehensif; dan Kekinian yang dilengkapi dengan *chat bot* RIMA dan dapat diintegrasikan dengan program lain. Beberapa keunggulan ini lebih dikenal dengan *tagline* EMC Kuadrat.

With the expansion of the Company's business lines and the growing need for risk management, a more objective and accountable risk analysis method is needed. At the end of 2018, the Company launched the MANRISK PP 18.1 quantitative risk management app. This app has advantages over previous apps, namely: Efficient because it is tailored to the needs, so that it is timely and effortful; Easy to use for users, unit heads, and management; Fast with only a single input, and calculations are carried out by the app comprehensively; and Contemporary is equipped with the RIMA chatbot and can be integrated with other programs. Some of these advantages are better known under the tagline "EMC Kuadrat."

Tahun 2020, perusahaan melakukan pengkinian aplikasi MANRISK PP 18.1 sehingga sesuai dengan kebutuhan, termasuk mengakomodir masukan dari beberapa hasil asesmen dan audit. Aplikasi ini kemudian menjadi MANRISK PP 20.1. Pengkinian dilakukan pada penambahan lingkup, penambahan nomenklatur risiko, adanya Riwayat kejadian risiko yang pernah diinput oleh risk owner sejak tahun 2018, serta adanya *monitoring* penanganan dan efektifitasnya yang telah dilakukan. Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan evaluasi aplikasi MANRISK PP 20.1 menjadi sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) PP dengan mengakomodir proses analisa risiko sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN yang saat ini telah dirubah menjadi BP BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Aplikasi PPRISMA mulai dikembangkan pada akhir tahun 2024 dan mulai menggantikan aplikasi MANRISK 22.1 sepenuhnya pada tahun 2025, dengan beberapa keunggulan yaitu:

1. Penentuan strategi risiko (*Risk Limit, Risk Appetite, Risk Tolerance*) untuk seluruh unit, proyek dan entitas anak;
2. Dashboard dan Proses integrasi risiko secara otomatis dari proyek, unit, anak perusahaan;
3. Sistem *Loss Event Database*;
4. Pemantauan Manajemen Risiko untuk nilai realisasi risiko dan *Key Risk Indicator (KRI)* untuk masing-masing risiko yang teridentifikasi; serta
5. Untuk selanjutnya PPRISMA akan terus dikembangkan untuk mengoptimalkan proses manajemen risiko di Perusahaan.

In 2020, the Company updated the MANRISK PP 18.1 app to suit its needs, including accommodating input from several assessment and audit results. This app then became MANRISK PP 20.1. Updating involves adding scope, risk nomenclature, a history of risk events inputted by the risk owner since 2018, and monitoring, handling, and effectiveness. In 2024, the Company evaluated the MANRISK PP 20.1 app to serve as a PP Enterprise Risk Management (ERM) system, incorporating the risk analysis process in accordance with the SOE Ministry Regulation, which has since been changed to BP BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. The PPRISMA app began development at the end of 2024 and will fully replace the MANRISK 22.1 app in 2025, with several advantages, namely:

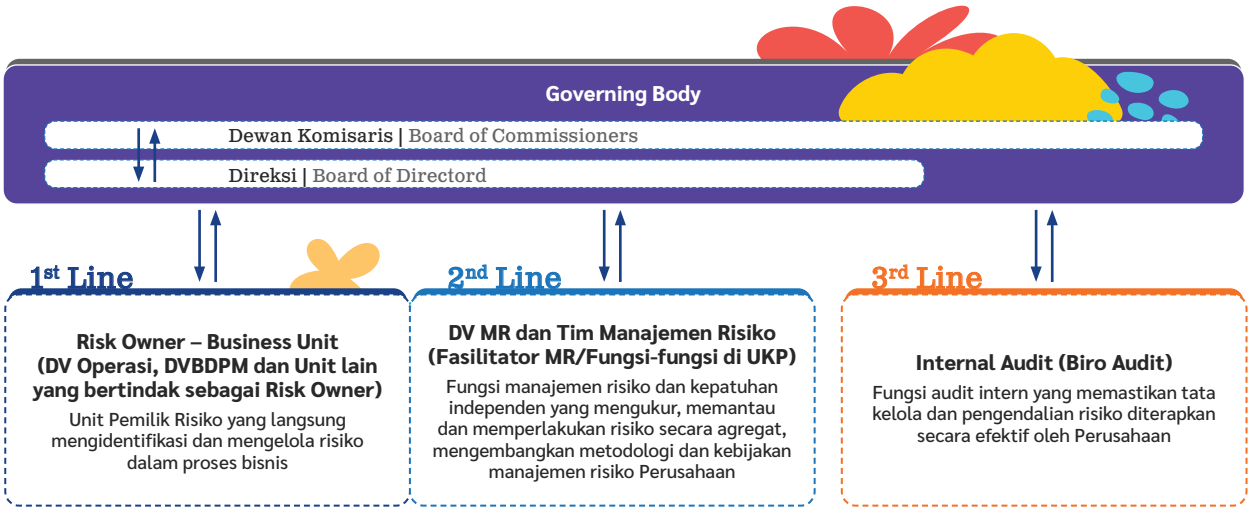
1. Determination of risk strategies (Risk Limit, Risk Appetite, Risk Tolerance) for all units, projects, and subsidiaries;
2. Dashboard and automatic risk integration process from projects, units, and subsidiaries;
3. Loss Event Database system;
4. Risk Management monitoring for risk realization values and Key Risk Indicators (KRI) for each identified risk; and
5. Going forward, PPRISMA will continue to be developed to optimize the Company's risk management process.

Tata Kelola Tiga Lini dalam Proses Pengelolaan Risiko (*Three Line Model*)

Pelaksanaan fungsi organ pengelola risiko dilakukan dengan menerapkan model tata kelola tiga lini (*three lines model*). Penerapan ini dilakukan dalam rangka mendukung adanya audit berbasis risiko. *Framework three line models* di lingkup Perusahaan digambarkan dengan rinci di bawah ini.

Three Lines of Governance in the Risk Management Process

The implementation of the risk management organ function is carried out separately in the context of applying the three-line governance model (three-line model). This implementation is to support risk-based audits. The framework of the three-line model in the Company is as follows:



	Lini Pertama First Line	Lini Kedua Second Line	Lini Ketiga Third Line
Key Risk Gatekeeper	*Business Unit* (Divisi Operasi, Divisi BDPM dan Unit lain yang bertindak sebagai *Risk Owner*) Business Unit (Operations Division, BDPM Division, and other Units acting as Risk Owners)	Divisi RM dan Tim Manajemen Risiko (Fasilitator RM/Fungsi-fungsi di UKP) RM Division and Risk Management Team (RM Facilitators/Functions in UKP)	Internal Audit (Biro SPI) Internal Audit (SPI Bureau)
Risk Responsibility	a. *Risk measurement* b. *Risk ownership*	a. *Risk evaluation* b. *Risk approval* c. *Risk reporting* d. *Risk regulator*	*Risk management efficacy review*
Tanggung Jawab & Wewenang Responsibility & Authority	a. Sebagai *Risk Owner* b. Melaksanakan dan mematuhi prosedur dan WI yang berlaku c. Menyusun kajian risiko mulai dari identifikasi sampai penanganan risiko d. Memberikan informasi ke Divisi RM untuk melakukan pembahasan Manajemen Risiko dengan tim RM e. Melakukan pembahasan RM terkait proses bisnis yang akan dilakukan bersama dengan tim RM f. Menetapkan dan melaksanakan penanganan g. Memonitor dan mereviu pelaksanaan penanganan h. Melakukan evaluasi terhadap kondisi realisasi/aktual yang terjadi dengan risiko yang telah disusun i. Menghadiri rapat Manajemen Risiko dan Direksi untuk memaparkan analisa dan hasil kajian risiko yang telah disusun j. Memelihara budaya sadar risiko di lingkungan unitnya k. Mengimplementasikan sistem Risk Management terkait risiko utama proses bisnis yang akan dilakukan l. Berkoordinasi dan berkomunikasi rutin dengan Divisi RM maupun Komite Manajemen Risiko	a. Menyusun SOP dan WI yang terkait dengan pengelolaan Manajemen Risiko di Perusahaan b. Mengajukan selera dan toleransi risiko untuk dapat disetujui oleh Direksi c. Mensosialisasikan seluruh pedoman terkait pelaksanaan Manajemen Risiko d. Memberikan pengetahuan terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit e. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap kajian risiko yang disusun oleh 1st *Lines* f. Melakukan pembahasan Manajemen Risiko g. Sebagai fasilitator dan *advisory* pembahasan RM terkait proses bisnis yang akan dilakukan 1st *Lines* h. Melakukan *review* penanganan yang direncanakan oleh 1st *Lines* i. Menghadiri rapat Direksi untuk memaparkan analisa dan hasil kajian risiko yang telah disusun j. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap proses bisnis yang akan dilakukan 1st *lines* k. Mengukur, memantau dan memperlakukan risiko secara agregat l. Melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko di Perusahaan	a. Melaksanakan audit berbasis risiko untuk mengaudit risiko dan pelaksanaan penanganan risiko b. Memberikan rekomendasi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan c. Mengevaluasi keseluruhan proses dan tahapan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan d. Melakukan *review* atas peringkat komposit risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku e. Melakukan kajian (identifikasi, analisis dan evaluasi) dan tindak lanjut atas potensi dan peristiwa penyalahgunaan wewenang/ tindak kecurangan (*fraud*) f. Memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan g. Melaporkan hasil audit kepada Direksi

Lini Pertama First Line	Lini Kedua Second Line	Lini Ketiga Third Line
a. As Risk Owner b. Implement and comply with applicable procedures and WI c. Arrange risk assessment from identification to risk handling d. Provide information to the RM Division to conduct Risk Management discussions with the RM team e. Conduct RM discussions related to business processes that will be carried out together with the RM team f. Determine and implement handling g. Monitor and review the implementation of handling h. Evaluate the realization/actual conditions that occur with the risks prepared. i. Attend risk management and Board of Directors meetings to present the analysis and results of the risk assessment that has been prepared. j. Maintain a risk-aware culture within the unit. k. Implement a Risk Management system related to the main risks of the business processes to be carried out. l. Coordinate and communicate regularly with RM Division and Risk Management team.	a. Develop SOPs and WIs related to risk management in the company. b. Submit risk appetite and tolerance to be approved by the Board of Directors. c. Disseminate SOP/WI related to the implementation of Risk Management d. Provide knowledge associated with Risk Management to all units e. Review and evaluate the risk assessment prepared by the First Line f. Conduct Risk Management discussion g. As a facilitator and advisor for RM discussions related to business processes that the First Line will carry out h. Review the handling planned by the First Line i. Attend the Board of Directors meeting to present the analysis and results of the prepared risk assessment. j. Provide recommendations to the Board of Directors on business processes that will be carried out by the First Lines. k. Measure, monitor and treat risk in aggregate. l. Report the implementation of Risk Management	m. Carry out risk-based audits to audit risks and implement risk handling. n. Provide recommendations for improving the implementation of Risk Management in the Company. o. Evaluate the overall process and stages of implementing Risk Management in the Company. p. Conduct a review of the risk composite rating by applicable regulations q. Conduct studies (identification, analysis, and evaluation), and follow-up on the potential and events of abuse of authority/ fraud. r. Ensure that the Company effectively implements governance and risk control. s. Report audit results to the Board of Directors.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi manajemen risiko pada semua pegawai dan menumbuhkan budaya manajemen risiko di Perusahaan, maka Divisi Manajemen Risiko memiliki program kerja sosialisasi manajemen risiko. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk *in house training* kepada semua pegawai sesuai otorisasi masing-masing dalam pengelolaan risiko Perusahaan, antara lain:

1. Pengenalan *Enterprise Risk Management* pada level pegawai baru/*new hire on boarding*, serta Pendalaman *Enterprise Risk Management* pada level Junior Management Development Program, *Middle Management Development Program*, *Contract Administration and Risk Management* (CARM);
2. Sosialisasi dan *refreshment* Manajemen Risiko pada seluruh Fasilitator Risiko di Divisi/Unit Kantor Pusat, Strategi Bisnis Unit, Anak Perusahaan hingga Proyek; serta
3. Sosialisasi dan *refreshment* terkait platform terbaru Perusahaan (PPRISMA) kepada seluruh Fasilitator Risiko di Divisi/Unit Kantor Pusat, Strategi Bisnis Unit, Anak Perusahaan hingga Proyek.

Risk Management Dissemination

To improve the knowledge and implementation of risk management among all employees and foster a culture of risk management in the Company, the Risk Management Division has a risk management dissemination work program. The dissemination is carried out in the form of in-house training for all employees according to their respective authorizations in the Company's risk management, including:

1. Introduction to Enterprise Risk Management at the new employee/new hire onboarding level, as well as an in-depth study of Enterprise Risk Management at the Junior Management Development Program, Middle Management Development Program, and Contract Administration and Risk Management (CARM) levels;
2. Dissemination and refreshment of Risk Management for all Risk Facilitators in the Division/Head Office Unit, Business Unit Strategy, Subsidiaries, and Projects; and
3. Dissemination and refreshment related to the Company's latest platform (PPRISMA) for all Risk Facilitators in the Division/Head Office Unit, Business Unit Strategy, Subsidiaries, and Projects.

Kebijakan Strategi Risiko (*Risk Strategy*)

Risk Appetite Statement (RAS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Surat Menteri BUMN No. S-491/ MBU/09/2023 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 dan sebagai salah satu upaya Perusahaan dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan memiliki strategi risiko yang dituangkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) sebagai berikut:

Risk Strategy Policy

Risk Appetite Statement (RAS) following the provisions in the SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the SOE Minister Letter No. S-491/ MBU/09/2023 on Shareholder Aspirations for the Preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget and as one of the Company's efforts to create and protect value and support sustainable business growth, the Company has a risk strategy set out in the following Risk Appetite Statement (RAS):

Sikap Terhadap Risiko* Attitude toward Risk	**Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*/"RAS") Risk Appetite Statement (RAS)**
Tidak toleran Intolerant	1. PTPP tidak memberikan ruang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi; dan PTPP does not provide space for violations of laws and regulations, including damage to the environment and negligence towards cybersecurity and personal data protection; and 2. PTPP menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, menjalankan organ pengelola risiko secara efektif dan prudent serta menjunjung tinggi *core value* AKHLAK. PTPP conducts its business by implementing good corporate governance and integrated risk management, operating risk management bodies effectively and prudently, and upholding the core values of AKHLAK.
Konservatif Conservative	1. PTPP mendukung penyelesaian penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional yang diberikan ke PTPP dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN); PTPP supports the completion of government assignments in the form of national strategic projects assigned to PTPP, with the provision that they are financially feasible or, if not financially feasible, are compensated/subsidize,d or financed by State Capital Participation (PMN); 2. PTPP berhati-hati dalam menentukan strategi untuk mempertahankan struktur keuangan yang sehat serta memenuhi kewajiban keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan; PTPP is cautious in determining strategies to maintain a sound financial structure, fulfill financial obligations, and ensure business continuity; 3. PTPP berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis utamanya dengan kualitas terbaik serta manjaga aspek ESG; PTPP is committed to conducting its main business activities with the highest quality and maintaining ESG aspects; 4. PTPP mendukung Anak Perusahaan dan Afiliasi berfokus dalam menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik serta berdasarkan manajemen risiko yang terukur; PTPP supports its Subsidiaries and Affiliates in focusing on carrying out their main business activities in a targeted manner and operating in good faith and based on measurable risk management; 5. PTPP mempertimbangkan risiko terkendali dalam melakukan optimalisasi penataan portofolio untuk memprioritaskan kestabilan usaha; PTPP considers controlled risks in optimizing portfolio structuring to prioritize business stability; 6. PTPP berhati hati dalam melakukan pemilihan pekerjaan termasuk dan tidak terbatas pada jasa EPC sesuai dengan kapabilitas, struktur proyek, dan proyeksi risiko serta keuangan yang sehat; serta PTPP is cautious in selecting projects, including but not limited to EPC services, in accordance with capabilities, project structure, and projections of risk and financial health; and 7. PTPP melakukan investasi secara cemat dan teliti sesuai dengan prinsip seleksi yang ketat atas potensi imbal hasil, pengelolaan risiko, serta kapasitas keuangan dan pendanaan. PTPP makes investments carefully and thoroughly, in accordance with strict selection principles regarding potential returns, risk management, and financial and funding capacity.

Sikap Terhadap Risiko* Attitude toward Risk	Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*/"RAS") Risk Appetite Statement (RAS)
Moderat Moderate	1. PTPP melakukan optimalisasi dengan mempertimbangkan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur; PTPP optimizes by considering market volatility and macroeconomics while accepting measurable consequences; 2. PTPP melakukan optimalisasi pengembangan pangsa pasar berdasar tipe proyek dan lokasi geografis pada pekerjaan jasa konstruksi gedung, infrastruktur dan infrastruktur pertambangan sesuai dengan prinsip pengelolaan risiko dan nilai potensi profitabilitas yang telah dicanangkan. PTPP optimizes market share development based on project type and geographical location for building construction, infrastructure, and mining infrastructure services, in accordance with established risk management and established potential profitability principles.
Strategis Strategic	PTPP mempertimbangkan risiko yang wajar dan terukur dalam melakukan kegiatan aksi korporasi dan divestasi. PTPP considers reasonable and measurable risks in conducting corporate actions and divestments.

*) Keterangan:
1. Tidak Toleran:
   a. Sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas serta konsistensi dalam operasi bisnis; dan
   b. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.
2. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal:
   a. Berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha; dan
   b. Keputusan bisnis berdasarkan pada upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk didalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.
3. Moderat:
   a. Bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar; dan
   b. Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan serta dapat menanggung beban yang sedang.
4. Strategis:
   a. Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumuhan dan inovasi yang lebih besar; serta
   b. Keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.

*) Information:
1. Intolerant:
   a. Very cautious in taking risks and prefers to maintain stability and consistency in business operations; and
   b. Business decisions are based on capital preservation.
2. Conservative:
   a. Cautious in taking risks, choosing some controllable risks but prioritizing business stability; and
   b. Business decisions are based on hedging against large unforeseen risks, including avoiding exposure to significant market fluctuations and keeping expenses small.
3. Moderate:
   a. Willing to take risks within certain limits to achieve growth and profit, but still concerned about protecting against large losses; and
   b. Business decisions consider growth opportunities and the impact of risks simultaneously and can bear moderate burdens.
4. Strategic:
   a. Actively implementing strategies that involve risk management as an integral part of the business plan, taking higher risks in order to achieve greater growth and innovation; and
   b. Business decisions are based on risk analysis and long-term investment return potential and can bear a heavy burden.

Ambang Batas Risiko

Perusahaan dalam menyusun strategi risiko mempertimbangkan beberapa aspek seperti RAS dari Kementerian BUMN yang saat ini menjadi BP BUMN *Core Competence* Perusahaan, Kondisi Perusahaan pada tahun berjalan, cakupan waktu penetapan target Perusahaan dan kapasitas risiko dari Perusahaan. Kapasitas risiko Perusahaan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. *Risk Capacity* merupakan nilai maksimum risiko yang dapat ditanggung Perusahaan berdasarkan pendekatan financial. Pendekatan Financial yang paling mendekati dengan strategi perusahaan saat ini adalah *Net Working Capital* (NWC).
2. *Risk Tolerance* merupakan nilai batasan risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan yang dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko, di mana nilai risk tolerance perusahaan lebih besar dari nilai *Risk Appetite.*

Risk Threshold

In developing a risk strategy, the company considers several aspects such as RAS from the SOE Ministry, the Company's Core Competence, the condition of the company in the current year, the scope of time for setting company targets, and the risk capacity of the company. The Company's risk capacity is divided into four, namely:

1. Risk Capacity is the maximum value of risk that the Company can bear based on a financial approach. The Financial Approach closest to the company's current strategy is Net Working Capital (NWC).
2. Risk Tolerance is the value of the risk limit that the Company is willing to take, which can be tolerated from the Risk Appetite value, where the company's risk tolerance value is greater than the Risk Appetite value.

3. *Risk Appetite* merupakan nilai batasan keseluruhan risiko yang bersedia diambil untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Perusahaan mengambil nilai *Risk Appetite* melalui pendekatan historis pencapaian target perusahaan dan menetapkan kebijakan nilai *Risk Appetite* berada pada level moderat.
4. *Risk Limit* merupakan nilai batasan risiko yang akan didistribusikan menjadi acuan bagi masing-masing risiko korporat kepada masing-masing unit pemilik risiko.

3. Risk Appetite is the value of the overall risk limit that is willing to be taken to get the expected results. The Company takes the Risk Appetite value through a historical approach to achieving company targets and sets the Risk Appetite value policy at a moderate level.
4. The Risk Limit is a value that will be distributed as a reference for each corporate risk to each risk owner unit.

Profil Risiko Korporat dan Mitigasi Risiko

Manajemen Risiko menjadi salah satu komitmen dari Perusahaan untuk mencapai sasaran dan strategi perusahaan dengan terus melindungi dan meningkatkan *value* perusahaan. Seluruh lini perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada SK *Risk Company Policy* melalui SK Direksi No. 075/SK/PP/DIR/2024, *Company Manual* Manajemen Risiko No. PP/CM/M2-045, *Standard Operating Procedure* Implementasi Manajemen Risiko No. PP/SOP/M2-082, *Work Instruction* Evaluasi Manajemen Risiko dengan *Risk Maturity Index* (RMI) No. PP/WI/M2-069, *Work Instruction* Pelaporan Manajemen Risiko No.PP/WI/M2-046, *Work Instruction* Penyusunan Profil Risiko No. PP/DIVMR&LEGAL/W/001 dan No. WI Penyusunan Profil Risiko Penyuapan No. PP/DIVMR&LEGAL/W/004. Pada tahun 2025, teridentifikasi sebanyak 11 (sebelas) profil risiko korporat.

Corporate Risk Profile and Risk Mitigation

Risk Managment is one of the Company's commitments to achieve the Company's goals and strategies by continuing to protect and increase the Company's value. All company lines implement risk management by referring to the Risk Company Policy through Board of Directors Decree No. 075/SK/PP/DIR/2024, Company Manual Risk Management No. PP/CM/M2-045, Standard Operating Procedure for Risk Management Implementation No. PP/SOP/M2-082, Work Instruction Risk Management Evaluation with Risk Maturity Index (RMI) No. PP/WI/M2-069, Work Instruction Risk Management Reporting No. PP/WI/M2-046, Work Instruction Risk Profile Preparation No. PP/DIVMR&LEGAL/W/001 and No. WI Compilation of Bribery Risk Profile No. PP/DIVMR&LEGAL/W/004. In 2025, 11 corporate risk profiles were identified.

Daftar risiko Perusahaan dilaporkan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direksi setiap triwulan untuk mendapatkan umpan balik, dan kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Badan Pengaturan BUMN. Dewan Komisaris memberikan tanggapan dan rekomendasi pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2025 risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan sebagai berikut:

The Company's risk register is reported by the Risk Management Division to the Board of Directors every quarter for feedback, and then reported to the Board of Commissioners and the SOE Regulatory Body. The Board of Commissioners provides input and recommendations on implementing risk management in the Company. Based on a study conducted in 2025, the risks faced by the Company are as follows:

Daftar Risiko (Risk Register) dan Penanganan Risiko

Risk Register and Risk Management

Nomor Risiko **Risk Number**	:	1
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Berkurangnya perolehan dan *burning* proyek baru Decreased revenue and burning of new projects
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	a. Perubahan kebijakan anggaran dari kementerian, lembaga dan badan terkait b. Semakin kompetitif kapabilitas, harga dan teknis c. Mundurnya waktu pelaksanaan tender a. Changes in budget policies from ministries, agencies, and related institutions b. Increasingly competitive capabilities, prices, and technical aspects c. Delays in tender implementation
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	a. Berkurangnya kontribusi laba dari proyek baru b. Kehilangan potential pendapatan a. Decreased profit contribution from new projects b. Loss of potential revenue
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*

Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Eksplorasi market pada segmen pasar baru namun tetap berdasarkan manajemen risiko yang terukur (*owner* swasta & tambang) b. Penggunaan *market intelligence* c. Meningkatkan market share dari BUMN d. Peningkatan kompetensi SDM e. Optimalisasi *strategic procurement* a. Market exploration in new market segments while maintaining measured risk management (private owners & mines) b. Use of market intelligence c. Increasing market share of state-owned enterprises d. Enhancing human resource competencies e. Optimizing strategic procurement
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	2
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Turunnya kontribusi dari proyek-proyek *carry over* Decrease in contributions from carry-over projects
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	a. Hambatan pelaksanaan proyek (kondisi lapangan, teknis, perizinan, iklim & cuaca, *stakeholders*) b. Kenaikan biaya pelaksanaan proyek a. Project implementation obstacles (field conditions, technical issues, licensing, climate & weather, stakeholders) b. Increase in project implementation costs
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	a. Kehilangan potensi pendapatan sesuai target b. Berkurangnya kontribusi laba dari proyek *carry over* a. Loss of potential revenue according to targets b. Decrease in profit contribution from carry-over projects
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Melakukan inovasi dan *value engineering* b. Renegosiasi kontrak/*price adjustment* dengan memperkuat fungsi CARM ditingkat divisi operasi sampai dengan proyek c. Optimalisasi kontrak payung dengan vendor d. Pengajuan eskalasi harga e. Penguatan kontrak dengan *owner* f. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM dalam *project execution* a. Implement innovation and value engineering b. Renegotiate contracts/price adjustments by strengthening the CARM function at the division and project levels c. Optimize umbrella contracts with vendors d. Submit price escalations e. Strengthen contracts with owners f. Improve the competence and capabilities of human resources in project execution
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	3
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Gagalnya *streamlining/realignment* Failure of streamlining/realignment
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	Hambatan pelaksanaan AKPOR (tidak mendapatkan persetujuan dari *stakeholders*, perubahan skema) Obstacles to AKPOR implementation (failure to obtain approval from stakeholders, changes to the scheme)
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Deviasi Konsolidasi EAT AP sebelum dan setelah AKPOR Deviations in EAT AP consolidation before and after AKPOR
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*

Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Pendampingan dengan pihak ketiga dan independen dalam proses *streamlining/realignment* b. Evaluasi aksi korporasi secara berkala melalui forum PMO c. Evaluasi divestasi yang dilakukan secara pekanan a. Assistance from third parties and independent parties in the streamlining/realignment process b. Periodic evaluation of corporate actions through the PMO forum c. Weekly evaluation of divestments
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	4
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Terhambatnya proses divestasi Hindrances to the divestment process
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	a. Keterbatasan market b. Nilai penawaran tidak sesuai asumsi awal a. Market limitations b. Offer value not in line with initial assumptions
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	a. Target pendapatan dan laba divestasi tidak terpenuhi b. Potensi *loss opportunity* atas efisiensi biaya a. Divestment revenue and profit targets not met b. Potential loss of opportunity on cost efficiency
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Perluasan *networking* melalui *market agency* b. Melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan prospek bisnis objek divestasi dan meningkatkan kinerja objek divestasi seoptimal mungkin a. Expansion of networking through market agencies b. Involvement of external parties in preparing business prospects for divestment objects and optimizing the performance of divestment objects
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	5
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Kinerja operasional AP tidak sesuai dengan target AP's operational performance did not meet targets
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	a. Pemasaran & divestasi tidak tercapai b. Keterbatasan kemampuan AP untuk burning penjualan a. Marketing & divestment targets were not achieved b. Limitations in AP's ability to burn sales
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Berkurangnya kontribusi laba dari Anak Perusahaan Decreased profit contribution from subsidiaries
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Eksplorasi market pada segmen pasar baru namun tetap berdasarkan Manajemen Risiko yang terukur (*owner* swasta & tambang) b. Sinergi antara Divisi Operasi - Anak Perusahaan dengan Pembentukan klasterisasi (Energi, Infra Tol, Infra Non Tol, Komersial, Residential, Hotel) c. Efisiensi biaya Anak Perusahaan d. Perluasan *networking* melalui *market agency* a. Exploration of new market segments while maintaining measured risk management (private owners & mines) b. Synergy between the Operations Division and Subsidiaries through the formation of clusters (Energy, Toll Infrastructure, Non-Toll Infrastructure, Commercial, Residential, Hotels) c. Cost efficiency of Subsidiaries d. Expansion of networking through market agencies
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko Risk Number	:	6
Peristiwa Risiko Risk Event	:	Penurunan *Cash in* Operasi (CFO) Decrease in Cash in Operations (CFO)
Penyebab Risiko Risk Cause	:	Berkurangnya kemampuan bayar *owner*, lamanya pengakuan progres dan piutang lama yang belum cair Reduced payment ability of owners, lengthy progress recognition, and long-standing receivables that have not been collected
Dampak Risiko Risk Impact	:	a. Kehilangan potensi *cash in* b. Kenaikan Biaya Bunga akibat Defisit NCFO a. Loss of potential cash in b. Increase in Interest Expenses due to NCFO Deficit
Risiko Inheren Inherent Risk	:	*High*
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	:	a. Percepatan pencairan piutang b. Optimalisasi *Cash Out* untuk unit-unit yang memberikan return ke perusahaan (Optimalisasi program *cash management office*) c. Perkuatan klausul kontrak terkait SOP Pengakuan *Progress & Timeline* pembayaran d. Perkuatan klausul kontrak pada *point* keterlambatan pembayaran dari *Owner* e. Pembentukan Satgas Piutang a. Acceleration of receivables collection b. Cash Out Optimization for units that provide returns to the company (cash management office program optimization) c. Strengthening contract clauses related to SOPs for progress recognition and payment timelines d. Strengthening contract clauses regarding late payments by the owner e. Formation of an Accounts Receivable Task Force
Risiko Residual Residual Risk	:	*Moderate*

Nomor Risiko Risk Number	:	7
Peristiwa Risiko Risk Event	:	Perolehan dana dari PMN *Right Issue* tidak optimal Funds raised from the Right Issue were not optimal
Penyebab Risiko Risk Cause	:	a. Tertundanya persetujuan/berkurangnya nilai PMN b. Rendahnya minat *public* a. Delayed approval/decreased PMN value b. Low public interest
Dampak Risiko Risk Impact	:	Biaya Right Issue Costs of the Right Issue
Risiko Inheren Inherent Risk	:	*Low*
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	:	a. Evaluasi secara berkala proses persetujuan PMN dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terkait PMN b. Edukasi publik dengan pemberitaan positif mengenai prestasi perusahaan telah dilakukan melalui melalui media online daerah dan nasional serta media cetak harian daerah dan nasional c. *Update* pengenalan PTPP melalui kegiatan Investor relation secara *One-on-One meeting*, Seminar, *Project Visiting* dan Penerimaan *Analyst Report* dari Perusahaan Sekuritas a. Periodic evaluation of the PMN approval process in light of changes in government policy related to PMN b. Public education through positive news coverage of the company's achievements via regional and national online media, as well as regional and national daily print media c. Updates on PTPP through investor relations activities such as one-on-one meetings, seminars, project visits, and acceptance of analyst reports from securities companies
Risiko Residual Residual Risk	:	*Low*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	8
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Kenaikan *rate* suku bunga pinjaman Increase in loan interest rates
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	Perubahan kondisi makro ekonomi Changes in macroeconomic conditions
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Kenaikan biaya bunga konsolidasi Increase in consolidated interest expenses
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*Moderate to high*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	Renegosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan suku bunga kompetitif Renegotiate with creditors to obtain competitive interest rates
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	9
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Terhambatnya sumber pendanaan Hindered funding sources
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	Penurunan kepercayaan kreditur untuk pendanaan Decreased creditor confidence in funding
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Kenaikan suku bunga akibat ketidaktercapaian pemasaran dan penyerapan obligasi Interest rate increases due to unmet marketing and bond absorption targets
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*High*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Menyebarkan berita positif mengenai *achievement* Perusahaan yang telah dilakukan melalui media *online* daerah dan nasional serta media cetak harian daerah dan nasional b. *Roadshow* ke kreditur signifikan terkait prospek dan rencana strategis PTPP a. Disseminate positive news about the Company's achievements through regional and national online media, as well as regional and national daily print media b. Roadshow to significant creditors regarding PTPP's prospects and strategic plans
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Moderate to high*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	10
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Tuntutan hukum dari pihak ketiga Legal claims from third parties
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	Terjadi *dispute* Disputes occur
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Level tuntutan Hukum kegiatan operasional Perusahaan Level of legal claims: Company operational activities
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*Moderate*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	a. Penunjukan konsultan pendampingan *Law Firm* (*Retainer*) b. Monitoring pendampingan atas progres *Law Firm* a. Appointment of a law firm consultant (retainer) b. Monitoring of the law firm's progress
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Low to moderate*

Nomor Risiko **Risk Number**	:	11
Peristiwa Risiko **Risk Event**	:	Implementasi *Roadmap* ESG tidak sesuai target Implementation of the ESG Roadmap is not on target
Penyebab Risiko **Risk Cause**	:	Program ESG belum menjadi prioritas dari Seluruh Divisi ESG programs are not yet a priority for all divisions
Dampak Risiko **Risk Impact**	:	Tidak terpenuhinya ESG *rating* ESG rating not met
Risiko Inheren **Inherent Risk**	:	*Moderate*
Mitigasi Risiko **Risk Mitigation**	:	Peningkatan pemahaman *awareness* kepada tiap unit Increased awareness in each unit
Risiko Residual **Residual Risk**	:	*Low to moderate*

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Kewajiban penerapan praktik manajemen risiko pada BUMN telah dicanangkan pada tahun 2011 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada Pasal 25 butir (2) bahwa Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance*. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN yang saat ini menjadi BP BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Dalam bab III Peraturan Menteri BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, pasal 74 disebutkan bahwa Perusahaan wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*). Penilaian *risk maturity index* ini merupakan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan manajemen risiko Perusahaan, memberikan keyakinan kepada Direksi bahwa penerapan Manajemen Risiko Perusahaan telah cukup memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan, memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan di masa yang akan datang (*area of improvement*), dan menentukan perencanaan dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Unit Internal Audit.

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management System

The obligation to implement risk management practices in SOEs was initiated in 2011 with the issuance of SOE Minister (now BP BUMN) Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs), especially in Article 25 point (2) that the Board of Directors is required to establish and implement an integrated corporate risk management program, which is part of the implementation of the Good Corporate Governance program. This is also reinforced by SOE Minister (now BP BUMN) Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in SOEs, which was updated by the SOE Minister (now BP BUMN) Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

In Chapter III of the SOE Minister Regulation No. PER2/MBU/03/2023, Article 74 states that it is mandatory to conduct a risk maturity index assessment. This risk maturity index assessment is an evaluation of the implementation of risk management in the Company carried out to assess the maturity level of the Company's risk management implementation, provide assurance to the Board of Directors that the implementation of Company Risk Management is sufficient to achieve the expected goals, provide recommendations to the Board of Directors regarding improvements to the implementation of Company Risk Management in the future (area of improvement), and determine the audit planning and approach that will be used by the Internal Audit Unit.

Tahun 2025 penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) di PTPP telah selesai dilakukan dengan pencapaian nilai 2,9 yang berada pada "Fase Praktik yang Baik". Penilaian dilakukan oleh Penilai Internal Perusahaan yang di ketuai oleh Biro Internal Audit dan beranggotakan Divisi Risk Management sesuai Keputusan Direksi No 074/SK/PP/DIR/2024 tentang Pelaksanaan Penilaian RMI (*Risk Maturity Index)* PT PP (Persero) Tbk. Penilaian RMI berdasarkan kriteria penilaian yang mengacu pada Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK-8/ DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN.

Risk Maturity Index (RMI) yang dilakukan mencakup Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja. Aspek Dimensi adalah aspek dalam penilaian yang terdiri dari budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko, serta model, data, dan teknologi risiko. Aspek Kinerja adalah aspek dalam penilaian yang terdiri atas tingkat kesehatan, peringkat akhir (*final rating*) dan peringkat komposit risiko. Jika dijabarkan per masing-masing aspek dimensi dan aspek kinerja, secara garis besar pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

In 2025, the Risk Maturity Index (RMI) assessment at PTPP was completed with a score of 2.9, which is in the "Good Practice Phase". The assessment was conducted by the Company's Internal Assessors, chaired by the Internal Audit Bureau and consisting of the Risk Management Division, per Board of Directors Decree No. 074/SK/PP/DIR/2024 on the Implementation of the RMI (Risk Maturity Index) Assessment of PT PP (Persero) Tbk. The RMI assessment was based on criteria drawn from Copy of the Finance and Risk Management Undersecretary Decree of the SOE Ministry No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index (Risk Maturity Index) in SOEs.

The Risk Maturity Index (RMI) includes Dimensional and Performance Aspects. Dimensional aspects of the assessment consist of risk culture and capability, risk organization and governance, risk and compliance framework, risk processes and controls, risk models, data, and technology. Performance aspects of the assessment consist of health level, final rating, and risk composite rating. If described per each aspect of the dimensions and performance aspects, the outline of the value achievement is as follows:

Aspek Dimensi
Dimension Aspect

Parameter	Dimensi Dimension	Deskripsi Description	Skor Score
01 s.d 03 01 to 03	1	Budaya dan Kapabilitas Risiko Risk Culture and Capability	4,3
04 s.d 19 04 to 19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko Risk Organization and Governance	3,2
20 s.d 33 20 to 33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Framework	3,6
34 s.d 39 34 to 39	4	Proses dan Kontrol Risiko Risk Process and Control	3,5
40 s.d 42 40 to 42	5	Model, Data dan Teknologi Risiko Risk Models, Data and Technology	2,5
		Skor Aspek Dimensi **Dimension Aspect Score**	**3,4**

Aspek Kinerja
Performance Aspect

No.	Aspek Aspect	Nilai Aspek Aspect Value	Nilai Konversi Conversion Value	Bobot Weight	Nilai Konversi x Bobot Conversion Value x Weight	Skor Score
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) Final Rating Soundness Level	A	79	50%	39,5	67
2	Peringkat Komposit Risiko Risk Composite Rating	3	55	50%	27,5	67
	Skor Aspek Kinerja **Performance Aspect Score**					**67**

Total Skor* Aspek Kinerja Total Score* Performance Aspects	Penyesuaian Skor* Aspek Dimensi Score Adjustment* Dimension Aspects
≤ 50	(1,00)
50 < x ≤ 65	(0,75)
65 < x ≤ 80	(0,50)
80 < x ≤ 90	(0,25)
>90	0,00

Skor Aspek Dimensi Dimension Score (A)	Penyesuaian Skor* Aspek Kinerja Score Adjustment* Performance Aspect (B)	Skor RMI RMI Score (A) + (B)
3,4	(0,5)	2,9

Penilaian maturitas manajemen risiko tahun yang dilakukan pada 2025 dengan parameter sesuai Peraturan Kementerian No. PER-2/MBU/03/2023 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

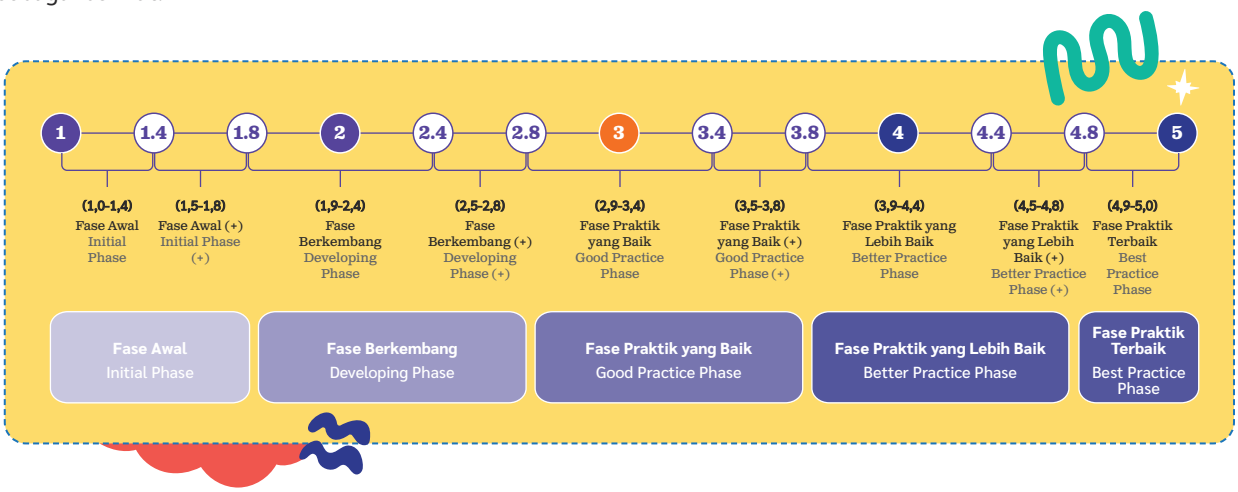
1. Melakukan *Kick Off Meeting* bersama dengan Tim Penilai Internal RMI Perusahaan;
2. Melakukan Pengumpulan *Survey*, Pengumpulan dokumen-dokumen dan *review* atas *survey* dan dokumen yang diperoleh; dan
3. Melakukan Penilaian dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan manajemen Risiko Kementerian BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN.

The assessment of the maturity of risk management for the year was carried out in 2025 with parameters per Ministry Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 was carried out in the following stages:

1. Conduct a Kick-Off Meeting with the Company's Internal RMI Assessment Team;
2. Conduct a survey, collect documents, and review the survey and documents obtained; and
3. Conduct Assessment and Reporting per the provisions outlined in the Copy of the Finance and Risk Management Undersecretary Decree of the SOE Ministry No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Guidelines for Assessing the Risk Maturity Index within SOEs.

Tingkatan Skor capaian penerapan Manajemen risiko dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori dengan skala sebagai berikut:

The Risk Management implementation achievement score levels are grouped into five Phases with the following scale:



1 Fase Awal
Initial Phase

- Menerapkan sejumlah dimensi praktik MR;
  Implementing some dimensions of RM practices;
- Budaya & kesadaran Risiko pegawai masih rendah;
  Employee risk culture and state are still low;
- Tata kelola dan struktur organisasi MR dalam tahap perencanaan;
  RM governance and organizational structure in the planning stage;
- Kebijakan/pedoman/SOP/ketentuan diperbaharui tidak secara berkala; dan
  Policies/guidelines/ SOPs/provisions are not updated regularly; and
- Kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem dan alat yang terkait MR diterapkan tidak secara konsisten di seluruh organisasi.
  RM-related frameworks, compliance, processes, systems, and tools are applied inconsistently across the organization.

Fase Awal (+)
Initial Phase (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui Fase Awal dan sedang transisi menuju Fase Berkembang.

Risk management practices are beyond the Initial Phase and are transitioning towards the Developing Phase.

2 Fase Berkembang
Developing Phase

- Secara rata-rata menerapkan seluruh dimensi praktik MR untuk memenuhi persyaratan minimum;
  On average, implementing all dimensions of RM practices to meet the minimum requirements;
- Pegawai tertentu cukup sadar akan risiko, budaya Risiko mulai diperkenalkan;
  Certain employees are reasonably risk-aware, a risk culture is being introduced.
- Terdapat struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem & alat yang terkait MR, ada kesenjangan dalam praktiknya, level implementasi tiap dimensi bervariasi;
  The organizational structure, framework, compliance, RM-related processes, systems, and tools are in place; gaps exist in practice, and the implementation level of each dimension varies;
- Telah mengomunikasikan infrastruktur MR dan dipahami oleh seluruh insan Perusahaan;
  All company personnel have communicated and understood RM infrastructure;
- Perusahaan telah menyelaraskan infrastruktur MR dan target kinerja.
  The company has aligned its RM infrastructure with performance targets.

Fase Berkembang (+)
Developing Phase (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui Fase Berkembang & sedang dalam transis menuju Fase Praktik yang Baik.

Risk management practices are beyond the Developing Phase and are transitioning to the Good Practice Phase

3 Fase Praktik yang Baik
Good Practice Phase

- Menerapkan seluruh Dimensi praktik MR, mendekati/sejalan dengan praktik standar industrinya;
  Implementing all dimensions of Risk Management practices, close to/in line with industry standard practices;
- Pegawai cukup sadar akan Risiko, budaya Risiko mulai diterapkan di dalam perusahaan;
  Employees are sufficiently risk aware, risk culture is starting to be implemented in the company;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, dan alat terkait MR telah diterapkan, level implementasinya masih bervariasi;
  Organizational structure, framework, compliance, processes, systems, and related tools have been implemented, the level of implementation still varies;
- Menerapkan MR secara konsisten sesuai *framework* MR dan menerapkan prinsip MR terus menerus; dan
  Implementing Risk Management consistently according to the Risk Management framework and applying the Risk Management principles continuously; and
- Penjabaran (*cancading*) *targeting* kinerja perusahaan telah dilakukan hingga tingkat individu.
  Corporate performance targets have been cascaded up to the individual level.

Fase Praktik yang Baik (+)
Good Practice Phase (+)

Praktik Manajemen Risiko melampau Fase Praktik yang Baik & sedang dalam transisi menuju Fase Praktik yang Lebih Baik.

Risk management practices go beyond the Good Practice Phase and are heading towards the Better Practice Phase.

4 Fase Praktik yang Lebih Baik
Better Practice Phase

- Menerapkan seluruh Dimensi praktik MR yang kuat, mendekati/sejalan dengan praktik standar global industrinya;
  Implementing all dimensions of robust RM practices, close to/ in line with global industry standard practices;
- Semua pegawai sadar Risiko, penerapan budaya risiko memasuki tahap lebih luas & makin terintegrasi;
  All employees are risk-aware, implementing a risk culture is broader and more integrated;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR diimplementasikan cukup efektif;
  Organizational structure, compliance framework, RM-related processes, systems & tools are implemented quite effectively;
- Menerapkan MR dengan perbaikan terus menerus;
  Implementing RM with continuous improvement;
- Penerapan MR didukung sistem informasi memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  Adequate and accountable information systems support RM implementation; and
- Evaluasi pencapaian kinerja telah dilakukan secara berkala.
  Evaluation of performance achievement has been conducted regularly.

Fase Praktik yang Lebih Baik (+)
Better Practice Phase (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui Fase Awal dan sedang transisi menuju Fase Berkembang.

Risk management practices are beyond the Initial Phase and are transitioning towards the Developing Phase.

5 Fase Praktik Terbaik
Best Practice Phase

- Menerapkan praktik-praktik terbaik MR sesuai praktik standar global industrinya;
  Implement RM best practices as per global industry standard practices;
- Budaya Risiko sepenuhnya tertanam, telah dilaksanakan sepenuhnya didukung pengelolaan pengetahuan & pengembangan kapabilitas sumber daya MR;
  Risk culture is fully embedded, fully implemented, supported by knowledge management & capability development of RM resources;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR diterapkan secara efektif & dilakukan perbaikan berkelanjutan;
  RM-related organizational structure, framework, compliance, processes, systems & tools are effectively implemented & continuous improvement is in place;
- Proses MR menggunakan metode terdepan dengan sistem informasi MR yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Perbaikan MR dilakukan berkelanjutan;
  RM processes use leading-edge methods with RM information systems integrated with other information systems. RM improvement is carried out continuously;
- MR menjadi dasar pengambilan keputusan dengan memperhitungan peluang yang ada; dan
  MR becomes the basis for decision making by taking into account the opportunities available; and
- Tren kinerja meningkat dari tahun ke tahun.
  Performance trends are increasing from year to year.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Hasil evaluasi yang telah disampaikan di atas memberikan gambaran tentang kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan. Melalui hasil penilaian tersebut, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sistem Manajemen Risiko PTPP telah mencukupi dan tidak terdapat penyimpangan dan kelemahan yang signifikan dalam Sistem Manajemen Risiko PTPP tersebut.

Realisasi Peta Jalan Perbaikan Manajemen Risiko 2025

Pada tahun 2025 ini perusahaan telah merealisasikan rencana perbaikan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. Perbaikan dilakukan dengan merujuk kepada hasil evaluasi penilaian *Risk Maturity* Index (RMI). Perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang terkait metodologi identifikasi dan analisa risiko di Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk Taksonomi Risiko;
2. Infrastruktur Manajemen Risiko telah dilengkapi dengan *Early Warning System/Key Risk Indicator, Loss Event Database, Search Engine* dan Integrasi Risiko sesuai dengan Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyusunan *contingency* Perusahaan yang dilengkapi dengan *Trigger Point* yang didefinisikan untuk pelaksanaan prosedur kontingensi;
4. Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko untuk Organ Pengelola Risiko melalui *Training* dan Sertifikasi;
5. Mengimplementasikan standar penilaian dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan; serta
6. Pelaksanan *Internal Control Testing* sesuai dengan peran Lini ke-2 untuk memberikan masukan pada bisnis proses perusahaan dalam mengontrol terjadinya risiko.

Rencana Sistem Manajemen Risiko ke Depan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN terutama pada bab III yaitu Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN, Kementerian BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN telah mengeluarkan beberapa Petunjuk Teknis sebagai panduan pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut. Petunjuk Teknis yang dimaksud antara lain:

1. Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023;
2. Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Company's Risk Management System

The evaluation results presented above provide an overview of the adequacy of the Company's Risk Management System. Through the results of the assessment, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners is confident that the PTPP Risk Management System is adequate and that there are no significant deviations or weaknesses in the PTPP Risk Management System.

Implementation of the 2025 Risk Management Improvement Roadmap

In 2025, the Company implemented a comprehensive risk management improvement plan. The improvements were made based on the results of the Risk Maturity Index (RMI) assessment. The improvements made are as follows:

1. Reviewing the risk identification and analysis methodology in the Company in accordance with applicable regulations, including Risk Taxonomy;
2. The Risk Management Infrastructure has been equipped with an Early Warning System/Key Risk Indicator, Loss Event Database, Search Engine, and Risk Integration in accordance with the Technical Guidelines for Risk Management and Aggregation Processes in the SOE Portfolio Risk Taxonomy No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 dated October 26, 2023;
3. Preparation of the Company's Contingency Plan, equipped with a defined Trigger Point for the implementation of contingency procedures;
4. Risk Management Competence Improvement for Risk Management Bodies via Training and Certification;
5. Implementation of assessment standards in the application of risk management in the Company; and
6. Implementation of Internal Control Testing in accordance with the role of the Second Line to provide input on the Company's business processes in controlling the occurrence of risks.

Future Risk Management System Plan

Based on SOE Minister (now BP BUMN) Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, especially in chapter III, i.e., the Implementation of Risk Management in SOEs, the SOE Ministry (now BP BUMN) has issued several Technical Guidelines to guide the implementation of the Ministerial Regulation. The Technical Guidelines referred to include:

1. Technical Guidelines for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOEs No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated May 26, 2023;
2. Technical Guidelines for the Risk Management Process and Aggregation of the SOE Portfolio Risk Taxonomy No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 dated October 26, 2023;

3. Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
4. Petunjuk Teknis Penilaian Indeks kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan BUMN tanggal 6 Desember 2023.

Untuk memenuhi Peraturan dan Petunjuk teknis di atas, maka PTPP juga harus melakukan penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko yang ada. Langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan antara lain:

1. Melengkapi peraturan internal Perusahaan untuk meningkatkan Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan;
2. Melakukan *refreshment* dan sosialisasi manajemen risiko meliputi Peraturan Menteri No. PER-2/MBU/03/2023, Petunjuk Teknis yang ada serta prosedur dan *work instruction* Perusahaan yang telah disesuaikan;
3. Menyusun RKAP berbasis Manajemen Risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis yang ada. Penyusunan RKAP berbasis Manajemen Risiko ini juga diberlakukan pada anak Perusahaan;
4. Mengimplementasikan *Roadmap* Manajemen Risiko berdasarkan hasil penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) yang mendukung peningkatan implementasi manajemen risiko;
5. Menyusun Kajian *Stress Testing* untuk mengetahui skenario dampak dan kondisi Perusahaan dari beberapa asumsi utama yang berpengaruh pada Perusahaan;
6. Menyusun *Contingency Plan* sebagai rencana darurat Perusahaan;
7. Memaksimalkan *Loss Event Database* untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam penilaian risiko ke depan dan peningkatan kualitas analisa risiko;
8. Memaksimalkan *Key Risk Indicator* (KRI) untuk dapat digunakan secara maksimal sebagai *early warning system* di Perusahaan; serta
9. Melakukan pembaharuan dan pengembangan aplikasi sistem manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri No. PER-2/MBU/03/2023, Petunjuk Teknis yang ada serta prosedur dan *work instruction* Perusahaan.

Pelaporan Manajemen Risiko

Sebagai salah satu pemenuhan terhadap Peraturan No. PER-2/MBU/03/2023 dan Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko No. SK-7/DKU.MBU/10/2023, serta sebagai bagian dari proses manajemen risiko, khususnya pada bagian proses pemantauan dan evaluasi manajemen risiko maka PTPP melakukan pelaporan manajemen risiko.

Pelaporan manajemen risiko terdiri dari 3 (tiga) laporan utama yaitu Laporan Penerapan Manajemen Risiko, Laporan Audit Intern dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi. Laporan ini disampaikan kepada Kementerian BUMN

3. Technical Guidelines for SOE Risk Management Reporting No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 dated October 26, 2023;
4. Technical Guidelines for assessing the Risk Maturity Index within SOEs dated December 6, 2023.

To fulfill the Ministerial Regulations and technical guidelines above, PTPP must also make adjustments to implementing existing risk management. The steps that the company will take include:

1. Supplementing the Company's internal regulations to improve the implementation of risk management within the Company;
2. Conducted refreshment and dissemination of risk management, including Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, existing Technical Guidelines and adjusted Company procedures and work instructions;
3. Prepare a Risk Management-based RKAP for existing Ministerial Regulations and Technical Guidelines. The preparation of Risk Management-based RKAP is also applied to subsidiaries;
4. Develop a Risk Management Roadmap based on the Risk Maturity Index (RMI) assessment results as an improvement program for risk management implementation;
5. Develop a Stress Testing Study to determine the scenario impact and condition of the Company from several key assumptions that affect the Company;
6. Develop a Contingency Plan as the Company's emergency plan;
7. Develop a Loss Event Database to be used as input in future risk assessments and improve risk analysis quality;
8. Maximize the use of Key Risk Indicators (KRI) as an early warning system within the Company; and
9. Update and develop the risk management system app per Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, existing technical guidelines, and Company procedures and work instructions.

Risk Management Reporting

As part of compliance with Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and Technical Guidelines for Risk Management Reporting No. SK-7/DKU.MBU/10/2023, and as part of the risk management process, particularly in the risk management monitoring and evaluation process, PTPP conducts risk management reporting.

Risk management reporting consists of three main reports: Risk Management Implementation Report, Internal Audit Report, and Integrated Governance Report. This report is submitted to the SOE Ministry (now BP BUMN) with

yang saat ini berubah menjadi BP BUMN dengan media penyampaian melalui Portal Silaba, SIM KBUMN yaitu *platform* Anaplan, surat resmi, surel, dan dengan periode penyampaian tahunan, triwulanan, sementara dan *incidental*.

Daftar data dan/atau laporan yang disampaikan PTPP kepada Kementerian BUMN yang saat ini berubah menjadi BP BUMN berdasarkan SK-7/DKU.MBU/10/2023 antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Penerapan dan Pemantauan Manajemen Risiko
   a. Realisasi perhitungan risiko residual yang dibandingkan dengan rencana target risiko residual sesuai periode pelaporan;
   b. Realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya;
   c. Peta Risiko;
   d. Ikhtisar perubahan profil dan strategi risiko;
   e. Catatan kejadian kerugian (*loss event database*);
   f. Hasil *internal control testing* (penjelasan detail terkait *internal control testing* akan dijelaskan pada SOP *Internal Control Testing*;
   g. Hasil *stress testing*;
   h. Perhitungan peringkat komposit risiko (penjelasan detail perhitungan peringkat komposit akan dijelaskan pada SOP Evaluasi Manajemen Risiko Dengan *Risk Maturity Index* (RMI); dan
   i. Laporan Manajemen Risiko Insidental.
2. Laporan Audit Intern
   a. Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern;
   b. Laporan tindak lanjut auditor internal, audit eksternal dan otoritas pengawasan lainnya; dan
   c. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SPI.
3. Catatan Kejadian Kerugian;
   a. Laporan struktur tata kelola terintegrasi;
   b. Laporan proses tata kelola terintegrasi; dan
   c. Laporan hasil tata kelola terintegrasi.
4. Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan
   a. Laporan Triwulanan; dan
   b. Laporan Tahunan.

through Silaba Portal, SIM KBUMN, i.e., Anaplan platform, official letter, email, and annual, quarterly, temporary, and incidental submission periods.

The data and/or reports PTPP submitted to the SOE Ministry (now BP BUMN) are based on SK-7/DKU.MBU/10/2023, which includes the following:

1. Risk Management Implementation and Monitoring Report
   a. Realization of residual risk calculation compared to residual risk target plan according to reporting period;
   b. Realization of risk treatment and cost implementation;
   c. Risk map;
   d. Overview of changes in risk profile and strategy;
   e. Loss event database;
   f. Internal control testing results (detailed explanation related to internal control testing will be explained in the Internal Control Testing SOP;
   g. Stress testing results;
   h. Calculation of composite risk rating (detailed explanation of composite rating calculation will be explained in the SOP for Risk Management Evaluation with Risk Maturity Index (RMI); and
   i. Incidental Risk Management Report.
2. Internal Audit Report
   a. Report on the implementation and main results of internal audits;
   b. Follow-up reports from internal auditors, external audits, and other supervisory authorities; and
   c. Report on the appointment or dismissal of the Head of SPI.
3. Integrated Governance Report
   a. Integrated governance structure report;
   b. Integrated governance process report; and
   c. Integrated governance results report.
4. Financial Performance Achievement Report
   a. Quarterly Report; and
   b. Annual Report.



Simpang Susun Tunjung Teja Jalan Tol Serang - Panimbang, Jawa Barat
Tunjung Teja Interchange of the Serang-Panimbang Toll Road, West Java

Perkara Penting
Significant Events

Perusahaan telah menerapkan *tools integrated case management* yang memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat menangani semua risiko yang dihadapinya. Di tahun 2025, Divisi Legal dengan diawasi secara langsung oleh Direktur Manajemen Risiko dan Legal memiliki peran utama dan telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan seluruh perkara penting yang dihadapi Perusahaan dengan telah diterapkannya *tools integrated case management*.

The Company had implemented tools integrated with case management, which has the primary function of ensuring that the Company can handle all the risks it faces. In 2025, the Legal Division, under the direct supervision of the Director of Risk Management and Legal Affairs, had a major role and made every effort to resolve all important cases facing the Company through the implementation of tools integrated case management.

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Legal Issues

Legal issues and/or cases faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2025 and 2024 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	2025		2024	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and with permanent legal force				
Perusahaan The Company	3	-	9	-
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Board of Commissioners and/or Board of Directors	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiary	13	-	10	-
Dalam proses penyelesaian In settlement				
Perusahaan The Company	3	-	3	-
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Board of Commissioners and/or Board of Directors	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiary	5	-	11	-
Jumlah **Total**	**24**	**-**	**33**	**-**

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2025 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Details of the legal issues faced by the Company in 2025 or which have been declared resolved in 2025 are as follows.

No	Nomor Perkara Case Number	Penggugat Plaintiffs	Tergugat Defendant
1	No. 381/Pdt.Sus-PKPU/2025/ PN.Niaga.Jkt.Pst	1. PT Atap Perkasa 2. CV Citra Pratama	PTPP
2	No. 286/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst	1. PT Cendana Jaya Mandiri 2. Sumber Arta Gondola	PPUB
3	No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst	1. PT Restru Bumi Adiyaksa 2. PT Farama Mitra Mandiri	PPUB
4	No. 227/Pdt.sus-PKPU/2025/ PN.Jkt.Pst	PT Airindo Sakti	PPUB
5	No. 290/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst	1. PT Guna Teknik Perkasa 2. PT Farama Mitra Mandiri	PPUB
6	No. 285/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst	PT Sakura Matriks	PPUB
7	No. 343/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga Jkt.Pst	1. PT Total abadi solusindo 2. PT Ekasurya Sejati	PPUB
8	No. 341/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga Jkt.Pst	1. PT Cendana Jaya mandiri 2. PT Sumber Artha Gondola	PPUB
9	No. 342/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga Jkt.Pst	1. PT Bangun Cipta Raya 2. CV Lembah Hijau	PPUB
10	No. 229/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst	1. PT Guna Teknik Perkasa 2. PT Farama Mitra Mandiri	PPUB
11	No. 50/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst	1. PT Stahlindo Jaya Perkasa 2. PT Sinar Baja Prima	PTPP
12	No. 12/Pdt.G/2025/PN. Rkb	Emin Muhaemin	1. PP - Urban, KSO 2. Hesti Umi Raharjo 3. Heru Haryanto 4. Mohammad Fahri Azmi S.H., M.Kn
13	No. 204/Pdt.G/2025/PN Bks : Gugatan PMH dari Yayok Dkk. Kons. GKL	1. Yayok Tuhoyoto 2. Wisanggo 3. Dedi Arfianto 4. Liny Tanto 5. Muhammad Ilham 6. Syahputra	1. PPRO 2. Notaris Elsha Fitria, S.H., M.Kn. Notary Elsha Fitria, S.H., M.Kn. 3. Notaris Yuanita Husni, S.H. Notary Yuanita Husni, S.H. 4. Notaris Rika Adrianti, S.H. Notary Rika Adrianti, S.H. 5. Kantor Pertanahan Bekasi Bekasi Land Office
14	No. 268/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Tim	PT Matrikstama Andalan Mitra	PTPP
15	No. 33/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt Pst	PPUB	PT Cahaya Baru Raya Realty
16	No. 63/Pdt.Sus-PKPU/2025/ PN.Niaga.Jkt Pst	1. PT Indopile 2. PT Java Logistics Intenational	PPUB
17	No. 199/Pdt.G/2025 PN Unr	Roni Rinto Nugroho	1. Heru Cahyono 2. PTPP

	Pokok Perkara Case Subject	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Claim/ Lawsuit Nominal Value	Status
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Klaim Ganti Rugi Sub-Vendor Sub-Vendor Compensation Claims	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Sengketa Konsumen Consumer Disputes	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Klaim Pembayaran Tagihan Vendor Vendor Bill Payment Claims	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 10.031.220.162	*Closed*
	Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp 5.214.897.856	*Closed*
	Sengketa Kepemilikan Tanah (Umum) Land Ownership Disputes (General)	Rp 500.000.000	*Open*

No	Nomor Perkara Case Number	Penggugat Plaintiffs	Tergugat Defendant
18	No. 19/Pdt.G/2025/PN Dmk_	Achmad Suparwi	1. Kementerian PUPR PUPR Ministry 2. PPSD 3. PTPP
19	No. 150/Pdt.G/2025/PN Bks	Divisi Gedung Building Division	1. PT Keyliosh Megah Utama 2. Widie Kusmananto
20	BANI 48036/VII/ARB-BANI/2025	PT Adhisatya Property	PPRO
21	No. 228/Pdt.sus-PKPU/2025/ PN.Jkt.pst	PT Cendana Jaya Mandiri PT Sumber Arta Gondola	PPUB
22	No. 170/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Tim	PT Capri Nusa Raya	PPUB
23	No. 26/Pdt.G/2025/PN DPK	Tony Simanjuntak Verede Siregar Juni Arman Sitorus	1. PT Cempaka 2. Maharani Indah 3. PPRO 4. Muhammad Ikhrom 5. Agus Kadarisman Karma 6. Kantor Pertanahan Kota City Land Office 7. Depok 8. PTPP 9. Mion Tarigan 10. Polres Metro Kota Depok Depok City Police 11. Satpol PP Kota Depok Depok City Public Order Agency

Sanksi Administrasi

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh regulator kepada Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak.

Administrative Sanctions

Throughout 2025, no administrative sanctions were imposed by regulators on the Company, its members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or its subsidiaries.

Perkara Perpajakan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara perpajakan yang melibatkan Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak.

Taxation Cases

Throughout 2025, there were no taxation cases involving the Company, its members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or its subsidiaries.

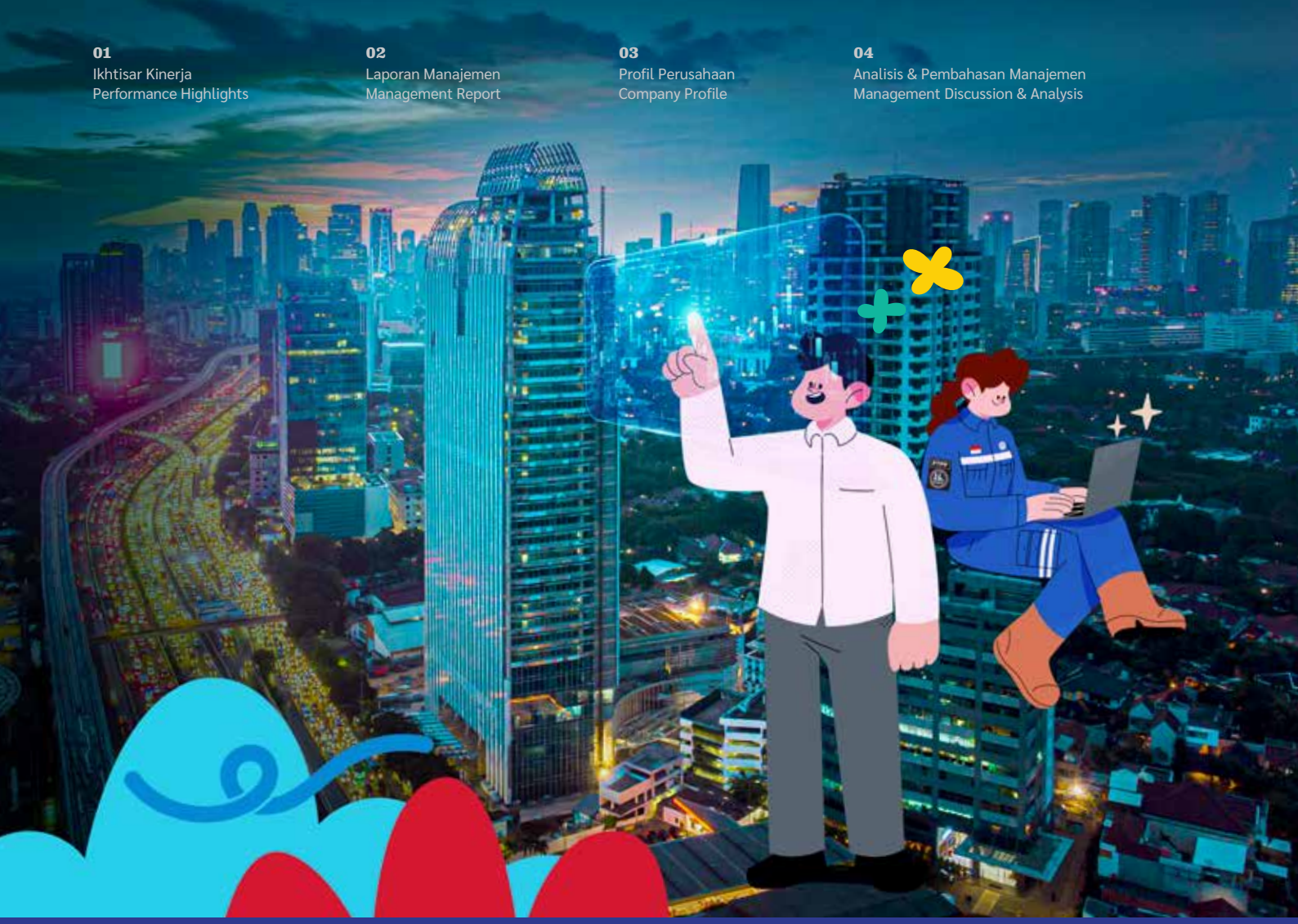
Pokok Perkara Case Subject	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Claim/ Lawsuit Nominal Value	Status
Klaim Ganti Rugi Masyarakat Community Compensation Claims	Rp 1.500.000.000	*Open*
Wanprestasi Perjanjian Breach of Contract	Rp 3.929.300.000	*Open*
Wanprestasi Perjanjian Breach of Contract	Rp 1.262.796.000	*Open*
Permohonan PKPU PKPU Petition	Rp6.066.367.405	*Open*
Wanprestasi Perjanjian Breach of Contract	Rp 2.230.880.450	*Open*
Sengketa Kepemilikan Tanah (Umum) Land Ownership Disputes (General)	Rp 3.700.000.000	*Open*

Perkara Lingkungan
Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara lingkungan yang melibatkan Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak.

Perkara Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang melibatkan Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak.

Environmental Cases
Throughout 2025, there were no environmental cases involving the Company, its members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or its subsidiaries.

Employment and Industrial Relations Cases
Throughout 2025, there were no employment and industrial relations cases involving the Company, its members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or its subsidiaries.



Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Kebijakan Teknologi Informasi
PTPP berkomitmen menjadikan Teknologi Informasi (TI) sebagai business enabler utama untuk memacu pertumbuhan nilai perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan IT Master Plan (ITMP) 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Panduan strategis ini memastikan transformasi digital mendukung visi perusahaan menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan. Melalui ITMP 2025-2029, PTPP membangun ekosistem digital yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data guna memperkuat daya saing di industri konstruksi serta investasi.

Information Technology Policy
PTPP is committed to making Information Technology (IT) a key business enabler to drive the company's growth. This commitment is realized through the implementation of the 2025-2029 IT Master Plan (ITMP), which has been aligned with the Company's Long-Term Plan. This strategic guide ensures that digital transformation supports the company's vision of becoming the innovative, superior, and sustainable contractor of choice. Through the 2025-2029 ITMP, PTPP is building an integrated, adaptive, and data-driven digital ecosystem to strengthen its competitiveness in the construction and investment industries.

Kerangka Kerja Tata Kelola TI
Dalam menjalankan tata kelola TI, PTPP. mengintegrasikan kerangka kerja COBIT 2019 dan standar internasional seperti TOGAF, ITIL V4, serta ISO 27001:2022 untuk memastikan arsitektur, layanan, dan keamanan informasi yang unggul serta sistematis. Operasional ini sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional, terutama Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 serta selalu

IT Governance Framework
In implementing IT governance, PTPP integrates the COBIT 2019 framework with international standards such as TOGAF, ITIL V4, and ISO 27001:2022 to ensure robust, systematic architecture, services, and information security. These operations are fully aligned with national regulations, particularly the SOE Minister Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, and continuously improve

meningkatkan keamanan siber BUMN terbaru guna menjamin kepatuhan dan akuntabilitas korporasi secara menyeluruh. Keberhasilan pendekatan ini tercermin pada pencapaian nilai IT *Maturity level* 3.30 ("*Matured*") untuk seluruh *objective* yang menunjukkan bahwa pedoman dan proses TI perusahaan telah terstandar dengan baik.

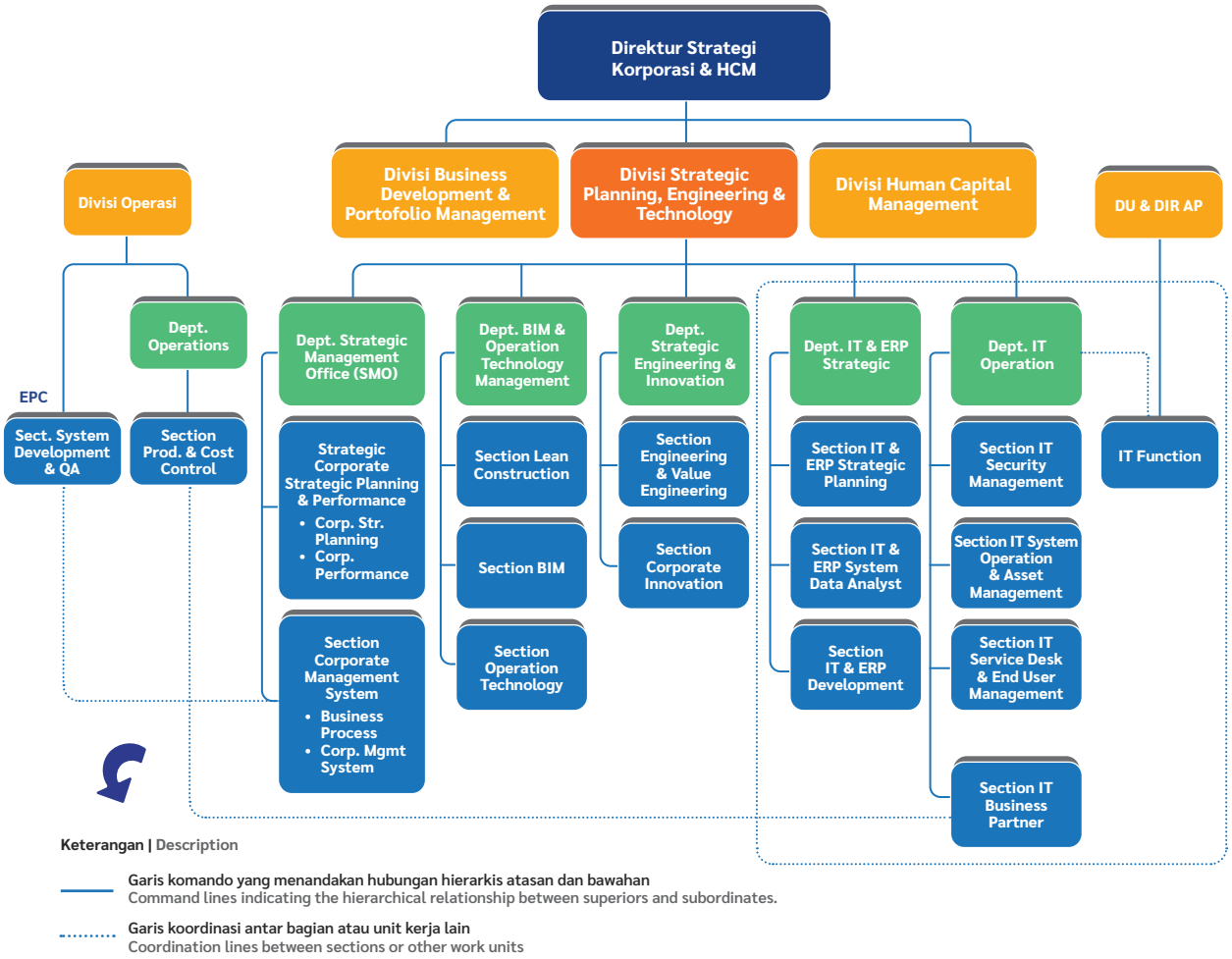
the latest SOE cybersecurity to ensure comprehensive corporate compliance and accountability. The success of this approach is reflected in achieving IT Maturity level 3 ("Matured"), for all objectives indicating that the Company's IT guidelines and processes have been well standardized.

Organisasi Pengelola TI PTPP

Organisasi TI di PT PP berada di bawah Divisi Strategic Planning, Engineering & Technology. Terdiri dari dua departemen yang terpisah namun saling bersinergi yaitu Departemen IT & ERP Strategis yang berfokus pada perencanaan dan pengembangan sistem TI dan ERP, serta Departemen IT Operation yang bertanggung jawab atas operasional dan dukungan sistem TI.

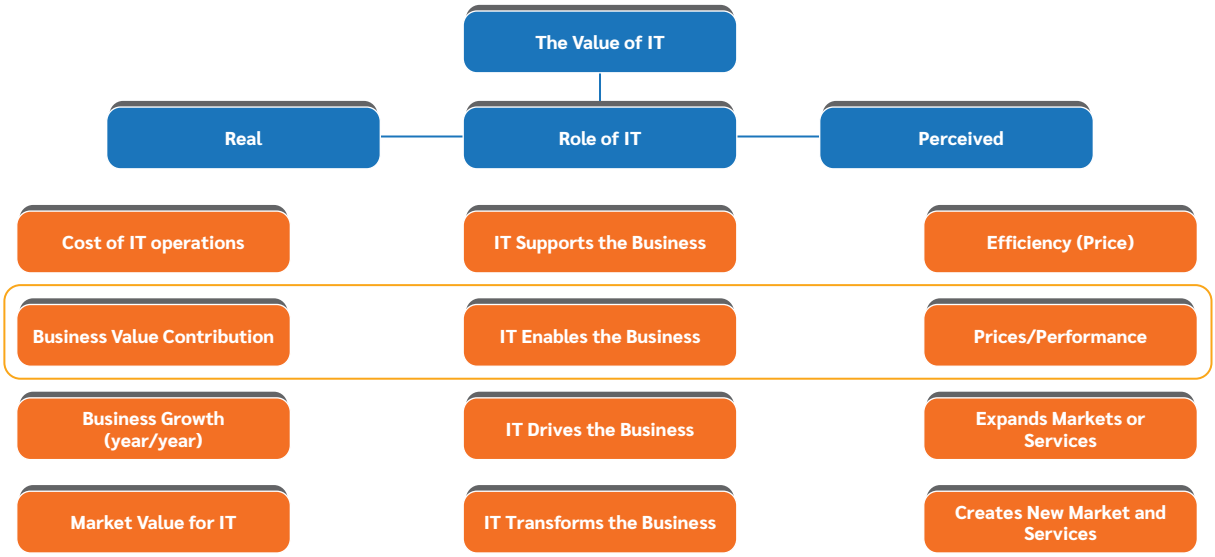
PTPP IT Management Organization

The IT organization at PTPP is under the auspices of the Strategic Planning, Engineering & Technology Division. This division oversees two main departments, i.e., the Strategic IT & ERP Department, which focuses on the planning and development of IT and ERP systems, and the IT Operations Department, which is responsible for IT system operations and support.



Sebagai *business enabler* utama, organisasi TI mengintegrasikan teknologi ke dalam pengembangan dan operasional bisnis demi mendorong peningkatan nilai serta pertumbuhan berkelanjutan PTPP.

As a key business enabler, the IT organization integrates technology into business development and operations to drive value enhancement and sustainable growth for PTPP.



Tugas dan tanggung jawab fungsi TI PTPP adalah:

1. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan penyusunan *Master Plan* TI, Program Kerja dan Portofolio TI sesuai dengan target, strategi dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
2. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan tersedianya solusi TI yang dapat diandalkan, guna mendukung penyediaan informasi yang tepat, cepat dan terintegrasi dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
3. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi berjalan dengan efektif, efisien, dan berkualitas;
4. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pengelolaan perubahan (*change management*) pada sistem informasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan kegiatan operasional layanan TI dilakukan dengan efektif untuk menjamin ketersediaan, keamanan, kehandalan dan keakuratan layanan TI;
6. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan proses manajemen Risiko TI yang handal dalam pelaksanaan program kerja dan proses operasional TI;
7. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses kerja Unit Kerja TI agar sejalan dengan pedoman dan prosedur yang ditentukan dalam mendukung pengembangan proses bisnis Perusahaan;
8. Mengelola seluruh aset TI, termasuk lisensi perangkat lunak, sesuai dengan hukum, peraturan, serta prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku di Perusahaan;

The duties and responsibilities of PTPP's IT function are:

1. Manage, evaluate, and ensure the preparation of IT Master Plans, Work Programs, and IT Portfolios in line with the company's targets, strategies, and business needs;
2. Manage, evaluate, and ensure the availability of reliable IT solutions to provide accurate, fast, and integrated information, adding value to the Company;
3. Manage, evaluate, and ensure the effective, efficient, and high-quality implementation of information system development;
4. Manage, evaluate, and ensure that change management in information systems is carried out following applicable regulations;
5. Manage, evaluate, and ensure that operational IT service activities are effectively carried out to ensure IT services' availability, security, reliability, and accuracy;
6. Manage, evaluate, and ensure the reliability of IT risk management in implementing work programs and IT operational processes;
7. Supervise and evaluate all IT Unit work processes to align with guidelines and procedures to support the company's business process development;
8. Manage, evaluate, and ensure that all IT assets, including licenses, used for delivering IT services are managed under applicable laws, regulations, and contractual obligations;

9. Menyusun, mengelola dan memastikan terlaksananya Pedoman Strategis dan operasional TI sebagai acuan dalam pelaksanaan proses dan pola kerja di Unit Kerja TI;
10. Melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja dan peluang untuk peningkatan terhadap manajemen TI dan terhadap layanan TI; serta
11. Mengelola dan memastikan penguatan aspek *Cybersecurity* pada seluruh layanan TI untuk menjamin keamanan data, kerahasiaan informasi, dan ketangguhan infrastruktur teknologi perusahaan.

9. Develop, manage, and ensure the implementation of IT Strategic and Operational Guidelines as references in implementing processes and work patterns in the IT Unit;
10. Report to top management on the performance and opportunities for improvement in IT management and IT services; and
11. Manage and strengthen cybersecurity across all IT services to ensure data security, information confidentiality, and the resilience of the company's technology infrastructure.

Peta Jalan Pengembangan TI

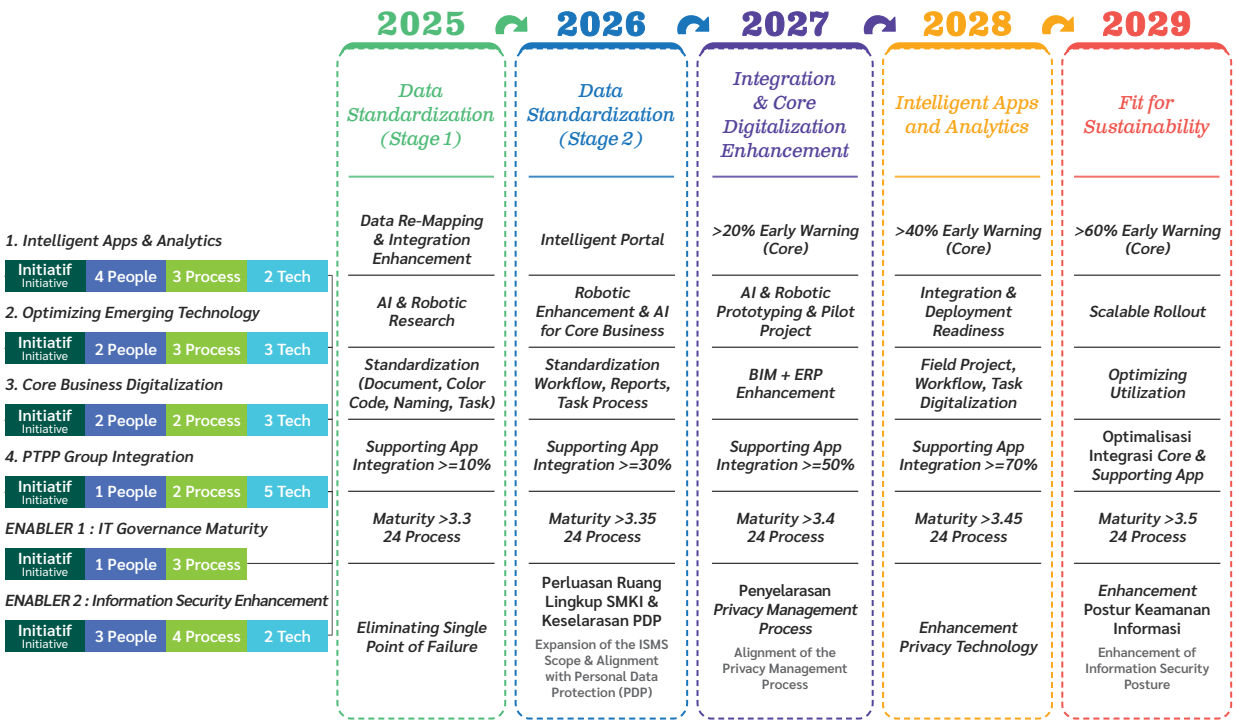
Pengembangan dan inisiatif tata kelola dan manajemen TI dijabarkan dalam *Roadmap Digital & IT Master Plan* 2025-2029. Peta jalan ini ditujukan agar setiap inisiatif TI yang ada selaras dan sinergi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Untuk mendukung pengembangan TI yang selaras, *Digital & IT Master Plan* 2025-2029 mencantumkan mencantumkan 6 tema inisiatif yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama: *people*, *process*, dan *technology* dibawah ini:

IT Development Roadmap

The development and initiatives of IT governance and management are elaborated in the Digital & IT Master Plan 2025-2029. This roadmap is aimed at ensuring that every IT initiative aligns and synergizes with the company's long-term strategic plan.

To support aligned IT development, the Digital & IT Master Plan 2025–2029 outlines six initiative themes that can be grouped into three main categories: people, process, and technology, as follows:



Hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis TI 2025-2029 pada tahun 2025 menunjukkan capaian progres yang telah mencapai 96,77%.

Realisasi Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2025

Implementasi ERP di PTPP tahun 2025 ditekankan bagaimana sistem ERP di PTPP Induk tidak hanya digunakan sebagai sistem pencatatan tetapi juga digunakan sebagai sistem pengendalian Perusahaan.

1. ***Improvement* Sistem ERP PP Induk**
   a. *Improvement* Sistem Pengendalian Perubahan Tarif PPN Pada Sistem ERP
      Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka dilakukan penyesuaian konfigurasi.

      Pada Sistem ERP PP (SAP, *Front End* dan SIPPJO) terkait perubahan tarif PPN tahun 2025, yaitu:
      1) Transaksi yang terdampak antara lain:
         » Pada Transaksi Pengadaan (PR, PO);
         » Verifikasi & Invoicing (*Park Invoice & Post Invoicing*);
         » Transaksi Biaya;
         » SUP & Pembayaran;
         » Kontrak *Owner*; serta
         » So & *Billing* BAP;
      2) Ringkasan Penegasan Perubahan PPN sesuai dengan PMK No. 131 tahun 2024

The results of the evaluation of the implementation of the 2025-2029 IT Strategic Plan in 2025 show that progress has reached 96.77%.

Realization of the Information Technology Work Program in 2025

The ERP implementation at PTPP in 2025 emphasizes how the ERP system at the Parent Company (PTPP) is used not only for record-keeping but also as a company control system.

1. **PTPP ERP System Improvement**
   a. Improvement of the VAT Tariff Change Control System in the ERP System
      Per Finance Minister Regulation No. 131 of 2024 on the treatment of Value Added Tax (VAT), configuration adjustments were made.

      In the PP ERP System (SAP, Front End, and SIPPJO) related to changes in VAT rates in 2025, namely:
      1) Transactions affected include:
         » Procurement Transactions (PR, PO);
         » Verification & Invoicing (Park Invoice & Post Invoicing);
         » Expense Transactions;
         » SUP & Payments;
         » Owner Contracts; and
         » So & Billing BAP;
      2) Summary of VAT Changes in accordance with PMK No. 131 of 2024.

Kategori Category	Keterangan Description	Sebelum 1 Januari 2025 Before January 1, 2025	Mulai 1 Januari 2025 As of January 1, 2025
Tarif PPN VAT Rate	Barang Mewah Luxury Goods	DPP×11%	DPP×12%
	Selain Barang Mewah Other than Luxury Goods	DPP×11%	DPP×12%×11/12
Kode Faktur Pajak Tax Invoice Code	Pajak Keluaran: Output Tax:		
	Transaksi kepada Owner Swasta dan Sesama BUMN Transactions to Private Owners and Other SOEs	1	4
	Transaksi kepada Bendaharawan/ Pemungut PPN Transactions to Treasurers/VAT Collectors	2	2
	Transaksi kepada BUMN dengan IUPK* Transactions to SOEs with IUPK*	3	3

Kategori Category	Keterangan Description	Sebelum 1 Januari 2025 Before January 1, 2025	Mulai 1 Januari 2025 As of January 1, 2025
	Transaksi di daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) & Kawasan Bebas (FTZ) Transactions in Special Economic Zones (KEK) & Free Trade Zones (FTZ)	7	7
	Transaksi yang mendapat Fasilitas dibebaskan Transactions that receive exemption facilities	8	8
	Pajak Masukan: Input Tax:		
	Transaksi dari Vendor ke PTPP > Rp 10.000.000 Transactions from Vendors to PTPP > Rp10,000,000	3	3
	Transaksi dari Vendor ke PTPP < Rp 10.000.000 Transactions from Vendors to PTPP < Rp10,000,000	1	4
SAP	Pajak Keluaran: Output Tax:		
	Transaksi PPN Keluaran Output VAT Transactions	C2	C3
	Pajak Masukan: Input Tax:		
	Transaksi PPN Masukan Non WAPU Non-WAPU Input VAT Transactions	V7	W1
	Transaksi PPN Masukan WAPU WAPU Input VAT Transactions	V8	W2
	Transaksi PPN Masukan Non WAPU Jasa Transporter Non-WAPU Input VAT Transactions for Transport Services	V9	W3
	Transaksi PPN Barang Mewah VAT Transactions for Luxury Goods	-	W4
Contoh Perhitungan Calculation Example	Termin 1 nilai tagihan 100.000.000 Term 1 invoice value 100,000,000	100.000.000×11% = 11.000.000	100.000.000×12%×11/12 = 11.000.000

Ringkasan Penegasan Perubahan PPN sesuai dengan PMK No. 131 tahun 2024

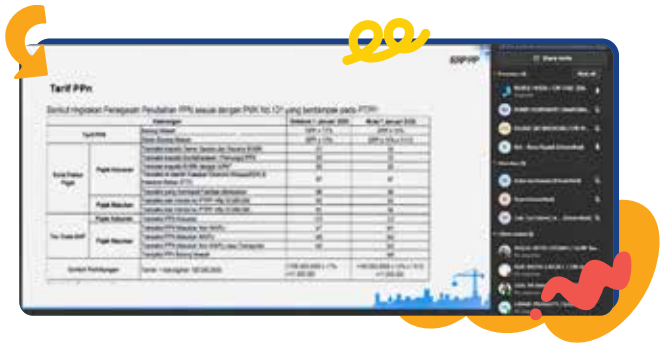
Summary of VAT Changes per PMK No. 131 of 2024

Tax Code yang terbentuk di dalam sistem ERP PP antara lain:
W1 : PPN Masukan Non WAPU Per 2025
W2 : PPN Masukan WAPU per 2025
W3 : PPN Masukan Non WAPU Transporter per 2025
W4 : PPN Barang Mewah Per 2025
C3 : PPN Keluaran Per 2025

Tax codes formed in the PP ERP system include:

W1: Non-WAPU Input VAT as of 2025
W2: WAPU Input VAT as of 2025
W3: Non-WAPU Transporter Input VAT as of 2025

W4: Luxury Goods VAT as of 2025
C3: Output VAT as of 2025



***Improvement* Sistem Pengendalian Perubahan Tarif PPN Pada Sistem ERP**

Improvement of the VAT Rate Change Control System in the ERP System

b. *Improvement* Penerapan Sistem ERP PP SBU Pada Pencatatan Transaksi Akuntansi dan Keuangan serta Konsolidasian PP Group

Evaluasi terhadap kesiapan sistem ERP PP SBU, dan belum adanya Proses Bisnis yang disepakati, serta adanya kebutuhan Pencatatan Transaksi Konsolidasi PP Group guna mempercepat & mengendalikan proses konsolidasi transaksi Akuntansi dan Keuangan PP Group, maka diperlukan Aturan Penerapan Sistem ERP unit bisnis SBU antara lain:

Jenis Transaksi yang dicatat dan dikendalikan di Sistem ERP SAP

1) Pengelolaan Otorisasi User ID SAP;
2) Hak Akses serta *Password* untuk *User ID* tersebut di atas akan disampaikan melalui email dengan pengajuan Form yang diberikan sesuai WI PP/ DIVSCM/W/019 terkait Pengoperasian Sistem ERP SAP;
3) Aturan Master Data;
4) Aturan Proses Transaksi Biaya Usaha;
5) Aturan *Update Budget*;
6) *Reporting & Tracking Data;*
7) Akses Sistem ERP yang Digunakan;
8) Aturan *Timeline* Transaksi; serta
9) Aturan Migrasi Data.

b. Improvement of the Implementation of the PP SBU ERP System in Accounting and Financial Transaction Recording and PP Group Consolidation

Evaluation of the readiness of the PP SBU ERP system, and the absence of agreed business processes, as well as the need for PP Group Consolidation Transaction Recording to accelerate and control the consolidation process of PP Group Accounting and Financial transactions, requires the following rules for the implementation of the SBU ERP system:

Types of transactions recorded and controlled in the SAP ERP system

1) Management of SAP User ID Authorization;
2) Access Rights and Passwords for the above User IDs will be sent via email with the submission of the Form provided in accordance with WI PP/ DIVSCM/W/019 related to the Operation of the SAP ERP System;
3) Master Data Rules;
4) Business Expense Transaction Process Rules;
5) Budget Update Rules;
6) Reporting & Data Tracking;
7) Access to the ERP System Used;
8) Transaction Timeline Rules; and
9) Data Migration Rules.



***Improvement* Penerapan Sistem ERP PP SBU Pada Pencatatan Transaksi Akuntansi dan Keuangan serta Konsolidasian PP Group**

Improvement of the Implementation of the PP SBU ERP System in Accounting and Financial Transaction Recording and PP Group Consolidation

c. *Improvement* Pengembangan SIPPJO (Sistem Pengendalian Proyek *Joint Operation*) Tahap V

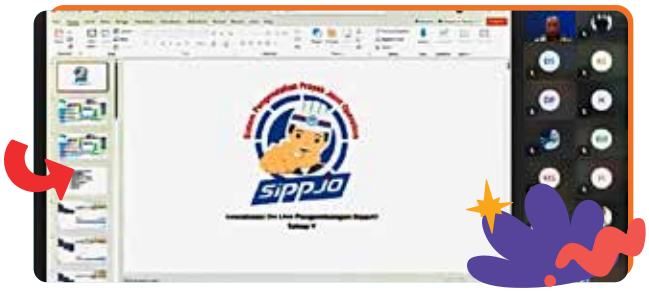
Improvement Pengembangan SIPPJO Tahap V dilakukan Untuk meningkatkan fungsi sistem ERP SIPPJO sebagai sistem pengendalian Perusahaan serta untuk memenuhi hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan sebelumnya. *Improvement* Pengembangan SIPPJO (Sistem Pengendalian Proyek *Joint Operation*) Tahap V antara lain:

1) Perubahan alur input biaya (Bahan, Subkon & Alat) menyesuaikan dengan perubahan Proses Bisnis Perusahaan sesuai hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Sistem Operasi pada Proyek JO;
2) Penambahan *Approval*/Validasi yang melibatkan Divisi Operasi dan Pusat (OCSCC & FINACC) sesuai hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Sistem Operasi pada Proyek JO;
3) Penambahan sistem pembayaran SKBDN pada saat pembuatan PO Bahan, SPK Subkontraktor & PO Alat;
4) Konfigurasi *Lock Hold Point* (*Lock* 6);
5) Reviu terhadap Konfigurasi *Lock* 1 s.d 4 (*Lock* 7), sebagai Kontrol untuk Batasan Masa Berlakunya Konfigurasi *Lock* 1 s.d 4;
6) Notifikasi *reminder* sebelum *Lock* terjadi;
7) Penambahan *Dashboard Lock*;
8) *Monitoring item saving* (CR, CP & KH);
9) Sinkronisasi dengan SAP untuk Perubahan masa pelaksanaan proyek; serta
10) *Update Budget* (RAPK) dengan metode *upload file.*

c. Improvement Development of SIPPJO (Joint Operation Project Control System) Phase V

Improvement Development of SIPPJO Phase V was carried out to enhance the functionality of the SIPPJO ERP system as a company control system and to fulfill the results of the previously conducted Focus Group Discussion (FGD). Improvement Development of SIPPJO (Joint Operation Project Control System) Phase V includes:

1) Changes to the cost input flow (Materials, Subcontractors & Tools) in line with changes to the Company's Business Processes based on the results of the Focus Group Discussion (FGD) on Operating System Development in JO Projects;
2) Addition of Approval/Validation involving the Operations and Central Divisions (OCSCC & FINACC) in accordance with the results of the Focus Group Discussion (FGD) on the Development of the Operating System for JO Projects;
3) Addition of the SKBDN payment system when creating Material POs, Subcontractor SPKs & Equipment POs;
4) Configuration of Lock Hold Point (Lock 6);
5) Review of Lock 1 to 4 (Lock 7) configuration, as a control for the validity period of Lock 1 to 4 configuration;
6) Reminder notification before Lock occurs;
7) Addition of Lock Dashboard;
8) Monitoring item saving (CR, CP & KH);
9) Synchronization with SAP for changes in project implementation periods; and
10) Update Budget (RAPK) using the file upload method.



***Improvement* Pengembangan SIPPJO (Sistem Pengendalian Proyek *Joint Operation*) Tahap V**
Improvement Development of SIPPJO (Joint Operation Project Control System) Phase V

d. *Improvement* Konfigurasi Sistem Pengendalian Imbalan Paska Kerja PTPP Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Konfigurasi TAPER sepanjang tahun 2024, untuk itu perlu diatur kembali prosedur tersebut sebagai berikut:

1) Sesuai Keputusan Direksi No. 26/SK/PP/DIR/2025 tentang Imbalan Paska Kerja, penyisihan Dana Imbalan Paska Kerja sejak Mei

d. Improvement of the Post-Employment Benefits Control System Configuration of PTPP for the Year 2025

Based on the results of the TAPER Configuration Use Evaluation throughout 2024, it is necessary to re-establish the procedures as follows:

1) Per Board of Directors Decree No. 26/SK/PP/DIR/2025 on Post-Employment Benefits, the allocation of Post-Employment Benefit Funds

2025, dihitung menggunakan nilai beban setiap tahun dari Laporan Aktuaris dan dibebankan secara manual berdasarkan personil setiap proyek.

2) Penyisihan Imbalan Paska Kerja berlaku bagi seluruh proyek aktif (regular dan JO).
3) Perencanaan Imbalan Paska Kerja dilakukan dengan ketentuan:
   i. Bagi proyek yang akan didapat, maka Tim Tender Divisi Operasi wajib menganggarkan biaya Imbalan Paska Kerja yang tertuang dalam WBS Z8B yang dibuat;
   ii. Proyek wajib merevisi deskripsi WBS Z8B yang semula ”TAPER” menjadi “Imbalan Paska Kerja”;
   iii. Apabila terdapat *impact* kenaikan *Projected Final Cost* (PFC) proyek dari penganggaran biaya Imbalan Paska Kerja, maka wajib dibahas melalui mekanisme *hold point* atau diskresi Direksi;
   iv. Pada saat Migrasi data Imbalan Paska Kerja, pengajuan *update budget* & WBS Z8B dilakukan oleh proyek dan *approval*-nya dilakukan oleh Divisi Operasi dan Divisi OCSCC;
   v. Divisi Operasi & Divisi HCM wajib menyiapkan anggaran *Budget* Biaya Usaha terkait Imbalan Paska Kerja, sesuai jumlah pegawai di Divisi Operasi dan Unit Kantor Pusat melalui mekanisme *Update Budget* Biaya Usaha; serta
   vi. Anak Perusahaan wajib menyiapkan anggaran Budget Biaya Usaha terkait Imbalan Paska Kerja, sesuai jumlah pegawai di Anak Perusahaan masing-masing. Pencatatan secara konsolidasi di PP melalui metode RK (Rekening Koran) oleh Divisi Finacc.
4) Pembebanan Imbalan Paska Kerja dilakukan dengan ketentuan:
   i. Perhitungan Imbalan Paska Kerja proyek aktif didapatkan dari perhitungan manual berdasarkan personil setiap proyek. *Mapping* Biaya dilakukan oleh Divisi HCM melalui sistem ERP SAP;
   ii. Berikutnya, Divisi HCM melakukan transaksi Tanda Terima Verifikasi (TTV) sehingga terbentuk dokumen *output* dari sistem untuk dilakukan validasi lebih lanjut oleh SVP-HCM, Divisi OC&SCC, dan Divisi FinAcc sehingga terjurnal dalam sistem pada modul Finance;
   iii. Penjurnalan pada sistem tersebut di atas tergantung kepada ketersediaan sisa *budget* WBS Payroll (Imbalan Paska Kerja) yang dimiliki dan masa pelaksanaan proyek (untuk proyek);

from May 2025 onwards shall be calculated using the annual expense value from the Actuarial Report and charged manually based on the personnel of each project.

2) The Post-Employment Benefits provision applies to all active projects (regular and JO).
3) Post-employment benefits planning is carried out with the following provisions:
   i. For projects to be obtained, the Operations Division Tender Team is required to budget for post-employment benefits costs as stated in the WBS Z8B;
   ii. Projects are required to revise the WBS Z8B description from “TAPER” to “Post-Employment Benefits”;
   iii. If there is an impact on the increase in the Projected Final Cost (PFC) of the project from budgeting for Post-Employment Benefits costs, it must be discussed through the hold point mechanism or the Board of Directors’s discretion;
   iv. During the migration of Post-Employment Benefits data, the submission of budget updates & WBS Z8B is carried out by the project and the approval is carried out by the Operations Division and the OCSCC Division;
   v. The Operations Division & HCM Division are required to prepare a Business Cost Budget related to Post-Employment Benefits, per the total employees in the Operations Division and Head Office Unit through the Business Cost Budget Update mechanism; and
   vi. Subsidiaries are required to prepare a Business Cost Budget related to Post-Employment Benefits, in accordance with the number of employees in each Subsidiary. Consolidated recording in PP using the RK (Current Account) method by the FinAcc Division.
4) Post-employment benefits are charged under the following conditions:
   i. The calculation of post-employment benefits for active projects is obtained from manual calculations based on the personnel of each project. Cost mapping is carried out by the HCM Division through the SAP ERP system;
   ii. Next, the HCM Division performs a Verification Receipt (TTV) transaction so that an output document is generated from the system for further validation by the SVP-HCM, OC&SCC Division, and FinAcc Division, so that it is journalized in the system in the Finance module;
   iii. Journaling in the above system depends on the availability of the remaining WBS Payroll (Post-Employment Benefits) budget and the project implementation period (for projects);

iv. Jika sisa *budget* proyek tidak mencukupi sesuai rencana yang dat sebelumnya sesuai poin c. di atas, maka perlu dilakukan *update budget Payroll* melalui mekanisme *Update Budget Payroll*; serta
v. Jika proyek sudah mencatatkan 100% penjualan di bulan sebelumnya, namun dibutuhkan transaksi Imbalan Paska Kerja di bulan berjalan, maka perlu dilakukan open periode oleh Divisi FINACC agar transaksi biaya Imbalan Paska Kerja dapat di-*posting* pada pencatatan bulan sebelumnya.

5) Realisasi Imbalan Paska Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan:
i. Setiap bulan Divisi HCM akan membuat (Surat Usulan Pembayaran) SUP di sistem ERP PP dengan melampirkan dokumen *invoice* dari DPPP ke Divisi FinAcc; serta
ii. Divisi FinAcc akan melakukan pembayaran dan *clearing* hutang atas hutang yang valid, SUP, dan ketersediaan Imbalan Paska Kerja.

6) *Improvement* sistem pengendalian biaya Imbalan Paska Kerja pada sistem ERP PP akan dilakukan Go Live per tanggal 26 Mei 2025

iv. If the remaining project budget is insufficient according to the plan previously stated in point c. above, then it is necessary to update the Payroll budget through the Update Payroll Budget mechanism; and
v. If the project has recorded 100% sales in the previous month, but Post-Employment Benefits transactions are required in the current month, the FinAcc Division needs to open the period so that Post-Employment Benefits cost transactions can be posted in the previous month's records.

5) Post-Employment Benefits are realized in accordance with the following provisions:
i. Each month, the HCM Division will create a Payment Proposal Letter (SUP) in the PP ERP system by attaching the DPPP invoice document to the FinAcc Division; and
ii. The FinAcc Division will make payments and clear valid debts, SUPs, and the availability of Post-Employment Benefits.

6) Improvement of the Post-Employment Benefits cost control system in the PP ERP system is live as of May 26, 2025.



Go Live Konfigurasi Sistem Pengendalian Imbalan Paska Kerja PTPP Tahun 2025
Go Live Configuration of PTPP's Post-Employment Compensation Control System for 2025

e. *Improvement* Sistem Pengendalian User ID SAM (*Site Administration Manager*) Proyek pada Sistem ERP SAP
Dalam rangka penguatan dan peningkatan kompetensi SAM (*Site Administration Manager*), maka telah dilakukan pengembangan sistem ERP SAP PP dan telah dilakukan *User Acceptance Test,* pelatihan serta sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:
1) SAM terlibat dalam pengendalian sistem ERP di PTPP, tidak hanya terbatas dalam transaksi di WBS Z tetapi juga pada WBS Non Z dan lainnya;

e. Improvement to Site Administration Manager (SAM) User ID Control System Project on the SAP ERP System
To strengthen and improve the SAM's competence, the SAP PP ERP system has been developed, and a User Acceptance Test, training, and dissemination have been carried out with the following details:

1) SAM is involved in controlling the ERP system at PTPP, not only limited to transactions in WBS Z but also in WBS Non-Z and others;

2) SAM terlibat di dalam *Modul Project System* (PS), *Material Management* (MM), *Finance & Controlling* (FI), dan *Sales & Distortion* (SD). *User manual* atas penggunaan masing-masing modul dapat diunduh melalui One Drive sesuai alamat link berikut: *User Manual* Fungsi SAM 2025;
3) SAM akan mendapatkan akses ke *user* ID SAP (peningkatan lisensi pengguna ke *user professional*) untuk digunakan ke dalam beberapa transaksi;
4) SAM akan mendapatkan akses ke user SAP pada masing-masing proyek aktif yang di *Assign* sesuai User ID, untuk digunakan ke dalam beberapa *Report*;
5) User ID SAM hanya berlaku pada Proyek Reguler Aktif;
6) Dikarenakan belum pernah ada *User* ID SAM sebelumnya, maka akan dapatkan *User* baru sesuai dengan *role* SAM, berdasarkan data proyek aktif per Juni 2025, *Password* atas *user* SAM tersebut akan di-*email* ke masing-masing *user*;
7) Jika terdapat pengajuan *User* ID baru SAM, maka dilakukan sesuai prosedur yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari SAM mengajukan ke Divisi Operasi yang akan diteruskan ke IT Ops. Setelah mendapat persetujuan dari SM-FinHC Divisi Operasi masing-masing;
8) Sistem Pengendalian *User* ID SAM ini akan berlaku efektif Go Live pada sistem ERP SAP PTPP pada Tanggal 9 Agustus 2025; serta
9) WI & Prosedur yang mengatur proses bisnis *user* SAM di atas dapat segera disesuaikan dan disahkan.

2) SAM is involved in the Project System (PS) Module, Material Management (MM), Finance & Controlling (FI), and Sales & Distribution (SD). The user manual for each module can be downloaded via OneDrive at the following link: User Manual SAM 2025 Functions;
3) SAM will get access to a SAP user ID (user license upgrade to professional user) to be used for several transactions;
4) SAM will get access to a SAP user for each active project that is assigned according to the User ID, to be used for several Reports;
5) The SAM User ID is only valid for Active Regular Projects;
6) Since there has never been a SAM User ID before, a new User will be obtained in accordance with the SAM role, based on active project data as of June 2025. The password for the SAM user will be emailed to each user;
7) If there is a request for a new SAM User ID, it will be processed according to the existing procedure, i.e., SAM will submit the request to the Operations Division, which will then forward it to IT Ops. After obtaining approval from the respective SM-FinHC Operations Division;
8) This SAM User ID Control System will be effective upon Go Live on the SAP ERP system of PTPP on August 9, 2025; and
9) The WI and procedures governing the SAM user business process outlined above should be promptly adjusted and approved.



***Go Live Improvement* Sistem Pengendalian User ID SAM (*Site Administration Manager*) Proyek pada Sistem ERP SAP**

Go Live Improvement of the Site Administration Manager (SAM) User ID Control System for Projects in the SAP ERP System

f. *Improvement* Pengendalian Bank Garansi Pada Sistem ERP PP
Sistem bank garansi untuk proses pengajuan, persetujuan dan *monitoring* masa berlaku bank garansi sudah selesai di kembangkan secara *inhouse* dan sudah dilakukan pengujian oleh tim ITE dan Tim Finacc PTPP. Pengembangan sistem bank garansi bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan surat bank garansi, persetujuan bank garansi dan *monitoring* masa berlaku bank garansi sehingga akan mempermudah *user* dalam proses alur pembuatan bank garansi serta mendapatkan notifikasi kapan masa berlaku bank garansi tersebut selesai, diharapkan dengan adanya sistem ini *user* dapat melakukan Tindakan setelah mendapatkan notifikasi tersebut. Sistem Bank Garansi pada saat ini masuk kedalam Sistem FrontEnd SAP.

f. Improvement of Bank Guarantee Control in the PP ERP System
The bank guarantee system for application, approval, and monitoring of the validity period has been developed in-house and tested by the ITE team and the PTPP Finacc Team. The development of the bank guarantee system aims to simplify the submission of bank guarantee letters, the approval of bank guarantees, and the monitoring of their validity periods, making it easier for users to create bank guarantees and receive notifications when the validity period expires. It is hoped that with this system, users can take action after receiving such notifications. The Bank Guarantee System is currently integrated into the SAP FrontEnd System.



***Go live* Sistem Pengendalian Bank Garansi Pada Sistem ERP SAP dilakukan pada tanggal 8 September 2025**
The Bank Guarantee Control System in SAP ERP went live on September 8, 2025

2. ***Improvement* ERP Anak Perusahaan**
a. *Improvement* ERP SAP PP Urban Penggunaan

Sistem ERP SAP Pada Pengelolaan Proyek PP Urban Berdasarkan Kajian dari Tim *Project Management Office* (PMO) yang berfokus pada *Portfolio Streamlining*, khususnya dalam pengelolaan proyek *share services* dan Memo No. 069/M/PP/OC SCM/2024, terkait Aturan Transaksi & Penggunaan Sistem ERP SAP Pada Pengelolaan Proyek PPUB:

- Lini Bisnis Konstruksi PP Urban digabung ke Divisi Operasi Gedung PP Induk; serta

- Sistem yang digunakan adalah ERP-SAP untuk mengakomodir *Proyek Reguler & Joint Operation* (JO/JV) dengan PP Urban (*Share Services*) yang dilakukan secara *inhouse* melalui mekanisme *rollout* terhadap Sistem ERP SAP di PP Induk.

2. **ERP Improvement for Subsidiaries**
a. Improvement of SAP PP Urban ERP Use of SAP ERP System in PP Urban Project Management
Based on a review by the Project Management Office (PMO) team focusing on Portfolio Streamlining, particularly in the management of shared services projects and Memo No. 069/M/PP/OC SCM/2024, regarding Transaction Rules & Use of the SAP ERP System in PPUB Project Management:

- The PP Urban Construction Business Line is merged into the PTPP Building Operations Division; and
- The system used is ERP-SAP to accommodate Regular & Joint Operation (JO/JV) Projects with PP Urban (Share Services) carried out in-house through a rollout mechanism for the SAP ERP System at PTPP.

Dalam Pengembangan sistem tersebut diatur:

- Proses Bisnis Konstruksi yang diterapkan pada sistem ERP SAP dalam pengelolaan proyek PP Urban adalah sama seperti di PP Induk;
- Proyek PP Urban yang menggunakan sistem ERP SAP ini terbatas pada Proyek yang baru didapat;
- Terdapat penyesuaian dan penambahan konfigurasi pada sistem ERP SAP yang akan digunakan;
- Otorisasi yang akan diberikan dalam transaksi PP Urban;
- *Monitoring* terkait pengelolaan Proyek yang dilakukan oleh unit Akuntansi Divisi Operasi; serta
- Pemberian Hak akses terhadap sistem ERP SAP dan *Front End* sesuai aturan WI IT *Help-Desk* (PP/DIVSCM/W/012) & WI Pengoperasian Sistem ERP SAP (PP/DIVSCM/W019.

In the development of this system, the following are regulated:

- The Construction Business Process applied to the SAP ERP system in the PP Urban project management is the same as in PTPP;
- PP Urban projects that use this SAP ERP system are limited to newly acquired projects;
- There are adjustments and additions to the configuration of the SAP ERP system that will be used;
- Authorizations to be granted in PP Urban transactions;
- Monitoring related to project management carried out by the Operations Division Accounting unit; and
- Granting of access rights to the SAP ERP system and Front End in accordance with the WI IT Help-Desk (PP/DIVSCM/W/012) & WI SAP ERP System Operation (PP/DIVSCM/W019) rules.



***User Acceptance Testing* (UAT) Sistem ERP SAP untuk Pengelolaan Proyek PP Urban**
SAP ERP System User Acceptance Testing (UAT) for PP Urban Project Management

b. *Benchmark* Implementasi ERP SAP PT Adhi Karya di PTPP
Menindaklanjuti Memo No. 013-0/2025/027, Tanggal 21 Februari 2025 terkait Permohonan *Benchmark* Implementasi SAP di PTPP serta untuk meningkatkan sarana Kolaborasi & *Sharing Knowledge* terkait Implementasi ERP, telah dilaksanakan kegiatan *Benchmark* Implementasi ERP SAP PT Adhi Karya di PTPP pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025.

b. SAP ERP Implementation Benchmarking at PT Adhi Karya in PTPP
Following up on Memo No. 013-0/2025/027, dated February 21, 2025, on the Request for SAP Implementation Benchmarking at PTPP and to improve collaboration and knowledge sharing related to ERP implementation, the SAP ERP Implementation Benchmarking of PT Adhi Karya at PTPP was conducted on Thursday, March 13, 2025.



***Benchmark* Implementasi ERP SAP PT Adhi Karya di PT PP, Kamis 13 Maret 2025**
SAP ERP Implementation Benchmarking at PT Adhi Karya at PTPP, Thursday, March 13, 2025

c. *Benchmark* PT Brantas Abipraya terkait Implementasi *Dashboard* Pengendalian Produksi & SCM PTPP

Menindaklanjuti surat permohonan *benchmarking* dari PT Brantas Abipraya No. 210/PRD/OPS/V/2025, terkait Permohonan Benchmark Implementasi *Dashboard* Pengendalian Produksi & SCM PTPP, telah dilaksanakan kegiatan *Benchmark* PT Brantas Abipraya terkait Implementasi *Dashboard* Pengendalian Produksi & SCM PTPP, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025.

c. PT Brantas Abipraya Benchmarking related to the Implementation of the Production Control & SCM Dashboard of PTPP

Following up on the benchmarking request letter from PT Brantas Abipraya No. 210/PRD/OPS/V/2025, on the Request for Benchmarking of the Implementation of the Production Control & SCM Dashboard at PTPP, a benchmarking activity was conducted for PT Brantas Abipraya regarding the Implementation of the Production Control & SCM Dashboard at PTPP, on Tuesday, May 27, 2025.



***Benchmark* PT Brantas Abipraya terkait Implementasi Dashboard Pengendalian Produksi & SCM PTPP, Selasa 27 Mei 2025**
PT Brantas Abipraya Benchmark related to the Implementation of the Production Control & SCM Dashboard at PTPP, Tuesday, May 27, 2025

d. Sistem ERP PP Hospitality (BSI) Pada Pencatatan Transaksi Akuntansi dan Keuangan serta Konsolidasian PP Group Pengembangan
Setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan sistem ERP PP SBU BSI, dan belum adanya Proses Bisnis yang disepakati, serta adanya kebutuhan Pencatatan Transaksi Konsolidasi PP Group guna mempercepat & mengendalikan proses konsolidasi transaksi Akuntansi dan Keuangan PP Group, maka diperlukan Aturan Penerapan Sistem ERP unit bisnis SBU BSI antara lain:

Jenis Transaksi yang dicatat dan dikendalikan di Sistem ERP SAP.
1) Pengelolaan Otorisasi *User* ID SAP.
2) Hak Akses serta *Password* untuk *User* ID.
3) Aturan Master Data.
4) Master Data Vendor;
   i. Master Data *Profit Center*;
   ii. Master Data GL *Account*;
   iii. Master Data Tarif PPN & PPH;
   iv. Master Data Lainnya; serta
   v. Master Data *House Bank, Bank Type, Payment Term, Payment Method & Material Group*.
5) Aturan Proses Transaksi Biaya Usaha
   i. Jenis Transaksi;
   ii. *Planning Budgeting*;
   iii. Input Rencana Penyerapan Anggaran;
   iv. *Mapping* Biaya Usaha/*Purchase Request*;
   v. Pengadaan Barang & Jasa/*Purchase Order*;
   vi. *Create* TTV (Tanda Terima Vendor);

d. PP Hospitality (BSI) ERP System for Accounting and Financial Transaction Recording and PP Group Consolidation Development
After evaluating the readiness of the PP SBU BSI ERP system, in the absence of an agreed Business Process as well as the need for PP Group Consolidation Transaction Recording to accelerate and control the consolidation process of PP Group Accounting and Financial transactions, the following ERP System Implementation Rules for the SBU BSI business unit are required:

Types of transactions recorded and controlled in the SAP ERP system.
1) Management of SAP User ID Authorization.
2) Access Rights and Passwords for User IDs.
3) Master Data Rules.
4) Vendor Master Data;
   i. Profit Center Master Data;
   ii. GL Account Master Data;
   iii. VAT & Income Tax Rate Master Data;
   iv. Other Master Data; and
   v. Master Data House Bank, Bank Type, Payment Term, Payment Method & Material Group.
5) Business Expense Transaction Process Rules
   i. Transaction Types;
   ii. Planning Budgeting;
   iii. Budget Absorption Plan Input;
   iv. Business Expense Mapping/Purchase Request;
   v. Procurement of Goods & Services/Purchase Order;
   vi. Create TTV (Vendor Receipt);

vii. Validasi TTV (Tanda Terima Vendor);
viii. *Park & Posting Invoice*; serta
ix. *Payment*.
6) Aturan Proses Transaksi HPP.
7) Aturan Update Budget.
8) Reporting & Tracking Data.
9) Akses Sistem ERP SAP yang Digunakan.
10) Aturan Timeline Transaksi.

vii. Validate TTV (Vendor Receipt);
viii. Park & Post Invoice; and
ix. Payment.
6) HPP Transaction Process Rules.
7) Update Budget Rules.
8) Reporting & Tracking Data.
9) Access to the SAP ERP System Used.
10) Transaction Timeline Rules.



Sistem ERP PP Hospitality (BSI) Pada Pencatatan Transaksi Akuntansi dan Keuangan serta Konsolidasian PP Group Pengembangan
PP Hospitality (BSI) ERP System for Accounting and Financial Transaction Recording and PP Group Development Consolidation

Penyelenggaraan *Cyber Security* Tahun 2025

Pada tahun 2025, PTPP telah melaksanakan beberapa inisiatif strategis terkait keamanan siber sebagai fondasi program di tahun berikutnya, yaitu:

1. **Implementasi Keamanan Perangkat Terintegrasi**
   Memastikan hanya perangkat yang terdaftar dan dikelola resmi oleh Perusahaan yang dapat mengakses sistem dan data korporat.
2. **Kebijakan Pengelolaan Aset Informasi**
   Mekanisme pengendalian hak akses berdasarkan tingkat sensitivitas data dan peran pengguna untuk mencegah kebocoran informasi.
3. **Peningkatan *Awareness* & Literasi Digital**
   Program edukasi rutin kepada seluruh pegawai mengenai ancaman siber terkini.
4. **Pembaruan Sertifikasi ISO 27001:2022**
   Keberhasilan dalam memperbarui standar internasional keamanan informasi melalui audit oleh British Standard Institution (BSI) pada September 2025.
5. **Pemenuhan Prioritas Keamanan Siber BUMN**
   Melaksanakan langkah strategis sesuai arahan SK-275/MBU/11/2024 mengenai prioritas penerapan keamanan siber di lingkungan BUMN.

Cybersecurity Implementation in 2025

In 2025, PTPP has implemented several strategic initiatives related to cybersecurity as the foundation for the following year's program, namely:

1. **Integrated Device Security Implementation**
   Ensuring that only devices that are registered and officially managed by the Company can access corporate systems and data.
2. **Information Asset Management Policy**
   Access control mechanisms based on data sensitivity levels and user roles to prevent information leaks.
3. **Increased Awareness & Digital Literacy**
   Regular education programs for all employees on the latest cyber threats.
4. **ISO 27001:2022 Certification Update**
   Success in updating international information security standards through an audit by the British Standards Institution (BSI) in September 2025.
5. **Fulfillment of SOE Cybersecurity Priorities**
   Implementing strategic measures in accordance with SK-275/MBU/11/2024 on cybersecurity implementation priorities within SOEs.

Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian atas Penyelenggaraan TI;

PTPP secara konsisten menindaklanjuti hasil audit serta penilaian penyelenggaraan TI melalui asesmen tata kelola dan manajemen TI berkala. Langkah strategis ini bertujuan untuk mencapai standar kapabilitas sesuai target perusahaan, khususnya dalam memitigasi temuan audit maupun rekomendasi dari penilaian keamanan siber.

Komitmen ini dibuktikan melalui pencapaian sebagai berikut:

- **IT *Maturity Level***
  Meraih nilai 3,3 (Level 3 - *Matured*), yang menunjukkan bahwa PTPP telah memiliki pedoman baku yang terstandarisasi dalam setiap pelaksanaan proses TI.
- ***Cyber Security Maturity* (CSM)**
  Berdasarkan hasil *monitoring* dan penilaian bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PTPP terus melakukan penguatan kontrol keamanan informasi untuk meningkatkan ketahanan aset digital dari ancaman siber yang kian kompleks. Berdasarkan hasil *monitoring* tahun 2025 oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PTPP berhasil mencapai Indeks Kematangan sebesar 4,10 yang menempatkan perusahaan pada Tingkat Kematangan Level 4.

Rencana Pengembangan TI Tahun 2026

Dalam upaya menjaga kesinambungan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta memperkuat peran Teknologi Informasi (TI) sebagai *business enabler* dalam meningkatkan kapabilitas digital dan TI, PTPP mengadopsi IT *Master Plan* (ITMP) 2025-2029. Berikut adalah beberapa rencana pengembangan TI yang akan dilaksanakan pada tahun 2026:

1. ***Continuous Upskill Robotic and AI Fundamental***

   Peningkatan kapabilitas SDM PTPP melalui pelatihan berkelanjutan terkait dasar-dasar teknologi robotik dan kecerdasan buatan (AI), agar mampu beradaptasi dan mendukung transformasi berbasis teknologi masa depan.
2. ***Upgrading IT Governance Capability***
   Dimulai dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan SDM dalam aspek tata kelola TI. Pelatihan difokuskan pada pengambil kebijakan dan pengelola sistem agar dapat menyusun kontrol, prosedur, dan arah strategis TI yang terstruktur.
3. ***Enhancement PDP Governance and Policies***
   Penguatan tata kelola dan kebijakan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai respons terhadap tuntutan regulasi, khususnya implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Fokusnya adalah membangun landasan tata kelola, peran, dan kebijakan yang sistematis terkait perlindungan data pribadi di seluruh organisasi.

Follow-up of Audit and/or Assessment Results on IT Implementation

PTPP consistently follows up on audit results and IT implementation assessments through periodic IT governance and management assessments. This strategic step aims to meet the company's capability standards, particularly by mitigating audit findings and recommendations from cybersecurity assessments.

This commitment is evidenced by the following achievements:

- **IT Maturity Level**
  Achieved a score of 3.3 (Level 3 - Matured), which indicates that PTPP has standardized guidelines for every IT process implementation.
- **Cyber Security Maturity (CSM)**
  Based on the results of joint monitoring and assessment with the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), PTPP continues to strengthen information security controls to improve the resilience of digital assets from increasingly complex cyber threats. Based on 2025 monitoring by BSSN, PTPP achieved a Maturity Index of 4.10, placing the company at Maturity Level 4.

IT Development Plan for 2026

To maintain the continuity of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and strengthen the role of Information Technology (IT) as a business enabler in improving digital and IT capabilities, PTPP has adopted the 2025-2029 IT Master Plan (ITMP). The following are some of the IT development plans that will be implemented in 2026:

1. **Continuous Upskilling in Robotics and AI Fundamentals**
   Enhancing the capabilities of PTPP's human resources through continuous training in the fundamentals of robotics and artificial intelligence (AI), enabling them to adapt to and support future technology-driven transformation.
2. **Upgrading IT Governance Capability**
   Beginning with improving human resource understanding and skills in aspects of IT governance. Training focuses on policymakers and system managers to help them develop structured IT controls, procedures, and strategic directions.
3. **Enhancement of PDP Governance and Policies**
   Strengthening Personal Data Protection (PDP) governance and policies in response to regulatory requirements, particularly the implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in Indonesia. The focus is on building a systematic foundation of governance, roles, and policies related to personal data protection throughout the organization.

4. ***High Availability DC & DRC (Critical Services)***
   Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TI yang digunakan oleh layanan-layanan kritikal, melalui peningkatan desain dan arsitektur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC). Fokus utama adalah memperkuat fondasi *high availability & resiliency* untuk mengurangi downtime serta meningkatkan *business continuity.*

Rencana Penyelenggaraan Cyber Security Tahun 2026

Rencana penyelenggaraan *Cyber Security* sebagai berikut:

1. ***Comprehensive Device Security - Endpoint Privilege Management***
   Implementasi EPM merupakan perwujudan prinsip *Least Privilege* untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Langkah ini terintegrasi dengan penguatan *Identity and Access Management* dalam kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mencakup seluruh level organisasi.
2. ***Comprehensive Device Security - Server Endpoint Security***
   Fokus utama pada tahun 2026 adalah penguatan *environment* aplikasi kritikal melalui arsitektur *High Availability* (HA) untuk meminimalkan *downtime* operasional. Infrastruktur server akan didesain untuk mengeliminasi titik kegagalan tunggal (*Single Point of Failure*) guna menjamin kesinambungan bisnis lintas entitas dalam PTPP Group. Keamanan server diperketat dengan menerapkan segmentasi jaringan berbasis *Zero Trust Network Architecture*.

4. **DC & DRC (Critical Services) High Availability**
   Improving the availability of IT infrastructure used by critical services, through enhancements to the design and architecture of the Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC). The main focus is to strengthen the foundation of high availability & resiliency to reduce downtime and improve business continuity.

Cybersecurity Implementation Plan for 2026

The cybersecurity implementation plan is as follows:

1. **Comprehensive Device Security - Endpoint Privilege Management**
   EPM implementation embodies the Least Privilege principle, ensuring that each user has only the access rights necessary to perform their functions. This step is integrated with the strengthening of Identity and Access Management within the Information Security Management System (ISMS), which covers all levels of the organization.

2. **Comprehensive Device Security - Server Endpoint Security**
   The main focus in 2026 is to strengthen the critical application environment through a High Availability (HA) architecture to minimize operational downtime. The server infrastructure will be designed to eliminate single points of failure, ensuring business continuity across entities in the PTPP Group. Server security will be strengthened by implementing network segmentation using a Zero Trust Network Architecture.

Kode Etik
Code of Conduct

Kode Etik Perusahaan dan Penerapannya

Agar Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang memiliki mekanisme *reward & punishment*. Perusahaan memiliki Kode Etik atau *Code of Conduct* yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan kesesuaian perilaku insan PTPP dengan apa yang diharapkan oleh Perusahaan. Kode Etik Perusahaan juga menjelaskan mengenai filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Perusahaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya.

The Company's Code of Conduct and Its Implementation

To implement the Company's Vision, Mission, and Values more pragmatically, a tool with a reward-and-punishment mechanism is necessary. The Company has a Code of Conduct created to influence, form, regulate, control, and implement behavioral adjustment of PTPP personnel with what the Company expects. The Company's Code of Conduct also describes the business philosophy and values within the Company in regulating and managing it comprehensively to achieve the business objectives as stated in its vision and mission.

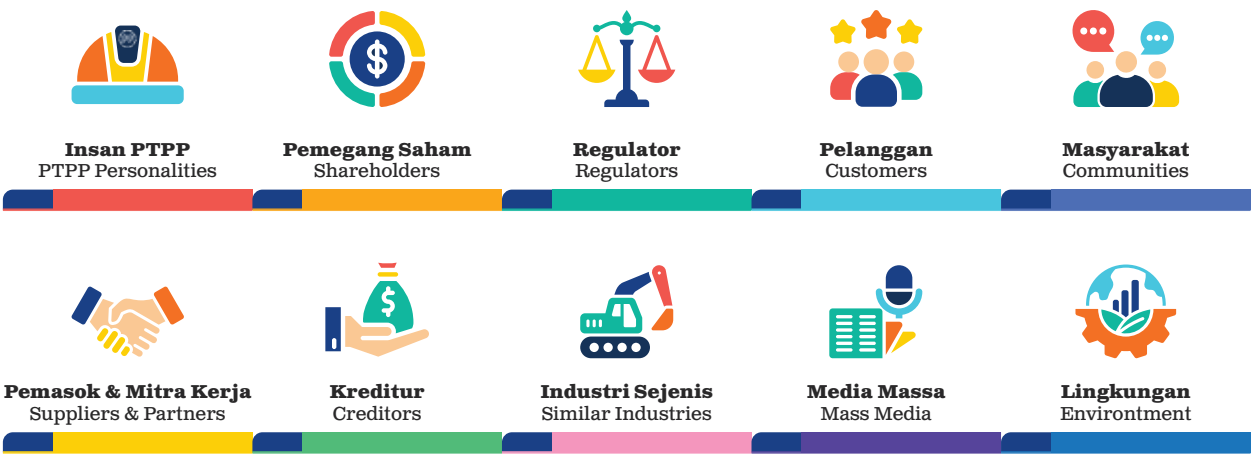
Hubungan yang Harmonis dengan Pemangku Kepentingan

Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perusahaan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Harmonious Relationship with Stakeholders

One of the major purposes of implementing GCG principles is to develop the business entity's relations with stakeholders. The Company formulated its Code of Conduct to build a harmonious relationship between its operational and business interests and the interests of every Stakeholder within the Company's operational and business scope and those impacted by the Company's operational and business activities.

Membangun Hubungan Harmonis dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan
Developing Harmonious Relationships with the Company's Stakeholders



Visi, Misi, serta Tata Nilai Perusahaan sebagai Dasar Utama

Perusahaan telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai dasar utama dalam arahan bagi pengembangan Perusahaan ke depan.

The Company's Vision, Mission, and Values as the Main Basis

The Company has formulated and established its vision and mission, which will be the main basis for directing its future developments.

Visi Vision

Menjadi Kontraktor Pilihan Utama yang Inovatif, Unggul dan Berkelanjutan didukung Keuangan yang Sehat.

To Become a Leading Innovative, Excellent, and Sustainable Contractor, with Robust Finance Foundation.



Misi Mission

1. Menyediakan jasa konstruksi dan EPC dengan fokus pada pengembangan gedung dan infrastruktur, yang berbasis tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen QHSE, manajemen risiko, dan prinsip keberlanjutan.
   To provide construction and EPC services focusing on building and infrastructure development, observing good corporate governance, risk management, and sustainability principles.
2. Menciptakan nilai tambah optimal bagi pemangku kepentingan melalui daya saing yang tinggi dan sinergi strategis dalam konstruksi dan EPC, serta investasi terkait.
   To create an optimum added value for stakeholders through high competitiveness and strategic synergy in construction, EPC, and related investment.
3. Mewujudkan talenta unggul dan tangguh dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan evaluasi yang selaras dengan budaya Perusahaan.
   To develop a distinguished and resilient talent through fulfillment, development, and evaluation processes aligned with the Company's culture.
4. Mencapai kinerja unggul berkelanjutan lewat pengoptimalan inovasi teknologi dan manajemen pengetahuan.
   To achieve a sustainable excellent performance by leveraging technological innovation and knowledge management.
5. Membangun Perusahaan yang berkelanjutan berlandaskan keuangan yang sehat.
   To build a sustainable Company with robust financial foundation.

Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Budaya/Tata Nilai yang diharapkan dapat dipahami sebagai kebijakan mendasar Perusahaan untuk mengembangkan keorganisasian yang **sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.**

The vision and mission are further derived into the Culture/Values expected to be understood as the Company's fundamental policy to develop the organization **in line with the established Vision and Mission.**

Budaya/Tata Nilai PTPP
PTPP Culture/Values



Amanah
Trustworthy

Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan
Uphold the Trust Given

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Fulfill promises and commitments.
- Responsibility for the duties, decisions, and actions taken.
- Uphold moral and ethical values.



Kompeten
Competent

Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas
Continue to Learn and Develop Capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improve self -competence in facing dynamic challenges.
- Help others learn.
- Complete tasks with the best quality.



Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai Perbedaan
Mutual Care and Respect for Differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang produktif.
- Appreciate anybody regardless of their background.
- Keen on helping others.
- Establish a productive working environment.



Loyal
Loyal

Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and Prioritizing the Interests of the Nation and the State

- Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum & etika.
- Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and State.
- Willingness to sacrifice for the greater good.
- Obedient to the leaders as long as it doesn't contradict the law and ethics.



Adaptif
Adaptive

Terus Berinovasi dan Antusias Dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan
Continue to Innovate and be Enthusiastic in Driving or Facing Change

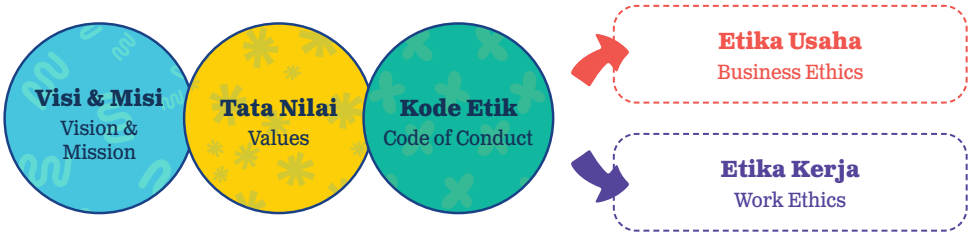
- Cepat menyesuaikan diri untuk lebih baik.
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif.
- Adaptive to be better.
- Continuously adapt following technological development.
- Act proactively.



Kolaboratif
Collaborative

Membangun Kerjasama yang Sinergis
Build Synergic Cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Offer opportunities to various parties to contribute.
- Be open to cooperation in creating added value.
- Encourage the use of various resources for the common goals.



Penetapan Kode Etik

PTPP telah menyusun Kode Etik Perusahaan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 159/KOM/PP/2022 dan No. 403/DIR/PP/DU/2022 tanggal 30 November 2022. Kode Etik Perusahaan mengatur 2 (dua) aspek mendasar, yaitu Etika Usaha dan Etika Kerja.

Pokok-pokok Isi dan Muatan Kode Etik

Secara terperinci Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada hukum dan kebijakan Perusahaan:
   a. Seluruh Insan PTPP harus tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan, termasuk budaya dan nilai-nilai Perusahaan;
   b. Tidak diperkenankan melanggar hukum, peraturan atau kebijakan Perusahaan untuk memenuhi target keuntungan;
   c. Kriteria praktik suatu aktivitas yang dapat diterima, tidak hanya semata-mata dilihat dari praktik yang dijalankan oleh oleh kompetitor atau pihak lain di pasar. Jika hukum dan/atau peraturan menjadi tidak relevan lagi atau jika para kompetitor tidak lagi mematuhinya, insan PTPP tetap tidak diijinkan untuk melanggarnya;
   d. Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan; Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Afiliasi; semua Pejabat 1 level dan 2 level dibawah Direksi; serta seluruh *Project Manager/Project Director* baik Perusahaan maupun di Anak Perusahaan termasuk Perusahaan Afiliasi wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, sesuai Peraturan yang berlaku;
   e. Semua insan PTPP dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dilarang melakukan *insider trading;* dan
   f. Semua insan PTPP tidak boleh membocorkan rahasia Perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan dan berpengaruh terhadap harga saham.
2. Terkait dengan Budaya Perusahaan, Manajemen telah merumuskan Nilai-Nilai Perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 111/SK/PP/DIR/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang disingkat "AKHLAK", yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai Perusahaan tersebut diharapkan melekat pada diri masing-masing Insan PTPP.

Determination of the Code of Conduct

PTPP has created the Company's Code of Conduct, as stated in the Joint Statement of the Board of Commissioners No. 159/KOM/PP/2022 and Board of Directors No. 403/DIR/PP/2022, dated November 30, 2022. The Code of Conduct regulates two basic aspects: Business Ethics and Work Ethics.

Subjects and Content of the Code of Conduct

Specifically, the Company's Code of Conduct is as follows:

1. Compliance with the laws and Company policies:
   a. All PTPP personnel must comply with the provisions of law and the regulations established in Company policies, including the Company's culture and values;
   b. Violations against the law, Company regulations, or Company policies for the fulfillment of profit targets are not allowed;
   c. The criteria for acceptable activities are not solely from the perspective of the practices of competitors or other parties in the market. If laws and/or regulations become irrelevant or competitors no longer comply with them, PTPP personnel is still prohibited from violating them;
   d. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors, the Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors, including the Affiliated Companies' Board of Commissioners and Board of Directors, all Officials one and two levels below the Board of Directors, and all Project Managers/Project Directors of the Company, Subsidiaries, and Affiliated Companies are obligated to fulfill and submit the Report of State Official Assets to the KPK, according to applicable regulations;
   e. All PTPP personnel and parties with contractual relationships are prohibited from conducting insider trading; and
   f. All PTPP personnel are not allowed to leak the Company's confidential information related to policies, which can affect stock prices.
2. In terms of Company values, the Management has formulated the Company Values stated in the Board of Directors Decree No. 111/SK/PP/DIR/2020 dated July 14, 2020, abbreviated into "AKHLAK," i.e, Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. These Company values are expected to be instilled in every PTPP personnel.

3. Hubungan dengan pihak luar/eksternal
   Hubungan yang dijalankan PTPP yang patut diperhatikan, antara lain: hubungan dengan komunitas setempat dalam hal penggunaan sumber daya dan transaksi dengan rekanan dan pemasok yang terkait dengan benturan kepentingan, suap, kontribusi dan aktivitas politik, hadiah dan fasilitas lain yang merupakan bentuk Gratifikasi.

Isi Kode Etik Perusahaan secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Pendahuluan
   - Kata Pengantar;
   - Peranan Kode Etik;
   - Unsur-Unsur Kode Etik;
   - Daftar Istilah yang Akan Dipakai.
2. Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan
   - Visi;
   - Misi;
   - Budaya dan Nilai Perusahaan.
3. Etika Usaha
   - Etika Perusahaan Terhadap Pegawai;
   - Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan;
   - Etika Perusahaan Terhadap Penyedia Barang dan Jasa;
   - Etika Perusahaan Terhadap Kompetitor;
   - Etika Perusahaan Terhadap Komunitas;
   - Etika Perusahaan Terhadap Anti KKN.
4. Etika Kerja
   - Ketaatan Kepada Hukum dan Kebijakan Perusahaan;
   - Hubungan External;
   - Hubungan dengan komunitas setempat;
   - Transaksi dengan Rekanan dan Pemasok;
   - Kebijakan Perlindungan Aset Perusahaan;
   - ntegritas dan Akurasi Pembukuan;
   - Pelanggaran Terhadap Kode Etik;
   - Pengawasan Kode Etik;
   - Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
   - Pelaporan Pengaduan atas Pelanggaran;
   - Lain-Lain.

Tujuan Penerapan Kode Etik

Pelaksanaan kode etik ini merupakan upaya untuk:
1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan PTPP bahwa PTPP beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran pegawai yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, sebab menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi; dan
3. Menjadi bagian dari komunitas bisnis jasa konstruksi, sebab pelaksanaan dan komitmen terhadap kode etik ini dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai kasus pengadilan, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun *goodwill* dan reputasi Perusahaan.

3. Relations with External Parties
   The relations developed by PTPP that require attention are the relations with local communities in terms of resource use as well as transactions with partners and suppliers related to the conflict of interest, bribery, political contribution and activities, gifts, and other facilities which are forms of gratuity.

The contents of the Company's Code of Conduct are generally:
1. Introduction
   - Foreword;
   - Role of the Code of Conduct;
   - Elements of the Code of Conduct;
   - List of Used Terms.
2. Company Vision, Mission, and Values
   - Vision;
   - Mission;
   - Company Culture and Values.
3. Business Ethics
   - Company Ethics to Employees;
   - Company Ethics to Customers;
   - Company Ethics to Suppliers of Goods and Services;
   - Company Ethics to Competitors;
   - Company Ethics to Communities;
   - Company Ethics on KKN.
4. Work Ethics
   - Compliance with Laws and Company Regulations;
   - External Relations;
   - Relationship with Local Communities;
   - Transactions with Partners and Suppliers;
   - Policies of Company Asset Protection;
   - Accountancy Integrity and Accuracy;
   - Violations of the Code of Conduct;
   - Code of Conduct Monitoring;
   - Gratuity Control Implementation;
   - Whistleblowing;
   - Others.

Purpose of Implementing the Code of Conduct

Implementing the Code of Conduct is an effort to:
1. Explain to all PTPP personnel that PTPP operates justly and openly, creating a good working environment with low employee turnover rates and improving welfare;
2. Become a part of certain communities since maintaining good relationships is a fundamental aspect of the Company's long-term success in achieving social welfare and economic improvement; and
3. Become a part of the construction service business community since the implementation and commitment to the Code of Conduct can support the Company in many court cases and become a part of proper risk management, building the Company's goodwill and reputation.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Kode etik Perusahaan mewajibkan seluruh jajaran personil baik itu para pejabat, manajemen maupun pegawai untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan, termasuk budaya Perusahaan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan PTPP.

Setiap pegawai, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di PTPP diwajibkan untuk mengerti, menghayati dan menjalankan Kode Etik sebagai landasan moral, sikap dan etika dalam bertindak dan berperilaku.

Implementation of a Code of Conduct for All Organizational Levels

The Code of Conduct mandates all personnel, including officials, management, and employees, to comply with and adhere to the laws and regulations applicable within the Company, including its culture, avoid activities that may cause conflicts of interest, as well as safeguard and maintain the confidentiality of the Company's business information and information related to parties with a relationship with PTPP.

Every employee, Board of Directors member, and Board of Commissioners member at PTPP is required to understand, internalize, and adhere to the Code of Conduct as a moral foundation, attitude, and ethics in their actions and behavior.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

PTPP senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan kepada seluruh pegawai, mulai dari level operasional sampai kepada *top management*. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh Insan PTPP senantiasa patuh terhadap Pedoman Etika Perusahaan. PTPP melakukan penegakan terhadap Pedoman Etika Perusahaan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Pedoman Etika Perusahaan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan.

PTPP mewajibkan setiap pegawai dan manajemen Perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua organ Perusahaan memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen dari semua jajaran Perusahaan.

Buku Kode Etik merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha Perusahaan. Oleh karena itu Insan PTPP harus menerapkan Kode Etik ini sebagai sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan Pedoman ini dan memastikan bahwa Kode Etik telah diterapkan dengan baik di unit kerja yang dipimpinnya.

Buku saku Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian yang diterbitkan oleh Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia) Perusahaan yang berlaku merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sebagai wujud dari komitmen penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, setiap awal tahun Insan PTPP diwajibkan menandatangani form Kepatuhan Terhadap Kode Etik Perusahaan; dan sebagai penanggung jawab adalah Divisi HCM.

Dissemination and Internalization of the Code of Conduct

PTPP continuously disseminates the Company's Guidelines of Business Ethics and Work Ethics to all employees, from the operational level to the top management. This dissemination is intended so that all PTPP personnel always comply with the Company's Code of Conduct. PTPP enforces the Code of Conduct through periodic monitoring of its implementation and providing facilities for grievances about violations of the Code of Conduct.

PTPP obligates all employees and management of the Company to sign an Integrity Pact related to compliance with the Code of Conduct to ensure that all Company organs are committed to building sound business ethics and culture as well as building the understanding, concern, and commitment of all levels of the Company.

The Code of Conduct is the basis for implementing the Company's business activities. Therefore, PTPP personnel must reference the Code of Conduct when performing their duties and responsibilities. Every leader of the work unit must disseminate this Code and ensure that the Code of Conduct has been implemented well in the work unit they lead.

The applicable Company Regulation pocketbook on Employment issued by the Company's Human Capital Management Division is an inseparable part.

As a form of commitment to consistent and continuous GCG implementation, at the beginning of each year, PTPP personnel are obligated to sign a form of Compliance with the Company's Code of Conduct, and the HCM Division is in charge.

Dalam rangka meningkatkan implementasi Peraturan Perusahaan serta meningkatkan kepatuhan pegawai, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/PP/DIR/2019 tanggal 21 Oktober 2019 membentuk Komite Kepatuhan Peraturan Perusahaan. Tugas dan wewenang Komite Kepatuhan diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.

To improve the implementation of Company Regulations and to improve employee compliance, per the Board of Directors Decree No. 101/SK/PP/DIR/2019 dated October 21, 2019, the Company's Regulatory Compliance Committee was formed. The duties and authorities of the Compliance Committee are regulated by the Board of Directors Decree.

Monitoring Pelaksanaan Kepatuhan Kode Etik Perusahaan Perusahaan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.

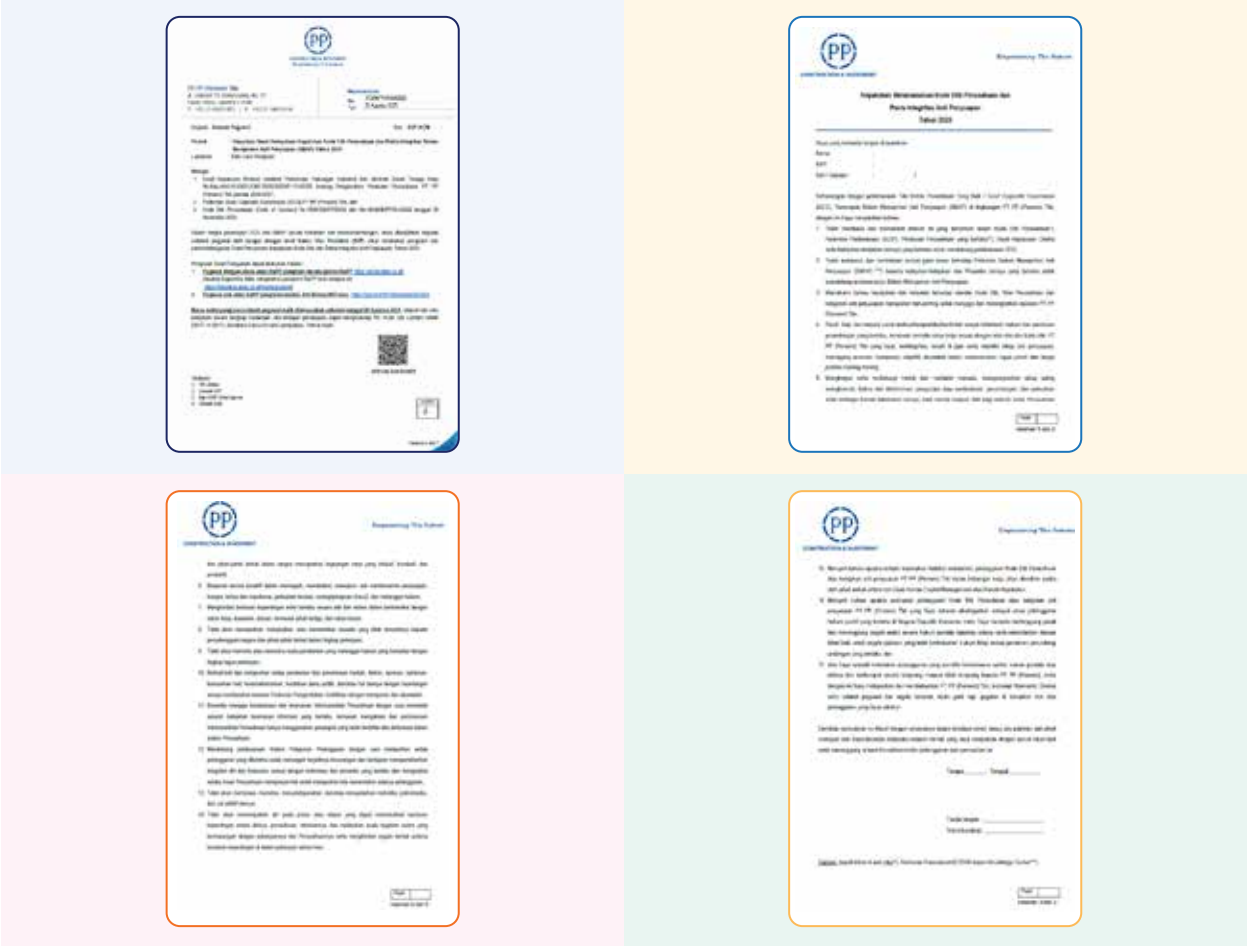
Monitoring the implementation of compliance with the Code of Conduct is the responsibility of every Head of the Unit.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh unit, yang dikoordinir Divisi HCM dengan menunjuk PIC di masing-masing unit. Selain itu dilakukan juga kewajiban penandatanganan Form Kepatuhan Kode Etik Perusahaan & Pakta Integritas Anti Penyuapan kepada seluruh pegawai.

The Code of Conduct is disseminated simultaneously with the Dissemination of the Anti-Bribery Management System in all units, coordinated by the HCM Division by appointing a PIC in every unit. Furthermore, all employees must sign a Form of Compliance with the Company's Code of Conduct and the Anti-Bribery Integrity Pact.

Form Kepatuhan Kode Etik Perusahaan & Pakta Integritas Anti Penyuapan

Form of Compliance with the Code of Conduct and the Anti-Bribery Integrity Pact



Kajian dan Evaluasi Manajemen

PTPP secara konsisten menyelenggarakan *Management Review* per triwulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan dan melakukan internalisasi pelaksanaan

Management Review and Evaluation

PTPP consistently conducts a quarterly Management Review to evaluate the Company's performance and internalize the implementation of business ethics so

etika bisnis sehingga terbentuk rasa memiliki dan dari semua pihak dalam Perusahaan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.

Upaya Penegakan Kode Etik

Penegakan terhadap pelanggaran kode etik adalah berupa penindakan secara serius yang dapat mengakibatkan tindakan indisipliner sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan kode etik Perusahaan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.

Mekanisme pelaporan pelanggaran Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui 2 (dua) sarana:

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang dikelola secara internal organisasi Perusahaan; dan
2. Mekanisme dan ketentuan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang telah dimiliki dan dikembangkan Perusahaan, yang memberikan kerahasiaan bagi pelapor.

Tujuan pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik adalah:

1. Untuk melindungi dan mencegah individu agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan dan merusak reputasi dan kredibilitas dirinya dan Perusahaan;
2. Untuk mengarahkan individu agar bersikap dan bertindak sesuai dengan persepsi dan norma Perusahaan serta masyarakat; dan
3. Untuk memperbaiki sikap dan tindakan individu yang melanggar agar kembali taat pada Etika, demi menegakkan profesionalisme individu.

Bagi Insan PTPP yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindak secara serius, sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian Perusahaan periode Tahun 2025-2027, tata cara pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin adalah sebagai berikut:

1. PTPP dapat memberikan pembinaan yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan Perusahaan dalam bentuk lisan dan Surat Peringatan tertulis yang didasarkan pada:
   a. Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran.
   b. Jenis pelanggaran.
   c. Unsur kesengajaan/Kelalaian.
   d. Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Surat Teguran, Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diterbitkan oleh Kepala Unit wajib ditembuskan ke Divisi HCM. Apabila tidak ditembuskan, maka Surat Peringatan tersebut dianggap tidak berlaku.

that a sense of belonging can be instilled in all parties in the Company and that they can understand the implementation of the guidelines in daily activities.

Enforcement of the Code of Conduct

Enforcement against code of conduct violations involves serious actions that may result in disciplinary measures according to the Company's applicable regulations. Monitoring compliance with the Company's code of conduct is the responsibility of each Unit Head.

The reporting violations mechanism of the Code of Conduct is carried out through two channels:

1. Internal violation reporting mechanism managed internally within the Company's organization; and
2. Mechanism and provisions of the Violation Reporting System or Whistleblowing System (WBS) owned and developed by the Company, which provides confidentiality to the reporter.

The objectives of imposing sanctions for violations of the Code of Conduct are:

1. To protect and prevent individuals from engaging in dishonorable acts that may harm and damage their own and the Company's reputation and credibility;
2. To guide individuals to behave and act following the Company's perceptions and norms as well as those of society; and
3. To correct the attitudes and actions of individuals who violate ethics to return to compliance with ethics to uphold individual professionalism.

For PTPP personnel found to have violated the applicable Code of Conduct, sanctions will be imposed per the policies and regulations of the prevailing laws.

Sanctions for Violations

Violations of this Code of Conduct will be taken seriously and may result in disciplinary actions per the Company's regulations. Based on the Company's Regulations on Personnel in the 2025-2027 Edition, the procedure for imposing sanctions on employees who violate rules and discipline is as follows:

1. PTPP may provide guidance to employees who violate Company regulations in the form of verbal warnings and written warning letters based on:
   a. Frequency (repeated/recurring) of violations.
   b. Type of violation.
   c. Intentional/negligent elements.
   d. Applicable laws and regulations.
2. Letter of Reprimand, First and Second Warning Letters issued by the Head of Unit must be copied to the HCM Division. If not copied, the Warning Letters shall be deemed invalid.

3. Surat Peringatan Ketiga atau Surat Peringatan Pertama dan Terakhir harus wajib diterbitkan oleh Divisi HCM atau Direktur Strategi Korporasi dan HCM.
4. Klasifikasi pembinaan, terdiri atas:
   a. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Surat Teguran:
      i. Melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter yang sah pada saat kesempatan pertama masuk kerja;
      ii. Melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan, antara lain perubahan alamat (tempat tinggal), status keluarga (perkawinan, kelahiran dan kematian) atau tidak melakukan pelaporan perubahan data lainnya;
      iii. Datang terlambat atau pulang lebih awal dari jam kerja sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu tanpa izin dari atasannya;
      iv. Tidak mengenakan Kartu Tanda Pengenal (ID *Card*) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 minggu selama berada di Lingkungan Perusahaan; serta
      v. Melakukan perbuatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini dan memiliki bobot sama dengan pelanggaran yang dapat diberikan Surat Teguran.
   b. Surat Peringatan: masa berlakunya 6 (enam) bulan. Tindakan Pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga adalah sebagai berikut:
      i. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan/atau tanpa sepengetahuan atasan;
      ii. Pegawai yang telah mendapat surat teguran tetapi masih melakukan kesalahan atau pengulangan kesalahannya sama pada saat surat teguran masih berlaku;
      iii. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan/atau tanpa sepengetahuan atasan;
      iv. Tidak memenuhi standar kinerja suatu jabatan yang ditentukan dalam *job profile* dan/atau tidak mematuhi perintah atasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
      v. Bekerja tanpa seragam atau Alat Perlindungan Diri (APD) yang telah ditetapkan Perusahaan;
      vi. Menghilangkan ID *Card* melebihi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan atau 8 (delapan) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau menyalahgunakan penggunaan ID *Card*;
      vii. Terlambat 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan;
      viii. Memasuki tempat yang ditetapkan terlarang oleh Perusahaan di dalam lingkungan kerja, kecuali Pegawai yang bertugas di tempat tersebut;
      ix. Bekerja tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, *Company Manual* (CM), *Standard Operational Procedure* (SOP), *Work Instruction*

3. The Third Warning Letter or First and Final Warning Letter must be issued by the HCM Division or the Director of Corporate Strategy and HCM.
4. Classification of guidance, consisting of:
   a. Violations that are subject to a Warning Letter:
      i. Neglecting the obligation to notify and submit a medical certificate from a licensed doctor on the first day of work;
      ii. Failing to fulfill the obligation to notify and submit a certificate, including changes of address (place of residence), family status (marriage, birth, and death), or failing to report other changes in data;
      iii. Arriving late or leaving early from work hours a total of twice in one wee without permission from their supervisor;
      iv. Failing to wear an ID card twice in one week while on company premises; and
      v. Committing other acts not regulated in these Company Regulations and having the same weight as violations that can result in a warning letter.
   b. Warning Letter: validity period of six months. Offenses that can be given First, Second, and Third Warnings are as follows:
      i. Leaving work without permission and/or without the supervisor's knowledge;
      ii. Employees who have received a warning letter but still commit the same mistake or repeat the same mistake while the warning letter is still valid;
      iii. Leaving work without permission and/or without the supervisor's knowledge;
      iv. Failure to meet the performance standards of a position as specified in the job profile and/or failure to comply with orders from superiors in relation to the performance of work without a valid reason;
      v. Working without uniform or Personal Protection Equipment (PPE) that the Company has determined;
      vi. Losing the ID Card more than three times in a month or eight times in six months and/or misusing the ID Card;
      vii. Being late three times in a week or ten times in a month;
      viii. Entering a place designated as prohibited by the Company in the work environment (except for employees on duty);
      ix. Working in a manner that is not in accordance with the Board of Directors' Decree, Company Manual (CM), Standard Operating Procedure

(WI), Surat Edaran (SE), dan Memo Internal dan/atau Kebijakan/*Policy* bentuk lainnya yang berlaku di Perusahaan sehingga menimbulkan keterlambatan pencapaian target pekerjaan;

x. Tidak bekerja sesuai Surat Penetapan Tugas (SPT) yang dikeluarkan Divisi HCM maupun SPT internal dari unit masing-masing, maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal berlakunya SPT;
xi. Dengan sengaja menutupi atau berbohong terkait dengan kondisi kesehatan yang dapat berpotensi menyebarkan penyakit menular pada lingkungan kerja;
xii. Melakukan tindakan kekerasan atau berkelahi di Lingkungan Perusahaan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan/atau kegaduhan di lingkungan kerja;
xiii. Tidak melaporkan E-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (ELHKPN) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Wajib Lapor Perusahaan;
xiv. Mangkir 2 (dua) Hari Kerja dalam sebulan;
xv. Melakukan perbuatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini dan memiliki bobot sama dengan pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga ini.

c. Tindakan pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir antara lain sebagai berikut:
i. Tindakan Pegawai yang mengakibatkan *Property Damaged/Lost Time Injury* yang berdampak merugikan Perusahaan dari sisi penyelesaian target maupun keuntungan Perusahaan dan/atau kerugian besar lainnya (atas kebijakan manajemen);
ii. Pelanggaran etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri (individu), penggunaan transaksi elektronik dan media sosial, menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan yang berdampak pada penurunan kinerja individu Pegawai lainnya maupun unit serta ketidaknyamanan kerja di lingkungan unit;
iii. Menolak permintaan pemeriksaan kesehatan medis (*medical check up*), tanpa persetujuan atasan;
iv. Bekerja tidak sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku di Perusahaan sehingga menimbulkan tidak tercapainya target pekerjaan dan/atau mengganggu performa bisnis Perusahaan;
v. Tidak mematuhi perintah atasan yang menimbulkan tidak tercapainya target pekerjaan;
vi. Tidak bersedia ditempatkan di lokasi kerja yang ditentukan Perusahaan;

(SOP), Work Instruction (WI), Circular Letter (SE), and Internal Memo and/or other forms of Policy applicable in the Company, thereby causing a delay in the achievement of work targets.;

x. Not working by the Letter of Assignment (SPT) issued by the HCM Division or internal SPT from each unit, a maximum of seven working days from the effective date of the SPT;
xi. Deliberately covering up or lying related to health conditions that can potentially spread infectious diseases in the work environment;
xii. Committing acts of violence or fighting in the Company's environment that cause inconvenience and/or disturbance in the work environment;
xiii. Not reporting the E-LHKPN (State Officials' Wealth Report) by the applicable laws and regulations for Mandatory Company Reporters;
xiv. Absent two working days in a month;
xv. Other offenses that can be given First, Second, and Third Warnings are regulated separately in Company policy or laws and regulations but have not been regulated in this Company Regulation.

c. Violations that may be given First and Final Warnings include the following:
i. Employee actions that result in property damage or lost time injury have a detrimental impact on the Company in terms of target completion, Company profits, and/or other major losses (at management discretion);
ii. Violation of ethics in the state, organization, and society towards oneself (individual), the use of electronic transactions and social media, and maintaining the confidentiality of the Company's data and information, which can reduce the performance of other individual employees and the unit and cause work discomfort in the unit environment;
iii. Refusing requests for medical check-ups without supervisor approval;
iv. Working not by the Standard Operational Procedure (SOP) applicable in the Company, causing the achievement of work targets and/or disrupting the Company's business performance;
v. Disobeying orders from superiors and failing to achieve work targets;
vi. Not willing to be placed at the work location determined by the Company;

vii. Pelanggaran kebijakan dan pakta integritas anti penyuapan serta ketidakpatuhan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berdampak pada penurunan kinerja individu maupun unit serta ketidaknyamanan kerja di lingkungan unit;
viii. Penggunaan material dan/atau metode kerja yang tidak sesuai spesifikasi teknis tanpa adanya persetujuan pihak yang berwenang yang menimbulkan permasalahan (materiil dan/atau non-materiil) serta mengakibatkan kerugian Perusahaan;
ix. Ancaman/intimidasi terhadap sesama Pegawai Perusahaan;
x. Menerima uang atau barang untuk tujuan yang tidak diizinkan oleh Perusahaan dan/atau disertai konflik kepentingan terhadap posisi jabatan maupun fungsi pekerjaan tanpa adanya persetujuan Unit Pengendali Gratifikasi atau Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
xi. Melakukan tindakan kekerasan atau berkelahi di lingkungan Perusahaan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan/atau kegaduhan di lingkungan kerja, dan menyebabkan rusaknya fasilitas Perusahaan termasuk kerugian materiil lainnya;
xii. Membongkar atau membocorkan identitas pelapor dan/atau materi laporan yang masuk ke dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran (khusus bagi Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran);
xiii. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan yang menimbulkan kerugian reputasi Perusahaan;
xiv. Tindakan Pegawai yang terbukti menyebabkan timbulnya biaya *repair/rework* yang signifikan akibat kegagalan struktur atau mutu kualitas (atas kebijakan manajemen);
xv. Mempekerjakan kembali Pegawai yang sudah diakhiri hubungan kerjanya oleh karena melakukan pelanggaran yang diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja dan/atau pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan lainnya;
xvi. Mangkir 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan;
xvii. Menguasai dan/atau menggunakan uang, barang, data, informasi, fasilitas, dan/atau aset milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Perusahaan dan/atau manajemen Perusahaan yang menimbulkan kerugian immaterial termasuk reputasi Perusahaan;

xviii. Membagikan, membongkar, atau membocorkan rahasia Perusahaan dengan atau tanpa unsur kesengajaan;

vii. Violation of anti-bribery policies and integrity pacts, as well as non-compliance with the anti-bribery management system, which can reduce individual and unit performance and work discomfort in the unit environment;

viii. Use of materials and/or work methods that are not by technical specifications without the approval of the authorized party, which causes problems (material and/or non-material) and results in losses to the Company;

ix. Threats/intimidation against fellow Company employees;
x. Receiving money or goods for purposes not permitted by the Company and/or accompanied by a conflict of interest in the position or job function without the approval of the Gratification Control Unit or the Anti-Bribery Compliance Function.
xi. Committing acts of violence or fighting in the Company's environment that cause inconvenience and/or disturbance in the work environment and cause damage to Company facilities, including other material losses;

xii. Disclosing or leaking the reporter's identity and/or the report material entered into the Whistleblowing System (specifically for the Whistleblowing Complaint Management Team);
xiii. Bringing and/or consuming intoxicating liquor that causes damage to the Company's reputation;
xiv. Employee actions that are proven to cause significant repair/rework costs due to structural or quality failures (at management's discretion);
xv. Rehiring an employee whose employment has been terminated due to an offense sanctioned by termination of employment and/or violation of other Company regulations;

xvi. Absent for three working days in a month;
xvii. Controlling and/or using money, goods, data, information, facilities, and/or assets belonging to the Company for personal interests without the permission of the Company and/or the Company's management, which causes immaterial losses, including the Company's reputation;
xviii. Sharing, disclosing, or leaking the Company's secrets with or without intentional elements.

xix. Tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan yang menimbulkan kerugian secara finansial dan/atau reputasi Perusahaan; serta
xx. Pelanggaran lainnya yang dapat diberikan Peringatan Pertama dan Terakhir sebagaimana diatur secara tersendiri dalam Kebijakan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan namun belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini.

xix. Not carrying out work per the Company's applicable provisions, which causes financial losses and/or the Company's reputation; and
xx. Other offenses that can be given First and Last Warning are regulated separately in the Company's Policy or laws and regulations but have not been regulated in this Company's Regulation.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sebagai realisasi penegakan Kode Etik, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2025.

Number of Code of Conduct Violations

As a realization of enforcing the Code of Conduct, here are the details of sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Conduct in 2025:

Surat Teguran Warning Letter Letter of Reprimand	Surat Peringatan Pertama First Warning Letter	Surat Peringatan Kedua Second Warning Letter	Surat Peringatan Pertama & Terakhir First & Final Warning Letter	Jumlah Total
-	-	-	1	1

Sebagai bagian dari transparansi yang dilakukan Perusahaan, berikut disampaikan jumlah pembinaan internal dalam dua tahun terakhir yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.

As part of the transparency practiced by the Company, the following is the number of internal deviations that occurred and the efforts made to resolve them.

Pembinaan Internal Internal Mentoring	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Total Cases Conducted by					
	Manajemen Management		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Temporary Employees	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Telah Diselesaikan Settled	-	-	10	14	6	4
Dalam proses penyelesaian internal Under internal settlement	-	-	4	5	2	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya Settlement not yet Considered	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up by legal process	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembinaan Total Mentoring	-	-	14	19	8	4

Data dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:
- Manajemen: Tidak terdapat catatan kasus penyimpangan (nihil) baik pada tahun 2024 maupun 2025.
- Pegawai Tetap: Kategori yang menyumbang jumlah kasus terbanyak, meskipun menunjukkan tren penurunan dari 19 kasus (2024) menjadi 14 kasus (2025).
- Pegawai Tidak Tetap: Menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus penyimpangan, dari 4 kasus (2024) menjadi 8 kasus (2025).

The data is grouped into three main categories:
- Management: There were no cases of irregularities (nil) in 2024 and 2025.
- Permanent Employees: This category contributed the highest number of cases, although it showed a downward trend from 19 cases (2024) to 14 cases (2025).
- Temporary Employees: This category showed an upward trend in the number of irregularities, from four cases (2024) to eight cases (2025).

Terjadi perubahan *trend* penurunan total penyimpangan Pegawai Tetap sebesar 26%. Namun, terdapat kenaikan sebesar 100% (dua kali lipat) pada jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap. Hingga data ini dilaporkan, tidak ada proses hukum yang berlanjut ke proses perselisihan hubungan industrial atau proses hukum lainnya untuk semua kategori pelanggaran.

There was a 26% decrease in the total number of violations committed by Permanent Employees. However, there was a 100% increase (double) in the number of violations committed by Non-Permanent Employees. As of the date of this report, there were no legal proceedings that had progressed to industrial relations disputes or other legal processes for any category of violations.

Membangun Iklim Bisnis yang Sehat
Developing Sound Business Climate

Perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Kode Etik Perusahaan yang antara lain berisi beberapa hal di bawah ini.

The Company supports efforts by all parties to create a business climate that is sound and free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The policies are stated in the Company's Code of Conduct, containing the following subjects.

Kebijakan tentang Hadiah dan Sumbangan (Donasi) yang Tidak Dibenarkan

Seluruh pengurus dan pegawai Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, rabat *(discount),* komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1). Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12 C ayat (1).

Policy on Unjustifiable Gifts and Donations

All executives and employees of the Company are not legally and ethically permitted to receive and give gifts or donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, tourism trips, free medical treatment, and other facilities (Gratuities) received domestically or abroad and conducted using electronic or non-electronic means under Law No. 20 of 2001 Article 12 B paragraph (1). This provision does not apply if the recipient reports the gratuity received to the Corruption Eradication Commission under Law No. 20 of 2001 Article 12 C paragraph (1).

Kebijakan tentang Larangan Suap

Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak. Setiap bentuk pelanggaran atas larangan suap tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Policy on Bribery Prohibition

The Company defines bribery as any form of money, commission, loan, gift, pleasure, facility, and anything of economic value, given or requested, as compensation directly or indirectly, with the intention of obtaining preferential treatment or biased behavior. Any violation of the bribery prohibition mentioned above will be subject to sanctions under applicable regulations.

Kebijakan Terkait Keterlibatan dalam Aktivitas Politik

Perusahaan senantiasa mengakui hak setiap pegawai untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Perusahaan memberi batasan keterlibatan kepada segenap jajaran

Policy Related to Involvement in Political Activities

The Company acknowledges every employee's right to express their political aspirations. The Company does not force or limit individuals' rights to express their political aspirations as permitted by applicable laws and regulations. However, the Company imposes restrictions on the involvement of all Company personnel in political

Perusahaan dalam aktivitas politik yaitu:
1. Wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral;
2. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
3. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Perusahaan; dan
4. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.

activities, namely:
1. Must carry out duties according to their responsibilities, act and behave professionally and neutrally;
2. Not allowed to become officials of political parties;
3. Prohibited from using party attributes or social community organization within the Company's environment; and
4. Prohibited from using positions, assets, or Company facilities to support specific political activities and interests.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan

Sebagai wujud pemenuhan terhadap Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Adapun jenis tindak kejahatan keuangan yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Policy Related to Resignation of Directors and Commissioners in Case of Financial Crimes

As a form of compliance with OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 on the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, the Company has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners and Directors in the event of involvement in financial crimes. The types of financial crimes referred to are explained in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Perusahaan berkomitmen untuk selalu menjalankan praktik korporasi sehat yakni dengan senantiasa mengelola kegiatan operasional bisnisnya secara profesional.

The Company is committed to practicing healthy corporate practices by managing its operational activities professionally.

Larangan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Perusahaan melarang seluruh individu jajaran Perusahaan yang memiliki akses informasi material untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

Insider Trading Prohibition

The Company prohibits all individuals within the Company who have access to material information from abusing their positions and jobs in disclosing material information that can affect investor decision-making. Material information is unpublished information that can prompt someone to buy, sell, or hold the Company's shares.

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Setiap individu jajaran Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan ekonomi yang dapat merugikan Perusahaan. jajaran Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, jajaran Perusahaan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Conflict of Interest

Every individual within the Company is obliged to avoid all forms of potential economic conflicts of interest that may harm the Company. Company personnel are prohibited from engaging in activities that benefit personal, family, or relatives' interests, directly or indirectly. To avoid conflicts of interest, Company personnel in positions with conflicts of interest are required to excuse themselves from the situation or inform their superiors or responsible parties about it.

Perusahaan menetapkan 2 (dua) prinsip utama yang harus diikuti seluruh jajaran Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan:
1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan; dan

The Company establishes two main principles that all Company personnel must follow to prevent conflicts of interest:
1. Not to use their position for personal interests or the interests of others related to the Company; and

2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan.

2. Avoiding any off-duty activities that could negatively affect independence and objectivity in decision-making that contradicts the position or could harm the Company.

Kebijakan Terhadap Kreditur

Kebijakan terhadap kreditur tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan yang berlaku, kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan kredit jangka panjang dan jangka pendek, hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban *financial* dan *non-financial*, kebijakan sebagai *avalist* (penjamin) dan kebijakan penggunaan dana.

Policy on Creditors

Policies regarding creditors are outlined in the Company's prevailing GCG Implementation Guidelines, this policy regulates the management of long-term and short-term credits. The Company's rights and obligations to creditors are set out in agreements that regulate financial and non-financial rights and obligations, policies as avalist (guarantors), and fund utilization policies.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policies

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees always uphold fair competition, sportsmanship, professionalism, and GCG principles. The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors, or actions that may pose a conflict of interest, corruption, collusion, and nepotism (KKN), and always putting the Company's interests above the interests of personal and family, group, or class. The Company also always considers the anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption.

Sebagai BUMN sekaligus sebagai Perusahaan Terbuka dengan kepatuhan yang kompleks, PTPP memiliki serangkaian kebijakan yang melandasi kebijakan terkait anti korupsi di lingkup PTPP. Seluruh kebijakan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Insan PTPP tanpa terkecuali. Beberapa pedoman dan kebijakan yang secara spesifik mengatur kebijakan terkait anti korupsi yang dimiliki PTPP antara lain:

1. Pedoman GCG (*Board Manual* & *Corporate Manual*);
2. Kode Etik Perusahaan;
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Company Manual Pengendalian Gratifikasi;
5. Surat Keputusan Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
6. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Company Manual Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
8. Company Manual Sistem Manajemen Anti Kecurangan;

As an SOE and a Public Company with complex compliance, PTPP has a series of policies that underlie policies related to anti-corruption within the scope of PTPP. All of these policies must be complied with by all PTPP personnel without exception. Several guidelines and policies that specifically regulate PTPP's anti-corruption policies include:

1. GCG Guidelines (Board Manual & Corporate Manual);
2. Company Code of Conduct;
3. Guidelines for Implementing Duties of the Board of Commissioners and Directors;
4. Gratuity Control Guidelines;
5. State Officials' Wealth Report (LHKPN);
6. Anti-Bribery Management System Guidelines;
7. Subsidiary Governance Guidelines;
8. Company Manual on Anti-Fraud Management Systems;

9. Company Manual Tata Kelola Terintegrasi; serta
10. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS).

9. Company Manual on Integrated Governance; and
10. Whistleblowing System (WBS) Guidelines.

Pada tahun 2025, Perusahaan berkesempatan mendapatkan pendampingan untuk implementasi Panduan Cegah Korupsi (PanCek) yang diinisiasi oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

In 2025, the Company had the opportunity to receive assistance in implementing the Corruption Prevention Guidelines (PanCek) initiated by the Anti-Corruption Directorate of Business Entities (AKBU) of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI).

Proses pemenuhan dan pembahasan dokumen Panduan Cegah Korupsi diawali dengan sosialisasi oleh KPK pada tanggal 22 Juli 2025, agar dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan substansi yang dipersyaratkan. Atas implementasi Panduan Cegah Korupsi (PanCek) tersebut, Perusahaan memperoleh total capaian sebesar 89,75% yang terdiri dari:

The process of fulfilling and discussing the Corruption Prevention Guidelines documents began with the KPK's outreach on July 22, 2025, to ensure the required documents met the required substance. Upon implementation of the Corruption Prevention Guidelines (PanCek), the Company achieved a total score of 89.75%, consisting of:

No	Indikator Indicator	Capaian Achievements
1	Komitmen Commitment	86,00%
2	Perencanaan Planning	100,00%
3	Pelaksanaan Implementation	100,00%
4	Evaluasi Evaluation	100,00%
5	Perbaikan Improvement	82,50%
6	Respon Response	70,00%
	Total	**89,75%**

Yang disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI pada tanggal 19 Desember 2025, sebagaimana surat dari KPK RI No. UND/2317/GTF.03/10-14/12/2025 tanggal 18 Desember 2025.

As stated by the Acting Deputy for Prevention and Monitoring of KPK RI on December 19, 2025, as per KPK RI letter No. UND/2317/GTF.03/10-14/12/2025 dated December 18, 2025.

Kemudian telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk oleh KPK RI pada tanggal 13 Oktober 2025, sebagaimana surat undangan dari KPK RI No. UND/1523/GTF.03/10-14/09/2025 tanggal 30 September 2025.

Then, the KPK RI conducted a Corruption Prevention Outreach at PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk on October 13, 2025, as stated in the invitation letter from the KPK RI No. UND/1523/GTF.03/10-14/09/2025 dated September 30, 2025.

Selain itu, pada tahun 2025 Perusahaan kembali melakukan Refreshment Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 yang dilaksanakan secara *online* melalui *Learning Management System,* hal ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan kompetensi Insan Perusahaan tentang SMAP dan diwajibkan bagi seluruh karyawan sebagaimana Memo No. 368/M/PP/HCM/2025 tanggal 27 Agustus 2025.

Additionally, in 2025, the Company again conducted a Refreshment of the ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP), which was carried out online through the Learning Management System. This was done to deepen the Company's personnel's understanding and competence regarding SMAP and was mandatory for all employees, as stipulated in Memo No. 368/M/PP/HCM/2025 dated August 27, 2025.

Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi
Gratification Management Policy

Bagi Perusahaan, gratifikasi merupakan penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan tugas pokok dan fungsi. Gratifikasi memiliki tujuan dan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan, antara lain:

- *Fee Marketing*;
- Uang pelicin, uang pulsa dan uang lainnya;
- Hadiah/Cinderamata/Bingkisan dari Pihak Lain untuk kepentingan Insan PTPP;
- Parcel dan atau bingkisan hari-hari keagamaan;
- Uang transportasi, tiket dan akomodasi perjalanan dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak kerja; dan
- Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak wajar untuk kepentingan insan PTPP.

For the Company, gratification is acceptance related to position and contradicts the main duties and functions. Gratification has purpose and intention to influence policy making decisions, including:

- Marketing Fee;
- Facilitation payments, credit, and other money;
- Gifts/Souvenirs/Presents from Other Parties for the benefit of PTPP Personnel;
- Parcel and or gift for religious days;
- Transportation money, tickets, and official travel accommodations from other parties not contained in the work contract; and
- Discounts/gifts or other benefits from other parties given improperly for the benefit of Company's employees.

Setiap Insan PTPP wajib mendukung pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi diatur secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

Every PTPP Personnel must support the implementation of Gratification Control. the implementation of Gratification Control policy is regulated separately, and is an integral part of the implementation of the Company Code of Conduct.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Sebagai tindak lanjut penandatanganan komitmen antara Perusahaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penerapan program pengendalian Gratifikasi, pada tanggal 26 Februari 2015 Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/PP/DIR/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PTPP dan saat ini sudah direviu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/PP/DIR/2023, tanggal 29 Mei 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. 113/SK/PP/DIR/2019 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan PT PP (Persero) Tbk, dan Company Manual Pengendalian Gratifikasi No. PP/CM/M2-035 tanggal 31 Juli 2024. Perusahaan memberlakukan pedoman Gratifikasi, penolakan, penerimaan dan pemberian hadiah atau Cinderamata dan hiburan (*Entertainment*) serta membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang di pimpin oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang saat ini memiliki nomenklatur sebagai Direktur Keuangan.

Gratification Control Guidelines

As a follow up to the signing of commitment between the Company and the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the implementation of Gratification control program, on February 26, 2015, the Board of Directors issued a Board of Directors Decree No. 011/SK/PP/DIR/2015 on the Enforcement of Guidelines for Gratification Control and the Establishment of Gratification Control Units in PTPP and currently under review according to Board of Directors Decree No. 080/SK/PP/DIR/2023, dated May 29, 2023, on the Second Amendment to Board of Directors Decree No. 113/SK/PP/DIR/2019 on the Establishment of a Gratification Control Units within PT PP (Persero) Tbk, and Gratification Control Company Manual No. PP/CM/M2-035 dated July 31, 2024. The company enforces guidelines on gratuities, refusal, acceptance, and the giving of gifts, souvenirs, and entertainment, and has formed a Gratification Control Unit led by the Director of Finance and Risk Management, who currently holds the title of Director of Finance.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan Perusahaan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi, Perusahaan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Adapun tugas dan tanggung jawab UPG antara lain meliputi:

Gratification Control Unit

As a manifestation of the Company's commitment to create a clean Company protected from corruption and gratification practices, the Company established the Gratification Control Unit (UPG). The duties and responsibilities of the UPG include:

1. UPG berwenang melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.
2. UPG dapat memberikan usul kepada KPK berdasarkan hasil penelaahan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi untuk ditindaklanjuti penanganannya.
3. UPG dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam penelaahan gratifikasi.
4. Tata cara penelaahan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Ketua UPG.
5. UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
6. UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Direksi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
7. UPG wajib merahasiakan pelapor penerima gratifikasi.
8. Menerima laporan gratifikasi dari insan PTPP dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada pelapor.
9. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi.
10. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh penerima.
11. Meminta data dan informasi kepada unit kerja dan atau Insan PTPP terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi oleh insan PTPP.
12. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
13. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.
14. Melakukan sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi.
15. Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Perusahaan, maka UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
    a. Dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk keperluan penyelenggaraan operasional Perusahaan;
    b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
    c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; dan
    d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi, dan dimusnahkan.

Penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

1. UPG has the authority to conduct a review and submit a report on the results of the review of the acceptance and rejection of gratification reports to the KPK no later than seven working days after the UPG receives the gratification report.
2. UPG can provide proposals to KPK according to the review of reports on acceptance and gratification refusal to be followed up.
3. UPG can coordinate with related work units in gratification review.
4. The procedure for review is further regulated in the technical guidance of the Head of UPG.
5. UPG must submit a recapitulation report on handling and follow-up on acceptance of gratification reports managed by UPG every month to the KPK.
6. UPG must submit a recapitalization report on the handling and follow-up of reports on the gratification acceptance and giving to the Board of Directors periodically every three months.
7. UPG must keep the confidentiality of the whistleblower who reports the gratification acceptance.
8. Receiving reports of gratification from Company personnel and requesting the fulfillment of the completeness of the required documents in sorting gratification activities from the whistleblower.
9. Coordinating, consulting, and corresponding to KPK on behalf of the Company in implementing gratification control guidelines.
10. Monitoring the follow-up on the use of gratification acceptance not considered as bribes related to official services by the recipient.
11. Requesting data and information from work units and/or Company Personnel related to monitoring the application of gratification control by Company personnel.
12. Conducting studies on potential points of gratification within the Company.
13. Proposing management policies, establishing an anti-gratification environment, and preventing corruption in the corporate environment.
14. Disseminating the gratification control guidelines.
15. In the case of receiving gratification determined by the KPK to be managed by the Company, the UPG can determine its utilization such as:
    a. Utilized by the Company to conduct Company operations;
    b. Donated to social foundations or other social institutions;
    c. Returned to the grantor of gratification; and
    d. Returned to the gratification acceptance and destroyed.

The determination of the use of gratification revenue is regulated further in the technical instructions for the Gratification Control Guidelines.

Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelaporan gratifikasi baik di lingkungan PTPP maupun di lingkungan Anak Perusahaan. Namun Perusahaan tetap melakukan koordinasi dengan Pihak KPK sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan mengacu pada Surat dari KPK No. B/1093/GTF.03/13/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Pada tahun 2025, monitoring dan evaluasi terkait penerapan unit pengendalian gratifikasi bersama dengan KPK dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Gratification Control Unit Report for 2025

Throughout 2025, there were no reports of gratuities either within PTPP or its subsidiaries. However, the Company continues to coordinate with the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in the technical guidelines for Gratuity Control, and refers to the KPK Letter No. B/1093/GTF.03/13/02/2023 dated February 27, 2023, on the 2023 Gratuity Control Program Monitoring and Evaluation Guidelines.

In 2025, monitoring and evaluation of the implementation of the gratification control unit, in collaboration with the KPK, was conducted in the fourth quarter.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Policy

Amanah Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa. Salah satu prinsip tersebut adalah bertindak adil dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh *vendor* yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, proses pemilihan *supplier* ini didasarkan pada persaingan bebas, di mana *supplier* bebas dalam mengikuti proses kualifikasi dan tender yang diadakan oleh Perusahaan. Vendor yang lulus dalam proses kualifikasi (baik aspek administrasi maupun aspek QHSE) tersebut berhak menjadi rekanan Perusahaan dan bebas mengikuti proses tender yang diadakan melalui *digital platform* Perusahaan, yaitu *Smart e-Procurement* dengan alamat https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend yang dikembangkan sendiri sejak tahun 2018.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa tercantum di dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. PP/SOP/E1-008 tanggal 20 Mei 2024. Maksud dan tujuan dibuatnya Prosedur tersebut adalah untuk memberikan panduan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku umum dan/atau dipersyaratkan dalam perjanjian oleh pemilik proyek sehingga proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN.

The mandate of SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises states that the Company must apply the procurement principles of goods and services. One of these principles is to act fairly by providing equal opportunities and treatment to vendors with the same qualifications without discrimination. Thus, the supplier selection process is based on free competition, where suppliers are free to participate in the qualification and tender process held by the Company. Vendors who pass the qualification process (both administrative and QHSE aspects) are entitled to become the Company's partners and are free to participate in the tender process held on the digital platform, Smart e-Procurement at https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/login which has been developed independently since 2018.

The Goods and Services Procurement Policy are contained in Goods and Services Procurement Procedure No. PP/SOP/E1-008, dated May 20, 2024. The procedure's purpose and objective are to guide the procurement process and produce quality goods and services that meet generally accepted technical specifications and/or are required in the agreement by the project owner so that the procurement process follows the provisions of the SOE Minister Regulation.

Prosedur tersebut mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
   a. Kewenangan Pengelolaan Pengadaan
      - Pengadaan dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi: Dikelola oleh *buying team*, baik anggota *buying team* pengadaan *OA*, maupun *buying team* untuk pengadaan *non OA;* serta
      - Pengadaan tidak dominan dan/atau tidak strategis dan/atau tidak kritis dan/atau berisiko rendah: Dikelola oleh Tim Proyek dan dikendalikan oleh Divisi Operasi.
   b. Ketentuan Proyek dalam Pengadaan dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi dan/atau memiliki volume potential besar.
   c. Penentuan Item Pengadaan dan Perencanaan Pembayaran
      - Cakupan Item Pengadaan tidak dominan dan/atau tidak strategis dan/atau tidak kritis dan/atau berisiko rendah; serta
      - Cakupan Item Pengadaan dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi.
   d. Pembagian Pengadaan Strategis dan Non Strategis.
   e. Pembagian Metode Pengadaan.
   f. Ketentuan Lain:
      - Penggunaan Sistem;
      - Pengadaan Dini; serta
      - Investasi.
2. Ketentuan Khusus-Pengadaan dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi:
   a. Kedudukan dan Ketentuan Perencanaan SKBDN dan Arus Kas.
   b. Penyusunan MSCS (*Material & Service Control Sheet*);
   c. Penyusunan Kontrak OA
      - Struktur Kontrak (Surat Perjanjian dan Apendiks Harga);
      - Penyusunan Kontrak OA (Item Barang/Jasa Baru, Item Barang/Jasa Lama); serta
      - Ketentuan *Detail* (Registrasi *Vendor*, Penyusunan Kontrak OA dan Format Dokumen Kontrak OA).
   d. Penyusunan Kontrak Non-OA
      - Struktur Kontrak;
      - Penyusunan Kontrak Non-OA (*Vendor* Sudah Terdaftar);
      - Ketentuan Jumlah Minimal *Vendor* dalam Evaluasi Seleksi & Negosiasi Non-O; serta
      - Ketentuan *Detail* (Registrasi *Vendor*, Penyusunan Kontrak OA dan Format Dokumen Kontrak OA).
   e. Penyusunan PO Pengadaan dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi
      - Kedudukan PO terhadap Kontrak;
      - Fungsi PO terhadap Kontrak OA;
      - Fungsi PO terhadap Kontrak Non-OA;
      - Penyusunan PO;

The procedure regulates:

1. General Provisions
   a. Authority of Procurement Management
      - Dominant and/or strategic and/or critical and/or high-risk procurement: Managed by the buying team, both members of the OA procurement buying team and the buying team for non-OA procurement; and
      - Non-dominant and/or non-strategic and/or non-critical and/or low-risk procurement: Managed by the Project Team and controlled by the Operations Division.
   b. Project provisions in dominant and/or strategic and/or critical and/or high-risk procurement and/or procurement with large potential volume.
   c. Determination of Procurement Items and Payment Planning
      - Procurement Items that are not dominant and/or strategic and/or critical and/or low risk; and
      - Procurement Items that are dominant and/or strategic and/or critical and/or high risk.
   d. Division of Strategic and Non-Strategic Procurement.
   e. Division of Procurement Methods.
   f. Other Provisions:
      - Use of Systems;
      - Early Procurement; and
      - Investment.
2. Special Provisions—Procurement that is dominant and/or strategic and/or critical and/or high risk:
   a. Position and Terms of SKBDN and Cash Flow Planning.
   b. Preparation of MSCS (Material & Service Control Sheet).
   c. OA Contract Preparation
      - Contract Structure (Agreement and Price Appendix);
      - Arrangement of OA Contracts (New Goods/Services Items, Existing Goods/Services Items); and
      - Detailed Provisions (Vendor Registration, OA Contract Preparation and OA Contract Document Format).
   d. Compilation of Non-OA Contracts
      - Contract Structure;
      - Non-OA Contract Preparation (Vendors Not Registered, Vendors Already Registered);
      - Minimum Vendor Amounts in the Evaluation of Non-O Selection & Negotiations; and
      - Detailed Provisions (Vendor Registration, OA Contract Preparation and OA Contract Document Format).
   e. Preparation of PO for dominant and/or strategic and/or critical and/or high-risk procurement
      - Position of PO against Contract;
      - PO Functions against OA Contracts;
      - PO function for Non-OA Contracts;
      - Preparation of PO;

- Pendatangan Barang/Pelaksanaan Pekerjaan (Pendatangan Barang, Pelaksanaan Pekerjaan); serta
- Evaluasi Kinerja Vendor.

3. Ketentuan Khusus-Pengadaan tidak dominan dan/atau tidak strategis dan/atau tidak kritis dan/atau berisiko rendah
   a. Persiapan Pengadaan;
   b. Penyusunan Kontrak, SPK, PO, dan Dokumen Setara Lainnya pada Pengadaan Non-Strategis;
   c. Pencatatan Penerimaan Barang/Jasa; serta
   d. Evaluasi Kinerja *Vendor.*

- Delivery of Goods/Execution of Work (Delivery of Goods, Execution of Work); and
- Vendor Performance Evaluation

3. Special Provisions—Procurement that is not dominant and/or not strategic and/or not critical and/or low risk
   a. Procurement Preparation;
   b. Contract Preparation, SPK, PO, and Other Equivalent Documents on Non-Strategic Procurement;
   c. Recording of Receipt of Goods/Services; and
   d. Vendor Performance Evaluation.

Adapun definisi dari istilah yang ada di prosedur tersebut:

The terms definitions in the procedure are as follows:

No	Istilah Term	Definisi Definition
1	Pengadaan Strategis Strategic Procurement	Pengadaan barang dan jasa yang dominan dan/atau strategis dan/atau kritis dan/atau berisiko tinggi; dikelola *Buying Team* dan bersifat *stock* maupun *non-stock*. Procurement of goods and services that are dominant and/or strategic and/or critical and/or high risk; managed by the Buying Team and classified as stock or non-stock.
2	Pengadaan Non-Strategis Non-Strategic Procurement	Pengadaan barang dan jasa yang tidak dominan dan/atau tidak strategis dan/atau tidak kritis dan/atau berisiko rendah; dilakukan oleh proyek dan dikendalikan oleh Divisi Operasi serta bersifat *non-stock*, kecuali untuk pengadaan asuransi konstruksi yang dikelola oleh *Buying Team*. Procurement of goods and services that are not dominant and/or non-strategic and/or non-critical and/or low risk; carried out by the project and controlled by the Operations Division, and is non-stock, except for the procurement of construction insurance, which is managed by the Buying Team.
3	OA	*Outline Agreement*. Kontrak yang dikeluarkan untuk seluruh proyek PTPP, merupakan kontrak pusat dan berlaku nasional. Outline Agreement. A contract issued for all PTPP projects, serving as a central contract and valid nationally.
4	Non-OA	*Non-Outline Agreement*. Kontrak yang dikeluarkan untuk pengadaan yang dilakukan di satu proyek. Non-Outline Agreement. A contract issued for procurement carried out in a single project.
5	PO	*Purchase Order* (Perintah Pembelian). Surat pesanan yang mengacu pada Kontrak dan Permintaan Pembelian (*Purchase Requisition*). Purchase Order. An order letter referencing the Contract and Purchase Requisition.
6	*Buying Team*	Sekelompok orang yang ditunjuk oleh Direksi yang bertanggung jawab untuk: a. Menerapkan prinsip pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang pedoman umum pengadaan barang dan jasa. b. Memastikan pencapaian komitmen TKDN perusahaan secara terkonsolidasi. c. Memonitor pencapaian komitmen TKDN secara periodik (minimum per triwulan). d. Melakukan klarifikasi komitmen penilaian mandiri (*self-assessment*) TKDN *vendor* di setiap proses pengadaan barang dan jasa. e. Melakukan klarifikasi penilaian mandiri final atas komitmen TKDN *vendor* di setiap proses pengadaan barang dan jasa dengan pemangku kepentingan terkait. f. Menentukan *item* barang dan jasa serta *vendor strategic partnership* yang sesuai dengan ketentuan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Proyek. g. Menganalisis peramalan indeks harga terutama untuk *item* barang dan jasa strategi. h. Menjaga nama baik perusahaan dengan menerapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. i. Menyesuaikan kebutuhan, perkembangan, dan kebijakan perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa. j. Menyusun Prosedur/*Work Instruction* tentang pengadaan barang dan jasa yang belum diatur oleh perusahaan.

No	Istilah Term	Definisi Definition
		a. A group of people appointed by the Board of Directors who are responsible for: b. Implementing procurement principles in the procurement process of goods and services by the SOE Minister Regulation governing the general guidelines for the procurement of goods and services. c. Ensuring the achievement of the company's TKDN commitment on a consolidated basis. d. Monitoring the achievement of TKDN commitments periodically (quarterly at minimum). e. Clarifying vendors' TKDN self-assessment commitments in each procurement process. f. Clarifying final self-assessment of vendors' TKDN commitments in each procurement process with relevant stakeholders. g. Determining items of goods and services and strategic partnership vendors by the provisions of the Project Goods and Services Procurement Procedure. h. Analyzing price index forecasting, especially for strategic goods and services items. i. Maintaining the company's good name by implementing the Anti-Bribery Management System Guidelines in the procurement of goods and services. j. Adjusting the needs, developments, and company policies in the procurement of goods and services. k. Developing procedures/work instructions for procuring goods and services that the company has not regulated.

Prosedur/WI lain yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara adalah:

1. WI Pendaftaran *Vendor* No. PP/DIVSCM/W/002, tanggal 17 Mei 2023;
2. WI Pembuatan Kontrak *Vendor* No. PP/DIVSCM/W/007, tanggal 20 September 2023;
3. WI Evaluasi Kinerja *Vendor* Proyek Konstruksi No. PP/WI/E1-006, tanggal 20 Mei 2024; dan
4. WI Tender Terbatas No. PP/WI/E1-009, tanggal 20 Mei 2024.

Untuk mendukung Proses Perencanaan Pengadaan tersebut, maka Perusahaan menyusun Perencanaan Pembayaran yang digunakan dengan menerbitkan beberapa Prosedur/WI, antara lain:

1. WI Pembayaran Reguler Tagihan *Vendor* No. PP/WI/E2-060, tanggal 15 Oktober 2024 yang merupakan pembaharuan terhadap WI yang sama;
2. WI Pengelolaan L/C dan L/C Lokal (SKBDN) No. PP/WI/E2-078, tanggal 6 Desember 2024 yang merupakan pembaharuan terhadap WI yang sama; dan
3. WI Pelaporan Pengaduan & Penanganan Tagihan *Vendor* No. PP/WI/E2-001, tanggal 20 Mei 2024 yang merupakan pengembangan fitur dalam smart e-proc untuk meningkatkan kepuasan *vendor* kepada Perusahaan.

Other procedures/WI related to the State-Owned Enterprises Minister Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises are:

1. Vendor Registration WI No. PP/DIVSCM/W/002, dated May 17, 2023;
2. WI Vendor Contract Creation No. PP/DIVSCM/W/007, dated September 20, 2023;
3. Construction Project Vendor Performance Evaluation WI No. PP/WI/E1-006, dated May 20, 2024; and
4. Limited Tender WI No. PP/WI/E1-009, dated May 20, 2024.

To support the Procurement Planning Process, the Company prepared a Payment Planning that is used by issuing several Procedures/WIs, among others:

1. WI Regular Payment of Vendor Bills No. PP/WI/E2-060, dated October 15, 2024, which is an update to the same WI;
2. WI Management of L/C and Local L/C (SKBDN) No. PP/WI/E2-078, dated December 6, 2024, which is an update to the same WI; and
3. WI Complaint Reporting & Vendor Bill Handling No. PP/WI/E2-001, dated May 20, 2024, which is a feature development in smart e-proc to improve vendor satisfaction with the Company.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Official Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, PTPP berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas penyelenggara perusahaan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan melalui formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

Ketentuan mengenai LHKPN juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur kedudukan, tata kelola, serta mekanisme pengawasan terhadap KPK. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia dilakukan pemeriksaan atas harta kekayaannya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pejabat yang memiliki fungsi strategis, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.

Penyampaian dan pemeriksaan LHKPN bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap Penyelenggara Negara diwajibkan mengisi dan menyampaikan LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap agar KPK dapat melakukan analisis, evaluasi, dan penilaian atas jumlah, jenis, serta nilai harta kekayaan yang dilaporkan secara akurat dan bertanggung jawab.

Basic Principles of State Officials Wealth Report

As an entity whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia, the Company is required to comply with binding laws and regulations. One form of this commitment is the implementation of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) requirement, an effort to prevent corruption and strengthen the integrity of company officials.

The State Officials' Wealth Report (LHKPN) is a list of all the assets of State Officials submitted through the LHKPN form established by the Corruption Eradication Commission (KPK), as stipulated in KPK Regulation No. 3 of 2024 on the Second Amendment to KPK Regulation No. 7 of 2016.

The provisions regarding LHKPN are also in line with Law No. 19 of 2019, an amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, which regulates the KPK's position, governance, and supervisory mechanisms. In addition, Law No. 28 of 1999 on Clean and Free State Administrators from Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every State Administrator must report and disclose their assets before and after taking office and be willing to have their assets audited. The provisions explain that officials with strategic functions, including the Board of Commissioners, Directors, and structural officials in State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises, are included in the category of State Administrators who are required to submit LHKPN.

The submission and examination of LHKPN reports aim to create state officials who uphold the principles of transparency, accountability, and freedom from corruption, collusion, and nepotism. Every State Administrator is required to complete and submit their LHKPN honestly, accurately, and completely so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the amount, type, and value of reported assets.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan berpedoman pada sejumlah dasar hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.

Legal Basis and Regulations in Applying LHKPN in the Company

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory basis as the foundation of how to view LHKPN implementation within the Company. The legal bases are:

1. Law No. 28 of 1999 on Clean and Free State Administrators from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No. 19 of 2019, an amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission; and
3. KPK Regulation No. 3 of 2024 on the Second Amendment to KPK Regulation No. 7 of 2016.

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perusahaan

PTPP telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/PP/DIR/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Perubahan Penetapan Pejabat yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan PTPP meliputi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat di bawah Direksi hingga dua tingkat, pimpinan entitas anak dan afiliasi, serta pejabat dan fungsi strategis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Unit pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkup Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/PP/DIR/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang terdiri dari:

LKHPN Implementation in the Company

PTPP has issued Board of Directors Decree No. 149/SK/PP/DIR/2024 dated December 9, 2024, on Changes to the Determination of Officials Required to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN). Officials required to submit LHKPN within PTPP include the Board of Commissioners, the Board of Directors, officials under the Board of Directors at up to two levels, leaders of subsidiaries and affiliates, as well as other strategic officials and functions, in accordance with applicable regulations.

The unit managing the implementation of LHKPN within the Company was formed based on Board of Directors Decree No. 149/SK/PP/DIR/2024 dated December 9, 2024, which consists of:

No	Jabatan Position	PIC
1	Penanggung Jawab Person in Charge	Direktur Utama President Director
2	Pembina Supervisor	Direktur Strategi Korporasi & HCM Director of Corporate Strategy & HCM
3	Koordinator Coordinator	Senior Vice President HCM Senior Vice President of HCM
4	Wakil Koordinator (PIC Perusahaan Afiliasi) Deputy Coordinator (PIC of Affiliated Company)	Senior Manager, HC Operation Senior Manager of HC Operation
5	Admin Instansi & Unit UKP Agency Admin & UKP Unit	Industrial Relations Section Divisi HCM Industrial Relations Section HCM Division
6	Admin Unit Afiliasi Affiliate Unit Admin	Industrial Relations Section Divisi HCM Industrial Relations Section HCM Division
7	Admin Unit Divisi Operasi Operations Division Unit Admin	Manager HCBP Divisi Operasi Manager of HCBP Operations Division
8	Admin Unit Anak Perusahaan Subsidiaries Unit Admin	Kepala Departemen HC Anak Perusahaan Head of HC Departments in Subsidiaries

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2025

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2025.

LHKPN Transparency of Company Officials in 2025

Below is the transparency of positions required for LHKPN mandatory reporting in 2025.

Pejabat Wajib LHKPN LHKPN-Mandatory Officials	Jumlah Wajib Lapor Total Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Board of Commissioners and Board of Directors	9	8	88,89
Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan termasuk Dewan Direksi Cucu Perusahaan serta Perusahaan Afiliasi The Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries, including the Board of Directors of Second-Tier Subsidariesand Affiliated Companies	64	64	100,00
Seluruh Pegawai pada level jabatan Kepala Divisi/ Biro All employees at the Head of Division/Bureau level	14	14	100,00
Seluruh Pegawai pada Level Jabatan *General Manager* All employees at the General Manager level	8	8	100,00
Seluruh pegawai pada Level Jabatan *Senior Manager*, *Coordinator* (fungsional), *Spesialist* dan *Senior Spesialist* All employees at the Senior Manager, Coordinator (functional), Specialist, and Senior Specialist levels	56	56	100,00
Seluruh pegawai pada Level Jabatan Kepala Divisi/Biro dan Kepala Departemen di Anak Perusahaan All employees at the Head of Division/Bureau and Head of Department level in Subsidiaries	66	66	100,00
Seluruh Project Manager/Project Director baik di Perusahaan maupun di Anak Perusahaan (termasuk Afiliasi) All Project Managers/Project Directors in the Company and in Subsidiaries (including Affiliates)	111	111	100,00
Seluruh Pengurus (Direksi) Dana Pensiun All Pension Fund Management (Board of Directors)	2	2	100,00
Jumlah Total	**330**	**329**	**99,69**

Pada tahun 2025, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN PTPP mencapai 99,69%, mencerminkan komitmen kuat Perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan regulasi.

In 2025, PTPP's LHKPN compliance rate reached 99.69%, reflecting the Company's strong commitment to transparency and regulatory compliance.

Whistleblowing System (WBS)

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan prinsip GCG, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini *(early warning system)* atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

As one of the efforts to enforce the implementation of GCG principles, PTPP implements a Whistleblowing System (WBS) to prevent fraud by reporting incidents of infringing behavior and encouraging a culture of honesty and openness. Implementing the WBS is beneficial for developing a well-managed violation reporting system, which can be the foundation for the Company to design evaluations and necessary follow-up actions. WBS is also part of an early warning system for possible problems due to a violation. For whistleblowers, WBS guarantees the protection and confidentiality of their identity.

Pedoman WBS dan Tujuan

Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PTPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 147/SK/PP/DIR/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Perubahan Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PTPP. Tugas dan kewajiban Tim, berpedoman pada Buku Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PTPP No. 160/KOM/PP/2022-405/EXT/PP/DU/2022 tanggal 30 November 2022.

Tujuan dari adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial dan dapat merusak citra Perusahaan serta mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
2. Menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik serta mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
3. Mempermudah manajemen dalam menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
4. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator dan masyarakat umum; dan
5. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.

WBS Guidelines and Purposes

The PTPP Whistleblowing System Policy Implementation Team was established pursuant to Board of Directors Decree No. 147/SK/PP/DIR/2024, dated December 2, 2024, on Changes to the PTPP Violation Reporting System (Whistleblowing System) Policy Implementation Team. The duties and obligations of the Team are based on the PTPP Violation Reporting System (Whistleblowing System) Book No. 160/KOM/PP/2022-405/EXT/PP/DU/2022 dated November 30, 2022.

The purpose of the Whistleblowing System is:

1. Creating a conducive climate and encouraging the reporting of things that can cause financial and non-financial losses, damage the Company's image, and reduce losses due to violations through early detection;
2. Addressing the problem of internal violations first, before expanding into public violations issues and reducing the risks faced by the Company due to violations in terms of financial, operational, legal, work safety, and reputation;
3. Facilitating the management in handling violation reports effectively while protecting the confidentiality of the whistleblower's identity while maintaining the confidentiality of information in a special archive with guaranteed security;
4. Increasing the Company's reputation in the eyes of stakeholders, regulators, and the general public; and
5. Establishing policies and infrastructure to protect whistleblowers from retaliation by internal and external parties.

Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pada penerapannya, lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti melalui WBS adalah tindakan yang dinilai dapat memberikan dampak material dan merugikan Perusahaan, diantaranya:

1. Benturan Kepentingan;
2. Penyalahgunaan jabatan;
3. Gratifikasi yang tidak dilaporkan oleh penerima;
4. Penyimpangan dan Peraturan Perusahaan (Kode Etik Perusahaan);
5. Penyimpangan dan Peraturan Perundangan yang Berlaku; dan
6. Penyimpangan dan Peraturan Perundangan yang Berlaku, yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Scope of Complaints of Violations through the Whistleblowing System

In the implementation, the scope of reporting that can be followed up through WBS is an action considered to have a material and adverse impact on the Company, including:

1. Conflict of interest;
2. Abuse of authority;
3. Gratuities not reported by the recipient;
4. Violations of Company Regulations (Company Code of Conduct);
5. Violations of Applicable Laws and Regulations; and
6. Violations of Applicable Laws and Regulations, which indicate criminal acts of corruption.

Pihak Pengelola WBS

Fungsi Pengelola Pengaduan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) di PTPP terdiri dari beberapa unsur dan diketuai oleh SVP Internal Audit. Berikut adalah struktur pengelola WBS di PTPP.

WBS Manager

The Whistleblowing System (WBS) function at PTPP consists of several elements and is chaired by the SVP of Internal Audit. The following is the structure of WBS management at PTPP.

Formasi Formation	Jabatan Position
Penanggung Jawab Person in Charge	Direktur Utama President Director
Ketua Chairman	SVP, Head of Internal Audit Biro SVP, Head of Internal Audit Bureau
Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently Member	SM, Head of Corporate Governance Department
Anggota Member	Komite Audit Audit Committee
Anggota Member	SVP, Head of Legal Division
Anggota Member	SVP, Head of Human Capital Management Division
Anggota Member	SVP, Head of Corporate Secretary Biro SVP, Head of Corporate Secretary Bureau
Anggota Member	SM. Head of IT Ops.
Anggota Member	GCG Auditor
Anggota Member	Corporate Governance Management Section

Saluran Pengaduan

Perusahaan menyediakan media untuk pelaporan pelanggaran yaitu: melalui *e-mail*, surat, dan aplikasi berbasis web yang dijamin kerahasiaannya. Penyediaan media tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran sebagaimana ruang lingkup pengaduan pelanggaran tersebut di atas dan bukan untuk menyampaikan keluhan pelapor.

Complaint Channel

The Company provides several channels for reporting violations, namely through email, letters, and a web-based application, all of which guarantee confidentiality. The provision of these channels is intended to report alleged violations within the scope of the aforementioned reporting mechanism and not to submit personal complaints from the reporter.

Media yang digunakan dalam penyampaian laporan pelanggaran dapat berupa:

1. Melalui surat tertulis yang ditujukan kepada:
   Biro SPI PTPP
   Plaza PP - Wisma Subiyanto Lantai Dasar
   Jl. TB. Simatupang No. 57
   Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia
2. Melalui *e-mail* ditujukan ke alamat:
   pengaduan@ptpp.co.id
3. Melalui aplikasi berbasis *web*:
   https://lapor.ptpp.co.id/

Mekanisme Penyampaian Pengaduan dan Penanganan Pengaduan yang Masuk Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran

Penyampaian laporan adanya pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal Perusahaan. Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui *e-mail* yang khusus diperuntukkan untuk media Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan yaitu pengaduan@ptpp.co.id; atau melalui aplikasi berbasis *web* dengan *link* https://lapor.ptpp.co.id yang dapat diakses langsung melalui internet;
2. Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/surel dan fotokopi identitas diri;
3. Pelapor anonim dapat diterima dengan syarat menyertakan cukup bukti untuk ditindaklanjuti yang sesuai dengan ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran, namun tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporan tersebut;
4. Pengaduan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan; dan
5. Perusahaan akan memberikan balasan atas email yang telah diterima yang diajukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor.

Langkah-langkah proses penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima dan menyeleksi laporan Pengaduan Pelanggaran yang diterima sebagai tahap verifikasi awal, apakah terdapat indikasi atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran serta dapat ditindaklanjuti, meliputi:
   a. Pihak pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/surel dan fotokopi identitas diri;
   b. Bagi Pelapor anonim dapat diterima dengan syarat menyertakan cukup bukti untuk ditindaklanjuti yang

The media used in submitting violation reports can be:

1. Written letter addressed to:
   Internal Audit Bureau PT PP (Persero) Tbk
   Plaza PP-Wisma Subiyanto Ground Floor
   JI. Letjend. TB. Simatupang No. 57
   Pasar Rebo, Jakarta 13760 – Indonesia
2. Via email to:
   pengaduan@ptpp.co.id
3. Via web-based app:
   https://lapor.ptpp.co.id/

Grievance Mechanisms and Complaints Handling Submitted through the Violation Reporting System

Reports of violations can be submitted by anyone, both internal and external to the Company. Violation reports must be submitted in writing with the following provisions:

1. The whistleblower submits an official letter addressed to the Company c.q. the Whistleblowing System Management Team via e-mail specifically designated for the Company's Whistleblowing System, namely pengaduan@ptpp.co.id; or via a web-based application with the link https://lapor.ptpp.co.id, which can be accessed via the internet;
2. Reporters are advised to provide information about their identity, including at least their name, address, phone number, email address, and a photocopy of their identity card;
3. Anonymous reports may be accepted, provided sufficient evidence is included for follow-up in accordance with the scope of the Violation Reporting System. However, the Company is under no obligation to respond, as it would be difficult to communicate with and clarify such reports;
4. Complaints of violations must be accompanied by supporting documents, such as documents related to the transaction and/or the complaint of violation to be submitted; and
5. The Company will respond to emails received in writing, accompanied by the reporter's identity.

The steps in the complaint handling process are as follows:

1. The Whistleblowing Management Team receives and selects the Violation Complaint reports received as an initial verification stage, whether there are indications or in accordance with the criteria of the Whistleblowing System, and can be followed up, including:
   a. The reporting party provides information about their identity, which at a minimum includes their name/address/phone number/email, and a photocopy of their identity card;
   b. Anonymous reports may be accepted provided that sufficient evidence is included for follow-up in

sesuai dengan ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran; dan
c. Terdapat permasalahan dugaan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, tempat dan tanggal peristiwa serta kerugian yang ditimbulkan.

Bila YA, laporan Pengaduan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti. Bila TIDAK, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

2. Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan hasil verifikasi awal tersebut kepada:
   a. Pengelola WBS di Kementerian BUMN Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris;
   b. Komite Audit yang bertugas sebagai Anggota Tim WBS (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
   c. Direksi (jika terlapor Pegawai); dan
   d. Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).
3. Pelaksanaan penanganan lebih lanjut, sesuai materi yang dilaporkan menjadi tanggung jawab dan atas arahan:
   a. Pengelola WBS di Kementerian BUMN Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris;
   b. Komite Audit yang bertugas sebagai Anggota Tim WBS (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
   c. Direksi (jika terlapor Pegawai); dan
   d. Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).
4. Dari laporan tersebut di atas, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi langkah selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Seluruh proses verifikasi awal dan penanganan lebih lanjut atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
6. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran di bawah.
7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi serta diadministrasikan dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).
8. *Timeline* penanganan Sistem Pelaporan Pelanggaran PTPP.

accordance with the scope of the Whistleblowing System; and
c. There are issues of alleged violations, who is involved, the place and date of the incident, and the losses incurred.

If YES, the complaint report will be forwarded for follow-up. If NO, the Violation Reporting System process is complete.

2. Members of the Whistleblowing Management Team shall report the results of the initial verification to:
   a. The WBS Manager at the SOE Ministry if the violation was committed by a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners;
   b. The Audit Committee serving as a WBS Team member (if the reported party is a member of the Board of Commissioners' supporting body);
   c. The Board of Directors (if the reported party is an employee); and
   d. The Board of Commissioners and the Board of Directors (if the reported party is a member of the Whistleblowing Management Team).
3. Further handling, in accordance with the reported material, is the responsibility of and under the direction of:
   a. WBS Manager at the SOE Ministry if the violation was committed by a member of the Board of Directors or Board of Commissioners;
   b. Audit Committee serving as a WBS Team member (if the reported party is a member of the Board of Commissioners' supporting body);
   c. The Board of Directors (if the reported party is an employee); and
   d. The Board of Commissioners and Board of Directors (if the reported party is a member of the Whistleblowing Management Team).
4. Based on the above report, the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall determine the recommended next steps. If the report is not proven, the complaint report will be closed. If the complaint is proven or requires follow-up, sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations, or the matter will be forwarded to the investigating party for further processing in accordance with applicable rules and regulations.
5. All initial verification processes and further handling of complaints must be recorded in an official report.
6. The procedure for managing complaints through the Whistleblowing System shall be carried out in accordance with the flowchart as stipulated in the Appendix below.
7. The entire Whistleblowing System process must be well-documented and administered reliably.
8. PTPP Whistleblowing System Handling Timeline

Keterangan Description	Waktu (Hari) Period (days)
Penerimaan Laporan, lalu dibuatkan tanda terima pelaporan pelanggaran Receipt of reports, followed by the issuance of a receipt for the reporting of violations	1
Verifikasi awal, lalu dibuatkan BA hasil pemeriksaan verifikasi awal Initial verification, followed by the issuance of an official report based on the initial verification	1-7
Laporan diteruskan kepada yang berwenang sesuai dengan pihak yang terlapor Reports are forwarded to the appropriate authorities according to the reported party	1
Pemeriksaan lanjutan dari hasil verifikasi awal (poin 2) Further examination of the initial verification results (point 2)	1-14
Pemeriksaan lanjutan dari hasil verifikasi awal (poin 2) apabila perlu dilakukan investigasi Further examination of the initial verification results (point 2), if an investigation is necessary	1-40
Kompilasi dan penyusunan laporan Compilation and preparation of reports	1-3

Mekanisme WBS di lingkup Perusahaan digambarkan dalam alur bagan berikut:

The WBS mechanism within the Company is described in the following flowchart:



Perlindungan bagi Pelapor

Fungsi pengelola WBS wajib menjaga kerahasiaan pelapor dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu:

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme;
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun; dan
4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan.

Perusahaan senantiasa memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Pelapor dengan senantiasa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan perlindungan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan Pelapor. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk menyediakan perlindungan hukum kepada Pelapor yang beritikad baik, di mana hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
- Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, maka ia juga dapat meminta bantuan pada LPSK, sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Penghargaan dan Sanksi

Pihak Terlapor yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Sementara itu, Perusahaan juga telah menetapkan sejumlah sanksi kepada Pelapor yang terbukti mengirimkan laporan berupa fitnah atau laporan palsu. Pada penerapannya, baik Terlapor maupun Pelapor yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan internal Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Protection for Whistleblower

The WBS management function is required to maintain the whistleblower's confidentiality by upholding the principle of confidentiality, such as:

1. In carrying out the follow-up process of any complaint/ disclosure, confidentiality, the principle of presumption of innocence, and professionalism must be promoted;
2. Whistleblower's identity is guaranteed confidentiality by the Company;
3. The Company guarantees the whistleblower from all threats, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the reported case to any party; and
4. This protection also applies to employees conducting investigations or parties providing information related to the complaints/disclosure.

The Company always guarantees and protects the whistleblower by always maintaining the confidentiality of the whistleblower's identity and providing protection against actions that could harm the whistleblower. In addition, the Company is committed to providing legal protection to the whistleblower in good faith, which should be in line with the laws and regulations, i.e., Law No. 15 of 2002 jo Law No. 25 of 2003 Article 43 on Money Laundering and Law No. 13 of 2006 Article 13 on Protection of Witnesses and Victims, and Government Regulation No. 57 of 2003 Article 5 on Procedures of Special Protection for Whistleblower and Witness of the Criminal Act of Money Laundering:

- Protection from criminal and/or civil charges;
- Protection of the whistleblower's personal and/or family security from physical and/or mental threats;
- Protection of Reporting assets; and/or
- Submission of information without face-to-face contact with the Reported Party at each level of case examination if the violation enters court dispute.

In the event that the Reporting Party needs help, they can ask for assistance from LPSK per Law No. 13 of 2006.

Rewards and Sanctions

The Reported Party, proven guilty, will be sanctioned following the applicable provisions in the Company. Meanwhile, the Company has also set several sanctions on Reporting Parties that have been proven to send defamation or false reports. In its application, the Reported and Whistleblower proven guilty will be subject to sanctions adjusted to the Company's internal regulations and the applicable laws and regulations.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perusahaan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi

In addition, awards are given to the Whistleblower if the reported case contains truth and the Company has a positive impact from such a report. The type and amount of the award given are governed by the policy of the Board of Directors.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2025 dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menemukan adanya pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS sebanyak 3 Pengaduan dengan rincian sebagai berikut.

Reporting Violations in 2025 and Its Follow-up

Throughout 2025, the Company found 3 complaints of violations entered through the WBS mechanism with the following details:

Media Penyampaian Delivery Media	2025	2024
Surat Letter	-	-
Surel Email	3	4
Aplikasi berbasis Web Web-based App	-	1
Jumlah **Total**	3	**5**

Status Laporan Report Status	2025	2024
Laporan Dalam Proses Ongoing Process	-	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Reports Followed-Up		
Laporan Tidak Terbukti Reports Not Proven	3	4
Laporan dengan Tindak Lanjut Reports with Follow Up	-	1
Jumlah **Total**	3	**5**

Kepatuhan Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance with Public Company Governance Guidelines

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Perusahaan dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Conformity of GCG Implementation Development in the Company with OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on the Governance Guidelines for Public Companies

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Aspect 1: Relations between Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholder's Rights

Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
Principle 1: Enhancing the Value of GMS

Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham.
Recommendation 1: The Public Company has ways or technical procedures of voting, either open or close, prioritizing the independence and interests of Shareholders.

Keterangan Rekomendasi:
- Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote).* Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci;
- Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan Pemegang Saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan Pemegang Saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.

Recommendation Description:
- Every issued share with voting rights has one vote (one share, one vote). Shareholders can use their votes when making a decision, especially by voting. However, the decision-making mechanism by voting, either open or closed, has not been regulated in detail;
- Public Companies are recommended to have a voting procedure in deciding on one GMS agenda. The procedure must maintain the independence or freedom of the shareholders. For example, open voting is done by raising hands and following the selection instructions offered by the GMS Chair. On the other hand, closed voting is done for decisions that need confidentiality or upon request of the shareholders by using a voting card or electronic voting.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang diatur secara jelas dalam:
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang pada Akta No. 31 tanggal 14 April 2023 Pasal RUPS dan Pasal Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS); dan
- Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP Tahun 2021 Bagian Kedua Bab I tentang RUPS.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The mechanism and procedures for decision-making are carried out through voting, either openly or by secret ballot, as clearly stipulated in:
- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- The Company's Articles of Association as stated in Deed No. 31 dated 14 April 2023, particularly the Articles on the GMS and on Quorum, Voting Rights, and Resolutions in the GMS; and
- PTPP's GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter I regarding the GMS.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Aspect 1: Relations between Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholder's Rights

Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
Recommendation 2: All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.

Keterangan Rekomendasi:
Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham terkait mata acara dalam RUPS.

Recommendation Description:
Attendance of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company is intended for every member of the Board to notice, explain, and answer every problem that occurs or questions asked by the Shareholders related to the GMS agenda.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Pada RUPST TB 2024 yang diadakan pada tanggal 30 April 2025 yang dipimpin oleh Dhony Rahajoe selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen telah dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
At the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024, held on 30 April 2025 and chaired by Dhony Rahajoe in his capacity as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, the meeting was attended by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
Recommendation 3: A summary of GMS minutes is available on the Corporate Website for at least one year

Keterangan Rekomendasi:
Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tersebut.

Recommendation Description:
The Public Company is required to make a summary of GMS minutes in Indonesian and foreign language(s) (at least in English) and announce it within two business days after the GMS is convened to the public, e.g., through the Company's Website. The availability of the GMS minutes summary on the Corporate Website allows Shareholders who cannot attend to obtain important GMS information easily and swiftly. Therefore, the provision of a minimum period of availability for the GMS minutes summary on the Website is intended to give shareholders adequate time to obtain information.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 telah tersedia dalam situs web Perusahaan, dan ditampilkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, dan tersedia dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) untuk memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir dalam mendapatkan informasi penting.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The Summary of Minutes of the Annual GMS for Fiscal Year 2024 has been made available on the Company's website and is displayed for at least 1 (one) year. It is provided in two languages (Indonesian and English) to enable shareholders who were not present to obtain important information.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Aspect 1: Relations between Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholder's Rights

Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
Principle 2: Improving the Communication Quality between the Public Company and Shareholders or Investors.

Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor.
Recommendation 4: The Public Company has a communication policy with Shareholders or investors.

Keterangan Rekomendasi:
- Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dimaksudkan agar para Pemegang Saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, Pemegang Saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka;
- Kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

Recommendation Description:
- The communication between the Public Company and the Shareholders or investors is intended to enable the Shareholders or investors to better understand publicly available information, i.e., periodic reports, information disclosure, business and performance conditions and prospects, and the implementation of corporate governance. Shareholders or investors may also submit feedback and opinions to the Public Company's management;
- A communication policy with the Shareholders or investors indicates the commitment of the Public Company to communicating with the Shareholders or investors. Such policies may include strategies, programs, and timelines of communication, as well as guidelines that support the Shareholders or investors in participating in such communications.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Pada Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP Tahun 2021, Bagian Ketiga tentang Pengungkapan Informasi (*Disclosure*) yang menyebutkan bahwa PTPP menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya, tetapi tidak termasuk data rahasia Perusahaan atau hal lain yang berkaitan dengan Perusahaan yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan keselamatan Perusahaan, persaingan usaha ataupun pertimbangan etika.

Prinsip Keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi PTPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
In the PTPP GCG Implementation Guidelines 2021, Part Three regarding Information Disclosure, it is stated that PTPP upholds the principle of transparency by providing information in a timely, adequate, clear, accurate, and comparable manner. Such information is also easily accessible to stakeholders in accordance with their rights. However, this does not include confidential Company data or other matters related to the Company that must not be disclosed to unauthorized parties, based on considerations of the Company's safety, business competition, or ethical considerations.

The principle of transparency does not reduce the obligation to comply with the confidentiality provisions of PTPP's information in accordance with prevailing laws and regulations, official confidentiality, and personal rights.

Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam Situs Web.
Recommendation 5: The Public Company discloses the communication policy with the Shareholders or Investors on the Website.

Keterangan Rekomendasi:
Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua Pemegang Saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran Pemegang Saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.

Recommendation Description:
Disclosure of a communication policy is a form of transparency by the Public Company regarding its commitment to giving communication equality to all Shareholders or investors. The disclosure of such information also aims to increase the participation and role of Shareholders or investors in the implementation of the Public Company's communication program.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Aspect 1: Relations between Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholder's Rights

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP Tahun 2021, Bagian Ketiga tentang Pengungkapan Informasi (*Disclosure*) yang menyebutkan bahwa informasi isi situs web Perusahaan (www.ptpp.co.id) dikelola oleh Biro Sekretaris Perusahaan, selalu di update berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya di Pasar Modal dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The PTPP GCG Implementation Guidelines 2021, Part Three regarding Information Disclosure, state that the information available on the Company's website (www.ptpp.co.id) is managed by the Corporate Secretary Bureau and is regularly updated in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly those related to the capital market, as well as the applicable Company regulations.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Principle 3: Strengthening the Board of Commissioners' Membership and Composition

Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Recommendation 6: The determination of the total members of the Board of Commissioners shall consider the condition of the Public Company.

Keterangan Rekomendasi:
Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

Recommendation Description:
The total number of members of the Board of Commissioners may affect the effectiveness of their duty execution. The determination of total members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the applicable laws and regulations, which is at least two persons based on the provisions of OJK Regulation on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. It is also necessary to consider the conditions of the public company, including, among others, the characteristics, capacities, and size, as well as the measures to achieve objectives and fulfill different business needs among Public Companies. However, a larger number of members could disrupt the effectiveness of the Board of Commissioners function.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG Tahun 2021, Bagian Kedua Bab II huruf B tentang Keanggotaan Dewan Komisaris; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2026 Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter II, Section B regarding the Membership of the Board of Commissioners; and
- The Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated 13 January 2026, Article 14 regarding the Board of Commissioners.

Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
Recommendation 7: The determination of the Board of Commissioners composition considers the diversity of required expertise, knowledge, and experience.

Keterangan Rekomendasi:
Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

Recommendation Description:
The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics that, either as an organ or as individual members of the Board, refer to the needs of the Public Company. These characteristics are reflected in determining the required expertise, knowledge, and experience in implementing the supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of a Public Company. A composition that is attentive to the needs of a Public Company is a positive thing, particularly related to decision-making in implementing supervisory functions conducted by considering various wider aspects.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG Tahun 2021, Bagian Kedua Bab II huruf B tentang Keanggotaan Dewan Komisaris; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2026 Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter II, Section B concerning the Membership of the Board of Commissioners; and
- The Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated 13 January 2026, Article 14 concerning the Board of Commissioners.

Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
Principle 4: Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Commissioners

Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
Recommendation 8: The Board of Commissioners has a Self-Assessment policy to assess their performance.

Keterangan Rekomendasi:
- Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan;
- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Recommendation Description:
- The Board of Commissioners self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the Board's performance assessment in a collegial manner. Self-assessment is conducted by each member to assess the Board of Commissioners' collegial performance rather than assessing the individual performance of each member. With this self-assessment, it is expected that every member of the Board of Commissioners' can continuously contribute to improving the performance of the Board;
- The policy may include the assessment activities undertaken along with their purposes and objectives, periodic time of execution, and benchmarks or assessment criteria used per the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Public Company, in which the functions are required in the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*).

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
Regulated in the Board of Commissioners Manual.

Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
Recommendation 9: The self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Annual Report of the Public Company.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

Keterangan Rekomendasi:
Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para Pemegang Saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Recommendation Description:
The disclosure of the self-assessment policy on the Board of Commissioners' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as accountability to their duty but also to provide confidence, especially to the Shareholders or investors, on efforts necessary to improve the Board of Commissioners' performance. With such disclosure, the Shareholders or investors understand the check and balance mechanism of the Board of Commissioners' performance.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Tercantum di dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 mengenai "Penilaian Kinerja Dewan Komisaris".

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
As disclosed in the Annual Report for Fiscal Year 2024 under "Board of Commissioners Performance Evaluation".

Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Recommendation 10: The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of the Board of Commissioners members if they are involved in financial crime

Keterangan Rekomendasi:
- Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas Perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris;
- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Recommendation Description:
- The resignation policy of the Board of Commissioners members involved in financial crime is a policy that can improve the stakeholders' trust in the public Company to maintain the Company's integrity. This policy is required to assist in a smooth legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In terms of morality, this policy also establishes an ethical culture within the Public Company's environment. Such policies may be covered by Guidelines or a Code of Conduct applicable to the Board of Commissioners;
- Furthermore, what is meant by engaging in financial crime is a convicted status by an authorized party against the member of the Board of Commissioners. The financial crimes in question include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities and money laundering, as referred to in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG Tahun 2021, Bagian Kedua Bab II huruf B tentang Keanggotaan Dewan Komisaris; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2026 Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter II, Section B concerning the Membership of the Board of Commissioners; and
- The Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated 13 January 2026, Article 14 concerning the Board of Commissioners.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
Recommendation 11: The Board of Commissioners or Committees performing the Nomination and Remuneration functions prepares a succession policy in the Nomination process of members of the Board of Directors.

Keterangan Rekomendasi:
Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perusahaan.

Recommendation Description:
Under the provisions of OJK Regulations on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee in charge of a nomination function has the duty to formulate policies and criteria required in the nomination process of candidate members of the Board of Directors. One of the policies that can support the nomination process, as referred to, is the succession policy of members of the Board of Directors. The succession policy is aimed at maintaining the continuity of the regeneration process or leadership cadre in the Company to maintain business sustainability and the long-term goals of the Company.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Perusahaan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjalankan fungsi nominasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The Company has a Nomination and Remuneration Committee that performs the nomination function in accordance with the provisions of the OJK Regulation.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi
Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors

Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
Principle 5: Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition

Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Recommendation 12: The determination of the total members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and the decisionmaking effectiveness.

Keterangan Rekomendasi:
Sebagai organ Perusahaan yang berwenang dalam pengurusan Perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.

Recommendation Description:
As a Company organ authorized in the Company's management, determining the total number of the Board of Directors greatly affects the performance of a Public Company. Thus, the determination of the total members of the Board must be made through careful consideration and must be subject to the provisions of applicable laws and regulations, which, according to the OJK Regulation on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, there must be at least two persons. The total member of the Board of Directors shall also be based on the need to achieve the Public Company's goals and objectives and adjusted to the Public Company's conditions, including the characteristics, capacity, and size of the Public Company, as well as how to achieve an effective Board decision-making.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG Tahun 2021, Bagian Kedua Bab III huruf B tentang Keanggotaan Direksi; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2026 Pasal 11 tentang Direksi.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter III, Section B concerning the Membership of the Board of Directors; and
- The Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated 13 January 2026, Article 11 concerning the Board of Directors.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi
Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors

Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
Recommendation 13: The composition of the Board of Directors is determined by considering the diversity of expertise, knowledge, and experience required.

Keterangan Rekomendasi:
Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.

Recommendation Description:
Similar to the Board of Commissioners, the diversity of composition of the Board of Directors is a combination of characteristics required in terms of the Board of Directors as an organ and as members of the Board of Directors individually, according to the needs of the Public Company. Such a combination was determined by considering the expertise, knowledge, and experience under the Board of Directors' duties and functions in achieving the Company's objectives. Therefore, considering a combination of such characteristics will impact the accuracy of the nomination process and the individual appointment of members of the Board of Directors or Board of Directors collegially.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Komposisi anggota Direksi senantiasa memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The composition of the members of the Board of Directors consistently takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience in accordance with the Company's needs.

Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Recommendation 14: The Board of Directors Members in charge of accounting or finance have the accounting skills and/or knowledge.

Keterangan Rekomendasi:
- Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan;
- Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

Recommendation Description:
- The Financial Statement is a management accountability report on the management of resources owned by the Public Company, which must be prepared and presented following the Generally Accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and the related OJK Regulations, e.g., the laws and regulations in Capital Market sector governing the presentation and disclosure of Public Company's Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector governing the Board of Directors' responsibilities to the Financial Statements, the Board is jointly and severally liable for the Financial Statements, signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of accounting or financial sector;
- Therefore, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statement will largely depend on the Board of Directors' expertise and/or knowledge, especially the Board members who are in charge of the accounting or financial sector. The qualification of accounting expertise and/ or knowledge, which at least shall be possessed by the said Board members, can provide confidence in preparing Financial Statements so that the report can be relied upon by the stakeholders as the basis of economic decision-making related to the Public Company. Such expertise and/or knowledge may be proven by educational background, training certification, and/ or related work experience.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi
Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Direktur Keuangan PTPP periode sampai dengan 31 Desember 2025, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Akuntansi dan memiliki sertifikasi profesi Chartered Accountant & Certified Professional Management Accountant.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The Finance Director of PTPP for the period up to 31 December 2025 holds a Bachelor's degree (S1) in Accounting Economics and possesses professional certifications as a Chartered Accountant and Certified Professional Management Accountant.

Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
Principle 6: Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Directors.

Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
Recommendation 15: The Board of Directors has a selfassessment policy to assess their performance.

Keterangan Rekomendasi:
- Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan;
- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi perusahaan terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Recommendation Description:
- Similar to the Board of Commissioners, the Board of Directors self-assessment policy is a guideline for accountability for the collective Board performance. Self-assessment is conducted by each member to assess the Board's performance collegially rather than assessing the individual performance of each member. With this self-assessment, it is expected that every member of the Board can continuously contribute to improving the performance of the Board of Directors;
- The policy may include the assessment activities undertaken along with their purposes and objectives, periodic time of execution, and benchmarks or assessment criteria used per the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Public Company, in which the functions are required in the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Penilaian kinerja Direksi melekat pada KPI Direksi secara Direktorat dan Kolegial.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
The performance evaluation of the Board of Directors is embedded in the Directors' KPIs, both at the Directorate and collegial levels.

Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
Recommendation 16: The self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance is disclosed in the annual report of the Public Company

Keterangan Rekomendasi:
Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan perusahaan terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan Perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.

Recommendation Description:
The disclosure of the self-assessment policy on the Board of Directors' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as accountability to their duty but also to provide confidence, especially to the Shareholders or investors, on efforts necessary to improve the Board of Directors' performance. With such disclosure, the Shareholders or investors understand the check and balance mechanism of the Board of Directors' performance.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi
Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Tercantum di dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 mengenai "Penilaian Kinerja Direksi".

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
As disclosed in the Annual Report for Fiscal Year 2024 under "Board of Directors Performance Evaluation".

Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Recommendation 17: The Board of Directors has a policy related to the resignation of the Board members if they are involved in financial crime.

Keterangan Rekomendasi:
- Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas Perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan perusahaan terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi;
- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Recommendation Description:
- The resignation policy of the Board of Directors members involved in financial crime is a policy that can improve the stakeholders' trust in the public Company to maintain the Company's integrity. This policy is required to assist in a smooth legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In terms of morality, this policy also establishes an ethical culture within the Public Company's environment. Such policies may be covered by Guidelines or a Code of Conduct applicable to the Board of Directors;
- Furthermore, what is meant by engaging in financial crime is a convicted status by an authorized party against the member of the Board. The financial crimes in question include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities and money laundering, as referred to in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG Tahun 2021, Bagian Kedua Bab III huruf B tentang Keanggotaan Direksi; dan
- Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2026 Pasal 11 tentang Direksi.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter III, Section B concerning the Membership of the Board of Directors; and
- The Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated 13 January 2026, Article 11 concerning the Board of Directors.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect 4: Stakeholders Participation

Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
Principle 7: Improving the Corporate Governance Aspect through Stakeholders' Participation.

Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
Recommendation 18: The Public Company has a policy to prevent insider trading.

Keterangan Rekomendasi:
Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Recommendation Description:
Someone who has insider information is prohibited from engaging in a securities transaction using such insider information as stipulated in the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example, by clearly segregating data and/or information that is confidential from that which is public and by dividing tasks and responsibilities for managing such information proportionally and efficiently.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect 4: Stakeholders Participation

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Kode Etik PTPP Tahun 2022, Bab IV Point 4.1 tentang Ketaatan kepada Hukum dan Kebijakan PTPP, menyebutkan bahwa: Semua Insan PTPP dan pihak pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dilarang melakukan *insider trading*; dan
- Semua Insan PTPP tidak boleh membocorkan rahasia Perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan dan berpengaruh terhadap harga saham.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- PTPP Code of Ethics 2022, Chapter IV, Point 4.1 regarding Compliance with Laws and PTPP Policies, states that all PTPP personnel and parties with contractual relationships are prohibited from engaging in insider trading; and
- All PTPP personnel are not allowed to disclose Company secrets related to policies that may affect the share price.

Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.
Recommendation 19: The Public Company has anticorruption and anti-fraud policies.

Keterangan Rekomendasi:
Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara *legal*, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

Recommendation Description:
An anti-corruption policy helps ensure that the Public Company's business activities are conducted legally, prudently, and following sound governance principles. This policy may be included or separated from the code of conduct. This policy may include programs and procedures for handling corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification in the Public Company. The policy scope must illustrate the preventive measures of the Public Company against all corrupt practices, either given to or received from other parties.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Kode Etik Perusahaan PTPP Tahun 2022, pada:
  - Bab III Point 3.6 tentang Etika Perusahaan terhadap Anti KKN;
  - Bab IV Point 4.2.2 tentang Transaksi dengan Rekanan dan Pemasok.
- Kebijakan Gratifikasi sesuai *Company Manual* Pengendalian Gratipikasi No. PP/CM/M2-035 tanggal 31 Juli 2024.
- Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran No. 160/KOM/PP/2022 & 405/EXT/PP/DU/2022 tanggal 30 November 2022.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- PTPP Company Code of Ethics 2022, in:
  - Chapter III, Point 3.6 regarding the Company's Ethics on Anti-Corruption, Collusion, and Nepotism (Anti-KKN);
  - Chapter IV, Point 4.2.2 regarding Transactions with Partners and Suppliers.
- Gratification Policy in accordance with the Company Manual on Gratification Control No. PP/CM/M2-035 dated 31 July 2024.
- Whistleblowing System Policy No. 160/KOM/PP/2022 & 405/EXT/PP/DU/2022 dated 30 November 2022.

Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.
Recommendation 20: The Public Company has a policy on selecting and improving supplier or vendor capabilities.

Keterangan Rekomendasi:
- Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* Perusahaan;
- Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan sebuah perusahaan terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect 4: Stakeholders Participation

Recommendation Description:
- The policy on supplier or vendor selection is beneficial to ensure that the Public Company obtains the necessary goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, the policy on enhancing supplier or vendor capabilities is beneficial to ensure that the supply chain operates efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output;
- Implementing these policies can ensure the continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by a public company. The scope of this policy includes criteria in supplier or vendor selection, transparent procurement mechanisms, efforts to enhance supplier or vendor capabilities, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- PP/DIVSCM/W/001 tanggal 7 Juni 2021 mengenai Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa;
- PP/DIVSCM/W/002 tanggal 2 November 2019 mengenai Pendaftaran Vendor Non-Z; dan
- PP/DIVSCM/W/003 tanggal 12 Oktober 2020 mengenai Evaluasi Kinerja Vendor.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- PP/DIVSCM/W/001 dated 7 June 2021 concerning the Procedure for Goods and Services Procurement;
- PP/DIVSCM/W/002 dated 2 November 2019 concerning the Registration of Non-Z Vendors;
- PP/DIVSCM/W/003 dated 12 October 2020 concerning Vendor Performance Evaluation.

Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Recommendation 21: The Public Company has a policy on fulfilling creditors' rights.

Keterangan Rekomendasi:
Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap perusahaan terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban perusahaan terbuka kepada kreditur.

Recommendation Description:
The policy on fulfilling creditors' rights is a guideline for borrowing from creditors. This policy aims to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in the public company. The policy includes considerations in making agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the obligations of the public company to creditors.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP Tahun 2021, Bagian Pertama Bab VII huruf J tentang Pengelolaan Kredit Jangka Panjang dan Jangka Pendek.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
PTPP GCG Implementation Guidelines 2021, Part One, Chapter VII, Section J regarding the Management of Long-Term and Short-Term Credit.

Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*
Recommendation 22: The Public Company has a whistleblowing system policy.

Keterangan Rekomendasi:
Kebijakan *system whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan pegawai atau manajemen perusahaan terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan *system whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *system whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

Recommendation Description:
A well-established whistleblowing system policy will assure protection to witnesses or reporters of indications of violations committed by employees or management of a public company. Implementing this system policy will impact the formation of a good corporate governance culture. The policy includes, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the reporting procedures, protection and confidentiality assurances for whistleblowers, complaint handling, managing parties, and the outcomes and follow-ups of complaints.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect 4: Stakeholders Participation

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Sistem Pelaporan Pelanggaran PTPP Tahun 2022, yang pada dasarnya mencakup:
- Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;
- Cara penyampaian pengaduan;
- Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;
- Penanganan pengaduan;
- Hasil penanganan; dan
- Tindak lanjut pengaduan dan pihak yang mengelola.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
PTPP Whistleblowing System 2022, which essentially covers:
- Types of violations that can be reported;
- Methods for submitting complaints;
- Protection and confidentiality guarantees for whistleblowers;
- Handling of complaints;
- Results of the handling; and
- Follow-up actions and the parties responsible for managing the complaints.

Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan pegawai
Recommendation 23: The Public Company has a longterm incentive policy for the Board of Directors and employees.

Keterangan Rekomendasi:
- Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang Perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang Perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan pegawai untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang;
- Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata perusahaan terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Pegawai dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang perusahaan terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi perusahaan terbuka yang ada.

Recommendation Description:
- Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have a rationale that the growth in the share value or other long-term targets of the Company reflects the long-term performance of the Company. Long-term incentives help maintain loyalty and motivate the Board of Directors and employees to boost performance or productivity, which will impact the Company's performance over the long term;
- This long-term incentive policy is a commitment of the Public Company to encourage the implementation of long-term incentives to the Board of Directors and Employees on terms, procedures, and forms tailored to the long-term objectives of the Public Company. Such policies may include, among others: the intent and objectives of providing longterm incentives, terms and procedures in giving incentives, and the conditions and risks that the Public Company shall pay attention to in providing incentives. Such policies may also be included in the existing remuneration policy of the Public Company.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
- Pedoman Pelaksanaan GCG PTPP Tahun 2021, Bagian Kedua Bab III Huruf G tentang Remunerasi Direksi; dan
- Prosedur Sistem Remunerasi No. PP/DIVHCM/P/008 tanggal 2 Juni 2019.

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
- PTPP GCG Implementation Guidelines 2021, Part Two, Chapter III, Section G regarding the Remuneration of the Board of Directors; and
- Remuneration System Procedure No. PP/DIVHCM/P/008 dated 2 June 2019.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi
Aspect 5: Information Disclosure

Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
Principle 8: Improving Information Disclosure Implementation.

Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
Recommendation 24: The Public Company utilizes the broader use of information technology besides the website for information disclosure.

Keterangan Rekomendasi:
Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi Perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya Perusahaan.

Recommendation Description:
Information technology can be beneficial as a means of information disclosure. Information disclosure is not only the disclosure regulated by laws and regulations but also other information related to the Public Company that shareholders or investors perceive as beneficial to know. By utilizing information technology more extensively aside from the Website, it is hoped that the Company can enhance the effectiveness of disseminating Company information. However, the utilization of information technology still considers the Company's benefits and costs.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Selain situs web Perusahaan (www.ptpp.co.id), dalam rangka keterbukaan informasi secara menyeluruh Perusahaan menggunakan juga media sosial, antara lain:
- Instagram : @PTPP_ID
- X : @PTPP_ID
- Facebook : PTPPTBK
- Youtube : PT PP PERSERO Tbk

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
In addition to the Company's website (www.ptpp.co.id), to ensure comprehensive information disclosure, the Company also utilizes social media, including:
- Instagram: @PTPP_ID
- X (formerly Twitter): @PTPP_ID
- Facebook: PTPPTBK
- YouTube: PT PP PERSERO Tbk

Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Recommendation 25: The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner of the Public Company's ownership of at least 5% of shares, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership through the Major and Controlling Shareholders

Keterangan Rekomendasi:
Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Recommendation Description:
The regulations in the Capital Market sector governing the submission of Annual Reports by Public Companies have mandated the disclosure of information regarding Shareholders owning 5% or more of the Company's shares, as well as the obligation to disclose information regarding Major Shareholders and Controllers of Public Companies, both directly and indirectly, up to the ultimate beneficial owner in the ownership of such shares. This Governance Guideline recommends disclosing the ultimate beneficial owners of shares in Public Companies holding at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owners of shares by the Major and Controlling Shareholders.

Penerapan di Perusahaan atas rekomendasi (per 31 Desember 2025)
Tercantum di dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 mengenai "Komposisi Pemegang Saham".

Company implementation upon recommendation (as of December 31, 2025)
As disclosed in the Annual Report for Fiscal Year 2024 under "Shareholders Composition".

Rujukan Keberlanjutan

Sustainability Reference




PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT

Tahun 2024 menjadi tahun *baseline* bagi PTPP untuk dapat merumuskan pendekatan keberlanjutan yang sistematis dan terukur. Melalui *Roadmap* ESG periode 2024-2028, PTPP berupaya untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih terukur. Keseriusan PTPP ini diharapkan mampu mendorong citra Perusahaan dan mampu memberikan nilai tambah baik bagi pemegang saham, investor, maupun bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan.

The year 2024 is the baseline year for PTPP to be able to formulate a systematic and measurable approach to sustainability. Through the 2024-2028 ESG Roadmap ratified in 2024, along with the formation of the ESG Committee, PTPP strives to realize sustainable construction with a more measurable approach. PTPP's seriousness is expected to boost the Company's image and provide added value for shareholders, investors, and stakeholders as a whole.

Roadmap ESG PTPP 2024-2028

PTPP 2024-2028 ESG Roadmap



Sustainability ***Leadership***

2028

Menjadi Perusahaan yang memimpin dalam keberlanjutan, menjadi inspirasi dan menjadi standar acuan oleh perusahaan lain pada industri yang sama
Becoming a company that leads in sustainability, inspires, and becomes a reference standard for other companies in the same industry

Tranformational ***Information***

2027

Memperkuat praktik keberlanjutan Perusahaan dengan keterbaruan inovasi
Strengthening the Company's sustainability practices with innovative newness

Continuous ***Improvement***

2026

Berfokus pada perbaikan dan peningkatan praktik keberlanjutan yang ada pada Perusahaan
Focusing on improving and enhancing the Company's existing sustainability practices

Enhancing ***Practice***

2025

Mengintegrasikan strategi berkelanjutan ke dalam operasi dan rantai pasokan Perusahaan
Integrating sustainability strategies into the Company's operations and supply chain

Igniting ***Journey***

2024

Penetapan landasan untuk komitmen jangka panjang perusahaan dalam journey keberlanjutan
Setting the foundation for the Company's long-term commitment to the sustainability journey

Environmental

1 *Water and Waste Management*
Efisiensi total pengambilan air sebesar 20%
Total water extraction efficiency of 20%

2 *Land Use and Biodiversity*
Konservasi Lingkungan dengan program penanaman pohon untuk skema *Carbon-Offset* dan pelestarian lingkungan
Environmental Conservation with tree planting program for the Carbon-Offset scheme and environmental conservation

3 *Carbon - Own Operations*
Penetapan *roadmap* NZE dan Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 15% (*Scope* 1 dan *Scope* 2)
Determination of the NZE roadmap and reduction of GHG emission intensity by 15% (Scope 1 and Scope 2)

4 *Carbon – Product & Services*
Perhitungan emisi GRK *Scope* 3
Calculation of Scope 3 GHG emissions

5 *Waste and Hazardouse Materials Management*
Pemetaan dan program penurunan produksi limbah konstruksi melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta menetapkan penurunan limbah konstruksi sebesar 15% dari total proyek
Mapping and program for reducing construction waste production through the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) program and determining a reduction in construction waste of 15% of the total project

6 *Product Design & Lifecycle Management*
Penerapan konstruksi berkelanjutan di seluruh proyek konstruksi PTPP
Implementation of sustainable construction in all PTPP construction projects



Social

7 *Occupational Health and Safety*
- Menjamin keselamatan semua karyawan dengan mempertahankan *fatality rate* di angka 0
  Ensure the safety of all employees by maintaining the fatality rate at 0 (zero)
- Menjamin program kesehatan kerja karyawan, dengan upaya penurunan rasio *claim* asuransi karyawan sebesar 5%
  Guarantee employee occupational health program, with efforts to reduce the ratio of employee insurance claims by 5%

8 *Employee Engagement*
- Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program *employees children daycare*
  The commitment to improve employee well-being through the employees' children daycare program
- Meningkatkan ketersediaan program pelatihan bagi karyawan
  Increase the availability of training programs for employees
- Merancang kompensasi dan benefit untuk karyawan
  Design compensation and benefits for employees
- Meningkatkan rasio *talent* Perempuan sebesar 16,67%
  Increase the female talent ratio by 16.67%

9 *Local Communities*
Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang komprehensif dengan mempertimbangkan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat
Comprehensive Environmental Social Responsibility activities by considering basic human rights in a fair and equal manner to improve the well-being of the entire community

10 *Product Quality and Safety*
- Mengembangkan dan meningkatkan produk *Green Building*
  Develop and improve Green Building products
- Memberikan kualitas konstruksi terbaik tanpa adanya kegagalan konstruksi
  Delivering the best construction quality without any construction failures

Governance

11
Ethics and Integrity
- Penerapan *whistleblowing system*
  Implementation of whistleblowing system
- Penerapan aturan anti *sexual harrasment*
  Implementation of anti-sexual harassment rules

12
Systemic Risk Management
Mengintegrasikan aspek Lingkungan dan social kedalam *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam pengelolaan seluruh proses bisnis
Integrating environmental and social aspects into Enterprise Risk Management (ERM) in managing all business processes

13
Corporate Governance
- Adopsi IFRS S1 dan S2 pada Laporan Keberlanjutan
  Adopt IFRS S1 and S2 in Sustainability Reports
- Membentuk Komite ESG (ESG Committee)
  Form an ESG Committee
- Menurunkan skor agregat BPKP
  Lowering the BPKP aggregate score
- Menurunkan ESG *risk rating* menuju medium
  Lowering the ESG risk rating to medium

14
Procurement Practice
- Peningkatan nilai TKDN sebesar 4% melalui sinergi perusahaan lokal
  Increase in TKDN value by 4% through local company synergy
- Peningkatan keterlibatan UMKM sebesar 2%
  Increased MSME involvement by 2%



Lebih lanjut tentang upaya PTPP dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

More about PTPP's efforts to realize sustainability is available in the 2025 Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statement




PP
CONSTRUCTION & INVESTMENT
PTPP



2025

PT PP (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024, serta 1 Januari 2024

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

for the Years Ended
December 31, 2025 and December 31, 2024
and January 1, 2024

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/
Page

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Serta 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024 and January 1, 2024/ December 31, 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024, SERTA 1 JANUARI 2024
PT PP (PERSERO) TBK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024, AND JANUARY 1, 2024
PT PP (PERSERO) TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : — *We, the undersigned :*

a.	Nama	:	Novel Arsyad	:	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Jakarta Timur	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	:	Jl. Petamburan IV/10 RT 05/RW 05, Jakarta Pusat	:	*Domicile Address*
	Nomor Telepon	:	(021)-8403883	:	*Phone number*
	Jabatan	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
b.	Nama	:	Agus Purbianto	:	*Name*
	Alamat Kantor	:	Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Jakarta Timur	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	:	Jl. Selorejo No.51A, Lowok Waru, Malang	:	*Domicile Address*
	Nomor Telepon	:	(021)-8403883	:	*Phone number*
	Jabatan	:	Direktur Keuangan / *Director of Finance*	:	*Position*

Menyatakan bahwa : — *Stated that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements have been disclosed completely and correctly.*
   b. *The financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor does it omit information or material fact.*
4. *We are responsible for internal control system within the company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 27 Maret 2026/ *March 27, 2026*

Novel Arsyad	Agus Purbianto
Direktur Utama	Direktur Keuangan
President Director	*Director of Finance*

DMRL	DSH	DO INF	DO GDG

CORSEC	LEGAL	RM	BDPM	OCSCC	FINACC

PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No.57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

T +62 21 840 3883 (hunting) **www.ptpp.co.id**
F +62 21 840 3936
+62 21 840 3890

ptpptbk @ptpp_id @ptpp_id

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : **00388/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/III/2026**

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT PP (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT PP (Persero) Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Kami membawa perhatian pada Catatan 62 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah mencatat rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp8.083.795 juta. yang mengakibatkan defisit saldo laba ditahan sebesar Rp6.044.544 juta. Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan pada Catatan 62 atas laporan keuangan konsoldiasian terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Material Uncertainty Related to Going Concern

We draw attention to Note 62 to the accompanying consolidated financial statements, the Group recorded other comprehensive loss amounted to Rp8,083,795 million for the year ended December 31, 2025 which resulting in a deficit retained earnings amounted to Rp6,044,544 million. These conditions, along with other matters as disclosed in Note 62 to the accompanying consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Selain hal yang diuraikan dalam paragraf Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha, kami telah menentukan hal-hal yang diuraikan di bawah ini sebagai hal audit utama yang dikomunikasikan dalam laporan kami.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matter described in the Material Uncertainty Related to Going Concern paragraph, we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Nilai Tercatat atas Persediaan dan Tanah akan Dikembangkan

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mencatat persediaan dan tanah akan dikembangkan sebesar Rp8.869.369 juta, dimana jumlah tersebut mencakup 20,42% dari jumlah aset Grup.

Pengungkapan Grup mengenai persediaan dan tanah akan dikembangkan dijelaskan pada Catatan 3m, 8 dan 13.

Kami melakukan prosedur audit termasuk:

1. Memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan estimasi biaya proyek;
2. Melakukan pemeriksaan atas dokumen perizinan proyek;
3. Mengevaluasi rencana dan dan perubahan rencana pengembangan proyek;
4. Mengevaluasi keakuratan estimasi dan alokasi biaya proyek;
5. Melakukan observasi fisik persediaan dan tanah akan dikembangkan;

Carrying Value of Inventory and Land for Development

As of December 31, 2025, the Group recorded inventory and land for development amounting to Rp8,869,369 million, which account for 20.42% of the Group's total assets.

The Group's disclosures regarding inventory and land for development are explained in Notes 3m, 8 and 13.

We perform audit procedures including:

1. *Understand and evaluate the design and implementation of the Group's relevant internal controls in respect of estimating project cost;*
2. *Perform testing of projects' permit documents;*
3. *Evaluate plan and change of project's master plan;*
4. *Evaluate accuracy estimation and allocation of project cost;*
5. *Perform physical observation of inventory and land for development;*

6. Melakukan pengujian nilai realisasi bersih persediaan; dan
7. Menilai ketepatan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

6. *Perform testing of net realizable value of inventory; and*
7. *Assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.*

Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha, Piutang Retensi, dan Tagihan Bruto

Grup mencatat cadangan kerugian penurunan nilai atas akun-akun piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto dengan jumlah saldo sebesar Rp4.363.183 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Perhitungan atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup menerapkan metode kolektif dan individual untuk mengukur kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Grup melakukan peninjauan atas estimasi penurunan nilai aset keuangan berdasarkan estimasi probabilitas gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan. Perubahan probabilitas gagal bayar dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pengungkapan Grup mengenai cadangan kerugian penurunan nilai dijelaskan pada Catatan 3h, 7, 9 dan 11.

Kami melakukan prosedur audit termasuk:
1. Memperoleh pemahaman atas kebijakan akuntansi dan metodologi cadangan kerugian penurunan nilai yang diterapkan oleh Grup;
2. Mengevaluasi desain dan menguji efektivitas implementasi pengendalian internal yang relevan atas proses cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk pengendalian atas kualitas, kelengkapan, dan akurasi data yang digunakan dalam model;
3. Menguji keandalan dan kelengkapan data historis yang menjadi dasar perhitungan, serta melakukan rekonsiliasi data tersebut dengan catatan akuntansi Grup;
4. Mengevaluasi kewajaran asumsi-asumsi utama yang digunakan manajemen, termasuk penentuan probabilitas gagal bayar (*probability of default*), *loss given default*, dan informasi bersifat masa depan (*forward-looking information*);
5. Mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian pengungkapan terkait cadangan kerugian penurunan nilai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Adequacy of Allowance for Impairment Loss on Trade Receivables, Retention Receivables and Gross Receivables.

Group recorded allowance for impairment loss of trade receivable, retention receivables, and gross receivables totalling to Rp4,363,183 million as of December 31, 2025.

The calculation of the allowance for impairment losses on financial assets involves significant estimates and judgments. The Group applies both collective and individual approaches in measuring expected credit losses on financial assets. The Group reviews the impairment estimates of financial assets based on the estimated probability of default over a certain period, the calculation of which incorporates historical data, assumptions, and expectations of future conditions. Changes in the probability of default may have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

The Group's disclosures regarding allowance for impairment loss are explained in Notes 3h, 7, 9 and 11.

We perform audit procedures including:
1. *Obtaining an understanding of the accounting policies and allowance for impairment loss methodology applied by the Group;*
2. *Evaluating the design and testing the operating effectiveness of relevant internal controls over the allowance for impairment loss process, including controls over the quality, completeness, and accuracy of data used in the model;*
3. *Testing the reliability and completeness of the historical data used as the basis for the calculation, and reconciling such data to the Group's accounting records;*
4. *Evaluating the reasonableness of the key assumptions used by management, including the determination of probability of default, loss given default, and forward-looking information;*
5. *Evaluating the adequacy and appropriateness of the disclosures related to allowance for impairment loss in the Notes to the Consolidated Financial Statements.*

Informasi Lain
Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami, membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance on the conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu level keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

  Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 27 Maret 2026/ *March 27, 2026*

00388

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : **00387/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/III/2026**

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT PP (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PP (Persero) Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No. 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan pendapatan jasa konstruksi dan EPC

Grup memiliki pendapatan utama yang berasal dari pendapatan jasa konstruksi dan EPC. Pada tahun 2024 Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dan EPC sebesar Rp18.235.175 juta, yang berkontribusi sebesar 92% terhadap total pendapatan Grup.

Grup mengakui pendapatan tersebut sepanjang waktu berdasarkan penyelesaian atas kewajiban pelaksanaan dari masing-masing kontrak dengan pemberi kerja. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan ditetapkan berdasarkan metode input, yaitu berdasarkan biaya yang terjadi secara relatif terhadap total biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan suatu kontrak, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek yang telah disepakati dengan pemberi kerja.

Karena signifikansi jumlah pendapatan jasa konstruksi dan EPC, maka perhatian audit kami mengarah kepada audit atas pendapatan yang dapat mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

- Kami memeroleh pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi atas pengendalian kunci yang relevan terhadap pengakuan pendapatan dari jasa konstruksi dan EPC berdasarkan estimasi persentase penyelesaian;
- Kami memeroleh rincian pendapatan dari jasa konstruksi dan EPC, dasar penentuan estimasi persentase penyelesaian berdasarkan metode input, dan mencocokkan jumlahnya dengan pendapatan dan biaya kontrak yang telah tercatat pada laporan keuangan;
- Berdasarkan uji petik, kami membaca dan memahami persyaratan utama pada kontrak konstruksi dan EPC yang berlaku selama tahun

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue recognition from construction services and EPC

The Group has primary revenues derived from construction and EPC services. In 2024, the Group recognized revenues from construction and EPC services of Rp18,235,175 million, which contributed to 92% of the Group's total revenues.

The Group recognizes such revenues over time based on the completion of the performance obligations of each contract with the project's owner. The completion of the performance obligations is determined using the input method, which is based on the costs incurred relative to the total costs expected to fulfill the performance obligations of a contract, as outlined in the Project Achievement Report that has been agreed with the project's owner.

Due to the significance of the amount of revenue from construction and EPC services, our audit attention is directed to the audit of revenue that could have a material impact on the consolidated financial statements.

Our audit procedures include, among others:

- *We obtained understanding and evaluated the design and implementation of key controls relevant to the revenue recognition from construction and EPC services based on estimated percentage of completion;*
- *We obtained the details of revenue from construction and EPC services, the basis for determining the estimated percentage of completion based on the input method, and compared the amount with the contract revenue and cost recorded in the consolidated financial statements;*
- *On a sample basis, we read and understood the key terms and conditions of construction and EPC services contracts outstanding during the year,*

berjalan, termasuk modifikasi yang ada untuk mengevaluasi ketepatan perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi dan EPC tersebut;
- Berdasarkan uji petik, kami mengunjungi proyek dengan melibatkan pakar auditor di bidang konstruksi, untuk memastikan keberadaan proyek dan progresnya; dan
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa pengakuan pendapatan yang telah tercatat pada laporan keuangan untuk memastikan bahwa pendapatan yang telah diakui didukung oleh bukti yang tepat.

Pengungkapan Grup mengenai pengakuan pendapatan konstruksi dan EPC berdasarkan persentase penyelesaian diungkapkan pada Catatan 3.y, 4 dan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penekanan Hal - Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 59 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menguraikan keputusan Pengadilan mengenai PKPU yang telah berakhir dengan merestrukturisasi utang PT PP Properti Tbk (entitas anak).

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 64 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup melakukan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 sehubungan dengan penemuan fakta kemudian pada tahun 2025 terkait kesalahan pada akun investasi ventura bersama, persediaan, tanah akan dikembangkan, aset tetap dan lainnya pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang laporan auditor independennya tidak diterbitkan kembali atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 tersebut.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga memeriksa penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 64 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023. Berdasarkan pemeriksaan kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 selain memeriksa yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 secara keseluruhan.

including any modifications, to assess the appropriateness of the accounting treatment for these construction and EPC contracts;
- *On a sample basis, we visited the projects by involving auditor's expert on construction, to ensure the existence of the projects and their progress; and*
- *On a sample basis, we examined revenue recorded in the consolidated financial statements to assess that the revenue recognized is supported by appropriate evidence.*

The Group's disclosure regarding revenue recognition from construction and EPC services based on percentage of completion disclosed in Notes 3y, 4 and 45 to the consolidated financial statements.

Emphasis of Matters

We draw attention to Note 59 of the consolidated financial statements, which describes the Court decision regarding PKPU which has ended with the debt restructuring of PT PP Properti Tbk (a subsidiary).

As disclosed in Note 64 to the accompanying consolidated financial statements, the Group restated the accompanying consolidated statement of financial position as of January 1, 2024/ December 31, 2023 due to subsequent discovery of facts in 2025 relating to error in accounts investment in joint venture, inventory, land for development, property and equipment and others for 2023 and prior years, which their independent auditors' reports were not reissued on 2023 consolidated financial statements.

As part of our audit of the Group's consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended, we also verified the adjustments described in Note 64 to the accompanying consolidated financial statements that were applied to restate the consolidated financial statements as of January 1, 2024/ December 31, 2023. Based on our verification, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the consolidated financial statements as of January 1, 2024/ December 31, 2023 other than verified those relating with respect to the such adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or other form of assurance on the consolidated financial statements as of January 1, 2024/ December 31, 2023 as a whole.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal - Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00097/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/III/2025 bertanggal 5 Maret 2025 atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut dengan opini tanpa modifikasian. Grup telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan fakta yang diketahui setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 (Catatan 64).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00132/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/IV/2024 tertanggal 5 April 2024 yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sebelum penyajian kembali yang dibahas pada Paragraf Penekanan atas suatu Hal.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan Tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Matters

Prior to this report, we have issued our independent auditor's report No. 000097/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/III/2025 dated on March 5, 2025 on the consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended with an unmodified opinion. The Group has reissued its consolidated financial statements in connection with facts discovered after the date of the consolidated financial statements as of December 31, 2024 (Note 64).

The accompanying consolidated financial statements of Group as of December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditors with report No. 00132/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/IV/2024 dated April 5, 2024 which expressed an unmodified opinion on the consolidated financial statements prior to the restatement discussed in the Emphasis of Matter Paragraph.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2024 Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design*

kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine the matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and is therefore the key audit matter. We describe this matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

00387

Jakarta, 5 Maret 2025, kecuali untuk Catatan 64 atas laporan keuangan konsolidasian, yang bertanggal 27 Maret 2026/
Jakarta, March 5, 2025, except for Note 64 to the consolidated financial statements, which as of March 27, 2026

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta
1 Januari 2024/ 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024 and
January 1, 2024/ December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024*)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023/ *January 1, 2024/ December 31,* 2023*)	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5a	2.893.604.323.721	4.181.504.952.269	4.170.592.096.502	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	6	194.836.075.861	299.349.400.861	209.603.984.592	*Short-term investments*
Bank yang dibatasi penggunaannya	5b	165.199.139.466	213.748.877.534	--	*Restricted bank*
Piutang usaha - bersih					*Trade accounts receivable - net*
Pihak berelasi	7	612.940.251.841	248.219.203.944	1.187.407.363.050	*Related parties*
Pihak ketiga		2.514.268.477.883	5.541.278.259.192	5.020.534.413.206	*Third parties*
Aset keuangan dari proyek konsesi - bagian lancar	8	174.024.539.373	219.641.238.342	164.744.037.896	*Financial assets from concession project - current portion*
Piutang retensi - bersih					*Retention receivable - net*
Pihak berelasi	9	644.104.239.443	669.251.345.084	676.766.486.664	*Related parties*
Pihak ketiga		143.487.766.269	773.401.974.763	582.829.459.975	*Third parties*
Piutang pada Ventura Bersama	10	660.354.334.940	843.760.030.002	1.218.738.518.797	*Receivable from Joint Ventures*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih					*Gross receivables from project owners - net*
Pihak berelasi	11	1.069.149.875.024	1.612.341.558.235	2.124.202.525.789	*Related parties*
Pihak ketiga		2.752.093.451.137	3.113.306.584.277	3.171.040.331.805	*Third parties*
Pekerjaan dalam proses	12	426.317.459.027	499.897.204.743	514.442.693.358	*Work in progress*
Piutang lain-lain - bersih					*Other receivables - net*
Pihak berelasi	13	50.380.317.402	93.815.645.345	120.913.639.665	*Related parties*
Pihak ketiga		52.853.631.303	144.296.437.528	167.420.657.367	*Third parties*
Persediaan - bersih	14	7.500.675.722.352	9.521.480.469.616	9.844.674.183.274	*Inventories - net*
Uang muka	15	70.714.381.338	269.115.721.951	457.052.594.959	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	16a	270.091.126.994	634.152.239.918	597.052.766.437	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	17	60.951.928.762	234.532.504.050	653.546.598.893	*Prepaid expenses*
Sewa dibayar dimuka	18	207.211.225.930	234.535.783.198	261.860.340.465	*Prepaid lease*
Aset keuangan lainnya		69.353.511.925	3.439.947.256	6.207.496.246	*Other financial assets*
		20.532.611.779.991	29.351.069.378.108	31.149.630.188.940	
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual		--	--	161.209.443.000	*Non-current assets held-for-sale*
Jumlah Aset Lancar		**20.532.611.779.991**	**29.351.069.378.108**	**31.310.839.631.940**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Bank yang dibatasi penggunaannya	5b	68.550.212.830	91.744.434.495	112.905.635.387	*Restricted bank*
Aset keuangan dari proyek konsesi - setelah dikurangi bagian lancar	8	3.187.624.950.638	2.941.246.589.966	2.469.619.299.414	*Financial assets from concession project - net of current portion*
Piutang lain-lain - setelah dikurangi bagian lancar	13	347.624.594.026	257.603.035.102	202.576.934.344	*Other receivables - net of current portion*
Tanah yang akan dikembangkan	14	1.368.693.134.465	3.525.984.411.476	3.532.170.333.472	*Land for development*
Investasi pada entitas asosiasi	19a	612.816.303.907	578.962.493.152	551.388.780.913	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	19b	840.014.299.088	960.534.589.888	1.383.947.394.821	*Investments in joint ventures*
Investasi jangka panjang lainnya	20	1.604.931.382.921	1.631.594.365.864	1.680.443.291.368	*Other long-term investments*
Aset tetap - bersih	21	2.139.819.893.332	2.796.636.722.754	3.759.000.382.365	*Property and equipment - net*
Properti investasi	22	3.637.004.065.523	3.881.231.185.132	3.385.232.049.311	*Investment properties*
Aset sewa pembiayaan	23	594.036.329.741	540.620.879.318	115.268.347.721	*Finance lease assets*
Aset minyak dan gas bumi - bersih	24	1.053.575.525.633	1.071.445.193.159	1.063.282.305.173	*Oil and gas properties - net*
Goodwill	25	292.469.532.737	292.883.536.627	293.832.391.215	*Goodwill*
Aset takberwujud	26	5.761.107.631.503	5.818.559.648.875	5.835.658.998.262	*Intangible assets*
Aset hak guna - bersih	27	937.050.005.640	785.403.381.047	436.644.260.634	*Right of use assets - net*
Aset lain-lain		6.522.685.059	6.690.969.240	4.437.935.082	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**22.451.840.547.043**	**25.181.141.436.095**	**24.826.408.339.482**	***Total Non-current Assets***
JUMLAH ASET		**42.984.452.327.034**	**54.532.210.814.203**	**56.137.247.971.422**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta
1 Januari 2024/ 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024 and
January 1, 2024/ December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024*)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023/ *January 1, 2024/ December 31,* 2023*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade account payables*
Pihak berelasi	28	486.840.665.608	788.695.812.135	382.634.568.117	*Related parties*
Pihak ketiga		7.150.244.003.125	8.622.406.120.826	9.035.802.929.615	*Third parties*
Utang pajak	16b	779.923.789.976	810.286.656.657	957.791.685.107	*Taxes payable*
Biaya Akrual	29	3.815.424.807.311	3.538.453.498.760	4.927.563.882.769	*Accruals*
Utang bank - jangka pendek					*Short-term bank loans*
Pihak berelasi	30	1.738.812.849.040	3.629.398.467.158	2.805.995.196.609	*Related parties*
Pihak ketiga		718.279.154.071	845.817.664.901	873.331.349.556	*Third parties*
Utang non-bank kepada pihak berelasi	31	343.657.874.242	343.010.116.650	610.010.000.000	*Non-bank loans to related parties*
Pendapatan diterima dimuka	32	124.329.995.155	119.729.415.194	108.054.386.603	*Unearned revenue*
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Current portion of long-term loans from bank and financial institutions*
Pihak berelasi	39	293.829.635.338	39.683.721.850	762.240.645.205	*Related parties*
Pihak ketiga		470.809.384.873	491.067.065.131	1.074.710.823.797	*Third parties*
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Long term liabilities - current portion*
Surat utang jangka menengah	33	--	600.000.000.000	--	*Medium-term notes*
Uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen	34	1.209.813.385.715	455.116.941.081	1.525.803.211.590	*Advances from project owners and consumers*
Liabilitas sewa	35	684.548.417.265	66.858.218.678	188.844.575.658	*Lease liabilities*
Utang obligasi	40a	1.153.245.284.489	453.675.000.000	1.263.280.518.708	*Bonds payable*
Utang jangka pendek lainnya	37	250.886.598.496	639.353.530.095	590.173.319.616	*Other current liabilities*
Sukuk Mudharabah	40c	226.754.000.000	60.000.000.000	400.000.000.000	*Sukuk Mudharabah*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**19.447.399.844.705**	**21.503.552.229.116**	**25.506.237.092.950**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	28	427.197.941.164	65.308.924.657	64.761.811.240	*Trade payables*
Liabilitas program imbalan kerja	38	435.947.308.363	285.363.241.781	97.680.954.958	*Employment benefits liabilities*
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Long-term loans from bank and financial institutions - net of current maturity*
Pihak berelasi	39	7.291.701.156.660	7.302.766.676.898	4.918.312.981.239	*Related parties*
Pihak ketiga		3.693.427.776.932	4.584.558.320.205	3.318.030.914.459	*Third parties*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Long-term liabilities - net of current maturity*
Pendapatan diterima dimuka	32	5.514.847.030	4.620.269.423	--	*Unearned Revenue*
Surat utang jangka menengah	33	--	30.000.000.000	630.000.000.000	*Medium-term notes*
Uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen	34	1.439.322.179.993	2.578.995.999.462	2.236.904.688.260	*Advances from project owners and consumers*
Liabilitas sewa	35	278.625.822.597	719.812.696.923	167.283.730.070	*Lease liabilities*
Utang obligasi	40a	937.184.651.905	2.249.824.498.562	2.104.800.924.861	*Bonds payable*
Obligasi konversi	40b	37.224.043.762	--	--	*Convertible bonds*
Liabilitas pajak tangguhan	16d	289.065.177.042	32.781.827.591	--	*Deferred Tax Liabilities*
Utang pada Ventura Bersama	36	1.955.375.715.995	1.236.850.197.118	2.044.706.511.754	*Joint Venture Payable*
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama	19b	1.598.333.187.054	707.022.649.874	4.776.153.210	*Accumulated Equity in Net Losses of a Joint Ventures*
Utang jangka panjang lainnya	41	537.716.331.410	309.787.548.365	259.909.610.889	*Other long-term liabilities*
Sukuk Mudharabah	40c	305.000.000.000	531.754.000.000	591.754.000.000	*Sukuk Mudharabah*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**19.231.636.139.906**	**20.639.446.850.858**	**16.438.922.280.940**	***Total Non-current Liabilities***
Jumlah Liabilitas		**38.679.035.984.611**	**42.142.999.079.974**	**41.945.159.373.890**	***Total Liabilities***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta
1 Januari 2024/ 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024 and
January 1, 2024/ December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024*)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023/ *January 1, 2024/ December 31,* 2023*)	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk					***Equity Attributable to Owners of Parent Entity***
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 24.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 6.199.897.354 saham Seri B	42	619.989.735.400	619.989.735.400	619.989.735.400	*Share capital - par value Rp 100 per share Authorized capital - 24,500,000,000 shares Issued and paid up capital - 1 Series A Dwiwarna share and 6,199,897,354 Series B shares*
Saham treasuri		(8.099.771.019)	(8.099.771.019)	(8.099.771.019)	*Treasury share*
Komponen ekuitas lainnya		(8.186.913.396)	(8.186.913.396)	(10.973.204.682)	*Other component equity*
Tambahan modal disetor	43	4.710.054.735.222	4.710.054.735.222	4.710.054.735.222	*Additional paid-in capital*
Perubahan ekuitas pada entitas anak		241.160.136.038	241.160.136.038	241.160.136.038	*Changes in equity of subsidiaries*
Penghasilan komprehensif lain		1.338.437.404.147	1.449.556.935.936	1.501.660.780.290	*Other comprehensive income*
Saldo laba:					*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya		2.300.741.054.668	3.823.364.771.596	3.661.960.939.208	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		(6.044.543.961.423)	(1.522.623.716.928)	161.403.832.388	*Unappropriated*
Ekuitas Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		3.149.552.419.637	9.305.215.912.849	10.877.157.182.845	***Net Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Kepentingan non-pengendali	44	1.155.863.922.786	3.083.995.821.380	3.314.931.414.687	***Non-controlling interest***
Jumlah Ekuitas		**4.305.416.342.423**	**12.389.211.734.229**	**14.192.088.597.532**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**42.984.452.327.034**	**54.532.210.814.203**	**56.137.247.971.422**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
PENDAPATAN USAHA	45	16.270.782.098.348	19.812.142.890.563	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	46	(14.811.841.135.211)	(17.179.098.253.462)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		**1.458.940.963.137**	**2.633.044.637.101**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	47	(902.564.610.538)	(823.493.230.525)	*Operating expenses*
Kerugian penurunan nilai	48	(7.350.615.795.524)	(356.262.150.040)	*Impairment losses*
Beban keuangan	49	(2.135.036.750.071)	(1.891.555.175.411)	*Finance cost*
Bagian rugi ventura bersama	19b	(151.492.877.006)	(570.016.196.408)	*Share in loss of joint venture*
Bagian laba entitas asosiasi	19a	54.559.934.652	48.572.907.652	*Share in profit of associates*
Pendapatan lainnya	50	3.172.624.271.470	1.103.047.691.097	*Other income*
Beban lainnya	51	(1.455.801.280.339)	(1.226.668.375.636)	*Other expense*
Beban pajak final	16e	(417.622.878.415)	(583.355.421.002)	*Final tax expense*
RUGI SEBELUM PAJAK		**(7.727.009.022.634)**	**(1.666.685.313.172)**	***LOSS BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK - BERSIH	16c, d	(272.163.744.782)	(118.277.848.331)	***NET TAX EXPENSE***
RUGI TAHUN BERJALAN		**(7.999.172.767.416)**	**(1.784.963.161.503)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit loss:***
Keuntungan revaluasi aset tetap		23.845.501.505	37.731.226.810	*Gain on revaluation of property and equipment*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(115.569.022.801)	(64.370.352.101)	*Remeasurement of defined benefits obligation*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will be reclassified subsequently to profit loss:***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		7.100.896.906	8.725.423.491	*Foreign Exchange due to the translation of the financial statements*
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan		(84.622.624.390)	(17.913.701.800)	***Total other comprehensive loss for the year***
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(8.083.795.391.806)**	**(1.802.876.863.303)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR***
Rugi yang dapat diatribusikan kepada:				***Loss for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		(6.075.259.041.566)	(1.522.623.716.928)	*Owners of the Company*
Kepentingan non pengendali		(1.923.913.725.850)	(262.339.444.575)	*Non-controlling interest*
Rugi tahun berjalan		**(7.999.172.767.416)**	**(1.784.963.161.503)**	***Loss for the year***
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		(6.155.663.493.211)	(1.574.727.561.282)	*Owners of the Company*
Kepentingan non pengendali		(1.928.131.898.594)	(228.149.302.021)	*Non-controlling interest*
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		**(8.083.795.391.806)**	**(1.802.876.863.303)**	***Total comprehensive loss for the year***
Rugi per Saham Dasar	**52**	**(982)**	**(246)**	***Basic Loss Per Share***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise *stated)*

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Share Capital*	Saham Treasuri/ *Treasury Share*	Komponen ekuitas lainnya/*Other component equity*	Tambahan modal disetor/*Addition paid in capital*	Perubahan Ekuitas Pada Entitas Anak/ *Changes in Equity of Subsidiaries*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*: Pengukuran Kembali Program Pensiun Imbalan Pasti/ *Remeasurement Employee Benefit*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*: Keuntungan Revaluasi Aset Tetap/*Gain of Fixed Asset Revaluation*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Foreign exchange due to the translation of the financial report*	Laba Ditahan/ *Retained Earnings*: Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*: Cadangan Untuk Pengembangan Perseroan/ *Reserves for Company's Development*	Laba Ditahan/ *Retained Earnings*: Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*: Cadangan Bertujuan/ *Appropriated*	Laba Ditahan/ *Retained Earnings*: Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/*Non-controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 31 Desember 2023		**619.989.735.400**	**(8.099.771.019)**	**(10.973.204.682)**	**4.710.054.735.222**	**837.156.695.507**	**(93.296.445.788)**	**1.519.408.078.712**	**4.691.245.070**	**3.403.345.179.357**	**258.615.759.851**	**481.379.208.573**	**11.722.271.216.203**	**3.421.120.116.477**	**15.143.391.332.680**	***Balance as of December 31, 2023***
Penyajian kembali	64	–	--	--	–	(595.996.559.469)	--	70.857.902.296	--	–	--	**(319.975.376.185)**	**(845.114.033.358)**	**(106.188.701.790)**	**(951.302.735.148)**	***Restatement***
Saldo 1 Januari 2024*)		**619.989.735.400**	**(8.099.771.019)**	**(10.973.204.682)**	**4.710.054.735.222**	**241.160.136.038**	**(93.296.445.788)**	**1.590.265.981.008**	**4.691.245.070**	**3.403.345.179.357**	**258.615.759.851**	**161.403.832.388**	**10.877.157.182.845**	**3.314.931.414.687**	**14.192.088.597.532**	***Balance as of January 1,2024*)***
Cadangan		–	--	--	–	–	--	--	--	161.403.832.388	--	(161.403.832.388)	–	–	--	*Reserves*
Perubahan ekuitas pada entitas anak		–	--	2.786.291.286	–	–	--	--	--	–	--	--	2.786.291.286	(2.786.291.286)	--	*Changes in equity of subsidiaries*
Rugi komprehensif tahun berjalan		–	--	--	–	–	(64.030.175.391)	3.256.553.718	8.669.777.319	–	--	(1.522.623.716.928)	(1.574.727.561.282)	(228.149.302.021)	(1.802.876.863.303)	*Comprehensive loss for the year*
Saldo 31 Desember 2024*)		**619.989.735.400**	**(8.099.771.019)**	**(8.186.913.396)**	**4.710.054.735.222**	**241.160.136.038**	**(157.326.621.179)**	**1.593.522.534.726**	**13.361.022.389**	**3.564.749.011.745**	**258.615.759.851**	**(1.522.623.716.928)**	**9.305.215.912.849**	**3.083.995.821.380**	**12.389.211.734.229**	***Balance as of December 31, 2024*)***
Cadangan		–	--	--	–	–	--	--	--	(1.522.623.716.928)	--	1.522.623.716.928	--	–	--	*Reserves*
Rugi komprehensif tahun berjalan		–	--	--	–	–	(115.944.909.093)	28.484.846.335	7.055.611.113	–	--	(6.075.259.041.566)	(6.155.663.493.211)	(1.928.131.898.594)	(8.083.795.391.806)	*Comprehensive loss for the year*
Reklasifikasi surplus revaluasi atas pelepasan aset tetap		–	--	--	–	–	--	(30.715.080.144)	--	–	--	30.715.080.144	–	–	--	*Reclassification of revaluation surplus on disposal of property and equipment*
Saldo 31 Desember 2025		**619.989.735.400**	**(8.099.771.019)**	**(8.186.913.396)**	**4.710.054.735.222**	**241.160.136.038**	**(273.271.530.272)**	**1.591.292.300.917**	**20.416.633.502**	**2.042.125.294.817**	**258.615.759.851**	**(6.044.543.961.422)**	**3.149.552.419.637**	**1.155.863.922.786**	**4.305.416.342.423**	***Balance as of December 31, 2025***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

PT PP (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	18.344.928.291.087	16.858.651.118.575	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada:			*Payments to:*
Pemasok dan subkontraktor	(15.171.006.504.693)	(11.860.071.863.632)	*Supplier and subcontractors*
Direksi, karyawan dan pihak ketiga lainnya	(2.081.524.784.207)	(1.172.696.909.872)	*Directors, employees and third party*
Kas yang dihasilkan dari operasi	1.092.397.002.187	3.825.882.345.072	*Cash generated from operation*
Pembayaran pajak	(216.337.883.271)	(225.202.275.091)	*Taxes payment*
Penerimaan bunga	47.886.938.648	47.399.804.105	*Interest received*
Penerimaan pajak	--	61.817.329.079	*Taxes Received*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	923.946.057.564	3.709.897.203.165	*Net cash provided by operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan investasi jangka pendek	113.000.000.000	--	*Short-term investment receipts*
Pembayaran investasi jangka pendek	(8.000.000.000)	(100.000.000.000)	*Payment of short-term investment*
Penambahan kas yang dibatasi penggunaannya	(18.276.739.376)	(214.183.793.545)	*Addition restricted cash*
Pengurangan kas yang dibatasi penggunaannya	204.983.961.774	3.500.000.000	*Deduction restricted cash*
Penerimaan Dana Talangan dari LMAN	42.127.085.058	2.821.999.300	*Receipt of funds from LMAN*
Pengembalian pinjaman dari entitas asosiasi dan jangka panjang lainnya	--	5.109.279.524	*Receipt of payment from investment associates company and other long-term investment*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	8.856.350.849	7.521.216.887	*Dividend received from associates*
Penambahan investasi pada ventura bersama	(2.323.971.527.185)	(3.960.534.972.340)	*Addition of investment in joint venture*
Pengurangan investasi pada ventura bersama	3.629.881.597.378	3.056.533.860.640	*Deduction from investment in joint venture*
Penambahan investasi jangka panjang lainnya	--	(30.700.000.000)	*Addition for other long-term investment*
Pengurangan investasi jangka panjang lainnya	10.807.934.479	--	*Deduction from investment in other long-term*
Penambahan aset keuangan dari proyek konsesi	(140.673.826.007)	(117.984.770.425)	*Addition financial assets from concession project*
Hasil divestasi pada entitas anak, asosiasi dan jangka panjang lainnya	--	731.312.752.546	*Proceed from divestment of investment in subsidiaries, associates and other long-term investment*
Pembayaran atas biaya divestasi	--	(40.982.150.494)	*Payment of divestment costs*
Penambahan aset minyak dan gas bumi	--	(52.283.111.716)	*Addition of oil and gas*
Perolehan aset tetap	(17.722.724.568)	(146.731.051.804)	*Acquisition of property and equipment*
Hasil dari pelepasan aset tetap	171.402.263.501	66.043.813.192	*Proceeds from disposal of property and equipment*
Perolehan aset takberwujud	(5.505.527.747)	(1.739.196.352.730)	*Addition of intangible assets*
Penambahan aset sewa pembiayaan	(555.923.406.003)	(425.352.531.597)	*Addition of finance lease assets*
Perolehan Properti investasi	(390.448.584)	(168.473.879.880)	*Acquisition of investment property*
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	1.110.594.993.569	(3.123.579.692.442)	*Net cash (used in) provided by investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran Dividen	--	(18.513.142.189)	*Payment of dividend*
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	43.572.578.395	--	*Receipt of loans from related parties*
Pembayaran pinjaman lainnya	(89.969.676.916)	(4.658.360.835)	*Payment of other loans*
Pembayaran bunga	(1.891.041.538.387)	(1.881.909.834.336)	*Payments of interest expense*
Pembayaran obligasi	(242.275.000.000)	(1.100.000.000.000)	*Payment of bonds*
Pembayaran sukuk	(60.000.000.000)	(400.000.000.000)	*Payment of sukuk*
Penerimaan utang bank	15.134.441.503.627	21.676.141.338.800	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	(15.577.924.771.743)	(18.535.471.333.522)	*Repayment of bank loans*
Penerimaan utang non bank	1.193.900.877	335.729.224.968	*Proceeds from non-bank loans*
Pembayaran utang non bank	(11.316.440.846)	(602.729.108.318)	*Repayment of non-bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(633.652.834.670)	(73.948.608.600)	*Payment of lease liabilities*
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(3.326.972.279.663)	(605.359.824.032)	*Net cash (used in) provided by financing activities*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.292.431.228.530)	(19.042.313.309)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PERUBAHAN PENGARUH SELISIH KURS	4.530.599.982	29.955.169.076	***EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.181.504.952.269	4.170.592.096.502	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**2.893.604.323.721**	**4.181.504.952.269**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements as a whole.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT PP (Persero) Tbk (Perusahaan) semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N. Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No.78 tanggal 15 Maret 1973 Jo. Akta Perubahan No.247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No.Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.249/1974.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 30 April 2025 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0223644 Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025.

1. General

a. Establishment and General Information

PT PP (Persero) Tbk (the Company) was initially named N.V. Pembangunan Perumahan, which resulted from merger of a construction company owned by Bank Industri Negara established under notary deed No. 48 dated August 26, 1953 of the notary Raden Mr. Soewandi in. Bank Industri Negara was then merged to Bank Pembangunan Indonesia. Subsequently based on the Law No.19 PRP Year 1960 was merged to P.N. Pembangunan Perumahan, a state owned company established under the Government Regulation No. 63 Year 1961 dated March 29, 1961, published in the State Gazette No. 84/1961, and Supplement No. 2218.

Subsequently by the Government Regulation No.39 Year 1971 on reforming the state owned company - PN Pembangunan Perumahan to become Perseroan (Persero) which was published in the State Gazette No.50 Year 1971 the Company's legal form was changed into Perusahaan Perseroan (Persero), established by notarial deed No.78 dated March 15, 1973 in conjunction with Deed of Amendment No.247 dated March 21, 1974 both made by notary Kartini Muljadi, S.H., in Jakarta which was approved by the Minister of Justice with his decree Y.A.5/105/2 dated March 30, 1974; registered in the Jakarta District Court on April 3, 1974, under register numbers No.1186 and 1187 and was published in the State Gazette No.48 dated September 14, 1974, Supplement No.249/1974.

The Articles of association of the Company have been several times amended most recently by deed No. 39 dated April 30, 2025 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.09-0223644. Year 2025 dated May 6, 2025.

b. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan ialah turut serta melakukan usaha di bidang Industri, Konstruksi, *Engineering Procurement dan Construction (EPC)*, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Investasi

- Mencakup pekerjaan sipil seperti drainase dan jaringan pengairan; bangunan bawah air; bendung, bendungan dan terowongan; bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah; jalan, jembatan landasan dan lokasi pengeboran darat; jalan dan jembatan kereta api, MRT; dermaga/pelabuhan, penahan gelombang dan tanah; reklamasi dan pengerukan; pencetakan sawah dan pembukaan lahan; jasa penunjang tenaga listrik; pertamanan; pengeboran; bandar udara; perpipaan; perawatan fasilitas produksi; stasiun transportasi darat; konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi; pekerjaan pancang; bangunan sipil lainnya.
- Mencakup pekerjaan gedung seperti konstruksi gedung kesehatan; konstruksi gedung pendidikan; konstruksi gedung lainnya; konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung perkantoran; konstruksi gedung penginapan; pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon; pengecatan; pemasangan pondasi dan tiang pancang; pemasangan perancah (steiger); konstruksi gedung pembelanjaan; konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung; konstruksi gedung industri; dekorasi interior; dekorasi

b. Objectives, Goals and Business Activities

The purpose, objectives and business activities of the Company are to engage in industry, construction, Engineering Procurement and Construction (EPC), trade, area management, capacity building service in construction, engineering and planning service, development and optimization of the utilization of the Company's resources to produce goods and/or high quality and highly competitive services, to obtain or pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a limited liability company.

To achieve the aims and objectives above the Company can carry out business activities as follows:

i. Construction and Investment Jobs

- *Includes civil works such as drainage and irrigation networks; underwater buildings; weirs, dams and tunnels; clean water, and wastewater management buildings; roads, runway bridges and ground drilling locations; road and railroad bridges, MRT; jetties/ ports, wave and ground barrier; reclamation and dredging; rice field printing and land clearing; electricity support services; landscaping; drilling; airport; piping; maintenance of production facilities; ground transportation station; construction of telecommunications building facilities; stake work; other civil buildings.*
- *Includes building works such as health building construction; education building construction; other building construction; residential building construction; office building construction; lodging building construction; work on the installation of glass and aluminum; work on floors, walls, sanitary and ceiling equipment; painting; installation of foundations and piles; mounting scaffolding (Steiger); expenditure building construction; construction of buildings for entertainment and sports venues; installation of prefabricated buildings for buildings; industrial building construction; interior decoration;*

eksterior; penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.
- Mencakup konstruksi bangunan seperti instalasi listrik; instalasi mekanikal; instalasi elektronika; instalasi pemanas dan geotermal; instalasi minyak dan gas; transmisi tenaga listrik; instalasi pendingan dan ventilasi udara; instalasi konstruksi lainnya ytdl; pembangkitan tenaga listrik; konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas; industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung; konstruksi sentral telekomunikasi; instalasi telekomunikasi; aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.

ii. Properti, meliputi namun tak terbatas pada bidang perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, pengelolaan air bersih dan limbah, sarana olah raga dan produk properti lainnya.
- Realti, meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan kawasan perumahan.
- Melakukan usaha pengembangan kawasan sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualan.
- Perhotelan, bumi perkemahan, persinggahan karavan, pondok wisata, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

iii. Pengelolaan kawasan
- Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- Real estat atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak.
- Perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, pekerjaan mekanikal elektrikal, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/ pemeliharaan dan konsultansi.
- Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi.
- Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek

exterior decoration; completion of other building constructions.
- *Includes building construction such as electrical installations; mechanical installation; electronic installation; heating and geothermal installation; oil and gas installations; electric power transmission; cooling installation and air ventilation; other construction installations; electricity generation; construction of processing buildings and storage of oil and gas goods; the offshore building industry and the floating building; telecommunications central construction; telecommunications installation; information technology activities and other computer services.*

ii. The property, including but not limited to the hotels, apartment, office, industrial estate, tourism area, clean water and waste management, sports facilities and other property products.
- *Realty, including but not limited to the provision of ready to build areas, housing procurement, housing area managements.*
- *Conducting business on the development of facilities and infrastructure areas, construction and sales.*
- *Hospitality, campgrounds, caravan stops, tourist lodges, provision of other short-term accommodation.*

iii. District Management
- *Real estate that is owned or leased.*
- *Real estate on a fee or contract basis.*
- *Planning and supervision of construction work which includes civil works, building works, electrical mechanical works, telecommunications radios and instrumentation and repairs/ maintenance and consultancy.*
- *Measurement, drawing of calculation and determination of construction work cost.*
- *Management consulting services, construction project management,*

konstruksi, rekayasa industri, *engineering* dan perencanaan.
- Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi.

iv. Kegiatan Usaha Instalasi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil
- Instalasi mekanikal.
- Instalasi konstruksi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain.

v. Jasa Perdagangan bahan komponen bangunan dan peralatan konstruksi.
- Penyewaan alat konstruksi dengan operator

vi. Pengelolaan Gedung
vii. Pengembangan Sistem
viii. Pelaksanaan pekerjaan EPC.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perusahaan adalah :
- Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa *handling* impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/ angkutan darat serta perdagangan umum.
- Melakukan usaha dalam bidang agro industri.
- Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi dan kepariwisataan.
- Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar.
- Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.
- Energi dan energi terbarukan.
- Pabrikasi dan komponen produk jadi.
- Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung.
- Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan tersebut.
- Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- Penyewaan peralatan konstruksi.
- Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan.
- Industri alat angkutan lainnya.
- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin.
- Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang.
- Pengadaan air.

industrial engineering, engineering and planning.
- *Measurement, drawing of calculation and determination of construction work cost.*

iv. Business Activities in Building Buildings and Civil Buildings
- *Mechanical installation.*
- *Other construction installation which cannot be classified elsewhere.*

v. Trading services for building components and construction equipment.
- *Rental of construction equipment with the operator*

vi. Building Management
vii. System Development
viii. Implementation of EPC Work

Supporting business activities that support the Company's main business activities are:
- *Conducting business of suppliers, agency services, import and export handling services and expedition/ land transportation services and general trade.Doing business in the field of agro industry.*
- *Doing business in the field of agro industry.*
- *Doing business in services and information technology and tourism.*
- *Investment and / or business management in the field of basic infrastructure and facilities.*
- *The toll road, railroad, port infrastructure.*
- *Energy and renewable energy.*
- *Manufacturing and manufacturing of finished.*
- *Mechanical and electricity for buildings, industries and buildings.*
- *Electronics and communication of other businesses that support the Company's main business.*
- *Manufacturing of construction components and equipment.*
- *Construction equipment rental.*
- *Carry out business in information and tourism services.*
- *Other transportation equipment industry.*
- *Supply of electricity, gas, steam / hot water and cold wind.*
- *Water supply, waste management and recycling.*
- *Water supply.*

- Pengelolaan limbah.
- Pengelolaan sampah dan daur ulang.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pracetak, peralatan dan investasi di bidang infrastruktur dan energi.

Pemegang saham langsung dan terakhir Perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Perusahaan mempunyai 1.766 dan 1.780 karyawan masing- masing pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Saham

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) dengan surat No. S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp560 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Februari 2010 sebanyak 4.842.436.500 lembar.

Pada tanggal 24 November 2016, Perusahaan memperoleh Surat Persetujuan No. S-693/D.04/2016 dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadakan Pencatatan Saham Tambahan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 1.357.460.854 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.750 (dalam nilai penuh) per saham. Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat dari 4.842.436.500 saham menjadi 6.199.897.354 saham dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia.

- *Waste management.*
- *Waste management and recycling.*

The current business activities of the Company are in construction services, real estate (developer) and properties, precast, equipment, and investment in infrastructure and energy.

The Company's immediate and the ultimate shareholder is government of the Republic of Indonesia.

The Company is domiciled in Jakarta, with head office is located at Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.

The Company had total number of employees of 1,766 and 1,780 as of December 31, 2025 and December 31, 2024 (unaudited), respectively.

c. Public Offering of Shares

The Company obtained Effective Statement No. S-858/BL/2010 on January 29, 2010 from the Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) for limited public offering of 1,038,976,500 shares of Series B with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp560 per share. Those shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on February 9, 2010 amounted to 4,842,436,500 shares.

On November 24, 2016, the Company obtained the approval Letter No. S-693/D.04/2016 from The Indonesian Financial Services Authority (OJK) to issue additional shares through Issuance of Preemptive Rights (IPS) for 1,357,460,854 shares with par value of Rp100 (in full amount) per share and exercise price of Rp3,750 (in full amount) per share. Accordingly, the issued and fully paid shares increased from 4,842,436,500 shares to 6,199,897,354 shares and has been listed on the Indonesia Stock Exchange.

d. Penawaran Umum Obligasi

Perusahaan telah melakukan beberapa kali penawaran obligasi kepada masyarakat seperti yang diuraikan pada Catatan 40 atas laporan keuangan - Utang Obligasi.

d. Public Offering of Bonds

The Company has made several bonds offering to the public as described in the notes 40 to financial statement - Bonds Payable.

Obligasi & Surat berharga/ *Bonds & Commercial paper*	2025	2024	Tenor (Tahun/ *Years)*	Tanggal Penerbitan/ *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Status
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2021 - Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000	5	22 Juli 2021/ *July 22, 2021*	2 Juli 2026/ *July 2, 2026*	Belum Lunas/ *Not Yet Paid*
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 - Seri B	404.500.000.000	404.500.000.000	5	22 April 2022/ *April 22, 2022*	22 April 2027/ *April 22, 2027*	Belum Lunas/ *Not Yet Paid*
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 - Seri A	503.725.000.000	503.725.000.000	3	11 April 2023/ *April 11, 2023*	11 April 2026/ *April 11, 2026*	Belum Lunas/ *Not Yet Paid*
Obligasi Berkelanjutan IV PT PP (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2024	434.620.000.000	434.620.000.000	3	28 Juni 2024/ *June 28, 2024*	28 Juni 2027/ *June 28, 2027*	Belum Lunas/ *Not Yet Paid*
Total	**1.992.845.000.000**	**1.992.845.000.000**				

e. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Perusahaan mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 30 April 2025 dan Akta No. 53 tanggal 29 April 2024. Susunan pengurus Perusahaan Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

e. The Management

The Company's management has been amended based on Deed No. 39 dated April 30, 2025 and Deed No. 53 dated April 29, 2024. The Company's management as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2025 and 2024*	
Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama dan Independen	Dhony Rahajoe	*Chairman and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Irjen. Pol. (Purn) Drs. Istiono, MH	*Independent Commissioners*
	Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum	
	Ir. Pundjung Setya Brata, M.M	
Komisaris	Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak., CFE., CFr.A., CA., QIA, CGCAE, ASEAN CPA	*Commissioners*
	Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc	
Direksi:		***Directors:***
Direktur Utama	Ir. Novel Arsyad, MM	*President Director*
Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management	I Gede Upeksa Negara, ST	*Director of Corporate Strategy and Human Capital Management*
Direktur Keuangan	Agus Purbianto, SE., Ak., MM	*Finance Director*
Direktur Manajemen Risiko dan Legal	Ing. Tommy Wiranata Anwar, M.Sc., CRMP., CRGP.	*Director of Risk Management and Legal*
Direktur Operasi Bidang Gedung	Ir. Yuyus Juarsa, MM	*Director of Operation Building Field*
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur	Ir. Yul Ari Pramuraharjo, MM	*Director of Operation Infrastructure Field*

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk 004/SK/KOM/PP/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) Tbk No. 004/SK/KOM/PP/06/2024 dated June 25, 2024, concerning the Dismissal. The Audit Committee composition December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2025 and 2024*	
Ketua	Irjen. Pol. (Purn) Drs. Istiono, MH	*Chairman*
Sekretaris	Ir. Pundjung Setya Brata, M.M	*Secretary*
Anggota	Prof. Dr. Aria Farah Mita, MSM, CPA, CIFRS, CA	*Members*
	Handoko Tripriyono, CPA	

f. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 066/SK/ PP/DIR/2024 tanggal 27 Juni 2024, tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, menetapkan membebaskan Tn. Bakhtiyar Efendi dari jabatan Sekretaris Perusahaan dan serentak dengan itu mengangkat Tn. Joko Raharjo sebagai Sekretaris Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 27 Juni 2024.

f. Corporate Secretary

Based on the Decree of the Directors of the Company No. 066/SK/ PP/DIR/2024 dated June, 27 2024, concerning the Appointment of Corporate Secretary, determined to release Mr. Bakhtiyar Efendi from the position of Corporate Secretary and simultaneously appointed Mr. Joko Raharjo as Corporate Secretary, effective since June 27, 2024.

g. Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 037/SK/ PP/DIR/2025 tanggal 22 September 2025, tentang Pengangkatan *Senior Vice President*, *Head of Internal Audit Bureau*, menetapkan Muhammad Zahid sebagai *Senior Vice President*, *Head of Internal Audit Bureau*, berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2025, menggantikan I Komang Sudarma selaku *Senior Vice President*, *Head of Internal Audit Bureau* sebelumnya yang telah pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 035/SK/PP/DIR/2025.

g. Internal Audit

Based on the Decree of the Directors of the Company No. 037/ SK/PP/DIR/2025 dated September 22, 2025, concerning the Appointment of Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau, appointing Muhammad Zahid as Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau, effective from September 22, 2025, replacing I Komang Sudarma as Senior Vice President, Head of Internal Audit Bureau previously who had retired based on the Decree of the Directors of the Company No. 035/SK/PP/ DIR/2025.

h. Entitas Anak yang dikonsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan entitas anak (Grup) sebagai berikut:

h. Consolidated Subsidiaries

The consolidated financial statements include the Company and subsidiaries (the Group) accounts as follows:

Entitas anak/*Subsidiaries*	**Domisili/ *Domicile***	**Bidang usaha/ *Nature of Business***	**Tahun operasi komersial/ *Start of Commercial Operations***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership (%)***		**Sebelum eliminasi/*Before elimination***			
						Jumlah Aset/*Total Assets*		**Jumlah Pendapatan/*Total Revenues***	
				2025	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*									
PT PP Urban (PPUB)	Jakarta	Konstruksi/General *constuction*	1989	100%	100%	1.131.450.397.740	2.024.028.143.792	328.861.775.635	335.864.907.998
PT PP Properti Tbk (PPRO)	Jakarta	Realti dan properti/ *Realty and property*	2013	65%	65%	10.545.058.971.620	16.074.119.782.126	323.230.991.620	458.507.659.754
PT PP Presisi Tbk (PPRE)	Jakarta	Jasa sewa/*Rental services*	2004	77%	77%	6.788.287.536.778	7.648.848.575.168	3.945.960.175.467	3.790.809.211.559
PT PP Energi (PPEN)	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/*Electricity supply*	2016	99%	99%	1.542.153.476.360	1.754.033.692.029	53.235.699.408	87.865.695.387
PT PP Infrastruktur (PPIN)	Jakarta	Infrastruktur/ *Infrastructure*	2016	99%	99%	3.673.167.375.000	3.884.976.115.121	537.097.741.848	666.818.406.327
PT Sinergi Colomadu (SCM)	Solo	Realti dan properti/ *Realty and property*	2018	99%	99%	134.978.563.036	142.748.665.438	5.418.735.986	6.421.732.209
PT Centurion Perkasa Iman (CPI)	Surabaya	Realti dan properti/ *Realty and property*	2011	68%	68%	386.496.218.857	400.586.875.277	48.783.569.024	59.372.633.508
PT PP Semarang Demak (PPSD)	Jawa Tengah	Pembangunan dan pengusahaan jalan toll/*Construction and Development Toll Road*	2022	75%	75%	5.769.091.450.477	6.033.686.529.384	68.071.155.000	76.881.983.500
PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)	Jawa Tengah	Realti dan properti/ *Realty and property*	2019	82%	82%	177.858.903.707	162.993.117.566	23.433.610.261	21.108.885.400

Entitas anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Bidang usaha/ *Nature of Business*	Tahun operasi komersial/ *Start of Commercial Operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership (%)*		Sebelum eliminasi/*Before elimination*			
						Jumlah Aset/*Total Assets*		Jumlah Pendapatan/*Total Revenues*	
				2025	2024	2025	2024	2025	2024
Kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak/ *Indirect ownership through subsidiaries*									
PT Griyaton Indonesia (GTI) melalui/ *through PPUB*	Jakarta	Pracetak/ *Precast*	1981	98%	98%	149.931.485.561	245.059.163.017	-	-
PT Gitanusa Sarana Niaga (GSN) melalui/ *through PPRO*	Surabaya	Realti dan properti/ *Realty and property*	2006	100%	100%	292.182.580.205	304.558.737.871	22.615.870.716	22.094.023.392
PT Hasta Kreasi Mandiri (HKM) melalui/ *through PPRO*	Balikpapan	Realti dan properti/ *Realty and property*	1995	99%	99%	803.944.706.305	835.123.384.751	62.999.060.858	85.556.231.442
PT Wisma Seratus Sejahtera (WSS) melalui/ *through PPRO*	Depok	Realti dan properti/ *Realty and property*	2012	55%	55%	302.496.723.989	330.293.548.476	19.995.616.884	50.592.082.721
PT PP Properti Jababeka Residen (PPJR) melalui/ *through PPRO*	Cikarang	Realti dan properti/ *Realty and property*	2016	53%	53%	389.869.193.654	393.171.143.346	-	-
PT PPRO Sampurna Jaya (PPSJ) melalui/ *through PPRO*	Surabaya	Realti dan properti/ *Realty and property*	2017	77%	77%	685.947.475.851	732.078.057.002	54.892.212.953	75.344.627.866
PT PPRO Suramadu (PPRS) melalui/ *through PPRO*	Surabaya	Realti dan properti/ *Realty and property*	2019	60%	60%	578.536.286.127	577.929.991.123	-	-
PT PPRO BIJB Aerocity Development (PPBA) melalui/ *through PPRO*	Jawa Barat	Realti dan properti/ *Realty and property*	2019	68%	68%	390.163.786.771	389.936.425.503	-	-
PT Limasland Realty Cilegon (LRC) melalui/ *through PPRO*	Cilegon	Realti dan properti/ *Realty and property*	2016	70%	70%	81.334.971.537	81.359.343.474	-	-
PT Grahaprima Realtindo (GPR) melalui/ *through PPRO*	Yogyakarta	Realti dan properti/ *Realty and property*	2014	99%	99%	86.775.988.956	86.785.272.369	-	-
Pekanbaru Permai Propertindo (PPP) melalui/ *through PPRO*	Pekanbaru	Realti dan properti/ *Realty and property*	2014	98%	98%	292.658.371.049	293.657.255.081	23.431.286.691	22.536.599.572
PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) melalui/ *through PPRE*	Jakarta	Konstruksi/ *General constuction*	1994	51%	51%	3.677.437.310.863	2.934.234.589.980	2.029.867.159.458	1.372.427.487.911
PT Sepoetih Daya Prima (SDP) melalui/ *through PPEN*	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ *Electricity supply*	2014	75%	75%	30.734.360.583	76.194.654.380	-	-
PT Odira Energi Karang Agung (OEKA) melalui/ *through PPEN*	Jakarta	Kontraktor eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Oil and gas exploration and production contractor*	2017	70%	70%	965.593.332.232	979.472.097.055	53.235.699.408	87.865.695.387
PT Mahkota Dinamika Niaga (MDN) melalui/ *through PPEN*	Jakarta	Penimbunan dan Penyimpanan Minyak/ *Oil storage business activities*	2018	73%	73%	50.341.514.502	60.064.019.427	-	-
PT Widya Tirta Selaras (WTS) melalui/ *through PPIN*	Bekasi	Pengolahan air minum/ *Drinking water treatment*	2018	99%	99%	111.911.945.335	114.099.042.526	17.668.960.370	20.469.749.305
PT Tirta Tangsel Mandiri (TTM) melalui/ *through PPIN*	Tangerang Selatan	Pengolahan air minum/ *Drinking water treatment*	2020	99%	99%	604.293.079.483	609.047.400.235	62.247.565.266	83.245.303.539
PT PP Krakatau Tirta (PPKT) melalui/ *through PPIN*	Gresik	Pengolahan air minum/ *Water treatment*	2021	75%	75%	992.538.559.224	958.076.239.748	131.357.045.982	124.340.439.701
PT PP Tirta Riau (PPTR) melalui/ *through PPIN*	Riau	Pengolahan air minum/ *Water treatment*	2020	70%	70%	1.231.372.756.106	1.358.405.897.005	227.561.038.451	214.686.875.353
PT PP Tirta Madani (PPTM) melalui/ *through PPIN*	Riau	Pengolahan air minum/ *Water treatment*	2020	85%	85%	467.402.464.754	500.662.895.827	84.248.216.794	119.511.536.847
PT PP Tirta Tanah Merah (PPTTM) melalui/ *through PPIN*	Bekasi	Pengolahan air minum/ *Water treatment*	2020	51%	51%	73.118.294.241	69.832.525.239	14.014.914.986	14.045.897.161

2. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. Changes on Financial Reporting Standards

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 Comparative Information;and*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236: Impairment of Assets;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property.*

The implementation of the above amendment to standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

Standar Baru dan Amendemen atas Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Standar baru, revisi dan amandemen serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Standard and Amendment to Standards which has been Issued but Not Yet Effective

Amendments, revised and annual improvements to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption are as follows:

- *Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *Annual Improvements on PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; and*
- *Revised PSAK 338: Business Combination of Entity Under Common Control regarding the scope and application of the method of pooling of interest.*

New, revised and amendment of standards and interpretation of standard which are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:

- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Amendment PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Revised PSAK 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;*
- *ISAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;*
- *PSAK 413: Impairment; and*
- *PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

3. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia ("DSAK"), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan suatu PSAK atau ISAK.

b. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

3. Material Accounting Policies Information

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountant ("DSAK") and Regulations in Capital Market including the Financial Services Authority Regulation/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning the Presentations and Disclosure of the Financial Statements of Issuers or Public Companies, to the extent it does not conflict with PSAK or ISAK.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for asset. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether the entity is in fact an investee when facts and circumstances indicate that there has been changes to one or more of the three control elements mentioned above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee, when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies. All assets and liabilities in intra Group, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions in the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan non-pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham non-pengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non-pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non pengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non- controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non- pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance. Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiary that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

If the Group losses control, the Group:

a. Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts when control is lost;

b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non- pengendali);
c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

b. Derecognise the carrying amount of any non-controlling interest in the former subsidiary when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to the non-controlling interest);

c. Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstance giving rise to the loss of control;
d. Recognise any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date control is lost;
e. Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other IFRSs, the amounts recognised in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
f. Recognise any resulting difference as a gain or loss in profit or loss attributable to the parent entity.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

e. Business Combination Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for using pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values. The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not reclassified to profit or loss when control is lost. The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup. Setiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya sendiri dan laporan keuangannya diukur menggunakan mata uang fungsional.

f. Foreign currency transactions and balances

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transaksi dan Saldo
Seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian neto dari selisih kurs dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan.

Transactions and Balances
All monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are translated to Rupiah at the Bank of Indonesia's middle exchange rates prevailing on the reporting date. The resulting net foreign exchange gains or losses are credited or charged to current operations.

Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Untuk tujuan konsolidasi, aset dan liabilitas OEKA, yang mempunyai mata uang fungsional selain Rupiah dijabarkan ke mata uang penyajian Grup yaitu Rupiah dengan menggunakan pedoman berikut ini:

- Aset dan liabilitas, baik moneter dan non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada akhir tanggal pelaporan, sedangkan akun-akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs tukar historis;
- Pendapatan dan beban serta arus kas dijabarkan dengan menggunakan kurs tukar rata-rata;
- Selisih kurs tukar yang terjadi dikreditkan atau dibebankan ke akun "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan" yang disajikan pada bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian, sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan atau kegiatan usaha luar negeri.

Foreign currency translation of financial statements
For consolidation purposes, assets and liabilities of OEKA, with functional currency other than Rupiah are translated into the Group presentation currency which is the Rupiah using the following basis:

- *Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the rates of exchange prevailing at the end of financial reporting date, while equity accounts are translated using historical rates of exchange;*
- *Revenues and expenses and cash flows are translated using average rates of exchange;*
- *The resulting foreign exchange differences arising on translation for consolidation are recognized in "Other Comprehensive Income - Translation Adjustments", under the Equity section of the consolidated statements of financial position, until the disposal of the net investment or the foreign operation.*

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri Grup dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non-pengendali).

For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of the Group's foreign operations are translated into Indonesian Rupiah using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

g. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf(a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

g. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reportingentity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor;

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity;

Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

h. Financial Instruments

Initial recognition and measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Subsequent measurement of financial assets

The Group' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. <u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki

i. <u>Financial Assets Measured at Amortized Costs</u>

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

(1) the financial asset is held within a business model whose objective to

aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - "SPPI*"*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - "SPPI*"*) dari jumlah pokok terutang.

hold the financial asset to collect contractual cash flow (held to collect); and

(2) the contractual terms of the financial asset give rise to specified dates that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

(1) the financial asset is held within a business model whose objective is archived by both collective contractual cash flows and selling financial assets; and

(2) the contractual terms of the financial asset give rise to specified dates that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
   (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
d) Imbalan Kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan Kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch"*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher than:
   (i) The amount of the loss allowance; and
   (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.
d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan berakhir, atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liablitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to received the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or a liability any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group derecognizes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Serupa

An exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms shall be accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, a

dengan hal tersebut, modifikasi secara substantial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut (terlepas dari ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru.

substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor) shall be accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

Persyaratan berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskontokan berdasarkan persyaratan baru termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai sekarang sisa arus kas yang didiskontokan berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

The terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective interest rate, is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. In determining those fees paid net of fees received, a borrower includes only fees paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau dialihkan kepada pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, shall be recognised in profit or loss.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak di mana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weightedamount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal

kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat *"investment grade"* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi
Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Reclassification
The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified

di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);

ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Obligasi Konversi

Obligasi konversi dicatat secara neto sebesar komponen liabilitasnya dikurangi biaya provisi obligasi konversi yang belum diamortisasi, jika ada.

Nilai wajar komponen liabilitas, tercakup dalam pos obligasi konversi dan disajikan sebagai bagian liabilitas jangka panjang, dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk obligasi yang serupa tanpa opsi konversi. Nilai wajar ditentukan saat penerbitan dan untuk selanjutnya dicatat pada nilai yang diamortisasi. Jumlah sisa, mewakili nilai opsi konversi ekuitas, dimasukkan pada ekuitas. Jumlah yang diakui di ekuitas merupakan selisih antara jumlah hasil yang diterima dari obligasi dan nilai kini bagian liabilitas.

Pada konversi instrumen yang dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, Grup menghentikan pengakuan komponen liabilitas dan mengakuinya sebagai ekuitas. Komponen ekuitas tetap sebagai ekuitas (walaupun dapat dialihkan dari satu pos dalam ekuitas ke pos lainnya). Tidak ada keuntungan atau kerugian konversi pada saat jatuh tempo.

Convertible Bond

Convertible bond are presented in a net amount of the liability component less unamortized convertible bond issuance cost, if any.

The fair value of the liability component, included in convertible bond line item and presented as part of noncurrent liabilities, was calculated using a market interest rate for an equivalent nonconvertible bond. The fair value was determined upon issue and subsequently carried at amortized cost. The residual amount, representing the value of the equity conversion option, is included in equity. The value of the equity portion represents the difference between the total proceeds received from the bonds and the present value of liability portion.

On conversion of a convertible instrument at maturity, the Group derecognises the liability component and recognises it as equity. The original equity component remains as equity (although it may be transferred from one line item within equity to another).

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Cash and Cash Equivalent

For cash flow presentation propose, cash and cash equivalents consist of cash on hand in banks all unrestricted investments with maturities of three months or less form the date of placement.

j. Investasi pada entitas asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut.

j. Investments in Associates and Joint Ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 105, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 105, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture) the Group discontinues recognizing it's share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill. Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 236 Penurunan Nilai Aset ("PSAK 236"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk *Goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 236 Impairment of Assets ("PSAK 236"), are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including Goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 236, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 236 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan hasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi atau ventura Bersama.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 109. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup. Grup menerapkan PSAK 109, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi bersih pada *investee.*

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 109 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 228 (yaitu, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian investee atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 228).

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a group entity transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group. The Group applies PSAK 109, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee.

Furthermore, in applying PSAK 109 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 228 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 228).

k. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

k. Ownership in Joint Operation

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangements, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas setiap liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama.

Grup mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepemilikannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tersebut. Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama: Ketika entitas grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Grup tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Grup menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

When a grup entity endertakes its activities under joint operation, the Grup as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- *Its share of the revenue from the sale of output by the joint operation;*
- *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

The Group accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the PSAKs applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses. When a group entity undertakes its activities under joint operations, the Group as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation: When a group entity transacts with a joint operation in which a group entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Group does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

I. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi phisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

I. Gross Receivables from Project Owners

Receivables of construction contracts in progress are recognized gross receivable from project owners. They are presented as the differences between actual cost incurred and added with recognized profit, deducted with recognized loss and progress billings.

Gross receivables from project owners are recognized as income based on percentage completion method which are stated in an official report of work physical progress (project performance report) the bills are not yet issued due to differences between date of physical progress report and date of billing at the statement of financial position date.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi
Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode setelah dilakukan stock opname persediaan, diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan phisik. Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Persediaan Hotel
Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah *(the lower of cost or net realizable value*) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.

Persediaan Realti
Persediaan real estat terdiri dari tanah matang, kavling tanah dan bangunan (rumah tinggal dan unit kondominium) yang siap dijual, bangunan (rumah tinggal) yang sedang dikonstruksi dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Nilai realisasi bersih adalah etimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Estimasi nilai realisasi bersih juga mempertimbangkan tujuan persediaan dikuasai. Perubahan tujuan pengadaan persediaan yang tidak berhubungan dengan tujuan pengadaan persediaan baru, maka biaya perolehan yang tidak relevan dengan tujuan pengadaan persediaan yang baru dibebankan pada laba atau rugi.

m. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Materials Inventory for Construction
Materials purchased for construction projects are recorded as project's material inventories, each use of material (with Material Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At end of period and after inventory taking, adjustment were made for any difference between inventory records and physical existence. Materials purchased which include food, beverage and supplies are presented at the lower of cost or net realizable value.

Hotel Inventory
Materials purchased issued by the cost or net realizable value, which are is lower (the lower of cost or net realizable value) that consist of food, beverage, and supplier.

Real Estate Inventory
Real estate inventories consist of land lot already developed, land and buildings (houses and condominium units) ready for sale, buildings (houses) under construction, and land under development, are stated at cost or net realizable value, whichever is lower.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Estimates of net realisable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. Changes in the purpose of procuring inventory that are not related to the purpose of procuring new inventory, the acquisition costs that are not relevant to the purpose of procuring new inventory are charged to profit or loss.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal.

The cost of land under development consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and borrowing costs. The cost of land under development is transferred to the buildings under construction account when the development is completed or transferred to the land account when it is ready for sale based on the area of salable lots.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lain-lain terkait dengan pengembangan dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke aset tanah dan bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual. Biaya ditentukan menggunakan metode identifikasi khusus.

The cost of buildings under construction consists of the cost of developed land, construction costs, other costs related to the development and borrowing costs, and is transferred to the land and buildings ready for sale account when the development of the land and construction of buildings are completed and ready for sale. Cost is determined using the specific identification method.

Tanah akan dikembangkan
Tanah akan dikembangkan merupakan tanah yang akan dikembangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah akan dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

Land for development
Land for development consist of land that has not been developed yet and is stated at cost or net realisable value, whichever is lower. The cost of land for development consist of pre-development costs and cost of the land. The cost of land for development is transferred to the land under development account when the development of the land has started or is transferred to the building under construction account when the land is ready for development.

Persediaan Minyak dan Gas Bumi
Persediaan minyak mentah, bahan kimia dan produk petroleum lainnya, suku cadang dan perlengkapan untuk operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode rata-rata. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual yang wajar di dalam proses usaha normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya penjualannya yang diperlukan. Cadangan untuk penurunan nilai keusangan persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode/tahun.

Oil and Gas Inventories
Inventories of crude oil, chemicals and other petroleum products, spare parts and equipment for operations are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method or average method. The net realizable value is a reasonable estimate of the selling price in the normal business process after deducting the estimated cost of completion and the estimated cost of its sales. Reserves for impairment of inventory obsolescence are determined based on a review of the condition of each inventory at the end of the period/year.

n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur secara andal, tetapi Grup mengharapkankan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

n. Investment Property

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Investment property that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which investment the market has become less active continues to be measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the company expects that the fair value of the property will be reliably determinable or construction is completed – whichever is earlier.

After initial recognition, the Group chooses to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

The transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

The transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation and commencement of development with a view to sell.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

o. Piutang Usaha

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Piutang usaha dihapusbukukan pada saat piutang usaha tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

o. Trade Receivable

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. Trade receivable are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

Jika piutang usaha yang diselesaikan dengan aset non keuangan, maka aset keuangan yang diperoleh diukur pada nilai wajarnya pada saat tanggal penyelesaian dan mengakui selisih nilai tercatat piutang usaha dan nilai wajar aset yang diperoleh pada laba rugi.

If trade receivables are settled with non-financial assets, the financial assets acquired are measured at their fair value at the settlement date and the difference between the carrying amount of the trade receivables and the fair value of the assets acquired is recognized in profit or loss.

Grup menetapkan pelanggan gagal bayar bila piutang pelanggan telah lewat jatuh tempo 2 - 3 tahun.

The Group determines that a customer has defaulted on payment if the customer's receivables are overdue 2 - 3 years.

p. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

p. Property and Equipment - Direct Acquisitions

Pada saat pengakuan awal

At initial recognition

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan termasuk biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya persiapan lahan, biaya instalasi dan peralatan dan biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi aset atau perolehan aset tetap.

Property and equipment are stated at cost, which includes freight in costs, handling costs, land preparation costs, installation and equipment costs, and employee benefits costs directly attributable to the construction or acquisition of the assets.

Masing-masing jenis hak atas tanah dianalisa untuk menentukan apakah hak atas tanah tersebut harus dicatat sebagai aset tetap atau aset hak guna tergantung pada substansi ekonomik yang mendasari kepemilikan hak atas tanah. Jika hak atas tanah tersebut tidak secara efektif memberikan pengendalian atas

Each of the land rights is analysed to determine whether it should be accounted for as either a property and equipment or a right-of-use asset, depending on the underlying economic substance of the land rights ownership. If the land rights do not effectively provide control of the underlying assets, but

aset pendasar, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar, transaksi tersebut dicatat sebagi sewa berdasarkan PSAK 116 “Sewa”. Jika hak atas tanah secara substansi menyeruapai pembelian tanah, maka hak atas tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 “Aset tetap”.

only give the rights touse the underlying assets, they are accounted for as leases under PSAK 116, “Leases”. If the land rights are substantially similar to those ofland purchases, they are accounted for as property and equipment under PSAK 216 “Property and Equipment”.

Pengukuran Selanjutnya
Setelah pengakuan awal, aset tanah dan bangunan diukur dengan model revaluasian.

Subsequent Measurement
After initial recognition, land and building assets are measured using the revaluation model.

Penilaian terhadap tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Valuation of land and building is performed by external independent valuers. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nuilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

The frequency of revaluations depends on changes in the fair value of the property and equipment being revalued. If the fair value of the revalued asset differs materially from its carrying amount, then further revaluation is required. Some property and equipment experience significant and fluctuating changes in fair value and therefore need to be revalued annually. Annual revaluation does not need to be carried out for property and equipment whose fair value changes are not significant. Otherwise, property and equipment may need to be evaluated every three or five years.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land and building is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under property, plant and equipment revaluation, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and building is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land and building is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Untuk aset tetap lainnya, setelah pengakuan awal diukur dengan model biaya.

After initial recognition, other property and equipment are carried using the cost model.

Aset tetap disusutkan diakui dengan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

Fixed assets depreciated is recognized using the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	**Persentase/ *Percentage***	
Bangunan	20 - 40	2,5% - 5%	*Buildings*
Apartemen	30	3,30%	*Apartments*
Mesin dan peralatan	4 - 5	20% - 25%	*Machinery and equipment*
Aset hotel	20	0,25%	*Hotel assets*
Kendaraan	4 - 5	20% - 25%	*Vehicles*
Inventaris kantor	3 - 4	25% - 33%	*Office equipments*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap dan keuntungannya/ kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as separate asset as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. When property and equipment are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pemasangan peralatan dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi/ pemasangan selesai.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of equipment are capitalized as assets under construction and installation. These costs are reclassified to property and equipment when the constructionor installation is complete.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman. Semua biaya pinjaman seperti bunga, beban keuangan dalam sewa, dan selisih kurs (diestimasi setiap 3 bulan sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga dengan membatasi selisih kurs yang diperhitungkan sebagai biaya pinjaman sebesar jumlah yang dapat diatribusikan ke aset kualifikasian, dikapitalisasi ke harga perolehan aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya kapitalisasi biaya pinjaman

Assets under construction and installation are stated at cost, which may include borrowing costs. All borrowing costs such as interest, finance charges in respect of leases and foreign exchange differences (estimated quarterly to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs by capping the exchange differences taken that can be attributed to qualifying assets, are capitalized to the cost of property and equipment under construction and installation. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when

dihentikan pada saat pembangunan/ pemasangan selesai dan aset yang dibangun/ dipasang tersebut siap untuk digunakan.

Biaya yang bergantung pada peristiwa masa depan selanjutnya diakui sebagai bagian nilai tercatat aset sebesar jumlah imbalan ketika terdapat ketidakpastian kewajiban tersebut terjadi.

Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset ditentukan dengan membandingkan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui di laba rugi.

the construction or installation is completed and the constructed or installed asset is ready for its intended use.

Cost contingent on future events are subsequently recognized as part of the cost ofthe asset at the amount of consideration when the obligation is certain to be occurred.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted in appropriate, at the end of each reporting period.

Property, plant, and equipment that are no longer used or sold, are removed from the financial statements. Gains and losses on disposals of assets are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in profit or loss.

q. *Goodwill*

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai *goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya. Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari *goodwill* termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

q. *Goodwill*

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cashgenerating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

If the recoverable amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods. On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi

s. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan

r. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease. When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

s. Leases

The Group as lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control

dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
  - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
  - *The Group has the right to operate the asset; or*
  - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:
- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara- substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:
- *pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara- substansi), dikurangi insentif sewa;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options;and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah
Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Short-term leases and leases of low-value assets
The Group has elected not to recognize right-of- use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk

Lease modification
The Group account for a lease modification as a separate lease if both:
- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the*

peningkatan dalam ruang lingkup sewa dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu;
- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

- Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa
Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika demikian, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Ketika Grup adalah pesewa antara, Grup mencatat sewa utama dan sub-sewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Sub-sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract;
- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *Determines the lease term of the modified lease;*
- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*

- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

The Group as lessor
When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

When the Group is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sub-lease as two separate contracts. The sub-lease is classified as a finance or operating lease by reference to the right- of-use asset arising from the head lease.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa. Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa bersih Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term. Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Group's net investment outstanding in respect of the leases.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai pengelompokan aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the statements of financial position based on grouping of the asset. Lease income is recognised over the term of the lease on a straight-line basis.

t. Aset Takberwujud

Biaya atas pembelian software akuntansi diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi selama periode atas pengakuan *software* akuntansi sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek. Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap dan/atau properti investasi. Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

t. Intangible Assets

The cost of purchase of accounting software is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter. The legal cost of landrights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under property, plant and equipment and/or investment property. The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

Nilai wajar dari perolehan aset takberwujud atas penyediaan jasa konstruksi pada perjanjian jasa konsesi diestimasi berdasarkan referensi nilai wajar dari pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nilai wajar yang diperhitungkan sebagai estimasi dari pendekatan biaya (cost plus) dengan marjin keuntungan sebesar % berdasarkan kontrak yang dianggap cukup memadai oleh Grup. Ketika Grup menerima aset takberwujud dan aset keuangan yang berasal dari jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi, Grup mengestimasi nilai wajar dari aset takberwujud sebesar perbedaan nilai antara nilai wajar dari jasa konstruksi dan nilai wajar dari aset keuangan yang diterima.

The fair value of intangible assets received as consideration for providing construction service in a service concession arrangement is estimated by reference to the fair value of the construction service provide. The fair value is calculated as the estimated total cost plus a profit margin of % base on arrangement which the Group considers a reasonable margin. When the Group receives an intangible assets and a financial assets as consideration for providing construction service in a service concession arrangement, the Group estimated the fair value of intangible assets as the difference between the fair value of the construction service provide and the fair value of the financial asset received.

u. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya pemasaran dan biaya tidak langsung dibayar dimuka akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

u. Prepaid Expenses

Prepaid marketing cost and indirect cost are charged proportionally to recognized income during projects construction. Prepaid rent, provision and insurance cost are amortized during their benefit period on straight line method.

v. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat dari jumlah obligasi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

v. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual. Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

w. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization. All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

x. Imbalan Pascakerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan nonmoneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberkan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas

x. Post Employments Benefit

Short-term Employee Benefits

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are

dipresentasikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada laporan posisi keuangan.

presented as current employee benefit obligations in the statement of financial position.

Imbalan Pascakerja

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan pasal 185 (b) Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Post-Employment Benefits

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of article 81 and article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga neto;
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu. Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan manfaat biaya diakui dalam laba rugi.

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);*
- *Net interest expense or income;*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs. The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Other Long-Term Employee Benefits
The Group also provides other long term employee benefits such as long service leaves and awards. The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method with the benefit cost recognized in profit and loss.

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

y. Recognition of Revenue and Costs

Revenue from contracts with customers
Revenue recognition have to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin.

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 (dua) cara, yakni:
1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

The implementation of obligation can be fulfilled in 2 (two) ways, it is:
1. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Pendapatan Konstruksi
Pendapatan atas jasa konstruksi diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan metode input yang mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input entitas atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan (sebagai contoh, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan) secara relatif terhadap total input yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Construction Revenue
Revenue from construction services is recognized based on the percentage of completion of the work. The percentage of completion of construction is determined based on the input method that recognizes revenue based on the entity's efforts or inputs to fulfill the performance obligation (for example, resources consumed, labor hours charged, costs incurred, time elapsed, or machine hours used) relative to the total inputs expected to fulfill the performance obligation as stated in the Project Performance Report (LPP) signed by both parties. Construction business revenue for which invoices have been issued is recognized as accounts receivable, while those for which invoices have not been issued are recognized as gross billings to the employer.

Pendapatan dari penjualan minyak dan gas bumi
Pendapatan dari penjualan minyak mentah dan gas diakui pada saat pengiriman ke pelanggan.

Revenue from sales of oil and gas

Revenue from sales crude oil and gas is recognized upon delivery to the customer. For

Apabila volume dari minyak yang di-*lifting* kurang atau lebih dari hak Perusahaan, maka piutang dari atau utang ke Pemerintah harus diakui.

lifting imbalances with the Government, wherein the volume of the oil lifted is less or greater than the Company entitlement, a receivable or payable is accrued.

Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Interest Income
Interest income from a financial asset is recognized when is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan Tol
Pendapatan dari operasi jalan tol diakui pada saat tiket tol terjual dan/atau jasa telah diberikan. Pendapatan dari perjanjian bagi hasil antara Perusahaan dan investor diakui pada saat tiket tol terjual, setelah dikurangi bagian investor. Pembayaran kepada investor yang tidak memiliki hak pengoperasian dicatat sebagai angsuran wajib dalam kerja sama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran dengan angsuran wajib dalam kerja sama operasi dicatat sebagai beban atau pendapatan kerja sama operasi.

Toll Revenues
Revenue from toll road operations is recognized when toll tickets are sold and/or service are rendered. Revenue from profit sharing arrangement between the recognized when toll tickets are sold, net or investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The excess of total payment over mandatory installment under joint operation is recorded as joint operation expenses or revenue.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses are recognized when incurred
Intangible Assets

z. Perjanjian Konsesi Jasa
Grup telah menerapkan ISAK 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 229, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan".

z. Concession Service Agreements
The Group has implemented ISAK 112, "Service Concession Arrangement" and ISAK 229, "Service Concession Arrangement: Disclosures".

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognise any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa. Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik sebagai imbalan atas jasa konstruksi yang dilakukan Grup. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement. The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service as a consideration for construction services performed by the Group. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service.

Sesuai dengan ISAK 112, Grup mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", untuk jasa konstruksi jalan tol dan jasa operasi dan pemeliharaan jalan tol selama masa konsesi. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud sebesar nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup. Nilai wajar dari pendapatan jasa konstruksi dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi jalan tol ditambah dengan marjin konstruksi tertentu. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset tak berwujud tersebut siap digunakan. Aset hak pengusahaan jalan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas selama masa konsesi.

In accordance with ISAK 112, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers" ("PSAK 115"), for toll road construction services and toll road operation and maintenance services during the concession period. During the construction period, the Group records intangible assets at fair value of the consideration received or to be received by the Group. The fair value of revenue from construction services is derived from the costs incurred for toll road construction plus certain construction margin. The amortisation of the costs starts when the intangible assets are ready to be operated. Concession rights for toll roads are amortised using the unit of usage method based on traffic volume during the concession period.

Sesuai dengan ISAK 112, pemberi konsesi dapat juga menyerahkan item infrastruktur lainnya kepada operator, yang dapat disimpan atau digunakan sesuai keinginan operator. Jika aset tersebut merupakan bagian dari imbalan yang harus dibayar oleh pemberi konsesi untuk pelayanan jasa, aset tersebut bukan merupakan hibah Pemerintah. Aset tersebut diakui sebagai aset operator, yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal. Operator mengakui pendapatan ditangguhkan sehubungan dengan kewajiban yang belum terpenuhi, yang ditanggung sehubungan dengan pertukaran aset. Aset tak berwujud akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset tak berwujud yang diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

In accordance with ISAK 112, the grantor may provide other infrastructure items to the operator, to keep or used as the operator wishes. If these assets are part of the consideration payable by the grantor for the services, then these assets would not be viewed as Government grant. These are recognized as assets of the operator and are measured at fair value on initial recognition. The operator recognizes a deferred revenue in respect of unfulfilled obligations it has assumed in exchange for the assets. The intangible assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the intangible assets which are expected to be fully amortised by then, will be handed over to the Indonesia Toll Road Authority (ITRA) for no consideration.

Aset tak berwujud yang diberikan kepada Grup dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT. Aset tak berwujud ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset tak berwujud akan dihentikan pengakuannya.

Provisi pelapisan jalan tol
Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol didiskontokan ke nilai kininya yang mencerminkan provisi.

Pendapatan jasa konsesi
Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan berdasarkan perjanjian konsesi diakui berdasarkan persentase penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup dalam mengakui pendapatan atas jasa konstruksi. Pendapatan operasi atau jasa diakui pada periode dimana jasa telah diberikan. Pendapatan dari penyerahan air minum kepada PDAM berdasarkan perjanjian konsesi jasa sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi jasa konsesi menggunakan model aset keuangan.

aa. Aset Minyak dan Gas Bumi
Biaya pengeboran sumur pengembangan dan sumur tes stratigrafi tahap pengembangan, platform, perlengkapan sumur dan fasilitas produksi terkait, dikapitalisasi sebagai asset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan. Biaya tersebut dipindahkan ke aset sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait pada saat pengeboran atau konstruksi selesai. Penyusutan, deplesi dan amortisasi atas asset minyak dan gas bumi, kecuali untuk aset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan, dihitung dengan menggunakan metode satuan unit produksi, dengan menggunakan produksi kotor yang dibagi dengan cadangan kotor yang terbukti dan telah dikembangkan. Penyusutan atas fasilitas pendukung dan peralatan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Intangible asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ ITRA. These intangible assets will be transferred to the Government/ ITRA at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the intangible assets will be derecognized.

Provision for overlay
In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the Minimum Service Standards (SPM) established by the Ministry of Public Works and Housing, which is by performing overlay of toll road regularly. The cost of this overlay is periodically provided for based on estimated utilisation of toll road by customers. The estimated net provision for overlay is discounted to its present value that reflects current provision.

Service concession revenue
Revenue related to construction or upgrade service inder a service concession arrangement is recognized based on the percentage of completion of the project, consistent with the Group's accounting policy on revenue recognition on construction services. Operation or services revenue is recognized in the period in which the service are provided. Revenue from delivery of drinking water to the PDAM to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for a service concession transaction using financial assets model.

aa. Oil and Gas Properties
The costs of drilling development wells and development-type stratigraphic test wells, platforms, well equipment and attendant production facilities, are capitalized as uncompleted wells, equipment and facilities. Such costs are transferred to wells and related equipment and facilities upon completion. Depreciation, depletion and amortization of oil and gas properties, except uncompleted wells, equipment and facilities, are calculated based on the unit-of-production method, using the gross production divided by gross proved developed reserves. Depreciation for support facilities and equipment is calculated using straight line.

bb. Liabilitas Pembongkaran Aset Restorasi Area

Grup mengakui liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam kontrak bagi hasil atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset minyak dan gas bumi dan restorasi area diakui sebagai komponen biaya perolehan aset, yang kemudian disusutkan/ dideplesikan dengan menggunakan metode satuan unit produksi yang sejalan dengan tarif deplesi aset yang dipilih.

Dalam banyak kasus, aktivitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait terjadi pada beberapa tahun di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area di masa yang akan datang adalah berupa estimasi terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian atas nilai kini dari liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area dibukukan sebagai penyesuaian atas nilai buku aset yang bersangkutan dengan jumlah yang sama. Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

bb. Asset Abandonment and Site Restoration obligations

The Company recognizes liability for the dismantling and reclassification of assets, and restoration of areas for oil and gas production facilities, wells, pipes and related assets in accordance with the terms of the production sharing contract or in accordance with applicable regulations. The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognized as part of the acquisition costs of the assets, and are subsequently depreciated/ depleted using the unit-of production method in line with the selected assets depletion rate.

In most instances, the dismantlement and transfer of assets, and site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipe lines and related assets will occur several years in the future. The provision for future dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation is the best estimate of the present value of the future expenditures required to under take the dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation at the reporting date, based on current legal requirements. Such estimates are reviewed on an annual basis and adjusted each year as required. Adjustments to the present value of the dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation are recorded as adjustment to the carrying amount of the associated asset in the same amount. The costs related to restoration, rehabilitation and living environment which occurred in the production phase are expensed as part of production cost.

cc. Pajak Penghasilan dan Pajak Final

Beban pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika

cc. Income Tax and Final Tax

Income tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively. Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods

jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku.

exceeds the amount due for those periods, the excess shall recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- Pengakuan awal *goodwill*; atau
- Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan
- Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized. A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- *The initial recognition of goodwill; or*
- *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and*
- *At the time of the transactions, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak)

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the

yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini;
  - entitas kena pajak yang sama; atau
  - entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available. The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes applied by the same taxation authority on either:*
  - *the same taxable entity; or*
  - *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- *has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

Pajak Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 2,65% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Koreksi tehadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan. Pajak penghasilan atas sewa dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 dan KMK-120/KMK.03/2002 tentang pajak penghasilan final atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Final Tax

Based on the Indonesian Government Regulation No. 9 Year 2022 regarding Income Tax for Income from Construction Services is 2,65% of the total payment excluding Value Added Tax and is deducted by the user in the event that the user is the tax withholder. Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filing an objection and appeal, when the decision of the objection and appeal is determined. The income tax on rental revenues is calculated based on Government Regulation (GR) No. 5 year 2002 dated March 23, 2002 and KMK-120/KMK.0312002 regarding final income tax on rental of land and/or building.

dd. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

dd. Operating Segment

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earns revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c. for which discrete financial information is available

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

ee. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ee. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

ff. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Grup sebagai penyewa

Utang sewa ijarah diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Beban sewa ijarah diakui salama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima.

Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Objek Ijarah Muntahiyah Bittamlik akan dihibahkan kepada Grup setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

Jual dan Ijarah

Transaksi jual dan ijarah merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung dengan harga jual pada nilai wajarnya.

Jika entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan menyewanya kembali, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya dalam laba rugi dan menerapkan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah, tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

ff. Ijara Muntahiyah Bittamlik

Ijara Muntahiyah Bittamlik is an ijarah with the transfer of ownership of assets that are ijara ded at a certain time.

The Group as lessor

Ijara lease payable is measured at the amount to be paid for the benefits that have been received. Ijarah lease expense is recognized over the term of the contract when the benefits of the asset have been received.

The cost of maintaining the object of ijara as agreed in the contract is borne by the lessee is recognized as an expense when incurred.

The object of Ijara Muntahiyah Bittamlik will be granted to the Group after the end of the lease term.

Sale and Ijara

The sale and ijara transactions are separate and independent transactions with the selling price at fair value.

If an entity sells the object of ijara to another party and leases it back, the entity shall recognize the gain or loss in the period in which it occurred in profit or loss and apply the accounting of the lessee. Gains or losses arising from sale and ijara transactions cannot be recognized as a reduction or increase in ijara expenses.

gg. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: (a). aset berwujud tertentu; (b). manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c). jasa yang sudah ada ataupun yang akan ada; (d). aset proyek tertentu; atau (e). kegiatan investasi yang telah ditentukan.

gg. Sukuk

Sukuk are the sharia securities represented by a certificate or evidence of ownership of equal denomination and representing individual ownership interest in (not separated or divided): (a). particular intangible assets; (b). existing or future benefits of particular intangible assets; (c). existing or future services; (d).particular project assets; or (e). determined investment activity.

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk ijarah dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Sukuk ijara is recognised initially at nominal, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognised in the profit or loss as sukuk ijara issuance costs and amortized using the straight-line method during the period of sukuk ijara.

Sukuk ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Sukuk ijara, adjusted with premium or discount and unamortised transaction costs, is presented as part of liabilities.

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Sukuk mudarabah is sukuk using a mudarabah's contract.

Grup sebagai Penerbit
Sukuk mudharabah diakui saat Grup menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal.

The Group as Issuer
Sukuk Mudarabah is recognized when the Group becomes a party bound by the provisions of sukuk mudarabah issuance. Sukuk mudarabah is recognized at its nominal amount.

Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah dan disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah.

A transaction cost is recognized separately from sukuk mudarabah and is presented in assets as deferred expense, rather than a contra account of sukuk mudarabah. Transaction cost is amortized on straight-line basis over the terms of sukuk mudarabah.

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

A return entitled for the holder of sukuk mudarabah is recognized as a deduction of revenues, rather than an expense.

Karena bukan merupakan entitas syariah, Grup tidak menyajikan sukuk mudharabah sebagai dana syirkah temporer yang secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, tetapi disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

Since was not a sharia entity, the Group did not presenting sukuk mudarabah as a temporary shirkah funds separately from liabilities and equity, but presented in a separate liability with the other liabilities. Sukuk mudarabah is presented at the last in the sequence of liabilities.

4. Pertimbangan Penting Akuntansi Dan Sumber Ketidakpastian Estimasi

4. Critical Accounting Judgments And Key Sources of Estimation Uncertainty

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut. Estimasi dan asumsi yang mendasari

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting year that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Ketika mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE), Grup menggunaan informasi perkiraan masa depan yang wajar dan terdukung, berdasarkan asumsi pergerakan masa depan atas penentu ekonomi dan bagaimana penentu tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Provision for Impairment Losses on Financial Assets

When measuring Expected Credit Losses (ECL), the Group uses information on reasonable and supportable future estimates, based on assumptions about the future movements of economic determinants and how these determinants will influence each other.

Kerugian saat gagal bayar adalah estimasi kerugian yang timbul pada saat gagal bayar. Persentase *simplified approach* dihitung dari selisih antara arus kas kontraktual dan arus kas yang diekspektasi diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari penjualan agunan dan peningkatan kredit. Probabilitas gagal bayar merupakan input utama dalam mengukur KKE. Probabilitas gagal bayar adalah estimasi kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. Percentage of simplified approach based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit echancements. Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Nilai tercatat atas aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13.

The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 5, 7, 8, 9, 10, 11 and 13.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai wajar dari aset tetap dan properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi. Valuasi properti investasi milik Grup dilakukan oleh penilai independen professional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan segmen properti investasi yang akan dinilai untuk semua properti investasi. Nilai wajar untuk semua properti investasi ditentukan menggunakan pendekatan yang relevan dengan masing-masing properti investasi.

Nilai tercatat atas aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 21 dan 22.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 22.

Penurunan nilai aset non-keuangan
Aset berwujud dan tidak berwujud, dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Sedangkan untuk *goodwill*, uji penurunan nilai harus dilakukan minimal setiap tahun, baik ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai

Fair Value of Property and Equipment and Investment Properties
The fair value of property and equipment and investment properties is determined by using valuation techniques. The Group's investment properties were valued by independent professionally qualified valuers who hold a recognized relevant professional qualification and have recent experience in the segment of related investment properties. The fair value for all investment properties was determined using relevant approach to each investment property.

The carrying amounts of property and equipment and investment property is disclosed in Notes 21 and 22.

Estimated useful lives of property and equipment
The useful life of each item of the Group's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment is disclosed in Note 22.

Impairment of non-financial assets
Tangible and intangible assets, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. While for goodwill, impairment testing is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indicators of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash generating unit) and a

untuk menentukan nilai sekarang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha. Menentukan apakah suatu *goodwill* turun nilainya membutuhkan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana *goodwill* dialokasikan.

suitable discount rate in order to calculate the present value. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations. Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been allocated.

Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan dihasilkan dari unit penghasil kas menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Bila aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise.

Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi
Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan metode input yang mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input entitas atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan (sebagai contoh, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan) secara relatif terhadap total input yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Recognition of revenue and cost of revenue
The Group's construction revenue and expense recognition policies require the use of estimates that affect the reported amounts of revenue and cost of revenue. The Group recognizes contract revenue and contract costs related to construction contracts based on the percentage of completion of the work. The percentage of completion of construction is determined using the input method, which recognizes revenue based on the entity's efforts or inputs to the performance obligation (for example, resources consumed, labor hours charged, costs incurred, time elapsed, or machine hours used) relative to the total inputs expected to satisfy the performance obligation as outlined in a Project Progress Report (PPP) signed by both parties. Construction revenue for which invoices have been issued is recognized as accounts receivable, while for which invoices have not been issued, it is recognized as gross billings from the client.

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup

The Group undertakes projects that frequently span more than one accounting period and are accounted for as construction contracts. The

untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

Group's accounting policies for these projects require revenue and costs to be allocated to individual accounting periods and the consequent recognition at period end of contract assets or liabilities for projects is still in progress. The application of these policies requires management to apply judgment in estimating the total revenue and total costs expected on each project. Such estimates are revised as a project progresses to reflect the current status of the project and the latest information available to management. Project management teams perform regular reviews to ensure the latest estimates are appropriate, the changes in estimation is applied prospectively. Change to estimates is accounted for prospectively, while The Group believes that their estimates are reasonable and appropriate, significant differences to the actual completion stage may materially affect the revenues and cost revenue of construction contracts.

Nilai tercatat atas pendapatan dan beban konstruksi diungkapkan dalam Catatan 45 dan 46.

The carrying amounts of revenue and cost of revenue are disclosed in Notes 45 and 46.

Amortisasi hak pengusahaan jalan tol
Grup melakukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan jembatan selama masa konsesi dengan menggunakan metode pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas selama masa konsesi. Nilai tercatat neto atas hak pengusahaan jalan tol.

Amortization of toll road concession right
The Group decided to amortize toll road concession rights - road and bridge using the toll road consumption pattern method derived from traffic over the concession period. The net carrying value of toll road concession rights.

Estimasi volume lalu lintas
Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Estimation of traffic volume
Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Grup akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

The Management perform periodic assessment on the total projected traffic volume. The Group will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume.

5. Kas dan Setara Kas dan Bank yang Dibatasi Penggunaannya / *5. Cash and Cash Equivalents and Restricted Bank*

a. Kas dan Setara Kas / *a. Cash and Cash Equivalents*

	2025	2024
Kas/ *Cash on Hand*		
Rupiah	9.352.479.334	30.119.033.361
Bank/ *Cash in Banks*		
Pihak Berelasi/ *Related parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.468.825.686.171	2.107.585.750.188
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111.732.705.542	18.437.237.099
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	218.377.777.346	371.960.553.905
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	262.783.168.650	327.337.393.111
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	79.792.467.628	143.579.234.575
PT Bank Syariah Nasional (dahulu/ *formerly* Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)	3.441.807.876	3.411.771.669
Dolar Amerika Serikat/ *U.S. Dollar*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.858.232.896	129.430.681.857
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	396.304.077	381.691.166
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.619.184	28.997.231
Euro/ *Euro*		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.437.157	4.168.959
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.999.585	3.056.586.388
Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.419.788.795	8.574.973.539
Sub Total	**2.156.702.994.907**	**3.113.789.039.687**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank ICBC Indonesia	160.032.208.444	3.534.164.512
PT Bank KB Bukopin Tbk	35.578.678.229	35.904.717.212
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	31.190.075.405	29.450.772.523
PT Bank DKI	28.995.838.989	72.373.060.132
PT Bank CIMB Niaga Tbk	16.224.863.669	3.623.185.053
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	14.598.422.307	10.747.042.028
PT Bank Central Asia Tbk	8.879.264.816	6.900.431.937
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.625.205.506	5.689.067.025
PT Bank UOB Indonesia	2.256.534.514	102.247.810.445
PT Bank HSBC Indonesia	2.169.065.850	3.376.537.359
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.887.303.544	1.185.881.451
PT Bank DBS Indonesia	1.789.788.608	1.796.568.608
PT Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta	1.652.788.358	4.660.167
PT Bank Mega Tbk	798.957.415	797.823.287
PT Bank Ina Perdana Tbk	773.902.778	773.902.778
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	627.597.640	626.857.282
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	536.319.874	335.315.185
PT Bank Permata Syariah (dahulu/ *formerly* Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk)	377.906.254	369.517.780
PT Bank Permata Tbk	333.370.015	7.288.844.788
PT Bank OCBC NISP Tbk	249.179.839	85.494.735
PT Bank NTB Syariah	199.013.674	22.533.048
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	189.085.249	82.401.632
PT BPD Jawa Tengah	93.554.362	24.216.827
PT BCA Syariah	51.025.404	--
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	37.233.888	38.124.043
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	24.693.381	25.394.166
PT Bank Resona Perdania	15.585.401	15.907.401
PT Bank Nationalnobu Tbk	8.859.125	9.637.858
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.754.437	3.954.437
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.083.837	3.247.691
PT BPR Surya Artha Utama	2.557.917	2.573.838
PT Bank Mega Syariah	115.759	474.464
PT Bank KEB Hana Indonesia	--	11.566.442

	2025	2024
Dolar Amerika Serikat/ *U.S. Dollar*		
BDO Bank, Inc	33.694.376.673	32.437.312.752
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	77.148.532	75.268.050
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.405.008	10.837.429
Euro/ *Euro*		
PT Bank HSBC Indonesia	20.978.944	17.896.939
Peso/ *Peso*		
BDO Bank, Inc	26.891.536.047	29.901.385.356
Jumlah Bank/ *Total Cash in Bank*	**2.532.603.274.599**	**3.463.583.426.347**
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	241.000.000.000	612.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.348.713.380	51.348.309.380
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.000.000.000	1.500.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.500.000.000	3.500.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.800.000.000	10.000.000.000
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank BJB Syariah	30.000.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	13.137.137.500	14.137.137.500
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	6.000.000.000	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000.000	100.000.000
PT Bank KB Bukopin Tbk	50.000.000	50.000.000
Jumlah Deposito Berjangka/ *Total Time Deposits*	357.935.850.880	692.635.446.880
Jumlah Kas dan Setara Kas/ *Total Cash and Cash Equivalents*	2.899.891.604.813	4.186.337.906.588
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Loss*	(6.287.281.092)	(4.832.954.319)
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih/ *Total Cash and Cash Equivalents - Net*	2.893.604.323.721	4.181.504.952.269
Jumlah/ *Total*	**2.893.604.323.721**	**4.181.504.952.269**

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun/ *Annual interest rates on time deposits*		
Rupiah/ *Rupiah*	2,25% - 5,00%	2,25% - 5,00%
Bagi Hasil (Nisbah Syariah)/ *Profit Sharing (Syariah)*	68-75%	68-75%
Jangka waktu deposito berjangka/ *Time Deposit*	0 - 3 bulan / *months*	0 - 3 bulan / *months*

Mutasi Cadangan Kerugian Nilai/ *Movement Allowance for Impairment Losses:*

	2025	2024
Saldo awal/ *Beginning balance*	4.832.954.319	6.309.023.265
Penambahan/ *Additions*	3.231.770.526	1.203.275.699
Pemulihan/ *Recovery*	(1.777.443.753)	(2.679.344.645)
Saldo akhir/ *Ending balance*	**6.287.281.092**	**4.832.954.319**

Dalam menentukan kerugian penurunan nilai, manajemen telah memperhitungkan peringkat kredit bank, mempertimbangkan berbagai informasi ekonomi aktual dan perkiraan dari sumber eksternal, yang sesuai, dalam mengestimasi kerugian penurunan nilai masing-masing kas dan setara kas. Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam menilai penyisihan kerugian nilai untuk kas dan setara kas.

In determining allowance for impairment loss, management has taken into account the credit rating of the bank, taking into account various actual and forecast economic information from external sources, where appropriate, in estimating allowances for impairment loss of cash and cash equivalents, respectively. There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the allowances for impairment loss of cash and cash equivalents.

Keuntungan atau kerugian penurunan nilai atas atas kas dan setara kas diakui dalam laba rugi, dengan penyesuaian terkait ke nilai tercatatnya melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Impairment gain or loss on cash and cash equivalents is recognized in profit or loss, with a corresponding adjustment to their carrying amount through the loss allowances for impairment loss.

b. Bank yang Dibatasi Penggunaannya / *b. Restricted Bank*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	128.284.626.020	72.648.532.764
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.801.377.812	161.936.202.884
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18.688.294.258	18.025.999.999
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.407.584.911	21.107.120.886
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.169.283.856	1.874.192.969
PT Bank Syariah Nasional (dahulu/ *formerly* Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)	1.373.704.220	2.501.976.980
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah/ *Rupiah*		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.925.227.615	16.740.541.105
PT Bank Nationalnobu Tbk	6.843.674.614	5.419.738.700
PT Bank Permata Syariah (dahulu/ *formerly* Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk)	1.348.366.247	1.190.195.108
PT BPD Jawa Timur Tbk	828.209.919	870.514.013
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	786.631.754	683.718.260
PT Bank Permata Tbk	208.206.044	842.322.358
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	23.800.001	23.800.000
PT Bank Central Asia Tbk	--	1.628.456.003
Lainnya/Others	60.365.025	--
Jumlah/ *Total*	**233.749.352.296**	**305.493.312.029**
Dikurangi/ *Less:*		
Bagian Lancar/ *Current Portion*	(165.199.139.466)	(213.748.877.534)
Bagian Tidak Lancar/ *Non Current Portion*	**68.550.212.830**	**91.744.434.495**

PPRO
Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan jaminan Grup yang diberikan kepada bank-bank tersebut atas fasilitas kredit kepemilikan apartemen ("KPA") dan rumah ("KPR") yang diperoleh pelanggan Grup. Jaminan akan dikembalikan apabila grup telah menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan milik pembeli kepada bank-bank tersebut dan disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dan disajikan sebagai bagian dari aset keuangan tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PPRO
Restricted funds is corporate guarantees provided by the Group to the banks of facilities of apartment ("KPA") and house ("KPR") ownership credit obtained by the Group's customers. These guarantees will be refunded when the Group has given the buyers' land and building certificates to those banks and are presented as "Restricted Funds" under the non-current assets section of the consolidated statements of financial position.

PPSD
Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening *Debt Service Account* (DSA) dan *Debt Service Reserve Account* (DSRA) yang dimaksudkan untuk menampung dana dalam rangka pembayaran fasilitas kredit investasi setiap 3 bulan.

PPSD
Cash that is restricted for use is an account for Debt Service Account (DSA) and a Debt Service Reserve Account (DSRA) which is intended to accommodate funds for payment of investment credit facilities quarterly.

PPIN
Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening *Debt Service Account* (DSA) dan *Debt Service Reserve Account* (DSRA) yang dimaksudkan untuk menampung dana dalam rangka pembayaran fasilitas kredit investasi setiap 3 bulan.

PPIN
Cash that is restricted for use is an account for Debt Service Account (DSA) and a Debt Service Reserve Account (DSRA) which is intended to accommodate funds for payment of investment credit facilities quarterly.

6. Investasi Jangka Pendek / *6. Short Term Investments*

	2025	2024
Rupiah/ *Rupiah*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	105.000.000.000	105.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.707.133.317	38.707.133.317
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	105.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.500.000.000	3.500.000.000
Sub Jumlah/ *Sub Total*	147.207.133.317	252.207.133.317
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank DKI	25.000.000.000	25.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.841.000.000	22.841.000.000
Sub Jumlah/ *Sub Total*	47.841.000.000	47.841.000.000
Jumlah/ *Total*	**195.048.133.317**	**300.048.133.317**
Rupiah/ *Rupiah*		
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(212.057.456)	(698.732.456)
Jumlah Investasi Jangka Pendek - Bersih/ *Total Short Term Investment - Net*	**194.836.075.861**	**299.349.400.861**
Jangka waktu deposito berjangka/ *Time deposits period*	3 - 12 bulan/ *months*	3 - 12 bulan/ *months*
Tingkat bunga per tahun/ *Annual interest rate*	2,25% - 5,00%	2,25% - 5,00%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai: / *Movement allowance for impairment losses:*

	2025	2024
Saldo awal/ *Beginning balance*	698.732.456	294.567.054
Penambahan & (Pemulihan)/ *Additions & (Recovery)*	(486.675.000)	404.165.402
Saldo akhir/ *Ending balance*	**212.057.456**	**698.732.456**

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima Perusahaan dan entitas anak dari bank-bank tersebut (Catatan 30). Dalam menentukan kerugian penurunan nilai, manajemen telah memperhitungkan peringkat kredit bank, mempertimbangkan berbagai informasi ekonomi aktual dan perkiraan dari sumber eksternal, yang sesuai, dalam mengestimasi kerugian penurunan nilai masing-masing investasi jangka pendek.

Short-term investment is time deposits are pledged as collateral to loan obtained by the Company and subsidiaries from respective banks (Note 30). In determining allowance for impairment loss, management has taken into account the credit rating of the bank, taking into account various actual and forecast economic information from external sources, where appropriate, in estimating allowances for impairment loss of short term investments.

Keuntungan atau kerugian penurunan nilai atas investasi jangka pendek diakui dalam laba rugi, dengan penyesuaian terkait ke nilai tercatatnya melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Impairment gain or loss on cash and cash equivalents is recognized in profit or loss, with a corresponding adjustment to their carrying amount through the loss allowances for impairment loss.

7. Piutang Usaha / *7. Trade Accounts Receivable*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related parties*		
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	93.234.454.756	--
KSO PP-Wika-KMK	81.966.681.643	--
KSO Surya Mina Asinusa	56.333.171.071	587.778.751.646
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	61.080.223.221
Lain-lain di bawah Rp 60 milyar/ *Others below Rp 60 billion*	533.247.067.590	330.222.502.975
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total*	764.781.375.060	979.081.477.842
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan kerugian penurunan nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(151.841.123.219)	(730.862.273.898)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	612.940.251.841	248.219.203.944
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	4.499.846.824.500	6.218.339.602.109
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga/ *Allowance for Impairment Losses - Third Parties*	(1.985.578.346.617)	(677.061.342.917)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	2.514.268.477.883	5.541.278.259.192
Jumlah Piutang Usaha - Bersih/ *Total Trade Accounts Receivable - Net*	**3.127.208.729.724**	**5.789.497.463.136**
Piutang usaha berdasarkan mata uang/ *Trade accounts receivable by currency:*		
Rupiah/ *Rupiah*	5.253.570.536.327	7.186.363.416.719
Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	11.057.663.233	11.057.663.232
Sub Jumlah/ *Sub Total*	5.264.628.199.560	7.197.421.079.951
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(2.137.419.469.836)	(1.407.923.616.815)
Jumlah / *Total*	**3.127.208.729.724**	**5.789.497.463.136**

	2025	2024
Piutang usaha berdasarkan umur/ *Trade accounts receivable by aging:*		
Belum Jatuh Tempo/ *Not yet due*	122.051.407.542	2.086.074.957.734
Sudah Jatuh Tempo/ *Overdue*		
1 bulan - 12 bulan/ *1 - 12 months*	1.639.631.525.186	2.900.421.249.341
12 - 15 bulan/ *12 - 15 months*	471.174.588.662	374.299.736.580
15 - 18 bulan/ *15 - 18 months*	250.692.523.657	373.675.096.608
18 - 21 bulan/ *18 - 21 months*	167.156.111.487	328.560.408.099
Lebih dari 21 bulan/ *More than 21 months*	2.613.922.043.026	1.134.389.631.589
Sub Jumlah/ *Sub Total*	5.264.628.199.560	7.197.421.079.951
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(2.137.419.469.836)	(1.407.923.616.815)
Jumlah / *Total*	**3.127.208.729.724**	**5.789.497.463.136**

Pada tahun 2025, PPRO melakukan penyelesaian atas piutang usaha dengan aset non-keuangan.

In 2025, PPRO settled its trade receivables through non-financial assets.

Rincian piutang usaha yang diselesaikan melalui aset non-keuangan adalah sebagai berikut:

The details of the settlement of trade receivables through non-financial assets are as follows:

	2025 Rp	
Nilai tercatat piutang usaha pada tanggal penyelesaian	521.164.955.139	*Carrying amount of trade receivable at the date of settlement*
Nilai wajar aset non keuangan saat tanggal penyelesaian	(449.154.363.351)	*Fair value of non-financial assets at the date of settlement*
Rugi atas penyelesaian piutang usaha (Catatan 51)	**72.010.591.788**	***Loss on settlement of trade receivables (Note 51)***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement allowance for impairment losses are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	1.407.923.616.815	1.320.335.769.511
Penambahan/ *Additions*	729.495.853.021	87.587.847.304
	2.137.419.469.836	**1.407.923.616.815**

Piutang usaha dijaminkan atas utang bank jangka pendek, utang non-bank serta utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang (Catatan 30, 31 dan 39).

Trade accounts receivables were used as collateral to short- term bank loans, non-bank loans and long-term loans from bank and financial institutions (Notes 30, 31 and 39).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible account receivables in the future.

8. Aset Keuangan Dari Proyek Konsesi / *8. Financial Assets From Concession Project*

Grup memiliki 2 jenis aset keuangan konsesi dengan rincian sebagai berikut:

The Group has 2 types of concession financial assets with the following details:

	2025	2024	
Konsesi Pembangkit Listrik Tenaga Uap	30.651.000.000	75.391.000.000	*Concession Project Coal Fired Power Plant*
Konsesi Sistem Penyediaan Air Minum	3.330.998.490.011	3.085.496.828.308	*Concession Project Drinking Water Supply System*
Jumlah	**3.361.649.490.011**	**3.160.887.828.308**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(174.024.539.373)	(219.641.238.342)	*Current Portion*
Jumlah jangka panjang	**3.187.624.950.638**	**2.941.246.589.966**	***Total long-term portion***

a. Konsesi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) / *a. Concession Project Coal Fired Power Plant (PLTU)*

	2025	2024	
Nilai tercatat	244.128.811.619	244.128.811.619	*Carrying value*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(213.477.811.619)	(168.737.811.619)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah bersih	**30.651.000.000**	**75.391.000.000**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Movement in the allowance for impairment losses:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	168.737.811.619	129.213.811.619	*Balance at beginning of year*
Penambahan	44.740.000.000	39.524.000.000	*Additions*
Saldo akhir tahun	**213.477.811.619**	**168.737.811.619**	***Balance at ending of year***

Aset keuangan atas proyek konsesi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung 2x6 MW merupakan proyek kerjasama antara SDP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang telah diklasifikasikan sebagai asset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 112 sesuai dengan berita acara *Commercial Operation Date* (COD) tanggal 2 Mei 2014.

The financial assets for the Lampung 2x6 MW Steam Power Plant (PLTU) concession project are a collaborative project between SDP and PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as stated in the Power Purchase Agreement which has been classified as a financial asset as a result of the application of ISAK 112 in accordance with the Commercial Operation Date (COD) minutes dated May 2, 2014.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan adalah cukup. Selama tahun 2025 dan 2024 Perusahaan tidak berproduksi dikarenakan harga jual batubara yang dibayarkan oleh PT PLN (Persero) lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Saat ini Perusahaan sedang dalam negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk penyesuaian tarif baru.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate. During 2025 and 2024 the Company is not producing because of the selling price of coal paid by PT PLN (Persero) is lower than the purchase price. Currently the Company is in the negotiation process with PT PLN (Persero) for a new tariff adjustment.

b. Konsesi Sistem Penyediaan Air Minum

b. Consession Project Drinking Water Supply System

	2025	2024	
Saldo awal	3.119.831.695.499	2.552.208.142.190	*Beginning balance*
Penambahan			***Addition***
Pendapatan keuangan	337.505.741.271	288.660.868.290	*Finance income*
Pendapatan konstruksi	137.137.253.340	186.596.986.101	*Construction revenue*
Pendapatan operasi	62.243.940.971	66.471.572.303	*Operating income*
Koreksi perubahan estimasi	--	58.691.977.558	*Correction of changes on estimation*
Pengurangan			***Deductions***
Penerimaan dari PDAM	(192.458.281.510)	(32.797.850.943)	*Receipt from PDAM*
Saldo akhir	**3.464.260.349.572**	**3.119.831.695.499**	***Ending balance***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(133.261.859.561)	(34.334.867.191)	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Jumlah bersih	**3.330.998.490.011**	**3.085.496.828.308**	***Net***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(174.024.539.373)	(219.641.238.342)	*Current Portion*
Jumlah jangka panjang	**3.156.973.950.638**	**2.865.855.589.966**	***Total long-term portion***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	34.334.867.191	31.500.000.000	*Balance at beginning of year*
Penambahan	98.926.992.370	2.834.867.191	*Additions*
Saldo akhir tahun	**133.261.859.561**	**34.334.867.191**	***Balance at ending of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

9. Piutang Retensi / *9. Retention Receivables*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	154.605.471.690	121.813.533.370
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	102.244.670.272	34.329.600.001
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	87.375.761.403	156.659.472.841
PT Angkasa Pura II (Persero)	82.231.707.878	32.728.095.166
PT Borneo Alumina Indonesia	60.486.285.628	60.486.285.628
PT Jasamarga Manado Bitung	33.540.531.920	65.728.143.532
Lain-lain di bawah Rp 60 milyar/ *Others below Rp 60 billion*	426.572.336.670	372.896.488.312
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total Related Parties*	947.056.765.461	844.641.618.850
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(302.952.526.018)	(175.390.273.766)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	644.104.239.443	669.251.345.084
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	822.469.415.790	1.025.182.281.194
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga/ *Allowance for Impairment Losses - Third Parties*	(678.981.649.521)	(251.780.306.431)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	143.487.766.269	773.401.974.763
Jumlah / *Total*	**787.592.005.712**	**1.442.653.319.847**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	427.170.580.197	400.596.019.543
Penambahan/ *Additions*	576.503.205.691	26.574.560.654
Pemulihan/ *Recovery*	(21.739.610.349)	--
Saldo akhir/ *Ending balance*	**981.934.175.539**	**427.170.580.197**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai piutang retensi.

Management believes the allowance is adequate for impairment losses of retention receivables.

10. Piutang pada Ventura Bersama / *10. Receivable from Joint Venture*

	2025	2024*)
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PP-Hyundai-Rekind	180.977.493.600	102.391.315.827
PP-Adhi Karya	146.244.166.099	157.232.420.964
PP-Ashfri	81.738.447.744	85.594.996.074
PP-ATM-SPS	30.378.979.779	--
PP-Elnusa	26.284.899.163	18.487.618.688
PP-Wika	21.272.188.578	20.017.469.273
PP-BMP-BLJ	16.047.580.417	16.047.580.417
PP-Adi Jaya Lima Pradana	13.921.137.252	--
PP-Lestari	12.546.994.047	17.809.099.073
PP-KSSA	10.904.194.936	10.585.574.936
PP-PMJ-EMM	10.669.803.507	10.677.836.104
PP-HK	10.235.916.783	9.552.606.412
PP-Wika-NK-Adhi Karya	9.497.598.443	--
PP-Arkonin	8.658.592.600	7.528.106.550
PP-Amka-PP Urban	8.621.604.050	9.055.060.772
PP-Wika-KMK	7.619.854.450	10.800.990.270
PP-Penta	6.524.541.884	9.809.167.244
PP-Ithocu Co.	6.312.027.887	6.312.027.887
PP-Gunung Tabora Perkasa	5.664.403.674	5.664.403.674
PP-Mahkota	5.532.430.770	5.532.430.770
PP-Mafri-DNT	5.045.205.683	--
PP-Jakon	4.819.281.967	11.828.835.333
PP-Brantas-Rangga	4.637.458.780	8.593.700.866
PP-Brantas	2.968.942.970	7.889.678.421
PP-Seneca	1.565.151.753	33.594.076.280
PP-Hyundai E&C	--	301.315.919.445
PP-Nindya Karya	--	69.489.056.942
PP-Waskita	--	5.530.145.036
Lain-lain di bawah Rp 5 milyar	268.092.714.133	62.332.966.861
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total Related Parties*	**906.781.610.949**	**1.003.673.084.119**
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(246.427.276.009)	(159.913.054.117)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**660.354.334.940**	**843.760.030.002**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025 Rp	2024*) Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	159.913.054.117	--
Penambahan/ *Additions*	86.514.221.892	159.913.054.117
Saldo akhir/ *Ending balance*	**246.427.276.009**	**159.913.054.117**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta atau saat proyek selesai.

Joint venture receivables were not subject to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand or when project completed.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang ventura bersama adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses on joint venture receivables is adequate.

11. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja / *11. Gross Receivables From Project Owners*

	2025	2024	
Pendapatan konstruksi yang telah diakui (beban kontrak kumulatif ditambah laba yang diakui kumulatif)	189.407.350.355.230	176.305.981.920.300	*Recognized sales (Accumulated contract expenses plus recognized accumulated profit)*
Dikurangi:			*Less:*
Penagihan termin	(184.342.277.016.588)	(170.791.182.417.517)	*Progress billing*
Sub jumlah	5.065.073.338.642	5.514.799.502.783	*Sub total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.243.830.012.481)	(789.151.360.271)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja	**3.821.243.326.161**	**4.725.648.142.512**	***Total gross receivables from project owners***

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan sebagai berikut:

Detail of gross receivables from project owners based on customer are as follows:

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	316.757.157.713	92.487.946.616
KSO PP-BAP-RE	113.137.281.056	204.433.891.734
KSO PP-Ashfri Minarta	105.541.594.486	80.578.117.799
PT Petrokimia Gresik	103.476.832.280	106.059.683.941
KSO PP-Waskita-Wika	81.195.500.090	107.676.965.028
KSO PP-Waskita-YPP	80.176.255.514	104.412.736.554
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	75.602.897.762	--
KSO PP-Wika-KMK	65.393.395.534	--
KSO PP-Bahagia-Bangunnusa	60.128.000.489	60.128.000.489
PT Angkasa Pura II (Persero)	26.877.703.149	63.803.557.528
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.238.918.916	292.332.972.970
PT Pupuk Iskandar Muda	17.233.966.324	68.933.583.705
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	16.564.514.408	100.338.623.316
Lain-lain di bawah Rp 60 milyar/ *Other below Rp 60 billion*	593.303.776.779	393.129.633.153
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total Related Parties*	1.674.627.794.500	1.674.315.712.833
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(605.477.919.476)	(61.974.154.598)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	1.069.149.875.024	1.612.341.558.235
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	3.390.445.544.142	3.840.483.789.951
Dikurangi/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga/ *Allowance for impairment losses - Third Parties*	(638.352.093.005)	(727.177.205.674)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	2.752.093.451.137	3.113.306.584.277
Jumlah Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih / *Total Gross Receivabes from Project Owners - Net*	**3.821.243.326.161**	**4.725.648.142.512**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	789.151.360.271	740.057.738.985
Penambahan/ *Additions*	518.469.219.074	49.093.621.286
Pemulihan/ *Recovery*	(63.790.566.864)	--
Saldo akhir/ *Ending balance*	**1.243.830.012.481**	**789.151.360.271**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto pada pemberi kerja di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible gross receivables from project owner in the future.

12. Pekerjaan Dalam Proses / *12. Work In Progress*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Pupuk Iskandar Muda	519.248.341.439	519.248.341.439
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	2.195.640.000
Jumlah Pekerjaan dalam Proses - Kotor/ *Total Work in Progress - Gross*	519.248.341.439	521.443.981.439
Dikurangi/ *Less*:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	(92.930.882.412)	(21.546.776.696)
Jumlah Pekerjaan dalam Proses - Bersih/ *Total Work in Progress - Net*	**426.317.459.027**	**499.897.204.743**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	21.546.776.696	21.546.776.696
Penambahan/ *Additions*	71.384.105.716	--
Saldo akhir/ *Ending balance*	**92.930.882.412**	**21.546.776.696**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pekerjaan dalam proses adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible in the future.

13. Piutang Lain-Lain / *13. Other Receivables*

	2025	2024
Jangka Pendek/ *Short-Term*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	40.000.000.000	--
PT Jababeka PP Properti	25.055.477.528	--
PT Sentul PP Properti	19.970.767.998	19.970.767.998
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	12.814.182.300	49.915.499.759
PT Prima Multi Terminal	11.548.457.094	11.547.201.000
PT Indonesia Ferry Property	7.244.134.267	7.223.045.307
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.575.561.680	--
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	6.103.808.917	5.699.659.948
KSO - Perkasa Abadi	7.628.197.438	--
KSO - Grand Soho	6.476.438.643	--
Lain-lain di bawah Rp 5 milyar/ *Others below Rp 5 billion*	120.317.001.302	17.593.515.363
Sub-jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total Related Parties*	263.734.027.167	111.949.689.375

	2025	2024
Cadangan kerugian penurunan nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for impairment losses*	(213.353.709.765)	(18.134.044.030)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	50.380.317.402	93.815.645.345
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	52.853.631.303	144.296.437.528
Jumlah Piutang Lain-lain Jangka Pendek - Bersih/ *Total Short Term Other Receivable - Net*	**103.233.948.705**	**238.112.082.873**
Jangka Panjang/ *Long-term*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Muba Daya Pratama	271.033.406.309	263.382.990.411
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	128.129.656.876	--
KSO Surya Mina Asinusa	59.109.798.491	53.306.001.867
Lain-lain di bawah Rp 5 milyar/ *Other below Rp 5 billion*	30.502.103.403	48.919.500.049
Jumlah Pihak Berelasi/ *Total Related Parties*	488.774.965.079	365.608.492.327
Dikurangi:/ *Less:*		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(217.157.813.353)	(188.679.373.112)
Sub Jumlah Pihak Berelasi/ *Sub Total Related Parties*	271.617.151.726	176.929.119.215
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	76.007.442.300	80.673.915.887
Jumlah Jangka Panjang - Bersih / *Total Long-term - Net*	**347.624.594.026**	**257.603.035.102**

Pada tahun 2025, uang muka (Catatan 15) telah direklasifikasi ke piutang lain-lain yang berasal dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp168.129.656.876 yang merupakan nilai yang dapat terpulihkan atas properti milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Konsorsium Karya yang terbentuk berdasarkan perjanjian Konsorsium tanggal 4 Oktober 2018 dengan No. 031-2/2018/077. Berdasarkan Akta No. 166 tentang Perjanjian Pelepasan Tanda Minat tanggal 31 Juli 2025, Akta No. 167 tentang Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat tanggal 31 Juli 2025, dan Akta No. 168 tentang Pernyataan dan Kesanggupan tanggal 31 Juli 2025, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk melakukan penyelesaian berupa pemberian/penyerahan atas tanda minat Konsorsium Karya dalam waktu 7 (tujuh) tahun secara bertahap.

As of 2025, advances (Note 15) has been reclassed to other receivable from PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) amounting to Rp168,129,656,876 which represents the recoverable value of property owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through the Karya Consortium which was formed based on the Consortium agreement dated October 4,2018 No. 031-2/2018/077. Based on Deed No. 166 concerning the Agreement for the Release of Interests dated July 31, 2025, Deed No. 167 concerning the Agreement for the Settlement of Interests dated July 31, 2025, and Deed No. 168 concerning the Statement and Undertaking dated July 31, 2025,PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) has an obligation to make a settlement in the form of granting/handing over the interest of the Karya Consortium within 7 (seven) years in stages.

Piutang lain-lain dari PT Jababeka PP Properti, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, dan PT Sentul PP Properti merupakan biaya-biaya atas entitas asosiasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup dan akan ditagihkan kepada entitas asosiasi. Piutang lain-lain dari manajemen gedung merupakan pendanaan awal Grup kepada manajemen gedung untuk menjalankan kegiatan operasi manajemen gedung apartemen yang di jual oleh Grup.

Other receivables from PT Jababeka PP Properti and PT Sentul PP Properti represent expenses from associates which are paid in advance by the Group and will be billed to associates. Other receivable from building management represents the Group's initial funding to building management to carry out operational activities for the management of apartment buildings sold by the Group.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement in the allowance for impairment losses:

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal/ *Beginning balance*	206.813.417.142	137.602.868.667
Penambahan/ *Additions*	223.698.105.976	69.210.548.475
Saldo akhir/ *Ending balance*	**430.511.523.118**	**206.813.417.142**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan piutang lain-lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is sufficient to cover the possibility of uncollectible other receivables in the future.

14. Persediaan / *14. Inventories*

	2025	2024*)	
Persediaan Bahan Baku			*Raw Materials*
Persediaan Bahan Untuk Konstruksi	284.820.382.560	280.733.223.138	*Construction materials*
Solar	8.516.839.775	7.042.192.342	*Diesel Fuel*
Bahan Kimia	344.662.750	500.401.504	*Chemicals*
Persediaan Suku Cadang			*Inventory of Spareparts*
Peralatan Produksi	73.804.698.494	77.145.116.425	*Production Equipment*
Persediaan Barang Dagang	333.552.259	281.604.549	*Merchandise Inventory*
Persediaan Properti			*Inventory of Property*
Persediaan Bahan untuk Hotel	5.011.727.631	4.918.644.805	*Inventory of Materials for Hotel*
Persediaan Realti			*Inventory of Real Estate*
Tanah yang akan dijual	3.380.251.091.679	--	*Land intended for sale*
Bangunan dalam Konstruksi	753.536.015.643	3.507.677.686.950	*Building Under Construction*
Tanah sedang Dikembangkan	314.329.291.462	3.554.909.049.714	*Land under Development*
Bangunan dan Rumah Jadi	2.771.076.963.856	2.088.272.550.189	*Ready House and Buildings*
Tanah akan Dikembangkan	1.368.693.134.465	3.525.984.411.476	*Land for Development*
Sub Jumlah	8.960.718.360.574	13.047.464.881.092	*Sub Total*
Dikurangi:			
Persediaan Tidak Lancar			*Sub-total less non-current inventories*
Tanah akan Dikembangkan	1.368.693.134.465	3.525.984.411.476	*Land for Development*
Sub Jumlah	7.592.025.226.109	9.521.480.469.616	*Sub Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91.349.503.757)	--	*Allowance for Impairment Losses*
Persediaan - Bersih	**7.500.675.722.352**	**9.521.480.469.616**	***Inventory - Net***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Mutasi persediaan realti adalah sebagai berikut:

The movement of Inventory of Real Estate are as follows:

	2025 Rp	2024*) Rp	
Saldo awal	12.676.843.698.329	12.714.308.599.307	***Beginning balance***
Kapitalisasi biaya	276.828.887.777	560.412.816.675	*Capitalisation of cost*
Penambahan persediaan dari penyelesaian piutang usaha	551.181.916.496	--	*Addition of inventories due to settlement of trade receivable*
Dikurangi:			*Less:*
Kerugian penurunan nilai (Catatan 48)	(4.591.960.997.239)	(72.191.346.595)	*Loss on impairment (Note 48)*
Beban pokok penjualan penjualan apartemen (Catatan 46)	(1.137.240.922.932)	(229.733.857.123)	*Cots of Good Sold of apartement (Note 46)*
Beban pokok penjualan penjualan rumah (Catatan 46)	(24.307.629.786)	(32.173.587.626)	*Cots of Good Sold of residential (Note 46)*
Reklasifikasi (ke) - properti investasi (Catatan 22)	(205.144.547.732)	200.509.932.649	*Reclassification (to) - investment property (Note 22)*
Reklasifikasi dari - aset tetap (Catatan 21)	125.564.518.808	--	*Reclassification from - property and equipement (Note 21)*
Reklasifikasi dari (ke) - tanah akan dikembangkan	916.121.573.384	(464.288.858.958)	*Reclassification from (to) - land for development*
Saldo akhir	**8.587.886.497.105**	**12.676.843.698.329**	***Ending balance***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Pada periode 2025, sehubungan dengan perjanjian Homologasi, PPRO telah melakukan perubahan *master plan* pengembangan proyek yang berdampak signifikan pada tujuan pengadaan proyek awal.

In the 2025 period, in connection with the Homologation agreement, PPRO has made changes to its project development master plan which has a significant impact on the initial project procurement objectives.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persediaan yang direklasifikasi ke properti investasi berupa tanah dan bangunan sebesar Rp167.102.962.780 (Catatan 22).

As of December 31, 2025, inventories reclassified to investment properties in the form of land and buildings amounted to Rp167,102,962,780 (Note 22).

Rincian tanah yang akan dijual sehubungan dengan perubahan *master plan* adalah sebagai berikut:

The details of the land intended for sale in connection with the changes to the master plan are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	Lokasi/ *Location*
Grand Kamala Lagoon	1.280.368.377.299	--	*Bekasi, Jawa Barat/ West Java*
Transyogi	510.730.091.971	--	*Depok, Jawa Barat/ West Java*
Grand Dharmahusada Lagoon	486.974.640.033	--	*Surabaya, Jawa Timur/ East Java*
Grand Shamaya	480.708.406.811	--	*Surabaya, Jawa Timur/ East Java*
Amartha View	240.246.052.598	--	*Semarang, Jawa Tengah/ Central Java*
The Paxton Apartment	101.314.657.501	--	*Surabaya, Jawa Timur/ East Java*
Ma-Zhoji Apartment	78.211.367.716	--	*Depok, Jawa Barat/ West Java*
Banyumanik Semarang	65.484.700.000	--	*Semarang, Jawa Tengah/ Central Java*
Yogyakarta	52.906.710.000	--	*Sleman, Yogyakarta*
Tanjung Barat	36.700.801.935	--	*Jakarta Selatan, DKI Jakarta*
Puri Lembana	26.947.682.494	--	*Bandung, Jawa Barat/ West Java*
Kapas Krampung	19.551.000.000	--	*Surabaya, Jawa Timur/ East Java*
Padang Pariaman	106.603.321	--	*Padang, Sumatra Barat/ West Java*
Jumlah	**3.380.251.091.679**	**--**	***Total***

Rincian tanah yang akan dijual pada tanggal 31 Desember 2025 beserta luas dan lokasi adalah sebagai berikut:

The details of the land intended for sale as of December 31, 2025, including the area and location, are as follows:

Uraian/ *Description*	Lokasi/ *Location*	2025 Luas/ *Area* (m^2/*sqm*)
Grand Kamala Lagoon	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	153.059
Transyogi	Depok, Jawa Barat/ West Java	203.011
Grand Dharmahusada Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	34.270
Grand Shamaya	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	16.759
Amartha View	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	149.809
The Paxton Apartment	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	19.250
Ma-Zhoji Apartment	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	4.653
Banyumanik Semarang	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	6.751
Yogyakarta	Sleman, *Yogyakarta*	9.425
Tanjung Barat	Jakarta Selatan, *DKI Jakarta*	15.968
Puri Lembana	Bandung, Jawa Barat/ *West Java*	8.462
Kapas Krampung	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	4.495
Padang Pariaman	Padang, Sumatra Barat/ *West Java*	3.555
Jumlah/*Total*		**629.467**

Bangunan dan rumah jadi terdiri dari: *Buildings and ready houses consists of:*

Uraian/ *Description*	Lokasi/ *Location*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*)*
Westown View	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	372.027.407.970	397.164.267.599
Forestwalk Sudimara	Tangerang, Banten	341.199.700.000	-
Kondotel - PT Hasta Kreasi Mandiri	Balikpapan, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	337.370.000.000	388.673.100.000
Apartemen Evenciio	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	244.095.146.424	256.992.613.418
Urbantown Serpong	Tangerang, Banten	229.658.227.687	86.278.953.148
Kondotel - PT Pekanbaru Permai Properti	Pekanbaru, Riau	199.467.790.352	199.919.213.426
Apartemen Gunung Putri Square	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	199.092.755.689	17.600.648.054
Louvin Apartment	Sumedang, Jawa Barat/ *West Java*	152.856.490.125	179.177.984.094
Apartemen Grand Kamala Lagoon	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	109.971.391.358	82.333.537.543
The Ayoma Apartment	Tangerang, Banten	84.828.377.785	85.387.853.175
Tanah Sentul	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	72.000.000.000	-
Apartemen Sudimara	Tangerang, Banten	70.203.916.443	-
Urbantown Sudimara	Tangerang, Banten	50.289.452.961	29.929.666.370
Urbantown Karawang	Karawang, Jawa Barat	46.655.740.547	50.057.205.229
The Alton Apartment	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	45.125.556.910	53.679.836.625
The Kencana Tower	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	38.880.000.000	38.880.000.000
Apartemen Pavilion Permata II	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	37.989.097.282	39.160.058.628
Apartemen Grand Sungkono Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	26.300.842.711	20.788.481.510
The Groove Tower	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	24.340.623.000	32.296.900.000
Begawan Apartment	Malang, Jawa Timur/ *East Java*	23.205.564.056	46.633.997.447
Grand Dharmahusada Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	22.032.050.644	31.551.169.104
Gudang Jl Raya Pekanbaru Bengkinang	Pekanbaru, Riau	15.448.000.000	15.448.000.000
Mall Serang	Serang, Banten	10.912.236.720	10.912.236.720
Lexington Residence	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	8.442.900.000	12.589.500.000
Bintaro Icon	Tangerang, Banten	4.481.420.000	4.922.630.000
Rumah di Bogor	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	1.549.837.734	1.549.837.734
Kebayoran Icon	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.402.200.000	3.505.500.000
Apartemen Pavilion Permata I	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	1.250.237.458	2.839.360.365
Jumlah/ Total		**2.771.076.963.856**	**2.088.272.550.189**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Tanah yang sedang dikembangkan terdiri dari: *Land under development consists of:*

Uraian/ *Description*	Lokasi/ *Location*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*)*
Urbantown Sudimara	Sudimara, Banten	89.456.419.414	--
Permata Puri Cibubur	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	46.993.302.096	54.232.946.268
Little Tokyo	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	44.880.255.225	44.880.255.225
Grand Sagara	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	36.493.459.713	36.493.459.713
Westown View	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	32.864.620.267	32.864.620.267
Green Park Terrace	Cilegon, Banten	21.335.736.002	25.608.358.323
Tana Babarsari	Sleman, Yogyakarta	16.212.032.137	78.687.751.171
The Alton Apartment	Semarang, Jawa Tengah/ Central Java	11.412.658.630	8.932.461.915
Begawan Apartment	Malang, Jawa Timur/ *East Java*	3.989.040.759	4.620.602.983
Amartha View	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	3.820.329.967	13.735.128.326
Grand Anila	Kertajati, Jawa Barat/ *West Java*	3.444.385.185	3.444.385.185
Grand Kamala Lagoon	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	3.427.052.067	1.302.351.837.778
Grand Dharmahusada Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	1.226.144.722.137
Grand Shamaya	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	466.795.568.122
The Paxton Apartment	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	113.670.684.284
Ma-Zhoji Apartment	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	--	78.211.367.716
Urbantown Karawang	Karawang, Jawa Barat/ West Java	--	36.149.596.656
Gunung Putri Square	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	--	1.221.667.281
The Ayoma Apartment	Tangerang, Jawa Barat/ *West Java*	--	26.863.636.364
Jumlah/ *Total*		**314.329.291.462**	**3.554.909.049.714**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Rincian tanah yang sedang dikembangkan berdasarkan luasan terdiri dari:

Land under development along with area and location are as follows:

Uraian/ *Description*	Lokasi/ *Location*	2025 Luas/ *Area* (m^2/*sqm*)	2024 Luas/ *Area* (m^2/*sqm*)
Permata Puri Cibubur	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	8.676	11.078
Urbantown Sudimara	Sudimara, Banten	7.254	7.254
Little Tokyo	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	6.293	6.293
Grand Sagara	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	4.336	4.336
Westown View	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	6.235	6.235
Green Park Terrace	Cilegon, *Banten*	5.388	5.388
Tana Babarsari	Sleman, *Yogyakarta*	2.091	2.091
The Alton Apartment	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	1.575	1.575
Begawan Apartment	Malang, Jawa Timur/ *East Java*	1.414	1.414
Amartha View	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	4.421	4.421
Grand Anila	Kertajati, Jawa Barat/ *West Java*	25.720	25.720
Grand Kamala Lagoon	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	5.395	270.702
Grand Dharmahusada Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	36.795
Grand Shamaya	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	9.986
The Paxton Apartment	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	4.813
Urbantown Karawang	Karawang, Jawa Barat/ *West Java*	--	3.877
Ma-Zhoji Apartment	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	--	4.653
The Ayoma Apartment	Tangerang Selatan/ *South Tangerang*	--	3.127
Gunung Putri Square	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	--	1.664
Jumlah/*Total*		**78.798**	**411.422**

Bangunan dalam konstruksi:

Building under construction:

Uraian/ *Description*	Lokasi/ *Location*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*)*
The Alton Apartment	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	126.152.414.947	129.387.866.975
Urbantown Karawang	Karawang, Jawa Barat/ *West Java*	122.233.454.564	171.445.742.158
Westownview Apartement	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	92.189.004.966	90.490.971.800
Little Tokyo	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	81.971.489.355	82.097.964.839
Green Park Terrace	Cilegon, Banten	51.468.120.841	51.441.718.298
Grand Sagara	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	48.284.398.915	48.284.398.915
Grand Kamala Lagoon	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	47.036.351.240	719.964.510.057
Urbantown Sudimara	Sudimara, Banten	45.225.528.052	208.875.004.566
Grand Anila	Kertajati, Jawa Barat/ *West Java*	34.360.769.281	34.360.769.281
Payon Amartha	Sumedang, Jawa Barat/ *West Java*	28.104.184.793	27.309.755.020
Tana Babarsari	Sleman, Yogyakarta	27.307.201.633	27.326.421.633
Permata Puri Cibubur	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	25.265.264.910	33.132.534.670
Amartha View	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	15.951.180.033	57.690.523.637
Apartemen Sinduadi	Sleman, Yogyakarta	4.281.968.277	14.278.550.949
Begawan Apartmen	Malang, Jawa Timur/ *East Java*	3.655.791.394	64.605.419.408
Bukit Permata Puri I	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*	48.892.442	--
The Ayoma Apartment	Tangerang Selatan/ South Tangerang	--	346.822.464.422
Grand Shamaya	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	816.592.159.420
Grand Dharmahusada Lagoon	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*	--	374.240.749.427
Ma-Zhoji Apartment	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	--	100.847.098.802
Gunung Putri Square	Bogor, Jawa Barat/ *West Java*	--	66.237.407.184
Transyogi	Depok, Jawa Barat/ *West Java*	--	26.580.924.168
Puri Lembana	Bandung, Jawa Barat/ *West Java*	--	15.664.731.321
Jumlah/ *Total*		**753.536.015.643**	**3.507.677.686.950**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Tanah yang akan dikembangkan: *Land for development:*

Uraian/ Description	Lokasi/ Location	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ *December 31, 2024*)*
Grand Sagara	Surabaya, Jawa Timur/ East Java	491.931.922.028	491.931.922.028
Grand Anila	Kertajati, Jawa Barat/ West Java	324.317.527.017	324.094.407.033
Little Tokyo	Bekasi, Jawa Barat/ West Java	253.717.602.037	253.717.602.037
Westown View	Surabaya, Jawa Timur/ East Java	138.715.855.511	138.697.105.511
Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	56.702.286.574	182.677.165.000
Tana Babarsari	Sleman, Yogyakarta	45.837.666.230	45.837.666.230
Begawan Apartment	Malang, Jawa Timur/ East Java	34.100.672.586	89.126.955.728
Louvin Apartment	Sumedang, Jawa Barat/ West Java	23.369.602.482	131.180.654.090
Transyogi	Depok, Jawa Barat/ West Java	--	932.746.299.796
Amartha View	Semarang, Jawa Tengah/ Central Java	--	708.260.867
Grand Shamaya	Surabaya, Jawa Timur/ East Java	--	432.004.055.132
Banyumanik Semarang	Semarang, Jawa Tengah/ Central Java	--	78.358.986.855
Yogyakarta	Sleman, Yogyakarta	--	126.409.842.257
Tanjung Barat	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	--	45.075.955.309
Puri Lembana (Rancasari Bandung)	Bandung, Jawa Barat/ West Java	--	38.948.486.950
Kapas Krampung	Surabaya, Jawa Timur/ East Java	--	--
The Paxton Apartment	Surabaya, Jawa Timur/ East Java	--	63.995.993.136
Padang Pariaman	Padang, Sumatra Barat/ *West Java*	--	106.603.322
Urbantown Sudimara	Sudimara, Banten/ *Banten*	--	150.366.450.195
Jumlah/ Total		**1.368.693.134.465**	**3.525.984.411.476**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Rincian tanah akan dikembangkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta luas dan lokasi adalah sebagai berikut:

Details of the land for development as of December 31, 2025 and 2024 along with area and location are as follows:

	2025 Luas/ Area (m^2/ *sqm*)	2024 Luas/ Area (m^2/ *sqm*)	Lokasi/ *Location*
Grand Sagara	52.419	52.419	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*
Grand Anila	1.308.504	1.308.504	Kertajati, Jawa Barat/ *West Java*
Urbantown Sudimara	7.254	7.254	Sudimara, Banten
Little Tokyo	39.716	39.716	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*
Pekanbaru	21.429	21.429	Pekanbaru, Riau
Begawan Apartment	15.114	15.114	Malang, Jawa Timur/ *East Java*
Westown View	9.704	9.704	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*
Louvin Apartment	3.315	3.315	*Sumedang, Jawa Barat/ West Java*
Tana Babarsari	5.929	5.929	Sleman, Yogyakarta
Transyogi	--	202.491	Depok, Jawa Barat/ *West Java*
Grand Shamaya	--	6.773	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*
Tanjung Barat	--	18.647	Jakarta Selatan, *DKI Jakarta*
Banyumanik Semarang	--	6.751	Semarang, Jawa Tengah/ *Central Java*
Yogyakarta	--	9.425	Sleman, Yogyakarta
The Paxton Apartment	--	14.437	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*
Kapas Krampung	--	4.495	Surabaya, Jawa Timur/ *East Java*
Puri Lembana (Rancasari Bandung)	--	8.462	Bandung, Jawa Barat/ *West Java*
Amartha View	--	4.421	*Semarang, Jawa Tengah/ Central Java*
Padang Pariaman	--	3.555	Padang, Sumatra Barat/ *West Java*
Jumlah	**1.463.384**	**1.742.841**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	2025	2024	
Penambahan	91.349.503.757	--	*Additions*
Saldo akhir	**91.349.503.757**	**--**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup.

Management believes that allowance for impairment lossess on other receivables is sufficient.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah mengasuransikan sebagian persediaan yang dimiliki kepada Perusahaan Asuransi pihak ketiga yaitu PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Binagriya Upakara, KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Arcadia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Binagriya Upakara dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp4.279.209.909.225.

As of December 31, 2025, the Group has insured some of its inventories with third party insurance companies, namely PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Binagriya Upakara, KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Arcadia, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Binagriya Upakara with a total coverage value of Rp4,279,209,909,225.

Asuransi di atas merupakan asuransi atas *Property All Risk* (PAR). Perusahaan berkeyakinan bahwa asuransi tersebut cukup untuk menanggung risiko kerugian di masa depan. Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup.

The insurance above is insurance for Property All Risk (PAR). The Company believes that the insurance is sufficient to cover the risk of future losses. The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. The management believes that allowance for impairment losses is adequate.

Beberapa persediaan digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 39).

Certain inventories are used as collateral for bank loans (Note 39).

15. Uang Muka / *15. Advances*

	2025	2024	
Uang Muka Pemasok	53.640.471.207	65.605.028.605	*Advances to Suppliers*
Uang Muka Dinas	12.435.076.326	15.514.903.959	*Advances for Business Travel*
Uang Muka Sub-Kontraktor	3.333.642.329	14.535.728.804	*Advances to Sub-Contractors*
Uang Muka Investasi	1.305.191.476	173.460.060.583	*Advances to Investment*
Jumlah	**70.714.381.338**	**269.115.721.951**	***Total***

Uang muka investasi sebesar Rp280.000.000.000 merupakan pembayaran tanda minat atas properti milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Konsorsium 5 BUMN Karya yang terbentuk berdasarkan perjanjian Konsorsium tanggal 4 Oktober 2018 dengan No. 031-2/2018/077. Berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama No. 87 tanggal 15 Maret

The investment advance of Rp280,000,000,000 represents the payment for the expression of interest in the property owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through a Consortium of 5 BUMN Karya, which was established based on the Consortium Agreement dated October 4, 2018, No. 031-2/2018/077. Based on Deed of Joint

2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang menyebutkan bahwa perjanjian penyelesaian tanda minat tersebut masih dalam proses penyusunan antara Konsorsium 5 BUMN Karya dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – ("BPUI"). Nilai terpulihkan pada 31 Desember 2024 atas uang muka investasi tersebut sebesar Rp173.460.060.583. Manajemen memiliki keyakinan bahwa penurunan nilai yang dibentuk cukup berdasarkan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan untuk menutup kemungkinan keterpulihan di kemudian hari.

Agreement No. 87 dated March 15, 2024, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, a Notary in South Jakarta, which stated that the settlement agreement for the expression of interest is still in the drafting process between the Consortium 5 BUMN Karya and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – "(BPUI"). Recoverable amount as of December 31, 2024 for the investment advance amounting to Rp173,460,060,583. Management believes that the impairment reserve is sufficient based on the best estimate at the reporting date to cover the possibility of non-recovery in the future.

Pada tahun 2025, uang muka investasi telah direklasifikasi ke piutang lain-lain dari BPUI (Catatan 13).

In 2025, investment advances have been reclassified to other receivables from BPUI (Note 13).

Uang muka subkontraktor dan uang muka pemasok diberikan kepada subkontraktor, pemasok, dan mandor yang merupakan pihak ketiga dan bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Grup. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan tagihan yang dibayarkan.

Advances for subcontractors and advances for suppliers are given to subcontractors, suppliers, and foremen who are third parties and work on projects implemented by the Group. The advance payment will be calculated with the bill paid.

Uang muka pemasok adalah uang muka yang dibayarkan kepada pemasok sebanyak persentase yang disesuaikan dengan kontrak yang berlaku, dan dibayarkan sebelum mengirimkan barang.

Advances to suppliers is an advance payment paid to the supplier in the percentage adjusted to the applicable contract, and paid before sending the goods.

16. Perpajakan / *16. Taxation*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	2025	2024	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	116.025.111.672	459.273.677.140	*Value Added Tax (VAT)*
Pajak Penghasilan (PPh):			*Income Tax (Tax Article):*
PPh Pasal 4 (2) (Final)	149.308.217.822	164.802.992.755	*Income Tax Article 4 (2) (Final)*
PPh Pasal 28A	4.757.797.500	10.075.570.023	*Income Tax Article 28A*
Jumlah	**270.091.126.994**	**634.152.239.918**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2025	2024	
Pajak Penghasilan			*Income Taxes*
Pasal 29	47.522.416.294	87.284.394.511	*Article 29*
Pasal 4(2)	76.120.984.382	69.088.145.399	*Article 4(2)*
Pasal 21	34.181.165.827	26.905.326.210	*Article 21*
Pasal 23	15.125.844.547	11.122.680.253	*Article 23*
Pasal 22	5.616.939.052	10.949.251.558	*Article 22*
Pasal 15	788.754.507	945.871.562	*Article 15*
Pasal 25	177.304.683	174.391.577	*Article 25*
Pasal 26	57.048.649	40.000.000	*Article 26*
Pajak Penghasilan Final	593.250.668.014	599.316.663.529	*Final Income Tax*
Pajak Pembangunan (PB 1)	3.698.414.563	1.314.821.797	*Development Tax (PB 1)*
Pajak Bumi dan Bangunan	3.384.249.458	3.145.110.261	*Land and Building Tax*
Jumlah	**779.923.789.976**	**810.286.656.657**	***Total***

c. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan

c. Income Taxes
Income tax

	2025	2024	
Beban Pajak Kini	16.541.112.475	85.496.020.740	*Current Tax*
Beban Pajak Tangguhan	255.622.632.307	32.781.827.591	*Deferred Tax Expense*
Jumlah	**272.163.744.782**	**118.277.848.331**	***Total***

Pajak kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current tax
Reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2025	2024	
(Rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(7.727.009.022.634)	(1.666.685.313.172)	*Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi: rugi sebelum pajak - entitas anak	(5.979.596.228.665)	(856.383.689.507)	*Less: profit before tax of subsidiaries*
(Rugi)/laba perusahaan sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	(1.747.412.793.969)	(810.301.623.665)	*Profit before tax - the Company*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Non-deductible expenses (non-taxable income):*
Penghasilan kena pajak final	(11.332.576.902.520)	(16.074.355.319.351)	*Income subject to final tax*
Beban atas penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	13.079.989.696.489	16.884.656.943.016	*Expenses on income subject to final tax*
Penghasilan Kena Pajak	--	--	*Income tax*
Beban pajak kini tidak final			*Current tax expense non-final:*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	16.541.112.475	85.496.020.740	*Subsidiaries*
Jumlah	**16.541.112.475**	**85.496.020.740**	***Total***

Jumlah laba fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah berdasarkan perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin akan disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan ke otoritas pajak atau adanya pemeriksaan dari otoritas pajak. Jika ada perbedaan antara laba kena pajak yang diakui sebelumnya dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT dicatat sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan diakui pada tahun berjalan saat SPT dilaporkan.

The amount of taxable profit for the years ended December 31, 2025 is based on preliminary calculations. The amount may be adjusted when Annual Tax Returns are reported to the tax authorities or there is inspection by the tax authorities. If there is a difference between the taxable income previously recognized with the amounts reported in the annual tax return is recorded as an adjustment to the previous year and recognized in the current year when annual tax return reported.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

	2024 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/*Credited (Charged) to Profit or Loss* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited (Charged to) Other Comprehensive income* Rp	Penyesuaian/ *Adjustment* Rp	2025 Rp	
Entitas Anak						***Subsidiaries***
PT PP Semarang Demak	(32.781.827.591)	(256.283.349.451)	--	--	(289.065.177.042)	*PT PP Semarang Demak*
PT PP Infrastruktur	2.051.887.698	660.717.144	(184.111.424)	--	2.528.493.418	*PT PP Infrastruktur*
Subjumlah	(30.729.939.893)	(255.622.632.307)	--	--	(286.536.683.624)	*Subtotal*
Liabilitas Pajak Tangguhan	32.781.827.591				289.065.177.042	***Deferred Tax Liability***
Aset Pajak Tangguhan	(2.051.887.698)				(2.528.493.418)	***Deferred Tax Asset***
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	**30.729.939.893**				**286.536.683.624**	***Consolidated Deferred Tax Liability***

	2023 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/*Credited (Charged) to Profit or Loss* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited (Charged to) Other Comprehensive income* Rp	Penyesuaian/ *Adjustment* Rp	2024 Rp	
Entitas Anak						***Subsidiaries***
PT PP Semarang Demak	--	(8.957.639.256)	--	(23.824.188.335)	(32.781.827.591)	*PT PP Semarang Demak*
PT PP Infrastruktur	1.042.330.365	999.492.639	10.064.694	--	2.051.887.698	*PT PP Infrastruktur*
Subjumlah	1.042.330.365	(7.958.146.617)	--	--	(30.729.939.893)	*Subtotal*
Liabilitas Pajak Tangguhan	--				32.781.827.591	***Deferred Tax Liability***
Aset Pajak Tangguhan	(1.042.330.365)				(2.051.887.698)	***Deferred Tax Asset***
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	**(1.042.330.365)**				**30.729.939.893**	***Consolidated Deferred Tax Liability***

e. Pajak Final

e. Final Tax

	2025	2024	
Perusahaan	301.244.597.566	458.876.059.558	*The Company*
Entitas Anak	116.378.280.849	124.479.361.444	*Subsidiaries*
Jumlah	**417.622.878.415**	**583.355.421.002**	***Total***

f. Administrasi Pajak

Pada tahun 2025, Perusahaan dan entitas anak belum menerima Surat Ketetapan Pajak.

f. Tax Administration

In 2025, the Company and subsidiaries have not yet received Tax Assessment Letters.

17. Biaya Dibayar Dimuka / *17. Prepaid Expenses*

	2025	2024	
Biaya Pemasaran	23.396.324.970	35.254.905.603	*Marketing Expense*
Biaya Tidak Langsung Proyek	12.811.267.784	157.348.784.730	*Project Indirect Expense*
Biaya Asuransi	18.718.917.960	33.688.144.438	*Insurance Expense*
Biaya Provisi	6.025.418.048	8.240.669.279	*Provision Expense*
Jumlah	**60.951.928.762**	**234.532.504.050**	***Total***

Biaya tidak langsung proyek merupakan biaya yang dikeluarkan Perusahaan pada saat awal pelaksanaan proyek dimana nantinya biaya ini akan menjadi bagian dari biaya produksi proyek. Meliputi biaya tidak langsung, biaya alat dibayar dimuka, biaya upah dibayar dimuka, dan biaya pengembangan.

Biaya pemasaran terdiri dari biaya dikeluarkan selama proses tender dengan tujuan untuk mendapatkan proyek. Biaya asuransi adalah biaya yang diperuntukan untuk pembayaran asuransi baik untuk proyek yang masih dalam penyelesaian maupun terkait premi asuransi alat berat, bangunan, dan aset tetap lainnya serta di amortisasi selama pelaksanaan proyek.

Project Indirect Expense are costs incurred by the company at the beginning of project implementation, whereas these costs will become part of the project production costs. These costs include indirect costs, prepaid equipment costs, prepaid wages, and development cost.

Marketing expense consist of costs incurred during the tender process with the aim of obtaining the project. Insurance expenses are costs intended for insurance payments for projects that are still being completed and related to insurance premiums for heavy equipment, buildings, and other fixed assets, and are amortized throughout project implementation.

18. Sewa Dibayar Dimuka / *18. Prepaid Lease*

	2025	2024	
Sewa	273.245.572.659	273.245.572.659	*Rent*
Dikurangi:			*Less:*
Amortisasi	(66.034.346.729)	(38.709.789.461)	*Amortization*
Jumlah	**207.211.225.930**	**234.535.783.198**	***Total***

Akun ini merupakan transaksi pembiayaan dengan akad No.03/044/CB2-FOG/VII/ 2023/IMBT berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Perusahaan.

This account represents financing transaction with contract No. 03/044/CB2-FOG/VII/ 2023/IMBT based on the Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) principle between PT Bank Syariah Indonesia Tbk and the Company.

19. Investasi Pada Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dan Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama / *19. Investment In Associates And Joint Ventures and Accumulated Equity in Net Losses of Joint Ventures*

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investment in associates*

Nama entitas asosiasi/ *Name of associates*	Bidang Usaha/ *Type of Business*	Persentase Kepemilikan (%)/ *Percentage Ownership (%)*	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Periode/ *Carrying Value at Beginning of Period*	2025 Perubahan Selama Setahun/*Changes in a Year*: Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ *Additions (Deduction) of Investment*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Portion in Net Profit (Loss)*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Received*	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ *Portion in Other Comprehensive Income*	Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Periode/*Carrying Value at the end of Period*
PT Celebes Railways Indonesia	Jasa, konstruksi dan tranportasi/ *Service, construction and transportation*	47,81%	212.773.566.066	--	27.385.693.673	(8.856.350.849)	--	231.302.908.890
PT Indonesia Ferry Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	181.807.905.374	--	26.554.356.459	--	--	208.362.261.833
PT Sentul PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	47.744.126.238	--	(155.679.373)	--	--	47.588.446.865
PT Aryan PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	43.365.854.657	--	81.963.905	--	--	43.447.818.562
PT Solo Citra Metro Plasma Power	Pembangkit tenaga listrik/*Power plant*	40,00%	9.578.986.285	(8.157.374.126)	(1.421.612.159)	--	--	--
PT Jababeka PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	36,77%	23.176.853.856	--	1.558.907.731	--	--	24.735.761.587
PT Alam Inti Energi	Pembangkit tenaga listrik/ *Power plant*	49,00%	17.821.300.000	--	--	--	--	17.821.300.000
PT Perusahaan Ressort Indonesia Amerika	Penyedia akomodasi/ *Accomodation provider*	40,00%	10.960.053.986	--	(1.176.597)	--	--	10.958.877.389
PT Jasamarga Rest Area Batang	Real estate dan perdagangan/ *Real* estate and trading	5,30%	3.171.092.187	(3.171.092.187)	--	--	--	--
PT Air Batam Hulu	Sistem penyedia air minum/ *Water supply system*	40,00%	13.209.796.799	--	(8.887.248.852)	--	(537.630.344)	3.784.917.603
PT Air Batam Hilir	Sistem penyedia air minum/ *Water supply system*	40,00%	33.174.257.704	--	9.444.729.864	--	16.323.610	42.635.311.178
Jumlah/*Total*			596.783.793.152	(11.328.466.313)	54.559.934.651	(8.856.350.849)	(521.306.734)	630.637.603.907
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for impairment loss*			(17.821.300.000)	--	--	--	--	(17.821.300.000)
Jumlah/*Total*			**578.962.493.152**	**(11.328.466.313)**	**54.559.934.651**	**(8.856.350.849)**	**(521.306.734)**	**612.816.303.907**

Nama entitas asosiasi/ *Name of associates*	Bidang Usaha/ *Type of Business*	Persentase Kepemilikan (%)/ *Percentage Ownership (%)*	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Periode/ *Carrying Value at Beginning of Period*	2024 Perubahan Selama Setahun/*Changes in a Year*: Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ *Additions (Deduction) of Investment*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Portion in Net Profit (Loss)*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Received*	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ *Portion in Other Comprehensive Income*	Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Periode/*Carrying Value at the end of Period*
PT Celebes Railways Indonesia	Jasa, konstruksi dan tranportasi/ *Service, construction and transportation*	47,81%	181.280.687.673	--	39.013.950.340	(7.521.071.947)	--	212.773.566.066
PT Indonesia Ferry Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	169.811.963.537	(217.235)	11.996.159.072	--	--	181.807.905.374
PT Sentul PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	47.950.107.953	--	(205.981.715)	--	--	47.744.126.238

				2024 Perubahan Selama Setahun/*Changes in a Year*				
Nama entitas asosiasi/ *Name of associates*	Bidang Usaha/ *Type of Business*	Persentase Kepemilikan (%)/ *Percentage Ownership (%)*	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Periode/ *Carrying Value at Beginning of Period*	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ *Additions (Deduction) of Investment*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Portion in Net Profit (Loss)*	Penerimaan Dividen/ *Dividend Received*	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ *Portion in Other Comprehensive Income*	Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Periode/*Carrying Value at the end of Period*
PT Aryan PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	49,00%	43.891.425.979	--	(525.571.322)	--	--	43.365.854.657
PT Solo Citra Metro Plasma Power	Pembangkit tenaga listrik/ *Power plant*	40,00%	26.887.833.516	180.919	(17.309.028.150)	--	--	9.578.986.285
PT Jababeka PP Properti	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	36,77%	20.070.613.730	--	3.106.240.126	--	--	23.176.853.856
PT Teknik Rekayasa Kereta Kapsul	Jasa, konstruksi dan tranportasi/ *Service, construction and transportation*	40,00%	9.000.000.000	(9.000.000.000)	--	--	--	--
PT Alam Inti Energi	Pembangkit tenaga Listrik/ *Power plant*	49,00%	17.821.300.000	--	--	--	--	17.821.300.000
PT Hotel Karya Indonesia	Realti dan properti jasa/ *Realty and property realty*	10,56%	5.723.712.343	(5.723.712.343)	--	--	--	--
PT Perusahaan Ressort Indonesia Amerika	Penyedia akomodasi/ *Accomodation provider*	40,00%	10.962.877.811	--	(2.823.825)	--	--	10.960.053.986
PT Jasamarga Rest Area Batang	Real estate dan perdagangan/ *Real estate and trading*	27,00%	2.468.712.386	--	702.379.801	--	--	3.171.092.187
PT Air Batam Hulu	Sistem penyedia air minum/ *Water supply system*	40,00%	11.478.525.270	155.400.819	1.575.870.710	--	--	13.209.796.799
PT Air Batam Hilir	Sistem penyedia air minum/ *Water supply system*	40,00%	21.862.320.715	1.090.224.374	10.221.712.615	--	--	33.174.257.704
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Allowance for impairment loss*			(17.821.300.000)	--	--	--	--	(17.821.300.000)
Jumlah/*Total*			**551.388.780.913**	**(13.478.123.466)**	**48.572.907.652**	**(7.521.071.947)**	**--**	**578.962.493.152**

Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan entitas asosiasi yang material dan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan entitas asosiasi disusun sesuai dengan PSAK terkait.

The summary of financial information below represents material associates and the amounts presented in the financial statements of the associates are prepared in accordance with related PSAK.

Entitas Asosiasi/ *Associates*	Total Aset/ *Total Asset*	Total Liabilitas/ *Total Liabilities*	Total Pendapatan/ *Total Revenue*	Laba (Rugi) Neto/ *Net Income (Loss)*
2025				
Perusahaan/ *The Company*				
PT Celebes Railway Indonesia	930.081.076.183	440.762.542.597	187.424.924.494	58.742.401.511
PT Indonesia Ferry Property	1.127.716.797.723	728.943.581.598	336.429.641.051	25.279.177.292
Entitas Anak/ *Subsidiaries*				
PT Air Batam Hulu	51.026.119.030	41.942.001.694	230.452.642.162	(22.218.122.129)
PT Air Batam Hilir	158.590.038.489	39.168.140.177	159.868.011.693	23.611.824.661
PT Sentul PP Properti	170.032.053.342	72.894.373.339	--	(317.713.005)
PT Aryan PP Properti	101.689.046.952	13.017.429.376	29.947.872.053	167.409.746
PT Jababeka PP Properti	119.066.663.077	39.853.482.002	21.242.579.187	4.239.592.238
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika	41.953.431.723	14.538.589.332	--	(2.941.485)
PT Mikroland Payon Amartha	399.186.495.997	382.009.847.503	1.846.846.847	(2.283.615.309)
2024				
Perusahaan/ *The Company*				
PT Celebes Railway Indonesia	1.000.068.769.984	550.970.169.992	211.184.180.315	85.677.497.025
PT Indonesia Ferry Property	1.138.925.465.238	758.798.006.823	227.990.119.855	24.482.445.403
Entitas Anak/ Subsidiaries				
PT Air Batam Hulu	57.557.863.780	27.118.124.029	196.326.293.703	2.778.100.882
PT Air Batam Hilir	124.733.810.190	31.704.864.103	170.159.699.432	35.992.485.082
PT Sentul PP Properti	170.062.955.253	72.625.962.930	--	(420.370.846)
PT Aryan PP Properti	99.363.038.520	10.858.830.690	26.721.399.733	(1.145.130.903)
PT Jababeka PP Properti	108.827.772.738	33.854.183.899	56.893.561.599	8.447.756.662
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika	41.942.254.078	14.538.589.332	--	(3.529.782)
PT Mikroland Payon Amartha	396.649.239.620	377.182.475.817	3.736.789.516	(550.759.447)

Pada tahun 2025, terdapat reklasifikasi investasi pada entitas asosiasi SCMPP ke investasi jangka panjang lainnya (Catatan 20) berdasarkan akta No 19 tanggal 30 Desember 2025. Yang mana berdasarkan akta tersebut, kepemilikan grup terdilusi menjadi 0,04%.

In 2025, there was a reclassification of the investment in associate for SCMPP to other long-term investments (Note 20) based on Deed No. 19 dated 30 December 2025, whereby, in accordance with the deed, the Group's ownership interest was diluted to 0.04%.

b. Investasi pada ventura bersama
Mutasi investasi pada ventura bersama Perusahaan adalah sebagai berikut:

b. Investment in joint venture
The movements of investment in joint venture of the Company are as follows:

2025						
Nama Ventura Bersama/ ***Name of Joint Venture***	**Nama Proyek/** ***Name of Projects***	**Porsi Bagi Hasil** ***/ Portion of Shares*** **(%)**	**Nilai Tercatat Awal/** ***Carrying Value Beginning Balance*** **(Rp)**	**Bagian Laba (Rugi) Bersih/** ***Portion in Net Profit (Loss)*** **(Rp)**	**Setoran (Penarikan) Koreksi/** ***Payment (Withdraw) Correction*** **(Rp)**	**Nilai Tercatat Akhir Tahun/** ***Carrying Value Ending Balance*** **(Rp)**
Investasi pada Ventura Bersama/						
Investment in Joint Ventures						
PP-Wika-KMK	Coal Handling Facility, Rail Loop, Serta TLS 6 dan 7	50%	49.892.812.295	153.819.355.508	(55.000.000.000)	148.712.167.803
PP-Wika-NK-Adhi Karya	Jalan Tol IKN Seksi 1B	45%	1.665.039.239	62.125.160.369	(9.000.000.000)	54.790.199.608
PP-Modern-SBS	Jalan West Residence	60%	6.015.515.560	49.939.563.415	(18.918.857.940)	37.036.221.035
PP-Wika-HK-KMK	Japek 2 Selatan Paket 2A	25%	25.096.771.352	22.600.360.285	(16.092.301.318)	31.604.830.319
PP-ATM-SPS	PLTGU Batam 120MV	80%	--	30.393.042.744	--	30.393.042.744
PP-Wika	BIJB Paket 2 Kertajati	55%	29.567.064.423	--	--	29.567.064.423
PP-Brantas-Rangga	Bandara VVIP IKN Sisi Udara	60%	78.791.017.942	62.520.634.604	(112.361.349.476)	28.950.303.070
PP-Arkonin	Gedung IT Bank Mandiri Slipi	99%	26.305.354.016	--	--	26.305.354.016
PP-Wika	RS Harapan Kita Tokushukai	70%	987.495.079	30.922.750.159	(7.964.165.766)	23.946.079.472
PP-Adhi Karya	Bromo General Contractor Work	55%	--	24.701.661.892	(5.567.521.399)	19.134.140.493
PP-NK	Tol Bayung Lencir-Tempino 2	55%	35.319.394.665	--	(16.571.860.118)	18.747.534.547
PP-Shimizu-BCK	Jalan Patimban	20%	--	17.208.543.736	--	17.208.543.736
PP-Waskita-YPP	Jalan Seksi 6C-1 ITCI Sumbu Timur	50%	41.627.624.607	--	(25.000.000.000)	16.627.624.607
PP-Ashfri	Bendungan Manikin	85%	23.121.671.839	7.450.524.937	(14.800.000.000)	15.772.196.776
PP-Brantas-NK	Hunian Vertikal 4 Tower TNI IKN	45%	5.835.841.497	26.046.844.430	(17.726.125.140)	14.156.560.787
PP-Adhi Karya-Waskita-MWT	Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III	33%	2.110.389.988	26.221.823.590	(14.535.209.556)	13.797.004.022
PP-Waskita	Jalan Baru Kretek Girijati	48%	7.651.502.800	7.591.962.817	(1.947.500.000)	13.295.965.617
PP-Wika-Waskita-Jakon	Jalan Tol IKN Seksi 3B 2 Karianga	15%	14.762.537.917	712.635.575	(3.750.000.000)	11.725.173.492
PP-Ashfri	Bendungan Bener	60%	11.075.122.223	7.194.505.596	(6.578.760.221)	11.690.867.598
PP-HK	Peningkatan Jalan Paket F di KIPP 1B	45%	--	35.683.099.143	(24.750.000.000)	10.933.099.143
PP-Wika	BSN Banjarmasin	53%	10.001.895.670	--	--	10.001.895.670
PP-KR Industry	KSCS Paket 2	70%	--	9.959.801.006	--	9.959.801.006
PP-Waskita	Tol Probolinggo Banyuwangi	50%	3.590.661.959	111.000.417.768	(104.797.085.651)	9.793.994.076
PP-Brantas	Pembangunan PUPR Wing 2 IKN	65%	11.328.262.826	59.582.399.956	(61.878.577.904)	9.032.084.878
PP-Adhi Karya	LRT Filipina 03C	49%	6.701.177.059	6.119.486.686	--	12.820.663.745
PP-CRBC-Wika	Tol Semarang Demak 1B	20%	2.681.441.746	80.651.088.263	(74.572.211.269)	8.760.318.740
PP-Wika	Bank Mandiri PIK 2	40%	--	18.519.000.143	(10.341.506.216)	8.177.493.927
PP-Markinah	Gedung Parkir Jatibaru Lanjutan	70%	--	7.000.843.418	(847.805.187)	6.153.038.231
PP-Waskita-SMU	LOT 2 Bululawang Sidomulyo Tambakrejo	45%	5.087.389.155	11.765.902.172	(10.937.391.676)	5.915.899.651
PP-Seven Gates Indonesia	CAA Building Paket-1	50%	719.087.526	12.285.183.255	(7.355.692.103)	5.648.578.678
PP-Penta	RSUD Tarempa	98%	--	23.474.670.127	(18.353.206.957)	5.121.463.170
PP-Wika	Mandalika Paket 1	40%	10.442.905.445	10.436.225.093	(15.659.928.350)	5.219.202.188
PP-Mafri-DNT	Bendungan Cibeet Paket 2	58%	7.871.829.022	3.173.219.495	(5.960.000.000)	5.085.048.517
PP-Jatiwangi	Bendungan Bagong Paket III	75%	4.909.247.828	14.326.379.589	(14.205.914.719)	5.029.712.698
PP-PP Urban-Penta	RS Adhyaksa Jambi	60%	--	13.052.906.312	(8.323.472.594)	4.729.433.718
PP-Wika-HK	Bendungan Karangnongko	30%	3.954.476.790	2.118.130.518	(2.420.760.255)	3.651.847.053
PP-Wika-Jakon	Jalan Tol IKN Segment KKT Kariangau-Sp. Tempadung	40%	23.303.636.525	--	(19.240.999.908)	4.062.636.617
PP-WAA	Jalan Dermaga Logistik IKN	65%	11.790.649.754	--	(8.000.000.000)	3.790.649.754
PP-Markinah-PP Urban	Gedung Parkir Jatibaru	45%	3.159.118.854	2.531.094.323	(2.107.973.124)	3.582.240.053
PP-PP Urban-Jakon	Rumah Susun ASN 1	45%	10.355.288.252	8.022.717.386	(14.867.049.122)	3.510.956.516
PP-Wika-Jakon	Pelabuhan Patimban 6	50%	32.716.261.962	17.731.996.800	(47.084.579.767)	3.363.678.995
PP-Arkonin	Gedung Parkir Kantin Hunian Vertikal	98%	--	2.985.470.901	--	2.985.470.901
PP-Ashfri	Pengendali Sediment Batang Kuranji Tahap 2	80%	2.934.150.136	--	--	2.934.150.136
PP-Adi Jaya Lima Pradana	Bendungan Tamblang	60%	5.071.532.654	--	(2.500.000.000)	2.571.532.654
PP-APTA-ADP	Pengendali Banjir Tenggang	55%	--	14.661.094.760	(12.615.462.744)	2.045.632.016
PP-Patroon	RSUD Krui	98%	--	16.822.755.520	(14.792.104.489)	2.030.651.031
PP-PMJ-EMM	Bendungan Wanggar	70%	1.845.275.139	--	--	1.845.275.139
PP-Markinah	Jalan Sumbu Barat IKN Thp II	65%	24.606.494.435	7.140.496.490	(30.002.699.803)	1.744.291.122
PP-Lestari	Jaringan Irigasi Rengrang	70%	1.525.567.376	--	--	1.525.567.376
PP-Adhi Karya-Penta	Stadion Utama Sumatera Utara	40%	1.113.006.544	--	--	1.113.006.544
PP Presisi - Sarana KSO	Jembatan GORR Segmen I STA 7700 dan STA 8500	70%	2.980.726.687	--	(367.550.000)	2.613.176.687
PP Properti - Perkasa Abadi	Paladian Park Apartment	75%	91.231.080.662	(51.054.591.747)	(8.012.570.384)	32.163.918.531
PP Properti - Grand Soho Slipi	Grand Slipi Tower	90%	38.551.907.733	4.694.337.257	(8.968.838.848)	34.277.406.142
PPUB - KSO Adam Malik Medan	Gedung Ongkologi Terpadu RS Adam Malik Medan	30%	10.160.617.028	52.012.113	(10.212.629.141)	--
PPUB - KSO RSU Adyaksa Jambi	RS Adhyaksa Jambi	38%	--	13.052.906.312	(8.323.472.594)	4.729.433.718
PPUB - KSO Rusun IKN	Rumah Susun ASN 1	33%	10.355.288.252	8.022.717.386	(14.867.049.122)	3.510.956.516
PPUB - KSO Jatibaru	Gedung Parkir Umum Jatibaru (Lanjutan)	15%	940.539.618	716.749.638	(1.657.289.256)	--
Lain-lain di bawah Rp 1 miliar/ *Others below Rp 1 billion*			260.779.917.809	(7.898.496.393)	(216.762.202.030)	36.119.219.386
			960.534.589.888	**986.079.383.347**	**(1.106.599.674.147)**	**840.014.299.088**
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama/						
Accumulated Equity in Net Lossess of a Joint Ventures						
PP-Hyundai-Rekind	RDMP RU V Balikpapan (Catatan/ *Note* 58)	20%	(702.246.496.664)	(835.911.134.544)	--	(1.538.157.631.208)
PP-Adhi Karya	LRT Filipina 01	49%	--	--	(15.466.804.074)	(15.466.804.074)
PP-BMP-BLJ	Stadion Jember	98%	(3.521.962.328)	--	--	(3.521.962.328)
PP-Hyundai E&C	PLTA Peusangan	43%	--	(293.893.874.680)	292.121.309.154	(1.772.565.526)
PP-Perdana	RRDP Apas Simanggaris	70%	(615.849.016)	--	--	(615.849.016)
PP-BRP	Jalan Bojonegoro-Padangan	70%	(8.357)	--	--	(8.357)
Lain-lain di bawah Rp 1 miliar/ *Others below Rp 1 billion*			(638.333.509)	(7.767.251.129)	(30.392.781.907)	(38.798.366.545)
			(707.022.649.874)	**(1.137.572.260.353)**	**246.261.723.173**	**(1.598.333.187.054)**

		2024*)				
Nama Ventura Bersama/ ***Name of Joint Venture***	**Nama Proyek/** ***Name of Projects***	**Porsi Bagi Hasil** ***/ Portion of Shares*** **(%)**	**Nilai Tercatat Awal/** ***Carrying Value Beginning Balance*** **(Rp)**	**Bagian Laba (Rugi) Bersih/** ***Portion in Net Profit (Loss)*** **(Rp)**	**Setoran (Penarikan) Koreksi/** ***Payment (Withdraw) Correction*** **(Rp)**	**Nilai Tercatat Akhir Tahun/** ***Carrying Value Ending Balance*** **(Rp)**
Investasi pada Ventura Bersama/ ***Investment in Joint Ventures***						
PP-Brantas-Rangga	Bandara VVIP IKN Sisi Udara	60 %	17.841.086.984	208.470.496.559	(147.520.565.601)	78.791.017.942
PP-Wika-KMK	Coal Handling Facility, Rail Loop, Serta TLS 6 dan 7	50%	--	49.892.812.295	--	49.892.812.295
PP-Waskita-YPP	Jalan Seksi 6C-1 ITCI Sumbu Timur	50%	265.101.950	97.862.522.657	(56.500.000.000)	41.627.624.607
PP-NK	Tol Bayung Lencir-Tempino 2	55%	33.868.562.459	39.950.832.206	(38.500.000.000)	35.319.394.665
PP-Wika-Jakon	Pelabuhan Patimban 6	50%	4.485.673.190	58.556.776.838	(30.326.188.066)	32.716.261.962
PP-Wika	BIJB Paket 2 Kertajati	55%	29.567.064.423	--	--	29.567.064.423
PP-Wika	Gedung Istana Negara	55%	8.676.202.432	42.842.878.204	(23.636.103.773)	27.882.976.863
PP-Arkonin	Gedung IT Bank Mandiri Slipi	99%	36.129.386.200	3.157.815.842	(12.981.848.026)	26.305.354.016
PP-Wika-HK-KMK	Japek 2 Selatan Paket 2A	25%	549.726.694	40.798.546.916	(16.251.502.258)	25.096.771.352
PP-Markinah	Jalan Sumbu Barat IKN Thp II	65%	--	61.698.220.904	(37.091.726.469)	24.606.494.435
PP-Wika-Jakon	Jalan Tol IKN Segment KKT Kariangau-Sp. Tempadung	40%	30.825.006.391	36.636.158.141	(44.157.528.007)	23.303.636.525
PP-Ashfri	Bendungan Manikin	85%	13.834.262.783	15.787.409.056	(6.500.000.000)	23.121.671.839
PP-Wika	RS Pusat Otak Nasional	30%	--	22.395.891.742	--	22.395.891.742
PP-Wika	Kantor Kepresidenan IKN	55%	12.503.840.211	34.077.572.553	(30.205.494.254)	16.375.918.510
PP-Wika-Waskita-Jakon	Jalan Tol IKN Seksi 3B 2 Karianga	15%	--	20.012.537.917	(5.250.000.000)	14.762.537.917
PP-WAA	Jalan Dermaga Logistik IKN	65%	4.407.130.757	33.083.518.997	(25.700.000.000)	11.790.649.754
PP-Brantas	Pembangunan PUPR Wing 2 IKN	65%	--	26.515.602.754	(15.187.339.928)	11.328.262.826
PP-Ashfri	Bendungan Bener	60%	9.417.162.609	12.657.959.614	(11.000.000.000)	11.075.122.223
PP-Wika	Mandalika Paket 1	40%	10.507.369.751	--	(64.464.306)	10.442.905.445
PP-PP Urban-Jakon	Rumah Susun ASN 1	45%	11.037.697.706	48.935.704.711	(49.618.114.165)	10.355.288.252
PP-Wika	BSN Banjarmasin	53%	15.001.895.670	--	(5.000.000.000)	10.001.895.670
PP-Ashfri	Bendungan Lolak Tahap 2	60%	8.034.497.301	1.096.665.638	--	9.131.162.939
PP-Mafri-DNT	Bendungan Cibeet Paket 2	58%	685.381.907	11.326.447.115	(4.140.000.000)	7.871.829.022
PP-Waskita	Jalan Baru Kretek Girijati	48%	1.449.074.160	12.373.803.868	(6.171.375.228)	7.651.502.800
PP-Adhi Karya	LRT Filipina 03C	49%	--	6.701.177.059	--	6.701.177.059
PP-Modern-SBS	Jalan West Residence	60%	--	10.015.515.560	(4.000.000.000)	6.015.515.560
PP-Brantas-NK	Hunian Vertikal 4 Tower TNI IKN	45%	--	5.835.841.497	--	5.835.841.497
PP-Adhi Karya	LRT Filipina 01	49%	--	5.356.011.794	--	5.356.011.794
PP-Waskita-SMU	LOT 2 Bululawang Sidomulyo Tambakrejo	45%	305.393.323	13.968.599.879	(9.186.604.047)	5.087.389.155
PP-Adi Jaya Lima Pradana	Bendungan Tamblang	60%	5.071.532.654	--	--	5.071.532.654
PP-Waskita	Renovasi Stadion Prov Jawa Timur	49%	--	8.835.529.842	(3.839.554.200)	4.995.975.642
PP-Jatiwangi	Bendungan Bagong Paket III	75%	--	4.909.247.828	--	4.909.247.828
PP-Markinah	Jalan & Jembatan Lot 6A	70%	5.572.989.235	3.592.499.187	(5.033.380.000)	4.132.108.422
PP-Wika-HK	Bendungan Karangnongko	30%	186.437.487	3.768.039.303	--	3.954.476.790
PP-Waskita	Tol Probolinggo Banyuwangi	50%	46.213.117.758	70.841.534.354	(113.463.990.153)	3.590.661.959
PP-Marfri	Bendungan Tiu Suntuk	58%	13.530.452.621	3.513.124.000	(13.530.452.621)	3.513.124.000
PP-Markinah-PP Urban	Gedung Parkir Jatibaru	45%	--	3.159.118.854	--	3.159.118.854
PP-Ashfri	Pengendali Sediment Batang Kuranji Tahap 2	80%	2.934.150.136	--	--	2.934.150.136
PP-Andesmont	Lau Simeme	80%	5.520.284.698	--	(2.720.284.698)	2.800.000.000
PP-CRBC-Wika	Tol Semarang Demak 1B	20%	1.486.071.064	43.802.710.437	(42.607.339.755)	2.681.441.746
PP-Selaras	SPAM Wasusokas	75%	1.736.165.066	14.489.647.206	(14.032.688.261)	2.193.124.011
PP-Amka-PP Urban	RSDC Papua	83%	5.070.177.459	--	(2.908.150.000)	2.162.027.459
PP-Adhi Karya-Waskita-MWT	Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III	33%	--	5.717.352.660	(3.606.962.672)	2.110.389.988
PP-PMJ-EMM	Bendungan Wanggar	70%	815.353.495	11.029.921.644	(10.000.000.000)	1.845.275.139
PP-Wika-NK-Adhi Karya	Jalan Tol IKN Seksi 1B	45%	--	1.665.039.239	--	1.665.039.239
PP-Adhi Karya	Bendungan Way Apu	75%	--	(15.538.037.716)	17.119.583.919	1.581.546.203
PP-Lestari	Jaringan Irigasi Rengrang	70%	1.926.936.413	4.539.620.608	(4.940.989.645)	1.525.567.376
PP-Jatiwangi	Bendungan Bagong Paket II	87%	6.707.052.192	14.546.113.904	(20.053.775.894)	1.199.390.202
PP-Adhi Karya-Penta	Stadion Utama Sumatera Utara	40%	1.822.655.785	8.090.350.758	(8.799.999.999)	1.113.006.544
PPRE - RPJ KSO	Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung	55%	1.817.297.142	--	(1.100.000.000)	717.297.142
PPRE - DPI KSO	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai	60%	2.862.988.025	--	--	2.862.988.025
PPRE - Yalapersada	Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran	51%	1.250.000.000	--	--	1.250.000.000
PP Properti - Perkasa Abadi	Paladian Park Apartment	75%	93.346.208.342	(292.235.905)	(1.822.891.776)	91.231.080.661
PP Properti - Grand Soho Slipi	Grand Slipi Tower	90%	45.375.873.431	4.919.576.844	(11.743.542.543)	38.551.907.732
Lain-lain di bawah Rp 1 milyar/ *Others below Rp 1 billion*			891.310.134.917	(537.457.919.470)	(175.478.086.400)	178.374.129.047
			1.383.947.394.821	**574.138.553.893**	**(997.551.358.826)**	**960.534.589.888**
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama/ ***Accumulated Equity in Net Lossess of a Joint Ventures***						
PP-Hyundai-Rekind	RDMP RU V Balikpapan (Catatan/ *Note* 58)	20%	--	(1.118.560.863.670)	416.314.367.006	(702.246.496.664)
PP-BMP-BLJ	Stadion Jember	98%	(3.521.962.328)	--	--	(3.521.962.328)
PP-Perdana	RRDP Apas Simanggaris	70%	(615.849.016)	--	--	(615.849.016)
PP-BRP	Jalan Bojonegoro-Padangan	70%	(8.357)	--	--	(8.357)
Lain-lain di bawah Rp 1 milyar/ *Others below Rp 1 billion*			(638.333.509)	(25.593.886.631)	25.593.886.631	(638.333.509)
			(4.776.153.210)	**(1.144.154.750.301)**	**441.908.253.637**	**(707.022.649.874)**

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya / *20. Other Long Term Investments*

Rincian mutasi investasi jangka panjang lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah sebagai berikut:

The detail of mutation of other long-term investment which measured at fair value through profit of loss are as follows:

		2025				
		Prosentase Kepemilikan/ *Percentage Ownership* (%)	**Saldo Awal/ *Beginning Balance* (Rp)**	**Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ *Addition (Deduction) of Investment* (Rp)**	**Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) in Fair Value* (Rp)**	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* (Rp)**
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ *Construction and development of toll road*	13,75%	494.925.960.443	--	1.029.303.257	495.955.263.700
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ *Construction and development of toll road*	15,01%	350.631.484.010	--	2.918.321.542	353.549.805.552
PT Meulaboh Power Generation	Ketenagalistrikan/Power plant	7,50%	134.663.000.000	--	--	134.663.000.000
PT Jasamarga Manado Bitung	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ *Construction and development of toll road*	14,99%	44.349.010.053	--	(2.449.658.608)	41.899.351.445
PT Citra Waspphutowa	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	6,74%	297.742.006.135	--	(512.192.697)	297.229.813.438
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Kawasan industri/*Industrial estate*	1,70%	18.601.352.009	--	13.835.424.288	32.436.776.297
PT Prima Multi Terminal	Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan/*Construction and operational port*	1,26%	165.267.481.670	--	(26.699.815.311)	138.567.666.359
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	10,00%	16.300.000.000	(10.807.934.479)	--	5.492.065.521
PT Jasamarga Jogja Bawen	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	6,88%	43.624.626.887	--	--	43.624.626.887
PT Hotel Karya Indonesia	Jasa, Pembangunan dan Perdagangan/ *Services, Development and Trade*	10,56%	5.723.712.343	--	(1.197.129.674)	4.526.582.669
PT Muba Daya Pratama	Services, Development and Trade Penyedia tenaga listrik/*Electricity producer*	13,00%	10.790.000.000	--	--	10.790.000.000
PT Pancakarya Grahatama	Pembangunan dan pengelolaan kawasan bisnis, area komersial, dan hotel/*Construction and development business park, commercial area, and hotel*	15,00%	4.350.000.000	--	(1.930.721.715)	2.419.278.285
PT Solo Citra Metro Plasma Power	Pembangkit tenaga listrik/ *Power plant*	0,04%	--	9.578.986.285	(9.473.101.131)	105.885.154
PT Mitra Cipta Polasarana	Jasa perserwaan kantor/Office spare rental	5%	1.631.000.000	--	(321.836.991)	1.309.163.009
PT Pembangkitan Perkasa Daya	*Penyedia tenaga listrik/Electricity producer*	5%	494.935.000	--	--	494.935.000
PT Karya Logistik Nusantara	Logistik/*Logistic*	14%	17.746.685.628	--	266.139.925	18.012.825.553
PT Jasamarga Akses Patimban	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	6%	20.705.000.000	--	--	20.705.000.000
PT Jasa marga Rest Area Batang	Real estate dan perdagangan/Real *estate and trading*	5%	--	7.024.136.482	(4.694.457.714)	2.329.678.768
PT PP Tirta Riau	*Penyedia Air Minum/Water Supply*	3%	4.048.111.686	--	(3.228.446.402)	819.665.284
Jumlah/Total			**1.631.594.365.864**	**5.795.188.288**	**(32.458.171.231)**	**1.604.931.382.921**

		2024				
		Prosentase Kepemilikan / Percentage Ownership (%)	**Saldo Awal/ Beginning Balance (Rp)**	**Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Addition (Deduction) of Investment (Rp)**	**Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value (Rp)**	**Saldo Akhir/ Ending Balance (Rp)**
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	13,75%	491.633.000.000	--	3.292.960.443	494.925.960.443
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	16,14%	322.710.997.500	--	27.920.486.510	350.631.484.010
PT Meulaboh Power Generation	Ketenagalistrikan/Power plant	7,50%	235.144.000.000	(100.481.000.000)	--	134.663.000.000
PT Jasamarga Manado Bitung	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/Construction and development of toll road	15,00%	204.241.000.000	--	(159.891.989.947)	44.349.010.053
PT Citra Waspphutowa	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	6,74%	165.875.000.000	--	131.867.006.135	297.742.006.135
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Kawasan industri/*Industrial estate*	1,70%	17.500.000.000	--	1.101.352.009	18.601.352.009
PT Prima Multi Terminal	Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan/*Construction and operational port*	1,26%	161.143.731.981	--	4.123.749.689	165.267.481.670
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	10,00%	16.300.000.000	--	--	16.300.000.000
PT Jasamarga Jogja Bawen	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	13,00%	29.549.626.887	14.075.000.000	--	43.624.626.887

		2024				
		Prosentase Kepemilikan / Percentage Ownership (%)	Saldo Awal/ Beginning Balance (Rp)	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Addition (Deduction) of Investment (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value (Rp)	Saldo Akhir/ Ending Balance (Rp)
PT Hotel Karya Indonesia	Jasa, Pembangunan dan Perdagangan/*Services, Development and Trade*	10,56%	--	5.723.712.343	--	5.723.712.343
PT Muba Daya Pratama	Penyedia tenaga listrik/*Electricity producer*	18,00%	10.790.000.000	--	--	10.790.000.000
PT Pancakarya Grahatama	Pembangunan dan pengelolaan kawasan bisnis, area komersial, dan hotel/*Construction and development business park, commercial area, and hotel*	15,00%	4.350.000.000	--	--	4.350.000.000
PT Mitra Cipta Polasarana	Jasa perserwaan kantor/*Office spare rental*	5,00%	1.631.000.000	--	--	1.631.000.000
PT Pembangkitan Perkasa Daya	Penyedia tenaga listrik/*Electricity producer*	5,00%	494.935.000	--	--	494.935.000
PT Karya Logistik Nusantara	Logistik/*Logistic*	18,00%	15.000.000.000	--	2.746.685.628	17.746.685.628
PT Jasamarga Akses Patimban	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/*Construction and development of toll road*	6,31%	4.080.000.000	16.625.000.000	--	20.705.000.000
PT PP Tirta Riau	Penyedia Air Minum/*Water Supply*	3,23%	--	--	4.048.111.686	4.048.111.686
Jumlah/Total			**1.680.443.291.368**	**(64.057.287.657)**	**15.208.362.153**	**1.631.594.365.864**

Pada 31 Desember 2025, terdapat reklasifikasi investasi asosiasi ke investasi jangka panjang lainnya atas 2 entitas yaitu SCMPP dan JRB karena adanya perubahan persentase kepemilikan.

As of December 31, 2025, there was a reclassification from investment in associates to other long-term investments for two entities, SCMPP and JRB, due to a change in ownership percentage.

Berikut tanggal laporan penilaian dalam menentukan nilai wajar investasi jangka panjang lainnya berdasarkan penilai Tobing Panuturi dan Rekan pada tahun 2025:

The following is the date of the appraisal report in determining the fair value of other long-term investments based on appraiser Tobing Panuturi with Rekan in 2025:

No. Laporan/ *Report No.*	Tanggal Laporan/ *Report Date*	Tanggal Penilaian/ *Valuation Date*	KJPP	Entitas/ *Entities*	Nilai Wajar/ *Fair Value*
00221/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Prima Multi Terminal	138.567.666.359
00215/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Kawasan Industri Terpadu Batang	32.436.776.297
00213/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Citra Waspphutowa	297.229.813.438
00219/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT PP Tirta Riau	819.665.284
00217/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	495.955.263.700
00220/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Jasamarga Manado Bitung	41.899.351.445
00214/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	353.549.805.552
00218/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Karya Logistik Nusantara	18.012.825.553
00216/2.0171-00/BS/03/0481/1/III/2026	9 Maret 2026/ *March 9, 2026*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	PT Jasamarga Rest Area Batang	2.329.678.768

21. Aset Tetap / *21. Property And Equipment*

	2025						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan							***Acquisition Cost***
Tanah	1.043.350.007.609	2.259.650.000	(41.793.379.074)	-	12.409.969.827	1.016.226.248.362	*Land*
Bangunan	597.769.766.134	18.289.139.116	(136.407.858.823)	(310.239.999)	10.593.176.268	489.933.982.696	*Buildings*
Apartemen	10.427.879.000	-	(773.890.410)	-	842.355.410	10.496.344.000	*Apartment*
Aset Pendukung Pabrik Lainnya	49.552.539.025	-	-	-	-	49.552.539.025	*Other Factory Supports*
Mesin dan Peralatan	3.886.545.607.257	23.806.332.430	(779.041.910.835)	(73.132.797.339)	-	3.058.177.231.513	*Machinery and Equipments*
Aset Hotel	122.839.436.967	1.627.221.070	-	668.662.180	-	125.135.320.217	*Hotel Assets*
Kendaraan	37.963.782.999	4.167.108.112	(3.561.700.412)	489.851.389	-	39.059.042.088	*Vehicles*
Inventaris Kantor	37.994.260.424	254.447.046	(2.374.802.214)	(788.612.180)	-	35.085.293.076	*Office Equipments*
Sub Jumlah	5.786.443.279.415	50.403.897.774	(963.953.541.768)	(73.073.135.949)	23.845.501.505	4.823.666.000.977	*Sub Total*
Aset dalam Penyelesaian							*Assets in Construction*
Tanah	4.714.427.135	-	-	-	-	4.714.427.135	*Land*
Bangunan	324.410.801.309	3.903.001.458	(175.337.614.436)	(2.400.548.914)	-	150.575.639.416	*Buildings*
Sub Jumlah	329.125.228.444	3.903.001.458	(175.337.614.436)	(2.400.548.914)	-	155.290.066.551	*Sub Total*
Jumlah Harga Perolehan	6.115.568.507.859	54.306.899.232	(1.139.291.156.204)	(75.473.684.863)	23.845.501.505	4.978.956.067.528	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Bangunan	80.304.739.806	45.060.733.918	(67.402.938.441)	101.062.500	-	58.063.597.783	*Buildings*
Apartemen	66.616.444	521.393.950	(521.393.950)	-	-	66.616.444	*Apartment*
Aset Pendukung Pabrik Lainnya	29.042.363.704	-	-	-	-	29.042.363.704	*Other Factory Supports*
Mesin dan Peralatan	3.030.770.945.916	258.275.712.828	(717.323.821.400)	948.614.584	-	2.572.671.451.928	*Machinery and Equipments*
Aset Hotel	104.447.680.572	6.941.857.134	-	354.948.258	-	111.744.485.964	*Hotel Assets*
Kendaraan	33.508.956.118	2.567.315.144	(7.823.270.685)	-	-	28.253.000.577	*Vehicles*
Inventaris Kantor	35.250.905.980	1.157.588.483	(2.197.402.474)	(456.010.758)	-	33.755.081.231	*Office Equipments*
Jumlah	3.313.392.208.540	314.524.601.457	(795.268.826.950)	948.614.584	-	2.833.596.597.631	***Total***
Penurunan Nilai	5.539.576.565	-	-	-	-	5.539.576.565	*Impairment*
Nilai Tercatat	**2.796.636.722.754**					**2.139.819.893.332**	***Carrying Amount***

	2024*)						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan							***Acquisition Cost***
Tanah	1.079.650.345.370	1.980.868.062	(62.761.167.588)	-	24.479.961.765	1.043.350.007.609	*Land*
Bangunan	896.678.636.777	-	(311.564.190.838)	-	12.655.320.195	597.769.766.134	*Buildings*
Apartemen	10.351.162.000	-	(519.227.850)	-	595.944.850	10.427.879.000	*Apartment*
Aset Pendukung Pabrik Lainnya	49.552.539.025	-	-	-	-	49.552.539.025	*Other Factory Supports*
Mesin dan Peralatan	4.432.346.337.434	419.751.840.059	(802.196.601.819)	(163.355.968.417)	-	3.886.545.607.257	*Machinery and Equipments*
Aset Hotel	134.834.619.928	1.213.400.006	(13.788.159.543)	579.576.576	-	122.839.436.967	*Hotel Assets*
Kendaraan	39.512.792.212	444.774.000	(1.993.783.213)	-	-	37.963.782.999	*Vehicles*
Inventaris Kantor	36.817.403.107	1.868.017.889	(691.160.572)	-	-	37.994.260.424	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**6.679.743.835.853**	**425.258.900.016**	**(1.193.514.291.423)**	**(162.776.391.841)**	**37.731.226.810**	**5.786.443.279.415**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian							*Assets in Construction*
Tanah	4.714.427.135	-	-	-	-	4.714.427.135	*Land*
Bangunan	319.075.597.482	5.914.780.403	-	(579.576.576)	-	324.410.801.309	*Buildings*
Sub Jumlah	323.790.024.617	5.914.780.403	-	(579.576.576)	-	329.125.228.444	*Sub Total*
Jumlah Harga Perolehan	**7.003.533.860.470**	**431.173.680.419**	**(1.193.514.291.423)**	**(163.355.968.417)**	**37.731.226.810**	**6.115.568.507.859**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciation***
Bangunan	33.284.087.153	62.305.664.067	(15.285.011.414)	-	-	80.304.739.806	*Buildings*
Apartemen	-	585.844.294	(519.227.850)	-	-	66.616.444	*Apartment*
Aset Pendukung Pabrik Lainnya	27.855.918.556	1.186.445.148	-	-	-	29.042.363.704	*Other Factory Supports*
Mesin dan Peralatan	3.016.291.993.807	431.059.900.709	(419.754.170.353)	3.173.221.753	-	3.030.770.945.916	*Machinery and Equipments*
Aset Hotel	97.699.664.180	17.195.721.178	(10.447.704.786)	-	-	104.447.680.572	*Hotel Assets*
Kendaraan	31.258.107.315	3.202.669.700	(1.352.751.323)	400.930.426	-	33.508.956.118	*Vehicles*
Inventaris Kantor	34.303.769.594	1.445.518.646	(498.382.260)	-	-	35.250.905.980	*Office Equipments*
Jumlah	3.240.693.540.605	516.981.763.742	(447.857.247.986)	3.574.152.179	-	3.313.392.208.540	***Total***
Penurunan Nilai	3.839.937.500	1.699.639.065	-	-	-	5.539.576.565	*Impairment*
Nilai Tercatat	**3.759.000.382.365**					**2.796.636.722.754**	***Carrying Amount***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap yang direklasifikasi ke persediaan sebesar Rp125.564.518.809 (Catatan 14).

As of December 31, 2025, property and equipment reclassified to inventories amounted to Rp125,564,518,809 (Note 14).

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap yang direklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp834.840.370 (Catatan 22).

As of December 31, 2025, property and equipment reclassified to investment properties amounted to Rp834,840,370 (Note 22).

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap yang direklasifikasi ke aset hak guna sebesar Rp72.642.945.950 (Catatan 27).

As of December 31, 2025, fixed assets reclassified to right of use assets amounted to Rp72,642,945,950 (Note 27).

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

	2025	2024	
Beban pokok pendapatan	297.716.781.855	495.987.148.694	*Cost of revenue*
Beban Usaha	16.807.819.602	20.994.615.048	*Operating expenses*
Jumlah	**314.524.601.457**	**516.981.763.742**	***Total***

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan. Aset tetap pemilikan langsung digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 30 dan 39).

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period. Directly acquired property and equipment are used as collateral for bank loans (Notes 30 and 39).

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah mengasuransikan sebagian aset tetap yang dimiliki kepada Perusahaan Asuransi pihak ketiga yaitu PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sahabat Insurance, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, PT Artha Graha General Insurance, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Chubb Syariah, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Raksa, PT Sompo Insurance Indonesia, PT KSK Insurance Indonesia dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp7.078.035.052.307.

As of December 31, 2025, the Group has insured a portion of its fixed assets with third-party insurance companies, namely PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sahabat Insurance, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, PT Artha Graha General Insurance, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Chubb Syariah, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Raksa, PT Sompo Insurance Indonesia, and PT KSK Insurance Indonesia, with a total coverage value of Rp7,078,035,052,307.

Grup memiliki pertanggungan asuransi atas aset-asetnya, yang menurut manajemen cukup memadai untuk memitigasi risiko kerugian yang mungkin timbul.

The Group believes that its insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset yang tidak digunakan untuk sementara, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.355.269.589.665 dan Rp1.444.106.269.374. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset tetap Grup dengan nilai wajarnya.

As of December 31, 2025 and 2024, there is no temporarily idle asset, property and equipment discontinued from active use and is not classified as available for sale. The total cost of property and equipment that have been fully depreciated and still in use as at December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp1,355,269,589,665 and Rp1,444,106,269,374, respectively. The management believes that the carrying amounts of the Group's property and equipment is not significantly different with their fair values.

Penilaian kembali aset tetap / *Revaluation of land and building*

2025

Entitas/*Entity*	KJPP	Tanggal Laporan/ *Report Date*	No. Laporan/ *Report No.*	Penilai Independen/ *Independent Appraiser*
Perusahaan	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	9 Maret 2026	00582/2.0041-00/PI/03/0431/1/'III/2026	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
PPSC	KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan	6 Februari 2026	00008/2.0041-00/PI/03/0431/1/II/2026	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
PPUB	KJPP Firman Azis & Rekan	13 Februari 2026	00184/2.0069-07/PP/03/0523/1/II/2026	Herman, S.P, CLI, MAPPI(Cert)
PPUB	KJPP Firman Azis & Rekan	13 Februari 2026	00186/2.0069-07/PP/03/0523/1/II/2026	Herman, S.P, CLI, MAPPI(Cert)
PPRO	KJPP Dasa'at Yudhistira dan Rekan	5 Februari 2026	00031/2.0041-04/PI/03/0664/1/II/2026	Zulfikar, S.E., MAPPI (Cert)
PPRE	KJPP Dasa'at Yudhistira dan Rekan	27 Januari 2026	No. 00016/2.0041- 12/PI/03/0142/1/I/2026	Hendra Gunawan
PPRE (LMA)	KJPP Wahyono Adi & Rekan	7 Januari 2026	No. 00001/2.0153-00/PI/03/0180/1/I/2026	Ir. Wahyono Adi, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)

2024

Entitas/*Entity*	KJPP	Tanggal Laporan/ *Report Date*	No. Laporan/*Report No.*	Penilai Independen/*Independent Appraiser*
Perusahaan	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	23 Januari 2025	00027/2.0041-00/PI/03/0431/1/I/2025	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
Perusahaan	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	20 Februari 2025	00037/2.0041-00/PI/03/0431/1/II/2025	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
Perusahaan	KJPP Sugianto Prasojo & Rekan	19 Februari 2025	00053/2.0131-08/PI/03/0516/1/II/2025	Putri Sekarningrum, S.MB., M.H., MAPPI (Cert.)
SC	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	18 Februari 2025	00035/2.0041-00/PI/03/0664/1/II/2025	Zulfikar, S.E., MAPPI (Cert)
PPUB	KJPP Firman Azis & Rekan	16 Januari 2025	00056/2.0069-07/PI/03/0523/1/I/2025	Herman, S.P, CLI, MAPPI(Cert)
PPUB	KJPP Firman Azis & Rekan	26 Februari 2025	00223/2.0069-07/PI/03/0523/1/II/2025	Herman, S.P, CLI, MAPPI(Cert)
PPRO	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	14 Januari 2025	00008/2.0041-00/PI/03/0431/1/I/2025	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
CPI	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	2 Januari 2025	00001/2.0171-10/PI/03/0420/1/I/2025	Panuri L. Tobing, S.P., S.H., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)., CSA
PPRE	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	22 Januari 2025	No. 00008/2.0041-12/PI/06/0142/1/I/2025	Hendra Gunawan
PPRE (LMA)	KJPP Wahyono Adi & Rekan	3 Januari 2025	No. 00001/2.0153-00/PI/03/0180/1/I/2025	Ir. Wahyono Adi, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)

Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.04/2021 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya. Berikut adalah rincian nilai pasar dan keuntungan (kerugian) revaluasi masing-masing aset tetap:

The valuation was performed in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI), referring to recent arm's length market transaction and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 28/POJK.04/2021 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Appraisal method was based on the market value approach and cost approach. The following are details of the market value and gain (loss) on revaluation of each fixed asset:

	Net carrying value 31 Desember 2025		Nilai pasar/ *Market value*		Keuntungan (kerugian) revaluasi/ *Gain (loss) on revaluation*	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Tanah/*Land*						
Perusahaan	346.451.670.000	345.397.590.000	346.451.670.000	348.865.368.272	--	3.467.778.272
PPRO	142.182.060.000	169.104.530.824	144.312.710.000	171.472.850.000	2.130.650.000	2.368.319.176
PPUB	132.347.700.000	132.347.700.000	132.347.700.000	132.701.300.000	--	353.600.000
PPRE	285.692.669.753	283.323.719.000	288.061.620.506	278.723.349.750	2.368.950.753	(4.600.369.250)
CPI	128.585.765.894	127.619.803.893	128.585.765.894	151.503.259.154	--	23.883.455.261
Sub Jumlah/ *Sub Total*	1.035.259.865.647	1.057.793.343.717	1.039.759.466.400	1.083.266.127.176	4.499.600.753	25.472.783.459
Bangunan/ *Building*						
Perusahaan	83.253.940.000	86.350.632.053	83.162.735.360	91.385.432.105	(91.204.640)	5.034.800.052
PPRO	81.965.704.848	71.860.500.000	93.433.419.696	71.779.100.000	11.467.714.848	(81.400.000)
PPUB	212.507.260.783	211.550.260.783	214.483.404.737	211.268.270.783	1.976.143.954	(281.990.000)
PPRE	53.720.196.837	49.298.228.983	59.713.443.427	57.109.441.010	5.993.246.590	7.811.212.027
SCM	5.625.330.755	5.855.457.923	5.625.330.755	5.621.214.501	--	(234.243.422)
CPI	237.837.097.179	237.837.097.179	237.837.097.179	237.837.097.179	--	--
Sub Jumlah/ *Sub Total*	674.909.530.402	662.752.176.921	694.255.431.154	675.000.555.578	19.345.900.752	12.248.378.657
Jumlah/*Total*	**1.710.169.396.049**	**1.720.545.520.638**	**1.734.014.897.554**	**1.758.266.682.754**	**23.845.501.505**	**37.721.162.116**

Selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Kerugian revaluasi di akui ke laba rugi untuk masing masing aset yang tidak memiliki atau telah melebihi keuntungan revaluasi pada tahun-tahun sebelumnya.

The difference between the fair value of the asset and the carrying amount is recorded in other comprehensive income. Revaluation losses are recognized in profit or loss for each asset that does not have or has exceeded revaluation gains in previous years.

22. Properti Investasi / *22. Investment Property*

	2025						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Penyesuaian Nilai Wajar/ *Fair Value Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan							*Acquisition Cost*
Tanah	831.412.446.203	133.266.142.400	--	220.498.311.933	(107.154.216.522)	1.078.022.684.014	*Land*
Bangunan	3.024.221.901.128	60.044.817.563	--	(501.480.357.703)	(49.630.558.700)	2.533.155.802.288	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	25.318.630.001	--	--	--	(30.448.030)	25.288.181.970	*Machinery and Equipments*
Sub Jumlah	3.880.952.977.332	193.310.959.963	--	(280.982.045.770)	(156.815.223.252)	3.636.466.668.272	*Sub Total*
Aset dalam Penyelesaian	--	--	--	--	--	--	*Assets in Construction*
Bangunan	278.207.800	259.189.451	--	--	--	537.397.251	*Buildings*
Sub Jumlah	278.207.800	259.189.451	--	--	--	537.397.251	*Sub Total*
Jumlah Harga Perolehan	**3.881.231.185.132**	**193.570.149.414**	**--**	**(280.982.045.770)**	**(156.815.223.252)**	**3.637.004.065.523**	***Total Acquisition Cost***

	2024*)						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Penyesuaian Nilai Wajar/ *Fair Value Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan							*Acquisition Cost*
Tanah	756.063.732.000	--	--	56.813.750.000	18.534.964.203	831.412.446.203	*Land*
Bangunan	2.602.879.376.311	150.669.045.462	(968.425.249)	313.161.250.000	(41.519.345.396)	3.024.221.901.128	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	26.288.941.000	--	--	--	(970.310.999)	25.318.630.001	*Machinery and Equipments*
Sub Jumlah	3.385.232.049.311	150.669.045.462	(968.425.249)	369.975.000.000	(23.954.692.192)	3.880.952.977.332	*Sub Total*
Aset dalam Penyelesaian Bangunan	--	278.207.800	--	--	--	278.207.800	*Assets in Construction Buildings*
Sub Jumlah	--	278.207.800	--	--	--	278.207.800	*Sub Total*
Jumlah Harga Perolehan	**3.385.232.049.311**	**150.947.253.262**	**(968.425.249)**	**369.975.000.000**	**(23.954.692.192)**	**3.881.231.185.132**	***Total Acquisition Cost***

*) Disajikan Kembali (Catatan 64)/ *As restated (Note 64)*

Properti investasi merupakan tanah, bangunan dan mesin dari Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mal Lagoon Avenue Sungkono, Mal Lagoon Avenue Bekasi, Kaza Mal Surabaya, dan Balikpapan Ocean Square yang disewakan.

The investment properties represents land, buildings and machinery of Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mall Lagoon Avenue Sungkono, Mall Lagoon Avenue Bekasi, Kaza Mall Surabaya, and Balikpapan Ocean Square that were used for rental.

Penilaian kembali Properti Investasi

Laporan penilaian nilai wajar properti investasi dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar, POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan POJK Nomor 28/POJK.04/2021 Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di

Re-assessment of Investment Property

Reports on the valuation of the fair value of investment properties are carried out in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI) which are determined based on recent transactions in reasonable terms, POJK Number 35/POJK.04/2020 concerning Appraisal and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market and POJK Number 28/POJK.04/2021 Concerning Appraisal and Presentation of Property

Pasar Modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya. Rincian dari laporan penilaian sebagai berikut:

Appraisal Reports in the Capital Market. The valuation method used is the market value approach and the cost approach. The details of the appraisal report are as follows:

31 Desember 2025/ *December 31, 2025*

Entitas/ Entity	KJPP	Tanggal Laporan/Report Date	Tanggal Penilaian/ Valuation Date	No. Laporan/Report No.	Penilai Independen/ Independent Appraiser
Perusahaan	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	9 Maret 2026	31 Desember 2025	00582/2.0041-00/PI/03/0431/1/III/2026	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
PPSC	KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan	6 Februari 2026	31 Desember 2025	00008/2.0041-00/PI/03/0431/1/II/2026	Agus Shoimuddin, S.E., MAPPI (Cert.)
PPRO	KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	5 Februari 2026	31 Desember 2025	00020/2.0041-04/PI/03/0664/1/II/2026	Zulfikar, S.E., MAPPI (Cert)
PPSB	KJPP Tobing Panuturi & Rekan	4 Februari 2026	31 Desember 2025	00098/2.0171-00/ PI/03/0420/1/II/2026	Panuturi L. Tobing, S.P., S.H., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)., CSA.
PPUB	KJPP Firman Aziz & Rekan	13 Februari 2026	31 Desember 2025	00188/2.0069-07/ PI/03/0523/1/II/2026	Herman, S.P., CLI., MAPPI (Cert.)

Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.04/2021 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan, nilai pasar dan pendekatan biaya.

The valuation was performed in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI), referring to recent arm's length market transaction and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 28/POJK.04/2021 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Appraisal methods were based on the revenue, market value and cost approach.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah mengasuransikan sebagian properti investasi yang dimiliki kepada Perusahaan Asuransi pihak ketiga yaitu PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp632.555.220.364.

As of December 31, 2025, the Group has insured some of its investment properties with third party insurance companies, namely PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Umum Bumiputera Muda with a total coverage value of Rp632,555,220,364.

Grup memiliki pertanggungan asuransi atas aset-asetnya, yang menurut manajemen cukup memadai untuk memitigasi risiko kerugian yang mungkin timbul.

The Group believes that its insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

23. Aset Sewa Pembiayaan / *23. Finance Lease Assets*

Aset dalam Konstruksi - Pembangunan dan Pengembangan Gedung BSI Tower

Aset ini mencerminkan biaya yang timbul dalam rangka pembangunan dan pengembangan Gedung BSI melalui skema kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT). Nilai aset diakui berdasarkan biaya konstruksi yang dikeluarkan hingga tanggal pelaporan, termasuk biaya langsung terkait pembangunan, seperti material, tenaga kerja, dan biaya perizinan. Nilai aset sewa pembiayaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp594.036.329.741 dan Rp540.620.879.318.

Assets in Construction - Construction and Development of BSI Tower Building

This asset reflects the costs incurred in the construction and development of the BSI Building through a Build Operate Transfer (BOT) cooperation scheme. The asset value is recognized based on the construction costs incurred up to the reporting date, including direct costs related to construction, such as materials, labor, and licensing fees. The amount of asset in construction as of December 31, 2025 and 2024 are Rp594,036,329,741 and Rp540,620,879,318, respectively.

24. Aset Minyak Dan Gas Bumi / *24. Oil And Gas Properties*

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Selisih kurs penjabaran/ *Translation of foreign exchange difference*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai perolehan aset minyak dan gas bumi:						***Acquisition cost oil and gas properties:***
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	796.113.016.401	29.651.978.609	--	--	825.764.995.010	*Wells and related equipment and facilities*
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	255.515.975.173	7.878.158.866	--	(19.935.518.639)	243.458.615.400	*Uncompleted wells equipment and facilities*
Bonus tanda tangan	16.162.000.000	620.000.000	--	--	16.782.000.000	*Signature bonus*
Pembongkaran aset dan restorasi area	7.672.018.275	294.310.812	--	--	7.966.329.087	*Asset abandonment of site restoration*
Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	313.461.184.376		--	--	313.461.184.376	*Oil and gas concessions rights*
Jumlah nilai perolehan	**1.388.924.194.225**	**38.444.448.287**	**--**	**(19.935.518.639)**	**1.407.433.123.873**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan fasilitas produksi	(52.186.110.926)	(2.067.478.035)	(3.883.644.111)	--	(58.137.233.072)	*Accumulated depreciation of production facilities*
Akumulasi amortisasi beban lifting pra operasi	(59.084.085.631)	(2.340.635.607)	(4.389.740.782)	--	(65.814.462.020)	*Accumulated amortization of pre-operational lifting expenses*
Akumulasi Beban Bunga	(45.391.823.274)	(1.793.634.400)	(3.101.186.042)	--	(50.286.643.716)	*Accumulated Interest Expense*
Akumulasi amortisasi bonus tanda tangan	(9.697.200.279)	(381.283.080)	(550.116.653)	--	(10.628.600.012)	*Accumulated signature bonus amortization*
Depresiasi ASR	(1.197.323.756)	(60.553.208)	(866.477.450)	--	(2.124.354.414)	*ASR Depreciation*
Akumulasi amortisasi aset minyak dan gas	(149.922.457.200)	--	(16.943.847.806)	--	(166.866.305.006)	*Accumulated amortization oil and gas rights*
Jumlah	**(317.479.001.066)**	**(6.643.584.330)**	**(29.735.012.844)**	**--**	**(353.857.598.240)**	***Total***
Nilai Tercatat	**1.071.445.193.159**				**1.053.575.525.633**	***Carrying Amount***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Selisih kurs penjabaran/ *Translation of foreign exchange difference*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai perolehan aset minyak dan gas bumi:						***Acquisition cost oil and gas properties:***
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	760.434.990.525	35.678.025.876	--	--	796.113.016.401	*Wells and related equipment and facilities*
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	245.089.037.065	10.743.905.440	22.750.560.007	(23.067.527.339)	255.515.975.173	*Uncompleted wells, equipment and facilities*
Bonus tanda tangan	15.416.000.000	746.000.000	--	--	16.162.000.000	*Signature bonus*
Pembongkaran aset dan restorasi area	7.317.895.911	354.122.364	--	--	7.672.018.275	*Abandonment and Site Asset abandonment of site restoration*
Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	313.461.184.376	--	--	--	313.461.184.376	*Oil and gas concessions rights*
Jumlah nilai perolehan	**1.341.719.107.877**	**47.522.053.680**	**22.750.560.007**	**(23.067.527.339)**	**1.388.924.194.225**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan fasilitas produksi	(44.690.268.267)	(2.162.625.191)	(5.333.217.468)	--	(52.186.110.926)	*Accumulated depreciation of production facilities*
Akumulasi amortisasi beban lifting pra operasi	(50.606.947.794)	(2.448.922.703)	(6.028.215.134)	--	(59.084.085.631)	*Accumulated amortization of pre-operational lifting expenses*
Akumulasi Beban Bunga	(40.399.803.381)	(1.955.003.537)	(3.037.016.355)	--	(45.391.823.273)	*Accumulated Interest Expense*
Akumulasi amortisasi bonus tanda tangan	(8.735.737.905)	(422.734.694)	(538.727.681)	--	(9.697.200.279)	*Accumulated signature bonus amortization*
Depresiasi ASR	(1.025.435.963)	(49.622.294)	(122.265.499)	--	(1.197.323.756)	*ASR Depreciation*
Akumulasi amortisasi aset minyak dan gas	(132.978.609.394)	--	(16.943.847.806)	--	(149.922.457.200)	*Accumulated amortization oil and gas rights*
Jumlah	**(278.436.802.704)**	**(7.038.908.419)**	**(32.003.289.943)**	**--**	**(317.479.001.066)**	***Total***
Nilai Buku	**1.063.282.305.173**				**1.071.445.193.159**	***Book Value***

Aset minyak dan gas bumi mencerminkan seluruh biaya eksplorasi dan pengembangan PT OEKA, entitas anak PPEN, untuk mendapatkan minyak dan gas sejak tanggal penandatanganan kontrak bagi hasil yaitu 16 Januari 2007. Seluruh biaya tersebut diajukan penggantian ke pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme *cost recovery* setelah produksi minyak atau gas dimulai. Bonus tanda tangan adalah biaya dimuka yang dibayarkan perusahaan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan migas di Blok Karang Agung

Oil and gas properties reflects all costs of exploration and development for oil and gas of PT OEKA, subsidiary of PPEN, from the date of signing of the production sharing contract of January 16, 2007. The entire cost of the proposed replacement to the government of Indonesia through a cost recovery mechanism after oil or gas production begin. Signature Bonus are upfront fees paid by the Company to the Government of Indonesia to acquire oil and gas management rights in Karang Agung Block according to the provisions of the Production Sharing Contract which is a

sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil pasal 8.1 terkait bonus tanda tangan. Biaya bonus tanda tangan diakui seluruhnya pada saat produksi minyak tercapai dalam satu tahun penuh.

signature bonus on clause 8.1 signature bonus expense are fully recognized when the oil production has reached its one full year.

25. *Goodwill* / *25. Goodwill*

	2025	2024	
Saldo Awal	292.883.536.627	297.170.850.502	*Beginning Balance*
Kerugian Penurunan Nilai	(414.003.890)	(4.287.313.875)	*Impairment Losses*
Saldo akhir	**292.469.532.737**	**292.883.536.627**	***Ending Balance***

	2025	2024	
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	246.863.514.371	246.863.514.371	*PT Lancarjaya Mandiri Abadi*
PT Hasta Kreasi Mandiri	30.172.720.506	30.172.720.506	*PT Hasta Kreasi Mandiri*
PT Widya Tirta Selaras	10.644.274.940	11.123.250.000	*PT Widya Tirta Selaras*
PT PP Krakatau Tirta	4.320.022.710	4.028.301.750	*PT PP Krakatau Tirta*
PT PP Tirta Riau	469.000.210	695.750.000	*PT PP Tirta Riau*
Jumlah	**292.469.532.737**	**292.883.536.627**	***Total***

Berdasarkan penilaian kembali oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan dalam laporan No. 00030/2.0041-00/BS/03/0384/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 nilai pasar 51% ekuitas LMA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.557.000.000.000.

Based on revaluation by KJPP Dasa'at, Yudistira and Partners in their report No. 00030/2.0041-00/BS/03/0384/1/II/2025 dated February 5, 2025 market value of 51% of LMA equity as at December 31, 2024 was Rp1,557,000,000,000.

Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang telah dilakukan, manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai *goodwill* telah memadai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the impairment test which had been conducted, the Management believes that the impairment on goodwill is adequate as of December 31, 2025 and 2024.

Goodwill di atas diuji untuk penurunan nilai secara tahunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The above-mentioned goodwill were tested annually for impairment as of December 31, 2025 and 2024.

26. Aset Takberwujud / *26. Intangible Assets*

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	5.784.004.658.431	--	--	--	5.784.004.658.431	*Concession Right - Toll*
Hak Penggunaan Lahan	--	2.591.480.802	--	--	2.591.480.802	*Land Use Right*
Merek Dagang	6.750.000.000	--	(6.750.000.000)	--	--	*Trademark*
Perangkat Lunak	127.001.729.812	3.419.237.489	--	--	130.420.967.301	*Software*
Hak Paten	25.000.000.000	--	(11.166.295.426)	--	13.833.704.574	*Patent*
Lainnya	4.749.313.875	--	(20.548.619.515)	--	(15.799.305.640)	*Other*
Sub Jumlah	5.947.505.702.118	6.010.718.291	(38.464.914.941)	--	5.915.051.505.468	*Sub-total*
Aset Takberwujud dalam pembangunan						***Intangible Assets Under Development***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	--	--	--	--	--	*Concession Right - Toll*
Pengelolaan Air	--	--	--	--	--	*Water Treatment*
Perangkat Lunak	--	(194.762.489)	--	--	(194.762.489)	*Software*
Lainnya	--	--	--	--	--	*Other*
Sub Jumlah	--	(194.762.489)	--	--	(194.762.489)	*Sub-total*
Jumlah	5.947.505.702.118	5.815.955.802	(38.464.914.941)	--	5.914.856.742.979	*Total*
Akumulasi amortisasi						***Accumulated depreciation***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	48.420.208.828	15.482.651.273	--	--	63.902.860.101	*Concession Right - Toll*
Hak Penggunaan Lahan	--	--	--	--	--	*Land Use Right*
Perangkat Lunak	76.231.930.540	14.435.728.615	--	--	90.667.659.155	*Software*
Hak Paten	--	--	--	--	--	*Patent*
Lainnya	4.293.913.875	--	(5.115.321.655)	--	(821.407.780)	*Other*
Jumlah	128.946.053.243	29.918.379.888	(5.115.321.655)	--	153.749.111.476	*Total*
Jumlah tercatat	**5.818.559.648.875**	**(24.102.424.086)**	**(33.349.593.286)**	**--**	**5.761.107.631.503**	***Net carrying value***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	5.784.004.658.431	--	--	--	5.784.004.658.431	*Concession Right - Toll*
Hak Penggunaan Lahan	--	--	--	--	-	*Land Use Right*
Merek Dagang	6.750.000.000	--	--	--	6.750.000.000	*Trademark*
Perangkat Lunak	111.080.915.120	15.920.814.692	--	--	127.001.729.812	*Software*
Hak Paten	25.000.000.000	--	--	--	25.000.000.000	*Patent*
Lainnya	3.800.459.287	--	--	948.854.588	4.749.313.875	*Other*
Sub Jumlah	5.930.636.032.838	15.920.814.692	--	948.854.588	5.947.505.702.118	
Aset Takberwujud dalam pembangunan						***Intangible Assets Under Development***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	--	--	--	--	--	*Concession Right - Toll*
Pengelolaan Air	--	--	--	--	--	*Water Treatment*
Perangkat Lunak	--	--	--	--	--	*Software*
Lainnya	--	--	--	--	--	*Other*
Sub Jumlah	--	--	--	--	--	*Sub-total*
Jumlah	5.930.636.032.838	15.920.814.692	--	948.854.588	5.947.505.702.118	*Total*
Akumulasi amortisasi						***Accumulated depreciation***
Hak Pengusahaan Jalan Tol	21.827.800.783	26.592.408.045	--	--	48.420.208.828	*Concession Right - Toll*
Hak Penggunaan Lahan	--	--	--	--	--	*Land Use Right*
Perangkat Lunak	69.810.774.543	6.335.355.997	--	--	76.146.130.540	*Software*
Hak Paten	--	--	--	--	--	*Patent*
Lainnya	3.338.459.250	1.041.254.625	--	--	4.379.713.875	*Other*
Jumlah	94.977.034.576	33.969.018.667	--	--	128.946.053.243	*Total*
Jumlah tercatat	**5.835.658.998.262**	**(18.048.203.975)**	**--**	**948.854.588**	**5.818.559.648.875**	***Net carrying value***

Aset takberwujud lainnya

Aset takberwujud PPRO berupa Hak Penggunaan *(use rights)* PT BIJB Aerocity Development di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang dicatat sebagai setoran modal pemegang saham non-pengendali di entitas anak:

- PT PPRO BIJB Aerocity Development. Aset takberwujud berupa *brand equity* PPRO yang dicatat sebagai setoran modal di entitas anak;
- PT Limasland Realty Cilegon sebesar Rp6.750.000.000.

Other intangible Assets

Intangible assets in form use rights of PT BIJB Aerocity Development at Kertajati International Airport, Majalengka, West Java, which were recognized as non-controlling shareholder's capital in subsidiary:

- *PT PPRO BIJB Aerocity Development. Intangible assets in form brand equity of PPRO which were recognized as capital in subsidiary;*
- *PT Limasland Realty Cilegon amounting to Rp6,750,000,000.*

27. Aset Hak-Guna / *27. Right-Of-Use Assets*

Grup menyewa beberapa aset termasuk bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Masa sewa rata-rata adalah 3 tahun. Grup memiliki opsi untuk membeli aset tertentu dengan jumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Grup dijamin dengan hak milik pesewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut.

The Group leases several assets including building, vehicles, machines, and equipment. The average lease term is 3 years. The Group has options to purchase certain assets for a nominal amount at the end of the lease term. The Group's obligations are secured by leasehold to the leased assets for that lease.

	1 Januari/ ***January 1, 2025***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Desember 31/** ***December 31, 2025***
Biaya perolehan/ *Acquisition cost*					
Mesin dan peralatan/ *Machinery and equipment*	1.212.270.097.898	102.529.933.299	17.514.625.000	(51.723.757.554)	1.245.561.648.643
Kendaraan/ *Vehicles*	116.655.910.743	282.551.903.171	19.229.512.407	124.366.703.503	504.345.005.010
Jumlah/ *Total*	1.328.926.008.641	385.081.836.470	36.744.137.407	72.642.945.949	1.749.906.653.653
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*					
Mesin dan peralatan/ *Machinery and equipment*	461.945.320.448	197.603.391.827	17.514.625.000	(1.952.083.334)	640.082.003.941
Kendaraan/ *Vehicles*	81.577.307.146	109.302.342.395	19.108.474.219	1.003.468.750	172.774.644.072
Jumlah/ *Total*	543.522.627.594	306.905.734.222	36.623.099.219	(948.614.584)	812.856.648.013
Nilai tercatat bersih/ *Net carrying value*	**785.403.381.047**				**937.050.005.640**

	1 Januari/ *January 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Desember 31/ *December 31, 2024*
Biaya perolehan/ *Acquisition cost*					
Bangunan/ *Building*	4.321.944.861	--	--	(4.321.944.861)	--
Mesin dan peralatan/ *Machinery and equipment*	644.665.974.548	417.283.514.660	(15.392.778.688)	165.713.387.378	1.212.270.097.898
Kendaraan/ *Vehicles*	120.204.463.710	21.172.147.280	(22.363.281.287)	(2.357.418.960)	116.655.910.743
Jumlah/ *Total*	769.192.383.119	438.455.661.940	(37.756.059.975)	159.034.023.557	1.328.926.008.641
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*					
Bangunan/ *Building*	108.048.622	72.032.414	--	(180.081.036)	--
Mesin dan peralatan/ *Machinery and equipment*	240.308.497.031	240.202.823.858	(15.392.778.688)	(3.173.221.753)	461.945.320.448
Kendaraan/ *Vehicles*	92.131.576.832	11.444.348.758	(21.597.688.018)	(400.930.426)	81.577.307.146
Jumlah/ *Total*	332.548.122.485	251.719.205.030	(36.990.466.706)	(3.754.233.215)	543.522.627.594
Nilai tercatat bersih/ *Net carrying value*	**436.644.260.634**				**785.403.381.047**

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset hak guna yang direklasifikasi ke aset tetap Adalah sebesar Rp72.642.945.949 (Catatan 21).

As of December 31, 2025, right of use assets reclassified to property and equipment amounted to Rp72,462,945,949 (Note 21).

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2025	2024	
Beban Pokok Pendapatan	297.162.929.892	251.442.851.014	*Cost of Revenue*
Beban Usaha	9.742.804.330	276.354.016	*Operating Expense*
Jumlah	**306.905.734.222**	**251.719.205.030**	***Total***

28. Utang Usaha / *28. Trade Accounts Payable*

Rincian utang usaha berdasarkan para pihak adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by parties are as follows:

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Wijaya Karya Beton Tbk	124.228.984.826	68.405.177.732
PT Solusi Bangun Beton	65.732.309.313	--
PT Krakatau Pipe Industries	18.210.619.724	188.616.252.494
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9.554.822.944	60.664.340.923
Lain-lain di bawah Rp60 Miliar	269.113.928.801	471.010.040.986
Jumlah Utang Usaha Pihak Berelasi/ *Total Account Payable Related Parties*	486.840.665.608	788.695.812.135
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Jumlah Utang Usaha - Pihak Ketiga/ *Total Account Payable - Third Parties*	7.577.441.944.289	8.687.715.045.483
Dikurangi/ *Less:*		
Bagian Tidak Lancar - Pihak Ketiga/ *Non-Current Portion - Third Parties*	(427.197.941.164)	(65.308.924.657)
	7.637.084.668.733	**9.411.101.932.961**

Jangka waktu kredit dari pembelian bahan baku dan material, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri, berkisar 30 sampai dengan 60 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Purchases of raw and materials, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 60 days. No interest is charged to the trade payable. As of December 31, 2025 and December 31, 2024, all accounts payables are in Rupiah.

29. Biaya Akrual / *29. Accruals*

	2025	2024	
Utang yang belum difakturkan	3.398.946.774.659	2.995.899.120.270	*Unbilled Payables*
Pemeliharaan Fisik	127.890.325.159	187.211.556.978	*Physical Maintenance*
Gaji dan Insentif Karyawan	117.381.260.389	82.145.844.286	*Employees Salaries and Incentive*
Tantiem	16.310.782.507	41.787.704.774	*Bonus*
Lain-lain	154.895.664.597	231.409.272.452	*Others*
Jumlah	**3.815.424.807.311**	**3.538.453.498.760**	***Total***

30. Utang Bank Jangka Pendek / *30. Short-Term Bank Loans*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.005.807.774.400	1.481.283.470.699
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	438.769.236.102	1.157.097.150.934
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	198.850.000.000	447.359.400.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95.385.838.538	540.958.445.525
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	2.700.000.000
Sub Jumlah/ *Sub Total*	1.738.812.849.040	3.629.398.467.158
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank ICBC Indonesia	400.000.000.000	400.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	210.999.999.996	43.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	107.279.154.075	105.410.266.257
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	90.000.000.000
PT Bank DKI	--	207.407.398.644
Sub Jumlah/ *Sub Total*	718.279.154.071	845.817.664.901
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek/ *Total Short-Term Bank Loans*	**2.457.092.003.111**	**4.475.216.132.059**

Rincian utang bank jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of short-term bank debt as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Nama Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian *Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perusahaan/ *The Company*	Musyarakah	700.000.000.000	15 November/ *November 15, 2025*	7,00%	--	450.000.000.000
	Perusahaan/ *The Company*	Musyarakah	700.000.000.000	15 November/ *November 15, 2025*	7,00%	--	175.682.277.609
	Perusahaan/ *The Company*	Musyarakah	700.000.000.000	15 November/ *November 15, 2026*	7,00%	326.655.525.507	490.000.000.000
	PPRE	Fasilitas Modal Kerja Transaksional	400.000.000.000	25 Maret/ *March 25, 2026*	9,00%	112.113.710.595	41.414.873.325
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan/ *The Company*	KMK Transaksional	5.000.000.000.000	15 Juli/ July 15, 2026	7,75%	1.005.807.774.400	961.507.774.400
	Perusahaan/ *The Company*	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	500.000.000.000	25 Agustus/ *August 25, 2025*	7,60%	--	499.775.696.299
	PPRE	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	250.000.000.000	25 April/ *April 25, 2026*	8,25%	--	20.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan/ *The Company*	Kredit modal kerja R/K/ *Working capital loan R/K*	100.000.000.000	7 Juni/ *June 7, 2026*	9,50%	95.385.838.538	98.066.445.525
	Perusahaan/ *The Company*	Transaksional	650.000.000.000	7 Juni/ *June 7, 2025*	8,75%	--	442.892.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan/ *The Company*	KMK Transaksional	500.000.000.000	7 September/ *September 7, 2026*	8,25%	98.850.000.000	347.359.400.000
	Perusahaan/ *The Company*	Kredit Jangka Pendek/ *Short Term Credit*	100.000.000.000	7 September/ *September 7, 2026*	7,75%	100.000.000.000	100.000.000.000

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Nama Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
PT Bank ICBC Indonesia	Perusahaan/ *The Company*	Kredit modal kerja R/K/ *Working capital loan R/K*	400.000.000.000	20 Juli/ *July 20, 2026*	8,29%	400.000.000.000	400.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	PPRE	KMK Jasa Konstruksi/ *KMK Construction Services*	300.000.000.000	Maret 1/ *March 1, 2026*	9,15%	107.279.154.075	105.410.266.257
PT Bank Central Asia Tbk	LMA	Term loan Revolving 1	101.500.000.000	8 Maret/ *Maret 8, 2026*	8,00%	101.500.000.000	43.000.000.000
	LMA	Term loan Revolving 2	110.000.000.000	8 Maret/ *Maret 8, 2026*	8,00%	109.499.999.996	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PPUB	Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving/*	70.000.000.000	30 Januari / *January 30, 2025*	9,50%	--	2.700.000.000
PT Bank Danamon Tbk	PPRO	Kredit Modal Kerja (KMK)	100.000.000.000	1 Desember/ *December 1, 2024*	2,00%	--	90.000.000.000
PT Bank DKI	PPRE	KMK Jasa Konstruksi/ *KMK Construction Services*	61.187.879.210	31 Mei 2025/ *May 31, 2025*	9,35%	--	36.248.846.161
	PPUB	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	275.000.000.000	15 Mei 2025/ *May 15, 2025*	10,00%	--	171.158.552.483
			11.017.687.879.210			**2.457.092.003.111**	**4.475.216.132.059**

Jaminan dan pembatasan dari setiap perjanjian dengan bank dan Perusahaan dan masing-masing entitas anak diungkapkan dalam catatan 39.

Collateral and covenant from each of agreements with banks and the Company and its subsidiaries are disclosed in Note 39.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Grup telah melakukan pembayaran atas utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp7.504.095.349.911.

As of 31 December 2025, the Group has made payments on its short-term bank and other financial institution borrowings amounting to Rp7,504,095,349,911.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp7.213.815.559.460.

As of 31 December 2024, the Group has made payments on its short-term bank and other financial institution borrowings amounting to Rp7,213,815,559,460.

31. Utang Non Bank / *31. Non Bank Loan*

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Nama Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia *(Indonesia Eximbank)*	PPRE	Kredit modal kerja ekspor/ *Export working capital loan*	300.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2026*	9%	299.609.874.242	304.516.630.123
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PPTTM	Kredit Investasi/ *Credit Investment*	44.978.000.000	13 Mei/ *May 13, 2033*	10,00%	44.048.000.000	38.493.486.527
			344.978.000.000			**343.657.874.242**	**343.010.116.650**

PPRE

PPRE memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 18 Februari 2022 dan pada tahun 2025, telah dilakukan addendum atas perjanjian kredit dengan No. 015/A/LCC/II/2025. Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia atas seluruh piutang usaha pada proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai

PPRE

PPRE obtained an Export Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 53 dated February 18, 2022 and in 2025, an addendum has been made to the credit agreement with No. 015/A/LCC/II/202. This loan is guaranteed by Fiduciary for all trade receivables on projects financed by existing and future loan facilities with a guarantee value of Rp375,000,000,000 which is bound by the

penjaminan Rp375.000.000.000 yang diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No. 54 tanggal 18 Februari 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sehubungan dengan pinjaman di atas, PPRE diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:
- *Interest bearing debt to equity ratio* tidak lebih dari 3 kali.
- *Debt service coverage ratio* tidak kurang dari 1 kali.
- *Current ratio* tidak kurang dari 1 kali.

Deed of Fiduciary Guarantee Agreement No. 54 dated February 18, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. In connection with the loan above, PPRE is required to maintain the following financial covenants:
- *Interest bearing debt to equity ratio is not more than 3 times.*
- *Debt service coverage ratio is not less than 1 time.*
- *Current ratio is not less than 1 time.*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 PPRE telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

As of December 31, 2025 and 2024, PPRE has complied with all the above short-term loan requirements as stated in the related credit agreement.

PPTTM

PPTTM memperoleh fasilitas kredit investasi sesuai dengan akta perjanjian pembiayaan No. 9 tanggal 7 Juni 2024 dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan proyek dan untuk refinancing atas hutang pemegang saham sehubungan dengan pembangunan proyek. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas seluruh tagihan, hasil klaim asuransi yang sehubungan dengan proyek, dan jaminan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

PPTTM diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan DSCR di atas IDR 6.500.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 PPTTM telah memenuhi semua persyaratan tersebut seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas utang non bank adalah masing-masing sebesar Rp11.316.440.846 dan Rp602.729.108.318.

PPTTM

PPTTM obtained an investment credit facility in accordance with financing agreement deed No. 9 dated June 7, 2024, with the purpose of financing project development and refinancing shareholder loans related to the project development. This loan is secured by fiduciary collateral over all receivables, insurance claim proceeds related to the project, and other collateral to be determined later.

PPTTM is required to maintain a DSCR financial ratio above IDR 6,500,000,000. As at December 31, 2025 and 2024, PPTTM has complied with all such requirements as stated in the relevant credit agreement.

As of 31 December 2025 and 2024, the Group has made payments on its non-bank amounting to Rp11,316,440,846 and Rp602,729,108,318, respectively.

32. Pendapatan Diterima Dimuka / *32. Unearned Revenue*

Akun ini merupakan pendapatan yang diterima dimuka atas sewa ruangan dan biaya layanan parkir penyewa.

This account represents unearned revenue from room rental and tenant parking service fees.

	2025	2024
Pendapatan Sewa/ *Unearned Revenue*		
Perusahaan/ *The Company*	90.548.722.923	86.586.820.302
Pendapatan Sewa Entitas Anak/ *Revenue rental of subsidiary*		
PT PP Properti Tbk (PPRO)	28.514.657.294	28.335.275.897
PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)	10.300.927.131	8.998.093.022
PT Sinergi Colomadu (SCM)	395.858.310	384.727.388
PT Centurion Perkasa Iman (CPI)	79.276.527	36.336.340
PT PP Semarang Demak (PPSD)	5.400.000	8.431.668
Jumlah/ *Total*	129.844.842.185	124.349.684.617
Dikurangi bagian tidak lancar/ *Less Non current portion*	(5.514.847.030)	(4.620.269.423)
Jumlah/ *Total*	**124.329.995.155**	**119.729.415.194**

33. Surat Berharga Jangka Menengah / *33. Medium Term Notes*

	2025	2024	
Pokok surat utang jangka menengah	--	630.000.000.000	*Medium term notes principle*
Sub Jumlah	**--**	**630.000.000.000**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	--	(600.000.000.000)	*Current maturity*
Jumlah surat utang jangka menengah setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**--**	**30.000.000.000**	***Total medium term notes net of current maturity***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, rincian dari surat berharga jangka menengah di atas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and December 31, 2024 details of the medium-term notes are as follows:

Uraian/ *Description*	Pokok/*Principal* 2025	Pokok/*Principal* 2024	Bank Kustodian / *Supervisory agent & underwriter*	Jangka Waktu/ *Term*	Suku Bunga/ *Interest*
MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2014-Jatuh Tempo Tahun 2026	--	30.000.000.000	*PT Henan Putihrai Sekuritas*	24 April/ *April 24, 2026*	10,50%
MTN XV PT PP Properti Tbk Tahun 2022-Jatuh Tempo Tahun 2025	--	300.000.000.000	*PT Bahana Sekuritas PT Mandiri Sekuritas*	30 Juli/ *July 30, 2025*	9,50%
MTN XVI PT PP Properti Tbk Tahun 2022-Jatuh Tempo Tahun 2025	--	300.000.000.000	*PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia*	26 Agustus/ *August 26, 2025*	10,00%
Jumlah/ Total	**--**	**630.000.000.000**			

Berdasarkan Keputusan Homologasi PPRO, surat utang jangka menengah tersebut dikonversi menjadi obligasi konversi (Catatan 40b dan 57).

Based on PPRO's Homologasion Decision, the medium-term notes were converted into convertible bonds (Notes 40b and 57).

34. Uang Muka Pemberi Pekerjaan Dan Konsumen / *34. Advances From Projects Owners And Consumers*

	2025	2024	
Jasa Konstruksi	1.707.484.070.340	1.908.854.729.148	*Constructions*
Realti	941.651.495.368	1.125.258.211.395	*Realty*
Jumlah	2.649.135.565.708	3.034.112.940.543	*Total*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.209.813.385.715)	(455.116.941.081)	*Current Maturity*
Uang Muka Jangka Panjang - Bersih	**1.439.322.179.993**	**2.578.995.999.462**	***Long-term Advances - Net***

35. Liabilitas Sewa / *35. Lease Liabilities*

	2025	2024
PT Mandiri Tunas Finance	339.401.239.721	361.237.836.900
PT Liugong Finance	79.235.261.451	--
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	64.296.718.853	97.733.896.506
PT KDB Tifa Finance	60.384.357.423	--
PT Bumiputera - BOT Finance	55.152.058.094	45.559.109.993
PT Adira Dinamika Multifinance	51.932.404.694	--
PT ORIX Indonesia Finance	50.561.896.381	36.776.559.666
PT Komatsu Astra Finance	36.565.782.457	48.490.439.165
PT Astra Credit Company	34.608.374.953	1.439.322.106
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	33.293.620.825	53.222.810.287
PT Surya Artha Nusantara Finance	31.121.641.601	55.548.008.571
PT Takari Kokoh sejahtera	17.986.961.718	15.760.092.905
PT Chandra Shakti Utama Leasing	16.720.682.329	3.182.160.839
PT IFS Capital	15.531.580.372	--
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	13.821.190.972	--
PT Shinhan Finance	12.444.994.636	--
Lain-lain di bawah Rp 5 milyar/ *Others below Rp 5 billion*	50.115.473.382	67.720.678.663
Jumlah/ *Total*	963.174.239.862	786.670.915.601
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun/ *Less current maturity*	(684.548.417.265)	(66.858.218.678)
Jumlah/ *Total*	**278.625.822.597**	**719.812.696.923**

Nilai dari liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The amounts of lease liabilities are as follows:*

	2025	2024	
Saldo Awal	786.670.915.601	351.323.344.438	***Beginning Balance***
Penambahan liabilititas sewa	385.082.100.495	437.270.159.732	*Addition of lease liabilities*
Beban bunga atas liabilitas sewa	103.112.885.458	70.840.442.665	*Interest on lease liabilities*
Reklasifikasi dari Utang Usaha	321.941.693.172	--	*Reclassment from Account Payables*
Pembayaran liabilitas sewa	(633.633.354.864)	(72.763.031.234)	*Payment of lease liabilities*
Saldo Akhir	**963.174.239.862**	**786.670.915.601**	***Ending Balance***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(684.548.417.265)	(66.858.218.678)	*Less short term maturities*
Bagian jangka panjang	**278.625.822.597**	**719.812.696.923**	***Long-term portion***

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The statement of profit or loss shows the following amounts related to lease:

	2025	2024	
Depresiasi atas aset hak guna (Catatan 27)			*Depreciation related to right of use (Notes 27)*
Bangunan	--	72.032.414	*Building*
Mesin dan Peralatan	197.603.391.827	240.202.823.858	*Machine and Equipment*
Kendaraan	109.302.342.395	11.444.348.758	*Vehicle*
Beban Sewa Jangka Pendek	54.076.102.734	40.550.710.838	*Short Term Rent Expense*
Beban Bunga	103.112.885.458	70.840.442.665	*Interest Expense*
Jumlah	**464.094.722.414**	**363.110.358.533**	***Total***

36. Utang pada Ventura Bersama / *36. Joint Venture Payable*

	2025	2024	
KSO PP-Wika-KMK	815.324.154.397	--	*KSO PP-Wika-KMK*
KSO PP-Waskita	249.386.822.507	--	*KSO PP-Waskita*
KSO PP-Brantas-Rangga	144.129.865.501	239.559.758.979	*KSO PP-Brantas-Rangga*
KSO PP-Wika-NK-Adhi Karya	87.250.000.000	--	*KSO PP-Wika-NK-Adhi Karya*
KSO PP-Modern-SBS	85.451.275.061	12.000.000.000	*KSO PP-Modern-SBS*
KSO PP-CRBC-Wika	77.935.019.792	21.060.832	*KSO PP-CRBC-Wika*
KSO PP-KR Industry	72.591.789.005	--	*KSO PP-KR Industry*
KSO PP-Wika-Jakon	69.613.928.881	125.565.975.312	*KSO PP-Wika-Jakon*
KSO PP-APTA-ADP	61.340.233.506	--	*KSO PP-APTA-ADP*
KSO PP-Jatiwangi	58.960.450.310	83.374.340.778	*KSO PP-Jatiwangi*
KSO PP-Wika	36.005.065.609	210.330.065.932	*KSO PP-Wika*
KSO PP-Adhi Karya	28.140.902.785	59.726.434.704	*KSO PP-Adhi Karya*
KSO PP-Ashfri	24.642.478.668	105.096.469.690	*KSO PP-Ashfri*
KSO PP-Adhi Karya-Waskita-MWT	22.000.000.002	6.700.320.002	*KSO PP-Adhi Karya-Waskita-MWT*
KSO PP-Selaras	15.426.056.774	117.338.831.944	*KSO PP-Selaras*
KSO PP-Wika	13.556.361.310	--	*KSO PP-Wika*
KSO PP-Adhi Karya	13.306.172.747	17.834.812.209	*KSO PP-Adhi Karya*
KSO PP-Brantas-Nindya Karya	12.704.683.930	23.839.902.896	*KSO PP-Brantas-Nindya Karya*
KSO PP-Memiontec	11.624.037.487	47.289.480.036	*KSO PP-Memiontec*
KSO PP-Mafri-Bangunnusa	7.570.126.995	5.961.716.981	*KSO PP-Mafri-Bangunnusa*
KSO PP-WAA	7.133.405.538	1.622.043.334	*KSO PP-WAA*
KSO PP-Ashfri	6.633.647.557	--	*KSO PP-Ashfri*
KSO PP-Jatiwangi	6.073.202.246	--	*KSO PP-Jatiwangi*
KSO PP-Selaras	5.432.539.044	--	*KSO PP-Selaras*
KSO PP-BNL	5.211.716.981	--	*KSO PP-BNL*
KSO PP-Markinah	5.160.331.507	--	*KSO PP-Markinah*
Lain-lain di bawah Rp 5 milyar	12.771.447.855	180.588.983.489	*Others below Rp 5 billion*
Jumlah	**1.955.375.715.995**	**1.236.850.197.118**	***Total***

37. Utang Jangka Pendek Lainnya / *37. Other Short Term Liabilities*

	2025	2024	
Beban Umum	116.165.591.773	445.181.698.443	*General Expense*
Bunga Pinjaman	47.857.969.457	77.325.691.746	*Interest Expense*
Jaminan Penyewa Mall	47.089.595.882	15.512.240.529	*Tenant Guarantee*
Pembelian Tanah	--	54.522.879.791	*Land Purchase*
Lain-lain	39.773.441.384	46.811.019.586	*Others*
Jumlah	**250.886.598.496**	**639.353.530.095**	***Total***

Utang pembelian tanah merupakan liabilitas yang berasal dari entitas PPRO kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya atas pembelian tanah di Surabaya. Berdasarkan Keputusan Homologasi (Catatan 57), utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya menjadi utang jangka panjang melalui skema penyelesaian dalam jangka waktu satu tahun dengan opsi perpanjangan sampai terdapat investor atau pembeli lahan, atau dengan cara pengembalian aset jaminan maupun aset perusahaan lainnya yang akan digunakan untuk pelunasan.

Land purchase liabilities are liabilities from PPRO to *PT Aneka Bangun Mulia Jaya for the purchase of land in Surabaya. Based on Homologation Decision (Note 49), the payable to PT Aneka Bangun Mulia Jaya has been classified as a long-term liability under a settlement scheme within a one-year period, with an option for extension until an investor or land buyer is obtained, or through the return of pledged collateral assets or other Company assets to be used for settlement.*

38. Liabilitas Program Imbalan Kerja / *38. Employee Benefits Liability*

	2025	2024	
Program Pesangon Pensiun dan Manfaat Lain	408.163.565.300	253.717.222.882	*Pension Severance Program and other benefits*
Program Masa Persiapan Pensiun	20.782.504.647	31.591.767.823	*Post-Employment Preparation Program*
Program Penghargaan Masa Kerja	20.637.683.308	18.555.284.529	*Long Service Program*
Program Cuti Besar Berimbalan	11.127.660.857	10.375.474.475	*Paid Leave Program*
Program Pensiun	(24.764.105.749)	(28.932.121.097)	*Pension Program*
Program Kompensasi PKWT	--	55.613.169	*Fixed Term Employment Agreement Program*
Jumlah	**435.947.308.363**	**285.363.241.781**	***Total***

Program imbalan kerja memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti: risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

The employee benefit plan expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk, and salary risk.

Risiko Investasi
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang, dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan *real estate* untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments, and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan

Longevity Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants

setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Program Pensiun
Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan tetap grup yang berumur tidak lebih dari 55 tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap. Dana program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan No. KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003. Kontribusi iuran sebelum UU No. 11 tahun 1992, grup memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU No. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 315 karyawan.

Pension Program
Group provides defined benefit pension program (PSL) for all permanent employees with age under 55 years since promotion to permanent employee. The pension program fund is managed by the Company Pension Fund, as approved by the Minister of Finance with his letter No. KEP-372/KM.6/2003 dated October 31, 2003. The contribution prior to the adoption of Law No. 11 year 1992 is 16.9% by group and 7.5% by the employees, from the employees monthly basic pension salaries. After the adoption of the Law No. 11 year 1992, the company gave contributions of 13.9% and employees bear 4.5% calculated by basic monthly pension salaries. The total number of employees eligible for the benefits until December 31, 2025 is 315 employees.

Liabilitas imbalan kerja Grup sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Group's employment benefits liability relating to the pensionprograms included in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas Awal Tahun	71.441.130.070	37.919.331.467	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Nilai wajat aset program	(77.215.399.525)	(76.726.209.635)	*Fair Value of Plan Assets*
Deifisit/ (Surplus) pendanaan	(5.774.269.455)	(38.806.878.168)	*Deficit/ (Surplus) plan asset*
Batasan atas aset	(18.989.836.294)	9.874.757.071	*The Asset ceiling*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**(24.764.105.749)**	**(28.932.121.097)**	***Net Liabilities End of the Year***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	37.919.331.467	39.447.333.491	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya Bunga	2.469.588.013	2.398.734.821	*Interests Costs*
Biaya Jasa Kini	3.072.217.322	3.360.645.258	*Current Service Costs*
Pembayaran Manfaat	(6.272.803.400)	(6.205.733.000)	*Benefit Paid*
Pengukuran Kembali:			*Remasurement:*
Penyesuaian Asumsi Keuangan	2.338.613.149	(1.419.400.873)	*Changes in Financial Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Pengalaman	724.460.736	337.751.770	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Experience Adjustments*
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	**40.251.407.287**	**37.919.331.467**	***Present Value of Liabilities - End of Year***

Mutasi aset program adalah sebagai berikut:

The movement of the fair value of asset program are as follow:

	2025	2024	
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	76.726.209.635	82.409.254.909	*Fair Value of Plan Assets - Beginning of the Year*
Hasil Pengembangan Riil:			*Realized Development Result:*
- Bunga Sesuai Bunga Diskonto	5.256.225.342	5.265.871.485	*Interest Based on Discount -*
atas Bunga Diskonto	622.698.134	(5.702.270.121)	*discount -*
Pembayaran Iuran-iuran - Peserta Program	883.069.814	959.086.362	*Payment of Contributions from Employee*
Pembayaran Imbalan Kerja	(6.272.803.400)	(6.205.733.000)	*Benefits Paid*
Aset Program Akhir Tahun	**77.215.399.525**	**76.726.209.635**	***Plan Assets - End of the Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follow:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	3.072.217.322	3.360.645.258	*Current Service Cost*
Iuran peserta	(883.069.814)	(959.086.362)	*Payment of Contributions from Employee*
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	--	--	*Net Interest on Liabilities (Assets)*
Bunga Liabilitas	2.469.588.013	2.398.734.821	*Interest on Liabilities*
Bunga Aset	(5.256.225.342)	(5.265.871.485)	*Interest on Assets*
Bunga Batas Atas Aset	701.107.752	783.699.432	*Interest Cap on Assets*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria -			*Actuarial (Gains) and Losses Arising From*
Penyesuaian Asumsi Demografik	(334.332.843)	--	*in demographic assumptions*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**103.617.931**	**318.121.664**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of the employee benefit expenses which is recognized as other consolidated comprehensive income are as follow:

	2025	2024	
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti - neto			*Re-Measurement of define benefits liability (asset) net*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	3.063.073.885	(1.081.649.103)	*Actuarial (Gain)/Loss*
Imbalan hasil atas aset program	(622.698.134)	5.702.270.121	*Return on Plan Assets*
Perubahan atas dampak aset di luar bunga			*Changes in the impact of assets other than*
aset neto/liabilitas	1.624.021.666	(2.783.176.181)	*interest on net assets/liabilities*
Pengukuran Kembali Penghasilan			***Remeasurement on Other Comprehensive***
Komprehensif Lain	**4.064.397.417**	**1.837.444.837**	***Income***
Penghasilan Komprehensif			*Other Comprehensive Income -*
Lain Awal Tahun	22.915.837.889	21.078.393.052	*Beginning of Year*
Penghasilan Komprehensif			*Other Comprehensive Income -*
Lain Tahun Berjalan	4.064.397.417	1.837.444.837	*Income for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir	**26.980.235.308**	**22.915.837.889**	***Other Comprehensive Income - End of Year***

Rincian liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:

Details of recognized liabilities are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas Bersih Awal periode	(28.932.121.097)	(31.087.687.598)	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya Imbalan Pasti			*Benefit Costs*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	103.617.931	318.121.664	*Expense Recognized in Profit Loss*
Pengukuran kembali liabilitas/aset periode berjalan	4.064.397.417	1.837.444.837	*Re-measurement of net liability (assets)*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**(24.764.105.749)**	**(28.932.121.097)**	***Net Liabilities End of the Year***

Adapun asumsi Aktuaria dan metode perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan biaya yang harus dibentuk berkenaan ketiga program imbalan di atas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions and methods of calculation used to determine the costs that must be established regarding the three programs above benefits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat Diskonto	6 - 6,24%	7 - 7,10%	*Discount Rate*
Tingkat kenaikan PhDP	5,00%	5,00%	*Retirement Income Increase Rate*
Tingkat Mortalitas	*TMI 4 Tahun 2019*	*TMI 4 Tahun 2019*	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	10 % dari TMI 4		*10 % dari TMI 4*
Tingkat Pengunduran Diri	5% pada Usia 25 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *5% at the age of 25 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*		*Turnover rate*
Metode Aktuaria	*Projected-Unit-Credit*		*Early Retirement Age (years)*
Usia Pensiun Dipercepat (tahun)	45	45	*Normal Retirement Age (years)*
Usia Pensiun Normal (tahun)	55	55	*Mandatory Retirement Age (years)*
Usia Pensiun Wajib (tahun)	58	58	

Analisis Sensitivitas Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			*Sensitivity Analysis Present Value Defined Benefit Obligations*
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumptions*
+ 1,00%	35.323.878.968	35.323.878.968	*+ 1,00%*
1,00%	40.847.432.902	40.847.432.902	*1,00%*

Program Pesangon Pensiun dan Manfaat Lain

Grup mengakui memberikan imbalan pascakerja yang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13, 2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU Ketenagakerjaan”) pada tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021.

Pension Severance Program and Other Benefits

The Group provides defined post-employment benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the “Labor Law”) in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2021.

Pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan Perusahaan (Tabungan Perusahaan/TAPER) dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP). Pendanaan terkait program manfaat karyawan entitas anak dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya.

In connection with the employee benefit program of the Company (Tabungan Perusahaan/TAPER), the fund is managed by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP). The fund of employee benefit program of the subsidiaries is managed by PT Asuransi Jiwasraya.

Liabilitas imbalan kerja Grup sehubungan dengan program manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statement of financial position arising from the Group’s obligation in respect of the employment benefit is as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas	592.520.684.070	456.931.498.069	*Present Value of Liabilities*
Nilai Wajar Aset Program	(184.357.118.770)	(203.214.275.187)	*Fair Value of Plan Assets*
Liabilitas (Aset) Bersih	**408.163.565.300**	**253.717.222.882**	***Net (Aset) Liabilities***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	456.931.498.069	371.434.829.984	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya Bunga	28.310.773.082	24.414.381.442	*Interests Costs*
Biaya Jasa Kini	44.005.055.918	59.370.380.997	*Current Service Costs*
Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) atas penyelesaian dan kurtailmen	(1.069.947.596)	(120.256.737)	*Past service cost and gains (losses) on settlements and curtailments*
Biaya jasa lalu	15.627.115.680	19.919.628.758	*Past service cost*
Pembayaran Manfaat	(63.577.786.597)	(52.058.854.821)	*Benefit Paid*
Pengukuran Kembali:			*Remasurement:*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Asumsi Keuangan	104.435.427.627	(6.614.042.967)	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Changes in Financial Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Asumsi Demografi	(2.193.424.754)	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Changes in Demographic Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Pengalaman	10.051.972.641	40.585.431.413	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Experience Adjustments*
Beban Pesangon	2.215.913.645	--	*Severance expense*
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	**592.520.684.070**	**456.931.498.069**	***Present Value of Liabilities - End of Year***

Mutasi aset program adalah sebagai berikut:

The movement of the fair value of asset program are as follow:

	2025	2024	
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	203.214.275.187	242.231.584.489	*Fair Value of Plan Assets - Beginning of the Year*
Hasil Pengembangan Riil:			*Realized Development Result:*
- Bunga Sesuai Bunga Diskonto	13.113.097.589	15.363.128.495	*Interest Based on Discount -*
- Kelebihan/(Kekurangan) Pengembangan atas Bunga Diskonto	19.965.147	(28.433.678.402)	*Gain/loss development of interest discount -*
Pembayaran Iuran-iuran - Pemberi Kerja	11.759.485.880	14.241.082.807	*Payment of Contributions from Employer*
Pembayaran Iuran-iuran - Peserta Program	--	--	*Payment of Contributions from Participant*
Pembayaran Imbalan Kerja	(43.749.705.033)	(40.187.842.202)	*Benefits Paid*
Aset Program Akhir Tahun	**184.357.118.770**	**203.214.275.187**	***Plan Assets - End of the Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follow:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	40.089.053.151	59.370.380.997	*Current Service Cost*
Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) atas penyelesaian dan kurtailmen	(1.069.947.596)	(120.256.737)	*Past service cost and gains (losses) on settlements and curtailments*
Biaya jasa lalu	14.649.450.697	19.919.628.758	*Past Service Cost*
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)			*Net Interest on Liabilities (Assets)*
Bunga Liabilitas	27.528.481.254	23.532.368.681	*Interest on Liabilities*
Bunga Aset	(13.113.097.589)	(15.363.128.495)	*Interest on Assets*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**68.083.939.917**	**87.338.993.204**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of the employee benefit expenses which is recognized as other consolidated comprehensive income are as follow:

	2025	2024	
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti - neto			*Re-Measurement of define benefits liability (asset) net*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	115.523.270.214	33.430.262.721	*Changes in demographic assumptions*
Imbalan hasil atas aset program	159.498.022	28.354.017.536	*Changes in financial assumptions*
Perubahan atas dampak aset di luar bunga aset neto/liabilitas	(2.685.775.084)	620.786.591	*Experience Adjustment*
Pengukuran Kembali Penghasilan Komprehensif Lain	**112.996.993.152**	**62.405.066.848**	***Remeasurement on Other Comprehensive Income***
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	192.630.071.039	131.911.284.695	*Other Comprehensive Income - Beginning of Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	112.996.993.152	62.405.066.848	*Other Comprehensive Income - Income for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Tahun	**305.627.064.191**	**194.316.351.543**	***Other Comprehensive Income - End of Year***

Adapun asumsi Aktuaria dan metode perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan biaya yang harus dibentuk berkenaan ketiga program imbalan di atas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions and methods of calculation used to determine the costs that must be established regarding the three programs above benefits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat Diskonto	6 - 6,56%	7 - 7,10%	*Discount Rate*
Program Pesangon	6,24%	7,10%	*Severance Program*
Program Manfaat Lain	8,50%	8,50%	*Other Benefits Program*
Tingkat Kenaikan Upah	TMI 4 Tahun 2019	TMI 4 Tahun 2019	*Salary Increment Rate*
Tingkat Mortalitas	*10 % dari TMI 4*		*Mortality Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	5% pada Usia 25 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *5% at the age of 25 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*	3% pada Usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *3% at the age of 20 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*	*Turnover rate*
Metode Aktuaria	*Projected-Unit-Credit*		*Actuarial Method*
Usia Pensiun Normal (tahun)	55	55	*Mandatory Retirement Age (years)*

Uji sensitivitas dengan melakukan simulasi perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah maka diperoleh gambaran sensitivitas dampak asumsi dalam perhitungan terhadap biaya jasa kini (*current service cost*) dan nilai sekarang dari imbalan pascakerja (*post-employment benefit obligation*).

Sensitivity tests by simulating changes in discount rate and salary increment assumptions provide an overview of the sensitivity of the impact of assumptions in the calculation of current service costs and the present value of post-employment benefit obligations.

	2025	2024	
Analisis Sensitivitas Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			*Sensitivity Analysis Present Value Defined Benefit Obligations*
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumptions*
+ 1,00%	490.205.194.913	358.948.823.062	*+ 1,00%*
-1,00%	579.628.250.437	424.386.735.755	*-1,00%*
Asumsi Tingkat Upah			*Sensitivity Increment Rate Assumptions*
+ 1,00%	561.931.498.787	417.754.564.745	*+ 1,00%*
-1,00%	505.234.386.447	364.290.341.367	*-1,00%*

Cuti Besar Berimbalan

Grup sebagai Pemberi Kerja, memberikan hak kompensasi berupa cuti besar berimbalan kepada pegawai yang sudah memenuhi kriteria dan mekanisme yaitu pegawai tetap yang telah bekerja terus-menerus selama 6 (enam) tahun sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai Peraturan Perusahaan (PP) PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk periode tahun 2023-2025. Perhitungan ini dilakukan untuk pertama kali. Pada 31 Desember 2025, jumlah karyawan aktif yang berhak atas imbalan ini berjumlah 1.596 orang. Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Long Paid Leave

The Group as the Employer, provides compensation rights in the form of paid long leave to employees who have met the criteria and mechanisms, namely permanent employees who have worked continuously for 6 (six) years since the date of appointment as Permanent Employees according to the Company Regulation (PP) of PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk for the period 2023-2025. This calculation is carried out for the first time. As of December 31, 2025, the number of active employees entitled to this benefit is 1,596 people. The details of employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	11.127.660.857	10.375.474.475	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Nilai Wajar Aset Program	--	--	*Fair Value of Plan Assets*
Liabilitas (Aset) Bersih Akhir Tahun	**11.127.660.857**	**10.375.474.475**	***Net (Aset) Liabilities End of the Year***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

	2025	2024	
Nilai kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal Tahun	10.375.474.475	921.768.995	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya Bunga	670.746.315	52.135.283	*Interests Costs*
Biaya Jasa Kini	2.094.695.927	10.095.026.145	*Current Service Costs*
Pembayaran Manfaat	(1.690.774.759)	(693.455.948)	*Benefit Paid*
Pengukuran Kembali:	(1.260.815.750)	--	*Remasurement:*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Asumsi Keuangan	75.182.773	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Changes in Financial Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria - Penyesuaian Pengalaman	863.151.876	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From Experience Adjustments*
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	**11.127.660.857**	**10.375.474.475**	***Present Value of Liabilities - End of Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follow:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	2.094.695.927	10.095.026.145	*Current Service Cost*
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)			*Net Interest on Liabilities (Assets)*
Bunga Liabilitas	578.880.716	--	*Interest on Liabilities*
Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) atas penyelesaian dan kurtailmen	(104.006.220)	--	*Past service costs and profits (losses) for settlement and curtailment*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	(322.481.101)	--	*Actuarial (Gain)/Loss*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**2.247.089.322**	**10.095.026.145**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Uji sensitivitas dengan melakukan simulasi asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, maka diperoleh gambaran sensitivitas dampak asumsi dalam perhitungan terhadap biaya jasa kini *(current service cost)* dan nilai sekarang dari imbalan pascakerja *(post-employment benefit obligation)*.

Sensitivity testing by simulating discount rate assumptions and salary increase rates, we obtain an overview of the sensitivity of the impact of assumptions in calculations on current service costs and the present value of post-employment benefit obligations.

	2025	2024	
Tingkat Diskonto	5,35%	7 - 7,1%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Upah	8,50%	8,50%	*Salary Increment Rate*
Tingkat Mortalitas	*TMI 4 Tahun 2019*	*TMI 4 Tahun 2019*	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	*10 % dari TMI 4*		*Disability Rate*
Metode Aktuaria	*Projected-Unit-Credit*		*Actuarial Method*
Tingkat Pengunduran Diri	5% pada Usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *5% at the age of 20 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*	3% pada Usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *3% at the age of 20 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*	*Turnover rate*

Program Kompensasi PKWT

Grup sebagai Pemberi Kerja, memberikan imbalan kompensasi kepada pegawai yang memiliki masa kontrak lebih dari 12 bulan sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2023.

Fixed-term Employment Agreement Program

The Group as an Employer, provides compensation benefits to employees who have a contract period of more than 12 months in accordance with Law No. 6 of 2023.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas	--	55.613.169	*Present Value of Liabilities*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**--**	**55.613.169**	***Net Liabilities End of the Year***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	55.613.169	433.887.488	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya Jasa Kini	--	248.816.008	*Current Service Costs*
Pembayaran Manfaat	(55.613.169)	(722.416.768)	*Benefit Paid*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria	--	95.326.441	*Actuarial (Gain)/Loss*
Nilai kini Liabilitas- Akhir Tahun	**--**	**55.613.169**	***Present Value of Liabilities - End of Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	--	248.816.008	*Current Service Cost*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	--	95.326.441	*Actuarial (Gain)/Loss*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**--**	**344.142.449**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Program Penghargaan Masa Kerja
Perusahaan sebagai Pemberi Kerja memberikan penghargaan berupa lencana perunggu, perak, dan emas kepada pegawai yang sudah memenuhi kriteria dan mekanisme untuk mendapatkan lencana tersebut sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 28 dan SK Dir No. 194/Kpts/Dir/198.

Service Award Program
The Company as an Employer provides awards in the form of bronze, silver, and gold badges to employees who have met the criteria and mechanisms to obtain the badge according to Company Regulation Article 28 and Decree of the Director No. 194/Kpts/Dir/198.

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas	20.637.683.308	18.555.284.529	*Present Value of Liabilities*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**20.637.683.308**	**18.555.284.529**	***Net Liabilities End of the Year***

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	18.555.284.529	--	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya bunga	1.280.634.656	--	*Interests Costs*
Biaya jasa kini	1.627.904.951	19.146.592.377	*Current Service Costs*
Pembayaran manfaat	(1.036.353.405)	(591.307.848)	*Benefit Paid*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian asumsi demografi	(1.298.092.989)	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Demographic Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian asumsi keuangan	1.232.875.816	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Changes in Financial Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian pengalaman	275.429.750	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Changes in Experience Adjustments*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**20.637.683.308**	**18.555.284.529**	***Net Liabilities - End of Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follow:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	1.627.904.951	19.146.592.377	*Current Service Cost*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**1.627.904.951**	**19.146.592.377**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Adapun asumsi Aktuaria dan metode perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan biaya yang harus dibentuk berkenaan ketiga program imbalan di atas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions and methods of calculation used to determine the costs that must be established regarding the three programs above benefits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat Diskonto	6 - 6,40%	7 - 7,10%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Upah	8,50%	8,50%	*Salary Increment Rate*
Tingkat Kenaikan Harga Emas	10,00%	10,00%	*Gold Price Increment Rate*
Tingkat Kenaikan Harga Perak	7,50%	7,50%	*Silver Price Increment Rate*
Tingkat Kenaikan Harga Perunggu	3,00%	3,00%	*Bronze Price Increment Rate*
Tingkat Mortalitas	TMI 4 2019	TMI 4 2019	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	10 % dari TMI 4	10 % dari TMI 4	*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	30% pada Usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada Usia Pensiun Normal/ *30% at the age of 20 years and decreases linearly to 0.00% at the Normal Retirement Age*		*Turnover Rate*

Uji sensitivitas dengan melakukan simulasi perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah maka diperoleh gambaran sensitivitas dampak asumsi dalam perhitungan terhadap biaya jasa kini (*current service cost*) dan nilai sekarang dari imbalan pascakerja (*post-employment benefit obligation*).

Sensitivity tests by simulating changes in discount rate and salary increment assumptions provide an overview of the impact of assumptions in the calculation of current service costs and the present value of post-employment benefit obligations.

	2025	2024	
Analisis Sensitivitas Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			***Sensitivity Analysis Present Value Defined Benefit Obligations***
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumptions*
+ 1,00%	17.022.115.195	17.022.115.195	*+ 1,00%*
- 1,00%	20.301.676.503	20.301.676.503	*- 1,00%*
Asumsi Tingkat Kenaikan Upah			*Salary Increment Rate Assumptions*
+ 1,00%	20.260.876.688	20.260.876.688	*+ 1,00%*
- 1,00%	17.027.462.903	17.027.462.903	*- 1,00%*

Program Masa Persiapan Pensiun

Pegawai berhak menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 3 bulan sebelum tanggal pensiun. Pegawai tersebut akan mendapatkan Remunerasi selama MPP berupa Gaji Pokok + Tunjangan Posisi sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 29 Kep Dir No. 40/SK/PP/DIR/2022.

Post-Employment Preparation Program

Employees are entitled to undergo a Retirement Preparation Period (MPP) for 3 months before the retirement date. The employee will receive Remuneration during the MPP in the form of Basic Salary + Position Allowance in accordance with Company Regulation Article 29 of Kep Dir No. 40/SK/PP/DIR/2022.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini Kewajiban Imbalan Pasti - awal	31.591.767.823	--	*Present Value of Liabilities - Beginning of Year*
Biaya bunga	2.232.223.382	--	*Interest expense*
Biaya jasa kini	1.590.879.442	33.006.213.190	*Current Service Costs*
(Kuitailment)/Settlement	(10.599.124.066)	--	*Curtailment*
Pembayaran manfaat	(304.003.764)	(1.414.445.367)	*Benefits Payment*
Pengukuran Kembali:			*Remeasurement:*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian asumsi demografi	(1.101.042.909)	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Demographic Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian asumsi keuangan	1.142.331.479	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Changes in Financial Assumptions*
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria - penyesuaian pengalaman	(3.770.526.740)	--	*Actuarial (Gains) and Losses Arising From - Changes in Changes in Experience Adjustments*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**20.782.504.647**	**31.591.767.823**	***Net Liabilities - End of Year***

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the consolidated profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Biaya Jasa Kini	1.590.879.442	33.006.213.190	*Current Service Costs*
Bunga Batas Atas Aset	2.232.223.382	--	*Interest Cap on Assets*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria	(14.328.362.236)	--	*Actuarial (Gain)/Loss*
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	**(10.505.259.412)**	**33.006.213.190**	***Expense Recognized in Profit Loss***

Adapun asumsi Aktuaria dan metode perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan biaya yang harus dibentuk berkenaan ketiga program imbalan di atas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions and methods of calculation used to determine the costs that must be established regarding the three programs above benefits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat Diskonto	6 - 6,57%	7 - 7,10%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Upah	8,50%	8,50%	*Salary Increment Rate*
Tingkat Klaim Manfaat MPP	50,00%	50,00%	*Preparation Period Benefit Claim Rate*
Tingkat Mortalitas	TMI 4 2019	TMI 4 2019	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	10 % dari TMI 4		*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	10 - 30% pada Usia 20 tahun dan menurun secara linear *10 - 30% at the age of 20 years and decreases linearly to*		*Turnover Rate*
Metode Aktuaria	*Projected-Unit-Credit*		*Actuarial Method*
Usia Pensiun Normal (tahun)	55	55	*Normal Retirement Age (years)*

Uji sensitivitas dengan melakukan simulasi perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah maka diperoleh gambaran sensitivitas dampak asumsi dalam perhitungan terhadap biaya jasa kini (*current service cost*) dan nilai sekarang dari imbalan pascakerja (*post-employment benefit obligation*).

Sensitivity tests by simulating changes in discount rate and salary increment assumptions provide an overview of the sensitivity of the impact of assumptions in the calculation of current service costs and the present value of post-employment benefit obligations.

	2025	2024	
Analisis Sensitivitas			***Sensitivity Analysis***
Nilai Kini Kewajiban			***Present Value Defined***
Imbalan Pasti			***Benefit Obligations***
Asumsi Tingkat Diskonto			*Discount Rate Assumptions*
+ 1,00%	18.900.213.919	29.044.707.529	*+ 1,00%*
- 1,00%	22.960.912.563	34.526.230.079	*- 1,00%*
Asumsi Tingkat Kenaikan Upah			*Salary Increment Rate Assumptions*
+ 1,00%	22.898.512.392	34.457.269.823	*+ 1,00%*
- 1,00%	18.915.733.753	29.053.544.742	*- 1,00%*

39. Utang Bank Dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang / *39. Bank Loans And Long Term Financial Institutions*

	2025	2024
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.157.343.223.937	5.049.121.961.922
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	804.440.883.364	807.642.438.070
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.276.729.695.517	1.165.176.731.497
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.950.000.000	325.111.673.746
Sub Jumlah/ *Sub-total*	8.304.463.802.818	7.347.052.805.235
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	574.494.590.582	444.517.759.332
PT Bank DKI	550.291.271.405	424.463.044.734
PT Indonesia Infrastructure Finance	395.911.800.005	699.323.598.535
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	709.729.201.890	361.937.034.720
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	391.800.561.796	390.023.180.470
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	391.800.561.796	390.023.180.470
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	685.999.180.000	693.000.000.000
PT Bank KB Indonesia Tbk	204.660.013.129	205.128.284.267
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	245.014.133.665	243.903.967.298
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	239.954.713.672	238.865.951.455
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	161.594.601.311	160.861.315.359
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	119.317.597.650	96.361.721.456
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Unit Usaha Syariah	97.078.432.874	118.916.297.604
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha Syariah	97.078.432.874	47.729.059.276
PT Bank Aceh Syariah	97.078.432.874	96.577.238.751
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	88.108.865.556	87.708.722.437
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	52.069.428.362	59.424.481.331
PT BPR Intidana	52.385.000.000	57.345.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	90.000.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara - Unit Usaha Syariah	48.448.527.878	97.045.754.610
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten - Unit Usaha Syariah	19.457.984.782	--
PT BPR Surya Arthaguna Abadi	21.786.752.706	22.822.944.266
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.270.106.060	37.129.933.792
PT BPR Jawa Timur	10.948.347.159	17.171.967.062
PT Bank Permata Tbk	--	41.039.475.746
PT Bank Central Asia Tbk	--	87.976.075.752
Sub Jumlah/ *Sub Total*	5.357.278.538.026	5.119.295.988.723
Dampak Restrukturisasi Pinjaman yang Belum Diamortisasi/ *Impact of Unamortized Loan Restructuring*	(1.942.841.749.964)	(62.482.083.706)
Amortisasi Dampak Restrukturisasi Pinjaman/ *Amortization of the Impact of Loan Restructuring*	30.867.362.923	14.209.073.832
Jumlah/ *Total*	11.749.767.953.803	12.418.075.784.084
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun/ *Less due in more than one year*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	261.801.760.186	39.683.721.850
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29.572.520.640	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.455.354.512	--
Sub Jumlah/ *Sub-total*	293.829.635.338	39.683.721.850

	2025	2024
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	428.038.000.000	299.580.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.270.106.060	--
PT BPR Jawa Timur	7.065.184.515	6.223.619.907
PT Bank Bukopin Tbk	5.973.667.111	1.891.742.582
PT Bank DKI	5.727.628.880	2.011.074.123
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	1.963.912.584	1.962.023.535
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1.963.912.584	1.962.023.535
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.823.646.107	1.839.397.057
PT Bank Jateng	1.228.141.020	1.226.264.709
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.202.780.532	1.201.739.415
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	809.998.020	809.334.708
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	598.083.192	603.322.237
PT Bank Aceh Syariah	486.608.688	490.505.884
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Unit Usaha Syariah	486.608.688	490.505.884
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha Syariah	486.608.688	490.505.884
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	441.648.444	441.455.296
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara - Unit Usaha Syariah	242.849.760	245.252.942
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	--	81.622.221.681
PT Bank Central Asia Tbk	--	87.976.075.752
Sub Jumlah/ *Sub Total*	470.809.384.873	491.067.065.131
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturity*	764.639.020.211	530.750.786.981
Utang Jangka Panjang/ *Long- term Liabilities*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*	7.291.701.156.660	7.302.766.676.898
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	3.693.427.776.932	4.584.558.320.205
Jumlah Utang Jangka Panjang/ *Total Long-Term Liabilities*	**10.985.128.933.592**	**11.887.324.997.103**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: *As of December 31, 2025 and 2024:*

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Jenis Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan/ *The Company*	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	3.000.000.000.000	25 Agustus/ *August 25, 2026*	7,60%	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
	Perusahaan/ The Company	Kredit Investasi/ *Investment Credit*	1.100.000.000.000	25 Juni/ *June 25, 2031*	9,00%	907.500.000.000	1.061.500.000.000
	Perusahaan/ The Company	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	3.000.000.000.000	26 Juni/ *June 26, 2027*	8,50%	2.260.000.000.000	1.000.000.000.000
	PPSD	Kredit Investasi/ *Investment Credit*	490.200.000.000	27 Juni/ *June 27, 2037*	Jibor+3bulan+3,5%	489.843.223.937	487.621.961.922
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PPRO	Kredit Konstruksi (KYG)/ *Construction Credit (KYG)*	690.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2035*	2,00%	669.765.000.000	669.765.000.000
	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	185.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2035*	2,00%	115.000.000.000	115.000.000.000
	WSS	Kredit Konstruksi (KYG)/ *Construction Credit (KYG)*	219.050.580.000	29 November/ *November 29, 2026*	2,00%	146.800.000.000	156.821.625.447
	PPUB	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	158.000.000.000	16 April/ *April 16, 2027*	9,25%	10.889.009.121	11.895.000.000
	PPUB	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	158.000.000.000	16 April/ *April 16, 2027*	9,25%	31.889.538.025	--
	CPI	Fasilitas Pinjaman/ *Loan Facilities*	250.000.000.000	28 Februari/ *February 28, 2035*	6,45%	302.386.148.371	211.695.106.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perusahaan/ The Company	IMBT	656.000.000.000	23 November/ *November 23, 2035*	8,00%	70.407.701.327	--
	Perusahaan/ The Company	Musyarakah Sindikasi/ *Syndicated Musyarakah*	200.000.000.000	23 Desember/ *December 23, 2031*	9,00%	126.998.605.800	144.937.759.332
	PPRE	Fasilitas Modal Kerja Transaksional/ *Working Capital Facility Transactional*	400.000.000.000	25 Maret/ *March 25, 2026*	9,00%	27.141.295.524	141.176.470.588
	WTS	Musyarakah Mutanaqishah	40.200.000.000	25 Desember/ *December 25, 2029*	9,00%	37.118.169.407	28.301.950.909
	TTM	Musyarakah Mutanaqishah	228.000.000.000	25 Juli/ *July 25, 2030*	10,00%	57.745.701.166	62.872.635.770
	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	500.000.000.000	27 Juni/ *June 27, 2037*	Jibor+3bulan+3,5%	485.029.410.140	430.353.621.471
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan/ *The Company*	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	900.000.000.000	1 November/ *November 1, 2026*	8,50%	65.950.000.000	325.111.673.746
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perusahaan/ *The Company*	Musyarakah	450.000.000.000	24 November/ *November 24, 2026*	8,40%	428.038.000.000	--
	Perusahaan/ *The Company*	Musyarakah Sindikasi/ *Syndicated Musyarakah*	200.000.000.000	23 Desember/ *December 23, 2031*	9,00%	126.998.605.800	444.517.759.332
	PPIN	Kredit Sindikasi/ *Syndicated Credit*		25 Juli/ *July 25, 2030*	10,00%	19.457.984.782	--

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Jenis Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
PT Bank CIMB Niaga Tbk	PPRE	Pembiayaan Investasi iB - Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)	150.000.000.000	27 April/ *April 27, 2026*	8,75%	12.270.106.060	37.129.933.792
PT Bank Permata Tbk	PPRE	Term Financing - Ijarah Muntahia Bittamilk (IMBT)	350.000.000.000	31 Oktober/ *October 31, 2025*	9,00%	--	41.039.475.746
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Perusahaan/ The Company	Musyarakah Sindikasi/ Sindication Musyarakah	82.000.000.000	23 Desember/ *December 23, 2031*	9,00%	52.069.428.362	59.424.481.331
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	PPRO	Kredit Sindikasi/ *Syndicated Credit*	1.000.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2035*	2,00%	685.999.180.000	693.000.000.000
PT Bank KB Indonesia Tbk	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	136.000.000.000	28 Mei/ *May 28, 2027*	2,00%	123.717.316.855	124.043.368.270
	PPEN	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	16.893.344.920	31 Desember/ *December 31, 2030*	11,50%	16.769.875.657	16.868.607.853
	PPEN	Kredit Investasi Civil Work/ *Civil Work Investment Credit*	18.442.486.227	31 Desember/ *December 31, 2030*	11,50%	18.418.127.515	18.429.932.855
	PPEN	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	19.559.073.119	31 Desember/ *December 31, 2030*	11,50%	19.538.011.788	19.550.449.208
	PPEN	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	19.585.135.776	31 Desember/ *December 31, 2030*	11,50%	19.606.698.385	19.618.589.043
	PPEN	Kredit Investasi IDC	6.630.541.176	31 Desember/ *December 31, 2030*	11,50%	6.609.982.929	6.617.337.038
PT Bank BPR Jawa Timur	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	20.000.000.000	28 Juni/ *June 28, 2027*	2,00%	10.948.347.158	17.171.967.062
PT Bank Pengkreditan Rakyat Surya Arthaguna Abadi	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	30.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2028*	2,00%	21.786.752.706	22.822.944.266
PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	22.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2028*	2,00%	17.356.613.480	19.000.000.000
PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana - Sindikasi	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	38.345.000.000	17 Februari/ *February 17, 2028*	2,00%	35.028.386.520	38.345.000.000
PT Bank Danamon Tbk	PPRO	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	100.000.000.000	17 Februari/ *February 17, 2035*	2,00%	90.000.000.000	--
PT Bank DKI	Perusahaan/ *The Company*	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	650.000.000.000	29 Mei 2024/ *May 29, 2024*	7,40%	--	--
	PPRE	KMK Jasa Konstruksi *Construction KMK*	70.000.000.000	30 Juni 2025/ *June 30, 2025*	9,25%	--	24.549.805.249
	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi *Investment Credit*	401.964.000.000	27 Juni 2037/ *June 27, 2037*	Jibor+3bulan +3,5%	401.734.358.391	399.913.239.485
	PPUB	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	148.556.913.014	31 Mei 2027/ *May 31, 2027*	10,00%	148.556.913.014	--
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi *Investment Credit*	392.782.518.091	27 Juni 2037/ *June 27, 2037*	Jibor+3bulan +3,5%	391.800.561.796	390.023.180.470
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	392.782.518.090	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	8,50%	391.800.561.796	390.023.180.470
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	375.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor+3bulan +3,5%	363.817.401.885	361.937.034.720
	PPIN	Kredit Sindikasi/ *Syndicated Credit*		31 Juli 2035/ *July 31, 2035*	9,50%	246.906.800.000	--
	PPIN	Kredit Sindikasi *Syndicated Credit*		31 Juli 2035/ *July 31, 2035*	10,35%	99.005.000.005	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	245.100.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor+3bulan +3,5%	245.014.133.665	243.903.967.298
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	240.556.103.936	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor+3bulan	239.954.713.672	238.865.951.455
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	161.999.600.317	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	0,085	161.594.601.311	160.861.315.359
PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	123.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	119.317.597.650	96.361.721.456

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Jenis Fasilitas/ *Facility Type*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility* Rp	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ *Maturity Date Of Credit Agreement*	Suku Bunga Per Tahun/ *Interest Rate per Annum*	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Unit Usaha Syariah	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	100.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	97.078.432.874	118.916.297.604
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha Syariah	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	100.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	97.078.432.874	47.729.059.276
PT BPD Aceh Syariah	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	100.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	97.078.432.874	96.577.238.751
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	88.236.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	88.108.865.556	87.708.722.437
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara - Unit Usaha Syariah	PPSD	Pinjaman Kredit Investasi/ *Investment Credit*	50.000.000.000	28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	Jibor + 3 bulan + 3,5%	48.448.527.878	97.045.754.610
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Unit Usaha Syariah	PPIN	Kredit Sindikasi/ *Syndicated Credit*		28 Juni 2037/ *June 28, 2037*	10%	19.457.984.782	--
PT Indonesia Infrastucture Finance	PPIN	*Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit*	506.676.100.000	31 Juli 2035/ *July 31, 2035*	10%	246.906.800.000	699.323.598.535
	PPIN	*Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit*	350.000.000.000	16 Juli 2036/ *July 16, 2036*	10%	99.005.000.007	--
	PPIN	*Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit*	250.000.000.000	16 Juli 2036/ *July 16, 2036*	10%	50.000.000.000	--
PT Bank Central Asia	LMA	*Term Loan Revolving 2*	189.500.000.000	12 Agustus 2026/ *August 12, 2026*	8,75%	--	87.976.075.752
Dampak Restrukturisasi Pinjaman yang Belum Diamortisasi/ *Impact of Unamortized Loan Restructuring*						(1.942.841.749.964)	(62.482.083.706)
Amortisasi Dampak Restrukturisasi Pinjaman/ *Amortization of the Impact of Loan Restructuring*						30.867.362.923	14.209.073.832
						11.749.767.953.803	**12.418.075.784.084**

Jaminan Pinjaman

Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jaminan dari perjanjian PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah agunan piutang usaha yang ada maupun yang akan ada atas proyek yang dibiayai dan telah diikat dengan fidusia (Catatan 7).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jaminan dari perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut :

- Seluruh piutang usaha yang ada dan akan ada yang dibiayai oleh fasilitas ini. (Catatan 7).

Sebidang tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (Catatan 21).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jaminan dari perjanjian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah seluruh piutang usaha yang ada dan akan ada atas PT East Java Development (Catatan 7).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jaminan dari perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Seluruh piutang usaha yang ada dan akan ada yang dibiayai oleh fasilitas ini (Catatan 7).

Loan Collateral

The Company

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The collateral from the agreement of PT Bank Syariah Indonesia Tbk is the collateral of existing or future business receivables on funded projects and has been secured with fiduciary (Note 7).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The collateral from the agreement of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is as follows:

- *All existing and future trade receivables funded by this facility. (Note 7).*

A plot of land and a warehouse building located in West Java and Nusa Tenggara Barat (Note 6).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The collateral from the agreement of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is all existing and future trade receivables from PT East Java Development (Note 7).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The collateral from the agreement of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is as follows:

- *All existing and future trade receivables funded by this facility (Note 7).*

- Sebidang tanah dan Bangunan Gudang berlokasi di Sidoarjo (Catatan 21).

Deposito dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000 (Catatan 6).

PPRO

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jaminan yang diberikan selama perikatan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Piutang usaha diikat secara fidusia notarial sebesar Rp300.000.000.000.
- 10 bidang tanah seluas 2.822 m^2 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan. Berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Neglasari.
- Sebidang tanah seluas 730 m^2 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan dengan nomor 30/Neglasari, yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Neglasari tanggal 26 Februari 2009.
- Sebidang tanah seluas 21.000 m^2 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan dengan nomor 30/Cicadas, yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungputri, Desa Cicadas tanggal 19 Januari 1995.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk – Sindikasi

Tanah yang dijamin SHGB No. 00387/Kemiri Muka seluas 2.148 m^2, SHGB No. 00388/ Kemiri Muka seluas 2.505 m^2, SHGB No. 1934/ Harjamukti seluas 941 m^2, SHGB No. 1908/ Harjamukti seluas 5.630 m^2, SHGB No. 1935/ Harjamukti seluas 1.000 m^2, SHGB No. 1909/ Harjamukti seluas 2.479 m^2, SHGB No. 8508/ Pekayon seluas 14.715 m^2, SHGB No. 8619/ Pekayon seluas 16.730 m^2, SHGB No. 8478/ Pekayon Jaya seluas 3.948 m^2, SHGB No. 00963/ Embong Kaliasin seluas 9.986 m^2, SHGB No. 0964/ Embong Kaliasin seluas 6.773 m^2, dengan nilai sebesar Rp875.000.000.000.

- *A plot of land and a warehouse building located in Sidoarjo (Note 21).*

A deposit with a nominal value of IDR 15,000,000,000 (Note 6).

PPRO

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

The guarantees provided during the financing engagements are as follows:

- *Trade receivables are tied up on a notarial fiduciary basis of Rp300,000,000,000.*
- *10 plot of land with an area of 2,822 sqm with SHGB located in the province of west Java, Bandung, Cibeunying Kaler Sub-district, Kelurahan Neglasari.*
- *A plot of land with an area of 730 sqm with SHGB number 30/Neglasari, located in the province of West Java, Bandung City, Cibeunying Kaler Sub-district, Kelurahan Neglasari dated February 26, 2009.*
- *A plot of land with an area of 21,000 sqm with SHGB number 30/Cicadas, located in the province of West Java, Bogor, Gunungputri Sub-district, Cicadas dated January 19, 1995.*

PT Bank SMBC Indonesia Tbk – Sindikasi

Land guaranteed by SHGB No. 00387/Kemiri Muka covering an area of 2,148 sqm, SHGB No. 00388/ Kemiri Muka covering an area of 2,505 sqm, SHGB No. 1934/ Harjamukti covering an area of 941 sqm, SHGB No. 1908/ Harjamukti covering an area of 5,630 sqm, SHGB No. 1935/ Harjamukti area of 1,000 sqm, SHGB No. 1909/ Harjamukti covering an area of 2,479 sqm, SHGB No. 8508/ Pekayon covering an area of 14,715 sqm, SHGB No. 8619/ Pekayon covering an area of 16,730 sqm, SHGB No. 8478/ Pekayon Jaya covering an area of 3,948 sqm, SHGB No. 00963/ Embong Kaliasin covering an area of 9,986 sqm, SHGB No. 0964/ Embong Kaliasin covering an area of 6,773 sqm, with a value of Rp875,000,000,000.

PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana - Sindikasi

Jaminan yang diberikan selama perikatan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 6.233 m² sesuai dengan sertifikat HGB Nomor 3909, 3914, 3915, 3916, 3918, 3921, 3924, 3928, 3930, 3931, 3934, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3874, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3889, 3890, 3892, 3893, 3896, 3897, 3898, 3899, 3903, 3904 yang terletak di Payon Amartha, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Tanah seluas 2.061 m² sesuai dengan sertifikat HGB Nomor 3805, 3806, 3810, 3811, 3072, 3040, 3635, 3800, 3802 yang terletak di Jl. Permata 1 Perum Permata Prima, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Tanah dengan luas total 1.608 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 3515 yang terletak di Jl. Tirto Mulyo II, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Tanah dengan luas total 1.240 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 1931 dan 1930 yang terletak di Jl. Campedak, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- Tanah dengan luas total 385 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 1928 yang terletak di Jl. Jambore, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- Tanah dengan luas total 1.250 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 1937 dan 1936 yang terletak di Jl. Masjid, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
- Tanah dengan luas total 2.037 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 1967 yang terletak di Jl. Al-Muzamil, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana – Sindikasi

The guarantees provided during the financing engagements are as follows:

- *A plot of land measuring 6,233 sqm in accordance with HGB certificate Number 3909, 3914, 3915, 3916, 3918, 3921, 3924, 3928, 3930, 3931, 3934, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3874, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3889, 3890, 3892, 3893, 3896, 3897, 3898, 3899, 3903, 3904 located at Payon Amartha, Bringin, Ngaliyan District, Semarang City, Central Java.*
- *Land measuring 2,061 sqm in accordance with HGB certificates Number 3805, 3806, 3810, 3811, 3072, 3040, 3635, 3800, 3802 located at Jl. Permata 1 Perum Permata Prima, Bringin, Ngaliyan District, Semarang City, Central Java.*
- *Land with a total area of 1,608 sqm according to HGB certificate number 3515 located on Jl. Tirto Mulyo II, Pedalangan, Banyumanik District, Semarang City, Central Java.*
- *Land with a total area of 1,240 sqm according to HGB certificates number 1931 and 1930 located on Jl. Campedak, Harjamukti Village, Cimanggis District, Depok City, West Java.*
- *Land with a total area of 385 sqm according to the HGB certificate number 1928 located on Jl. Jambore, Harjamukti Village, Cimanggis District, Depok City, West Java.*
- *Land with a total area of 1,250 sqm according to HGB certificate number 1937 and 1936 located on Jl. Masjid, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok City, West Java*
- *Land with a total area of 2,037 sqm according to the HGB certificate number 1967 located on Jl. Al-Muzamil, Harjamukti Village, Cimanggis District, Depok City, West Java.*

- Tanah dengan luas total 8.821 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 1043, 1045, dan 1047 yang terletak di Jl. Saxofone, RT.004/RW.004, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
- Tanah dengan luas total 6.851 m² sesuai dengan sertifikat HGB nomor 324 yang terletak di Jl. Raya Jatinangor No. 122, Kel. Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat.

- *Land with a total area of 8,821 sqm according to HGB certificates number 1043, 1045, and 1047 located on Jl. Saxofone, RT.004/RW.004, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Malang City, East Java.*
- *Land with a total area of 6,851 sqm according to HGB certificate number 324 located at Jl. Raya Jatinangor No. 122, Kel. Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, West Java.*

PT Bank Pengkreditan Rakyat Surya Arthaguna Abadi

Jaminan yang diberikan adalah sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kelurahan Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Jl. Sutorejo selatan dengan luas tanah 5.046 m^2 dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04457/Mulyorejo atas nama Perusahaan, berkedudukan di Jakarta Timur, surat ukur No. 00351/MULYOREJO/2017 tanggal 08/02/2017 NIB No. 12392201.07099 dengan tanggal berakhir hak 18 Oktober 2040.

PT Bank Pengkreditan Rakyat Surya Arthaguna Abadi

The collateral provided is a piece of land located in the Province of East Java, Surabaya City, Mulyorejo Village, Mulyorejo District, Sutorejo Selatan Street, with a land area of 5,046 sqm. The land is registered under the Building Use Right Certificate No. 04457/Mulyorejo, in the name of the Company, headquartered in East Jakarta. The land is documented in the land measurement certificate No. 00351/ MULYOREJO/2017, dated February 8, 2017, with the Business Identification Number (NIB) No. 12392201.07099, and the land rights will expire on October 18, 2040.

PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana

Fasilitas Kredit Modal Kerja dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 26.393 m² atau senilai Rp58.252.993.234 pada HGB No. 1803, 1090, 1091, 1093, 1094 dan 1095.

PT Bank Pengkreditan Rakyat Intidana

The loan facility is secured by a Building Use Rights Certificate on a plot of land and building covering an area of 26,393 sqm or Rp58,252,993,234 in HGB No. 1803, 1090, 1091, 1093, 1094 and 1095.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, PPRO diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Debt service coverage ratio (DSCR)* minimal 110%;
- *Debt to equity ratio of loan recipients* maksimal 500% untuk tahun pertama, 400% untuk tahun kedua, 330% untuk tahun ketiga, 300% untuk tahun keempat, 260% untuk tahun kelima, dan 233% untuk tahun keenam, dan seterusnya;
- Menjaga ekuitas tetap positif.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

In connection with the loans mentioned above, PPRO is required to maintain financial covenants as follows:

- *Debt service coverage ratio (DSCR) shall not be less than 110%;*
- *Debt to equity ratio of loan recipients shall not exceed 500% for the first year, 400% for the second year, 330% for the third year, 300% for the fourth year, 260% for the fifth year, and 233% for the sixth year onwards;*
- *Keep the equity always positive.*

PPRE

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 13 April 2021 oleh Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan beberapa bidang tanah, 13 unit *vibrating* Sakai, 44 unit *dump truck*, 3 bidang tanah dan bangunan girik, 105 unit *dump truck*, 8 unit *dump truck*, dan 26 unit *dump truck* yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.

PPRE

PT Bank Central Asia Tbk

Based on Deed of Amendment to Credit Agreement No. 12 dated April 13, 2021 by Susanna Tanu, S.H., Notary in Jakarta. This loan is secured by several plots of land, 13 units of vibrating sakai, 44 units of dump trucks, 3 plots of land and buildings, 105 units of dump trucks, 8 units of dump trucks, and 26 units of dump trucks which are financed by Investment Credit facility 2.

PPUB

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan pokok berupa tanah dan bangunan yg berdiri dan yg akan berdiri diatasnya dilokasi Apartemen Urban Town @Serpong dengan bukti kepemilikan saat ini dengan SHGB keduanya atas nama PPUB.

Jaminan lainnya berupa Akta *Cessie* (Notariil) atas piutang yang berkaitan dengan pendapatan atas objek yang dibiayai oleh Bank. Selama pembiayaan PPUB tidak diperkenankan: Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain (Bank), kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, menggunakan fasilitas diluar tujuan penggunaan kredit, memberikan pinjaman baru ke pihak lain atau melunasi pinjaman pemegang saham, kecuali dengan persetujuan Bank, memindahtangankan agunan proyek kepada selain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PPUB

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

This facility is secured by the principal collateral, which includes the land and buildings situated at the Urban Town @Serpong Apartment location. The ownership of the land is currently verified with SHGB both registered under the name of PPUB.

Other guarantees are in the form of Deed of Cessie (Notarial) on receivables related to income from objects financed by the Bank. During financing PPUB is not permitted to: Obtain credit facilities from other parties (Banks), except for loans from shareholders and common trade transactions, use facilities other than the intended use of credit, provide new loans to other parties or pay off shareholder loans, except with the approval of the Bank, transferring project collateral to other than PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pembatasan Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 100%;
- *Debt to equity ratio* (DER) maksimal 300%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 110%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

Covenant
The Company

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The Company is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio shall not be less than 100%;*
- *Debt to equity ratio (DER) shall not exceed 300%;*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 110%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 110%;
- *EBITDA to interest ratio* minimal 300%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 130%;
- *Leverage interest bearin*g maksimal 300%;
- *Interest bearing ratio* maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Transaksional dengan jaminan piutang, sebidang tanah, dan deposito. Grup diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu di dalam perjanjian pinjaman-pinjaman di atas. Pada 31 Desember 2024, Grup memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan dari pinjaman bank yang mempunyai saldo.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PPRO
PT Bank BTPN Tbk
Selama masa pembiayaan PPRO wajib memastikan dan tidak melanggar salah satu janji keuangan diantaranya:
- Rasio likuiditas minimal 1,00x;
- Rasio jumlah seluruh hutang yang dikenal bunga terhadap ekuitas maksimal 3,0x;
- *Debt service coverage ratio (DSCR)* minimal 1,15x.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
The Company is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:
- *Current ratio shall not be less than 110%;*
- *EBITDA to interest ratio shall not be less than 300%;*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 130%;*
- *Leverage interest bearing shall not exceed 300%;*
- *Interest bearing ratio shall not exceed 400%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
The Company obtained a Transactional Construction Working Capital Loan facility with a maximum Plafond of Rp900,000,000,000 which matures on November 1, 2025 with loan collateral, a plot of land, and deposits. The Group is required to comply with certain financial covenants under the terms of the loan agreements. As at 31 December 2024, Group met the required financial covenants on the outstanding bank loans.

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PPRO
PT Bank BTPN Tbk
During the financing period PPRO is obliged to ensure and not violate any of the financial promises including:
- *Liquidity ratio shall not be less than 1,00x;*
- *The maximum ratio of interest-bearing debt to equity is 3.0x;*
- *Debt service coverage ratio (DSCR) minimum 1.15x*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PPRE

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PPRE terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to EBITDA ratio* maksimal 400%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 110%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PT Bank Central Asia Tbk

PPRE diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- Rasio EBITDA minimal 1 kali;
- *Current Ratio* minimal 1 kali;
- *Debt to Equity Ratio* minimal 1,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PPRE

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PPRE is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:

- *Debt to EBITDA ratio shall not exceed 400%;*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 110%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PT Bank Central Asia Tbk

PPRE is required to maintain the following financial covenants:

- *EBITDA ratio of at least 1x;*
- *Current Ratio of at least 1x;*
- *Debt to Equity Ratio of at least 1,5x.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PPEN

PT Bank Bukopin Tbk

SDP terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Leverage ratio* maksimal 200%;
- *Current ratio* minimal 110%;
- *Interest service coverage ratio* minimal 150%;
- *Debt to EBITDA* maksimal 400%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PPEN

PT Bank Bukopin Tbk

SDP is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:

- *Debt service coverage ratio (DSCR) shall not be less than 200%;*
- *Current ratio shall not be less than 110%;*
- *Interest service coverage ratio shall not be less than 150%;*
- *Debt to EBITDA shall not exceed 400%*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 100%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PPIN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PPIN terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 100%;
- *Debt to equity ratio* maksimal 260%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PPIN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PPIN is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio shall not be less than 100%;*
- *Debt to equity ratio shall not exceed 260%;*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 100%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

PT Indonesia Infrastructure Finance
Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, PPKT diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Debt service coverage ratio (DSCR)* minimal 110%;
- *Current ratio* minimal 100%;
- *Debt to equity ratio of loan recipients* maksimal 233%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

PT Indonesia Infrastructure Finance
In connection with the loans mentioned above, PPKT is required to maintain financial covenants as follows:

- *Debt service coverage ratio (DSCR) shall not be less than 110%;*
- *Current ratio shall not be less than 100%;*
- *Debt to equity ratio of loan recipients shall not exceed 233%.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

CPI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
CPI terikat dengan beberapa batasan, antara lain, rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 100%;
- *Debt to equity ratio* maksimal 500%;
- Rasio modal disetor terhadap total utang Perusahaan di Bank minimal sebesar 10%;
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%;
- Ekuitas positif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

CPI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
CPI is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio shall not be less than 100%;*
- *Debt to equity ratio shall not exceed 500%;*
- *The ratio of paid-in capital to the Company's total debt in the Bank is at least 10%;*
- *Debt service coverage ratio shall not be less than 100%;*
- *Maintain equity always positive.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

SCM
SCM wajib menjaga nilai rasio keuangan *(financial covenant)* selama jangka waktu kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- Rasio modal disetor terhadap kredit minimal 10%;
- *Debt Service Coverage* di atas 100%;
- Rasio agunan riil minimal sebesar 135%;
- DER maksimal sebesar 500%;
- Menjaga ekuitas selalu positif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persyaratan perjanjian dalam pinjaman telah dipenuhi

SCM
SCM is required to maintain financial covenants during the period of the credit reflected on the financial statements as follows:

- *The ratio of paid-in capital to total debt minimum of 10%;*
- *Debt Service Coverage above 100%;*
- *The real collateral ratio is 135%;*
- *DER at maximum of 500%;*
- *Maintain equity always positive.*

As of December 31, 2025, certain covenants of the loan agreement have been fulfilled.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Grup telah melakukan pembayaran atas utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang sebesar Rp8.073.829.422.832.

As of 31 December 2025, the Group has made payments on its long-term bank and other financial institution borrowings amounting to Rp8,073,829,422,832.

40. Utang Obligasi, Obligasi Konversi, Dan Sukuk Mudharabah / *40. Bonds Payable, Convertible Bonds, And Sukuk Mudharabah*

	2025	2024	
Obligasi			*Bond*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.153.245.284.489	453.675.000.000	*Current maturity*
Jangka panjang	937.184.651.905	2.249.824.498.562	*Long-term*
Sub-jumlah	2.090.429.936.394	2.703.499.498.562	*Sub-Total*
Obligasi Konversi			*Convertible Bonds*
Jangka panjang	37.224.043.762	--	*Long-term*
Sukuk Mudharabah			*Sukuk Mudharabah*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	226.754.000.000	60.000.000.000	*Current maturity*
Jangka panjang	305.000.000.000	531.754.000.000	*Long-term*
Sub-jumlah	531.754.000.000	591.754.000.000	*Sub-total*
Jumlah	**2.659.407.980.156**	**3.295.253.498.562**	***Total***

a. Obligasi / *Bond*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, rincian obligasi diatas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, details of the bond are as follows:

	Suku Bunga/ *Interest Rate*	Jangka Waktu/ *Term*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2021 - Seri B	9,10%	5 Tahun / *5 Years*	2 Juli 2026/ *July 2, 2026*	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 - Seri B	7,75%	5 Tahun / *5 Years*	22 April 2026/ *April 22, 2027*	404.500.000.000	404.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B	0,50%	20 Tahun / *20 Years*	14 Januari 2042/ *January 14, 2042*	--	163.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tbk Tahap III Tahun 2021 Seri B	0,50%	20 Tahun / *20 Years*	2 September 2041/ *September 2, 2041*	--	164.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 - Seri A	6,50%	3 Tahun / *3 Years*	22 April 2025/ *April 22, 2025*	--	140.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PT PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 - Seri A	9,50%	3 Tahun / *3 Years*	30 Juni 2025/ *June 30, 2025*	--	102.275.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PT PP Presisi Tbk Tahap I Tahun 2022 - Seri B	10,50%	5 Tahun / *5 Years*	30 Juni 2025/ *June 22, 2027*	100.523.731.000	100.705.000.000
Obligasi Berkelanjutan II PT PP Properti Tbk Tahap I Tahun 2020 Tahun 2020 Seri B	0,50%	20 Tahun / *20 Years*	27 Februari 2040/ *February 27, 2040*	--	47.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV PT PP (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2024	10,25%	3 Tahun / *3 Years*	28 Juni 2027 / *June 28, 2027*	434.620.000.000	434.620.000.000
Obligasi Berkelanjutan III PT PP (Persero) Tbk Tahap III Tahun 2023 - Seri A	8,80%	3 Tahun / *3 Years*	11 April 2026/ *April 11, 2026*	503.725.000.000	503.725.000.000
Jumlah/ *Total*				2.093.368.731.000	2.711.225.000.000
Biaya Emisi Obligasi yang belum diamortisasi/ *Issuence unamortized cost*				(2.938.794.606)	(7.725.501.438)
Jumlah/ *Total*				2.090.429.936.394	2.703.499.498.562
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ *Current maturity - net of unamortized*				(1.153.245.284.489)	(453.675.000.000)
Utang obligasi jangka panjang/ *Long-term bonds payable*				**937.184.651.905**	**2.249.824.498.562**

Perusahaan
Pada tanggal 11 Oktober 2023, PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan Perusahaan dengan hasil peringkat A. Wali amanat atas Obligasi Perusahaan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The Company
On October 11, 2023, PT Pefindo rated The Company Sustainable Bonds with an A rating. The trustee for the Company's Bonds is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk.

Perusahaan terikat dengan beberapa Batasan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 100%;
- *Interest bearing debt* maksimal 300%;
- EBITDA minimal 150%.

The Company is required to comply with several restrictions, among others, to maintain financial ratios as follows:
- *Current ratio shall not be less than 100%;*
- *Interest bearing debt shall not exceed 300%;*
- *EBITDA shall not be less than 150%.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian terkait.

As at December 31, 2025, The company has complied with all of the covenants of the above mentioned as stipulated in the agreement.

Wali amanat atas Obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The trustee of the Companys Bonds is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

PPRE
PPRE terikat dengan beberapa batasan rasio keuangan sebagai berikut:
- *Current Ratio minimum* sebesar 1 kali.
- *Interest bearing debt to equity ratio maksimum* 3 kali.
- Perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman *minimum* 1,5 kali.

PPRE
PPRE is bound by some financial ratio restrictions as follows:
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Interest-bearing debt to equity ratio maximum of 3 times.*
- *The ratio of EBITDA to interest bearing debt minimum of 1.5 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, PPRE telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian terkait.

As at December 31, 2025, PPRE has complied with all of the covenants of the above mentioned as stipulated in the agreement.

Tahap I Tahun 2022 - Seri A
PPRE menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 - seri A sebesar Rp102.275.000.000 dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2025.

Phase I 2022 - A Series
PPRE Issued sustainable bonds payable phase I 2022 - A Series amounted to Rp102,275,000,000 with a fixed interest rate to 9.50% per year. The terms of Bonds are 3 years until December 31, 2025.

Tahap I Tahun 2022 - Seri B
PPRE menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 - seri B sebesar Rp100.705.000.000 dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2027. Pada tanggal

Phase I 2022 - B Series
PPRE Issued sustainable bonds payable phase I 2022 - B Series amounted to Rp100,705,000,000 with a fixed interest rate to 10.50% per year. The terms of Bonds are 5 years until December 31, 2027. On March 10, 2023, PT Pefindo conducted a

10 Maret 2023, PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan PPRE dengan hasil peringkat BBB+. Wali amanat atas Obligasi PPRE adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

rating of the PPRE's Sustainable Bond with a result of BBB+. The trustee of the PPRE's Bonds is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

b. Obligasi Konversi
PPRO
Berdasarkan Keputusan Homologasi (Catatan 57), surat utang obligasi dan surat utang jangka menengah (Catatan 33) yang diterbitkan PPRO dikonversi menjadi obligasi konversi, sebagai berikut:

b. Convertible Bonds
PPRO
Based on Homologasion Decision (Note 57), bonds payable and medium-term notes (Note 33) issued by PPRO were converted into convertible bonds are as follows:

Uraian *Description*	Bank kustodian/ *Supervisory agent & underwriter*	Jangka waktu/ *Term*	Suku bunga/ *Interest Rate*	2025 Rp
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B/ *PP Properti Sustainable Bond Phase III Year 2021 Series B*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	17 Februari/ *February 2035*	0,5% per tahun/ *per annum*	164.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV PP Properti Tahap I Tahun 2022/ *PP Properti Sustainable Bond Phase IV Year 2022 Series B*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	17 Februari/ *February 2035*	0,5% per tahun/ *per annum*	163.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020/ *PP Properti Sustainable Bond Phase I Year 2020 Series B*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	17 Februari/ *February 2035*	0,5% per tahun/ *per annum*	47.900.000.000
MTN XV PT PP Properti Tbk Tahun 2022- Jatuh Tempo Tahun 2025	PT Bahana Sekuritas dan/ and PT Mandiri Sekuritas	17 Februari/ *February 2028*	0,5% per tahun/ *per annum*	300.000.000.000
MTN XVI PT PP Properti Tbk Tahun 2022- Jatuh Tempo Tahun 2025	PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia	17 Februari/ *February 2028*	0,5% per tahun/ *per annum*	300.000.000.000
MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2014- Jatuh Tempo Tahun 2026	PT Henan Putihrai Sekuritas	17 Februari/ *February 2028*	0,5% per tahun/ *per annum*	30.000.000.000
Subjumlah/ *Subtotal*				**1.005.400.000.000**
Dampak Restrukturisasi yang Belum Diamortisasi/ *Impact of Unamortized Restructuring*				(992.104.954.290)
Amortisasi Dampak Restrukturisasi/ *Amorized Restructuring Impact*				23.928.998.052
Jumlah Obligasi Konversi Akhir Periode/ *Total Convertible Bonds at the End of the Period*				**37.224.043.762**

c. Sukuk Mudharabah
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, rincian Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

c. Sukuk Mudharabah
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, details of of Sukuk Mudharabah are as follows:

	Suku Bunga/ *Interest Rate*	Jangka Waktu/ *Term*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP (Persero) Tbk Tahap III Tahun 2023 Seri A	8,80%	3 Tahun / *3 Years*	11 April / *April 11, 2026*	126.754.000.000	126.754.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 Seri B	7,75%	5 Tahun / *5 Years*	22 April / *April 22, 2027*	305.000.000.000	305.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2022 Seri A	6,50%	3 Tahun / *3 Years*	22 April / *April 22, 2025*	--	60.000.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2021 Seri B	9,10%	5 Tahun / *5 Years*	2 Juli / *July 2, 2026*	100.000.000.000	100.000.000.000
				531.754.000.000	591.754.000.000
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ *Current maturity*				(226.754.000.000)	(60.000.000.000)
Sukuk Mudharabah Jangka Panjang/ *Long-term Sukuk Mudharabah*				**305.000.000.000**	**531.754.000.000**

41. Utang Jangka Panjang Lainnya / *41. Other Long Term Liabilities*

	2025	2024	
Pembelian Tanah	121.874.625.000	66.972.312.500	*Land Purchase*
Beban Pemeliharaan	33.166.409.783	17.139.793.317	*Maintenance Expense*
Utang Modal Kerja	13.096.954.416	151.408.983.269	*Working Capital Loan*
Lainnya	369.578.342.211	74.266.459.279	*Others*
Jumlah	**537.716.331.410**	**309.787.548.365**	***Total***

Utang atas modal kerja adalah pinjaman yang diterima untuk proyek instalasi dan pembangkit selama masa pengembangan.

Working capital loan is loan obtained for installation and power plant project during the development period.

PPEN
Utang atas modal kerja yang diterima OEKA dari PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada merupakan pemegang saham OEKA sebelum OEKA diambil alih oleh PPEN, pinjaman terdiri dari pencairan pinjaman dalam bentuk kas yang transaksinya dilakukan dalam mata uang dollar sebesar USD7.144.271. Pinjaman modal kerja yang diterima OEKA dari PT Persada Tanjung Api-api. Sesuai perjanjian pinjam meminjam No. 012/ PTAAOEKA/2017 tanggal 13 Desember 2017. PT Persada Tanjung Api-Api merupakan pihak afiliasi OEKA sebelum OEKA diambil alih oleh PPEN.

PPEN
Working capital loan obtained by OEKA from PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada was the shareholder of OEKA before OEKA was taken over by the PPEN, loans consist of cash disbursement loan which the transaction are conducted in dollar amounted USD7,144,271. Working capital loan is a loan obtained by OEKA by PT Persada Tanjung Api-api. Based on loan agreement No. 012/PTAA- OEKA/2017 dated December 13, 2017. PT Persada Tanjung Api-Api was the affiliated party of PT OEKA before OEKA was taken over by the PPEN.

CPI
Utang atas modal kerja merupakan pinjaman yang diberikan PT Kana Revayah Makmur dan PT Barak Sejahtera Mulia kepada CPI.

CPI
Working capital loan is a loan provided by PT Kana Revayah Makmur and PT Barak Sejahtera Mulia to CPI.

PPRO
Berdasarkan Keputusan Homologasi PPRO (Catatan 57), sehingga utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya menjadi utang jangka panjang melalui skema penyelesaian dalam jangka waktu satu tahun dengan opsi perpanjangan sampai terdapat investor atau pembeli lahan, atau dengan cara pengembalian aset jaminan maupun aset perusahaan lainnya yang akan digunakan untuk pelunasan.

Utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya merupakan utang atas pembelian tanah seluas 41.634 m² yang terletak di Surabaya. Proses pembelian tanah sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).

PPRO
Based on PPRO's Homologation Decision (Note 57). Accordingly, the payable to PT Aneka Bangun Mulia Jaya has been classified as a long-term liability under a settlement scheme within a one-year period, with an option for extension until an investor or land buyer is obtained, or through the return of pledged collateral assets or other Company assets to be used for settlement.

Payable to PT Aneka Bangun Mulia Jaya represent payable for purchase of the land area of 41,634 sqm, located on Surabaya. Land acquisition process has been bind under PPJB (Sale and Purchase Binding Agreement).

42. Modal Saham / *42. Share Capital*

Nama Pemegang Saham	2025 Jumlah Saham/ *Number of Shares*	2025 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	2025 *Nilai Nominal/ Par Value*	*Name of Stockholders*
Saham seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna shares*
Pemerintah Republik Indonesia	1	--	100	*Government of the Republic of Indonesia*
Saham seri B				*Series B shares*
PT Danantara Asset Management (Persero)	3.130.328.358	50,49	313.032.835.800	*PT Danantara Asset Management (Persero)*
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	31.619.477	0,51	3.161.947.700	*Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara*
Koperasi Karyawan Pemegang Saham - PT PP (Persero) Tbk	2.029.692	0,03	202.969.200	*Employees Cooperative Shareholders of PT PP (Persero) Tbk*
Publik	3.021.363.926	48,74	302.136.392.600	*Public*
Sub-jumlah	6.185.341.454		618.534.145.400	*Sub-total*
Saham treasuri	14.555.900	0,23	1.455.590.000	*Treasury stock*
Jumlah	**6.199.897.354**	**1,00**	**619.989.735.400**	***Total***

Nama Pemegang Saham	2024 Jumlah Saham/ *Number of Shares*	2024 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	2024 *Nilai Nominal/ Par Value*	*Name of Stockholders*
Saham seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna shares*
Pemerintah Republik Indonesia	1	--	100	*Government of the Republic of Indonesia*
Saham seri B				*Series B shares*
Pemerintah Republik Indonesia	3.161.947.835	51,00	316.194.783.500	*Government of the Republic of Indonesia*
Koperasi Karyawan Pemegang Saham - PT PP (Persero) Tbk	2.029.692	0,03	202.969.200	*Employees Cooperative Shareholders of PT PP (Persero) Tbk*
Publik	3.021.363.926	48,74	302.136.392.600	*Public*
Sub-jumlah	6.185.341.454		618.534.145.400	*Treasury stock*
Saham treasuri	14.555.900	0,23	1.455.590.000	***Total***
Jumlah	**6.199.897.354**	**1,00**	**619.989.735.400**	

Berdasarkan Akta No. 121 tanggal 22 Maret 2025 oleh Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan kepemilikan saham Seri B Perseroan sebanyak 3.130.328.358 lembar atau sebesar 50,49% kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Based on Deed No. 121 dated March 22, 2025 by Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., the Government of The Republic of Indonesia transferred ownership of the Company's Series B shares amounting to 3,130,328,358 shares or 50,49% to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Berdasarkan Akta No. 163 tanggal 23 Mei 2025 oleh Notaris Josedima Satria S.H., M.Kn., PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengganti nama menjadi PT Danantara Asset Management (Persero).

Based on Deed No. 163 dated May 23, 2025 by Notary Josedima Satria S.H., M.Kn., PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) changed its name to PT Danantara Asset Management (Persero).

Saham Treasuri

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 14.555.900 lembar saham. Jumlah pembayaran untuk mengakuisisi saham Perusahaan sebesar Rp8.099.771.019.

Treasury share

In 2020, the Company repurchased their own shares through the Indonesia Stock Exchange on 14,555,900 shares. The total amount paid to acquire the Company shares were Rp8,099,771,019.

Cadangan Umum

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No. 39 tanggal 30 April 2025 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan Tahun Buku 2024 sebesar Rp415.654.077.278 sebagai cadangan.

General Reserve

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated on Company's Minutes of Meeting Report No. 39 dated April 30, 2025 from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a notary in Jakarta. The shareholders stipulate the appropriation of net profit which can be attributed to the Company's main entity owner for the Book Year 2024 amounting to Rp415,654,077,278 as reserve.

43. Tambahan Modal Disetor / *43. Additional Paid-In Capital*

	2025	2024	
Selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil penawaran umum saham	477.929.190.000	477.929.190.000	*Difference in par value between par value and initial public offering*
Biaya emisi saham	(15.477.842.291)	(15.477.842.291)	*Share issuance cost*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	(148.362.477)	(148.362.477)	*Transaction among entities under common control*
Penawaran saham terbatas	4.234.385.791.348	4.234.385.791.348	*Subscribed share capital*
Pengaruh akuisisi entitas anak	13.365.958.642	13.365.958.642	*Effect of acquisition from a subsidiary*
Jumlah	**4.710.054.735.222**	**4.710.054.735.222**	***Total***

Kombinasi bisnis entitas sepengendali merupakan selisih antara harga pengalihan saham dengan nilai buku.

Business combination under common control is the difference between the transfer price of shares and book value.

	2025	2024
PT Prakarsa Dirganeka (PDA)	190.393.598	190.393.598
PT Primajasa Aldodua (PJA)	(338.756.075)	(338.756.075)
Jumlah/ *Total*	**(148.362.477)**	**(148.362.477)**

44. Kepentingan Non Pengendali / *44. Non Controlling Interest*

	31 Desember/*December 31, 2025*			
	Kepemilikan/ *Ownership (%)*	**Nilai Tercatat Awal/ *Initial Carrying Amount***	**Penambahan/ Pengurangan/ *Addition/Reduction***	**Nilai Tercatat Akhir Tahun/*Carrying Value at the End of Year***
PT Centurion Perkasa Iman	32,18%	6.472.016.580	(11.396.026.103)	(4.924.009.523)
PT PP Properti Tbk	35,04%	860.309.510.311	(1.711.403.542.609)	(851.094.032.298)
PT PP Semarang Demak	24,90%	355.072.663.881	73.540.874.133	428.613.538.014
PT Sinergi Colomadu	13,26%	13.762.041.359	(1.440.521.373)	12.321.519.986
PT PP Presisi Tbk	23,01%	1.555.068.944.746	(246.864.584.614)	1.308.204.360.132
PT PP Sinergi Banjaratma	26,43%	39.600.804.668	2.231.783.357	41.832.588.025
PT PP Urban	0,00%	436.881.691	(236.315.066)	200.566.625
PT PP Energi	0,91%	67.779.479.814	(23.280.844.009)	44.498.635.805
PT PP Infrastruktur	0,85%	185.493.478.330	(9.282.722.310)	176.210.756.020
Jumlah/ *Total*		**3.083.995.821.380**	**(1.928.131.898.594)**	**1.155.863.922.786**

	31 Desember/*December 31, 2024*			
	Kepemilikan/ *Ownership (%)*	**Nilai Tercatat Awal/ *Initial Carrying Amount***	**Penambahan/ Pengurangan/ *Addition/Reduction***	**Nilai Tercatat Akhir Tahun/*Carrying Value at the End of Year***
PT Centurion Perkasa Iman	32,18%	11.505.126.770	(5.033.110.190)	6.472.016.580
PT PP Properti Tbk	35,04%	1.243.937.070.118	(383.627.559.807)	860.309.510.311
PT PP Semarang Demak	24,90%	317.440.321.025	37.632.342.856	355.072.663.881
PT Sinergi Colomadu	13,26%	26.205.651.464	(12.443.610.105)	13.762.041.359
PT PP Presisi Tbk	23,01%	1.449.091.037.956	105.977.906.790	1.555.068.944.746
PT PP Sinergi Banjaratma	26,43%	38.298.375.831	1.302.428.837	39.600.804.668
PT PP Urban	0,00%	618.828.187	(181.946.496)	436.881.691
PT PP Energi	0,91%	82.174.970.930	(14.395.491.116)	67.779.479.814
PT PP Infrastruktur	0,85%	145.660.032.406	39.833.445.924	185.493.478.330
Jumlah/ *Total*		**3.314.931.414.687**	**(230.935.593.307)**	**3.083.995.821.380**

45. Pendapatan Usaha / *45. Revenue*

	2025	2024	
Jasa Konstruksi	13.511.686.654.076	16.179.413.792.564	*Construction Services*
EPC	1.150.227.934.402	2.055.761.795.062	*EPC*
Properti dan Realti	774.500.955.313	795.185.484.474	*Property and Real Estate*
Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi	399.960.488.508	322.778.141.439	*Financial income on the construction of concession financial assets*
Persewaan Peralatan	69.493.976.167	112.855.257.482	*Equipment Rent*
Pracetak	10.652.576.647	98.592.811.692	*Precast*
Energi	53.235.699.408	87.865.695.387	*Energy*
Jalan Tol	68.071.155.000	83.761.645.260	*Toll Road*
Jasa Pertambangan	232.952.658.827	75.928.267.203	*Mining Service Business*
Jumlah	**16.270.782.098.348**	**19.812.142.890.563**	***Total***

46. Beban Pokok Pendapatan / *46. Cost Of Revenues*

	2025	2024	
Jasa Konstruksi			***Construction Services***
Material	4.371.811.808.354	4.991.281.265.160	*Materials*
Sub-Kontraktor	3.643.067.333.585	4.097.571.965.729	*Sub-Contractors*
Beban Tidak Langsung	1.624.607.137.673	1.819.938.494.917	*Indirect expenses*
Upah	1.838.977.370.965	1.942.090.452.239	*Wages*
Peralatan	1.070.148.522.372	1.149.811.287.866	*Equipments*
Jumlah Jasa Konstruksi	**12.548.612.172.949**	**14.000.693.465.911**	***Total construction services***
EPC			***EPC***
Material	417.613.326.998	552.285.024.936	*Materials*
Sub-Kontraktor	281.104.209.660	1.008.361.800.581	*Sub-Contractors*
Beban Tidak Langsung	128.553.762.975	178.093.876.791	*Indirect Expenses*
Upah	109.878.477.209	144.079.276.831	*Wages*
Peralatan	80.628.984.528	61.781.287.470	*Equipments*
Jumlah EPC	**1.017.778.761.370**	**1.944.601.266.609**	***Total EPC***
Properti dan Realti			***Property and Realty***
Apartemen	176.775.208.413	261.907.444.750	*Apartment*
Hotel	118.547.706.984	171.852.997.460	*Hotel*
Sewa Bangunan	30.547.033.868	29.740.696.858	*Rent of Buildings*
Pengelolaan Gedung	64.766.552.015	43.361.309.756	*Building Management*
Penyusutan	57.642.324.031	66.189.381.839	*Depreciation*
Biaya Jasa	13.487.332.628	24.195.746.371	*Service Charge*
Tanah	3.160.979.799	1.012.299.923	*Land*
Lain-lain	86.671.834.924	58.464.179.005	*Others*
Jumlah Properti dan Realti	**551.598.972.662**	**656.724.055.962**	***Total Property and Realty***
Energi			***Energy***
Minyak	63.570.276.619	68.552.209.842	*Oil*
Penyusutan dan Amortisasi	12.791.165.038	14.820.746.366	*Depreciation and Amortization*
Sewa Operasi	884.217.006	1.628.217.302	*Operating Lease*
Jumlah Energi	**77.245.658.663**	**85.001.173.510**	***Total energy***
Pracetak			***Precast***
Bahan	6.327.543.965	69.485.000.547	*Materials*
Beban Tidak Langsung	6.866.330.838	10.579.178.303	*Indirect expenses*
Sub-Kontraktor	107.574.580	3.390.252.996	*Sub-Contractors*
Beban Penyusutan	375.272.190	5.463.969.063	*Depreciation*
Peralatan	937.737.894	--	*Equipments*
Upah	280.818.573	2.587.185.801	*Wages*
Jumlah pracetak	**14.895.278.040**	**91.505.586.710**	***Total Precast***

	2025	2024	
Persewaan Peralatan			***Equipments Rent***
Penyusutan	31.614.357.201	15.137.419.830	*Depreciation and Amortization*
Peralatan	22.696.100.267	37.999.284.071	*Equipments*
Bahan	17.577.317.718	20.162.695.695	*Materials*
Beban Tidak Langsung	7.715.628.598	15.266.210.435	*Indirect Expenses*
Upah	3.482.889.017	10.985.772.731	*Wages*
Jumlah Persewaan Peralatan	**83.086.292.801**	**99.551.382.762**	***Total Equipment Rent***
Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi			***Finance income on the construction of concession financial assets***
Sub-Kontraktor	130.606.907.945	61.275.913.189	*Sub-Contractors*
Beban Tidak Langsung	28.584.794.486	61.360.749.291	*Indirect Expenses*
Bahan	10.646.165.452	25.907.665.450	*Materials*
Upah	23.346.669.344	29.210.573.096	*Wages*
Jumlah pendapatan keuangan	**193.184.537.226**	**177.754.901.026**	***Total financial income***
Jalan Tol			***Toll road***
Operasi dan Pemeliharaan Tol	59.410.902.792	56.849.133.786	*Toll Operation and Maintenance*
Operasi Lainnya	4.909.725.173	4.382.111.065	*Other Operations*
E-Settlement	344.959.680	316.460.310	*E-Settlement*
Jumlah jalan tol	**64.665.587.645**	**61.547.705.161**	***Total toll road***
Jasa Pertambangan			***Mining Service Business***
Penyusutan	92.329.514.064	24.257.118.345	*Depreciation*
Beban Tidak Langsung	57.731.133.779	18.360.480.152	*Indirect Expenses*
Bahan	88.769.137.270	5.744.238.241	*Materials*
Peralatan	15.247.212.250	7.173.947.199	*Equipments*
Upah	6.696.876.491	6.182.931.874	*Wages*
Jumlah Pertambangan	**260.773.873.854**	**61.718.715.811**	***Total Mining***
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	**14.811.841.135.210**	**17.179.098.253.462**	***Total Cost of Revenue***

47. Beban Usaha / *47. Operating Expenses*

	2025	2024	
Pegawai	646.289.799.692	611.683.353.389	*Employees*
Umum	206.921.243.418	183.586.566.834	*General Administrative*
Penyusutan dan Amortisasi	28.879.214.617	22.694.254.113	*Depreciation and Amortization*
Pemasaran	20.474.352.811	5.529.056.189	*Marketing*
Jumlah	**902.564.610.538**	**823.493.230.525**	***Total***

48. Kerugian Penurunan Nilai / *48. Impairment Losses*

	2025	2024	
Persediaan	4.632.582.889.591	42.771.675.064	*Inventories*
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses	2.551.493.684.580	269.707.755.027	*Receivables, Retention and Gross Receivable from Project Owner*
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	143.666.992.371	42.358.867.191	*Financial Assets from Consession Project*
Aset Tak Berwujud	20.723.815.488	--	*Intangible Assets*
Kas dan Bank	1.734.409.604	474.998.170	*Banks and Deposits*
Goodwill	414.003.890	948.854.588	*Goodwill*
Jumlah	**7.350.615.795.524**	**356.262.150.040**	***Total***

49. Beban Keuangan / *49. Finance Costs*

Merupakan beban bunga atas utang bank, liabilitas sewa, dan obligasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.135.036.750.071 dan Rp1.891.555.175.411.

Represents interest expenses on bank loans, lease liabilities. and bonds in 2025 and 2024 amounted to Rp2,135,036,750,071 and Rp1,891,555,175,411 respectively.

50. Pendapatan Lainnya / *50. Other Income*

	2025	2024	
Keuntungan dari restrukturisasi utang bank (Catatan 39)	1.960.912.298.867	4.602.406.467	*Gain on debt restructuring (Note 39)*
Keuntungan dari restrukturisasi MTN & Obligasi (Catatan 40)	992.104.954.289	--	*Gain on MTN & Obligation restructuring (Note 40)*
Laba selisih kurs-bersih	29.028.649.731	57.213.423.673	*Gain exchange rates - net*
Bunga Bank dan Deposito Berjangka (Catatan 6)	26.922.955.549	21.885.792.195	*Interest on banks and time deposits (Note 6)*
Bunga Jasa Giro (Catatan 5a)	22.247.922.737	27.826.103.798	*Interest on Current Accounts (Note 5a)*
Pendapatan Rupa-rupa	141.407.490.297	991.519.964.964	*Miscellaneous income*
Jumlah	**3.172.624.271.470**	**1.103.047.691.097**	***Total***

51. Beban Lainnya / *51. Other Expense*

	2025	2024	
Penurunan nilai atas nilai wajar properti investasi	360.450.233.028	107.745.074.409	*Impairment in the fair value of investment property*
Administrasi dan provisi bank	290.444.784.645	130.780.664.384	*Bank administration and provision charges*
Pembebanan biaya dibayar dimuka	122.473.767.713	19.730.267.381	*Recognition of prepaid expenses as expense*
Beban kerugian penyelesaian aset jaminan	72.010.591.788	--	*Loss on settlement of collateral assets*
Beban jasa konsultan terkait PKPU	58.673.469.387	--	*Consultant service fees related to PKPU*
Amortisasi keuntungan restrukturisasi utang Bank	53.023.484.649	17.715.524.334	*Amortization of gain on bank debt restructuring*
Penurunan nilai investasi jangka panjang lainnya	32.458.171.231	15.208.362.153	*Impairment of other long-term investments*
Lainnya	466.266.777.899	935.488.482.975	*Miscellaneous expenses*
Jumlah	**1.455.801.280.339**	**1.226.668.375.636**	***Total***

52. Rugi Per Saham Dasar / *52. Basic Loss Per Share*

	2025	2024	
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(6.075.259.041.566)	(1.522.623.716.928)	*Loss of the year attributable to owners of the Company*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar	6.185.341.454	6.185.341.454	*Weighted average number of outstanding ordinary shares*
Rugi per saham	**(982)**	**(246)**	***Basic loss per share***

53. Sifat Dan Transaksi Pihak Berelasi / *53. Nature Of Relationship And Transactions With Related Parties*

Sifat pihak berelasi

a. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
b. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
c. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
d. Pihak berelasi yang merupakan perusahaan asosiasi dari Grup.

Nature of relationship

a. The Government of Republic Indonesia, represented by Ministry of Finance, is the majority stockholder.
b. All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has significant influence: Stateowned Enterprise (SOE).
c. Related parties whose major shareholders are the same as the Group.
d. Related parties which are associates of the Group.

e. Manajemen kunci yang meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

f. Dana Pensiun PP adalah entitas yang didirikan oleh Perusahaan untuk mengelola program manfaat imbalan dan iuran pasti Perusahaan.

e. Key management personnel includes Boards of the Commissioners and Directors of the Company.

f. Dana Pensiun PP is an entity co-founded by the Company to manage the Company's defined benefit and defined pension plan.

Transaksi-transaksi pihak berelasi
Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:

Transactions with related parties
The following are details of characteristic of the relationship and types of significant transactions with the related parties:

No	Pihak-Pihak yang Bereleasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank, pendapatan usaha/ *cash and cash equivalent, bank loans, revenue*
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank, pendapatan usaha, piutang usaha/ *cash and cash equivalent, bank loans, revenue, trade receivable*
3	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank/ *cash and cash equivalent, bank loans*
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/*Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank/ *cash and cash equivalent, bank loans*
5	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank, pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi kerja/ *cash and cash equivalent, bank loans, revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
6	PT Bank Syariah Nasional (dahulu/ *formerly* PT Bank Victoria Syariah)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas/ *cash and cash equivalent*
7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Kas dan setara kas, utang bank/ *cash and cash equivalent, bank loans*
8	PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/*Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, gross amount due from customers*
9	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/*Controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
10	PT Jasa Marga Pandaan Malang	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/*Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, retention receivable, gross amount due from customers*

No	Pihak-Pihak yang Bereleasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
11	PT Jasamarga Manado Bitung	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/*Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, retention receivable, gross amount due from customers*
12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi kerja / *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
13	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang retensi, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, receivable, advance from project owner*
14	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Dikendalikan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) / *Controlled by PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang retensi, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, receivable, advance from project owner*
15	Perusahaan Umum dan Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pembeir kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
16	PT Indonesia Ferry Property	Dikendalikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
17	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
18	PT Pupuk Iskandar Muda	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
19	Yayasan Pendidikan Telkom	Dikendalikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
20	PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pariwisata Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
21	PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pariwisata Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
22	PT GMF AeroAsia Tbk	Dikendalikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
23	PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
24	PT Hutama Karya Infrastruktur	Dikendalikan oleh PT Hutama Karya (Persero)/ *Controlled by PT Hutama Karya (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
25	PT Indonesia Power	Dikendalikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / *Controlled by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*

No	Pihak-Pihak yang Bereleasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
26	PT Marga Sarana Jabar	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
27	PT Solo Citra Metro Plasma Power	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
28	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
29	PT Wijaya karya Bangunan Gedung Tbk	Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, retention receivable, gross amount due from customers*
30	PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi/ *Revenue, trade receivable, retention receivable*
31	PT Prima Multi Terminal	Dikendalikan oleh PT Pelindo (Persero) / *Controlled by PT Pelindo (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi/ *Revenue, trade receivable, retention receivable*
32	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, piutang retensi/ *Revenue, trade receivable, retention receivable*
33	PT Menara Maritim Indonesia	Dikendalikan oleh PT Pelindo (Persero) dan PT PP Properti Tbk/ *Controlled by PT Pelindo (Persero) and PT PP Properti Tbk*	Pendapatan usaha, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja, uang muka pemberi pekerjaan/ *Revenue, trade receivable, gross amount due from customers, advance from project owner*
34	PT Gapura Angkasa	Dikendalikan oleh Pariwisata Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, gross amount due from customers*
35	PT Inpola Meka Energi	Dikendalikan oleh PT PP Energi/ *Controlled by PT PP Energi*	Pendapatan usaha, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, gross amount due from customers*
36	PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, trade receivable, gross amount due from customers*
37	PT Amarta Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, piutang usaha/ *Revenue, trade receivable*
38	Konsorsium Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Pendapatan usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, gross amount due from customers*
39	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) / *Controlled by PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*	Pendapatan usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, gross amount due from customers*
40	Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Revenue, gross amount due from customers*
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendapatan usaha, uang pekerjaan/ *Revenue, advance to project owner*
42	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Perum LPPNPI)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Piutang retensi/ *Retention receivable*

No	Pihak-Pihak yang Bereleasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
43	PT Jasamarga Jatim Pasuruan	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
44	PT Meulaboh Power Generation	Afiliasi/*Affiliated*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
45	PT Sigma Cipta Caraka	Dikendalikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
46	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
47	PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) / *Controlled by PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
48	PT Pupuk Indonesia Energi	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
49	PT Sinergi Investasi Properti	Afiliasi/*Affiliated*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
50	PT Trans Marga Jateng	Afiliasi/*Affiliated*	Piutang retensi/ *Retention receivable*
51	PT Perusahaan Ressort Indonesia Amerika	Dikendalikan oleh PT PP Properti Tbk *Controlled by PT PP Properti Tbk*	Piutang usaha, uang muka pemberi pekerjaan/ *Trade receivable, advance to project owner*
52	PT Adhi Persada Gedung	Dikendalikan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk/*Controlled by PT Adhi Karya (Persero) Tbk*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
53	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Dikendalikan oleh PT PP Properti Tbk/ *Controlled by PT PP Properti Tbk*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
54	PT Jasa Marga Rest Area Batang	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
55	PT Nindya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
56	PT Semen Padang	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
57	BIJB Paket 2 Kertajati	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
58	Sindang Heula	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
59	BSN Banjarmasin	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
60	Bandara Kualanamu	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
61	Holtekamp bentang	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*

No	Pihak-Pihak yang Bereleasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
62	PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
63	Rekonstruksi Sabodam Merapi	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
64	Bendung DI Kamijoro	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
65	Bandara Sepinggan	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*
66	Cable Stayed Kendari	Dikendalikan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*	Utang, piutang dan laba ventura bersama/ *Receivable/payable and (profit/loss) joint venture*

Rincian akun yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The following is the breakdown of transactions with related parties:

	31 Desember/*December 31, 2025*		31 Desember/*December 31, 2024*		
	%	Nilai/*Amount*	%	Nilai/*Amount*	
Aset					***Assets***
Kas dan setara kas	85,70%	2.566.822.387.780	90,70%	3.795.577.296.323	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	75,55%	147.207.133.317	84,25%	152.207.133.317	*Short-term investments*
Piutang usaha	26,71%	668.484.436.230	4,29%	248.219.203.944	*Trade accounts receivable*
Piutang retensi	71,02%	542.922.033.281	46,39%	669.251.345.084	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	39,24%	1.432.894.604.914	34,12%	1.612.341.558.235	*Gross receivables from project owners*
Piutang lain-lain	81,47%	216.104.747.908	39,40%	93.815.645.345	*Other receivables*
Liabilitas					***Liabilities***
Utang bank	73,80%	1.737.718.850.447	81,10%	3.629.398.467.158	*Bank loans*
Utang non bank	48,50%	299.132.015.593	100,00%	304.516.630.123	*Non-bank loans*
Utang usaha	14,37%	1.418.983.301.184	7,66%	788.695.812.135	*Trade accounts payable*
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	28,52%	217.852.218.603	7,48%	39.683.721.850	*Current portion of long-term loans from bank and financial institutions*
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu	67,13%	7.909.096.692.280	61,23%	7.302.766.676.898	*Long-term loans from bank and financial institutions - net of current maturity*

54. Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing / *54. Monetary Assets In Foreign Currencies*

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*		31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
	Mata uang lain/ *Other currencies*	Setara dengan Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata uang lain/ *Other currencies*	Setara dengan Rp/ *Equivalent in Rp*	
Aset					***Assets***
Kas dan setara kas					*Cash and cash equivalents*
Dolar Amerika Serikat	2.148.964	36.063.919.341	10.046.083	162.364.788.485	*U.S. Dollar*
Dolar Singapura	720,773	9.419.788.795	719,437	8.574.973.539	*Singapore Dollar*
Euro	3,501	69.147.487	182,698	3.078.652.285	*Euro*
Peso	94.356.267	26.891.536.046	107.173.424	29.901.385.357	*Peso*
Piutang usaha					*Trade accounts receivable*
Dolar Amerika Serikat	0.659	11.057.663.232	684,177	11.057.663.232	*U.S. Dollar*
Jumlah aset moneter		**83.502.054.901**		**214.977.462.898**	***Total Monetary Assets***

55. Informasi Segmen / *55. Segment Information*

Dewan Direksi menetapkan operasi bisnis dari perspektif segmen primer yaitu berdasarkan jenis usaha. Grup melaporkan segmen primer berdasarkan jenis usaha atau produk yang dihasilkan sebagai berikut:

- Konstruksi;
- Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC, Properti dan Realti);
- Pracetak;
- Persewaan Peralatan;
- Energi;
- Pendapatan keuangan atas *asset* konsesi;
- Pendapatan tol;
- Pertambangan.

The Board of Director has determined business operations from both primary segment, which is based on business type. The Group's reportable primary segments are based on the basis of type of business/product as follows:

- *Construction;*
- *Engineering, Procurement, and Construction (EPC, Property and Realty);*
- *Precast;*
- *Equipment Rent;*
- *Energy;*
- *Revenue from consession asset;*
- *Toll road revenue;*
- *Mining.*

31 Desember/ *December 31*, 2025 (dalam jutaan/*in million*)

Keterangan/ *Description*	Konstruksi/ *Construction*	EPC	Properti dan realti/ *Property and real estate*	Pracetak/ *Precast*	Persewaan Peralatan/ *Equipment rent*	Energi/ *Energy*	Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi/ *Revenue from consession asset*	Pendapatan Tol/*Toll Road Revenue*	Pertambangan/ *Mining*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian *Consolidation*
PENDAPATAN USAHA/ *REVENUE*											
Penjualan eksternal/ *External sales*	13.511.687	1.150.228	774.501	10.653	69.494	53.236	399.960	68.071	232.953	--	16.270.782
Penjualan antar segmen/ *Intersegment sales*	317.576	--	5.832	--	15.066	--	--	--	--	(338.474)	--
Jumlah pendapatan usaha/ *Total operating income*	**13.829.263**	**1.150.228**	**780.333**	**10.653**	**84.560**	**53.236**	**399.960**	**68.071**	**232.953**	**(338.474)**	**16.270.782**
Hasil segmen/ *Segment revenues*	1.280.650	132.449	228.734	(4.243)	1.474	(24.010)	206.776	3.406	(27.821)	(338.474)	1.458.941
Kerugian penurunan nilai/ *Impairment losses*	(600.639)	--	(6.252.350)	(1.000)	(14.059)	(74.677)	(137.972)	--	(41.666)	(228.254)	(7.350.616)
Beban keuangan/ *Finance cost*	(1.102.580)	--	(248.195)	(571)	(8.021)	(107.067)	(121.349)	(387.650)	(23.771)	(135.834)	(2.135.037)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of net income (loss) of associate and joint venture*	(55.004)	--	(29.681)	--	--	--	557	--	--	(12.805)	(96.933)
Beban usaha/ *Operating Expenses*	(447.777)	(46.202)	(153.543)	(163)	(2.295)	(18.427)	(31.102)	(14.005)	(6.802)	(182.248)	(902.565)
Beban pajak final/ *Final tax expense*	(370.224)	(30.481)	(19.122)	--	--	--	--	--	(2.707)	4.911	(417.623)
Pendapatan (beban) lain-lain/ *Other income (expenses)*	442.973	--	(1.465.342)	42	586	8.393	4.625	(966.902)	1.738	3.690.710	1.716.823
Laba sebelum pajak penghasilan/ *Profit before income tax*	(852.600)	55.766	(7.939.497)	(5.936)	(22.314)	(215.788)	(78.464)	(1.365.152)	(101.029)	2.798.006	(7.727.009)
Beban pajak penghasilan/ *Income tax expenses*	--	--	5.428	--	(11.113)	--	661	(256.284)	--	5.685	(255.623)
Profit for the year	**(852.600)**	**55.766**	**(7.934.069)**	**(5.936)**	**(33.427)**	**(215.788)**	**(77.803)**	**(1.621.436)**	**(101.029)**	**2.803.691**	**(7.999.173)**
INFORMASI LAINNYA/ *OTHER INFORMATION*											
Jumlah aset konsolidasian/ *Consolidated total assets*	**14.267.378**	**2.749.212**	**12.499.998**	**10.339**	**145.287**	**1.542.153**	**3.673.167**	**5.769.091**	**430.594**	**1.897.232**	**42.984.452**
Jumlah liabilitas konsolidasian/ *Consolidated total liabilities*	**20.829.145**	**1.489.887**	**6.187.739**	**7.090**	**99.624**	**2.051.858**	**1.773.462**	**4.047.752**	**295.258**	**1.897.232**	**38.679.046**

31 Desember/ *December 31*, 2024 (dalam jutaan/*in million*)

Keterangan/ *Description*	Konstruksi/ *Construction*	EPC	Properti dan realti/ *Property and real estate*	Pracetak/ *Precast*	Persewaan Peralatan/ *Equipment rent*	Energi/ *Energy*	Pendapatan keuangan atas konstruksi aset keuangan konsesi/ *Revenue from consession asset*	Pendapatan Tol/*Toll Road Revenue*	Pertambangan/ *Mining*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian *Consolidation*
PENDAPATAN USAHA/ *REVENUE*											
Penjualan eksternal/ *External sales*	16.179.414	2.055.762	795.185	98.593	112.855	87.866	322.778	83.762	75.928	-	19.812.143
Penjualan antar segmen/ *Intersegment sales*	418.434	-	28.969	5.465	33.592	-	-	-	-	(486.459)	--
Jumlah pendapatan usaha/ *Total operating income*	**16.597.848**	**2.055.762**	**824.154**	**104.058**	**146.447**	**87.866**	**322.778**	**83.762**	**75.928**	**(486.459)**	**19.812.143**
Hasil segmen/ *Segment revenues*	2.204.146	111.161	138.907	7.087	13.304	2.865	145.023	15.334	14.210	(18.992)	2.633.045
Kerugian penurunan nilai/ *Impairment losses*	(334.849)	--	(109.163)	(4.236)	(21.468)	(90.882)	(14.841)	--	(1.039)	220.217	(356.262)
Beban keuangan/ *Finance cost*	(1.228.122)	--	(955.419)	(727)	(3.683)	(114.478)	(82.659)	(321.246)	(6.057)	820.835	(1.891.555)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of net income (loss) of associate and joint venture*	(538.948)	8.627	6.999	--	--	--	1.879	--	--	--	(521.443)
Beban usaha/ Operating Expenses	(336.106)	(54.000)	(104.312)	(154.340)	(131.663)	(20.299)	(28.640)	(13.125)	--	18.992	(823.493)
Beban pajak final/ *Final tax expense*	(365.644)	--	(19.340)	(103.411)	(94.961)	--	--	--	--	--	(583.355)
Pendapatan (beban) lain-lain/ *Other income (expenses)*	814.698	--	(1.049.586)	(828.017)	131.523	(200.566)	508.126	(332.427)	(9.948)	842.576	(123.621)
Laba sebelum pajak penghasilan/ *Profit before income tax*	215.175	65.788	(2.091.914)	(1.083.644)	(106.948)	(423.361)	528.887	(651.464)	(2.834)	1.883.628	(1.666.685)
Beban pajak penghasilan/ *Income tax expenses*	(85.496)	--	(3.997)	--	(45.517)	--	(35.982)	(32.782)	--	--	(118.278)
Profit for the year	**129.679**	**65.788**	**(2.095.911)**	**(1.083.644)**	**(152.465)**	**(423.361)**	**492.905**	**(684.246)**	**(2.834)**	**1.932.202**	**(1.784.963)**
INFORMASI LAINNYA/ *OTHER INFORMATION*											
Jumlah aset konsolidasian/ *Consolidated total assets*	**40.520.058**	**4.589.938**	**18.934.011**	**9.703.838**	**11.539.309**	**1.754.034**	**3.884.676**	**6.033.687**	**7.654.633**	**(31.147.962)**	**54.532.211**
Jumlah liabilitas konsolidasian/ *Consolidated total liabilities*	**45.550.212**	**2.964.304**	**16.464.014**	**5.811.294**	**6.158.709**	**2.040.049**	**1.998.644**	**4.607.692**	**4.160.065**	**(31.147.962)**	**42.143.009**

Proyek-proyek yang dikerjakan Grup masih didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Project undertaken by the Group is still dominated by infrastructure projects from the Central Government and Local Government.

56. Perjanjian Dan Komitmen / *56. Agreement And Commitments*

Grup melakukan perikatan kontrak konstruksi dengan berbagai pihak sebagai berikut:

The Group has entered into construction contract with other parties as follows:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pemberi Kerja/*Bowheer*	Jangka Waktu Mulai/ *Period Start*	Selesai/*End*
EPC ISBL & OSBL RDMP Project RU V Balikpapan	69.294.680.502.092	PT Pertamina (Persero)	27-Feb-19	23-Sep-25
Toll Road Development of Semarang - Demak 1B	6.842.709.962.000	Kementrian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga , Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	27-Feb-23	26-Feb-26
Patimban Port Development Project (II) Package 6 Container Terminal No. 2 Construction	5.487.901.719.956	Direktorat Kepelabuhanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	5-Jan-23	3-Nov-25
LRT Filipina 03C	5.213.562.808.569	Department of Transportation (Dotr), Government of The Republic of The Philippines	14-Mar-24	12-Agu-29
Rail Loop TLS 6 DAN 7	4.987.940.400.000	PT Bukit Asam	04-Nov-24	27-Jun-26
Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Sta.20+200-Sta.45+800	4.516.640.612.445	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	12-Jun-23	8-Jun-25
Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok	4.259.643.826.053	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	22-Nov-22	22-Agu-25
Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu - Sukaragam (STA. 7+250 - STA. 17+750)	4.117.845.442.791	PT Jasamarga Japek Selatan	11-Sep-23	12-Mar-25
JO Tol IKN Seksi 1B	3.748.845.064.000	Kementerian PUPERA Satker Pelaksanaan Pembangunan IKN 2	01-Nov-24	26-Mar-26
Pengadaan EPC PLTGU Batam #1 120 MW	3.723.698.197.266	PT PLN Batam	20-Agu-25	
Malolos-Clark Railway Project (Blumentritt Extension) Package CP S-01	3.397.581.119.891	Department of Transportation, Republic of The Philippines	14-Nov-23	13-Nov-27
Mines of Bahodopi Block 2 & 3 Project	2.970.542.265.717	PT Vale Indonesia	1-Nov-22	31-Okt-25
JO Tol IKN Seksi 3B-2	2.663.365.777.088	Kementerian PUPR Satker Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang Provinsi Kal- Tim	21-Des-23	12-Jun-25
Pekerjaan Awal Pembangunan Pabrik Peleburan (Smelter) Feronikel	2.622.954.165.450	PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI)	29-Apr-19	25-Okt-24
New Priok Eastern Access (NPEA)	2.586.300.000.000	PT Pelabuhan Indonesia	02-Jul-25	21-Feb-27
Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi III (Cileles – Panimbang) Fase 2 Paket 3	2.125.858.440.252	Kementerian PUPERA Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang Panimbang	04-Okt-24	07-Mar-26
Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif	1.910.594.398.508	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	31-Okt-25	31-Des-27
Bendungan Cibeet Paket II	1.810.154.597.449	Kementerian PUPR - SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum	4-Sep-23	6-Okt-28
Tol Kataraja Seksi 1	1.662.908.950.418	PT Duta Graha Karya	25-Sep-23	14-Okt-26
JO Mandiri PIK2	1.625.000.000.000	PT. Mandiri Tbk	14-Apr-25	02-Feb-27
Sulut-1 Coal Fired Steam Power Plant	1.593.168.450.272	PT PLN (Persero)	16-Des-19	8-Jan-25
Gedung dan Kawasan Lembaga DPD IKN	1.488.700.000.000	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	4-Dec-25	23-Dec-27
Pembangunan PUPR Wing 2 IKN	1.480.162.072.000	Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	29-Dec-23	17-Dec-25
BNI Kawasan PIK 2	1.440.000.000.000	PT. BNI (Persero) Tbk	29-Nov-23	27-Jul-25
Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Peningkatan Jalan Kawasan West Residence	1.354.302.458.437	Kementerian PUPERA Satker Pelaksanaan Pembangunan IKN 1	29-Jul-24	20-Mar-26
Revitalisasi T1C Bandara Soetta	1.300.101.468.673	PT Angkasa Pura II (Persero)	18-Feb-19	30-Apr-26
Pembangunan Gedung Sentra Pengelolaan Uang (SPU) di Kawasan Karawang	1.261.077.531.831	Bank Indonesia	26-Jul-24	14-Nov-26
Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna IKN	1.244.903.000.000	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	4-Dec-25	23-Dec-27
Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 3 (MYC)	1.209.560.925.000	Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Seraya Opak SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak	29-Oct-18	31-Jul-26
Patimban Access Toll Road Construction Project Package 1	1.116.817.968.687	PPK Jalan Bebas Hambatan 2 Prov. Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Prov. Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR	3-Jan-24	2-Dec-25
Pembangunan Bendungan Way Apu Kabupaten Buru Propinsi Maluku - Paket 1 (Multiyears 2017 - 2022)	1.114.608.654.999	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Maluku, Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan	28-Dec-17	31-Dec-25
Timor-1 Coal Fired Steam Power Plant	1.099.681.227.031	PT. PLN (Persero)	12-Dec-19	24-Jul-25
JO RS PON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta	1.027.995.512.326	RS PON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta	15-Dec-23	16-May-25
JO Harkit - Tokushukai	958.908.243.000	Tokushukai Medical Corporation	1-Nov-24	1-Sep-26
Pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang (Paket-2)	933.687.694.000	SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumberdaya Air	15-Jan-19	15-Dec-25
Smelter Grade Alumina Refinery	902.086.523.969	PT Borneo Alumina	25-Nov-19	26-Feb-25

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pemberi Kerja/*Bowheer*	Jangka Waktu Mulai/ *Period Start*	Selesai/*End*
JO Proyek Hunian Vertikal 4 Tower TNI IKN	877.812.507.996	Kementerian Pekerjaan Umur dan Perumahan Rakyat	6-Nov-24	2-Dec-25
Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang	873.015.000.000	PT Pertamina Gas	1-Jul-25	1-Jul-27
Pembangunan Dermaga A Petrokimia Gresik	845.299.410.000	PT Petrokimia Gresik	13-Nov-24	12-Nov-26
KSCS Paket 2	823.888.524.669	BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	17-Oct-25	9-Jun-27
JV Sekolah Rakyat Aceh 1	782.299.599.999	Kementrian PU Dir. Jendral Prasarana Strategis	28-Nov-25	26-Jul-26
Bangunan Kantor Pendukung IKN	769.540.000.000	Otorita Ibu Kota Nusantara	4-Dec-25	23-Nov-27
Project Bromo General Contractor Works Batam	746.460.000.000	PT. Teknologi Data Infrastruktur	10-Dec-24	1-Feb-26
Bendungan Karangnongko	730.023.438.000	SNVT BBWS Bengawan Solo - Dirjen SDA - Kementrian PUPR	18-Sep-23	31-Dec-26
RS UPT Vertikal Riau	663.243.270.000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	9-Dec-24	31-Jul-26
JV Gedung Hunian Vertikal, Parkir Kantin	654.297.990.809	Komboss PTE Ltd	21-Nov-25	21-Nov-26
JO Vertikal Kalibata	654.297.990.808	PT. Titan Jaya Solusi	22-Oct-25	22-Oct-26
Gedung Kuliah UIN 3 Malang	652.718.242.790	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	28-Nov-22	30-Nov-25
Peningkatan Jalan Paket F di KIPP 1B	603.867.106.000	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	11-Jun-25	31-Dec-25
Overlay Runway Selatan Bandara Soekarno-Hatta	520.517.638.000	PT Angkasa Pura II	24-Aug-23	26-Oct-25
BRI Ragunan	517.000.000.000	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3-Jun-24	24-Jan-26
JV Sekolah Rakyat Bengkulu	501.990.000.000	Kementrian PU Dir. Jendral Prasarana Strategis	10-Dec-25	6-Aug-26
Proyek AMNT Private Airport	458.082.265.752	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	21-Nov-22	31-Jul-25
Lot 2 : Bululawang-Sidomulyo-Tambakrejo	455.817.913.093	Kementerian PUPERA	20-Dec-23	4-Oct-26
Pembangunan Dermaga Kap. 50.000 di Fuel Terminal Biak	436.729.500.001	PT. Pertamina Patraniaga	28-Dec-23	11-Jan-26
Pembangunan Terowongan/ Tunnel Jl. Sultan Alimuddin-Kakap Kota Samarinda	435.561.420.252	Dinas PU dan Tata Ruang Kota Samarinda	26-Dec-22	31-Dec-25
BI Hunian Karawang	412.800.000.000	Bank Indonesia	2-Dec-25	5-Jan-27
Mill Optimization Portsite Project Packages	408.305.729.698	PT. Freeport Indonesia	15-Aug-23	27-Feb-27
Bendungan Bagong Paket 3	402.314.271.123	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20-Dec-24	31-Dec-28
Penanganan Darurat Pasca Bencana Aceh 2	379.300.176.000	SATKER Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh	26-Dec-25	23-Jun-26
CAA-1 Project Package BD	377.342.018.079	PT. Chandra Asri Alkali	6-Jun-24	10-Oct-26
Pemb. Gedung Prasarana Palu Sulteng	376.650.317.500	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	20-Oct-23	15-Nov-25
Pembangunan Twin Tower Pleburan Undip	355.680.000.000	Universitas Diponegoro	14-Oct-24	1-May-27
JO Kantor Gubernur DPRD MRP Papua Tengah	355.362.185.000	Ditjen Cipta Karya Provinsi Papua	20-Oct-25	14-Dec-26
Portsite ACC Complex	350.619.030.000	PT. Freeport Indonesia	23-Dec-24	25-Mar-26
BTN Ecopark Gandul	346.001.433.141	PT. Bank Tabungan Negara	6-Nov-24	31-Dec-25
Deermaga PAL Surabaya	334.759.350.000	PT PAL Indonesia	14-Jun-24	4-Feb-26
Pengendalian Banjir Sistem Tenggang – Sringin Tahap I Paket III	314.149.756.439	PUPR	3-Mar-25	22-Feb-27
Pembangunan Jalan Baru Kretek - Girijati	305.670.107.209	Kementerian PUPERA	9-Nov-23	28-Aug-26
Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan-Pulau Laut Kabupaten Tanah Bumbu	290.014.579.103	Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	23-May-25	18-Jan-26
Construction Works for Oncology Center Building Adam Malik Hospital Under IsDB Financing Assistant IDN 1054 (Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu)	280.376.577.000	Adam Malik General Hospital, Kementerian Kesehatan RI	10-Dec-24	9-Dec-26
JO RS Adhyaksa Jambi	255.518.629.185	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	31-Jan-25	26-Dec-25
JV Sekolah Rakyat NTT	238.572.380.880	Kementrian PU Dir. Jendral Prasarana Strategis	29-Dec-25	25-Aug-26
BRI Semarang	222.691.000.000	PT. BRI	13-Feb-24	31-Aug-25
EPC ISBL & OSBL RDMP RU V Balikpapan (Reg)	211.984.980.456	JO SK E&C, Co.Ltd - HEC Ltd - PT Rekind and PT PP (Persero) Tbk	17-Mar-19	7-Jul-23
Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu & Anak IPT KIA KIARA RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	195.915.000.000	RSUPN DR Cipto Mangunkusumo Satker Kemenkes	15-Aug-25	12-Dec-25
NCICD Fase A Tahap 3 Paket 2	191.919.976.998	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	15-Dec-25	31-Dec-27
Parkir RS. Dharmais	184.750.000.000	RS. Kanker Dharmais	1-Oct-24	10-Dec-25
Pengadaan Perencanaan dan Konstruksi Fisik (Design and Build) Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan) di RSUD Tarempa	180.780.215.225	Kementerian Kesehatan RI	28-Feb-25	21-Dec-25
JO Relokasi Gunung Papua	175.058.348.511	Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Provinsi Kalimantan S	22-Dec-25	31-Dec-26
DPRD PRV Papua Barat	164.395.296.000	Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	19-Dec-24	13-Dec-25
Pelebaran Tol Tangerang - Merak	155.563.312.444	PT. Marga Mandalasakti	17-Dec-24	15-Oct-25
Pekerjaan Civil Works Package 11 RDMP RU-V Balikpapan	155.504.285.558	JO RDMP RU-V Balikpapan	17-Jul-20	28-Nov-23
Pengadaan Perencanaan dan Konstruksi Fisik (Design and Build) Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan) di RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI	141.066.600.000	Kementerian Kesehatan RI	17-Mar-25	31-Dec-25
Pelebaran Tol Kejapanan-Gempol	140.306.368.740	PT Jasamarga Toll Road Maintenance	1-Sep-25	28-May-26
Polder Bulak Cabe	137.921.347.204	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	15-Dec-25	4-Dec-27
Bendungan Lausimeme Lanjutan	132.368.124.663	SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera II	8-Nov-23	31-Dec-26
Pembangunan Gedung Parkir Umum Dinas Teknis Jatibaru (Lanjutan)	132.030.000.000	Provinsi DKI Jakarta	29-Aug-25	31-Dec-25
Proyek Harapan Kita Power House	129.108.000.000	RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	27-Oct-25	28-Oct-26
Polder Pondok Labu	127.237.696.737	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	16-Dec-25	9-Jan-27
Rehabilitasi Irigasi Sumut	99.779.743.213	Kementrian PU Dirjen SDA BBWS Sumatera II Medan	24-Jun-25	7-Oct-25
JIAT Papua Keerom 2 Tahap 3	95.241.356.761	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	31-Oct-25	19-Feb-26
JIAT Papua Keerom 1 Tahap 3	93.477.657.784	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	31-Oct-25	31-Dec-25

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pemberi Kerja/*Bowheer*	Jangka Waktu Mulai/ *Period Start*	Selesai/*End*
Rehab DPRD Pasca Demo - Jawa Tengah	92.470.425.000	Satker Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	19-Dec-25	24-Sep-26
Irigasi Sulteng Tahap 2 Paket 1	80.614.391.756	PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA WS. Palu	22-Aug-25	31-Mar-26
Rehabilitasi Irigasi Kalbar	80.587.798.472	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Kalimantan I Kalbar	25-Jun-25	13-Oct-25
JIAT Sarmi Jayapura Tahap 3	75.847.144.208	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	31-Oct-25	19-Feb-26
Irigasi Jatim Tahap 2	64.072.000.000	PPK Irigasi dan Rawa II SNVT BBWS Brantas	2-Sep-25	30-Dec-25
Irigasi Sulteng Tahap 2 Paket 2	63.800.800.000	PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA WS. Palu	22-Aug-25	31-Mar-26
Irigasi Kalbar Tahap 2 Paket 1	57.275.001.541	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Kalimantan I Kalbar	2-Sep-25	30-Dec-25
Irigasi Jatim Tahap 3	56.465.158.745	PPK Irigas dan Rawa I SNVT PJPA BBWS Brantas	24-Oct-25	31-Dec-25
Irigasi Papua Jayapura Tahap 3	56.320.715.571	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	27-Oct-25	19-Feb-26
Irigasi Sumut Tahap 2	50.382.770.000	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Sumatera II Sumut	2-Sep-25	31-Dec-25
Irigasi Jatim Tersier Tahap 3	43.100.642.088	PPK Operasi dan Pemeliharaan IV SDA BBWS Brantas	24-Oct-25	31-Dec-25
Irigasi Papua Mimika Tahap 3	41.998.931.216	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	25-Oct-25	19-Feb-26
Irigasi Papua Selatan Tahap 2	37.535.881.000	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Papua Merauke	2-Sep-25	30-Dec-25
Gedung BI IKN Tahap 1 Lanjutan	35.286.744.489	PT Bank Indonesia	27-Oct-25	25-Dec-25
Irigasi Malut Tahap 2	34.596.443.600	PPK Irigasi dan Rawa II BWS Maluku Utara	2-Sep-25	30-Dec-25
Enhancement DC CKRG 2	32.079.000.000	PT. Telkom Data Ekosistem	30-Jun-25	2-Sep-25
Irigasi Papua Barat Tahap 3	32.032.482.783	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Provinsi Papua Barat	24-Oct-25	31-Dec-25
JIAT Sumut Tahap 2	30.922.952.043	PPK Air Tanah & Air Baku SNVT PJPA Sumatera II	2-Sep-25	29-Jun-26
Stasiun Tanah Abang Lanjutan	25.244.876.000	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Ditjen	24-Oct-25	31-Dec-25
Irigasi Papua Barat & Barat Daya Tahap 2	22.246.020.648	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Provinsi Papua Barat	9-Sep-25	30-Dec-25
Penataan Klaster Manohara BSS Tahap 3 Dan Sarana Prasarana Pendukungnya	20.952.000.000	PT. Taman Wisata Candi Borobudur	21-May-25	17-Oct-25
Fas. Olahraga BTN	16.300.000.000	PT. Bank Tabungan Negara	14-Nov-25	30-Jan-25
Structure Enhancement CFRP L2 HDC	15.262.500.000	PT. Telkom Data Ekosistem	17-Feb-25	1-Jun-25
JIAT Kaltara Tahap 2	15.168.645.748	PPK Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA Kalimantan V	9-Sep-25	28-Dec-25
Irigasi Papua Tengah Tahap 2	13.528.090.985	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	15-Sep-25	31-Dec-25
JIAT Papua Tahap 2	11.812.777.054	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	19-Sep-25	31-Jan-26
JIAT Merauke Tahap 2	11.811.394.000	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Papua Merauke	2-Sep-25	30-Dec-25
Irigasi Kalbar Tahap 2 Paket 2	6.372.842.165	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Kalimantan I Kalbar	2-Sep-25	31-Jan-26
Irigasi Papua Selatan Tahap 3	2.431.288.001	PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Papua Merauke	7-Nov-25	31-Dec-25
JIAT Nabire Tahap 2	1.964.525.975	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua	19-Sep-25	31-Jan-26

Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip IMBT

Perusahaan

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) No. 03/044/CB2-FOG/VII/2023/IMBT pada tanggal 11 Juli 2023. Pinjaman ini dijamin dengan Kawasan Gedung Plaza PP yang berlokasi di Jalan TB Simatupang No. 57, DKI Jakarta seluas 34.056 m2, yang seluruhnya terdaftar atas nama nasabah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.005.000.000.000. Agunan fasilitas pembiayaan ini bersifat *cross collateral* terhadap fasilitas Modal Kerja Transaksional dan fasilitas Modal Kerja *Invoice Financing.* Perjanjian ini efektif dan akan berlangsung untuk jangka waktu akad terhitung 120 bulan sejak tanggal Akad. Perusahaan berkewajiban membayar Ujrah sebesar Rp1.036.456.254.167. Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk penyewaan penyewaan obyek akad berupa Kawasan Gedung Plaza PP di Jalan TB Simatupang No. 57, DKI Jakarta.

Financing agreement based on IMBT Principles

The Company

Based on the cooperation agreement between The Company and PT Bank Syariah Indonesia Tbk regarding financing facilities based on the principles of Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) No. 03/044/ CB2-FOG/VII/2023/IMBT on July 11, 2023. This loan is secured by the Plaza PP Building Area situated on Jalan TB Simatupang No. 57, DKI Jakarta, which covers an area of 34,056 m2 and is registered in the customer's name. The mortgage will guarantee the loan for the amount of Rp1,005,000,000,000. The collateral for this financing facility is cross collateral for the Transactional Working Capital facility and the Invoice Financing Working Capital facility. This agreement is effective and will last for the contract period starting 120 months from the date of the Agreement. The Company is obliged to pay ujrah Rp1,036,456,254,167. The purpose of this facility is to lease the PP Plaza Building area located at Jalan TB Simatupang No. 57, DKI Jakarta.

PPRE

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk tentang fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) No. 294/AMD/CB/ JKT/2021/ pada tanggal 5 November 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan gadai agunan tunai *(cash collateral)* deposito dengan nilai penjaminan setara 15% dari *plafond* Fasilitas PI IMBT atau sebesar Rp22.500.000.000 dengan ketentuan gadai agunan tunai ini dapat diikat dengan gadai agunan tunai per transaksi atau sebelum dari setiap penarikan dengan nilai penjaminan per penarikan setara 15% dari nilai penarikan Fasilitas PI IMBT. Dalam hal Perusahan tidak melakukan pembayaran utang, maka Bank akan menarik atau mengambil kepemilikan 100% dari aset IMBT atas peralatan.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga financial covenant sebagai berikut:

- *Debt to EBITDA Ratio maksimum* sebesar 4 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali.

Perjanjian Bangun Operasi dan Transfer (BOT) dengan PD Pasar Surya

GSN

Saat ini operasional PT GSN adalah mengelola Kaza Plaza yang berdiri diatas lahan seluas 25.420 m^2 yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Modern (Mall), Trade Center dan Hotel yang berlokasi di Jalan Tambahrejo Kecamatan Simokerto, Kapas Krampung, Kota Surabaya. Pengelolaan tersebut berdasarkan akta perjanjian bangun operasi dan transfer serah (BOT) antara PT GSN dengan PD Pasar Surya notaris Noor Irawati, S.H., No. 141 tanggal 21 Juni 2014.

Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 27 tahun 6 bulan terhitung dari tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan tanggal 10 Juli 2032 atau sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Penggunaan Lahan.

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian BOT No. 012/DIRUT/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 PT GSN telah mengajukan permohonan perpanjangan atas kerjasama tersebut menjadi berakhir pada bulan Juni 2063.

PPRE

Based on the cooperation agreement between The Company and PT Bank CIMB Niaga Tbk regarding financing facilities based on the principles of Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) No. 294/AMD/CB/ JKT/2021/ dated November 5, 2021.

This loan is collateralized by a cash collateral deposit with a guarantee value equivalent to 15% of the IMBT PI Facility Plafond or Rp22,500,000,000 provided that this cash collateral pledge can be tied with cash collateral per transaction or before each withdrawal with the guarantee value per withdrawal is equivalent to 15% of the withdrawal value of the IMBT PI Facility. In the event that the Company does not pay its debts, the Bank will withdraw or take ownership of 100% of IMBT's assets on heavy equipment which is the object of financing for sales.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Debt to EBITDA Ratio maximum of 4 times;*
- *Debt Service Coverage Ratio is greater than or equal to 1.1 times.*

Agreement on Operation, Operate and Transfer (BOT) with PD Pasar Surya

GSN

PT GSN current operation is to manage Kaza Plaza which stands on an area of 25,420 sqm consisting of the Traditional Market, Modern Market (Mall), Trade Center and Hotel located at Jalan Tambahrejo, Simokerto, Kapas Krampung, Surabaya City. The operating is based on the agreement deed of build, operate and transfer (BOT) between PT GSN with PD Pasar Surya by notary Noor Irawati, S.H., No. 141 dated June 21, 2014.

The term of the agreement is for 27 years 6 months commencing from January 10, 2005 up to July 10, 2032 or since the signing of Minutes of Land Use Handover.

Based on a request the extension of BOT agreement term letter No. 012/DIRUT/XII/2017 dated December 22, 2017 PT Gitanusa Sarana Niaga have proposed an extension of the cooperation being ended in June 2063.

Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, proses perpanjangan masa waktu BOT masih dalam tahap negosiasi.

Until the issuance of the consolidated financial statements, the extension of the BOT concession period is still being negotiated.

Perjanjian bangun operasi dan transfer (BOT) dengan PD Pasar Surya PT HKM

Saat ini operasional Perusahaan adalah mengelola Ocean Square yang berdiri diatas lahan seluas 23.280 m^2 yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Modern (Mall), Trade Center, Kondotel dan Hotel yang berlokasi di Balikpapan Ocean Square, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengelolaan tersebut berdasarkan akta perjanjian bangun operasi dan transfer serah (BOT) antara PT HKM dengan PD Pasar Surya dengan perjanjian kerjasama adendum No. 060/LGL/HKM-PKS/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004.

Agreement on operation, operate and transfer (BOT) with PD Pasar Surya - PT HKM

The Company's current operation is to manage Ocean Square which stands on an area of 23,280 sqm square meters consisting of the Traditional Market, Modern Market (Mall), Trade Center, Condotel and Hotel located at Balikpapan Ocean Square, Balikpapan, East Kalimantan. The operating is based on the agreement deed of build, operate and transfer (BOT) between PT HKM PD Pasar Surya with of the joint venture addendum No. 060/LGL/HKM-PKS/XII/2004 dated December 15, 2004.

Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 25 tahun terhitung dari bulan Desember 2004 sampai dengan bulan November 2029 atau sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Penggunaan Lahan.

The term of the agreement is for 25 years commencing from December 2004 still up November 2029 or since the signing of Minutes of Land Use Handover.

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian BOT No. 260/HKM/XII/2017 tanggal 22 November 2017, PT HKM telah mengajukan permohonan perpanjangan atas kerjasama tersebut menjadi berakhir pada bulan November 2064.

Based on a request the extension of BOT agreement term letter No. 260/HKM/XII/2017 dated November 22, 2017 PT HKM have proposed an extension of the cooperation being ended in November 2064.

Sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasi ini, PT HKM belum mendapat tanggapan atas surat permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian BOT tersebut.

Until the issuance of this consolidated financial report, PT HKM has not received a response to the letter requesting for a term extension of BOT.

Perjanjian dengan Swiss-Belhotel - PT HKM

Pada tahun 2023, PT HKM telah menandatangani perjanjian baru berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 5 Juli 2023 dengan jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juli 2023.

Agreement with Swiss-Belhotel - PT HKM

In 2023, PT HKM has signed a new agreement based on a Letter of Agreement on July 5, 2023 with a period of three (3) years starting from July 6, 2023.

57. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PPRO

Berdasarkan keputusan Homologasi tertanggal 17 Februari 2025, keputusan tersebut tertuang dalam Rencana Perdamaian yang mencakup 5 skema penyelesaian dengan para kreditur, sebagai berikut:

- Diselesaikan dengan pelaksaanan Akta Jual Beli (AJB);
- Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional;
- Dikonversi menjadi ekuitas;
- Dikonversi menjadi surat berharga *perpetual*; dan
- Dimodifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru jangka panjang;

Rincian skema penyelesaian untuk masing-masing jenis kewajiban atau kelompok kreditur adalah sebagai berikut:

57. Suspension Of Debt Payment Obligations ("PKPU") PPRO

Based on Homologation decision on 17 February 2025, which set out in the Composition Plan, covering the 5 settlement schemes with creditors, are as follows:

- *Settled through the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB);*
- *Settled in installments through operating cash flows;*
- *Converted into equity;*
- *Converted into perpetual securities; and*
- *Modified into new long-term payment terms.*

The details of the settlement scheme for each type of obligation or group of creditors are as follows:

Kreditur	Jenis kewajiban/ kelompok kreditur/ *Type of obligation/ creditor group*	Skema Penyelesaian/ *Settlement Scheme*
Kreditur Preferen/ *Preferred Creditors*	*Kreditor* dengan hak mendahului yang karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa/ *Creditors with priority rights whose claims are granted preferential status by law due to the nature of the receivables*	Pembayaran pada kreditur dilakukan lebih dahulu dari kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren yang diambil dari dana yang diterima oleh Perusahaan/ *Payments to creditors are made prior to the settlement of Secured Creditors and Concurrent Creditors, using funds received by the Company.*
Kreditur Separatis Tranche A/ Secured Creditors – Tranche A	*Kreditor* yang memiliki nilai utang di bawah Rp50.000.000.000/ *Creditors with outstanding balances below Rp50,000,000,000*	Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas dalam jangka waktu 3 tahun tingkat suku bunga 2% dengan opsi perpanjangan/ *Payments will be made based on the availability of cash flows within a period of 3 years, with an interest of 2% and an option for extension*
Kreditur Separatis Tranche B/ Secured Creditors – Tranche B	*Kreditor* yang akan memberikan Kredit Pemilikan Apartmen (KPA)/ *Creditors who will provide Apartment Mortgage Loans (KPA)*	Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas dalam jangka waktu 10 tahun dengan tingkat suku bunga 2% dengan opsi perpanjangan/ *Payments will be made subject to the availability of cash flows over a period of 10 years, with an interest rate of 2% and an option for extension*
Kreditur Separatis Tranche C/ *Secured Creditors – Tranche C*	*Kreditor* yang tidak memberikan Kredit Pemilikan Apartmen (KPA)/ *Creditors who was not provide Apartment Mortgage Loans (KPA)*	Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas dalam jangka waktu 10 tahun dengan tingkat suku bunga 2% dengan opsi perpanjangan/ *Payments will be made subject to the availability of cash flows over a period of 10 years, with an interest rate of 2% and an option for extension.*
Kreditur Separatis Tranche D/ *Secured Creditors – Tranche D*	*Kreditor* yang merupakan pemilik lahan/ *Creditors who are landowners.*	Pembayaran dilakukan dengan penjualan bersama dalam jangka waktu 1 tahun dengan opsi perpanjangan sampai dengan didapatkannya calon investor dan/atau pembeli lahan atau melalui pengembalian Aset Jaminan atau aset lainnya yang akan menjadi obyek dari penyelesaian kewajiban (*"Asset Settlement"*)/ *Payments will be made through joint sales within a period of 1 year, with an option for extension until a potential investor and/or land buyer is obtained, or through the return of collateral assets or other assets that will become the object of settlement of the obligation ("Asset Settlement").*
Kreditur Separatis Tranche E/ *Secured Creditors – Tranche E*	*Kreditor* yang memberikan pinjaman pemegang saham/ *Creditors who provide shareholder loans*	Pembayaran dilakukan dengan konversi menjadi *perpetual loan* dengan jangka waktu 28 tahun dan tingkat suku bunga 0,75%. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas. *Payments will be made through conversion into a perpetual securities with a term of 28 years and an interest rate of 0.75%. Payments made based on the availability of cash flow.*

Kreditur	Jenis kewajiban/ kelompok kreditur/ *Type of obligation/ creditor group*	Skema Penyelesaian/ *Settlement Scheme*
Kreditor Konkuren Non-Konsumen Tranche A-D/ *Non-Consumer Concurrent Creditors – Tranche A-D*	*Kreditor* yang bukan para konsumen unit apartemen maupun perumahan/ *Creditors who are not consumers of apartment or housing units*	Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas dalam jangka waktu 4 - 10 tahun dengan opsi perpanjangan/ *Payments will be made based on the availability of cash flows within a period of 4 to 10 years, with an option for extension.*
Kreditor Konkuren Non-Konsumen Tranche E/ *Non-Consumer Concurrent Creditors – Tranche E*	*Kreditor* yang memiliki nilai utang antara Rp20.000.000.000 dan Rp45.000.000.000/ *Creditors with outstanding balances between Rp20,000,000,000 and Rp45,000,000,000.*	Pembayaran akan dilakukan konversi menjadi obligasi konversi (*convertible bonds*) dengan jangka waktu 20 dengan tingkat suku bunga 0,50%/ *Payments will be made through conversion into convertible bonds with a term of 20 years at an interest rate of 0.50%*
Kreditor Konkuren Non Konsumen Tranche F/ Non-Consumer Concurrent Creditors – Tranche F	*Kreditor* yang memiliki nilai utang lebih dari Rp45.000.000.000/ *Creditors with outstanding balances exceeding Rp45,000,000,000*	Pembayaran akan dilakukan konversi menjadi obligasi konversi (*convertible bonds*) dengan jangka waktu 20 dengan tingkat suku bunga 0,50%/ *Payments will be made through conversion into convertible bonds with a term of 20 years at an interest rate of 0.50%*
Kreditor Konkuren Non Konsumen Tranche G/ *Non-Consumer Concurrent Creditors – Tranche G*	*Kreditor* yang memberikan pinjaman pemegang saham/ *Creditors who provide shareholder loans*	Pembayaran dilakukan dengan konversi perpetual loan dalam jangka waktu 28 tahun dengan tingkat suku bunga 0,75%, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketersediaan arus kas/ *The obligations will be settled through conversion into a perpetual loan with a term of 28 years at an interest rate of 0.75%, with payments made based on the availability of cash flows*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche A/ Concurrent Consumer Creditors – Tranche A	*Kreditor* atas unit apartemen persediaan jadi dan perumahan telah melakukan pelunasan dan telah dilakukan serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *Creditors for completed apartment and housing inventory units have settled their obligations and the handover of the apartment and/or housing units has been completed*	Melaksanakan kewajiban kepada kreditor melalui pelaksanaan AJB/ *To fulfill obligations to creditors through the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB)*

Kreditur	Jenis kewajiban/ kelompok kreditur/ *Type of obligation/ creditor group*	Skema Penyelesaian/ *Settlement Scheme*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche B/ *Concurrent Consumer Creditors – Tranche B*	*Kreditor* atas unit apartemen persediaan jadi dan perumahan yang telah melakukan pelunasan namun belum dilakukan serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *Creditors for completed apartment and housing inventory units who have fully settled their obligations but the handover of the apartment and/or housing units has not yet been completed*	Diselesaikan melalui pelaksanaan AJB dalam jangka waktu sampai dengan 7 tahun sejak tanggal efektif dan terpenuhinya kriteria serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *The obligations will be settled through the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB) within a period of up to 7 years from the effective date, subject to the fulfillment of the criteria for the handover of the apartment and/or housing units.*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche C/ *Concurrent Consumer Creditors – Tranche C*	*Kreditor* atas unit apartemen persediaan jadi (*ready stock*) dan perumahan yang belum melakukan pelunasan namun telah dilakukan serah terima unit apartemen dan/atau perumahan./ *Creditors for completed apartment (ready stock) and housing units who have not yet settled their obligations, but the handover of the apartment and/or housing units has been completed.*	Diselesaikan melalui pelaksanaan AJB dalam jangka waktu sampai dengan 7 tahun sejak tanggal efektif dan terpenuhinya kriteria serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *The obligations will be settled through the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB) within a period of up to 7 years from the effective date, subject to the fulfillment of the criteria for the handover of the apartment and/or housing units.*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche D/ *Concurrent Consumer Creditors – Tranche D*	*Kreditor* atas unit apartemen persediaan jadi dan perumahan yang belum melakukan pelunasan dan belum dilakukan serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *Creditors for completed apartment (ready stock) and housing units who have not yet settled their obligations, but the handover of the apartment and/or housing units has been completed*	Diselesaikan melalui pelaksanaan AJB dalam jangka waktu sampai dengan 7 tahun sejak tanggal efektif dan terpenuhinya kriteria serah terima unit apartemen dan/atau perumahan/ *The obligations will be settled through the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB) within a period of up to 7 years from the effective date, subject to the fulfillment of the criteria for the handover of the apartment and/or housing units.*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche E/ Concurrent *Consumer Creditors – Tranche E*	*Kreditor* atas unit apartemen dalam pembangunan/ *Creditors for apartment units under construction*	Diselesaikan melalui pelaksanaan relokasi unit atau melalui pelaksanaan *refund* setelah Kreditor Konsumen Tranche F diselesaikan/ *The obligations will be settled through unit relocation or through the execution of refunds after Consumer Creditors – Tranche F have been settled."*
Kreditor Konkuren Konsumen Tranche F/ *Concurrent Consumer Creditors – Tranche F*	*Kreditor* konsumen yang telah menandatangani berita Acara *Refund* sampai dengan tanggal efektif Putusan/ *Consumer creditors who have signed the Refund Minutes up to the effective date of the Decision.*	Diselesaikan melalui pelaksanaan *refund* dalam jangka waktu 10 tahun/ *The obligations will be settled through refunds over a period of 10 years*

58. Kontinjensi

Perusahaan

Perusahaan memiliki partisipasi sebesar 19,8% dalam operasi bersama proyek EPC ISBL & OSBL RDMP RU-V Balikpapan bersama Hyundai Engineering Co. Ltd. dan PT Rekayasa Industri. Sesuai PSAK 111, pengaturan ini diklasifikasikan sebagai operasi bersama sehingga Perseroan mengakui bagian atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari proyek tersebut. Sehubungan dengan penurunan profitabilitas proyek dan kondisi kontrak yang memberatkan, Perseroan telah mengakui tanggungan rugi berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas bagian proporsional Perseroan sebesar 19,8% dari kerugian proyek. Dalam menentukan tanggungan rugi tersebut, sesuai pengaturan *default* dalam SAJOA, besaran akhir eksposur masih mengandung ketidakpastian material karena adanya sengketa atas alokasi kerugian internal JO, indikasi kelemahan tata kelola dan temuan forensik, potensi klaim dengan owner, serta adanya eksposur tanggung renteng *(joint and several liability)* kepada owner atas kewajiban proyek. Oleh karena itu, selain tanggungan rugi yang telah diakui, Perusahaan juga mengungkapkan liabilitas kontinjensi dan akan terus menelaah kecukupan tanggungan rugi tersebut sesuai perkembangan negosiasi, arbitrase, dan hasil penyelesaian klaim yang dapat berdampak material terhadap jumlah kewajiban yang pada akhirnya menjadi beban Perusahaan.

58. Contingencies

The Company

The Company has a 19.8% participation in the joint operation of the EPC ISBL & OSBL RDMP RU-V Balikpapan project with Hyundai Engineering Co. Ltd. and PT Rekayasa Industri. In accordance with PSAK 111, this arrangement is classified as a joint operation so that the Company recognizes its share of the assets, liabilities, revenues, and expenses arising from the project. In connection with the decline in project profitability and burdensome contract conditions, the Company has recognized accumulated equity in net losses for contract losses based on management's best estimate of the Company's proportionate share of 19.8% of the project losses. In determining this accumulated equity in net losses, in accordance with the default settings in the SAJOA, the final amount of exposure still contains material uncertainty due to disputes over the allocation of internal JO losses, indications of governance weaknesses and forensic findings, potential claims with the owner, and the existence of joint and several liability exposures to the owner for project obligations. Therefore, in addition to the recognized accumulated equity in net lossess, the Company also discloses contingent liabilities and will continue to review the adequacy of these accumulated equity in net lossess in accordance with developments in negotiations, arbitration, and the results of claims settlements that may have a material impact on the amount of obligations that ultimately become a burden on the Company.

59. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Manajemen Modal

Manajemen risiko modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari utang termasuk utang bank, utang non-bank pihak berelasi, utang obligasi, surat berharga jangka menengah, dan liabilitas sewa pembiayaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Perusahaan, modal saham, dan

59. Financial Instrument, Financial Risk And Capital Managements

Capital risk management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance. The capital structure of the Group consists of debt, which includes bank loans, non bank loans related party, bonds payable, medium-term notes, and finance lease liabilities disclosed in the notes to consolidated financial statements, cash and cash equivalents and equity attributable to the owner of the Company, comprising issued capital, and retained earnings. The Board of

laba ditahan. Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

Manajemen Risiko Keuangan
Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Financial Risk Management
Financial risk management objectives and policies

Grup memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, manajemen terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko melalui pendekatan yang proaktif dan terencana. Grup telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah sebagai berikut:

The Group perceives that risk is by nature an indivisible part of business operation. Realizing that business success is also determined on the effectivity of risk management, therefore management continually strive to improve the risk management capability through proactive and systematic approach. The Group identified the main financial risk facing the Group are as follows:

i. Risiko tingkat suku bunga
Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur terhadap suku bunga Grup terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Grup memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp3.627.444.003.340 dan Rp4.779.732.762.182 yang dikenakan suku bunga mengambang.

i. Interest rate risk management
Interest on the cash flow risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Group's exposure to interest rate is monitored continuously by analyzing financial liabilities's. As of December 31, 2025 and December 31, 2024, Group has outstanding financial liabilities amounting to Rp3,627,444,003,340 and Rp4,779,732,762,182 which are borne floating interest rate.

Pada 31 Desember 2025, jika suku bunga atas liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang meningkat/ menurun sebesar 1 basis poin, dengan asumsi variable lain konstan, maka laba sebelum pajak dan ekuitas akan meningkat/ menurun sebesar Rp21.350.367.500.

On December 31, 2025, if the interest rate on financial liabilities with floating rates increases/ decreases by 1 basis point, assuming other variables remain constant, the profit before tax and equity with increases/ decreases by Rp21,350,367,500.

ii. Risiko kredit
Keterlambatan pembayaran, tidak membayar Sebagian, atau seluruh hasil kerja proyek dari pemilik proyek akan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Grup. Hal ini menyebabkan perubahan alokasi pendanaan pada beberapa proyek yang sedang dan akan berjalan serta keterbatasan arus kas operasional untuk kebutuhan pembelanjaan modal dalam jangka pendek.

ii. Credit Risk
Late payment, do not pay part or all of the work of the project the project owner will be able to negatively affect the Group's working capital turnover. This causes changes in the allocation of funding to some projects that are being and will run as well as the limitations of operating cash flow for capital expenditure needs in the short term.

iii. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko Grup tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Grup memonitor secara ketat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

iii. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk when the Group is unable to meet liabilities as the due falls. The Group closely monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the needs of a liability payments are due. The following is aging summary of financial liabilities based on undiscounted contractual payments:

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate*	31 Desember/*December 31*, 2025					
		Kurang dari satu bulan/*Less than 1 month*	1 sampai 3 bulan/*1 to 3 months*	3 bulan sampai 1 tahun/*3 months to 1 year*	1 sampai 5 tahun/*1 to 5 years*	Jumlah/*Total*	
Tanpa bunga							***Non-interest bearing***
Kas	--	9.352.479.334	--	--	--	9.352.479.334	*Cash on hand*
Piutang usaha							*Trade accounts receivable*
Pihak berelasi	--	--	--	612.940.251.841	--	612.940.251.841	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	2.514.268.477.883	--	2.514.268.477.883	*Third parties*
Aset keuangan dari proyek konsesi	--	--	--	174.024.539.373	--	174.024.539.373	*Financial asset from concession project*
Piutang retensi							*Retention receivables*
Pihak berelasi	--	--	--	644.104.239.443	--	644.104.239.443	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	143.487.766.269	--	143.487.766.269	*Third parties*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja							*Gross receivables from project owners*
Pihak berelasi	--	--	--	1.069.149.875.024	--	1.069.149.875.024	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	2.752.093.451.137	--	2.752.093.451.137	*Third parties*
Piutang lain-lain							*Other accounts receivable*
Pihak berelasi	--	--	--	50.380.317.402	--	50.380.317.402	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	52.853.631.303	--	52.853.631.303	*Third parties*
Instrumen suku bunga variabel							***Variable interest rate instruments***
Bank	0,04%-5%	--	--	2.532.603.274.599	--	2.532.603.274.599	*Cash in banks*
Bank yang dibatasi penggunaannya	0,04%-5%	--	--	233.749.352.297	--	233.749.352.297	*Restricted bank*
Instrumen suku bunga tetap							***Fixed interest rate instruments***
Deposito berjangka	2,25%-4,75%	--	--	357.935.850.880	--	357.935.850.880	*Time deposits*
Jumlah		**9.352.479.334**	--	**11.137.591.027.450**	--	**11.146.943.506.784**	***Total***

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate*	31 Desember/*December 31*, 2024					
		Kurang dari satu bulan/*Less than 1 month*	1 sampai 3 bulan/*1 to 3 months*	3 bulan sampai 1 tahun/*3 months to 1 year*	1 sampai 5 tahun/*1 to 5 years*	Jumlah/*Total*	
Tanpa bunga							***Non-interest bearing***
Kas	--	30.119.033.361	--	--	--	30.119.033.361	*Cash on hand*
Piutang usaha							*Trade accounts receivable*
Pihak berelasi	--	--	--	248.219.203.944	--	248.219.203.944	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	5.541.278.259.192	--	5.541.278.259.192	*Third parties*
Aset keuangan dari proyek konsesi	--	--	--	219.641.238.342	--	219.641.238.342	*Financial asset from concession project*
Piutang retensi							*Retention receivables*
Pihak berelasi	--	--	--	669.251.345.084	--	669.251.345.084	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	773.401.974.763	--	773.401.974.763	*Third parties*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja							*Gross receivables from project owners*
Pihak berelasi	--	--	--	1.612.341.558.235	--	1.612.341.558.235	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	3.113.306.584.277	--	3.113.306.584.277	*Third parties*
Piutang lain-lain							*Other accounts receivable*
Pihak berelasi	--	--	--	93.815.645.345	--	93.815.645.345	*Related parties*
Pihak ketiga	--	--	--	144.296.437.528	--	144.296.437.528	*Third parties*
Instrumen suku bunga variabel							***Variable interest rate instruments***
Bank	0,04%-5%	--	--	3.463.583.426.347	--	3.463.583.426.347	*Cash in banks*
Bank yang dibatasi penggunaannya	0,04%-5%	--	--	305.493.312.029	--	305.493.312.029	*Restricted bank*
Instrumen suku bunga tetap							***Fixed interest rate instruments***
Deposito berjangka	2,25%-4,75%	--	--	692.635.446.880	--	692.635.446.880	*Time deposits*
Jumlah		**30.119.033.361**	--	**16.877.264.431.966**	--	**16.907.383.465.327**	***Total***

60. Transaksi Non Kas / *60. Non Cash Transaction*

Tabel di bawah ini menunjukan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2025 and December 31, 2024 , are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2025* Rp	Perubahan non kas/ *Non cash movement* Arus kas/ *Cash flows* Rp	Lainnya/ *Others* Rp	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	16.893.291.916.143	(443.483.268.116)	(2.242.948.691.113)	14.206.859.956.914	*Loans from bank and financial institution*
Utang Obligasi	2.703.499.498.562	(242.275.000.000)	(370.794.562.168)	2.090.429.936.394	*Bonds payable*
Surat utang jangka menengah	630.000.000.000	--	(630.000.000.000)	--	*Medium Term notes*
Utang non bank	343.010.116.650	(10.122.539.969)	10.770.297.561	343.657.874.242	*Non bank loan*
Sukuk	591.754.000.000	(60.000.000.000)		531.754.000.000	*Sukuk*
Jumlah	**21.161.555.531.355**	**(755.880.808.085)**	**(3.232.972.955.720)**	**17.172.701.767.550**	***Total***

	1 Januari/ *January 1, 2024* Rp	Perubahan non kas/ *Non cash movement* Arus kas/ *Cash flows* Rp	Lainnya/ *Others* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya	13.752.621.910.865 3.368.081.443.569	3.140.670.005.278 1.100.000.000.000	 --	16.893.291.916.143 2.703.499.498.562	*Loans from bank and financial institution*
Utang Obligasi					*Bonds payable*
Surat utang jangka menengah	-- 610.010.000.000	630.000.000.000 (266.999.883.350)	-- --	630.000.000.000 343.010.116.650	*Medium Term notes*
Utang non bank	991.754.000.000	(400.000.000.000)	--	591.754.000.000	*Non bank loan*
Jumlah	**18.722.467.354.434**	**4.203.670.121.928**	**--**	**21.161.555.531.355**	***Total***

61. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *61. Events After The Reporting Period*

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup.

There were no significant events which had a material effect on the Group's financial condition and results of operations.

62. Kelangsungan Usaha / *62. Going Concern*

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan asumsi bahwa Grup akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha *(going concern)*. Dalam menilai ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha, manajemen telah mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, yang paling kurang mencakup dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

These consolidated financial statements have been prepared on the assumption that the Group will continue its operations as an entity capable of maintaining its going concern. In assessing the appropriateness of the use of the going concern assumption, management has considered all available information about the future, covering at least twelve months from the reporting date.

Dalam melakukan penilaian tersebut, manajemen mengidentifikasi adanya beberapa kondisi dan peristiwa yang

In conducting this assessment, management identified several conditions and events that put pressure on the Group's financial performance

memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan dan likuiditas Grup, yang memerlukan perhatian berkelanjutan dalam menjaga kelangsungan usaha:

- **Rugi komprehensif:** Grup mencatat rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp8.083 miliar (2024: Rp1.803 miliar), yang berdampak terhadap posisi ekuitas Grup per tanggal pelaporan.
- **Tekanan arus kas:** Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan signifikan, sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan pengelolaan arus kas dan prioritas penggunaan dana dalam mendukung operasional dan kewajiban Grup.
- **Kewajiban jatuh tempo yang signifikan:** Grup memiliki kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo dalam dua belas bulan ke depan sebesar Rp4.601 miliar, yang saat ini dikelola melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk proses restrukturisasi dan Reprofiling kewajiban keuangan dengan para kreditur.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut di atas, manajemen telah menyusun dan mulai melaksanakan serangkaian rencana tindakan yang tertuang dalam RKAP 2026 sebagai berikut:

1. Restrukturisasi dan *Reprofiling* Utang
   Manajemen sedang melaksanakan program restrukturisasi utang *(debt reprofiling)* bersama para kreditur utama yang ditujukan untuk:
   - Memperpanjang tenor kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo;
   - Menurunkan beban bunga efektif dan memperbaiki struktur biaya pendanaan; dan
   - Meningkatkan ketersediaan arus kas untuk operasional Grup.

   Per tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, negosiasi dengan para kreditur masih dalam tahap pembahasan.

2. Divestasi Aset dan Portofolio Non-Inti

   Untuk memperkuat posisi likuiditas dan menurunkan beban utang Grup, manajemen merencanakan pelepasan kepemilikan atas aset dan penyertaan saham yang bukan merupakan bisnis inti *(non-core)*, yang meliputi:

and liquidity, which require ongoing attention in maintaining going concern:

- ***Comprehensive loss:*** *The Group recorded a comprehensive loss for the year ended December 31, 2025 of Rp8,083 billion (2024: Rp1,803 billion), which impacted the Group's equity position as of the reporting date.*
- ***Cash flow pressure:*** *Cash flow from operating activities significant decreased prompting management to improve cash flow management and prioritize the use of funds to support the Group's operations and obligations.*

- ***Significant maturing obligations:*** *The Group has financial liabilities maturing in the next twelve months amounting to IDR 4,601 billion, which are currently being managed through various strategic initiatives, including the restructuring process and reprofiling of financial liabilities with creditors.*

To address the above conditions, management has prepared and begun implementing a series of action plans as outlined in the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), as follows:

2. Debt Restructuring and Reprofiling
   Management is implementing a debt reprofiling program with major creditors aimed at:

   - *Extending the tenor of maturing short-term obligations;*
   - *Reducing the effective interest burden and improving the funding cost structure; and*
   - *Increasing cash flow availability for the Group's operations.*

   As of the completion date of these consolidated financial statements, negotiations with creditors are still ongoing.

2. Divestment of Non-Core Assets and Portfolio
   To strengthen liquidity and reduce the Group's debt burden, management plans to divest ownership in non-core assets and equity investments, including:

- Penyertaan saham pada PT Indonesia Ferry Property, PT Prima Multi Terminal, PT Citra Waspphutowa, dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi;
- Properti investasi berupa BSI Tower dan Prime Park Hotel Lombok.

3. Dukungan Pemegang Saham dan Pendanaan Strategis
   Grup mengupayakan dukungan pendanaan strategis melalui Danantara selaku Pemegang Saham Perusahaan. Mekanisme dukungan tersebut mencakup mekanisme carve out atau instrumen pendanaan lainnya senilai Rp5.500 miliar yang difokuskan pada penyehatan keuangan Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan signifikan.

4. Penguatan Bisnis Inti dan Efisiensi Operasional
   Manajemen menetapkan strategi fokus pada bisnis inti jasa konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Pemasaran selektif dengan memprioritaskan proyek-proyek yang didanai oleh BUMN, Pemerintah (Proyek Strategis Nasional), infrastruktur digital, dan swasembada energi, dengan target perolehan kontrak baru sebesar Rp22.009 miliar;
   - Target realisasi penjualan sebesar Rp15.270 miliar;
   - Penerapan kebijakan pengendalian arus kas secara ketat, dengan menargetkan arus kas operasi bersih positif sebesar Rp110 miliar; dan
   - Pengendalian biaya material dan subkontraktor secara efisien untuk memperbaiki marjin proyek.

5. Rencana Integrasi BUMN Karya
   Grup juga menyiapkan proses integrasi dengan entitas BUMN Karya lainnya, yang jika terlaksana diharapkan akan meningkatkan skala operasional, efisiensi biaya, dan memperkuat posisi keuangan Grup secara keseluruhan. Per tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, masih dalam tahap studi kelayakan.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh rencana tindakan yang diuraikan di atas, manajemen

- *Equity investments in PT Indonesia Ferry Property, PT Prima Multi Terminal, PT Citra Waspphutowa, and PT Lancarjaya Mandiri Abadi;*
- *Investment properties in the form of BSI Tower and Prime Park Hotel Lombok.*

3. Shareholder Support and Strategic Funding

The Group is seeking strategic funding support through Danantara as the Company's shareholder. The support mechanism includes carve-out mechanisms or other funding instruments amounting to Rp5,500 billion, focused on improving the financial condition of companies experiencing significant financial distress.

4. Core Business Strengthening and Operational Efficiency
Management has established a strategy to focus on its core construction services business through the following measures:
- *Selective marketing by prioritizing projects funded by SOEs, the Government (National Strategic Projects), digital infrastructure, and energy self-sufficiency, with a target of new contract acquisitions of Rp22,009 billion;*
- *Revenue realization target of Rp15,270 billion;*
- *Implementation of strict cash flow control policies, targeting positive net operating cash flow of Rp110 billion; and*
- *Efficient control of material and subcontractor costs to improve project margins.*

5. SOE Construction Integration Plan
The Group is also preparing for integration with other state-owned construction entities, which, if realized, is expected to increase operational scale, cost efficiency, and strengthen the Group's overall financial position. As of the completion date of these consolidated financial statements, this is still in the feasibility study stage.

Based on the assessment performed by considering all the action plans described above, management believes that the Group

berkeyakinan bahwa Grup akan memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya dalam dua belas bulan ke depan dari tanggal pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian ini tetap disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha.

will have adequate resources to continue its operations and meet its obligations within the next twelve months from the reporting date. Accordingly, these consolidated financial statements have been prepared on a going concern basis.

Namun demikian, realisasi rencana manajemen tersebut di atas masih bergantung pada beberapa kondisi yang berada di luar kendali penuh manajemen, antara lain:

a) Keberhasilan negosiasi restrukturisasi utang dengan para kreditur;
b) Realisasi penerimaan dari program divestasi aset sesuai dengan target;
c) Keberlangsungan dan bentuk dukungan pendanaan dari pemegang saham melalui Danantara;
d) Kondisi ekonomi makro dan iklim industri konstruksi di Indonesia; dan
e) Pencapaian kinerja operasional dan keuangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

However, the realization of the above management plans is still dependent on several conditions beyond management's full control, including:

a) The success of debt restructuring negotiations with creditors;
b) The realization of proceeds from the asset divestment program in line with targets;
c) The continuity and form of funding support from shareholders through Danantara;
d) Macroeconomic conditions and the construction industry climate in Indonesia; and
e) *The achievement of operational and financial performance in accordance with the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).*

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.

These conditions indicate the existence of material uncertainty that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. These consolidated financial statements do not include any adjustments that may arise from such uncertainty.

Sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, tidak terdapat peristiwa perkembangan yang relevan dengan penilaian kelangsungan usaha.

From December 31, 2025 up to the completion date of these consolidated financial statements, there have been no developments relevant to the going concern assessment.

63. Informasi Keuangan Tambahan / *63. Supplementary Financial Information*

Informasi tambahan berikut yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/ tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia. Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards. The supplementary financial information presents information related to the Company's contribution to the Government of Indonesia as required by the Circular Letter of Ministry of State- Owned Enterprises of The Republic of

Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2025, jumlah setoran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan terkait pajak badan, pajak final, PPN Keluaran, dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp1.291.946.893.893.

Indonesia No. S-32/ DKU.MBU/08/2024. During the year ended December 31, 2025 total tax payments made by the Company related to corporate income tax, final tax, VAT Out,s and Land and Building Tax amounted to Rp 1,291,946,893,893.

Jenis Kontribusi		Total Kontribusi (Rp)
A. Pajak		
1. Pajak penghasilan (PPh)	Rp	446.808.533.245
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	Rp	826.096.457.213
3. Bea Masuk/Keluar, Bea & Cukai, dan Bea Materai		
4. PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)	Rp	9.900.774.594
5. Pajak Pemerintah Pusat Lainnya	Rp	3.388.543.636
6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), termasuk PPB P2 (Perkotaan dan Pedesaan)	Rp	5.752.585.204
Total Kontribusi Pajak (Total A)	**Rp**	**1.291.946.893.892**
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1. Dividen		--
2. PNBP Lainnya		--
Total Kontribusi PNBP (Total B)		**--**
Total Kontribusi kepada Negara (Total A & B)	**Rp**	**1.291.946.893.892**

64. Penyajian Kembali atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Manajemen menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian terdahulu sehubungan dengan penemuan fakta kemudian yang terkait dengan:

1. Koreksi atas kapitalisasi biaya pinjaman di persediaan tahun 2023 dan tahun sebelumnya karena seharusnya diakui sebagai beban bunga.
2. Penyesuaian saldo aset dalam penyelesaian yang telah dialihkan kepada Perusahaan yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan namun sebelumnya masih tercatat sebagai bagian dari aset tetap.
3. Penyesuaian kerugian revaluasi aset tetap yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya karena seharusnya diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.
4. Penyesuaian atas pengakuan bagian laba rugi, piutang dan utang entitas ventura bersama, sejalan dengan hasil penelaahan kembali atas fakta dan kondisi yang relevan guna memastikan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi.
5. Penyesuaian atas pencatatan properti investasi sebagai bagian dari proses penelaahan kembali untuk memastikan

64. Restatement of Consolidated Financial Statements

In the preparation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2025, Management has restated the previously issued consolidated financial statements in relation to the subsequents discovery of facts to following matters:

1. *The correction of the capitalization of borrowing costs on inventories in 2023 and prior years because they should have been recognized as interest expense.*
2. *The adjustment of assets under construction that had been transferred to the Company that no longer provide future economic benefits but were previously recorded as property and equipment.*
3. *Adjustment relating to the revaluation loss on property and equipment previously recorded in other comprehensive income, which should have been recorded in profit or loss for the current year.*
4. *Adjustments to the recognition of the profit and loss portion, receivables and payables of joint venture entities, in line with the results of a review of relevant facts and conditions to ensure consistency in the application of accounting policies.*
5. *Adjustment the accounting for investment properties as part of a reassessment process to ensure more reliable*

penyajian yang lebih andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
6. Penyesuaian atas arus kas pembayaran bunga sejalan dengan penelaahan kembali untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi.

presentation and compliance with applicable accounting principles.
6. Adjustment to interest payment cash flows in line with the reassessment to ensure consistency in the application of accounting policies.

Manajemen telah melakukan penyesuaian pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut, dan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 telah disajikan kembali.

Management has made adjustment on recording of those transactions, and in order to prepare and present the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2025, the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2024 and consolidated statement of financial posititon as of January 1, 2024/ December 31, 2023 have been restated accordingly

Tabel di bawah ini merangkum dampak penyajian kembali terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal pada 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023.

The table below summarizes the impact of the restatement on the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 and January 1, 2024/ December 31, 2023.

	31 Des 2024/ *Dec 31, 2024*		
	Seperti yang dilaporkan sebelumnya/ *as previously reported* **Rp**	**Setelah disajikan kembali/ *After as reclassified*** **Rp**	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Persediaan	10.042.878.467.063	9.521.480.469.616	*Inventory*
Piutang pada ventura bersama	--	843.760.030.002	*Receivable from Joint Ventures*
JUMLAH ASET LANCAR	**29.120.451.780.048**	**29.351.069.378.108**	***TOTAL CURRENT ASSET***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Properti Investasi	3.751.057.445.132	3.881.231.185.132	*Investment Property*
Tanah akan dikembangkan	3.945.427.308.597	3.525.984.411.476	*Land for Development*
Investasi pada Ventura Bersama	2.950.918.074.443	960.534.589.888	*Investment in Joint Venture*
Aset Tetap - bersih	2.896.851.315.028	2.796.636.722.754	*Property, Plant and Equipment - net*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**27.469.264.235.546**	**25.181.141.436.095**	***TOTAL NON-CURRENT ASSET***
JUMLAH ASET	**56.589.716.015.594**	**54.532.210.814.203**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang pada ventura bersama	--	1.236.850.197.118	*Joint Venture Payable*
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama	--	707.022.649.874	*Accumulated Equity in Net Losses of a Joint Ventures*
JUMLAH LIABILITAS	**41.334.800.497.741**	**42.142.999.079.974**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Saldo laba	4.558.994.225.059	2.300.741.054.668	*Retained Earnings*
Kepentingan non-pengendali	3.133.584.244.531	3.083.995.821.380	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS	**15.254.915.517.853**	**12.389.211.734.229**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**56.589.716.015.594**	**54.532.210.814.203**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

	31 Des 2024/ *Dec 31, 2024*		
	Seperti yang dilaporkan sebelumnya/ *as previously reported* Rp	**Setelah disajikan kembali/ *After as reclassified* Rp**	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Beban lainnya	(1.130.189.186.871)	(1.226.668.375.636)	*Other expense*
Kerugian penurunan nilai	(357.198.776.953)	(356.262.150.040)	*Impairment losses*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**247.715.735.304**	**(1.666.685.313.172)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**129.437.886.973**	**(1.784.963.161.503)**	***NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**111.524.185.173**	**(1.802.876.863.303)**	***TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
Laba (rugi) per saham dasar	**67,20**	**(246,17)**	***Earnings (basic loss) per share***
LAPORAN ARUS KAS			***CASH FLOWS STATEMENTS***
DARI AKTIVITAS OPERASI			***FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran bunga	(1.881.909.834.336)	--	*Payments of interest expense*
Kas dihasilkan dari operasi	**3.579.397.798.171**	**3.825.882.345.072**	***Cash generated from operations***
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**285.584.131.868**	**3.709.897.203.165**	***Net Cash Used in Operating Activities***
DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran bunga	--	(1.881.909.834.336)	*Payments of interest expense*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**1.920.326.025.906**	**(605.359.824.032)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***

	Jan 1, 2024 / 31 Des 2023		
	Seperti yang dilaporkan sebelumnya/ *as previously reported* Rp	**Setelah disajikan kembali/ *After as reclassified* Rp**	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Persediaan	10.378.008.680.721	9.844.674.183.274	*Inventory*
Piutang pada ventura bersama	--	1.218.738.518.797	*Receivable from Joint Ventures*
JUMLAH ASET LANCAR	**30.738.341.245.977**	**31.310.839.631.940**	***TOTAL CURRENT ASSET***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Properti Investasi	3.362.401.857.032	3.385.232.049.311	*Investment Property*
Tanah akan dikembangkan	3.951.613.230.593	3.532.170.333.472	*Land for Development*
Investasi pada Ventura Bersama	2.075.587.069.915	1.383.947.394.821	*Investment in Joint Venture*
Aset Tetap - bersih	3.859.214.974.639	3.759.000.382.365	*Property, Plant and Equipment - net*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**25.786.701.328.583**	**24.826.408.339.482**	***TOTAL NON-CURRENT ASSET***
JUMLAH ASET	**56.525.042.574.560**	**56.137.247.971.422**	***TOTAL ASSETS***

	Jan 1, 2024 / 31 Des 2023		
	Seperti yang dilaporkan sebelumnya/ *as previously reported* **Rp**	**Setelah disajikan kembali/ *After as reclassified*** **Rp**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang pada ventura bersama	--	2.044.706.511.754	*Joint Venture Payable*
Tanggungan Rugi pada Ventura Bersama	--	4.776.153.210	*Accumulated Equity in Net Losses of a Joint Ventures*
JUMLAH LIABILITAS	**41.381.651.241.880**	**41.945.159.373.890**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Saldo laba	4.143.340.147.781	3.823.364.771.596	*Retained Earnings*
Kepentingan non-pengendali	3.421.120.116.477	3.314.931.414.687	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS	**15.143.391.332.680**	**14.192.088.597.532**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**56.525.042.574.560**	**56.137.247.971.422**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Beban keuangan	(1.206.628.832.432)	(1.891.555.175.411)	*Finance charges*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**149.204.119.482**	**(1.666.685.313.172)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX***
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**127.089.519.355**	**(1.784.963.161.503)**	***NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**212.248.656.269**	**(1.802.876.863.303)**	***TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
Laba (rugi) per saham dasar	**77,83**	**(246,17)**	***Earnings (basic loss) per share***
LAPORAN ARUS KAS			***CASH FLOWS STATEMENTS***
DARI AKTIVITAS OPERASI			***FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran kas kepada:			*Cash paid to:*
Pemasok	(244.119.006.360)	(344.333.598.634)	*Suppliers*
Kas dihasilkan dari operasi	**(155.774.401.323)**	**(255.988.993.597)**	***Cash generated from operations***
Pembayaran beban keuangan	(311.330.650.386)	(311.330.650.386)	*Payment of finance charges*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(91.196.338.348)**	**(191.410.930.622)**	***Net Cash Used in Operating Activities***

65. Penyelesaian Laporan Keuangan / *65. Completion of The Financial Statements*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah di setujui oleh direktur untuk diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements is the responsibility of management and has been approved by the director to be published on March 27, 2026.



021 - 877 84317

Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jalan TB Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760

corsec@ptpp.co.id
www.ptpp.co.id

Strengthening Foundation, Balancing Business Risks

Menguatkan Fondasi, Menyeimbangkan Risiko Bisnis

Laporan Tahunan 2025 Annual Report

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (Persero) Tbk

Head Office
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia
(021) 840 3883 (hunting)
corsec@ptpp.co.id

www.ptpp.co.id